brksyariah
berkah untuk semua

bpd
bersama membangun Indonesia

Langkah Berkah
dalam Ekosistem Syariah
Steps of Blessing in The Sharia Ecosystem



LAPORAN TAHUNAN
2025
ANNUAL REPORT

TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2025
ABOUT THE 2025 ANNUAL REPORT

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perseroan atau BRK Syariah dengan bangga mempersembahkan Laporan Tahunan 2025 sebagai sarana penyampaian informasi mengenai kinerja, strategi, serta arah pengembangan Perseroan. Laporan ini merupakan wujud komitmen BRK Syariah dalam menjaga transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan di tengah dinamika industri perbankan yang terus berkembang.

Sepanjang tahun 2025, BRK Syariah terus berupaya menjaga kinerja yang sehat dengan tetap adaptif terhadap berbagai perubahan kondisi ekonomi. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk memperkuat fondasi bisnis, meningkatkan kualitas layanan, serta mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui Laporan Tahunan 2025 ini, BRK Syariah berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja, strategi, serta prospek usaha Perseroan. Dengan dukungan dan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan, BRK Syariah optimistis dapat terus tumbuh, meningkatkan kualitas layanan, serta berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), hereinafter referred to as the Company or BRK Syariah, proudly presents the 2025 Annual Report as a medium for conveying information regarding the Company's performance, strategy, and developmental direction. This report embodies BRK Syariah's commitment to maintaining transparency, strengthening accountability, and fostering open communication with all stakeholders amidst the continuously evolving dynamics of the banking industry.

Throughout 2025, BRK Syariah has consistently strived to maintain sound performance by remaining adaptive to various changes in economic conditions. Various strategic measures were undertaken to reinforce the business foundation, enhance service quality, and develop products aligned with community needs.

Through this 2025 Annual Report, BRK Syariah hopes to provide a clear overview of the Company's performance, strategy, and business prospects. With the support and trust of all stakeholders, BRK Syariah is optimistic about its continued growth, the improvement of service quality, and its contribution toward supporting inclusive and sustainable economic growth.





TEMA & PENJELASAN TEMA
THEME & EXPLANATION OF THEME

LANGKAH BERKAH
DALAM EKOSISTEM SYARIAH

STEPS OF BLESSING
IN THE SHARIA ECOSYSTEM

Komitmen BRK Syariah diwujudkan dalam upaya mendorong pertumbuhan bisnis yang selaras dengan prinsip syariah serta memberikan manfaat dan keberkahan yang berkelanjutan. Bank secara aktif menyalurkan pembiayaan sektor riil untuk mendukung pengembangan UMKM halal, wisata halal, dan travel halal sebagai penggerak utama ekonomi syariah yang produktif dan inklusif.

Dalam menjalankan fungsi sosialnya, BRK Syariah memperkuat sinergi dengan lembaga pendidikan, sosial, dan komunitas keagamaan Islam melalui optimalisasi pengelolaan ZISWAF, dukungan terhadap kemandirian ekonomi pesantren, serta penyediaan layanan keuangan syariah bagi sekolah dan institusi keislaman. Seiring dengan itu, transformasi digital perbankan syariah terus dikembangkan guna menghadirkan layanan keuangan yang mudah diakses, aman, dan sesuai prinsip syariah.

Seluruh langkah tersebut dijalankan dengan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap regulasi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta penciptaan nilai sosial bagi pemegang saham dan masyarakat. Upaya ini diperkuat melalui peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah untuk membangun ekosistem syariah yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

The commitment of BRK Syariah is manifested in efforts to drive business growth that is aligned with Sharia principles, as well as to deliver sustainable benefits and blessings. The Bank actively disburses real sector financing to support the development of halal MSMEs, halal tourism, and halal travel as the primary drivers of a productive and inclusive Sharia economy.

In executing its social function, BRK Syariah strengthens synergies with educational and social institutions, alongside Islamic religious communities, through the optimized management of ZISWAF, support for the economic independence of *pesantren*, and the provision of Sharia financial services for schools and Islamic institutions. Concurrently, the digital transformation of Sharia banking continues to be developed to deliver accessible, secure, and Sharia-compliant financial services.

All of these measures are executed by upholding strict regulatory compliance, implementing good corporate governance, and creating social value for shareholders and the public. These efforts are reinforced through the enhancement of Sharia financial literacy and education to build a robust, competitive, and sustainable Sharia ecosystem.

KEBERLANJUTAN TEMA
THEME SUSTAINABILITY

2024

MERANGKAI TEKNOLOGI UNTUK KEMUDAHAN AKSES KEUANGAN

ASSEMBLING TECHNOLOGY FOR EASY ACCESS TO FINANCE



Teknologi merupakan sebuah keniscayaan yang telah jauh berkembang pesat hingga saat ini. Teknologi menjadi elemen penting yang telah menyentuh dan mengubah cara kita berinteraksi dengan berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Teknologi yang diintegrasikan pada sektor keuangan telah membuat akses terhadap kebutuhan keuangan menjadi cepat, mudah, aman, dan efisien sehingga dapat dilakukan oleh setiap individu, di mana pun, dan di saat kapan pun.

BRK Syariah telah menghadirkan rangkaian inovasi teknologi pada produk, layanan, dan solusi keuangan untuk memberi kemudahan atas kebutuhan masyarakat luas serta Pemerintah Daerah. Layanan BRKS *Mobile, Cash Management System (CMS)*, fitur pembayaran QRIS, layanan *merchant* QRIS, layanan EDC (*Electronic Data Capture*), Kartu Debit, Aplikasi SP2D *Online*, Aplikasi SKPD *Online*, Aplikasi Pembayaran PBB Kolektif, dan penggunaan perangkat perbankan elektronik terkini telah meningkatkan *customer experience* terhadap akses keuangan.

Di sisi lain, dalam menunjang program Pemerintah Daerah (Pemda) akan kesadaran dan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah, BRK Syariah memberi akses kemudahan dengan mendukung transaksi non tunai penerimaan pajak dan retribusi daerah di wilayah Riau dan Kepri. Tersedia beragam pilihan cara bayar yaitu melalui *counter Teller*, ATM, EDC, aplikasi BRKS *Mobile, e-commerce*, dan QRIS serta sudah terkoneksi secara *host-to host* dengan seluruh Pemda.

Pengakuan pihak eksternal telah diberikan atas aktivitas teknologi yang dihadirkan. Pengakuan ini menjadi apresiasi dan bukti bagi kami yang telah mendukung inovasi keuangan non tunai bagi Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat luas dengan cara yang praktis, mandiri, aman, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Aktivitas teknologi yang juga mampu memperkuat perekonomian daerah, melayani kebutuhan masyarakat, membuka jalan menuju masa depan akses keuangan yang lebih inklusif, berkah, dan berkelanjutan.

Technology is a necessity that has developed rapidly until now. Technology has become an important element that has touched and changed the way we interact with various sectors, including the financial sector. Technology integrated into the financial sector has made access to financial needs fast, easy, safe, and efficient so that it can be done by every individual, anywhere, and at any time.

BRK Syariah has presented a series of technological innovations in products, services and financial solutions to provide convenience for the needs of the wider community and the Regional Government. BRKS Mobile services, Cash Management System (CMS), QRIS payment features, QRIS merchant services, EDC (Electronic Data Capture) services, Debit Cards, Online SP2D Applications, Online SKPD Applications, Collective PBB Payment Applications, and the use of the latest electronic banking devices have improved customer experience towards financial access.
On the other hand, in supporting the Local Government (Pemda) program for awareness and obligation to pay local taxes and levies, BRK Syariah provides easy access by supporting non-cash transactions for local tax and levy revenues in Riau and Kepulauan Riau. There are various choices of payment methods, namely through Teller counters, ATMs, EDC, BRKS Mobile applications, e-commerce, and QRIS and have been connected host-to-host with all local governments.

External recognition has been awarded for the technological initiatives deployed. This recognition serves as an appreciation and a testament to our commitment to supporting cashless financial innovation for both Regional Governments and the wider public in a manner that is practical, autonomous, secure, and strictly compliant with Sharia principles. These technological activities also serve to fortify the regional economy, cater to the needs of the community, and pave the way toward a future of financial access that is more inclusive, blessed, and sustainable.



2023

KEBERKAHAN UNTUK BUMI BERKELANJUTAN

BLESSINGS FOR A SUSTAINABLE EARTH

BRK Syariah menyadari pentingnya menjaga keberkahan bumi melalui upaya kolaboratif, inovatif, dan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Upaya BRK Syariah untuk berperan aktif dalam mendorong dan mendukung pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan menerapkan praktik perbankan yang bertanggung jawab secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menjadi mitra bagi pelaku usaha berkelanjutan.

BRK Syariah terus berinovasi dalam menciptakan produk, layanan, dan solusi keuangan yang memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dalam upaya mencapai keberkahan bumi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan BRK Syariah yang inklusif, *resilient*, dan modern yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara luas serta berkontribusi pada pembangunan daerah berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

BRK Syariah recognizes the importance of preserving the blessings of the earth through collaborative efforts, innovation, and sustainable business practices.

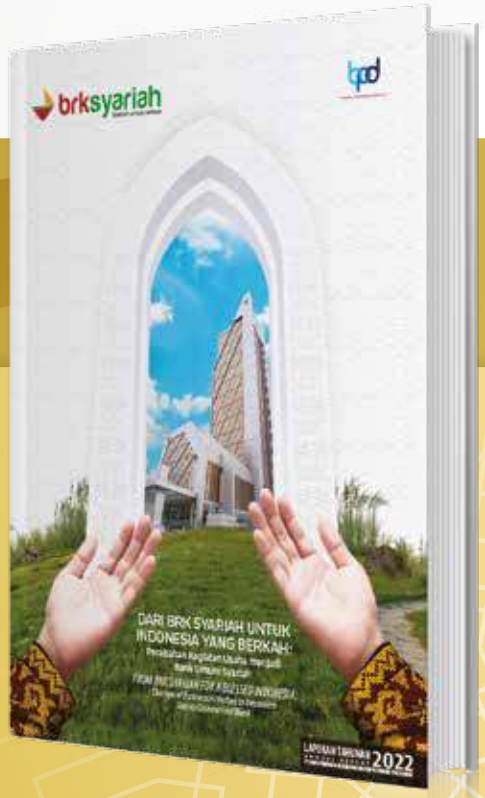
BRK Syariah efforts to play an active role in encouraging and supporting sustainable development are carried out by implementing socially, economically and environmentally responsible banking practices, as well as becoming a partner for sustainable business actors.

BRK Syariah continues to innovate in creating products, services and financial solutions that provide added value for stakeholders in an effort to achieve sustainable earthly blessings in order to realize an inclusive, resilient and modern BRK Syariah that is able to accommodate the needs of society at large and contribute to development sustainable areas that are in line with sharia principles.

2022

DARI BRK SYARIAH UNTUK INDONESIA YANG BERKAH: Perubahan Kegiatan Usaha menjadi Bank Umum Syariah

FROM BRK SYARIAH FOR A BLESSED INDONESIA: Change of Business Activities to become A Sharia Commercial Bank



Resmi melakukan konversi menjadi BRK Syariah, kami terus melakukan pengembangan usaha. Dengan akses yang kian luas, pesatnya perkembangan industri keuangan syariah dan ekosistem industri halal, BRK Syariah optimis dapat menciptakan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Dari BRK Syariah memberikan maslahat untuk Indonesia yang berkah.

Having officially converted to BRK Syariah, we continue to develop our business. With increasingly broad access and the rapid growth of the sharia financial industry and the halal industry ecosystem, BRK Syariah is optimistic that we can create sustainable performance growth. From BRK Syariah, we aim to provide blessings for Indonesia.

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENT



1	**PENDAHULUAN** INTRODUCTION
1	Tentang Laporan Tahunan 2025 About The 2025 Annual Report
2	Tema & Penjelasan Tema Theme & Explanation of Theme
3	Kenerlanjutan Tema Theme Sustainability
6	Daftar Isi Table Of Contents
10	Kinerja Utama Tahun 2025 Main Performance in 2025
12	Keunggulan Kami Our Advantages
13	Testimoni Testimony
15	Ikhtisar Data Keuangan Penting Summary of Important Financial Data
15	Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position
17	Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Profit/Loss and Income Statements Comprehensive
18	Laporan Arus Kas dan Rasio Keuangan Statement of Cash Flow and Financial Ratio
18	Rasio Keuangan Financial Ratio
19	Informasi Harga Saham Share Price Information
19	Sanksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*) Suspension and/or Delisting Sanctions
19	Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds
19	Informasi Sumber Pendanaan Lainnya Information on Other Sources of Funding
20	Peristiwa Penting BRK Syariah 2025 BRK Syariah 2025 Significant Events
34	**LAPORAN MANAJEMEN** MANAGEMENT REPORT
36	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioner Report
48	Laporan Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Report
53	Lembar Pernyataan Dewan Pengawas Syariah Statement Sheet of Sharia Supervisory Board

54	Laporan Direksi Board of Director Report
69	Lembar Pengesahan Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors Approval Sheet

PROFIL PERUSAHAAN

70	COMPANY PROFILE
72	Identitas Perusahaan Corporate identity
74	Jaringan Kantor dan Peta Wilayah Office Network and Operational Area Map
75	Nama dan Alamat Kantor Office Name and Address
82	Sejarah Singkat BRK Syariah Brief History of BRK Syariah
84	Jejak Langkah BRK Syariah The Journey Of Brk Syariah
86	Brand BRK Syariah BRK Syariah Brand
88	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Culture
88	• Visi Vision
88	• Misi Mission
89	*Review* Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Vision and Mission Review by The Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Directors
90	Nilai dan Budaya Perusahaan Corporate Values and Culture
91	Internalisasi Budaya Perusahaan Internalization of Corporate Culture
92	Bidang Usaha Business fields
94	Produk dan Jasa Products and Services
110	Struktur Organisasi Organizational structure
113	Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri yang Berkaitan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan List of Industrial Association Memberships Related to the Implementation of Sustainable Finance
115	Identitas dan Riwayat Singkat Direksi Identity and Brief History of the Board of Directors
122	Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris Identity and Brief History of the Board of Commissioners
127	Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Pengawas Syariah Identity and Brief History of the Sharia Supervisory Board
131	Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi Profile of Officers One Level Below the Board of Directors
148	Jumlah dan Komposisi Pegawai BRK Syariah Number and Composition of BRK Syariah Employees
150	Informasi Pemegang Saham BRK Syariah BRK Syariah Shareholder Information
150	• Struktur Pemegang Saham BRK Syariah Shareholding Structure of BRK Syariah
151	• Komposisi Pemegang Saham BRK Syariah Shareholder Composition of BRK Syariah
152	• Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih Shareholder Composition of 5% or More
152	• Kepemilikan Saham BRK Syariah oleh Dewan Komisaris dan Direksi Sharia BRK Share Ownership by the Board of Commissioners and Directors
152	• Kepemilikan Saham BRK Syariah oleh Masyarakat Kurang dari 5% BRK Syariah Share Ownership by the Public of Less Than 5%
153	• Jumlah Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi Institusi Lokal, Institusi Asing, Individu Lokal, dan Individu Asing Number of Shareholders Based on Classification of Local Institutions, Foreign Institutions, Local Individuals, and Foreign Individuals
155	Nama Entitas Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Ventura Bersama Name of Subsidiaries, Associated Companies, and Joint Ventures
155	Kronologis Pencatatan Saham Share Issuance Chronology
155	Informasi Pencatatan Efek Lainnya Other Securities Listing Information
156	Informasi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Information on Public Accounting Firm and Public Accountant
157	Lembaga dan Profesi Penunjang BRK Syariah Supporting Institutions and Professionals of BRK Syariah
159	Penghargaan Tahun 2025 Awards in 2025
161	Sertifikasi Tahun 2025 Certifications in 2025

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

162	MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS OF COMPANY PERFORMANCE
164	Tinjauan Perekonomian dan Industri Economic and Industrial Review
164	Perekonomian Global Economic Review
165	Perekonomian Nasional National Economy
168	Perekonomian Riau dan Kepulauan Riau Economy of Riau and Kepulauan Riau
170	Industri Perbankan Syariah Sharia Banking Industry

172 Posisi BRK Syariah di Industri Perbankan
BRK Syariah's Position in the Banking Industry

173 Strategi Pengembangan Bisnis
Business Development Strategy

178 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

181 Tinjauan Operasi per Segmen
Operating Review by Segment

183 Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance Review

208 Penguatan Ekosistem Digital Melalui Layanan Mobile Banking dan QRIS
Strengthening The Digital Ecosystem Through Mobile Banking and QRIS Services

212 Akselerasi Pertumbuhan *Fee Based Income*
Accelerating Fee-Based Income Growth

214 Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
Debt Paying Ability and Receivables Collectability

216 Kualitas Aset Produktif
Quality of Earning Assets

217 Struktur Permodalan
Capital Structure

220 Pengungkapan Kuantitatif Eksposur Risiko
Quantitative Disclosure of Risk Exposures

258 Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts Subsequent to The Accountant's Report Date

258 Pencapaian Target 2025 dan Proyeksi 2026
2025 Target Achievement and 2026 Projections

265 Prospek Usaha
Business Outlook

267 Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy and Distribution

268 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Use of Proceeds From Public Offerings

268 Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)
Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)

269 Informasi Material Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Restrukturisasi Hutang dan Modal
Material Information Related To Investments, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt and Capital Restructuring

271 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Information on Material Transactions That Contain Conflict of Interest and/or Transactions With Affiliated Parties

274 Perubahan Kebijakan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Bank
Changes in Legislation and its Impact on Bank Performance

276 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

277 Tingkat Kesehatan Bank
Bank Soundness Level

277 Aspek Perpajakan
Taxation Aspects

278 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

280 Larangan, Batasan, dan/atau Hambatan Signifikan untuk Melakukan Penyediaan Dana antara Bank dan Entitas Lain dalam Suatu Kelompok Usaha
Prohibitions, Limitations, and/or Significant Barriers to Provision of Funds Between Banks and Other Entities In A Business Group

280 Komitmen dan Kontinjensi
Commitments and Contingencies

281 Perjanjian dan Perikatan
Significant Agreements

282 TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS
BUSINESS SUPPORT OVERVIEW

284 Manajemen Sumber Daya Insani
Human Resources Management

299 Tata Kelola Teknologi Informasi
Technology Information Governance

306 TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

308 Tata Kelola Unggul Sebagai Pilar Transformasi dan Keberlanjutan BRK Syariah
Excellent Corporate Governance As A Pillar of Transformation and Sustainability for BRK Syariah

309 Pencapaian Penting Tata Kelola 2025
Key Governance Milestones 2025

310 Komitmen Penerapan Tata Kelola Berkelanjutan
Commitment to Implementation of Sustainable Governance

310 • Dasar Penerapan Tata Kelola
Basic Implementation of Governance

310 • Tujuan dan Prinsip Penerapan Tata Kelola
Objectives and Principles of Governance Implementation

311 • Prinsip-prinsip Tata Kelola
Governance Principles

314 *Roadmap* Tata Kelola Bank
Bank Governance Roadmap

315 Implementasi & Rencana Strategis Tata Kelola Bank ke Depan
Implementation Of Bank Governance Going Forward

316 Penilaian Penerapan *Good Corporate Governance* Bank
Assessment of The Bank's Good Corporate Governance Implementation

328 Struktur Tata Kelola BRK Syariah
BRK Syariah Governance Structure

331 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Mechanism

338 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

354 Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

361 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

381 Komite Audit
Audit Committee

388 Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee

400 Direksi
Directors

419 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

425 Komite di Bawah Direksi
Commitees Under the Board of Directors

436 Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham
Affiliation Relations between Members of the Board of Commissioners, Directors and Shareholders

438 Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Directors Frequency and Attendance Meetings

439 Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Directors Nomination and Remuneration Policy

443 Tata Kelola Remunerasi Bank
Bank Remuneration Governance

447 Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Directors Diversity Policy

449 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

456 Audit Internal
Internal Audit

456 Fungsi Audit Internal
Funding For Social Activities

475 Strategi Anti *Fraud*
Anti Fraud Strategy

481 Fungsi Kepatuhan
Compliance Function

493 Manajemen Risiko
Risk management

535 Auditor Eksternal
External Auditors

538 Kode Etik *(Code of Conduct)*
Code of Conduct

545 Perkara Penting
Important Matters

546 Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
Whistleblowing System

550 Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

551 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Management of State Officials'Wealth Reports (LHKPN)

553 Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi dan Senjata Pemusnah Masal (PPPSPM)
Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorism Financing (CTF), dnd Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (CPF) Programs

562 Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

563 Rencana Strategis Bank
Bank Strategic Plan

564 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data

566 Penanganan Pengaduan Nasabah
Customer Complaint Handling

569 Investor Relation
Investor Relations

570 Informasi Penting Lainnya
Other Important Information

576 Pernyataan tidak Melakukan Praktik *Bad Corporate Governance*
Statement of No Bad Corporate Governance Practices

578 **TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN**
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITIES

580 Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
Corporate Social and Environmental Responsibility

580 Strategi dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Strategy and Implementation of Social and Environmental Responsibility

582 Dasar Kebijakan Pelaksanaan CSR
Policy Basis for CSR Implementation

584 Struktur Pengelola CSR BRK Syariah
BRK Syariah CSR Management Structure

590 **LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN AUDITED 2025**
AUDITED ANNUAL FINANCIAL REPORT 2025

594 Surat Pernyataan Direksi
Board of Directors Statement

596 Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

600 Laporan Keuangan
Financial Report

732 **INDEKS OJK**
OJK INDEKS

KINERJA UTAMA TAHUN 2025

KEY PERFORMANCE IN 2025



Aset | Assets

Rp31,10 Triliun

Ekuitas | Equity

Rp3,39 Triliun

Total Pembiayaan
Total Financing

Rp21,79 Triliun

Dana Pihak Ketiga
Third Party Funds

Rp25,75 Triliun

Laba Bersih Tahun Berjalan
Net Profit For The Year

Rp276,43 Miliar



Rasio NPF *Nett*
Nett NPF Ratio

1,48%

Rasio NPF *Gross*
Gross NPF Ratio

3,82%

Rasio KPMM | CAR Ratio

21,21%

Rasio ROE
ROE Ratio

8,50%

Rasio ROA | ROA Ratio

1,19%

KEUNGGULAN KAMI
OUR ADVANTAGES



Kolaborasi dan sinergi dengan entitas ekosistem syariah

Collaboration and synergy with Sharia ecosystem entities



Peningkatan fungsi dan kemudahan infrastruktur digital *channel*

Enhancement of the functionality and accessibility of digital channel infrastructure



Sinergi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah

Synergy with Regional Governments, Ministries, and Government Agencies

"BRK Syariah memperkuat keunggulan melalui penguatan sinergi dengan entitas dalam ekosistem syariah serta kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah dan berbagai lembaga terkait, yang didukung oleh pengembangan layanan digital yang andal dan mudah diakses. Optimalisasi instrumen ZISWAF serta penguatan pembiayaan pada halal *supply chain* turut dilakukan guna mendukung sektor riil dan memperluas dampak sosial. Seluruh inisiatif tersebut dilandasi oleh prinsip *maqoshid* syariah dalam rangka mendorong peningkatan literasi keuangan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan".

"BRK Syariah fortifies its competitive advantage through the reinforcement of synergies with entities within the Islamic economic ecosystem, as well as strategic partnerships with Regional Governments and various relevant institutions, underpinned by the development of reliable and accessible digital services. The optimization of ZISWAF instruments, alongside the strengthening of financing within the halal supply chain, is concurrently executed to support the real sector and broaden social impact. All aforementioned initiatives are fundamentally anchored in the principles of Maqashid al-Shariah to drive the enhancement of financial literacy and sustainable regional development."



Tatanan institusi berasas *maqoshid* syariah

Institutional framework grounded in *maqoshid* sharia



Penetrasi pembiayaan halal *supply chain*

Penetration of halal supply chain financing



Optimalisasi instrumen ZISWAF

Optimization of ZISWAF instruments

TESTIMONI
TESTIMONY



"BRK Syariah adalah kebanggaan masyarakat Riau, dan kami dari Komisi III DPRD Riau akan terus mendukung setiap program dan inisiatif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan kita akan berdiskusi bersama untuk kemajuan ekonomi Masyarakat Riau"

Edi Basri, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, pada Kunjungan Resmi Komisi III ke BRK Syariah tanggal 26 Februari 2025.

"BRK Syariah is the pride of the people of Riau, and we from Commission III of the Riau Regional House of Representatives (DPRD Riau) will consistently support every program and initiative that drives regional economic growth. Furthermore, we will engage in collaborative discussions to advance the economic prosperity of the Riau community."

Edi Basri, Chairman of Commission III of the Riau Provincial Regional House of Representatives (DPRD), during the Official Visit of Commission III to BRK Syariah on February 26, 2025.

"Peran BRK Syariah sebagai mitra keuangan yang telah mendukung penuh implementasi SIPD BLUD ini. Kolaborasi ini sangat penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih baik ke depan. BRK Syariah sudah membuat langkah besar dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah"

Bupati Rokan Hulu Bapak Sukiman, saat Launching Layanan Sistem Informasi Pelayanan Daerah BRK Syariah tanggal 20 Januari 2025.

"The role of BRK Syariah as a financial partner has fully supported the implementation of the Regional Public Service Agency Financial Information System (SIPD BLUD). This collaboration is paramount in fortifying superior regional financial governance moving forward. BRK Syariah has taken significant strides in promoting transparency and accountability in the management of regional finances."

Regent of Rokan Hulu, Mr. Sukiman, during the Launching of the BRK Syariah Regional Service Information System on January 20, 2025.





"Identitas Bank Riau Kepri Syariah adalah bagian dari pemerintah daerah. Maka kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjadikan bank ini tumbuh dan berkembang, tidak hanya melayani sektor pemerintahan, tetapi juga menjangkau dunia usaha dan masyarakat,"

Gubernur Riau, Bapak Abdul Wahid, pada saat penandatanganan MoU di BRK Syariah, 20 Juni 2025.

"The identity of Bank Riau Kepri Syariah is an integral part of the regional government. Therefore, we share a collective responsibility to foster the growth and development of this bank, ensuring it not only serves the government sector but also expands its reach to the business sector and the broader community."

Governor of Riau, Mr. Abdul Wahid, during the Memorandum of Understanding (MoU) signing ceremony at BRK Syariah on June 20, 2025.



"Transformasi digital di sektor pendidikan yang dilakukan BRK Syariah merupakan langkah strategis yang harus diadopsi secara menyeluruh. Ini sejalan dengan upaya kita membangun kota yang modern, cerdas, dan terintegrasi secara digital. Inovasi transaksi digital ini sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan hari ini," tegasnya.

Wali Kota Tanjungpinang, Bapak Lis Darmansyah saat Launching BRKSEduPay tanggal 20 Juni 2025.

"The digital transformation within the education sector spearheaded by BRK Syariah constitutes a strategic imperative that must be comprehensively adopted. This aligns with our continuous efforts to build a modern, smart, and digitally integrated city. Such digital transaction innovations are highly pertinent to the contemporary needs of the education sector," he asserted.

Mayor of Tanjungpinang, Mr. Lis Darmansyah, during the Launching of BRKSEduPay on June 20, 2025.

"Selama ini BRK Syariah telah memberikan kontribusi kebaikan di daerah Kepulauan Riau, khususnya di Kabupaten Karimun. Ayo kita memajukan sama-sama BRK Syariah, karena Pemerintah Kabupaten Karimun memiliki penyertaan modal sebesar Rp.7 miliar dan mendapatkan deviden yang luar biasa sebesar Rp.1,3 miliar serta dapat kami manfaatkan, ditambah lagi dengan program CSR dari BRK Syariah,"

Bupati Karimun, Bapak Ing. H. Iskandarsyah saat Grand Opening Kantor Cabang Pembantu BRK Syariah Karimun Batu Lipai tanggal 10 Juli 2025.

"Thus far, BRK Syariah has made positive contributions to the Kepulauan Riau region, particularly in Karimun Regency. Let us collectively advance BRK Syariah, as the Regional Government of Karimun Regency holds an equity investment amounting to Rp7 billion and has received an exceptional dividend of Rp1.3 billion which we have successfully utilized, further augmented by the Corporate Social Responsibility (CSR) programs from BRK Syariah."

Regent of Karimun, Mr. Ing. H. Iskandarsyah, during the Grand Opening of the BRK Syariah Karimun Batu Lipai Sub-Branch Office on July 10, 2025.





"Kalau butuh pembiayaan, silakan manfaatkan produk Gadai emas di BRK Syariah. Aman dan menguntungkan. BRK Syariah sangat komitmen dalam mendukung penguatan literasi dan akses layanan perbankan syariah di Riau,"

Bupati Pelalawan Bapak Zukri tanggal 13 Oktober 2025.

"Should you require financing facilities, please utilize the Gold Pawn (Gadai Emas) product at BRK Syariah. It is secure and profitable. BRK Syariah is highly committed to supporting the enhancement of financial literacy and access to Islamic banking services in Riau."

Regent of Pelalawan, Mr. Zukri, on October 13, 2025.

"Kolaborasi Pemkab Natuna dan BRK Syariah ini untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha. Pemberian pembiayaan untuk UMKM ini dapat membantu mereka mengembangkan usahanya dan tentunya ini mendorong pertumbuhan ekonomi di Natuna"

Bupati Natuna, Cen Sui Lan saat MoU Pemkab Natuna dan BRK Syariah terkait Pembiayaan Subsidi UMKM tanggal 12 Agustus 2025.

"This collaboration between the Regional Government of Natuna Regency and BRK Syariah aims to advance the community's economy through the empowerment of business actors. The provision of financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) will assist them in expanding their business operations, which will inherently drive economic growth in Natuna."

Regent of Natuna, Cen Sui Lan, during the Memorandum of Understanding (MoU) signing between the Regional Government of Natuna Regency and BRK Syariah regarding MSME Subsidized Financing on August 12, 2025.



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
SUMMARY OF IMPORTANT FINANCIAL DATA

Laporan Posisi Keuangan — Statement Of Financial Position

dalam jutaan (Rupiah) | in millions (Rupiah)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	Explanation
LAPORAN POSISI KEUANGAN | *STATEMENT OF FINANCIAL POSITION*						
ASET| *ASSET*						
Kas	937.249	956.983	733.212	1.461.888	719.394	Cash
Giro pada Bank Indonesia	3.074.642	2.466.349	3.001.432	3.480.743	2.042.746	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	61.032	188.524	141.889	206.400	88.760	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	1.000.000	1.195.000	3.334.381	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat Berharga	4.677.867	4.881.313	3.670.724	5.029.940	5.237.487	Securities
Piutang	10.363.285	12.778.698	14.689.669	16.588.848	-	Receivables
Piutang *Murabahah*	10.363.033	12.778.525	14.689.536	16.588.735	-	*Murabahah* Receivables
Piutang *Ijarah*	252	173	133	113	-	*Ijarah* receivables
Pinjaman *Qardh*	220.554	98.023	59.089	54.598	-	*Qardh* Loan
Pembiayaan bagi hasil	11.030.287	8.489.587	5.106.955	2.545.670	-	Profit sharing financing
Mudharabah	-	1.895	4.981	23.720	-	*Mudharabah*
Musyarakah	11.030.287	8.487.692	5.101.974	2.521.950	-	*Musyarakah*
Pembiayaan sewa (Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*)	173.187	241.200	322.656	411.782	-	Lease financing (Acquired Assets for *Ijarah*)
Jumlah Pembiayaan / Kredit yang diberikan	21.787.314	21.607.508	20.178.370	19.600.897	18.884.914	Amount of Financing / Credit provided
Cadangan kerugian penurunan nilai	(525.492)	(441.091)	(419.390)	(453.235)	(496.610)	Allowance for impairment losses
Jumlah Pembiayaan / Kredit yang diberikan - Bersih	21.261.822	21.166.417	19.758.980	19.147.661	18.388.304	Total Financing / Credit provided - Net
Penyertaan saham	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	Share investment
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.155)	-	-	-	-	Allowance for impairment losses
Jumlah Penyertaan Saham - bersih	400	1,556	1,556	1,556	1,556	Share investment - Net
Aset tetap	361.907	383.737	369.980	394.095	396.932	Fixed assets
Aset pajak tangguhan	95.971	104.882	58.455	75.453	32.099	Deferred tax assets
Aset lain-lain	629.256	709.966	608.622	389.620	538.027	Other assets
Jumlah Aset	**31.100.146**	**30.859.727**	**29.344.850**	**31.382.356**	**30.779.686**	**Total assets**
LIABILITAS | *LIABILITIES*						
Dana simpanan *Wadiah*	1.780.006	1.660.211	1.585.155	1.248.831	-	*Wadiah* savings fund
Giro	110.174	156.675	247.137	107.343	-	Giro
Tabungan	1.669.833	1.503.536	1.338.018	1.141.488	-	Savings
Liabilitas segera	465.366	498.692	1.178.444	607.981	667.015	Immediate liability
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	35.669	42.645	33.341	17.361	-	Undistributed Profit Sharing
Simpanan dari nasabah*)	-	-	-	-	25.615.733	Deposits from customers*)
Giro	-	-	-	-	5.607.380	Giro
Tabungan	-	-	-	-	7.449.293	Savings
Deposito berjangka	-	-	-	-	12.559.060	Time deposit
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	1.040.800	Deposits from other banks

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	Explanation
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	Securities sold under agreement to repurchase
Pendanaan dari Bank Indonesia (PaSBI)	401.374	1.502.950	580.125	-	-	Funding from Bank Indonesia (PaSBI)
Surat berharga yang diterbitkan SIMA	600.000	590.000	225.000	-	-	Securities issued by SIMA
Pinjaman yang diterima	281.472	241.697	236.201	201.131	151.442	Loans received
Utang pajak	21.431	30.910	10.006	47.853	32.036	Tax debt
Imbalan kerja	67.908	83.639	46.841	32.437	26.051	Employee benefits
Liabilitas lain-lain	13.257	70.905	81.896	56.681	59.449	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	**3.666.483**	**4.721.649**	**3.977.010**	**2.212.276**	**27.592.527**	**Total Liabilities**
DANA *SYIRKAH* TEMPORER - BUKAN BANK						TEMPORARY *SHIRKAH* FUNDS - NON BANK
Giro *Mudharabah*	2.249.508	1.763.897	3.932.256	3.483.049	-	*Mudharabah* Current Account
Tabungan *Mudharabah*	7.012.795	6.611.035	6.457.482	6.544.823	-	*Mudharabah* Savings
Deposito *Mudharabah*	14.707.766	14.281.334	11.516.129	15.697.002	-	*Mudharabah* deposits
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer - Bukan Bank	**23.970.069**	**22.656.267**	**21.905.867**	**25.724.874**	**-**	**Temporary Syirkah Fund Amount - Non-Bank**
DANA *SYIRKAH* TEMPORER - BANK						TEMPORARY *SHIRKAH* FUND - BANK
Giro *Mudharabah*	41.254	33.043	40.761	33.064	-	*Mudharabah* current account
Tabungan *Mudharabah*	33.819	25.103	24.343	16.086	-	*Mudharabah* Savings
Deposito *Mudharabah*	1.800	4.600	11.450	44.125	-	*Mudharabah* time deposit
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer - Bank	**76.873**	**62.746**	**76.554**	**93.275**	**-**	**Temporary Syirkah Fund Amount - Bank**
EKUITAS | *EQUITY*						
Modal saham						Capital stock
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.209.261	1.209.261	1.207.161	1.209.241	1.103.161	Issued and Fully Paid-Up Capital
Tambahan modal disetor	2.085	2.085	4.165	2.085	4.085	Additional paid-in capital
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak	(34.099)	(40.329)	-	-	-	Remeasurement of employee benefits liabilities - net of tax
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari surat berharga tersedia untuk dijual	11.367	(27.200)	(55.252)	(66.099)	2.233	Unrealized net gain (loss) from changes in fair value of available-for-sale securities
Saldo laba	2.198.107	2.275.248	2.229.344	2.206.705	2.077.680	Retain earning
Telah ditentukan penggunaannya	1.846.011	1.861.628	1.871.323	1.774.826	1.622.421	Its use has been determined
Belum ditentukan penggunaannya	352.096	413.620	358.021	431.879	455.259	Its use has not yet been determined
Jumlah Ekuitas	**3.386.721**	**3.419.065**	**3.385.418**	**3.351.932**	**3.187.159**	**Total Equity**
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas	**31.100.146**	**30.859.727**	**29.344.850**	**31.382.356**	**30.779.686**	**Total Liabilities, Temporary Syirkah Funds and Equity**

*) Bank menjalankan operasional dengan sistem konvensional
*) The Bank conducts operations under a conventional system.

Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Profit/Loss and Comprehensive Income Statements

dalam jutaan (Rupiah) | in millions (Rupiah)

Uraian	2025	2024	2023	2022**	2021	Explanation
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI *MUDHARIB*						FUND MANAGEMENT INCOME BY BANK AS *MUDHARIB*
Pendapatan Bunga	-	-	-	835.355	-	Interest income
Pendapatan dari Jual Beli	1.124.079	1.324.668	1.525.490	969.260	-	Revenue from Buying and Selling
Pendapatan dari Bagi Hasil	964.976	668.624	297.141	90.079	-	Income from Profit Sharing
Pendapatan dari *Ijarah* - neto	20.240	17.236	28.221	28.749	-	Income from *Ijarah* - net
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	388.056	320.640	288.040	186.525	-	Other Main Business Income
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*	2.497.350	2.331.168	2.138.892	2.109.968	-	Total Income from Fund Management by the Bank as *Mudharib*
Pendapatan Bunga dan Syariah *)	-	-	-	-	2.213.852	Interest and sharia income
Pendapatan bunga	-	-	-	-	1.781.784	Interest income
Pendapatan syariah	-	-	-	-	432.068	Sharia income
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	(983.292)	(926.717)	(847.269)	(632.496)	-	THIRD PARTY RIGHTS TO PROFIT SHARING
Beban Bunga dan Syariah *)	-	-	-	-	(922.450)	Interest and Sharia Expenses *)
Beban bunga	-	-	-	-	(768.749)	Interest expense
Beban syariah	-	-	-	-	(153.456)	Sharia Expense
Provisi dan komisi	-	-	-	-	(244)	Fees and commissions
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah, Neto *)	-	-	-	-	1.291.403	Interest Income and Sharia Income, Net *)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	1.514.058	1.404.450	1.291.623	1.477.472	-	RESULTS SHARING RIGHTS OWNED BY THE BANK
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	118.042	127.127	128.439	171.255	207.345	OTHER BUSINESS INCOME
BEBAN USAHA						OPERATING EXPENSES
Beban Usaha selain dari Penyaluran Dana	(1.147.509)	(1.057.807)	(1.050.834)	(1.093.599)	(912.395)	Operating Expenses other than Distribution of Funds
Pemulihan/(Beban) cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(85.556)	(23.190)	33.846	(9.093)	(35.019)	Recovery/(Expense) of allowance for impairment losses on earning assets
LABA USAHA	399.034	450.580	403.074	546.034	551.335	OPERATING PROFIT
PENDAPATAN/(BEBAN) NON-USAHA - NETO	(29.521)	(26.957)	(20.539)	(42.477)	(36.237)	NON-TRANS INCOME/(EXPENSES) - NET
LABA SEBELUM PAJAK	369.513	423.623	382.535	503.557	515.098	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK - NETO	(93.082)	(84.249)	(98.759)	(152.658)	(134.085)	TAX EXPENSES - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	276.432	339,374	283,775	350,899	381,013	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	44.797	18.312	10.848	(68.332)	2.920	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	**321.229**	**357.686**	**294.623**	**282.567**	**383.934**	**TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT**
Laba bersih per saham (dalam Rupiah penuh)	**22.860**	**28.089**	**23.517**	**29.052**	**34.581**	**Earnings per share (in full Rupiah)**

*) Bank operasional dengan sistem konvensional | *)Bank operates with a conventional system

**)Tahun 2022 periode gabungan dari 01 Januari s/d 21 Agustus 2022 ketika BUK dan 22 Agustus s/d 31 Desember 2022 sudah menjadi BUS
* *)from 01 January to 21 August 2022 when Bank were still a conventional bank, and 22 August to 31 Dec after becoming Sharia Bank

Laporan Arus Kas dan Rasio Keuangan

Statement of Cash Flow and Financial Ratio

dalam jutaan (Rupiah) | in millions (Rupiah)

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	Explanation
LAPORAN ARUS KAS | CASH FLOW STATEMENT						
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES						
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	790.669	(1.096.297)	(1.445.242)	1.593.530	3.319.665	Net cash is obtained from (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES						
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(22.034)	(65.097)	(27.924)	(8.941)	(23.857)	Net cash is obtained from (used in) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES						
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(307.568)	(328.283)	(219.333)	17.208	(259.849)	Net cash is provided by (used in) financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	461.067	(1.489.677)	(1.692.498)	1.601.797	3.035.959	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	3.611.856	5.101.533	6.794.031	5.192.234	3.149.329	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas akhir tahun	4.072.923	3.611.856	5.101.533	6.794.031	6.185.288	End of year cash and cash equivalents

Rasio Keuangan

Financial Ratio

Dalam % | in %

RASIO KEUANGAN | FINANCIAL RATIOS						
PERMODALAN | CAPITALIZATION						
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	21,21	21,18	22,11	22,00	21,07	Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM)
ASET PRODUKTIF | PRODUCTIVE ASSETS						
Aset Produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,82	1,76	1,79	1,71	1,77	Non-performing Earning Assets to total earning assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1,78	1,51	1,50	1,54	1,68	Allowance for Impairment Losses (CKPN) of financial assets against productive assets
NPF/NPL (Gross)	3,82	2,37	2,48	2,57	2,82	NPF/NPL (Gross)
NPF/NPL (Netto)	1,48	0,39	0,45	0,33	0,88	NPF/NPL (Netto)
RENTABILITAS | PROFITABILITY						
Laba terhadap aset (ROA)	1,19	1,43	1,33	2,31	1,93	Return on assets (ROA)
Laba terhadap modal (ROE)	8,50	10,42	8,98	18,09	12,49	Return on equity (ROE)
Net Imbalan (NI) / *Net Interest Margin (NIM)*	5,12	4,98	4,67	5,98	4,64	Net Interest Margin (NIM)
Biaya Opersional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	84,86	81,82	82,63	70,63	77,23	Operational Cost to Operating Income (BOPO)
Cost to Income Ratio (CIR)	70,31	68,17	73,04	65,63	63,87	Cost to Income Ratio (CIR)
LIKUIDITAS | LIQUIDITY						
Financing to Deposit Ratio (FDR) / Loan to Deposit Ratio (LDR)	84,61	88,86	85,90	72,67	73,72	Financing to Deposit Ratio (FDR) / Loan to Deposit Ratio (LDR)
Current Account Saving Account (CASA)	42,88	41,27	50,98	41,81	50,97	Current Account Saving Account (CASA)

Dalam % | in %

Uraian	2025	2024	2023	2022	2021	Explanation
KEPATUHAN | OBEDIENCE						
a. Persentase pelanggaran BMPD						a.Percentage of BMPD violations
i. Pihak terkait	-	-	-	-	-	i. Related parties
ii. Pihak tidak terkait	-	-	-	-	-	ii. Unrelated parties
b. Persentase pelampauan BMPD						b. Percentage of exceedances of BMPD
i. Pihak terkait	-	-	-	-	-	i. Related parties
ii. Pihak tidak terkait	-	-	-	-	-	ii. Unrelated parties
Giro Wajib Minimum (GWM)						Minimum Reserve Requirement (Giro Wajib Minimum)
a. GWM utama rupiah	10,04	8,64	11,64	13,06	8,93	a. The main GWM is rupiah
b. GWM valuta asing	14,13	7,19	8,45	29,62	5,96	b. GWM foreign currency
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	2,71	2,02	1,52	1,29	0,98	Overall Net Open Position (NOP).

Informasi Harga Saham

Sampai dengan 31 Desember 2025, BRK Syariah belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham.

Share Price Information

As of December 31, 2025, BRK Syariah has not yet become a publicly listed company on the stock exchange. Therefore, there is no information regarding the stock price, market capitalization, and stock trading volume.

Sanksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2025, BRK Syariah belum mencatatkan sahamnya di bursa efek dengan demikian Bank tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

Sanctions of Temporary Suspension of Share Trading and/or Delisting of Shares

As of December 31, 2025, BRK Syariah has not listed its shares on the stock exchange, and the bank has never been subject to temporary suspension of stock trading (suspension) and/ or delisting sanctions.

Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2025, BRK Syariah tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai obligasi/ sukuk/obligasi konversi.

Information on Bonds, Sukuk, and/ or Convertible Bonds

As of December 31, 2025, BRK Syariah has not issued any bonds, sukuk, or convertible bonds, therefore there is no information available regarding these financial instruments.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2025, BRK Syariah tidak memiliki sumber pendanaan yang berasal dari efek lainnya, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai sumber pendanaan lainnya.

Information on Other Funding Sources

As of December 31, 2025, BRK Syariah does not have any sources of funding from other financial instruments, hence there is no information available regarding other sources of funding.

PERISTIWA PENTING BRK SYARIAH 2025
BRK SYARIAH 2025 SIGNIFICANT EVENTS

08 Januari 2025 08 January 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) melakukan penandatanganan kerja sama dengan Rumah Sakit Aulia Hospital dalam rangka memberikan nilai tambah (*benefit* tambahan) kepada nasabah melalui program *benefit network*.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) signed a cooperation agreement with Aulia Hospital to provide added value (additional benefits) to customers through the benefit network program.

10 Januari 2025 10 January 2025



Melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menyerahkan 1 unit Ambulans kepada Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) pada acara *Grand Launching* penerimaan mahasiswa baru dan *Grand Breaking* gedung Mahmud Marzuki Tower UMRI.

Through the Minister of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) handed over 1 ambulance unit to Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) during the Grand Launching event for new student admissions and the Groundbreaking of the Mahmud Marzuki Tower building at UMRI.

01 Februari 2025 01 February 2025



Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menyerahkan 1 (satu) unit *Speedboat Ambulance* melalui bantuan Program Kemitraan untuk Dusun Terisolir Bagan Benio.

The Regional Government of Bengkalis Regency, together with PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), handed over 1 (one) Ambulance Speedboat unit through the Partnership Program assistance for the Isolated Hamlet of Bagan Benio.

25 Februari 2025 25 February 2025



Pada ajang bergengsi nasional yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menerima penghargaan Indonesia *Best Sharia Regional Bank 2025 with Contribution to Local Economic Development through the Best Sharia Financial Solutions* dengan kategori *Sharia Regional Bank* - KBMI 1.

At a prestigious national event organized by Warta Ekonomi, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) received the "Indonesia Best Sharia Regional Bank 2025 with Contribution to Local Economic Development through the Best Sharia Financial Solutions" award under the Sharia Regional Bank - KBMI 1 category.

04 Maret 2025 04 March 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menyediakan layanan penukaran uang melalui Otobanking selama bulan Ramadhan 1446 H yang diluncurkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau pada kegiatan Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI).

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) provided a currency exchange service through Otobanking during the month of Ramadhan 1446 H, which was launched by the Bank Indonesia Representative Office for Riau Province at the Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) event.

25 Maret 2025 25 March 2025



Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama BRKS Teluk Kuantan lakukan penandatanganan akad Pembiayaan Pemerintah Daerah.

The Regional Government of Kuantan Singingi Regency, together with BRKS Teluk Kuantan, executed the signing of the Regional Government Financing contract (akad).

08 April 2025 08 April 2025



HUT PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Ke-59.

The 59th Anniversary of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

15 April 2025 15 April 2025



Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmikan layanan *Electronic* Badan Layanan Umum Daerah (E-BLUD) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) bersama RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau.

The Director General of Regional Financial Development of the Ministry of Home Affairs, together with the Provincial Government of Kepulauan Riau, inaugurated the Electronic Regional Public Service Agency (E-BLUD) service of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) in collaboration with RSUD Raja Ahmad Tabib of Kepulauan Riau Province.

17 April 2025 17 April 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) signed a Cooperation Agreement (PKS) with the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia regarding the utilization of the Regional Government Information System Application of the Republic of Indonesia (SIPD-RI).

21 April 2025 21 April 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) bersama Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah lakukan penanaman Jagung Pipil dalam rangka pelestarian lingkungan dan swasembada pangan.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), alongside the Provincial Government of Riau, the City Government of Pekanbaru, and the Regional Leadership Coordination Forum, conducted the planting of Shelled Corn in the context of environmental conservation and food self-sufficiency.

23 April 2025 23 April 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Perti Nasional (LP3N) Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) terkait Penggunaan Jasa dan Layanan Perbankan di Lingkungan Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Perti Nasional.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) executed the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) with the National Perti Education Organizing Institution (LP3N) of the Islamic Tarbiyah Association (Perti) regarding the Use of Banking Services and Facilities within the Environment of the National Perti Education Organizing Institution.

25 April 2025 25 April 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), together with the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia, executed the signing of a cooperation agreement regarding the disbursement of People's Business Credit (KUR) for the year 2025.

28 April 2025

28 April 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tahun 2025.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) held the Annual General Meeting of Shareholders (RUPS Tahunan) for the 2024 Financial Year and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) for the Year 2025.

15 Mei 2025

15 May 2025



Dalam rangka mendukung pengembangan pendidikan tinggi, memperluas literasi keuangan serta layanan perbankan di lingkungan civitas akademika, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) bersama Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti (STMKT) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama.

In order to support the development of higher education, expand financial literacy, and provide banking services within the academic community, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), together with the Trisakti School of Communication Media (STMKT), executed the signing of a cooperation agreement.

16 Mei 2025

16 May 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menerima penghargaan *Financial Regional Champion 2025* dengan predikat *Excellent Financial Performance During 2023-2024* dalam *Rating Infobank Top* BUMD 2025 yang ditaja oleh Infobank Media Group.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) received the Financial Regional Champion 2025 award with the predicate of Excellent Financial Performance During 2023-2024 in the Infobank Top BUMD 2025 Rating organized by Infobank Media Group.

27 Mei 2025 27 May 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dinobatkan sebagai salah satu penerima penghargaan "Top Bank 2025" dalam kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1, atas kinerja unggul sepanjang tahun 2023 hingga 2024.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) was named as one of the recipients of the "Top Bank 2025" award in the Bank Group based on Core Capital (KBMI) 1 category, for its outstanding performance throughout the years 2023 to 2024.

28 Mei 2025 28 May 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih *Gold Award (B) (Excellent)* Bintang 4 untuk kategori *Sharia Regional Development Bank – Asset* > Rp10 Triliun dalam ajang bergengsi *The Best Indonesia Finance Award 2025* yang diselenggarakan oleh *Economic Review*.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) recorded a proud achievement at the national level by winning the 4-Star Gold Award (B) (Excellent) for the Sharia Regional Development Bank - Asset > Rp10 Trillion category at the prestigious The Best Indonesia Finance Award 2025 event organized by Economic Review.

14 Juni 2025 14 June 2025



Melalui bantuan program kemitraan, PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyerahkan 2 (dua) unit ambulans kepada Puskesmas yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Through the partnership program assistance, PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah), together with the Regional Government of Indragiri Hilir Regency, handed over 2 (two) ambulance units to community health centers (puskesmas) located in Indragiri Hilir Regency.

17 Juni 2025 17 June 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang tentang Pinjaman Daerah Kota Tanjungpinang.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) established a partnership with the Regional Government of Tanjungpinang City regarding the Tanjungpinang City Regional Loan.

19 Juni 2025 19 June 2025



Pemerintah Provinsi Riau bersama PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menjalin kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait layanan jasa perbankan.

The Provincial Government of Riau, together with PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), established a partnership through the signing of a Cooperation Agreement (PKS) regarding banking services.

20 Juni 2025 20 June 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) bersama Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanjungpinang secara resmi meluncurkan program Digitalisasi Keuangan bertempat di aula MAN Tanjungpinang.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), alongside Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanjungpinang, officially launched the Financial Digitalization program located at the MAN Tanjungpinang auditorium.

07 Juli 2025 07 July 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) meresmikan Kantor Cabang Pembantu BRKS Karimun Batu Lipai.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) inaugurated the BRKS Karimun Batu Lipai Sub-Branch Office.

18 Juli 2025 18 July 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) meresmikan layanan *Rahn* (Gadai Emas) di Kantor Cabang BRKS Jakarta.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) inaugurated the *Rahn* (Gold Pawn) service at the BRKS Jakarta Branch Office.

19 Juli 2025 19 July 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) melakukan *launching* penggunaan kartu digital santri di Assajadah *Islamic Boarding School* Pekanbaru.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) launched the use of digital santri cards at Assajadah Islamic Boarding School Pekanbaru.

20 Juli 2025 20 July 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Riau dengan menerima penghargaan sebagai Perusahaan Peduli CSR Terbaik pada ajang JMSI Riau *Award* 2025.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) recorded a proud achievement at the Riau Province level by receiving an award as the Best CSR Caring Company at the JMSI Riau Award 2025 event.

23 Juli 2025 23 July 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menerima tiga penghargaan dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) received three awards from The Public Housing Savings Management Agency (BP Tapera).

29 Juli 2025 29 July 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negeri yang berada di Provinsi Riau.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) executed the signing of a cooperation agreement with the High Prosecution Office of Riau and the District Prosecution Offices located within Riau Province.

04 Agustus 2025 04 August 2025



Dalam rangka HUT ke-68 Provinsi Riau, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) meluncurkan layanan keuangan BRKS Edupay.

In commemoration of the 68th Anniversary of Riau, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) launched the BRKS Edupay financial service.

05 Agustus 2025 05 August 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menjalin kerjasama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Layanan Jasa Perbankan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) established a strategic partnership with the Regional Government of Kepulauan Anambas Regency regarding Banking Services within the Regional Government of Kepulauan Anambas Regency.

08 Agustus 2025 08 August 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) meraih penghargaan PR *Popular Companies Awards* pada ajang 6th PR *Popular* Companies *Awards 2025* yang diselenggarakan oleh *The Iconomics* kategori Bank.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) achieved the PR Popular Companies Award at the 6th PR Popular Companies Awards 2025 event organized by The Iconomics under the Bank category.

12 Agustus 2025 12 August 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tentang Layanan Jasa Perbankan dan Pemberian Subsidi *Margin* untuk Pembiayaan Usaha Mikro.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) established a partnership with the Regional Government of Natuna Regency regarding Banking Services and the Provision of Margin Subsidies for Micro Enterprise Financing.

13 Agustus 2025 13 August 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) tentang Layanan Jasa Perbankan.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) executed the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) with the State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) regarding Banking Services.

17 Agustus 2025 17 August 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menyerahkan bantuan satu unit Mobil Administrasi Kependudukan (Adminduk) kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) handed over assistance in the form of one Population Administration (Adminduk) Vehicle unit to the City Government of Pekanbaru.

22 Agustus 2025 22 August 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan PT Pos Indonesia (Persero) memperkuat sinergi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penerimaan pembayaran pajak daerah dan jenis pajak lainnya.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) and PT Pos Indonesia (Persero) strengthened their synergy through the signing of a Cooperation Agreement (PKS) regarding the receipt of regional tax payments and other types of taxes.

22 Agustus 2025 22 August 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) berhasil meraih penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kategori PUJK Terbaik 3 *Competition Video Jingle*.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) successfully achieved an award from the Financial Services Authority (OJK) in the category of 3rd Best PUJK in the Jingle Video Competition.

24 Agustus 2025 24 August 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menunjukkan komitmen kepedulian sosialnya dengan menyerahkan bantuan 1 (satu) unit mobil ambulans untuk Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) demonstrated its social responsibility commitment by handing over assistance of 1 (one) ambulance unit to the Regional Government of Kuantan Singingi Regency.

27 Agustus 2025 27 August 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menerima penghargaan pada ajang Tribun Pekanbaru *Award* 2025 dengan kategori *Best Sharia Bank in Innovation and Services*.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) received an award at the Tribun Pekanbaru Award 2025 event under the category of Best Sharia Bank in Innovation and Services.

29 Agustus 2025 29 August 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menjalin sinergi strategis dengan Kementerian Agama Kota Tanjungpinang melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) established a strategic synergy with the Ministry of Religious Affairs of Tanjungpinang City through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) and a Cooperation Agreement (PKS).

12 September 2025 12 September 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu resmi menandatangani Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait layanan jasa perbankan.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), together with the Regional Government of Indragiri Hulu Regency (Pemkab Indragiri Hulu), officially signed a Memorandum of Understanding (MoU) regarding banking services.

16 September 2025 16 September 2025



PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah (Perseroda) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terkait layanan jasa perbankan di lingkungan Pemkab Rokan Hilir.

Bank Riau Kepri (BRK) Syariah executed the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) with the Regional Government of Rokan Hilir Regency (Pemkab Rokan Hilir) regarding banking services within the Regional Government of Rokan Hilir Regency.

18 September 2025 18 September 2025



BRKS Tanjungpinang resmi bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau dalam penyediaan layanan informasi dan pembayaran pajak daerah secara digital.

BRKS Tanjungpinang officially partnered with the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Kepulauan Riau Province in the provision of digital regional tax information and payment services.

29 September 2025 29 September 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) turut berpartisipasi dalam kegiatan Akad Massal KPR FLPP dan serah terima kunci tahun 2025 bersama Presiden RI untuk 26.000 penerima manfaat pembiayaan FLPP.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) participated in the mass KPR FLPP (Housing Financing Liquidity Facility) contract (akad) signing and key handover event for the year 2025, alongside the President of the Republic of Indonesia, for 26,000 FLPP financing beneficiaries.

29 September 2025 29 September 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) meresmikan Kantor Kedai BRKS Inhu Pasar Rengat.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) inaugurated the BRKS Inhu Pasar Rengat Kedai Office.

29 September 2025 29 September 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) bersama dua UMKM binaannya, D'Sayur TPI dan Nafeesa Snack, berhasil meraih penghargaan *Indonesia Creative Awards* (ICA) 2025. Ajang bergengsi yang digelar oleh *International Creative Exchange* (ICE).

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), alongside two of its fostered MSMEs (UMKM), D'Sayur TPI and Nafeesa Snack, successfully achieved the Indonesia Creative Awards (ICA) 2025. This prestigious event was organized by the International Creative Exchange (ICE).

23 Oktober 2025 24 October 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tahun 2025.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) for the 2025 fiscal year.

24 Oktober 2025 25 October 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) bersama Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja sama Layanan Jasa Perbankan.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), in conjunction with the Regional Government of Karimun Regency, executed the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) regarding Banking Services Cooperation.

25 Oktober 2025 25 October 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Layanan Jasa Perbankan di lingkungan pemerintah daerah.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) established a strategic partnership with the Regional Government of Kepulauan Meranti Regency through the execution of a Memorandum of Understanding (MoU) concerning Banking Services within the regional government sector.

09 November 2025 09 November 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) melakukan penandatangan nota kesepahaman tentang penyediaan dan pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji dengan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) executed a Memorandum of Understanding concerning the provision and utilization of Sharia banking products and services for the administration of the Hajj pilgrimage, in collaboration with the Ministry of Hajj and Umrah of the Republic of Indonesia.

17 November 2025 17 November 2025



BRKS Tanjungpinang Pamedan meraih penghargaan pada ajang Baznas *Awards* 2025 untuk kategori "Bank dengan Komitmen Pelayanan Kelembagaan Terbaik Terhadap *Zakat*".

BRKS Tanjungpinang Pamedan secured an accolade at the Baznas Awards 2025 under the category of "Bank with the Best Institutional Service Commitment to *Zakat*."

17 November 2025 17 November 2025



BRKS Tanjungpinang Pamedan menerima penghargaan pada ajang Baznas *Award* 2025 yang digelar oleh Badan Amil *Zakat* Nasional (Baznas) Provinsi Kepulauan Riau, dalam kategori Perusahaan, BUMD, dan BUMN Aktif Pengumpulan *Zakat*, *Infak*, dan Sedekah.

BRKS Tanjungpinang Pamedan received an award at the Baznas Awards 2025, organized by the National Board of *Zakat* (Baznas) of Kepulauan Riau Province, in the category of Enterprises, Regionally-Owned Enterprises (BUMD), and State-Owned Enterprises (BUMN) with Active Collection of *Zakat*, Infaq, and Sadaqah.

22 Desember 2025 22 December 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) meresmikan relokasi Cabang Pembantu BRKS Kuansing Baserah.

Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) officially inaugurated the relocation of the BRKS Kuansing Baserah Sub-Branch Office.

23 Desember 2025 23 December 2025



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dinobatkan sebagai Juara Kedua dalam kategori *Hajj Registration* & AUM *Contribution* Bank 2025 dan Juara Ketiga dalam kategori *The Best of Young Hajj Pilgrims Registration* Bank 2025 pada ajang Hajj Banking *Award* BPKH 2025.

Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) was awarded Second Place in the "Hajj Registration & AUM Contribution Bank 2025" category, and Third Place in "The Best of Young Hajj Pilgrims Registration Bank 2025" category at the BPKH Hajj Banking Awards 2025.



LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat

Esteemed Shareholders and Stakeholders

ROY PRAKOSO

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga BRK Syariah mampu melalui dinamika dan tantangan perekonomian sepanjang tahun 2025 dengan capaian kinerja yang tetap positif dan terjaga. Dalam situasi ekonomi yang terus berubah, Bank tetap mampu menjaga stabilitas usaha melalui penguatan fundamental serta peningkatan kualitas layanan.

Dewan Komisaris menilai bahwa manajemen BRK Syariah telah menjalankan fungsi kepengurusan Bank dengan baik dan penuh tanggung jawab, meskipun masih perlu melakukan perbaikan untuk mengacu kepada GRC (*Governance, Risk, and Compliance*). Bank senantiasa hadir memberikan solusi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan melalui inovasi produk dan layanan berbasis teknologi, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja manajemen selama tahun 2025 yang mencakup penjelasan mengenai kondisi eksternal yang memengaruhi kinerja Bank, pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, penilaian atas kinerja serta prospek usaha yang disampaikan Direksi, serta evaluasi penerapan tata kelola Bank secara menyeluruh.

Kondisi Eksternal Bank

Perekonomian global pada tahun 2025 masih dibayangi ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan meningkatnya proteksionisme perdagangan. Konflik Rusia-Ukraina serta dinamika di Timur Tengah, ditambah kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap sejumlah mitra dagang utama, mendorong perlambatan perdagangan global dan meningkatkan fragmentasi ekonomi. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan pelaku usaha dan investor, sehingga pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat menjadi sekitar 3,3% dengan inflasi yang masih relatif tinggi meskipun menunjukkan tren penurunan.

Di tengah tekanan global tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan sebesar 5,11% pada tahun 2025. Pertumbuhan didukung oleh peningkatan investasi dan konsumsi domestik, serta kinerja positif di berbagai sektor seperti transportasi, jasa, dan keuangan. Secara regional, Pulau Sumatera memberikan kontribusi signifikan di bawah Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional, yang mencerminkan peran strategis kawasan ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

All praise and gratitude be to Allah SWT for His grace and blessings, which have enabled BRK Syariah to navigate the economic dynamics and challenges throughout 2025, maintaining a positive and stable performance. Amidst an ever-changing economic landscape, the Bank successfully preserved business stability by strengthening fundamentals and enhancing service quality.

The Board of Commissioners assesses that the management of BRK Syariah has executed its management functions effectively and with full responsibility, although improvements are still required to fully align with GRC (Governance, Risk, and Compliance) standards. The Bank consistently provides solutions for the public and stakeholders through technology-driven product and service innovations, while continuing to prioritize prudential principles and the implementation of good corporate governance.

This report is compiled as a manifestation of the Board of Commissioners' oversight function regarding management's performance during 2025. It encompasses an explanation of external conditions affecting the Bank's performance, the execution of oversight functions and the provision of advice to the Board of Directors, an assessment of the performance and business prospects presented by the Board of Directors, as well as a comprehensive evaluation of the Bank's corporate governance implementation.

The Bank's External Conditions

The global economy in 2025 remained overshadowed by uncertainty due to geopolitical tensions and rising trade protectionism. The Russia-Ukraine conflict and dynamics in the Middle East, coupled with United States import tariff policies against several major trading partners, drove a slowdown in global trade and heightened economic fragmentation. These conditions impacted the declining confidence of business actors and investors, projecting a slowdown in global economic growth to approximately 3.3%, alongside relatively high inflation despite showing a downward trend.

Amidst these global pressures, the Indonesian economy has continued to demonstrate robust resilience, recording a growth rate of 5.11% in 2025. This expansion was supported by increased investments and domestic consumption, alongside positive performance across various sectors such as transportation, services, and finance. Regionally, Sumatra Island delivered a significant contribution to the national economy, second only to Java Island, thereby reflecting the strategic role of this region in bolstering Indonesia's overall economic growth.

Secara lebih spesifik, Provinsi Riau dan Kepulauan Riau menunjukkan kinerja ekonomi yang solid. Riau tumbuh sebesar 4,79% dengan dukungan konsumsi rumah tangga dan sektor jasa keuangan, sementara Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan lebih tinggi sebesar 6,94% yang didorong oleh peningkatan ekspor dan investasi. Meskipun tekanan inflasi masih terjadi di kedua wilayah tersebut, aktivitas ekonomi tetap terjaga, yang didukung oleh konsumsi masyarakat dan pertumbuhan sektor perdagangan serta jasa.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, industri perbankan syariah nasional terus mencatat pertumbuhan positif, tercermin dari peningkatan aset, Dana Pihak Ketiga, dan pembiayaan dengan kualitas yang tetap terjaga. Kondisi ini menjadi peluang bagi BRK Syariah untuk memperkuat perannya sebagai Bank Pembangunan Daerah di wilayah Riau dan Kepulauan Riau, khususnya melalui fokus pada pembiayaan sektor konsumer dan UMKM. Dengan dukungan kondisi ekonomi regional yang stabil dan prospek industri yang positif, BRK Syariah memiliki ruang untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Peran Strategis Dewan Komisaris dalam Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan Bank

Dewan Komisaris memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya tata kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance*) melalui fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, mencakup seluruh aktivitas Bank mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi strategi dan kebijakan usaha. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris bersama Direksi juga memperkuat mekanisme *check and balance* guna memastikan setiap strategi pengembangan usaha yang telah disepakati dapat berjalan efektif, konsisten, serta selaras dengan prinsip kehati-hatian.

Sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, Dewan Komisaris secara berkala menyampaikan hasil pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris juga aktif menghadiri undangan OJK dalam membahas berbagai isu strategis, termasuk implementasi Rencana Bisnis Bank (RBB) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan rutin OJK terhadap Bank. Dalam forum tersebut, Dewan Komisaris memberikan arahan, saran, rekomendasi, serta persetujuan yang diperlukan untuk mendukung penguatan kebijakan dan strategi Bank agar tetap berada pada arah yang sehat dan berkelanjutan.

More specifically, Riau and Kepulauan Riau Provinces demonstrated solid economic performance. Riau grew by 4.79%, supported by household consumption and the financial services sector, while Kepulauan Riau recorded higher growth at 6.94%, driven by increased exports and investments. Although inflation pressures persisted in both regions, economic activity remained stable, supported by public consumption and the growth of the trade and service sectors.

In line with these developments, the national Islamic banking industry continued to record positive growth, reflected in the increase in assets, Third-Party Funds (TPF), and financing with well-maintained quality. These conditions present an opportunity for BRK Syariah to strengthen its role as a Regional Development Bank in the Riau and Kepulauan Riau regions, particularly through a focus on consumer and MSME sector financing. Supported by stable regional economic conditions and positive industry prospects, BRK Syariah possesses ample room to continuously enhance its contribution to driving regional economic growth.

Strategic Role of the Board of Commissioners in Strengthening Bank Governance and Oversight

The Board of Commissioners holds a strategic role in ensuring the implementation of Good Corporate Governance through its oversight function and the provision of continuous advice. Throughout 2025, the Board of Commissioners optimally executed its duties and responsibilities, covering all Bank activities from the formulation, implementation, to the evaluation of business strategies and policies. In its execution, the Board of Commissioners, together with the Board of Directors, fostered a strong mechanism of checks and balances to ensure every mutually agreed business development strategy runs effectively, consistently, and in alignment with prudential principles.

As part of the principles of transparency and accountability, the Board of Commissioners routinely conveyed the results of its oversight to the Financial Services Authority (OJK) and the Controlling Shareholders. The Board of Commissioners also actively attended OJK invitations to discuss various strategic issues, including the implementation of the Bank Business Plan (RBB) and follow-up actions on OJK's routine examination results of the Bank. Within these forums, the Board of Commissioners provided directives, advice, recommendations, and necessary approvals to support the strengthening of the Bank's policies and strategies, ensuring they remain on a sound and sustainable trajectory.

Selain itu, Dewan Komisaris melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja keuangan dan operasional Bank, termasuk penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Fokus pengawasan mencakup pengembangan layanan perbankan digital, penguatan keamanan siber, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi penerapan teknologi dalam transformasi digital perbankan. Dewan Komisaris juga memberi perhatian pada strategi pembiayaan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penguatan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, guna memastikan ketahanan dan keberlanjutan kinerja Bank di tengah dinamika industri perbankan.

Pengawasan Strategis Dewan Komisaris Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris yang didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsi pengawasan secara menyeluruh terhadap perumusan dan implementasi strategi Bank yang disusun oleh Direksi. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan melalui kajian, evaluasi, serta pemberian arahan strategis guna memastikan seluruh kebijakan Bank selaras dengan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) serta arah pengembangan usaha yang telah ditetapkan.

Sebagai wujud pengawasan aktif, Dewan Komisaris juga melakukan kunjungan ke Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kedai secara rutin guna mendapatkan masukan secara langsung dari jajaran terdepan dalam pelayanan kepada nasabah.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris tidak hanya menitikberatkan pada aspek kepatuhan, tetapi juga efektivitas implementasi strategi Bank secara berkelanjutan. Melalui peran komite-komite pendukung, Dewan Komisaris memberikan berbagai arahan, evaluasi, dan rekomendasi strategis, khususnya terkait penguatan manajemen risiko, peningkatan kinerja operasional, pengembangan transformasi digital, serta penguatan organisasi. Seluruh masukan tersebut diarahkan untuk memastikan strategi Bank dapat berjalan secara prudent, adaptif, dan berkesinambungan. Dewan Komisaris telah mengeluarkan rekomendasi pada tahun 2025 berupa Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap Calon Direktur Utama PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Dewan Komisaris juga telah memberikan tanggapan dan saran kepada Direksi dengan keluarnya persetujuan atau keputusan pengawasan selama tahun 2025, meliputi aspek berikut:

1. Persetujuan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Furthermore, the Board of Commissioners conducted a comprehensive evaluation of the Bank's financial and operational performance, including the enhancement of organizational capacity and capabilities. The oversight focus encompassed the development of digital banking services, strengthening cybersecurity, elevating human capital quality, and optimizing technology adoption in the Bank's digital transformation. The Board of Commissioners also paid close attention to financing strategies, prioritizing prudential principles and reinforcing the risk management and internal control systems, to ensure the resilience and sustainability of the Bank's performance amidst the dynamic banking industry.

Strategic Oversight of the Board of Commissioners in 2025

In 2025, the Board of Commissioners, supported by the Audit Committee, Risk Oversight Committee, and Remuneration and Nomination Committee, executed comprehensive oversight functions regarding the formulation and implementation of the Bank's strategies devised by the Board of Directors. The execution of this oversight was conducted through reviews, evaluations, and the provision of strategic directives to ensure all Bank policies align with the principles of Good Corporate Governance and the established business development direction.

As a manifestation of active oversight, the Board of Commissioners also conducts routine visits to Branches/Sub-Branches/Kedai Office to obtain direct feedback from the front-line personnel engaged in customer service.

In executing its duties, the Board of Commissioners focuses not only on compliance aspects but also on the effectiveness of the Bank's sustainable strategy implementation. Through the role of its supporting committees, the Board of Commissioners provides various strategic directives, evaluations, and recommendations, particularly concerning the strengthening of risk management, the enhancement of operational performance, the advancement of digital transformation, and organizational capacity building. All of these inputs are directed towards ensuring that the Bank's strategy is executed in a prudent, adaptive, and sustainable manner. The Board of Commissioners issued a recommendation in 2025 in the form of the Remuneration and Nomination Committee's Recommendation regarding the Candidate for President Director of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
The Board of Commissioners has also provided responses and suggestions to the Board of Directors through the issuance of supervisory approvals or decisions throughout 2025, encompassing the following aspects:

1. Approval of the Extension of the Tenure for Members of the Audit Committee and Risk Oversight Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

2. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Divisi Audit Internal dan Anti *Fraud* Tahun 2025
3. Persetujuan Rencana Perubahan SOTK.
4. Persetujuan Pembiayaan Aneka Guna (PAG) kepada Pihak Terkait.
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk *Review* Kaji Ulang Divisi Audit Internal dan Anti *Fraud* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
6. Tindak Lanjut Remunerasi Tetap Dewan Pengawas Syariah Tahun Buku 2025 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
7. Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahun 2025-2027.
8. Persetujuan Pembagian Wewenang dan Tugas Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
9. Persetujuan Penegasan Limit Direksi.
10. Persetujuan Perubahan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB).
11. Persetujuan Perubahan Piagam Audit Intern Tahun 2025 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
12. Persetujuan Penyesuaian atas Revisi Rencana Bisnis Bank PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahun 2025-2027.
13. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahun Buku 2025.
14. Persetujuan Perubahan BPP *Special Asset Management*
15. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026-2028 dan Persetujuan *Corporate Plan* Tahun 2026-2030 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
16. Persetujuan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
17. Persetujuan atas BPP *Internal Control Over Financing* (ICOFR) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Mekanisme dan Intensitas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2025

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu melalui pemberian nasihat dan arahan strategis. Pengawasan tersebut difokuskan pada berbagai aspek penting, antara lain penguatan strategi pengembangan bisnis, peningkatan kualitas pengelolaan portofolio aset, penurunan *Non Performing Financing* (NPF), serta penguatan pengelolaan Sumber Daya Insani. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan perhatian terhadap efektivitas mitigasi sepuluh risiko utama pada Bank Syariah, optimalisasi penggunaan modal, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi operasional dan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

2. Approval of the Work Plan and Budget for the Internal Audit and Anti-Fraud Division for the Year 2025.
3. Approval of the Organizational Structure and Work Procedures (SOTK) Change Plan.
4. Approval of Multipurpose Financing (PAG) to Related Parties.
5. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the Peer Review of the Internal Audit and Anti-Fraud Division of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
6. Follow-up on the Fixed Remuneration of the Sharia Supervisory Board for the 2025 Financial Year of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
7. Approval of the Revised Bank Business Plan of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the Years 2025-2027.
8. Approval of the Distribution of Authority and Duties of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
9. Approval of the Reaffirmation of the Board of Directors' Limits.
10. Approval of the Amendments to the Bank Financing Policy (KPB).
11. Approval of the Amendments to the Internal Audit Charter for the Year 2025 of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
12. Approval of Adjustments to the Revised Bank Business Plan of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the Years 2025-2027.
13. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the Audit of the Annual Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the financial year 2025.
14. Approval of Amendments to the Corporate Guidelines of Special Asset Management.
15. Approval of the Bank Business Plan (RBB) for the Years 2026-2028 and Approval of the Corporate Plan for the Years 2026-2030 of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
16. Approval of the Extension of the Tenure for Members of the Audit Committee and Risk Oversight Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
17. Approval of the Corporate Guidelines of Internal Control Over Financing (ICOFR) of PT. Bank Riau Kepri Syariah.

Mechanism and Intensity of Board of Commissioners' Oversight in 2025

The Board of Commissioners exercises its supervisory function over the execution of the Board of Directors' duties and responsibilities on both a scheduled and ad hoc basis, through the provision of strategic advice and direction. This oversight focuses on several vital aspects, including the reinforcement of business development strategies, the enhancement of asset portfolio management quality, the reduction of Non-Performing Financing (NPF), and the strengthening of Human Capital management. Furthermore, the Board of Commissioners closely monitors the mitigation effectiveness of the ten principal risks in Islamic Banking, the optimization of capital allocation, the implementation of Good Corporate Governance (GCG), and the utilization of information technology to drive operational efficiency and elevate the quality of customer service.

Intensitas pengawasan dilakukan secara terstruktur, berkesinambungan, dan responsif sesuai dengan dinamika operasional Bank. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris bersama Dewan Pengawas Syariah dan Direksi telah melaksanakan rapat berkala sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali sebagai forum utama dalam membahas kinerja, kebijakan strategis, serta isu-isu penting Bank. Frekuensi pengawasan ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga efektivitas fungsi pengawasan terhadap jalannya Bank.

Selain melalui rapat berkala, pengawasan juga diperkuat dengan penerimaan dan penelaahan berbagai laporan yang disampaikan oleh Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, serta Direktur Kepatuhan. Pengawasan juga dilakukan melalui komunikasi tertulis dan laporan insidentil lainnya yang bersifat khusus maupun tematik. Seluruh mekanisme tersebut memastikan bahwa fungsi pengawasan Dewan Komisaris berjalan komprehensif, adaptif, dan mampu merespons setiap perkembangan serta tantangan yang dihadapi Bank secara tepat waktu. Namun demikian, Dewan Komisaris terus berbenah dengan melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan.

Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2025 dan Penguatan Transformasi Digital Bank

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan nasional sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan usaha Bank secara berkelanjutan. Hal ini tercermin dari capaian kinerja keuangan yang tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya, di mana total aset Bank meningkat sebesar 0,78% dari Rp30,86 triliun menjadi Rp31,10 triliun. Dari sisi permodalan, ekuitas Bank mengalami penurunan dengan nilai menjadi Rp3,39 triliun atau turun 0,95% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp3,42 triliun, sehingga memperkuat fundamental keuangan Bank dalam mendukung ekspansi usaha.

Kinerja fungsi intermediasi Bank juga menunjukkan kondisi yang sehat dan seimbang. Dana pihak ketiga berhasil dihimpun sebesar Rp25,75 triliun dan disalurkan ke sektor pembiayaan sebesar Rp21,79 triliun, sehingga menghasilkan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 84,61%. Pertumbuhan dana pihak ketiga tercatat sebesar 5,90%, sementara pembiayaan kepada masyarakat tumbuh 0,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari aspek profitabilitas, Bank berhasil membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp276,43 miliar, menurun 18,55% dari periode yang sama tahun 2024. Meskipun capaian tersebut menunjukkan tren positif, Dewan Komisaris tetap mendorong Direksi

The intensity of oversight was conducted in a structured, continuous, and responsive manner in accordance with the Bank's operational dynamics. Throughout 2025, the Board of Commissioners, together with the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors, held periodic meetings 29 (twenty-nine) times as the primary forum for discussing performance, strategic policies, and pivotal issues concerning the Bank. The frequency of this oversight demonstrates a strong commitment to maintaining the effectiveness of the oversight function over the Bank's course of operations.

Beyond convening periodic meetings, the oversight function is further fortified through the receipt and comprehensive review of various reports submitted by the Internal Audit & Anti-Fraud Division, the constituent Committees operating under the auspices of the Board of Commissioners, as well as the Director of Compliance. Supervisory activities are additionally executed via formalized written communications and other incidental reporting mechanisms of a specialized or thematic nature. These integrated mechanisms meticulously ensure that the Board of Commissioners' oversight function is executed in a comprehensive and adaptive manner, possessing the agility to respond to any developments and challenges encountered by the Bank in a timely fashion. Nevertheless, the Board of Commissioners remains steadfast in its commitment to continuous improvement by conducting requisite evaluations and implementing necessary remediations.

Assessment of the Board of Directors' Performance in 2025 and Strengthening the Bank's Digital Transformation

In navigating the dynamics of the global and national economy throughout 2025, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has demonstrated commendable performance in managing and developing the Bank's business activities sustainably. This is reflected in the positive growth of financial performance compared to the preceding year, where the Bank's total assets increased by 0.78%, from Rp30.86 trillion to Rp31.10 trillion. In terms of capitalization, the Bank's equity experienced a decrease, reaching Rp3,39 trillion, or a 0.95% decline compared to Rp3.42 trillion in 2024, thereby strengthening the Bank's financial fundamentals in supporting business expansion.

The performance of the Bank's intermediation function also indicated a sound and balanced condition. Third-Party Funds were successfully accumulated at Rp25.75 trillion and disbursed to the financing sector amounting to Rp21.79 trillion, generating a Financing to Deposit Ratio (FDR) of 84.61%. The growth of Third-Party Funds was recorded at 5.90%, while financing to the public grew by 0.83% compared to the previous year. From the profitability aspect, the Bank successfully recorded a net profit for the current year of Rp276.43 billion, a decrease of 18.55% from the corresponding period in 2024. Although these achievements indicate a positive trend, the Board of Commissioners continues to urge the Board of Directors

untuk terus memperkuat strategi penghimpunan dana serta optimalisasi laba agar target kinerja tahun berikutnya dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Pada sisi transformasi digital, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas peningkatan implementasi teknologi dalam mendukung produk dan layanan Bank. Pemanfaatan layanan digital seperti BRKS *Mobile*, *Cash Management System* (CMS), QRIS, layanan *merchant* QRIS, *Electronic Data Capture* (EDC), Kartu Debit, serta berbagai aplikasi layanan publik seperti SP2D *Online*, SKPD *Online*, dan pembayaran PBB kolektif semakin luas digunakan oleh nasabah maupun Pemerintah Daerah. Perkembangan ini mencerminkan komitmen Bank dalam memperkuat sinergi ekosistem digital sesuai arah strategis Rencana Bisnis Bank, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional, perluasan inklusi keuangan, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Dewan Komisaris memandang bahwa dalam setiap periode penyusunan target dan kebijakan strategis, Direksi telah menyusun prospek usaha Bank secara terarah dengan tetap mengacu pada capaian kinerja dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) periode sebelumnya. Dalam hal ini, Dewan Komisaris turut memberikan rekomendasi serta arahan strategis sebagai bagian dari fungsi pengawasan, guna memastikan bahwa arah pengembangan usaha Bank tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian kinerja yang berkelanjutan.

Dewan Komisaris menilai bahwa RBB Bank tahun 2025–2027 serta RAKB tahun 2025 telah disusun oleh Direksi dengan mempertimbangkan kekuatan internal, keunggulan kompetitif, serta berbagai asumsi eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja Bank di masa mendatang. Penyusunan prospek usaha tersebut juga telah mengacu pada kebijakan strategis nasional dan sektoral, sehingga mampu memberikan arah pengembangan usaha yang lebih terukur, realistis, dan berdaya saing.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa RBB tahun 2025–2027 telah selaras dengan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 serta *Roadmap* Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024–2027. Dalam implementasinya, Bank memperkuat ketahanan industri melalui efesiensi operasional dengan menjaga rasio BOPO (Pilar 1), meningkatkan fungsi dan kemudahan infrastruktur *digital channel* (Pilar 2), serta memperkuat tata kelola dan peningkatan pembiayaan UMKM melalui produk KUR iB yang mendukung *sustainable finance* (Pilar 3). Selain itu,

to further strengthen funding strategies and profit optimization so that performance targets for the ensuing year can be achieved more optimally and sustainably.

Regarding digital transformation, the Board of Commissioners expresses appreciation for the enhanced implementation of technology in supporting the Bank's products and services. The utilization of digital services such as BRKS Mobile, Cash Management System (CMS), QRIS, merchant QRIS services, Electronic Data Capture (EDC), debit cards, as well as various public service applications like SP2D Online, SKPD Online, and collective PBB payments, is being increasingly widely used by both customers and Regional Governments. These developments reflect the Bank's commitment to strengthening digital ecosystem synergy in line with the strategic direction of the Bank Business Plan, while concurrently contributing to elevated operational efficiency, expanded financial inclusion, and continuously improved service quality for the community.

Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

The Board of Commissioners views that in every period of target setting and strategic policy formulation, the Board of Directors has meticulously prepared the Bank's business prospects with reference to the performance achievements within the Bank Business Plan (RBB) and the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) of the preceding period. In this regard, the Board of Commissioners partakes in providing recommendations and strategic directives as part of the oversight function, aiming to ensure that the direction of the Bank's business development remains relevant, adaptive, and oriented toward sustainable performance achievements.
The Board of Commissioners assesses that the Bank's RBB for the years 2025–2027 and the RAKB for the year 2025 have been formulated by the Board of Directors by taking into account internal strengths, competitive advantages, and various external assumptions that possess the potential to influence the Bank's performance in the future. The formulation of these business prospects has also aligned with national and sectoral strategic policies, thereby enabling it to provide a more measurable, realistic, and competitive direction for business development.

The Board of Commissioners assesses that the 2025–2027 Bank Business Plan (RBB) is in full alignment with the 2023–2027 Roadmap for the Development and Strengthening of Indonesian Islamic Banking (RP3SI) and the 2024–2027 Roadmap for the Strengthening of Regional Development Banks (BPD). In its implementation, the Bank fortifies industry resilience through operational efficiency by maintaining the BOPO ratio (Pillar 1), enhancing the functionality and accessibility of digital channel infrastructure (Pillar 2), and strengthening corporate governance alongside the expansion of MSME financing via the KUR iB product to

Bank juga meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui kolaborasi dengan berbagai ekosistem syariah untuk memperluas kontribusi terhadap perekonomian nasional (Pilar 4), sejalan dengan penguatan peran BPD dalam aspek perizinan, pengaturan, dan pengawasan industri perbankan daerah.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Konsistensi Penerapan GCG Bank

Dewan Komisaris berpandangan bahwa berbagai pencapaian penting Bank pada tahun 2025 tidak terlepas dari konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di seluruh lini organisasi. Implementasi GCG BRK Syariah telah berjalan dengan baik, terarah, dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja Bank serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. Penerapan GCG tersebut berlandaskan pada tiga aspek utama, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*, yang diintegrasikan secara konsisten dalam setiap aktivitas operasional maupun pengambilan keputusan strategis Bank.

Dewan Komisaris menilai bahwa keseimbangan antara struktur tata kelola yang kuat dan proses pengambilan keputusan yang efektif telah menghasilkan *governance outcome* yang selaras dengan harapan Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dari meningkatnya kualitas pengawasan, kepatuhan, serta efektivitas pelaksanaan fungsi manajerial di lingkungan Bank. Kondisi tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan kinerja, stabilitas usaha, serta reputasi Bank di tengah dinamika industri perbankan.

Dewan Komisaris juga mencatat bahwa pada tahun 2025, BRK Syariah telah melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan GCG sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 serta Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Bank mempertahankan skor *self-assessment* GCG secara individu maupun konsolidasi pada peringkat "3" dengan kategori "Cukup Baik" untuk periode Desember 2025. Proses penilaian tersebut dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif, serta unit-unit kerja terkait guna memastikan objektivitas dan akurasi hasil evaluasi tata kelola Bank.

support sustainable finance (Pillar 3). Furthermore, the Bank is advancing financial literacy and inclusion through strategic collaborations across various Islamic ecosystems to broaden its contribution to the national economy (Pillar 4). This proceeds in tandem with the strengthened role of BPDs concerning the licensing, regulation, and supervision of the regional banking industry.

Views of the Board of Commissioners on the Consistency of GCG Implementation

The Board of Commissioners holds the view that the various pivotal achievements of the Bank in 2025 are inextricable from the consistency in applying Good Corporate Governance (GCG) across all organizational lines. The implementation of GCG at BRK Syariah has been executed admirably, purposefully, and effectively in supporting the attainment of the Bank's performance as well as solidifying the trust of stakeholders. This GCG implementation is grounded upon three primary aspects, namely Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome, which are integrated consistently within every operational activity and strategic decision-making process of the Bank.

The Board of Commissioners assesses that the equilibrium between a robust governance structure and effective decision-making processes has yielded governance outcomes that align with the expectations of the Shareholders and all stakeholders. This is mirrored in the elevated quality of oversight, compliance, and the effectiveness of managerial functions within the Bank. These conditions serve as a vital foundation in maintaining performance sustainability, business stability, and the Bank's reputation amidst the dynamics of the banking industry.

The Board of Commissioners also notes that in 2025, BRK Syariah executed a self-assessment on the implementation of GCG in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.03/2023 and the Financial Services Authority Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 concerning the Application of Governance for Commercial Banks. The assessment results denote that the Bank sustained an individual GCG self-assessment score as well as a consolidated score at rank "3" with the "Fairly Good" (Cukup Baik) category for the period of December 2025. The assessment process was conducted comprehensively, involving the Board of Commissioners, the Board of Directors, executive officers, and pertinent work units to ensure the objectivity and accuracy of the Bank's governance evaluation results.

Penerapan *Whistleblowing System* dan Pengawasan Dewan Komisaris

Penerapan *Whistleblowing System* di BRK Syariah dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat fungsi pengawasan perusahaan. Sistem ini dirancang untuk memastikan setiap laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti secara independen, objektif, dan investigatif, serta menghasilkan langkah perbaikan yang diperlukan. Sepanjang tahun 2025, mekanisme *Whistleblowing System* telah berjalan dengan baik, namun tetap memerlukan penguatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan.

Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan secara komprehensif, termasuk memastikan penerapan sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Direksi tentang Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut atas indikasi pelanggaran kode etik, prosedur, maupun *fraud* melalui penerapan strategi anti-*fraud* yang dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Bank juga terus mengantisipasi risiko *fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang masuk melalui Aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS) melalui *website* sebagai berikut :

Implementation of the Whistleblowing System and Oversight by the Board of Commissioners

The implementation of the Whistleblowing System at BRK Syariah is deemed as one of the critical pillars in fortifying the company's oversight function. This system is designed to ensure that every incoming report can be followed up independently, objectively, and investigatively, thereby generating the requisite corrective measures. Throughout 2025, the Whistleblowing System mechanism has functioned commendably, yet it still necessitates continuous strengthening and refinement.

The Board of Commissioners plays a role in conducting comprehensive oversight, including ensuring the imposition of sanctions against parties proven to have committed violations in accordance with the Board of Directors' Regulation concerning Employee Disciplinary Action, the applicable Collective Labor Agreement (PKB), as well as prevailing laws and regulations. Additionally, the Board of Commissioners conducts monitoring, evaluations, and follow-ups on indications of code of ethics violations and internal fraud through anti-fraud strategy implementations periodically reported to the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Bank also continuously anticipates fraud risks originating both internally and externally.

The Suspected Violation Complaint Reports received up to December 31, 2025, through the Whistleblowing System (WBS) Application via the website are as follows:

Klasifikasi Laporan Report Classification		**Laporan Ditindaklanjuti** Reports Followed Up	**Laporan dinyatakan Selesai** Reports Declared Resolved
Fraud	***Non Fraud***		
-	5	5	5

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, serta berkontribusi dalam memperkuat fungsi tata kelola di BRK Syariah.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

In supporting the execution of its oversight duties, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, the Risk Oversight Committee, and the Remuneration and Nomination Committee. Throughout 2025, the Board of Commissioners assesses that all committees have fulfilled their respective duties and responsibilities in accordance with prevailing guidelines and regulations, and have contributed to strengthening the governance function at BRK Syariah.

Penilaian kinerja komite dilakukan secara menyeluruh, baik secara kolegial maupun individu terhadap masing-masing anggota dan ketua komite. Aspek yang menjadi dasar penilaian meliputi efektivitas pelaksanaan rapat, tingkat kehadiran, kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, kompetensi yang dimiliki, serta capaian kinerja komite selama tahun buku 2025. Hasil penilaian ini menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas peran komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Komite Audit

Peran dan tugas Komite Audit ("Komite") adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut pengendalian internal di BRK Syariah, termasuk memastikan kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite juga berperan dalam memberikan masukan guna memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal serta menjaga kualitas dan integritas laporan keuangan perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali rapat. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, Komite telah memberikan sebanyak 1 (satu) rekomendasi terkait usulan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Review Kaji Ulang Divisi Audit Internal PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) periode Review Juni 2022 - Juni 2025. Atas pelaksanaan tugas tersebut, Komite Audit juga secara berkala menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penguatan tata kelola perusahaan.

Komite Pemantau Risiko

Peran dan tugas Komite Pemantau Risiko ("Komite") adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan manajemen risiko di BRK Syariah. Komite juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan implementasinya, guna memastikan penerapan manajemen risiko berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%. Dalam pelaksanaannya, sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko tidak menyampaikan rekomendasi, namun Komite Pemantau Risiko secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan risiko.

The performance assessment of the committees was conducted comprehensively, encompassing both collegial and individual evaluations of each member and the committee chairpersons. The fundamental aspects of this assessment encompass the effectiveness of meeting execution, attendance rates, quality of task execution and accountability, possessed competencies, and the performance achievements of the committees during the 2025 financial year. The results of this assessment constitute a pivotal component in ensuring the effectiveness of the committees' roles in buttressing the Board of Commissioners' oversight function.

Audit Committee

The role and duties of the Audit Committee ("Committee") are to conduct monitoring and evaluation of the planning, execution, and follow-up of internal controls at BRK Syariah, including ensuring the adequacy of the financial reporting process. The Committee also plays a role in providing recommendations to enhance the effectiveness of the internal control system and maintain the quality and integrity of the company's financial statements.

Throughout 2025, the Audit Committee convened 9 (nine) meetings. Resulting from the execution of these duties, the Committee provided 1 (one) recommendation concerning the proposed appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the Peer Review of the Internal Audit and Anti-Fraud Division of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the Review period of June 2022 - June 2025. Pertaining to the execution of these duties, the Audit Committee also periodically submitted reports to the Board of Commissioners as a manifestation of accountability and the strengthening of corporate governance.

Risk Oversight Committee

The role and duties of the Risk Oversight Committee ("Committee") are to conduct monitoring and evaluation of the planning and implementation of risk management at BRK Syariah. The Committee also provides recommendations to the Board of Commissioners concerning the congruence between risk management policies and their implementation, ensuring that risk management is executed effectively, measurably, and in accordance with applicable provisions.

In 2025, the Risk Oversight Committee held 17 (seventeen) meetings with a 100% attendance rate. During its execution throughout 2025, the Risk Oversight Committee did not issue any specific recommendations; however, the Risk Oversight Committee periodically submitted reports on the execution of its duties to the Board of Commissioners as a form of strengthening the risk oversight function.

Komite secara berkala melakukan Kajian atas 10 (sepuluh) risiko, khususnya risiko utama yang dapat berdampak signifikan terhadap operasional bank.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Peran dan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi ("Komite") adalah memberikan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif, dan pegawai dengan mengacu pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite juga berperan dalam menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta memberikan rekomendasi calon sesuai dengan kebutuhan BRK Syariah.

Pada tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%. Dalam pelaksanaannya, Komite menghasilkan 1 (satu) rekomendasi, yaitu perpanjangan masa kerja anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, penarikan dan penggantian Komisaris Utama Bank, rekomendasi calon Komisaris Utama Non-Independen, serta rekomendasi calon Komisaris Utama, calon Direktur Utama, dan calon Direktur Pembiayaan. Komite juga secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk penguatan tata kelola perusahaan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2025 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris BRK Syariah. Hingga akhir Desember 2025, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen Bapak Roy Prakoso. Pada tanggal 25 Oktober 2025, Ibu Rita Anugerah secara resmi mengundurkan diri, sehingga 31 Desember 2025 komposisi Dewan Komisaris BRK Syariah hanya dijabat oleh Komisaris Independen Bapak Roy Prakoso. Kondisi ini masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

BRK Syariah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Rita Anugerah atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat. Sementara itu, Bapak Roy Prakoso tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penasehatan secara optimal untuk mendukung keberlanjutan kinerja BRK Syariah.

The Committee periodically conducts a review of the 10 (ten) risks, particularly the principal risks that may have a significant impact on the Bank's operations.

Remuneration and Nomination Committee

The role and duties of the Remuneration and Nomination Committee ("Committee") are to provide recommendations concerning remuneration policies for the Board of Commissioners, the Board of Directors, executive officers, and employees, referencing the Remuneration and Nomination Committee Charter. The Committee also plays a role in structuring the selection and appointment procedures for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as providing recommendations for candidates tailored to the needs of BRK Syariah.
In 2025, the Remuneration and Nomination Committee held 2 (two) meetings with a 100% attendance rate. During its proceedings, the Committee produced 1 (one) recommendation, namely the extension of the tenure of the members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee, the withdrawal and replacement of the President Commissioner of the Bank, the recommendation for a Non-Independent President Commissioner candidate, as well as recommendations for candidates for President Commissioner, President Director, and Director of Financing. The Committee also periodically submitted reports on the execution of its duties to the Board of Commissioners as an effort to strengthen corporate governance.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

During the 2025 fiscal year, a structural transition occurred within the composition of the Board of Commissioners of BRK Syariah. Following the official resignation of Mrs. Rita Anugerah on October 25, 2025, the Board of Commissioners, as of December 31, 2025, was exclusively constituted by Independent Commissioner Mr. Roy Prakoso. Consequently, this current condition does not yet fully comply with the regulatory provisions stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.
BRK Syariah expresses its gratitude and appreciation to Mrs. Rita Anugerah for her dedication and contributions during her tenure. Meanwhile, Mr. Roy Prakoso continues to execute the oversight and advisory functions optimally to support the sustainability of BRK Syariah's performance.

Apresiasi dan Penutup

Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh insan BRK Syariah atas kerja keras, dedikasi, dan komitmen sehingga kinerja tahun 2025 dapat tumbuh dengan baik. Terima kasih juga kepada Direksi atas dedikasi dan kepemimpinannya, serta kepada Pemegang Saham, Nasabah, Mitra Bisnis, dan seluruh Pemangku Kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang telah terjalin.

Dewan Komisaris optimis bahwa dengan sinergi dan kerja sama yang solid, BRK Syariah akan terus mampu memperkuat kinerja, meningkatkan daya saing, serta menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita bersama dan memberikan kemudahan dalam setiap ikhtiar. Aamiin.

Appreciation and Closing

We extend our highest appreciation to all individuals of BRK Syariah for their hard work, dedication, and solid commitment, resulting in an esteemed performance achievement in 2025 that can further propel growth, enhance competitiveness, and sustain continuous growth in the future. We also thank the Board of Directors for their dedication and leadership, as well as the Shareholders, Customers, Business Partners, and all Stakeholders for the trust and support that has been established.

The Board of Commissioners is optimistic that with solid synergy and cooperation, BRK Syariah will continuously be able to fortify its performance, elevate its competitiveness, and preserve sustainable growth in the future. May Allah SWT perpetually bless our every endeavor together and grant ease in every undertaking. Aamiin.

Pekanbaru, 27 April 2026
Pekanbaru, April 27th, 2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Roy Prakoso
Komisaris Independen
Independent Commissioner

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

SHARIA SUPERVISORY BOARD REPORT



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Esteemed Shareholders and Stakeholders

ZULHENDRI RAIS

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Chairman of Sharia Supervisory Board

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) mampu menjalani tahun 2025 yang penuh dinamika dan tantangan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, peningkatan risiko industri keuangan, serta percepatan transformasi digital, Perseroan tetap menunjukkan kinerja yang positif dan stabil. Capaian tersebut tidak terlepas dari penguatan fundamental bisnis, peningkatan kualitas pembiayaan, serta inovasi layanan berbasis prinsip syariah yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) terus menjalankan peran dan tanggung jawab secara optimal dalam memastikan seluruh kegiatan usaha Bank senantiasa berlandaskan prinsip syariah. DPS secara aktif memberikan nasihat, opini, dan rekomendasi kepada Direksi serta melakukan pengawasan secara berkala terhadap implementasi akad, produk, dan proses bisnis.

Sepanjang tahun 2025, DPS juga mendorong penguatan tata kelola syariah (*sharia governance*) melalui peningkatan koordinasi dengan unit terkait, pelaksanaan *review* kepatuhan syariah, serta penguatan fungsi pengendalian internal. Dengan berbagai upaya tersebut, DPS memandang bahwa BRK Syariah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kepatuhan syariah sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Bismillahirrahmanirrahim

All praise and gratitude be to Allah SWT for His abundant grace, guidance, and blessings, which have enabled Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) to navigate a highly dynamic and challenging year in 2025. Amidst global economic uncertainty, elevated risks in the financial industry, and the acceleration of digital transformation, the Company consistently demonstrated positive and stable performance. This achievement is inseparable from the strengthening of business fundamentals, the improvement of financing quality, and the continuous innovation of Sharia principle-based services that are increasingly adaptive to the community's needs.

In line with these developments, the Sharia Supervisory Board (DPS) continues to optimally execute its roles and responsibilities to ensure that all of the Bank's business activities are consistently anchored in Sharia principles. The DPS actively provides advice, opinions, and recommendations to the Board of Directors, alongside conducting periodic oversight regarding the implementation of Sharia contracts (akad), products, and business processes.

Throughout 2025, the DPS also advocated for the strengthening of sharia governance through enhanced coordination with relevant units, the execution of sharia compliance reviews, and the reinforcement of the internal control function. Through these various efforts, the DPS observes that BRK Syariah has demonstrated a strong commitment to maintaining sharia compliance while simultaneously supporting sustainable business growth.

Penguatan Kepatuhan dan Pengawasan Syariah

Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BRK Syariah berperan aktif memastikan bahwa seluruh proses bisnis, termasuk pengembangan produk dan digitalisasi layanan, tetap sejalan dengan prinsip syariah. Melalui 13 (tiga) kali rapat yang dilaksanakan, DPS memberikan opini, rekomendasi, dan saran terkait penyempurnaan akad, implementasi fatwa, serta mitigasi risiko syariah.

Strengthening Sharia Compliance and Supervision

Throughout 2025, the BRK Syariah Sharia Supervisory Board (DPS) played an active role in ensuring that all business processes, including product development and service digitalization, remained aligned with Sharia principles. Through 13 (thirteen) meetings convened, the DPS provided opinions, recommendations, and advice regarding contract (akad) refinement, fatwa implementation, and sharia risk mitigation.

DPS juga mendorong penguatan tata kelola syariah melalui peningkatan fungsi kepatuhan, koordinasi lintas unit, dan literasi syariah di lingkungan Bank. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa transformasi bisnis tidak hanya mendorong kinerja, tetapi juga tetap menjaga kepatuhan dan integritas syariah secara berkelanjutan.

Adapun opini, rekomendasi, dan saran/hal lainnya yang menjadi fokus pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Opini Syariah untuk Fitur Pembayaran QRIS Antarnegara di Aplikasi BRKS *Mobile*
2. Opini Syariah untuk Produk Berkah BRK Syariah (Bersama *Loyalty* untuk Nasabah Bank Riau Kepri Syariah) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah
3. Opini terhadap Pendapatan *Cash* Basis Subsidi *Margin* Pembiayaan KUR
4. Opini Syariah untuk Layanan *Virtual Account* BRK Syariah
5. Opini terhadap Laporan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) tahun 2025
6. Opini untuk Layanan "Bkawan" BRK Syariah (Laku Pandai) Klasifikasi "B"
7. Opini untuk Layanan Tarik Tunai Tanpa Kartu (*Cardless Withdrawal*).

Optimalisasi Pengawasan Syariah dan Transformasi Digital Berkelanjutan

Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah telah mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan syariah secara lebih terstruktur dan adaptif terhadap perkembangan bisnis dan teknologi. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada kesesuaian prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga mencakup evaluasi kebijakan, prosedur, serta integrasi prinsip syariah dalam proses transformasi digital yang terus berkembang.

Optimalisasi tersebut dilakukan melalui penguatan fungsi *review* dan uji petik kepatuhan syariah yang dilaksanakan secara berkala oleh unit *Sharia Compliance*. Hasil pengawasan menjadi dasar bagi DPS dalam memberikan rekomendasi strategis guna memastikan bahwa setiap

The DPS also promoted the strengthening of sharia governance by enhancing the compliance function, cross-unit coordination, and sharia literacy within the Bank. These endeavors were undertaken to ensure that business transformation not only drives performance but also sustainably safeguards sharia compliance and integrity.

The opinions, recommendations, and advice/other matters that became the primary focus in 2025 are as follows:

1. Sharia Opinion on the Cross-Border QRIS Payment Feature within the BRKS Mobile Application.
2. Sharia Opinion on the BRK Syariah Berkah Product (Loyalty Program for Customers of Bank Riau Kepri Syariah) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah.
3. Opinion on the Cash Basis Income of KUR Financing Margin Subsidies.
4. Sharia Opinion on the BRK Syariah Virtual Account Service.
5. Opinion on the 2025 Recovery Plan Report.
6. Opinion on the BRK Syariah "Bkawan" Service (Laku Pandai) Classification "B".
7. Opinion on the Cardless Withdrawal Service.

Optimization of Sharia Supervision and Sustainable Digital Transformation

Throughout 2025, the BRK Syariah Sharia Supervisory Board optimized the implementation of sharia supervision in a more structured manner, adapting to business and technological developments. The supervision was not solely focused on sharia principle compliance in fund collection and distribution but also encompassed the evaluation of policies, procedures, and the integration of sharia principles within the continuously evolving digital transformation processes.

This optimization was executed by strengthening the review function and conducting periodic sharia compliance sampling tests by the Sharia Compliance unit. The results of this supervision served as the strategic foundation for the DPS to issue recommendations

inovasi produk dan layanan digital tetap memenuhi prinsip kehati-hatian serta kesesuaian dengan fatwa dan ketentuan syariah. Dengan demikian, transformasi digital yang dijalankan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, tetapi juga menjaga integritas syariah secara menyeluruh.

DPS juga mendorong penguatan peran sosial Bank melalui pengelolaan dana kebajikan dan zakat yang lebih tepat sasaran dan berdampak. Sinergi antara pengawasan syariah dan transformasi digital diharapkan mampu memperluas akses layanan keuangan syariah yang inklusif, sekaligus memperkuat kontribusi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dengan penerapan *Sharia First Strategy*, DPS menegaskan pentingnya menjadikan prinsip syariah sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas bisnis dan pengembangan teknologi. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat daya saing Perseroan serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan industri perbankan syariah nasional yang berkelanjutan dan berintegritas.

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Pada tahun buku 2025, terjadi perubahan komposisi Dewan Pengawas Syariah. Ketua DPS dijabat oleh Bapak Zulhendri Rais. Sementara itu, Bapak Saifuddin Yuliar mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 6 Juni 2025, sehingga komposisi DPS hingga 31 Desember 2025 terdiri dari 1 (satu) orang.

Perseroan menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kontribusi, dedikasi, serta pemikiran yang telah diberikan oleh Bapak Saifuddin Yuliar selama masa jabatannya dalam memperkuat fungsi pengawasan dan kepatuhan syariah di BRK Syariah.

Apresiasi atas Kinerja

Bersyukur atas capaian kinerja yang telah diraih, kami menyampaikan apresiasi kepada manajemen dan seluruh insan BRK Syariah atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusinya sepanjang tahun 2025. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga kinerja yang sehat, profesional, dan berlandaskan prinsip syariah.

ensuring that every digital product and service innovation continues to adhere to prudential principles and remains compliant with fatwas and sharia regulations. Consequently, the digital transformation undertaken not only enhances efficiency and service quality but also comprehensively safeguards sharia integrity.

The DPS also advocated for strengthening the Bank's social role through the management of benevolence funds and zakat that are more precisely targeted and impactful. The synergy between sharia supervision and digital transformation is expected to broaden access to inclusive sharia financial services, while simultaneously fortifying PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) contribution to sustainable economic development.

By implementing the Sharia First Strategy, the DPS emphasizes the critical importance of establishing sharia principles as the primary foundation in all business activities and technological development. These efforts are expected to strengthen the Company's competitiveness and yield a tangible contribution to the growth of a sustainable and high-integrity national sharia banking industry.

Changes in the Composition of the Sharia Supervisory Board

During the 2025 financial year, a change occurred in the composition of the Sharia Supervisory Board. The position of Chairman of the DPS is held by Mr. Zulhendri Rais. Concurrently, Mr. Saifuddin Yuliar concluded his tenure on June 6, 2025; thus, the composition of the DPS as of December 31, 2025, consists of 1 (one) member.

The Company expresses its profound gratitude and highest appreciation for the contributions, dedication, and insights provided by Mr. Saifuddin Yuliar during his tenure, which have significantly strengthened the supervision and sharia compliance functions at BRK Syariah.

Appreciation for Performance

Grateful for the performance achievements attained, we extend our appreciation to the management and all BRK Syariah personnel for their dedication, hard work, and contributions throughout 2025. This achievement stands as a testament to our collective commitment to sustaining a healthy, professional performance founded strictly upon sharia principles.

Ke depan, diharapkan capaian positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam menyongsong tahun 2026 melalui penguatan inovasi, tata kelola, serta sinergi yang berkelanjutan. Dengan demikian, BRK Syariah dapat terus tumbuh dan berdaya saing di tengah dinamika industri.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan kelancaran dalam setiap langkah, sehingga upaya pengembangan ekonomi syariah dapat memberikan manfaat yang luas serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

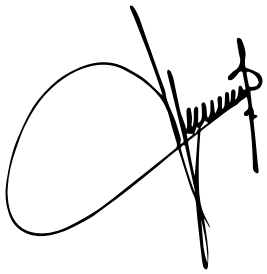
Moving forward, it is expected that these positive achievements can be continuously maintained and elevated as we look ahead to 2026 through the strengthening of innovation, corporate governance, and sustainable synergy. Accordingly, BRK Syariah will continue to grow and remain highly competitive amidst industry dynamics.

May Allah SWT continuously bestow ease, blessings, and smoothness upon every endeavor, so that efforts to develop the sharia economy may yield broad benefits and support sustainable business growth.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 27 April 2026
Pekanbaru, April 27th, 2026

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board



Zulhendri Rais
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

LEMBAR PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
STATEMENT SHEET OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

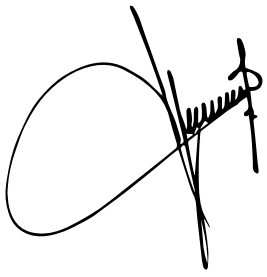
Surat Pernyataan Dewan Pengawas Syariah tentang Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2025 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Statement of The Sharia Supervisory Board Regarding the Responsibility of PT. Bank Riau Kepri Syariah's 2025 Annual Report

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa selama periode laporan tahunan 2025, kami telah melakukan pengawasan yang cermat terhadap kepatuhan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) terhadap prinsip-prinsip syariah. Hasil pengawasan kami menunjukkan bahwa Bank telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya. Namun, untuk memperkuat kepatuhan syariah diperlukan proses pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap setiap produk dan layanan baru yang ditawarkan Bank.

We, the undersigned, hereby declare that during the period of our annual report 2025, we have carefully supervised PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) compliance with sharia principles. The results of our supervision indicate that the Bank has complied with sharia principles in all aspects of its operations. However, to strengthen sharia compliance, a regular monitoring and assessment process is required for each new product and service offered by the Bank.

Pekanbaru, 27 April 2026
Pekanbaru, April 27th, 2026

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board



Zulhendri Rais
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Esteemed Shareholders and Stakeholders

HELWIN YUNUS
Plt. Direktur Utama
Act. President Director

Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan ridha-Nya, sehingga Perseroan mampu melalui tahun 2025 dengan kinerja yang terjaga dan menunjukkan tren pertumbuhan positif. *Shalawat* serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia menuju peradaban yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan.

Kinerja yang dicapai Perseroan pada tahun 2025 merupakan hasil dari komitmen, integritas, dan dedikasi seluruh insan BRK Syariah dalam mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan secara konsisten. Direksi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran atas kontribusi aktifnya dalam menjaga stabilitas operasional serta mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Perseroan akan terus memperkuat fundamental bisnis melalui inovasi produk dan layanan, peningkatan kapabilitas digital, serta optimalisasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan, sekaligus mencerminkan komitmen Perseroan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Perseroan berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kinerja dan arah pengembangan usaha ke depan, serta menjadi sarana untuk memperkuat kepercayaan seluruh pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan pertumbuhan BRK Syariah.

Tinjauan Makro Ekonomi dan Industri Perbankan Tahun 2025

Tahun 2025 diwarnai oleh dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian, dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik serta meningkatnya fragmentasi perdagangan internasional. Kondisi tersebut berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan berada pada kisaran 3,3%, disertai tekanan inflasi yang masih berlangsung meskipun mulai menunjukkan tren penurunan. Situasi ini turut mempengaruhi sentimen pelaku usaha dan arah investasi di berbagai kawasan.

Di tengah tantangan global tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid dengan pertumbuhan sebesar 5,11% pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didukung oleh kuatnya konsumsi domestik, peningkatan investasi, serta kinerja positif di berbagai sektor, khususnya transportasi, jasa, dan keuangan. Stabilitas makroekonomi juga tetap terjaga, tercermin dari inflasi yang berada dalam kisaran sasaran serta kebijakan moneter yang akomodatif guna menjaga momentum pertumbuhan.

All praise and gratitude be to Allah SWT for His abundant grace and blessings, which have enabled the Company to navigate 2025 with sustained performance and a positive growth trajectory. May peace and salutations always be upon the Prophet Muhammad SAW, who guided humanity toward a civilization founded on knowledge and virtues.

The performance achieved by the Company in 2025 is the culmination of the commitment, integrity, and dedication of all BRK Syariah personnel in consistently implementing the established strategies. The Board of Directors extends ours deepest appreciation and gratitude to the entire team for their active contribution in maintaining operational stability and driving sustainable business growth. The Company will continuously fortify its business fundamentals through product and service innovation, the enhancement of digital capabilities, and the optimization of technology to improve efficiency and broaden financial inclusion for the public.

This Annual Report is prepared as a manifestation of management's accountability to the Shareholders and all Stakeholders, while concurrently reflecting the Company's commitment to the principles of transparency, accountability, and good corporate governance. The Company hopes this report provides a comprehensive overview of its performance and future business development direction, and serves as an instrument to strengthen the trust of all stakeholders in the sustainable growth of BRK Syariah.

Macroeconomic and Banking Industry Overview 2025

The year 2025 was characterized by highly uncertain global economic dynamics, driven by persistent geopolitical tensions and increasing fragmentation in international trade. These conditions resulted in a deceleration of global economic growth, estimated at approximately 3.3%, accompanied by ongoing inflationary pressures, albeit showing a downward trend. This situation inherently affected business sentiment and investment directions across various regions.

Amidst these global challenges, the Indonesian economy demonstrated solid resilience, recording a growth of 5.11% in 2025. This growth was underpinned by robust domestic consumption, increased investment, and positive performance across various sectors, particularly transportation, services, and finance. Macroeconomic stability was maintained, as reflected by inflation remaining within the target range and an accommodative monetary policy designed to sustain growth momentum.

Pada lingkup regional, perekonomian Provinsi Riau dan Kepulauan Riau turut menunjukkan kinerja yang positif. Provinsi Riau mencatat pertumbuhan sebesar 4,79%, sementara Provinsi Kepulauan Riau tumbuh lebih tinggi sebesar 6,94%. Pertumbuhan di kedua wilayah tersebut didukung oleh aktivitas konsumsi, investasi, serta kontribusi sektor jasa dan perdagangan yang terus berkembang, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan eksternal dan fluktuasi harga komoditas.

Secara keseluruhan, dinamika ekonomi global, nasional, dan regional tersebut menjadi konteks penting bagi Perseroan dalam merumuskan strategi bisnis yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan memahami berbagai tantangan dan peluang yang ada, Perseroan terus memperkuat peran intermediasi serta meningkatkan kualitas layanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, industri perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang terus tumbuh positif, ditandai dengan peningkatan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan penyaluran pembiayaan yang mencapai level tertinggi sepanjang perkembangan industri. Total aset perbankan syariah nasional tercatat sebesar Rp1.067,73 triliun, tumbuh 8,92% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan yang didukung oleh peningkatan intermediasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Sejalan dengan itu, DPK mencapai Rp829,99 triliun dan pembiayaan sebesar Rp705,22 triliun, dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga pada level yang sehat.

Di tengah dinamika industri tersebut, BRK Syariah terus memperkuat perannya sebagai Bank Pembangunan Daerah yang berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah, khususnya di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Hingga akhir tahun 2025, BRK Syariah mencatat total aset sebesar Rp31,10 triliun, DPK sebesar Rp25,75 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp21,79 triliun. Fokus penyaluran pembiayaan tetap diarahkan pada sektor konsumer serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Analisis Kinerja dan Kebijakan Strategis Bank 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan, Bank secara berkelanjutan melakukan analisis terhadap kinerja tahun 2025 sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan inisiatif strategis ke depan. Analisis ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan strategi bisnis, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memastikan keselarasan antara arah pengembangan Bank dengan dinamika industri perbankan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

On a regional scale, the economies of Riau and Kepulauan Riau Provinces also exhibited positive performance. Riau Province recorded a growth of 4.79%, while Kepulauan Riau Province grew at a higher rate of 6.94%. Growth in both regions was supported by consumption activities, investments, and the continuing development of the services and trade sectors, despite persistent exposure to external challenges and commodity price fluctuations.

Overall, these global, national, and regional economic dynamics formed a critical context for the Company in formulating adaptive and sustainable business strategies. By comprehending the existing challenges and opportunities, the Company continuously strengthened its intermediation role and enhanced service quality to support regional economic growth and deliver value-add to all stakeholders.

Meanwhile, the Islamic banking industry in Indonesia demonstrated sustained positive growth in 2025, characterized by increases in assets, Third-Party Funds (TPF), and financing disbursements, reaching the highest levels in the industry's history. Total national Islamic banking assets were recorded at Rp1,067.73 trillion, growing by 8.92% year-on-year, driven by enhanced intermediation and growing public trust in Islamic financial services. In alignment with this, TPF reached Rp829.99 trillion and financing amounted to Rp705.22 trillion, with financing quality maintained at a healthy level.

Amidst these industry dynamics, BRK Syariah continued to reinforce its role as a Regional Development Bank contributing to the advancement of the Islamic economy, specifically in Riau and Kepulauan Riau Provinces. As of the end of 2025, BRK Syariah recorded total assets of Rp31.10 trillion, TPF of Rp25.75 trillion, and financing of Rp21.79 trillion. Financing disbursement remained strategically focused on the consumer sector and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as the primary engines of the regional economy.

Performance Analysis and Strategic Bank Policies 2025

To support the achievement of the Company's vision and mission, the Bank consistently conducts an analysis of its 2025 performance as a foundation for formulating future strategic policies and initiatives. This analysis functions as an evaluative instrument to assess the effectiveness of business strategy implementation, identify challenges encountered, and ensure alignment between the Bank's development direction and both banking industry dynamics and stakeholder needs.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Bank menetapkan kebijakan dan inisiatif strategis yang difokuskan pada penguatan daya saing dan keberlanjutan kinerja. Kebijakan ini kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran strategis yang disusun dalam bentuk *strategy map* sebagai panduan utama dalam pengelolaan kinerja Perseroan. Peta strategi tersebut mencerminkan keterkaitan antar sasaran yang disusun secara sistematis untuk memastikan seluruh program dan inisiatif berjalan terarah dan terukur.

Adapun *strategy map* Bank mencakup empat perspektif utama yang saling terintegrasi, yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sebagai fondasi penguatan sumber daya manusia dan kapabilitas organisasi, perspektif proses bisnis internal untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional, perspektif pelanggan yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan nasabah, serta perspektif keuangan sebagai ukuran utama keberhasilan kinerja Bank. Melalui pendekatan ini, Bank berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan, memperkuat daya saing, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Bank menjabarkan inisiatif strategis berdasarkan empat perspektif utama tersebut sebagai upaya untuk memastikan pencapaian sasaran bisnis secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Setiap perspektif dalam *strategy map* dirancang untuk saling mendukung dan membentuk rantai nilai yang utuh, mulai dari penguatan fondasi organisasi hingga pencapaian kinerja keuangan yang optimal dengan fokus strategi sebagai berikut:

1. Memperkuat tatanan institusi melalui penerapan *maqashid syariah*, penguatan tata kelola, manajemen talenta, kepemimpinan, budaya kerja, dan desain organisasi dengan struktur yang terbaik.
2. Digitalisasi proses bisnis yang didukung oleh kemampuan Teknologi Informasi.
3. Memperkuat proses bisnis yang *excellent* dan sesuai Prinsip Syariah dalam hal pengembangan produk dan jasa, peningkatan layanan (*service quality*), akselerasi digitalisasi, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas.
4. Adaptif dalam sinergi dan kolaborasi melalui pola kerjasama dengan bank lain (*platform sharing*), sinergi dengan entitas ekonomi syariah, dan sinergi dengan ekosistem digital.
5. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan Nasabah dengan memperhatikan tingkat kepuasan Nasabah serta aksesibilitas produk dan jasa Bank oleh Nasabah.
6. Memperkuat *brand awareness* melalui komunikasi pemasaran yang efektif termasuk melalui pemasaran digital (*digital marketing*) yang mampu menjangkau target bisnis dengan lebih efisien, efektif, dan terukur.

Based on this analysis, the Bank established policies and strategic initiatives focused on strengthening competitiveness and performance sustainability. These policies were subsequently translated into strategic objectives structured within a strategy map serving as the primary guideline for managing the Company's performance. The strategy map reflects the interlinkage between systematically arranged objectives to ensure all programs and initiatives run in a directed and measurable manner.
The Bank's strategy map encompasses four integrated primary perspectives: the learning and growth perspective as the foundation for strengthening human capital and organizational capabilities; the internal business process perspective to ensure operational effectiveness and efficiency; the customer perspective which focuses on enhancing service quality and customer satisfaction; and the financial perspective as the ultimate measure of the Bank's performance success. Through this approach, the Bank is committed to realizing sustainable growth, bolstering competitiveness, and delivering value-add to all stakeholders.

The Bank outlines strategic initiatives based on these four main perspectives to ensure the achievement of business targets in a directed, measurable, and sustainable manner. Each perspective within the strategy map is designed to mutually support and form a comprehensive value chain, from strengthening the organizational foundation to achieving optimal financial performance, with the following strategic focus:

1. Strengthening the institutional framework through the application of *Maqasid al-Sharia*, enhancement of corporate governance, talent management, leadership, corporate culture, and organizational design utilizing optimal structures.
2. Digitalization of business processes supported by robust Information Technology capabilities.
3. Reinforcing excellent business processes compliant with Sharia Principles regarding product and service development, service quality improvement, digitalization acceleration, and the enhancement of efficiency and productivity.
4. Demonstrating adaptability in synergy and collaboration through partnership models with other banks (platform sharing), synergies with Islamic economic entities, and integration within the digital ecosystem.
5. Fulfilling Customer needs and expectations by prioritizing Customer satisfaction levels and enhancing Customer accessibility to the Bank's products and services.
6. Strengthening brand awareness through effective marketing communications, including digital marketing, capable of reaching business targets more efficiently, effectively, and measurably.

7. Meningkatkan pembiayaan khusus sektor UMKM, dana murah (CASA) untuk mendorong efesiensi Bank, serta *fee based income* dengan memanfaatkan digitalisasi Bank.
8. Memperkuat permodalan untuk meningkatkan kapasitas Bank dalam meningkatkan usaha serta menghadapi tantangan dan peluang masa depan.
9. Meningkatkan perolehan laba melalui peningkatan pendapatan dari aktivitas pembiayaan dan/atau penyaluran dana lainnya serta meningkatkan pertumbuhan aset melalui peningkatan *size* bisnis, pemupukan laba Bank, dan aksi korporasi Bank.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Implementasi Kebijakan Bank

Direksi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan arah usaha yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten di seluruh lini organisasi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Direksi tidak hanya berfokus pada perumusan strategi melalui Rencana Bisnis Bank (RBB), tetapi juga memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan strategis dengan pelaksanaan operasional. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Bank, sehingga kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab tantangan usaha sekaligus mengoptimalkan peluang yang ada.

Pada tahun 2025, implementasi kebijakan difokuskan pada penguatan fungsi intermediasi melalui penyaluran pembiayaan yang selektif dan produktif, khususnya pada segmen konsumer dan UMKM. Segmen konsumer tetap menjadi andalan dengan fokus pada pasar Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara pembiayaan UMKM terus ditingkatkan melalui penyaluran KUR iB untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan investasi masyarakat. Selain itu, Perseroan juga memperluas pembiayaan pada sektor komersial, termasuk proyek-proyek pemerintah dan skema sindikasi, serta mengarahkan strategi penghimpunan dana pada peningkatan dana murah (CASA) guna menjaga efisiensi biaya dana dan mendukung pertumbuhan pembiayaan yang berkelanjutan.

Dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, Direksi juga mendorong transformasi digital sebagai bagian dari strategi jangka menengah untuk meningkatkan daya saing dan kualitas layanan. Upaya ini diiringi dengan penguatan kolaborasi dalam ekosistem ekonomi syariah guna menghadirkan layanan yang lebih inovatif dan sesuai

7. Increasing specific financing for the MSME sector, low-cost funds (CASA) to drive Bank efficiency, and fee-based income by leveraging the Bank's digitalization.

8. Strengthening capital to enhance the Bank's capacity for business expansion and to navigate future challenges and opportunities.
9. Boosting profitability by increasing income from financing activities and/or other fund disbursements, and accelerating asset growth through business size expansion, Bank profit accumulation, and corporate actions.

The Role of the Board of Directors in Strategy Formulation and Bank Policy Implementation

The Board of Directors plays a strategic role in ensuring that every formulated policy and business direction is effectively and consistently implemented across all organizational lines. In executing this function, the Board not only focuses on strategy formulation through the Bank Business Plan (RBB) but also ensures a robust connection between strategic planning and operational execution. This approach is undertaken by considering the Bank's internal and external conditions, ensuring that the established policies effectively address business challenges while optimizing available opportunities.

In 2025, policy implementation focused on strengthening the intermediation function through selective and productive financing disbursements, particularly within the consumer and MSME segments. The consumer segment remained a primary driver, focusing on the State Civil Apparatus (ASN) market, while MSME financing was continuously accelerated through the disbursement of KUR iB to support working capital and public investment needs. Furthermore, the Company expanded financing into the commercial sector, including government projects and syndicated schemes, and directed its fund-gathering strategy towards increasing low-cost funds (CASA) to maintain cost of funds efficiency and support sustainable financing growth.

To support successful policy implementation, the Board of Directors also championed digital transformation as an integral component of the medium-term strategy to enhance competitiveness and service quality. This effort was accompanied by strengthened collaboration within the Islamic economic ecosystem to provide

dengan kebutuhan nasabah. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan strategi, Direksi secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi melalui rapat berkala, kunjungan langsung ke unit kantor, serta analisis laporan kinerja harian dan bulanan. Pengawasan ini diperkuat dengan dukungan berbagai Komite strategis di bawah Direksi, yang berperan dalam memberikan rekomendasi dan memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Komite Strategis di bawah Direksi berperan sebagai *second layer of control* dalam memastikan kualitas implementasi kebijakan dan disiplin eksekusi strategi. Komite seperti *Sharia Asset and Liability Management* (SHALMA), Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko (RMCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi (ITSC), Komite Pembiayaan, serta Komite Sumber Daya Insani tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memperkuat proses pengambilan keputusan melalui analisis yang komprehensif dan berbasis risiko. Sinergi antara Direksi dan Komite menjadi elemen penting dalam memastikan terciptanya tata kelola yang efektif, pengelolaan risiko yang optimal, serta pencapaian kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

Pencapaian Kinerja Keuangan (Perbandingan Target dan Realisasi) 2025

BRK Syariah mencatat kinerja yang positif sepanjang tahun 2025. Total aset mencapai Rp31,10 triliun, tumbuh 0,78% dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh peningkatan dana *syirkah* temporer menjadi Rp24,05 triliun atau meningkat 5,85% yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan nasabah. Sementara itu, liabilitas turun 22,35% menjadi Rp3,67 triliun, yang mencerminkan perbaikan struktur pendanaan dan penguatan likuiditas Bank.

Pada tahun 2025, BRK Syariah mencatat pendapatan bersih sebesar Rp1,51 triliun atau tumbuh 7,80% dibandingkan tahun 2024, terutama didorong peningkatan pendapatan bagi hasil. Bank membukukan laba bersih sebesar Rp276,43 miliar dengan kontribusi utama dari Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Secara keseluruhan, kinerja operasional menunjukkan pertumbuhan positif dengan pengelolaan beban yang tetap terjaga.

more innovative services tailored to customer needs. To ensure the effectiveness of strategy execution, the Board of Directors actively conducted monitoring and evaluation via regular meetings, direct visits to work units, and analysis of daily and monthly performance reports. This oversight was reinforced by the support of various strategic Committees under the Board of Directors, which played a pivotal role in providing recommendations and ensuring policy implementation adhered to prudential principles and good corporate governance.

The Strategic Committees under the Board of Directors function as a second layer of control in guaranteeing the quality of policy implementation and the discipline of strategy execution. Committees such as the Sharia Asset and Liability Management (SHALMA), Financing Policy Committee, Risk Management Committee (RMCO), Information Technology Steering Committee (ITSC), Financing Committee, and Human Capital Committee not only execute supervisory functions but also fortify the decision-making process through comprehensive, risk-based analysis. The synergy between the Board of Directors and the Committees constitutes a vital element in ensuring the realization of effective governance, optimal risk management, and the achievement of the Company's sustainable performance.

Financial Performance Achievement (Target vs. Realization Comparison) 2025

BRK Syariah recorded positive performance throughout 2025. Total assets reached Rp31.10 trillion, growing by 0.78% year-on-year, bolstered by an increase in Temporary *Syirkah* Funds to Rp24.05 trillion—a 5.85% increase reflecting heightened customer trust. Concurrently, liabilities decreased by 22.35% to Rp3.67 trillion, reflecting an improvement in the funding structure and the strengthening of the Bank's liquidity.

In 2025, BRK Syariah recorded a net income of Rp1.51 trillion, representing a 7.80% growth compared to 2024, primarily driven by an increase in profit-sharing income. The Bank posted a net profit of Rp276.43 billion, with major contributions originating from Riau and Kepulauan Riau Provinces. Overall, operational performance exhibited positive growth with consistently well-managed expenses.

BRK Syariah senantiasa menjaga kemampuan pemenuhan kewajiban melalui pengelolaan likuiditas dan permodalan yang *prudent*. Pada tahun 2025, FDR tercatat sebesar 84,61% dan CAR sebesar 21,21%, hal ini mencerminkan likuiditas dan permodalan yang kuat serta berada dalam batas ketentuan regulator. Adapun, kualitas aset tercermin dari NPF *Gross* sebesar 3,82% dan NPF Net sebesar 1,48% yang masih terkendali melalui penerapan manajemen risiko yang konsisten. Sementara itu, rasio rentabilitas menunjukkan ROA sebesar 1,19%, ROE sebesar 8,50%, NI sebesar 5,12%, serta BOPO sebesar 84,86%, yang mengindikasikan kinerja yang terjaga dengan ruang peningkatan efisiensi ke depan.

Berdasarkan penilaian OJK, BRK Syariah memperoleh Peringkat Komposit 3 (Cukup Sehat), sama dengan capaian tahun 2024. Hasil tersebut mencerminkan kondisi Bank yang cukup sehat dan mampu menghadapi dinamika kondisi usaha serta faktor eksternal.

Pencapaian kinerja pada tahun ini mencerminkan hasil kerja kolektif yang positif dan menjadi modal penting bagi BRK Syariah untuk memasuki tahun 2026 dengan keyakinan yang lebih kuat. BRK Syariah berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan kinerja bisnis, serta manajemen risiko yang *prudent*. Seluruh upaya tersebut akan terus didukung oleh sinergi insan BRK Syariah, nasabah, serta para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai kinerja yang semakin optimal dan berkelanjutan.

Dinamika Tantangan dan Strategi Mitigasi Risiko

Sepanjang tahun 2025, BRK Syariah menghadapi dinamika tantangan usaha yang semakin kompleks, baik dari sisi persaingan industri maupun tekanan terhadap likuiditas. Peningkatan kompetisi di industri perbankan, khususnya dalam penghimpunan dana, serta keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan berbiaya rendah menjadi isu utama yang perlu dikelola secara cermat. Selain itu, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak pada berkurangnya dana giro Pemerintah Daerah turut mempengaruhi struktur pendanaan Perseroan. Dalam merespon kondisi tersebut, Perseroan menerapkan strategi mitigasi risiko likuiditas melalui optimalisasi penghimpunan dana berbasis tabungan dengan biaya yang lebih efisien, sehingga stabilitas pendanaan tetap terjaga.

BRK Syariah consistently maintains its capability to meet obligations through prudent liquidity and capital management. In 2025, the FDR was recorded at 84.61% and the CAR at 21.21%, reflecting robust liquidity and capitalization well within regulatory limits. Additionally, asset quality was reflected by a Gross NPF of 3.82% and a Net NPF of 1.48%, remaining well-controlled through the consistent application of risk management. Meanwhile, profitability ratios showed an ROA of 1.19%, an ROE of 8.50%, a NI of 5.12%, and a BOPO of 84.86%, indicating preserved performance with room for future efficiency improvements.

Based on the OJK assessment, BRK Syariah achieved a Composite Rating of 3 (Fairly Sound), consistent with the achievement in 2024. This result reflects the Bank's fairly sound condition and its ability to navigate business dynamics and external factors.

This year's performance achievements reflect positive collective efforts and serve as vital capital for BRK Syariah to enter 2026 with stronger confidence. BRK Syariah is committed to sustaining its growth momentum through enhanced service quality, strengthened business performance, and prudent risk management. All iniatives will continue to be supported by the synergy of BRK Syariah personnel, customers, and stakeholders to achieve increasingly optimal and sustainable performance.

Dynamics of Challenges and Risk Mitigation Strategies

Throughout 2025, BRK Syariah faced increasingly complex business dynamics and challenges, both in terms of industry competition and liquidity pressures. Heightened competition in the banking industry, particularly in fund accumulation, coupled with limited access to low-cost funding sources, emerged as primary issues requiring meticulous management. Additionally, changes in Central Government policies resulting in a reduction of Regional Government demand deposits inherently impacted the Company's funding structure. In response to these conditions, the Company implemented liquidity risk mitigation strategies by optimizing the accumulation of savings-based funds with more efficient costs, thereby maintaining funding stability.

Dari sisi persaingan, ekspansi perbankan nasional ke wilayah Riau dan Kepulauan Riau dengan dukungan layanan berbasis teknologi menjadi tantangan yang signifikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan mempercepat transformasi digital dengan menghadirkan berbagai inovasi layanan, seperti BRKS *Mobile, Cash Management System* (CMS), serta penguatan layanan pembayaran digital melalui QRIS dan *merchant* QRIS. Langkah ini merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko bisnis guna meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan layanan, serta memberikan pengalaman perbankan yang lebih efisien dan terintegrasi bagi nasabah.

From a competitive standpoint, the expansion of national banks into the Riau and Kepulauan Riau regions, supported by technology-based services, presented a significant challenge. To anticipate this, the Company accelerated its digital transformation by launching various service innovations, such as BRKS Mobile, Cash Management System (CMS), and the enhancement of digital payment services via QRIS and QRIS merchants. This measure constitutes part of the business risk mitigation strategy aimed at elevating competitiveness, broadening service reach, and providing a more efficient and integrated banking experience for customers.

Selain itu, tantangan persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah yang dinilai belum memiliki diferensiasi yang kuat dibandingkan dengan produk konvensional juga menjadi perhatian utama. Untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan secara aktif melakukan edukasi dan literasi keuangan syariah melalui berbagai inisiatif, termasuk kolaborasi dengan tokoh agama, keterlibatan dalam ekosistem ekonomi syariah, serta pengembangan layanan inklusif seperti *branchless banking* dan Tabungan SINAR LAKU. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keunggulan produk berbasis akad syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah.

Furthermore, the challenge of public perception regarding Islamic banking products—often deemed lacking strong differentiation compared to conventional products—remained a primary focus. To address this, the Company actively engaged in Islamic financial education and literacy through various initiatives, including collaborations with religious figures, involvement in the Islamic economic ecosystem, and the development of inclusive services such as branchless banking and the SINAR LAKU Savings account. These efforts are intended to enhance public comprehension regarding the superiority of Sharia contract-based products that align with both their needs and Sharia principles.

Dalam menghadapi tantangan pertumbuhan pembiayaan yang sebelumnya relatif terbatas, Perseroan juga melakukan langkah mitigasi melalui penguatan strategi penyaluran pembiayaan yang lebih terfokus dan selektif. Peningkatan pembiayaan konsumer pada segmen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengembangan pembiayaan pra-pensiun, ekspansi produk gadai emas (*rahn*), serta penguatan pembiayaan sindikasi dan KUR iB menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan yang lebih baik. Dengan berbagai strategi mitigasi tersebut, Perseroan optimis dapat menjaga stabilitas kinerja, meningkatkan daya saing, serta memperkuat posisi di industri perbankan syariah secara berkelanjutan.

In confronting the challenge of previously constrained financing growth, the Company also executed mitigation measures by strengthening a more focused and selective financing disbursement strategy. The enhancement of consumer financing in the State Civil Apparatus (ASN) segment, the development of pre-retirement financing, the expansion of gold pawning (*rahn*) products, and the fortification of syndicated financing and KUR iB were the primary catalysts for driving improved financing growth. Armed with these diverse mitigation strategies, the Company is optimistic about maintaining performance stability, elevating competitiveness, and solidifying its position in the Islamic banking industry sustainably.

Prospek Usaha

Pada tahun 2026, perekonomian global diperkirakan masih diwarnai oleh tingkat ketidakpastian yang tinggi, seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, serta arah kebijakan ekonomi yang cenderung proteksionis di berbagai negara. Kondisi tersebut berimplikasi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang diprakirakan menurun dari 3,3% pada tahun 2025 menjadi 3,2% pada tahun 2026. Selain itu, volatilitas pasar keuangan dan potensi gangguan rantai pasok global turut menjadi faktor yang perlu dicermati oleh pelaku industri, termasuk sektor jasa keuangan.

Di tengah dinamika tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan prospek yang tetap resilien. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 diproyeksikan berada dalam kisaran 4,9%–5,7%, didukung oleh kuatnya permintaan domestik, peningkatan investasi, serta sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Stabilitas inflasi yang diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% turut memberikan ruang bagi terjaganya daya beli masyarakat dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Dari sisi sektoral, pertumbuhan diperkirakan akan ditopang oleh sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta konstruksi, sementara sektor industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Sejalan dengan prospek tersebut, sektor jasa keuangan nasional diperkirakan akan terus menunjukkan kinerja yang positif. Otoritas Jasa Keuangan memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan pada kisaran 10%-12% dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 7%-9% pada tahun 2026. Hal ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk mendukung ekspansi usaha di berbagai sektor produktif. Di sisi lain, penguatan struktur permodalan, peningkatan kualitas tata kelola, serta akselerasi transformasi digital dan mitigasi risiko, termasuk risiko siber, menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan daya tahan industri keuangan.

Dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan tersebut, BRK Syariah memandang tahun 2026 sebagai momentum strategis untuk memperkuat peran sebagai lembaga keuangan syariah yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Perseroan akan terus mengoptimalkan fungsi intermediasi melalui penyaluran pembiayaan yang selektif dan berkualitas, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan sejalan dengan prinsip syariah, termasuk penguatan pembiayaan UMKM dan sektor unggulan daerah.

Business Prospects

In 2026, the global economy is projected to remain clouded by high levels of uncertainty, alongside escalating geopolitical tensions, international trade fragmentation, and the protectionist trajectory of economic policies in various nations. These conditions are expected to result in a deceleration of global economic growth, projected to decline from 3.3% in 2025 to 3.2% in 2026. Furthermore, financial market volatility and potential global supply chain disruptions serve as factors demanding close scrutiny by industry players, including the financial services sector.

Amidst ini dynamics, the Indonesian economy demonstrates resilient prospects. National economic growth in 2026 is projected to range between 4.9%–5.7%, bolstered by robust domestic demand, increased investment, and policy synergy between the Government and Bank Indonesia in preserving macroeconomic stability. Inflation stability, anticipated to remain controlled within the target range of 2.5±1%, also provides ample room for sustaining public purchasing power and economic activity. From a sectoral perspective, growth is expected to be supported by the transportation and warehousing, information and communication, financial services, and construction sectors, while the manufacturing industry remains the backbone of the national economy.

In line with ini prospects, the national financial services sector is expected to continuously demonstrate positive performance. The Financial Services Authority (OJK) projects bank financing growth in the range of 10%–12% and Third-Party Funds growth of 7%–9% in 2026. This reflects an escalating need for financing to support business expansion across various productive sectors. Conversely, the strengthening of capital structures, enhancement of governance quality, and the acceleration of digital transformation and risk mitigation, including cyber risk, remain pivotal factors in maintaining the stability and resilience of the financial industry.

Considering these opportunities and challenges, BRK Syariah views 2026 as a strategic momentum to fortify its role as an adaptive, innovative, and highly competitive Islamic financial institution. The Company will continuously optimize its intermediation function through selective and high-quality financing disbursements, prioritizing productive sectors with high growth potential that align with Sharia principles, including the reinforcement of MSME financing and premier regional sectors.

Perseroan juga akan mempercepat pengembangan layanan keuangan berbasis digital guna meningkatkan akses dan kualitas layanan kepada nasabah, sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah di wilayah operasional. Penguatan manajemen risiko, peningkatan efisiensi operasional, serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik akan terus menjadi prioritas dalam menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan strategi tersebut, BRK Syariah optimis dapat menjaga pertumbuhan kinerja, memperkuat kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah, serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh posisi Perseroan sebagai salah satu bank terbesar dalam *peer group* Bank Umum Syariah dan terus memperkuat perannya dalam kelompok Bank Umum Syariah melalui peningkatan skala usaha dan daya saing.

Optimisme ini juga ditopang oleh kelengkapan produk dan jasa layanan keuangan berbasis syariah yang inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta dukungan kuat dari Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham yang berkomitmen menjaga peran Perseroan sebagai bank bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang, sekaligus mendorong penguatan permodalan untuk ekspansi usaha ke depan. Selain itu, jaringan distribusi yang luas dengan 179 kantor (1 Kantor Pusat, 23 Kantor Cabang, 40 Kantor Cabang Pembantu, 49 Kantor Kedai, 46 Kantor Kas, 1 BUTIK, dan 19 *Payment Point*) yang tersebar di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, hingga DKI Jakarta menjadi kekuatan strategis dalam memperluas akses layanan dan meningkatkan kedekatan dengan nasabah, sehingga secara keseluruhan memperkuat langkah Perseroan dalam mewujudkan visi sebagai bank syariah yang terpercaya, berdaya saing, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Komitmen Penguatan Tata Kelola untuk Kinerja Berkelanjutan

Komitmen BRK Syariah dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) menjadi fondasi utama dalam memastikan kinerja Perseroan yang berkelanjutan, sehat, dan berintegritas. Perseroan memandang GCG tidak hanya sebagai pemenuhan aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi sebagai instrumen strategis dalam menciptakan nilai tambah jangka panjang, meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta memperkuat daya saing di industri perbankan syariah. Oleh karena itu, pengembangan praktik GCG terus dilakukan secara konsisten dengan mengacu pada *best practices* serta prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

The Company will also expedite the development of digital-based financial services to enhance access and service quality for customers, while simultaneously expanding Islamic financial inclusion across its operational territories. The fortification of risk management, enhancement of operational efficiency, and the implementation of good corporate governance will remain paramount priorities in sustaining healthy and continuous performance.

With this strategy, BRK Syariah is optimistic about sustaining performance growth, amplifying its contribution to regional economic development, and delivering sustainable value-add to all stakeholders, supported by the Company's position as one of the largest banks within the Islamic Commercial Bank peer group, continuously reinforcing its role through scaled business operations and heightened competitiveness.

This optimism is also underpinned by a comprehensive suite of innovative Sharia-based financial products and services tailored to community needs, as well as robust support from the Regional Government as Shareholders committed to preserving the Company's role as a bank for all strata of society regardless of background, while concurrently driving capital strengthening for future business expansion. Additionally, a vast distribution network encompassing 179 offices (1 Head Office, 23 Branch Offices, 40 Sub-Branch Offices, 49 Kedai Offices, 46 Cash Offices, 1 BUTIK, and 19 Payment Points) distributed across Riau Province, Kepulauan Riau, and DKI Jakarta, serves as a strategic strength in expanding service access and fostering closer customer proximity.

Commitment to Strengthening Governance for Sustainable Performance

BRK Syariah's commitment to reinforcing Good Corporate Governance (GCG) serves as the primary foundation for ensuring the Company's performance remains sustainable, sound, and characterized by integrity. The Company perceives GCG not merely as a fulfillment of regulatory compliance, but as a strategic instrument for creating long-term value, elevating shareholder and stakeholder trust, and amplifying competitiveness within the Islamic banking industry. Therefore, the development of GCG practices is continuously executed with consistency, referencing best practices alongside the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Dalam implementasinya, Perseroan mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu *Governance Structure, Governance Process*, dan *Governance Outcome*, ke dalam seluruh aspek operasional dan pengambilan keputusan. Ketiga pilar ini memastikan bahwa tata kelola tidak hanya terbangun secara struktural, tetapi juga berjalan efektif dalam proses bisnis serta menghasilkan kinerja yang optimal. Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan *self assessment* atas penerapan GCG dengan hasil peringkat komposit 3, yang menunjukkan bahwa implementasi tata kelola telah berjalan dengan baik dan memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan, sekaligus mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Dalam mendukung penguatan tata kelola tersebut, Direksi didukung oleh berbagai Komite yang berfungsi sebagai mitra strategis dalam memberikan rekomendasi, pengawasan, dan arahan kebijakan sesuai dengan ketentuan *regulator* maupun kebutuhan internal Perseroan. Selain komite yang diwajibkan, Perseroan juga membentuk komite tambahan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan kualitas pengambilan keputusan. Evaluasi kinerja Komite yang dilakukan secara berkala menunjukkan bahwa seluruh Komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, serta secara konsisten memberikan masukan yang bersifat taktis dan strategis, sehingga berkontribusi nyata dalam memperkuat kualitas tata kelola dan mendukung pencapaian kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

Komitmen ESG sebagai Pilar Keberlanjutan dan Penciptaan Nilai Jangka Panjang

Komitmen BRK Syariah dalam menerapkan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*) menjadi pilar utama dalam mewujudkan keberlanjutan usaha sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Perseroan memandang ESG tidak hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi sebagai pendekatan strategis dalam menjalankan kegiatan usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, memperhatikan aspek sosial, serta menjunjung tinggi tata kelola yang baik. Implementasi ini diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, pengembangan bisnis yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh aspek operasional, sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan kerangka Taksonomi Hijau Indonesia.

In its implementation, the Company integrates three primary pillars, namely Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome, into all operational facets and decision-making processes. These three pillars ensure that governance is not only structurally established but also functions effectively within business processes and yields optimal performance. Throughout 2025, the Company conducted a self-assessment on GCG implementation, resulting in a composite rating of 3, indicating that governance implementation has proceeded effectively and meets the established principles, while reflecting a balance between business growth and the application of prudential principles.

In supporting this governance enhancement, the Board of Directors is backed by various Committees functioning as strategic partners in providing recommendations, oversight, and policy direction in accordance with regulatory stipulations and internal Company needs. Beyond the mandatory committees, the Company also established supplementary committees to augment control effectiveness and the quality of decision-making. Periodic Committee performance evaluations indicate that all Committees have optimally executed their duties and responsibilities, consistently offering tactical and strategic insights, thereby tangibly contributing to the enhancement of governance quality and the realization of the Company's sustainable performance.

ESG Commitment as a Pillar of Sustainability and Long-Term Value Creation

BRK Syariah's commitment to applying Environmental, Social, and Governance (ESG) principles stands as a central pillar in materializing business sustainability while generating long-term value for all stakeholders. The Company views ESG not simply as regulatory compliance, but as a strategic approach to conducting business operations that are environmentally responsible, socially conscious, and uphold excellent governance. This implementation is actualized through sustainable resource management, business development that evaluates social and environmental impacts, and the application of transparency and accountability across all operational domains, in alignment with regulations set by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Green Taxonomy framework.

Dalam operasionalnya, Perseroan terus menanamkan budaya keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari DNA organisasi, dengan menjadikan ESG sebagai landasan dalam setiap proses bisnis dan pengambilan keputusan. Komitmen ini tidak hanya diterapkan secara internal, tetapi juga diwujudkan melalui peran aktif Perseroan dalam mendukung nasabah untuk bertransisi menuju praktik keuangan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, Perseroan berkontribusi dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif, adaptif, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, Perseroan juga secara konsisten mengembangkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terstruktur dan berkelanjutan. Program tersebut mengacu pada empat prinsip utama *community relation*, yaitu *community, environment, workplace*, dan *marketplace,* serta diperkuat oleh lima pilar utama yang meliputi pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dukungan terhadap kesehatan, pelestarian seni dan budaya, serta konservasi lingkungan. Melalui pendekatan ini, Perseroan tidak hanya berperan sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan nasional yang inklusif serta berkelanjutan.

Penguatan Sumber Daya Insani untuk Mendorong Kinerja dan Produktivitas

Penguatan Sumber Daya Insani (SDI) menjadi fokus utama Bank dalam mendukung pencapaian kinerja dan produktivitas yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui pengelolaan SDI yang terarah dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, khususnya dalam menerjemahkan kebutuhan kompetensi ke dalam program pendidikan dan pelatihan yang relevan. Dengan demikian, pengembangan SDI senantiasa selaras dengan strategi bisnis Bank dan kebutuhan unit kerja, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Secara berkelanjutan, Bank menerapkan kerangka pengelolaan SDI yang terintegrasi melalui prinsip *Recruit Right, Develop Right, Perform Right,* dan *Reward Right*. Kerangka ini memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan SDI dilaksanakan secara efektif dan berbasis merit, mulai dari proses rekrutmen yang selektif,

In its operations, the Company continuously embeds a culture of sustainable finance as part of its organizational DNA, positioning ESG as the foundation for every business process and decision. This commitment is not solely applied internally but is also manifested through the Company's active role in supporting customers as they transition toward more sustainable financial practices. Consequently, the Company contributes to constructing an inclusive and adaptive financial ecosystem capable of propelling economic growth that is harmonious with sustainability principles and social welfare.

As part of its social and environmental responsibility, the Company consistently develops structured and sustainable Corporate Social Responsibility (CSR) programs. These programs adhere to the four core principles of community relations community, environment, workplace, and marketplace, and are fortified by five primary pillars comprising education, community empowerment, health support, arts and culture preservation, and environmental conservation. Through this approach, the Bank functions not only as a financial institution but also as a developmental partner actively contributing to elevating the community's quality of life.

Strengthening Human Capital to Drive Performance and Productivity

Strengthening Human Capital (HC) constitutes a primary focus for the Bank in supporting the achievement of sustainable performance and productivity. This endeavor is executed through directed HC management by optimizing all available resources, specifically by translating competency requirements into highly relevant education and training programs. Consequently, HC development continuously aligns with the Bank's business strategy and work unit requirements, ensuring a tangible contribution to organizational performance enhancement.

The Bank sustainably implements an integrated HC management framework through the principles of Recruit Right, Develop Right, Perform Right, and Reward Right. This framework ensures that every phase of HC management is executed effectively on a meritocratic basis, from selective recruitment and directed competency

pengembangan kompetensi yang terarah, penilaian kinerja yang objektif, hingga pemberian penghargaan yang adil dan kompetitif. Pendekatan ini juga diperkuat dengan upaya membangun budaya kerja yang adaptif dan produktif dalam menghadapi dinamika era *next normal*.

Lebih lanjut, peningkatan produktivitas SDI didorong melalui pemenuhan kapabilitas dan kapasitas karyawan secara optimal, yang didukung oleh penerapan strategi remunerasi berbasis kinerja dengan prinsip *positive consequence management*. Melalui pendekatan ini, Bank berupaya menciptakan lingkungan kerja yang mendorong setiap karyawan untuk memberikan kinerja terbaik secara konsisten. Dengan demikian, SDI tidak hanya berperan sebagai pendukung operasional, tetapi juga menjadi pilar strategis dalam menciptakan keunggulan kompetitif serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan Bank.

Teknologi Informasi dalam Mendukung Inovasi dan Ketahanan Digital

BRK Syariah secara berkelanjutan melaksanakan transformasi Teknologi Informasi (TI) sebagai bagian dari upaya mendukung inovasi layanan perbankan serta memperkuat ketahanan digital. Transformasi ini difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia di bidang TI, penyempurnaan proses kerja, pembaruan teknologi, serta penguatan keamanan siber. Melalui langkah tersebut, Bank berupaya meningkatkan kapabilitas dan keandalan sistem TI agar mampu menjawab kebutuhan bisnis yang terus berkembang serta memberikan layanan yang aman, cepat, dan efisien kepada nasabah.

Sepanjang tahun 2025, BRK Syariah terus melakukan penguatan tata kelola TI melalui penyusunan, penerbitan, dan pembaruan kebijakan serta prosedur operasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses kerja TI berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku serta mengacu pada *best practice* dan standar internasional. Di samping itu, Bank juga secara konsisten meningkatkan kompetensi Sumber Daya Insani melalui pelatihan berkelanjutan serta pengembangan tenaga profesional TI.

development, to objective performance appraisals and the provision of fair and competitive remuneration. This approach is further reinforced by efforts to cultivate an adaptive and productive work culture capable of navigating the dynamics of the next normal era.

Furthermore, HC productivity elevation is propelled by the optimal fulfillment of employee capabilities and capacity, supported by the application of performance-based remuneration strategies operating under the principle of positive consequence management. Through this methodology, the Bank strives to cultivate a work environment that inspires every employee to consistently deliver their absolute best performance. Therefore, HC serves not only as an operational enabler but as a strategic pillar in engineering competitive advantage and safeguarding the continuity of the Bank's growth.

Information Technology in Supporting Innovation and Digital Resilience

BRK Syariah continuously executes Information Technology (IT) transformation as part of its overarching effort to drive banking service innovation and fortify digital resilience. This transformation targets the development of IT human resources, the refinement of workflows, technological modernization, and the fortification of cybersecurity. Through these strategic steps, the Bank endeavors to enhance IT system capability and reliability to meet perpetually evolving business demands and to deliver secure, rapid, and highly efficient services to customers.

Throughout 2025, BRK Syariah continuously strengthened its Information Technology (IT) governance through the formulation, issuance, and updating of policies and standard operating procedures. This initiative was undertaken to ensure that all IT operational workflows strictly comply with prevailing regulatory provisions while adhering to industry best practices and international standards. Furthermore, the Bank consistently enhances the competencies of its Human Capital through continuous training and the professional development of its IT personnel.

Sejalan dengan meningkatnya risiko keamanan siber dan tuntutan digitalisasi, BRK Syariah juga melakukan modernisasi infrastruktur teknologi secara berkelanjutan, termasuk penguatan sistem keamanan informasi serta pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak. Pengembangan aplikasi digital pendukung juga terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Selain itu, Bank memastikan pelaporan penerapan TI kepada otoritas terkait dilaksanakan secara tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan dan transparansi. Direksi bersama Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan dan memastikan bahwa strategi pengembangan TI berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan dukungan tersebut, BRK Syariah berkomitmen untuk terus memperkuat peran Teknologi Informasi sebagai *supporting unit* dalam mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, serta memperkokoh ketahanan digital Bank secara berkelanjutan.

Perubahan Susunan Anggota Direksi

Pada tahun 2025, Perseroan melakukan penyesuaian komposisi Direksi yang ditetapkan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS-LB No.03 tanggal 28 April 2025, yaitu pengangkatan Sdr. Helwin Yunus sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama dan berakhirnya masa jabatan Sdr. M. A. Suharto sebagai Direktur Dana & Jasa serta Sdr. Said Syamsuri sebagai Direktur Operasional yang efektif sejak 14 September 2025. Perubahan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjaga kesinambungan kepemimpinan dan memperkuat struktur organisasi guna mendukung kinerja Perseroan secara berkelanjutan.

Direksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Sdr. M. A. Suharto dan Sdr. Said Syamsuri atas dedikasi, kontribusi, dan pengabdian yang telah diberikan selama masa jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Semoga segala upaya dan karya yang telah ditorehkan menjadi bagian penting dalam perjalanan dan pertumbuhan Perseroan ke depan.

Dengan demikian komposisi Direksi BRK Syariah hingga akhir tahun buku 2025 adalah sebagai berikut:

Plt. Direktur Utama	: Helwin Yunus
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	: Fajar Restu Febriansyah

In alignment with escalating cybersecurity risks and the demands of digitalization, BRK Syariah consistently undertakes the continuous modernization of its technological infrastructure. This encompasses the reinforcement of information security systems, as well as the upgrading of both hardware and software. The development of supporting digital applications is also persistently advanced to enhance operational efficiency and service quality. Furthermore, the Bank ensures that the reporting of IT implementation to the relevant regulatory authorities is executed in a timely manner as a manifestation of strict regulatory compliance and transparency. The Board of Directors, in conjunction with the Board of Commissioners, actively exercises oversight and ensures that the IT development strategy progresses in accordance with the predetermined targets. Fortified by this support, BRK Syariah is resolutely committed to continuously strengthening the function of Information Technology as a supporting unit to drive innovation, elevate competitiveness, and solidify the Bank's digital resilience on a sustainable basis.

Changes in the Composition of the Board of Directors

In 2025, the Company adjusted the composition of the Board of Directors, established by the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB) No. 03 dated April 28, 2025, which included the appointment of Mr. Helwin Yunus as the Acting (Plt.) President Director, and concluded the tenure of Mr. M. A. Suharto as Director of Funds & Services, as well as Mr. Said Syamsuri as Director of Operations, effective September 14, 2025. These modifications were executed to preserve leadership continuity and reinforce the organizational structure to support the Company's performance sustainably.
The Board of Directors extends its highest appreciation and deepest gratitude to Mr. M. A. Suharto and Mr. Said Syamsuri for their immense dedication, profound contribution, and unwavering service during their tenure as Directors of the Company. May all their endeavors and distinguished achievements remain a vital chapter in the Company's journey and future growth.

Consequently, the composition of the BRK Syariah Board of Directors as of the end of the 2025 financial year is as follows:

Act. President Director	: Helwin Yunus
Director of Compliance & Risk Management	: Fajar Restu Febriansyah

Apresiasi dan Penutup

Direksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pemegang Saham, Nasabah, karyawan, mitra usaha, serta masyarakat luas atas kepercayaan dan dukungan yang terus diberikan kepada BRK Syariah. Capaian kinerja Perseroan hingga saat ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan, serta kepercayaan tinggi dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, khususnya para Nasabah, yang senantiasa menjadikan BRK Syariah sebagai mitra keuangan yang andal dan terpercaya. Dukungan tersebut menjadi fondasi penting bagi Perseroan untuk terus bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Direksi juga menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atas arahan, saran, serta pengawasan yang konstruktif dalam mendorong peningkatan kinerja Perseroan.

Semoga seluruh pencapaian yang telah diraih dapat menjadi *legacy*, amal dan ibadah bagi kita semua, serta menjadi landasan untuk terus memperkuat peran BRK Syariah sebagai bank milik Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi dalam mewujudkan komitmen bersama menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Appreciation and Closing

The Board of Directors conveys its highest appreciation and profound gratitude to all Shareholders, Customers, employees, business partners, and the wider public for their unwavering trust and continuous support extended to BRK Syariah. The Company's performance milestones to date are inextricably linked to the formidable synergy among all stakeholders, as well as the profound trust placed in us by the Regional Government and the community, specifically our Customers, who consistently choose BRK Syariah as a reliable and highly trusted financial partner. This unparalleled support forms the critical foundation for the Company to continue growing and expanding sustainably.

The Board of Directors also extends its sincere tribute to the Board of Commissioners and the Shareholders for their constructive directives, counsel, and oversight in propelling the enhancement of the Company's performance.

May all the milestones achieved serve as a legacy, a source of merit, and an act of worship for us all, acting as the bedrock to perpetually strengthen BRK Syariah's role as a highly competitive Regional Government-owned bank, actualizing our shared commitment toward inclusive and sustainable growth.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 27 April 2026
Pekanbaru, April 27th, 2026

Direksi BRK Syariah
BRK Syariah Board of Directors

Helwin Yunus
Plt. Direktur Utama
Act. President Director

Fajar Restu Febriansyah
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Director of Compliance & Risk Management

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS APPROVAL SHEET

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2025 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Statement of The Board of Commissioner and Directors Regarding of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Responsibility Annual Report 2025

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun 2025 telah dibuat secara lengkap dan benar, serta bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that all information in the Annual Report of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the year 2025 has been made completely and correctly, and take full responsibility for the correctness of the contents of the company's Annual Report. Thus this statement is made with truth.

Pekanbaru, 27 April 2026
Pekanbaru, April 27th, 2026

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Roy Prakoso
Komisaris Independen
Independent Commissioner

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Helwin Yunus
Plt. Direktur Utama
Act. President Director

Fajar Restu Febriansyah
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Director of Compliance & Risk Management



PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE



IDENTITAS PERUSAHAAN
KEY CORPORATE IDENTITY



Nama Perusahaan
Company Name

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)

Nama Panggilan
Call Name

BRK Syariah

Perubahan Nama Bank BRK Syariah (Perseroda)
Corporate Name Changes of Bank BRK Syariah (Perseroda)

Sejak didirikan sampai saat ini, Bank mengalami 3 (tiga) kali perubahan nama sejak berdiri pada tahun 1966 yaitu:

1. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau tahun 2002
2. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BPD Riau Kepri) tahun 2010
3. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau yang disebut BRK Syariah tahun 2022

From its establishment up to the present, the Bank has undergone 3 (three) name changes since its inception in 1966, namely:

1. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau in 2002
2. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BPD Riau Kepri) in 2010
3. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), also known as BRK Syariah, in 2022

Status Perusahaan
Company Status

BUMD dalam bentuk Perusahaan Perseroan Daerah
BUMD in the Form of a Regional Corporation

Bidang Usaha
Business Field

Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
Commercial Bank Based on Sharia Principles



Tanggal Pendirian
Company Establishment

1 April 1966 | April 1,1966

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Undang-Undang No.13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah
Law no. 13 of 1962 regarding Regional Development Bank

Kepemilikan
Ownership

1. Pemerintah Provinsi Riau 42,93% (Seri A)
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 0,99% (Seri A)
3. Pemerintah Kota/Kabupaten se-Riau dan Kepri 55,50% (Seri A)
4. Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri 0,58% (Seri B)

1. Riau Provincial Government 42,93% (Series A)
2. Kepulauan Riau Provincial Government 0.99% (Series A)
3. City/Regency Government of Riau and Kepri 55,50% (Series A)
4. Amanah Riau Kepri Syariah Cooperative Consumer 0.58% (Series B)



Jaringan Kantor
Office Network Data

179 Jaringan Kantor	179 Office Networks
- 1 Kantor Pusat	- 1 Head Office
- 23 Kantor Cabang	- 23 Branch Offices
- 40 Kantor Cabang Pembantu	- 40 Sub Branch Offices
- 49 Kantor Kedai	- 49 Kedai Offices
- 46 Kantor Kas	- 46 Cash Office
- 1 BUTIK	- 1 BUTIK
- 19 *Payment Point*	- 19 Payment Points



Modal Dasar
Authorized capital

Rp 4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah)
IDR.4,000,000,000,000.- (four trillion rupiah)

Modal Ditempatkan & Disetor Penuh
Issued capital & Fully Paid

Rp1.209.260.700.000,- (satu triliun dua ratus sembilan miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
IDR 1.209.260.700.000.- (one trillion two hundred nine billion two hundred sixty million seven hundred thousand rupiahs).



Jumlah Pegawai
Number of Employees

2.988 orang | 2.988 people

Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretary

T. M. Fadhly Kholis

Email: corsec@brksyariah.co.id
Telp : (0761) 47070



Alamat Kantor Pusat
Headquarters Address

Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah,
Jl. Jenderal Sudirman No. 462
Pekanbaru 28116 PO Box 1102
Telp: (0761) 47070

Situs Web
Website
www.brksyariah.co.id

Situs Web Aduan
Complaint Portal
bit.ly/PengaduanBRKSyariah

Call Center

Call Center 1500470

WhatsApp:
LAILA 08117575470

callcenter@brksyariah.co.id,

Media Sosial
Social media

BRK Syariah
BRK Syariah
brksyariahid
brksyariahid
bank_brksyariah

JARINGAN KANTOR DAN PETA WILAYAH OPERASIONAL BRK SYARIAH
OFFICE NETWORK AND OPERATIONAL AREA MAP OF BRK SYARIAH

Tabel Jaringan Kantor BRK Syariah Tahun 2021-2025
Table of BRK Syariah Office Network for 2021-2025

Keterangan	2025	2024	2023	2022	2021	Information
Total Jaringan Kantor	179	177	180	175	174	Total Office Network
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	Headquarters
Kantor Cabang	23	23	23	21	21	Branch office
Kantor Cabang Pembantu	40	40	40	42	41	Sub Branch office
Kedai	49	49	51	40	38	Kedai Office
Kantor Kas	46	46	49	55	56	Cash office
BUTIK	1	1	1	2	3	BUTIK
Payment Point	19	17	15	14	14	Payment Points
ATM/CRM	377	373	373	373	335	ATM/CRM
CDM	-	2	2	2	2	CDM
OtoBanking	16	16	16	16	16	OtoBanking
EDC	1.275	600	600	600	664	EDC
Unit Layanan Syariah	-	-	-	-	87	Sharia Service Unit

Peta wilayah operasional BRK Syariah per 31 Desember 2025
Map of BRK Syariah's operational areas as of December 31, 2025



NAMA DAN ALAMAT JARINGAN KANTOR BRK SYARIAH
NAMES AND ADDRESSES OF BRK SYARIAH OFFICE NETWORK

Kantor Pusat | Headquarters

Menara Dang Merdu BRK Syariah
Jl. Jenderal Sudirman No. 462 Pekanbaru 28116
Tel. (0761) 47070
www.brksyariah.co.id

Berikut nama dan alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik serta alamat situs web jaringan kantor BRK Syariah per 31 Desember 2025:

The following are the names, addresses, phone numbers, email addresses, and website addresses of the BRK Syariah branch network as of December 31, 2025:

Nama dan Alamat Kantor Cabang — Names and Addresses of Branch Offices

No	Nama Kantor Office Name	Alamat Address	Telepon dan Fax Phone and Fax
1	BRKS Pekanbaru Cabang Utama	Menara Dang Merdu BRK Syariah, Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru	Tel. : (0761) 47170 Fax. : (0761) 42389
2	BRKS Pekanbaru Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 377 Pekanbaru	Tel. : 0761-848711/848712 Fax. : 0761-32872
3	BRKS Pekanbaru Arifin Ahmad	Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru	Telp. : 0761-32826 Fax. : 0761-856356
4	BRKS Tembilahan	Jl. Telaga Biru Tembilahan	Tel. : 0768-22525/21334 Fax. : 0768-22324
5	BRKS Dumai	Jl. Sultan Syarif Kasim No. 111-112 Dumai	Tel. : 0765-31079/32704 Fax. : 0765-36837
6	BRKS Selatpanjang	Jl. Diponegoro No. 58 Selatpanjang	Tel. : 0763-31249/31719/31250 Fax. : 0763-31307
7	BRKS Bengkalis	Jl. Pahlawan No. 15 A Bengkalis	Tel. : 0766-21569/22541/22549 Fax. : 0766-21784
8	BRKS Bangkinang	Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 29 Bangkinang	Tel. : 0762-20432
9	BRKS Air Molek	Jl. Jend. Sudirman Air Molek	Tel. : 0769-41435/41436/41438/41363 Fax. : 0769-41437
10	BRKS Pangkalan Kerinci	Jl. Maharaja Indra No. 490 Pangkalan Kerinci	Tel. : 0761-95731/95732 Fax. : 0761-95735
11	BRKS Bagansiapiapi	Jl. Pahlawan RT 005 RW 003 Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Bagansiapiapi	Tel. : 0767-2701150
12	BRKS Teluk Kuantan	Jl. Imam Munandar, Desa Beringin, Teluk Kuantan	Tel. : 0760-561651/561652 Fax. : 0760-561653
13	BRKS Pasir Pengaraian	Jl. Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian	Tel. : 0762-91260 Fax. : 0762-91151/91301
14	BRKS Siak Sri Indrapura	Jl. Sutomo Kel. Kampung Dalam Siak Sri Indrapura	Tel. : 0764-20461/20462/ 320770 Fax. : 0764-20463
15	BRKS Tanjungpinang	Jl. Teuku Umar No. 21 Tanjungpinang	Tel. : 0771-21276/24334/24329 Fax. : 0771-311370
16	BRKS Tanjungpinang Pamedan	Jl. Raja Ali Haji Komplek Pamedan No. 1-2, Tanjungpinang	Tel. : 0771-317970 Fax. : 0771-317971
17	BRKS Lingga Daik	Jl. Istana Robat No. 7 Kel. Daik, Kec. Lingga, Kab. Lingga Prov. Kepulauan Riau	Telp. : 0812-7061174
18	BRKS Bintan	Jl. WR. Supratman/Jl. Raya Tanjung Uban Km.16 No. 3,4 dan 5 Kec. Toapaya Kab. Bintan Prov. Kepulauan Riau	Tel. : 0771-4446692/44467229 Fax. : 0771-463451
19	BRKS Anambas Tarempa	Jl. Imam Bonjol Tarempa Kab. Kepulauan Anambas	Telp. : 0772-31044 Fax. : 0722-31083
20	BRKS Batam	Jl. Laksamana Bintan-Sei Panas Komp. Tana Mas Blok C No. 14 Batam	Tel. : 0778-460264/460269 Fax. : 0778-460288
21	BRKS Tanjung Balai Karimun	Jl. Pertambangan No. 23 A Tanjung Balai Karimun	Tel. : 0777-31900 Fax. : 0777-22012
22	BRKS Ranai	Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng Natuna	Tel. : 0773-31532/31077 Fax. : 0773-31533
23	BRKS Jakarta	Jl. Panglima Polim Raya No. 97A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Tel. : 021-7247701/ 7255834/7256415 Fax. : 021-29126511

Nama dan Alamat Kantor Cabang Pembantu

Names and Addresses of Sub-Branch Offices

No	Nama KC	Alamat	Telepon
1	BRKS Pekanbaru Tangkerang	Jl. Jend. Sudirman No. 628 Pekanbaru	Tel. : 0761-857201/857203 Fax. : 0761-857202
2	BRKS Pekanbaru Rumbai	Jl. Sembilang No. 108 Pekanbaru	Tel. : 0761-554459/554876
3	BRKS Pekanbaru Senapelan	Jl. Jend. Ahmad Yani (Simp. Jl. H. Juanda) Kec. Senapelan Pekanbaru	Tel. : 0761-857413/857415 Fax. : 0761-857202
4	BRKS Pekanbaru Panam	Komplek MTC Giant Panam Blok A 11-12 Jl. HR Soebrantas, Panam, Pekanbaru	Telp. : 0761-587457 Fax. : 0761-587454/587399
5	BRKS Pekanbaru Tuanku Tambusai	Jl. Tuanku Tambusai No. 135 A-B Pekanbaru	Telp. : 0761-39915/39914 Fax. : 0761-39913
6	BRKS Pekanbaru Jalan Riau	Jl. Riau 129 B. Kec. Senapelan Pekanbaru	Telp. : 0761-39448/39450 Fax. : 0761-39451
7	BRKS Pekanbaru Sukaramai Trade Center	Jl. Jend Sudirman (Komplek Sukaramai Trade Center Blok 05-KA-SA-01A) Pekanbaru	Telp.: 0761-37486/37094/37486 Fax. : 0761-37201
8	BRKS Pekanbaru Delima Panam	Jl. HR. Soebrantas Blok III A No 5 Kec. Tampan, Pekanbaru	Telp. : 0761-563847 Fax. : 0761-563840
9	BRKS Tembilahan Pasar Baru	Jl. Jend Sudirman No. 583- Pasar Baru Tembilahan	Telp. : 0768-325715/325716 Fax. : 0768-325717
10	BRKS Inhil Sungai Guntung	Jl. Yos Sudarso Kec. Kateman	Telp. : 0779-551646 Fax. : 0779-557645
11	BRKS Inhil Kota Baru	Pasar Kota Baru Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir	Telp. : 0811753557
12	BRKS Bengkalis Duri Hangtuah	Jl. Hang Tuah No. 21-22 Duri	Telp. : 0765-597675/597677 Fax. : 0765-596808
13	BRKS Bengkalis Sungai Pakning	Jl. Jend. Sudirman No. 364, Sungai Pakning	Telp. : 0766-91316 Fax. : 0766-391654
14	BRKS Bengkalis Duri Sudirman	Jl. Jend. Sudirman, Duri Kel. Air Jamban Kec. Mandau	Telp. : 0765-94800/94801 Fax. : 0765-94802
15	BRKS Kampar Lipat Kain	Jl. Raya Lipat Kain-Teluk Kuantan, Kampar Kiri	Tel. : 0761-676531/676532 Fax. : 0761-676530
16	BRKS Kampar Flamboyan	Jl. Raya Petapahan – Kota Garo No. 48-49 RT/RW 16/06 Desa Tanjung Sawit, Kec. Tapung, Kampar	Telp. : 0762-7320600
17	BRKS Kampar Petapahan	Jl. Raya Petapahan, Kec. Tapung, Kab. Kampar	Telp. : 0762-3242328
18	BRKS Inhu Belilas	Jl. Lintas Timur, Belilas, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu	Tel. ; 0769-324347/324349 Fax. : 0769-324348
19	BRKS Pelalawan Sorek	Jl. Raya Lintas Timur No. 105 Pangkalan Kuras, Sorek	Tel. : 0761-492395/492396 Fax. : 0761-492164
20	BRKS Rohil Bagan Batu	Jl. Jend. Sudirman No. 808-809 Kec. Bagan Sinembah	Tel. : 0765-51290 Fax. : 0765-51441
21	BRKS Rohil Ujung Tanjung	Jl. Lintas Riau-Sumut, Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir	Tel. : 0852-72572019
22	BRKS Kuansing Baserah	Jl. Jend. Sudirman Baserah No. 172, Kec. Kuantan Hilir, Kab. Kuantan Singingi	Telp. : 0760-21077
23	BRKS Kuansing Sungai Sirih	Jl. Poros Desa Sungai Sirih Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi	Telp. : 0760-20753, 20754,
24	BRKS Rohul Ujung Batu	Jl. Jend. Sudirman No. 86 Ujung Batu	Tel. : 0762-62109/62103 Fax. : 0762-61444
25	BRKS Rohul Dalu Dalu	Jl. Lintas Prov. Riau-Sumut Desa Talikumain, Tambusai Kab. Rokan Hulu	Tel. : 0811-7530153
26	BRKS Rohul Kota Tengah	Jl. Syech Abdul Wahab Rokan No. 16 Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu	Tel. : 08117543999
27	BRKS Rohul Kota Lama	Jl. Tengku Pahlawan Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam	Telp. : 0762-7398050 Fax. : 0762-7398049

No	Nama KC	Alamat	Telepon
28	BRKS Siak Perawang	Jl. Raya Perawang Km. 5,5 RT 01 RW 06, Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak	Tel. : 0761-693753/693755/92552 Fax. : 0761-693754
29	BRKS Siak Kandis	Jl. Raya Pekanbaru - Duri, Km. 72, Kec. Kandis	Tel. : 0761-598314/598302 Fax. : 0761-598312
30	BRKS Siak Lubuk Dalam	Jl. Pertamina, Desa Rawang Kao Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak	Telp. : 0851-00816616/0851-00816617/0851-00816618
31	BRKS Tanjungpinang Bintan Center	Jl. Dl Panjaitan Km. 9 No. 5-6 Komp. Bintan Center Kec. Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang	Telp. : 0771-442799 Fax. : 0771-441600
32	BRKS Lingga Dabo Singkep	Jl. Pahlawan, Kel. Dabo, Kec. Singkep Kab. Lingga	Telp. : 0776-322072/322279 Fax. : 0776-322278
33	BRKS Bintan Tanjung Uban	Jl. Permaisuri Blok A No. 2, Kec. Bintan Utara	Telp. : 0771-483400 Fax. : 0771-483403
34	BRKS Batam Lubuk Baja	Jl. Pembangunan No. 1 Nagoya Lubuk Baja Batam	Telp. : 0778-458343
35	BRKS Batam Batu Aji	Komplek Ruko Regency Blok A4 No. 1-2 Jl. Brigjen Katamso, Batu Aji	Telp. : 0778-3581262/3581263 Fax. : 0778-3581265
36	BRKS Batam Tiban	Komp Ruko Tiban Impian Blok A2 No. 1 Jl. Gadjah Mada	Telp. : 0778-326360 Fax. : 0778-326359
37	BRKS Batam SP Plaza	Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam	-
38	BRKS Batam Botania	Komplek Ruko Graha Nusa Permai Blok C1 No. 1-3 Cikitsu – Botania Kota Batam	Telp.: 0778-7434008 Fax.: 0778-7434003,743400
39	BRKS Karimun Tanjung Batu	Jl. Merdeka No. 14 Tanjung Batu	Telp. : 0779-431555/431629 Fax. : 0779-431630
40	BRKS Karimun Batu Lipai	Jl. Raja Oesman No. 88/89, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun	elp.: 0777-327880 Fax: : 0777-327881

Nama dan Alamat Kantor Kedai / Name and Address of Kedai Office

No	Nama Kantor Office Name	Alamat Address	Telepon dan Fax Phone and Fax
1	BRKS Pekanbaru Marpoyan	Jl. Kaharudin Nasution No. 58 Pekanbaru	Tel. : 0761-563847 Fax. : 0761-563840
2	BRKS Pekanbaru Pasar Sail	Jl. Hangtuah RT. 005 RW. 001 Kel. Bambu Kuning Pekanbaru	Tel. : 0761-858701/20554 Fax. : 0761-857496
3	BRKS Pekanbaru Durian	Jl. Durian No. 27 B Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki Pekanbaru	Telp. : 0761-862050 Fax. : 0761-864122
4	BRKS Pekanbaru Garuda Sakti	Jl. Garuda Sakti KM. 2 Pekanbaru Telp. :	Telp. : 0761-589729
5	BRKS Pekanbaru Tenayan Raya	Jalan Lintas Timur Km 12 No. 88D Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru	Telp. : 0761-8663007
6	BRKS Dumai Pasar Bukit Kapur	Jl. Soekarno Hatta, Bukit Kapur Kota Dumai	Tel. : 0811-750024 Fax. : -
7	BRKS Dumai Sungai Sembilan	Jl. Cut Nyak Dien, Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai	Telp. : 0853 - 74432290
8	BRKS Meranti Tanjung Samak	Jl. Jend. Sudirman, Tanjung Samak	Telp. : 0812-7525600
9	BRKS Meranti Teluk Belitung	Pasar Suka Ramai Teluk Belitung, Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti	Telp. : 0822-88279696
10	BRKS Bengkalis Pasar Pinggir	Jl. Lintas Duri-Pekanbaru Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis	Tel. : 0765-561500 Fax. : 0765-561501
11	BRKS Bengkalis Batupanjang Rupat	Jl. Stadion RT 007 RW 001 Kel. Batu Panjang, Kec. Rupat, Kab. Bengkalis	Telp. : 08117077174
12	BRKS Bengkalis Bantan	Jl. Jend. Sudirman Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis	-
13	BRKS Bengkalis Batin Solapan	Jl. Lintas Sumatera, Sebangor Kec. Mandau	-

No	Nama Kantor Office Name	Alamat Address	Telepon dan Fax Phone and Fax
14	BRKS Bengkalis Rupat Utara	Jl. Riau Tanjung Medang Kec. Rupat Utara	Telp. : 082230433093
15	BRKS Kampar Pasar Air Tiris	Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 56, Air Tiris, Kampar	Telp. : 0762-21633 Fax. : 0761-21632
16	BRKS Kampar Pasar Kuok	Jl. Prof. M. Yamin, SH. RT 04 RW 03 Pasar Kuok, Desa Kuok, Kec. Kuok, Kab. Kampar	Telp. : 0762-323722 Fax. : 0762-323722
17	BRKS Kampar Pasar Sukaramai	Pasar Sukaramai, Jl. Lintas Petapahan-Ujung Batu, Desa Sukaramai-Tapung Hulu, Kampar	Telp. : 0762-61731 Fax. : 0762-61730
18	BRKS Kampar Kota Bangun	Komplek KUD Bangun Desa Jl. Pembangunan Koto Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar	-
19	BRKS Inhu Pasar Peranap	Jl. Jend. Sudirman No. 22 Lintas Teluk Kuantan, RT/RW 01/03, Simpang Tugu Peranap, Kel. Peranap, Kec. Peranap, Kab. Indragiri Hulu.	Telp. : 0760-561030 Fax. : 0760-561080
20	BRKS Inhu Pasar Rengat	Jl. Narasinga Kel. Kambesko, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu	Telp. : 0769-21496 Fax. : 0769-21495
21	BRKS Inhu Sei Lala	Jl. Lintas Air Molek-Teluk Kuantan, Desa Sei Lala Perkebunan, Kec. Sei Lala, Kab. Indragiri Hulu	Telp. : 0769-7446019
22	BRKS Inhu Kuala Kilan	Jl. Lintas Selatan No. 60, Desa Kuala Kilan Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu	Telp. : 0811-708094
23	BRKS Pelalawan Pasar Ukui	Jl. Lintas Timur RT 02/01 Pasar Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan	Telp. : 0769-7445244 Fax. : 0769-7445245
24	BRKS Pasar Pangkalan Kerinci	Pasar Pangkalan Kerinci, Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan	Telp. : 0761-493365 Fax. : 0761-493366
25	BRKS Pelalawan Bandar Sei Kijang	Jl. Lintas Timur KM. 34, Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan	Telp. : 0761-8403373
26	BRKS Rohil Pujud	Jl. Lintas Pujud - Mahato Kep. Kasang Bangsawan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir	Telp. : 082170436400
27	BRKS Rohil Kubu	Jl. Jend. Sudirman Dusun Tanjung Mesjid Desa Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir	Telp. : 082170192014
28	BRKS Rohil Panipahan	Jl. Bakti, Kelurahan Panipahan	Telp. : 081371993087
29	BRKS Kuansing Pasar Lubuk Jambi	Jl. Jend. Sudirman Desa Banjar Padang Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi	Telp. : 0811-7535951
30	BRKS Kuansing Pasar Muara Lembu	Jl. Jend Sudirman, Kel. Muara Lembu, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi	Telp. : 0760 2523700
31	BRKS Rohul Kabun	Jl. Lintas Pekanbaru-Pasir Pengaraian Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu	Telp. : 0811-7074666
32	BRKS Rohul Tandun	Jl. Raya Tandun- Ujung Batu, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu	Telp. : 0813-16025267
33	BRKS Rohul Rantau Kasai	Jl. Sultan Zainal Abidin, Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu	Telp. : 0821-69363330
34	BRKS Siak Sungai Apit	Jl. Gajah Mada RT.001/RW.006 Kec. Sungai Apit	Telp. : 0766-51112/51222 Fax. : 0766-51157
35	BRKS Siak Pasar Minas	Jl. Yos Sudarso Km. 30, Kel. Minas Raya - Minas	Telp. : 0761-598900 Fax. : 0761-598900
36	BRKS Siak Dayun	Pasar Dayun, Jl. Perawang – Siak	Telp. : 0764-8001251
37	BRKS Siak Sabak Auh	Jl. Lintas Siak – Sungai Pakning Sabak Auh, Bandar Pedada Kab. Siak	Telp. : 085218394750
38	BRKS Siak Kampung Belutu	Desa Belutu,kecamatan kandis Kabupaten siak	-
39	BRKS Bintan Kijang	Jl. Kampung Kuala Lumpur, Kab. Bintan, Prov. Kepri	Telp. : 0771-4610633
40	BRKS Anambas Palmatak	Ladan, Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29783	-
41	BRKS Anambas Letung	Jl. Merdeka Letung Kab. Kepulauan 8. Anambas Prov. Kepulauan Riau	Telp. : 0772-3380030
42	BRKS Batam Belakang Padang	Jl. Hangtuah No. 01 (Depan Mesjid At Taqwa) Belakang Padang Kota Batam	Telp. : 0778-5611786
43	BRKS Batam Bengkong	Komp. Bengkong City Centre Jl. Yos Sudarso Bengkong Laut	Telp. : 0778-4893095

No	Nama Kantor Office Name	Alamat Address	Telepon dan Fax Phone and Fax
44	BRKS Batam Nongsa	Komp. Summerland Jl. Hang Kestury Nongsa Kota Batam	Telp. : 0778-7630932
45	BRKS Karimun Moro	Jl.Sudirman Moro, Kec Moro Kabupaten Karimun	Telp. : 0779-5120092
46	BRKS Natuna Sedanau	Jl. Pelontar II (NATO) Sedanau, Kabupaten Natuna	Telp. : 0811- 7047008
47	BRKS Natuna Midai	Jl. Merdeka Sabang Barat, Kec. Midai Kab. Natuna	Telp. : 082385195511
48	BRKS Natuna Serasan	Kampung Air Raya, Kec. Serasan, Kab. Natuna	Telp. : 0821-70315022
49	BRK Natuna Subi	Jl. Datuk Panglima Indre Mahkota Kec. Subi Kab. Natuna	Telp. : 082260062738

Nama dan Alamat Kantor Kas

Name and Address of Cash Office

No	Nama Kantor Office Name	Alamat Address
1	Kantor Kas RSUD Arifin Ahmad	RSUD Arifin Ahmad Jl. Diponegoro No. 2 Pekanbaru
2	Kantor Kas Samsat Selatan Provinsi Riau	Kantor Samsat Provinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 6 Pekanbaru
3	Kantor Kas Unilak Pekanbaru	Kampus Universitas Lancang Kuning Jl. Dl. Panjaitan KM 8 Rumbai Pekanbaru
4	Kantor Kas Kantor Gubernur Riau	Kantor Gubernur Riau, Menara Lancang Kuning/Gedung 9 Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman 460
5	Kantor Kas Dispenda Kota Pekanbaru	Kantor Dispenda Kota Pekanbaru Jl. Teratai No. 81 Pekanbaru
6	Kantor Kas Samsat Pekanbaru Kota	Gedung Samsat Pekanbaru Kota Jl. Gajah Mada Kota Pekanbaru
7	Kantor Kas RSUD Petala Bumi	RSUD Petala Bumi Jl. Soetomo No. 65 Sutomo Pekanbaru
8	Kantor Kas Kantor Bupati Indragiri Hilir	Komplek Perkantoran Bupati Indragiri Hilir-Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
9	Kantor Kas Kemenag Indragiri Hilir	Kantor Kemenag Kab. Indragiri Hilir Jl. Keritang No. 12 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
10	Kantor Kas Kantor Walikota Dumai	Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar Bukit Kapur Dumai
11	Kantor Kas RSUD Dumai	RSUD Dumai Jl. Tanjung Jati No.4 Dumai
12	Kantor Kas DPPKAD Kab. Kepulauan Meranti	Kantor DPPKAD Kep. Meranti Jl. Merdeka, Selat Panjang Kota Selat Panjang
13	Kantor Kas Kemenag Kep. Meranti	Kantor Kemenag Kab. Kep. Meranti, Jl. Dorak Selat Panjang Timur, Kab. Kep. Meranti
14	Kantor Kas Pematang Duku	Jl. Raya Desa Pematang Duku, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis
15	Kantor Kas RSUD Mandau Duri	Jl. Stadion No.10, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Duri Kab. Bengkalis
16	Kantor Kas Kemenag Bengkalis	Kantor Kemenag Kab. Bengkalis Jl. Kelapapati Darat Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis
17	Kantor Kas Kantor Bupati Kampar	Kantor Bupati Kampar Jl. Lingkar Bangkinang
18	Kantor Kas Pematang Reba	Jl. Raya Pematang Reba-Belilas, Kab. Indragiri Hulu
19	Kantor Kas Kantor Bupati Pelalawan	Kantor Bupati Pelalawan Lt. 1 Jl. Lintas Timur Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan
20	Kantor Kas Kuala Kampar	Jl. Bono Sakti Desa Teluk Dalam Kec. Kuala Kampar
21	Kantor Kas Kantor Bupati Rokan Hilir	Jl. Merdeka No. 58 Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir
22	Kantor Kas Kantor Dispenda Rokan Hilir	Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir
23	Kantor Kas Kantor Bupati Kuansing	Komplek Perkantoran Bupati Kuansing 2. Jl. Senambek Sungai Jering Teluk 4. Kuantan
24	Kantor Kas Suka Damai	Jl. Jend Sudirman Desa Suka Damai
25	Kantor Kas Kemenag Kuantan Singingi	Kantor Kemenag Kab. Kuantan Singingi Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi
26	Kantor Kas Bapenda Rokan Hulu	Kantor Bapenda Rokan Hulu, Pasir Pengaraian
27	Kantor Kas Kantor Bupati Siak	Kantor Bupati Siak Jl. Sultan Ismail, Siak Sri Indrapura
28	Kantor Kas Kemenag Siak	Kantor Kemenag Siak Jl. Datuk Tun Habib Siak
29	Kantor Kas Kantor Walikota Tanjungpinang	Kompleks Kantor Walikota Tanjungpinang Jl. Raya Sebauk – Senggarang
30	Kantor Kas Kantor Gubernur Kepulauan Riau	Gedung Aula Komplek Perkantoran Pemerintahan Prov. Kepulauan Riau, Dompak, Kota Tanjungpinang
31	Kantor Kas RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	Jl. WR Supratman Km. 8 No.100 Tanjungpinang
32	Kantor Kas BPKAD Kota Tanjungpinang	Jl. Basuki Rahmat Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau
33	Kantor Kas Senayang	Jl. Merdeka No.172 Senayang Kabupaten Lingga Kepulauan Riau

No	Nama Kantor Office Name	Alamat Address
34	Kantor Kas Pancur	Depan Dermaga Pancur Kec. Lingga Utara Kab. Lingga Prov. Kepulauan Riau
35	Kantor Kas Kantor Bupati Bintan	Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan Km. 42, Bintan Bunyu, Kec. Teluk Bintan, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau
36	Kantor Kas Kantor Walikota Batam	Kantor Walikota Batam Lantai 1 Jl. Engku Putri No. 1 Batam Center
37	Kantor Kas Dispenda Kota Batam	Gedung Bersama Dispenda Kota Batam Jl. Engku Putri Batam Center
38	Kantor Kas Dinas Pendidikan Kota Batam	Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran Kota Batam) Sekupang Kota Batam
39	Kantor Kas RSUD Embung Fatimah Batam	RSUD Embung Fatimah Batam Jl. Letjen Soeprapto Batam
40	Kantor Kas Kantor Bupati Karimun	Komplek Perkantoran Poros Jl. Jend Sudirman, Tanjung Balai Karimun Telp. : 0777-323859
41	Kantor Kas Sawang	Jl. Sawang Besar Kec. Kundur Barat - Tanjung Batu Kab. Karimun
42	Kantor Kas Kantor Bupati Natuna	Kompleks Kantor Bupati Natuna Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, Ranai
43	Kantor Kas BPKAD Bengkalis	Jl. Pertanian Kec. Bengkalis
44	Kantor Kas Tambelan	Jl. Desa Kampung Hilir Kec. Tambelan
45	Kantor Kas Kantor Walikota Pekanbaru	Kantor Walikota Pekanbaru Jl. Sudirman No. 464 Pekanbaru
46	Kantor Kas Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru	Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru-Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Nama dan Alamat BUTIK

Name and Address of BUTIK

No	Nama Kantor Office Name	Alamat Address
1	BUTIK Mega Mall	Mega Mall Batam Centre Lt. 1 /F. 255 Batam

Nama dan Alamat *Payment Point*

Name and Address of *Payment Points*

	Nama Kantor Office Name	Alamat Address
1	*Payment Point* Dispenda Duri Bengkalis	Jl. Harapan Jaya No. 14 Air Jamban - Duri
2	*Payment Point* Kantor Dispenda Karimun	Jl. Pertambangan, Sei Ayam Kab. Karimun
3	*Payment Point* Kantor Bapenda Kampar	Jl. Prof M. Yamin Bangkinang Kab. Kampar
4	*Payment Point* Dispenda Kota Dumai	Gedung Dispenda Kota Dumai Jl. HR Soebrantas, Dumai
5	*Payment Point* Kantor Dispenda Siak	Gedung Dispenda Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Siak Sri Indrapura
6	*Payment Point* Dispenda Bengkalis	Gedung Dispenda Bengkalis Jl. Jend Sudirman Bengkalis
7	*Payment Point* Bapenda Indragiri Hulu	Gedung Dispenda Indragiri Hulu Pematang Reba, Indragiri Hulu
8	*Payment Point* Kantor DPKAD Pelalawan	Kantor DPKAD Kab. Pelalawan
9	*Payment Point* Bapenda Kab. Indragiri Hilir	Kantor Bapenda Kab. Indragiri Hilir
10	*Payment Point* Bapenda Kuantan Singingi	Kantor Bapenda Kuantan Singingi Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau
11	*Payment Point* BPPRD Kota Tanjungpinang	Jl. Basuki Rahmat/Jl. Pramuka Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari Kota Tanjungpinang 29113
12	*Payment Point* Sekretariat DPRD Provinsi Riau	Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Riau
13	*Payment Point* Universitas Islam Riau (UIR)	Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Damai Pekanbaru
14	*Payment Point* Kantor MPP Kota Dumai	Jl. HR. Soebrantas, Kelurahan Teluk Binjai, Kota Dumai
15	*Payment Point* Kantor MPP Kab. Bengkalis	Jl. Jendral Sudirman Bengkalis
16	*Payment Point* Kantor MPP Kab. Siak	Jl. Raya Siak-Buatan, Sungai Mempura, Kec. Mempura, Kabupaten Siak
17	*Payment Point* Kantor MPP Kab. Kampar	Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar
18	*Payment Point* Kantor MPP Kab. Bintan	Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 42 Bandar Seri Bentan
19	*Payment Point* Kantor RSUD Indrasari Kab. Indragiri Hulu	Jl. Lintas Timur Sumatera, Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu



OtoBanking/Kas Keliling

1. *OtoBanking* Cabang Utama
2. *OtoBanking* Cabang Tanjungpinang
3. *OtoBanking* Cabang Tanjungpinang Pamedan
4. *OtoBanking* Cabang Batam
5. *OtoBanking* Cabang Bagansiapiapi
6. *OtoBanking* Cabang Pasir Pengaraian
7. *OtoBanking* Cabang Air Molek
8. *OtoBanking* Cabang Tembilahan
9. *OtoBanking* Cabang Bangkinang
10. *OtoBanking* Cabang Siak Sri Indrapura
11. *OtoBanking* Cabang Bengkalis
12. *OtoBanking* Cabang Pangkalan Kerinci
13. *Mini OtoBanking* Cabang Dumai
14. *Mini OtoBanking* Cabang Teluk Kuantan
15. *Mini OtoBanking* Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad
16. *Mini OtoBanking* Cabang Bangkinang

SEJARAH SINGKAT BRK SYARIAH
BRIEF HISTORY OF BRK SYARIAH

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) merupakan lembaga keuangan daerah yang memiliki sejarah panjang dalam mendukung pembangunan ekonomi regional. Perseroan berawal dari pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau pada tahun 1966, yang dibentuk sebagai sarana intermediasi keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Provinsi Riau. Seiring dengan perkembangan wilayah dan perluasan cakupan layanan, pada tahun 2010 bank ini resmi berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang disingkat PT Bank Riau Kepri, setelah bergabungnya Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemegang saham.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) is a regional financial institution with a long-standing history of supporting regional economic development. The Company originated from the establishment of Bank Pembangunan Daerah Riau in 1966, founded as a financial intermediary to stimulate economic growth and infrastructure development in Riau Province. In line with regional development and the expansion of service reach, the bank officially changed its name in 2010 to PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, abbreviated as PT Bank Riau Kepri, following the inclusion of Kepulauan Riau Province as a shareholder.

Dalam rangka merespons perkembangan industri perbankan nasional serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah, BRK secara bertahap mempersiapkan transformasi bisnis melalui penguatan layanan perbankan syariah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui proses konversi kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank yang sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Setelah melalui tahapan persiapan yang komprehensif serta memperoleh persetujuan dari regulator, pada tahun 2022 Perseroan secara resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau dikenal sebagai BRK Syariah.

In response to the dynamics of the national banking industry and the increasing public demand for Sharia-based financial services, BRK Syariah gradually prepared for a business transformation by strengthening its Sharia banking services. This commitment was realized through a conversion process from a conventional bank into a bank operating fully under Sharia principles. Following a comprehensive preparation phase and obtaining regulatory approval, in 2022, the Company officially commenced operations as a Sharia Commercial Bank under the name PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), commonly known as BRK Syariah.

Pasca konversi, BRK Syariah terus memperkuat perannya sebagai bank daerah berbasis syariah yang berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, BRK Syariah berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Post-conversion, BRK Syariah continues to solidify its role as a Sharia-based regional bank focusing on sound, inclusive, and sustainable fund mobilization and financing. Guided by Sharia principles, BRK Syariah is committed to supporting regional development, enhancing community welfare, and serving as a catalyst for economic growth in Riau and the Kepulauan Riau Provinces.

Perubahan Nama Perusahaan

Sebelum menjadi BRK Syariah, Bank telah mengalami tiga kali perubahan nama sejak berdiri pada tahun 1966 sebagai berikut:

1. Berdiri pada tahun 1966 dengan nama Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Riau, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1992.
2. Pada tanggal 26 Juni 2002, Bank mengalami perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003, serta berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2003.
3. Selanjutnya, pada tanggal 26 April 2010, PT Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BPD Riau Kepri). Perubahan nama tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010, serta persetujuan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/59/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010.
4. Dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan industri perbankan serta amanat Pemegang Saham, BPD Riau Kepri yang selanjutnya dikenal sebagai BRK menuntaskan proses konversi kegiatan usaha menjadi BRK Syariah pada tanggal 25 Agustus 2022.

Corporate Name Changes

Prior to becoming BRK Syariah, the Bank underwent three name changes since its inception in 1966 as follows:

1. Established in 1966 under the name Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Riau, based on Regional Regulation Number 14 of 1992.
2. On June 26, 2002, the Bank underwent a change in legal status to a Limited Liability Company (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau, which was legalized by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number C-09851.HT.01.01.TH.2003 dated May 5, 2003, and based on the resolution of the General Meeting of Shareholders dated June 13, 2003.
3. Subsequently, on April 26, 2010, PT Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) changed its name to PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BPD Riau Kepri). This name change received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-36484.AH.01.02 Year 2010 dated July 22, 2010, and approval from Bank Indonesia through the Decree of the Governor of Bank Indonesia Number 12/59/KEP.GBI/2010 dated September 23, 2010.
4. Considering the dynamics of the banking industry and the mandate of the Shareholders, BPD Riau Kepri, subsequently known as BRK Syariah, finalized the business conversion process into BRK Syariah on August 25, 2022.

JEJAK LANGKAH BRK SYARIAH
THE JOURNEY OF BRK SYARIAH

1966

01 April 1966 | April 01, 1966

Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah.

Bank Pembangunan Daerah Riau began with its status as a Riau Regional Government-Owned Bank in accordance with Law No. 13 of 1962 concerning Regional Development Banks.

1975

Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1975.

The corporate establishment status of Bank Pembangunan Daerah Riau was adjusted to comply with Riau Provincial Regulation Level I No.10 of 1975.

1986

Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 18 Tahun 1986.

The corporate establishment status of Bank Pembangunan Daerah Riau was further adjusted in accordance with Riau Provincial Regulation Level I No. 18 of 1986.

1992

Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

The corporate establishment status of Bank Pembangunan Daerah Riau was adjusted in accordance with Regional Regulation Number 14 of 1992 concerning Bank Pembangunan Daerah Riau, pursuant to Law No. 7 of 1992 concerning Banking.

2002

26 Juni 2002 | June 26, 2002

Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS.

Bank Pembangunan Daerah Riau received approval to convert its corporate status from a Regional Enterprise (Perusahaan Daerah/PD) to a Limited Liability Company (Perseroan Terbatas/PT) pursuant to the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).

2003

5 Mei 2003 | May 5, 2003

Pengesahan perubahan status dari PD menjadi PT oleh Menteri Kehakiman dan HAM melalui Surat Keputusan Nomor: C-09851. HT.01.01. TH.2003

Ratification of the change in status from PD to PT by the Minister of Justice and and Human Rights by Decree Number: C-09851. HT.01.01. TH.2003

13 Juni 2003 | June 13, 2003

Perubahan badan hukum dari PD menjadi PT telah disahkan dalam RUPS.

Change in the legal entity from Regional Company (PD) into Limited Liability Company (PT) has been approved in the GMS.

22 Juli 2003 | July 22, 2003

Mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 5/30/KEP.DGS/2003.

Received the approval of the Senior Deputy Governor of Bank Indonesia Number 5/30/KEP.DGS/2003.

2010

26 April 2010 | April 26, 2010

Dilakukan perubahan nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang disingkat PT Bank Riau Kepri.

The name PT Bank Pembangunan Daerah Riau was changed to PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, abbreviated as PT Bank Riau Kepri.

22 Juli 2010 | July 22, 2010

Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui keputusan No. AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Perubahan Nama.

Approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-36484.AH.01.02 of 2010 regarding the Name Change.

23 September 2010 | September 23 ,2010

Persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/59/ KEP.GBI/2010 tetang Perubahan Nama dari BPD Riau menjadi BPD Riau Kepri.

Approval from Bank Indonesia through the Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 12/59/ KEP.GBI/2010 on the Change of Name from BPD Riau to BPD Riau Kepri.

2016

28 Januari 2016 | January 28, 2016

Peresmian Kantor Pusat dan Cabang Utama Bank Riau Kepri di Menara Dang Merdu, sebagai ikon pembangunan ekonomi Riau dan Kepri.

Inauguration of the Head Office and Main Branch of Bank Riau Kepri in Dang Merdu Tower, as an icon of Riau and Kepri economic development.

2018

Bank Riau Kepri meluncurkan berbagai produk inovasi berbasiskan teknologi digital seperti uang elektronik (*e-money*), samsat *online*, pelayanan pajak daerah secara *online* dan dengan sistem *host to host*. Ini adalah upaya menyelaraskan teknologi *digital Banking* untuk menjadikan Bank Riau Kepri sebagai bank yang unggul.

Bank Riau Kepri launched a variety of innovative products based on digital technologies such as e-money, samsat online, online local tax services and a host-to-host system. This is an effort to harmonize digital Banking technology to make Bank Riau Kepri a superior bank.

2019 - 2021

Persiapan Konversi Menuju Bank Umum Syariah

Menjadi amanat RUPSLB tanggal 22 April tahun 2019, bahwa Bank Riau Kepri akan berubah menjadi Bank Umum Syariah, yang diyakini akan lebih diterima masyarakat Riau dan Kepulauan Riau yang berbudaya melayu dan mayoritas beragama Islam.

Dengan dicanangkannya *spirit* 3K (Konversi-Kinerja-Kultur) menjadi arah sekaligus energi baru dalam menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat di era baru melalui proses konversi menjadi bank syariah, dan mendorong terciptanya kultur syariah yang produktif melalui pertumbuhan positif kinerja Bank.

Preparation toward Conversion to become Sharia Commercial Bank

It is the mandate of the EGMS on April 22, 2019, that Bank Riau Kepri will transform into a Sharia Commercial Bank, which is believed to be more accepted by the people of Riau and Kepulauan Riau, which are Malay-cultured and predominantly Muslim.

With the launching of the 3K spirit (Conversion-Performance-Culture), it becomes a new direction and energy in facing the challenges and increasingly fierce competition in the new era through the conversion process into a sharia bank, and encourages the creation of a productive sharia culture through positive growth in the Bank's performance.

2022

Hari Pertama Beroperasinya BRK Syariah (*Go Live*).

Perubahan Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah dengan *call sign* BRK Syariah berkat dukungan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau serta *spirit* "Berkah untuk Semua" *Insya Allah* BRK Syariah dapat berperan menjadi motor penggerak, yakni pemicu sekaligus pemacu ekosistem syariah di kawasan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau terutama dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah.

BRK Syariah's First Day of Operation (Go Live).

The transformation of Bank Riau Kepri into Bank Riau Kepri Syariah, with the call sign BRK Syariah, was realized through the continuous support of the people of Riau and Kepulauan Riau, alongside the spirit of "Blessings for All". *Insya Allah*, BRK Syariah will serve as a primary driving force, acting as both a catalyst and an accelerator for the sharia ecosystem within Riau Province and Kepulauan Riau Province, particularly in supporting the development of regional economic potential.

2023

Transformasi Digital dan Inovasi Kepemimpinan yang Berkelanjutan serta Layanan Terbaik

Kinerja kami selama tahun 2023 mendorong terbentuknya Ekosistem Halal, meningkatkan layanan, termasuk penyempurnaan implementasi digitalisasi perbankan, mengembangkan Ekosistem Digital Desa, Transaksi Non Tunai Keuangan Desa, Ekosistem Digital Islam, Ekosistem Digital Pemerintah Daerah, dan Transaksi Non Tunai Keuangan Pemerintah Daerah dan BRK Syariah terus mengembangkan berbagai program potensial guna memperluas pangsa pasar syariah.

Melalui konversi penuh ke perbankan syariah dan upaya yang berkelanjutan, BRK Syariah telah berhasil mencapai keberlanjutan praktik syariah di tahun 2023 dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah secara konsisten dalam semua aspek operasional, serta memberikan kepercayaan kepada nasabah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Digital Transformation and Sustainable Leadership Innovation and Best Service

Our performance throughout 2023 has driven the establishment of the Halal Ecosystem and the enhancement of our services. This includes refining the implementation of banking digitalization, as well as developing the Village Digital Ecosystem, Village Non-Cash Financial Transactions, the Islamic Digital Ecosystem, the Regional Government Digital Ecosystem, and Regional Government Non-Cash Financial Transactions. Furthermore, BRK Syariah continuously develops various potential programs to expand its sharia market share.

Through a full conversion to a sharia banking system and continuous efforts, BRK Syariah successfully achieved the sustainability of sharia practices in 2023. This was accomplished by consistently applying Sharia principles across all operational aspects, thereby instilling trust and confidence among our customers, the community, and other stakeholders.

2024

Pengembangan dan Inovasi untuk Menghasilkan Solusi Keuangan yang Berkelanjutan sesuai dengan Prinsip Syariah

Di tahun 2024, BRK Syariah terus melakukan berbagai pengembangan dan inovasi guna memperkuat transaksi non-tunai dan menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih terintegrasi. Melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat serta pemerintah daerah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, BRK Syariah berupaya menghadirkan solusi keuangan yang modern, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Inovasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan syariah, tetapi juga mendorong percepatan transformasi digital dalam ekosistem keuangan secara lebih luas. Dengan optimalisasi teknologi dan penguatan kerja sama lintas sektor, BRK Syariah berharap dapat memberikan layanan yang lebih inklusif, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekosistem keuangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Development and Innovation to produce sustainable financial solutions in accordance with Sharia Principles

In 2024, BRK Syariah continues to carry out various developments and innovations to strengthen non-cash transactions and create a more integrated Islamic financial ecosystem. Through strategic collaboration with various stakeholders, including the central government and local governments in Riau Province and Kepulauan Riau Province, BRK Syariah strives to provide financial solutions that are modern, safe, and in accordance with sharia principles.

This innovation not only aims to improve the efficiency and accessibility of Islamic financial services, but also encourages the acceleration of digital transformation in the broader financial ecosystem. By optimizing technology and strengthening cross-sector cooperation, BRK Syariah hopes to provide more inclusive services, support regional economic growth and improve community welfare through an integrated and sustainable financial ecosystem.

2025

Optimalisasi Langkah dalam Ekosistem Syariah, Menggapai Berkah

BRK Syariah secara berkelanjutan mengoptimalkan langkah bisnis maupun fungsi sosial dalam ekosistem syariah. Di tahun 2025, Bank memperluas kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah serta berbagai institusi/mitra.

Kerja sama di sektor pendidikan mencakup Pondok Pesantren, Sekolah Islam, dan Universitas. Sementara itu, sinergi dengan pelaku usaha dilakukan bersama Rumah Sakit, Travel Haji & Umrah, serta *Cafe*/Restoran dan pelaku wisata *halal*/ramah muslim. Di sektor industri *halal*, kemitraan diperkuat pada usaha berbasis komoditas lokal, makanan/minuman halal, *fashion* syariah, serta *marketplace*.

BRK Syariah juga berkolaborasi dengan pengelola ZISWAF dan melakukan optimalisasi produk CWLD serta bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kementerian, dan lembaga pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Langkah strategis tersebut diiringi dengan peningkatan fungsi dan kemudahan infrastruktur digital *channel* melalui pengembangan aplikasi *mobile banking* dengan berbagai fitur terbaik, CMS, layanan *virtual account,* QRIS yang berasaskan *maqoshid* syariah.

Optimizing Strides within the Sharia Ecosystem, Attaining Blessings

BRK Syariah sustainably optimizes both its business operations and social functions within the Sharia ecosystem. In 2025, the Bank systematically expanded its collaborations with Islamic financial institutions as well as various strategic institutions and partners.

Partnerships within the education sector encompass Islamic Boarding Schools (Pesantren), Islamic Schools, and Universities. Meanwhile, synergies with business actors were successfully established with Hospitals, Hajj & Umrah Travel Agencies, alongside Cafes/Restaurants and halal or Muslim-friendly tourism operators. Within the halal industry sector, partnerships were profoundly fortified across local commodity-based enterprises, halal food and beverages, Sharia fashion, and digital marketplaces.

BRK Syariah also collaborated with ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf) administrators and actively optimized CWLD (Cash Waqf Linked Deposit) products, while concurrently partnering with Local Governments, Ministries, and various government agencies to robustly support regional and national economic growth.

These strategic measures were accompanied by the functional enhancement and seamless accessibility of digital channel infrastructure. This was achieved through the advanced development of the mobile banking application—equipped with premier features—alongside the Cash Management System (CMS), virtual account services, and QRIS, all firmly anchored in the principles of *Maqashid al-Shariah*.

BRAND BRK SYARIAH
BRK SYARIAH BRAND

Setelah sukses menyelesaikan proses konversi menjadi bank syariah, BRK Syariah melakukan transformasi logo dan *brand* baru, yaitu perubahan ikon 3 (tiga) perahu dan layar terkembang menjadi hanya tinggal 1 (satu). *Brand* baru tersebut sesuai dengan ciri khas Melayu dengan filosofi Tanjak/Tengkolok dan Perahu Lancang Kuning.

After successfully completing the conversion process to an Islamic bank, BRK Syariah transformed its logo and brand, changing the icon of 3 (three) boats and a flapping sail to only 1 (one). The new brand is in accordance with Malay characteristics with the philosophy of Tanjak / Tengkolok and Perahu Lancang Kuning.





Simbol Tanjak

Merupakan bentuk ikat kepala. Tanjak merupakan kebanggaan masyarakat Melayu sebagai simbol semangat, kepemimpinan, dan ketulusan.

Tanjak Symbol

It is a form of headband. Tanjak is the pride of the Malay people as a symbol of spirit, leadership, and sincerity.

Simbol Layar Kapal Jong Terkembang

Mengartikan Bank Riau Kepri Syariah terus mengarungi dan berkembang dengan teguh dan mengarah ke suatu tujuan yang lebih baik.

The symbol of the Expanded Sailing Ship

This means that Bank Riau Kepri Syariah continues to navigate and develop steadily and lead to a better goal.

Perahu

Mengartikan perahu mampu menampung dan mengantarkan masyarakat Riau dan Kepri ke perekonomian yang lebih baik.

Boat

This means that boats are able to accommodate and deliver the people of Riau and the Kepulauan Riau to a better economy.

Garis Hijau

Simbol aliran ombak bahwa Bank Riau Kepri Syariah bertekad menerjang arus era globalisasi modern.

Green Line

The symbol of the flow of waves is that Bank Riau Kepri Syariah is determined to hit the currents of the modern globalization era.

Garis Landasan

Bank Riau Kepri Syariah yang sepenuhnya berlandaskan syariah dan menjadi simbol kesetaraan umat.

Baseline

Bank Riau Kepri Syariah which is fully based on sharia and is a symbol of equality of people.



Akronim BRK

Dalam *branding* penyingkatan kata diperlukan untuk memberikan kemudahan penyebutan dan efek pengingat.

BRK acronym

In branding, word abbreviations are needed to provide ease of mentioning and reminder effects.

Huruf

Font **Harabara Mais Bold** memberikan kesan luwes, *humble,* dan modern.

Typography

The Harabara Mais Bold font gives a supple, humble, and modern impression.

Slogan

"Berkah untuk Semua" merupakan nilai *universal value* dimana perekonomian Riau dan Kepri tumbuh secara berkeadilan.

Slogan

"Blessings for all" is a universal value in which the economy of Riau and the Kepulauan Riau grows in an equitable manner.

Merah

Gigih dan Semangat

Red

Persistence and Passion

Kuning

Kejayaan dan Kesuksesan

Yellow

Glory and Success

Hijau

Religius, Sejuk, dan Mengayomi

Green

Religious, Cool, and Nurturing

Hitam

Kepemimpinan, Ketegasan, dan Kunci Ekonomi Riau dan Kepulauan Riau

Black

Leadership, Decisiveness, and the Key to Riau and Kepulauan Riau Economy

VISI Vision

"Mewujudkan Bank Syariah yang Inklusif, *Resilient*, dan Modern Pilihan Utama Masyarakat yang Berkontribusi Signifikan terhadap Pembangunan Daerah Berkelanjutan".

"Creating an Inclusive, Resilient and Modern Sharia Bank, the Community's Top Choice that Contributes Significantly to Sustainable Regional Development".

MISI Mission

- **Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan menuju pembangunan ekonomi nasional;**
  Encouraging sustainable regional economic growth towards national economic development;
- **Memberikan solusi layanan keuangan berbasis syariah dengan dukungan teknologi terkini;**
  Providing sharia-based financial service solutions with the latest technology support;
- **Memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mencapai kesejahteraan umat;**
  Strengthening the development of micro, small, and medium enterprises to achieve people's welfare;
- **Mengelola dana daerah dan dunia usaha nasional secara optimal dan profesional;**
  Manage regional funds and the national business world optimally and profesionally;
- **Mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) berkualitas yang siap menghadapi transformasi dalam nilai-nilai syariah universal.**
  Developing quality human resources who are ready to face transformation in universal sharia values.





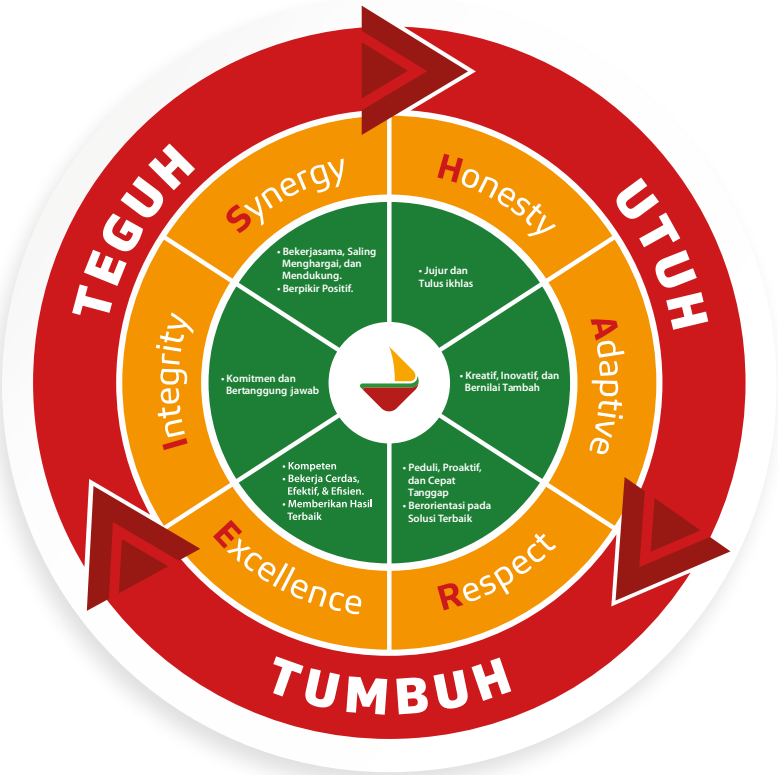
REVIEW VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN DIREKSI

Vision and Mission Review by The Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Directors

Visi dan Misi BRK Syariah telah dikaji ulang dan ditetapkan pada tahun 2025 saat pembahasan *Corporate Plan* BRK Syariah tahun 2026-2030. *Corporate Plan* telah disahkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi BRK Syariah memandang bahwa visi dan misi yang ditetapkan masih relevan dengan kondisi saat ini. Visi dan misi dimaksud telah dimuat dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2026-2028.

BRK Syariah's Vision and Mission were reviewed and established in 2025 during the discussion of BRK Syariah's Corporate Plan 2026-2030. The Corporate Plan was endorsed by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors of BRK Syariah view that the vision and mission set are still relevant to the current conditions. The vision and mission have been included in the Bank's Business Plan 2026-2028.

I SHARE



Insan BRK Syariah adalah insan yang memiliki spirit berbagi (*sharing*) yang baik sebagai modal utama dalam menampilkan kinerja terbaik yang bernilai kontributif dalam memajukan perusahaan

The human capital of BRK Syariah consists of individuals who embody an exceptional spirit of sharing, serving as the principal asset in delivering paramount performance that provides contributive value toward the advancement of the corporation.

Budaya BRK Syariah dikenal dengan akronim "**I SHARE**" yaitu:
The corporate culture of BRK Syariah is recognized by the acronym "I SHARE", namely:



INTEGRITY

1. **Komitmen & bertanggung jawab**
   Commitment and Responsibility



SYNERGY

2. **Bekerjasama, saling menghargai dan mendukung**
   Collaboration, Mutual Respect, and Support
3. **Berpikir positif**
   Positive Thinking



HONESTY

4. **Jujur dan tulus ikhlas**
   Honesty and Sincerity



ADAPTIVE

5. **Kreatif, Inovatif dan bernilai tambah**
   Creative, Innovative, and Value-Generating



RESPECT

6. **Peduli, proaktif dan cepat tanggap**
   Caring, Proactive, and Responsive
7. **Berorientasi pada solusi yang terbaik**
   Oriented Towards Optimal Solutions



EXCELLENCE

8. **Kompeten**
   Competence
9. **Bekerja cerdas, efektif dan efisien**
   Smart, Effective, and Efficient Work Practices
10. **Memberikan hasil yang terbaik**
    Delivering Paramount Results

INTERNALISASI BUDAYA PERUSAHAAN
INTERNALIZATION OF CORPORATE CULTURE

Penerapan nilai-nilai budaya dan perilaku utama insan BRK Syariah adalah hal penting guna menunjang kinerja produktif melalui penerapan program budaya secara aktif dan terintegrasi. Penerapan nilai-nilai budaya dan perilaku utama diarahkan untuk menciptakan kompetensi sumber daya insani BRK Syariah yang unggul ditandai dengan kefasihan dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu perbankan syariah, nilai-nilai budaya, dan prosedur kerja.

BRK Syariah secara konsisten dan berkelanjutan mengimplementasikan nilai-nilai budaya dan perilaku utama *(Core Values)* I SHARE salah satunya melalui Ritual *Morning Briefing* dengan 5 (lima) tema program sebagai berikut:

The implementation of cultural values and key behaviors of BRK Syariah people is important to support productive performance through active and integrated implementation of cultural programs. The application of cultural values and key behaviors is directed at creating superior BRK Syariah human resource competencies characterized by fluency in 3 (three) main aspects namely Islamic Banking, cultural values, and work procedures.

BRK Syariah consistently and continuously implements I SHARE core values and behaviors, one of which is through the Morning Briefing Ritual with 5 (five) program themes as follows:

DAILY SHARING SESSION

Menjadikan atmosfir *sharing information and knowledge* sebagai budaya yang melekat di setiap unit kantor agar tercipta Sumber Daya Insani yang memiliki 3 kefasihan

Establishing an atmosphere of continuous information and knowledge sharing as an ingrained corporate culture within every office unit, aimed at cultivating Human Capital equipped with three core fluencies.

Fasih Perbankan Syariah
Fluency in Islamic Banking

Fasih Nilai-Nilai Budaya
Fluency in Cultural Values

Fasih Prosedur Kerja
Fluency in Work Procedures

Daily Sharing Session

Aktivitas berbagi informasi dan pengetahuan yang dilakukan secara rutin di setiap unit kantor

Routine information and knowledge sharing activities systematically implemented across all office units.

SENIN

SEkilas Capaia**N** K**IN**erja

1. Dilaksanakan setiap hari Senin
2. Sasaran: seluruh pegawai memiliki informasi terkini terkait (pencapaian) target unit kantornya dan rencana kerja mingguan sehingga menghasilkan kesadaran untuk dapat berkontribusi semakin baik lagi.
3. Dilakukan oleh pimpinan unit kantor masing-masing

1. Conducted every Monday
2. Objective: To ensure all personnel possess the latest information regarding the performance achievements of their respective office units and weekly operational plans, thereby fostering a heightened awareness to elevate their contributions.
3. Facilitated by the respective heads of each office unit.

SELASA

SELami **A**kad **S**y**A**riah

1. Dilaksanakan setiap hari Selasa
2. Sasaran: seluruh pegawai memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai akad dan prakteknya dalam dunia kerja.
3. Materi yang disampaikan dan didiskusikan adalah fatwa-fatwa DSN yang terkait dengan operasional Bank Syariah
4. Disampaikan secara bergiliran di antara pegawai

1. Conducted every Tuesday.
2. Objective: To equip all personnel with comprehensive knowledge and a profound understanding of Sharia contracts (Akad) and their practical application within the professional environment.
3. The materials presented and discussed comprise the fatwas issued by the National Sharia Board (DSN) pertaining to the operational activities of Islamic Banking.
4. Delivered on a rotational basis among the personnel.

RABU

ResA**m** Nilai **BU**daya & Layanan

1. Dilaksanakan setiap hari Rabu
2. Sasaran: seluruh pegawai memiliki pengetahuan, pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai dan perilaku utama budaya "I SHARE" sehingga semakin terinternalisasi di dalam diri dan terimplementasi dalam aktivitas sehari-hari.
3. Materi yang disampaikan dan disikusikan adalah nilai-nilai, dan perilaku utama budaya "I SHARE"
4. Disampaikan secara bergiliran di antara pegawai

1. Conducted every Wednesday.
2. Objective: To assure that all personnel acquire thorough knowledge and understanding of the core values and fundamental behaviors of the "I SHARE" corporate culture, facilitating its deep internalization and consistent implementation in daily operational activities.
3. The materials presented and discussed focus on the core values and primary behaviors integral to the "I SHARE" corporate culture.
4. Delivered on a rotational basis among the personnel.

JUMAT

Menu**JU** **M**ental Seh**AT**

1. Dilaksanakan setiap hari Jum'at.
2. Sasaran: pegawai memiliki keimanan yang kuat dan ibadah yang *shahih*.
3. Agenda program bisa berupa *taushiyah*, dzikir atau pembacaan Al-Qur'an (*Yasin, Al-Kahfi* dll).
4. Dikelola di setiap unit kerja dan dapat melibatkan pihak (ustadz) dari eksternal.

1. Conducted every Friday.
2. Objective: To cultivate strong faith and authentic worship practices among all personnel.
3. The program agenda may include spiritual advisement (*Taushiyah*), remembrance of Allah (*Dhikr*), or the recitation of the Holy *Qur'an* (e.g., *Surah Ya-Sin, Surah Al-Kahf*, etc.).
4. Administered within each respective work unit, with the potential inclusion of external Islamic scholars (*Ustadz*).

KAMIS

KAjian **M**asalah Tekn**IS** Kerja

1. Dilaksanakan setiap hari Kamis
2. Sasaran: pegawai dapat bekerja secara baik sesuai aturan yang berlaku.
3. Materi yang disampaikan dan didiskusikan adalah BPP, sistem prosedur (SOP), dan aturan-aturan bank yang terkait langsung dengan bidang kerja masing-masing
4. Disampaikan secara bergiliran di antara pegawai di bidang kerja masing-masing

1. Conducted every Thursday.
2. Objective: To ensure that personnel execute their duties proficiently and in strict compliance with the applicable regulatory frameworks.
3. The materials presented and discussed encompass the Corporate Guidelines (BPP), Standard Operating Procedures (SOP), and internal bank regulations directly related to their respective areas of expertise.
4. Delivered on a rotational basis among personnel within their specific functional areas.

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar Terakhir

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan didirikannya BRK Syariah adalah melaksanakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan usaha dalam bidang perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Bank Umum Syariah. Kegiatan usaha bank berdasarkan Prinsip Syariah, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau bentuk investasi serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya berdasarkan Prinsip Syariah, serta memberikan jasa dalam sistem pembayaran.

Business Activities According to the Latest Articles of Association

Based on Article 3 of the Articles of Association, the purpose and objective of the establishment of BRK Syariah is to conduct activities or business operations in the field of banking based on Sharia Principles and applicable laws and regulations, specifically as a Sharia Commercial Bank. The bank's business activities based on Sharia Principles include mobilizing funds from the public in the form of deposits or investments, as well as distributing them to the public in the form of financing and/or other forms based on Sharia Principles, and providing services in payment systems.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Mengacu pada Anggaran Dasar PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Pasal 3 ayat 2, kegiatan usaha BRK Syariah adalah sebagai berikut:

Business Activities Conducted

Referring to the Articles of Association of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Article 3 paragraph 2, the business activities of BRK Syariah are as follows:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Telah/Belum Dijalankan Has/Not Executed	Business Activities Based on the Articles of Association
Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	√	Collecting funds in the form of deposits in the form of Current Accounts, Savings, or other equivalent forms based on a Wadi'ah contract or other agreements that do not conflict with Sharia Principles.
Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	√	Raising funds in the form of investments in the form of deposits, savings, or other equivalent forms based on *Mudharabah* contracts or other contracts that do not conflict with Sharia Principles.
Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah*, akad *Musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	√	Distributing profit sharing financing based on *Mudharabah* contracts, *Musyarakah* contracts, or other contracts that do not conflict with Sharia Principles.
Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, akad *Salam*, akad *Istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	√	Disbursing financing based on a *Murabahah* contract, Salam contract, Istishna contract, or other contracts that are not against Sharia Principles.
Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	√	Disbursing financing based on *Qardh* contracts or other contracts that are not against Sharia Principles.
Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad *Ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	√	Distribute movable or immovable property leasing financing to customers based on *Ijarah* contracts and/or lease purchases in the form of *Ijarah Muntakiya bittamlik* or other contracts that are not against Sharia Principles.
Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *Hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	√	Take over debt based on the *Hawalah* contract or other contracts that do not conflict with Sharia Principles.
Melakukan usaha Kartu Debit dan/atau Kartu Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.	√	Doing Debit Card and/or Financing Card business based on Sharia Principles.
Melakukan pemberian jasa pelayanan Perbankan berdasarkan akad antara lain: *Wakalah*, *Hawalah*, *Kafalah*, *Rahn*.	√	Providing Banking services based on contracts, including: *Wakalah*, *Hawalah*, *Kafalah*, *Rahn*.
Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri Surat Berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan Prinsip Syariah antara lain seperti akad *Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah*, atau *Hawalah*.	√	Purchase, sell, or guarantee at its own risk third party securities issued on the basis of underlying transactions based on Sharia Principles such as *Ijarah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Kafalah*, or *Hawalah* contracts.
Membeli Surat Berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia.	√	Purchasing Securities based on Sharia Principles issued by the Government and/or Bank Indonesia.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Telah/Belum Dijalankan Has/Not Executed	Business Activities Based on the Articles of Association
Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.	√	Receiving payments from bills on securities and performing calculations with third parties or between third parties based on Sharia Principles.
Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.	√	Carry out safekeeping for the benefit of other Parties based on an agreement based on Sharia Principles.
Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga berdasarkan Prinsip Syariah.	√	Providing a place to store goods and Securities based on Sharia Principles.
Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.	√	Transferring money both for own account and for the benefit of the Customer based on Sharia Principles.
Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.	√	Placing funds at, borrowing funds from or lending funds to other banks, either using letters, telecommunication facilities or money orders, checks or other means.
Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *Wakalah*.	-	Performing the function as Trustee based on the *Wakalah* contract.
Memberikan fasilitas *letter of credit* atau Bank Garansi berdasarkan Prinsip Syariah.	√	Providing letter of financing or Bank Guarantee facilities based on Sharia Principles.
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang Perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	√	Carrying out other activities that are commonly carried out in the Banking sector and in the social sector as long as they do not conflict with Sharia Principles and are in accordance with the provisions of laws and regulations.
Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah.	√	Conducting foreign exchange activities based on Sharia Principles.
Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau Lembaga Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.	√	Carrying out equity participation activities in Islamic Commercial Banks or Financial Institutions that carry out business activities based on Sharia Principles.
Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.	√	Conducting temporary capital participation activities to overcome the consequences of financing failures based on Sharia Principles with the condition that the participation must be withdrawn.
Bertindak sebagai Pendiri dan Pengurus Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.	-	Acts as Founder and Management of Pension Funds based on Sharia Principles.
Melakukan kegiatan dalam Pasar Modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	√	Carrying out activities in the Capital Market as long as it does not conflict with Sharia Principles and provisions of Laws and Regulations in the Capital Market sector.
Menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.	√	Organizing Bank activities or products based on Sharia Principles by using electronic means.
Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan Surat Berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Uang.	√	Issuing, offering and trading short-term securities based on Sharia Principles, either directly or indirectly through the Money Market.
Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan Surat Berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Modal.	-	Issue, offer and trade long-term Securities based on Sharia Principles, either directly or indirectly through the Capital Market.
Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.	√	Providing products or conducting other Sharia Commercial Bank business activities based on Sharia Principles.
Membantu Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Riau dan Kepulauan Riau dalam membina Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) milik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Riau dan Kepuluan Riau.	√	Assist Provincial, Regency/City Governments throughout Riau and Kepulauan Riau Archipelago in fostering Sharia People's Financing Banks (BPRS) owned by Provincial, Regency/City Governments throughout Riau and Kepulauan Riau s.
Melaksanakan fungsi sebagai lembaga penunjang otonomi daerah, membantu dengan tugas antara lain sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, sebagai pemegang kas daerah dan/atau melaksanakan penyimpanan uang Daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.	√	Carrying out functions as a supporting institution for regional autonomy, assisting with tasks including activating and driving the pace of development in the region, as a regional treasury holder and/or carrying out regional money storage, and as a source of regional income.



PRODUK DAN JASA
Products and Services

BRK Syariah memiliki beragam produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan nasabah dengan Prinsip Syariah sebagai berikut:

BRK Syariah has a variety of products and services that meet customer needs with Sharia Principles as follows:

PRODUK SIMPANAN
Savings Product



TABUNGAN SINAR *WADIAH* DAN *MUDHARABAH*

Merupakan simpanan mata uang rupiah dengan akad *Wadiah* dan/*atau Mudharabah*, memiliki setoran awal yang ringan serta dapat dilengkapi dengan fasilitas kartu ATM/Debit, BRKS *Mobile*, SMS *Banking* dan diikutsertakan dalam setiap program undian. (khusus untuk tabungan Sinar *Mudharabah*).

SINAR WADIAH AND MUDHARABAH SAVINGS

Individual savings account utilizing *Wadiah* and/or *Mudharabah* contracts. It features a low initial deposit requirement and can be complemented with ATM/Debit card facilities, BRKS Mobile, and SMS Banking. Additionally, the account provides eligibility for participation in all prize draw programs (exclusive to Sinar Mudharabah Saving).



TABUNGAN SINAR PRIORITAS

Merupakan simpanan menggunakan akad *Wadiah* atau *Mudharabah* dengan layanan spesial yang diberikan secara eksklusif kepada Nasabah Prioritas dengan berbagai keistimewaan.

SINAR PRIORITY SAVINGS

Individual savings account using *Wadiah* or *Mudharabah* contracts with special services provided exclusively to Priority Customers with various privileges.



TABUNGAN *DHUHA WADIAH* DAN MUDHARABAH

Tabungan perorangan dengan akad *Wadiah* dan/atau *Mudharabah*, diperuntukkan bagi nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji regular.

DHUHA WADIAH AND MUDHARABAH SAVINGS

Individual savings account utilizing *Wadiah* and/or *Mudharabah* contracts, specifically designed for customers intending to undertake the regular Hajj pilgrimage.



TABUNGAN *DHUHA* TERENCANA

Tabungan perorangan menggunakan akad *Mudharabah*, diperuntukkan bagi nasabah yang ingin merencanakan ibadah umrah, haji regular, atau haji khusus dengan sistem *autodebit* dari rekening sumber setiap bulannya sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan penyetoran.

DHUHA TERENCANA SAVINGS

Individual savings using a *Mudharabah* contract, intended for customers who want to plan Umrah, regular Hajj, or special Hajj with an auto-debit system from the source account every month so as to provide convenience in making deposits.



TABUNGAN *DHUHA* UMRAH *WADIAH*

Tabungan perorangan menggunakan akad *Wadiah* untuk tujuan ibadah umrah. Dapat dibuka secara perorangan maupun kolektif dengan travel umrah yang telah bekerjasama dengan BRK Syariah.

DHUHA UMRAH WADIAH SAVINGS

Individual savings using a *Wadiah* contract for the purpose of Umrah worship. Can be opened individually or collectively with Umrah travel that has collaborated with BRK Syariah.







TABUNGAN *DHUHA* HAJI MUDA *WADIAH*

Tabungan haji regular sejak usia dini dengan akad *Wadiah*, diperuntukkan bagi anak berusia maksimal 17 tahun pada saat pembukaan rekening, bebas biaya administrasi tabungan dan dapat melakukan penyetoran kapan saja.

DHUHA HAJI MUDA WADIAH SAVINGS

Regular Hajj savings from an early age with a *Wadiah* contract, intended for children up to 17 years old at the time of account opening, free of administration fees and can make deposits at any time.



TABUNGAN SINAR BELIA *MUDHARABAH*

Merupakan simpanan dengan akad *Mudharabah* diperuntukkan khusus bagi Pelajar dan Mahasiswa

SINAR BELIA MUDHARABAH SAVINGS

Savings account with *Mudharabah* contract intended for students and college students.



TABUNGAN SINAR *QURBAN*

Tabungan dengan akad *Mudharabah* yang diperuntukkan Bagi Nasabah yang merencanakan ibadah *Qurban* dengan cara menabung melalui pola *autodebit* setoran secara bulanan.

SINAR QURBAN SAVINGS

Savings account using a *Mudharabah* contract, specifically designed for customers planning for *Qurban* by accumulating funds through an automated monthly debit system.



TABUNGAN SINAR PENDIDIKAN *MUDHARABAH*

Tabungan berjangka menggunakan akad *Mudharabah* untuk masa depan pendidikan buah hati, dengan sistem *autodebit* memberikan kemudahan dalam melakukan penyetoran tanpa harus ke Kantor Bank, hanya dapat ditarik setelah jangka waktu yang telah diperjanjikan, setoran bulanan yang ringan dan jangka waktu fleksibel.

SINAR PENDIDIKAN MUDHARABAH SAVINGS

Savings account using a *Mudharabah* contract for the future of children's education. The automated debit system provides convenience in making deposits without visiting a bank branch. Funds can only be withdrawn after the agreed-upon period, offering affordable monthly deposits and flexible tenors.



TABUNGAN SINAR DELIMA *MUDHARABAH*

Tabungan dengan segmen bisnis yang memiliki akad *Mudharabah*, diperuntukkan bagi nasabah perorangan atau perusahaan, memiliki berbagai keunggulan dan *benefit* yang tidak dimiliki tabungan lain.

SINAR DELIMA MUDHARABAH SAVINGS

Business-segmented savings account using a *Mudharabah* contract, explicitly tailored for individual and corporate clients. It offers exclusive competitive advantages and premier benefits unparalleled by standard savings products.



TABUNGAN SINAR KPE *MUDHARABAH*

Tabungan dengan akad *Mudharabah* yang diperuntukkan khusus bagi CASN dan ASN Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

SINAR KPE MUDHARABAH SAVINGS

Savings account using a *Mudharabah* contract, exclusively designated for Civil Servant Candidates (CASN) and State Civil Apparatus (ASN) within the Riau and Kepulauan Riau provinces.



TABUNGAN SINAR *COMMUNITY MUDHARABAH*

Tabungan dengan akad *Mudharabah* untuk anggota suatu yayasan, perkumpulan, atau organisasi kemasyarakatan yang telah bekerjasama dengan BRK Syariah.

SINAR COMMUNITY MUDHARABAH SAVINGS

Savings with *Mudharabah* contract for members of a foundation, association, or community organization that has collaborated with BRK Syariah.



Tabungan *NETO (NISBAH* SETARA *DEPOSITO)*

Merupakan tabungan dengan saldo tertentu yang diberikan nisbah setara dengan *counter nisbah* deposito, bebas biaya administrasi dan menggunakan akad *Mudharabah*.

NETO SAVINGS (NISBAH RATE EQUIVALENT TO DEPOSIT)

savings account that, upon maintaining a specified balance, provides a profit-sharing ratio (*nisbah*) equivalent to the financing counter rate. This account is exempt from administrative fees and operates under a *Mudharabah* contract.



DEPOSITO *MUDHARABAH*

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah dengan akad *Mudharabah*, memberikan bagi hasil yang kompetitif dan jangka waktu yang fleksibel.

MUDHARABAH DEPOSIT

A time deposit in rupiah with a *Mudharabah* contract, providing competitive profit sharing and a flexible tenor.



TABUNGAN SIMPEDA *MUDHARABAH*

Tabungan dengan akad *Mudharabah*, diperuntukkan bagi nasabah perorangan atau non perorangan. Merupakan produk tabungan yang diterbitkan secara bersama oleh BPD seluruh Indonesia yang dirancang secara khusus sebagai alat pemersatu BPD seluruh Indonesia.

SIMPEDA MUDHARABAH SAVINGS

Savings with *Mudharabah* contract, intended for individual or non-individual customers. is a savings product Issued jointly by BPDs throughout Indonesia which is specifically designed as a unifying tool for BPDs throughout Indonesia.



TABUNGANKU *MUDHARABAH*

Merupakan simpanan menggunakan akad *Mudharabah* untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TABUNGANKU MUDHARABAH

Savings account using a *Mudharabah* contract, designed for individuals with accessible and straightforward requirements. This product is jointly issued by banks across Indonesia to foster a culture of saving and enhance community welfare.



TABUNGAN SINAR DBOS *MUDHARABAH*

Merupakan simpanan khusus yang menggunakan akad *Mudharabah* untuk sekolah baik negeri maupun swasta yang ditetapkan sebagai penerima dana BOS.

SINAR DBOS MUDHARABAH SAVINGS

A special savings account using a *Mudharabah* contract for both public and private schools that are designated as recipients of BOS funds.







TABUNGAN SimPel *WADIAH*

Merupakan simpanan menggunakan akad *Wadiah* untuk siswa PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA sederajat yang diterbitkan secara Nasional oleh Bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah.

SIMPEL WADIAH SAVINGS

It is a savings account using *Wadiah* contract for students of Preschool, kindergarten, elementary school, junior high school, high school equivalent which is issued nationally by banks in Indonesia with easy requirements.



TABUNGAN SINARLAKU *MUDHARABAH*

Merupakan simpanan menggunakan akad *Mudharabah* bagi WNI yang belum memiliki rekening di Bank dan transaksi dapat dilakukan di agen Laku Pandai maupun di Kantor Cabang Bank dengan biaya terjangkau.

SINARLAKU MUDHARABAH SAVINGS

Savings account using a *Mudharabah* contract, targeted at Indonesian citizens who are currently unbanked. Transactions can be conveniently executed through Laku Pandai agents or Bank Branch Offices at affordable costs.



GIRO *WADIAH* DAN *MUDHARABAH*

Giro hadir dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang diperuntukkan bagi perorangan atau non-perorangan. Penarikan dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau melalui pemindahbukuan. Dengan setoran awal yang ringan memberikan kemudahan dalam mengatur keuangan.

WADIAH DAN MUDHARABAH CURRENT ACCOUNT

Current account utilizing either a *Mudharabah* or *Wadiah* contract, available for both individual and corporate clients. Withdrawals can be executed at any time via checks, bilyet giro, other payment order instruments, or book-entry transfers. The affordable initial deposit requirement offers clients greater flexibility in financial management.





DEPOSITO CWLD (*CASH WAQF LINKED DEPOSIT*)

Merupakan jenis deposito *Mudharabah* dari setoran wakaf uang jangka waktu tertentu/temporer dimana bagi hasilnya diberikan langsung ke *Mauquf Alaih* atau dibayarkan untuk angsuran pembiayaan *Nazhir* dalam rangka proyek CWLD.

CWLD DEPOSIT (CASH WAQF LINKED DEPOSIT)

It is a type of *Mudharabah* deposit from a certain period/contemporary cash waqf deposit where the profit sharing is given directly to *Mauquf Alaih* or paid for the Nazir's financing installment in the context of CWLD project.

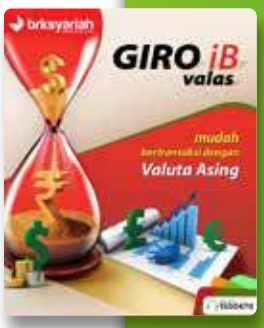


SINAR iB VALAS

Simpanan perorangan dalam mata uang valuta asing dengan menggunakan akad *Mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan slip penarikan, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan dan memperoleh bagi hasil atas dana yang ditempatkan sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan.

SINAR iB VALAS

Individual deposits in foreign currencies using a *Mudharabah* contract whose withdrawals can be made according to agreement using a withdrawal slip, other means of payment order, or by book-entry order and receive profit sharing on the funds placed in accordance with the predetermined ratio.



GIRO iB VALAS

Simpanan non perorangan dalam mata uang valuta asing dengan menggunakan akad *Mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan slip penarikan, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan dan memperoleh bagi hasil atas dana yang ditempatkan sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan.

CURRENT ACCOUNT iB IN FOREIGN CURRENCY

Non-individual deposits in foreign currencies using a *Mudharabah* contract whose withdrawals can be made according to agreement using a withdrawal slip, other means of payment order, or by book-entry order and receive profit sharing on the funds placed in accordance with the predetermined ratio.



DEPOSITO iB VALAS

Simpanan berjangka perorangan & non perorangan dengan menggunakan akad *Mudharabah* dalam mata uang asing, yang pembagian keuntungannya dinyatakan dalam nisbah, penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan Bank.

DEPOSIT iB IN FOREIGN CURRENCY

Individual & non-individual term deposits using *Mudharabah* contracts in foreign currencies, whose profit sharing is expressed in a ratio, withdrawals can only be made at certain times based on the deposit customer's agreement with the Bank.



TABUNGAN *DHUHA* VALAS

Tabungan untuk perorangan & non perorangan dalam mata uang SAR yang ingin menunaikan ibadah haji regular, haji khusus maupun umrah.

DHUHA SAVING ACCOUNT IB IN FOREIGN CURRENCY

A specialized savings account available to individual and non-individual entities, denominated in Saudi Riyals (SAR), designed to systematically prepare funds for regular Hajj, special Hajj, and Umrah pilgrimages.

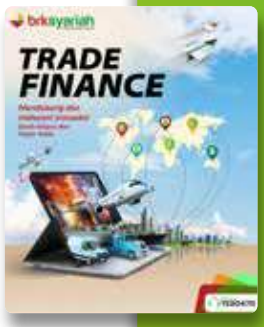


REMITTANCE TRANSFER VALAS

Remittance merupakan layanan BRK Syariah dalam pengiriman/transfer uang valuta asing dari dalam dan ke luar negeri menggunakan sarana *SWIFT* (*society for worldwide interbank financial telecommunication*) dalam mata uang USD, EUR, SGD.

REMITTANCE TRANSFER IN FOREIGN CURRENCY

A premier foreign exchange service provided by BRK Syariah for both inbound and outbound cross-border fund transfers. The service utilizes the SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) network, accommodating transactions in USD, EUR, and SGD.



TRADE FINANCE

Trade Finance merupakan layanan dari BRK Syariah yang dapat membantu nasabah dalam mengelola proses jual-beli (dalam negeri) dan ekspor-impor (mancanegara) bersama mitra bisnis masing-masing, seperti *Letter of Credit* (L/C), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dan *Standby Letter of Credit* (SBLC).

TRADE FINANCE

Trade Finance is a service from BRK Syariah that can assist customers in managing the buying and selling process (domestic) and export-import (overseas) with their respective business partners, such as Letter of Credit (L/C), Domestic Documentary Letter of Credit (SKBDN), and Standby Letter of Credit (SBLC).



MONEY CHANGER

Money Changer/ Jual Beli Valas merupakan layanan BRK Syariah dalam penukaran valuta asing dalam bentuk uang kertas/ fisik (*bank note*) dalam mata uang USD, SGD, MYR, EUR, dan SAR.

MONEY CHANGER

Money Changer/ Forex Buying and Selling is BRK Syariah's service in exchanging foreign exchange in the form of paper / physical money (bank notes) in USD, SGD, MYR, EUR, and SAR.



LAYANAN BANK
Banking Services



BRKS *Mobile*

Merupakan layanan *Mobile Banking* bagi nasabah perorangan yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi kapan pun dan di mana pun.

Layanan ini mencakup berbagai fitur yaitu:
- Informasi rekening tabungan, giro perorangan, deposito, dan valas
- Pembayaran QRIS MPM
- Transfer (sesama, ibft, dan BI-FAST)
- Pembayaran (pulsa pascabayar, telkompay, Samsat Signal, Pajak PBB, Pajak daerah Lainnya, PLN Pascabayar, PLN Non Taglis, tiket lion air, BPJS Kesehatan, BPJS Jamsostek, tagihan air, dan pembayaran universitas)
- Pembelian (pulsa prabayar, paket data, telkomsel paket spesial, dan PLN Prabayar)
- *Top Up e-wallet* (OVO, GoPay, LinkAja, iSaku, Shopee Pay, E-Money)
- Ziswaf (zakat, infaq/sedekah, wakaf)
- Blokir Kartu ATM
- Informasi nilai tukar kurs
- Informasi lokasi ATM
- Informasi Islami (waktu sholat, arah kiblat, lokasi masjid terdekat, Al-Qur'an)
- Informasi call center

BRKS MOBILE

A Mobile Banking service for individual customers that provides convenience in conducting transactions anytime and anywhere.

This service encompasses various features, namely:
- Account information for savings, individual current accounts, time deposits, and foreign exchange
- QRIS MPM Payments
- Transfers (intrabank, IBFT, and BI-FAST)
- Payments (postpaid mobile credit, Telkompay, Samsat Signal, Land and Building Tax/PBB, Other Regional Taxes, Postpaid PLN, Non-Taglis PLN, Lion Air tickets, BPJS Kesehatan, BPJS Jamsostek, water bills, and university payments)
- Purchases (prepaid mobile credit, data packages, Telkomsel special packages, and Prepaid PLN)
- E-wallet Top-Ups (OVO, GoPay, LinkAja, iSaku, ShopeePay, E-Money)
- Ziswaf (Zakat, Infaq/Sadaqah, Waqf)
- ATM Card Blocking
- Exchange rate information
- ATM location information
- Islamic information (prayer times, Qibla direction, nearest mosque locations, Al-Qur'an)
- Call center information



SMS *Banking* BRK SYARIAH

Merupakan layanan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi transfer sesama rekening BRK Syariah, memperoleh informasi saldo rekening, notifikasi transaksi di rekening melalui pesan SMS tanpa memerlukan koneksi internet.

BRK SYARIAH SMS BANKING

A service that enables customers to perform intrabank transfers between BRK Syariah accounts, obtain account balance information, and receive transaction notifications via SMS without requiring an internet connection.



EDC BRK SYARIAH

Merupakan Layanan *Electronic Data Capture* (EDC) bagi merchant dengan fitur *purchase* (khusus Kartu ATM/Debit BRK Syariah), fitur mini ATM, dan QRIS Dinamis *merchant*.

Fitur mini ATM terdiri dari:

- Transfer (sesama BRKS dan antarbank)
- Pembayaran (Tagihan Telepon, Pajak PBB, Pajak Daerah Lainnya, Pajak Kendaraan Bermotor)
- Pembelian (*voucher* pulsa dan paket data)

BRK SYARIAH EDC

An Electronic Data Capture (EDC) service for merchants featuring a purchase function (exclusively for BRK Syariah ATM/Debit Cards), mini ATM features, and dynamic merchant QRIS.

The mini ATM features consist of:

- Transfers (intrabank BRKS and interbank)
- Payments (Telephone Bills, Land and Building Tax/ PBB, Other Regional Taxes, Motor Vehicle Tax)
- Purchases (mobile phone credit vouchers and data packages)





LAYANAN QRIS BRK SYARIAH

Layanan QRIS BRK Syariah merupakan layanan transaksi QRIS MPM (*Merchant Presented Mode*) yang diberikan kepada Nasabah, terdiri dari:

a. Layanan QRIS *Merchant* merupakan layanan bagi *merchant* perorangan atau Badan Usaha sehingga dapat melakukan penerimaan pembayaran QRIS MPM dari seluruh aplikasi *Mobile Banking* Pelanggan yang sudah memiliki fitur pembayaran QRIS MPM.

b. Fitur Pembayaran QRIS di Aplikasi BRKS *Mobile* merupakan fitur pembayaran QRIS MPM untuk pembelanjaan di *merchant* dengan cara men-scan kode QRIS *merchant*.

QRIS BRK SYARIAH SERVICE

The BRK Syariah QRIS Service is a QRIS MPM (Merchant Presented Mode) transaction service provided to Customers, consisting of:

a. Merchant QRIS Service, A service for individual merchants or Corporate Entities enabling them to receive QRIS MPM payments from all Customer Mobile Banking applications equipped with the QRIS MPM payment feature.

b. QRIS Payment Feature on the BRKS Mobile Application: A QRIS MPM payment feature for purchases at merchants by scanning the merchant's QRIS code.



KARTU ATM /Debit BRK SYARIAH

Kartu ATM/Debit BRK Syariah merupakan kartu Bank berteknologi *chip* berfungsi sebagai Kartu ATM sekaligus sebagai Kartu Debit untuk pembelanjaan di *merchant*. Kartu ATM/Debit BRK Syariah dapat digunakan di seluruh mesin ATM berlogo GPN, ATM Bersama, Prima.

BRK SYARIAH ATM/DEBIT CARD

BRK Syariah ATM/Debit Card is a chip technology bank card that functions as an ATM Card as well as a Debit Card for purchases at merchants. The BRK Syariah ATM/Debit Card can be used at all ATM machines with the GPN logo, ATM Bersama, Prima.





LAYANAN INTEGRASI SIPD RI

Merupakan layanan berbasis API yang memberikan akses integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI dengan sistem Bank untuk mendukung pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel.

SIPD RI INTEGRATION SERVICE

An API-based service that provides access to integration of the RI Regional Government Information System (SIPD) with the Bank's system to support efficient, economical, effective, transparent, accountable and auditable financial management of the Regional Government.



LAYANAN SIPD E-BLUD PADA APLIKASI CMS

Merupakan layanan integrasi sistem *SIPD E-BLUD* Kemendagri dengan Aplikasi CMS BRK Syariah untuk mendukung tata kelola keuangan instansi penyelenggara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan layanan publik.

SIPD E-BLUD SERVICE ON CMS APPLICATION

Is an integration service for the SIPD E-BLUD system of the Ministry of Home Affairs with the BRK Syariah CMS Application to support transparent and accountable financial governance of the Regional Public Service Agency (BLUD) organizing agency in the provision of public services.



LAYANAN INTEGRASI SISKEUDES PADA APLIKASI CMS

Merupakan layanan integrasi sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) Kemendagri dengan Aplikasi CMS BRK Syariah untuk mendukung pengelolaan dana desa secara non tunai.

SISKEUDES INTEGRATION SERVICE ON CMS APPLICATION

Is an integration service for the village financial information system (Siskeudes) of the Ministry of Home Affairs with the BRK Syariah CMS Application to support non-cash village fund management.



CASH MANAGEMENT SYSTEM

Merupakan layanan internet *Banking* bagi *corporate* maupun perseroan perorangan dengan berbagai fitur untuk memudahkan pengelolaan keuangan secara *real time*, antara lain informasi arus kas rekening secara *real time*, fitur transfer BI *Fast*, transfer sesama dan antar bank, pembayaran *payrol* gaji, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, Pajak MPN, dan sebagainya

CASH MANAGEMENT SYSTEM

An internet Banking service for corporate and individual companies with various features to facilitate financial management in real time, including real time account cash flow information, BI Fast transfer features, peer and interbank transfers, salary payroll payments, Employment BPJS payments, MPN, Tax and so on.



E-MONEY

Alat pembayaran berupa kartu uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran di merchant dan dapat diisi ulang menggunakan BRKS *Mobile* maupun di outlet lainnya (*co branding* dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk).

E-MONEY

A payment instrument in the form of an electronic money card that can be utilized for merchant transactions and is reloadable via BRKS Mobile as well as other designated outlets (a co-branding initiative with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk).



SAFE DEPOSIT BOX

Merupakan fasilitas layanan penyimpanan bagi nasabah untuk menyimpan barang maupun dokumen berharga dengan sistem keamanan yang dirancang secara khusus dalam memberikan perlindungan maksimum terhadap barang berharga dan dokumen dari bahaya kebakaran, pencurian dan risiko kehilangan.

SAFE DEPOSITE BOX

It is a storage service facility for customers to store valuable goods and documents with a specially designed security system to provide maximum protection for valuables and documents from the dangers of fire, theft and risk of loss.

PRODUK KOMERSIAL
Commercial Products



PEMBIAYAAN ATAS DASAR KONTRAK

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah yang berbadan usaha yang bergerak di bidang pembangunan fisik, *engineering,* dan penyediaan barang dan jasa dengan sistem Transaksional dan *Standby Plafond* dengan *underlying* kontrak dari Pemilik Pekerjaan.

FINANCING ON A CONTRACT BASIS

Financing facilities provided to customers who are business entities engaged in physical development, engineering and the supply of goods and services with a Transactional system and Standby Ceiling with an underlying contract from the Employer.



PEMBIAYAAN MODAL KERJA

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Perseorangan atau Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar.

WORKING CAPITAL FINANCING

Financing facilities provided to individuals or business entities to meet the needs of current assets.



PEMBIAYAAN INVESTASI

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Badan Usaha dengan tujuan untuk membiayai pengadaan aktiva tetap baik untuk usaha baru, perluasan, rehabilitasi, dan relokasi.

INVESTMENT FINANCING

Financing facilities provided to Business Entities with the aim of financing the procurement of fixed assets for new businesses, expansion, rehabilitation, and relocation.



PEMBIAYAAN SINDIKASI

Pembiayaan Sindikasi adalah akad atau perjanjian antara beberapa lembaga keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah, maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama.

SINDICATION FINANCING

Syndicated Financing is a contract or agreement between several financial institutions, both among fellow Islamic Financial Institutions, as well as between Islamic Financial Institutions and Conventional Financial Institutions, in order to jointly finance certain projects.



BANK GARANSI

Surat Berharga (surat jaminan) yang dikeluarkan Bank Umum/Lembaga Keuangan lainnya kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak yang terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya, kewajiban mana bersifat kontigensi yang timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dan prestasi di masa yang akan datang.

BANK GUARANTEE

Securities (guarantee letters) issued by commercial banks / other financial institutions to the recipient of the guarantee that the Bank will pay a certain amount of money to him at a certain time if the guaranteed party cannot fulfill his obligations, which obligations are contingent in nature whose emergence depends on the occurrence or non-occurrence of one or more events and achievements in the future.



SKBDN

Janji tertulis dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) yang diterbitkan oleh Bank Pembuka (*Issuing Bank*) atas instruksi dari Pemohon (*Applicant*) untuk membayar sejumlah uang kepada Penerima (*Beneficiary*) sepanjang syarat dan kondisi yang tercantum di dalam SKBDN terpenuhi.

SKBDN

A written and irrevocable promise issued by the issuing bank on instructions from the applicant to pay a sum of money to the beneficiary as long as the terms and conditions stated in the SKBDN are met.



LETTER OF CREDIT

Perjanjian yang diterbitkan oleh Bank (*Issuing Bank*) yang bertindak atas permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran atas dokumen *export-impor* yang dikirimkan oleh penerima L/C.

LETTER OF CREDIT

An agreement issued by a Bank (Issuing Bank) that acts at the request of its customers to make payments on export-import documents sent by L/C recipients.



SUPPLY CHAIN FINANCING

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Badan Usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum serta Badan Layanan Umum yang memiliki tagihan (*invoice*) kepada *Principal* sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak/ Perjanjian.

SUPPLY CHAIN FINANCING

Financing facilities provided to Business Entities, both legal entities and non-legal entities as well as Public Service Agencies that have invoices to the Principal as stated in the Contract/ Agreement.

PRODUK MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
Micro, Small, and Medium Products



PEMBIAYAAN PENGUSAHA MIKRO

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro secara perseorangan dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MICRO ENTREPRENEURS FINANCING

Financing provided to individual micro-entrepreneurs with the aim of productive business, both for working capital and investment that does not conflict with Sharia Principles and applicable laws and regulations.



PEMBIAYAAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil & menengah perseorangan, perusahaan dan koperasi dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS FINANCING

Financing provided to individual small & medium entrepreneurs, companies and cooperatives with the aim of productive business, both for working capital and investment that does not conflict with Sharia Principles and applicable laws and regulations.



PEMBIAYAAN AGRIBISNIS KELAPA SAWIT

Pembiayaan Agribisnis *Replanting* Kelapa Sawit adalah pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah dalam rangka penanaman kembali kebun kelapa sawit yang digunakan untuk peremajaan kebun.

OIL PALM AGRIBUSINESS FINANCING

Oil Palm Agribusiness Replanting Financing is financing provided to prospective customers in the context of replanting oil palm plantations that are used for plantation rejuvenation.



KUR iB

Merupakan fasilitas pembiayaan KUR dengan Prinsip Syariah untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi bagi perseorangan dan/atau kelompok usaha produktif yang layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

KUR iB

Is a KUR financing facility with Sharia Principles for working capital and/or investment needs for individuals and/or productive business groups who are eligible but do not yet have additional collateral or insufficient additional collateral.



PRODUK KONSUMER
Consumer Products



GADAI EMAS (RAHN)

Fasilitas Gadai Emas Dengan Maksimal Pembiayaan Sebesar Rp 250.000.000,- Biaya Ujrah Yang Ringan Dan Jangka Waktu Maksimal 4 Bulan.

GOLD PAWNING (RAHN)

A Gold Pawning facility offering a maximum financing ceiling of IDR 250,000,000, featuring highly competitive ujrah (safekeeping fees) and a maximum tenor of 4 months.



PEMBIAYAAN UMRAH

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan dan kolektif untuk perjalanan ibadah umrah.

UMRAH FINANCING

A targeted financing facility extended to both individual and collective customers to support the financial requirements of the Umrah pilgrimage.



PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (PKE)

Pembiayaan kepemilikan emas adalah pembiayaan yang bertujuan untuk investasi emas dalam bentuk batangan ataupun perhiasan dengan *margin* yang kompetitif.

GOLD OWNERSHIP FINANCING (PKE)

Gold Ownership Financing is a financing facility designed for gold investments, encompassing both bullion and jewelry, offered with competitive margins.



PEMBIAYAAN CWLD KONSUMTIF

Pembiayaan yang diberikan kepada *Nazhir* yang menerima wakaf uang temporer yang menggunakan deposito sebagai instrumen pengembangan hasilnya bertujuan konsumtif.

CWLD CONSUMPTIVE FINANCING

A financing facility extended to a Nazhir receiving temporary cash waqf, utilizing deposits as the investment instrument to generate returns designated for consumptive purposes.



Helwin Yunus
Plt. Direktur Utama
Act. President Director



PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA FLPP

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).

SEJAHTERA HOUSE OWNERSHIP FINANCING FLPP (FLPP HOME OWNERSHIP FINANCING)

This is home ownership financing with the support of housing finance liquidity facilities for Low-Income Communities (MBR), whose management is carried out by the Public Housing Savings Management Agency (BP TAPERA).



PEMBIAYAAN ANEKA GUNA

Pembiayaan Aneka Guna BRK Syariah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berpenghasilan tetap (ASN, CPNS, Pegawai BUMN/ BUMD, Pegawai tetap perusahaan swasta, dll) dan pekerja profesi (dokter, notaris, dll) untuk berbagai kebutuhan yang bersifat konsumtif antara lain pendidikan, pernikahan, kesehatan, dan lain-lain.

MULTIPURPOSE FINANCING

BRK Syariah Aneka Guna Financing is a financing facility provided to fixed-income customers (ASN, CPNS, BUMN/BUMD employees, permanent employees of private companies, etc.) and professional workers (doctors, notaries, etc.) for various consumptive needs, including education , marriage, health, and others.



PEMBIAYAAN ANEKA GUNA PRA PENSIUN DAN PENSIUN

Pembiayaan Aneka Guna Pra Pensiun dan pensiun adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan tujuan konsumtif, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau maksimal dalam waktu 12 tahun ke depan akan memasuki usia pensiun normal dan pensiunan.

MULTIPURPOSE PRE-RETIREMENT AND PENSION FINANCING

Multipurpose Pre-Retirement and Pension Funding is a financing facility provided for consumptive purposes, given to State Civil Servants who have entered the retirement preparation period or a maximum of the next 12 years will enter the normal retirement age and retiree.



PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH

Pembiayaan Kepemilikan Rumah diberikan kepada perorangan untuk membeli Tanah dan/atau bangunan/renovasi Rumah, Ruko, Rusun, Apartemen baik melalui developer, non developer atau membangun sendiri (swadaya) dan juga *take over* (pengambilalihan dari bank lain).

HOME OWNERSHIP FINANCING

Home Ownership Financing is given to individuals to buy land and/or building/ renovating houses, shophouses, flats, apartments either through developers, non-developers or build their own and also take over from other banks.



PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk membiayai kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat, baik kendaraan baru atau kendaraan lama (bekas).

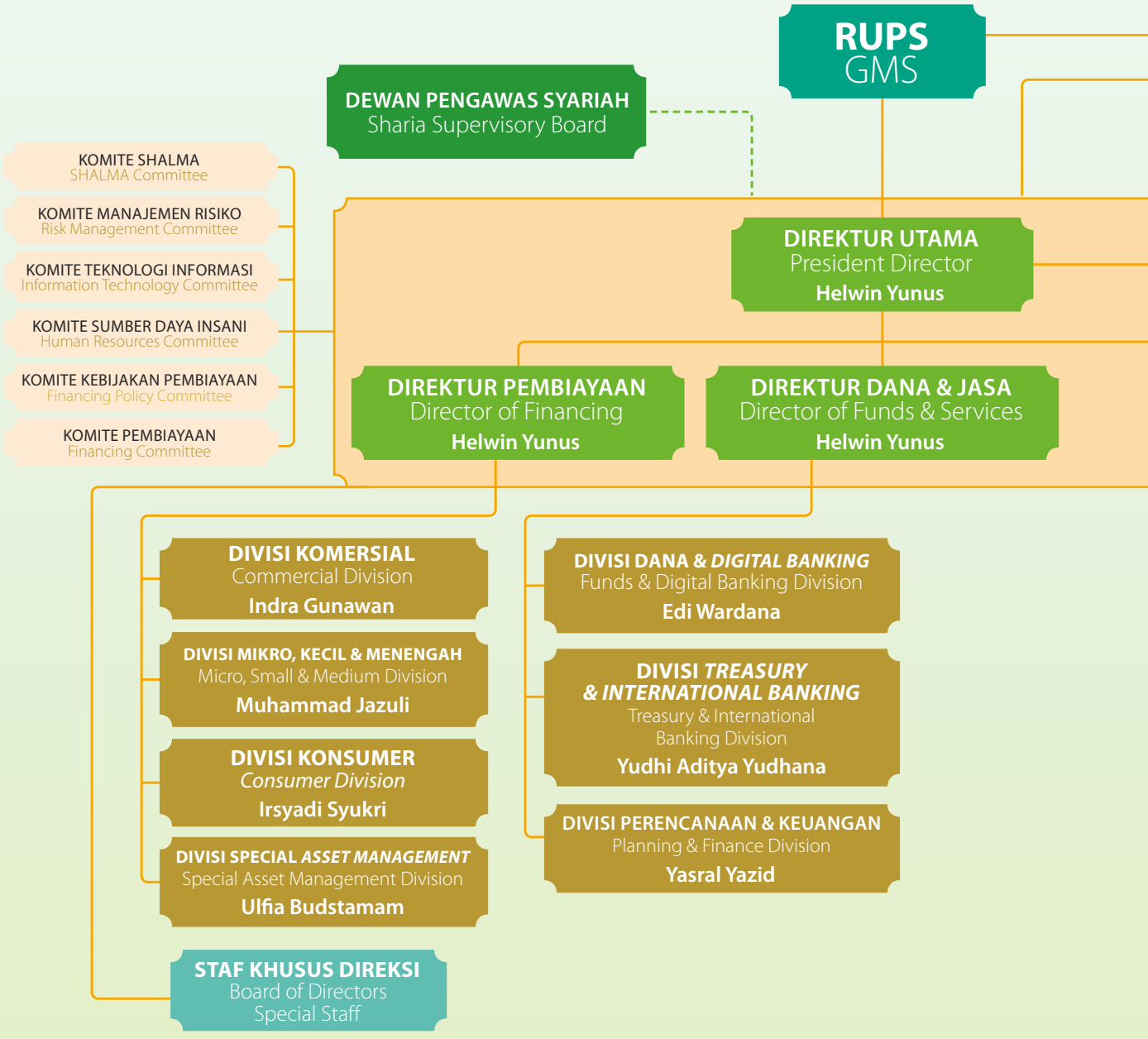
MOTORIZED VEHICLE FINANCING

A financing facility provided to individual customers to finance the ownership of two-wheeled and four-wheeled vehicles, both new and old (used) vehicles.



STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor: 193/ KEPDIR/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Perubahan Pertama Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Nomor: 227/KEPDIR/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), struktur organisasi BRK Syariah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:



Keterangan | Explanation :

Garis Instruksi | Instruction Line =

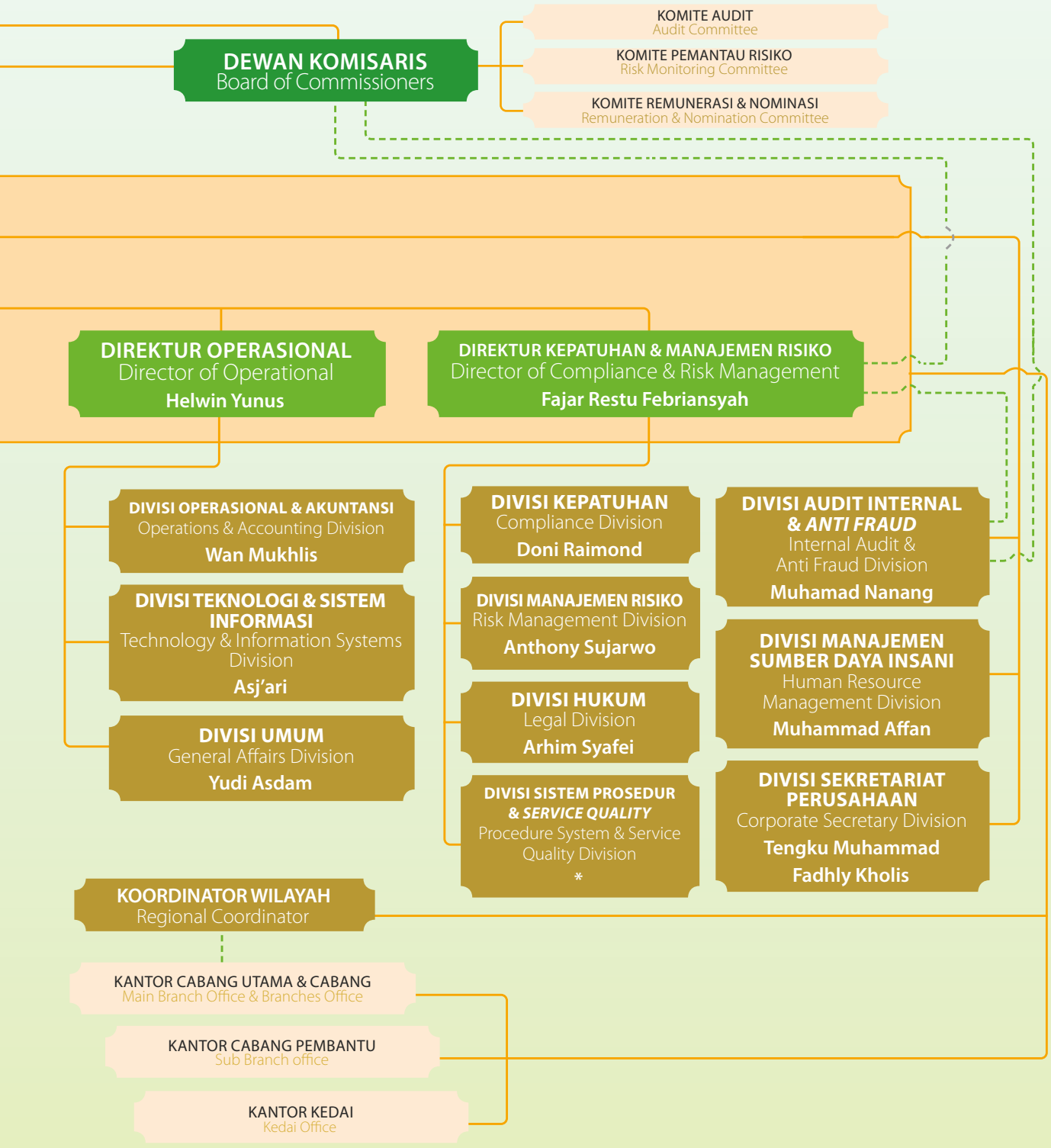
Garis Koordinasi | Coordination Line =

Catatan | Note :

* Untuk Jabatan Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality* berakhir per November 2025 dikarenakan Pemimpin Divisi mengikuti proses pencalonan anggota DPS.

* The term for the Vice President of System Procedures & Service Quality concluded as of November 2025, due to the Vice President participating in the nomination process for the Sharia Supervisory Board (DPS).

Pursuant to the Board of Directors Decree Number: 193/KEPDIR/2024 dated October 18, 2024, regarding the First Amendment to the Board of Directors Decree of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Number: 227/KEPDIR/2022 dated December 15, 2022, concerning the Organizational Structure and Operational Procedures of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), the organizational structure of BRK Syariah as of December 31, 2025, is as follows:



Tabel Daftar Nama Pejabat dalam Struktur Organisasi BRK Syariah per 31 Desember 2025
Table of Officials in the Organizational Structure of BRK Syariah as of December 31, 2025

Dewan Komisaris	Komisaris Utama President Commissioner Komisaris Independen Independent Commissioner	: - : Roy Prakoso	Board of Commissioners
Direksi	Plt. Direktur Utama Act. President Director Direktur Pembiayaan Director of Financing Direktur Dana & Jasa Director of Funds & Services Direktur Operasional Director of Operations Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Director of Compliance & Risk Management	: Helwin Yunus : Helwin Yunus : Helwin Yunus : Helwin Yunus : Fajar Restu Febriansyah	Board of Directors
Dewan Pengawas Syariah	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	: Zulhendri Rais : -	Sharia Supervisory Board
Komite Audit	Ketua Chairman Anggota Members	: Roy Prakoso : - Fahmi Oemar - Indarti	Audit Committee
Komite Pemantau Risiko	Ketua Chairman Anggota : Members	: Roy Prakoso - Fahmi Oemar - Indarti - Zulhendri Rais	Risk Monitoring Committee
Komite Remunerasi dan Nominasi	Ketua Chairman Anggota Members	: Roy Prakoso : Muhammad Affan	Remuneration and Nomination Committee

Divisi Komersial	Indra Gunawan	Commercial Division
Divisi Mikro, Kecil & Menengah	Muhammad Jazuli	Micro, Small & Medium Division
Divisi Konsumer	Irsyadi Syukri	Consumer Division
Divisi *Special Asset Management*	Ulfia Budstamam	Special Asset Management Division
Divisi Dana & *Digital Banking*	Edi Wardana	Funds & Digital Banking Division
Divisi *Treasury & International Banking*	Yudhi Aditya Yudhana	Treasury & International Banking Division
Divisi Perencanaan & Keuangan	Yasral Yazid	Planning & Finance Division
Divisi Operasional & Akuntansi	Wan Mukhlis	Operations & Accounting Division
Divisi Teknologi & Sistem Informasi	Asj'ari	Technology & Information Systems Division
Divisi Umum	Yudi Asdam	General Affairs Division
Divisi Kepatuhan	Doni Raimond	Compliance Division
Divisi Manajemen Risiko	Anthony Sujarwo	Risk Management Division
Divisi Hukum	Arhim Syafei	Legal Division
Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality*	*	Procedure System & Service Quality Division
Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*	Muhamad Nanang	Internal Audit & Anti Fraud Division
Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	Muhammad Affan	Human Resource Management Division
Divisi Sekretariat Perusahaan	Tengku Muhammad Fadhly Kholis	Corporate Secretary Division

Catatan | Note :

* Untuk Jabatan Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality* berakhir per November 2025 dikarenakan Pemimpin Divisi mengikuti proses pencalonan anggota DPS.

* The term for the Vice President of System Procedures & Service Quality concluded as of November 2025, due to the Vice President participating in the nomination process for the Sharia Supervisory Board (DPS).

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI BRK SYARIAH
LIST OF BRK SYARIAH ASSOCIATION MEMBERSHIPS

BRK Syariah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai asosiasi nasional, yang bertujuan untuk memperluas jaringan kemitraan strategis terkait bisnis perbankan syariah sejalan dengan perkembangan lingkungan bisnis, yakni: Berikut daftar keanggotaan asosiasi BRK Syariah per 31 Desember 2025:

BRK Syariah establishes strategic partnerships with various national associations, aiming to expand strategic partnership networks related to sharia banking business in line with business environment developments, namely: The following is the list of BRK Syariah association memberships as of December 31, 2025:

No.	Nama Asosiasi/ Perhimpunan/ Lembaga	Status Keanggotaan Membership Status	Association / Society / Institution Name
1	Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas)	√	Association of National Banks (Perbanas)
2	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)	√	Association of Regional Development Banks (Asbanda)
3	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	√	Indonesian Payment System Association (ASPI)
4	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	√	Communication Forum for Banking Compliance Directors (FKDKP)
5	Forum Komunikasi Dewan Komisaris (FKDK)	√	Communication Forum for the Board of Commissioners (FKDK)
6	Badan Musyawarah Pembangunan Daerah (BMPD)	√	Regional Development Consultative Body (BMPD)
7	Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK)	√	Financial Services Industry Communication Forum (FKIJK)
8	Indonesia *Islamic Global Market Association* (IIGMA)	√	Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA)
9	Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (Apuvindo)	√	Indonesian Money Market and Foreign Exchange Association (Apuvindo)
10	Asosiasi *Swift* Indonesia (Aswiftindo)	√	Swift Indonesia Association (Aswiftindo)
11	Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)	√	Indonesian Sharia Banks Association (ASBISINDO)

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI PADA TAHUN BUKU DAN SETELAH TAHUN BUKU 2025 SERTA ALASAN PERUBAHANNYA

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS DURING AND AFTER THE 2025 FISCAL YEAR AND THE REASONS FOR THE CHANGES

Komposisi Direksi BRK Syariah Tahun 2025

Pada tahun 2025, terdapat perubahan jumlah dan susunan Direksi yaitu dengan adanya:

1. Pengangkatan Sdr. Helwin Yunus sebagai Plt. Direktur Utama berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No.03 tanggal 28 April 2025.
2. Pemberhentian dengan hormat Sdr. M.A Suharto sebagai Direktur Dana & Jasa berdasarkan AKTA Berita Acara RUPS No.03 tanggal 28 April 2025 dan efektif berakhir sejak 14 September 2025.
3. Pemberhentian dengan hormat Sdr. Said Syamsuri sebagai Direktur Operasional berdasarkan AKTA Berita Acara RUPS No.03 tanggal 28 April 2025 dan efektif berakhir sejak 14 September 2025.

Berikut Perubahan susunan Direksi BRK Syariah selama tahun buku 2025:

Composition of the Board of Directors of BRK Syariah in 2025

In 2025, there were changes to the number and composition of the Board of Directors, specifically due to the:

1. Appointment of Mr. Helwin Yunus as the Acting President Director, pursuant to the Deed of the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) No. 03 dated April 28, 2025.
2. Honorable discharge of Mr. M.A Suharto as the Director of Funding and Services, pursuant to the Deed of the Minutes of the GMS No. 03 dated April 28, 2025, effective as of September 14, 2025.
3. Honorable discharge of Mr. Said Syamsuri as the Director of Operations, pursuant to the Deed of the Minutes of the GMS No. 03 dated April 28, 2025, effective as of September 14, 2025.

The following are the changes to the composition of the Board of Directors of BRK Syariah during the 2025 fiscal year:

Periode 1 Januari 2025-14 September 2025 Period of January 1, 2025 - September 14, 2025		Periode 29 April 2025 - 31 Desember 2025 Period of April 29, 2025 - December 31, 2025	
Nama Name	**Jabatan** Position	**Nama** Name	**Jabatan** Position
M. A. Suharto	Direktur Dana & Jasa Director of Funds & Services	Helwin Yunus	Plt. Direktur Utama Act. President Director
Said Syamsuri	Direktur Operasional Director of Operations	Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Director of Compliance & Risk Management
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Director of Compliance & Risk Management		
Helwin Yunus	Direktur Pembiayaan Director of Financing		

Alasan Perubahan Komposisi Direksi Tahun Buku 2025

Alasan perubahan komposisi Direksi adalah dikarenakan telah berakhirnya masa jabatan Direktur Dana & Jasa dan Direktur Operasional, serta dalam rangka pemenuhan komposisi Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), maka dilakukan pembukaan lowongan untuk proses seleksi bagi calon Direksi.

Komposisi Direksi Setelah Tahun Buku 2025

Komposisi Direksi BRK Syariah setelah tahun buku 2025 hingga penyampaian Laporan Tahunan ini kepada Pemegang Saham tidak mengalami perubahan, sehingga tidak ada informasi mengenai alasan perubahan komposisi Direksi BRK Syariah setelah tahun buku 2025.

Reasons for the Change in the Composition of the Board of Directors in 2025 Fiscal Year

The changes in the composition of the Board of Directors occurred due to the expiration of the tenures of the Director of Funding and Services and the Director of Operations. Furthermore, in order to fulfill the required composition of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), vacancies have been opened for the selection process of prospective Directors.

Composition of the Board of Directors After the 2025 Fiscal Year

The composition of the Board of Directors of BRK Syariah after the 2025 fiscal year until the submission of this Annual Report to the Shareholders has remained unchanged; therefore, there is no information regarding the reasons for changes in the composition of the Board of Directors of BRK Syariah after the 2025 fiscal year.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE



FAJAR RESTU FEBRIANSYAH
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Director of Compliance & Risk Management

HELWIN YUNUS
Plt. Direktur Utama
Act. President Director



HELWIN YUNUS

Plt. Direktur Utama
Act. President Director

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Pekanbaru, 2 Juli 1973. Usia 52 tahun per 31 Desember 2025

Dasar Hukum Pengangkatan (Direktur Pembiayaan)
Pernyataan keputusan pemegang saham Akta No.12 Tanggal 29 November 2024 dan Surat OJK No. SR-106/ KO.154/2024 tanggal 18 Desember 2024

Dasar Hukum Pengangkatan (Plt. Direktur Utama)
Pernyataan keputusan pemegang saham Akta No.03 Tanggal 28 April 2025 dan Surat OJK No. S-354/ KO.154/2025 tanggal 09 Desember 2025

Citizenship: Indonesian Citizen

Domicile: Pekanbaru, Riau

Place and Date of Birth/Age:
Born in Pekanbaru, 2 July 1973. 52 years old as of 31 December 2025

Legal Basis for Appointment (Director of Financing):
Statement of Shareholders' Resolution Deed No. 12 dated November 29, 2024, and OJK Letter No. SR-106/ KO.154/2024 dated December 18, 2024

Legal Basis for Appointment (Act. President Director):
Statement of Shareholders' Resolution Deed No. 03 dated April 28, 2025, and OJK Letter No. S-354/ KO.154/2025 dated December 09, 2025

Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Manajemen dari STIE Riau (2018)
- Magister bidang Manajemen Pemasaran dari Universitas Riau (2022)

Pengalaman Kerja
Bergabung di Bank Riau Kepri Syariah mulai tahun 1997. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai:
- Pemimpin Cabang Syariah Tanjungpinang (Agust 2015 - Mar 2018)
- Pemimpin Cabang Syariah Pekanbaru (Mar 2018 – Jan 2021)
- Pgs. Pemimpin Cabang Bangkinang (Jan - Agust 2021)
- Pgs. Pemimpin Divisi Dana & Jasa (Agust 2021 – Nov 2022)
- Pemimpin Divisi Dana & Jasa (Nov 2022 – Jan2023)
- Pemimpin Divisi Konsumer (Jan 2023 – Nov 2024)
- Direktur Pembiayaan (Nov 2024 – Apr 2025)
- Plt. Direktur Utama (Apr 2025 - Sekarang)

Periode Menjabat : Ke – 1 (Pertama)

Jabatan Rangkap
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Lembaga Sertifikasi Professional (LSP) BSMR (2023)
- Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh Lembaga Sertifikasi Professional (LSP) Keuangan Syariah (2024)
- Sertifikasi manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) oleh ADPI dan LSPDP (2025)
- Sertifikasi Profesi KKNI Jenjang 6 Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Dana Pensiun oleh LSPDP (2025)

Pernyataan Independensi
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Kepemilikan Saham
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pelatihan yang di Ikuti Tahun 2025
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background
- Bachelor's degree in Management from STIE Riau (2018)
- Masters in Management from Riau University (2022).

Work Experience
Joined Bank Riau Kepri Syariah starting in 1997. Several positions held include:
- Head of Tanjungpinang Sharia Branch (Aug 2015 - Mar 2018)
- Head of Pekanbaru Sharia Branch (Mar 2018 - Jany 2021)
- Act. Head of Bangkinang Branch (Jan - Aug 2021)
- Act. Vice President of Funds & Services Division (Aug 2021 - Nov 2022)
- Vice President of Funds & Services Division (Nov 2022 - Jan 2023)
- Vice President of Consumer Division (Jan 2023 – Nov 2024)
- Director of Financing (Nov 2024 - Apr 2025)
- Act. President Director (Apr 2025 - present)

Period of Service: 1st (First)

Concurrent Positions
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Certification
- Level 5 Risk Management Certification by Professional Certification Institute (LSP) BSMR (2023)
- Level 7 Risk Management Certification by Sharia Financial Professional Certification Institute (LSPKS) (2024)
- General Pension Fund Management (MUDP) Certification by ADPI and LSPDP (2025)
- KKNI Level 6 Professional Certification in Pension Funds, Sub-Field of Pension Fund Supervision, by LSPDP (2025)

Statement of Independence
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Share Ownership
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Training Attended in 2025
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.



FAJAR RESTU FEBRIANSYAH

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Director of Compliance & Risk Management

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Pekanbaru, 1 Februari 1969. Usia 57 tahun per 31 Desember 2025

Dasar Hukum Pengangkatan
Periode Pertama : Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.35 tanggal 15 November 2021 dan Surat OJK No. S-462/KO.053/2021 tanggal 7 Desember 2021

Citizenship: Indonesian Citizen

Domicile: Pekanbaru, Riau

Place and Date of Birth/Age
Born in Pekanbaru, 1 February 1969. 57 years old as of 31 December 2025

Legal Basis for Appointment
First Term : Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Minutes of Resolution Deed No. 35 dated November 15, 2021, and OJK Letter No. S-462/KO.053/2021 dated December 7, 2021.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Ekonomi dan Pembangunan dari Universitas Riau (1995)

Pengalaman Kerja
Bergabung di Bank Riau Kepri mulai tahun 1996. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai:
- Pemimpin Cabang Ranai (2007 - 2009)
- Pemimpin Cabang Bangkinang (2009 - 2017)
- Pemimpin Cabang Tanjungpinang (2017 - 2018)
- Pemimpin Divisi Hukum (2018 - 2021)
- Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (2021 - sekarang)

Periode Menjabat : Ke – 1 (Pertama)

Jabatan Rangkap
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Lembaga Sertifikasi Professional (LSP) BSMR (2023)
- Sertifikasi *Nazhir Wakaf* oleh LSP-BWI (2023)
- Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh Lembaga Sertifikasi Professional (LSP) Keuangan Syariah (2024)

Pernyataan Independensi
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Kepemilikan Saham
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pelatihan yang di Ikuti Tahun 2025
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background
- Bachelor's degree in Economics and Development from Riau University (1995)

Work Experience
Joined Bank Riau Kepri starting in 1996. Several positions held include:
- Head of Ranai Branch (2007 - 2009)
- Head of Bangkinang Branch (2009 - 2017)
- Head of Tanjungpinang Branch (2017 - 2018)
- Vice President of Legal Division (2018 - 2021)
- Director of Compliance & Risk Management (2021 - present)

Period of Service : 1st (First)

Concurrent Positions
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Sertifikasi
- Level 5 Risk Management Certification by Professional Certification Institute (LSP) BSMR (2023)
- Certified Nazhir Wakaf by LSP-BWI (2023)
- Level 7 Risk Management Resertification by Sharia Financial Professional Certification Institute (LSPKS) (2024)

Statement of Independence
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Share Ownership
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Training Attended in 2025
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.



M. A. SUHARTO

Direktur Dana & Jasa
Director of Funds & Services

Berakhir masa jabatan efektif terhitung sejak 14 September 2025 berdasarkan keputusan pemegang saham pada Akta No. 03 Tanggal 28 April 2025

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Metro, 20 Des 1965. Usia 60 tahun per 31 Desember 2025.

The term of office effectively concluded as of September 14, 2025, pursuant to the shareholders' resolution in Deed No. 03 dated April 28, 2025.

Citizenship: Indonesian Citizen

Domicile: Pekanbaru, Riau

Place and Date of Birth/Age:
Born in Metro, 20 Dec 1965. 59 years old as of 31 December 2025.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Lampung (1988).

Pengalaman Kerja
- Memulai karir di Bank Duta sejak 1991 terakhir menjabat *Representative Head Office* Lampung.
- Selanjutnya berkarir di Bank Syariah Mandiri jabatan yang pernah dijabat diantaranya:
  - Manager Operasional dan Risiko Pembiayaan Cabang Pamekasan (2000 – 2001)
  - Kepala Cabang Pamekasan (2001 - 2003)
  - Kepala Cabang Yogyakarta (2003 - 2006)
  - Kepala Cabang Lampung (2006 - 2008)
  - Kepala Cabang Utama Medan (2008 - 2010)
  - *Regional Head Office* Wilayah IV (2010 - 2013)
  - Pemegang Wewenang Memutus Pembiayaan (PWMP) Kantor Pusat (2013 - 2014)
- Berikutnya berkarir di Bank Mega Syariah dengan jabatan yang pernah dipegang diantaranya:
  - Staff Khusus Direksi Bidang *Network & Distribution Head* (2014 - 2015)
  - *Micro and Small Business Group Head* (2015)
  - *Micro and Small & Network Group Head* (2015 - 2016)
  - *Financing Business & Network Group Head* (2016 - 2017)
  - *Financing Business Group Head Bank* (2017 - 2018)
  - *Funding Business and Network Group Head* (2017 - 2018)
  - *Network and Financing Support Group Head* (2018 - 2019)
  - *Financing Support Group Head* (2019 - 2020)
- Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri Syariah (15 Sept 2020 - 14 Sept 2025)

Periode Menjabat : Ke – 1 (Pertama)

Jabatan Rangkap
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh LSPP (2019)
- Sertifikasi *Treasury Dealer, Level Advance* oleh LSPP (2021)
- Sertifikasi *Nazhir Wakaf* oleh LSP-BWI (2023)
- Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh Lembaga Sertifikasi Professional (LSP) BSMR (2024)
- Sertifikasi *Treasury* Jenjang 7 oleh ACI (*Association Cambiste Internationale*) *Financial Markets Association Indonesia* (2024)
- Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Manajemen Risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM) (2025)
- Sertifikasi Asesor Pasar Modal oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM) (2025)
- Sertifikasi Wakil Manajer Investasi (WMI) Jenjang 5 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM) (2025)

Pernyataan Independensi
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Kepemilikan Saham
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pelatihan yang di Ikuti Tahun 2025
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background
- Bachelor's degree in Economics from Lampung University (1988).

Work Experience
- Started his career at Bank Duta in 1991, most recently serving as Representative Head Office Lampung.
- Next career at Bank Syariah Mandiri, positions held include:
  - Manager of Operations and Financing Risk Manager Pamekasan Branch (2000 – 2001)
  - Head of Pamekasan Branch (2001 - 2003)
  - Head of Yogyakarta Branch (2003 - 2006)
  - Head of Lampung Branch (2006 - 2008)
  - Head of Medan Main Branch (2008 - 2010)
  - Regional Head Office Region IV (2010 - 2013)
  - Authority Holder to Decide on Financing (PWMP) Head Office (2013 - 2014)
- Next, he had a career at Bank Mega Syariah with positions held including:
  - Board of Directors Special Staff for Network & Distribution Head (2014 - 2015)
  - Micro and Small Business Group Head (2015)
  - Micro and Small & Network Group Head (2015 - 2016)
  - Financing Business & Network Group Head (2016 - 2017)
  - Financing Business Group Head Bank (2017 - 2018)
  - Funding Business and Network Group Head (2017 - 2018)
  - Network and Financing Support Group Head (2018 - 2019)
  - Financing Support Group Head (2019 - 2020)
- Director of Funds and Services, Bank Riau Kepri Syariah (Sept 15, 2020 - Sept 14, 2025)

Period of Service: 1st (First)

Concurrent Positions
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Certification
- Level 5 Risk Management Certification by LSPP (2019)
- Treasury Dealer Certification, Advance Level by LSPP (2021)
- Certified Nazhir Wakaf by LSP-BWI (2023)
- Level 7 Risk Management Resertification by Professional Certification Institute (LSP) BSMR (2024)
- Level 7 Treasury Certification by ACI (Association Cambiste Internationale) Financial Markets Association Indonesia (2024)
- Qualification Level 5: Certification in the Capital Market Sector, Risk Management Sub-sector by Capital Market Professional Certification Institution (2025)
- Capital Market Assessor Certification: by Capital Market Professional Certification Institution (2025)
- Investment Manager Representative Level 5 Certification by Capital Market Professional Certification Institution (2025)

Statement of Independence
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Share Ownership
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report..

Training Attended in 2025
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.



SAID SYAMSURI

Direktur Operasional
Director of Operations

Berakhir masa jabatan efektif terhitung sejak 14 September 2025 berdasarkan keputusan pemegang saham pada Akta No. 03 Tanggal 28 April 2025

The term of office effectively concluded as of September 14, 2025, pursuant to the shareholders' resolution in Deed No. 03 dated April 28, 2025.

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Citizenship: Indonesian Citizen

Domisili : Pekanbaru, Riau

Domicile: Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Rengat, 7 Desember 1965. Usia 60 tahun per 31 Desember 2025

Place and Date of Birth/Age:
Born in Rengat, December 7, 1965. 60 years old as of December 31, 2025.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Riau (1993).
- Magister bidang Manajemen dari Universitas Riau (2012).

Educational Background
- Bachelor's degree in Accounting from Riau University (1993)
- Masters in Management from Riau University (2012).

Pengalaman Kerja
Bergabung di Bank Riau Kepri mulai tahun 1994. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai :
- Pemimpin Divisi Mikro dan Kecil (2008 - 2010)
- Pemimpin Divisi Konsumer & Mikro (2010 - Juli 2013)
- Staf Direksi (2013 - 2016)
- Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah (2016 - 2019)
- Pemimpin Divisi Syariah (2019 - 2020)
- Direktur Operasional (15 Sept 2020 - 14 Sept 2025)

Work Experience
Joined Bank Riau Kepri starting in 1994. Several positions held include:
- Vice President of Micro and Small Division (2008 - 2010)
- Vice President of Consumer & Micro Division (2010 - July 2013)
- Board of Directors Staff (2013 - 2016)
- Vice President of Problem Loan Handling Division (2016 - 2019)
- Vice President of Sharia Division (2019 - 2020)
- Director of Operations (Sept 15, 2020 - Sept 14, 2025)

Periode Menjabat : Ke – 1 (Pertama)

Period of Service: 1st (First)

Jabatan Rangkap
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Concurrent Positions
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh BSMR (2011)
- Sertifikasi *Nazhir Wakaf* oleh LSP-BWI (2023)
- Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh Lembaga Sertifikasi Professional (LSP) BSMR (2024)

Certification
- Level 5 Risk Management Certification by BSMR (2011)
- Certified Nazhir Wakaf by LSP-BWI (2023)
- Level 7 Risk Management Resertification by Professional Certification Institute (LSP) BSMR (2024)

Pernyataan Independensi
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Statement of Independence
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Kepemilikan Saham
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Share Ownership
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report

Pelatihan yang di Ikuti Tahun 2025
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Training Attended in 2025
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS AFFILIATION RELATIONSHIPS

Seluruh anggota Direksi BRK Syariah yang menjabat per 31 Desember 2025 tidak memiliki hubungan afiliasi, baik hubungan keluarga maupun keuangan, dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

All members of the Board of Directors of BRK Syariah serving as of December 31, 2025, do not have any affiliation relationships, whether family or financial, with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Controlling Shareholders as shown in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Hubungan Keluarga dengan** Family Relationship with								**Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with**							
		Direksi BOD		**Dewan Komisaris** BOC		**Dewan Pengawas Syariah** Sharia Supervisory Board		**Pemegang Saham Pengendali** Controlling Shareholder		**Direksi** BOD		**Dewan Komisaris** BOC		**Dewan Pengawas Syariah** Sharia Supervisory Board		**Pemegang Saham Pengendali** Controlling Shareholder	
		Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Helwin Yunus	Plt. Direktur Utama Act. President Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA TAHUN BUKU DAN SETELAH TAHUN BUKU 2025 SERTA ALASAN PERUBAHANNYA

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS DURING AND AFTER THE 2025 FISCAL YEAR AND THE REASONS FOR THE CHANGES

Pada tahun 2025, terdapat perubahan jumlah dan susunan Dewan Komisaris BRK Syariah yaitu dengan adanya Pengunduran Diri Sdri. Rita Anugerah sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Berita Acara RUPS-LB No. 45 tanggal 23 Oktober 2025 dan efektif sejak 25 Oktober 2025 dan juga perpanjangan masa jabatan Sdr. Roy Prakoso sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Berita Acara RUPS-LB No. 45 tanggal 23 Oktober 2025.

Berikut Perubahan susunan Dewan Komisaris BRK Syariah selama tahun tahun buku 2025:

In 2025, there was a change in the number and composition of the Board of Commissioners of BRK Syariah, specifically with the resignation of Ms. Rita Anugerah as an Independent Commissioner, pursuant to the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 45 dated October 23, 2025, effective as of October 25, 2025, alongside the extension of the tenure of Mr. Roy Prakoso as an Independent Commissioner, pursuant to the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 45 dated October 23, 2025.
The following details the changes to the composition of the Board of Commissioners of BRK Syariah during the 2025 financial year:

Periode 1 Januari 2025-25 Oktober 2025 Period of January 1, 2025 - October 25, 2025		Periode 25 Oktober 2025 - 31 Desember 2025 Period of October 25, 2025 - December 31, 2025	
Nama Name	**Jabatan** Position	**Nama** Name	**Jabatan** Position
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner		

Alasan Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Tahun Buku 2025

Alasan perubahan komposisi Dewan Komisaris adalah dikarenakan terdapat pengunduran diri dari salah satu komisaris independen. Dan selanjutnya, dalam rangka pemenuhan komposisi Komisaris PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), maka dilakukan pembukaan lowongan untuk proses seleksi bagi calon Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris Setelah Tahun Buku 2025

Komposisi Dewan Komisaris BRK Syariah setelah tahun buku 2025 hingga penyampaian Laporan Tahunan ini kepada Pemegang Saham tidak mengalami perubahan, sehingga tidak ada informasi mengenai alasan perubahan komposisi Dewan Komisaris BRK Syariah setelah tahun buku 2025.

Reasons for the Change in the Composition of the Board of Commissioners in 2025 Fiscal Year

The rationale for the change in the composition of the Board of Commissioners is due to the resignation of an Independent Commissioner. Furthermore, in order to fulfill the requisite composition of the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), vacancies have been opened for the selection process of prospective President Commissioner and Independent Commissioner.

Composition of the Board of Commissioners After the 2025 Fiscal Year

The composition of the Board of Commissioners of BRK Syariah after the 2025 fiscal year until the submission of this Annual Report to the Shareholders has remained unchanged; therefore, there is no information regarding the reasons for changes in the composition of the Board of Commissioners of BRK Syariah after the 2025 fiscal year.

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



ROY PRAKOSO

Komisaris Independen
Independent Commissioner



ROY PRAKOSO

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili: Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Jakarta, 5 Januari 1964. Usia 61 tahun per 31 Desember 2025

Dasar Hukum Pengangkatan
Akta No. 35 tanggal 15 November 2021 dan Surat OJK S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 kemudian diperbaharui kembali melalui pernyataan keputusan pemegang saham Akta No. 17 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat OJK SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 dengan adanya perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah

Dasar Hukum Perpanjangan
Akta No. 45 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Berita Acara RUPS-LB

Citizenship : Indonesian Citizen
Domicile: Pekanbaru, Riau

Place and Date of Birth/Age
Born in Jakarta, 5 January 1964. Age 61 as of 31 December 2025

Legal Basis for Appointment
Deed No. 35 dated November 15, 2021, and OJK Letter No. S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022, subsequently updated through the Statement of Shareholders' Resolution via Deed No. 17 dated June 14, 2022, and OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022, following the change of business activities into a Sharia Commercial Bank

Legal Basis for Extension
Deed No. 45 dated October 23, 2025, concerning the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Akuntansi dari STIE Malangkucecwara, Malang (1988).
- Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1999).
- *Doctor of Philoshopy* bidang Manajemen dari Universitas Pancasila, Jakarta (2025).

Pengalaman Kerja
- *System programmer* di PT Ekspor Impor Indonesia (Bank Mandiri Tbk) (1990- 1994)
- Analis kredit komersial kantor pusat di PT Ekspor Impor Indonesia (Bank Mandiri Tbk) (1994 – 1995)
- Kepala bagian kredit bank PT Ekspor Impor Indonesia Cabang Solo (Bank Mandiri Tbk) (1995 – 1997)
- *Cash Outlet Manager* di PT Ekspor Impor Indonesia (Bank Mandiri Tbk) (1997 – 1999)
- *Section Head of IT Support Credit & Operation Control Division* PT Bank Mandiri Tbk (1999 – 2001)
- *Project Manager Core Banking System* (eMAS) PT Bank Mandiri Tbk (2001 – 2004)
- Tim *Overseas Branch Core Banking System Application Implementation Singapure & Hongkong Branch* PT Bank Mandiri Tbk (2004 – 2010)
- *Business Development* PT Mitra Bisnis (2010 – 2012)
- Direktur PT Mahesa Prima Solusindo (2012 – 2021)
- Komisaris PT Smartec Teknologi Indonesia (2020 – 2021)
- Komisaris Independen BRK Syariah (15 Nov 2021 - sekarang)

Periode Menjabat :
- Ke – 1 (Pertama)
- Periode Jabatan Perpanjangan

Jabatan Rangkap
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Sertifikasi
- Sertifikasi International CIISA (*Certified International Information System Auditor*) (2022)
- *Certified Islamic Financial Analyst* (CIFA) (2023)
- *Certfied Governance, Risk & Compliance* (GRC) (2023)
- Sertifikasi *Internasional Certified Risk Manajement* (CRMP) (2023)
- Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 oleh Lembaga Sertifikasi Professional (LSP) Keuangan Syariah (2025)

Pernyataan Independensi
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Kepemilikan Saham
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pelatihan yang diikuti Tahun 2025
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Educational background
- Bachelor's degree in Accounting from STIE Malangkucecwara, Malang (1988).
- Master of Management from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1999).
- Doctor of Philosophy in Management from Universitas Pancasila, Jakarta (2025).

Work Experience
- System programmer at PT Ekspor Impor Indonesia (Bank Mandiri Tbk) (1990-1994)
- Head office commercial credit analyst at PT Ekspor Impor Indonesia (Bank Mandiri Tbk) (1994 – 1995)
- Head of credit department at PT Ekspor Impor Indonesia Solo Branch (Bank Mandiri Tbk) (1995 – 1997)
- Cash Outlet Manager at PT Ekspor Impor Indonesia (Bank Mandiri Tbk) (1997 – 1999)
- Section Head of IT Support Credit & Operation Control Division PT Bank Mandiri (1999 – 2001)
- Project Manager Core Banking System (eMAS) PT Bank Mandiri Tbk (2001 – 2004)
- Overseas Branch Core Banking System Application Implementation Team Singapore & Hongkong Branch PT Bank Mandri Tbk (2004 – 2010)
- Business Development PT Mitra Bisnis (2010 - 2012)
- Director of PT Mahesa Prima Solusindo (2012 - 2021)
- Commissioner of PT Smartec Teknologi Indonesia (2020 - 2021)
- Independent Commissioner of BRK Syariah (15 Nov 2021 - present)

Period of Service:
- 1st (First)
- Extended Term of Office

Concurrent Positions
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Certification
- International Certification CIISA (Certified International Information System Auditor) (2022)
- Certified Islamic Financial Analyst (CIFA) (2023)
- Certfied Governance, Risk & Compliance (GRC) (2023)
- Certified International Risk Management Certification(CRMP) (2023)
- Level 7 Risk Management Resertification by Sharia Financial Professional Certification Institute (LSPKS) (2025)

Statement of Independence
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Share Ownership
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Training Attended in 2025
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.



RITA ANUGERAH

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Berakhir Menjabat sejak 25 Oktober 2025 berdasarkan keputusan pemegang saham pada Akta No. 045 Tanggal 23 Oktober 2025

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Rengat, 27 Maret 1961. Usia 64 tahun per 31 Desember 2025.

Term of office ended on October 25, 2025, based on the shareholders' resolution in Deed No. 045 dated October 23, 2025.

Citizenship: Indonesian Citizen

Domicile: Pekanbaru, Riau

Place and Date of Birth/Age:
Born in Rengat, 27 March 1961. 64 years old as of 31 December 2025.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Riau (1988).
- *Master of Accountancy and Financial Information System* (MAFIS) dari *Cleveland State University,* Ohio, USA (1994).
- Doctor *Business Administration* (DBA) dari Universiti Kebangsaan Malaysia (2005).
- Profesor dari Universitas Riau (2019).

Pengalaman Kerja
- Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Riau (1989 - sekarang)
- Dosen Program Magister Manajamen Universitas Riau (1994 - Sekarang)
- Dosen di Program D3 Akuntansi dan Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Riau (1995-1996)
- Sekretaris Program D3 Akuntansi dan Perpajakan, Fakultas Ekonomi Universitas Riau (1995 – 1997)
- Dosen Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Riau (1995 - 2012)
- Dosen Program Profesi Akuntansi Universitas Riau (2004 - sekarang)
- Dosen Program Magister Akuntansi di Universitas Riau (2007 – sekarang)
- Komisaris independen di BRK Syariah (19 Agt 2019 - 25 Okt 2025)

Periode Menjabat : ke-2 (Kedua)

Jabatan Rangkap
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Sertifikasi
- *Certified Fraud Examiner* (CFE) (2021)
- Sertifikasi International CIISA (*Certified International Information System Auditor*) (2022)
- *Certified Islamic Financial Analyst* (CIFA) (2023)
- Sertifikasi *Internasional Certified Risk Manajement* (CRMP) (2023)
- Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 oleh Lembaga Sertifikasi Professional (LSP) Keuangan Syariah (2024)

Pernyataan Independensi
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Kepemilikan Saham
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pelatihan yang diikuti Tahun 2025
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Educational Background
- Bachelor's degree in Accounting from Riau University (1988).
- Master of Accountancy and Financial Information Systems (MAFIS) from Cleveland State University, Ohio, USA (1994).
- Doctor of Business Administration (DBA) from Universiti Kebangsaan Malaysia (2005).
- Professor from Riau University (2019).

Work Experience
- Lecturer at the Faculty of Economics, Riau University (1989 - present)
- Lecturer in Master of Management Program, University of Riau (1994 - Present)
- Lecturer in the D3 Accounting and Taxation Program, Faculty of Economics, Riau University (1995-1996)
- Secretary of the D3 Accounting and Taxation Program, Faculty of Economics, Riau University (1995 – 1997)
- Lecturer in the Extension Program at the Faculty of Economics, Riau University (1995 - 2012)
- Lecturer in the Accounting Professional Program, University of Riau (2004 - present)
- Lecturer in Master of Accounting Program at Riau University (2007 – present)
- Independent commissioner at BRK Syariah (Aug19, 2019 - Oct 25, 2025)

Period of Service: 2nd (Second)

Concurrent Positions
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Certification
- Certified Fraud Examiner (CFE) (2021)
- Certification International CIISA (Certified International Information System Auditor) (2022)
- Certified Islamic Financial Analyst (CIFA) (2023)
- Certified International Risk Management Certification(CRMP) (2023)
- Level 6 Risk Management Resertification by Sharia Financial Professional Certification Institute (LSPKS) (2024)

Statement of Independence
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Share Ownership
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Training Attended in 2025
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS
AFFILIATION RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Seluruh anggota Dewan Komisaris BRK Syariah yang menjabat per 31 Desember 2025 tidak memiliki hubungan afiliasi, baik hubungan keluarga maupun keuangan, dengan Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

All members of the Board of Commissioners of BRK Syariah serving as of December 31, 2025, do not have any affiliation relationships, whether family or financial, with the Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and Controlling Shareholders as presented in the following table:

Nama* Name*	**Jabatan** Position	**Hubungan Keluarga dengan** Family Relationship with						**Hubungan Keuangan dengan**					
		Dewan Pengawas Supervisory Board		**Direksi** BOD		**Pemegang Saham Pengendali** Controlling Shareholder		**Dewan Pengawas** Supervisory Board		**Direksi** BOD		**Pemegang Saham Pengendali** Controlling Shareholder	
		Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

*hingga akhir Desember 2025, Dewan Komisaris BRK Syariah hanya terdiri 1 (satu) orang Komisaris Independen sehingga tidak ada informasi Hubungan afiliasi sesama Dewan Komisaris.

*As of the end of December 2025, the Board of Commissioners of BRK Syariah consists of only 1 (one) Independent Commissioner, therefore there is no information regarding affiliation relationships among the Board of Commissioners.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA TAHUN BUKU DAN SETELAH TAHUN BUKU 2025 SERTA ALASAN PERUBAHANNYA

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD MEMBERS IN FISCAL YEAR 2025 AND AFTER FISCAL YEAR 2025, AND THE REASONS FOR THE CHANGES

Pada tahun 2025, terdapat perubahan jumlah dan susunan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah yaitu dengan adanya pemberhentian dengan hormat Sdr. Saifuddin Yuliar berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 03 tanggal 28 April 2025 dan efektif berakhir sejak 6 Juni 2025

Berikut Perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah selama tahun buku 2025:

In 2025, there was an amendment to the quantity and composition of the Sharia Supervisory Board of BRK Syariah, specifically marked by the honorable dismissal of Mr. Saifuddin Yuliar, pursuant to the Deed of the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) No. 03 dated April 28, 2025, effective as of June 6, 2025.

The following are the changes in the composition of the Sharia Supervisory Board of BRK Syariah during the 2025 financial year:

Periode 1 Januari 2025- 6 Juni 2025 Period of January 1, 2025 - June 6, 2025		**Periode7 Juni 2025 - 31 Desember 2025** Period of June 7, 2025 - December 31, 2025	
Nama Name	**Jabatan** Position	**Nama** Name	**Jabatan** Position
Zulhendri Rais	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	Zulhendri Rais	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board
Saifuddin Yuliar	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board		

Alasan Perubahan Komposisi Dewan Pengawas Syariah Tahun Buku 2025

Alasan perubahan komposisi Dewan Pengawas Syariah adalah dikarenakan telah berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah, serta dalam rangka pemenuhan komposisi Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), maka dilakukan pembukaan lowongan untuk proses seleksi bagi calon Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Komposisi Dewan Komisaris Syariah Setelah Tahun Buku 2025

Komposisi Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah setelah tahun buku 2025 hingga penyampaian Laporan Tahunan ini kepada Pemegang Saham tidak mengalami perubahan, sehingga tidak ada informasi mengenai alasan perubahan komposisi Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah setelah tahun buku 2025.

Reason for the Change in the Composition of The Sharia Supervisory Board for the 2025 Fiscal Year

The rationale behind the change in the composition of the Sharia Supervisory Board is attributed to the conclusion of the tenure of a Member of the Sharia Supervisory Board. Furthermore, in order to fulfill the requisite composition of the Members of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), a vacancy has been opened to initiate the selection process for prospective Members of the Sharia Supervisory Board.

Composition of the Sharia Board of Commissioners After the 2025 Fiscal Year

The composition of the Sharia Supervisory Board of BRK Syariah after the 2025 financial year until the submission of this Annual Report to the Shareholders has remained unchanged; thus, there is no information regarding the reasons for changes in the composition of the Sharia Supervisory Board of BRK Syariah after the 2025 financial year.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD PROFILE



ZULHENDRI RAIS

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board



ZULHENDRI RAIS

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia:
Lahir di Padang, 19 Juli 1990. Usia 35 tahun per 31 Desember 2025.

Dasar Hukum Pengangkatan

Periode Pertama : Akta No. 06 tanggal 17 Januari 2020 dan Surat OJK S-234/KO.053/2021 tanggal 19 Juni 2021 kemudian diperbaharui kembali melalui Akta No.17 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat OJK SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 dengan adanya perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah

Periode Kedua : Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dalam Akta No. 07 tanggal 06 April 2024 dan Surat OJK No.S 307/KO.053/2023 tanggal 29 September 2023. Surat OJK No. SR-106/KO.154/2024 tanggal 18 Desember 2024

Citizenship : Indonesian Citizen

Domicile : Pekanbaru, Riau

Place and Date of Birth/Age
Born in Padang, 19 July 1990. 35 years old as of 31 December 2025

Legal Basis for Appointment

First Period : Deed No. 06 dated January 17, 2020, and OJK Letter No. S-234/KO.053/2021 dated June 19, 2021, subsequently updated through Deed No. 17 dated June 14, 2022, and OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022, following the change of business activities into a Sharia Commercial Bank

Second Period : Statement of Shareholders' Resolution in Deed No. 07 dated April 06, 2024, and OJK Letter No. S-307/KO.053/2023 dated September 29, 2023. OJK Letter No. SR-106/KO.154/2024 dated December 18, 2024

Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Sunnah dan Ilmu Hadits, Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (2013)
- Magister bidang Sunnah dan Ilmu Hadist, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Omdurman Republik Arab Sudan (2016)
- Doktor bidang *Islamic Studies* (*Hadeeth and its Sciences*) di University of Gezira Republik Sudan (2021)

Pengalaman Kerja

- Tenaga Pengajar/Dosen di Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau (2017 - sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah (2020 - 2021)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah (2021 – Sekarang)

Periode Menjabat : Ke – 2 (Kedua)

Jabatan Rangkap
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini

Sertifikasi

- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (2019)
- Sertifikasi Pengawas Syariah Lembaga Keuangan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) DSN-MUI (2019)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (2025)

Pernyataan Independensi
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Kepemilikan Saham
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pelatihan yang diikuti Tahun 2025
Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Educational background

- Bachelor's degree in Sunnah and Hadith Science, Ushuluddin Faculty, Al-Azhar University, Cairo, Egypt (2013)
- Master in Sunnah and Hadith Science, Ushuluddin Faculty, Omdurman Islamic University, Arab Republic of Sudan (2016)
- Doctorate in Islamic Studies (Hadeeth and its Sciences) at the University of Gezira Republic of Sudan (2021)

Work experience

- Teaching Staff/Lecturer at the Tarbiyah Faculty of UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau (2017 - present)
- Member of the Sharia Supervisory Board of BRK Syariah (2020 - 2021)
- Chairman of the Sharia Supervisory Board of BRK Syariah (2021 – Present)

Period of Service: Period 2nd (Second)

Concurrent Positions :
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Certification:

- Sharia Supervisory Board Certification from the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) (2019)
- Financial Institution Sharia Supervisor Certification from the DSN-MUI Professional Certification Institute (LSP) (2019)
- Level 6 Risk Management Certification from the Sharia Finance Competency Professional Certification Body (2025)

Statement of Independence
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Share Ownership
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Training Attended in 2025
Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.



SAIFUDDIN YULIAR

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Member

Berakhir masa jabatan efektif terhitung sejak 6 Juni 2025 berdasarkan keputusan pemegang saham pada Akta No. 03 Tanggal 28 April 2025

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia:
Lahir di Kampar, 10 Desember 1972. Usia 53 tahun per 31 Desember 2025

The term of office effectively concluded as of June 6, 2025, pursuant to the shareholders' resolution in Deed No. 03 dated April 28, 2025.

Citizenship : Indonesian Citizen

Domicile : Pekanbaru, Riau

Place and Date of Birth/Age
Born in Kampar, December 10, 1972. 53 years of age as of December 31, 2025.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1997)
- Magister Jurusan PMDI dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2000)
- *Doctor of Philosophy Program Study Islamic Economics* di *Universal Institute Profesional Management* UIPM, Kuala Lumpur (2022)

Pengalaman Kerja

- Anggota DPRD Kabupaten Kampar (2009)
- Pemimpin Cabang Asuransi Mubarokah, Pekanbaru (2010)
- Dosen di UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2015)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah (7 Juni 2021 – 6 Juni 2025)

Periode Menjabat : Ke- 1 (Pertama)

Jabatan Rangkap

Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini

Sertifikasi

- *Accounting* Syariah oleh Muamalah Institute (2005)
- Muamalah Maaliyah Dasar oleh Dewan Syariah Nasional MUI (2020)
- Pendidikan Dasar Perbankan Syariah oleh Dewan Syariah Nasional MUI (2021)
- Sertifikasi Dewan Syariah Nasional MUI (2021)
- Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi MUI (2021)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh BSMR (2023)
- Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Keuangan Syariah (2024)

Pernyataan Independensi

Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Kepemilikan Saham

Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pelatihan yang diikuti Tahun 2025

Dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Educational background

- Bachelor degree from the Faculty of Sharia and Law, Al-Azhar University, Cairo, Egypt (1997)
- Master of PMDI Department from UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2000)
- Doctor of Philosophy Islamic Economics Study Program at Universal Institute Professional Management UIPM, Kuala Lumpur (2022)

Work experience

- Member of the Kampar Regency DPRD (2009)
- Branch Manager of Mubarokah Insurance, Pekanbaru (2010)
- Lecturer at UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2015)
- Sharia Supervisory Board Member of BRK Syariah (Jun 7, 2021 – Jun 6, 2025)

Period of Service: 1st (First)

Concurrent Positions :

Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Certification:

- Sharia Accounting by Muamalah Institute (2005)
- Basic Muamalah Maaliyah by the MUI National Sharia Council (2020)
- Basic Sharia Banking Education by the MUI National Sharia Council (2021)
- MUI National Sharia Council Certification (2021)
- Certification from MUI Professional Certification Agency (2021)
- Level 1 Risk Management Certification by BSMR (2023)
- Recertification Level 4 Risk Management From Professional Certification Agency (LSP) Sharia Financial (2024)

Statement of Independence

Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Share Ownership

Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

Training Attended in 2025

Further explained in the Bank Governance Chapter, Board of Directors sub-section of this Annual Report.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH
AFFILIATION RELATIONSHIPS OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjabat per 31 Desember 2025 tidak memiliki hubungan afiliasi, baik hubungan keluarga maupun keuangan, dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

All members of the Sharia Supervisory Board serving as of December 31, 2025, do not have any affiliation relationships, whether family or financial, with fellow members of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, Board of Directors, and Controlling Shareholders as presented in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Hubungan Keluarga dengan** Family Relationship with								**Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with**							
		Dewan Pengawas Supervisory Board		**Direksi** BOD		**Dewan Komisaris** BOC		**Pemegang Saham Pengendali** Controlling Shareholder		**Dewan Pengawas** Supervisory Board		**Direksi** BOD		**Dewan Komisaris** BOC		**Pemegang Saham Pengendali** Controlling Shareholder	
		Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Zulhendri Rais	Ketua Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

PROFIL PEJABAT SATU TINGKAT DI BAWAH DIREKSI
PROFILES OF EXECUTIVES ONE LEVEL BELOW THE BOARD OF DIRECTORS



INDRA GUNAWAN

Pemimpin Divisi Komersial
Vice President of Commercial Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Dumai, 7 Juni 1974. Usia 51 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Komersial sejak tahun 2022 berdasarkan SK No. 34/KEPDIR/MSDM/2022 tanggal 08 Februari 2022.

Indonesian Citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Dumai, June 7, 1974. Aged 51 as of December 31, 2025. Serving as the Vice President of Commercial Division since 2022 based on Decree No. 34/KEPDIR/MSDM/2022 dated February 08, 2022.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana bidang Manajemen di STIE Riau pada tahun 2025.

Pengalaman Kerja

Bergabung di Bank Riau Kepri Syariah mulai tahun 1997. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai:

- Pemimpin Bagian Komersial Divisi Komersial (Mar 2014 - Mei 2017)
- Pemimpin Cabang Selat Panjang (Mei 2017 - Jul 2019)
- Pemimpin Cabang Siak Sri Indrapura (Jul 2019 - Agust 2021)
- Pemimpin Cabang Utama (Agust 2021 - Feb 2022)
- Pemimpin Divisi Komersial (Feb 2022 – Des 2024)
- Pemimpin Divisi Komersial Merangkap Tugas Pemimpin Divisi Konsumer (Des 2024 – Mar 2025)
- Pemimpin Divisi Komersial (Mar 2025 - Sekarang)

Educational background

Obtained a Bachelor's Degree in Management from STIE Riau in 2025.

Work experience

Joined Bank Riau Kepri Syariah starting in 1997. Several positions he has held include:

- Head of Commercial Department, Commercial Division (Mar 2014 – May 2017)
- Branch Manager of Selat Panjang (May 2017 – Jul 2019)
- Branch Manager of Siak Sri Indrapura (Jul 2019 – Aug 2021)
- Main Branch Manager (Aug 2021 – Feb 2022)
- Vice President of Commercial Division (Feb 2022 – Dec 2024)
- Vice President of Commercial Division concurrent responsibilities with Consumer Division (Dec 2024 – Mar 2025)
- Vice President of Commercial Division (Mar 2025 – Present)



MUHAMMAD JAZULI

Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah
Vice President of Micro, Small & Medium Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Pekanbaru, 28 Februari 1980. Usia 45 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah sejak 2023 berdasarkan SK No. 06/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 05 Januari 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Pekanbaru, 28 February 1980. 45 years old as of 31 December 2025. Served as Vice President of Micro, Small & Medium Division since 2023 based on Decree No. 06/KEPDIR/MSDI/2023 dated 05 January 2023.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar sarjana di bidang Akuntansi pada Universitas Riau pada tahun 2003 dan meraih gelar Pasca Sarjana dari Universitas Riau di bidang Manajemen Strategis pada tahun 2010.

Pengalaman Kerja

Memulai karir di Bank Riau Kepri Syariah pada tahun 2003. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Cabang Jakarta (Agust 2016 - Feb 2017)
- Pgs. Pemimpin Cabang Siak Sri Indrapura (Feb 2017 - Mar 2018)
- Pemimpin Cabang Utama (Mar 2018 - Jul 2019)
- Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (Jul 2019 - Jan 2021)
- Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit (Jan 2021- Agust 2022)
- Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan (Agust 2022 - Jan 2023)
- Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah (Jan 2023 – Sekarang)

Educational background

Obtained a bachelor's degree in Accounting at the University of Riau in 2003 and a Master's degree from the University of Riau in the field of Strategic Management in 2010.

Work experience

Started his career at Bank Riau Kepri Syariah in 2003. Several positions he has held include:

- Head of Jakarta Branch (Aug 2016 - Feb 2017)
- Act. Head of Siak Sri Indrapura Branch (Feb 2017 - Mar 2018)
- Head of Main Branch (Mar 2018 - Jul 2019)
- Vice President of Corporate Secretary Division (Jul 2019 - Jan 2021)
- Vice President of Credit Rescue & Settlement Division (Jan 2021- Aug 2022)
- Vice President of Rescue & Financing Settlement Division (Aug 2022-Jan 2023)
- Vice President of Micro, Small & Medium Division (Jan 2023 - Present)



IRSYADI SYUKRI

Pemimpin Divisi Konsumer
Vice President of Consumer Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Midai, 16 Jan 1979. Saat ini Usia 46 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Konsumer sejak berdasarkan SK No. 0002/KEPDIR/2025 tanggal 12 Maret 2025.

Indonesian Citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Midai, January 16, 1979. Currently 46 years old as of December 31, 2025. Serving as the Vice President of Consumer Division since 2025 based on Decree No. 0002/KEPDIR/2025 dated March 12, 2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana bidang Manajemen di STIE Riau pada tahun 2022 dan meraih gelar Pasca Sarjana dari Universitas Riau Kepulauan Batam di bidang Magister Manajemen pada tahun 2025.

Pengalaman Kerja

Memulai karir di Bank Riau Kepri Syariah pada tahun 2003. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Cabang Ranai (Okt 2016 - Jan 2021)
- Pemimpin Cabang Syariah Tanjung Pinang (Jan 2021 - Agus 2022)
- Pemimpin Cabang Tanjung Pinang II (Agus 2022 - Nov 2022)
- Pemimpin Cabang Tanjung Pinang Pamedan (Nov 2022 - Jan 2023)
- *Branch Manager* BRKS Batam (Jan 2023 - Mar 2025)
- Pjs. Pemimpin Divisi Konsumer (Mar 2025 - Sept 2025)
- Pemimpin Divisi Konsumer (Okt 2025 - Sekarang)

Educational background

Obtained a Bachelor's Degree in Management from STIE Riau in 2022 and a Master's Degree from Universitas Riau Kepulauan Batam with a Master of Management in 2025.

Work experience

Started his career at Bank Riau Kepri Syariah in 2003. Several positions he has held include:

- Branch Manager of Ranai (Oct 2016 – Jan 2021)
- Sharia Branch Manager of Tanjung Pinang (Jan 2021 – Aug 2022)
- Branch Manager of Tanjung Pinang II (Aug 2022 – Nov 2022)
- Branch Manager of Tanjung Pinang Pamedan (Nov 2022 – Jan 2023)
- Branch Manager of BRKS Batam (Jan 2023 – Mar 2025)
- Act. Vice President of Consumer Division (Mar 2025 – Sept 2025)
- Vice President of Consumer Division (Oct 2025 – Present)



ULFIA BUDSTAMAM

Pemimpin Divisi *Special Asset Management*
Vice President of Special Asset Management Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Pekanbaru, 23 April 1973. Saat ini Usia 52 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi *Special Asset Management* sejak 2025 berdasarkan SK No.250/KEPDIR/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Indonesian Citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Pekanbaru, April 23, 1973. Aged 52 as of December 31, 2025. Serving as the Vice President of Special Asset Management since 2025 based on Decree No. 250/KEPDIR/2024 dated December 31, 2024.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar sarjana di bidang Hukum pada Universitas Indonesia pada tahun 1995.

Pengalaman Kerja

Memulai karir di Bank Riau Kepri Syariah pada tahun 2000. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pjs. Pemimpin Bagian Administrasi SDM Divisi SDM (Jan 2007 - Mar 2008)
- Pemimpin Bagian UKPN Divisi Kepatuhan (Mar 2008 - Mei 2017)
- Pgs. Pemimpin Cabang Utama (Apr 2014 - Mei 2014)
- Pemimpin Unit Investigasi *Fraud* (Mei 2017 - Apr 2020)
- Pemimpin Bagian Anti *Fraud* Divisi Manajemen Risiko (Apr 2020 - Jun 2020)
- Pemimpin Bagian Penyelesaian Kredit Divisi P2K (Jul 2020 - Jan 2021)
- Pemimpin Tim Anti *Fraud* (Jan 2021 - Ags 2021)
- Pemimpin Desk Anti *Fraud* (Ags 2021 - Jan 2023)
- Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* (Jan 2023 - Jul 2023)
- Tim Khusus Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Jul 2023 - Jan 2025)
- Pemimpin Divisi *Special Asset Management* (Jan 2025 - Sekarang)

Educational background

Obtained a Bachelor's Degree in Law from Universitas Indonesia in 1995.

Work experience

Started his career at Bank Riau Kepri Syariah in 2000. Several positions he has held include:

- Act. Head of HR Administration Department, HR Division (Jan 2007 – Mar 2008)
- Head of UKPN Department, Compliance Division (Mar 2008 – May 2017)
- Act. Main Branch Manager (Apr 2014 – May 2014)
- Head of Fraud Investigation Unit (May 2017 – Apr 2020)
- Head of Anti-Fraud Department, Risk Management Division (Apr 2020 – June 2020)
- Head of Financing Settlement Department, P2K Division (July 2020 – Jan 2021)
- Head of Anti-Fraud Team (Jan 2021 – Aug 2021)
- Head of Anti-Fraud Desk (Aug 2021 – Jan 2023)
- Vice President of Internal Audit & Anti-Fraud (Jan 2023 – July 2023)
- Special Team for Troubled Financing Settlement (July 2023 – Jan 2025)
- Vice President of Special Asset Management (Jan 2025 – Present)



EDI WARDANA

Pemimpin Divisi Dana & *Digital Banking*
Vice President of Funds and Digital Banking Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Simpang Gaung, 21 Oktober 1978. Usia 47 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Dana & *Digital Banking* sejak April 2025 berdasarkan SK No. 048/KEPDIR/2025 tanggal 14 April 2025.

Indonesian Citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Simpang Gaung, October 21, 1978. 47 years of age as of December 31, 2025. Serving as the Head of the Funding & Digital Banking Division since April 2025, pursuant to the Board of Directors' Decree No. 048/KEPDIR/2025 dated April 14, 2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar sarjana di bidang Manajemen pada Universitas Riau pada tahun 2006 dan meraih gelar Pasca Sarjana dari Universitas Riau di bidang Manajemen pada tahun 2016

Pengalaman Kerja

Memulai karir di Bank Riau Kepri Syariah pada tahun 2001. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Cabang Pembantu Tangkerang (Des 2010 s/d Mar 2010)
- Pemimpin Bagian Pengadaan Divisi Umum (Mar 2014 - Okt 2016)
- Pemimpin Bagian ATM *Center* Divisi Operasional (Okt 2016 - Mei 2017)
- Pemimpin Bagian Pengembangan Produk Divisi Produk Dana & Jasa (Mei 2017 - Jan 2021)
- Pemimpin *Desk Digital Banking Services* (Jan 2021 - Feb 2022)
- Pgs. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (Feb - Nov 2022)
- Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (Nov 2022 – Apr 2025)
- Pemimpin Divisi Dana & *Digital Banking* (Apr 2025 - Sekarang)

Educational background

Obtained a bachelor's degree in Management at the University of Riau in 2006 and a Master's degree from the University of Riau in the field of Management in 2016

Work experience

Started his career at Bank Riau Kepri Syariah in 2001. Several positions he has held include:

- Sub-Branch Manager of Tangkerang (Dec 2010 – Mar 2010)
- Procurement Dept. Head of General Affairs Division (Mar 2014 - Oct 2016)
- ATM Center Dept. Head of Operations Division (Oct 2016 - May 2017)
- Product Development Dept. Head of Fund Products & Services Division (May 2017 - Jan 2021)
- Head of Desk Digital Banking Services (Jan 2021 - Feb 2022)
- Act. Vice President of Corporate Secretary Division (Feb - Nov 2022)
- Vice President of Corporate Secretary Division (Nov 2022 – Apr 2025)
- Vice President of Funds & Digital Banking Division (Apr 2025 – Present)



YUDHI ADITYA YUDHANA

Pemimpin Divisi *Treasury & International Banking*
Vice President of Treasury & International Banking Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Jakarta, 11 November 1975. Usia 50 per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi *Treasury & International Banking* sejak 2023 berdasarkan SK No.35/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 21 Maret 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Jakarta, 11 November 1975. Age 50 as of 31 December 2025. Served as Vice President of Treasury & International Banking Division since 2023 based on Decree No.35/KEPDIR/MSDI/2023 dated 21 March 2023.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana bidang Manajemen dari Universitas Riau (UNRI) pada tahun 1999.

Pengalaman Kerja

Bergabung di Bank Riau Kepri Syariah mulai tahun 2000. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain:

- Pemimpin Bagian Internasional Divisi *Treasury & International* (Des 2010 - Okt 2016)
- Pemimpin Divisi *Treasury & Internasional* (Okt 2016 - Jan 2023)
- Pemimpin Divisi Dana & *Digital Banking* (Jan 2023 - Mar 2023)
- Pemimpin Divisi *Treasury & International Banking* (Mar 2023 – Sekarang)

Educational background

Obtained a Bachelor's Degree in Law from Universitas Indonesia in 1995.

Work experience

Joined Bank Riau Kepri Syariah starting in 2000. Several Positions held include:

- International Dept. Head of Treasury & International Division (Des 2010 - Oct 2016)
- Vice President of Treasury & International Division (Oct 2016 - Jan 2023)
- Vice President of Funds & Digital Banking Division (Jan 2023 - Mar 2023)
- Vice President of Treasury & International Banking Division (Mar 2023 - Present)



YASRAL YAZID

Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan
Vice President of Planning & Finance Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Duri, 19 Sep 1971. Saat ini Usia 54 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan sejak 17 Mei 2025 berdasarkan SK No. 0002/KEPDIR/2025 tanggal 12 Maret 2025.

Indonesian Citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Duri, September 19, 1971. Aged 54 as of December 31, 2025. Serving as the Vice President of Planning & Finance since May 17, 2025, based on Decree No. 0002/KEPDIR/2025 dated March 12, 2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Manajemen Industri pada Universitas Pasundan tahun 1996 dan Magister di bidang Keuangan pada Sekolah Tinggi Manajemen Bandung (STMB) TELKOM pada tahun 2001.

Pengalaman Kerja

Memulai karir di Bank Riau Kepri Syariah pada tahun 2004. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Cabang Dumai (Mei 2017 - Mar 2018)
- Pemimpin Cabang Pekanbaru (Mar 2018 - Agus 2021)
- Pemimpin Bagian Perencanaan Divisi Perencanaan Strategis (Agus 2021 - Jan 2023)
- Pemimpin Bagian Perencanaan & Keuangan Divisi Perencanaan & Keuangan (Jan 2023 - Mar 2025)
- Pjs. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan (Mar 2025 - Sept 2025)
- Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan (Okt 2025 - Sekarang)

Educational background

Obtained a Bachelor's Degree in Industrial Management Engineering from Universitas Pasundan in 1996 and a Master's Degree in Finance from Sekolah Tinggi Manajemen Bandung (STMB) TELKOM in 2001.

Work experience

Started his career at Bank Riau Kepri Syariah in 2004. Several positions he has held include:

- Branch Manager of Dumai (May 2017 – Mar 2018)
- Branch Manager of Pekanbaru (Mar 2018 – Aug 2021)
- Head of Planning Department, Strategic Planning Division (Aug 2021 – Jan 2023)
- Head of Planning & Finance Department, Planning & Finance Division (Jan 2023 – Mar 2025)
- Act. Vice President of Planning & Finance Division (Mar 2025 – Sept 2025)
- Vice President of Planning & Finance Division (Oct 2025 – Present)– Present)



WAN MUKHLIS

Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi
Vice President of Operations & Accounting Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Siak Sri Indrapura, 13 Mei 1972. Usia 53 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi sejak 2023 berdasarkan SK No. 06/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 05 Januari 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Siak Sri Indrapura, 13 May 1972. 53 years old as of 13 December 2025. Served as Vice President of Operations & Accounting Division since 2023 based on Decree No.06/KEPDIR/MSDI/2023 dated 05 January 2023.

Riwayat Pendidikan

Meraih sarjana bidang Teknik Informatika di STMIK Riau tahun 2005

Pengalaman Kerja

Memulai karir di Bank Riau Kepri Syariah sejak 1 Januari 1998. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian Operasional dan Pengembangan Prosedur Divisi Operasional (Jul 2009 – Mar 2014)
- Pemimpin Divisi Operasional (Mar 2014 – Okt 2014)
- Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi (Okt 2014 – Jan 2023)
- Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi (Jan 2023 – Sekarang)

Educational background

Obtained a bachelor's degree in Informatics Engineering at STMIK Riau in 2005

Work experience

Started his career at Bank Riau Kepri Syariah since January 1 1998. Several positions he has held include:

- Operations and Procedure Development Dept. Head of Operational Division (Jul 2009 - Mar 2014)
- Vice President of Operational Division (Mar 2014 – Oct 2014)
- Vice President of Technology & Information Systems Division (Oct 2014 – Jan 2023)
- Vice President of Operations & Accounting Division (Jan 2023 – Present)



ASJ'ARI

Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi
Vice President of Technology & Information Systems Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Tanjung Uban, 13 Mei 1972. Usia 53 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi sejak 2023 berdasarkan SK No. 06/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 05 Januari 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Tanjung Uban, 13 May 1972. 53 years old as of 31 December 2025. Has served as Vice President of Technology & Information Systems Division since 2023 based on Decree No. 06/KEPDIR/MSDI/2023 dated 05 January 2023.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar sarjana di bidang Teknik Informatika pada STMIK Riau pada tahun 2005.

Pengalaman Kerja

Memulai karir di Bank Riau Kepri Syariah pada tahun 1996. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian Pengembangan & Penerapan Kebijakan Divisi Manajemen Risiko (Mar 2008 – Apr 2014)
- Pgs. Pemimpin Cabang Airmolek (Nov 2011)
- Pemimpin Bagian *IT Planning & Change Management* Divisi TSI (Apr 2014 - Okt 2016)
- Pemimpin Bagian *IT Security* Divisi TSI (Okt 2016 – Mei 2017)
- Pemimpin Bagian Pengawasan SKAI (Mei 2017 – Jul 2019)
- Pgs. Pemimpin Cabang Ranai (Mar – Apr 2018)
- Pgs. Pemimpin Cabang Batam (Sep 2018)
- Pgs. Pemimpin SKAI (Mar - Mei 2019)
- Pemimpin Bagian Audit Teknologi Informasi SKAI (Jul 2019 – Jan 2020)
- Project Manager Tim *Project Core Banking System* Konversi Syariah (Jan - Sep 2020)
- Pemimpin Bagian Operasional *E-Channel* Divisi Keuangan & Operasional (Sep 2020 - Jan 2021)
- Pgs. Pemimpin Divisi Keuangan (Jan - Agust 2021)
- Pjs. Pemimpin Divisi *Financial & Review* (Agust 2021 – Mar 2022)
- Pjs. Pemimpin Divisi *Financial & Reporting* (Mar - Nov 2022)
- Pemimpin Divisi *Financial & Reporting* (Nov 2022 - Jan 2023)
- Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi (Jan 2023 - sekarang)

Educational background

Obtained a bachelor's degree in Informatics Engineering at STMIK Riau in 2005.

Work experience

Started his career at Bank Riau Kepri Syariah in 1996. Several positions he has held include:

- Policy Development & Implementation Dept. Head of Risk Management Division (Mar 2008 - Apr 2014)
- Act. Assistant Head of Airmolek Branch (Nov 2011)
- IT Planning & Change Management Dept. Head of TSI Division (Apr 2014 - Okt 2016)
- IT Security Dept. Head of TSI Division (Oct 2016 - May 2017)
- Head of Control Department of SKAI (May 2017 -Jul 2019)
- Act. Head of Ranai Branch (Mar – Apr 2018)
- Act. Head of Batam Branch (Sep 2018)
- Act. Vice President of SKAI (Mar - May 2019)
- Information Technology Audit Dept. Head of SKAI (Jul 2019 - Jan 2020)
- PM Sharia Conversion Core Banking System Project Team (Jan - Sep 2020)
- E-Channel Operations Dept. Head of Finance & Operational Division (Sep 2020 - Jan 2021)
- Act. Vice President of Finance Division (Jan - Aug 2021)
- Act. Vice President of Financial & Review Division (Aug 2021 - Mar 2022)
- Act. Vice President of Financial & Reporting Division (Mar - Nov 2022)
- Vice President of Financial & Reporting Division (Nov 2022 - Jan 2023)
- Vice President of Technology & Information Systems Division (Jan 2023 - Present)



YUDI ASDAM

Pemimpin Divisi Umum
Vice President of General Affairs Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Tanjung Uban, 21 Mei 1971. Usia 54 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi sejak 2023 berdasarkan SK No. 67/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 30 Mei 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Tanjung Uban, May 21, 1971. 54 years old as of 31 December 2025. Served as Vice President of General Affairs Division since 2023 based on Decree No. 67/KEPDIR/MSDI/2023 dated 30 May 2023.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi pada Universitas Riau pada tahun 1998.

Pengalaman Kerja

Memulai karir di Bank Riau Kepri Syariah pada tahun 1997. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Cabang Syariah Tanjungpinang (Apr 2014 – Agust 2015)
- Pemimpin Cabang Tanjungpinang (Agust 2015 – Mei 2017)
- Pemimpin Cabang Pasir Pengaraian (Mei 2017 – Jul 2019)
- Pemimpin Cabang Tanjungpinang (Jul 2019 – Agust 2021)
- Koordinator Staf Khusus Direksi Monitoring Kinerja Cabang (Agust 2021 – Feb 2022)
- Pgs. Pemimpin Cabang Utama (Feb 2022)
- Pemimpin Bagian Pengembangan & Pembinaan Jaringan (Feb 2022 – Agust 2022)
- Pemimpin Bagian Pengembangan & Supervisi Jaringan (Sep 2022 – Mei 2023)
- Staf Khusus Direksi Koordinasi Bisnis Wilayah Kepri (Sep 2022 – Mei 2023)
- Pgs. Pemimpin Divisi Umum (Mei 2023 – Mar 2024)
- Pemimpin Divisi Umum (Mar 2024 – Sekarang)

Educational background

Obtained a Bachelor's degree in Accounting at Riau University in 1998.

Work experience

Started his career at Bank Riau Kepri Syariah in 1997. Several positions he has held include:

- Head of Tanjungpinang Sharia Branch (Apr 2014 – Aug 2015)
- Head of Tanjungpinang Branch (Aug 2015 – May 2017)
- Head of Pasir Pengaraian Branch (May 2017 – Jul 2019)
- Head of Tanjungpinang Branch (Jul 2019 – Agust 2021)
- Coordinator of Assistant Directors for Monitoring Branch Performance(Aug 2021 – Feb 2022)
- Act. Head of Main Branch (Feb 2022)
- Development & Coaching Network Dept. Head (Feb 2022 - Aug 2022)
- Development & Supervision Network Dept. Head (Sep 2022 - May 2023)
- Assistant of Directors for Business Coordination Kepri Region (Sep 2022 – May 2023)
- Act. Vice President of General Affairs Division (May 2023 – March 2024)
- Vice President of General Affairs Division (March 2024 – Present)



DONI RAIMOND

Pjs. Pemimpin Divisi Kepatuhan
Act. Vice President of Compliance Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Selatpanjang, 01 Desember 1979. Usia 46 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pjs. Pemimpin Divisi Kepatuhan sejak 2025 berdasarkan SK No. 204/KEPDIR/2025 tanggal 24 November 2025.

Indonesian Citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Selatpanjang, December 01, 1979. Aged 46 as of December 31, 2025. Serving as the Acting Vice President of Compliance since 2025 based on Decree No. 204/KEPDIR/2025 dated November 24, 2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar sarjana di bidang Akuntansi pada Universitas Riau pada tahun 2004 dan meraih gelar Pasca Sarjana dari Universitas Riau di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2013.

Educational background

Obtained a Bachelor's Degree in Accounting from Universitas Riau in 2004, and subsequently earned a Master's Degree in Human Resource Management from Universitas Riau in 2013.

Pengalaman Kerja

Memulai karir di Bank Riau Kepri Syariah pada tahun 1 Mei 2003. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Cabang Siak Sri Indrapura (Mei 2017 - Mar 2018)
- Pemimpin Bagian Dana Divisi Bisnis Syariah (Mar 2018 - Jan 2021)
- Pgs. Pemimpin Divisi Syariah (Jan 2021 - Agt 2021)
- Pemimpin Bagian Pengembangan & Penerapan Kebijakan Divisi Manajemen Risiko (Agt 2021 - Jan 2023)
- Pemimpin Bagian Pengembangan Kebijakan & *Cyber Management* (Jan 2023 - Nov 2025)
- Pjs. Pemimpin Divisi Kepatuhan (Nov 2025 – Sekarang)

Work experience

Started a career at Bank Riau Kepri Syariah on May 1, 2003. Several positions he has held include:

- Branch Manager of Siak Sri Indrapura (May 2017 – Mar 2018)
- Head of Funding Department, Sharia Business Division (Mar 2018 – Jan 2021)
- Act. Vice President of Sharia Division (Jan 2021 – Aug 2021)
- Head of Policy Development & Implementation Department, Risk Management Division (Aug 2021 – Jan 2023)
- Head of Policy Development & Cyber Management Department (Jan 2023 – Nov 2025)
- Act. Vice President of Compliance (Nov 2025 – Present)



ANTHONY SUJARWO

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
Vice President of Risk Management Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Jakarta, 03 Maret 1975. Usia 50 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko sejak 2023 berdasarkan SK No. 91/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 11 Juli 2023.

Indonesian Citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Jakarta, March 3, 1975. 50 years of age as of December 31, 2025. Serving as Head of the Risk Management Division since 2023, pursuant to Decree No. 91/KEPDIR/MSDI/2023 dated July 11, 2023.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Muda bidang Perbankan dari STIE AKBAR tahun 1997.

Pengalaman Kerja

Bergabung di Bank Riau Kepri Syariah mulai tahun 1997. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Cabang Tanjung Balai Karimun (Mar 2013 - Okt 2014)
- Pemimpin Cabang Tanjungpinang (Okt 2014 - Agust 2015)
- Pemimpin Cabang Batam (Agust 2015 - Mei 2017)
- Pemimpin Bagian Proyek dan Sindikasi Divisi Komersial (Mei 2017 - Apr 2020)
- Pemimpin Bagian Komersial I Divisi Komersial (Apr - Jun 2020)
- Pemimpin Cabang Bangkinang (Jun 2020 - Jan 2021)
- Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah (Jan 2021 - Jan 2023)
- Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan (Jan 2023 – Juli 2023)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (Jul 2023 – Jun 2024)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Merangkap Tugas Pemimpin Divisi Kepatuhan (Jun 2024 – Mar 2025)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Merangkap Tugas Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality* (Jan 2025 – Mar 2025)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (Mar 2025 – sekarang)

Educational background

Obtained a Bachelor's degree in Banking from STIE AKBAR in 1997.

Work experience

Joined Bank Riau Kepri Syariah starting in 1997. Several positions he has held include:

- Head of Tanjung Balai Karimun Branch (Mar 2013 -Oct 2014)
- Head of Tanjungpinang Branch (Oct 2014 - Aug 2015)
- Head of Batam Branch (Aug 2015 - May 2017)
- Project and Syndication Dept. Head of Commercial Division (May 2017 - Apr 2020)
- Commercial I Dept. Head of Commercial Division (Apr - Jun 2020)
- Head of Bangkinang Branch (Jun 2020 - Jan 2021)
- Vice President of Micro, Small & Medium Division (Jan 2021 - Jan 2023)
- Vice President of Planning & Finance Division (Jan 2023 – Jul 2023)
- Vice President of Risk Management Division (Jul 2023 – Jun 2024)
- Vice President of Risk Management Division concurrent responsibilities with Compliance Division (Jun 2024 – Mar 2025)
- Vice President of Risk Management Division concurrent responsibilities with Procedure Systems & Service Quality Division (Jan 2025 – Mar 2025)
- Vice President of Risk Management Division (Mar 2025 – present)



ARHIM SYAFEI

Pemimpin Divisi Hukum
Vice President of Legal Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Pekanbaru, 27 Desember 1972. Berusia 53 tahun pada tanggal 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum sejak tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan No. 02/KEPDIR/MSDM/2022 tanggal 10 Januari 2022.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Pekanbaru, 27 December 1972. 53 years old as of 31 December 2025. Served as Vice President of Legal Division since 2022 based on Decree No. 02/KEPDIR/MSDM/2022 dated 10 January 2022.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana bidang Hukum dari Universitas Gajah Mada tahun 1993.

Pengalaman Kerja

Berkarir di Bank Riau Kepri Syariah sejak tahun 2000. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian Kepatuhan Kebijakan dan GCG Divisi Kepatuhan (Mar 2008 - Jul 2013)
- Pgs. Pemimpin Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko (Jul 2013 - Mar 2014)
- Pemimpin Bagian Hukum Divisi Hukum & *Corporate Secretary* (Mar 2014 - Jan 2016)
- Pemimpin Bagian Hukum Litigasi Divisi Hukum (Jan 2016 – Jan 2021)
- Ketua Tim *Task Force* Penyelesaian Kredit (Jan 2021 - Jan 2022)
- Pgs. Pemimpin Divisi Hukum (Jan 2022 - Nov 2022)
- Pemimpin Divisi Hukum (Nov 2022 – sekarang)

Educational background

Obtained a Bachelor's degree in Law from Gajah Mada University in 1993.

Work experience

He has worked at Bank Riau Kepri Syariah since 2000. Several positions he has held include:

- Policy Compliance and GCG Dept. Head of Compliance Division (Mar 2008 - Jul 2013)
- Act. Vice President of Compliance & Risk Management Division (Jul 2013 - Mar 2014)
- Legal Division Dept. Head of Law & Corporate Secretary Division (Mar 2014 - Jan 2016)
- Litigation Legal Dept. Head of Legal Division (Jan 2016 – Jan 2021)
- Head of Financing Settlement Task Force Team (Jan 2021 - Jan 2022)
- Act. Vice President of Legal Division (Jan 2022 - Nov 2022)
- Vice President of Legal Division (Nov 2022 – present)



MUHAMAD NANANG

Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
Vice President of Internal Audit & Anti Fraud Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Bengkalis, 2 Januari 1972. Usia 53 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* sejak 2023 berdasarkan SK No. 91/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 11 Juli 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Bengkalis, 2 January 1972. 53 years old as of 31 December 2025. Served as Internal Vice President of Internal Audit & Anti Fraud Division since 2023 based on Decree No. 91/KEPDIR/MSDI/2023 dated 11 July 2023.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Riau (UNRI) tahun 1996.

Pengalaman Kerja

Berkarir di Bank Riau Kepri Syariah sejak tahun 2000. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian UKPN Divisi Kepatuhan (Okt 2014 - Jan 2018)
- Pgs. Pemimpin Cabang Jakarta (Jan - Mar 2018)
- Pemimpin Cabang Siak Sri Indrapura (Mar 2018 - Jul 2019)
- Pemimpin Cabang Bengkalis (Jul 2019 – Agust 2021)
- Pemimpin Cabang Pekanbaru (Agust 2021 – Feb 2022)
- Pgs. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (Feb 2022 - Nov 2022)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (Nov 2022 – Jul 2023)
- Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* (Jul 2023 - Sekarang)

Educational background

Obtained a Bachelor's degree in Development Economics from the University of Riau (UNRI) in 1996.

Work experience

He has worked at Bank Riau Kepri Syariah since 2000. Several positions he has held include:

- UKPN Dept. Head of Compliance Division (Oct 2014 - Jan 2018)
- Act. Head of Jakarta Branch (Jan - Mar 2018)
- Head of Siak Sri Indrapura Branch (Mar 2018 - Jul 2019)
- Head of Bengkalis Branch (Jul 2019 – Aug 2021)
- Head of Pekanbaru Branch (Augt 2021 – Feb 2022)
- Act. Vice President of Risk Management Division (Feb 2022 - Nov 2022)
- Vice President of Risk Management Division (Nov 2022 – Jul 2023)
- Vice President of Internal Audit & Anti Fraud Division (Jul 2023 - Present)



MUHAMMAD AFFAN

Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani
Vice President of Human Resources Management Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Cengar, 11 Juni 1970. Usia 55 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani sejak 2024 berdasarkan SK No. 250/KEPDIR/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Indonesian Citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Cengar, June 11, 1970. Aged 55 as of December 31, 2025. Serving as the Vice President of Human Capital Management since 2024 based on Decree No. 250/KEPDIR/2024 dated December 31, 2024.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Riau (UNRI) pada tahun 1994.

Pengalaman Kerja

Bergabung di Bank Riau Kepri Syariah mulai tahun 1996. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Cabang Teluk Kuantan (Apr 2014 - Mei 2017)
- Pemimpin Cabang Bangkinang (Mei 2017 - Jul 2019)
- Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah (Jul 2019 - Jan 2021)
- Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (Jan 2021 - Agust 2022)
- Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (Agust 2022 - Jul 2023)
- Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan (Jul 2023 – Mei 2024)
- Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan Merangkap Tugas Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (Mei 2024 - Jan 2025)
- Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (Jan 2025 - Sekarang)

Educational background

Obtained a Bachelor's degree in Development Economics from the University of Riau (UNRI) in 1994.

Work experience

Joined Bank Riau Kepri Syariah starting in 1996. Several positions he has held include:

- Head of Teluk Kuantan Branch (Apr 2014 - May 2017)
- Head of Bangkinang Branch (May 2017 - Jul 2019)
- Vice President of Micro, Small & Medium Division (Jul 2019 - Jan 2021)
- Vice President of Human Resources Management Division (Jan 2021 - Aug 2022)
- Vice President of Human Resources Management Division (Aug 2022 - Jul 2023)
- Vice President of Planning & Finance Division (July 2023 – Mei 2024)
- Vice President of Planning & Finance Division concurrent responsibilities with Human Resources Management Division (May 2024 - Jan 2025)
- Vice President of Human Resources Management Division (Jan 2025 - Present)



TENGKU MUHAMMAD FADHLY KHOLIS

Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
Vice President of Corporate Secretary Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Pekanbaru, 10 Februari 1974. Usia 51 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan sejak November 2025 berdasarkan SK No. 185/KEPDIR/2025.

Indonesian Citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Pekanbaru, February 10, 1974. Aged 51 as of December 31, 2025. Serving as the Vice President of Corporate Secretary since November 2025 based on Decree No. 185/KEPDIR/2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi pada Universitas Sumatera Utara pada tahun 1998.

Pengalaman Kerja

Memulai karir di Bank Riau Kepri Syariah pada tahun 2000. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pgs. Pemimpin Divisi SKAI (Ags 2013 - Mar 2014)
- Pemimpin Cabang Pasir Pangaraian (Mar 2014 - Ags 2015)
- Pemimpin Cabang Tanjung Balai Karimun (Ags 2015 - Mei 2017)
- Pemimpin Cabang Teluk Kuantan (Mei 2017 - Jul 2019)
- Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci (Jul 2019 - Jan 2021)
- Pemimpin Bagian Pengadaan Divisi Umum (Jan 2021 - Ags 2021)
- Pemimpin Bagian Pengadaan IT & Logistik Divisi Umum (Ags 2021 - Mei 2023)
- Tim Task Force Penyelesaian Pembiayaan (Mei 2023 - Jun 2023)
- Pemimpin Bagian Penyelesaian *Asset Management* Divisi *Special Asset Management* (Jun 2023 - Jan 2024)
- Pemimpin Bagian Anti *Money Laundering* (AML) & *Counter Terrorism Financing* (CTF) Divisi Kepatuhan (Jan 2024 - Apr 2025)
- Pjs. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (Apr 2025 - Oktober 2025)
- Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (November 2025 - sekarang)

Educational background

Obtained a Bachelor's Degree in Accounting from University of Sumatera Utara in 1998.

Work experience

Started a career at Bank Riau Kepri Syariah in 2000. Several positions held include:

- Act. Vice President of SKAI (Internal Audit) (Aug 2013 – Mar 2014)
- Branch Manager of Pasir Pangaraian (Mar 2014 – Aug 2015)
- Branch Manager of Tanjung Balai Karimun (Aug 2015 – May 2017)
- Branch Manager of Teluk Kuantan (May 2017 – July 2019)
- Branch Manager of Pangkalan Kerinci (July 2019 – Jan 2021)
- Head of Procurement Department, General Affairs Division (Jan 2021 – Aug 2021)
- Head of IT & Logistics Procurement Department, General Affairs Division (Aug 2021 – May 2023)
- Task Force Team for Financing Settlement (May 2023 – June 2023)
- Head of Asset Management Settlement Department, Special Asset Management Division (June 2023 – Jan 2024)
- Head of Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) Department, Compliance Division (Jan 2024 – Apr 2025)
- Act. Vice President of Corporate Secretary (Apr 2025 – Oct 2025)
- Vice President of Corporate Secretary (November 2025 – Present)



NOKI SYAFRIADI*

Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality*
Vice President of Procedure Systems & Service Quality Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Dumai, 18 Januari 1979. Usia 46 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality* sejak Maret 2025 berdasarkan SK No.0002/KEPDIR/MSDI/2025

Indonesian Citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Dumai, January 18, 1979. Age 46 years old as of December 31, 2025. Serving as Vice President of Procedure Systems & Service Quality Division since March 2025 based on Decree (SK) No.0002/KEPDIR/MSDI/2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana di bidang "*Islamic Law and Jurisprudence*" pada Al Azhar University Kairo, Mesir pada tahun 2004 dan meraih gelar Pasca Sarjana di bidang "Ekonomi dan Keuangan Syariah" pada Universitas Trisakti pada tahun 2012.

Educational background

Obtained a Bachelor's degree in "Islamic Law and Jurisprudence" from Al Azhar University Cairo, Egypt in 2004 and obtained a Master's degree in "Sharia Economics and Finance" from Universitas Trisakti in 2012.

Pengalaman Kerja

Memulai karir di BRK Syariah pada tahun 2005. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian Perencanaan, Pengembangan Produk & Jasa Divisi Syariah (5 Mar 2018 - 12 Mar 2018)
- Sekretaris Umum Tim *Task Force* Kajian *Spin Off* UUS Bank Riau Kepri (12 Mar 2018 - Mei 2019)
- Sekretaris Eksekutif Tim PMO Konversi PT. Bank Riau Kepri menjadi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Mei 2019 - Des 2020)
- Pemimpin Bagian Dana & Jasa Divisi Syariah (Jan 2021 - Ags 2021)
- Pemimpin Bagian Kepatuhan Syariah Divisi Kepatuhan (Ags 2021 - Mar 2025)
- Pjs. Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality* (Mar 2025 - Sept 2025)
- Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality* (Okt 2025 - Nov 2025)

Work experience

Started a career at Bank Riau Kepri Syariah in 2005. Several positions held include::

- Head of Planning, Product & Service Development Department, Sharia Division (Mar 5, 2018 to Mar 12, 2018)
- General Secretary of the Task Force Team for the Spin-Off Study of the Sharia Business Unit (UUS) of Bank Riau Kepri (Mar 12, 2018 to May 2019)
- Executive Secretary of the PMO Team for the Conversion of PT. Bank Riau Kepri to PT. Bank Riau Kepri Syariah (May 2019 to Dec 2020)
- Head of Funds & Services Department, Sharia Division (Jan 2021 to Aug 2021)
- Head of Sharia Compliance Department, Compliance Division (Aug 2021 to Mar 2025)
- Act. Vice President Procedure Systems & Service Quality Division (Mar 2025 to Sept 2025)
- Vice President Procedure Systems & Service Quality Division (Oct 2025 to Nov 2025)

Non aktif sementara dalam rangka mengikuti pencalonan Anggota Dewan Pengawas Syariah efektif terhitung sejak 25 November 2025.

Temporarily inactive in order to participate in the candidacy for Member of the Sharia Supervisory Board, effective as of November 25, 2025.

JUMLAH DAN KOMPOSISI PEGAWAI BRK SYARIAH
NUMBER AND COMPOSITION OF BRK SYARIAH EMPLOYEES

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah pegawai BRK Syariah tercatat sebanyak 2.988 orang. Jumlah tersebut menunjukkan Penurunan dibandingkan posisi akhir tahun 2024 yang berjumlah 3.003 pegawai. Perubahan jumlah pegawai tersebut terutama dipengaruhi oleh pegawai *resign* dan pensiun selama periode tahun 2025.

Berikut adalah profil dan komposisi pegawai BRK Syariah yang disajikan berdasarkan beberapa aspek utama, meliputi jenis kelamin, status kepegawaian, level jabatan, tingkat pendidikan dan usia.

As of December 31, 2025, the total headcount of BRK Syariah was recorded at 2,988 employees. This figure represents a decrease compared to the position at the end of 2024, which totaled 3,003 employees. The change in the number of employees was primarily driven by employee resignations and retirements during the 2025 period.

The following is the profile and composition of BRK Syariah employees, presented based on several key aspects, including gender, employment status, job level, education level, and age.

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Count by Gender

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (dalam Satuan Orang)
Table of Number of Employees Based on Gender (in Persons)

Jenis Kelamin	2025			2024			2023			Gender
	Pria Man	Wanita Woman	Total	Pria Man	Wanita Woman	Total	Pria Man	Wanita Woman	Total	
Jumlah	**2.011**	**977**	**2.988**	**2.028**	**975**	**3.003**	**2011**	**947**	**2.958**	Total

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Count by Employment Status

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status
Table of Number of Employees Based on Status

Status Kepegawaian	2025			2024			2023			Employment status
	Pria Man	Wanita Woman	Total	Pria Man	Wanita Woman	Total	Pria Man	Wanita Woman	Total	
Pegawai Tetap	1.191	677	1.868	1.223	695	1.918	1.237	701	1.938	Permanent employee
PTT	221	239	460	185	213	398	149	179	328	PTT
Outsourcing	599	61	660	620	67	687	625	67	692	Outsourcing
Jumlah	**2.011**	**977**	**2.988**	**2.028**	**975**	**3.003**	**2.011**	**947**	**2.958**	Total

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Employee Count by Job Level

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan (dalam Satuan Orang)
Table of Number of Employees Based on Position Level (in Persons)

Level Jabatan	2025			2024			2023			*Position Level*
	Pria Man	Wanita Woman	Total	Pria Man	Wanita Woman	Total	Pria Man	Wanita Woman	Total	
Pemimpin Divisi	16	1	17	14	1	15	17	1	18	Division Head
Pemimpin Cabang Utama/ Setingkat	1	1	2	2	1	3	2	1	3	Main Branch Manager/ Equivalent
Pemimpin Bagian Kantor Pusat	55	13	68	57	12	69	50	13	63	Dept. Head of head office
Pemimpin Cabang	21	1	22	21	1	22	22	0	22	Branch Manager
Staf Direksi	2	0	2	2	0	2	2	0	2	Board of Directors Staff

Level Jabatan	2025			2024			2023			*Position Level*
	Pria Man	Wanita Woman	Total	Pria Man	Wanita Woman	Total	Pria Man	Wanita Woman	Total	
Pemimpin Cabang Pembantu	38	2	40	38	2	40	39	2	41	Sub-Branch Manager
Pemimpin Bagian Cabang Utama/Setingkat	21	3	24	23	4	27	21	3	24	Dept. Head of Main Branch/ Equivalent
Pemimpin Setingkat Pincapem	14	4	18	16	4	20	16	4	20	Head of Sub-Branch Manager Level
Pemimpin Seksi Setingkat	295	152	447	296	151	447	297	141	438	Section Head/Equivalent
Pegawai MPP (Masa Persiapan Pensiun)	6	1	7	7	0	7	2	0	2	MPP Employees (Retirement Preparation Period)
Pelaksana	226	268	494	232	272	504	250	290	540	Officer
Pegawai *Core* (*Teller*/CS/FO/RO)	428	469	897	405	459	864	217	245	462	Core Staff (Teller/CS/FO/RO)
Lain-lain	888	62	950	915	68	983	1076	247	1323	Etc
Jumlah	**2.011**	**977**	**2.988**	**2,028**	**975**	**3,003**	**2.011**	**947**	**2.958**	Total

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Number of Employees Based on Education Level

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (dalam Satuan Orang)
Table of Number of Employees Based on Education Level (in Persons)

Tingkat Pendidikan	2025			2024			2023			Level of education
	Pria Man	Wanita Woman	Total	Pria Man	Wanita Woman	Total	Pria Man	Wanita Woman	Total	
S3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	Doctorate/Doctoral Degree
S2	78	35	113	75	34	109	67	31	98	Master's Degree
S1	1.066	780	1.856	1.058	761	1.819	1065	747	1812	Bachelor degree
D3	116	138	254	119	144	263	121	147	268	Diploma
SMA	739	23	762	19	16	35	745	21	766	Senior High School
SMP	11	0	11	745	19	764	12	0	12	Junior High School
SD	0	0	0	11	0	11	0	0	0	Elementary
Jumlah	**2.011**	**977**	**2.988**	**2.028**	**975**	**3.003**	**2.011**	**947**	**2.958**	Total

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

Number of Employees Based on Age

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia (dalam Satuan Orang)
Table of Number of Employees on Age (in Persons)

Usia	2025			2024			2023			Age
	Pria Man	Wanita Woman	Total	Pria Man	Wanita Woman	Total	Pria Man	Wanita Woman	Total	
> 55	4	1	5	5	1	6	5	1	6	> 55
50 – 55	120	18	138	102	13	115	86	9	95	50 – 55
40 – 49	627	230	857	569	211	780	516	184	700	40 – 49
30 – 39	869	428	1.297	880	402	1282	874	371	1.245	30 – 39
23 – 29	368	297	665	445	346	791	491	377	868	23 – 29
< 23	23	3	26	27	2	29	39	5	44	< 23
Jumlah	**2.011**	**977**	**2.988**	**2.028**	**975**	**3.003**	**2.011**	**947**	**2.958**	Amount

INFORMASI PEMEGANG SAHAM BRK SYARIAH
BRK SYARIAH SHAREHOLDER INFORMATION

Struktur Pemegang Saham BRK Syariah Per 31 Desember 2025

Shareholding Structure of BRK Syariah as of December 31, 2025



Komposisi Pemegang Saham BRK Syariah Tahun 2025

Shareholder Composition of BRK Syariah for the Year 2025

Tabel Komposisi Pemegang Saham BRK Syariah per 31 Desember 2025
Table of Composition of Shareholders of BRK Syariah as of 31 December 2025

Pemegang Saham	31 Januari 2025 January 31, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025			Shareholders
	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Nilai (Rp) Value (IDR)	Kepemilikan Ownership	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Nilai (Rp) Value (IDR)	Kepemilikan Ownership	
SAHAM SERI A							SERIES A SHARE
Prov. Riau	5.191.682	519.168.200.000	42,93%	5.191.682	519.168.200.000	42,93%	Riau Province
Kab. Bengkalis	1.316.062	131.606.200.000	10,88%	1.316.062	131.606.200.000	10,88%	Bengkalis Regency
Kab. Kampar	1.051.812	105.181.200.000	8,70%	1.051.812	105.181.200.000	8,70%	Kampar Regency
Kab. Indragiri Hilir	678.772	67.877.200.000	5,61%	678.772	67.877.200.000	5,61%	Indragiri Hilir Regency
Kab. Kep. Meranti	600.000	60.000.000.000	4,96%	600.000	60.000.000.000	4,96%	Kepulauan Meranti Regency
Kota Batam	500.000	50.000.000.000	4,13%	500.000	50.000.000.000	4,13%	Batam City
Kab. Bintan	380.789	38.078.900.000	3,15%	380.789	38.078.900.000	3,15%	Bintan Regency
Kab. Rokan Hilir	371.351	37.135.100.000	3,07%	371.351	37.135.100.000	3,07%	Rokan Hilir Regency
Kab. Natuna	360.381	36.038.100.000	2,98%	360.381	36.038.100.000	2,98%	Natuna Regency
Kab. Siak	327.110	32.711.000.000	2,71%	327.110	32.711.000.000	2,71%	Siak Regency
Kab. Pelalawan	319.668	31.966.800.000	2,64%	319.668	31.966.800.000	2,64%	Pelalawan Regency
Kab. Kuantan Singingi	152.086	15.208.600.000	1,26%	152.086	15.208.600.000	1,26%	Kuantan Singingi Regency
Kota Pekanbaru	150.000	15.000.000.000	1,24%	150.000	15.000.000.000	1,24%	Pekanbaru City
Prov. Kepulauan Riau	120.000	12.000.000.000	0,99%	120.000	12.000.000.000	0,99%	Kepulauan Riau Province
Kota Tanjungpinang	83.913	8.391.300.000	0,69%	83.913	8.391.300.000	0,69%	Tanjungpinang City
Kab. Rokan Hulu	82.807	8.280.700.000	0,68%	82.807	8.280.700.000	0,68%	Rokan Hulu Regency
Kab. Kepulauan Anambas	78.237	7.823.700.000	0,65%	78.237	7.823.700.000	0,65%	Kepulauan Anambas Regency
Kab. Karimun	71.900	7.190.000.000	0,59%	71.900	7.190.000.000	0,59%	Karimun Regency
Kab. Lingga	70.000	7.000.000.000	0,58%	70.000	7.000.000.000	0,58%	Lingga Regency
Kab. Indragiri Hulu	64.007	6.400.700.000	0,53%	64.007	6.400.700.000	0,53%	Indragiri Hulu Regency
Kota Dumai	52.030	5.203.000.000	0,43%	52.030	5.203.000.000	0,43%	Dumai City
TOTAL SAHAM SERI A	**12.022.607**	**1.202.260.700.00**	**99,42%**	**12.022.607**	**1.202.260.700.00**	**99,42%**	TOTAL SERIES A SHARES
SAHAM SERI B							SERIES B SHARE
Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri	70.000	7.000.000.000	0.58%	70.000	7.000.000.000	0.58%	Riau Kepri Amanah Syariah Cooperative Consumer
TOTAL SAHAM SERI B	**70.000**	**7.000.000.000**	**0,58%**	**70.000**	**7.000.000.000**	**0,58%**	TOTAL SERIES B SHARES
TOTAL SAHAM	**12.092.607**	**1.209.260.700.000**	**100%**	**12.092.607**	**1.209.260.700.000**	**100%**	TOTAL SHARE

Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham

Shareholders Owning 5% or More of Shares

Tabel Komposisi Pemegang Saham BRK Syariah 5% atau Lebih Per Desember 2025
Table of Composition of Sharia BRK Shareholders of 5% or More as of December 2025

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Nilai (Rp) Value (IDR)	Kepemilikan Ownership	Shareholders
1	Provinsi Riau	5.191.682	519.168.200.000	42,93%	Riau Province
2	Kabupaten Bengkalis	1.316.062	131.606.200.000	10,88%	Bengkalis Regency
3	Kabupaten Kampar	1.051.812	105.181.200.000	8,70%	Kampar Regency
4	Kabupaten Indragiri Hilir	678.772	67.877.200.000	5,61%	Indragiri Hilir Regency
	TOTAL	**8.238.328**	**823.832.800.000**	**68,12%**	TOTAL

Kepemilikan Saham BRK Syariah oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat kepemilikan saham BRK Syariah oleh Dewan Komisaris dan Direksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah dijelaskan lebih lanjut pada Bab Tata Kelola Bank dalam Laporan Tahunan ini.

BRK Syariah Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

As of December 31, 2025, there is no share ownership in BRK Syariah by the Board of Commissioners or the Board of Directors, whether directly or indirectly. Information regarding the share ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors of BRK Syariah is further explained in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.

Kepemilikan Saham BRK Syariah oleh Masyarakat Kurang dari 5%

Sampai dengan 31 Desember 2025, BRK Syariah belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi pemegang saham masyarakat kurang dari 5% atau lebih, dikarenakan kepemilikan saham BRK syariah dimiliki oleh Institusi Lokal yaitu Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau dan Kepulauan Riau serta Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri. Berikut Pemegang Saham BRK Syariah yang memiliki saham kurang dari 5% per 31 Desember 2025.

BRK Syariah Share Ownership by the Public of Less Than 5%

As of December 31, 2025, BRK Syariah has not yet become a company listed on the stock exchange. Accordingly, there is no information regarding the composition of public shareholding of less than 5% or more, as the share ownership of BRK Syariah is held by Local Institutions, namely the Riau Provincial Government, the Kepulauan Riau Provincial Government, Regency/City Governments throughout Riau and the Kepulauan Riau, as well as the Amanah Riau Kepri Sharia Consumer Cooperative. The following are the BRK Syariah Shareholders who own less than 5% as of December 31, 2025.

Tabel Komposisi Pemegang Saham BRK Syariah Kurang dari 5% Per Desember 2025
Table of Shareholder Composition of BRK Syariah Less than 5% as of December 2025

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Nilai (Rp) Value (IDR)	Kepemilikan Ownership	Shareholders
1	Kab. Kepulauan Meranti	600.000	60.000.000.000	4,96%	Kepulauan Meranti Regency
2	Kota Batam	500.000	50.000.000.000	4,13%	Batam City
3	Kab. Bintan	380.789	38.078.900.000	3,15%	Bintan Regency
4	Kab. Rokan Hilir	371.351	37.135.100.000	3,07%	Rokan Hilir Regency
5	Kab. Natuna	360.381	36.038.100.000	2,98%	Natuna Regency
6	Kab. Siak	327.110	32.711.000.000	2,71%	Siak Regency
7	Kab. Pelalawan	319.668	31.966.800.000	2,64%	Pelalawan Regency
8	Kab. Kuantan Singingi	152.086	15.208.600.000	1,26%	Kuantan Singingi Regency
9	Kota Pekanbaru	150.000	15.000.000.000	1,24%	Pekanbaru City
10	Prov. Kepulauan Riau	120.000	12.000.000.000	0,99%	Kepulauan Riau Province
11	Kota Tanjung Pinang	83.913	8.391.300.000	0,69%	Tanjung Pinang City
12	Kab. Rokan Hulu	82.807	8.280.700.000	0,68%	Rokan Hulu Regency
13	Kab. Kepulauan Anambas	78.237	7.823.700.000	0,65%	Kepulauan Anambas Regency
14	Kab. Karimun	71.900	7.190.000.000	0,59%	Karimun Regency
15	Kab. Lingga	70.000	7.000.000.000	0,58%	Lingga Regency
16	Kab. Indragiri Hulu	64.007	6.400,700.000	0,53%	Indragiri Hulu Regency
17	Kota Dumai	52.030	5.203.000.000	0,43%	Dumai City
18	Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri	70.000	7.000.000.000	0,58%	Amanah Riau Kepri Sharia Consumer Cooperative
	TOTAL	**3.854.279**	**385.427.900.000**	**31,88%**	TOTAL

Jumlah Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi Institusi Lokal, Institusi Asing, Individu Lokal, dan Individu Asing

Sampai dengan 31 Desember 2025, BRK Syariah hanya dimiliki oleh institusi lokal yaitu Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau dan Kepulauan Riau serta Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri.

Number of Shareholders Based on Classification of Local Institutions, Foreign Institutions, Local Individuals, and Foreign Individuals

As of December 31, 2025, BRK Syariah is exclusively owned by local institutions, namely the Provincial Government of Riau, the Provincial Government of Kepulauan Riau, the Regency and Municipal Governments throughout Riau and Kepulauan Riau, as well as the Amanah Riau Kepri Sharia Consumer Cooperative.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

BRK Syariah adalah entitas dengan kepemilikan saham yang dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan kepemilikan saham sebanyak 42,93% dengan jumlah lembar saham sebesar 5.191.682 per 31 Desember 2025. Berikut ini adalah profil pemegang saham pengendali BRK Syariah:

Major and Controlling Shareholders

BRK Syariah is an entity with share ownership controlled by the Riau Provincial Government, holding a 42.93% stake with a total of 5,191,682 shares as of December 31, 2025. The following is the profile of the controlling shareholder of BRK Syariah:

Pemerintah Provinsi Riau

Provinsi Riau resmi berdiri pada tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sumatera Tengah. Sebelumnya, wilayah Riau merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah.

Sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, Riau telah dikenal sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis di jalur perdagangan Selat Malaka serta kaya akan nilai budaya Melayu yang menjadi identitas dan karakter masyarakatnya hingga saat ini.

Riau Provincial Government

Riau Province was officially established on August 9, 1957, based on Emergency Law Number 19 of 1957, which was later enacted as Law Number 61 of 1958, as a result of the regional expansion from the Central Sumatra Province. Previously, the Riau region was part of the Central Sumatra Province.

Since before Indonesian independence, Riau has been recognized as a region with a strategic position along the Malacca Strait trade route and is rich in Malay cultural values, which serve as the identity and character of its society to this day.

NAMA ENTITAS ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ASOSIASI, DAN PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA
NAME OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED COMPANIES, AND JOINT VENTURES

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, BRK Syariah tidak memiliki Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi maupun Perusahaan Ventura Bersama sehingga tidak tersedia informasi mengenai Nama Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi maupun Perusahaan Ventura Bersama, termasuk informasi persentase kepemilikan saham, keterangan tentang bidang usaha, total aset, alamat, dan keterangan status beroperasi dari Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi maupun Perusahaan Ventura Bersama.

As of December 31, 2025, BRK Syariah does not have any Subsidiaries, Associated Companies, or Joint Ventures. Therefore, no information is available regarding the Names of Subsidiaries, Associated Companies, or Joint Ventures; including information on shareholding percentages, descriptions of lines of business, total assets, addresses, and the operating status of any Subsidiaries, Associated Companies, or Joint Ventures.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
CHRONOLOGY OF SHARE LISTING

Hingga 31 Desember 2025, BRK Syariah tidak melakukan pencatatan saham di Bursa Efek. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai tindakan korporasi *(corporate action)*, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi dan nama bursa tempat saham perusahaan dicatatkan.

As of December 31, 2025, BRK Syariah has not listed its shares on any Stock Exchange. Accordingly, there is no information regarding corporate actions, share offering prices for each corporate action, the number of shares listed after each corporate action, or the name of the exchange where the company's shares are listed.

INFORMASI PENCATATAN EFEK LAINNYA
OTHER SECURITIES LISTING INFORMATION

Sampai dengan 31 Desember 2025, BRK Syariah tidak menerbitkan obligasi atau efek lainnya. Dengan demikian tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan obligasi serta efek lainnya.

As of December 31, 2025, BRK Syariah has not issued any bonds or other securities. Consequently, there is no information regarding the chronology of issuance and/or listing of bonds and other securities.

INFORMASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK
INFORMATION ON PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND PUBLIC ACCOUNTANT

Laporan keuangan BRK Syariah Tahun Buku 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan KAP dan AP BRK Syariah dalam mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 telah melibatkan rekomendasi Komite Audit sebagaimana surat No. 080/KS.01/DK/2025 tanggal 21 Oktober 2025 Perihal Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun buku 2025.

Berikut informasi KAP dan AP BRK Syariah yang ditunjuk untuk melaksanakan audit dan menyajikan laporan keuangan tahunan tahun buku 2025 BRK Syariah:

The financial statements of BRK Syariah for the 2025 Financial Year have been audited by a Public Accounting Firm (Kantor Akuntan Publik - KAP) and a Public Accountant (Akuntan Publik - AP) registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK). The appointment of the KAP and AP for BRK Syariah to audit the Financial Statements for the 2025 Financial Year involved the recommendation of the Audit Committee, as stipulated in Letter No. 080/KS.01/DK/2025 dated October 21, 2025, regarding the Appointment of the Public Accounting Firm (KAP) for the Audit of the Annual Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the 2025 financial year.
The following is the information regarding the KAP and AP appointed by BRK Syariah to conduct the audit and present the annual financial statements of BRK Syariah for the 2025 financial year:

Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP) Name	Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto
Nama Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP) Name	AP Hermen Bustaman, CA, CPA
Alamat KAP KAP Address	Gedung Sentra Kramat Blok B No.18 Jl. Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat 10450
Periode Penugasan KAP KAP Engagement Period	ke-6 (keenam) | 6th (sixth)
Periode Penugasan AP AP Engagement Period	Ke-1(kesatu) | 1st (first)
No. Izin KAP KAP License No.	No: STTD.KAP-106/PM.22/2018
No.Izin AP AP License No.	No : STTD.APS-56/PB.122/2018
Jasa Audit dan Fee Audit Audit Services and Audit Fee	**Jasa Audit** Audit Services: Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 Financial Report for the 2025 Fiscal Year; - **Fee Audit** Audit Fee: Rp.749.250.000; -
Jasa Non Audit dan Fee Non Audit Non-Audit Services and Non-Audit Fee	**Jasa Non Audit** Non-Audit Services: - **Fee Non Audit** Non-Audit Fee: -
Opini Audit Audit Opinion	Wajar, dalam semua hal yang material Present fairly, in all material respects

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG BRK SYARIAH
SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS OF BRK SYARIAH

Berikut adalah Lembaga dan Profesi Penunjang BRK Syariah hingga per 31 Desember 2025:

The following are the Supporting Institutions and Professionals of BRK Syariah as of December 31, 2025:

Lembaga Profesi	Keterangan	Description
Kantor Konsultan Hukum		Legal Consultant / Law Firm
Topan Meiza Romadhon & Partner Law Firm	Komplek Sudirman Business Centre Blok A-10 Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru – Riau 28282 • **Jasa yang diberikan :** 1. Konsultasi Hukum 2. Legal Opinion 3. Pendampingan Hukum 4. Serta hal lainnya yang dipandang perlu • **Periode Penugasan :** 10 Maret 2025 s/d 10 Maret 2026	Komplek Sudirman Business Centre Block A-10 Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru – Riau 28282 • **Services Provided :** 1. Legal Consultation 2. Legal Opinion 3. Legal Assistance 4. And other matters deemed necessary • **Engagement Period :** March 10, 2025, to March 10, 2026
Notaris		Notary
Notaris Vivit Arisandy, S.H., M.Kn	Jl. Meranti No. 35 A Labuh Baru Timur Kota Pekanbaru Telp : 0852 7490 9403 email : qwertyarisandy@gmail.com • **Jasa yang diberikan :** Pembuatan Akta Notaris • **Periode Penugasan :** Bulan April Tahun 2025	Jl. Meranti No. 35 A Labuh Baru Timur, Pekanbaru City Tel: 0852 7490 9403 Email: qwertyarisandy@gmail.com • **Services Provided :** Issuance of Notarial Deeds • **Engagement Period :** April 2025
Notaris Justitia Ferryanto, S.H., M.H	Komplek Ruko Hup Seng Development Blok C No.8 Batam Center, Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau Telp : 0778 464 889 email : notrais_justitiaferry@yahoo.co.id • **Jasa yang diberikan :** Pembuatan Akta Notaris • **Periode Penugasan :** Bulan Oktober Tahun 2025	Komplek Ruko Hup Seng Development Blok C No.8 Batam Center, Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau Telp : 0778 464 889 email : notrais_justitiaferry@yahoo.co.id • **Services Provided :** Issuance of Notarial Deeds • **Engagement Period :** October 2025
Konsultan Penetration Test		Penetration Test Consultant
PT Veda Praxis	Sampoerna *Strategic Square South Tower* Level 30 Jl.Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 • **Jasa yang diberikan :** Jasa Audit Teknologi Informasi dan pengujian keamanan (*penetration test*) • **Periode Penugasan:** 14 Oktober 2025 s.d. 13 Desember 2025	Sampoerna Strategic Square South Tower Level 30 Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 • **Services Provided :** IT Audit Services and security testing (penetration test) • **Engagement Period :** October 14, 2025, to December 13, 2025
PT Punggawa Siber Solusi	Jl Cempaka Putih Tengah I No 5F, Jakarta • **Jasa yang diberikan:** Jasa Audit Teknologi Informasi dan pengujian keamanan (*penetration test*) • **Periode Penugasan:** 26 September 2025 s.d. 26 September 2026	Jl. Cempaka Putih Tengah I No. 5F, Jakarta • **Services Provided :** IT Audit Services and security testing (penetration test) • **Engagement Period :** September 26, 2025, to September 26, 2026

PENCAPAIAN RATING TAHUN 2025
2025 RATING ACHIEVEMENTS



Berdasarkan penilaian dari Fitch Ratings per 1 September 2025, BRK Syariah memperoleh peringkat Nasional Jangka Panjang A(idn) dengan outlook stabil serta peringkat jangka pendek F1+(idn). Peringkat tersebut mencerminkan profil kredit yang solid, didukung oleh kinerja yang stabil, peran strategis sebagai bank pembangunan daerah, serta potensi dukungan pemerintah.

Based on the assessment by Fitch Ratings as of September 1, 2025, BRK Syariah secured a National Long-Term Rating of A(idn) with a stable outlook, as well as a Short-Term Rating of F1+(idn). These ratings reflect a solid credit profile, underpinned by stable performance, its strategic role as a regional development bank, and potential government support.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

25 Februari 2025
February 25, 2025



Indonesia *Sharia and Halal Brand Awards* 2025

Predikat | Predicate

Indonesia's Best Sharia Regional Bank 2025 for Contribution to Local Economic Development through Premier Sharia Financial Solutions

Penyelenggara | Organizer

Warta Ekonomi

20 Maret 2025
March 20, 2025



Digital Brand Awards 2025

Predikat | Predicate

The 2nd Best Sharia Savings Account Banks with Sharia Conventional Banks – Assets IDR > 25 Trillion

Penyelenggara | Organizer

infobank

20 Maret 2025
March 20, 2025



Digital Brand Awards 2025

Predikat | Predicate

The 2nd Best Sharia Conventional Bank – Asset IDR > 25 Trillion

Penyelenggara | Organizer

infobank

28 April 2025
April 28, 2025



Top BUMD *Awards* 2025

Predikat | Predicate

TOP BUMD *AWARDS 2025*
BPD SYARIAH # BINTANG *5*

Penyelenggara | Organizer

TopBussiness

28 April 2025
April 28, 2025



Top BUMD *Awards* 2025

Predikat | Predicate

TOP CEO BUMD 2025

Penyelenggara | Organizer

TopBussiness

28 April 2025
April 28, 2025



Top BUMD *Awards* 2025

Predikat | Predicate

TOP PEMBINA BUMD 2025
Gubernur Provinsi Riau

Penyelenggara | Organizer

TopBussiness

28 April 2025
April 28, 2025



Top BUMD *Awards* 2025

Predikat | Predicate

TOP PEMBINA BUMD 2025
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

Penyelenggara | Organizer

TopBussiness

28 April 2025
April 28, 2025



Top BUMD *Awards* 2025

Predikat | Predicate

GOLDEN TROPHY
TOP BUMD *AWARDS 2025*

Penyelenggara | Organizer

TopBussiness

27 Mei 2025
May 27, 2025



6th Indonesia Top Bank *Awards* 2025

Predikat | Predicate

6th Indonesia
Top Bank Awards 2025 in KBMI 1 Category

Penyelenggara | Organizer

The Iconomics

28 MEI 2025
May 28, 2025



The Best Indonesia Finance Award 2025

Predikat | Predicate

***GOLD Award – III (Excellent) (4 Stars **)*
Category : The Best Indonesia Finance Award 2025

Penyelenggara | Organizer

Economic Review

20 Juli 2025
July 20, 2025



JMSI Riau *Award* 2025

Predikat | Predicate

Perusahaan Peduli CSR Terbaik

Penyelenggara | Organizer

Jaringan Media Siber Indonesia

23 Juli 2025
July 23, 2025



Sebagai Bank Penyalur Terbaik

Predikat | Predicate

Bank Penyalur Pembiayaan FLPP dengan Nilai Evaluasi Tertinggi

Penyelenggara | Organizer

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)

Sebagai Bank Penyalur Peringkat I

Predikat | Predicate

Tingkat Keterhunian Tertinggi Berdasarkan Hasil Sampling: 100% Rumah Dihuni

Penyelenggara | Organizer

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)

Sebagai Bank Penyalur Peringkat II

Predikat | Predicate

Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan FLPP Tertinggi

Penyelenggara | Organizer

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)

07 AGUSTUS 2025
August 07, 2025



Industry Marketing Champion 2025

Predikat | Predicate

Riau Industry Marketing Champion 2025 - Commercial Banking

Penyelenggara | Organizer

MarkPlus Institute / MCorp

22 AGUSTUS 2025
August 22, 2025



OJK *Financial Literacy Award*

Predikat | Predicate

Pemenang Terbaik 3 untuk kategori "Video Competition Kategori Video Jingle"

Penyelenggara | Organizer

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

27 AGUSTUS 2025
August 27, 2025



Tribun Pekanbaru *Award* 2025

Predikat | Predicate

Best Sharia Bank in innovations and services

Penyelenggara | Organizer

Tribun Network



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) memperoleh sertifikat ISO 37001 untuk ruang lingkup Proses Kerja Pada Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* sebagai Pengawas Internal Jasa Perbankan Syariah, yang dikeluarkan oleh BSC Mutu Internasional.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) obtained an ISO 37001 certificate for the scope of the Work Process in the Internal Audit & Anti-Fraud Division as Internal Supervisor of Sharia Banking Services, issued by BSC Mutu Internasional.



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) memperoleh sertifikat ISO 27001 kegiatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk Proses Integrasi Pemanfaatan Informasi Dukcapil dan Aktivitas Sistem Pembayaran BRK Syariah.

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) obtained an ISO 27001 certificate for Information Security Management System activities for the Integration Process of Utilizing Dukcapil information and BRK Syariah Payment System Activities.



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS OF COMPANY PERFORMANCE



Perekonomian Global

Perekonomian global pada tahun 2025 masih dihadapkan pada tingkat ketidakpastian yang tinggi, seiring berlanjutnya ketegangan geopolitik serta meningkatnya dinamika perdagangan internasional. Menyusul konflik Rusia–Ukraina yang belum menunjukkan tanda penyelesaian penghentian perang, ketegangan di Timur Tengah turut memengaruhi stabilitas ekonomi global. Di sisi lain, kebijakan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat pada April 2025 terhadap berbagai negara mitra dagang utama, termasuk Tiongkok, Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa, turut meningkatkan tensi perang dagang global.

Kebijakan tarif tersebut berdampak pada menurunnya volume perdagangan global serta meningkatnya fragmentasi ekonomi antarnegara. Sejumlah negara merespons kebijakan tersebut dengan penerapan tarif balasan, sementara negara lain melakukan negosiasi perdagangan guna menekan dampaknya terhadap aktivitas ekspor. Kondisi tersebut turut memengaruhi sentimen pelaku usaha dan investor global sehingga menahan ekspansi kegiatan ekonomi di berbagai kawasan.

Di tengah dinamika tersebut, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan melambat menjadi sekitar 3,3%. Pertumbuhan ekonomi negara maju cenderung moderat, seiring perlambatan aktivitas ekonomi di Amerika Serikat serta pemulihan yang berlangsung secara bertahap di kawasan Eropa. Sementara itu, kelompok negara berkembang (*emerging economies*) mencatat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi meskipun menghadapi tekanan dari melemahnya perdagangan global. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok menunjukkan kecenderungan melambat, sementara ekonomi India tetap tumbuh kuat didukung oleh konsumsi domestik dan ekspansi sektor manufaktur. Di kawasan Asia Tenggara, perekonomian negara-negara ASEAN juga menunjukkan daya tahan dengan dukungan permintaan domestik yang relatif stabil.

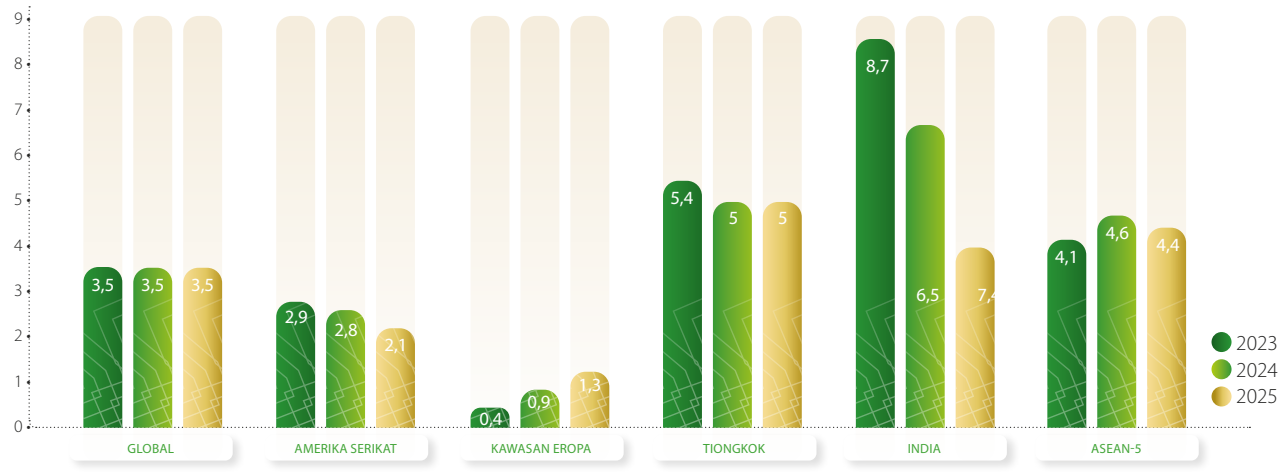
Economic Review

The global economy in 2025 remains confronted with a high degree of uncertainty, driven by persistent geopolitical tensions and the escalating dynamics of international trade. Following the Russia-Ukraine conflict, which has yet to exhibit any signs of a ceasefire resolution, escalating tensions in the Middle East further impact global economic stability. Furthermore, the import tariff policies enacted by the United States in April 2025 against several major trading partners, including China, Canada, Mexico, and the European Union, have subsequently heightened global trade war tensions.

These tariff policies have resulted in a decline in global trade volume and an increase in economic fragmentation among nations. Several countries have responded by implementing retaliatory tariffs, while others have engaged in trade negotiations to mitigate the impact on their export activities. These conditions have consequently affected global business and investor sentiment, thereby constraining economic expansion across various regions.

Amidst these dynamics, global economic growth in 2025 is projected to decelerate to approximately 3.3%. Economic growth in advanced economies tends to be moderate, reflecting a slowdown in economic activity in the United States and a gradual recovery in the European region. Meanwhile, emerging economies recorded relatively higher growth despite facing pressures from the weakening of global trade. China's economic growth indicates a decelerating trend, whereas India's economy remains robust, supported by domestic consumption and manufacturing sector expansion. In the Southeast Asian region, ASEAN economies also demonstrated resilience, bolstered by relatively stable domestic demand.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Global dan Beberapa Negara/Kawasan Tahun 2023-2025 (%)
Graph of Global and Select Countries/Regions Economic Growth 2023-2025 (%)



Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2025
Source: Bank Indonesia, Indonesian Economic Report 2025

Di sisi harga, tekanan inflasi global masih berlangsung meskipun menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Kenaikan harga sejumlah komoditas serta dinamika biaya tenaga kerja di beberapa negara menyebabkan proses penurunan inflasi berjalan lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Secara keseluruhan, inflasi global pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 3,9%, dengan inflasi negara maju sekitar 2,4% dan negara berkembang sekitar 4,8%.

Secara keseluruhan, dinamika geopolitik dan kebijakan perdagangan global pada tahun 2025 turut memengaruhi kinerja perdagangan internasional serta prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan. Kondisi tersebut juga berkontribusi terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi aktivitas ekonomi di berbagai negara.

On the price front, global inflationary pressures persist, although they are exhibiting a gradual downward trend. Price increases in several commodities and labor cost dynamics in certain countries have caused the disinflation process to proceed slower than previously anticipated. Overall, global inflation in 2025 is projected to be within the range of 3.9%, with advanced economies' inflation at approximately 2.4% and emerging economies at around 4.8%.

Overall, geopolitical dynamics and global trade policies in 2025 have influenced international trade performance and economic growth prospects across various regions. These conditions have also contributed to heightened global economic uncertainty, which affects economic activities in multiple countries.

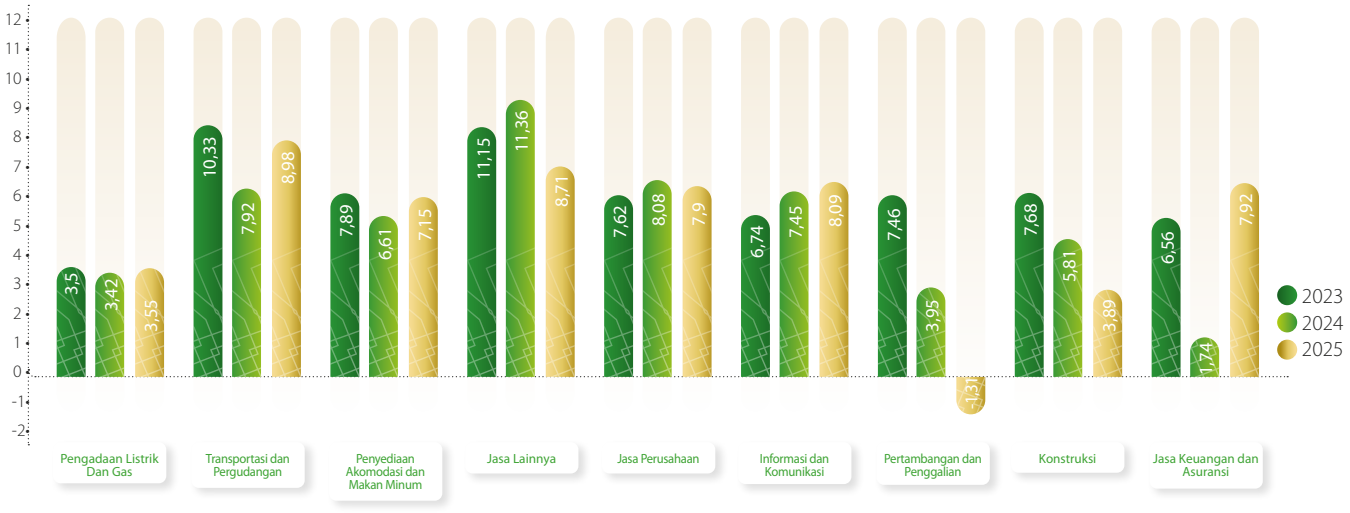
Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang tetap terjaga di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 sebesar 5,11%, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,03%. Pada triwulan IV 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,39% (yoy) yang turut menopang kinerja pertumbuhan sepanjang tahun.
Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 8,98% (yoy), diikuti oleh jasa lainnya sebesar 8,71% serta sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,09%. Sementara itu, sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh sebesar 7,92%, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,74%. Adapun sektor pertambangan dan penggalian serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 1,31% dan 0,51%.

National Economy

The Indonesian economy in 2025 demonstrated sustained growth amidst global economic dynamics and uncertainties. The Central Statistics Agency (BPS) reported that Indonesia's economic growth throughout 2025 stood at 5.11%, an increase compared to 5.03% in 2024. In the fourth quarter of 2025, the Indonesian economy grew by 5.39% (yoy), which further supported the overall annual growth performance.
From the production side, growth was observed across almost all business sectors. The transportation and warehousing sector recorded the highest growth at 8.98% (yoy), followed by other services at 8.71%, and the information and communication sector at 8.09%. Meanwhile, the financial and insurance services sector grew by 7.92%, a significant increase compared to the previous year's 1.74%. Conversely, the mining and quarrying sector, as well as the water supply, waste management, and recycling sector, contracted by 1.31% and 0.51%, respectively.

Grafik Pertumbuhan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2023-2025 (%)
Graph of GDP Growth by Business Sector 2023-2025 (%)



Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 18/02/Th. XXIX, 5 Februari 2026
Source: BPS, Official Statistics News No. 18/02/Th. XXIX, February 5, 2026

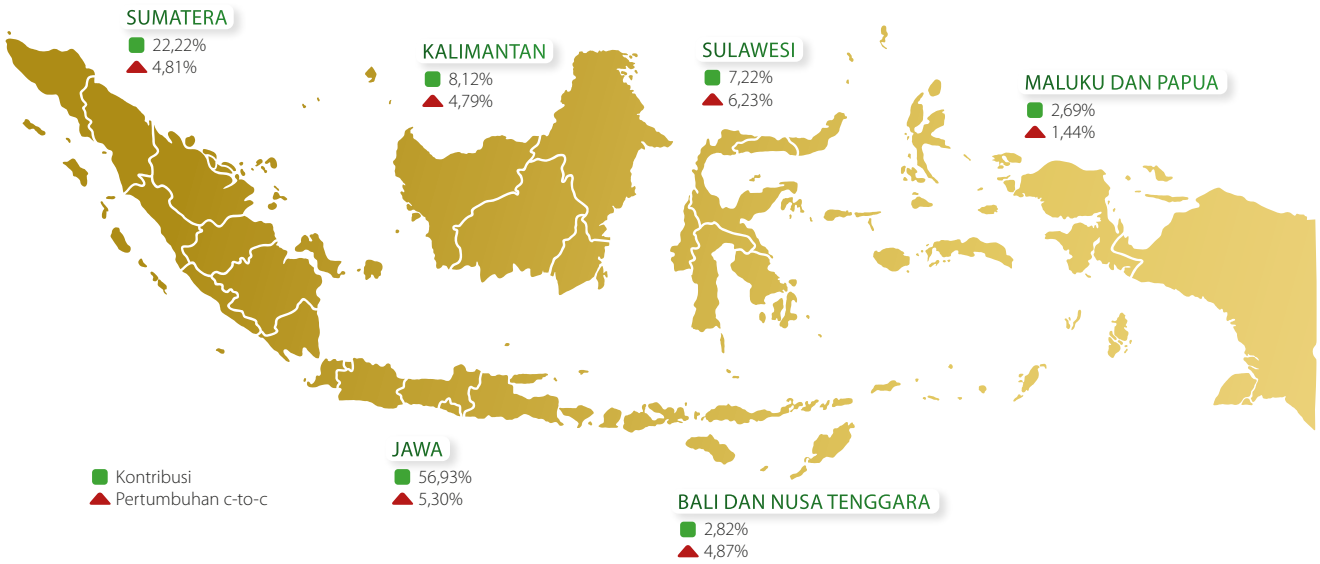
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan investasi yang tercermin pada pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,12%, diikuti oleh konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 5,90%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah masing-masing tumbuh sebesar 5,11% dan 4,55%.

Secara regional, Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 56,93% pada tahun 2025, diikuti oleh Sumatera sebesar 22,22%, Kalimantan sebesar 8,12%, Sulawesi sebesar 7,22%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,82%, serta Maluku dan Papua sebesar 2,69%.

From the expenditure side, economic growth was driven by an increase in investment, reflected in the growth of Gross Fixed Capital Formation (PMTB) by 6.12%, followed by the consumption of Non-Profit Institutions Serving Households (LNPRT) at 5.90%. Meanwhile, household consumption and government consumption grew by 5.11% and 4.55%, respectively.

Regionally, Java Island remained the largest contributor to the national economy, contributing 56.93% in 2025, followed by Sumatra at 22.22%, Kalimantan at 8.12%, Sulawesi at 7.22%, Bali and Nusa Tenggara at 2.82%, and Maluku and Papua at 2.69%.

Gambar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Spasial Tahun 2025
Figure of Indonesian Economic Growth by Spatial Region in 2025

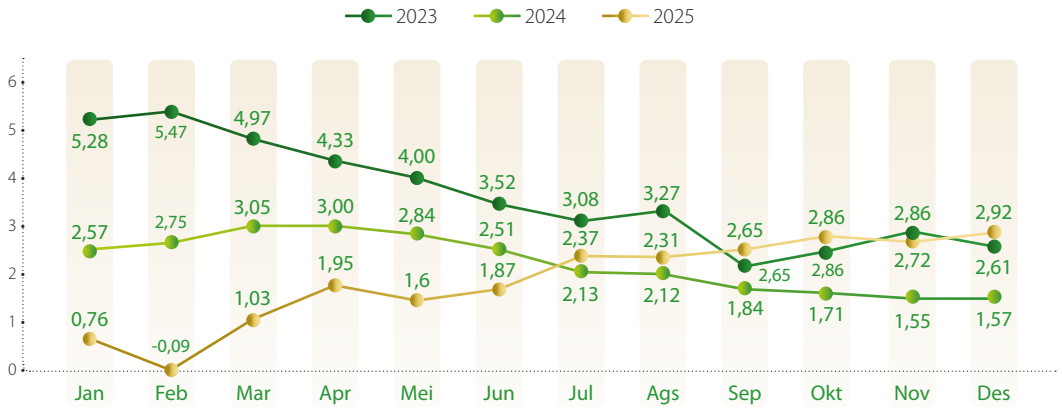


Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 18/02/Th. XXIX, 5 Februari 2026
Source: BPS, Official Statistics News No. 18/02/Th. XXIX, February 5, 2026

Stabilitas harga relatif terjaga sepanjang tahun 2025 dengan tingkat inflasi tercatat sebesar 2,92%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,57%, namun masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%. Kondisi ini didukung oleh konsistensi kebijakan moneter serta sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Inflasi inti tercatat sebesar 2,38% (yoy), sementara inflasi kelompok bahan makanan bergejolak (*volatile food*) sebesar 6,21% dan inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) sebesar 1,93%.

Price stability was relatively well-maintained throughout 2025, with the inflation rate recorded at 2.92%, higher than the 1.57% recorded in 2024, yet still within the national inflation target range of 2.5±1%. This condition was supported by the consistency of monetary policy and the synergy in inflation control between Bank Indonesia and the Government through the Central and Regional Inflation Control Teams (TPIP and TPID). Core inflation was recorded at 2.38% (yoy), while volatile food inflation stood at 6.21%, and administered prices inflation was at 1.93%.

Grafik Inflasi Tahun 2023-2025 (%)
Graph of Inflation 2023-2025 (%)

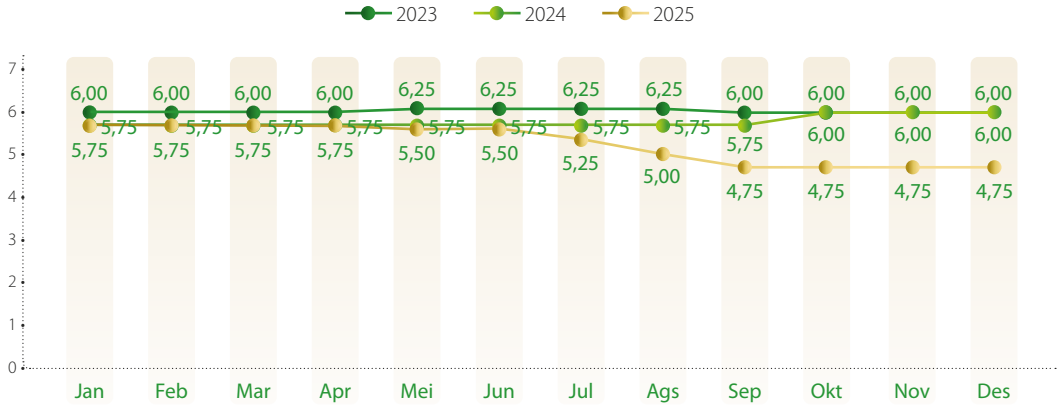


Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 01/01/Th. XXIX, 5 Januari 2026
Source: BPS, Official Statistics News No. 01/01/Th. XXIX, January 5, 2026

Dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebanyak lima kali sepanjang tahun 2025 dengan total penurunan sebesar 125 basis poin menjadi 4,75% pada Desember 2025. Kebijakan ini ditempuh untuk mendorong penurunan suku bunga di sektor perbankan serta menjaga likuiditas di sistem keuangan.

In order to maintain macroeconomic stability and support the momentum of economic growth, Bank Indonesia lowered the benchmark interest rate (BI-Rate) five times throughout 2025, with a total reduction of 125 basis points to 4.75% in December 2025. This policy was implemented to encourage the reduction of interest rates in the banking sector and maintain liquidity within the financial system.

Grafik Perkembangan BI Rate Tahun 2023-2025 (%)
Graph of BI Rate Developments 2023-2025 (%)



Sumber: www.bi.go.id
Source: www.bi.go.id

Di sisi lain, nilai tukar Rupiah bergerak fluktuatif sepanjang tahun 2025 seiring dinamika ekonomi global dan domestik. Rupiah sempat menguat hingga sekitar Rp16.300 per USD pada Agustus 2025, sebelum kembali melemah seiring meningkatnya ketidakpastian eksternal, termasuk arah kebijakan suku bunga *Federal Reserve*. Pada akhir Desember 2025, Rupiah tercatat sebesar Rp16.675 per USD atau melemah 3,48% dibandingkan posisi akhir tahun 2024, dengan rata-rata Rp16.466 sepanjang tahun 2025.

On the other hand, the Rupiah exchange rate fluctuated throughout 2025, corresponding with global and domestic economic dynamics. The Rupiah briefly appreciated to around Rp16,300 per USD in August 2025, before depreciating again due to heightened external uncertainties, including the direction of the Federal Reserve's interest rate policy. At the end of December 2025, the Rupiah was recorded at Rp16,675 per USD, depreciating by 3.48% compared to its position at the end of 2024, averaging Rp16,466 throughout 2025.

Perekonomian Riau dan Kepulauan Riau

Pulau Sumatera masih menjadi kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian nasional setelah Pulau Jawa. Pada tahun 2025, kontribusi perekonomian Pulau Sumatera terhadap perekonomian Indonesia tercatat sebesar 22,22%, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 22,12%.

Economy of Riau and Kepulauan Riau

Sumatra Island remains the second-largest contributor to the national economy after Java Island. In 2025, the economic contribution of Sumatra Island to the Indonesian economy was recorded at 22.22%, a slight increase compared to 22.12% in 2024.

Gambar Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera
Figure of Sumatra Island Economic Growth



Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No.10/02/14/Th. XXVII, 5 Februari 2026
Source: BPS, Official Statistics News No.10/02/14/Th. XXVII, February 5, 2026

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Provinsi Riau mencatatkan pertumbuhan kumulatif sebesar 4,79% pada tahun 2025, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,52%. Dengan capaian tersebut, Provinsi Riau memberikan kontribusi sebesar 22,88% terhadap PDRB Pulau Sumatera dan menjadi kontributor terbesar kedua setelah Provinsi Sumatera Utara. Pada triwulan IV tahun 2025, perekonomian Riau tumbuh sebesar 4,94% (yoy). Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha, dengan kinerja tertinggi pada sektor jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh sebesar 17,49%, diikuti sektor jasa lainnya sebesar 13,79%, sementara sektor pertambangan dan penggalian mengalami koreksi sebesar 0,15%.

From an economic growth perspective, Riau Province recorded a cumulative growth of 4.79% in 2025, an increase from 3.52% in the previous year. With this achievement, Riau Province contributed 22.88% to the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Sumatra Island, positioning it as the second-largest contributor after North Sumatra Province. In the fourth quarter of 2025, Riau's economy grew by 4.94% (yoy). Growth occurred in the majority of business sectors, with the highest performance in the financial and insurance services sector, which grew by 17.49%, followed by other services at 13.79%, while the mining and quarrying sector underwent a correction of 0.15%.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Riau terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,59%, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,25% serta ekspor luar negeri sebesar 2,74%. Sementara itu, konsumsi pemerintah dan impor luar negeri masing-masing mengalami kontraksi sebesar 0,41% dan 8,72%.

From the expenditure side, Riau's economic growth was primarily driven by household consumption, which grew by 4.59%, followed by Gross Fixed Capital Formation (PMTB) at 3.25% and foreign exports at 2.74%. Conversely, government consumption and foreign imports contracted by 0.41% and 8.72%, respectively.

Sementara itu, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera. Secara kumulatif pada tahun 2025, perekonomian Kepulauan Riau tumbuh sebesar 6,94%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,02%, sekaligus menjadi pertumbuhan tertinggi di Pulau Sumatera. Kontribusi perekonomian Kepulauan Riau terhadap PDRB Pulau Sumatera tercatat sebesar 7,27%, menempatkannya sebagai kontributor terbesar kelima di wilayah tersebut.

Meanwhile, the economy of the Kepulauan Riau Province exhibited higher growth performance compared to the majority of provinces on Sumatra Island. Cumulatively in 2025, the economy of the Kepulauan Riau grew by 6.94%, an increase from 5.02% in 2024, concurrently marking the highest growth on Sumatra Island. The economic contribution of the Kepulauan Riau to the GRDP of Sumatra Island was recorded at 7.27%, positioning it as the fifth-largest contributor in the region.

Pada triwulan IV tahun 2025, perekonomian Kepulauan Riau tumbuh sebesar 7,89% (yoy). Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 18,67%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,16%, sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial masing-masing mengalami koreksi sebesar 13,42% dan 2,12%.

In the fourth quarter of 2025, the economy of the Kepulauan Riau grew by 7.89% (yoy). Growth occurred in most business sectors, with the highest growth in the mining and quarrying sector at 18.67%, and the financial and insurance services sector at 12.16%, whereas the agriculture, forestry, and fisheries sector, as well as the health services and social activities sector, corrected by 13.42% and 2.12%, respectively.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau terutama didorong oleh komponen net ekspor yang meningkat sebesar 27,02%, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,46% serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,24%. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,17%, sementara konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 3,72%.

From the expenditure side, the economic growth of the Kepulauan Riau was predominantly driven by the net export component, which increased by 27.02%, followed by the Consumption Expenditure of Non-Profit Institutions Serving Households (LNPRT) at 9.46% and Gross Fixed Capital Formation (PMTB) at 6.24%. Household consumption grew by 4.17%, while government consumption contracted by 3.72%.

Dari sisi inflasi, Provinsi Riau mencatat inflasi sebesar 4,88% (yoy) pada tahun 2025, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,27% (yoy). Hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi, kecuali kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga, rekreasi, olahraga dan budaya, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang masing-masing mengalami deflasi sebesar 0,96%, 0,51%, dan 0,01%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,51%, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,88%.

In terms of inflation, Riau Province recorded an inflation rate of 4.88% (yoy) in 2025, higher than the 4.27% (yoy) recorded in 2024. Nearly all expenditure groups experienced inflation, with the exception of the household equipment, tools, and routine maintenance group; the recreation, sports, and culture group; and the information, communication, and financial services group, which experienced deflation of 0.96%, 0.51%, and 0.01%, respectively. The highest inflation occurred in the personal care and other services group at 15.51%, followed by the food, beverages, and tobacco group at 4.88%.

Sementara itu, tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,47% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 2,09% (yoy). Hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi, kecuali kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,01%. Inflasi tertinggi tercatat pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 16,68%, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,07%.

Secara keseluruhan, perkembangan perekonomian di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2025 menunjukkan ketahanan yang cukup baik, didukung oleh aktivitas konsumsi masyarakat, investasi, serta kinerja sektor jasa dan perdagangan yang tetap tumbuh positif di kedua wilayah.

Meanwhile, the inflation rate in the Kepulauan Riau Province in 2025 was recorded at 3.47% (yoy), an increase from 2.09% (yoy) in 2024. Almost all expenditure groups experienced inflation, except for the information, communication, and financial services group, which experienced a deflation of 0.01%. The highest inflation was recorded in the personal care and other services group at 16.68%, followed by the food, beverages, and tobacco group at 5.07%.

Overall, economic developments in Riau Province and Kepulauan Riau Province throughout 2025 demonstrated substantial resilience, supported by public consumption activities, investments, as well as the performance of the services and trade sectors, which continued to register positive growth in both regions.

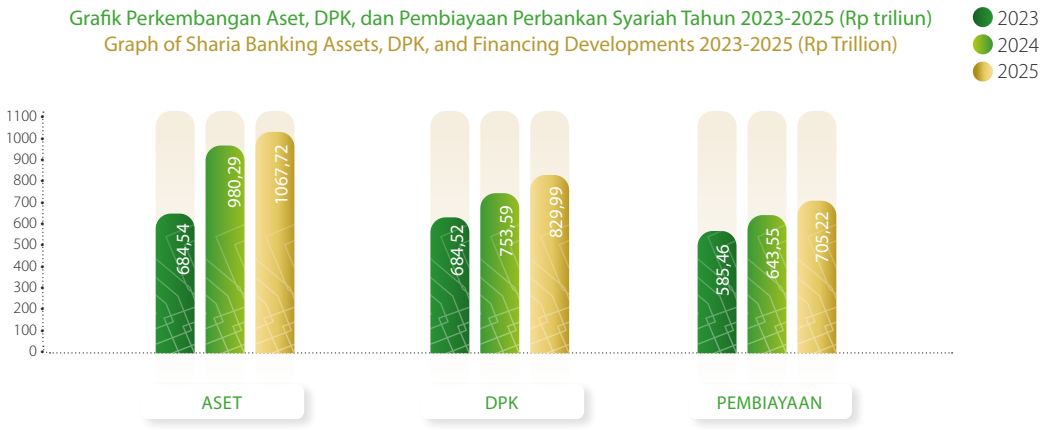
Industri Perbankan Syariah

Industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta penyaluran pembiayaan yang meningkat secara berkelanjutan seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah.

Sharia Banking Industry

The Sharia banking industry in Indonesia continues to demonstrate positive development. This is reflected in the sustained growth of assets, Third-Party Funds (DPK) accumulation, and financing disbursement, aligning with the increasing public trust in financial services based on Sharia principles.

Grafik Perkembangan Aset, DPK, dan Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2023-2025 (Rp triliun)
Graph of Sharia Banking Assets, DPK, and Financing Developments 2023-2025 (Rp Trillion)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Portal Data Sektor Jasa Keuangan Teritegrasi
Source: Financial Services Authority (OJK), Integrated Financial Services Sector Data Portal

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, total aset perbankan syariah pada tahun 2025 mencapai Rp1.067,73 triliun, meningkat 8,92% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp980,29 triliun, sekaligus menjadi level tertinggi sepanjang perkembangan industri. Pertumbuhan aset tersebut masih didominasi oleh Bank Umum Syariah yang mencatat total aset sebesar Rp797,23 triliun, diikuti oleh Unit Usaha Syariah sebesar Rp244 triliun dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebesar Rp26,51 triliun.

Based on data from the Financial Services Authority (OJK), total Sharia banking assets in 2025 reached Rp1,067.73 trillion, an 8.92% increase compared to Rp980.29 trillion in 2024, concurrently marking the highest level in the industry's development history. This asset growth remained dominated by Sharia Commercial Banks (BUS), which recorded total assets of Rp797.23 trillion, followed by Sharia Business Units (UUS) at Rp244 trillion and Sharia Rural Banks (BPRS) at Rp26.51 trillion.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan pertumbuhan yang solid. Pada tahun 2025, total DPK perbankan syariah mencapai Rp829,99 triliun, meningkat 10,14% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp753,59 triliun. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan DPK pada Bank Umum Syariah yang mencapai Rp639,24 triliun, atau meningkat 25,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, DPK Unit Usaha Syariah tercatat sebesar Rp172,58 triliun, sedangkan DPK Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meningkat menjadi Rp18,17 triliun.

The accumulation of Third-Party Funds (DPK) also exhibited solid growth. In 2025, total Sharia banking DPK reached Rp829.99 trillion, a 10.14% increase compared to Rp753.59 trillion in 2024. This growth was primarily sustained by an increase in DPK at Sharia Commercial Banks, which reached Rp639.24 trillion, or a 25.01% increase compared to the previous year. Meanwhile, DPK of Sharia Business Units was recorded at Rp172.58 trillion, whereas DPK of Sharia Rural Banks increased to Rp18.17 trillion.

Sejalan dengan pertumbuhan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp705,22 triliun, meningkat 9,58% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp643,55 triliun. Penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah tercatat sebesar Rp517,72 triliun, meningkat 25,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pembiayaan yang disalurkan oleh Unit Usaha Syariah mencapai Rp167,20 triliun, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp20,30 triliun, meningkat 6,90% dibandingkan tahun 2024.

In line with the growth in fund accumulation, the disbursement of Sharia banking financing also experienced an increase. In 2025, total financing disbursed reached Rp705.22 trillion, an increase of 9.58% compared to Rp643.55 trillion in 2024. Financing disbursement by Sharia Commercial Banks was recorded at Rp517.72 trillion, an increase of 25.28% compared to the prior year. Meanwhile, financing disbursed by Sharia Business Units reached Rp167.20 trillion, while Sharia Rural Banks disbursed financing amounting to Rp20.30 trillion, a 6.90% increase compared to 2024.

Peningkatan penyaluran pembiayaan tersebut diikuti oleh kualitas pembiayaan yang tetap terjaga. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tercatat sebesar 2,16% dengan NPF net sebesar 0,83%, yang menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah masih berada pada level yang terkendali. Sementara itu, rasio NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berada pada level 10,23%, mencerminkan tantangan pengelolaan kualitas pembiayaan pada segmen mikro dan usaha kecil yang menjadi fokus pembiayaannya.

The increase in financing disbursement was accompanied by well-maintained financing quality. The Non-Performing Financing (NPF) ratio for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units was recorded at 2.16%, with a net NPF of 0.83%, indicating that the level of non-performing financing remains at a manageable level. Concurrently, the NPF ratio for Sharia Rural Banks stood at 10.23%, reflecting the challenges in managing financing quality within the micro and small enterprise segments, which constitute their primary financing focus.

Dari sisi fungsi intermediasi, rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2025 tercatat sebesar 84,37%, yang menunjukkan penyaluran pembiayaan yang cukup optimal terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun. Adapun pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, rasio FDR tercatat sebesar 111,74%, mencerminkan tingkat penyaluran pembiayaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan dana yang dihimpun.

From an intermediation function perspective, the Financing to Deposit Ratio (FDR) of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units in 2025 was recorded at 84.37%, indicating an optimal disbursement of financing relative to the accumulated third-party funds. As for Sharia Rural Banks, the FDR ratio was recorded at 111.74%, reflecting a relatively higher rate of financing disbursement compared to the funds accumulated.

Kinerja profitabilitas perbankan syariah juga menunjukkan capaian yang positif. Rasio *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tercatat sebesar 1,98% pada tahun 2025, sementara ROA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berada pada level 0,25%. Capaian ini mencerminkan kemampuan industri dalam mengelola aset secara produktif untuk menghasilkan laba, meskipun tetap menghadapi tantangan pada segmen pembiayaan tertentu.

The profitability performance of Sharia banking also demonstrated positive achievements. The Return on Assets (ROA) ratio for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units was recorded at 1.98% in 2025, while the ROA for Sharia Rural Banks stood at 0.25%. These achievements reflect the industry's capacity to manage assets productively to generate profit, despite continuing to face challenges in certain financing segments.

Posisi BRK Syariah di Industri Perbankan

Di tengah pertumbuhan industri perbankan syariah nasional, BRK Syariah turut berperan dalam memperkuat pengembangan layanan keuangan berbasis prinsip syariah, khususnya di wilayah operasional Bank yang mencakup Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai Bank Pembangunan Daerah, BRK Syariah juga berkomitmen mendukung pembangunan ekonomi regional melalui penyediaan layanan perbankan syariah yang inklusif serta penyaluran pembiayaan kepada berbagai sektor ekonomi masyarakat.

Hingga akhir tahun 2025, BRK Syariah mencatat total aset sebesar Rp31,10 triliun, dengan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp25,75 triliun serta penyaluran pembiayaan sebesar Rp21,79 triliun. Capaian tersebut mencerminkan kontribusi Bank dalam mendukung perkembangan industri perbankan syariah yang terus menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Dari sisi penyaluran pembiayaan, BRK Syariah secara konsisten fokus pada sektor konsumer dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan pada kedua segmen tersebut menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan kinerja Bank, sekaligus bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan sektor ekonomi produktif di daerah. Fokus tersebut juga sejalan dengan karakteristik perekonomian di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang didukung oleh aktivitas perdagangan, jasa, serta kegiatan usaha masyarakat yang berkembang di berbagai sektor ekonomi lokal.

Ke depan, BRK Syariah akan terus memperkuat posisinya dalam industri perbankan syariah melalui pengembangan produk dan layanan yang inovatif, peningkatan kualitas layanan kepada nasabah, serta optimalisasi pembiayaan pada sektor-sektor strategis yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah.

BRK Syariah's Position in the Banking Industry

Amidst the growth of the national Sharia banking industry, BRK Syariah plays an active role in strengthening the development of financial services based on Sharia principles, particularly within the Bank's operational areas encompassing Riau Province and Kepulauan Riau Province. As a Regional Development Bank, BRK Syariah is also committed to supporting regional economic development through the provision of inclusive Sharia banking services and the disbursement of financing to various community economic sectors.

By the end of 2025, BRK Syariah recorded total assets of Rp31,10 trillion, with Third-Party Funds (DPK) accumulation amounting to Rp25,75 trillion and financing disbursement of Rp21,79 trillion. These achievements reflect the Bank's contribution to supporting the development of the Sharia banking industry, which continues to exhibit a positive growth trend.

In terms of financing disbursement, BRK Syariah consistently focuses on the consumer sector and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Financing in both of these segments acts as a primary catalyst for the Bank's performance growth, as well as a manifestation of support for the enhancement of community welfare and the strengthening of productive economic sectors in the region. This focus is also aligned with the economic characteristics of Riau Province and Kepulauan Riau Province, which are supported by trade activities, services, and community business ventures developing across various local economic sectors.

Going forward, BRK Syariah will continue to strengthen its position within the Sharia banking industry through the development of innovative products and services, the enhancement of service quality for customers, and the optimization of financing in strategic sectors that align with community needs and regional economic development.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS
BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY

BRK Syariah menyusun strategi pengembangan bisnis yang senantiasa diselaraskan dengan arah dan kebijakan yang diterbitkan oleh regulator terutama yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas, kapabilitas ketahanan dan daya saing Bank Pembangunan Daerah. Pada tahun 2024 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan *Roadmap* Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027 sebagai arah pengembangan BPD selama empat tahun ke depan dalam rangka meningkatkan resiliensi BPD terhadap dinamika bisnis dan perekonomian di daerah, mendorong kontribusi BPD terhadap pembangunan wilayah serta menciptakan keunggulan kompetitif bagi BPD sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. *Roadmap* ini merupakan pengkinian dan penyelarasan terhadap program-program penguatan BPD sebelumnya, dengan memperhatikan evaluasi terhadap BPD serta berbagai tantangan dan peluang. *Roadmap* Penguatan BPD juga memperhatikan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2020-2025, *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025, dan *Destination Statement* OJK 2022-2027.

Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 fokus pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD. Keempat pilar utama pengembangan BPD ke depan meliputi:

1. Penguatan Struktur dan Keunggulan BPD
   Tata Kelola, manajemen risiko, dan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus prioritas dalam penguatan struktur BPD. Selain itu, BPD diharapkan berupaya untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum agar memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing yang lebih baik sehingga mendukung pelaksanaan peran BPD secara optimal melalui peningkatan kapabilitas dan pengembangan strategi bisnis.
2. Akselerasi Transformasi Digital BPD
   BPD perlu beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat melalui inovasi berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi nasabah dalam ekosistem digital yang terus berkembang.
3. Penguatan Peran BPD dalam Ekonomi Daerah dan Nasional
   Pengembangan BPD harus selaras dengan program-program pemerintah daerah sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. BPD juga diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah, menciptakan wilayah yang kuat dan bersaing.
4. Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan BPD
   OJK memberikan dukungan bagi pengembangan BPD termasuk mendorong harmonisasi kebijakan antara OJK dan pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan BPD. Selain itu, penguatan pengawasan dilakukan agar isu dan tantangan yang dihadapi BPD dapat diatasi dengan baik melalui komunikasi yang efektif dengan seluruh satuan kerja di OJK.

BRK Syariah formulates its business development strategy consistently in alignment with the directives and policies issued by regulators, particularly those pertaining to enhancing the capacity, resilience, and competitiveness of Regional Development Banks (BPD). In 2024, the Financial Services Authority (OJK) issued the 2024-2027 Regional Development Bank Strengthening Roadmap as the strategic trajectory for BPD development over the ensuing four years. This initiative aims to increase BPD resilience against business and regional economic dynamics, foster BPD contributions to regional development, and cultivate competitive advantages, enabling BPDs to compete at the national level. This Roadmap constitutes an update and harmonization of previous BPD strengthening programs, taking into account BPD evaluations as well as various emerging challenges and opportunities. The BPD Strengthening Roadmap also incorporates the 2020-2025 Indonesian Financial Services Sector Master Plan, the 2020-2025 Indonesian Banking Development Roadmap, and the OJK 2022-2027 Destination Statement.

The 2024-2027 BPD Strengthening Roadmap focuses on four primary pillars designed to optimize the role of BPDs. These four core pillars for future BPD development encompass:

1. Strengthening BPD Structure and Competitive Advantage
   Corporate governance, risk management, and human resource capacity are the focal priorities in strengthening the BPD structure. Furthermore, BPDs are expected to strive for compliance with minimum core capital requirements to possess superior competitive advantages and market competitiveness. This supports the optimal execution of the BPD's role through enhanced capabilities and business strategy development.
2. Accelerating BPD Digital Transformation
   BPDs must adapt to shifts in consumer behavior through continuous innovation to meet customer expectations within an ever-evolving digital ecosystem.
3. Strengthening the Role of BPDs in the Regional and National Economy
   BPD development must align with regional government programs, thereby supporting the achievement of national development objectives. BPDs are also expected to contribute positively to regional development, creating robust and competitive regions.
4. Strengthening BPD Licensing, Regulation, and Supervision
   The OJK provides support for BPD development, including encouraging policy harmonization between the OJK and regional governments to foster a conducive environment for BPD advancement. Additionally, supervisory strengthening is implemented to ensure that issues and challenges faced by BPDs are effectively addressed through efficient communication with all operational units within the OJK.



BRK Syariah sebagai salah satu BPD berkomitmen melaksanakan inisiatif-inisiatif yang dimuat dalam *Roadmap* Penguatan BPD melalui penerapan *action plan* dan program kerja yang telah disusun untuk setiap inisiatif tersebut. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat fundamental dan daya saing BRK Syariah, sehingga mampu tumbuh secara berkelanjutan dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung perekonomian daerah.

BRK Syariah, as a BPD, is committed to executing the initiatives outlined in the BPD Strengthening Roadmap through the implementation of established action plans and work programs for each respective initiative. These efforts are anticipated to fortify the fundamentals and competitiveness of BRK Syariah, enabling sustainable growth and optimizing its role in supporting the regional economy.

Fokus Pengembangan Bisnis Tahun 2025

Strategi pengembangan bisnis BRK Syariah pada tahun 2025 difokuskan pada penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga serta layanan kepada nasabah. Berikut strategi yang dilakukan untuk masing-masing bidang:

1. Penyaluran Pembiayaan
   Strategi dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan diantaranya:
   a. Bank akan berupaya membangun ekosistem syariah di Provinsi Riau dan Provinsi Kepri melalui sinergi dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan islam, industri halal (sektor riil terutama berbasis komoditi lokal, farmasi dan kosmetik, halal *food, moslem fashion*), pelaku usaha syariah (rumah sakit, travel haji-umroh, wisata halal/ ramah muslim), Kementerian dan Lembaga Pemerintah, serta kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Business Development Focus 2025

BRK Syariah's business development strategy in 2025 focuses on financing disbursement, the accumulation of third-party funds, and customer service excellence. The strategies implemented for each respective area are as follows:

1. Financing Disbursement
   Strategies to increase financing disbursement include:
   a. The Bank will endeavor to build an Islamic ecosystem in Riau Province and Kepulauan Riau Province through synergy and collaboration with Islamic financial institutions, Islamic educational institutions, the halal industry (the real sector, particularly those based on local commodities, pharmaceuticals and cosmetics, halal food, moslem fashion), Islamic business actors (hospitals, Hajj and Umrah travel agencies, halal/Muslim-friendly tourism), Ministries and Government Agencies, as well as cooperation with Regional Governments.

b. Peningkatan layanan penyaluran dan penggunaan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS)
c. Optimalisasi fungsi *Account Officer* dalam rangka pemasaran produk-produk pembiayaan dengan menggunakan metode *pipeline*
d. Mengkaji kebijakan pembiayaan terkait *margin* dan lain-lain dalam rangka antisipasi persaingan.
e. Melaksanakan program kerja lainnya terkait pembiayaan seperti *workshop* nasabah binaan UMKM, program promosi pembiayaan konsumer, dan-lain-lain.

2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan *Fee Based Income*
Strategi dalam mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga dan *fee based income* adalah:
a. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, baik secara mandiri maupun melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Inisiatif ini diarahkan untuk memperluas pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan DPK.
b. Penguatan ekosistem syariah di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, melalui sinergi dengan lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan sosial Islam, lembaga pendidikan Islam, masjid dan musala, serta pelaku industri halal. Kolaborasi turut diperluas kepada sektor riil berbasis komoditas lokal, farmasi dan kosmetik, *halal food*, *moslem fashion*, pelaku usaha syariah (rumah sakit, biro perjalanan haji–umrah, wisata halal), serta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Langkah ini bertujuan meningkatkan aliran dana, aktivitas transaksi, serta penetrasi layanan Bank dalam ekosistem syariah daerah.
c. Akselerasi digitalisasi produk dan layanan syariah, termasuk implementasi berbagai *digital solutions* bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Program yang dijalankan meliputi perluasan akuisisi *merchant* QRIS, peningkatan transaksi pada *merchant* QRIS BRK Syariah, integrasi dengan sistem digital penerimaan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pemanfaatan CMS, serta peningkatan penggunaan *mobile banking* dan Kartu ATM/Debit oleh nasabah.
d. Optimalisasi strategi pemasaran dan penjualan, khususnya melalui peningkatan kerja sama dengan pelaku usaha dan perusahaan swasta/pihak ketiga. Bank memanfaatkan strategi *digital marketing* serta pendekatan pemasaran konvensional untuk memperluas jangkauan akuisisi dan memperkuat posisi kompetitif dalam penghimpunan dana.
e. Peningkatan *engagement* dan loyalitas nasabah melalui penguatan layanan *priority banking* dan pengembangan layanan bernilai tambah yang memberikan pengalaman perbankan lebih personal. Inisiatif ini berkontribusi pada stabilitas dana dan pertumbuhan nasabah berkualitas.

b. Enhancing services for the disbursement and utilization of Palm Oil Replanting (PPKS) funds.
c. Optimizing the function of Account Officers in marketing financing products utilizing the pipeline method.
d. Reviewing financing policies related to margins and other relevant factors to anticipate market competition.
e. Executing other financing-related work programs, such as workshops for MSME fostered clients, consumer financing promotional programs, and others.

2. Third-Party Funds Accumulation and Fee-Based Income Strategies to drive the growth of third-party funds and fee-based income encompass:
a. Enhancement of Islamic financial literacy and inclusion, both independently and through collaboration with stakeholders within the Islamic economic and financial ecosystem. This initiative is directed at expanding public understanding and access to Islamic banking products and services, which ultimately drives the growth of Third-Party Funds (TPF).
b. Strengthening of the Islamic ecosystem in Provinsi Riau and Provinsi Kepulauan Riau, through synergy with Islamic financial institutions, Islamic social finance institutions, Islamic educational institutions, mosques and musalas, as well as halal industry players. The collaboration is also expanded to the real sector based on local commodities, pharmaceuticals and cosmetics, halal food, moslem fashion, Islamic business players (hospitals, Hajj and Umrah travel agencies, halal tourism), as well as Ministries/Agencies and Regional Governments. This step aims to increase fund flows, transaction activities, and the penetration of Bank services within the regional Islamic ecosystem.
c. Acceleration of the digitalization of Islamic products and services, including the implementation of various digital solutions for Regional Governments and the public. The executed programs include the expansion of QRIS merchant acquisition, the increase of transactions at BRK Syariah QRIS merchants, integration with the digital systems for the receipt of regional taxes and levies, optimization of Cash Management System (CMS) utilization, as well as the enhancement of mobile banking and ATM/Debit Card usage by Customers.
d. Optimization of marketing and sales strategies, specifically through the enhancement of partnerships with business players and private companies/third parties. The Bank utilizes digital marketing strategies as well as conventional marketing approaches to expand the acquisition reach and strengthen its competitive position in fund mobilization.
e. Enhancement of Customer engagement and loyalty through the strengthening of priority banking services and the development of value-added services that provide a more personalized banking experience. This initiative contributes to fund stability and the growth of high-quality Customers.

f. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan, antara lain melalui pemanfaatan Tabungan SIMPEL, *Otobanking*, serta perluasan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dan Tabungan SINAR LAKU yang ditujukan untuk mendorong inklusi keuangan di wilayah operasional.
g. Penguatan efektivitas program promosi melalui penyelenggaraan program hadiah dan undian, *merchant discount*, berbagai kegiatan *event*, *customer gathering*, serta expo. Kegiatan ini menjadi sarana peningkatan *awareness*, akuisisi, dan aktivitas transaksi nasabah.
h. Optimalisasi pengelolaan dana pemerintah daerah, BUMN, dan swasta nasional sebagai salah satu sumber pendanaan stabil yang mendukung pertumbuhan DPK dan likuiditas Bank.

3. *Treasury*
Strategi dalam bidang *treasury* yang memiliki peran dalam pengelolaan likuiditas dan peningkatan pendapatan Bank melalui instrumen-instrumen pasar uang syariah dan pasar modal syariah adalah:
1. Transaksi SIPA (Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank)
2. Transaksi SIMA (Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank) *Committed* dan *Uncommitted*
3. Pengelolaan Sukuk Negara dan Korporasi pada Portofolio AFS dan HTM
4. Optimalisasi pada TD Valas, Sukuk Valas Bank Indonesia (SuvBI) serta Sukuk Bank Indonesia
5. Penempatan pada Reksadana Syariah
6. Promosi pemasaran Produk DPK Valas yang diperuntukkan untuk Haji plus dan umrah
7. Implementasi *Treasury System* Syariah
8. Pengembangan ISO 20022: Transformasi dari Format Pesan SWIFT MT ke MX

Pengembangan Bisnis *Treasury* dan International Banking pada tahun 2025 melalui penyempurnaan infrastruktur pendukung transaksi. Salah satunya adalah penyempurnaan dalam infrastruktur pencatatan di *Core Banking System* (CBS) terkait dengan transaksi valas berupa penyempurnaan pencatatan Rekening Perantara Valas (RPV) dan penyempurnaan infrastruktur pengiriman uang (*remittance*) valuta asing melalui SWIFT. Perubahan format *message* SWIFT yang awalnya dalam bentuk *Message Type* (MT) berubah ke format baru yang disebut format MX sesuai dengan ISO 20022. Perbankan international khususnya Bank Riau Kepri Syariah mempersiapkan perubahan transisi SWIFT ini ke ISO 20022 yang akan harus dimulai ditahun 2025. Transisi ini merupakan langkah signifikan menuju standarisasi pesan keuangan dan meningkatkan akurasi, kecepatan, dan kejelasan pertukaran informasi.

f. Enhancement of financial literacy and inclution, among others, through the utilization of Tabungan SIMPEL, Otobanking, as well as the expansion of Branchless Financial Services (Layanan Keuangan Tanpa Kantor) and Tabungan SINAR LAKU, which are aimed at driving financial inclusion within the operational areas.
g. Strengthening the effectiveness of promotional programs through the organization of reward and sweepstake programs, merchant discounts, various events, customer gatherings, and expos. These activities serve as a means to increase awareness, acquisition, and Customer transaction activities.
h. Optimization of the management of funds from regional governments, State-Owned Enterprises (BUMN), and national private entities as a source of stable funding that supports the growth of TPF and Bank liquidity.

3. Treasury
Strategies within the treasury division, which plays a pivotal role in liquidity management and augmenting the Bank's revenue through Sharia money market and Sharia capital market instruments, include:
1. SIPA (Interbank Sharia-based Fund Management Certificate) Transactions
2. SIMA (Interbank Mudharabah Investment Certificate) Transactions, Committed and Uncommitted
3. Management of Sovereign and Corporate Sukuk in AFS (Available for Sale) and HTM (Held to Maturity) Portfolios
4. Optimization of FX Time Deposits, Bank Indonesia Foreign Currency Sukuk (SuvBI), and Bank Indonesia Sukuk
5. Placement in Sharia Mutual Funds
6. Marketing promotion of FX Third-Party Fund (DPK) products designated for Haji Plus and Umrah
7. Implementation of Sharia Treasury System
8. ISO 20022 Development: Transformation from SWIFT MT to MX Message Formats

The development of the Treasury and International Banking business in 2025 is driven by the enhancement of transaction support infrastructure. One such initiative is the refinement of the recording infrastructure within the Core Banking System (CBS) for FX transactions, specifically the improvement of Foreign Currency Intermediary Account (RPV) recording and the enhancement of foreign currency remittance infrastructure via SWIFT. The SWIFT message format, which was originally in the form of Message Type (MT), is transitioning to a new format known as MX in accordance with ISO 20022. International banking institutions, specifically Bank Riau Kepri Syariah, are preparing for this SWIFT transition to ISO 20022, which is set to commence in 2025. This transition represents a significant step toward financial messaging standardization and enhances the accuracy, speed, and clarity of information exchange.

Dengan peralihan tersebut, akan berdampak bagi bank dan bisnisnya sebagai berikut:
- Berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur teknologi agar kompatibel dengan format MX yang melibatkan perangkat lunak, perangkat keras atau *integrase system* baru
- Alur kerja yang ada terkait dengan proses pembayaran perlu disesuaikan untuk mengakomodasi struktur data dan fungsi baru pesan MX
- Pengawal yang terlibat dalam proses pembayaran memerlukan pelatihan/training tentang format baru dan perubahan prosedur terkait SWIFT ISO 20022.

Pengembangan dan peningkatan portofolio DPK Valas melalui promosi pemberian *Ju'ul* dalam Pemasaran Haji Khusus.

Dalam rangka meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) khususnya dari produk Giro nasabah yang diberikan kepada nasabah yang berhasil merekomendasikan dan mendampingi pendaftaran porsi haji khusus melalui Bank BRK Syariah dan melakukan setoran haji khusus melalui rekening Giro Valas khususnya dalam mata uang USD.

Untuk memaksimalkan proses transaksi *treasury*, meminimalisir kesalahan terutama *human error*, kemudahan didalam pengawasan transaksi, dan mempersingkat waktu sehingga transaksi lebih efektif dan efisien diperlukan Implementasi *Treasury System* Syariah dan didalam proses implementasinya diperlukan konsultan pendamping sehingga implementasi dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pengembangan bisnis turut didukung oleh pengembangan operasional, teknologi dan *Governance, Risk, Compliance* (GRC). Strategi pengembangan operasional, teknologi dan GRC sebagai berikut.
1. Operasional dan Teknologi
   a. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi
   b. Pengkayaan *Digital Banking*
   c. *Integrated* HC *Management*
   d. Pemenuhan SLA & standardisasi kerja
2. *Governance, Risk, Compliance* (GRC)
   a. *Internal Control System*.
   b. Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank.
   c. Penguatan *Three Line of Defense*.
   d. Penyempurnaan kebijakan Anti *Fraud*.
   e. Penyempurnaan SOT.

This transition will impact the bank and its business as follows:
- Investing in technological infrastructure upgrades to ensure compatibility with the MX format, involving new software, hardware, or system integration.
- Existing workflows related to payment processes will need to be adjusted to accommodate the new data structures and functions of MX messages.
- Personnel involved in payment processes require training on the new format and procedural changes related to SWIFT ISO 20022.

Development and enhancement of the FX Third-Party Funds (DPK) portfolio through the promotion of *Ju'ul*(rewards) in Special Hajj Marketing.

To increase the collection of Third-Party Funds (DPK), particularly from Current Account products, incentives are provided to customers who successfully recommend and assist in the registration of special Hajj portions through BRK Syariah and facilitate special Hajj deposits via FX Current Accounts, specifically in USD.

To maximize treasury transaction processes, minimize errors (particularly human error), facilitate transaction oversight, and reduce processing time for greater effectiveness and efficiency, the implementation of a Sharia Treasury System is required. The implementation process will involve assisting consultants to ensure the system operates optimally and in compliance with applicable regulations.

Business development is concurrently supported by the advancement of operations, technology, and Governance, Risk, Compliance (GRC). The operational, technological, and GRC development strategies are as follows:
1. Operations and Technology
   a. Strengthening Information Technology Infrastructure.
   b. Enriching Digital Banking capabilities.
   c. Integrated Human Capital (HC) Management.
   d. Fulfillment SLA and operational standardization.
2. Governance, Risk, Compliance (GRC)
   a. Enhancing the Internal Control System.
   b. Improving the Bank's Soundness Rating.
   c. Strengthening the Three Lines of Defense.
   d. Refining Anti-Fraud policies.
   e. Refining SOT.

ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECTS

Strategi Pemasaran

BRK Syariah telah menyusun Rencana Bisnis Bank 2025-2027 yang memuat arah, kebijakan, strategi dan rencana kerja untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan. Strategi pemasaran diturunkan menjadi rencana kerja dalam Rencana Bisnis Bank sebagai upaya menyelaraskan keunggulan produk dan layanan dengan dinamika pasar. Berikut ini strategi pemasaran yang diimplementasikan oleh BRK Syariah pada tahun 2025.

Rencana Pendanaan

Pada tahun 2025, BRK Syariah memfokuskan arah kebijakan pada peningkatan proporsi Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *fee-based income* sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan bisnis. Fokus ini sejalan dengan kebutuhan penguatan struktur pendanaan yang berkelanjutan, diversifikasi sumber pendapatan, serta peningkatan profitabilitas Bank. Untuk mencapai sasaran tersebut, BRK Syariah mengakselerasi inovasi produk dan layanan, memperluas kanal distribusi (*delivery channel*), peningkatan jumlah transaksi merchant QRIS, peningkatan jumlah penggunaan fitur-fitur *mobile banking* dan CMS, optimalisasi penggunaan EDC *merchant*, serta memperkuat efektivitas komunikasi pemasaran. Selain itu, Bank secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan engagement dan edukasi guna meningkatkan loyalitas serta memperkokoh ekosistem bisnis BRK Syariah.

Rencana Penanaman Dana

BRK Syariah meningkatkan pertumbuhan pembiayaan berkualitas, baik segmen konsumtif aneka guna yang menjadi unggulan Bank maupun segmen produktif melalui *pricing* dan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. BRK Syariah menargetkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya melalui:

- Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan Islam, industri halal, pelaku usaha, Kementerian, Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- Optimalisasi fungsi *Account Officer* dalam pemasaran produk pembiayaan
- Implementasi program kerja seperti program promosi pembiayaan konsumer, *workshop* nasabah binaan UMKM, dan pembukaan layanan *Rahn* (Gadai Emas) pada 11 unit kantor baru.

Marketing Strategy

BRK Syariah has formulated the 2025-2027 Bank Business Plan, which contains the direction, policies, strategies, and work plans to achieve the established strategic targets. The marketing strategy is derived into specific work plans within the Bank Business Plan as an effort to align product and service excellence with market dynamics. The following are the marketing strategies implemented by BRK Syariah in 2025.

Funding Plan

In 2025, BRK Syariah focused its policy direction on increasing the proportion of Third-Party Funds (DPK) and fee-based income as primary drivers of business growth. This focus aligns with the need to strengthen a sustainable funding structure, diversify income sources, and enhance the Bank's profitability. To achieve these objectives, BRK Syariah accelerated product and service innovation, expanded delivery channels, increased the volume of QRIS merchant transactions, boosted the usage of mobile banking and CMS features, optimized merchant EDC utilization, and strengthened the effectiveness of marketing communications. Furthermore, the Bank actively organized various engagement and educational activities to enhance loyalty and reinforce the BRK Syariah business ecosystem.

Fund Placement Plan

BRK Syariah continuously strives to increase the growth of quality financing, both in the multi-purpose consumer segment, which is the Bank's flagship product, and the productive segment through pricing and features tailored to market needs. BRK Syariah targets a highly significant growth in financing disbursement compared to previous years, achieved primarily through:

- Synergy and collaboration with Sharia financial institutions, Islamic educational institutions, the halal industry, business actors, Ministries, Government Agencies, and Regional Governments.
- Optimization of the Account Officer function in marketing financing products.
- Implementation of work programs such as consumer financing promotion programs, workshops for fostered MSME customers, and the opening of Rahn (Gold Pawn) services at 11 new office units..

Pangsa Pasar

BRK Syariah terus berupaya untuk memperkuat posisinya dalam persaingan ketat dengan Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 1 dan BPD di Indonesia. Penguasaan pasar dianalisis berdasarkan kapasitas Bank dalam meningkatkan Aset, penghimpunan DPK dan penyaluran pembiayaan.

Market Share

BRK Syariah continuously strives to strengthen its position amidst tight competition with Core Capital Bank Group 1 (KBMI 1) and Regional Development Banks (BPD) in Indonesia. Market dominance is analyzed based on the Bank's capacity to increase Assets, Third-Party Funds (DPK) accumulation, and financing disbursement.

Pangsa Pasar BRK Syariah terhadap KBMI 1

BRK Syariah's Market Share relative to KBMI 1

Tabel Pangsa Pasar BRK Syariah terhadap KBMI 1
BRK Syariah Market Share Table against KBMI 1

(dalam % | In %)

Indikator	2025	2024	Pertumbuhan Growth	Indicator
Aset	2,38	2,13	0,24	Assets
Pembiayaan	2,71	2,69	0,02	Financing
Dana Pihak Ketiga	2,64	2,49	0,15	Third Party Funds

BRK Syariah menunjukkan peningkatan kinerja melalui pertumbuhan pangsa pasar aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga terhadap Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1. Pada tahun 2025 Bank mencatatkan pangsa pasar aset sebesar 2,38%, mengalami pertumbuhan sebesar 0,24% dari tahun 2024 yang sebesar 2,13%. Total aset BRK Syariah meningkat dari Rp30,86 triliun tahun 2024 menjadi Rp31,10 triliun pada akhir tahun 2025 atau tumbuh sebesar 0,78%. Peningkatan komponen aset terjadi pada kinerja pembiayaan yang diberikan dan penempatan pada Bank Indonesia.

Kinerja pembiayaan mencatatkan peningkatan pangsa pasar dari 2,69% pada 2024 menjadi 2,71% pada akhir Desember 2025, atau tumbuh sebesar 0,02%. Bank mampu secara berkesinambungan menumbuhkan penyaluran portofolio pembiayaan segmen konsumtif di tengah persaingan di segmen tersebut yang sangat ketat.

Di tengah persaingan bisnis sektor pendanaan, Bank masih menunjukkan peningkatkan kinerja penetrasi pasar pada sisi penghimpunan dana pihak ketiga. Pangsa pasar tahun 2024 sebesar 2,49% dan pada akhir periode Desember 2025 meningkat menjadi 2,64%, atau tumbuh sebesar 0,15%.

BRK Syariah demonstrated improved performance through growth in the market share of assets, financing, and third-party funds relative to the Bank Cluster Based on Core Capital (KBMI) 1. In 2025, the Bank recorded an asset market share of 2.38%, representing a growth of 0.24% from 2.13% in 2024. Total assets of BRK Syariah increased from IDR 30.86 trillion in 2024 to IDR 31.10 trillion at the end of 2025, a growth of 0.78%. This increase in asset components was driven by the performance of financing provided and placements with Bank Indonesia.

Financing performance recorded an expansion in market share from 2.69% in 2024 to 2.71% as of late December 2025, representing a growth of 0.02%. The Bank has demonstrated the capability to sustainably grow its financing portfolio disbursement within the consumer segment, despite the highly competitive landscape in the sector.

Amidst business competition in the funding sector, the Bank continued to demonstrate improved market penetration in terms of third-party fund collection. The market share, which stood at 2.49% in 2024, increased to 2.64% by the end of December 2025, representing a growth of 0.15%.

Pangsa Pasar BRK Syariah terhadap BPD

BRK Syariah's Market Share relative to BPD

Tabel Pangsa Pasar BRK Syariah terhadap BPD
BRK Syariah Market Share Table against BPD

(dalam % | In %)

Indikator	2025	2024	Pertumbuhan Growth	Indicator
Aset	2,92	3,02	(0,10)	Assets
Pembiayaan	3,37	3,35	0,03	Financing
Dana Pihak Ketiga	3,42	3,23	0,19	Third Party Funds

Sebagai bagian dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), BRK Syariah juga menghadapi persaingan antar BPD se-Indonesia. Kinerja pertumbuhan pangsa pasar BRK Syariah terhadap BPD tercermin dari kinerja pembiayaan dan dana pihak ketiga, sementara pangsa pasar aset mengalami penyesuaian. Pangsa pasar pembiayaan Bank tahun 2025 meningkat 0,03% dari 3,35% pada tahun 2024 menjadi 3,37% pada akhir tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah persaingan sektor pembiayaan antar BPD, BRK Syariah mampu meningkatkan penetrasi penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, Bank menunjukkan peningkatan pangsa pasar dari 3,23% pada 2024 menjadi 3,42% pada tahun 2025 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,19%. Bank mampu meningkatkan penghimpunan dana ritel melalui instrumen tabungan maupun giro dengan pertumbuhan masing-masing 7,00% dan 22,86%. Meskipun pada instrumen deposito turut mengalami peningkatan, namun dengan pertumbuhan paling kecil sebesar 2,99%.

As part of the Regional Development Bank (BPD) group, BRK Syariah also faces competition among BPDs across Indonesia. BRK Syariah's market share growth performance relative to other BPDs is reflected in its financing and third-party funds performance, while its asset market share underwent an adjustment. The Bank's financing market share in 2025 increased by 0.03%, rising from 3.35% in 2024 to 3.37% at the end of 2025. This indicates that amidst competition in the financing sector among BPDs, BRK Syariah was able to enhance its financing distribution penetration to the public.

Regarding third-party fund collection, the Bank demonstrated an increase in market share from 3.23% in 2024 to 3.42% in 2025, representing a growth of 0.19%. The Bank successfully increased retail fund collection through savings and current account instruments, with growth of 7.00% and 22.86%, respectively. While time deposits also experienced an increase, they recorded the lowest growth at 2.99%.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN
OPERATING REVIEW BY SEGMENT

Segmen Geografis

BRK Syariah menjalankan kegiatan operasional di wilayah Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi DKI Jakarta. Kinerja operasional BRK Syariah dilaporkan berdasarkan segmen geografis, yang mencerminkan kondisi lingkungan ekonomi dengan tingkat risiko dan imbal hasil yang berbeda di masing-masing wilayah. Pendekatan ini mendukung pengambilan keputusan serta pengalokasian sumber daya untuk mengoptimalkan potensi pasar di setiap daerah. Melalui pendekatan ini, BRK Syariah juga dapat memantau kontribusi masing-masing wilayah terhadap kinerja secara keseluruhan.

Pada tahun 2025 pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* sebesar Rp2,50 triliun, mencakup pendapatan dari jual beli, pendapatan dari bagi hasil, pendapatan dari *ijarah* dan pendapatan usaha utama lainnya. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tahun 2025 sebesar Rp983,28 miliar, sehingga pendapatan bersih BRK Syariah tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,51 triliun meningkat 7,80% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,40 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pendapatan dari bagi hasil yang mengalami kenaikan sebesar Rp296,35 miliar atau 44,32% dibandingkan tahun 2024. Beban usaha dapat dikelola dengan baik, sehingga BRK Syariah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp276,43 miliar pada tahun 2025. Provinsi Riau masih menjadi kontributor utama terhadap laba bersih BRK Syariah, diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Provinsi DKI Jakarta masih mencatatkan kerugian dalam dua tahun terakhir.

Geographical Segments

BRK Syariah conducts its operational activities within the regions of Riau, Kepulauan Riau, and DKI Jakarta. The operational performance of BRK Syariah is reported based on geographical segments, which reflect the economic environment conditions with varying levels of risk and return in each respective region. This approach supports decision-making and resource allocation to optimize market potential in each region. Through this approach, BRK Syariah is also able to monitor the contribution of each region to the overall performance.

In 2025, the income from fund management generated by the Bank as a mudharib amounted to Rp2.50 trillion, encompassing income from sales and purchase transactions, profit-sharing income, *ijarah* income, and other principal operating revenues. Third-party rights over profit sharing in 2025 stood at Rp983.28 billion, bringing BRK Syariah's net income for 2025 to Rp1.51 trillion, representing an increase of 7.80% compared to the previous year's Rp1.40 trillion. This growth was primarily driven by profit-sharing income, which surged by Rp296.35 billion, or 44.32%, compared to 2024. Operating expenses were effectively managed, enabling BRK Syariah to successfully post a net profit of Rp276.43 billion in 2025. Riau Province remains the predominant contributor to BRK Syariah's net profit, followed by the Riau Islands Province, whereas the DKI Jakarta Province continued to record losses over the past two years.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Berdasarkan Geografis Tahun 2025
Table of Revenue and Profitability by Geographical Business Segments, 2025

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

URAIAN	Riau	Kepulauan Riau	DKI Jakarta	Total	DESCRIPTION
Pendapatan dari Jual - Beli	880.715	242.868	496	1.124.079	Income From Sales And Purchases
Pendapatan dari Bagi Hasil	725.899	216.235	22.842	964.976	Income From Profit Sharing
Pendapatan dari *Ijarah - neto*	16.247	3.988	5	20.240	Income From *Ijarah* - Net
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	382.613	5.402	41	388.056	Other Main Operating Income
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil	(530.674)	(113.780)	(338.838)	(983.292)	Third parties share on return
Pendapatan - Bersih	1.474.799	354.713	(315.454)	1.514.058	Income - Net
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan	90.922	19.460	130	110.512	Fee Based Income From Banking
Pendapatan Lainnya	5.454	2.075	-	7.530	Other Income
Gaji dan Tunjangan	559.006	92.959	5.523	657.488	Salaries and Benefits
Umum dan Administrasi	407.050	55.991	3.775	466.816	General And Administrative
Bonus *Wadiah*	55	35	-	90	*Wadiah* Bonus
Lain-lain	21.698	1.288	130	23.115	Others

URAIAN	Riau	Kepulauan Riau	DKI Jakarta	Total	DESCRIPTION
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	78.946	6.582	28	85.556	Allowance for Impairment Losses for Financial
Pendapatan/(Beban) Non Usaha - *Netto*	28.241	932	348	29.521	Non operating Income/(expense) - net
Laba Operasional	**476.180**	**218.462**	**(325.128)**	**369.513**	**Operating Income**
Laba Bersih	**383.098**	**218.462**	**(325.128)**	**276.432**	**Net Profit**
Jumlah Aset	**20.742.397**	**4.781.166**	**5.576.584**	**31.100.146**	**Total Assets**
Jumlah Liabilitas	**17.819.299**	**4.349.392**	**5.544.734**	**27.713.425**	**Total Liability**
Jumlah Ekuitas	**2.923.098**	**431.773**	**31.850**	**3.386.721**	**Total Equity**

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas per Segmen Geografis Tahun 2024
Table of Revenue and Profitability by Geographical Segment, 2024

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	Riau	Kepulauan Riau	Lainnya	Jumlah	DESCRIPTION
Pendapatan dari Jual - Beli	1.029.913	294.200	554	1.324.668	Income From Sales And Purchases
Pendapatan dari Bagi Hasil	537.871	126.785	3.968	668.624	Income From Profit Sharing
Pendapatan dari *Ijarah* - neto	13.263	3.964	9	17.236	Income From *Ijarah* - Net
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	317.963	2.677	-	320.640	Other Main Operating Income
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil	(436.209)	(109.449)	(381.059)	(926.717)	Third parties share on return
Pendapatan - Bersih	1.462.801	318.177	(376.528)	1.404.450	Income - Net
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan	96.774	24.120	156	121.049	Fee Based Income From Banking
Pendapatan Lainnya	4.577	1.501	-	6.078	Other Income
Gaji dan Tunjangan	536.333	91.086	5.432	632.851	Salaries and Benefits
Umum dan administrasi	347.869	52.616	3.547	404.032	General And Administrative
Bonus *Wadiah*	113	21	-	134	*Wadiah* Bonus
Lain-lain	19.370	1.295	125	20.790	Others
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(17.733)	(5.252)	(205)	(23.190)	Allowance for Impairment Losses for Financial
Pendapatan/(beban) Non usaha - neto	23.368	3.284	304	26.957	Non operating Income/(expense) - net
Laba Operasional	**619.366**	**190.243**	**(385.985)**	**423.623**	**Operating Income**
Laba Bersih	**535.116**	**190.243**	**(385.985)**	**339.374**	**Net Profit**
Jumlah Aset	**21.764.994**	**3.779.133**	**5.315.600**	**30.859.727**	**Total Assets**
Jumlah Liabilitas	**18.572.451**	**3.552.611**	**5.315.600**	**27.440.662**	**Total Liability**
Jumlah Ekuitas	**3.192.543**	**226.522**	**-**	**3.419.065**	**Total Equity**

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Uraian analisis pada tinjauan kinerja keuangan disusun berdasarkan Laporan Keuangan BRK Syariah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebagaimana dimuat dalam Laporan Tahunan ini. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto dengan opini Wajar, dalam semua hal yang material.

The analytical descriptions within the financial performance review are prepared based on the Financial Statements of BRK Syariah for the year ended December 31, 2025, as presented in this Annual Report. The financial statements are presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), including the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), and have been audited by the Public Accounting Firm of Bustaman, Ezeddin & Putranto, receiving an Unmodified Opinion.

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Aset BRK Syariah tahun 2025 sebesar Rp31,10 triliun meningkat 0,78% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp30,86 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh aset lancar yang mengalami kenaikan sebesar Rp351,87 miliar dibandingkan tahun 2024. Aset lancar tahun 2025 tercatat sebesar Rp30,13 triliun meningkat 1,19% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp29,66 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan pembiayaan *Musyarakah* sebesar Rp2.542 miliar atau 29,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, aset tidak lancar tahun 2025 sebesar Rp1.087 miliar turun 9,30% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.199 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari aset lain-lain sebesar Rp80,71 miliar atau 11,37% dibandingkan tahun sebelumnya.

Statement of Financial Position

Assets

BRK Syariah's assets in 2025 amounted to Rp31.10 trillion, an increase of 0.78% compared to Rp30.86 trillion in 2024. This increase was primarily driven by current assets, which experienced a growth of Rp351.87 billion compared to 2024. Current assets in 2025 were recorded at Rp30.13 trillion, representing a 1.19% increase from Rp29.66 trillion in 2024. This growth predominantly stemmed from an increase in *Musyarakah* financing by Rp2,542 billion, or 29.96%, compared to the previous year. Meanwhile, non-current assets in 2025 stood at Rp1,087 billion, a decrease of 9.30% compared to Rp1,199 billion in 2024. This decline was primarily attributed to a decrease in other assets by Rp80.71 billion, or 11.37%, compared to the previous year.

Tabel Aset
Table of Assets

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Aset Lancar					CURRENT ASSETS
Kas	937.249	956.983	(19.734)	(2,06)	Cash
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	3.074.642	2.466.349	608.293	24,66	Placements with Bank Indonesia and Current Accounts
Giro dan Penempatan pada Bank Lain	61.032	188.524	(127.492)	(67,63)	Placements with Other Banks and Current Accounts
Investasi Pada Surat Berharga	4.677.867	4.881.313	(203.446)	(4,17)	Investments in Marketable Securities
Piutang *Murabahah*	10.363.033	12.778.525	(2.415.492)	(18,90)	*Murabahah* Receivables
Piutang *Ijarah*	252	173	79	45,66	*Ijarah* Receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(378.810)	(370.437)	(8.373)	2,26	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Piutang - Bersih	9.984.475	12.408.261	(2.423.786)	(19,53)	Total Receivables - Net
Pinjaman *Qardh*	220.554	98.023	122.531	125,00	*Qardh* Receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(91)	(8)	(83)	1.037,50	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pinjaman *Qardh* - Bersih	220.463	98.015	122.448	124,93	Total *Qardh* Receivables - Net
Pembiayaan *Mudharabah*	-	1.895	(1.895)	(100,00)	*Mudharabah* Financing
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(2)	2	(100,00)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* - Bersih	-	1.893	(1.893)	(100,00)	Total *Mudharabah* Financing - Net
Pembiayaan *Musyarakah*	11.030.287	8.487.692	2.542.595	29,96	*Musyarakah* Financing
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(146.591)	(70.645)	(75.946)	107,50	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* - Bersih	10.883.697	8.417.047	2.466.650	29,31	Total *Musyarakah* Financing - Net
Aset yang diperoleh untuk *Ijarah* - Bersih	173.187	241.200	(68.013)	(28,20)	Assets Acquired for *Ijarah* - Net
Jumlah Piutang dan Pembiayaan	21.787.314	21.607.508	179.806	0,83	Total Receivables and Financing
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(525.492)	(441.091)	(84.401)	19,13	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pembiayaan - Bersih	21.261.822	21.166.417	95.405	0,45	Total Financing - Net
Penyertaan Saham	1.556	1.556	-	-	Investment Shares

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.155)	-	(1.155)	-	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Penyertaan Saham - bersih	400	1.556	(1.156)	(74,29)	Total Investment in Shares - Net
Jumlah Aset Lancar	**30.013.012**	**29.661.142**	**351.870**	**1,19**	**Total Current Assets**
Aset Tidak Lancar					**Non-Current Assets**
Aset Tetap - Bersih	361.907	383.737	(21.830)	(5,69)	Fixed Assets - Net
Aset Pajak Tangguhan	95.971	104.882	(8.911)	(8,50)	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	629.256	709.966	(80.710)	(11,37)	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1.087.134**	**1.198.585**	**(111.451)**	**(9,30)**	**Total Non-Current Assets**
Jumlah Aset	**31.100.146**	**30.859.727**	**240.419**	**0,78**	**Total Assets**

Kas

Kas tahun 2025 sebesar Rp937,25 miliar mengalami penurunan sebesar 2,06% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp956,98 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari kas Rupiah yang turun sebesar Rp216,79 miliar atau 26,21%. Kas dalam mata uang asing juga mengalami penurunan khususnya pada mata uang dolar Amerika Serikat sebesar Rp5,08 miliar, selain itu juga terdapat penurunan pada Dolar Singapura.

Cash

Cash in 2025 amounted to Rp937.25 billion, representing a decrease of 2.06% compared to Rp956.98 billion in 2024. This contraction was primarily attributable to a decrease in Rupiah cash holdings by Rp216.79 billion, or 26.21%. Furthermore, cash held in foreign currencies also registered a decline, specifically in United States Dollars by Rp5.08 billion, alongside a decrease in Singapore Dollars.

Tabel Kas
Cash Flow Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Rupiah					**Rupiah**
Kas	610.294	827.080	(216.786)	(26,21)	Cash
Kas ATM	146.170	116.087	30.083	25,91	ATM Cash
Kas ATM Pada Pihak Ketiga	173.036	-	(173.036)	100,00	ATM Cash at Third Parties
Jumlah	**929.499**	**943.167**	**(13.668)**	**(1,45)**	**Total**
Mata Uang Asing					**Foreign Currency**
Dolar Amerika Serikat	2.923	7.999	(5.076)	(63,46)	United States Dollar
Dolar Singapura	2.164	3.462	(1.298)	(37,49)	Singapore Dollar
Euro	175	138	37	26,81	Euro
Riyal Arab Saudi	2.314	1.622	692	42,66	Saudi Arabia Riyal
Ringgit Malaysia	174	596	(422)	(70,81)	Malaysian Ringgit
Jumlah	**7.750**	**13.817**	**(6.067)**	**(43,91)**	**Total**
Total	**937.249**	**956.983**	**(19.734)**	**(2,06)**	**Total**

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Pada tahun 2025 giro dan penempatan pada Bank Indonesia tercatat sebesar Rp3,07 triliun meningkat 24,66% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,47 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penempatan giro dalam rupiah pada Bank Indonesia yang meningkat sebesar Rp441,29 miliar atau 17,95% dibandingkan tahun sebelumnya.

Current Accounts and Placements with Bank Indonesia

In 2025, current accounts and placements with Bank Indonesia were recorded at Rp3.07 trillion, representing an increase of 24.66% compared to the Rp2.47 trillion recorded in 2024. This growth was primarily driven by the placement of Rupiah-denominated current accounts with Bank Indonesia, which experienced a year-on-year increase of Rp441.29 billion, or 17.95%.

Tabel Giro pada Bank Indonesia
Table of Current Accounts with Bank Indonesia

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Giro dalam Rupiah	2.900.319	2.459.026	441.293	17,95	Current accounts in Rupiah
Giro dalam Dolar Amerika Serikat	174.322	7.323	166.999	2.280,47	Current Account in US Dollar
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	-	-	-	-	Bank Indonesia Syariah Deposit Facility (FASBIS)
Total	**3.074.642**	**2.466.349**	**608.293**	**24,66**	**Total**

Giro dan Penempatan pada Bank Lain

Giro dan penempatan pada bank lain tahun 2025 tercatat sebesar Rp61,03 miliar turun 67,63% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp188,52 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh giro dan penempatan pada bank lain dari mata uang asing yang turun sebesar Rp118,75 miliar.

Current Accounts and Placements with Other Banks

Demand Deposits and Placements with Other Banks Demand deposits and placements with other banks in 2025 were recorded at Rp61.03 billion, representing a decrease of 67.63% compared to Rp188.52 billion in 2024. This contraction was primarily influenced by a decline in foreign currency demand deposits and placements with other banks, which decreased by Rp118.75 billion.

Tabel Giro dan Penempatan pada Bank Lain
Current Accounts and Placements with Other Banks

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Rupiah	29.939	38.682	(8.743)	(22,60)	Rupiah
Mata Uang Asing	31.093	149.842	(118.749)	(79,25)	Foreign Currency
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	-	Allowance for Impairment Losses
Total	**61.032**	**188.524**	**(127.492)**	**(67,63)**	**Total**

Investasi Pada Surat Berharga

BRK Syariah melakukan investasi pada surat berharga berdasarkan prinsip syariah seperti sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Surat berharga tahun 2025 tercatat sebesar Rp4,68 triliun turun 4,17% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,88 triliun.

Investments in Securities

BRK Syariah engages in securities investments in accordance with sharia principles, such as sukuk (Islamic bonds) issued by the government or corporate entities. In 2025, investments in securities were recorded at Rp4.68 trillion, reflecting a decrease of 4.17% compared to Rp4.88 trillion in 2024.

Tabel Investasi pada Surat Berharga
Table of Investments in Securities

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Sukuk BI tersedia untuk dijual	593.014	1.038.070	(445.056)	(42,87)	BI Sukuk available for sale
Sukuk Negara yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain	883.124	1.764.264	(881.140)	(49,94)	Government Sukuk Measured at Amortized Acquisition Cost fair value through other comprehensive income
Sukuk Negara yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi	3.201.729	2.078.980	1.122.750	54,00	Government Sukuk Measured at Amortized Cost
Sertifikat Investasi *Mudharabah* antar Bank ("SIMA") Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisas	-	-	-	-	Interbank *Mudharabah* Investment Certificates ("SIMA") Measured at Amortized Acquisition Costs
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	-	Allowance for impairment losses
Jumlah-Bersih	**4.677.867**	**4.881.313**	**(203.446)**	**(4,17)**	**Total-Net**

Piutang

BRK Syariah memiliki piutang yang terdiri dari piutang *murabahah* dan piutang *ijarah*. Jumlah piutang *murabahah* tahun 2025 sebesar Rp10,36 triliun turun 18,90% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp12,78 triliun. Sedangkan, piutang *ijarah* tahun 2025 sebesar Rp252 juta meningkat 45,66% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp173 juta. CKPN untuk piutang sebesar Rp378,81 miliar, sehingga piutang bersih setelah dikurangi CKPN tahun 2025 yaitu sebesar Rp9,98 triliun turun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp12,41 triliun.

Receivables

BRK Syariah holds receivables comprising *Murabahah* receivables and *ijarah* receivables. Total *Murabahah* receivables in 2025 amounted to Rp10.36 trillion, a decrease of 18.90% compared to Rp12.78 trillion in 2024. Meanwhile, *ijarah* receivables in 2025 stood at Rp252 million, representing an increase of 45.66% compared to Rp173 million in 2024. The Allowance for Impairment Losses (CKPN) for receivables amounted to Rp378.81 billion, resulting in net receivables (after deducting CKPN) of Rp9.98 trillion in 2025, a decrease compared to Rp12.41 trillion in 2024.

Tabel Piutang
Table of Receivables

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Piutang *Murabahah*	10.363.033	12.778.525	(2.415.492)	(18,90)	*Murabahah* Receivables
Pihak Berelasi	114	-	(114)	100,00	Related Parties
Pihak Ketiga	10.362.919	12.778.525	(2.415.606)	(18,90)	Third Parties
Piutang *Ijarah*	252	173	79	45,66	*Ijarah* Receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(378.810)	(370.437)	(8.373)	2,26	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Piutang - Bersih	**9.984.475**	**12.408.261**	**(2.423.786)**	**(19,53)**	**Net Receivables**

Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *qardh* tahun 2025 tercatat sebesar Rp220,55 miliar meningkat 125,00% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp98,02 miliar. CKPN untuk pinjaman *qardh* sebesar Rp91 juta, sehingga pinjaman *Qardh* bersih setelah dikurangi CKPN tahun 2025 yaitu sebesar Rp220,46 miliar meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp98,02 miliar.

Qardh Loans

Qardh loans in 2025 were recorded at Rp220.55 billion, surging by 125.00% compared to Rp98.02 billion in 2024. The CKPN for *Qardh* loans was Rp91 million, resulting in net *Qardh* loans (after deducting CKPN) of Rp220.46 billion in 2025, an increase compared to Rp98.02 billion in 2024.

Tabel Pinjaman *Qardh*
Table of Qardh Loans

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Pinjaman *Qardh*	220.554	98.023	122.531	125,00	*Qardh* Loans
Pihak Berelasi	45	-	(45)	100,00	Related Parties
Pihak Ketiga	220.509	98.023	122.486	124,96	Third Parties
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(91)	(8)	(83)	1.037,50	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pinjaman *Qardh* - Bersih	**220.463**	**98.015**	**122.448**	**124,93**	**Net *Qardh* Loans**

Pembiayaan *Mudharabah*

Pada tahun 2025 BRK Syariah tidak memiliki saldo pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan, pembiayaan *Mudharabah* tahun 2024 tercatat sebesar Rp1,89 miliar dengan CKPN sebesar Rp2 juta sehingga pembiayaan *mudharabah* bersih setelah dikurangi CKPN sebesar Rp1,89 miliar.

Mudharabah Financing

In 2025, BRK Syariah recorded a zero balance for *Mudharabah* financing. Conversely, *Mudharabah* financing in 2024 was recorded at Rp1.89 billion with a CKPN of Rp2 million, resulting in net *Mudharabah* financing (after deducting CKPN) of Rp1.89 billion.

Tabel Pembiayaan *Mudharabah*
Table of Mudharabah Financing

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Pembiayaan *Mudharabah*	-	1.895	(1.895)	(100,00)	*Mudharabah* Financing
Pihak Berelasi	-	-	-	-	Related Parties
Pihak Ketiga	-	1.895	(1.895)	(100,00)	Third Parties
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(2)	2	(100,00)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* - Bersih	**-**	**1.893**	**(1.893)**	**(100,00)**	**Net *Mudharabah* Financing**

Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* tahun 2025 tercatat sebesar Rp11,03 triliun meningkat 29,96% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8,49 triliun. CKPN untuk pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp146,59 miliar sehingga pembiayaan *Musyarakah* bersih setelah dikurangi CKPN tahun 2025 sebesar Rp10,88 triliun meningkat 29,31% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8,42 triliun.

Musyarakah Financing

Musyarakah financing in 2025 was recorded at Rp11.03 trillion, representing an increase of 29.96% compared to Rp8.49 trillion in 2024. The CKPN for *Musyarakah* financing amounted to Rp146.59 billion, yielding net *Musyarakah* financing (after deducting CKPN) of Rp10.88 trillion in 2025, a 29.31% increase compared to Rp8.42 trillion in 2024.

Tabel Pembiayaan *Musyarakah*
Table of Musyarakah Financing

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Pembiayaan *Musyarakah*	11.030.287	8.487.692	2.542.595	29,96	*Musyarakah* Financing
Pihak Berelasi	2.781	32.781	(30.000)	(91,52)	Related Parties
Pihak Ketiga	11.027.506	8.454.910	2.572.596	30,43	Third Parties
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(146.591)	(70.645)	(75.946)	107,50	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* - Bersih	**10.883.697**	**8.417.047**	**2.466.650**	**29,31**	**Total *Musyarakah* Financing - Net**

Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* tahun 2025 tercatat sebesar Rp173,19 miliar turun 28,20% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp241,20 miliar.

Assets Acquired for *Ijarah*

Assets acquired for *ijarah* in 2025 were recorded at Rp173.19 billion, reflecting a decrease of 28.20% compared to Rp241.20 billion in 2024.

Tabel Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*
Table of Assets Acquired for *Ijarah*

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Multijasa	68.770	80.779	(12.009)	(14,87)	Multi-services
Lainnya	213.475	266.595	(53.120)	(19,93)	Others
Jumlah	282.245	347.374	(65.129)	(18,75)	Total
Akumulasi Penyusutan, Amortisasi Pemeliharaan dan Penurunan Nilai	(109.057)	(106.173)	(2.884)	2,72	Accumulated Depreciation, Amortization Maintenance and Impairment
Jumlah - bersih	**173.187**	**241.200**	**(68.013)**	**(28,20)**	**Total - net**

Penyertaan Saham

BRK Syariah melakukan penyertaan saham kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gemilang/Kateman sebanyak 1,38% dengan nominal sebesar Rp200 juta, BPR Rokan Hilir sebanyak 0,91% dengan nominal sebesar Rp200 juta dan PT Sarana Riau Ventura sebanyak 7,76% dengan nominal sebesar Rp1,155 miliar pada tahun 2007. Sampai dengan tahun 2025 BRK Syariah tidak melakukan penambahan penyertaan saham.

Share Investments

BRK Syariah made share investments in Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gemilang/Kateman amounting to 1.38% with a nominal value of Rp200 million, BPR Rokan Hilir amounting to 0.91% with a nominal value of Rp200 million, and PT Sarana Riau Ventura amounting to 7.76% with a nominal value of Rp1.155 billion in 2007. Up to 2025, BRK Syariah did not make any additional equity investments.

Tabel Penyertaan Saham
Share Investment Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang/Kateman	200	200	-	-	Regional Government-Owned Rural Bank Gemilang/Kateman
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir	200	200	-	-	Regional Government-Owned Rural Bank Rokan Hilir
PT Sarana Riau Ventura	1.155	1.155	-	-	PT Sarana Riau Ventura
Jumlah	1.556	1.556	-	-	Amount
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.155)	-	(1.155)	-	Allowance for Impairment Losses
Jumlah-Bersih	**400**	**1.556**	**(1.156)**	**-**	**Net Amount**

Aset Tetap

Aset tetap tahun 2025 sebesar Rp361,91 miliar turun 5,69% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp383,74 miliar. Aset tetap berupa gedung, kendaraan dan inventaris tertentu lainnya diasuransikan atas kemungkinan risiko kebakaran, kecelakaan dan risiko lain. Aset tetap tersebut diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp452.199.085 kepada PT Asuransi Asei Indonesia, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Syariah dan PT Asuransi Askrida Syariah. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari kebakaran dan gempa bumi.

Fixed Assets

Fixed assets in 2025 amounted to Rp361.91 billion, representing a decrease of 5.69% compared to Rp383.74 billion in 2024. Fixed assets comprising buildings, vehicles, and certain other inventory items are insured against potential risks of fire, accidents, and other perils. These fixed assets are insured with a total coverage value of Rp452,199,085 through PT Asuransi Asei Indonesia, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Syariah, and PT Asuransi Askrida Syariah. Management is of the opinion that the aforementioned coverage value is adequate to cover potential losses arising from fire and earthquakes.

Tabel Aset Tetap
Fixed Assets Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Harga Perolehan	857.580	843.589	13.991	1,66	Acquisition Price
Akumulasi Penyusutan	(503.716)	(459.852)	(43.864)	9,54	Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	361.907	383.737	(21.830)	5,69	Book Value Net

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan tahun 2025 sebesar Rp95,97 miliar turun 8,50% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp104,88 miliar.

Deferred Tax Assets

Deferred Tax Assets in 2025 amounted to Rp95.97 billion, reflecting a decrease of 8.50% compared to Rp104.88 billion in 2024.

Tabel Aset Pajak Tangguhan
Deferred Tax Assets

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Kewajiban Jasa Produksi	13.683	16.799	(3.116)	(18,55)	Production Service Liabilities
Kewajiban Tantiem	1.216	1.561	(345)	(22,10)	Tantiem Liabilities
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	5.322	7.026	(1.704)	(24,25)	Post-Employment Benefit Liabilities
Perbedaan CKPN Pinjaman Atas PPKA Pinjaman	29.375	19.128	10.247	53,57	Difference in Allowance for Impairment Losses on Loan Impairment Losses
Saldo Pinjaman Hapus Buku	39.962	41.321	(1.359)	(3,29)	Loan Write-Off Balance
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja- Setelah Pajak	9.618	11.375	(1.757)	(15,45)	Remeasurement of Employee Benefit Liabilities - Net of Tax
Surat Berharga Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	(3.206)	7.672	(10.878)	(141,79)	Marketable Securities Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income
Jumlah Aset Pajak Tangguhan - Bersih	**95.971**	**104.882**	**(8.911)**	**(8,50)**	**Deferred Tax Assets - Net**

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain tahun 2025 sebesar Rp629,26 miliar turun 11,37% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp709,97 miliar.

Other Assets

Other Assets in 2025 were recorded at Rp629.26 billion, representing a decline of 11.37% compared to Rp709.97 billion in 2024.

Tabel Aset Lain - lain
Table of Other Assets

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Piutang Pendapatan Surat Berharga	113.386	94.278	19.108	20,27	Income Receivables From Securities
Pendapatan Pembiayaan yang Akan Diterima	158.296	153.379	4.917	3,21	Financing Income to be Received
Asuransi Dibayar Dimuka	100.253	113.790	(13.537)	(11,90)	Prepaid Insurance
PPh pasal 21 lebih bayar	11.427	7.962	3.465	43,51	Article 21 Income Tax overpayment
Sewa Dibayar Dimuka	29.630	30.170	(540)	(1,79)	Prepaid Rent
Tagihan ATM	9.024	10.629	(1.605)	(15,10)	ATM Billings
Persediaan Alat Tulis Kantor dan Materai	13.915	18.436	(4.521)	(24,52)	Stationery and Stamp Inventory
Setoran Jaminan	2.241	2.249	(8)	(0,36)	Security Deposit
Lain-lain	191.084	279.074	(87.990)	(31,53)	Other
Jumlah	**629.256**	**709.966**	**(80.710)**	**(11,37)**	**Total**

Liabilitas

Liabilitas tahun 2025 sebesar Rp3,67 triliun turun 22,35% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,72 triliun. Hal tersebut dipengaruhi oleh liabilitas jangka pendek yang mengalami penurunan sebesar 23,57%, terutama pendanaan dari Bank Indonesia yang turun sebesar Rp1,10 triliun atau 73,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi Liabilitas BRK Syariah tahun 2025 mencakup liabilitas jangka pendek sebesar Rp3,28 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp384,07 miliar yang

Liabilities

Liabilities in 2025 amounted to Rp3.67 trillion, representing a decrease of 22.35% compared to Rp4.72 trillion in 2024. This contraction was influenced by short-term liabilities, which experienced a decline of 23.57%, primarily driven by funding from Bank Indonesia that decreased by Rp1.10 trillion, or 73.29%, compared to the previous year. The composition of BRK Syariah's liabilities in 2025 comprised short-term liabilities of Rp3.28 trillion and long-term liabilities of Rp384.07 billion, registering

masing-masing mengalami penurunan sebesar 23,57% dan 10,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan upaya BRK Syariah dalam menjaga struktur kewajiban yang lebih efisien dan terkendali, sejalan dengan strategi pengelolaan likuiditas.

decreases of 23.57% and 10.09%, respectively, compared to the previous year. This condition reflects BRK Syariah's efforts in maintaining a more efficient and controlled liability structure, aligning with its liquidity management strategy.

Tabel Liabilitas
Table of Liabilities

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Liabilitas Jangka Pendek					**Short-term Liabilities**
Liabilitas Segera	465.366	498.692	(33.326)	(6,68)	Immediate Liabilities
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	35.669	42.645	(6.976)	(16,36)	Undistributed Profit Sharing
Simpanan *Wadiah*	1.780.006	1.660.211	119.795	7,22	*Wadiah* Deposit
Pendanaan dari Bank Indonesia (PaSBI)	401.374	1.502.950	(1.101.576)	(73,29)	Funding from Bank Indonesia (PaSBI)
Surat berharga yang diterbitkan SIMA	600.000	590.000	10.000	1,69	Securities issued by SIMA
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**3.282.415**	**4.294.498**	**(1.012.083)**	**(23,57)**	**Total Short-term Liabilities**
Liabilitas Jangka Panjang					**Long-term Liabilities**
Pinjaman yang Diterima	281.472	241.697	39.775	16,46	Loans Receivable
Utang Pajak	21.431	30.910	(9.479)	(30,67)	Tax Payable
Liabilitas Imbalan Kerja	67.908	83.639	(15.731)	(18,81)	Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Lain-lain	13.257	70.905	(57.648)	(81,30)	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**384.068**	**427.151**	**(43.083)**	**(10,09)**	**Total Long-Term Liabilities**
Jumlah Liabilitas	**3.666.483**	**4.721.649**	**(1.055.166)**	**(22,35)**	**Total Liabilities**

Liabilitas Segera

Liabilitas Segera tahun 2025 sebesar Rp465,37 miliar turun 6,68% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp498,69 miliar. Penurunan tersebut berasal dari setoran jaminan jatuh tempo yang turun sebesar Rp26,87 miliar atau 30,41% dibandingkan tahun sebelumnya.

Immediate Liabilities

Immediate Liabilities in 2025 amounted to Rp465.37 billion, reflecting a decrease of 6.68% compared to Rp498.69 billion in 2024. This decline primarily originated from matured security deposits, which decreased by Rp26.87 billion, or 30.41%, compared to the previous year.

Tabel Liabilitas Segera
Table of Immediate Liabilities

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Liabilitas Pihak ketiga	53.481	73.377	(19.896)	(27,11)	Third-Party Liabilities
Cadangan jasprod dan tantiem	67.726	83.453	(15.727)	(18,85)	Provision for Production Bonus and Tantiem
Liabilitas atas tagihan ATM	47.697	41.380	6.317	15,27	Liabilities on ATM Billings
Titipan kiriman uang dan inkaso	-	3.062	(3.062)	(100,00)	Remittance and Collection Deposits
Titipan tagihan pembayaran	85.080	82.892	2.188	2,64	Payment Billing Deposits
Biaya yang masih harus dibayar	40.725	37.403	3.322	8,88	Accrued Expenses
Liabilitas terkait pembiayaan	23	26	(3)	(11,54)	Financing-Related Liabilities
Liabilitas BI-*Fast*	91.101	65.096	26.005	39,95	BI-Fast Liabilities
Setoran Jaminan Jatuh Tempo	61.705	88.672	(26.967)	(30,41)	Matured Security Deposits
Titipan dana nasabah	2.253	15.107	(12.854)	(85,09)	Customer Fund Deposits
Warkat pinjaman Kliring	5.747	-	5.747	100,00	Clearing Loan Documents
Liabilitas principle Telkomsel	321	302	19	6,29	Telkomsel Principal Liabilities
Liabilitas QRIS	5.503	3.800	1.703	44,82	QRIS Liabilities
Dana kebajikan	3.077	2.953	124	4,20	Benevolence Funds
Rekening yang ditutup	349	345	4	1,16	Closed Accounts
Zakat dan *infaq*	2	1	1	100,00	Zakat and Infaq
Titipan Lainnya	578	822	(244)	(29,68)	Other Deposits
Jumlah	**465.366**	**498.692**	**(33.326)**	**(6,68)**	**Total**

Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

Bagi hasil yang belum dibagikan merupakan saldo yang belum dibagikan oleh Bank kepada nasabah (*shahibul maal*) atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *Mudharabah*. Pada tahun 2025 bagi hasil yang belum dibagikan sebesar Rp35,67 miliar turun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp42,65 miliar. Penurunan tersebut berasal dari bagi hasil yang belum dibagikan untuk deposito dengan mata uang rupiah yang turun sebesar Rp6,92 miliar atau 16,32% dibandingkan tahun sebelumnya.

Undistributed Profit Sharing

Undistributed profit sharing represents the balance of profits not yet distributed by the Bank to customers (*shahibul maal*), originating from the portion of the Bank's operating profit allocated from the management of *Mudharabah* funds. In 2025, undistributed profit sharing amounted to Rp35.67 billion, a decrease compared to Rp42.65 billion in 2024. This decline primarily stemmed from undistributed profit sharing for Rupiah-denominated deposits, which decreased by Rp6.92 billion, or 16.32%, compared to the previous year.

Tabel Bagi Hasil yang Belum dibagikan
Table of Undistributed Profit Sharing

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Rupiah					**Rupiah**
Deposito	35.482	42.400	(6.918)	(16,32)	Deposits
Sub Jumlah	35.482	42.400	(6.918)	(16,32)	Subtotal
Mata Uang Asing					**Foreign Currency**
Deposito	186	245	(59)	(24,08)	Deposits
Sub Jumlah	186	245	(59)	(24,08)	Subtotal
Jumlah	**35.669**	**42.645**	**(6.976)**	**(16,36)**	**Total**

Simpanan *Wadiah*

Simpanan *wadiah* meliputi giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Simpanan *Wadiah* tahun 2025 sebesar Rp1,78 triliun meningkat 7,22% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,66 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh tabungan *Wadiah* yang meningkat sebesar 11,06% menjadi Rp1,67 triliun pada tahun 2025.

Wadiah Deposits

Wadiah deposits encompass *Wadiah* demand deposits and *Wadiah* savings. *Wadiah* deposits in 2025 amounted to Rp1.78 trillion, reflecting an increase of 7.22% compared to Rp1.66 trillion in 2024. This growth was predominantly driven by *Wadiah* savings, which increased by 11.06% to reach Rp1.67 trillion in 2025.

Tabel Simpanan *Wadiah*
Table of Wadiah Deposits

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Giro *Wadiah*					**Wadiah Demand Deposits**
Pihak Ketiga					**Third Parties**
Rupiah	108.887	155.196	(46.309)	(29,84)	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	-	-	-	-	United States Dollars
Pihak Berelasi					**Related Parties**
Rupiah	1.286	1.479	(193)	(13,05)	Rupiah
Jumlah Giro *Wadiah*	**110.174**	**156.675**	**(46.501)**	**(29,68)**	**Total *Wadiah* Demand Deposits**
Tabungan *Wadiah*					**Wadiah Savings**
Pihak Ketiga					**Third Parties**
Rupiah	1.664.617	1.493.675	170.492	11,44	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	-	-	-	-	United States Dollars
Pihak Berelasi					**Related Parties**
Rupiah	5.216	9.861	(4.645)	(47,10)	Rupiah
Jumlah Tabungan *Wadiah*	**1.669.833**	**1.503.536**	**166.297**	**11,06**	**Total Wadiah Savings**
Jumlah Simpanan *Wadiah*	**1.780.006**	**1.660.211**	**119.795**	**7,22**	**Total Wadiah Deposits**

Pendanaan dari Bank Indonesia

Pendanaan dari Bank Indonesia tahun 2025 sebesar Rp401,37 miliar turun 73,29% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,50 triliun. Penurunan ini sejalan dengan upaya BRK Syariah dalam mengoptimalkan likuiditas internal serta menyelaraskan portofolio jaminan menjadi dua seri PBS dari tujuh seri PBS. BRK Syariah juga berhasil meningkatkan efisiensi biaya dana (*cost of fund*) melalui penurunan tingkat bagi hasil PBS menjadi 4,85% pada tahun 2025 dari 6,25% pada tahun 2024.

Funding from Bank Indonesia

Funding from Bank Indonesia in 2025 amounted to Rp401.37 billion, a decrease of 73.29% compared to Rp1.50 trillion in 2024. This decline is in line with BRK Syariah's efforts to optimize internal liquidity and align its collateral portfolio, transitioning from seven series of Project-Based Sukuk (PBS) to two series. Furthermore, BRK Syariah successfully enhanced its cost of fund efficiency by reducing the PBS profit-sharing rate to 4.85% in 2025, down from 6.25% in 2024.

Tabel Pendanaan dari Bank Indonesia
Table of Funding from Bank Indonesia

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Pendanaan dari Bank Indonesia	401.374	1.502.950	(1.101.576)	(73,29)	Funding from Bank Indonesia

Surat Berharga yang Diterbitkan SIMA

Surat berharga yang Diterbitkan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp600 miliar meningkat 1,69% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp590 miliar. Kondisi tersebut mencerminkan efisiensi biaya dana (*cost of fund*) yang signifikan melalui optimalisasi tingkat bagi hasil SIMA ke kisaran 4,15% hingga 4,20% pada 2025, jauh lebih rendah dibandingkan level 6,30% hingga 6,40% pada tahun 2024.

Securities Issued by SIMA

Securities issued in the form of Interbank *Mudharabah* Investment Certificates (SIMA) in 2025 were recorded at Rp600 billion, an increase of 1.69% compared to Rp590 billion in 2024. This condition reflects significant cost of fund efficiency achieved through the optimization of the SIMA profit-sharing rate to a range of 4.15% to 4.20% in 2025, substantially lower than the 6.30% to 6.40% level recorded in 2024.

Tabel Surat Berharga yang Diterbitkan SIMA
Table of Securities by SIMA

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Surat berharga yang diterbitkan SIMA	600.000	590.000	10.000	1,69	Securities Issued by SIMA

Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima tahun 2025 tercatat sebesar Rp281,47 miliar meningkat 16,46% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp241,70 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari Pinjaman KPR Sejahtera.

Borrowings

Borrowings in 2025 were recorded at Rp281.47 billion, representing an increase of 16.46% compared to Rp241.70 billion in 2024. This increase predominantly stemmed from KPR Sejahtera (Subsidized Mortgage) Loans.

Tabel Pinjaman yang Diterima
Table of Borrowings

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Pinjaman KPR Sejahtera	268.624	228.490	40.134	17,56	KPR Sejahtera Loans
Pinjaman Dana Kelolaan	12.847	13.206	(359)	(2,72)	Managed Fund Loans
Jumlah	**281.472**	**241.697**	**39.775**	**16,46**	**Total**

Utang Pajak

Utang pajak tahun 2025 tercatat sebesar Rp21,43 miliar turun 30,67% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp30,91 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari utang pajak PPh Pasal 29 yang turun sebesar Rp13,03 miliar atau 82,15% dibandingkan tahun sebelumnya.

Taxes Payable

Taxes payable in 2025 amounted to Rp21.43 billion, reflecting a decrease of 30.67% compared to Rp30.91 billion in 2024. This decline was primarily driven by Corporate Income Tax (PPh Article 29) payable, which decreased by Rp13.03 billion, or 82.15%, compared to the previous year.

Tabel Utang Pajak
Table of Taxes Payable

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
PPh Pasal 4 (2)	5.294	6.018	(724)	(12,03)	Income Tax (PPh) Article 4 (2)
PPh Pasal 21	984	525	459	87,43	Income Tax (PPh) Article 21
PPh Pasal 23	436	524	(88)	(16,79)	Income Tax (PPh) Article 23
PPh Pasal 25	11.874	7.979	3.895	48,82	Income Tax (PPh) Article 25
PPh Pasal 29	2.831	15.858	(13.027)	(82,15)	Income Tax (PPh) Article 29
PPN & PPh Lainnya	12	6	6	100,00	VAT & Other Income Taxes
Jumlah	**21.431**	**30.910**	**(9.479)**	**(30,67)**	**Total**

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja tahun 2025 sebesar Rp67,91 miliar turun 18,81% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp83,64 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak terdapat saldo imbalan penghargaan masa bakti tahun 2025, sedangkan imbalan penghargaan masa bakti tahun 2024 sebesar Rp19,65 miliar.

Employee Benefits Liabilities

Employee benefits liability in 2025 amounted to Rp67.91 billion, representing a decrease of 18.81% compared to Rp83.64 billion in 2024. This was primarily due to a zero balance for long-service awards in 2025, whereas long-service awards in 2024 amounted to Rp19.65 billion.

Tabel Liabilitas Imbalan Kerja
Table of Employee Benefits Liability

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Imbalan Kerja	42.498	36.602	5.896	16,11	Employee Benefits
Imbalan Cuti Besar	24.147	26.631	(2.484)	(9,33)	Extended Leave Benefits
Imbalan Penghargaan Masa Bakti	-	19.648	(19.648)	(100,00)	Long-Service Award Benefits
Imbalan PKWT	1.263	758	505	66,62	PKWT (Fixed-Term Contract) Benefits
Jumlah	**67.908**	**83.639**	**(15.731)**	**(18,81)**	**Total**

Liabilitas Lain-lain

Liabilitas Lain-lain tahun 2025 sebesar Rp13,26 miliar turun 81,30% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp70,91 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh Cadangan THR dan Kepegawaian Lainnya yang mengalami penurunan sebesar Rp48,82 miliar atau 92,94% dibandingkan tahun sebelumnya.

Other Liabilities

Other liabilities in 2025 amounted to Rp13.26 billion, reflecting a decrease of 81.30% compared to Rp70.91 billion in 2024. This was primarily caused by the Provision for THR (Religious Holiday Allowance) and Other Employee Benefits, which experienced a decline of Rp48.82 billion, or 92.94%, compared to the previous year.

Tabel Liabilitas Lain-Lain
Table of Other Liabilities

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Cadangan THR dan Kepegawaian Lainnya	3.711	52.531	(48.820)	(92,94)	Provision for THR and Other Employee Benefits
Setoran Jaminan	7.581	12.796	(5.215)	(40,75)	Security Deposits
Rekening Sementara	-	4.864	(4.864)	(100,00)	Suspense Accounts
Pendapatan Administrasi Pembiayaan Ditangguhkan	1.879	635	1.244	195,91	Deferred Financing Administration Income
Lain-lainnya	86	79	7	8,86	Others
Jumlah	**13.257**	**70.905**	**(57.648)**	**(81,30)**	**Total**

Dana *Syirkah* Temporer

Dana *Syirkah* Temporer yang berhasil dihimpun oleh BRK Syariah tahun 2025 tercatat sebesar Rp24,05 triliun, meningkat 5,85% dibandingkan posisi tahun 2024 yang sebesar Rp22,72 triliun. Berdasarkan struktur pendanaannya, mayoritas dana *Syirkah* temporer tahun 2025 bersumber dari pihak ketiga dengan kontribusi sebesar Rp23,97 triliun atau setara dengan 99,68% dari total dana *Syirkah* temporer BRK Syariah.

Pada dana yang bersumber dari pihak ketiga tersebut, deposito *Mudharabah* menjadi kontributor utama yang tercatat sebesar Rp14,71 triliun. Sementara itu, giro *Mudharabah* mencapai Rp2,25 triliun dan tabungan *Mudharabah* tercatat sebesar Rp7,01 triliun. Deposito *Mudharabah*, giro *Mudharabah*, dan tabungan *Mudharabah* mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,99%, 27,53% dan 6,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi tersebut mencerminkan stabilitas pendanaan dari masyarakat serta tingginya kepercayaan nasabah terhadap BRK Syariah melalui penempatan dananya pada instrumen berbasis prinsip syariah.

Selain dana yang bersumber dari pihak ketiga, BRK Syariah juga mengelola dana *Syirkah* temporer yang berasal dari bank lain sebesar Rp76,87 miliar melalui giro, tabungan, dan deposito *Mudharabah*. Meskipun kontribusinya relatif lebih kecil, dana dari perbankan tersebut turut memperkuat struktur pendanaan serta mendukung pengelolaan likuiditas BRK Syariah secara optimal.

Temporary *Syirkah* Funds

Temporary *Syirkah* Funds mobilized by BRK Syariah in 2025 were recorded at Rp24.05 trillion, representing an increase of 5.85% compared to the 2024 position of Rp22.72 trillion. Analyzing the funding structure, the majority of Temporary *Syirkah* Funds in 2025 were sourced from third parties, contributing Rp23.97 trillion, equivalent to 99.68% of BRK Syariah's total Temporary *Syirkah* Funds.

Within these third-party funds, *Mudharabah* time deposits constituted the primary contributor, recorded at Rp14.71 trillion. Meanwhile, *Mudharabah* demand deposits reached Rp2.25 trillion, and *Mudharabah* savings deposits were recorded at Rp7.01 trillion. *Mudharabah* time deposits, *Mudharabah* demand deposits, and *Mudharabah* savings deposits experienced year-on-year growth of 2.99%, 27.53%, and 6.08%, respectively. This composition reflects the stability of public funding and the high level of customer trust in BRK Syariah through the placement of their funds in Sharia-compliant instruments.

In addition to funds sourced from third parties, BRK Syariah also managed Temporary *Syirkah* Funds originating from other banks amounting to Rp76.87 billion through *Mudharabah* demand deposits, savings deposits, and time deposits. Although their relative contribution is smaller, these interbank funds further strengthen the funding structure and support the optimal liquidity management of BRK Syariah.

Tabel Dana *Syirkah* Temporer
Table of Temporary *Syirkah* Funds

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Dana *Syirkah* Temporer- Bukan Bank					**Temporary *Syirkah* Funds - Non-Bank**
Giro *Mudharabah*					***Mudharabah* Current Accounts**
Pihak Berelasi	1.051.987	480.357	571.630	119,00	Related Parties
Pihak Ketiga	1.197.521	1.283.540	(86.019)	(6,70)	Third Parties
Jumlah Giro *Mudharabah*	**2.249.508**	**1.763.897**	**485.611**	**27,53**	**Total *Mudharabah* Current Accounts**
Tabungan *Mudharabah*					***Mudharabah* Savings Accounts**
Pihak Berelasi	10.769	5.668	5.101	90,00	Related Parties
Pihak Ketiga	7.002.026	6.605.368	396.658	6,01	Third Parties
Jumlah Tabungan *Mudharabah*	**7.012.795**	**6.611.035**	**401.760**	**6,08**	**Total *Mudharabah* Savings Accounts**
Deposito *Mudharabah*					***Mudharabah* Time Deposits**
Pihak Berelasi	1.892	1.032	860	83,33	Related Parties
Pihak Ketiga	14.705.874	14.280.302	425.572	2,98	Third Parties
Jumlah Deposito *Mudharabah*	**14.707.766**	**14.281.334**	**426.432**	**2,99**	**Total *Mudharabah* Time Deposits**
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer- Bukan Bank	**23.970.069**	**22.656.267**	**1.313.802**	**5,80**	**Total Temporary *Syirkah* Funds - Non-Bank**
Dana *Syirkah* Temporer-Bank					**Temporary *Syirkah* Funds - Bank**
Giro *Mudharabah*	41.254	33.043	8.211	24,85	*Mudharabah* Current Accounts
Tabungan *Mudharabah*	33.819	25.103	8.716	34.72	*Mudharabah* Savings Accounts
Deposito *Mudharabah*	1.800	4.600	(2.800)	(60,87)	*Mudharabah* Time Deposits
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer-Bank	**76.873**	**62.746**	**14.127**	**22,51**	**Total Temporary *Syirkah* Funds - Bank**
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer	**24.046.942**	**22.719.013**	**1.327.929**	**5,85**	**Total Temporary *Syirkah* Funds**

Ekuitas

Ekuitas tahun 2025 sebesar Rp3,39 triliun turun sebesar 0,95% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,42 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh laba ditahan yang mengalami penurunan sebesar Rp77,14 miliar atau 3,39% dibandingkan tahun sebelumnya.

Equity

Total equity for the year 2025 amounted to Rp3.39 trillion, representing a decrease of 0.95% compared to the 2024 figure of Rp3.42 trillion. This decline was primarily driven by a reduction in retained earnings, which decreased by Rp77.14 billion, or 3.39%, compared to the preceding year.

Tabel Ekuitas
Table of Equity

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.209.261	1.209.261	-	-	Issued and fully paid-up capital
Tambahan Modal Disetor	2.085	2.085	-	-	Additional paid-in capital
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak	(34.099)	(40.329)	6.230	(15,45)	Remeasurement of employee benefits liabilities - net of tax
Keuntungan (Kerugian) Bersih yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar dari Efek-Efek Tersedia untuk Dijual	11.367	(27.200)	38.567	(141,79)	Net unrealized gain (loss) on changes in fair value of available-for-sale securities
Saldo Laba					**Retained Earnings**
Telah Ditentukan Penggunaannya	1.846.011	1.861.628	(15.617)	(0,84)	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	352.096	413.620	(61.524)	(14,87)	Not yet Appropriated
Jumlah Saldo Laba	**2.198.107**	**2.275.248**	**(77.141)**	**(3,39)**	**Total Retained Earnings**
Jumlah Ekuitas	**3.386.721**	**3.419.065**	**(32.344)**	**(0,95)**	**Total Equity**

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Modal ditempatkan dan disetor penuh tahun 2025 sebesar Rp1,21 triliun sama dengan tahun 2024. Modal ditempatkan dan disetor penuh terdiri dari saham seri A sebesar Rp1,20 triliun dan saham seri B sebesar Rp7 miliar.

Issued and Fully Paid-in Capital

Issued and fully paid capital for the year 2025 stood at Rp1.21 trillion, remaining unchanged from 2024. The issued and fully paid capital comprises Series A shares amounting to Rp1.20 trillion and Series B shares amounting to Rp7 billion.

Tabel Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Table of Issued and Fully Paid-in Capital

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Saham Seri A	1.202.261	1.202.261	-	-	Series A Shares
Saham Seri B	7.000	7.000	-	-	Series B Shares
Jumlah	**1.209.261**	**1.209.261**	**-**	**-**	**Total**

Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor tahun 2025 sebesar Rp2,09 miliar sama dengan tahun 2024.

Additional Paid-in Capital

Additional paid-in capital for the year 2025 amounted to Rp2.09 billion, remaining equivalent to the 2024 figure.

Tabel Tambahan Modal Disetor
Table of Additional Paid-in Capital

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Dana Setoran Modal	2.085	2.085	-	-	Capital Contribution Fund
Jumlah	**2.085**	**2.085**	**-**	**-**	**Total**

Saldo Laba

Saldo Laba tahun 2025 sebesar Rp2,20 triliun turun 3,39% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,23 triliun. Hal tersebut terutama berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang mengalami penurunan sebesar Rp61,52 miliar atau 14,87% dibandingkan tahun sebelumnya.

Retained Earnings

Retained earnings for the year 2025 amounted to Rp2.20 trillion, reflecting a 3.39% decrease compared to the 2024 figure of Rp2.23 trillion. This contraction was predominantly attributable to unappropriated retained earnings, which experienced a reduction of Rp61.52 billion, or 14.87%, compared to the preceding year.

Tabel Saldo Laba
Table of Retained Earnings

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Telah Ditentukan Penggunaannya	1.846.011	1.861.628	(15.617)	(0,84)	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	352.096	413.620	(61.524)	(14,87)	Unappropriated
Jumlah Saldo Laba	**2.198.107**	**2.275.248**	**(77.141)**	**(3,39)**	**Retained Earnings Amount**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Tabel Laba Rugi
Table of Profit or Loss

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*	2.497.350	2.331.168	166.182	7.13	Income from Fund Management by the Bank as *Mudharib*
Hak Pihak Ketiga atas bagi hasil	983.292	926.717	56.575	6,10	Third parties' share in profit distribution
Hak bagi hasil milik Bank	1.514.058	1.404.450	109.608	7,80	Bank's share in income from fund management
Pendapatan Usaha Lainnya	118.042	127.127	(9.085)	(7,15)	Other Operating Income
Beban Usaha	1.147.509	1.057.807	89.702	8,48	Operating Expenses
Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Non Produktif - Bersih	(85.556)	(23.190)	62.366	268,93	Recovery of allowance for impairment losses on productive and non-productive assets - net
Laba Usaha	399.034	450.580	(51.546)	(11,44)	Operating Profit
Pendapatan (Beban) Non Usaha – Bersih	(29.521)	(26.957)	(2.561)	9,51	Non-Operating Income (Expenses) – net
Laba Sebelum Pajak	369.513	423.623	(54.110)	(12,77)	Profit Before Tax
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(93.082)	(84.249)	(8.833)	10,48	Income Tax Expense - net
Laba Setelah Pajak	276.432	339.374	(62.942)	(18,55)	Profit After Tax
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain-Bersih Setelah Pajak	44.797	18.312	26.485	144,63	Other Comprehensive Income (Loss) - net of tax
Laba Komprehensif	321.229	357.686	(36.457)	(10,19)	Comprehensive Income
Laba Per Saham Dasar	22.860	28.089	(5.229)	(18,62)	Basic Earnings Per Share

Pendapatan Pengelolaan Dana

BRK Syariah berhasil membukukan pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* tahun 2025 sebesar Rp2,50 triliun meningkat 7,13% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2,33 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan dari bagi hasil yang meningkat sebesar Rp296,35 miliar atau 44,32% dibandingkan tahun sebelumnya.

Fund Management Income

BRK Syariah successfully recorded income from fund management as a *mudharib* for the year 2025 amounting to Rp2.50 trillion, representing an increase of 7.13% compared to the 2024 figure of Rp2.33 trillion. This increment was primarily driven by income from profit-sharing, which surged by Rp296.35 billion, or 44.32%, compared to the preceding year.

Tabel Pendapatan Pengelolaan Dana
Table of Fund Management Income

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Pendapatan dari Jual Beli	1.124.079	1.324.668	(200.589)	(15,14)	Income from Sale and Purchase
Pendapatan dari Bagi Hasil	964.976	668.624	296.352	44,32	Income from Profit Sharing
Pendapatan dari *Ijarah* - Neto	20.240	17.236	3.004	17.43	Income from *Ijarah* - Net
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	388.056	320.640	67.416	21,03	Other Main Business Income
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*	**2.497.350**	**2.331.168**	**166.182**	**7,13**	**Total Income from Fund Management by Bank as *Mudharib***

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil

Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *Mudharabah mutlaqah* atas pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pada tahun 2025 hak pihak ketiga atas bagi hasil

Third-Party Rights over Profit Sharing

The third parties' share of returns represents the portion of profit sharing attributable to third parties based on the *Mudharabah mutlaqah* principle for the Bank's management of their funds. In 2025, the third parties' share of returns

sebesar Rp983,29 miliar meningkat 6,10% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp926,72 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan bagi hasil milik pihak ketiga atas surat berharga sebesar Rp19,39 miliar atau 164,79% dibandingkan tahun sebelumnya.

amounted to Rp983.29 billion, marking a 6.10% increase from the 2024 figure of Rp926.72 billion. This increase was predominantly influenced by the rise in the third parties' share of returns on marketable securities, which grew by Rp19.39 billion, or 164.79%, compared to the previous year.

Tabel Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil
Table of Third-Party Rights over Profit Sharing

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Deposito *mudharabah*	847.478	824.312	23.166	2,81	*Mudharabah* time deposits
Giro *mudharabah*	43.231	37.252	5.979	16,05	*Mudharabah* demand deposits
Tabungan *mudharabah*	60.028	52.198	7.830	15,00	*Mudharabah* savings deposits
Surat Berharga	31.163	11.769	19.394	164,79	Marketable securities
Pinjaman Diterima	1.394	1.186	208	17,54	Borrowings received
Jumlah Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil	**983.292**	**926.717**	**56.575**	**6,10**	**Total Third-Party Rights over Profit Sharing**

Hak Bagi Hasil Milik Bank

Pada tahun 2025 hak bagi hasil milik bank tercatat sebesar Rp1,51 triliun meningkat 7,80% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,40 triliun.

Bank's Rights over Profit Sharing

In 2025, the Bank's share of returns was recorded at Rp1.51 trillion, reflecting a 7.80% increase compared to the 2024 figure of Rp1.40 trillion.

Tabel Hak Bagi Hasil Milik Bank
Table of Bank's Rights over Profit Sharing

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Hak Bagi Hasil Milik Bank	1.514.058	1.404.450	109.608	7,80	Bank's Profit Sharing Rights

Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya berasal dari pendapatan imbalan jasa perbankan dan pendapatan lainnya. Pendapatan usaha lainnya tahun 2025 sebesar Rp118,04 miliar turun 7,15% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp127,13 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh pendapatan imbalan jasa perbankan yang mengalami penurunan sebesar Rp10,53 miliar atau 8,70% dibandingkan tahun sebelumnya.

Other Operating Income

Other operating income is derived from banking service fee income and other income. Other operating income for the year 2025 amounted to Rp118.04 billion, representing a decline of 7.15% compared to the 2024 figure of Rp127.13 billion. This was primarily driven by banking service fee income, which experienced a decrease of Rp10.53 billion, or 8.70%, compared to the preceding yea

Tabel Pendapatan Usaha Lainnya
Table of Other Operating Income

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan	110.512	121.049	(10.537)	(8,70)	Fee Based Income From Banking
Pendapatan lainnya	7.530	6.078	1.452	23,89	Other Income
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	**118.042**	**127.127**	**(9.085)**	**(7,15)**	**Total Other Operating Income**

Beban Usaha

Beban usaha meliputi beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, bonus *Wadiah*, dan beban usaha lainnya. Beban usaha tahun 2025 sebesar Rp1,15 triliun meningkat 8,48% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,06 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp45,62 miliar atau 11,29% dibandingkan tahun sebelumnya.

Operating Expenses

Operating expenses comprise personnel expenses, general and administrative expenses, *Wadiah* bonuses, and other operating expenses. Operating expenses for the year 2025 amounted to Rp1.15 trillion, representing an 8.48% increase compared to the 2024 figure of Rp1.06 trillion. This increase was primarily driven by a rise in general and administrative expenses amounting to Rp45.62 billion, or 11.29%, compared to the previous year.

Tabel Beban Usaha
Table of Operating Expenses

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Beban Tenaga Kerja	674.649	632.851	41.798	6,60	Personnel Expenses
Beban Umum dan Administrasi	449.655	404.032	45.623	11,29	General and Administrative Expenses
Bonus *wadiah*	90	134	(44)	(32,84)	*Wadiah* bonus
Beban usaha lainnya	23.115	20.790	2.325	11,18	Others operating expenses
Jumlah Beban Usaha	**1.147.509**	**1.057.807**	**89.702**	**8,48**	**Total Operating Expense**

Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif tahun 2025 sebesar Rp85,56 miliar meningkat 268,93% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp23,19 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) piutang dan pembiayaan sebesar Rp61,48 miliar atau 141,45% dibandingkan tahun sebelumnya.

Provision for Impairment Losses Expense

The provision for impairment losses on earning assets for the year 2025 amounted to Rp85.56 billion, surging by 268.93% compared to the 2024 figure of Rp23.19 billion. This increase stemmed from a rise in the provision for impairment losses (CKPN) on receivables and financing by Rp61.48 billion, or 141.45%, compared to the preceding year.

Tabel Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Table of Provision for Impairment Losses Expense

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Beban CKPN - Piutang dan Pembiayaan	104.936	43.461	61.475	141,45	Provision for Impairment Losses - Receivables and Financing
Beban CKPN - Penyertaan	1.155	-	1.155	100,00	Provision for Impairment Losses - Investments
Pemulihan CKPN	(20.535)	(20.271)	264	1,30	Reversal of Impairment Losses
Jumlah Beban CKPN	**85.556**	**23.190**	**62.366**	**268,93**	**Total Provision for Impairment Losses**

Laba Usaha

Laba usaha tahun 2025 sebesar Rp399,03 miliar turun sebesar 11,44% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp450,58 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban usaha dan beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif masing-masing sebesar 8.48% dan 268,93% dibandingkan tahun sebelumnya.

Operating Profit

Operating profit for the year 2025 stood at Rp399.03 billion, reflecting a decline of 11.44% compared to the 2024 figure of Rp450.58 billion. This was primarily attributable to the increase in operating expenses and the provision for impairment losses on earning assets by 8.48% and 268.93%, respectively, compared to the previous year.

Tabel Laba Usaha
Table of Operating Profit

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Laba Usaha	399.034	450.580	(51.546)	(11,44)	Operating Profit

Pendapatan (Beban) Non Usaha

Pendapatan Non usaha berasal dari pendapatan keuntungan penjualan aset tetap dan pendapatan lainnya. Sedangkan beban non usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk iuran keanggotaan, denda yang dibayarkan dan beban lainnya. Pendapatan Non usaha tahun 2025 sebesar Rp10,03 miliar meningkat sebesar Rp2,03 miliar atau 25,39% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8 miliar. Sementara itu, beban non usaha tahun 2025 sebesar Rp39,55 miliar meningkat sebesar Rp2,39 miliar atau 13,28% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp39,95 miliar. Oleh karena itu, pendapatan dan (beban) non usaha tahun 2025 sebesar Rp29,52 miliar meningkat Rp2,56 miliar atau 9,51% dari tahun sebelumnya sebesar Rp26,96 miliar.

Non-Operating Income (Expense)

Non-operating income is derived from gains on the sale of fixed assets and other income. Conversely, non-operating expenses consist of costs incurred for membership dues, penalties paid, and other expenses. Non-operating income for the year 2025 amounted to Rp10.03 billion, an increase of Rp2.03 billion, or 25.39%, compared to the 2024 figure of Rp8.00 billion. Meanwhile, non-operating expenses in 2025 stood at Rp39.55 billion, an increase of Rp2.39 billion, or 13.28%, from the previous year's figure of Rp37.16 billion. Consequently, net non-operating income (expense) for 2025 resulted in an expense of Rp29.52 billion, which increased by Rp2.56 billion, or 9.51%, from the preceding year's expense of Rp26.96 billion.

Tabel Pendapatan (Beban) Non Usaha
Table of Non-Operating Income (Expenses)

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Pendapatan					Income
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	-	58	(58)	(100,00)	Gain on Sale of Fixed Assets
Lain-Lain	10.026	7.938	2.088	26,30	Others
Jumlah	10.026	7.996	2.030	25,39	Total
Beban					Expenses
Iuran keanggotaan	15.976	13.602	2.374	17,45	Membership Fees
Kegiatan Sosial	3.176	3.347	(171)	(5,11)	Social Activities
Lain-Lain	20.395	18.004	2.391	13,28	Others
Jumlah	39.547	34.953	4.594	13,14	Total
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Usaha-Bersih	**(29.521)**	**(26.957)**	**2.564**	**9,51**	Total Non-Operating Income (Expenses)-Net

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak tahun 2025 sebesar Rp369,51 miliar turun 12,77% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp423,62 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan terhadap beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif yang meningkat sebesar Rp62,37 miliar atau 268,93% dibandingkan sebelumnya.

Profit Before Tax

Profit before tax for the year 2025 amounted to Rp369.51 billion, a decline of 12.77% compared to the 2024 figure of Rp423.62 billion. This was impacted by the increase in the provision for impairment losses on earning and non-earning assets, which surged by Rp62.37 billion, or 268.93%, compared to the previous period.

Tabel Laba Sebelum Pajak
Table of Profit before tax

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Laba Sebelum Pajak	369.513	423.623	(54.110)	(12,77)	Profit before tax

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan tahun 2025 sebesar Rp93,08 miliar meningkat 10,48% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp84,25 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan manfaat pajak tangguhan yang signifikan sebesar 91,33%, meskipun di sisi lain Bank berhasil mencatatkan efisiensi pada beban Pajak Kini yang turun sebesar 6,79% menjadi Rp93,21 miliar.

Income Tax Expense

Income tax expense for the year 2025 amounted to Rp93.08 billion, representing a 10.48% increase compared to the 2024 figure of Rp84.25 billion. This rise was primarily driven by a significant 91.33% decline in deferred tax benefits, despite the Bank successfully recording efficiencies in current tax expense, which decreased by 6.79% to Rp93.21 billion.

Tabel Beban Pajak Penghasilan
Table of Income Tax Expense

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Pajak Kini	(93.208)	(99.994)	(6.786)	(6,79)	Current Tax
Penyesuaian Pajak Tahun Lalu	(3.597)	(27.220)	(23.623)	(86,79)	Prior Year Tax Adjustments
Pajak Tangguhan	3.723	42.965	(39.242)	(91,33)	Deferred Tax
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**(93.082)**	**(84.249)**	**8.833**	**10,48**	**Total Income Tax Expense**

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba bersih tahun berjalan tahun 2025 sebesar Rp276,43 miliar turun 18,55% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp339,37 miliar.

Net Profit for the Year

Net profit for the current year in 2025 stood at Rp276.43 billion, reflecting a decrease of 18.55% compared to the 2024 figure of Rp339.37 billion.

Tabel Laba Bersih Tahun Berjalan
Table of Net Profit for the Year

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Laba Bersih Tahun Berjalan	276.432	339.374	(62.942)	(18,55)	Table of Net Profit for the Year

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lainnya

BRK Syariah mencatatkan jumlah rugi komprehensif lain bersih sebesar Rp44,80 miliar pada tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp18,31 miliar. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kerugian yang belum direalisasikan atas surat berharga, tetapi terdapat perbaikan pada pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja yang mencatatkan nilai positif sebesar Rp7,99 miliar pada tahun 2025.

Other Comprehensive Income (Loss)

BRK Syariah recorded a net other comprehensive loss of Rp44.80 billion for the year 2025, an increase compared to the 2024 figure of Rp18.31 billion. This was primarily driven by unrealized losses on marketable securities, although there was an improvement in the remeasurement of employee benefits liabilities, which recorded a positive value of Rp7.99 billion in 2025.

Tabel Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lainnya
Table of Other Comprehensive Income (Loss)

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	7.987	(12.486)	20.473	163,97	Remeasurement of employee benefits liabilities
Pajak penghasilan terkait	(1.757)	2.747	(4.504)	(163,96)	Related income tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					Items that may be reclassified subsequently to profit or loss
Kerugian yang Belum Direalisasikan atas Surat Berharga dalam Kelompok Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain	49.446	35.963	13.483	37,49	Unrealized Losses on Securities Classified as Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income
Pajak penghasilan terkait	(10.878)	(7.912)	(2.966)	(37,49)	Related income tax
Jumlah Rugi Komprehensif Lain – bersih setelah pajak	**44.797**	**18.312**	**26.485**	**144,63**	Total Other Comprehensive Loss - Net of Tax

Laba Komprehensif

Laba komprehensif tahun berjalan tahun 2025 sebesar Rp321,23 miliar turun sebesar 10,19% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp357,69 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban usaha dan beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif masing-masing sebesar 8.48% dan 268,93%.

Comprehensive Income

Comprehensive income for the current year of 2025 amounted to Rp321.23 billion, representing a 10.19% decrease compared to the 2024 figure of Rp357.69 billion. This decline was primarily attributable to the increase in operating expenses and the provision for impairment losses on earning assets by 8.48% and 268.93%, respectively.

Tabel Laba Komprehensif
Table of Comprehensive Income

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Laba Komprehensif	321.229	357.686	(36.457)	(10,19)	Comprehensive Income

Laba Per Saham

Laba per saham tahun 2025 sebesar Rp22.860 turun 18,62% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp28.089.

Earnings Per Share

Earnings per share for the year 2025 stood at Rp22,860, reflecting an 18.62% decrease compared to the 2024 figure of Rp28,089.

Tabel Laba Per Saham
Table of Earnings Per Share

(Dalam Rupiah)| (In rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Laba Per Saham Dasar	22.860	28.089	(5.229)	(18,62)	Basic Earning Per Share

Laporan Arus Kas

Kas dan setara kas akhir tahun 2025 meningkat 12,77% menjadi Rp3,61 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,61 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2025 sebesar Rp790,67 miliar.

Statement of Cash Flows

Cash and cash equivalents at the end of 2025 increased by 12.77% to Rp4.07 trillion compared to the 2024 figure of Rp3.61 trillion. This increase was primarily driven by net cash provided by operating activities in 2025, which amounted to Rp790.67 billion.

Tabel Arus Kas
Table of Cash Flows

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	790.669	(1.096.297)	1.886.966	(172,12)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(22.034)	(65.097)	43.063	(66,15)	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(307.568)	(328.283)	20.715	(6,31)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan setara Kas	461.067	(1.489.677)	1.950.744	(130,95)	Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas dan setara Kas Awal Periode	3.611.856	5.101.533	(1.489.677)	(29,20)	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Period
Kas dan setara Kas Akhir Periode	4.072.923	3.611.856	461.067	12,77	Cash and Cash Equivalents at End of the Period

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2025 sebesar Rp790,67 miliar, sedangkan tahun 2024 kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp1.096 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh penerimaan jual beli, bagi hasil, *ijarah* dan usaha utama lainnya yang meningkat sebesar Rp94,94 miliar atau 3,99% dibandingkan tahun sebelumnya.

Cash Flows from Operating Activities

Net cash provided by operating activities for the year 2025 amounted to Rp790.67 billion, whereas in 2024, net cash used in operating activities stood at Rp1.09 trillion. This positive shift was influenced by receipts from sales and purchases, profit sharing, *Ijarah*, and other main operations, which increased by Rp94.94 billion, or 3.99%, compared to the preceding year.

Tabel Arus Kas Bersih Dihasilkan dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi
Table of Net Cash Generated from (Used in) Operating Activities

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Penerimaan jual beli, bagi hasil, *Ijarah* dan Usaha Utama Lainnya	2.473.325	2.378.382	94.943	3,99	Receipts from sales and purchases, profit sharing, *Ijarah*, and Other Main Operations
Pembayaran Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer	(976.316)	(936.021)	(40.295)	4,30	Payments of Profit Sharing on Temporary *Syirkah* Funds
Penerimaan dari Pembiayaan dan Piutang Yang Dihapusbukukan	6.180	5.147	1.033	20,07	Receipts from Written-Off Financing and Receivables
Penerimaan Pendapatan Usaha Lainnya	111.862	121.980	(10.118)	(8,29)	Receipts of Other Operating Income
Pembayaran Tantiem	-	-	-	-	Payments of Tantiem (Directors/Commissioners Bonus)
Pembayaran Beban Usaha	(1.244.968)	(855.408)	(389.560)	45,54	Payments of Operating Expenses
Penerimaan atas Pendapatan Non-Usaha Bersih	(29.521)	(26.957)	(2.564)	9,51	Receipts of Net Non-Operating Income
Pembayaran Pajak Penghasilan	(96.805)	(127.214)	30.409	(23,90)	Payments of Income Tax
Pembayaran Zakat	(1)	(1)	-	--	Payments of Zakat
Penyaluran Dana Kebajikan	(3.077)	(2.953)	(12)	4,20	Disbursement of Qardhul Hasan funds
Arus Kas Sebelum Perubahan Aset Operasi dan Liabilitas Operasi	240.679	556.954	(316.275)	(56,79)	Cash Flows Before Changes in Operating Assets and Operating Liabilities
(Kenaikan) Penurunan Aset Operasi					**(Increase) Decrease in Operating Assets**
Surat Berharga	203.446	(1.435.589)	1.639.035	(114,17)	Securities
Piutang	2.415.413	1.910.971	504.442	26,40	Receivables
Piutang *Qardh*	(122.531)	(38.934)	(83.597)	214,71	*Qardh* Receivables
Pembiayaan	(2.540.701)	(3.382.631)	841.930	(24,89)	Financing
Aset *Ijarah*	68.013	81.456	(13.443)	(16,50)	*Ijarah* Assets
Aset Lain-lain -Bersih	249.224	(272.580)	521.804	(191,43)	Other Assets - Net

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
(Kenaikan) Penurunan Liabilitas Operasi					**(Increase) Decrease in Operating Liabilities**
Simpanan *Mudharabah*	1.313.802	750.399	563.403	75,08	*Mudharabah* Deposits
Simpanan *Wadiah*	119.795	75.056	44.738	59,61	*Wadiah* Deposits
Simpanan Bank	14.127	(13.808)	27.935	(202,31)	Bank Deposits
Liabilitas Segera	2.058	(643.937)	645.995	(100,32)	Immediate Liabilities
Bagi Hasil Yang Belum dibagikan	(13.953)	18.607	(32.560)	(174,99)	Undistributed Profit Sharing
Pendanaan dari Bank Indonesia (PaSBI)	(1.101.577)	922.825	(2.024.402)	(219,37)	Funding from Bank Indonesia (PaSBI)
Surat berharga yang diterbitkan SIMA	10.000	365.000	(355.000)	(97,26)	Securities Issued by SIMA
Utang Pajak	(9.479)	20.904	(30.383)	(145,35)	Taxes Payable
Liabilitas Lain-lain	(57.648)	(10.991)	(46.657)	424,50	Other Liabilities
Jumlah	549.990	(1.653.251)	2.203.241	(133,27)	Total
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	**790.669**	**(1.096.297)**	**1.886.966**	**(172,12)**	**Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities**

Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk ativitas investasi tahun 2025 sebesar Rp22,03 miliar turun 66,15% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp65,10 miliar.

Cash Flows from Investing Activities

Net cash used in investing activities for the year 2025 amounted to Rp22.03 billion, representing a decrease of 66.15% compared to the 2024 figure of Rp65.10 billion.

Tabel Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi
Table of Net Cash Used in Investing Activities

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Pembelian Aset Tetap	(22.034)	(65.097)	43.063	(66,15)	Purchases of Fixed Assets
Penjualan Aset Tetap	-	-	-	-	Sales of Fixed Assets
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	**(22.034)**	**(65.097)**	**43.063**	**(66,15)**	**Net Cash Used in Investing Activities**

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2025 kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp307,57 miliar turun 6,31% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp328,28 miliar.

Cash Flows from Financing Activities

In 2025, net cash used in financing activities amounted to Rp307.57 billion, reflecting a decrease of 6.31% compared to the 2024 figure of Rp328.28 billion.

Tabel Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan
Table of Net Cash from Financing Activities

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Pinjaman yang Diterima	39.775	5.496	34.279	623,71	Borrowings
Pembayaran Dividen	(229.077)	(191.548)	(37.529)	19,59	Payments of Dividends
Penggunaan laba untuk cadangan umum	(93.328)	(78.038)	(15.290)	19,59	Appropriation of retained earnings for general reserves
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(16.969)	(14.189)	(2.780)	19,59	Partnership and Community Development Program

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Pembentukan Cadangan	93.328	78.038	15.290	19,59	Formation of Reserves
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak	6.230	(40.329)	46.559	(115,45)	Remeasurement of employee benefits liabilities - net of tax
Penyelesaian selisih Yadit Pembiayaan	(87.733)	(87.733)	-	-	Settlement of Financing Yadit differences
Modal DIsetor	1.419	2.100	(681)	(32,43)	Paid-in Capital
Tambahan Modal Disetor	(21.213)	(2.080)	(19.133)	919,86	Additional Paid-in Capital
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**(307.568)**	**(328.283)**	**20.715**	**(6,31)**	**Net Cash Used in Financing Activities**

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank Syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Statement of Reconciliation of Income and Profit Sharing

The statement of reconciliation of income and profit sharing serves as a reconciliation between the Sharia Bank's income prepared on an accrual basis and the income shared with fund owners prepared on a cash basis.

Tabel Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Bagi Hasil
Table of Reconciliation of Income for Profit Sharing

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Pendapatan pengelola dana sebagai *Mudharib* Utama	2.497.350	2.331.168	166.182	7,13	Income from fund management as Main *Mudharib*
Pengurangan:					**Deductions:**
Pendapatan tahun berjalan, yang kas atau setara kasnya belum diterima:					Current year income, for which cash or cash equivalents have not been received:
Pendapatan jual beli dan bagi hasil	(167.128)	(163.230)	3.898	2,39	Income from sales and purchases and profit sharing
Pendapatan bagi hasil		-			Income from profit sharing
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal	(104.553)	(84.426)	20.127	23,84	Amortization income from the difference between the acquisition cost of marketable securities and their nominal value
Pendapatan dari *ijarah* – bersih	(257)	(333)	76	(22,82)	Income from *ijarah* - net
Pendapatan usaha utama lainnya	(88.310)	(92.375)	4.065	(4,40)	Other main operating income
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	2.137.103	1.990.804	146.299	7,35	Income available for profit sharing
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	1.153.810	1.064.086	89.724	8,43	Bank's share of returns
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	983.292	926.717	56.575	6,10	Third parties' share of returns
Dirinci atas:					**Detailed as follows:**
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	947.624	884.072	63.552	7,19	Fund owners' share of returns that has been distributed
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	35.669	42.645	(6.976)	(16,36)	Fund owners' share of returns that has not been distributed
Jumlah	983.292	926.717	56.575	6,10	Total

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Sumber dana zakat BRK Syariah berasal dari internal dan eksternal Bank, yang berasal dari pegawai serta nasabah dan umum. Dana zakat yang terkumpul akan disalurkan kepada para mustahik zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) agar penyaluran zakat dilakukan dengan tepat sasaran.

Pada tahun 2025 BRK Syariah menghimpun penerimaan zakat sebesar Rp817 juta meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp624 juta yang dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan zakat eksternal. Selanjutnya, dana zakat disalurkan ke lembaga amil zakat, sehingga saldo akhir dana zakat tahun 2025 sebesar Rp1 juta.

Statement of Sources and Uses of Zakat Funds

The sources of BRK Syariah's zakat funds are derived from both internal and external to the Bank, originating from employees as well as customers and the general public. The collected zakat funds are distributed to eligible recipients (mustahik) through Amil Zakat Institutions (LAZ) and the Amil Zakat Agency (BAZ) to ensure targeted and appropriate distribution.

In 2025, BRK Syariah mobilized zakat receipts amounting to Rp817 million, representing an increase compared to the 2024 figure of Rp624 million, driven by an upsurge in external zakat receipts. Subsequently, the zakat funds were disbursed to amil zakat institutions, resulting in an ending balance of zakat funds for the year 2025 of Rp1 million.

Tabel Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Table of Sources and Uses of Zakat Funds

(Dalam Rupiah)| (In rupiah)

Uraian	2025	2024	Explanation
Sumber Dana Zakat			**Sources of Zakat Funds**
Internal Bank	-	-	Internal to the Bank
Eksternal Bank	817.082.651	624.480.899	External to the Bank
Jumlah	817.082.651	624.480.899	Total
Penyaluran Dana Zakat			**Uses of Zakat Funds**
Disalurkan ke lembaga amil zakat	(815.954.056)	(623.486.380)	Disbursed to amil zakat institutions
Saldo Akhir Dana Zakat	1.128.595	994.519	Ending Balance of Zakat Funds

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Dana Kebajikan adalah dana yang didapat dari dana sumbangan baik dari internal maupun eksternal. Dana yang berasal dari internal berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non-halal. Sedangkan dana yang berasal dari eksternal berupa *infaq* dan *shadaqah* dari nasabah. Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad *qardh* dan *hasan* dimana kedua akad ini disalurkan dengan tujuan sosial.

Selama tahun 2025, BRK Syariah menerima dana kebajikan sebesar Rp646.247.077. Dana kebajikan tersebut disalurkan dalam bentuk sumbangan sebesar Rp522.049.500, sehingga saldo akhir dana kebajikan tahun 2025 sebesar Rp3.077.233.778. Berikut tabel pengelolaan dana kebajikan dalam dua tahun terakhir.

Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds

Qardhul Hasan funds comprise donation funds obtained from both internal and external sources. Internally sourced funds consist of returns on productive Qardhul Hasan funds, penalties, and non-halal income. Conversely, externally sourced funds comprise *infaq* and *shadaqah* from customers. Qardhul Hasan funds are disbursed through *Qardh* and hasan contracts, both of which are executed for social purposes.

During the year 2025, BRK Syariah received qardhul hasan funds amounting to Rp646,247,077. These qardhul hasan funds were disbursed in the form of donations amounting to Rp522,049,500, resulting in an ending balance of qardhul hasan funds for the year 2025 of Rp3,077,233,778. The following table presents the management of qardhul hasan funds over the past two years.

Tabel Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Table of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds

(Dalam Rupiah)| (In rupiah)

Uraian	2025	2024	Explanation
Sumber dana kebajikan			**Sources of Qardhul Hasan Funds**
Infaq dan *shadaqah*	292.397	276.482	Infaq and shadaqah
Denda	379.506.680	603.647.299	Fines
Pendapatan nonhalal	211.956.718	75.282.588	Non-halal income
Sumbangan/hibah	-	-	Donations/grants
Lainnya	54.491.282	561.488.332	Others
Jumlah	646.247.077	1.240.694.701	Total
Penggunaan Dana Kebajikan			**Uses of Qardhul Hasan Funds**
Sumbangan	(522.049.500)	(150.000.000)	Donations
(Penurunan)/Kenaikan Dana Kebajikan	124.197.577	1.090.694.701	(Decrease)/Increase in Qardhul Hasan Funds
Saldo awal dana kebajikan	2.953.036.201	1.862.341.500	Beginning balance of Qardhul Hasan Funds
Saldo akhir dana kebajikan	3.077.233.778	2.953.036.201	Ending balance of Qardhul Hasan Funds

Laporan Distribusi Bagi Hasil Penghimpunan Dana

Berikut adalah laporan distribusi bagi hasil pengimpunan dana BRK Syariah dalam dua tahun terakhir.

Statement of Profit Sharing Distribution for Fund Accumulation

The following is the profit sharing distribution report for BRK Syariah's fund accumulation over the past two years.

Tabel Laporan Distribusi Bagi Hasil Penghimpunan Dana
Table of Profit Sharing Distribution for Fund Accumulation

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

No.	Jenis Penghimpunan Dana Types of Funding	2025					2024				
		Saldo Rata-rata Average Balance	Pendapatan yang akan Dibagihasilkan Distributable Income	Porsi Pemilik Dana Fund Owner's Portion			Saldo Rata-rata Average Balance	Pendapatan yang akan Dibagihasilkan Distributable Income	Porsi Pemilik Dana Fund Owner's Portion		
				Nisbah (%) Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil Profit Sharing Amount	Indikasi Rate of Return (%) Indicative Rate of Return (%)			Nisbah (%) Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil Profit Sharing Amount	Indikasi Rate of Return (%) Indicative Rate of Return (%)
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	Liabilitas kepada Bank Lain Liabilities to other Banks	75.666	589	11,48	68	1,08	65.213	540	11,71	63	1,16
2	Giro *Mudharabah* *Mudharabah* Current Accounts	3.601.086	28.021	10,00	2.802	0,93	3.046.182	25.240	10,00	2.524	0,99
3	Tabungan *Mudharabah* *Mudharabah* Savings Accounts	6.898.849	53.683	11,00	5.905	1,03	6.469.665	53.606	11,00	5.897	1,09
4	**Deposito *Mudharabah*** ***Mudharabah Time Deposits***										
	- 1 Bulan | 1 Month	3.106.481	24.173	33,00	7.977	3,08	3.797.229	31.463	33,00	10.383	3,28
	- 3 Bulan | 3 Months	7.496.892	58.336	31,00	18.084	2,89	7.604.939	63.013	31,00	19.534	3,08
	- 6 Bulan | 6 Months	2.910.005	22.644	31,00	7.020	2,89	2.057.142	17.045	31,00	5.284	3,08
	- 12 Bulan | 12 Months	440.065	3.424	31,00	1.061	2,89	1.765.538	14.629	31,00	4.535	3,08
5	Surat Berharga yang Diterbitkan Securities Issued	19.355	151	-	-	-	109.032	903	-	-	-
6	Pembiayaan yang Diterima Financing Received	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah | Total	**24.548.399**	**191.021**		**42.917**		**24.914.940**	**206.439**		**48.220**	

Laporan Distribusi Bagi Hasil Penyaluran Dana

Berikut adalah laporan distribusi bagi hasil penyaluran dana BRK Syariah dalam dua tahun terakhir.

Statement of Profit Sharing Distribution for Fund Disbursement

The following is the profit sharing distribution report for BRK Syariah's fund disbursement over the past two years.

Tabel Laporan Distribusi Bagi Hasil Penyaluran Dana
Table of Profit Sharing Distribution for Fund Disbursement

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

No.	Jenis Penghimpunan Dana	2025		2024		Types of Funding
		Saldo Rata-rata Average Balance	Pendapatan yang Diterima Earned Income	Saldo Rata-rata Average Balance	Pendapatan yang Diterima Earned Income	
		A	B	A	B	
1	Penempatan pada Bank Lain	2.127.259	7.547	2.715.732	14.159	Placements with Other Banks
2	Surat Berharga yang Dimiliki	5.349.630	20.610	3.351.129	18.624	Securities Held
3	Piutang *Murabahah*	10.443.537	120.671	12.863.837	121.117	*Murabahah* Receivables
4	Piutang *Istishna*	-	-	-	-	*Istishna* Receivables
5	Piutang Multijasa	-	-	-	-	Multijasa Receivables
6	Pembiayaan Gadai	212.457	1.977	99.155	891	Pawn Financing
7	Pembiayaan *Mudharabah*	-	-	1.921	12	*Mudharabah* Financing
8	Pembiayaan *Musyarakah*	10.938.695	75.301	8.287.314	70.969	*Musyarakah* Financing
9	Pembiayaan Sewa	175.107	1.486	243.747	2.621	Lease Financing
10	Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	Other Financing
Jumlah		**29.246.685**	**227.592**	**27.562.835**	**228.393**	**Total**

PENGUATAN EKOSISTEM DIGITAL MELALUI LAYANAN *MOBILE BANKING* DAN QRIS

STRENGTHENING THE DIGITAL ECOSYSTEM THROUGH MOBILE BANKING AND QRIS SERVICES

BRK Syariah melaksanakan penguatan ekosistem digital terutama pada layanan *mobile banking* dan QRIS sebagai kanal dengan jangkauan luas serta sarana utama dalam berbagai layanan dan transaksi digital. Melalui peran tersebut, kedua layanan ini tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan secara berkelanjutan.

BRK Syariah is strengthening its digital ecosystem, primarily focusing on mobile banking and QRIS services as expansive channels and primary instruments for various digital services and transactions. Through this role, both services not only support operational efficiency but also sustainably expand access to financial services.

Layanan *Mobile Banking*

Sejalan dengan strategi transformasi digital BRK Syariah, pada tahun 2025 layanan BRKS *Mobile* diperkuat melalui pengembangan kapabilitas aplikasi, peningkatan stabilitas layanan, serta penyempurnaan fitur transaksi. Upaya tersebut mendorong peningkatan penggunaan kanal digital dan tercermin pada kinerja BRKS *Mobile* yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dan berkelanjutan.

Mobile Banking Services

In line with BRK Syariah's digital transformation strategy, in 2025, BRKS Mobile services were enhanced through application capability development, service stability improvement, and transaction feature refinement. These efforts drove an increase in the utilization of digital channels, reflected in the performance of BRKS Mobile, which demonstrated significant and sustainable growth.

Tabel Kinerja BRKS Mobile
BRKS Mobile Performance Table

No	Kinerja BRKS mobile	2025	2024	Capaian (%) Growth (%)	BRKS Mobile Performance
1	Jumlah pengguna	368.997	277.525	32,96	Number of users
2	Volume Transaksi (dalam juta)	21,2	15,2	39,47	Transaction Volume (in millions)
3	Nominal Transaksi (dalam triliun rupiah)	25,4	21,4	18,69	Transaction Value (in trillions rupiah)

Jumlah pengguna BRKS *Mobile* pada akhir tahun 2025 tercatat sebanyak 368.997 pengguna, meningkat 32,96% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 277.525 pengguna. Pertumbuhan ini didorong oleh upaya akuisisi pengguna baru melalui sinergi dengan seluruh unit kantor, peningkatan literasi digital nasabah, serta implementasi program promosi yang diarahkan untuk meningkatkan penetrasi layanan digital di seluruh wilayah operasional.

The number of BRKS Mobile users at the end of 2025 was recorded at 368,997 users, an increase of 32.96% compared to the previous year's total of 277,525 users. This growth was driven by new user acquisition efforts through synergy across all office units, enhancement of customer digital literacy, and the implementation of promotional programs aimed at increasing digital service penetration throughout the operational regions.

Dari sisi aktivitas transaksi, volume transaksi BRKS *Mobile* mengalami pertumbuhan yang kuat. Sepanjang tahun 2025, volume transaksi mencapai 21.2 juta transaksi, meningkat 39,47% dari 15.2 juta transaksi pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin tingginya pemanfaatan BRKS *Mobile* sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan nasabah sehari-hari khususnya transfer, pembayaran tagihan, pembelian, serta transaksi berbasis QRIS. Selain itu, pertumbuhan volume transaksi turut menunjukkan keberhasilan peningkatan pengalaman pengguna *(user experience)* melalui penyediaan fitur yang lebih mudah digunakan, optimalisasi kecepatan proses, serta peningkatan stabilitas sistem.

In terms of transaction activity, BRKS Mobile transaction volume experienced robust growth. Throughout 2025, transaction volume reached 21,2 million transactions, an increase of 39.47% from 15,2 million transactions in 2024. This increase reflects the growing utilization of BRKS Mobile as a means to fulfill customers' daily financial transaction needs, particularly transfers, bill payments, purchases, and QRIS-based transactions. Furthermore, the growth in transaction volume also indicates the successful enhancement of user experience through the provision of more user-friendly features, optimization of processing speed, and improved system stability.

Selaras dengan peningkatan volume transaksi, nilai nominal transaksi yang diproses melalui BRKS *Mobile* turut mengalami pertumbuhan. Total nilai transaksi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp25.4 triliun, meningkat 18,69% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp21.4 triliun. Peningkatan tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap keamanan dan keandalan layanan BRKS *Mobile*, sekaligus menunjukkan pergeseran preferensi transaksi yang semakin mengedepankan efisiensi dan kemudahan. Meskipun pertumbuhan nominal lebih moderat dibandingkan volume, hal ini mengindikasikan semakin meratanya pola transaksi, termasuk peningkatan kontribusi transaksi bernilai kecil dan menengah.

Secara keseluruhan, kinerja BRKS *Mobile* pada tahun 2025 mencerminkan keberhasilan strategi digitalisasi BRK Syariah dalam memperkuat layanan berbasis teknologi dan mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah. Ke depan, BRK Syariah akan terus mengembangkan fitur layanan, meningkatkan keamanan siber, serta memperluas integrasi dengan ekosistem digital untuk mendorong utilisasi aplikasi sebagai salah satu kanal utama transaksi. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi BRK Syariah sebagai bank daerah syariah yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan layanan keuangan digital.

In alignment with the increase in transaction volume, the nominal value of transactions processed through BRKS Mobile also experienced growth. The total transaction value in 2025 was recorded at Rp25,4 trillion, an increase of 18.69% compared to Rp21,4 trillion in 2024. This increase reflects growing customer confidence in the security and reliability of BRKS Mobile services, while simultaneously indicating a shift in transaction preferences that increasingly prioritize efficiency and convenience. Although the nominal growth is more moderate compared to the volume, this indicates an increasingly equitable transaction pattern, including an increased contribution from small and medium-value transactions.

Overall, the performance of BRKS Mobile in 2025 reflects the success of BRK Syariah's digitalization strategy in strengthening technology-based services and driving the enhancement of Sharia financial inclusion. Moving forward, BRK Syariah will continue to develop service features, enhance cybersecurity, and expand integration with the digital ecosystem to drive application utilization as one of the primary transaction channels. These efforts are expected to strengthen BRK Syariah's position as an adaptive, innovative, and responsive regional Sharia bank to the dynamic needs of digital financial services.

Layanan QRIS

Layanan QRIS terus dikembangkan untuk memperluas jangkauan transaksi non-tunai serta mendukung integrasi pembayaran digital di berbagai sektor. Pada tahun 2025, kinerja layanan QRIS BRK Syariah menunjukkan pertumbuhan signifikan pada berbagai indikator, baik di sisi merchant maupun pengguna aplikasi BRKS *Mobile,* yang mencerminkan keberhasilan strategi ekspansi ekosistem pembayaran digital syariah.

QRIS Services

QRIS services continue to be developed to expand the reach of non-cash transactions and support the integration of digital payments across various sectors. In 2025, the performance of BRK Syariah's QRIS services demonstrated significant growth across various indicators, both on the merchant side and among BRKS Mobile application users, reflecting the successful expansion strategy of the Sharia digital payment ecosystem.

Tabel Kinerja QRIS BRK Syariah
BRK Syariah QRIS Performance Table

No	Layanan QRIS BRK Syariah	2025	2024	Capaian (%) Growth (%)	BRK Syariah QRIS Services
	QRIS *Merchant*				**QRIS Merchant**
1	Jumlah *merchant* QRIS	8.585	6.607	29.94	Number of QRIS merchants
2	Volume transaksi QRIS di merchant	1.019.313	569.696	78.92	QRIS transaction volume at merchants
3	Nominal Transaksi QRIS *merchant* (dalam miliar rupiah)	149,3	99,4	50.20	QRIS merchant transaction value (in billions rupiah)
	Fitur QRIS MPM di BRKS mobile				**QRIS MPM Feature on BRKS Mobile**
1	Volume transaksi QRIS (dalam juta)	4,1	1,7	141.18	1. QRIS transaction volume (in millions)
2	Nominal Transaksi QRIS (dalam miliar rupiah)	747,1	355,7	110.04	2. QRIS transaction value (in billions rupiah)

Dari sisi *merchant,* jumlah *merchant* QRIS BRK Syariah meningkat dari 6.607 *merchant* pada tahun 2024 menjadi 8.585 *merchant* pada tahun 2025, atau tumbuh sebesar 29,94%. Pertumbuhan ini didorong oleh perluasan akuisisi *merchant* di sektor UMKM, ritel, layanan publik, dan institusi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh seluruh unit kantor untuk meningkatkan adopsi QRIS dalam transaksi pembayaran syariah.

Sejalan dengan peningkatan jumlah *merchant*, volume transaksi QRIS pada *merchant* juga mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu sebesar 78,92% dari 569.696 transaksi pada tahun 2024 menjadi 1.019.313 transaksi pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa *merchant* tidak hanya bertambah secara jumlah, tetapi juga semakin aktif dalam memanfaatkan QRIS sebagai sarana penerimaan pembayaran, sejalan dengan tren penggunaan transaksi digital yang cepat, efisien, dan aman.

Dari sisi nilai transaksi, nominal transaksi QRIS *merchant* meningkat dari Rp99,4 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp149,3 miliar pada tahun 2025, atau tumbuh 50,20%. Pertumbuhan tersebut mencerminkan peningkatan skala dan kualitas transaksi, termasuk pada sektor dengan nilai transaksi yang relatif lebih tinggi seperti penerimaan pajak daerah, layanan publik, kesehatan, pendidikan dan sektor perdagangan.

Selain dari sisi *merchant*, pemanfaatan fitur QRIS *Merchant Presented Mode* (MPM) pada aplikasi BRKS *Mobile* juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat sepanjang tahun 2025. Volume transaksi QRIS melalui BRKS *Mobile* meningkat dari 1,7 juta transaksi pada 2024 menjadi 4,1 juta transaksi pada 2025, atau tumbuh sebesar 141,18%. Peningkatan ini menunjukkan semakin kuatnya peran BRKS *Mobile* sebagai kanal utama dalam transaksi pembayaran berbasis QR, yang didukung oleh peningkatan pengalaman pengguna, stabilitas sistem, dan integrasi fitur yang lebih optimal.

Sejalan dengan peningkatan volume, nominal transaksi QRIS melalui BRKS *Mobile* juga mengalami pertumbuhan signifikan, dari Rp355,7 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp747,1 miliar pada tahun 2025 atau tumbuh 110,04%. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi berbasis QR tidak hanya meningkat dalam sisi frekuensi, tetapi juga semakin digunakan untuk transaksi bernilai lebih besar di berbagai segmen nasabah.

Secara keseluruhan, kinerja layanan QRIS pada tahun 2025 mencerminkan keberhasilan BRK Syariah dalam memperluas ekosistem pembayaran digital syariah serta meningkatkan penetrasi transaksi non-tunai di masyarakat. Pertumbuhan yang kuat pada jumlah *merchant*, volume transaksi, dan nilai transaksi menegaskan efektivitas strategi digitalisasi pembayaran yang dijalankan oleh BRK Syariah.

From the merchant perspective, the number of BRK Syariah QRIS merchants increased from 6,607 merchants in 2024 to 8,585 merchants in 2025, representing a growth of 29.94%. This growth was driven by the expansion of merchant acquisition in the MSME, retail, public services, and regional government institution sectors conducted by all office units to increase QRIS adoption in Sharia payment transactions.

In line with the increase in the number of merchants, QRIS transaction volume at merchants also recorded highly significant growth of 78.92%, from 569,696 transactions in 2024 to 1,019,313 transactions in 2025. This increase demonstrates that merchants are not only growing in number but are also increasingly active in utilizing QRIS as a means of accepting payments, in accordance with the trend of utilizing fast, efficient, and secure digital transactions.

In terms of transaction value, the nominal QRIS transaction at merchants increased from Rp99.4 billion in 2024 to Rp149.3 billion in 2025, representing a growth of 50.20%. This growth reflects an increase in the scale and quality of transactions, including in sectors with relatively higher transaction values such as regional tax receipts, public services, healthcare, education, and the trade sector.

Apart from the merchant side, the utilization of the QRIS Merchant Presented Mode (MPM) feature on the BRKS Mobile application also demonstrated highly rapid growth throughout 2025. The volume of QRIS transactions through BRKS Mobile increased from 1.7 million transactions in 2024 to 4.1 million transactions in 2025, representing a growth of 141.18%. This increase demonstrates the strengthening role of BRKS Mobile as a primary channel for QR-based payment transactions, supported by improved user experience, system stability, and more optimal feature integration.

In alignment with the increase in volume, the nominal value of QRIS transactions through BRKS Mobile also experienced significant growth, from Rp355.7 billion in 2024 to Rp747.1 billion in 2025, a growth of 110.04%. This indicates that QR-based transactions are not only increasing in frequency but are also increasingly being used for larger-value transactions across various customer segments.

Overall, the performance of QRIS services in 2025 reflects BRK Syariah's success in expanding the Sharia digital payment ecosystem and increasing the penetration of non-cash transactions in society. The robust growth in the number of merchants, transaction volume, and transaction value underscores the effectiveness of the payment digitalization strategy implemented by BRK Syariah.

BRK Syariah akan terus mengembangkan ekosistem QRIS ke depan melalui perluasan akuisisi *merchant* di sektor prioritas, peningkatan performa dan keamanan fitur QRIS pada aplikasi BRKS *Mobile,* penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, UMKM, dan institusi pendidikan, serta inovasi layanan pembayaran berbasis QR untuk meningkatkan kenyamanan dan inklusivitas layanan. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat posisi BRK Syariah sebagai institusi keuangan syariah yang adaptif terhadap dinamika sistem pembayaran digital serta mendukung agenda nasional dalam percepatan transaksi non-tunai.

BRK Syariah will continue to develop the QRIS ecosystem moving forward through the expansion of merchant acquisition in priority sectors, enhancement of the performance and security of QRIS features on the BRKS Mobile application, strengthening of collaboration with regional governments, MSMEs, and educational institutions, as well as innovation in QR-based payment services to improve convenience and service inclusivity. These efforts are expected to strengthen BRK Syariah's position as a Sharia financial institution that is adaptive to the dynamics of digital payment systems and supports the national agenda for accelerating non-cash transactions.

AKSELERASI PERTUMBUHAN *FEE BASED INCOME*
ACCELERATING THE GROWTH OF FEE-BASED INCOME

Fee based income merupakan salah satu sumber pendapatan yang terus dioptimalkan oleh BRK Syariah untuk memperkuat struktur pendapatan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong percepatan inovasi layanan perbankan serta memperluas peluang pengembangan pendapatan berbasis komisi. Sejalan dengan hal tersebut, BRK Syariah menerapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kontribusi *fee based income* melalui langkah-langkah berikut:

- Pengembangan fitur pada BRKS *Mobile* (fitur *top up e-money,* dan fitur Pembelian Telkomsel Paket Spesial).
- Pengembangan integrasi *new* PLN di *channel Mbanking*, Aplikasi CMS dan *Teller* (yaitu fitur pembelian token listrik PLN, pembayaran tagihan listrik PLN, dan pembayaran non tagihan listrik PLN)
- Pengembangan fitur *Top Up ShopeePay* dan Pembayaran BPJS Kesehatan di Mesin ATM BRK Syariah
- Pengembangan fitur BI Fast API diaplikasi BRKS *mobile* dan CMS
- Promosi dan sosialisasi Produk dan layanan Aplikasi BRKS *mobile* dan Aplikasi CMS sehingga dapat meningkatkan jumlah pengguna dan Peningkatan penggunaan fitur-fitur transaksi transaksional yang ada di Aplikasi BRKS *mobile* dan Aplikasi CMS.
- Penambahan akuisisi *merchant* QRIS BRK Syariah.
- Peningkatan jumlan transaksi QRIS di *merchant* QRIS BRK Syariah.
- Sosialisasi penggunaan fitur QRIS Aplikasi BRKS *mobile* untuk pembelajaan di *merchant-merchant* sehingga meningkatkan frekuensi penggunaan fitur QRIS oleh pengguna BRKS *mobile.*

Fee-based income constitutes one of the revenue sources continuously optimized by BRK Syariah to fortify its income structure. Developments in information technology have propelled the acceleration of banking service innovations and broadened opportunities for generating commission-based income. In alignment with this, BRK Syariah implements several strategies to enhance the contribution of fee-based income through the following measures:

- Development of features on BRKS Mobile (e-money top-up feature and the purchase of Telkomsel Special Packages feature).
- Development of the new PLN integration across M-banking channels, CMS Application, and Tellers (specifically, features for purchasing PLN electricity tokens, PLN electricity bill payments, and non-electricity PLN bill payments).
- Development of the ShopeePay Top-Up feature and BPJS Kesehatan (Health Insurance) payment feature at BRK Syariah ATM machines.
- Development of the BI Fast API feature within the BRKS mobile and CMS applications.
- Promotion and socialization of the BRKS mobile and CMS Application products and services to increase the number of users and enhance the utilization of transactional features available within the BRKS mobile and CMS Applications.
- Increasing the acquisition of BRK Syariah QRIS merchants.
- Increasing the volume of QRIS transactions at BRK Syariah QRIS merchants.
- Socialization of the BRKS mobile Application's QRIS feature for retail purchases at merchants, thereby increasing the frequency of QRIS feature utilization by BRKS mobile users.

- Meningkatkan upaya dalam pembangunan ekosistem syariah melalui sinergi dan kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Sosial Islam, Lembaga Pendidikan Islam, Masjid/ Musholla, Pelaku Usaha Syariah, Industri Halal Kementerian dan Lembaga Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan administrasi pengelolaan dana atas kerjasama dimaksud.
- Penguatan aktivitas promosi melalui program hadiah dan undian, *events, customer gathering*, dan expo.
- Peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui produk tabungan SimPel, pemanfaatan Otobanking, dan memperluas layanan melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor, serta Tabungan Sinar Laku.
- Melakukan program literasi dan inklusi keuangan syariah baik sendiri maupun secara bersama dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah.
- Meningkatkan penyaluran pembiayaan terhadap produk unggulan Bank yakni pembiayaan segmen konsumtif dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Selama tahun 2025 BRK Syariah memperoleh *fee based income* dari berbagai sumber sebesar Rp110,51 miliar turun dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh pendapatan lainnya yang turun sebesar 71,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut perkembangan *fee based income* dalam dua tahun terakhir.

- Enhancing efforts in building a Sharia ecosystem through synergy and collaboration with Sharia Financial Institutions, Islamic Social Finance Institutions, Islamic Educational Institutions, Mosques/Prayer Rooms (Musholla), Sharia Business Actors, the Halal Industry, Ministries and Government Agencies, as well as Regional Governments in Riau Province and Kepulauan Riau Province. These efforts are anticipated to increase administrative income from fund management arising from the aforementioned collaborations.
- Strengthening promotional activities through prize and sweepstake programs, events, customer gatherings, and expos.
- Enhancing financial literacy and inclution through the SimPel savings product, the utilization of Otobanking, and expanding services through Branchless Financial Services (Laku Pandai), as well as Tabungan Sinar Laku.
- Conducting Sharia financial literacy and inclusion programs, both independently and collaboratively within the Sharia economic and financial system.
- Increasing financing disbursement for the Bank's flagship products, namely the consumer segment financing and micro, small, and medium enterprises (MSME) financing.

During 2025, BRK Syariah generated fee-based income from various sources amounting to Rp110.51 billion, representing a decrease compared to 2024. This contraction was primarily driven by a 71.27% year-on-year decline in other income. The development of fee-based income over the past two years is presented below.

Tabel *Fee Based Income*
Table of Fee-Based Income

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Keuntungan penjualan - nilai wajar melalui OCI	929	-	929	100,00	Gain on Sale - Fair Value through OCI
Pendapatan Transaksi ATM	54.517	32.302	22.215	68,77	ATM Transaction Revenue
Pendapatan Komisi Asuransi	12.869	31.677	(18.808)	(59,37)	Insurance Commission Revenue
Pendapatan Administrasi dan Komisi Selain Pembiayaan	16.128	7.588	8.540	112,55	Administration and Commission Revenue Other Than Financing
Pendapatan Administrasi CASA	12.159	11.413	746	6,54	CASA Administration Revenue
Pendapatan Administrasi & *Fee* Pembiayaan	917	993	(76)	(7,65)	Administration and Financing Fee Revenue
Pendapatan Transaksi *Remittance*	37	26	11	42,31	Remittance Transaction Revenue
Keuntungan penjabaran Valas	3.156	2.946	210	7,13	Foreign Exchange Translation Gain
Pendapatan Lainnya	9.799	34.105	(24.306)	(71,27)	Other Revenue
Jumlah	**110.512**	**121.049**	**(10.537)**	**(8,70)**	**Total**

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG
DEBT PAYING ABILITY AND RECEIVABLES COLLECTABILITY

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan BRK Syariah dalam memenuhi seluruh kewajiban kepada kreditur dan pihak lainnya secara tepat waktu didukung oleh pengelolaan likuiditas dan permodalan yang seimbang. Pengelolaan tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan strategi penyaluran pembiayaan dan pengelolaan risiko yang diterapkan sepanjang tahun.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Dalam mendukung pemenuhan kewajiban jangka pendek, BRK Syariah mengelola likuiditas secara *prudent*. Kinerja likuiditas tersebut antara lain tercermin pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yang menunjukkan perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun.

Pada tahun 2025, FDR tercatat sebesar 84,61%, menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 88,86%. Hal ini mencerminkan penyaluran pembiayaan yang tetap dijaga dalam batas optimal, dengan tetap memperhatikan kecukupan dana yang tersedia. Posisi FDR yang berada dalam rentang ketentuan regulator sebesar 78%–92% menunjukkan kemampuan BRK Syariah dalam menjaga keseimbangan antara penyaluran pembiayaan dan pemenuhan kewajiban jangka pendek, sehingga likuiditas tetap terjaga pada tingkat yang memadai.

Debt Paying Ability

BRK Syariah's ability to fulfill all obligations to creditors and other parties in a timely manner is supported by balanced liquidity and capital management. This management is conducted in an integrated manner with the financing disbursement strategies and risk management applied throughout the year.

Short-Term Debt Paying Ability

In supporting the fulfillment of short-term obligations, BRK Syariah manages its liquidity prudently. This liquidity performance is reflected, among others, in the Financing to Deposit Ratio (FDR), which indicates the ratio between disbursed financing and accumulated third-party funds.

In 2025, the FDR was recorded at 84,61%, decreasing compared to 88.86% in 2024. This reflects that financing disbursement is maintained within optimal limits, while consistently considering the adequacy of available funds. The FDR position, which remains within the regulatory threshold of 78%–92%, demonstrates BRK Syariah's capability in maintaining an equilibrium between financing disbursement and the fulfillment of short-term obligations, thereby ensuring liquidity is maintained at an adequate level.

Tabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
Table of Financing to Deposit Ratio (FDR)

(Dalam % | In %)

Uraian	2025	2024	Explanation
Financing to Deposit Ratio (FDR)	84,61	88,86	Financing to Deposit Ratio (FDR)

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Kemampuan BRK Syariah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang didukung oleh struktur permodalan yang memadai. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/ CAR) yang menunjukkan kemampuan permodalan Bank dalam menyerap risiko atas aset tertimbang menurut risiko (ATMR).

Pada tahun 2025, CAR tercatat sebesar 21,21% sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 21,18%. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan pembiayaan yang berdampak pada peningkatan ATMR, sejalan dengan strategi ekspansi usaha yang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Posisi CAR BRK Syariah tetap berada di atas ketentuan minimum regulator, sehingga mencerminkan kapasitas permodalan yang memadai dalam mendukung pertumbuhan usaha serta menjaga ketahanan terhadap risiko jangka panjang.

Long-Term Debt Paying Ability

BRK Syariah's ability to fulfill long-term obligations is supported by an adequate capital structure. This is reflected in the Capital Adequacy Ratio (CAR), which indicates the Bank's capital capability in absorbing risks associated with Risk-Weighted Assets (RWA).

in 2025, the Capital Adequacy Ratio (CAR) was recorded at 21.21%, reflecting a marginal increase from 21.18% in 2024. This development was primarily driven by financing growth, which consequently led to an increase in ATMR, in alignment with a business expansion strategy that rigorously adheres to prudential principles. BRK Syariah's CAR position remains consistently above the minimum regulatory requirements, thereby demonstrating adequate capital capacity to support continued business growth while ensuring long-term resilience against risk.

Tabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
Table of Capital Adequacy Ratio (CAR)

(Dalam % | In %)

Uraian	2025	2024	Explanation
Capital Adequacy Ratio (CAR)	21,21	21,18	Capital Adequacy Ratio (CAR)

Kolektibilitas Piutang

Kualitas aset produktif khususnya pembiayaan, turut menjadi faktor penting dalam mendukung kemampuan BRK Syariah dalam memenuhi kewajiban. Dalam hal ini, pengelolaan risiko pembiayaan dilakukan secara *prudent* melalui pemantauan kualitas pembiayaan secara berkala.

Kolektibilitas piutang tercermin dari rasio *Non-Performing Financing* (NPF), yang menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah. Pada tahun 2025, *NPF Gross dan NPF Net* tercatat sebesar 3,82% dan *1,48%*, meningkat dibandingkan tahun 2024 masing-masing sebesar 2,37% dan 0,39%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan tetap terjaga, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan serta upaya pengelolaan pembiayaan bermasalah yang dilakukan secara konsisten.

Receivables Collectability

The quality of earning assets, particularly financing, also serves as a vital factor in supporting BRK Syariah's ability to fulfill its obligations. In this regard, financing risk management is conducted prudently through periodic monitoring of financing quality.

Receivables collectability is reflected in the Non-Performing Financing (NPF) ratio, which indicates the level of non-performing financing. In 2025, Gross NPF and Net NPF were recorded at 3,82% and 1,48%, increasing compared to 2.37% and 0.39% respectively in 2024. This indicates that financing quality is well-maintained, supported by the application of prudential principles in financing disbursement as well as consistent efforts in managing non-performing financing.

Tabel *Non-Performing Financing* (NPF)
Table of Non-Performing Financing (NPF)

(Dalam % | In %)

Uraian	2025	2024	Explanation
Non-Performing Financing (NPF) Gross	3,82	2,37	Non-Performing Financing (NPF) Gross
Non-Performing Financing (NPF) Net	1,48	0,39	Non-Performing Financing (NPF) Net

Rasio Keuangan Lainnya

Rasio Rentabilitas

Kemampuan BRK Syariah dalam menghasilkan laba serta menjaga efisiensi operasional diukur melalui rasio rentabilitas. Tingkat profitabilitas ditunjukkan oleh rasio *Return on Assets* (RoA), *Return on Equity* (RoE) dan *Net Interest Margin* (NIM), sedangkan efisiensi operasional tercermin pada rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Pada tahun 2025, rasio RoA dan RoE masing-masing tercatat sebesar 1,19% dan 8,50%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan dinamika kinerja Bank. Di sisi lain, rasio NIM meningkat menjadi 5,12% yang menunjukkan tetap terjaganya kualitas *margin* dari aktivitas intermediasi. Sementara itu, rasio BOPO tercatat sebesar 84,86%, yang mengindikasikan adanya ruang bagi BRK Syariah untuk terus meningkatkan efisiensi operasional untuk mendukung kinerja yang lebih optimal.

Other Financial Ratios

Rentability Ratios

BRK Syariah's capacity to generate profit and maintain operational efficiency is measured through rentability ratios. The level of rentability is indicated by the Return on Assets (RoA), Return on Equity (RoE), and Net Interest Margin (NIM) ratios, while operational efficiency is reflected in the Operating Expenses to Operating Income (BOPO) ratio.

In 2025, the RoA and RoE ratios were recorded at 1.19% and 8.50%, respectively, experiencing a decline compared to the previous year, in line with the dynamics of the Bank's performance. Conversely, the NIM ratio increased to 5.12%, demonstrating the sustained quality of margins derived from intermediation activities. Meanwhile, the BOPO ratio was recorded at 84.86%, indicating that there is room for BRK Syariah to continuously enhance operational efficiency to support more optimal performance.

Tabel Rasio Rentabilitas
Table of Rentability Ratios

(Dalam % | In %)

Uraian	2025	2024	Explanation
Return on Assets (RoA)	1,19	1,43	Return on Assets (RoA)
Return on Equity (RoE)	8,50	10,42	Return on Equity (RoE)
Net Imbalan (NI)	5,12	4,98	Net Margin (NI)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	84,86	81,82	Operating Expenses to Operating Income (BOPO)

KUALITAS ASET PRODUKTIF
QUALITY OF EARNING ASSETS

BRK Syariah memantau kualitas aset produktif secara berkala untuk memastikan portofolio aset tetap berada pada tingkat risiko yang terkendali. Salah satu indikator yang digunakan adalah rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif yang mencerminkan proporsi aset produktif yang berada dalam kondisi bermasalah dibandingkan dengan keseluruhan aset produktif Bank.

Pada tahun 2025, rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif tercatat sebesar 2,82%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,76%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan risiko pada aset produktif, namun BRK Syariah telah mengambil langkah antisipatif melalui pembentukan cadangan kerugian untuk memitigasi potensi risiko di masa mendatang.

BRK Syariah monitors the quality of earning assets periodically to ensure the asset portfolio remains at a manageable risk level. One of the indicators utilized is the ratio of non-performing earning assets to total earning assets, which reflects the proportion of earning assets in a non-performing condition relative to the Bank's overall earning assets.

In 2025, the ratio of non-performing earning assets to total earning assets was recorded at 2.82%, marking an increase compared to 1.76% in 2024. This development indicates an elevated risk profile within the earning assets portfolio; however, BRK Syariah has implemented anticipatory measures by establishing provisions for impairment losses to mitigate potential future risks.

Tabel Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif
Table of Ratio of Non-Performing Earning Assets to Total Earning Assets

(Dalam % | In %)

Uraian	2025	2024	Explanation
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	2,82	1,76	Non-Performing Earning Assets to Total Earning Assets



STRUKTUR PERMODALAN
CAPITAL STRUCTURE

Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

BRK Syariah menetapkan kebijakan struktur modal sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan usaha serta mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat. Struktur modal yang optimal memungkinkan BRK Syariah untuk memperkuat kapasitas pembiayaan, khususnya dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, dengan tetap menjaga keseimbangan antara risiko dan tingkat imbal hasil, serta selaras dengan prinsip syariah dan kehati-hatian.

Kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), menjadi landasan dalam pengelolaan permodalan untuk memastikan ketahanan Bank dalam menghadapi berbagai risiko. Kapasitas permodalan yang memadai juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja dan prospek BRK Syariah.

Dalam rangka memastikan kecukupan permodalan, BRK Syariah menyusun rencana permodalan secara komprehensif berdasarkan proyeksi kebutuhan modal, profil risiko, serta mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi terkini. Rencana tersebut merupakan bagian integral dari Rencana Bisnis Bank yang disusun oleh Direksi dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

BRK Syariah secara konsisten mengintegrasikan perencanaan modal dengan strategi bisnis dan manajemen risiko, serta mengoptimalkan sumber permodalan internal guna mendukung ekspansi usaha yang berkelanjutan. Selain itu, BRK Syariah mengalokasikan modal secara selektif pada segmen bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan dan memberikan nilai tambah yang optimal.

Dalam pengelolaan permodalan, BRK Syariah memastikan ketersediaan modal yang memadai untuk mengantisipasi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Perhitungan kecukupan modal dilakukan dengan mengacu pada ketentuan regulator, dimana untuk risiko kredit, BRK Syariah menggunakan pendekatan Standar Basel II (*Standardized Approach*) untuk memastikan pengukuran risiko yang *prudent*.

Management Policy on Capital Structure

BRK Syariah establishes a capital structure policy as part of its efforts to maintain business sustainability and support sound business growth. An optimal capital structure enables BRK Syariah to strengthen its financing capacity, particularly in supporting regional economic development, while maintaining a balance between risk and rate of return, and aligning with Sharia and prudential principles.

Compliance with the Financial Services Authority (OJK) regulations, including the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM), serves as the foundation in capital management to ensure the Bank's resilience in facing various risks. Adequate capital capacity also plays a role in enhancing stakeholder confidence in BRK Syariah's performance and prospects.

In order to ensure capital adequacy, BRK Syariah formulates a comprehensive capital plan based on projected capital needs, risk profile, and considerations of the latest economic developments. This plan is an integral part of the Bank's Business Plan prepared by the Board of Directors and has obtained the approval of the Board of Commissioners.

BRK Syariah consistently integrates capital planning with business strategy and risk management, and optimizes internal capital sources to support sustainable business expansion. Furthermore, BRK Syariah selectively allocates capital to business segments that possess growth potential and provide optimal value-added.

In capital management, BRK Syariah ensures the availability of adequate capital to anticipate credit risk, market risk, and operational risk. The calculation of capital adequacy is conducted with reference to regulatory provisions, wherein for credit risk, BRK Syariah utilizes the Basel II Standardized Approach to ensure prudent risk measurement.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Penetapan kebijakan struktur modal BRK Syariah didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif, meliputi ketentuan regulator, profil risiko, serta arah pengembangan usaha, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan dinamika industri perbankan.

Adapun ketentuan yang menjadi acuan BRK Syariah antara lain sebagai berikut:

- POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- POJK No. 27 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- POJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets*.
- SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi BRK Syariah dalam menetapkan kebijakan permodalan yang selaras dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Struktur Modal

Struktur modal BRK Syariah terdiri dari modal inti dan modal pelengkap sebagai fondasi dalam mendukung kegiatan usaha dan pengelolaan risiko. Pada tahun 2025 modal inti BRK Syariah tercatat sebesar Rp3.276 miliar sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp3.277 miliar. Sementara itu, modal pelengkap tercatat sebesar Rp172 miliar sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp173 miliar.

Secara keseluruhan, jumlah modal BRK Syariah tahun 2025 mencapai Rp3.448 miliar sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.449 miliar. Di sisi lain, Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) juga

Basis for Selecting the Management Policy on Capital Structure

The determination of BRK Syariah's capital structure policy is based on comprehensive considerations, including regulatory provisions, risk profile, and the direction of business development, while continuing to observe economic conditions and the dynamics of the banking industry.
The regulations that serve as references for BRK Syariah include the following:

- POJK No. 8/POJK.03/2014 concerning the Soundness Rating Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- POJK No. 27 of 2022 dated December 28, 2022, concerning the Second Amendment to POJK No. 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks.
- POJK No. 34/POJK.03/2016 dated September 22, 2016, concerning the Amendment to POJK No. 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks.
- SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Adequacy Requirement according to Risk Profile and the Fulfillment of Capital Equivalency Maintained Assets.
- SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 concerning the Transparency and Publication of Reports of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

These provisions serve as the foundation for BRK Syariah in establishing a capital policy that is aligned with prudential principles, regulatory compliance, and supports sustainable business growth.

Capital Structure

BRK Syariah's capital structure consists of core capital and supplementary capital as the foundation in supporting business activities and risk management. In 2025, BRK Syariah's core capital was recorded at Rp3,276 billion, a slight decrease of 0.03% compared to Rp3,277 billion in 2024. Meanwhile, supplementary capital was recorded at Rp172 billion, a decrease of 0.58% compared to the previous year's Rp173 billion.

Overall, the total capital of BRK Syariah in 2025 reached Rp3,448 billion, a slight decrease compared to Rp3,449 billion in 2024. On the other hand, Risk-Weighted Assets (RWA) also experienced a decrease to Rp16,252 billion

mengalami penurunan menjadi sebesar Rp16.252 miliar dari Rp16.285 miliar pada tahun sebelumnya, mencerminkan pengelolaan eksposur risiko yang lebih terkendali seiring dengan dinamika aktivitas usaha Bank

Dengan perkembangan tersebut, rasio kecukupan modal Bank tetap berada pada level yang memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan penguatan struktur permodalan BRK Syariah yang tetap solid dalam mengantisipasi risiko serta mendukung ekspansi usaha secara berkelanjutan.

from Rp16,285 billion in the previous year, in line with the development of the Bank's business activities and risk profile.

With these developments, the Bank's capital adequacy ratio remains at an adequate level and in accordance with prevailing regulations. This reflects the strengthening of BRK Syariah's capital structure, which is quite solid in anticipating risks and supporting sustainable business expansion.

Tabel Struktur Modal dan Rasio Kecukupan Modal
Table of Capital Structure and Capital Adequacy Ratio

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Explanation
Modal Inti	3.275.821	3.276.601	Core Capital
Modal Pelengkap	171.794	172.893	Supplementary Capital
Jumlah Modal	3.447.615	3.449.494	Total Capital
Jumlah ATMR	16.252.221	16.285.305	Total RWA
Rasio Kecukupan Modal (%)	21,21%	21,18%	Capital Adequacy Ratio (%)



PENGUNGKAPAN KUANTITATIF EKSPOSUR RISIKO
QUANTITATIVE DISCLOSURE OF RISK EXPOSURES

BRK Syariah mengelola 10 jenis risiko termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi sebagai bentuk mitigasi terhadap kinerja Bank. Strategi pengelolaan risiko tersebut diuraikan pada bab Tata Kelola Perusahaan. Sementara, bagian berikut menyajikan informasi kuantitatif terkait perbandingan eksposur risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional selama dua tahun terakhir.

BRK Syariah manages 10 types of risks, including credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, rate of return risk, and investment risk, as a form of mitigation to safeguard the Bank's performance. These risk management strategies are elaborated in the Corporate Governance chapter. Meanwhile, the following section presents quantitative information regarding the comparison of credit risk, liquidity risk, and operational risk exposures over the past two years.

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual
Table Disclosure of Net Receivables by Region - Individual Bank

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 December 31, 2025				31 Desember 2024 December 31, 2024				Portfolio Category
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Net Claims by Region				Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Net Claims by Region				
		Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Total	Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(3)	(4)	(5)	(8)	(2)
1	Tagihan kepada Pemerintah	7.857.062	-	-	7.857.062	7.432.087	-	-	7.432.087	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	37.802	-	10.727	48.529	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	79.580	13	697	80.290	180.527	14	7.983	188.524	Bills to Banks
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	330.156	129.317	1.053	460.526	302.081	99.934	3.496	405.511	Residential Backed Loans
6	Kredit Beragun Properti Komersial	19.413	1.022	6.183	26.617	21.178	1.182	-	22.360	Commercial Property Backed Loans
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	11.461.950	4.140.384	13.767	15.616.101	11.402.899	4.015.651	17.055	15.435.605	Employee/ Retirement Loans
8	Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.937.559	411.040	5.571	3.354.170	3.112.968	441.080	150	3.554.198	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi	503.612	115.845	1.179.896	1.799.353	235.983	77.042	1.631.659	1.944.684	Claims on Corporations
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	301.430	21.853	-	323.283	65.682	18.402	-	84.084	Claims That Have Been Due Date
11	Aset Lainnya	1.760.562	254.537	9.684	2.024.783	1.883.219	264.221	9.684	2.157.124	Other Assets
	Total	**25.251.326**	**5.074.010**	**1.216.851**	**31.542.187**	**24.674.426**	**4.917.526**	**1.680.754**	**31.272.706**	**Total**

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individual
Table Disclosure of Net Receivables Based on Remaining Term of Contract - Bank Individualy

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 December 31, 2025						Portfolio Category
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak Net Receivables Based on Contract Term Areas						
		< 1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	> 5 tahun	Non-Kontraktual	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
1	Tagihan kepada Pemerintah	3.701.403	1.197.106	354.898	2.603.654	-	7.857.062	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	61.032	-	19.258	-	-	80.290	Bills to Banks
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	996	10.131	24.993	424.406	-	460.526	Residential Backed Loans
6	Kredit Beragun Properti Komersial	7.419	5.145	7.829	6.225	-	26.617	Commercial Property Backed Loans
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	167.111	1.223.249	2.134.657	12.091.084	-	15.616.100	Employee/Retirement Loans
8	Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	204.313	1.498.268	1.366.301	285.289	-	3.354.170	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi	503.612	68.445	663.182	564.115	-	1.799.354	Claims on Corporations
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	17.579	29.644	29.203	246.858	-	323.283	Claims That Have Been Due Date
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	2.024.783	2.024.783	Other Assets
	Total	**4.663.465**	**4.031.988**	**4.600.320**	**16.221.631**	**2.024.783**	**31.542.187**	**Total**

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 December 31, 2024						Portfolio Category
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak Net Receivables Based on Contract Term Areas						
		< 1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	> 5 tahun	Non-Kontraktual	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
1	Tagihan kepada Pemerintah	4.981.515	1.696.548	754.025	-		7.432.087	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	48.529	-	-	-	-	48.529	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	188.524	-	-	-	-	188.524	Bills to Banks
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1.030	9.433	24.276	370.772		405.511	Residential Backed Loans
6	Kredit Beragun Properti Komersial	4.994	1.954	12.408	3.003		22.360	Commercial Property Backed Loans
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	128.760	971.449	2.293.816	12.041.580		15.435.605	Employee/Retirement Loans
8	Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	166.937	1.437.939	1.626.878	322.445		3.554.198	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi	259.807	29.772	506.462	1.148.642	-	1.944.684	Claims on Corporations
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	17.697	18.625	20.227	27.535	-	84.084	Claims That Have Been Due Date
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	2.157.124	2.157.124	Other Assets
	Total	**5.797.793**	**4.165.721**	**5.238.091**	**13.913.977**	**2.157.124**	**31.272.706**	**Total**

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual
Table Disclosure of Net Receivables by Economic Sector - Bank Individualy

No	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah Claims to Government	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Bills to Banks	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Backed Financing	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
31 Desember 2025 December 31, 2025							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	
3	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	80.290	-	
12	Real Estat	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	460.526	
23	Lainnya	7.857.062	-	-	-	-	
	Total	**7.857.062**	**-**	**-**	**80.290**	**460.526**	

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Backed Financing	**Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan** Employee/ Retirement Funding	**Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel** Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio	**Tagihan kepada Korporasi** Claims on Corporations	**Tagihan yang telah Jatuh Tempo** Claims That Have Been Due Date	**Aset Lainnya** Other Assets	Economic Sector
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(2)
2.875	-	2.530.644	1.887	100.142		Agriculture, Forestry and Fisheries
-	-	980	-	990		Mining and excavation
3.345	-	38.906	377.255	6.365		Processing industry
-	-	92	-	-		Procurement of Electricity, Gas, Steam/ Hot Water and Cold Air
-	-	1.046	1.636	443		Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling
-	-	1.056	988.701	26.022		Construction
13.044	-	521.538	31.179	123.182		Wholesale and retail trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance
-	-	12.096	2.019	2.464		Transportation and Warehousing
909	-	96.204	281.812	10.259		Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink
-	-	2.475	-	177		Information and Communication
-	-	213	50.000	-		Financial and Insurance Activities
-	-	4.396	-	1.225		Real Estate
-	-	379	-	1.488		Professional, Scientific and Technical Activities
4.799	-	10.446	42.325	2.025		Leasing and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support
-	-	-	-	-		Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
-	-	4.559	30.615	168		Education
1.375	-	7.517	30.686	624		Human Health Activities and Social Activities
-	-	848	-	364		Arts, Entertainment and Recreation
-	-	113.244	3.182	13.720		Other Service Activities
-	-	726	-	458		Household Activities as Employers
-	-	-	-	-		Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies
270	15.615.980	6.805	(41.943)	32.689		Not Business Field
-	121	-	-	478	2.024.783	Other
26.617	**15.616.101**	**3.354.170**	**1.799.354**	**323.283**	**2.024.783**	Total

No	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah Claims to Government	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Claims on Public Sector Entities	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan kepada Bank Bills to Banks	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal Residential Backed Financing	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
31 Desember 2024 December 31, 2024							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	
3	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	10.727	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	37.802	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	188.524	-	
12	Real Estat	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	405.511	
23	Lainnya	7.432.087	-	-	-	-	
	Total	**7.432.087**	**48.529**	**-**	**188.524**	**405.511**	

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

Pembiayaan Beragun Properti Komersial Commercial Property Backed Financing	**Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan** Employee/ Retirement Funding	**Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel** Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio	**Tagihan kepada Korporasi** Claims on Corporations	**Tagihan yang telah Jatuh Tempo** Claims That Have Been Due Date	**Aset Lainnya** Other Assets	Economic Sector
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	(2)
7.019	-	2.698.388	4.155	26.312	-	Agriculture, Forestry and Fisheries
-	-	1.255	-	-	-	Mining and excavation
-	-	41.157	478.004	484	-	Processing industry
-	-	413	720	-	-	Procurement of Electricity, Gas, Steam/ Hot Water and Cold Air
-	-	1.580	1.743	0	-	Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling
-	-	4.536	1.003.017	2.428	-	Construction
7.642	-	557.799	37.776	12.982	-	Wholesale and retail trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance
-	-	12.869	3.024	348	-	Transportation and Warehousing
1.182	-	81.664	271.911	1.469	-	Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink
-	-	1.909	-	92	-	Information and Communication
-	-	104	11.358	-	-	Financial and Insurance Activities
-	-	5.340	-	317	-	Real Estate
-	-	635	-	-	-	Professional, Scientific and Technical Activities
4.994	-	11.062	12.134	132	-	Leasing and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support
-	-	-	-	-	-	Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
-	-	2.416	12.618	237	-	Education
1.523	-	9.027	6.361	233	-	Human Health Activities and Social Activities
-	-	932	-	-	-	Arts, Entertainment and Recreation
-	-	120.179	6.370	1.140	-	Other Service Activities
-	-	1.818	-	200	-	Household Activities as Employers
-	-	-	-	-	-	Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies
-	15.435.605	1.115	95.493	37.709	-	Not Business Field
-	-	-	-	-	2.157.124	Other
22.360	**15.435.605**	**3.554.198**	**1.944.684**	**84.084**	**2.157.124**	**Total**

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual
Table Disclosure of Receivables and Allowances by Region - Bank Individualy

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2025 December 31, 2025				Explanation
		Wilayah Region				
		Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)
1	Tagihan	26.039.244	4.447.125	1.716.906	32.203.275	Bill
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai	-	-	-		Bills that have decreased in value
	a. Belum jatuh tempo	188.387	67.320	405.608	661.315	a. Not yet due
	b. Telah jatuh tempo	499.368	73.928	568	573.864	b. Has expired
3	CKPN - Individual	54.057	5.582	-	59.640	CKPN - Individually
4	CKPN - Kolektif	404.170	53.641	9.196	467.007	CKPN - Collective
6	Tagihan yang dihapus buku	-	-	-	-	Write off Claims

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2024 December 31, 2024				Explanation
		Wilayah Region				
		Wilayah 1 Region 1	Wilayah 2 Region 2	Wilayah 3 Region 3	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)
1	Tagihan	25.085.214	4.979.555	1.792.476	31.857.245	Bill
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai					Bills that have decreased in value
	a. Belum jatuh tempo	228.840	60.587	406.802	696.229	a. Not yet due
	b. Telah jatuh tempo	439.134	71.542	1.988	512.663	b. Has expired
3	CKPN - Individual	4.639	5.882	-	10.520	CKPN - Individually
4	CKPN - Kolektif	377.712	49.025	3.834	430.571	CKPN - Collective
6	Tagihan yang dihapus buku	-	-	-	-	Write off Claims

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual
Table Disclosure of Receivables and Allowances Based on Economic Sector - Bank Individualy

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Bill	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables		CKPN - Individual CKPN - Individually	CKPN - Kolektif CKPN - Collective	Tagihan yang Dihapus Buku Write off Claims	Economic Sector
			Belum jatuh Tempo Not yet due	Telah jatuh Tempo Expired				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
31 Desember 2025 | December 31, 2025								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.736.316	62.831	200.724	67	160.226		Agriculture, Forestry and Fisheries
2	Pertambangan dan Penggalian	1.969	-	990	-	990		Mining and excavation
3	Industri Pengolahan	426.122	1.493	6.365	2.954	3.410		Processing industry
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	92	-	-	-	0		Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	7.250	-	443	443	0		Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling
6	Konstruksi	1.413.586	146.386	26.022	-	33.438		Construction
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	709.620	35.402	123.182	296	110.599		Wholesale and retail trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance
8	Pengangkutan dan Pergudangan	16.580	1.432	2.464	-	2.341		Transportation and Warehousing
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	398.322	264.016	10.259	50.657	455		Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink
10	Informasi dan Komunikasi	2.652	28	177	-	178		Information and Communication
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	69.471	-	-	-	61		Financial and Insurance Activities
12	Real Estat	5.622	260	1.225	-	1.168		Real Estate
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	1.867	37	1.488	-	1.489		Professional, Scientific and Technical Activities
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	72.904	555	2.025	-	1.832		Leasing and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-		Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
16	Pendidikan	35.342		168	-	196		Education
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	40.200	1.037	624	-	393		Human Health Activities and Social Activities
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	1.212	140	364	-	372		Arts, Entertainment and Recreation
19	Aktivitas Jasa Lainnya	141.859	8.301	13.720	-	12.055		Other Service Activities
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	1.184	274	458	2	269		Household Activities as Employers
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-		Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies
22	Bukan Lapangan Usaha	16.472.195	139.125	183.167	5.220	137.532		Not Business Field
23	Lainnya	9.648.910						Other
	Total	**32.203.275**	**661.315**	**573.864**	**59.640**	**467.007**	**-**	**Total**

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Bill	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables		CKPN - Individual CKPN - Individually	CKPN - Kolektif CKPN - Collective	Tagihan yang Dihapus Buku Write off Claims	Economic Sector
			Belum jatuh Tempo Not yet due	Telah jatuh Tempo Expired				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
31 Desember 2024 | December 31, 2024								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.879.254	105.615	164.314	74	143.771		Agriculture, Forestry and Fisheries
2	Pertambangan dan Penggalian	2.245	-	990	-	990		Mining and excavation
3	Industri Pengolahan	525.271	1.358	6.015	2.954	3.057		Processing industry
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	11.869	172	-	-	18		Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	6.462	112	1.883	1.883	6		Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling
6	Konstruksi	1.199.730	146.442	32.835	-	31.332		Construction
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	722.103	29.327	113.358	311	101.595		Wholesale and retail trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance
8	Pengangkutan dan Pergudangan	18.403	846	2.468	-	2.167		Transportation and Warehousing
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	370.151	263.369	9.734	-	9.030		Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink
10	Informasi dan Komunikasi	2.125	60	213	-	125		Information and Communication
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	20.925	-	-	-	2		Financial and Insurance Activities
12	Real Estat	7.010	-	1.670	-	1.354		Real Estate
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	2.127	80	1.488	-	1.492		Professional, Scientific and Technical Activities
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	33.864	765	1.880	-	1.799		Leasing and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-		Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security
16	Pendidikan	15.479	-	445	-	218		Education
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	17.591	1.261	631	-	436		Human Health Activities and Social Activities
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	1.295	-	364	-	364		Arts, Entertainment and Recreation
19	Aktivitas Jasa Lainnya	140.036	8.773	12.391	-	11.717		Other Service Activities
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	2.351	544	506	2	331		Household Activities as Employers
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-		Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies
22	Bukan Lapangan Usaha	16.101.219	137.504	161.477	5.296	120.767		Not Business Field
23	Lainnya	9.777.736	-	-	-	-		Other
	Total	**31.857.245**	**696.229**	**512.663**	**10.520**	**430.571**	-	**Total**

Tabel Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individual
Table Disclosure of Details of Movements in Allowance for Impairment Losses - Bank Individualy

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2025 December 31, 2025		31 Desember 2024 December 31, 2024		Explanation
		CKPN - Individual CKPN - Individually	**CKPN - Kolektif** CKPN - Collective	**CKPN - Individual** CKPN - Individually	**CKPN - Kolektif** CKPN - Collective	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)
1	Saldo awal CKPN	59.640	467.007	12.139	407.251	CKPN initial balance
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)					Establishment (recovery) of CKPN in the current period (Net)
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan				23.320	2.a. Establishment of CKPN in the current period
	2. b. Pemulihan CKPN pada periode pembentukan			1.619		2. b. Recovery of CKPN during the formation period
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan					Allowance for Impairment Losses used to write-off bills in the current period
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan					Other establishment (recovery) in the current period
Saldo akhir CKPN		**59.640**	**467.007**	**10.520**	**430.571**	

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Individual
Table Disclosure of Net Receivables by Portfolio Category and Rating Scale - Bank Individualy

	Kategori Portofolio							
		Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	Peringkat Jangka Panjang Long Term Rating					
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+ (idn) s.d A- (idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan kepada Pemerintah							
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik							
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasinal							
4	Tagihan kepada Bank		80.290		-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal							
6	Kredit Beragun Properti Komersial							
7	Kredit Pegawai/Pensiunan							
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
9	Tagihan kepada Korporasi							
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
11	Aset Lainnya							
	Total		**80.290**	**-**	**-**	**-**	**-**	

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

31 Desember 2025 December 31, 2025								
Tagihan Bersih Net Bills								
		Peringkat Jangka Pendek Short Term Rating				Tanpa Peringkat No Rating	Total	Portfolio Category
B+ s.d B-	Kurang dari B- Less than B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3 Less than A-3			
B+ s.d B-	Kurang dari B- Less than B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3 Less than F3			
B1 s.d B3	Kurang dari B3 Less than B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3 Less than P-3			
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn) Less than B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn) Less than F3(idn)			
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB- Less than idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4 Less than idA4			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(2)
						7.857.062	7.857.062	Claims to Government
						-	-	Claims on Public Sector Entities
						-	-	Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions
-	-	-	-	-	-	-	80.290	Bills to Banks
						460.526	460.526	Residential Backed Loans
						26.617	26.617	Commercial Property Backed Loans
						15.616.101	15.616.101	Employee/Retirement Loans
						3.354.170	3.354.170	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
						1.799.353	1.799.353	Claims on Corporations
						323.283	323.283	Claims That Have Been Due Date
						2.024.783	2.024.783	Other Assets
-	-	-	-	-	-	31.461.897	31.542.187	Total

	Kategori Portofolio							
		Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	Peringkat Jangka Panjang Long Term Rating					
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+ (idn) s.d A- (idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan kepada Pemerintah							
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik							
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasinal							
4	Tagihan kepada Bank		188.524					
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal							
6	Kredit Beragun Properti Komersial							
7	Kredit Pegawai/Pensiunan							
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
9	Tagihan kepada Korporasi							
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
11	Aset Lainnya							
	Total		**188.524**	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

31 Desember 2024 December 31, 2024								Portfolio Category
Tagihan Bersih Net Bills								
		Peringkat Jangka Pendek Short Term Rating				Tanpa Peringkat No Rating	Total	
B+ s.d B-	Kurang dari B- Less than B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3 Less than A-3			
B+ s.d B-	Kurang dari B- Less than B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3 Less than F3			
B1 s.d B3	Kurang dari B3 Less than B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3 Less than P-3			
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn) Less than B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn) Less than F3(idn)			
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB- Less than idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4 Less than idA4			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(2)
						7.432.087	7.432.087	Claims to Government
						48.529	48.529	Claims on Public Sector Entities
						-	-	Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions
						-	188.524	Bills to Banks
						405.511	405.511	Residential Backed Loans
						22.360	22.360	Commercial Property Backed Loans
						15.435.605	15.435.605	Employee/Retirement Loans
						3.554.198	3.554.198	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
						1.944.684	1.944.684	Claims on Corporations
						84.084	84.084	Claims That Have Been Due Date
						2.157.124	2.157.124	Other Assets
-	-	-	-	-	-	31.084.182	31.272.706	Total

Tabel Risiko Kredit Pihak Lawan Laporan Transaksi Lindung Nilai Syariah *Over the Counter*
Table Counterparty Credit Risk Report of Over the Counter Sharia Hedging Transactions

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No.	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2025 | *December 31, 2025*								Underlying Variables
		Nilai Nosional Notional Value			Tagihan Lindung Nilai Syariah Sharia Hedging Claims	Kewajiban Lindung Nilai Syariah Sharia Hedging Obligations	Tagihan Bersih Sebelum MRK Net Claims Before MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK Net Bills After MRK	
		≤ 1 Tahun ≤ 1 Year	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun > 1 Year - ≤ 5 Years	> 5 Tahun > 5 Years						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(2)
1	*Shariah compliant profit rate swap*	-	-	-	-	-	-	-	-	Shariah compliant profit rate swap
2	*Shariah compliant foreign currency swap*	-	-	-	-	-	-	-	-	Shariah compliant foreign currency swap
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	Other
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**TOTAL**

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No.	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2024 | *December 31, 2024*								Underlying Variables
		Nilai Nosional Notional Value			Tagihan Lindung Nilai Syariah Sharia Hedging Claims	Kewajiban Lindung Nilai Syariah Sharia Hedging Obligations	Tagihan Bersih Sebelum MRK Net Claims Before MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK Net Bills After MRK	
		≤ 1 Tahun ≤ 1 Year	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun > 1 Year - ≤ 5 Years	> 5 Tahun > 5 Years						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(2)
1	*Shariah compliant profit rate swap*	-	-	-	-	-	-	-	-	Shariah compliant profit rate swap
2	*Shariah compliant foreign currency swap*	-	-	-	-	-	-	-	-	Shariah compliant foreign currency swap
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	Other
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**TOTAL**

Tabel Laporan Transaksi *Repo*
Table Repo Transaction Reports

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 31 December 2025				31 Desember 2024 31 December 2024				Portfolio Category
		Nilai Wajar SSB Repo SSB Repo Fair Value	Kewajiban Repo Repos Obligation	Tagihan Bersih Net Bills	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo SSB Repo Fair Value	Kewajiban Repo Repos Obligation	Tagihan Bersih Net Bills	ATMR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(2)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	Bills to Banks
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Corporations
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL

Tabel Laporan Transaksi *Reverse Repo*
Table Report on Reverse Repo Transactions

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 31 December 2025				31 Desember 2024 31 December 2024				Portfolio Category
		Nilai Wajar SSB Repo SSB Repo Fair Value	Kewajiban Repo Repos Obligation	Tagihan Bersih Net Bills	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo SSB Repo Fair Value	Kewajiban Repo Repos Obligation	Tagihan Bersih Net Bills	ATMR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(2)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	Bills to Banks
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Corporations
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual
Table Disclosure of Net Receivables Based on Risk Weighting After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation - Bank Individualy

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 | December 31, 2025											ATMR	Beban Modal Capital Charges	Portfolio Category
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation													
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(2)
A	LAPORAN EKSPOSUR POSISI KEUANGAN														FINANCIAL POSITION EXPOSURE REPORT
1	Tagihan kepada Pemerintah	7.857.062												-	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik													-	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional													-	Claims on Multilateral Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank		61.032					19.258					12.206	977	Bills to Banks
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal				460.536								161.188	12.895	Residential Backed Loans
6	Kredit Beragun Properti Komersial									26.608			26.608	2.129	Commercial Property Backed Loans
7	Kredit Pegawai/Pensiunan							15.615.943					7.807.971	624.638	Employee/Retirement Loans
8	Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel								3.349.090				2.511.817	200.945	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi									1.886.398			1.886.398	150.912	Claims on Corporations
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo									112.083			112.083	8.967	Claims That Have Been Due Date
11	Aset lainnya													-	Other assets
	Total Eksposur Neraca	**7.857.062**	**61.032**	**-**	**460.536**	**-**	**-**	**15.635.201**	**3.349.090**	**2.025.089**	**-**	**-**	**12.518.272**	**1.001.462**	**Total Balance Sheet Exposures**
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen /Kontijensi pd Transaksi Rekening Administratif**														**Exposure to Commitment/ Contingencies Liabilities in Administrative Account Transactions**
1	Tagihan kepada Pemerintah												-	-	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Claims on Multilateral Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Bills to Banks
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Residential Backed Loans
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	5	0	Commercial Property Backed Loans
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Employee/Retirement Loans
8	Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	10.036	5.018	-	-	-	3.764	301	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	270.926	-		-	-	-	-	Claims on Corporations
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo							-	-	-	-	-	-	-	Claims That Have Been Due Date
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**280.972**	**5.018**	**-**	**-**	**-**	**3.769**	**301**	**Total Administrative Account Transaction Exposur**
C	**Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)**														**Exposure due to Counterparty Credit Risk**
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bills to Banks
5	Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	Claims on Corporations
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Total Counterparty Credit Risk Exposure**

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 | *December 31, 2024*											ATMR	Beban Modal Capital Charges	Portfolio Category
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation													
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(2)
A	LAPORAN EKSPOSUR POSISI KEUANGAN														FINANCIAL POSITION EXPOSURE REPORT
1	Tagihan kepada Pemerintah	7.432.087											-	-	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	14.286						27.506					13.753	1.100	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional												-	-	Claims on Multilateral Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank		188.524										37.705	3.016	Bills to Banks
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal				405.510								141.929	11.354	Residential Backed Loans
6	Kredit Beragun Properti Komersial									22.355			22.355	1.788	Commercial Property Backed Loans
7	Kredit Pegawai/Pensiunan							15.435.605					7.717.802	617.424	Employee/Retirement Loans
8	Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel								3.550.613				2.662.960	213.037	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi									1.781.892			1.781.892	142.551	Claims on Corporations
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo									84.084			84.084	6.727	Claims That Have Been Due Date
11	Aset lainnya	956.983								1.200.141			1.200.141	96.011	Other assets
	Total Eksposur Neraca	**8.403.356**	**188.524**	**-**	**405.510**	**-**	**-**	**15.463.111**	**3.550.613**	**3.088.471**	**-**	**-**	**13.662.620**	**1.093.010**	**Total Balance Sheet Exposures**
B	Eksposur Kewajiban Komitmen /Kontijensi pd Transaksi Rekening Administratif														Exposure to Commitment/ Contingencies Liabilities in Administrative Account Transactions
1	Tagihan kepada Pemerintah														Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik							6.737					3.368	269	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional												-	-	Claims on Multilateral Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank												-	-	Bills to Banks
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal												-	-	Residential Backed Loans
6	Kredit Beragun Properti Komersial							11		-			6	0	Commercial Property Backed Loans
7	Kredit Pegawai/Pensiunan												-	-	Employee/Retirement Loans
8	Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel								3.585				2.689	215	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi							270.353		27.615			162.791	13.023	Claims on Corporations
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo												-	-	Claims That Have Been Due Date
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**277.100**	**3.585**	**27.615**	**-**	**-**	**168.854**	**13.508**	**Total Administrative Account Transaction Exposur**
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)														Exposure due to Counterparty Credit Risk
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bills to Banks
5	Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Claims on Corporations
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Total Counterparty Credit Risk Exposure**

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual
Table Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation Techniques - Individual Banks

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 December 31, 2025						Portfolio Category
		Tagihan Bersih Net Bills	Bagian yang Dijamin dengan Parts Guaranteed With				Bagian yang Tidak Dijamin Non-Guaranteed Parts	
			Agunan collateral	Garansi Warranty	Asuransi Pembiayaan Financing Insurance	Lainnya Other		
(1)	(2)	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(2)
A	LAPORAN EKSPOSUR POSISI KEUANGAN							FINANCIAL POSITION EXPOSURE REPORT
1	Tagihan kepada Pemerintah	7.857.062	-	-	-	-	7.857.062	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	80.290	-	-	-	-	80.290	Bills to Banks
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	460.526	-	-	-	-	460.526	Residential Backed Loans
6	Kredit Beragun Properti Komersial	26.612	-	-	-	-	26.612	Commercial Property Backed Loans
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	15.616.101	-	-	-	-	15.616.101	Employee/Retirement Loans
8	Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.349.152	-	-	-	-	3.349.152	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi	1.634.650	-	-	-	-	1.634.650	Claims on Corporations
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo	323.283	-	-	-	-	323.283	Claims That Have Been Due Date
11	Aset lainnya	2.024.783	-	-	-	-	2.024.783	Other assets
	Total Eksposur Neraca	**31.372.460**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.372.460**	**Total Balance Sheet Exposures**
B	Eksposur Kewajiban Komitmen / Kontijensi pd Transaksi Rekening Administratif							Exposure to Commitment/ Contingencies Liabilities in Administrative Account Transactions
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	Bills to Banks
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	Residential Backed Loans
6	Kredit Beragun Properti Komersial	5	-	-	-	-	5	Commercial Property Backed Loans
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	Employee/Retirement Loans
8	Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	5.018	-	-	-	-	5.018	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi	164.704	-	-	-	-	164.704	Claims on Corporations
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	Claims That Have Been Due Date
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	**169.728**	**-**	**-**	**-**	**-**	**169.728**	**Total Administrative Account Transaction Exposure**
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							Exposure due to Counterparty Credit Risk
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-		-	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-		-	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-	Claims on Multilateral Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-		-	Bills to Banks
5	Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-		-	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-		-		-	Claims on Corporations
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	-	-	-	-	-	-	**Total Counterparty Credit Risk Exposure**
	Total (A+B+C)	**31.542.188**	-	-	-	-	**31.542.188**	**Total (A)+(B)+(C)**

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 December 31, 2024						Portfolio Category
		Tagihan Bersih Net Bills	Bagian yang Dijamin dengan Parts Guaranteed With				Bagian yang Tidak Dijamin Non-Guaranteed Parts	
			Agunan collateral	Garansi Warranty	Asuransi Pembiayaan Financing Insurance	Lainnya Other		
(1)	(2)	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)=(9)-[(10)+(11)+(12)+(13)	(2)
A	LAPORAN EKSPOSUR POSISI KEUANGAN							FINANCIAL POSITION EXPOSURE REPORT
1	Tagihan kepada Pemerintah	7.432.087	-	-	-	-	7.432.087	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	41.792	14.286	-	27.506	-	55.013	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	188.524	-	-	-	-	188.524	Bills to Banks
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	405.511	-	-	-	-	405.511	Residential Backed Loans
6	Kredit Beragun Properti Komersial	22.355	-	-	-	-	22.355	Commercial Property Backed Loans
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	15.435.605	-	-	-	-	15.435.605	Employee/Retirement Loans
8	Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.550.613	-	-	-	-	3.550.613	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi	1.781.892	-	-	-	-	1.781.892	Claims on Corporations
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo	84.084	-	-	-	-	84.084	Claims That Have Been Due Date
11	Aset lainnya	2.157.124	-	-	-	-	2.157.124	Other assets
	Total Eksposur Neraca	**31.099.587**	**14.286**	**-**	**27.506**	**-**	**31.112.807**	**Total Balance Sheet Exposures**
B	Eksposur Kewajiban Komitmen / Kontijensi pd Transaksi Rekening Administratif							Exposure to Commitment/ Contingencies Liabilities in Administrative Account Transactions
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	6.737	-	-	-	-	6.737	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	Bills to Banks
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	Residential Backed Loans
6	Kredit Beragun Properti Komersial	6	-	-	-	-	6	Commercial Property Backed Loans
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	Employee/Retirement Loans
8	Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.585	-	-	-	-	3.585	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi	162.791	-	-	-	-	162.791	Claims on Corporations
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	Claims That Have Been Due Date
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	**173.119**	**-**	**-**	**-**	**-**	**173.119**	**Total Administrative Account Transaction Exposure**
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							Exposure due to Counterparty Credit Risk
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	Bills to Banks
5	Tagihan kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	Claims on Corporations
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Total Counterparty Credit Risk Exposure**
	Total (A+B+C)	**31.272.706**	**14.286**	**-**	**27.506**	**-**	**31.285.926**	**Total (A)+(B)+(C)**

Tabel Pengungkapan Transaksi Sekuritas Aset secara Individual
Table of Disclosure for Individual Asset Securitization Transactions

No.	Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2025 December 31, 2025						Securitization Exposure
		Nilai Aset yang Disekuritisasi Value of Securitized Assets	Nilai Aset yang Disekuritisasi yang Mengalami Penurunan Nilai Value of Securitized Assets that Have Impaired Value		Laba/Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi Profit/ Loss from Securitization Activities	ATMR	Pengurang Modal Capital Reduction	
			Telah Jatuh Tempo Due date	Belum Jatuh Tempo Not yet due				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
1	Bank bertindak sebagai kreditur awal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			-			The bank acts as the initial creditor - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)
2	Bank bertindak sebagai penyedia kredit pendukung: a. Fasilitas penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-	The bank acts as a supporting credit provider: a. First risk bearer facility - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-		c. Second risk bearer facility - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)
3	Bank bertindak sebagai penyedia fasilitas likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-		The bank acts as a provider of liquidity facilities - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)
4	Bank bertindak sebagai penyedia jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-		The bank acts as a service provider - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)
5	Bank bertindak sebagai bank kustodian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-						The bank acts as a custodian bank - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)
6	Bank bertindak sebagai pemodal *a. Senior trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-	The bank acts as financier a. Senior tract - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)
	b. Junior trache - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-		-	c. Junior trache - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)

No.	Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2024 December 31, 2024						Securitization Exposure
		Nilai Aset yang Disekuritisasi Value of Securitized Assets	Nilai Aset yang Disekuritisasi yang Mengalami Penurunan Nilai Value of Securitized Assets that Have Impaired Value		Laba/Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi Profit/ Loss from Securitization Activities	ATMR	Pengurang Modal Capital Reduction	
			Telah Jatuh Tempo Due date	Belum Jatuh Tempo Not yet due				
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(2)
1	Bank bertindak sebagai kreditur awal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			-			The bank acts as the initial creditor - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)
2	Bank bertindak sebagai penyedia kredit pendukung: a. Fasilitas penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-	The bank acts as a supporting credit provider: a. First risk bearer facility - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-		c. Second risk bearer facility - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)
3	Bank bertindak sebagai penyedia fasilitas likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-		The bank acts as a provider of liquidity facilities - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)
4	Bank bertindak sebagai penyedia jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-		The bank acts as a service provider - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)
5	Bank bertindak sebagai bank kustodian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-						The bank acts as a custodian bank - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)
6	Bank bertindak sebagai pemodal *a. Senior trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-	The bank acts as financier a. Senior tract - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)
	b. Junior trache - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-		-	c. Junior trache - Type of exposure (example: claims secured by residential houses)

Tabel Transaksi Sekuritisasi Aset dalam Hal BUS Bertindak sebagai Kreditur Awal
Table Asset Securitization Transactions in the Case of BUS Acting as Initial Creditor

No.	Underlying Asset	31 Desember 2025 December 31, 2025		31 Desember 2024 December 31, 2024		Underlying Asset
		Nilai Aset yang Disekuritisasi Value of Securitized Assets	Keuntungan/ Kerugian Penjualan Sales Gain/Loss	Nilai Aset yang Disekuritisasi Value of Securitized Assets	Keuntungan/ Kerugian Penjualan Sales Gain/Loss	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	Bills to Banks
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	Residential Backed Financing
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	Commercial Property Backed Financing
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	Employee/Retirement Funding
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	Claims on Corporations
10	Aset Lainnya	-	-	-	-	Other Assets
	Total	-	-	-	-	**Total**

Tabel Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Individual
Table Disclosure of RWA Calculations for Credit Risk Using the Standard Approach - Bank Individualy

1. Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi
1. Asset Exposure in the Statement of Financial Position, Except for Securitization Exposure

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 December 31, 2025			31 Desember 2024 December 31, 2024			Portfolio Category
		Tagihan Bersih Net Bills	ATMR Sebelum MRK RWA before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	Tagihan Bersih Net Bills	ATMR Sebelum MRK RWA before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
1	Tagihan kepada Pemerintah	7.857.062	-	-	7.432.087	-	-	Claims to Government
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	41.792	20.896	13.753	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	80.290	21.835	21.835	188.524	37.705	37.705	Bills to Banks
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	460.526	161.188	161.188	405.511	141.929	141.929	Residential Backed Financing
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	26.612	26.612	26.612	22.355	22.355	22.355	Commercial Property Backed Financing
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	15.616.101	7.808.051	7.808.051	15.435.605	7.717.802	7.717.802	Employee/Retirement Funding

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 December 31, 2025			31 Desember 2024 December 31, 2024			Portfolio Category
		Tagihan Bersih Net Bills	ATMR Sebelum MRK RWA before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	Tagihan Bersih Net Bills	ATMR Sebelum MRK RWA before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.349.152	2.511.864	2.511.864	3.550.613	2.662.960	2.662.960	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
9	Tagihan kepada Korporasi	1.634.650	1.634.650	1.634.650	1.781.892	1.781.892	1.781.892	Claims on Corporations
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	323.283	323.283	323.283	84.084	84.084	84.084	Claims That Have Been Due Date
11	Aset Lainnya	2.024.783	-	1.087.534	2.157.124	-	1.200.141	Other Assets
TOTAL		31.372.460	12.487.483	13.575.017	31.099.587	12.469.622	13.662.620	TOTAL

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi
2. Exposure to Commitment/Contingencies Liabilities in Administrative Account Transactions, Except for Securitization Exposures

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 December 31, 2025			31 Desember 2024 December 31, 2024			Portfolio Category
		Tagihan Bersih Net Bills	ATMR Sebelum MRK RWA before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	Tagihan Bersih Net Bills	ATMR Sebelum MRK RWA before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
1	Tagihan kepada Pemerintah				-	-	-	Claims to Government
	a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	-	-	-	-	-	-	a. Bills to the Government of Indonesia
	b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-	b. Claims on Governments of Other Countries
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	6.737	3.368	3.368	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	Bills to Banks
	a. Tagihan Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-	a. Short term bills
	b. Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	b. Long Term Bills
5	Kredit beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	Residential secured loans
6	Kredit Beragun Properti Komersial	5	5	5	6	6	6	Commercial Property secured loans
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	-			-	-	-	Employee/Retirement Loans
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	5.018	3.764	3.764	3.585	2.689	2.689	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 December 31, 2025			31 Desember 2024 December 31, 2024			Portfolio Category
		Tagihan Bersih Net Bills	ATMR Sebelum MRK RWA before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	Tagihan Bersih Net Bills	ATMR Sebelum MRK RWA before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
9	Tagihan kepada Korporasi	164.704	164.704	164.704	162.791	162.791	162.791	Receivables to Corporations
10	Tagihan yang telah jatuh tempo							Claims That Have Been Due Date
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	a. Residential Backed Loans
	b. Selain kredit beragun rumah tinggal	-	-	-	-	-	-	b. Apart from mortgages secured by residential houses
TOTAL		169.728	168.473	168.473	173.119	168.854	168.854	TOTAL

3. Eksposur Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
3. Exposures Causing Credit Risk Due to Counterparty Credit Risk

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 December 31, 2025			31 Desember 2024 December 31, 2024			Portfolio Category
		Tagihan Bersih Net Bills	ATMR Sebelum MRK RWA before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	Tagihan Bersih Net Bills	ATMR Sebelum MRK RWA before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	Claims to Government
	a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia							a. Bills to the Government of Indonesia
	b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain							b. Claims on Governments of Other Countries
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	Claims on Multilateral Banks and International Institutions
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	Bills to Banks
	a. Tagihan Jangka Pendek							a. Short term bills
	b. Tagihan Jangka Panjang							b. Long Term Bills
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	Receivables to Corporations
TOTAL		-	-	-	-	-	-	TOTAL

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelment (*Settlement Risk*)
4. Exposures Causing Credit Risk Due to Settlement Risk

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 December 31, 2025			31 Desember 2024 December 31, 2024			Portfolio Category
		Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital Reduction Factor	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital Reduction Factor	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)	(2)
1	*Delivery versus payment*	-		-	-		-	Delivery versus payment
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-		-	-		-	a. Capital Charge 8% (5-15 days)
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-		-	-		-	b. Capital Cost 50% (16-30 days)
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-		-	-		-	c. Capital Charge 75% (31-45 days)
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-		-	-		-	d. Capital Charge 100% (more than 45 days)
2	*Non delivery versus payment*	-	-		-	-		Non-delivery versus payment
TOTAL		-	-	-	-	-	-	TOTAL

5. Eksposur Sekuritisasi
5. Securitization Exposure

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 December 31, 2025		31 Desember 2024 December 31, 2024		Portfolio Category
		Faktor Pengurang Modal Capital Deduction Factor	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	Faktor Pengurang Modal Capital Deduction Factor	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(2)
1	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-	Supporting Financing Facilities that meet the requirements
2	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-	Supporting Financing Facilities that do not meet the requirements
3	Fasilitas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan		-		-	Financing facilities that meet the requirements
4	Fasilitas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-	Financing facilities that do not meet the requirements
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-	Purchase of Asset Backed Securities that meet the requirements
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan					Purchase of Asset Backed Securities that do not meet the requirements
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum		-		-	Exposure to Securitization that is not covered in the Financial Services Authority Regulation concerning prudential principles in asset securitization activities for commercial banks
TOTAL		-	-	-	-	TOTAL

6. Eksposur Sekuritisasi
6. Securitization Exposure

Tabel Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Total Pengukuran Risiko Kredit
Table of Disclosure for the Calculation of Credit Risk RWA Using the Standardized Approach for Total Credit Risk Measurement

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025 December 31, 2025	31 Desember 2024 December 31, 2024	Explanation
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	13.743.490	13.831.474	TOTAL RWA CREDIT RISK
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-	TOTAL CAPITAL REDUCTION FACTOR

Risiko Pasar

Market Risk

Tabel Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar
Table Disclosure of Market Risk Using the Standard Method

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No	Jenis Risiko	31 Desember 2025 December 31, 2025				31 Desember 2024 December 31, 2024				Risk Type
		Bank Bank		Konsolidasi Consolidation		Bank Bank		Konsolidasi Consolidation		
		Beban Modal Capital Charges	ATMR	Beban Modal Capital Charges	ATMR	Beban Modal Capital Charges	ATMR	Beban Modal Capital Charges	ATMR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)
1	Risiko Suku Bunga							-	-	Interest Rate Risk
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Specific Risks
	b. Risiko Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	b. General Risk
2	Risiko Nilai Tukar	7.465	93.313	-	-	5.581	69.765	-	-	Exchange Rate Risk
3	Risiko Ekuitas *)	-	-	-	-		-	-	-	Equity Risk *)
4	Risiko Komoditas *)	-	-	-	-		-	-	-	Commodity Risk *)
5	Risiko *Option*	-	-	-	-	-	-	-	-	Options Risk
	TOTAL	7.465	93.313	-	-	5.581	69.765	-	-	TOTAL

Keterangan: 1). Untuk BUS yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud
Note: 1). For BUS (Sharia Commercial Banks) that have subsidiaries with the aforementioned risk exposure.

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Laporan Profil Maturitas
Maturity Profile Report

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No.	Pos-pos	Saldo	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Report Date Position December 31, 2025 Jatuh Tempo *)					POSS
			≤ 1 bulan ≤ 1 month	> 1 bulan s.d. 3 bulan > 1 month to.d. 3 months	> 3 bulan s.d. 6 bulan > 3 month to.d. 6 months	> 6 bulan s.d. 12 bulan > 6 month to.d. 12 months	>12 bulan > 12 month	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
I	LAPORAN POSISI KEUANGAN							FINANCIAL POSITION REPORT
A.	Aset							A. Asset
1.	Kas	929.499	929.499					1. Cash
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2.900.319	2.900.319	-	-	-	-	2. Placement with Bank Indonesia
3.	Penempatan pada bank lain	29.939	29.939	-	-			3. Placements with other banks
4.	Surat berharga yang dimiliki	4.677.867	216.915	175.559	1.272.307	764.053	2.249.033	4. Owned securities
5.	Piutang:							5. Receivables:
a.	Piutang *murabahah* (*gross*)	10.363.033	9.547	27.138	56.899	236.788	10.032.661	a. *Murabahah* receivables (gross)
b.	Piutang salam	-						b. Greetings credit
c.	Piutang *istishna'*	-						c. *Istishna*'s debt
d.	Piutang *qardh*	220.554	167.597	52.756	-	-	201	d. *Qardh* receivables
6.	Pembiayaan bagi hasil:							6. Profit sharing financing:
a.	Pembiayaan *mudharabah*	-	-	-	-	-	-	a. *Mudharabah* financing
b.	Pembiayaan *musyarakah*	11.030.287	23.252	33.052	33.814	70.179	10.869.992	b. *Musyarakah* financing
7.	Pembiayaan sewa	173.187	69	108	635	2.099	170.276	7. Lease financing
8.	Aset lainnya	450.827	-				450.827	8. Other assets
B.	Liabilitas							B. Liability
1.	Dana pihak ketiga							1. Third-party funds
a.	Giro *Wadiah*	110.174	110.174					a. *Wadiah* current account
b.	Deposito *mudharabah*	14.599.563	8.997.767	3.928.683	1.513.248	158.246	1.620	b. *Mudharabah* deposits
c.	Tabungan *Wadiah*	1.669.833	1.669.833	-	-	-	-	c. *Wadiah* savings
d.	Tabungan *mudharabah*	7.012.795	6.992.734	1.234	1.896	1.934	14.998	d. *Mudharabah* savings
e.	Giro *Mudharabah*	2.232.631	2.232.631	-	-	-	-	e. *Mudharabah* Current Account
2.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	401.374	401.374	-	-	-	-	2. Liabilities to Bank Indonesia
3.	Liabilitas kepada bank lain	76.873	75.373	-	1.500	-	-	3. Liabilities to other banks
4.	Surat berharga yang diterbitkan							4. Securities issued
5.	Pembiayaan yang diterima							5. Received financing
	Liabilitas lainnya	1.040.974	-				1.040.974	other liabilities
C.	Laporan Komitmen dan Kontinjensi							C. Commitment and Contingencies Report
1.	Kewajiban komitmen	310.214	43.809	11.000	23.241	28.645	203.518	1. Commitment obligation
2.	Kewajiban kontinjensi							2. Contingent liability
D.	Selisih (A-B)	3.631.296	(16.287.417)	(3.641.578)	(153.008)	913.157	23.071.292	D. Difference (A-B)

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No.	Pos-pos	Saldo	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Report Date Position December 31, 2024					POSS
			Jatuh Tempo *)					
			≤ 1 bulan ≤ 1 month	**> 1 bulan s.d. 3 bulan** > 1 month to.d. 3 months	**> 3 bulan s.d. 6 bulan** > 3 month to.d. 6 months	**> 6 bulan s.d. 12 bulan** > 6 month to.d. 12 months	**>12 bulan** > 12 month	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
I	**LAPORAN POSISI KEUANGAN**							**FINANCIAL POSITION REPORT**
	A. Aset							**A. Asset**
	1. Kas	943.167	943.167	-	-	-	-	1. Cash
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	2.459.026	2.459.026	-	-	-	-	2. Placement with Bank Indonesia
	3. Penempatan pada bank lain	38.682	38.682	-	-	-	-	3. Placements with other banks
	4. Surat berharga yang dimiliki	4.881.313	524.414	33.910	512.656	1.358.761	2.450.572	4. Owned securities
	5. Piutang:	-	-	-	-	-	-	5. Receivables:
	a. Piutang *murabahah* (*gross*)	18.695.136	11.516	28.188	57.299	202.033	18.396.101	*a. Murabahah* receivables (gross)
	b. Piutang salam	-	-	-	-	-	-	b. Greetings credit
	c. Piutang *istishna'*	-	-	-	-	-	-	*c. Istishna's* debt
	d. Piutang *qardh*	98.023	78.446	19.577	-	-	-	*d. Qardh* receivables
	6. Pembiayaan bagi hasil:	-	-	-	-	-	-	6. Profit sharing financing:
	a. Pembiayaan *mudharabah*	1.895	-	-	1.895	-	-	*a. Mudharabah* financing
	b. Pembiayaan *musyarakah*	8.487.692	144.756	31.097	28.959	56.717	8.226.163	*b. Musyarakah* financing
	7. Pembiayaan sewa	241.373	159	111	345	1.851	238.907	7. Lease financing
	8. Aset lainnya	566.868	-	-	-	-	566.868	8. Other assets
	B. Liabilitas							**B. Liability**
	1. Dana pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	1. Third-party funds
	a. Giro *Wadiah*	156.675	156.675	-	-	-	-	*a. Wadiah* current account
	b. Deposito *mudharabah*	14.914.658	8.500.985	4.319.510	908.845	464.000	-	*b. Mudharabah* deposits
	c. Tabungan *Wadiah*	1.503.536	1.503.536	-	-	-	-	*c. Wadiah* savings
	d. Tabungan *mudharabah*	6.611.024	6.589.963	766	2.161	2.407	-	*d. Mudharabah* savings
	e. Giro *Mudharabah*	1.749.033	1.749.033	-	-	-	-	*e. Mudharabah* Current Account
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	1.502.950	1.502.950	-	-	-	-	2. Liabilities to Bank Indonesia
	3. Liabilitas kepada bank lain	62.746	62.746	-	-	-	-	3. Liabilities to other banks
	4. Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	4. Securities issued
	5. Pembiayaan yang diterima	-	-	-	-	-	-	5. Received financing
	Liabilitas lainnya	885.937	-	-	-	-	-	other liabilities
	C. Laporan Komitmen dan Kontinjensi							**C. Commitment and Contingencies Report**
	1. Kewajiban komitmen	318.623	47.428	13.513	34.129	22.871	200.682	1. Commitment obligation
	2. Kewajiban kontinjensi	-	-	-	-	-	-	2. Contingent liability
	D. Selisih (A-B)							**D. Difference (A-B)**

Tabel Profil Maturitas (Valuta Asing)
Table of Maturity Profile (Foreign Currency)

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No.	Pos-pos	Saldo	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2025 Report Date Position December 31, 2025					POSS
			Jatuh Tempo *)					
			≤ 1 bulan ≤ 1 month	> 1 bulan s.d. 3 bulan > 1 month to.d. 3 months	> 3 bulan s.d. 6 bulan > 3 month to.d. 6 months	> 6 bulan s.d. 12 bulan > 6 month to.d. 12 months	>12 bulan > 12 month	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
I	LAPORAN POSISI KEUANGAN							FINANCIAL POSITION REPORT
A.	Aset							A. Asset
1.	Kas	7.750	7.750	-	-	-	-	1. Cash
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	174.322	174.322	-	-	-	-	2. Placement with Bank Indonesia
3.	Penempatan pada bank lain	31.093	31.093	-	-	-	-	3. Placements with other banks
4.	Surat berharga yang dimiliki	-	-	-	-	-	-	4. Owned securities
5.	Piutang:	-	-	-	-	-	-	5. Receivables:
a.	Piutang *murabahah* (*gross*)	-	-	-	-	-	-	a. *Murabahah* receivables (gross)
b.	Piutang salam	-	-	-	-	-	-	b. Greetings credit
c.	Piutang *istishna'*	-	-	-	-	-	-	c. *Istishna*'s debt
d.	Piutang *qardh*	-	-	-	-	-	-	d. *Qardh* receivables
6.	Pembiayaan bagi hasil:	-	-	-	-	-	-	6. Profit sharing financing:
a.	Pembiayaan *mudharabah*	-	-	-	-	-	-	a. *Mudharabah* financing
b.	Pembiayaan *musyarakah*	-	-	-	-	-	-	b. *Musyarakah* financing
7.	Pembiayaan sewa	-	-	-	-	-	-	7. Lease financing
8.	Aset lainnya	2.719	-	-	-	-	-	8. Other assets
B.	Liabilitas							B. Liability
1.	Dana pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	1. Third-party funds
a.	Giro *Wadiah*	-	-	-	-	-	-	a. *Wadiah* current account
b.	Deposito *mudharabah*	108.202	107.909	-	-	-	-	b. *Mudharabah* deposits
c.	Tabungan *Wadiah*	-	-	-	-	-	-	c. *Wadiah* savings
d.	Tabungan *mudharabah*	-	-	-	-	-	-	d. *Mudharabah* savings
e.	Giro *Mudharabah*	16.877	16.877	-	-	-	-	e. *Mudharabah* Current Account
2.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	2. Liabilities to Bank Indonesia
3.	Liabilitas kepada bank lain	-	-	-	-	-	-	3. Liabilities to other banks
4.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	4. Securities issued
5.	Pembiayaan yang diterima	-	-	-	-	-	-	5. Received financing
	Liabilitas lainnya	-	-	-	-	-	-	other liabilities
C.	Laporan Komitmen dan Kontinjensi							C. Commitment and Contingencies Report
1.	Kewajiban komitmen	-	-	-	-	-	-	1. Commitment obligation
2.	Kewajiban kontinjensi	-	-	-	-	-	-	2. Contingent liability
D.	Selisih (A-B)	90.805	-	-	-	-	-	D. Difference (A-B)

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No.	Pos-pos	Saldo	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024 Report Date Position December 31, 2024					POSS
			Jatuh Tempo *)					
			≤ 1 bulan ≤ 1 month	**> 1 bulan s.d. 3 bulan** > 1 month to.d. 3 months	**> 3 bulan s.d. 6 bulan** > 3 month to.d. 6 months	**> 6 bulan s.d. 12 bulan** > 6 month to.d. 12 months	**>12 bulan** > 12 month	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
I	LAPORAN POSISI KEUANGAN							FINANCIAL POSITION REPORT
A.	Aset							A. Asset
1.	Kas	13.817	13.817	-	-	-	-	1. Cash
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7.323	7.323	-	-	-	-	2. Placement with Bank Indonesia
3.	Penempatan pada bank lain	149.842	149.842	-	-	-	-	3. Placements with other banks
4.	Surat berharga yang dimiliki	-	-	-	-	-	-	4. Owned securities
5.	Piutang:	-	-	-	-	-	-	5. Receivables:
a.	Piutang *murabahah* (*gross*)	-	-	-	-	-	-	a. *Murabahah* receivables (gross)
b.	Piutang salam	-	-	-	-	-	-	b. Greetings credit
c.	Piutang *istishna'*	-	-	-	-	-	-	c. *Istishna's* debt
d.	Piutang *qardh*	-	-	-	-	-	-	d. *Qardh* receivables
6.	Pembiayaan bagi hasil:	-	-	-	-	-	-	6. Profit sharing financing:
a.	Pembiayaan *mudharabah*	-	-	-	-	-	-	a. *Mudharabah* financing
b.	Pembiayaan *musyarakah*	-	-	-	-	-	-	b. *Musyarakah* financing
7.	Pembiayaan sewa	-	-	-	-	-	-	7. Lease financing
8.	Aset lainnya	324	-	-	-	-	324	8. Other assets
B.	Liabilitas							B. Liability
1.	Dana pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	1. Third-party funds
a.	Giro *Wadiah*	-	-	-	-	-	-	a. *Wadiah* current account
b.	Deposito *mudharabah*	86.676	86.397	237	18	24	-	b. *Mudharabah* deposits
c.	Tabungan *Wadiah*	-	-	-	-	-	-	c. *Wadiah* savings
d.	Tabungan *mudharabah*	11	11	-	-	-	-	d. *Mudharabah* savings
e.	Giro *Mudharabah*	14.864	14.864	-	-	-	-	e. *Mudharabah* Current Account
2.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	2. Liabilities to Bank Indonesia
3.	Liabilitas kepada bank lain	-	-	-	-	-	-	3. Liabilities to other banks
4.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	4. Securities issued
5.	Pembiayaan yang diterima	-	-	-	-	-	-	5. Received financing
	Liabilitas lainnya	69.755	-	-	-	-	69.755	other liabilities
C.	Laporan Komitmen dan Kontinjensi							C. Commitment and Contingencies Report
1.	Kewajiban komitmen	-	-	-	-	-	-	1. Commitment obligation
2.	Kewajiban kontinjensi	-	-	-	-	-	-	2. Contingent liability
D.	Selisih (A-B)							D. Difference (A-B)

Risiko Operasional

Operational Risk

Tabel Bank secara Individual
Table Bank Individually

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

No	Pendekatan Yang Digunakan Approach Used	31 Desember 2025 December 31, 2025			31 Desember 2024 December 31, 2024		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir Gross Income (Average of the last 3 years)	Beban Modal Capital Charges	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir Gross Income (Average of the last 3 years)	Beban Modal Capital Charges	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)
1	Pendekatan Indikator Dasar Basic Indicator Approach	1.288.223	193.233	2.415.418	1.498.748	190.725	2.384.065
	Total	**1.288.223**	**193.233**	**2.415.418**	**1.498.748**	**190.725**	**2.384.065**

Fitur Instrumen Permodalan
Capital Instrument Features

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Disclosure of Details of Capital Instrument Features	
No.	Pertanyaan	Jawaban	Question	Answer
1.	Penerbit	PT. Bank Riau Kepri Syariah	Publisher	PT. Bank Riau Kepulauan Riau Syariah
2.	Nomor identifikasi	- Saham Seri A : I-01 s.d II-19 - Saham Seri B : III-01"	Identification number	- Series A shares: I-01 to II-19 - Series B shares : III-01
3.	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia	Laws used	Indonesian law
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM		Instrument treatment based on KPMM provisions	
4.	Pada saat masa transisi	N/A	During the transition period	N/A
5.	Setelah masa transisi	CET 1	After the transition period	CET 1
6.	Apakah instrumen *eligible* untuk Solo/*Group* atau *Group* dan Solo	Solo	Is the instrument eligible for Solo/ Group or Group and Solo	Solo
7.	Jenis instrumen	Saham Biasa	Instrument type	Common stock
8.	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	1.209.261	The amount recognized in the KPMM calculation	1.207.161
9.	Nilai Par dari instrumen	1.209.261	Par value of the instrument	1.207.161
10.	Klasifikasi akuntansi	Ekuitas	Accounting classification	Equity
11.	Tanggal penerbitan	31 Desember 2024	publication date	December 31, 2024
12.	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo	Perpetual	There is no maturity (perpetual) or with maturity	Perpetuals
13.	Tanggal jatuh tempo	Tidak ada tanggal jatuh tempo	Due date	There is no due date
14.	*Eksekusi call option* atas persetujuan Pengawas Bank	Tidak	Execution of the call option with the approval of the Bank Supervisor	No

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Disclosure of Details of Capital Instrument Features	
No.	Pertanyaan	Jawaban	Question	Answer
15.	Tanggal *call option*, jumlah penarikan dan persyaratan *call option* lainnya (jika ada)		Call option date, withdrawal amount and other call option terms (if any)	
16.	*Subsequent call option*		Subsequent call option	
	Kupon/dividen		Coupons/dividends	
17.	*Fixed* atau *floating*	*Floating*	Fixed or floating	floating
18.	Tingkat dari kupon *rate* atau index lain yang menjadi acuan		The rate of the coupon rate or other index that becomes the reference	
19.	Ada atau tidaknya *dividend stopper*	Tidak	Whether or not a dividend stopper is present	No
20.	*Fully discretionary*, partial, atau *mandatory*		Fully discretionary, partial, or mandatory	
21.	Apakah terdapat fitur *step up* atau insentif lain	Tidak	Is there a step up feature or other incentives	No
22.	*Non-cumulative* atau *cumulative*	*Cumulative*	Non-cumulative or cumulative	cumulative
23.	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversikan	Convertible or non-convertible	Cannot be converted
24.	Jika dapat dikonversi, sebutkan *trigger point*-nya		If it can be converted, state the trigger point	
25.	Jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian		If convertible, is it whole or part	
26.	Jika dapat dikonversi, bagaimana rate konversinya		If it can be converted, what is the conversion rate	
27.	Jika dapat dikonversi; apakah *mandatory* atau opsional		If it can be converted; whether mandatory or optional	
28.	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya		If convertible, state the type of conversion instrument	
29.	Jika dapat dikonversi, sebutkan *issuer of instrument it converts into*		If it can be converted, state the issuer of instrument it converts into	
30.	Fitur *write-down*	Tidak	Write down feature	No
31.	Jika terjadi *write-down*, sebutkan *trigger*-nya		If a write-down occurs, state the trigger	
32.	Jika terjadi *write-down*, apakah penuh atau sebagian		If there is a write-down, is it full or partial	
33.	Jika terjadi *write-down*; permanen atau temporer		If a write-down occurs; permanent or temporary	
34.	Jika terjadi *write-down temporer*, jelaskan mekanisme *write-up*		If a temporary write-down occurs, explain the write-up mechanism	
35.	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Terakhir	Instrument hierarchy at the time of liquidation	Final
36.	Apakah terdapat fitur yang *non-compliant*	Tidak	Are there any features that are non-compliant	No
37.	Jika Ya, jelaskan fitur yang *non-compliant*		If Yes, describe non-compliant features	

Pengungkapan Permodalan Berdasarkan Kerangka Basel III
1. Perhitungan Permodalan
Disclosure of Capital Based on the Basel III Framework
1. Calculation of Capital

	Komponen	Component	Jumlah (dalam jutaan Rupiah) Amount (in million Rupiah)	No. Ref. dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi) No. Ref. from the Consolidated Statement of Financial Position)
	Modal Inti Utama/Common Equity Tier I (CET1): Instrumen dan Tambahan Modal Disetor	**Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves**		
1	Saham biasa (termasuk *stock surplus*)	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	1.209.261	
2	Laba ditahan	Retained earnings	75.665	
3	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2.139.102	
4	Modal yang termasuk *phase out* dari CET1	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	N/A	
5	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	
6.	*CET1 sebelum regulatory adjustment*	CET1 capital before regulatory adjustments	3.424.028	
	CET1: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)	CET1 capital: regulatory adjustments		
7	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *trading book*	Prudential valuation adjustments	-	
8	*Goodwill*	Goodwill (net of related tax liability)	-	
9	Aset tidak berwujud lain (selain *Mortgage-Servicing Rights*)	Other intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	-	
10	Aset pajak tangguhan yang berasal dari *future profitability*	Deferred tax assets arising from future profitability	-	
11	*Cash-flow hedge reserve*	Cash-flow hedge reserve	-	
12	*Shortfall on provisions to expected losses*	Shortfall of provisions to expected losses	-	
13	Keuntungan dari sekuritisasi	Gains from securitization	-	
14	Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-	
15	Aset pensiun imbalan pasti	Defined-benefit pension fund net assets	-	
16	Investasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal pada Laporan Posisi Keuangan)	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-	
17	Kepemilikan silang pada instrumen CET1 pada entitas lain	Reciprocal cross-holdings in common equity	-	
18	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, *net posisi short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-	
19	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan *net* posisi *short* yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	Significant investments in the common stock of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-	
20	*Mortgage servicing rights*	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-	
21	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, net dari kewajiban pajak)	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-	
22	Jumlah melebihi batasan 15% dari:	Amount exceeding the 15% threshold	-	
23	Investasi signifikan pada saham biasa *financials*	of which: significant investments in the common stock of financials	-	

	Komponen	Component	Jumlah (dalam jutaan Rupiah) Amount (in million Rupiah)	No. Ref. dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi) No. Ref. from the Consolidated Statement of Financial Position)
24	*Mortgage servicing rights*	of which: mortgage servicing rights	-	
25	Pajak tangguhan dari perbedaan temporer	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-	
26.	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	National specific regulatory adjustments		
26a.	Selisih PPA dan CKPN	Difference between Allowance for Earning Assets and Allowance for Impairment Losses	(52.236)	
26b.	PPA atas aset non produktif	Allowance for Non-Earning Assets	-	
26c.	Aset Pajak Tangguhan	Deferred Tax Assets	(95.971)	
26d.	Penyertaan	Equity Participations	-	
26e.	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	Capital Shortfall in Insurance Subsidiaries	-	
26f.	Eksposur sekuritisasi	Securitization Exposures	-	
26g.	Lainnya	Others		
27	Penyesuaian pada CET1 akibat AT1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	Regulatory adjustments applied to CET1 due to insufficient Additional Tier 1 (AT1) and Tier 2 to cover deductions	-	
28.	**Jumlah pengurang (*regulatory adjustment*) terhadap CET1**	Total regulatory adjustments to CET1	**(148.207)**	
29.	**Jumlah CET1 setelah faktor pengurang**	CET1 capital	**3.275.821**	
	Modal Inti Tambahan (Additional Tier 1)/AT1: Instrumen	AT1 capital: instruments		
30	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk *stock surplus*)	Directly issued qualifying AT1 instruments plus related stock surplus	-	
31	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	of which: classified as equity under applicable accounting standards	-	
32	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards	-	
33	Modal yang termasuk *phase out* dari AT1	Directly issued capital instruments subject to phase out from AT1	N/A	
34	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	AT1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-	
35	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk *phase out*	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	N/A	
36	Jumlah AT1 sebelum *regulatory adjustment*	AT1 capital before regulatory adjustments		
	Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)	AT1 capital: regulatory adjustments		
37	Investasi pada instrumen AT1 sendiri	Investments in own AT1 instruments	-	
38	Kepemilikan silang pada instrumen AT1 pada entitas lain	Reciprocal cross-holdings in AT1 instruments	-	
39	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi *short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-	
40	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan	Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	
41	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	National specific regulatory adjustments	-	
41a.	Penempatan dana pada instrumen AT1 pada Bank lain	Placement of funds in AT1 instruments at other banks	-	
42	Penyesuaian pada AT1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-	

	Komponen	Component	Jumlah (dalam jutaan Rupiah) Amount (in million Rupiah)	No. Ref. dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi) No. Ref. from the Consolidated Statement of Financial Position)
43.	**Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) terhadap AT1**	Total regulatory adjustments to AT1 capital	-	
44.	**Jumlah AT1 setelah faktor pengurang**	AT1 capital	-	
45.	**Jumlah Modal Inti (Tier 1 = CET1 + AT1)**	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1)	**3.275.821**	
	Modal Pelengkap (Tier 2): Instumen dan cadangan	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Instrumen T2 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk *stock surplus*)	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	Modal yang termasuk *phase out* dari Tier 2	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2		
48	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk *phase out*	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
50	Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit + Cadangan Tujuan	General provision for impairment losses on earning assets, required to be computed at a maximum limit of 1.25% of Risk-Weighted Assets (RWA) for Credit Risk + Appropriated Reserves.	171.794	
51.	**Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang**	Tier 2 capital before regulatory adjustments	**171.794**	
	Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investasi pada instrumen Tier 2 sendiri	Investments in own Tier 2 instruments	N/A	
53	Pemilikan instrumen Tier 2 secara resiprokal	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		
54	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi *short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	N/A	
55	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan	Significant investments in the capital Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	N/A	
56	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	National specific regulatory adjustments	-	
56a	Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada Bank lain	Placement of funds in Tier 2 instruments of other banks.	-	
56b.	*Sinking fund*	Sinking fund.	-	
57.	**Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) Modal Pelengkap**	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	-	
58.	**Jumlah T2 setelah *regulatory adjustment***	Tier 2 capital (T2) after regulatory adjustment	**171.794**	
59.	**Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)**	Total capital (TC = T1 + T2)	**3.447.615**	
60.	**Total ATMR**	Total risk weighted assets	**16.252.221**	
	Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (*Capital Buffer*)	Capital ratios and buffers		
61.	**Rasio Modal Inti Utama (CET1) – persentase terhadap ATMR**	CET1 (as a percentage of risk weighted assets)	**20,16%**	
62.	**Rasio Modal Inti (Tier 1) – persentase terhadap ATMR**	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	**20,16%**	
63.	**Rasio Total Modal – persentase terhadap ATMR**	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	**21,21%**	
64.	**Tambahan modal (buffer) – persentase terhadap ATMR terdiri dari:**	Capital buffer – percentage of Risk-Weighted Assets (RWA) comprising:		
65	*Capital Conservation Buffer*	of which: capital conservation buffer requirement	-	
66	*Countercyclical Buffer*	of which: Bank specific countercyclical buffer requirement	-	
67	*Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik	of which: G-SIB buffer requirement	-	

	Komponen	Component	Jumlah (dalam jutaan Rupiah) Amount (in million Rupiah)	No. Ref. dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi) No. Ref. from the Consolidated Statement of Financial Position)
68.	Modal Inti Utama (CET1) yang tersedia untuk memenuhi Tambahan Modal (*Buffer*) – persentase terhadap ATMR	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)		
	National minima (jika berbeda dari Basel 3)	National minima (if different from Basel 3)		
69	Rasio minimal CET1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)	-	
70	Rasio minimal Tier 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)	-	
71	Rasio minimal total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	National total capital minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)	-	
	Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Investasi non-signifikan pada modal entitas keuangan lain	Non-significant investments in the capital of other financials	-	
73	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	Significant investments in the common stock of financials	-	
74	*Mortgage servicing rights* (net dari kewajiban pajak)	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	-	
75	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	-	
	Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan *cap*)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	-	
77	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan standar	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	-	
78	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan *cap*)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	-	
79	*Cap* atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan IRB	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	-	
	Instrumen Modal yang termasuk *phase out* (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between 1 Jan 2018 and 1 Jan 2022)		
80	Cap pada CET1 yang temasuk phase out	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	-	
81	Jumlah yang dikecualikan dari CET1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah *redemptions* dan *maturities*)	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	-	
82	Cap pada AT1 yang temasuk *phase out*	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	-	
83	Jumlah yang dikecualikan dari AT1 karena adanya cap (kelebihan di atas *cap* setelah *redemptions* dan *maturities*)	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	-	
84	Cap pada Tier 2 yang temasuk *phase out*	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	-	
85	Jumlah yang dikecualikan dari Tier 2 karena adanya *cap* (kelebihan di atas cap setelah *redemptions* dan *maturities*)	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	-	

Keterangan:
1) Diisi oleh BUS berdasarkan rekonsiliasi antara Format Standar Pengungkapan Perhitungan KPMM Basel III dan Laporan Posisi Keuangan Publikasi (hanya ditampilkan jika terdapat rekonsiliasi sebagaimana pada Bagian 2)
2) Sesuai Pedoman Pengisian Perhitungan KPMM Triwulanan

Description:
1) To be completed by Sharia Commercial Banks (BUS) based on the reconciliation between the Basel III Capital Adequacy Ratio (KPMM) Disclosure Standard Format and the Published Statement of Financial Position (only displayed if a reconciliation exists as set out in Section 2).
2) In accordance with the Quarterly Capital Adequacy Ratio (KPMM) Calculation Reporting Guidelines.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENTS

BRK Syariah tidak memiliki ikatan yang material terkait investasi barang modal hingga akhir tahun 2025. Oleh karena itu tidak terdapat informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan BRK Syariah untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

As of the end of 2025, BRK Syariah has no material commitments regarding capital goods investments. Consequently, there is no information to disclose regarding the counterparties involved, the purpose of such commitments, the anticipated sources of funding to fulfill these obligations, the denominated currencies, or the measures planned by BRK Syariah to mitigate risks associated with the related foreign exchange exposure.

INVESTASI BARANG MODAL
CAPITAL GOODS INVESTMENTS

Tujuan Investasi

BRK Syariah melakukan investasi barang modal dengan membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan. Investasi ini ditujukan untuk memperluas jaringan kantor sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan memberikan nilai tambah bagi Bank di masa yang akan datang.

Investment Objectives

BRK Syariah undertakes capital goods investments by purchasing several fixed assets or increasing the value of fixed assets that are expected to provide future economic benefits. This investment is aimed at expanding the office network to reach a broader community and provide added value for the Bank in the future.

Jenis dan Nilai Investasi

Investasi barang modal BRK Syariah dalam bentuk aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan kantor, dan kendaraan. Pada tahun 2025 nilai investasi barang modal BRK Syariah berupa penambahan aset tetap tercatat sebesar Rp46,77 miliar turun 34,74% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp71.67 miliar yang dipengaruhi oleh investasi barang modal berupa mesin dan peralatan kantor yang turun sebesar Rp25,23 miliar atau 37,72% dibandingkan 2024.

Types and Value of Investments

BRK Syariah's capital goods investments, in the form of fixed assets, comprise land, buildings, machinery and office equipment, and vehicles. In 2025, the value of BRK Syariah's capital goods investments, realized through additions to fixed assets, was recorded at Rp46.77 billion. This represents a 34.74% decline compared to the Rp71.67 billion reported in 2024. This contraction was primarily influenced by a reduction in capital investments for machinery and office equipment, which decreased by Rp25.23 billion, or 37.72%, compared to 2024.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal
Table of Types and Investment Value of Capital Goods

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

Uraian	2025	2024	Explanation
Tanah	-	2.100	Land
Bangunan	3.871	627	Building
Mesin dan peralatan kantor	41.655	66.881	Office machines and equipment
Kendaraan	1.243	2.060	Vehicle
Aset dalam Penyelesaian	-	-	Assets In Progress
Total	**46.769**	**71.668**	**Total**

Langkah Perlindungan Risiko

Sumber pendanaan investasi barang modal berasal dari internal. Seluruh transaksi pembelian barang modal menggunakan mata uang Rupiah sebagai bentuk antisipasi risiko terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang. BRK Syariah melaksanakan upaya perlindungan risiko terhadap barang modal berupa gedung, kendaraan dan inventaris tertentu lainnya dengan asuransi atas kemungkinan risiko kebakaran, kecelakaan dan risiko lain. Nilai pertanggungan asuransi aset tersebut sebesar Rp452,20 miliar pada tahun 2025 dan Rp942,89 miliar pada tahun 2024. Manajemen BRK Syariah berpendapat jumlah tersebut cukup untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari kebakaran dan gempa bumi.

Risk Protection Measures

Funding for capital goods investments is derived entirely from internal sources. All procurement transactions for capital goods are denominated in Rupiah as a strategic risk mitigation measure against foreign exchange fluctuations. Furthermore, BRK Syariah implements risk protection measures for its capital goods—specifically buildings, vehicles, and certain other inventory—by securing insurance coverage against potential risks such as fire, accidents, and other associated perils. The total insured value of these assets stood at Rp452.20 billion in 2025 and Rp942.89 billion in 2024. The Management of BRK Syariah assesses that this coverage is adequate to offset potential financial losses arising from fire and earthquakes.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

Pada tahun 2025 tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, sehingga tidak terdapat informasi terkait dengan jenis transaksi dan dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

In 2025, there were no material information and facts occurring subsequent to the accountant's report date; therefore, there is no information related to the types of transactions and their impact on future performance and business risks.

PENCAPAIAN TARGET 2025 DAN PROYEKSI 2026

2025 TARGET ACHIEVEMENT AND 2026 PROJECTIONS

Pencapaian Target 2025

Target kinerja BRK Syariah yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank menjadi landasan dalam mengarahkan strategi dan pengembangan usaha dalam jangka pendek hingga menengah. Sepanjang tahun 2025 BRK Syariah mampu menjaga kinerja pada aspek keuangan, pemasaran, serta pengembangan sumber daya insani, sejalan dengan target dan program kerja yang telah ditetapkan.

2025 Target Achievement

BRK Syariah's performance targets outlined in the Bank's Business Plan serve as the foundation in directing short- to medium-term strategy and business development. Throughout 2025, BRK Syariah managed to maintain performance in the financial, marketing, and human resource development aspects, in line with the established targets and work programs.

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan 2025

Kinerja keuangan BRK Syariah tahun 2025 tetap terjaga sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sebagaimana tercermin dari capaian beberapa indikator. Jumlah aset BRK Syariah tahun 2025 tercatat sebesar Rp31,10 triliun, mencapai 98,73% dari target tahun 2025 yang sebesar Rp31,50 triliun. Penyaluran pembiayaan terealisasi sebesar Rp21,79 triliun atau 97,38% dari target sebesar Rp22,37 triliun.

Penghimpunan dana pihak ketiga juga menunjukkan kinerja yang sejalan hingga melebihi target, dengan realisasi sebesar Rp25,75 triliun atau mencapai 102,36% dari target sebesar Rp25,16 triliun. Dari sisi pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*, Bank membukukan sebesar Rp2,50 triliun atau 100,41% dari target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, beban usaha terealisasi sebesar Rp1,23 triliun atau sebesar 94,24% di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp1,31 triliun yang mencerminkan upaya pengendalian biaya yang dilakukan secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, laba bersih BRK Syariah tercatat sebesar Rp276,43 miliar atau mencapai 81,04% dari target tahun 2025 sebesar Rp341,10 miliar

Comparison of 2025 Financial Targets and Realization

The financial performance of BRK Syariah in 2025 was maintained in alignment with the established targets, as reflected by the achievements of several key indicators. Total assets of BRK Syariah in 2025 were recorded at Rp31.10 trillion, achieving 98.73% of the 2025 target of Rp31.50 trillion. Financing disbursement was realized at Rp21.79 trillion, or 97.38% of the targeted Rp22.37 trillion.

The mobilization of third-party funds (TPF) also demonstrated performance that met and exceeded the target, with a realization of Rp25.75 trillion, or reaching 102.36% of the Rp25.16 trillion target. In terms of income from fund management as a *mudharib*, the Bank posted Rp2.50 trillion, or 100.41% of the established target.

Meanwhile, operating expenses were realized at Rp1.23 trillion, representing 94.24% of the set target of Rp1.31 trillion (remaining below the maximum threshold), which reflects the continuous cost-control efforts implemented by the Bank. Consequently, the net profit of BRK Syariah was recorded at Rp276.43 billion, achieving 81.04% of the 2025 target of Rp341.10 billion.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2025
Table Comparison of 2025 Financial Targets and Realization

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

Uraian	Realisasi 2025 2025 Realization	Target 2025 2025 Target	Pencapaian (%) Achievement (%)	Explanation
Posisi Keuangan				**Balance Sheet**
Total Aset	31.100.146	31.500.000	98,73	Total Assets
Pembiayaan	21.787.314	22.372.516	97,38	Financing
Dana Pihak Ketiga	25.750.075	25.157.000	102,36	Third Party Funds
Laba Rugi				**Profit and Loss**
Pendapatan Pengelolaan Dana selaku *Mudharib*	2.497.350	2.487.249	100,41	Fund Management Income as *Mudharib*
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil	(983.292)	(896.166)	109,72	Third Party Right to Profit Sharing
Hak Bagi Hasil Milik Bank	1.514.058	1.591.083	95,16	Bank's Right to Profit Sharing
Pendapatan Usaha Lainnya	118.042	199.391	59,20	Other Business Income
Beban Usaha	(1.233.065)	(1.308.388)	94,24	Business Expenses
Laba Usaha	399.035	482.087	82,77	Operating Profit
Pendapatan/Beban Non Usaha – Netto	(29.521)	(32.087)	92,00	Non-business Income/Expense - Net
Laba sebelum Pajak	369.514	450.000	82,11	Profit before Tax
Laba Bersih	276.432	341.100	81,04	Net Profit

Realisasi Penerbitan Produk/Aktivitas Baru 2025

Pada tahun 2025 BRK Syariah telah merealisasikan target penerbitan produk/aktivitas baru sebagaimana tabel di bawah ini.

Realization of New Product/Activity Issuances in 2025

In 2025, BRK Syariah achieved its targets for the issuance of new products/activities, as shown in the table below.

Tabel Realisasi Penerbitan Produk/Aktivitas Baru 2025
Table of the Realization of New Product/Activity Issuances in 2025

No.	Produk Product	Deskripsi Description	Realisasi Realization
1.	Layanan Digital (Integrasi SIPD-RI dengan BRK Syariah) Digital Services (Integration of SIPD-RI with BRK Syariah)	Aplikasi yang dikembangkan berbasis API (*Application Programming Interface*) yang akan menghubungkan SIPD-RI yang digunakan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dengan *Core System* BRK Syariah sehingga dapat saling berinteraksi dengan batasan-batasan yang telah diatur pada awal pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku pada kedua belah pihak. An application developed based on an API (Application Programming Interface) that will connect the SIPD-RI utilized by Regional Governments within the Riau Province and Kepulauan Riau Province with the BRK Syariah Core System. This facilitates mutual data interaction subject to the parameters established during the initial development phase, in accordance with the prevailing regulations applicable to both parties.	Telah dibuka layanan transaksi SIPD tersebut pada instansi di lingkungan 4 (empat) Kabupaten yakni Bengkalis, Dumai, Tanjungbalai Karimun, dan Lingga. The aforementioned SIPD transaction services have been launched for agencies within 4 (four) Regencies, namely Bengkalis, Dumai, Tanjungbalai Karimun, and Lingga.
2.	Layanan Digital (Sistem Pengelolaan Keuangan E-BLUD) Digital Services (E-BLUD Financial Management System)	Suatu sistem yang memberikan kemudahan kepada BLUD dalam mendokumentasikan administrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan BLUD secara *real time*. Sistem aplikasi E-BLUD dirancang secara *online* untuk memudahkan Pengguna dalam mengakses data dimana saja berdasarkan *user* yang sistematis sesuai tugas dan fungsinya sebagai pengelola keuangan BLUD. A system that facilitates BLUDs (Regional Public Service Agencies) in documenting the administration of planning, budgeting, execution, accountability administration, and real-time financial reporting. The E-BLUD application system is designed online to seamlessly facilitate Users in accessing data from any location, systematically based on their authorized duties and functions as BLUD financial administrators.	Telah dilakukan layanan digital dimaksud pada beberapa RSUD dan Puskesmas di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. The intended digital services have been implemented across several RSUD and Puskesmas in Provinsi Riau and Kepulauan Riau.

Selain itu, Bank juga menjalankan strategi pengembangan produk secara terarah dan berkelanjutan sebagai bagian dari rencana ekspansi layanan serta penguatan daya saing di industri perbankan khususnya perbankan syariah. Fokus utama diarahkan pada pematangan konsep, pemenuhan aspek perizinan, serta penyelarasan model bisnis terhadap kebutuhan pasar dan ketentuan regulator.

Sepanjang tahun 2025, Bank telah melakukan serangkaian aktivitas pengembangan produk baru, antara lain:

1. **Pengembangan Fitur QRIS Antarnegara sebagai *Issuer***, yang dipersiapkan untuk meningkatkan kapabilitas transaksi pembayaran lintas negara Malaysia, SIngapura, dan Thailand bagi nasabah serta memperluas peran BRK Syariah di ekosistem pembayaran digital nasional dan internasional.
2. **Fitur Tarik Tunai Tanpa Kartu**, sebagai inovasi untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan transaksi nasabah pada jaringan ATM BRK Syariah.
3. ***Virtual Account***, yang tengah dikembangkan untuk memperkuat layanan penerimaan pembayaran bagi mitra korporasi, merchant, maupun institusi pemerintah dan non-pemerintah secara lebih terintegrasi.
4. **Gerai Investasi**, sebagai inisiatif untuk menyediakan akses layanan investasi syariah yang lebih beragam, sesuai prinsip kehati-hatian dan kebutuhan finansial nasabah.

Furthermore, the Bank is implementing a targeted and sustainable product development strategy as part of its service expansion plan and to strengthen its competitiveness in the banking industry, particularly in Sharia banking. The primary focus is directed toward concept refinement, regulatory licensing compliance, and the alignment of business models with market needs and regulatory requirements.

Throughout 2025, the Bank conducted a series of new product development activities, including:

1. **Development of Cross-Border QRIS Feature as an Issuer**, prepared to enhance cross-border payment transaction capabilities in Malaysia, Singapore, and Thailand for customers, while expanding BRK Syariah's role in the national and international digital payment ecosystems.
2. **Cardless Cash Withdrawal Feature, an innovation to improve the convenience**, speed, and ease of customer transactions within the BRK Syariah ATM network.
3. **Virtual Accounts**, currently being developed to strengthen integrated payment collection services for corporate partners, merchants, as well as government and non-government institutions.
4. **Investment Outlets (Gerai Investasi)**, an initiative to provide access to a wider variety of Sharia investment services, in accordance with prudential principles and customers' financial needs.

5. **Pengembangan Laku Pandai Klasifikasi B**, yang ditujukan untuk memperluas jangkauan layanan perbankan hingga ke wilayah yang sebelumnya belum terlayani secara optimal, serta meningkatkan tingkat inklusi keuangan masyarakat.

5. **Development of Class B Branchless Banking (Laku Pandai)**, aimed at expanding the reach of banking services to previously underserved areas and increasing the level of financial inclusion in society.

Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDI

Ketersediaan Sumber Daya Insani (SDI) yang kompeten merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan bisnis BRK Syariah. Oleh karena itu, BRK Syariah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara berkelanjutan.

Pencapaian pengembangan SDI tersebut diukur melalui jumlah partisipasi pelatihan serta beban pendidikan dan pelatihan. Sepanjang tahun 2025, jumlah peserta pelatihan tercatat sebanyak 7.343 orang, atau mencapai 125,30% dari target yang ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi beban pendidikan dan pelatihan mencapai sebesar Rp19,827 miliar, atau 99,14% dari target sebesar Rp20 miliar.

Comparison of Human Resource Development Targets and Realization

The availability of competent Human Resources (HR) is a key factor in supporting BRK Syariah's business growth. Therefore, BRK Syariah implements education and training programs to continuously improve employee competencies.

The achievement of this HR development is measured through the number of training participations as well as education and training expenses. Throughout 2025, the number of training participants was recorded at 7.343 individuals, or reaching 125,30% of the set target. In line with this, the realization of education and training expenses reached Rp19,827 billion, or 99,14% of the target of Rp20 billion.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDI Tahun 2025
Table: Comparison of 2025 Human Resource Development Targets and Realization

Uraian	Realisasi 2025 2025 Realization	Target 2025 2025 Target	Pencapaian (%) Achievement (%)	Explanation
Jumlah Peserta Pelatihan	7.343	5.859	125,30%	Number of Training Participants
Beban Pendidikan dan Pelatihan (Rp juta)	19.827	20.000	99,14%	Education and Training Expenses (Rp million)

Proyeksi 2026

Manajemen BRK Syariah telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2026–2028 dengan mengacu pada perkembangan kondisi ekonomi terkini serta prospek perekonomian ke depan. Penyusunan RBB tersebut didasarkan pada asumsi makro dan mikro sebagai landasan dalam menetapkan arah dan target kinerja Bank.

2026 Projections

BRK Syariah Management has prepared the 2026–2028 Bank Business Plan (RBB) by referring to the latest economic conditions and future economic prospects. The preparation of the RBB is based on macro and micro assumptions as a foundation in determining the Bank's direction and performance targets.

Tabel Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2026
Table 2026 Macro and Micro Assumptions

Asumsi	Proyeksi 2026 2026 Projection	Assumption
ASUMSI MAKRO		**MACRO ASSUMPTIONS**
Pertumbuhan PDB (%)	5,4	GDP growth (%)
Inflasi (%)	2,5	Inflation (%)
Kurs IDR/USD	16.500	IDR/USD Exchange Rate
BI 7 Days Rate	6,90	BI 7 Days Rate
ASUMSI MIKRO		**MACRO ASSUMPTIONS**
Pertumbuhan pembiayaan (%)	5,19	Financing growth (%)
Pertumbuhan dana pihak ketiga (%)	7,79	Third party fund growth (%)

Proyeksi Keuangan 2026

Pada tahun 2026 BRK Syariah memproyeksikan kinerja keuangan yang tetap solid melalui penguatan pada aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga, seiring dengan ekspansi bisnis yang terukur dan penguatan basis nasabah yang berkelanjutan. Dari sisi pendapatan, BRK Syariah menargetkan peningkatan pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* melalui optimalisasi penyaluran dana dan peningkatan kualitas aset produktif. Sementara itu, beban usaha akan dikelola secara efisien untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas, sehingga laba bersih diharapkan tetap tumbuh dan mendukung kinerja BRK Syariah secara keseluruhan.

2026 Financial Projections

In 2026, BRK Syariah projects to maintain solid financial performance through the strengthening of assets, financing, and third-party funds, in line with measured business expansion and a sustainable strengthening of the customer base. In terms of income, BRK Syariah targets an increase in income from fund management as *mudharib* through the optimization of fund disbursement and improvement of productive asset quality. Meanwhile, operating expenses will be managed efficiently to maintain a balance between growth and profitability, ensuring that net profit continues to grow and supports BRK Syariah's overall performance.

Tabel Proyeksi Keuangan Tahun 2026 (Rp juta)
Table 2026 Financial Projections (Rp million)

Uraian	Target 2026 2026 Targetting	Explanation
Posisi Keuangan		**Financial Position**
Total Aset	32.000.000	Total Assets
Pembiayaan	22.918.597	Financing
Dana Pihak Ketiga	25.954.197	Third Party Funds
Laba Rugi		**Profit and Loss**
Pendapatan Pengelolaan Dana selaku *Mudharib*	2.538.441	Fund Management Income as *Mudharib*
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil	(748.774)	Third Party Right to Profit Sharing
Hak Bagi Hasil Milik Bank	1.789.667	Bank's Right to Profit Sharing
Pendapatan Usaha Lainnya	157.588	Other Business Income
Beban Usaha	(1.443.278)	Business Expenses
Laba Usaha	503.948	Operating Profit
Pendapatan/Beban Non Usaha – Netto	(33.948)	Non-business Income/Expense - Net
Laba Sebelum Pajak	470.000	Profit Before Tax
Laba Bersih	356.260	Net Profit

Proyeksi Penerbitan Produk/Aktivitas Baru 2026

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru Bank tahun 2026 disajikan sebagai berikut.

Projected Issuance of New Products/Activities in 2026

The plan for the issuance of new products and/or the implementation of new Bank activities in 2026 is presented as follows.

Tabel Proyeksi Penerbitan Produk/Aktivitas Baru 2026
Table of Projected Issuance of New Products/Activities in 2026

No.	Produk Product	Deskripsi	Description
1.	Gerai Investasi Investment Outlet	BRK Syariah memberikan beragam pilihan pengelolaan keuangan kepada Nasabah umum maupun Nasabah Prioritas bekerjasama dengan Perantara Penjual Efek dan Reksadana. BRK Syariah bertindak sebagai pemberi referensi atas produk-produk yang ditawarkan oleh Perantara Penjual Efek dan Reksadana dengan tujuan untuk mempertahankan Nasabah Bank dan meningkatkan pendapatan melalui *fee based income*.	BRK Syariah provides a variety of financial management options to both general and Priority Customers in collaboration with Securities and Mutual Fund Selling Agents. BRK Syariah acts as a referrer for the products offered by the Securities and Mutual Fund Selling Agents with the objective of retaining the Bank's Customers and increasing revenue through fee-based income.
2.	*New Mobile Banking* BRK Syariah New Mobile Banking BRK Syariah	Pengembangan aplikasi *mobile banking* BRK Syariah yang berfokus pada penyediaan layanan perbankan digital yang aman, mudah, dan sesuai prinsip syariah. Aplikasi dirancang dengan UI/UX yang modern, sederhana, dan intuitif, didukung fitur keamanan seperti biometrik, notifikasi *real-time*, pembayaran QRIS, dan akses layanan 24/7. Beberapa fitur yang dihadirkan adalah transfer (sesama, *online* IBFT, SKN BI, RTGS); *pay & buy*; *virtual account*; tarik tunai tanpa kartu; setor tunai tanpa kartu; *request money* (sesama, BI-*FAST*, *split bill*); haji dan umrah; emas; *customer on boarding*; *face recognition*; deposito *online*; dan pembiayaan *online*.	The development of the BRK Syariah mobile banking application focusing on the provision of digital banking services that are secure, convenient, and in accordance with Sharia principles. The application is designed with a modern, simple, and intuitive UI/UX, supported by security features such as biometrics, real-time notifications, QRIS payments, and 24/7 service access. Several featured services include transfers (on-us, online IBFT, SKN BI, RTGS); pay & buy; virtual accounts; cardless cash withdrawals; cardless cash deposits; request money (on-us, BI-FAST, split bill); Hajj and Umrah; gold; customer onboarding; face recognition; online deposits; and online financing.
3.	QRIS CPM (*Customer Presented Mode*) di *New Mobile Banking* BRK Syariah QRIS CPM (Customer Presented Mode) on New Mobile Banking BRK Syariah	Fitur pembayaran QRIS dengan metode CPM (*Customer Presented Mode*) di aplikasi BRKS mobile	QRIS payment feature with Customer Presented Mode (CPM) in the BRKS mobile application.
4.	QRIS Tap NFC di New *Mobile Banking* BRK Syariah QRIS Tap NFC on New Mobile Banking BRK Syariah	Fitur pembayaran QRIS Tap di aplikasi New Mobile Banking	QRIS Tap payment feature in the New Mobile Banking application.
5.	Layanan *Virtual Account* *Virtual Account Service*	Nasabah/mitra BRK Syariah dapat membuatkan nomor rekening virtual (*virtual acoount*/VA) yang akan digunakan sebagai rekening tujuan transaksi bagi pegawai, *customer*, dan entitas yang diinginkan oleh Nasabah/mitra tersebut tanpa harus menjadikan mereka sebagai Nasabah Bank terlebih dahulu. Melalui penggunaan VA, Nasabah/mitra Bank yang menyalurkan dana bantuan atau pun menerima uang pembayaran dapat dengan mudah mendefinisikan transaksi yang masuk ke rekening Nasabah/mitra Bank tersebut.	Customers/partners of BRK Syariah can generate virtual account (VA) numbers to be used as destination accounts for transactions by employees, customers, and other entities desired by the Customer/partner without requiring them to become Bank Customers first. Through the use of VAs, Bank Customers/partners disbursing assistance funds or receiving payment funds can easily identify the transactions entering their respective Bank Customer/partner accounts.
6.	Fitur Tarik Tunai Tanpa Kartu Cardless Cash Withdrawal Feature	Merupakan fitur pada aplikasi BRKS *Mobile* sehingga Nasabah dapat melakukan transaksi tarik tunai pada mesin ATM BRK Syariah tanpa harus menggunakan fisik kartu ATM pada saat bertransaksi.	A feature within the BRKS Mobile application enabling Customers to perform cash withdrawal transactions at BRK Syariah ATM machines without the need to use a physical ATM card during the transaction.

No.	Produk Product	Deskripsi	Description
7.	Penambahan Klasifikasi "B" Layanan BKawan (Laku Pandai) Addition of Class "B" Classification for BKawan Services (Branchless Banking/ Laku Pandai)	Layanan Laku Pandai yang semula hanya dapat menerima transaksi Nasabah tabungan BSA (Sinar Laku), kini dapat dilakukan oleh Nasabah reguler BRK Syariah pada agen Laku Pandai yang bertempat tinggal jauh dari jaringan kantor BRK Syariah. Layanan bertujuan memberikan kemudahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan keuangan lainnya.	The branchless banking service (Laku Pandai), which previously only accepted transactions from Basic Savings Account (BSA/Sinar Laku) customers, is now accessible to regular BRK Syariah customers through BKawan agents for those residing far from the Bank's office network. This service aims to provide convenience and enhance accessibility for the unbanked and underbanked populations.
8.	QRIS *Cross Border* QRIS Cross Border	Penambahan fitur pada aplikasi mobile banking yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk bertransaksi pada merchant di negara-negara yang telah bekerjasama dalam penggunaan transaksi QRIS.	Addition of a feature in the mobile banking application that enables customers to perform transactions at merchants in countries that have established cross-border QRIS payment cooperation.
9	SNAP BI	Mendukung ekosistem pembayaran digital yang aman dan terstandarisasi. Produk ini memungkinkan integrasi dengan sistem pembayaran lain serta memberikan kemudahan bagi mitra atau Nasabah Bank dalam melakukan transaksi perbankan dan memfasilitasi inovasi layanan keuangan yang lebih cepat melalui API yang telah terstandarisasi oleh Bank Indonesia.	Supporting a secure and standardized digital payment ecosystem. This product enables integration with other payment systems, provides convenience for the Bank's partners and customers in conducting banking transactions, and facilitates faster financial service innovation through APIs standardized by Bank Indonesia.

Proyeksi Pengembangan SDI 2026

Pada tahun 2026 BRK Syariah akan terus memperkuat pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) dengan mengacu pada evaluasi program tahun sebelumnya. Program pendidikan dan pelatihan diarahkan secara lebih terstruktur dan adaptif guna memastikan keselarasan dengan kebutuhan kompetensi dan dinamika bisnis Bank. Sejalan dengan hal tersebut, proyeksi pengembangan SDI difokuskan pada peningkatan partisipasi pelatihan serta pengelolaan beban pendidikan dan pelatihan secara optimal, untuk mendukung efektivitas pengembangan kompetensi dan keseimbangan biaya.

2026 Human Resource Development Projections

In 2026, BRK Syariah will continue to strengthen Human Resource (HR) development by referring to the evaluation of the previous year's programs. Education and training programs are directed in a more structured and adaptive manner to ensure alignment with competency requirements and the Bank's business dynamics. In line with this, HR development projections are focused on increasing training participation and optimally managing education and training expenses, to support the effectiveness of competency development and cost balance.

Tabel Proyeksi Pengembangan SDI 2026
Table: 2026 Human Resource Development Projections

Uraian	Proyeksi 2026 2026 Projection	Explanation
Jumlah Peserta Pelatihan	6.430	Number of Training Participants
Beban Pendidikan dan Pelatihan (Rp juta)	20.000	Education and Training Expenses (Rp million)

PROSPEK USAHA
BUSINESS PROSPECTS

Perekonomian global pada tahun 2026 diperkirakan masih menghadapi dinamika yang cukup tinggi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta ketidakpastian kebijakan ekonomi di berbagai negara. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat dari 3,3% pada 2025 menjadi 3,2% pada 2026, seiring berlanjutnya kebijakan perdagangan yang semakin proteksionis, gangguan rantai pasok global, serta volatilitas di pasar keuangan internasional.

The global economy in 2026 is projected to still face considerably high dynamics amidst escalating geopolitical tensions, trade fragmentation, and economic policy uncertainty in various countries. Based on Bank Indonesia's projections, global economic growth is projected to slow down from 3.3% in 2025 to 3.2% in 2026, in line with the continuation of increasingly protectionist trade policies, global supply chain disruptions, and volatility in international financial markets.

Grafik Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026
Graph of 2026 Economic Growth Projections



Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2025
Source: Bank Indonesia, 2025 Indonesian Economy Report

Di tengah dinamika global tersebut, prospek perekonomian Indonesia diperkirakan tetap terjaga. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,9%–5,7% pada tahun 2026. Prospek tersebut didukung oleh sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Amidst these global dynamics, Indonesia's economic prospects are expected to remain stable. Based on Bank Indonesia's projections, Indonesia's economic growth is projected to increase within the range of 4.9%–5.7% in 2026. This prospect is supported by the synergy of the national economic policy mix between the Government and Bank Indonesia in maintaining macroeconomic stability while driving sustainable growth.

Di sisi stabilitas harga, inflasi Indonesia diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada tahun 2026, seiring dengan konsistensi kebijakan moneter serta koordinasi pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat dan daerah. Stabilitas inflasi tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

On the price stability front, Indonesia's inflation is expected to remain under control within the target range of 2.5±1% in 2026, in line with the consistency of monetary policy and inflation control coordination between the Central and regional governments. This inflation stability is expected to maintain people's purchasing power while supporting the sustainability of national economic growth.

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2026 (%, yoy)
Table: Indonesia's Economic Growth Projections for 2026 (%, yoy)

Komponen	2026	Component
Pertumbuhan Ekonomi	4,9-5,7	Economic Growth
Konsumsi Rumah Tangga	4,9-5,7	Household Consumption
Konsumsi Pemerintah	7,2-8,0	Government Consumption
Investasi	5,6-6,4	Investment
Ekspor	4,9-5,7	Exports
Impor	5,0-5,8	Imports

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2025
Source: Bank Indonesia, 2025 Indonesian Economy Report

Struktur pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih didukung oleh kuatnya permintaan domestik serta peningkatan aktivitas investasi. Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 diperkirakan didukung oleh kinerja sejumlah lapangan usaha utama. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan mencatat pertumbuhan tertinggi dalam kisaran 10,8%–11,6%, diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,0%–8,8%, serta sektor jasa keuangan dan konstruksi yang masing-masing diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 7,6%–8,4% dan 7,5%–8,3%. Sementara itu, sektor dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional seperti industri pengolahan diperkirakan tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam kisaran 5,0%–5,8%, seiring dengan berlanjutnya pengembangan hilirisasi dan peningkatan aktivitas produksi domestik.

Sejalan dengan prospek perekonomian nasional tersebut, sektor jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2026 diperkirakan akan terus menunjukkan penguatan kinerja. Otoritas Jasa Keuangan memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan berada pada kisaran 10%–12%, dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 7%–9%, yang didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi serta kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor usaha.

Dalam rangka menjaga sektor jasa keuangan tetap berdaya tahan dan mampu berkontribusi lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sejumlah kebijakan prioritas yang mencakup penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem pembiayaan yang lebih kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan. Kebijakan tersebut antara lain meliputi penguatan struktur permodalan lembaga jasa keuangan, pengembangan industri keuangan syariah, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko termasuk mitigasi risiko siber, serta penguatan akses pembiayaan bagi sektor usaha produktif seperti UMKM.

This growth structure indicates that Indonesia's economy is still supported by strong domestic demand and an increase in investment activities. From a sectoral perspective, national economic growth in 2026 is expected to be supported by the performance of several main business sectors. Based on Bank Indonesia's projections, the transportation and warehousing sector is projected to record the highest growth within the range of 10.8%–11.6%, followed by the information and communication sector at 8.0%–8.8%, and the financial services and construction sectors, which are projected to grow within the ranges of 7.6%–8.4% and 7.5%–8.3%, respectively. Meanwhile, sectors with a major contribution to the national economy, such as the manufacturing industry, are expected to continue showing stable growth within the range of 5.0%–5.8%, in line with the ongoing development of downstreaming and the increase in domestic production activities.

In line with these national economic prospects, the financial services and insurance sector in 2026 is expected to continue showing performance strengthening. The Financial Services Authority (OJK) projects banking credit growth to be in the range of 10%–12%, with Third-Party Fund (DPK) growth at 7%–9%, supported by increased economic activity and financing needs across various business sectors.

In order to maintain a resilient financial services sector capable of contributing more optimally to national economic growth, the Financial Services Authority has established several priority policies covering the strengthening of the financial services sector's resilience, the development of a more contributive financing ecosystem, as well as financial market deepening and the development of sustainable finance. These policies include, among others, strengthening the capital structure of financial services institutions, developing the sharia financial industry, improving governance and risk management including cyber risk mitigation, and strengthening access to financing for productive business sectors such as MSMEs.

Dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global serta prospek perekonomian nasional tersebut, BRK Syariah optimis dapat terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Melalui penguatan fungsi intermediasi, peningkatan pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang selaras dengan prinsip syariah, serta pengembangan layanan keuangan yang inovatif dan inklusif, BRK Syariah berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Considering the global economic dynamics and the national economic prospects, BRK Syariah is optimistic that it can continue to strengthen its role as a strategic partner in driving regional economic development. Through the strengthening of the intermediation function, increased financing in productive sectors aligned with sharia principles, and the development of innovative and inclusive financial services, BRK Syariah is committed to supporting sustainable regional economic growth and providing added value and benefits for the community.

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen BRK Syariah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen hanya dapat dibagikan apabila Bank memiliki saldo laba yang positif. Bank berkomitmen untuk membagikan dividen tunai dengan rasio minimum sebesar 50% dari laba bersih setiap tahun buku, dengan besaran yang ditetapkan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi.

Dalam menetapkan besaran dividen, Bank mempertimbangkan aspek strategis, antara lain kebutuhan permodalan untuk mendukung pengembangan usaha, kondisi keuangan dan likuiditas, profil risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan regulator. Kebijakan ini mencerminkan upaya Bank untuk menjaga keseimbangan antara pemberian imbal hasil kepada Pemegang Saham dan penguatan struktur permodalan guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Dividend Policy

BRK Syariah's dividend policy is determined based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association. Net profit, after deducting provisions for reserves, may be distributed to Shareholders as dividends in accordance with the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). Dividends can only be distributed if the Bank has a positive retained earnings balance. The Bank is committed to distributing cash dividends with a minimum ratio of 50% of the net profit for each financial year, with the amount determined through the GMS based on the Board of Directors' recommendation.

In determining the dividend amount, the Bank considers strategic aspects, including capital requirements to support business development, financial and liquidity conditions, risk profile, as well as compliance with statutory provisions and regulatory policies. This policy reflects the Bank's efforts to maintain a balance between providing returns to Shareholders and strengthening the capital structure to support sustainable business growth.

Pembagian Dividen

BRK Syariah menerapkan kebijakan dividen dalam proses pembagiannya. RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada 28 April 2025 menyetujui dan menetapkan penggunaan laba Bank tahun buku 2024 sebesar Rp229.077.280.007 dibagikan sebagai dividen. Alokasi penggunaan laba tahun buku 2024 yaitu dividen sebesar 67,5%, cadangan umum sebesar 27,5% dan dana pembinaan kemitraan sebesar 5%. Rincian dividen yang dibagikan dalam dua tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel berikut.

Dividend Distribution

BRK Syariah implements its dividend policy in its distribution process. The Annual GMS for the 2024 Financial Year, held on April 28, 2025, approved and determined the appropriation of the Bank's net profit for the 2024 financial year amounting to Rp229,077,280,007 to be distributed as dividends. The appropriation of the net profit for the 2024 financial year was allocated as 67.5% for dividends, 27.5% for general reserves, and 5% for the partnership development fund. Details of the dividends distributed over the last two years are shown in the following table.

Tabel Pembagian Dividen
Table of Dividend Distribution

Uraian	Tahun Buku 2024 2024 Financial Year	Tahun Buku 2023 2023 Financial Year	Explanation
Tanggal Pengumuman	28 April 2025 April 28, 2025	22 Mei 2024 May 22, 2024	Announcement Date
Tanggal Pembayaran	16 Mei 2024 May 16, 2024	4 Juni 2024 June 4, 2024	Payment Date
Laba bersih (Rp)	339.373.748.158	283.775.067.551	Net Profit (Rp)
Cadangan Umum (Rp)	110.296.468.151	92.226.896.954	General Reserves (Rp)
Dividen (Rp)	229.077.280.007	191.548.170.597	Dividends (Rp)
Jumlah lembar saham	12.092.607	12.066.607	Number of Outstanding Shares
Dividen per Saham (Rp)	18.943,58	15.874,24	Dividend per Share (Rp)
Payout Ratio	67,50%	67,50%	Payout Ratio

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
REALIZATION OF USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERINGS

Sampai dengan 31 Desember 2025, BRK Syariah belum melakukan penawaran umum saham atau obligasi di pasar modal, sehingga tidak terdapat informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana, dan tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

Up to December 31, 2025, BRK Syariah has not conducted a public offering of shares or bonds in the capital market; therefore, there is no information regarding the total proceeds raised, planned use of proceeds, details of the use of proceeds, fund balance, and the date of GMS approval for changes in the use of proceeds.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEGAWAI DAN/ ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)
EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Sampai dengan tahun 2025 BRK Syariah belum memiliki program kepemilikan saham untuk pegawai dan/atau manajemen yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka kompensasi kepada pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi terkait ESOP (*Employee Stock Option Program*) dan MSOP (*Management Stock Option Program*) baik jumlah saham dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan pegawai dan/atau manajemen yang berhak maupun harga *exercise*.

Up to 2025, BRK Syariah did not have an employee and/or management stock ownership program implemented through a stock offering or stock option offering as compensation for employees, the Board of Directors, and the Board of Commissioners. Therefore, there is no information related to ESOP (Employee Stock Option Program) and MSOP (Management Stock Option Program), in terms of the number of shares and their realization, the timeframe, the requirements for employees and/or management entitled, as well as the exercise price.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

MATERIAL INFORMATION RELATED TO INVESTMENTS, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND DEBT AND CAPITAL RESTRUCTURING

Investasi

BRK Syariah melakukan investasi pada surat berharga syariah dengan memperhatikan profil risiko serta penerapan manajemen risiko yang efektif. Investasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan dana sekaligus mendukung peningkatan profitabilitas Bank. Nilai investasi pada surat berharga dalam dua tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Investments

BRK Syariah invests in sharia securities by considering the risk profile and the implementation of effective risk management. This investment is carried out as part of the efforts to optimize fund management while supporting the increase in the Bank's profitability. The investment value in securities over the last two years is presented in the following table.

Tabel Investasi pada Surat Berharga
Table of Investments in Securities

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

Uraian	2025	2024	Pertumbuhan Growth		Explanation
			Rp	%	
Sukuk BI tersedia untuk dijual	593.014	1.038.070	(445.056)	(42,87)	Bank Indonesia Sukuk available for sale
Sukuk Negara yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain	883.124	1.764.264	(881.140)	(49,94)	Government Sukuk Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income
Sukuk Negara yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi	3.201.729	2.078.980	1.122.750	54,00	Government Sukuk Measured at Amortized Cost
Sertifikat Investasi *Mudharabah* antar Bank (SIMA) Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi	-	-	-	-	Interbank *Mudharabah* Investment Certificates (SIMA) Measured at Amortized Cost
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	-	Allowance for Impairment Losses
Jumlah-Bersih	**4.677.867**	**4.881.313**	**(203.446)**	**(4,17)**	**Total - Net**

Selain investasi pada surat berharga, BRK Syariah juga melakukan penyertaan saham pada beberapa entitas sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan usaha dan memperkuat sinergi bisnis. BRK Syariah melakukan penyertaan saham kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gemilang/Kateman sebanyak 1,38% dengan nominal sebesar Rp200 juta, BPR Rokan Hilir sebanyak 0,91% dengan nominal sebesar Rp200 juta dan PT Sarana Riau Ventura sebanyak 7,76% dengan nominal sebesar Rp1,155 miliar pada tahun 2007. Sampai dengan tahun 2025 BRK Syariah tidak melakukan penambahan penyertaan saham.

In addition to investments in securities, BRK Syariah also makes equity participations in several entities as part of the effort to support business development and strengthen business synergy. BRK Syariah made equity participations in Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gemilang/ Kateman amounting to 1.38% with a nominal value of Rp200 million, BPR Rokan Hilir amounting to 0.91% with a nominal value of Rp200 million, and PT Sarana Riau Ventura amounting to 7.76% with a nominal value of Rp1.155 billion in 2007. Up to 2025, BRK Syariah has not made any additional equity participations.

Ekspansi Jaringan Kantor

Dalam rangka memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat serta mendukung pertumbuhan bisnis, BRK Syariah melakukan pengembangan jaringan layanan. Informasi mengenai ekspansi jaringan yang dilakukan BRK Syariah dalam 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Office Network Expansion

With a strategic objective to augment service access for the general public and facilitate sustainable corporate expansion, BRK Syariah has progressively enhanced its service delivery platform. Comprehensive data detailing the network development initiatives undertaken by BRK Syariah over the preceding two (2) fiscal years is delineated in the table provided below.

Tabel Jaringan Kantor
Table of Office Network

Uraian	2025	2024	Explanation
Kantor Cabang	23	23	Branch Offices
Kantor Cabang Pembantu/Kedai:	89	89	Sub-Branch Offices/Kedai:
- Cabang Pembantu	40	40	- Sub-Branch Offices
- Kedai	49	49	- Kedai Office
Kantor Kas/*Payment Point*/BUTIK	66	64	Cash Offices/Payment Points/BUTIK
- Kantor Kas	46	46	- Cash Offices
- *Payment Point*	19	17	- Payment Points
- BUTIK	1	1	- BUTIK

Pada tahun 2025 BRK Syariah membuka jaringan layanan baru berupa 2 (dua) *Payment Point*. Layanan ini masing-masing beroperasi pada wilayah Kabupaten Bintan yakni *Payment Point* Kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bintan serta wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yakni *Payment Point* Kantor RSUD Indrasari Kabupaten Indragiri Hulu.

Divestasi

Selama tahun 2025, BRK Syariah tidak melakukan kegiatan divestasi sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan divestasi.

Akuisisi

Selama tahun 2025, BRK Syariah tidak melakukan kegiatan akuisisi sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan akuisisi.

Restrukturisasi Hutang dan Modal

Selama tahun 2025, BRK Syariah tidak melakukan kegiatan restrukturisasi baik restrukturisasi hutang maupun modal, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan restrukturisasi.

In fiscal year 2025, BRK Syariah established two (2) new Payment Points to broaden its service footprint. These strategic points of service are situated within the Bintan Regency, specifically located at the Integrated Public Service Center (MPP) office, and within the Indragiri Hulu Regency at the Regency Public Hospital (RSUD) Indrasari office complex.

Divestment

During 2025, BRK Syariah did not carry out any divestment activities; therefore, there is no information related to the objectives, transaction values, and funding sources for divestment activities.

Acquisition

During 2025, BRK Syariah did not carry out any acquisition activities; therefore, there is no information related to the objectives, transaction values, and funding sources for acquisition activities.

Debt and Capital Restructuring

During 2025, BRK Syariah did not carry out any restructuring activities, either debt or capital restructuring; therefore, there is no information related to the objectives, transaction values, and funding sources for restructuring activities.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau dengan Pihak Afiliasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, benturan kepentingan merupakan kondisi di mana terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham utama yang berpotensi merugikan Bank. Sementara itu, transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank atau entitas anak dengan pihak terafiliasi, termasuk afiliasi dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham utama.

Dalam mengelola potensi benturan kepentingan, BRK Syariah telah memiliki kebijakan dan pedoman yang mengatur identifikasi, pengungkapan, serta pengendalian benturan kepentingan, yang dituangkan dalam SK Direksi Nomor 169/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*). Insan BRK Syariah diwajibkan untuk menghindari kondisi benturan kepentingan, mengungkapkan secara transparan apabila kondisi tersebut terjadi, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara independen oleh pihak yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan tetap mengutamakan kepentingan Bank.

Selama tahun 2025 BRK Syariah tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan tidak terdapat transaksi dengan pihak terafiliasi.

Material Transactions Containing Conflicts of Interest or with Affiliated Parties

Based on Financial Services Authority Regulation No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, a conflict of interest is a condition where there is a difference between the Bank's economic interests and the personal interests of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or main Shareholders that has the potential to harm the Bank. Meanwhile, affiliated transactions are transactions carried out by the Bank or subsidiary entities with affiliated parties, including affiliates of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or main Shareholders.

In managing potential conflicts of interest, BRK Syariah has policies and guidelines governing the identification, disclosure, and control of conflicts of interest, set forth in the Board of Directors Decree Number 169/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022, concerning Guidelines on Conflicts of Interest. BRK Syariah personnel are required to avoid conflict of interest conditions, disclose transparently if such conditions occur, and ensure that every decision is made independently by parties who do not have a conflict of interest while continuously prioritizing the Bank's interests.

During 2025, BRK Syariah did not have any material transactions containing conflicts of interest, and there were no transactions with affiliated parties.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

BRK Syariah melakukan transaksi dengan pihak berelasi dalam kegiatan usahanya sesuai ketentuan PSAK No.224 (Amandemen 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Pihak berelasi adalah pihak yang memiliki hubungan kepemilikan, pengendalian, atau pengaruh signifikan terhadap Bank, termasuk entitas anak, ventura bersama, manajemen kunci, keluarga dekat, dan program imbalan pasca kerja Bank.

Nama dan Sifat Hubungan Pihak Berelasi

Berikut ini pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan BRK Syariah dalam kegiatan usahanya.

Transactions with Related Parties

BRK Syariah conducts transactions with related parties in its business activities in accordance with the provisions of PSAK No.224 (2015 Amendment) concerning "Related Party Disclosures". Related parties are parties that have ownership relations, control, or significant influence over the Bank, including subsidiary entities, joint ventures, key management, close family members, and the Bank's post-employment benefit plans.

Names and Nature of Relationships of Related Parties

The following are the related parties transacting with BRK Syariah in its business activities.

Tabel Pihak-pihak Berelasi
Table of Related Parties

Pihak -Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi Transactions
Provinsi Riau Riau Province	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro dan Deposito Demand Deposits and Time Deposits
Kabupaten Bengkalis Bengkalis Regency	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits
Kabupaten Siak Sri Indrapura Siak Sri Indrapura Regency	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits
Kabupaten Pelalawan Pelalawan Regency	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro dan Deposito Demand Deposits and Time Deposits
Kabupaten Indragiri Hulu Indragiri Hulu Regency	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro dan Deposito Demand Deposits and Time Deposits
Kabupaten Indragiri Hilir Indragiri Hilir Regency	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro dan Deposito Demand Deposits and Time Deposits
Kota Pekanbaru Pekanbaru City	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits
Kota Dumai Dumai City	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro dan Deposito Demand Deposits and Time Deposits
Kabupaten Bintan Bintan Regency	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits
Kabupaten Rokan Hilir Rokan Hilir Regency	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro dan Deposito Demand Deposits and Time Deposits
Kabupaten Kuantan Singingi Kuantan Singingi Regency	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits
Kota Tanjung Pinang Tanjung Pinang City	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits
Kabupaten Kep. Meranti Kep. Meranti Regency	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits
Provinsi Kepulauan Riau Kepulauan Riau Province	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits
Kabupaten Kampar Kampar Regency	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits
Kabupaten Lingga Lingga Regency	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits
Kabupaten Karimun Karimun Regency	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits
Kota Batam Batam City	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro dan Deposito Demand Deposits and Time Deposits
Kabupaten Natuna Natuna Regency	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits
Kabupaten Rokan Hulu Rokan Hulu Regency	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits
Kabupaten Kepulauan Anambas Kepulauan Anambas Regency	Pemegang Saham Shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits
Karyawan Kunci Key Management Personnel	Direksi, Komisaris, Pemimpin Cabang, Pemimpin Divisi serta anggota keluarga dekat dengan orang-orang tersebut Directors, Commissioners, Branch Managers, Division Heads, and close family members of these individuals	Tabungan, Deposito, dan Kredit yang diberikan Savings, Time Deposits, and Granted Credit
PD BPR Rokan Hilir PD BPR Rokan Hilir	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama Owned by the same ultimate shareholder	Simpanan Tabungan, Simpanan Giro Savings Deposits, Demand Deposits
PD Tuah Sekata PD Tuah Sekata	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama Owned by the same ultimate shareholder	Simpanan Giro, Simpanan Deposito Demand Deposits, Time Deposits
PT Penjaminan Kredit Daerah Prop. Riau Riau Province Regional Credit Guarantee Corporation	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama Owned by the same ultimate shareholder	Simpanan Giro, Simpanan Tabungan, dan Simpanan Deposito Demand Deposits, Savings Deposits, and Time Deposits
PT PER PT PER	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama Owned by the same ultimate shareholder	Simpanan Giro dan Simpanan Deposito Demand Deposits and Time Deposits

Pihak -Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi Transactions
Riau Airlines Riau Airlines	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama Owned by the same ultimate shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits
PD BPR Rohul PD BPR Rohul	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama Owned by the same ultimate shareholder	Simpanan Tabungan Savings Deposits
PT Yastera PT Yastera	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama Owned by the same ultimate shareholder	Simpanan Giro dan Pinjaman Demand Deposits and Loans
PD Rokan Hulu Jaya PD Rokan Hulu Jaya	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama Owned by the same ultimate shareholder	Simpanan Tabungan, Simpanan Giro Savings Deposits, Demand Deposits
BPR Dana Amanah BPR Dana Amanah	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama Owned by the same ultimate shareholder	Simpanan Giro Demand Deposits

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

BRK Syariah melakukan transaksi dengan pihak berelasi dalam kegiatan perbankan. Berikut ini uraian realisasi transaksi BRK Syariah dengan pihak berelasi dalam dua tahun terakhir.

Realization of Related Party Transactions

BRK Syariah conducts transactions with related parties in its banking activities. The following is a description of the realization of BRK Syariah's transactions with related parties over the last two years.

Tabel Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi
Table of Transactions with Related Parties

(dalam jutaan rupiah) | (in million rupiah)

Uraian	2025	2024	Explanation
Aset			**Assets**
Pembiayaan yang diberikan			Granted Financing
Lembaga Pemerintah	-	31.060	Government Institutions
Karyawan Kunci	2.940	1.780	Key Management Personnel
Persentase terhadap jumlah aset	0,01%	0,11%	Percentage of total assets
Liabilitas			**Liabilities**
Simpanan *Wadiah*			*Wadiah* Deposits
Simpanan dari nasabah	6.502	11.340	Deposits from customers
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,02%	0,04%	Percentage of total liabilities
Simpanan *Mudharabah*			*Mudharabah* Deposits
Simpanan dari nasabah dan bank lain	1.064.648	487.057	Deposits from customers and other banks
Persentase terhadap jumlah liabilitas	3,84%	1,78%	Percentage of total liabilities

Simpanan dari nasabah tersebut merupakan simpanan dari manajemen kunci, pemerintah daerah dan Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama. Simpanan dari bank lain merupakan simpanan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama.

These deposits from customers consist of deposits from key management, regional governments, and Companies whose shares are owned by the same ultimate shareholder. Deposits from other banks are deposits from Rural Banks (BPR) whose shares are owned by the same ultimate shareholder.

Kewajaran Transaksi Pihak Berelasi

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan persyaratan yang telah disepakati bersama dan diawasi melalui mekanisme pengendalian internal untuk mengidentifikasi potensi benturan kepentingan.

Fairness of Related Party Transactions

All transactions with related parties are carried out in accordance with mutually agreed policies and terms and are supervised through internal control mechanisms to identify potential conflicts of interest.

PERUBAHAN KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA BANK

CHANGES IN LEGISLATION AND ITS IMPACT ON BANK PERFORMANCE

BRK Syariah memastikan kepatuhan terhadap regulator dengan mengikuti perkembangan perubahan peraturan yang diterbitkan. Peraturan tersebut dikaji untuk pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BRK Syariah agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BRK Syariah ensures compliance with regulators by continually keeping abreast of the development of issued regulatory changes. These regulations are reviewed to update and refine BRK Syariah's policies, provisions, systems, and procedures so that they are always in accordance with sharia principles and applicable laws and regulations.

Berikut ini peraturan dan perubahannya yang berlaku efektif pada tahun 2025 serta dampaknya terhadap BRK Syariah.

The following are the regulations and their changes that are effective in 2025, as well as their impact on BRK Syariah.

Tabel Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Bank
Table of Regulatory Changes and Their Impact on the Bank

Peraturan Regulation	Pokok Pengaturan Core Provisions	Dampak Impact
PBI No. 10 tahun 2025 PBI No. 10 of 2025	• Perizinan & klasifikasi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJP/PIP) • Penerapan kerangka TIKMI (Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, Infrastruktur TI) sebagai dasar penilaian dan pengawasan. • Licensing & classification of Payment System Providers (PJP/PIP). • Implementation of the TIKMI framework (Transactions, Interconnection, Competency, Risk Management, IT Infrastructure) as a basis for assessment and supervision	• Penyesuaian izin & klasifikasi PJP. • Penguatan manajemen risiko dan sistem TI. • Kewajiban penyusunan rencana bisnis sistem pembayaran. • Potensi kebutuhan tambahan modal. • - Adjustment of PJP licensing & classification. - Strengthening of risk management and IT systems. - Obligation to prepare a payment system business plan. - Potential need for additional capital.
PADG No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 17 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia – *Fast Payment* PADG No. 1 of 2025 concerning Amendments to the Regulation of the Members of the Board of Governors No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Bank Indonesia – Fast Payment	• Penguatan Manajemen Risiko pada penyelenggaraan BI-Fast • Penerapan Fitur *Proactive Risk Manager* • Mekanisme Pemberian *alert* dan penolakan transaksi • Kewajiban peserta menindaklanjuti *alert* • Kewajiban pelaporan *fraud* kepada penyelenggara • Kewajiban memiliki *fraud management system* • Strengthening Risk Management in the implementation of BI-Fast. • Implementation of the Proactive Risk Manager Feature. • Mechanism for providing alerts and rejecting transactions. • Participants' obligation to follow up on alerts. • Obligation to report fraud to the organizer. • Obligation to have a fraud management system.	• Dapat mendeteksi *anomaly* transaksi keuangan dan memitigasi risiko transaksi keuangan mencurigakan. • Dalam pengelolaan *Fraud*, bank dapat membatasi jumlah transaksi dan/atau nilai nominal transaksi yang dapat ditransaksikan oleh nasabah pada suatu waktu tertentu dan dapat melakukan penundaan transaksi • Menerapkan metode pengelolaan *fraud* atau fitur sistem deteksi *fraud* • Ability to detect financial transaction anomalies and mitigate the risk of suspicious financial transactions. • In Fraud management, the bank can limit the number of transactions and/or the nominal value of transactions that can be conducted by customers at a specific time and can delay transactions. • Implementing fraud management methods or fraud detection system features.
PADG No. 14 Tahun 2025 PADG No. 14 of 2025	• Penguatan Keamanan & Manajemen Risiko BI-FAST • Standar Keamanan Sistem Informasi • Penanganan Insiden & Kontinuitas Bisnis • Penguatan Pengawasan & Kepatuhan • Strengthening Security & Risk Management of BI-FAST. • Information System Security Standards. • Incident Handling & Business Continuity. • Strengthening Supervision & Compliance.	• Bank wajib menerapkan standar keamanan informasi dan ketahanan siber. • Mitigasi yang efektif terhadap potensi gangguan dan ancaman terhadap operasional BI-*Fast*. • Penerapan pengamanan *system* informasi • Penyesuaian ketentuan internal dan sinkronisasi *system* deteksi *fraud* • The bank is required to implement information security and cyber resilience standards. • Effective mitigation of potential disruptions and threats to BI-Fast operations. • Implementation of information system security. • Adjustment of internal provisions and synchronization of the fraud detection system.
POJK Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank POJK Number 18 of 2025 Concerning Transparency and Publication of Bank Reports	• Penguatan transparansi informasi bank kepada *public* • Pengaturan jenis laporan publikasi bank • Pengaturan tata cara dan periodisasi publikasi laporan • Penguatan kualitas penyusunan laporan keuangan • Penerapan sanksi bagi pelanggaran • Strengthening the transparency of bank information to the public. • Regulation of the types of published bank reports. • Regulation of the procedures and periodicity of report publication. • Strengthening the quality of financial report preparation. • Implementation of sanctions for violations.	• Meningkatkan integritas dan kompetensi penyusunan laporan keuangan • Meningkatkan keakuratan dan menyusun laporan sesuai standar akuntansi agar tidak dikenakan sanksi sebagaimana sanksi pada POJK Integritas Pelaporan Keuangan • Pengungkapan pihak yang mempunyai hubungan istimewa secara tahunan yang lebih lengkap. • Pengungkapan isi laporan tahunan dengan lebih detail. • Enhancing the integrity and competence of financial report preparation. • Improving accuracy and compiling reports in accordance with accounting standards to avoid sanctions as stipulated in the POJK on the Integrity of Financial Reporting. • More comprehensive annual disclosure of related parties. • More detailed disclosure of the contents of the annual report.

Peraturan Regulation	Pokok Pengaturan Core Provisions	Dampak Impact
POJK No. 19 Tahun 2025 Tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah POJK No. 19 of 2025 Concerning Ease of Financing Access for Micro, Small, and Medium Enterprises	• Kewajiban Lembaga Keuangan memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM • Penerapan prinsip pembiayaan UMKM yang mudah dan inklusif • Pengaturan kebijakan dan skema khusus pembiayaan UMKM • Kewajiban penyusunan rencana penyaluran pembiayaan UMKM • Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM • Penguatan ekosistem pembiayaan melalui kemitraan dan teknologi • Ketentuan pengelolaan kredit bermasalah dan literasi keuangan • Obligation of Financial Institutions to provide ease of financing access for MSMEs. • Application of easy and inclusive MSME financing principles. • Regulation of specific MSME financing policies and schemes. • Obligation to prepare an MSME financing disbursement plan. • Strengthening governance, risk management, and human resources. • Strengthening the financing ecosystem through partnerships and technology. • Provisions for managing non-performing financing and financial literacy.	• Penetapan Kebijakan Khusus pembiayaan UMKM • Bank melakukan Penyusunan Skema Khusus pembiayaan sesuai karakteristik usaha • Percepatan proses bisnis penyaluran pembiayaan kepada UMKM • Penetapan biaya yang wajar terkait pembiayaan • Establishment of Specific Policies for MSME financing. • The Bank establishes Specific Schemes for financing according to business characteristics. • Acceleration of business processes for financing disbursement to MSMEs. • Determination of reasonable fees related to financing.
POJK No. 20 Tahun 2025 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. POJK No. 20 of 2025 concerning the Obligation to Fulfill the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.	• Kewajiban pemenuhan rasio likuiditas bagi bank Syariah • Pengaturan perhitungan dan komponen rasio LCR • Pengaturan perhitungan dan komponen rasio NSFR • Ketentuan pemenuhan minimum rasio • Kewajiban pelaporan kepada OJK • Penguatan Manajemen Risiko Likuiditas • Sanksi Administratif bagi BUS dan UUS yang tidak memenuhi ketentuan • Obligation to fulfill liquidity ratios for Sharia banks. • Regulation of the calculation and components of the LCR. • Regulation of the calculation and components of the NSFR. • Provisions for fulfilling minimum ratios. • Reporting obligations to the OJK. • Strengthening Liquidity Risk Management. • Administrative sanctions for BUS and UUS that fail to comply with the provisions.	• Bank wajib memelihara kecukupan likuiditas dan pendanaan stabil bersih yang memadai. • Bank wajib melakukan perhitungan LCR secara harian. • Bank wajib melakukan pemantauan pemenuhan NSFR • The bank is required to maintain adequate liquidity coverage and net stable funding. • The bank is required to calculate the LCR daily. • The bank is required to monitor the fulfillment of the NSFR.
POJK No. 21 Tahun 2025 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bank Umum Syariah POJK No. 21 of 2025 Concerning the Obligation to Fulfill the Leverage Ratio for Sharia Commercial Banks	• Kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio*) • Tujuan penerapan Rasio Pengungkit yakni membatasai tingkat pengungkitan yang berlebihan • Perhitungan Rasio Pengungkit • Batas minimum rasio • Pelaporan wajib disampaikan kepada OJK secara trwiulanan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui *website* bank. • Rencana tindak dan sanksi apabila rasio tidak terpenuhi • Obligation to fulfill the Leverage Ratio. • The objective of implementing the Leverage Ratio is to restrict excessive leverage. • Calculation of the Leverage Ratio. • Minimum ratio limit. • Reports must be submitted to the OJK quarterly and published to the public via the bank's website. • Action plans and sanctions if the ratio is not fulfilled.	• Bank wajib menyediakan modal inti yang memadai berdasarkan total eksposur yang tercatat dalam posisi laporan keuangan serta laporan komitmen dan kontijensi. • Bank wajib memenuhi Rasio Pengungkit paling rendah 3% setiap waktu dalam dominasi rupiah • Kewajiban pemenuhan rasio pengungkit pertama kali berlaku untuk akhir triwulan, laporan disampaikan pertama kali untuk akhir bulan Maret 2026. • Bank wajib mempublikasikan laporan perhitungan dan nilai Rasio Pengungkit untuk posisi Laporan September 2026. • Dalam hal Bank tidak mampu memenuhi rasio, maka Bank wajib menyampaikan rencana tindak kepada OJK yang memuat Langkah perbaikan, kendala dan jangka waktu penyelesaian • The bank must provide adequate core capital based on the total exposures recorded in the statement of financial position as well as the commitments and contingencies report. • The bank is required to maintain a Leverage Ratio of at least 3% at all times in Rupiah denomination. • The obligation to fulfill the leverage ratio first applies at the end of the quarter; the report is submitted for the first time for the end of March 2026. • The bank is required to publish the calculation report and the value of the Leverage Ratio for the September 2026 reporting position. • In the event the Bank is unable to fulfill the ratio, the Bank is required to submit an action plan to the OJK containing corrective measures, constraints, and a completion timeframe.
POJK No. 24 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum POJK No. 24 of 2025 Concerning the Management of Accounts at Commercial Banks	• Standardisasi pengelolaan rekening nasabah agar terdapat keseragaman • Kewajiban bank memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan rekening • Klasifikasi status rekening • Kewajiban *system* pemantauan rekening • Penguatan perlindungan nasabah dan pencegahan penyalahgunaan rekening • Standardization of customer account management to ensure uniformity. • Obligation for banks to have account management policies and procedures. • Classification of account status. • Obligation to have an account monitoring system. • Strengthening customer protection and preventing account misuse.	• Penyusunan Kebijakan mengenai Pengelolaan Rekening • Pengelolaan Rekening Giro dan Tabungan dapat diklasifikasikan • Membuat *system*/sarana komunikasi dengan nasabah dalam menyampaikan informasi status rekening • Formulation of Policies regarding Account Management. • Management of Current and Savings Accounts can be classified. • Establishing a system/communication channel with customers to convey information on account status.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Pada tanggal 1 Januari 2025, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

Dampak Perubahan Kebijakan

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi BRK Syariah dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Effective January 1, 2025, the following new standards, along with adjustments or amendments to existing standards, came into effect:

- Amendments to PSAK 221: "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding lack of exchangeability.

Impact of Policy Changes

The implementation of these standards did not result in any substantial changes to BRK Syariah's accounting policies and had no material impact on the financial statements for the current year or prior years.



TINGKAT KESEHATAN BANK
BANK SOUNDNESS LEVEL

BRK Syariah melakukan Berdasarkan Penilaian OJK dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*). Penilaian tersebut mencakup empat faktor yaitu profil risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas, dan permodalan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/ POJK.03/2014 dan SE OJK No. 10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Hasil akhir dari Penilaian OJK tingkat kesehatan bank berupa Peringkat Komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Peringkat komposit tingkat kesehatan BRK Syariah posisi 31 Desember 2025 berada pada Peringkat Komposit 3 (Cukup Sehat). Hasil penilaian tersebut mencerminkan kondisi BRK Syariah secara umum cukup sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Berikut ini hasil Penilaian OJK periode Desember 2024-2025.

BRK Syariah conducts its assessment based on the OJK Assessment using a risk approach (risk-based bank rating). The assessment encompasses four factors, namely risk profile, Good Corporate Governance (GCG), profitability, and capital, which refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.03/2014 and OJK Circular Letter (SE OJK) No. 10/SEOJK.03/2014 concerning the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
The final result of the OJK Assessment of the bank soundness level is the Bank Soundness Composite Rating, which is determined based on a comprehensive and structured analysis of the rating of each factor by taking into account the materiality and significance of each respective factor. BRK Syariah's composite rating of the soundness level as of December 31, 2025, stands at Composite Rating 3 (Fairly Sound). This assessment result reflects that the condition of BRK Syariah is generally fairly sound, and thus it is assessed as capable of withstanding significant negative impacts from changes in business conditions and other external factors. The following are the results of the OJK Assessment for the December 2024-2025 period.

Tabel Peringkat Tingkat Kesehatan BRK Syariah Posisi 31 Desember 2024-2025
Table of BRK Syariah Soundness Level Ratings as of December 31, 2024-2025

Faktor Penilaian	Peringkat Rating		Assessment Factor
	Desember 2025 Dec 2025	Desember 2024 Dec 2024	
Profil Risiko	3	3	Risk Profile
Good Corporate Governance (GCG)	3	3	Good Corporate Governance (GCG)
Rentabilitas	3	2	Rentability
Permodalan	2	2	Capital
Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank	3	3	Bank Soundness Composite Rating

ASPEK PERPAJAKAN
TAXATION ASPECTS

Pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan bagian dari komitmen BRK Syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta mendukung penerimaan negara dan daerah. Bank melaksanakan perannya sebagai Wajib Pajak Badan serta sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak atas transaksi dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Fulfilling tax obligations is part of BRK Syariah's commitment to ensuring compliance with applicable regulations and supporting state and regional revenue. The Bank performs its role as a Corporate Taxpayer as well as a tax withholder and/or collector for transactions with third parties in accordance with applicable tax provisions.

Sepanjang tahun 2025, total pajak yang disetorkan oleh BRK Syariah mencapai Rp21,43 miliar turun sebesar 30,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh utang pajak penghasilan pasal 29 yang turun sebesar 82,15% dibandingkan tahun sebelumnya.

Throughout 2025, the total taxes remitted by BRK Syariah reached Rp21.43 billion, representing a decrease of 30.67% compared to the previous year. This decline was primarily driven by a significant reduction in Article 29 Income Tax payable, which dropped by 82.15% year-on-year.

Tabel Pembayaran Pajak
Table of Tax Payments

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

Uraian	2025	2024	Explanation
Utang Pajak penghasilan			**Income Tax Payable**
Pasal 29	2.831	15.858	Article 29
Utang Pajak Lainnya			**Other Taxes Payable**
PPh pasal 4 (2)	5.294	6.018	Income Tax Article 4 (2)
PPh pasal 21	984	525	Income Tax Article 21
PPh pasal 23	436	524	Income Tax Article 23
PPh pasal 25	11.874	7.979	Income Tax Article 25
PPN dan PPh Lainnya	12	6	VAT and Other Income Taxes
Jumlah	**21.431**	**30.910**	**Total**

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

BRK Syariah konsisten mengidentifikasi serta memitigasi berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi stabilitas operasional. Dari sisi eksternal, BRK Syariah mencermati dinamika perekonomian global dan nasional terutama Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, fluktuasi sektor riil yang berdampak pada kualitas pembiayaan, serta adaptasi terhadap perubahan regulasi yang diterbitkan oleh regulator. Secara internal, fokus utama diarahkan pada akselerasi transformasi digital, penguatan tata kelola perusahaan (GCG), serta efisiensi operasional untuk menjaga daya saing dan kecukupan permodalan. Melalui pengelolaan risiko yang terukur, Manajemen BRK Syariah berkeyakinan bahwa hingga akhir tahun buku 2025, tidak terdapat hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Bank.

Matters Potentially Having a Significant Impact on Business Continuity

BRK Syariah consistently identifies and mitigates various factors that potentially affect operational stability. Externally, BRK Syariah observes global and national economic dynamics, particularly in Riau Province and Kepulauan Riau Province, real sector fluctuations impacting financing quality, and adaptation to regulatory changes issued by regulators. Internally, the primary focus is directed toward the acceleration of digital transformation, the strengthening of Good Corporate Governance (GCG), and operational efficiency to maintain competitiveness and capital adequacy. Through measurable risk management, BRK Syariah Management believes that up to the end of the 2025 financial year, there are no matters significantly affecting the Bank's business continuity.

Assessment Manajemen atas Hal-hal yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Manajemen BRK Syariah melakukan penilaian kelangsungan usaha melalui evaluasi menyeluruh terhadap posisi strategis Bank. Proses ini dilakukan dengan menimbang kekuatan dan menganalisis kelemahan internal yang perlu diperbaiki. Peluang ekspansi pasar pun dipetakan oleh Manajemen sekaligus mengantisipasi ancaman dari persaingan industri perbankan dan perubahan kondisi ekonomi. Laporan keuangan BRK Syariah disusun dengan asumsi kelangsungan usaha (*going concern*). Laporan keuangan BRK Syariah tahun 2025 telah mendapatkan opini wajar dalam semua hal yang material termasuk didalamnya adalah posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Hasil evaluasi ini mengonfirmasi keyakinan Manajemen bahwa tidak terdapat ketidakpastian material yang dapat menghambat keberlanjutan usaha Bank.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan *Assessment*

Manajemen mendasarkan analisis penilaian kelangsungan usaha pada asumsi-asumsi sebagaimana dimuat dalam Rencana Bisnis Bank. Asumsi tersebut mencakup indikator makroekonomi seperti PDB, tingkat inflasi, dan nilai tukar secara historis dan proyeksi, serta perubahan regulasi dan kebijakan Pemerintah. Dari sisi internal, Manajemen mempertimbangkan capaian kinerja keuangan, kecukupan permodalan, dan efisiensi operasional untuk memastikan stabilitas serta keberlanjutan operasional Bank dalam menghadapi dinamika pasar.

Management's Assessment of Matters Having a Significant Impact on Business Continuity

BRK Syariah Management conducts a business continuity assessment through a comprehensive evaluation of the Bank's strategic position. This process is carried out by weighing internal strengths and analyzing weaknesses that require improvement. Market expansion opportunities are also mapped by Management while simultaneously anticipating threats from banking industry competition and changing economic conditions. BRK Syariah's financial statements are prepared on a going concern assumption. BRK Syariah's 2025 financial statements have received a fair opinion in all material respects, including the financial position, financial performance and cash flows, reconciliation of income and profit sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of Qardhul Hasan funds in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The results of this evaluation confirm Management's belief that there is no material uncertainty that could impede the Bank's business sustainability.

Assumptions Used by Management in Conducting the Assessment

Management bases the business continuity assessment analysis on the assumptions set forth in the Bank's Business Plan. These assumptions encompass macroeconomic indicators such as GDP, inflation rates, and exchange rates, both historically and projected, as well as changes in government regulations and policies. Internally, Management considers financial performance achievements, capital adequacy, and operational efficiency to ensure the Bank's operational stability and sustainability in facing market dynamics.

LARANGAN BATASAN DAN/ATAU HAMBATAN SIGNIFIKAN UNTUK MELAKUKAN PENYEDIAAN DANA ANTARA BANK DAN ENTITAS LAIN DALAM SUATU KELOMPOK USAHA

PROHIBITIONS, RESTRICTIONS, AND/OR SIGNIFICANT OBSTACLES TO PROVIDING FUNDS BETWEEN THE BANK AND OTHER ENTITIES WITHIN A BUSINESS GROUP

BRK Syariah menerapkan kebijakan pembatasan penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam implementasinya, BRK Syariah telah menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur BMPD dan penyaluran dana besar kepada pihak terkait, penyediaan dana besar, serta penyediaan dana kepada pihak lain.

BRK Syariah implements a policy restricting fund distribution to related parties in accordance with the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 26/POJK.03/2021 concerning the Legal Lending Limit (Batas Maksimum Penyaluran Dana/BMPD) and Large Fund Distribution for Sharia Commercial Banks as part of the implementation of Good Corporate Governance principles. In its implementation, BRK Syariah has established Standard Operating Procedures (SOP) governing the Legal Lending Limit (BMPD) and large fund distribution to related parties, large fund provision, as well as fund provision to other parties.

Tabel Penyediaan Dana Pihak Terkait
Table of Related Party Fund Provision

No	Penyedia Dana	Jumlah 2025 Total 2025		Jumlah 2024 Total 2024		Fund Provision
		Number of *Account* (NoA) Number of Account (NoA)	Nominal (dalam jutaan Rupiah) Amount (in millions of Rupiah)	Number of *Account* (NoA) Number of Account (NoA)	Nominal (dalam jutaan Rupiah) Amount (in millions of Rupiah)	
1	Kepada Pihak Terkait	7	2.864	6	1.780	To Related Parties
2	Kepada 20 Debitur Inti	-	-	-	-	To Top 20 Core Debtors
	Individu	39	1.527.795	39	1.552.858	Individuals
	Group	-	-	-	-	Groups
Total Debitur Inti		-	-	-	-	**Total Core Debtors**

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Pada akhir tahun 2025 BRK Syariah memiliki komitmen dan kontinjensi sebesar Rp600,53 miliar meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp597,17 miliar. Ini terdiri dari kewajiban komitmen dari fasilitas pembiayaan yang belum ditarik sebesar Rp280,97 miliar, tagihan kontinjensi berupa pendapatan dalam penyelesaian sebesar Rp290,32 miliar, dan kewajiban kontinjensi berupa garansi yang diberikan dan kewajiban lainnya sebesar Rp29,24 miliar. Berikut ini tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi BRK Syariah dalam dua tahun terakhir.

As of the end of 2025, BRK Syariah recorded total commitments and contingencies of Rp600.53 billion, representing an increase from the Rp597.17 billion recorded in 2024. This total comprises commitment liabilities stemming from undrawn financing facilities amounting to Rp280.97 billion, contingent claims in the form of income in settlement totaling Rp290.32 billion, and contingent liabilities arising from issued guarantees and other obligations amounting to Rp29.24 billion. The following section details BRK Syariah's commitment and contingency claims and liabilities over the past two years.

Tabel Komitmen dan Kontinjensi
Table of Commitments and Contingencies

(Dalam Jutaan Rupiah)| (In million rupiah)

No.	Uraian	2025	2024	Explanation
I	**TAGIHAN KOMITMEN**	-	-	**COMMITMENT RECEIVABLES**
1	Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	-	-	Undrawn financing facilities
2	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan *forward*	-	-	Foreign exchange position to be received from spot and forward transactions
3	Lainnya	-	-	Others

No.	Uraian	2025	2024	Explanation
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	280.973	291.008	COMMITMENT LIABILITIES
1	Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	280.973	291.008	Undrawn financing facilities
	Committed	280.973	291.008	Committed
	Uncommitted	-	-	Uncommitted
2	*Irrevocable* L/C yang masih berjalan	-	-	Outstanding Irrevocable L/C
3	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi *spot* dan *forward*	-	-	Foreign exchange position to be delivered for spot and forward transactions
4	Lainnya	-	-	Others
III	TAGIHAN KONTINJENSI	290.315	278.543	CONTINGENCY RECEIVABLES
1	Garansi yang diterima	-	-	Guarantees received
2	Pendapatan dalam penyelesaian	290.315	278.543	Income in settlement
	Murabahah	6.734	2.641	*Murabahah*
	Istishna'	-	-	*Istishna'*
	Sewa	22	-	Lease (*Ijarah*)
	Bagi hasil	4.297	456	Profit sharing
	Lainnya	279.262	275.446	Others
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	29.241	27.615	CONTINGENCY LIABILITIES
1	Garansi yang diberikan	29.241	27.615	Guarantees issued
2	Lainnya	-	-	Others
	Jumlah	**600.529**	**597.166**	**Total**

PERJANJIAN DAN PERIKATAN
AGREEMENTS AND ENGAGEMENTS

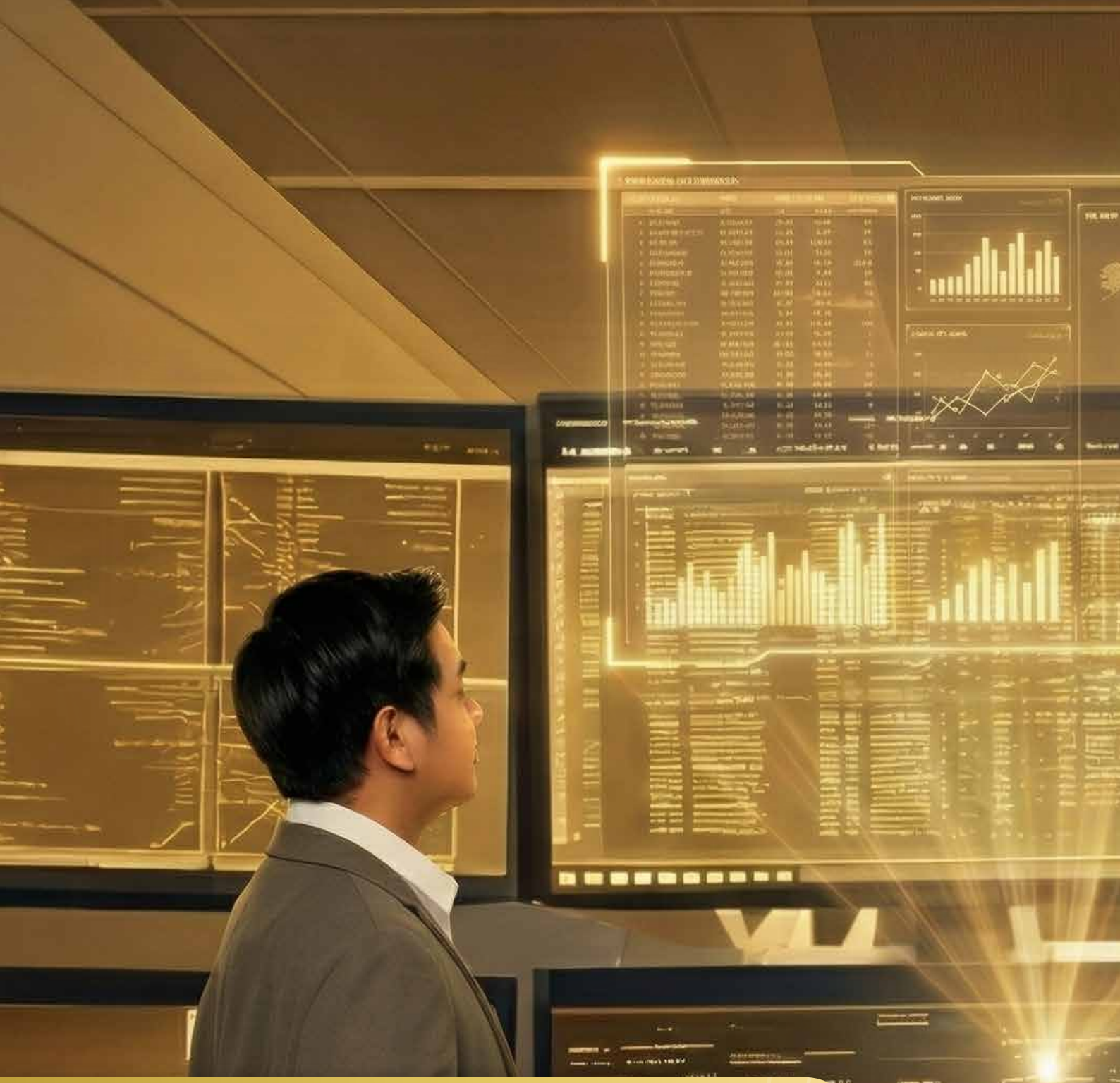
BRK Syariah memiliki sejumlah perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung kegiatan operasional, pengembangan usaha, serta peningkatan kualitas layanan kepada nasabah dan pemangku kepentingan. Perjanjian yang masih berlaku hingga tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- **Pekerjaan pengelolaan Kas ATM wilayah Pekanbaru, Batam, dan Tanjung Pinang**
  BRK Syariah menjalin perjanjian kerja sama dengan PT Swadharma Sarana Informatika pada 11 Maret 2025 terkait pekerjaan pengelolaan Kas ATM wilayah Pekanbaru, Batam, dan Tanjung Pinang. Perjanjian berlaku selama 12 bulan. Pekerjaan tersebut dilakukan secara berkesinambungan dan dilaporkan setiap bulan dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
- **Pengadaan barang/jasa *maintenance* CRM (*Cash Recycle Machine*)**
  BRK Syariah menjalin perjanjian kerja sama dengan PT Hitachi Channel Solutions Indonesia pada 18 Juli 2023 terkait pengadaan barang/jasa *maintenance* CRM. Perjanjian berlaku selama 12 bulan dan selanjutnya diperpanjang secara otomatis setiap bulan

- **Perjanjian Penyelenggaraan ATM Bersama**
  Bank menjalin perjanjian kerja sama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis pada 3 Oktober 2003 terkait penyelenggaraan jaringan ATM Bersama. Perjanjian berlaku selama 36 bulan dan selanjutnya diperpanjang secara otomatis setiap tahun. Melalui kerja sama ini, Bank memperoleh akses ke jaringan ATM Bersama yang tersebar di lebih dari 31.000 ATM di seluruh Indonesia.

BRK Syariah maintains several cooperative agreements with various counterparties to support operational activities, business development, and the continuous enhancement of service quality for both customers and stakeholders. The agreements that remain in effect through 2025 include, but are not limited to, the following:

- **ATM Cash Management Services for the Pekanbaru, Batam, and Tanjung Pinang Regions**
  BRK Syariah entered into a cooperative agreement with PT Swadharma Sarana Informatika on March 11, 2025, concerning ATM cash management services for the Pekanbaru, Batam, and Tanjung Pinang regions. This agreement is valid for a period of 12 months. The contracted services are executed on a continuous basis and are reported monthly in accordance with the provisions stipulated within the agreement.
- **Procurement of Goods and Services for CRM (Cash Recycle Machine) Maintenance**
  BRK Syariah entered into a cooperative agreement with PT Hitachi Channel Solutions Indonesia on July 18, 2023, regarding the procurement of goods and services for CRM maintenance. The agreement is valid for an initial period of 12 months and is subsequently subject to automatic monthly renewal.
- **ATM Bersama Network Implementation Agreement**
  The Bank entered into a cooperative agreement with PT Artajasa Pembayaran Elektronis on October 3, 2003, regarding the implementation of the ATM Bersama network. The agreement is valid for an initial period of 36 months and is subsequently subject to automatic annual renewal. Through this strategic partnership, the Bank secures access to the ATM Bersama network, which encompasses a widespread distribution of over 31,000 ATMs across Indonesia.



TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORT OVERVIEW



MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

BRK Syariah memandang Sumber Daya Insani (SDI) sebagai pemangku kepentingan strategis yang memiliki peran kunci dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan Bank. Insan BRK Syariah menempati posisi sentral sebagai penggerak utama operasional sekaligus penentu tercapainya visi dan misi Perusahaan.

BRK Syariah views Human Resources (HR) as a strategic stakeholder with a key role in supporting the Bank's success and sustainability. BRK Syariah employees occupy a central position as the primary drivers of operations and the key determinants in achieving the Company's vision and mission.

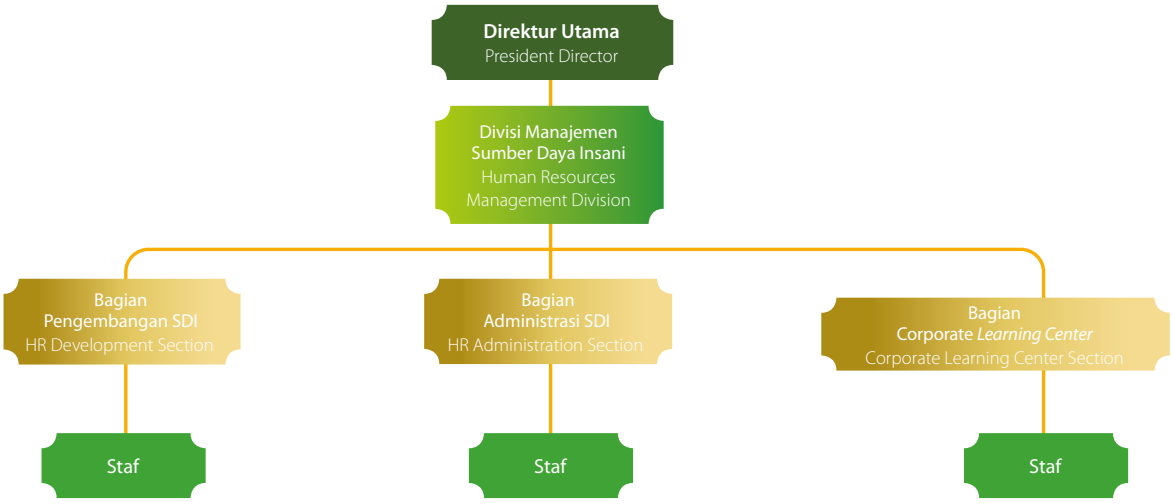
Sebagai mitra strategis dalam menjalankan usaha, SDI dikelola secara profesional melalui pengembangan kompetensi, penguatan integritas, serta peningkatan dedikasi dan kinerja. BRK Syariah berkomitmen membangun lingkungan kerja yang kondusif serta memenuhi hak dan harapan karyawan sehingga tercipta hubungan yang selaras antara kepentingan Perusahaan dan Insan BRK Syariah guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

As a strategic partner in running the business, Human Resources (HR) is managed professionally through competency development, integrity strengthening, and increased dedication and performance. BRK Syariah is committed to building a conducive work environment and fulfilling employee rights and expectations, thus creating a harmonious relationship between the interests of the Company and BRK Syariah's employees to support sustainable growth.

Struktur Organisasi Manajemen SDI BRK Syariah

BRK Syariah SDI Management Organizational Structure

Struktur Organisasi Manajemen SDI BRK Syariah
BRK Syariah HR Management Organizational Structure



Divisi Manajemen SDI dipimpin oleh Pemimpin Divisi Manajemen SDI yang berada langsung dibawah Plt. Direktur Utama. Pemimpin Divisi Manajemen SDI BRK Syariah dijabat oleh Sdr. Muhammad Affan. Profil ringkas beliau dijelaskan pada Laporan Tahunan ini dalam bab Profil Perusahaan sub bab Profil Pejabat Satu Tingkat di bawah Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen SDI

Tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Sumber Daya Insani adalah sebagai berikut:

1. Mengatur dan menyusun strategi Rencana Kerja dan Anggaran Unit (RKAU) Divisi Manajemen Sumber Daya Insani.
2. Menyelenggarakan, memonitor, mengendalikan dan mengadministrasikan serta membuat laporan pelaksanaan RKAU Divisi Manajemen Sumber Daya Insani sehubungan dengan bidang tugasnya dan kegiatan lain yang meliputi:
   a. Menjabarkan Rencana Kerja dan Anggaran serta Strategi Bisnis Divisi Manajemen SDI dalam bentuk *Key Performance Indicator* (KPI).
   b. Menyusun dan pengkinian peraturan perusahaan yang berkaitan dengan Kepegawaian yang berpedoman kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku.
   c. Menyusun program Kompensasi dan Benefit Pengurus serta Pegawai Bank.
   d. Penyelenggaraan, *monitoring* dan pengendalian seluruh Program pengembangan Pegawai melalui program magang, pendidikan, dan pelatihan baik melalui *inhouse*, publik maupun pembelajaran elektronik.
   e. Memastikan pengelolaan *database* kepegawaian dari Pengurus dan Pegawai Bank, termasuk pengelolaan laporan Pejabat Eksekutif dan Pengurus Bank kepada Otoritas.
   f. Penanggung jawab pengelolaan *Learning Center* dan Perpustakaan Bank.
   g. Memastikan pengelolaan *website e-recruitment* Bank.
   h. Memastikan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan pihak eksternal dalam pengelolaan *Learning Center*.
   i. Bertanggung jawab dalam penyediaan dan pengembangan SDI yang kompeten guna menunjang pencapaian target kinerja unit bisnis.
   j. Bertanggungjawab dalam program pengembangan dan kaderisasi Pegawai dan pengisian personel sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
   k. Menjaga hubungan baik antara Pegawai, Manajemen, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan.

Head of the Human Resources Management Division is directly under the Acting President Director. The Head of the Human Resources Management Division at BRK Syariah is Mr. Muhammad Affan. His brief profile is explained in this Annual Report in the Company Profile chapter, sub-chapter on Profiles of Officials One Level Below the Board of Directors.

Duties and Responsibilities of the Human Resources Management Division

The duties and responsibilities of the Human Resources Management Division are as follows:

1. Organize and develop strategies for the Human Resources Management Division's Work Plan and Unit Budget (RKAU).
2. Organize, monitor, control and administer as well as make reports on the implementation of the Human Resources Management Division's RKAU in relation to its field of duties and other activities which include:
   a. Describe the Work Plan and Budget as well as the Business Strategy of the Human Resources Management Division in the form of Key Performance Indicators (KPIs).
   b. Prepare and update company regulations relating to employment that are guided by applicable regulations and laws.
   c. Developing Compensation and Benefit programs for Bank Managers and Employees.
   d. Implementation, monitoring and control of all Employee Development Programs through internship programs, education and training both in-house, public and electronic learning.
   e. Ensure the management of the personnel database of the Bank's Management and Employees, including the management of reports from Executive Officers and Bank Management to the Authority.
   f. Responsible for managing the Learning Center and Bank Library.
   g. Ensure management of the Bank's e-recruitment website.
   h. Ensure the implementation of cooperation and partnerships with external parties in the management of the Learning Center.
   i. Responsible for providing and developing competent human resources to support the achievement of business unit performance targets.
   j. Responsible for employee development and cadre programs and personnel recruitment in accordance with the Organizational Structure and Work Procedures.
   k. Maintain good relations between employees, management, government and other relevant parties.

l. Memastikan proses mediasi terhadap permasalahan yang terjadi antara Pegawai dan Bank.
m. Memberikan *reward* dan *punishment* untuk dan atas nama Direksi kepada pegawai.
n. *Review* Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank sesuai dengan perkembangan bisnis Bank.
o. Memastikan *monitoring* dan evaluasi terhadap program pensiun untuk Pengurus dan Pegawai baik yang diselenggarakan oleh Bank maupun oleh pihak lainnya.

3. Merumuskan kebijakan dan pengarahan Direksi dalam suatu Instruksi, Ketetapan, Keputusan, dan Prosedur tertulis sebagai pedoman bagi staf dan Pegawai baik di lingkungan Divisi Manajemen SDI maupun Bank secara keseluruhan.
4. Melatih/membimbing bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, prestasi dan mutu pegawai, termasuk diantaranya mengusulkan pelatihan/*workshop*.
5. Memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.
6. Menetapkan satu orang Pegawai yang juga berfungsi sebagai *support assistance* yang bertugas antara lain sebagai administrator, pemantauan SLA dan program kerja Divisi Manajemen SDI.
7. Penetapan uraian tugas pokok untuk seluruh pegawai di Divisi masing-masing.
8. Penetapan rencana kerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk Sasaran Kinerja Individu (SKI).
9. Dalam hal Pemimpin Divisi berhalangan, baik tetap maupun sementara, maka pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan fungsi Pemimpin Divisi akan dilaksanakan oleh minimal dua orang Pemimpin bagian/pejabat setingkat. Apabila di dalam suatu unit kerja (Divisi) hanya terdapat satu orang Pemimpin Bagian/pejabat setingkat maka akan dilaksanakan oleh Pemimpin Bagian/pejabat setingkat tersebut.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas Divisi Manajemen SDI.

Kebijakan dan Strategi Manajemen SDI

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan kebijakan otoritas, Bank terus melakukan penyesuaian kebijakan serta membangun hubungan industrial yang harmonis melalui rencana pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit. Pemenuhan kebutuhan SDI dilakukan secara terencana, baik dari internal maupun eksternal, untuk mendukung perubahan struktur organisasi, pembukaan jaringan kantor, maupun penggantian pegawai yang berhenti atau pensiun.

Pengembangan kompetensi pegawai menjadi fokus utama melalui pemetaan gap kompetensi yang

l. Ensuring the mediation process for problems that occur between employees and the bank.
m. Providing rewards and punishments for and on behalf of the Board of Directors to employees.
n. Review Bank's Organizational Structure and Work Procedures accordance with Bank's business.
o. Ensure monitoring and evaluation of pension programs for Managers and Employees, whether organized by the Bank or by other parties.

3. Formulate the policies and directives of the Board of Directors in written Instructions, Decrees, Decisions and Procedures as guidelines for staff and employees both within the SDI Management Division and the Bank as a whole.
4. Train/guide subordinates to improve employee skills, performance and quality, including proposing training/workshops.
5. Provide responses to internal and external audit findings and carry out necessary corrective follow-up actions.
6. Appoint one employee who also functions as support assistance whose duties include being an administrator, monitoring SLAs and the work program of the SDI Management Division.
7. Determination of main job descriptions for all employees in each Division.
8. Determination of subordinate work plans which are outlined in the form of Individual Performance Targets (SKI).
9. In the event that the Division Leader is unable to perform his duties, responsibilities, and functions, either permanently or temporarily, the Division Leader will be carried out by at least two Section Leaders/officials of the same level. If there is only one Section Leader/official in a work unit (Division), then the duties will be carried out by that Section Leader/official of the same level.
10. Carry out other tasks assigned by the Board of Directors, especially regarding the implementation of the duties of the Human Resources Management Division.

Human Resource Management Policy and Strategy

To ensure compliance with labor regulations and regulatory authorities, the Bank continues to adjust its policies and build harmonious industrial relations through the planned establishment of a Bipartite Cooperation Institution. Human resource needs are met in a planned manner, both internally and externally, to support changes in organizational structure, the opening of office networks, and the replacement of employees who resign or retire.

Employee competency development is a primary focus through competency gap mapping in collaboration

bekerja sama dengan pihak profesional sebagai dasar penyusunan program pelatihan dan pengembangan. Program *assessment* dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menyiapkan kader pimpinan serta memperbarui kompetensi sesuai perkembangan perbankan syariah. Bank juga menyusun standar pengembangan SDI melalui kamus kompetensi sebagai pedoman pengelolaan talenta.

Untuk optimalisasi produktivitas, pada tahun 2025 telah dilaksanakan *Work Load Analysis* (WLA) sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai. Perbaikan sistem remunerasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja dan pertumbuhan bisnis Bank. Perubahan organisasi diselaraskan dengan arah bisnis, regulasi, serta ketersediaan dan kompetensi SDI.

Sebagai investasi jangka panjang, Bank menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi melalui program beasiswa S1 dan S2 bagi pegawai berprestasi, sekaligus mendorong riset yang mendukung pengembangan bisnis. Pengayaan pengalaman juga dilakukan melalui penempatan pegawai pada unit usaha terafiliasi. Selain itu, sertifikasi dan *refreshment* kompetensi dilaksanakan secara berkala.

Optimalisasi *Corporate Learning Center* yang didefinisikan sebagai salah satu '*engine*' strategis organisasi yang mengintegrasikan semua sumber daya, proses, dan orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran di dalam organisasi melalui 2 (dua) program strategis tahunan yang dicanangkan sebagai berikut:

1. Penerapan Kurikulum dan Materi Pembelajaran berbasis kompetensi.
2. Program pengembangan karir secara bertingkat : ODP, SDP, MDP

Roadmap Manajemen SDI

BRK Syariah telah mengembangkan strategi dan kebijakan Manajemen SDI jangka panjang untuk mendukung rencana pengembangan bisnis Bank, dinamika sektor bank pembangunan daerah dan maupun tuntutan pasar. Sistem pengembangan Manajemen SDI BRK Syariah dikembangkan sesuai dan selaras dengan strategi bisnis Bank guna mencapai Visi untuk: "Mewujudkan Bank Syariah yang Inklusif, *Resilient*, dan Modern sebagai Pilihan Utama Masyarakat yang Berkontribusi Signifikan Terhadap Pembangunan Daerah Berkelanjutan".

Kebijakan Rekrutmen

Pelaksanaan rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan unsur suku, agama, ras, golongan, gender, atau kondisi fisik untuk berkontribusi

with professionals as the basis for developing training and development programs. Assessment programs are implemented on an ongoing basis to prepare leadership cadres and update competencies in line with developments in Islamic banking. The bank also develops human resource development standards through a competency dictionary as a guideline for talent management.

To optimize productivity, a Workload Analysis (WLA) was implemented in 2025 as a basis for planning employee needs. Improvements to the remuneration system were also implemented, taking into account the Bank's performance and business growth. Organizational changes were aligned with business direction, regulations, and the availability and competency of human resources.

As a long-term investment, the Bank collaborates with universities through undergraduate and graduate scholarship programs for high-achieving employees, while also encouraging research to support business development. Experience is also enhanced through employee placements in affiliated business units. Furthermore, certification and competency refresher courses are conducted periodically.

Optimization of the Corporate Learning Center which is defined as one of the organization's strategic 'engines' which integrates all resources, processes and people involved in learning within the organization through 2 (two) annual strategic programs which are planned as follows:

1. Implementation of competency-based curriculum and learning materials.
2. Multi-level career development programs: ODP, SDP, MDP

Roadmap of Human Resource Management

BRK Syariah has developed a long-term Human Resource Management strategy and policy to support the Bank's business development plan, the dynamics of the regional development banking sector, and market demands. BRK Syariah's Human Resource Management development system is developed in accordance with and aligned with the Bank's business strategy to achieve the Vision of: "Creating an Inclusive, Resilient, and Modern Sharia Bank as the Main Choice of the Community that Contributes Significantly to Sustainable Regional Development."

Recruitment Policy

Recruitment is conducted openly, providing equal opportunities to all members of the public, regardless of ethnicity, religion, race, social class, gender, or physical condition, to contribute to BRK Syariah. Candidates

di BRK Syariah. Kandidat pegawai diseleksi berdasarkan kriteria sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dalam level jabatan terkait. Selain itu, untuk menjaga independensi, proses penerimaan pegawai dibantu oleh pihak ketiga yang dilakukan secara *online* melalui sistem *e-Recruitment*.

are selected based on criteria consistent with the qualifications and competencies required for the relevant position level. Furthermore, to maintain independence, the recruitment process is assisted by a third party online through the e-Recruitment system.

Tabel Rekrutmen BRK Syariah Tahun 2023-2025
BRK Syariah Recruitment Table for 2023-2025

Jabatan	2025	2024	2023	Position
Pegawai Tetap	1	2	0	Permanent employee
AO	39	26	28	AO
Funding Officer	11	0	1	Funding Officer
Teller	17	27	28	Teller
Customer Service	14	31	26	Customer Service
Administrasi	3	0	1	Administration
Total	**85**	**86**	**84**	**Total**

Turnover

Selama tahun 2025 *turnover* pegawai BRK Syariah mencapai 71 orang, dengan rincian 15 pegawai pensiun, 41 *Resign*, 9 PHK dan 1 meninggal dunia serta 5 habis kontrak.

Turnover

During 2025, the employee turnover at BRK Syariah reached 71 employees, comprising 15 retirements, 41 resignations, 9 employment terminations, 1 passing, and 5 contract expirations.

Sistem Penilaian Kinerja

BRK Syariah memiliki sistem penilaian kinerja pegawai yang berkaitan dengan sistem penilaian unit kerja masing-masing yaitu berupa *Key Performance Indicator* (KPI) untuk menilai kinerja unit kantor setiap triwulan atau tahunan. Sasaran Kinerja Individu (SKI) untuk mengukur kinerja pegawai setiap setahun sekali.

Penilaian SKI akan membimbing para pegawai dalam setiap unit kerja dalam mencapai sasaran unitnya dalam kerangka mencapai sasaran usaha BRK Syariah serta memberikan penilaian kinerja dan potensi secara lebih objektif.

Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai berpedoman pada Keputusan Direksi No. 021/KEPDIR/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahapan Sistem Manajemen Kinerja pegawai dilakukan sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai membuat penilaian tahunan dengan menggunakan formulir lembaran penilaian SKI sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan dan mengisi form *job description* yang memuat pekerjaan utama dan tambahan masing-masing pegawai yang ditandatangani dan disetujui oleh atasan tertinggi di masing-masing unit kerja.

Performance Appraisal System

BRK Syariah has an employee performance appraisal system linked to each work unit's assessment system. Key Performance Indicators (KPIs) are used to assess office unit performance quarterly or annually. Individual Performance Targets (SKI) are used to measure employee performance annually.

The SKI assessment will guide employees in each work unit in achieving their unit's targets within the framework of achieving BRK Syariah business targets and provide a more objective assessment of performance and potential.

Implementation of employee performance assessments is based on guidelines in the Board of Directors' Decree No. 021/KEPDIR/2023 dated February 9, 2023 Regarding the Company Guidelines (BPP) for PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) Personnel, the stages of the employee performance management system are as follows:

1. All employees make annual assessments using the SKI assessment sheet form in accordance with the established form and fill out a job description form containing the main and additional work of each employee which is signed and approved by the highest superior in each work unit.

2. Proses kegiatan tersebut diselenggarakan pada awal tahun dan akhir tahun
3. Dalam proses penilaian terlibat tiga pihak, yaitu:
   a. Pegawai yang dinilai (Pihak I).
   b. Atasan langsung pegawai yang dinilai (Pihak II), yaitu pejabat yang melakukan penilaian terhadap pegawai yang bersangkutan.
   c. Atasan berikutnya (Pihak III), yaitu atasan langsung Pihak II yang dalam hal ini bertindak sebagai pemutus.

Program Pengembangan dan Kompetensi Pegawai

Pengembangan kualitas dan kompetensi Pegawai BRK Syariah dilaksanakan sesuai dengan pedoman *blue print* edukasi yang telah dirumuskan sebagai berikut:

2. The activity process is held at the beginning of the year and the end of the year.
3. In assessment process, three parties involved, namely:
   a. The employee being assessed (Party I).
   b. The direct superior of the employee being assessed (Party II), namely the official who carries out the assessment of the employee concerned.
   c. The next superior (Party III), namely the direct superior of Party II, who in this case acts as the decision maker.

Employee Development and Competency Program

The development of the quality and competency of BRK Syariah employees is carried out in accordance with the educational blueprint guidelines which have been formulated as follows:



Pengembangan Kompetensi SDI

BRK Syariah memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk terus berkembang seiring dengan perkembangan kinerja Bank. Program pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan karir, pelatihan dan sertifikasi profesi, keterampilan, serta berbagai kursus, pelatihan, sosialisasi, seminar, *workshop* dan pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan BRK Syariah.

Sebelum menentukan program pelatihan, maka dilakukan kajian kebutuhan melalui berbagai tahapan. Metode pelatihan dan pengembangan dalam pengelolaan pelatihan dan pengembangan SDI BRK Syariah dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan;
2. Penetapan Tujuan;
3. Pengembangan Metode Pelatihan;

Human Resources Competency Development

BRK Syariah provides equal opportunities for employees to continuously develop in line with the Bank's performance. Human resource development programs are implemented through career education, professional training and certification, skills development, and various courses, training, outreach, seminars, workshops, and management and technical training tailored to BRK Syariah's needs.

Before determining a training program, a needs assessment is conducted through several stages. The training and development methods used in BRK Syariah's HR management and development are implemented through several stages, as follows:

1. Needs analysis;
2. Goal Setting;
3. Development of Training Methods;

4. Pengembangan Materi Pelatihan;
5. Pelaksanaan Pelatihan;
6. Evaluasi Pelatihan.

Penentuan pelatihan berfokus pada tugas, pekerjaan, atau posisi yang spesifik yang membuat seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu, topik pelatihan ditentukan oleh tingkat kepentingannya. Disamping itu, dalam rangka melakukan fungsi *coaching & counceling* kepada para pegawai yang memiliki kendala dan masalah dalam pekerjaannya sehari-hari atau masalah dalam kehidupan pribadi atau rumah tangga agar tidak mempengaruhi kinerja pegawai yang bersangkutan, BRK Syariah telah membentuk Unit Layanan Konseling sejak tahun 2010.

Tujuan Pelatihan

Setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan karir pegawai itu sendiri. Pegawai akan mengikuti program pelatihan baik dalam rangka meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya saat ini maupun mengantisipasi pengembangan tugas ke depan.

Pelaksanaan Pelatihan 2025

Selama tahun 2025, pegawai BRK Syariah telah menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 339 jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 7.343 orang yang dikelompokkan sebagai berikut:

4. Training Material Development;
5. Implementation of Training;
6. Training Evaluation.

Training focuses on specific tasks, jobs, or positions that enable a person to complete their work. Therefore, training topics are determined by their level of importance. Furthermore, to provide coaching and counseling to employees experiencing obstacles and problems in their daily work or personal or domestic life, ensuring they do not impact their performance, BRK Syariah has established a Counseling Services Unit since 2010.

Training Objectives

Every employee has an equal opportunity to receive education tailored to their career needs. Employees will participate in training programs to improve their skills in carrying out their current duties and anticipate future developments.

Implementation of 2025 Training

During 2025, BRK Syariah employees have organized as many 339 types of educational and training activities with a total number of participants7,343people who are grouped as follows:

Jenis Diklat	Peserta	Types of Training
Inhouse Training	6.777	In-house Training
Pelatihan Eksternal Dalam Negeri	566	Domestic External Training
Pelatihan Eksternal Luar Negeri	0	External Training Abroad

Adapun pegawai yang telah mengikuti pelatihan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The employees who have participated in training during 2025 are as follows:

No.	Jenis Diklat	*Inhouse Training*	Pelatihan Ekternal Dalam Negeri Domesti Domestic External Training	Pelatihan Eksternal Luar Negeri External Training Overseas	Types of Training
1.	Pemimpin Divisi	90	50	0	Division Head
2.	Pemimpin Cabang Utama/ Setingkat	16	1	0	Main Branch Manager/ Equivalent Level
3.	Pemimpin Bagian Kantor Pusat	305	109	0	Head Office Dept Head
4.	Pemimpin Cabang	229	5	0	Branch Manager
5.	Staf Khusus Direksi	0	0	0	Special Staff of the Board of Directors
6.	Pemimpin Cabang Pembantu	152	15	0	Sub-Branch Manager
7.	Pemimpin Bagian Cabang Utama/Setingkat	99	1	0	Head of Main Branch/ Equivalent Section
8.	Pemimpin Setingkat Pincapem	75	33	0	Sub-Branch Manager Equivalent Leader
9.	Pemimpin Seksi Setingkat	1882	215	0	Section Head / Equivalent
10.	Pegawai MPP (Masa Persiapan Pensiun)	0	0	0	MPP (Retirement Preparation Period) Employees
11.	Pegawai *Core (Teller*, CS, FO)	1527	32	0	Core Employees (Teller, CS, FO)
12.	Pelaksana	1344	105	0	Officer
13.	Lain-lain	130	3	0	ETC
	Total	**6.777**	**566**	**0**	**Total**

Biaya Pelatihan

Selama tahun 2025, biaya pelatihan dan pengembangan pegawai BRK Syariah adalah sebesar Rp19.827 juta atau naik sebesar 11,33% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp17.810 Juta.

Training Fees

Throughout the 2025 fiscal year, BRK Syariah's employee training and development expenditure amounted to IDR 19,827 million, representing an 11.33% increase compared to the 2024 expenditure of IDR 17,810 million.

Tabel Biaya Pelatihan Pegawai Tahun 2024- 2025
Employee Training Costs Table 2024-2025

No.	Jenis Diklat	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Types of Training
1	*Inhouse Training*	11.328.771.377	11.404.816.989	In-house Training
2	Pelatihan Eksternal	8.498.569.318	6.404.986.103	External Training
3	Total	19.827.340.695	17.809.805.116	Total

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Selama tahun 2025, peningkatan kompetensi dan kapasitas insan BRK Syariah fokus pada digitalisasi pembelajaran melalui *Learning Management System (LMS)* yang mendukung *active/self learning* serta optimalisasi *Learning Center* dengan pelaksanaan kurikulum, modul dan kalender pelatihan yang telah disusun dengan tujuan

Evaluation of Competency Development Implementation

Throughout 2025, the enhancement of competencies and capacity building for BRK Syariah's human capital focused on the digitalization of learning via the Learning Management System (LMS). This platform facilitates active/self-learning, alongside the optimization of the Learning Center through the execution of structured curricula, training modules, and a comprehensive training calendar. These initiatives

agar setiap individu merasa termotivasi dan bertanggung jawab untuk terus mengembangkan diri sebagai proaktif, mendorong kolaborasi, berbagi pengetahuan dan keterampilan antar karyawan, serta pengukuran pasca pembelajaran.

Kesetaraan Kesempatan Kerja dan Manajemen Karir Pegawai

Untuk pengembangan kompetensi pegawai, BRK Syariah selalu berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawainya agar dapat mengembangkan potensi dirinya guna menunjang karir di perusahaan. Bank membuat kebijakan *design* ketentuan promosi, dimana sistem atau metode yang memformulasikan indikator-indikator dari parameter yang terukur dalam rangka pemilihan kandidat pegawai yang memiliki *high performance* dan *high qualification* untuk dipromosikan.

Sistem pengembangan karir di BRK Syariah dikembangkan dalam 4 (empat) tahapan yaitu: standar kompetensi, *mapping* potensi pegawai, *career planning* dan *development* program.

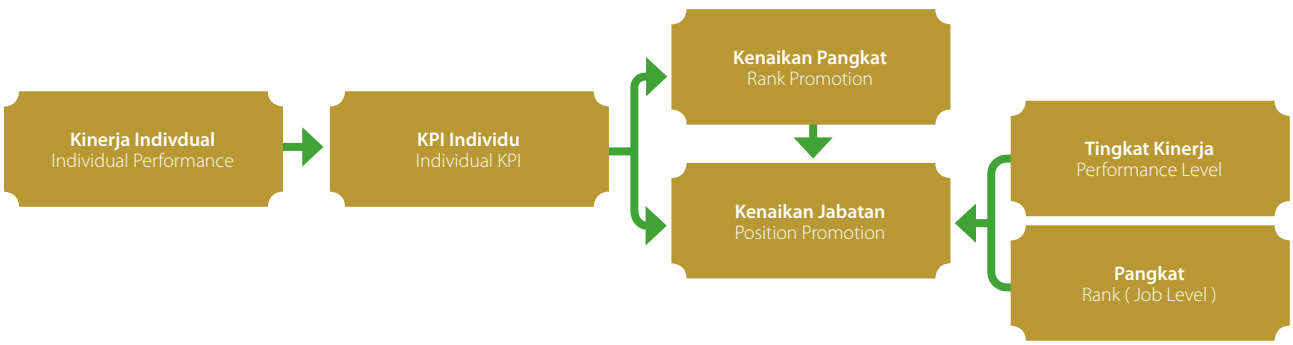
were strategically formulated to ensure that every individual is motivated and takes accountability for their continuous, proactive self-development. Furthermore, this framework is designed to foster collaboration, encourage the sharing of knowledge and skills among the workforce, and implement robust post-learning evaluations.

Equal Employment Opportunity and Employee Career Management

To develop employee competencies, BRK Syariah is committed to providing equal opportunities for all employees to develop their potential to support their careers within the company. The bank has established a promotion policy, a system or method that formulates measurable indicators for selecting high-performing and highly qualified candidates for promotion.

The career development system at BRK Syariah was developed in 4 (four) stages, namely: competency standards, employee potential mapping, career planning and development programs.





Reward and Punishment

Kebijakan *Reward and Punishment* di lingkungan BRK Syariah berpedoman dari BPP Kepegawaian, sejalan dengan kebijakan tersebut, sistem *reward and punishment* dirancang untuk memotivasi pegawai agar dapat mencapai Visi, Misi, tujuan maupun target kinerja BRK Syariah tercapai. *Reward* merupakan salah satu alat pengendalian untuk memotivasi individu pegawai agar berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh Bank. Sedangkan *punishment* merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan pegawai untuk menghasilkan efek jera sehingga tidak akan melakukan perbuatan dan kesalahan yang dilarang.

Bentuk-bentuk *punishment* antara lain kehilangan pekerjaan, tidak menerima kenaikan gaji, dihapus dari daftar karyawan yang akan dipromosikan, kegagalan mendapatkan *reward*, ancaman pemecatan, dan lain sebagainya.

Selama tahun 2025, BRK Syariah telah memberikan *reward and punishment* sebagai berikut:

Reward and Punishment

The Reward and Punishment policy within BRK Syariah is governed by the Human Capital Policy Manual (BPP Kepegawaian). In alignment with this directive, the reward and punishment framework is systematically designed to motivate personnel toward the realization of BRK Syariah's Vision, Mission, strategic objectives, and performance targets. Rewards function as a strategic control mechanism, incentivizing individual employees to exhibit conduct that aligns with the Bank's corporate expectations. Conversely, punishments serve as corrective measures, implementing adverse consequences to create a deterrent effect, thereby preventing the execution of prohibited acts and infractions.

Forms of disciplinary action include, but are not limited to: termination of employment, withholding of salary increments, removal from promotional eligibility pipelines, forfeiture of performance rewards, formal warnings of dismissal, and other applicable sanctions.

Throughout the 2025 fiscal year, BRK Syariah executed the following rewards and punishments:

Tabel Jumlah *Reward* Pegawai Tahun 2024-2025
Employee Reward Total Table for 2024-2025

Jenis Rewards	2025 (Jumlah Karyawan) (Number of employees)	2024 (Jumlah Karyawan) (Number of employees)	Types of Rewards
15 tahun masa bakti	177	-	15 years of service
20 tahun masa bakti	9	30	20 years of service
25 tahun masa bakti	0	-	25 years of service
30 tahun masa bakti	9	1	30 years of service
Jumlah	195	31	Total

Tabel Rekapitulasi Sanksi Pegawai Tahun 2024-2025
Summary Table of Employee Sanctions for 2024-2025

Kategori Sanksi	Keterangan Information	2025 (Jumlah Karyawan) (Number of employees)	2024 (Jumlah Karyawan) (Number of employees)
Ringan Low	Peringatan Pertama First Warning	1	2
	Peringatan Kedua Second Warning	-	-
	Peringatan Ketiga Third Warning	-	-
Sedang Medium	Pernyataan Tidak Puas Statement of Dissatisfaction	3	4
	Demosi Grade Grade Demotion	1	-
Berat High	Pemutusan Hubungan Kerja Work termination	5	3
Jumlah		10	9

Kebijakan Remunerasi

Bank membuat strategi pemberian remunerasi berdasarkan kompetensi dan beban kerja dengan memperhatikan peluang bagi pegawal untuk berkembang, memiliki daya saing serta untuk mempertahankan talenta terbaik guna memberi dampak positif terhadap kinerja Bank. Bank senantiasa mempertimbangkan pemberian remunerasi kepada pegawai menyesuaikan dengan *Job Grade* (Peringkat Jabatan) yang memperhatikan beban kerja, tanggung jawab, bobot tugas, wewenang dan tanggung jawab pegawal, sehingga gaji sebagai faktor motivasi untuk produktivitas dapat berperan secara efektif.

Kebijakan Remunerasi Pegawai BRK Syariah mengacu pada Buku Pedoman Perusahaan Kepegawaian sebagaimana diatur pada SK No. 021/KEPDIR/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan peraturan perusahaan BRK Syariah yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.141/PHIJSK- PK/PP/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.

BRK Syariah melalui Divisi Manajemen SDI melaksanakan program kesejahteraan bagi pegawai maupun sistem remunerasi serta kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun komponen remunerasi pegawai selama tahun 2025 mencakup antara lain:

1. Pembayaran Jasa Produksi;
2. Pembayaran THR;
3. Pembayaran Bantuan Pakaian Dinas;
4. Pembayaran Uang Kehadiran;
5. Bekal Cuti Tahunan & Cuti Besar;
6. Pembayaran Perawatan Kesehatan baik Jaminan Perusahaan dan BPJS Kesehatan;
7. Pembayaran Penghargaan Masa Pengabdian 15, 25 dan 30 Tahun;
8. Uang Santunan Kematian.

Penguatan Tata Kelola SDI melalui Aplikasi HRIS

Sejalan dengan upaya mewujudkan visi dan misi baru sejak menjadi Bank Umum Syariah, BRK Syariah telah mencanangkan program pengembangan kualitas SDM secara konsisten melalui sistem Manajemen SDI dalam aplikasi *database* kepegawaian yaitu berupa aplikasi HRIS (*Human Resource Information System*).

Remuneration Policy

The Bank creates a remuneration strategy based on competency and workload, taking into account opportunities for employees to develop, be competitive, and retain the best talent to positively impact the Bank's performance. The Bank consistently considers providing remuneration to employees based on their Job Grade, which takes into account the employee's workload, responsibilities, task weight, authority, and responsibilities, so that salary, as a motivating factor for productivity, can play an effective role.

The BRK Syariah Employee Remuneration Policy refers to the Employee Company Guidelines as stipulated in Decree No. 021/KEPDIR/2023 dated February 9, 2023 concerning the Employee Company Guidelines (BPP) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) and the BRK Syariah company regulations which have been ratified by the Directorate General of Industrial Relations and Social Security of the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. KEP.141/PHIJSK-PK/PP/I/2017 dated January 31, 2017.

BRK Syariah, through its Human Resources Management Division, implements employee welfare programs and a remuneration and compensation system in accordance with applicable laws and regulations. The employee remuneration components for 2025 include:

1. Payment for Production Services;
2. THR payment;
3. Payment of Uniform Assistance;
4. Payment of Attendance Fee;
5. Provision for Annual Leave & Long Leave;
6. Health Care Payments, both Company Insurance and BPJS Health;
7. Payment of Awards for Service Periods of 15, 25 and 30 Years;
8. Death Benefit.

Strengthening Human Resource Governance through HRIS Applications

In line with efforts to realize the new vision and mission since becoming a Sharia Commercial Bank, BRK Syariah has consistently launched a program to develop HR quality through the HR Management system in the personnel database application, namely the HRIS (Human Resource Information System) application.

Sistem aplikasi HRIS ditetapkan dalam SK Direksi Nomor 084/KEPDIR/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Implementasi modul-modul aplikasi yaitu sebagai berikut:

The HRIS application system is stipulated in the Director's Decree Number 084/KEPDIR/2017 dated October 30, 2017. Implementations of the application modules are as follows:

Penggajian/Payroll

Berfungsi untuk mengelola data gaji pegawai, dimana modul ini membantu petugas bagian penggajian di Divisi Manajemen SDI untuk menghitung dan mengolah data gaji seluruh pegawai setiap bulannya yang dimulai dari merekap posisi pegawai, menginput komponen potongan gaji, memproses data gaji hingga memposting gaji ke rekening masing-masing pegawai.

This module functions to manage employee remuneration data. It assists payroll officers within the Human Capital Management Division (Divisi Manajemen SDI) in calculating and processing the monthly salary data for all personnel. The end-to-end process encompasses consolidating employee position data, inputting salary deduction components, processing the payroll calculations, and ultimately executing the disbursement of salaries to the respective employees' bank accounts.

Cuti/Leave

Memiliki fungsi untuk pengajuan cuti pegawai yang akan diteruskan dan di-*approve* oleh pimpinan pegawai di unit kantornya masing-masing pegawai. Modul aplikasi cuti baru dapat diterapkan setelah implementasi ESS ini.

This module facilitates the submission of employee leave requests, which are subsequently routed for formal approval to the respective supervisors within each employee's organizational unit. This new leave application module will be fully operational following the implementation of the Employee Self-Service (ESS) system.

Pelatihan/Training

Memiliki fungsi untuk merekap seluruh kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada bagian pengembangan SDM yang nantinya akan menambah informasi pelatihan di CV masing-masing pegawai.

This module is designed to meticulously record all training activities executed by the Human Capital Development department. This data will subsequently be integrated to enrich the training history and competency profile within each employee's Curriculum Vitae (CV).

Absensi/ Absence

Berfungsi untuk me-record dan mengolah data absen pegawai yang terkoneksi dengan mesin-mesin absen.

This module functions to record and process employee attendance data through seamless, real-time integration with the corporate biometric/clock-in machines.

Track Record

Merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola data *track record* pegawai berupa administrasi sanksi pegawai dan penerimaan penghargaan masa bakti pegawai.

This module manages the historical professional data of personnel, specifically encompassing the administration of employee disciplinary sanctions and the formal recognition of long-service awards (tenure).

Perawatan Kesehatan (*Medical Record*)
Healthcare (Medical Record)

Rencana Kerja Manajemen SDI Tahun 2026

Dalam rangka membentuk organisasi yang fleksibel dan selaras dengan perubahan-perubahan perbankan berbasis digital yang modern dan dinamis, Bank senantiasa melakukan *review* terhadap bentuk organisasi yang sejalan dengan rencana bisnis Bank.

Pelaksanaan *assessment* masih menjadi salah satu fokus bank dalam melakukan perbaikan-perbaikan atau evaluasi bagi peningkatan kompetensi pegawai serta *mendukung sustainable assessment* program Bank melalui Kajian pembentukan *assessment center*. Kamus kompetensi yang telah disusun di tahun 2025 akan menjadi dasar pengukuran kompetensi pegawai di seluruh jabatan melalui metode *assessment center*.

Aktivitas *work load analysis* (WLA) merupakan kegiatan yang berkelanjutan, maka untuk memudahkan pelaksanaannya pada tahun ini akan dilakukan perubahan *platform* yang berbasis digital yang bertujuan untuk menghemat waktu, data lebih akurat dan mudah diakses oleh semua *user*.

BRKS CorpU akan menjadi media dan tempat pembelajaran berpedoman dengan modul yang telah disusun, antara lain: mempromosikan budaya pembelajaran yang berkelanjutan di seluruh jajaran BRKS dengan tujuan setiap individu merasa termotivasi dan bertanggung jawab untuk terus mengembangkan diri secara proaktif, mendorong kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan transfer keterampilan antar karyawan melalui berbagai inisiatif, seperti komunitas praktik, forum diskusi, dan proyek lintas-fungsional, memastikan pembelajaran berdampak langsung kepada peningkatan kinerja organisasi, dan melaksanakan pengukuran pasca pembelajaran, serta mengembangkan program *mentoring* dan *coaching* yang terstruktur untuk mempercepat akselerasi pengembangan talenta, baik dari segi teknis maupun kepemimpinan.

Digitalisasi pembelajaran dapat menggunakan aplikasi pembelajaran tanpa batas waktu dan tempat sehingga setiap materi serta tema pembelajaran dapat diakses untuk mendukung *Active/Self Learning*. Sertifikasi dan *refreshment* keahlian juga menjadi perhatian yang akan dilakukan secara berkala dan rutin. Program strategis tahunan akan terus dilanjutkan dengan prioritas kebutuhan organisasi dan penguatan kompetensi SDI Bank.

2026 Human Resources Management Work Plan

In order to form a flexible organization that is in line with modern and dynamic digital-based banking changes, the Bank continuously reviews the organizational form that is in line with the Bank's business plan.

Assessment implementation remains a key focus for the bank in improving or evaluating employee competency and supporting its sustainable assessment program through a study on establishing an assessment center. The competency dictionary, developed in 2025, will serve as the basis for measuring employee competency across all positions using the assessment center method.

Workload Analysis (WLA) activities constitute a continuous process; therefore, to streamline implementation this year, a transition to a digital-based platform is being undertaken. This initiative aims to optimize time efficiency, ensure greater data accuracy, and provide seamless accessibility for all users.

BRKS CorpU will be a media and learning place based on the modules that have been prepared, including: promoting a culture of continuous learning throughout BRKS with the aim of every individual feeling motivated and responsible to continue to develop themselves proactively, encouraging collaboration, knowledge sharing, and skill transfer between employees through various initiatives, such as communities of practice, discussion forums, and cross-functional projects, ensuring that learning has a direct impact on improving organizational performance, and implementing post-learning measurements, as well as developing structured mentoring and coaching programs to accelerate talent development, both in terms of technical and leadership.

Digitizing learning can utilize learning applications without time and location constraints, allowing access to all learning materials and topics to support active/self-directed learning. Certification and skills refreshment will also be a priority and will be conducted periodically and routinely. Annual strategic programs will continue, prioritizing organizational needs and strengthening the Bank's HR competencies.

Rencana Pengembangan dan Pelatihan 2026

Transformasi organisasi menjadi perbankan syariah nasional perlu didukung penguatan SDI organisasi. Pendidikan dan pelatihan didorong agar seluruh pegawai kompeten sebagai SDI perbankan syariah dan sejalan dengan visi, misi dan strategi organisasi.

Bank menyadari bahwa SDI merupakan faktor terpenting dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk itu, Bank menempatkan pegawai sebagai mitra strategis dalam menjalankan Rencana Bisnis Bank. Di sisi lain, pengembangan SDI dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya dan kemampuan yang dimiliki dalam merespon tantangan dalam industri perbankan, yang pada saat bersamaan berupaya menyesuaikan diri terhadap kebutuhan nasabah yang dinamis dan kritis.

Sebagai pilar utama dalam mendukung pencapaian visi dan misi bisnis Bank, Divisi Manajemen Sumber Daya Insani pada tahun 2026 berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan tata kelola *human capital* yang berorientasi pada kepatuhan (*compliance*), efisiensi, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Strategi tahun ini difokuskan pada penguatan fondasi hubungan industrial yang harmonis melalui pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, serta penyesuaian struktur organisasi yang dinamis seiring dengan arah strategi bisnis dan regulasi otoritas.

Dalam aspek akuisisi dan penempatan talenta, Bank akan menerapkan pendekatan berbasis data melalui *Work Load Analysis* (WLA) dan pemetaan *gap* kompetensi lintas divisi. Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi beban kerja yang proporsional serta ketepatan penempatan pegawai, baik dari rekrutmen internal maupun eksternal, termasuk penugasan strategis pada unit usaha afiliasi. Sejalan dengan itu, sistem *reward management* dan remunerasi akan terus disempurnakan untuk mencerminkan keadilan internal dan eksternal, serta sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi kinerja pegawai terhadap pertumbuhan bisnis Bank.

2026 Development and Training Plan

The organizational transformation into a national Islamic banking institution requires strengthening of the organization's human resources. Education and training are encouraged to ensure all employees are competent as Islamic banking human resources and align with the organization's vision, mission, and strategy.
The Bank recognizes that human resources (HR) is a crucial factor in achieving sustainable growth. Therefore, the Bank positions employees as strategic partners in implementing the Bank's Business Plan. Furthermore, HR development is carried out by mobilizing all available resources and capabilities to respond to challenges in the banking industry, while simultaneously adapting to the dynamic and critical needs of customers.

As a key pillar in supporting the achievement of the Bank's business vision and mission, the Human Resources Management Division is fully committed to optimizing human capital governance, oriented toward compliance, efficiency, and sustainable competency development, by 2026. This year's strategy focuses on strengthening the foundation of harmonious industrial relations through the establishment of a Bipartite Cooperation Institution and adapting the dynamic organizational structure in line with business strategy direction and regulatory authorities.

In terms of talent acquisition and placement, the Bank will implement a data-driven approach through Workload Analysis (WLA) and cross-divisional competency gap mapping. This aims to ensure proportional workload distribution and accurate employee placement, both through internal and external recruitment, including strategic assignments to affiliated business units. In line with this, the reward management and remuneration systems will continue to be refined to reflect internal and external fairness and as a form of appreciation for employee performance contributions to the Bank's business growth.

Guna menjawab tantangan industri perbankan syariah yang semakin kompetitif, Bank mempercepat transformasi digital dalam pengembangan kompetensi melalui optimalisasi *Learning Management System* (LMS) yang terintegrasi dengan fitur *chatbot* dan materi pembelajaran digital. Program ini didukung oleh kurikulum pelatihan yang terstruktur, sertifikasi keahlian berkala, serta program pengembangan kepemimpinan (*ODP, FLDP, MDP, dan BM*) untuk mencetak kader pemimpin masa depan. Sinergi dengan perguruan tinggi melalui program beasiswa dan riset juga akan terus digencarkan sebagai wujud investasi jangka panjang dan strategi *link and match* pendidikan. Secara keseluruhan, seluruh inisiatif ini dirancang untuk menciptakan ekosistem kerja yang produktif, adaptif, dan berdaya saing tinggi guna mendukung keberlanjutan usaha Bank di tahun 2026 dan seterusnya.

To address the challenges of the increasingly competitive Islamic banking industry, the Bank is accelerating digital transformation in competency development by optimizing its Learning Management System (LMS) integrated with chatbot features and digital learning materials. This program is supported by a structured training curriculum, periodic skills certification, and leadership development programs (ODP, FLDP, MDP, and BM) to produce future leaders. Synergy with universities through scholarship and research programs will also continue to be intensified as a form of long-term investment and educational link-and-match strategy. Overall, all these initiatives are designed to create a productive, adaptive, and highly competitive work ecosystem to support the Bank's business sustainability in 2026 and beyond.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
TECHNOLOGY INFORMATION GOVERNANCE

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi (TI) menjadi tulang punggung operasional dan strategi bisnis perusahaan. Pengelolaan TI yang baik bukan hanya memastikan kelancaran sistem dan layanan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam mitigasi risiko, perlindungan data, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penerapan tata Kelola TI BRK Syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2022, setiap perusahaan sektor jasa keuangan diwajibkan menyelenggarakan tata kelola TI secara efektif, aman, dan andal.

Beberapa tujuan utama penerapan tata kelola TI di BRK Syariah adalah untuk menjaga keamanan data dan sistem, mengelola risiko TI, memastikan kepatuhan terhadap POJK 11/POJK.03/2022, dan mendorong efisiensi serta inovasi dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis dan kepercayaan pemangku kepentingan.

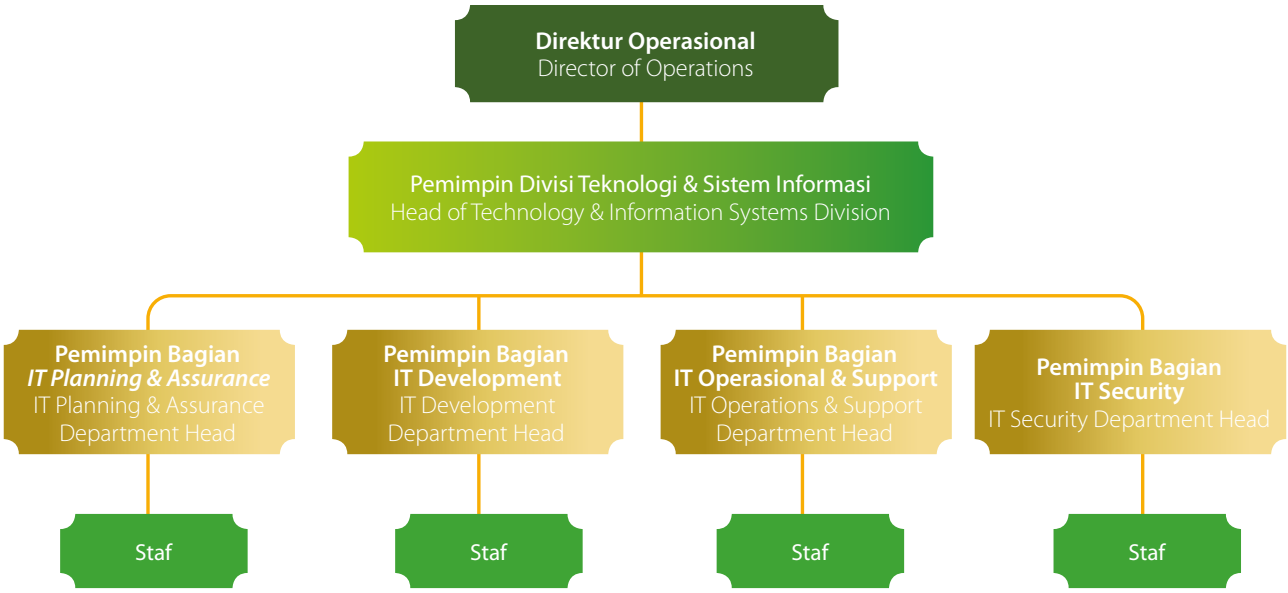
In today's digital era, Information Technology (IT) serves as the backbone of the company's operations and business strategy. Proper IT management ensures not only the seamless operation of systems and services but also acts as a crucial factor in risk mitigation, data protection, and compliance with applicable regulations.

The implementation of IT Governance at BRK Syariah complies with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 11/POJK.03/2022, which mandates every financial services institution to implement IT governance effectively, securely, and reliably.

The primary objectives of implementing IT governance at BRK Syariah include safeguarding data and system security, managing IT risks, ensuring adherence to POJK 11/POJK.03/2022, and fostering efficiency and innovation to support the achievement of business objectives and maintain stakeholder trust.

Struktur Organisasi TSI BRK Syariah

BRK Syariah IT Organizational Structure



Divisi TSI dipimpin oleh Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi yang berada langsung dibawah Direktur Operasional. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi BRK Syariah dijabat oleh Asj'ari profil ringkas beliau dijelaskan pada Laporan Tahunan ini dalam bab Profil Perusahaan sub bab Profil Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi.

The IT Division is led by the Vice President, Technology & Information Systems, who reports directly to the Director of Operations. The position of Vice President, Technology & Information Systems of BRK Syariah is held by Asj'ari. His brief profile is presented in this Annual Report within the Company Profile chapter, specifically under the sub-chapter Profiles of Executives One Level Below the Board of Directors.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Teknologi & Sistem Informasi

Tugas dan tanggung jawab Divisi Teknologi & Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran unit (RKAU) Divisi teknologi dan Sistem Informasi.
b. Menyelenggarakan, memonitor, mengendalikan dan mengadministrasikan serta membuat laporan pelaksanaan RKAU Divisi Teknologi dan Sistem Informasi sehubungan dengan bidang tugasnya dan kegiatan lain yang meliputi:
    1. Menjabarkan rencana kerja dan anggaran serta strategi bisnis Divisi Teknologi dan Sistem Informasi dalam bentuk KPI (*Key Performance Indicator*).
    2. Merencanakan Teknologi Informasi (TI) *master plan/ Strategic Plan dan Architecture* jangka panjang sesuai *business plan*.
    3. Memastikan pelaksanaan rencana Strategi TI sesuai dengan rencana bisnis bank.
    4. Menyiapkan *Management Information System* (MIS) *Implementation Plan* ke MIS *Steering Committee* (MISSC).
    5. Membuat dan *monitoring TI Roadmap* secara Periodik.
    6. Memastikan pelaksanaan *TI security Plan and Policy* untuk menciptakan perencanan sistem keamanan yang handal.
    7. Mengelola dan memitigasi risiko kegiatan operasional TI yang terdiri dari Data *Center Operation, core banking system, delivery channel system, switching,* data *warehouse* dan MIS, dan sistem TI perbankan lainnya.
    8. Memastikan pelaksanaan layanan jaringan terpelihara dalam hal efektivitas, produktivitas, *performance* dan *dependibility* serta kesesuaiannya terhadap skema rencana jaringan.
    9. Merencanakan kapasitas dan kinerja infrastruktur.
    10. Monitoring dan menjaga kegiatan penanganan masalah pada operasional *Helpdesk & Problem Management* agar dapat melayani kebutuhan TI seluruh *user* dengan cepat dan efisien.
    11. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah TI yang timbul akibat insiden.
    12. Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras agar sesuai dengan priotitas kebutuhan bisnis dan *roadmap* TI guna pencapaian target kinerja unit bisnis.
    13. *Monitoring* terhadap kegiatan pengelolaan pangkalan data *(database)*.

Duties and Responsibilities of the Technology & Information Systems Division

The duties and responsibilities of the Technology & Information Systems Division are as follows:

a. Formulate the annual work plan and budget (RKAU) for the Technology and Information Systems Division.
b. Organize, monitor, control, administer, and prepare implementation reports for the RKAU of the Technology and Information Systems Division in relation to its duties and other activities, which include:
    1. Translate the work plan, budget, and business strategy of the Technology and Information Systems Division into Key Performance Indicators (KPIs).
    2. Plan the Information Technology (IT) Master Plan/ Strategic Plan and long-term Architecture in alignment with the business plan.
    3. Ensure the execution of the IT Strategy plan aligns with the Bank's business plan.
    4. Prepare the Management Information System (MIS) Implementation Plan for the MIS Steering Committee (MISSC).
    5. Develop and periodically monitor the IT Roadmap.
    6. Ensure the implementation of the IT Security Plan and Policy to establish robust security system planning.
    7. Manage and mitigate risks associated with IT operational activities, encompassing Data Center Operations, core banking systems, delivery channel systems, switching, data warehouse and MIS, along with other banking IT systems.
    8. Ensure the implementation of network services is maintained in terms of effectiveness, productivity, performance, and dependability, as well as its compliance with the network planning scheme.
    9. Plan infrastructure capacity and performance.
    10. Monitor and maintain problem-handling activities within Helpdesk & Problem Management operations to fulfill the IT needs of all users promptly and efficiently.
    11. Identify and provide recommendations for resolving IT issues arising from incidents.
    12. Coordinate software and hardware development and procurement activities to align with business priorities and the IT roadmap, aiming to achieve business unit performance targets.
    13. Monitor database management activities.

14. Monitoring pengelolaan *user application support* dalam penggunaan Aplikasi, termasuk *user training* dan *client installation*.
15. Mengevaluasi kegiatan operasional TI khususnya terkait *Data Center, Help Desk* dan *Disaster Recovery Cenver* sesuai target dan waktu yang telah di tetapkan.
16. Mengkoordinasikan dan mengendalikan implementasi IT *Governance* terkait dengan bidang pengembangan sistem informasi, termasuk tindak lanjut atas pelaksanaan *quality assurance*.
17. Mengelola administrasi dan keuangan TI secara baik dan benar dan melaporkan pelaksanaannya untuk memastikan berjalan sesuai rencana kerja.
18. Melaksanakan kegiatan TI *review* terhadap pengelolaan operasional TI Bank yang dilakukan oleh pihak ketiga mencakup pengendalian umum TI, pengendalian aplikasi dan pengendalian *security* TI.
19. Bekerjasama antar Divisi khususnya Divisi Dana & Digital Banking dalam membuat suatu produk digital Bank.

c. Merumuskan kebijakan dan pengarahan Direksi dalam suatu instruksi, ketetapan, keputusan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi staf dan pegawai baik dilingkungan Divisi Teknologi dan Sistem Informasi maupun bank secara keseluruhan.
d. Melatih/ membimbing bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, prestasi dan mutu pegawai, termasuk diantaranya mengusulkan pelatihan/*workshop*.
e. Memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan internal audit dan eksternal serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.
f. Menetapkan satu orang pegawai yang juga berfungsi sebagai *support assistance* yang bertugas antara lain sebagai administrator, pemantauan SLA dan program kerja Divisi Teknologi dan Sistem Informasi.
g. Penetapan uraian tugas pokok untuk seluruh pegawai di Divisi Teknologi dan Sistem Informasi.
h. Penetapan rencana kerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk Sasaran Kinerja Individu (SKI).
i. Dalam hal Pemimpin Divisi berhalangan baik tetap maupun sementara, maka pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan fungsi Pemimpin Divisi akan dilaksanakan oleh minimal dua orang Pemimpin bagian/pejabat setingkat. Apabila di dalam suatu unit kerja (Divisi) hanya terdapat satu orang Pemimpin Bagian/pejabat setingkat maka akan dilaksanakan oleh Pemimpin Bagian/pejabat setingkat tersebut.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas Divisi Teknologi dan Sistem Informasi.

14. Monitor the management of user application support, including user training and client installation.
15. Evaluate IT operational activities, particularly those related to the Data Center, Help Desk, and Disaster Recovery Center, in accordance with established targets and timelines.
16. Coordinate and control the implementation of IT Governance related to information system development, including the follow-up on quality assurance execution.
17. Administer IT administration and finances properly and report on its implementation to ensure alignment with the work plan.
18. Conduct IT review activities on the Bank's IT operational management performed by third parties, covering general IT controls, application controls, and IT security controls.
19. Collaborate across divisions, particularly with the Funding & Digital Banking Division, in developing the Bank's digital products.

c. Formulate policies and directives of the Board of Directors into written instructions, stipulations, decisions, and procedures as guidelines for staff and employees, both within the Technology and Information Systems Division and across the Bank as a whole.
d. Train and mentor subordinates to enhance their skills, performance, and overall employee quality, including proposing relevant training or workshops.
e. Provide responses to findings from internal and external audits and execute the necessary corrective follow-ups.
f. Appoint an employee to concurrently function as support assistance, with duties including acting as an administrator and monitoring the SLAs and work programs of the Technology and Information Systems Division.
g. Determine the main job descriptions for all employees within the Technology and Information Systems Division.
h. Establish subordinate work plans outlined in the form of Individual Performance Targets (SKI).
i. In the event that the Vice President is permanently or temporarily incapacitated, the execution of the Vice President's duties, responsibilities, and functions shall be carried out by a minimum of two Department Heads/equivalent officials. If there is only one Department Head/equivalent official within a work unit (Division), the duties shall be carried out by that respective Department Head/equivalent official.
j. Perform other tasks assigned by the Board of Directors, particularly those related to the execution of the Technology and Information Systems Division's duties.

Kebijakan dan Tata Kelola TI BRK Syariah

Dalam menjalankan penerapan Tata Kelola TI dan sebagai acuan utama untuk memastikan setiap inisiatif TI selaras dengan strategi dan tujuan bisnis, terstruktur, terintegrasi, serta mendukung pencapaian tujuan korporasi secara efektif, BRK Syariah menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2026–2030 yang merujuk pada POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Adapun penyusunan RSTI 2026–2030 bertujuan untuk :

1. Menyusun arah strategis dan prioritas pengembangan TI yang selaras dengan strategi bisnis BRK Syariah.
2. Membangun tata kelola TI yang efektif, adaptif, dan sesuai dengan prinsip *good corporate governance*.
3. Menetapkan *roadmap* pengembangan TI, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi secara terintegrasi.
4. Menentukan inisiatif strategis dan *timeline* implementasi yang terukur dan berkelanjutan.
5. Memastikan pemanfaatan TI mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta daya saing Bank di tingkat regional maupun nasional.

Ruang lingkup yang diatur dalam RSTI 2026–2030 BRK Syariah mencakup:

1. Analisis Konteks Internal dan Eksternal
   Melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi strategi TI, mencakup regulasi dan perkembangan teknologi terkini yang relevan dengan perbankan daerah.
2. Pemetaan Kondisi Saat Ini dan Kondisi Target
   Mengidentifikasi dan memetakan kondisi saat ini serta kondisi target yang ingin dicapai untuk 5 (lima) aspek utama, yaitu:
   a. *Digital Banking*;
   b. *Enterprise Architecture;*
   c. *People;*
   d. *Process*; dan
   e. *Technology*
3. Analisis Kesenjangan
   Menentukan kesenjangan antara kondisi saat ini dan target yang diharapkan, serta mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan penguatan di tiap aspek.
4. Visi dan Misi TI
   Menyusun Visi dan Misi TI yang selaras dengan strategi bisnis dan arah transformasi digital BRK Syariah.

BRK Syariah IT Policy and Governance

In implementing IT Governance and serving as the primary reference to ensure that every IT initiative is aligned with business strategies and objectives, structured, integrated, and effectively supports the achievement of corporate goals, BRK Syariah has formulated the Information Technology Strategic Plan (RSTI) 2026–2030. This formulation strictly refers to POJK Number 11/POJK.03/2022 concerning the Implementation of Information Technology by Commercial Banks.
The preparation of the RSTI 2026–2030 aims to:

1. Establish strategic directions and IT development priorities that align with BRK Syariah's business strategy.
2. Build effective and adaptive IT governance in accordance with the principles of good corporate governance.
3. Establish an integrated roadmap for IT development, human resources, and technology infrastructure.
4. Determine strategic initiatives and a measurable, sustainable implementation timeline.
5. Ensure that IT utilization enhances operational efficiency, service quality, and the Bank's competitiveness at both regional and national levels.

The scope regulated in RSTI 2026–2030 BRK Syariah includes:

1. Internal and External Context Analysis
   Conducting a comprehensive analysis of the factors influencing the Information Technology (IT) strategy, encompassing regulatory frameworks and the latest technological advancements relevant to the regional banking sector.
2. Current and Target State Mapping
   Identifying and mapping the existing conditions as well as the envisioned target conditions to be achieved across 5 (five) core aspects, namely:
   a. Digital Banking;
   b. Enterprise Architecture;
   c. People;
   d. Process; and
   e. Technology
3. Gap Analysis
   Determining the gap between current conditions and expected targets, as well as identifying the need for improvement and strengthening in each aspect..
4. IT Vision and Mission
   Formulating an IT Vision and Mission that aligns with the business strategy and the digital transformation direction of BRK Syariah.

5. Penyusunan Strategi dan Solusi TI
   Merumuskan strategi TI yang mencakup penguatan tata kelola TI, pengembangan kompetensi SDM, optimalisasi proses bisnis, serta modernisasi arsitektur teknologi dan keamanan informasi.
6. Penyusunan *Thematic Timeline* dan Inisiatif TI Prioritas
   Menetapkan tema strategis pengembangan TI dan inisiatif prioritas beserta *timeline* implementasi sebagai panduan jangka menengah dan panjang.
7. Penyusunan *Roadmap* RSTI 2026–2030
   Menyusun peta jalan implementasi RSTI yang terintegrasi dengan *Corporate Plan* BRK Syariah, sehingga arah pengembangan TI dapat mendukung sasaran bisnis secara berkesinambungan.

Dengan kebijakan ini, BRK Syariah berharap dapat memastikan bahwa TI menjadi fondasi yang mendukung efisiensi, keamanan, inovasi, dan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus mendorong transformasi digital yang berkelanjutan.

Pengelolaan TI BRK Syariah

Dalam rangka memperkuat strategi pengelolaan teknologi informasi (TI), memajukan transformasi digital dan meningkatkan kinerja operasional BRK Syariah melakukan pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) pada Divisi TI, inovasi TI secara berkelanjutan, penanganan gangguan (*disruption*), penguatan keamanan dunia maya (*cyber security*), serta penerapan mekanisme pemulihan bencana (*disaster recovery*). Upaya ini diarahkan untuk memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan perbankan yang semakin digital.

Pengembangan Sumber Daya Insani TI

Pengembangan SDI pada Divisi Teknologi dan Sistem Informasi dilakukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi serta kebutuhan bisnis perbankan yang terus berubah. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai, Divisi Teknologi dan Sistem Informasi secara berkesinambungan menyelenggarakan dan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai program pelatihan, seminar, dan *workshop* yang relevan dengan bidang TI. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan SDI memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai dalam mendukung operasional serta pengembangan sistem informasi perusahaan.

Berikut adalah pelatihan yang telah diikuti oleh Divisi Teknologi dan Sistem Informasi selama tahun 2025:

5. IT Strategy and Solution Development
   Formulating IT strategies that encompass the strengthening of IT governance, the development of human capital competencies, the optimization of business processes, and the modernization of technology architecture and information security.
6. Thematic Timeline and Priority IT Initiatives Development
   Establishing strategic themes for IT development and priority initiatives along with their implementation timelines to serve as medium and long-term guidelines.
7. Development of the 2026-2030 RSTI Roadmap
   Developing an implementation roadmap for the IT Strategic Plan (RSTI) that is integrated with the BRK Syariah Corporate Plan, ensuring that the direction of IT development sustainably supports business objectives.

With this policy, BRK Syariah aims to ensure that IT serves as a foundation supporting efficiency, security, innovation, and regulatory compliance, while simultaneously driving sustainable digital transformation.

BRK Syariah IT Management

In an effort to strengthen the information technology (IT) management strategy, advance digital transformation, and improve operational performance, BRK Syariah is developing Human Capital within the IT Division, driving continuous IT innovation, managing disruptions, strengthening cyber security, and implementing disaster recovery mechanisms. These efforts are directed at ensuring the organization's readiness to face the dynamics of technological developments and the increasingly digital needs of banking services.

IT Human Resource Development

Human Capital development within the Technology and Information Systems Division is conducted to meet the demands of technological advancements and the ever-changing needs of the banking business. To improve employee competence and professionalism, the Technology and Information Systems Division continuously organizes and enrolls employees in various training programs, seminars, and workshops relevant to the IT field. These activities aim to ensure that the Human Capital possesses adequate knowledge, skills, and capabilities to support the company's information systems operations and development.

The following are the training programs attended by the Technology and Information Systems Division during 2025:

No	Nama Pelatihan	Training Name
1	Cobit 2019	Cobit 2019
2	*Solution Architec - Kubertenes Based*	Solution Architect - Kubernetes Based
3	*Certified Disaster Recovery Profesional* (EDRP)	Certified Disaster Recovery Professional (EDRP)
4	*Programming React JS : Build Scalable and Interaractive Application*	Programming React JS: Build Scalable and Interactive Applications
5	*IT* service Management & Governance (P-157)	IT Service Management & Governance (P-157)
6	Managing *IT Helpdesk & IT Service Desk* (P-146)	Managing IT Helpdesk & IT Service Desk (P-146)
7	*Mastering OWASP Buiding Secure Application is in Digital Word*	Mastering OWASP: Building Secure Applications in the Digital World
8	*Software Testing life cycle*	Software Testing Life Cycle
9	*Penetratation Test*	Penetration Testing
10	*Training Implementing Data Ware House dan Data Integration and ETL with SSIS* (P-014)	Training on Implementing Data Warehouse and Data Integration and ETL with SSIS (P-014)
11	*GenAI Proficiency Certification - Level 1* (P-031)	GenAI Proficiency Certification - Level 1 (P-031)
12	*Training Open Worldwidw Security Project (OWASP)* (P-019)	Training Open Worldwide Security Project (OWASP) (P-019)
13	Pelatihan Teknis Implementasi Teknologi *Biometric Identification* (P-112)	Technical Training on the Implementation of Biometric Identification Technology (P-112)
14	*Training Cross Platform Mobile Development with Flutter + Pre Test and Post Test + Study Case* (P-127)	Cross-Platform Mobile Development Training with Flutter + Pre-Test and Post-Test + Case Study (P-127)

Inovasi Teknologi Informasi

BRK Syariah menyadari bahwa teknologi informasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing di industri perbankan dan jasa keuangan. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan inovasi dan pengembangan teknologi serta sistem informasi secara berkelanjutan guna menyediakan layanan transaksi dan jasa perbankan yang andal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta nasabah.

Beberapa inisiatif inovasi TI yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan pembaharuan terhadap kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi
2. Mengimplementasikan SDWAN untuk seluruh jaringan unit kantor
3. Mengimplementasikan otomasi *backup database*
4. Mengimplementasikan replikasi untuk aplikasi kritikal
5. Melakukan penetration test secara berkala
6. Melakukan penyusunan RSTI 2026-2030 sesuai dengan *corporate plan*
7. Mengimplementasikan QRIS Dinamis pada EDC

Penanganan Gangguan (*Disruption*)

Dalam rangka mencegah dan menangani gangguan operasional TI, seperti *phishing, malware, denial of service,* dan *ransomware,* BRK Syariah menerapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keandalan sistem serta kontinuitas layanan. Upaya tersebut meliputi:

1. Pemantauan sistem dan jaringan secara berkelanjutan.
2. Penerapan pengendalian keamanan berlapis untuk melindungi sistem dari ancaman siber.
3. Penguatan ketahanan layanan melalui mekanisme pemulihan gangguan.
4. Pelaksanaan pengelolaan kerentanan dan pembaruan sistem secara berkala.

Information Technology Innovation

BRK Syariah recognizes that information technology is a key factor in enhancing competitiveness in the banking and financial services industry. Therefore, the company continues to innovate and develop its technology and information systems sustainably to provide reliable, secure, and responsive banking transactions and services that meet the needs of the community and customers.

Several IT innovation initiatives undertaken include:

1. Updating information technology implementation policies and procedures.
2. Implementing SDWAN across the entire branch office network.
3. Implementing database backup automation.
4. Implementing replication for critical applications.
5. Conducting periodic penetration testing.
6. Preparing the 2026-2030 IT Strategic Plan (RSTI) in accordance with the Corporate Plan.
7. Implementing Dynamic QRIS on EDC machines.

Disruption Handling

To prevent and address IT operational disruptions, such as phishing, malware, denial of service, and ransomware, BRK Syariah has implemented various strategic measures to maintain system reliability and service continuity. These efforts include:

1. Continuous monitoring of systems and networks.
2. Implementation of layered security controls to protect the system from cyber threats.
3. Strengthening service resilience through disruption recovery mechanisms.
4. Execution of vulnerability management and periodic system updates.

5. Penerapan *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP).
6. Peningkatan kesiapan organisasi melalui simulasi penanganan insiden.
7. Peningkatan kesadaran keamanan informasi bagi karyawan.

Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery*)

Sebagai bagian dari manajemen risiko TI, BRK Syariah menyiapkan mekanisme pemulihan bencana untuk memastikan keberlangsungan operasional apabila terjadi gangguan besar atau bencana yang berdampak pada sistem dan data perusahaan. Langkah ini meliputi:

1. Penyusunan dan Pengkinian Dokumen *Disaster Recovery Plan* (DRP) :
   Mendokumentasikan prosedur sistematis, pembagian tanggung jawab tim tanggap darurat, dan langkah teknis pemulihan.
2. Pembangunan *Disaster Recovery Center* (DRC): Menyediakan infrastruktur data cadangan (*backup*) di lokasi fisik terpisah dari pusat data utama (*primary site*) untuk memastikan sistem tetap berjalan saat terjadi bencana.
3. Backup Data Secara Rutin (*Data Mirroring/Replication*): Melakukan replikasi data sistem utama ke DRC secara realtime atau berkala untuk meminimalkan *Data Loss*.
4. Uji Coba DRP secara Berkala (DRP *Simulation/Drill*): Melakukan simulasi skenario bencana minimal 1 kali setahun pada aplikasi kritikal untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan SDM
5. Penerapan IT *Security System*: Memperkuat keamanan data selama proses pemulihan, termasuk enkripsi, pengelolaan akses, dan perlindungan dari serangan siber.

Rencana Pengembangan TI Tahun 2026

Selaras dengan RSTI , rencana Pengembangan TI Tahun 2026 difokuskanpada tiga fase utama, yaitu:

1. Fase 1: *Strengthening IT Capabilities, Security & Process Excellence* (2026–2027), memperkuat kapabilitas TI, tata kelola, keamanan, dan proses operasional agar semakin selaras dengan arah bisnis dan prinsip syariah.
2. Fase 2: *Integrated* Syariah Digital *Solutions & Operational Effectiveness* (2028–2029), mengintegrasikan solusi dan layanan digital syariah serta meningkatkan efektivitas operasional melalui modernisasi sistem, penerapan dan penguatan tools, serta peningkatan kualitas layanan digital.
3. Fase 3: *Resilient, Adaptive & High-Performing Islamic Digital Organization* (2030), mewujudkan organisasi TI yang tangguh, adaptif, aman, dan unggul untuk mendukung transformasi digital syariah secara berkelanjutan serta peningkatan kualitas layanan.

5. Implementation of a Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP).
6. Enhancing organizational readiness through incident handling simulations.
7. Increasing information security awareness among employees.

Disaster Recovery

As part of IT risk management, BRK Syariah has prepared disaster recovery mechanisms to ensure operational continuity in the event of a major disruption or disaster impacting the company's systems and data. These steps include:

1. Preparation and Updating of Disaster Recovery Plan (DRP) Documents:
   Documenting systematic procedures, the division of responsibilities for the emergency response team, and technical recovery steps.
2. Development of a Disaster Recovery Center (DRC):
   Providing backup data infrastructure at a physical location separate from the primary data center (primary site) to ensure the system remains operational during a disaster.
3. Regular Data Backup (Data Mirroring/Replication):
   Replicating main system data to the DRC in real-time or periodically to minimize Data Loss.
4. Periodic DRP Testing (DRP Simulation/Drill):
   Conducting disaster scenario simulations at least once a year on critical applications to ensure the readiness of both infrastructure and Human Capital.
5. Implementation of IT Security Systems:
   Strengthening data security during the recovery process, including encryption, access management, and protection against cyber attacks.

IT Development Plan for 2026

In alignment with the IT Strategic Plan (RSTI), the 2026 IT Development Plan is focused on three main phases, namely:

1. Phase 1: Strengthening IT Capabilities, Security & Process Excellence (2026–2027), strengthening IT capabilities, governance, security, and operational processes to be increasingly aligned with business directions and Sharia principles.
2. Phase 2: Integrated Syariah Digital Solutions & Operational Effectiveness (2028–2029), integrating Sharia digital solutions and services while increasing operational effectiveness through system modernization, implementation and strengthening of tools, and improving the quality of digital services.
3. Phase 3: Resilient, Adaptive & High-Performing Islamic Digital Organization (2030), realizing an IT organization that is resilient, adaptive, secure, and excellent in sustainably supporting Sharia digital transformation and enhancing service quality.



TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE



TATA KELOLA UNGGUL SEBAGAI PILAR TRANSFORMASI DAN KEBERLANJUTAN BRK SYARIAH

EXCELLENT CORPORATE GOVERNANCE AS A PILLAR OF TRANSFORMATION AND SUSTAINABILITY FOR BRK SYARIAH

Peran tata kelola di BRK Syariah menjadi landasan strategis dalam memastikan setiap aktivitas usaha berjalan secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian. Tata kelola tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kepatuhan, tetapi sebagai instrumen utama dalam menjaga amanah pemegang saham dan kepercayaan masyarakat.

Pelaksanaan tata kelola diwujudkan melalui sinergi yang harmonis antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Masing-masing organ Bank menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Keseimbangan antara fungsi pengambilan keputusan strategis, pengawasan, dan pengelolaan operasional menciptakan mekanisme *check and balance* yang efektif serta memperkuat sistem pengendalian internal.

Konsistensi dalam penerapan tata kelola yang baik mendorong peningkatan kinerja Bank secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat reputasi dan daya saing Perseroan. Dengan budaya integritas dan kepatuhan yang tertanam di seluruh tingkatan organisasi, BRK Syariah mampu menghadirkan nilai tambah bagi pemegang saham, nasabah, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan, serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

The role of governance at BRK Syariah serves as a strategic foundation for ensuring that all business activities are conducted transparently, accountably, and in accordance with prudent principles. Governance is viewed not merely as a compliance obligation, but as a key instrument in maintaining shareholder trust and public trust.

The implementation of good governance is realized through harmonious synergy between the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors. Each of the Bank's organs carries out its functions and responsibilities professionally in accordance with laws and regulations and Sharia principles. The balance between strategic decision-making, supervision, and operational management creates an effective checks and balances mechanism and strengthens the internal control system.

Consistent implementation of good governance drives sustainable improvement in the Bank's performance, while strengthening the Company's reputation and competitiveness. With a culture of integrity and compliance embedded throughout the organization, BRK Syariah is able to deliver added value to shareholders, customers, regulators, and all stakeholders, while significantly contributing to regional and national economic growth.

PENCAPAIAN PENTING TATA KELOLA 2025
GOVERNANCE MILESTONES 2025

"Sepanjang 2025, BRK Syariah terus memperkuat implementasi tata kelola sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas, integritas, dan keberlanjutan usaha. Berbagai capaian strategis yang diraih mencerminkan komitmen BRK Syariah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan secara konsisten di seluruh lini organisasi, sekaligus memperkokoh kepercayaan pemangku kepentingan".

"Throughout 2025, BRK Syariah has continuously strengthened the implementation of corporate governance as the primary foundation for maintaining stability, integrity, and business sustainability. The various strategic milestones achieved reflect BRK Syariah's commitment to consistently applying the principles of transparency, accountability, and compliance across all organizational lines, while simultaneously reinforcing stakeholder confidence".



Self-Assessment GCG

GCG Self-Assessment

Predikat **Cukup Baik,** dalam semua aspek, *Governance Structure*, *Governance Process* maupun pada *Governance Outcome*

Good enough predicate, in all aspects, Governance Structure, Governance Process and on Governance Outcome



Tingkat Kesehatan BRK Syariah Per Desember 2025 Berdasarkan Penilaian OJK

BRK Syariah's Health Level as of December 2025 Based on OJK's Assessment

Cukup Sehat dengan Peringkat Komposit **TKB 3 (Tiga),** mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Fairly Healthy with a TKB Composite Rating of 3 (Three), capable of facing significant negative impacts from changes in business conditions and other external factors.



Profil Risiko Berdasarkan Penilaian OJK

Risk Profile based on OJK Assessment

Nilai komposit Profil Risiko adalah **3 (Moderate)**

Risk Profile composite score is 3 (Moderate)



IT Maturity Berdasarkan *Self-Assessment Bank*

IT Maturity Based on Bank Self-Assessment

Pada proses tata kelola Divisi TSI telah dilakukan self assessment terhadap IT Maturity level pada proses pengelolaan TI. Tata cara penilaian merujuk kepada COBIT 2019. Rata-rata IT maturity level untuk seluruh proses (5 Domain & 40 Proses) adalah 2,1.



Opini Auditor

Auditor's Opinion

Wajar, dalam semua hal yang material

Reasonable, in all material respects



ISO 27001

BRK Syariah telah memperoleh sertifikat ISO/IEC 27001:2013 dari PT SGS Indonesia

BRK Syariah has obtained an ISO/IEC 27001:2013 certificate from PT SGS Indonesia. from PT SGS Indonesia



Fitch Ratings

BRK Syariah National Long-Term Rating at'A(idn)' and its National Short-Term Rating at'F1+(idn)'. The Outlook is Stable.



SNI ISO 37001

BRK Syariah telah memperoleh Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) certificate from PT BSC Mutu Internasional

BRK Syariah has obtained the SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) certificate from PT BSC Mutu Internasional.

Dasar Penerapan Tata Kelola

Pedoman penerapan tata kelola di BRK Syariah mengacu pada berbagai ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia terkait Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, serta berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan Tata Kelola;
3. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disampaikan melalui siaran pers OJK pada tanggal 4 Februari 2014;
4. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);
5. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
6. Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahannya dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); serta ,
7. Kebijakan Tata Kelola BRK Syariah.

BRK Syariah juga melakukan tinjauan dan evaluasi secara berkala terhadap kelengkapan dan pengkinian ketentuan internal terkait GCG. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketentuan internal Bank telah relevan dan sesuai dengan kondisi organisasi, strategi Bank dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dan Prinsip Penerapan Tata kelola

Penerapan tata kelola yang baik di BRK Syariah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan Visi, Misi, dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan.
2. Menjaga agar kegiatan operasional dan non operasional Bank sesuai dengan Prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada pemangku kepentingan.
4. Memperbaiki budaya kerja Bank.
5. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
6. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

Basis for Implementing Good Corporate Governance

Guidelines for implementing good corporate governance at BRK Syariah refer to various applicable legal provisions and regulations, including:

1. Laws of the Republic of Indonesia concerning Capital Markets, Limited Liability Companies, and Banking;
2. Financial Services Authority Regulations (POJK) and OJK Circular Letters (SEOJK), specifically concerning Governance, Annual Reports, Risk Management, Internal Control Systems, as well as various POJK and SEOJK related to the implementation of Good Corporate Governance;
3. Indonesian Corporate Governance Roadmap, announced in an OJK press release on February 4, 2014;
4. Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) 2021, issued by the National Committee for Governance Policy (KNKG);
5. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
6. The Company's Articles of Association and amendments thereto, and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS); and
7. BRK Syariah's Good Corporate Governance Policy.

BRK Syariah also conducts regular reviews and evaluations of the completeness and updating of internal provisions related to GCG. This effort is made to ensure that the Bank's internal provisions are relevant and align with organizational conditions, the Bank's strategy, and applicable regulations.

Objectives and Principles of Good Corporate Governance Implementation

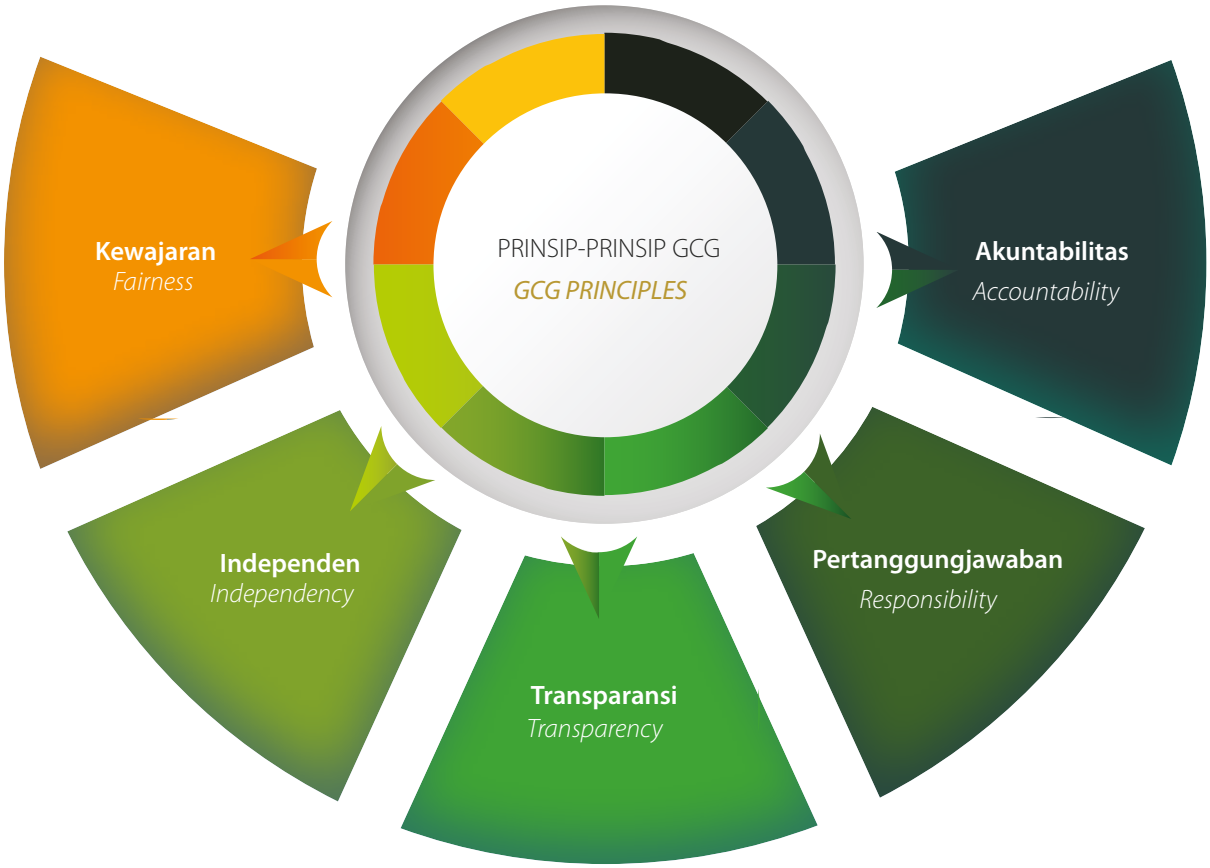
The implementation of good corporate governance at BRK Syariah aims to:

1. Improve the Bank's performance by implementing GCG in all Bank activities in line with the Bank's Vision, Mission, and established business strategy plan.
2. Maintain the Bank's operational and non-operational activities in accordance with Sharia Principles and applicable laws and regulations.
3. Improve accountability and provide added value to stakeholders.
4. Improve the Bank's work culture.
5. Manage the Bank's resources in a more trustworthy manner.
6. Encourage and support the Bank's development.

Prinsip-prinsip Tata Kelola

Governance Principles

Skema Prinsip-prinsip GCG
GCG Principles Scheme



Landasan yang kokoh diperlukan bagi suatu perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik sebagai kerangka utama pengelolaan perusahaan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berpedoman pada prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*). Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis diambil secara objektif, terukur, serta selaras dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

A solid foundation is essential for a company to achieve sustainable and competitive growth. Therefore, the implementation of good governance as the primary framework for corporate management must be implemented consistently and continuously, guided by the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. These principles ensure that every policy and strategic decision is made objectively, measurably, and in line with the interests of all stakeholders.

Sejalan dengan itu, BRK Syariah juga menginternalisasikan prinsip ETAK (Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan) dengan berpedoman pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Prinsip Etika menegaskan pentingnya integritas dan budaya perusahaan yang berlandaskan nilai moral; Transparansi menjamin keterbukaan informasi yang relevan dan andal; Akuntabilitas memperjelas fungsi, peran, dan tanggung jawab setiap organ perusahaan; sedangkan Keberlanjutan menekankan keseimbangan antara pencapaian kinerja ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Integrasi prinsip GCG dan ETAK tersebut membentuk sistem tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan dan kinerja, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang yang berkesinambungan, sehingga perusahaan mampu menjaga stabilitas usaha, meningkatkan kepercayaan publik, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan masyarakat.

Transparansi

BRK Syariah secara proaktif mengungkapkan informasi material dan relevan yang diwajibkan oleh hukum dan informasi material lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi ini disajikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh semua orang.

Akuntabilitas

Pengelolaan BRK Syariah harus dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Pertanggungjawaban

Pengelolaan usaha BRK Syariah harus dipastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Selain itu, pertanggungjawaban Bank juga dilakukan dengan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

In line with this, BRK Syariah also internalizes the ETAK (Ethics, Transparency, Accountability, and Sustainability) principles, guided by the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) issued by the National Committee for Governance Policy (KNKG). The Ethics Principle emphasizes the importance of integrity and a corporate culture grounded in moral values; Transparency ensures the disclosure of relevant and reliable information; Accountability clarifies the functions, roles, and responsibilities of each company organ; while Sustainability emphasizes the balance between achieving economic performance, social responsibility, and long-term environmental preservation.
The integration of GCG and ETAK principles forms a governance system that is oriented not only toward compliance and performance, but also toward the creation of sustainable long-term value, enabling the company to maintain business stability, enhance public trust, and make a positive contribution to economic and community development.

Transparency

BRK Syariah proactively discloses material and relevant information required by law, as well as other material information that may influence the decisions of shareholders and other stakeholders. This information is presented quickly, accurately, and easily accessible to everyone.

Accountability

Management of Sharia BRK must be carried out correctly, measurably, and in accordance with the Bank's interests, while still taking into account the interests of Shareholders and other stakeholders.

Accountability

Management of Sharia BRK business must be ensured in accordance with applicable laws and regulations and the principles of sound bank management. Furthermore, the Bank's accountability is also carried out with concern for the environment and surrounding communities.

Independen

Independen yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak mana pun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah sesuai dengan Prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) dipegang teguh oleh BRK Syariah yang diwujudkan dalam setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Etika

Prinsip Etika menegaskan komitmen BRK Syariah untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam setiap aktivitas usaha. Seluruh insan BRK Syariah wajib menjunjung tinggi nilai moral, menghindari benturan kepentingan, serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Prinsip Keberlanjutan

Prinsip Keberlanjutan menempatkan pertumbuhan jangka panjang BRK Syariah sebagai tujuan utama yang dicapai secara bertanggung jawab. BRK Syariah tidak hanya berfokus pada kinerja finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam setiap kebijakan dan kegiatan operasional.

Independent

Independent means having competence, being able to act objectively, and being free from influence/pressure from any party (independent), as well as having a strong commitment to developing Islamic banking in accordance with Sharia Principles and applicable laws and regulations.

Fairness and Equality

BRK Syariah firmly upholds the principles of fairness and equality, which are manifested in every decision taken, always considering the interests of majority shareholders and providing protection to minority shareholders and other stakeholders from manipulation and transactions that conflict with applicable laws and regulations.

Ethical Principles

The Ethical Principles affirm BRK Syariah's commitment to acting with integrity, honesty, and professionalism in all business activities. All BRK Syariah employees are required to uphold moral values, avoid conflicts of interest, and comply with applicable regulations.

Sustainability Principles

The Sustainability Principles prioritize BRK Syariah's long-term growth as its primary objective, which must be achieved responsibly. BRK Syariah not only focuses on financial performance, but also considers social and environmental impacts in every policy and operational activity.

ROADMAP TATA KELOLA BERKELANJUTAN BRK SYARIAH
BANK GOVERNANCE ROADMAP

Tata kelola berkelanjutan menjadi arah utama dalam *Roadmap* Tata Kelola BRK Syariah sebagai strategi besar yang memandu transformasi perusahaan secara terencana dan bertahap. *Roadmap* tersebut dirancang sebagai panduan implementasi GCG yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan regulasi, tetapi juga pada penguatan kualitas pengelolaan Bank secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaannya, *roadmap* mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, serta tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam satu kerangka yang saling terhubung. Pendekatan tersebut memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis dilandasi prinsip kehati-hatian, transparansi, serta pertimbangan dampak jangka panjang terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan.

Melalui langkah-langkah yang terstruktur dan terukur, BRK Syariah menjadikan tata kelola sebagai pilar transformasi bisnis dan penciptaan nilai berkelanjutan. Dengan demikian, Bank mampu memperkuat daya saing, menjaga stabilitas usaha, serta membangun kepercayaan publik secara konsisten.

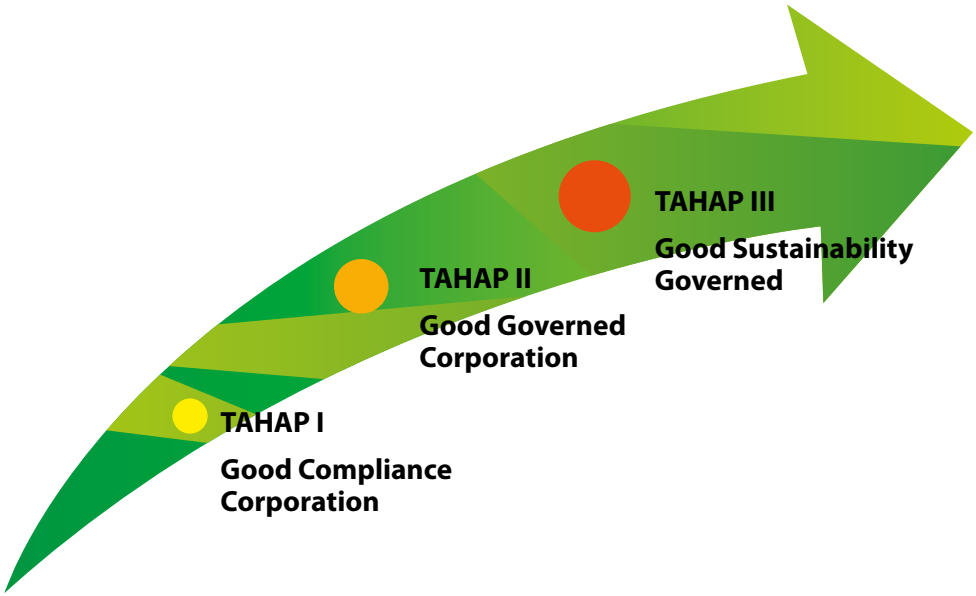
Tahapan *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan BRK Syariah adalah sebagai berikut:

Sustainable governance is the primary focus of BRK Syariah's Corporate Governance Roadmap, a major strategy guiding the company's planned and gradual transformation. The roadmap is designed to guide GCG implementation, oriented not only toward regulatory compliance but also toward strengthening the quality of the Bank's management comprehensively and sustainably.

In its implementation, the roadmap integrates aspects of compliance, internal control, risk management, and corporate social responsibility into a single, interconnected framework. This approach ensures that every policy and strategic decision is based on the principles of prudence, transparency, and consideration of long-term impacts on stakeholders and the environment.

Through structured and measurable steps, BRK Syariah makes governance a pillar of business transformation and sustainable value creation. Thus, the Bank is able to strengthen its competitiveness, maintain business stability, and consistently build public trust.

The stages of BRK Syariah's Corporate Governance Roadmap are as follows:



Salah satu indikator kuatnya tatanan institusi organisasi sebagai implementasi Tahap II *Good Governed Corporation* adalah kuatnya implementasi *Governance Risk Compliance* (GRC). Implementasi GRC yang baik akan mendorong Bank berani melakukan pengambilan keputusan dan tidak salah arah. Bank menjadi lebih bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan yang dilakukan sejalan dengan peraturan internal dan regulasi eksternal.

One indicator of a strong organizational institutional structure as part of the implementation of Phase II of Good Governance is the robust implementation of Governance Risk Compliance (GRC). Good GRC implementation will encourage banks to be bold in making decisions and avoid misdirection. Banks will be more accountable for their policies and decisions, in line with internal and external regulations.

IMPLEMENTASI & RENCANA STRATEGIS TATA KELOLA BANK KE DEPAN
IMPLEMENTATION OF BANK GOVERNANCE GOING FORWARD

Implementasi tata kelola ke depan difokuskan pada penguatan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam operasional sehari-hari. BRK Syariah menitikberatkan pada optimalisasi peran organ perusahaan, penguatan manajemen risiko dan kepatuhan, peningkatan transparansi, serta internalisasi budaya etika dan integritas.

Sementara itu, rencana strategis tata kelola BRK Syariah merupakan arah jangka menengah dan panjang yang menjadi peta jalan pengembangan GCG yang mengacu pada regulasi, integrasi aspek keberlanjutan dan ESG, penguatan *governance* berbasis risiko, serta peningkatan kompetensi SDM guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Adapun strategi implementasi GCG BRK Syariah ke depan dilaksanakan dengan inisiatif sebagai berikut:
1. Penguatan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan (GRC) sebagai fondasi dalam meningkatkan daya saing Bank;
2. Perlindungan terhadap hak Pemegang Saham;
3. Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite;
4. Peningkatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal;
5. Efektivitas penanganan pengaduan nasabah; dan
6. Peningkatan fungsi kepatuhan.

Future governance implementation focuses on strengthening Good Corporate Governance (GCG) practices in daily operations. BRK Syariah emphasizes optimizing the role of corporate organs, strengthening risk and compliance management, increasing transparency, and internalizing a culture of ethics and integrity.

Meanwhile, BRK Syariah's strategic governance plan represents the medium- and long-term direction that serves as a roadmap for GCG development, referring to regulations, integrating sustainability and ESG aspects, strengthening risk-based governance, and enhancing human resource competencies to support healthy and sustainable business growth.

BRK Syariah's future GCG implementation strategy will be implemented through the following initiatives:
1. Strengthening governance, risk management, and compliance (GRC) as a foundation for enhancing the Bank's competitiveness;
2. Protecting Shareholders' rights;
3. Optimizing the roles and functions of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees;
4. Enhancing risk management and internal control functions;
5. Effective handling of customer complaints; and
6. Enhancing the compliance function.

PENILAIAN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK
ASSESSMENT OF THE BANK'S GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Penilaian Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank merupakan proses evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran telah dijalankan secara efektif dalam seluruh aktivitas operasional. Melalui penilaian secara berkala, BRK Syariah dapat mengukur tingkat kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas fungsi pengawasan, serta kualitas manajemen risiko dan pengendalian internal.

Self-Assessment Good Corporate Governance Bank

Pelaksanaan *self-assessment Good Corporate Governance* Bank yang dilakukan setiap semester mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan SEOJK No. 10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sedangkan Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, SE OJK No. 15/ SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Mekanisme Penilaian Terdapat 3 (tiga) aspek *Good Corporate Governance* yang dinilai secara lengkap, meliputi:

1. **Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)**
   Bank melakukan penilaian struktur tata kelola untuk memastikan bahwa struktur dan infrastruktur tata kelola yang dimiliki cukup untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
2. **Proses Tata Kelola (*Governance Process*)**
   Tujuan utama penilaian proses tata kelola adalah untuk mengetahui seberapa efektif prinsip tata kelola yang diterapkan dalam praktik. Diharapkan bahwa Bank akan menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan jika struktur dan infrastruktur tata kelolanya cukup dan didukung oleh proses tata kelola yang baik.
3. **Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)**
   Selain itu, BRK Syariah melakukan penilaian Hasil Tata Kelola untuk menilai kualitas hasil Bank, yang mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa Struktur dan Proses Tata Kelola telah dilaksanakan dengan baik, yang menghasilkan implementasi tata kelola yang berkualitas.

The assessment of Bank Good Corporate Governance (GCG) implementation is an evaluation process conducted to ensure that the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness have been effectively executed across all operational activities. Through periodic assessments, BRK Syariah can measure the level of regulatory compliance, the effectiveness of oversight functions, as well as the quality of risk management and internal controls.

Self-Assessment of Bank Good Corporate Governance

The implementation of the Bank's Good Corporate Governance self-assessment, conducted semi-annually, refers to the provisions of OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, and SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 concerning the Soundness Level Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units..
Meanwhile, the implementation of Governance for Sharia Commercial Banks refers to the provisions of POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, and SE OJK No. 15/SEOJK.03/2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Assessment Mechanisms There are 3 (three) aspects of Good Corporate Governance that are comprehensively assessed, including:

1. **Governance Structure**
   The Bank conducts an assessment of the governance structure to ensure that the existing governance framework and infrastructure are sufficient to generate outcomes aligned with stakeholder expectations.

2. **Governance Process**
   The primary objective of the governance process assessment is to determine the effectiveness of governance principles applied in practice. It is expected that the Bank will demonstrate results consistent with stakeholder expectations if the governance structure and infrastructure are adequate and supported by sound governance processes.
3. **Governance Outcome**
   In addition, BRK Syariah conducts a Governance Outcome assessment to evaluate the quality of the Bank's results, encompassing both qualitative and quantitative aspects. The objective of this assessment is to ensure that the Governance Structure and Process have been properly executed, resulting in high-quality governance implementation.

Kriteria Penilaian

Terdapat 16 (enam belas) faktor penilaian sendiri (*selfassessment*) *Good Corporate Governance*, meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
9. Pemberian remunerasi.
10. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
11. Integritas pelaporan dan *system* teknologi informasi
12. Rencana strategis Bank.
13. Aspek Pemegang Saham
14. Penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan
15. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
16. Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank

Hasil Penilaian

Self-Assessment GCG Bank untuk Semester I dan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Semester I

Assessment Criteria

There are 16 (sixteen) factors in the Good Corporate Governance self-assessment, including:

1. Execution of duties and responsibilities of the Board of Directors.
2. Execution of duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
3. Completeness and execution of Committee duties.
4. Management of conflicts of interest.
5. Implementation of the Bank's compliance function.
6. Implementation of the internal audit function.
7. Implementation of the external audit function.
8. Implementation of risk management, including the internal control system.
9. Provision of remuneration.
10. Provision of funds to related parties and large exposures.
11. Integrity of reporting and information technology systems.
12. The Bank's strategic plan.
13. Shareholder aspects.
14. Implementation of anti-fraud strategies, including anti-bribery.
15. Implementation of sustainable finance, including social and environmental responsibility.
16. Implementation of governance within the Bank's business group.

Assessment Results

The Bank's Good Corporate Governance (GCG) Self-Assessment results for Semester I and II of 2025 are as follows:

Semester I

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Results of Self-Assessment of Good Corporate Governance Implementation		
Peringkat *Rating*		Definisi Peringkat *Rating definition*
Individual *Individual*	3	Manajemen Bank telah melakukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. *The Bank's management has implemented Good Corporate Governance which is generally Fairly good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of Good Corporate Governance principles, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Bank's management.*
Analisis Analysis		
Untuk periode Januari - Juni 2025, Bank telah melakukan *Self-Assessment* (penilaian sendiri) terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* BRK Syariah yang secara umum dinilai **Cukup baik**, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang termuat di dalam *Governance Structure*, *Governance Process* maupun pada *Governance Outcome*. Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (*Self-Assessment*) pelaksanaan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. *For the period January - June 2025, the Bank has conducted a self-assessment of the implementation of BRK Syariah Good Corporate Governance which is generally considered **Fairly good**, this is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance contained in the Governance Structure, Governance Process and in the Governance Outcome. Determination of the ranking of the results of the self-assessment of the implementation of the implementation of Good Corporate Governance above, generated with considerations including governance structure, governance process and governance outcome.*		

Governance Structure

1. Aspek positif
   a. Seluruh Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tidak berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau pihak- pihak yang memiliki hubungan dengan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
   b. Sepanjang periode laporan (Januari s.d Juni 2025):
      - Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga keuangan lainnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saja.
      - Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain. Seluruh Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saja.
      - Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah lainnya. Namun, terdapat satu orang anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya (Unit Usaha Syariah PT Permodalan Ekonomi Rakyat dan Yayasan Berkah Riau Kepri Syariah). Hal ini masih memenuhi ketentuan regulator tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mengatur bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjabat sebagai anggota DPS pada Bank lain dan/ atau DPS pada Lembaga keuangan selain Bank, yang merupakan anggota konglomerasi Bank sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Pengawas Syariah.
   c. Bank telah menjaga pemenuhan modal inti sebesar Rp3 triliun untuk posisi Juni 2025 sebagaimana yang diatur di dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020.
   d. Sebagai perwujudan tata kelola yang baik, Bank telah memiliki :

Governance Structure

1. Positive aspects
   a. The entire Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) does not come from former members of the Board of Directors or Executive Officers of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) or parties who have a relationship with PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
   b. Throughout the reporting period (January to June 2025):
      - Members of the Board of Commissioners do not hold concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Executive Officers at other banks/ financial institutions. All members of the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) currently serve solely as administrators at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
      - The Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) does not hold concurrent positions as Commissioners, Directors, or Executive Officers at other banks, companies, or institutions. All Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) currently serve solely as administrators at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
      - Members of the Sharia Supervisory Board do not hold concurrent positions as members of the Sharia Supervisory Board at other Sharia Banks. However, there is one member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) who holds concurrent positions as members of the Sharia Supervisory Board at other Sharia financial institutions (Sharia Business Unit of PT Permodalan Ekonomi Rakyat and Yayasan Berkah Riau Kepri Syariah). This still meets the regulatory provisions regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units which stipulate that members of the Sharia Supervisory Board may serve as members of the Sharia Supervisory Board at other Banks and/or the Sharia Supervisory Board at financial institutions other than Banks, which are members of the Bank conglomerate as long as it does not result in the person concerned neglecting the implementation of the duties and responsibilities of members of the Sharia Supervisory Board.
   c. The Bank has maintained its core capital requirement of IDR 3 trillion for the June 2025 position as stipulated in POJK Number 12/ POJK.03/2020.
   d. As a manifestation of good governance, the Bank has:

- Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001 : 2022 dengan Ruang Lingkup mencakup Proses Integrasi Pemanfaatan Informasi Dukcapil dan Aktivitas Sistem Pembayaran BRK Syariah. Pada tahun 2025, ISO 27001 : 2022 telah melakukan perluasan ruang lingkup yakni mengganti Web CS menjadi SMART CS.
- Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016. Untuk tahap awal, Implementasi SMAP ISO 37001:2016 dilakukan pada proses kerja pada Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*.

2. Aspek Negatif
   a. Sampai dengan periode penilaian, masih terdapat kekosongan Jabatan Komisaris Utama, namun kekosongan Jabatan Komisaris Utama tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris maupun komite yang berada di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melalui SK Direksi No. 096/KEPDIR/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 Tentang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah melakukan perubahan susunan seluruh komite.
   b. Sampai dengan periode penilaian masih terdapat kekosongan jabatan (defenitif) Direktur Utama Bank. Namun, pada tanggal 28 April 2025 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menetapkan Bapak Helwin Yunus sebagai Plt Direktur Utama sesuai yang tertuang pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) disingkat PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Nomor 3 Tanggal 28 April 2025.
   c. Sesuai hasil RUPS LB Tanggal 28 April 2025 masa jabatan salah satu anggota Dewan Pengurus Syariah tidak diperpanjang, sehingga sejak tanggal 6 Juni 2025 jumlah DPS belum sesuai dengan POJK Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
   d. Divestasi kepemilikan saham pada 3 (tiga) Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Konvensional pasca perubahan kegiatan usaha belum terlaksana dan telah melewati jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan.
   e. Belum terdapat pemegang saham dengan porsi kepemilikan minimal 51%, menindaklanjuti status badan hukum bank sebagai Perseroan Daerah (Perseroda).

- The ISO 27001:2022 Information Security Management System covers the integration process for the use of Civil Registration and Civil Registration Agency (Dukcapil) information and the activities of the Sharia BRK payment system. In 2025, the scope of ISO 27001:2022 was expanded, replacing Web CS with SMART CS.
- Anti-Bribery Management System ISO 37001: 2016. For the initial stage, the implementation of SMAP ISO 37001: 2016 was carried out in the work process in the Internal Audit & Anti-Bribery Division.Fraud.

2. Negative Aspects
   a. Until the assessment period, there is still a vacancy in the position of President Commissioner, however, the vacancy in the position of President Commissioner does not affect the implementation of the duties of the Board of Commissioners or the committees under the Board of Commissioners. The Board of Commissioners through Decree of the Board of Directors No. 096/KEPDIR/2024 dated June 13, 2024 concerning Amendments to Decree of the Board of Directors No. 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 concerning the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) has made changes to the composition of all committees.
   b. Until the assessment period there is still a (definitive) vacant position of President Director of the Bank. However, on April 28, 2025, an Extraordinary General Meeting of Shareholders was held which appointed Mr. Helwin Yunus as Acting President Director as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) abbreviated as PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Number 3 Dated April 28, 2025.
   c. According to the results of the Extraordinary GMS on April 28, 2025, the term of office of one of the members of the Sharia Management Board was not extended, so that since June 6, 2025, the number of DPS has not been in accordance with POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
   d. Divestment of share ownership in 3 (three) Conventional Financial Services Institutions (LJK) following changes in business activities has not been implemented and has passed the time period as stipulated in the provisions.
   e. There are no shareholders with a minimum ownership portion of 51%, following up on the bank's legal entity status as a Regional Company (Perseroda).

Governance Process

1. Aspek positif
   a. Direksi secara rutin melaksanakan rapat internal maupun rapat bersama dengan unit kerja kantor pusat guna membahas dan menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis.
      Pelaksanaan rapat juga dilakukan antara Direksi dengan unit kantor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), baik secara langsung/tatap muka maupun secara *online*.
   b. Dewan Komisaris secara rutin :
      1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi di dalam rapat bersama antara Komisaris dan Direksi maupun arahan melalui surat.
      2. Memantau dan meminta Direksi agar tepat waktu menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
   c. Dewan Pengawas Syariah secara rutin telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) agar sesuai dengan prinsip syariah, baik melalui surat kepada Direksi, pemberian opini atas produk dan jasa PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) serta pelaksanaan kunjungan ke jaringan kantor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) untuk menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pelaksanaan operasional dan produk PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
   d. Untuk meningkatkan pemahaman sumber daya insani di unit bisnis (penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan dan/atau jasa) agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai operasional dan produk perbankan syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) terus melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman pegawai yang dilaksanakan secara berkala.

2. Aspek Negatif
   a. Berdasarkan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) maupun Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawas, secara umum pedoman operasional & produk dan pelaksanaan produk & jasa pada jaringan kantor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah sesuai dengan ketentuan/ peraturan regulator dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
      Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan/ketidaksesuaian yang mesti diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan dan Prinsip Syariah.

Governance Process

1. Positive aspects
   a. The Board of Directors regularly holds internal meetings and joint meetings with head office work units to discuss and determine strategic policies and decisions.
      Meetings were also held between the Board of Directors and the office units of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), both directly/face-to-face and online.
   b. The Board of Commissioners regularly:
      1. supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors in joint meetings between the Commissioners and the Board of Directors or directives by letter.
      2. monitor and request the Board of Directors to timely follow up on audit findings and recommendations resulting from supervision by the Financial Services Authority and/or the results of supervision by other authorities.
   c. The Sharia Supervisory Board has routinely provided advice and suggestions to the Board of Directors and supervised the activities of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) to ensure compliance with sharia principles, both through letters to the Board of Directors, providing opinions on the products and services of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) and conducting visits to the office network of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) to assess and ensure compliance with sharia principles in the implementation of operations and products of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
   d. To improve the understanding of human resources in business units (fund collection, fund distribution, and services and/or services) in order to have adequate knowledge regarding Islamic banking operations and products, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) continues to conduct socialization and increase employee understanding which is carried out periodically.

2. Negative Aspects
   a. Based on the Supervisory Report of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) and the Supervisory Inspection Result Report, in general the operational & product guidelines and implementation of products & services in the office network of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) have complied with the provisions/ regulations of the regulator and the Fatwa of the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council.
      Nevertheless, in its implementation, several weaknesses/non-conformities are still identified, which must be rectified to ensure compliance with the prevailing provisions and Sharia Principles.

b. Pencapaian realisasi rencana bisnis Bank tidak tercapai seluruhnya.
c. Masih ditemukan kelemahan dalam penerapan manajemen risiko pada aktivitas pembiayaan, aktivitas operasional dan aktivitas operasional Teknologi Informasi (TI), sehingga meningkatkan risiko dan mengakibatkan pengenaan sanksi.
d. Frekuensi Rapat anggota Dewan Pengawas Syariah, dan rapat DPS bersama Dewan Komisaris dan Direksi belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
e. Struktur pendanaan terutama penghimpunan dana murah mengalami penurunan cukup signifikan, yang mengakibatkan rendahnya rasio CASA dan tingginya beban bagi hasil yang harus ditanggung.

Governance Outcome

1. Aspek positif
   a. Sepanjang periode laporan penilaian PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) berkomitmen untuk membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank dengan melakukan sosialisasi budaya peduli risiko dan anti *fraud*, serta kegiatan kunjungan Divisi Kepatuhan ke jaringan kantor Bank untuk meningkatkan *awareness* Pegawai terhadap ketentuan internal Bank yang berlaku sebagai tindakan *ex ante*/preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran/*fraud*.
   Pelaksanaan kegiatan di atas cukup efektif dalam membangun budaya kepatuhan dan peduli risiko sebagai upaya pencegahan atas terjadinya pelanggaran/*fraud*.
   b. Setiap pelaksanaan dan keputusan rapat Direksi telah dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik oleh sekretaris Direksi. Tidak terdapat *dissenting opinions* sepanjang penyelenggaraan rapat Direksi pada periode laporan.
   c. Sebelum penerbitan suatu produk, dilakukan proses uji petik kepatuhan, termasuk terhadap Prinsip syariah oleh unit kerja kepatuhan dan beberapa diantaranya telah dilengkapi dengan pendapat/opini dari Dewan Pengawas Syariah, sehingga produk yang dimiliki oleh PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) secara umum telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

2. Aspek Negatif
   a. Pada periode pelaporan, terdapat 2 denda ke pihak regulator.
   b. Masih terdapat komitmen dalam proses tindak lanjut

b. The realization of the Bank's business plan was not fully achieved.
c. Weaknesses are still found in the application of risk management in financing activities, operational activities and Information Technology (IT) operational activities, thus increasing risks and resulting in the imposition of sanctions.
d. The frequency of meetings of members of the Sharia Supervisory Board, and meetings of the DPS with the Board of Commissioners and Directors are not in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 concerning Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
e. The funding structure, especially the collection of low-cost funds, experienced a significant decline, resulting in a low CASA ratio and a high profit-sharing burden that must be borne.

Governance Outcome

1. Positive aspects
   a. Throughout the assessment report period, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) is committed to building a culture of compliance in the Bank's operational activities by conducting socialization of the culture of risk awareness and anti-fraud, as well as visits by the Compliance Division to the Bank's office network to increase employee awareness of the Bank's internal provisions that apply as an ex ante/preventive measure to prevent violations/fraud.
   The implementation of the above activities is quite effective in building a culture of compliance and risk awareness as an effort to prevent violations/fraud.
   b. Every implementation and decision of the Board of Directors meeting has been outlined in the minutes of the meeting and properly documented by the Board of Directors' secretary. There were no dissenting opinions during the Board of Directors meetings during the reporting period.
   c. Before a product is issued, a compliance random check process is carried out, including against Sharia Principles by the compliance work unit and some of them have been supplemented with opinions from the Sharia Supervisory Board, so that the products owned by PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) are generally in accordance with the Fatwa issued by the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council.

2. Negative Aspects
   a. During the reporting period, two regulatory fines were imposed.
   b. Outstanding commitments remain in the follow-up process.

Semester II **Semester II**

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Results of Self-Assessment of Good Corporate Governance Implementation		
Peringkat *Rating*		Definisi Peringkat *Rating definition*
Individual *Individual*	3	Manajemen Bank telah melakukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. *The Bank's management has implemented Good Corporate Governance which is generally Fairly good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of Good Corporate Governance principles, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Bank's management.*
Analisis Analysis		
Untuk periode Juli s.d Desember 2025, Bank telah melakukan *Self-Assessment* (penilaian sendiri) terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* BRK Syariah yang secara umum dinilai **Cukup baik**, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang termuat di dalam *Governance Structure*, *Governance Process* maupun pada *Governance Outcome*. Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (*Self-Assessment*) pelaksanaan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. *For the period July to December 2025, the Bank has conducted a self-assessment of the implementation of BRK Syariah Good Corporate Governance which is generally considered **Fairly good**, this is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance contained in the Governance Structure, Governance Process and in the Governance Outcome.Determination of the ranking of the results of the self-assessment of the implementation of the implementation of Good Corporate Governance above, generated with considerations including governance structure, governance process and governance outcome.*		

Governance Structure

1. Aspek positif
   a. Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tidak berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) .
   b. Sepanjang periode laporan (Juli s.d Desember 2025) :
      - Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga keuangan lainnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saja.
      - Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain. Seluruh Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saja.

Governance Structure

1. Positive aspects
   a. The Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) does not come from former members of the Board of Directors or Executive Officers of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) or parties who have a relationship with PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
   b. Throughout the reporting period (July to December 2025):
      - Members of the Board of Commissioners do not hold concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Executive Officers at other banks/ financial institutions. All members of the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) currently serve solely as administrators at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
      - The Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) does not hold concurrent positions as Commissioners, Directors, or Executive Officers at other banks, companies, or institutions. All Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) currently serve solely as administrators at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

- Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah lain maupun pada Lembaga keuangan lainnya.
- Seluruh Direksi memiliki kemauan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu bentuk pembelajaran yang berkelanjutan antara lain adalah dengan keikutsertaan Direksi dalam berbagai pelatihan/ seminar maupun workshop terkait dengan bidang tugasnya.

c. Bank telah menjaga pemenuhan modal inti minimal sebesar Rp.3 triliun untuk posisi Desember 2025 sebagaimana yang diatur di dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020.

d. Sebagai perwujudan tata kelola yang baik, Bank telah memiliki :
   - Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001 : 2022 dengan Ruang Lingkup mencakup Proses Integrasi Pemanfaatan Informasi Dukcapil dan Aktivitas Sistem Pembayaran BRK Syariah. Pada tahun 2025, ISO 27001 : 2022 telah melakukan perluasan ruang lingkup yakni mengganti Web CS menjadi SMART CS.
   - Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001: 2016. Untuk tahap awal, Implementasi SMAP ISO 37001:2016 dilakukan pada proses kerja pada Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*. Pada tahun 2025, Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah diperbarui dan berlaku s.d. 10 November 2026.

2. Aspek Negatif

a. Sampai dengan periode penilaian, masih terdapat kekosongan Jabatan Komisaris Utama, namun kekosongan Jabatan Komisaris Utama tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris maupun komite yang berada dibawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melalui SK Direksi No. 202/KEPDIR/2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor 36.A/ KEPDIR/MSDI/2023 Tentang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah melakukan perubahan susunan seluruh komite.

- Members of the Sharia Supervisory Board do not hold concurrent positions as members of the Sharia Supervisory Board at other Sharia Banks or other financial institutions.
- All Directors are committed to continuous learning to improve their knowledge of banking and the latest developments in the financial and other fields that support the implementation of their duties and responsibilities. One form of continuous learning is through participation by Directors in various training courses, seminars, and workshops related to their respective areas of responsibility.

c. The Bank has maintained a minimum core capital requirement of IDR 3 trillion for the December 2025 position as stipulated in POJK Number 12/ POJK.03/2020.

d. As a manifestation of good governance, the Bank has:
   - The ISO 27001:2022 Information Security Management System covers the integration process for the use of Civil Registration and Civil Registration Agency (Dukcapil) information and the activities of the Sharia BRK payment system. In 2025, the scope of ISO 27001:2022 was expanded, replacing Web CS with SMART CS.
   - ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System. For the initial stage, the implementation of the ISO 37001:2016 SMAP was carried out in the work processes of the Internal Audit & Anti-Fraud Division. In 2025, the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certification was updated and is valid until November 10, 2026.

1. Negative Aspects

a. Until the assessment period, there is still a vacancy in the position of President Commissioner, however, the vacancy in the position of President Commissioner does not affect the implementation of the duties of the Board of Commissioners or the committees under the Board of Commissioners. The Board of Commissioners through Decree of the Board of Directors No. 202/KEPDIR/2025 concerning the Third Amendment to the Decree of the Board of Directors No. 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 concerning the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) has made changes to the composition of all committees.

b. Terhitung sejak tanggal 15 September 2025 terdapat kekosongan Jabatan Direktur Dana & Jasa dan Direktur Operasional Bank, dikarenakan masa jabatan kedua Direktur tersebut telah berakhir s.d. tanggal 14 September 2025.
c. Pada Periode Pelaporan, Komisaris Independen yakni Ibu Rita Anugerah mengundurkan diri dimana tertuang pada Akta RUPS-LB Nomor 45 Tanggal 23 Oktober 2025. Atas Surat Pengunduran Diri yang diajukan Bank kepada OJK, Bank telah mendapatkan Surat Tanggapan yakni Surat Nomor: SR-68/KO.154/2025 tanggal 16 Oktober 2025 Perihal Tindak Lanjut Pengunduran Diri Komisaris Independen PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda).
d. Belum terpenuhinya komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah Bank.
e. Divestasi kepemilikan saham pada 3 (tiga) Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Konvensional pasca perubahan kegiatan usaha belum terlaksana dan telah melewati jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan.
f. Belum terdapat pemegang saham dengan porsi kepemilikan minimal 51%, menindaklanjuti status badan hukum bank sebagai Perseroan Daerah (Perseroda).

Governance Process

1. Aspek positif
   a. Direksi secara rutin melaksanakan rapat internal maupun rapat bersama dengan unit kerja kantor pusat guna membahas dan menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis. Pelaksanaan rapat juga dilakukan antara Direksi dengan unit kantor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), baik secara langsung/tatap muka maupun secara *online*.
   b. Dewan Komisaris secara rutin :
      1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi di dalam rapat bersama antara Komisaris dan Direksi maupun arahan melalui surat.
      2. memantau dan meminta Direksi agar tepat waktu menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya

b. Effective September 15, 2025, there is a vacancy in the positions of Director of Funds & Services and Director of Operations, because the terms of office of the two Directors have ended until September 14, 2025.
c. During the Reporting Period, the Independent Commissioner, Mrs. Rita Anugerah, resigned as stated in the Deed of the Extraordinary GMS Number 45 dated October 23, 2025. Regarding the Resignation Letter submitted by the Bank to the OJK, the Bank has received a Response Letter, namely Letter Number: SR-68/KO.154/2025 dated October 16, 2025 Regarding Follow-up to the Resignation of the Independent Commissioner of PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda).
d. The composition of the members of the Bank's Sharia Supervisory Board has not been fulfilled.
e. Divestment of share ownership in 3 (three) Conventional Financial Services Institutions (LJK) following changes in business activities has not been implemented and has passed the time period as stipulated in the provisions.
f. There are no shareholders with a minimum ownership portion of 51%, following up on the bank's legal entity status as a Regional Company (Perseroda).

Governance Process

1. Positive aspects
   a. The Board of Directors regularly holds internal meetings and joint meetings with head office work units to discuss and establish strategic policies and decisions. Meetings are also held between the Board of Directors and PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) office units, both in person and online.

   b. The Board of Commissioners regularly:
      1. supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors in joint meetings between the Commissioners and the Board of Directors or directives by letter.
      2. monitor and request the Board of Directors to timely follow up on audit findings and recommendations resulting from supervision by the Financial Services Authority and/or the results of supervision by other authorities

c. Dewan Pengawas Syariah secara rutin telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) agar sesuai dengan Prinsip syariah, baik melalui surat kepada Direksi, pemberian opini atas produk dan jasa PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) serta pelaksanaan kunjungan ke jaringan kantor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) untuk menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip syariah atas pelaksanaan operasional dan produk PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

d. Untuk meningkatkan pemahaman sumber daya insani di unit bisnis (penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan dan/atau jasa) agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai operasional dan produk perbankan syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) terus melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman pegawai yang dilaksanakan secara berkala.

2. Aspek Negatif

a. Berdasarkan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) maupun Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawas, secara umum pedoman operasional & produk dan pelaksanaan produk & jasa pada jaringan kantor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah sesuai dengan ketentuan/ peraturan regulator dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

   Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan/ketidaksesuaian yang mesti diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan dan Prinsip syariah.

b. Komposisi Direksi pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang tidak lengkap, sehingga mengakibatkan adanya proses bisnis Bank tidak berjalan sebagaimana mestinya.

c. Pencapaian realisasi rencana bisnis Bank tidak tercapai seluruhnya.

d. Masih ditemukan kelemahan dalam penerapan manajemen risiko pada aktivitas pembiayaan, aktivitas operasional dan aktivitas operasional Teknologi Informasi (TI), sehingga meningkatkan risiko dan mengakibatkan pengenaan sanksi.

c. The Sharia Supervisory Board has routinely provided advice and suggestions to the Board of Directors and overseen the activities of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) to ensure compliance with Sharia Principles, both through letters to the Board of Directors, providing opinions on the products and services of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) and conducting visits to the office network of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) to assess and ensure compliance with Sharia Principles for the implementation of operations and products of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

d. To improve the understanding of human resources in business units (fund collection, fund distribution, and services and/or services) so that they have adequate knowledge regarding Islamic banking operations and products, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) continues to conduct socialization and increase employee understanding which is carried out periodically.

2. Negative Aspects

a. Based on the Supervisory Report of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) and the Supervisory Inspection Result Report, in general the operational & product guidelines and implementation of products & services in the office network of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) have complied with the provisions/ regulations of the regulator and the Fatwa of the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council.

   However, in its implementation, several weaknesses/inconsistencies were still found which must be corrected to comply with Sharia provisions and principles.

b. The composition of the Board of Directors at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) is incomplete, resulting in the Bank's business processes not running as they should.

c. The realization of the Bank's business plan was not fully achieved.

d. Weaknesses are still found in the application of risk management in financing activities, operational activities and Information Technology (IT) operational activities, thus increasing risks and resulting in the imposition of sanctions.

e. Frekuensi Rapat anggota Dewan Pengawas Syariah, dan rapat DPS bersama Dewan Komisaris dan Direksi belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Governance Outcome

1. Aspek positif
   a. Sepanjang periode laporan penilaian PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) berkomitmen untuk membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank dengan melakukan sosialisasi budaya peduli risiko dan anti *fraud*, serta kegiatan kunjungan Divisi Kepatuhan ke jaringan kantor Bank untuk meningkatkan *awareness* Pegawai terhadap ketentuan internal Bank yang berlaku sebagai tindakan *ex ante*/preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran/*fraud*.
      Pelaksanaan kegiatan di atas cukup efektif dalam membangun budaya kepatuhan dan peduli risiko sebagai upaya pencegahan atas terjadinya pelanggaran/*fraud*.
   b. Setiap pelaksanaan dan keputusan rapat Direksi telah dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik oleh sekretaris Direksi. Tidak terdapat *dissenting opinions* sepanjang penyelenggaraan rapat Direksi pada periode laporan.
   c. Sebelum penerbitan suatu produk, dilakukan proses uji petik kepatuhan, termasuk terhadap Prinsip syariah oleh unit kerja kepatuhan dan beberapa diantaranya telah dilengkapi dengan pendapat/opini dari Dewan Pengawas Syariah, sehingga produk yang dimiliki oleh PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) secara umum telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
2. Aspek Negatif
   a. Pada periode pelaporan, masih terdapat 6 (enam) sanksi dari pihak regulator.
   b. Masih terdapat komitmen dalam proses tindak lanjut.

e. The frequency of meetings of members of the Sharia Supervisory Board, and meetings of the DPS with the Board of Commissioners and Directors are not in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Governance Outcome

1. Positive aspects
   a. Throughout the assessment report period, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) is committed to building a culture of compliance in the Bank's operational activities by conducting socialization of the culture of risk awareness and anti-fraud, as well as visits by the Compliance Division to the Bank's office network to increase employee awareness of the Bank's internal provisions that apply as an ex ante/preventive measure to prevent violations/fraud.
      The implementation of the above activities is quite effective in building a culture of compliance and risk awareness as an effort to prevent violations/fraud.
   b. Every implementation and decision of the Board of Directors meeting has been outlined in the minutes of the meeting and properly documented by the Board of Directors' secretary. There were no dissenting opinions during the Board of Directors meetings during the reporting period.
   c. Prior to the issuance of a product, a compliance sampling process is conducted, including adherence to Sharia Principles by the compliance unit, and several of these have been supplemented with opinions from the Sharia Supervisory Board. Consequently, the products owned by PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) generally comply with the Fatwas issued by the National Sharia Board – Majelis Ulama Indonesia.
2. Negative Aspects
   a. During the reporting period, 6 (six) sanctions from the regulatory authority were recorded.
   b. Outstanding commitments remain in the follow-up process.

Rekomendasi Penilaian *Self Assesment* Tahun 2025 diantaranya adalah :

1. Agar mempercepat proses pengisian Jabatan Komisaris Utama, Direktur Utama dan Anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.
2. Saran untuk Divestasi Saham yakni sebagai berikut :
   a. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Aksi Divestasi
   b. Kordinasi intensif Bersama pihak regulator
   c. Mengevaluasi factor yang menjadi hambatan Pelaksanaan Divestasi
   d. Peningkatan Fungsi Kepatuhan dan Pemantauan
   e. Pelaporan berkala kepada Manajemen dan Dewan Komisaris
3. Rekomendasi atas belum terpenuhinya kepemilikan saham minimal 51 % oleh Pemerintah Daerah yakni sebagai berikut :
   a. Percepatan Realisasi Kepemilikan Mayoritas oleh Pemda.
   b. Kordinasi strategis dengan Pemerintah Daerah dan DPRD
   c. Penyusunan Rencana Aksi Kepemilikan Saham
   d. Melakukan evaluasi ulang Status Badan Hukum

Tindak Lanjut Penilaian *Self Assesment* Tahun 2025 diantaranya adalah :

1. Untuk pengisian komposisi pengurus Bank, Pada tahun 2025 telah diadakan dua kali RUPS-LB, yaitu pada tanggal 28 April 2025 dan tanggal 23 Oktober 2025 dengan agenda mengenai pengisian pengurus.
2. Mengenai pengenaan sanksi dari regulator, Bank telah melakukan evaluasi terhadap penyebabnya dan melakukan perbaikan agar hal tersebut tidak terulang kembali.
3. Melakukan koordinasi Bersama Pemerintah Daerah selaku pemilik 3 (tiga) Lembaga Jasa Keuangan untuk akselerasi proses divestasi saham pada LJK Konvensional.
4. Pembahasan Bersama Pemegang Saham Pengendali untuk terpenuhinya saham minimal 51%.
5. Bank menyusun RBB yang disesuaikan dengan Model bisnis, Rencana koorporasi dan roadmap yang diterbitkan oleh otoritas.

The recommendations from the 2025 Self Assessment Evaluation include the following:

1. To accelerate the appointment process for the positions of President Commissioner, President Director, and Members of the Sharia Supervisory Board in accordance with applicable laws and regulations.
2. Suggestions for Share Divestment are as follows:
   a. Formulation and Submission of the Divestment Action Plan
   b. Intensive coordination with the regulators
   c. Evaluation of factors hindering the Divestment Implementation
   d. Enhancement of the Compliance and Monitoring Functions
   e. Periodic reporting to the Management and Board of Commissioners
3. Recommendations regarding the unfulfilled minimum 51% share ownership by the Regional Government are as follows:
   a. Acceleration of Majority Ownership Realization by the Regional Government.
   b. Strategic coordination with the Regional Government and the Regional People's Representative Council (DPRD)
   c. Formulation of the Share Ownership Action Plan
   d. Re-evaluating the Legal Entity Status

The Follow-up Actions on the 2025 Self Assessment Evaluation include the following:

1. Regarding the fulfillment of the Bank's management composition, two Extraordinary General Meetings of Shareholders (RUPS-LB) were held in 2025, specifically on April 28, 2025, and October 23, 2025, with agendas pertaining to the appointment of management.
2. Concerning the imposition of sanctions by the regulator, the Bank has evaluated the root causes and implemented corrective measures to prevent recurrence.
3. Coordinating with the Regional Government as the owner of 3 (three) Financial Services Institutions (LJK) to accelerate the share divestment process in Conventional LJKs.
4. Joint discussion with the Controlling Shareholder to fulfill the minimum 51% share ownership.
5. The Bank formulates the Bank Business Plan (RBB) aligned with the business model, corporate plan, and the roadmap issued by the authorities.

STRUKTUR TATA KELOLA BRK SYARIAH
BRK SYARIAH GOVERNANCE STRUCTURE

Struktur Organ Perusahaan

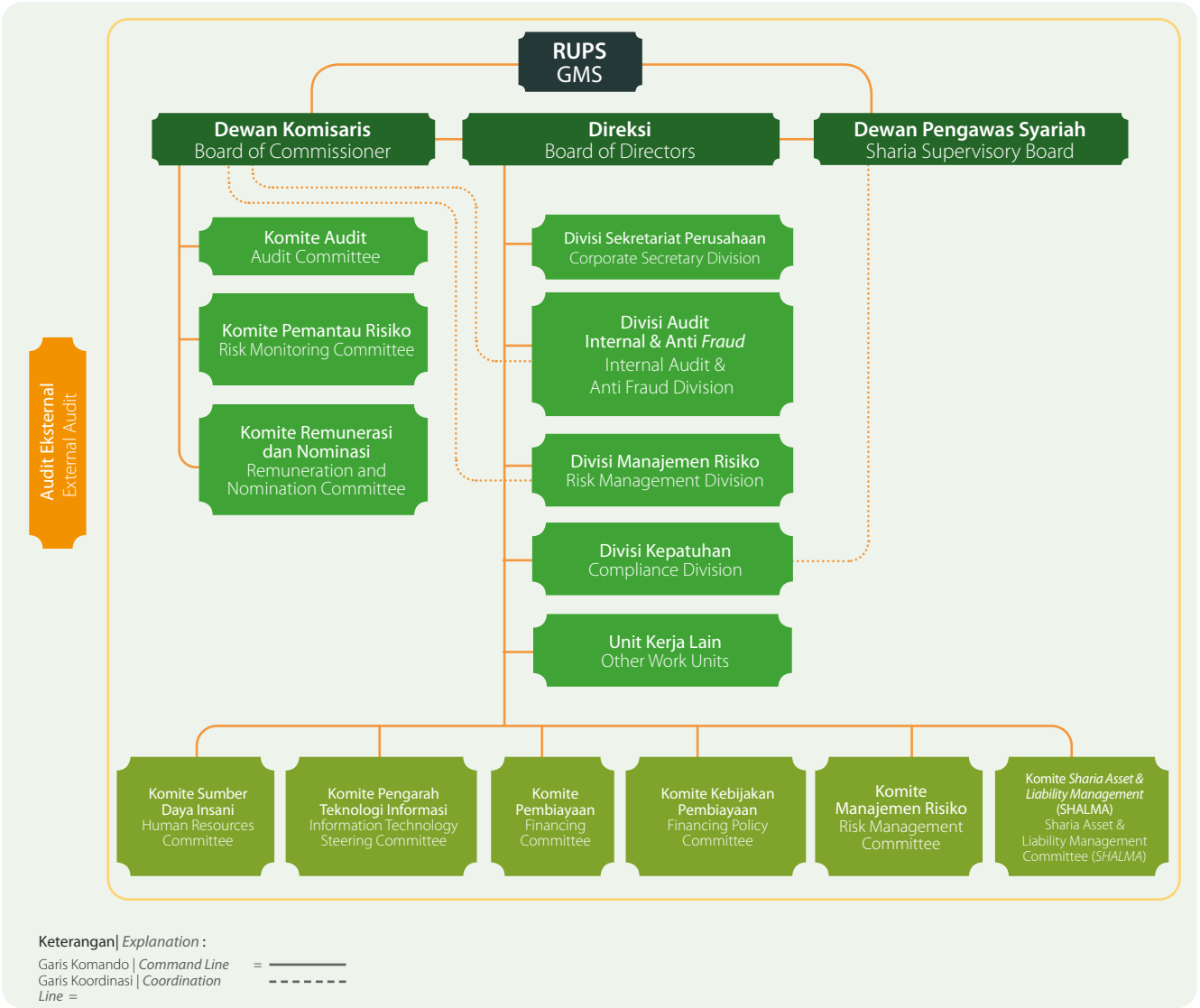
Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka struktur GCG BRK Syariah terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Selain itu, BRK Syariah juga membentuk organ pendukung yang terdiri dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.

Struktur Organ tata kelola BRK Syariah disajikan pada bagan di bawah ini:

Corporate Governance Structure

In alignment with the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 2 of 2024 regarding the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, and OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Good Corporate Governance (GCG) structure of BRK Syariah consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors. Furthermore, BRK Syariah has established supporting organs comprising committees under the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Corporate Secretary, and Internal Audit.

The Corporate Governance Structure of BRK Syariah is presented in the organizational chart below:



Keterangan| *Explanation* :

Garis Komando | *Command Line* = ————

Garis Koordinasi | *Coordination Line* = - - - - - - -

Governance Soft-Structure

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi tata kelola Bank secara berkelanjutan, BRK Syariah telah memiliki kebijakan tata kelola berupa *governance soft structure* yang mengatur hubungan antar organ di dalam BRK Syariah sehingga terdapat tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, etika bisnis yang sehat maupun *best practices*. *Governance soft structure* BRK Syariah merupakan tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Bank, sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar BRK Syariah.
2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDK/2023 tanggal tanggal 27 Juni 2023 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
3. Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/KEPDK/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.
4. Keputusan Direksi No. 045/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Penerapan (BPP) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
5. Keputusan Direksi Nomor 049/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan Syariah.
6. Keputusan Direksi Nomor 170/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
7. Keputusan Direksi Nomor 171/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
8. Keputusan Direksi Nomor 172/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*).
9. Keputusan Direksi Nomor 031/KEPDIR/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*).

Governance Soft-Structure

In order to enhance the quality of the Bank's governance implementation sustainably, BRK Syariah has established governance policies in the form of a governance soft structure. This structure regulates the relationship between organs within BRK Syariah to ensure clear duties, responsibilities, and authorities in accordance with applicable laws and regulations, GCG principles, sound business ethics, and best practices. The governance soft structure of BRK Syariah serves as a policy framework and governance foundation for policy formulation and the execution of Bank activities, as follows:

1. Articles of Association of BRK Syariah.
2. Board of Commissioners Decree No. 001/KEPDK/2023 dated June 27, 2023, concerning the Board of Commissioners Work Guidelines.
3. Board of Commissioners Decree No. 002/KEPDK/2023 dated June 27, 2023, concerning the Work Guidelines for the Remuneration & Nomination Committee, Risk Monitoring Committee, and Audit Committee.
4. Board of Directors Decree No. 045/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022, concerning the Manual for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG).
5. Board of Directors Decree No. 049/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022, concerning the Corporate Manual for Sharia Compliance.
6. Board of Directors Decree No. 170/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022, concerning the Guidelines for Gratuity Control within PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
7. Board of Directors Decree No. 171/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022, concerning the Whistleblowing System Guidelines.
8. Board of Directors Decree No. 172/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022, concerning the Compliance Code of Conduct.
9. Board of Directors Decree No. 031/KEPDIR/2023 dated March 6, 2023, concerning the Compliance Charter.

10. Keputusan Direksi Nomor 168/KEPDIR/2024 tanggal 12 September 2024 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi No. 156/KEPDIR/2025 tanggal 17 September 2025 Tentang Perubahan Pertama SK Direksi Nomor 168/KEPDIR/2024 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
11. Keputusan Direksi Nomor 169/KEPDIR/2024 tanggal 12 September 2024 Tentang Manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi No. 157/KEPDIR/2025 tanggal 17 September 2025 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Direksi No. 169/KEPDIR/2024 Tentang Manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
12. Keputusan Direksi Nomor 242/KEPDIR/2024 Tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).
13. Keputusan Direksi Nomor 011/KEPDIR/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Strategi Anti *Fraud*.
14. Keputusan Direksi Nomor 133/KEPDIR/2025 tanggal 20 Agustus 2025 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)
15. Keputusan Direksi Nomor 202/KEPDIR/2025 tanggal 21 November 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/2023 Tentang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
16. Keputusan Direksi Nomor 209/KEPDIR/2025 tanggal 26 November 2025 Tentang Piagam Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
17. Keputusan Direksi No. 220/KEPDIR/2025 tanggal 18 Desember 2025 Tentang Pedoman *Compliance Checklist* Calon Pengurus dan DPS Bank.

10. Board of Directors Decree Number 168/KEPDIR/2024 dated September 12, 2024, Regarding the Establishment of the Anti-Bribery Management System (ABMS) Organizational Structure of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), as amended by Board of Directors Decree Number 156/KEPDIR/2025 dated September 17, 2025, Regarding the First Amendment to Board of Directors Decree Number 168/KEPDIR/2024 Regarding the Establishment of the Anti-Bribery Management System (ABMS) Organizational Structure of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
11. Board of Directors Decree Number 169/KEPDIR/2024 dated September 12, 2024, Regarding the Anti-Bribery Management System (ABMS) Manual of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), as amended by Board of Directors Decree Number 157/KEPDIR/2025 dated September 17, 2025, Regarding the First Amendment to Board of Directors Decree Number 169/KEPDIR/2024 Regarding the Anti-Bribery Management System (ABMS) Manual of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
12. Board of Directors Decree No. 242/KEPDIR/2024 concerning the Conflict of Interest Guidelines.
13. Board of Directors Decree No. 011/KEPDIR/2025 dated January 20, 2025, concerning the Corporate Manual for the Implementation of Anti-Fraud Strategies.
14. Board of Directors Decree Number 133/KEPDIR/2025 dated August 20, 2025 Concerning the Company Guidelines (BPP) of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)
15. Board of Directors Decree No. 202/KEPDIR/2025 dated November 21, 2025, concerning the Third Amendment to Board of Directors Decree No. 36.A/KEPDIR/2023 regarding the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
16. Board of Directors Decree No. 209/KEPDIR/2025 dated November 26, 2025, concerning the Internal Audit Charter of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
17. Board of Directors Decree No. 220/KEPDIR/2025 dated December 18, 2025, concerning the Compliance Checklist Guidelines for Prospective Executives and Sharia Supervisory Board Members of the Bank.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan sistem dan struktur yang digunakan dalam implementasi GCG di BRK Syariah agar setiap organ dalam Bank menjalankan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta etika bisnis yang sehat.

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas fungsi pengawasan dan penasihatan, yang dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Dewan Komisaris beranggotakan anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak independen serta profesional di bidangnya. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tata kelola, Direksi membentuk fungsi Audit Internal, manajemen risiko dan kepatuhan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil Pengawasan DPS disampaikan kepada OJK setiap semester.

Tingkat Kesehatan Bank dan Penilaian Risiko Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 23, yaitu Bank wajib menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka penilaian Profil Risiko menjadi bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Penilaian Profil Risiko mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan Sistem Pengendalian Risiko (*risk control system*).

Laporan Tingkat Kesehatan Bank

Prinsip-prinsip umum sebagai landasan penilaian Tingkat Kesehatan Bank adalah:

1. Berorientasi Risiko
   Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko yang dihadapi Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara identifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan di masa yang akan datang.
2. Proporsionalitas
   Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor

Corporate governance mechanisms constitute the systems and structures utilized in the implementation of GCG at BRK Syariah to ensure that every organ within the Bank carries out its authority, duties, and responsibilities in alignment with GCG principles, applicable laws and regulations, and sound business ethics.

The Board of Commissioners is responsible for the oversight and advisory functions, supported by the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee. The Board of Commissioners' Committees consist of members of the Board of Commissioners as well as independent parties and professionals in their respective fields. The Board of Directors holds full responsibility for the management of the Bank as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations. In executing governance, the Board of Directors establishes the Internal Audit, risk management, and compliance functions. The Sharia Supervisory Board (DPS) is an organ tasked with providing advice and recommendations to the Board of Directors and overseeing the Bank's activities to ensure compliance with Sharia principles. The results of the DPS oversight are submitted to the OJK on a semi-annual basis.

Bank Soundness Level and Bank Risk Assessment

Financial Services Authority Regulation Number 65/POJK.03/2016 concerning the Application of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Article 23, stipulates that Banks are mandatory to submit Risk Profile Reports to the Financial Services Authority on a quarterly basis for the positions of March, June, September, and December.

With the issuance of the Financial Services Authority Circular Letter Number 10/SEOJK.03/2014 dated June 11, 2014, regarding the Rating of Sharia Commercial Bank Soundness, the Risk Profile assessment has become an integral part of the Soundness Level Report for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The Risk Profile assessment includes the assessment of Inherent Risk and the assessment of the Quality of Risk Management Implementation, which reflects the risk control system.

Bank Soundness Level Report

The general principles serving as the foundation for the Bank Soundness Level assessment are:

1. Risk-Oriented
   The soundness level assessment is based on the risks faced by the Bank and the resulting impact on the Bank's overall performance. This is conducted by identifying internal and external factors that could increase risk or affect the Bank's financial performance at present and in the future.
2. Proportionality
   The use of parameters/indicators in each assessment factor of the Bank Soundness Level is carried out by

penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

3. Materialitas dan Signifikansi
   Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai Risiko dan kinerja keuangan Bank. Materialitas dan signifikansi komponen atau faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank adalah: a. Penilaian Profil Risiko b. Penilaian Tata Kelola c. Penilaian Rentabilitas d. Penilaian Permodalan.
4. Komprehensif dan Terstruktur.
   Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Bank. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan trend dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Bank.

considering the characteristics and complexity of the Bank's business.

3. Materiality and Significance
   The determination of materiality and significance is based on analysis supported by adequate data and information regarding the Bank's risks and financial performance. The materiality and significance of the components or factors in the Bank Soundness Level assessment are: a. Risk Profile Assessment b. Governance Assessment c. Profitability Assessment d. Capital Assessment.
4. Comprehensive and Structured
   The assessment process is conducted thoroughly and systematically, focusing on the Bank's primary issues. The analysis must be supported by key facts and relevant ratios to demonstrate trends and the level of issues faced by the Bank.

Tabel Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Desember 2025 (OJK)
Bank Health Level Assessment Table December 2025 (OJK)

No	Faktor Penilaian	Peringkat Individu Individual Ranking	Assessment Factors
1	Profil Risiko	3	Risk Profile
2	Tata Kelola	3	Governance
3	Rentabilitas	3	Rentability
4	Permodalan	2	Capital
	Peringkat Tingkat Risiko	3	Risk Level Rating

Berdasarkan penilaian OJK kondisi BRK Syariah secara umum Cukup Sehat dengan Peringkat Komposit TKB 3 (tiga), dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Secara umum kelemahan yang ada bisa diatasi sehingga tidak terlalu signifikan menganggu kelangsungan usaha BRK Syariah.

Based on the OJK, the general condition of BRK Syariah is categorized as Satisfactory with a Bank Soundness Level (TKB) Composite Rating of 3 (three), reflecting the capacity to withstand significant negative impacts from changes in business conditions and other external factors. In general, existing weaknesses can be addressed such that they do not significantly disrupt the business continuity of BRK Syariah.

1. Profil Risiko
   Dengan mempertimbangkan signifikansi, materialitas dan peringkat dari sepuluh risiko inheren serta kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit diperoleh kesimpulan bahwa Profil Risiko Bank Riau Kepri Syariah adalah 3 (*moderate*).

1. Risk Profile
   By considering the significance, materiality, and ratings of the ten inherent risks as well as the composite quality of risk management implementation, it is concluded that the Risk Profile of Bank Riau Kepri Syariah is 3 (moderate).

Tabel Profil Risiko periode Desember 2025 (OJK)
Risk Profile Table for December 2025 (OJK)

No	Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Quality Rating of Risk Management Implementation	Peringkat Tingkat Risiko Risk Level Rating	Risk Profile
1	Risiko Kredit	*Moderate*	*Fair*	3	Credit Risk
2	Risiko Pasar	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	Market Risk
3	Risiko Likuiditas	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	Liquidity Risk
4	Risiko Operasional	*Moderate*	*Fair*	3	Operational Risk
5	Risiko Hukum	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	Legal Risk
6	Risiko Reputasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	Reputation Risk
7	Risiko Strategis	*Moderate*	*Fair*	3	Strategic Risk
8	Risiko Kepatuhan	*Moderate*	*Fair*	3	Compliance Risk
9	Risiko Imbal Hasil	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	Yield Risk
10	Risiko Investasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	Investment Risk
	Peringkat Komposit			**3**	**Composite Rating**

2. Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola secara umum baik, yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola tersebut. Kelemahan yang ada secara umum kurang signifikan namun tetap memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

2. Governance

The implementation of Governance is generally sound, as reflected in adequate compliance with Governance principles. Weaknesses are generally less significant but still require adequate attention from Bank management.

Penilaian Faktor Tata Kelola
Assessment of Governance Factors

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-assesment*) Pelaksanaan Tata Kelola Results of Self-assessment of Governance Implementation		
Peringkat Rating		**Definisi Peringkat** Definition of Rating
Individual	3	Manajemen PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah melakukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). *The management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) has implemented Good Corporate Governance which is generally good enough. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*

3. Rentabilitas

Rentabilitas Bank memadai, namun Bank tetap perlu meningkatkan kinerja yang mampu mendukung pertumbuhan permodalan Bank untuk kelangsungan usaha Bank di masa yang akan datang sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai (peringkat 3).

1. Kinerja Bank Dalam Menghasilkan Laba
   - Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup memadai, hal ini ditandai dengan :
     a. Rasio ROA BRK Syariah sebesar 1,19% berada di bawah rata-rata rasio ROA Bank Umum Syariah sebesar 1,97%, ROA Bank Umum KBMI 1 sebesar 1,48 dan BPD KBMI 1 sebesar 2,09%. (sumber : SPI OJK – Oktober 2025).
     b. Rasio Rasio NOM BRK Syariah sebesar 0,88 % berada di bawah rasio NOM Bank Umum Syariah sebesar 2,33%, (sumber : SPI OJK – Oktober 2025).
     c. Rasio NI BRK Syariah sebesar 5,12% per Desember 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024 (4,98%).
     d. Pencapaian laba BRK Syariah belum mencapai target Semester II, dimana realisasi laba bersih sebesar Rp276 miliar.
     e. Kemampuan Bank dalam memperoleh rentabilitas untuk meningkatkan permodalan sebesar Rp3.447 miliar per Desember 2025.

3. Rentability

The Bank's rentability is adequate; however, the Bank still needs to improve performance capable of supporting capital growth to ensure future business continuity and achieve established targets (Rating 3).

1. The Bank's Earnings Performance
   - The Bank's performance in generating profit (rentability) is sufficiently adequate, as indicated by:
     a. The ROA ratio of BRK Syariah at 1.19%, which is below the average ROA ratio for Sharia Commercial Banks (1.97%), KBMI 1 Commercial Banks (1.48%), and KBMI 1 Regional Development Banks (2.09%). (Source: SPI OJK – October 2025).
     b. The NOM ratio of BRK Syariah at 0.88%, which is below the NOM ratio for Sharia Commercial Banks of 2.33% (Source: SPI OJK – October 2025).
     c. The NI ratio of BRK Syariah at 5.12% as of December 2025, an increase compared to 2024 (4.98%).
     d. The profit achievement of BRK Syariah has not yet reached the Semester II target, where the realization of net profit was Rp276 billion.
     e. The Bank's ability to obtain rentability to increase capital to Rp3.447 billion as of December 2025.

2. Sumber-Sumber Yang Mendukung Rentabilitas
   - Sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earnings* sangat dominan namun pencapaiannya secara umum dibawah *peer group*, antara lain :
     a. Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dikurang imbalan dan bonus dibagi rata-rata total aset adalah sebesar 4,94%.
     b. Pendapatan operasional lainnya selain pendapatan bunga (nett) = 0,44% dari rata-rata total aset.
     c. Beban *overhead* yaitu sebesar 3,61% dari rata-rata total aset, dan untuk beban pencadangan dengan rasio sebesar 0,13% dari rata-rata total aset.
3. Stabilitas (*Sustainability*) Komponen yang Mendukung Rentabilitas
   - Stabilitas (*Sustainability*) komponen yang mendukung rentabilitas cukup stabil tercermin dari :
     a. Ratio core ROA sebesar 1,19%
     b. Pertumbuhan rentabilitas saat ini sebesar 95,29% per Desember 2025
4. Manajemen Rentabilitas
   Manajemen rentabilitas Bank sangat memadai yang terlihat dari pertumbuhan laba yang mengalami peningkatan yang cukup memadai pada posisi periode laporan. Ke depannya Bank harus lebih meningkatkan pencapaian laba dengan cara :
   a. Meningkatkan penyaluran pembiayaan yang berkualitas lancer
   b. Efisiensi dalam hal menurunkan biaya imbal hasil DPK (*special* nisbah deposito) dan beban CKPN
   c. Meningkatkan *fee based income*.

4. Permodalan

Bank Riau Kepri Syariah memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Bank Riau Kepri Syariah (Peringkat2).

1. Kecukupan Modal Bank
   a. Bank Riau Kepri Syariah memiliki tingkat permodalan yang memadai di atas persyaratan minimum, mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung usaha Bank ke depan :
      a). Rasio KPMM = 21,21% melampaui KPMM minimum 8% Rasio KPMM BRK Syariah 21,21% berada di bawah rasio KPMM Bank Umum Syariah sebesar 24,57% , rasio KPMM Bank Swasta Nasional sebesar 28,45%, Bank Persero sebesar 20,19 dan BPD sebesar 26,28% (sumber : SPI OJK – Oktober 2025).

2. Sources Supporting Profitability
   - The primary sources of rentability derived from core earnings are dominant, but their achievement is generally below the peer group, including:
     a. Income from fund distribution after profit sharing minus incentives and bonuses divided by average total assets is 4.94%.
     b. Other operating income excluding interest income (net) = 0.44% of average total assets.
     c. Overhead expenses represent 3.61% of average total assets, while provisioning expenses stand at a ratio of 0.13% of average total assets.
3. Sustainability of Components Supporting Profitability
   - The sustainability of components supporting rentability is quite stable, as reflected by:
     a. Core ROA ratio of 1.19%.
     b. Current rentability growth of 95.29% as of December 2025.
4. Profitability Management
   The Bank's rentability management is very adequate, as evidenced by sufficient profit growth during the reporting period. Going forward, the Bank must further improve profit achievement by:
   a. Increasing the distribution of high-quality, performing financing.
   b. Improving efficiency by reducing the cost of fund yields (special deposit ratios) and CKPN (Allowance for Impairment Losses) expenses.
   c. Increasing fee-based income.

4. Capital

Bank Riau Kepri Syariah maintains adequate capital quality and adequacy relative to its risk profile, accompanied by robust capital management in accordance with the characteristics, business scale, and business complexity of Bank Riau Kepri Syariah (Rating 2).

1. Bank Capital Adequacy
   a. Bank Riau Kepri Syariah possesses an adequate level of capital above the minimum requirements, capable of anticipating all risks faced and supporting the Bank's future business:
      a). The Capital Adequacy Ratio (CAR/KPMM) of 21.21% exceeds the minimum 8% requirement. The CAR of BRK Syariah at 21.21% is below the CAR of Sharia Commercial Banks at 24.57%, the CAR of National Private Banks at 28.45%, State-Owned Banks (Persero) at 20.19%, and Regional Development Banks (BPD) at 26.28%. (Source: SPI OJK – October 2025).

b). Rasio modal inti dibandingkan ATMR 19,81% per Desember 2025.

b. Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian :
   a). Jumlah aset produktif bermasalah dikurangi CKPN aset produktif sebesar 2,19% dari modal inti dan cadangan umum.
   b). Jumlah aset kualitas rendah dikurangi CKPN aset kualitas rendah mencapai sebesar 20,77% dari modal inti dan cadangan umum.
   c). Kecukupan modal Bank masih cukup memadai untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko bank yang berada pada peringkat *Low to Moderate*, termasuk potensi kerugian akibat perkara pada risiko hukum sebesar 0,00%.

c. Data Modal dan Komposisi Saham Bank Riau Kepri Syariah pada periode Desember 2025 yaitu sebagai berikut :

b). The ratio of Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets (RWA/ATMR) is 19.81% as of December 2025.

b. The quality of capital components is generally good, permanent, and capable of absorbing losses:
   a). The amount of non-performing earning assets minus the Allowance for Impairment Losses (CKPN) on earning assets is 2.19% of Tier 1 capital and general reserves.
   b). The amount of low-quality assets minus the CKPN on low-quality assets reaches 20.77% of Tier 1 capital and general reserves.
   c). The Bank's capital adequacy remains sufficient to anticipate potential losses in accordance with the bank's risk profile, which is rated Low to Moderate, including potential losses resulting from legal risk cases at 0.00%.

c. The Capital Data and Share Composition of Bank Riau Kepri Syariah for the period of December 2025 are as follows:

No	Pemegang Saham	Per 31 Desember 2025 as of December 31, 2025		Shareholders
	Seri A	**Modal** Capital	**Komposisi** Composition	Series A
1	Prov. Riau	519.168.200.000	42,93%	Riau Province
2	Kab. Bengkalis	131.606.200.000	10,88%	Bengkalis Regency
3	Kab. Kampar	105.181.200.000	8,70%	Kampar Regency
4	Kab. Indragiri Hilir	67.877.200.000	5,61%	Indragiri Hilir Regency
5	Kab. Kep. Meranti	60.000.000.000	4,96%	Kepulauan Meranti Regency
6	Kota Batam	50.000.000.000	4,13%	Indragiri Hulu Regency
7	Kab. Bintan	38.078.900.000	3,15%	Batam City
8	Kab. Rokan Hilir	37.135.100.000	3,07%	Rokan Hilir Regency
9	Kab. Natuna	36.038.100.000	2,98%	Natuna Regency
10	Kab. Siak	32.711.000.000	2,71%	Siak Regency
11	Kab. Pelalawan	31.966.800.000	2,64%	Pelalawan Regency
12	Kab. Kuantan Singingi	15.208.600.000	1,26%	Kuantan Singingi Regency
13	Kota Pekanbaru	15.000.000.000	1,24%	Pekanbaru City
14	Prov. Kepulauan Riau	12.000.000.000	0,99%	Kepulauan Riau Province
15	Kota Tanjungpinang	8.391.300.000	0,69%	Tanjungpinang City
16	Kab. Rokan Hulu	8.280.700.000	0,68%	Dumai City
17	Kab. Kepulauan Anambas	7.823.700.000	0,65%	Rokan Hulu Regency
18	Kab. Karimun	7.190.000.000	0,59%	Karimun Regency
19	Kab. Lingga	7.000.000.000	0,58%	Lingga Regency
20	Kab. Indragiri Hulu	6.400.700.000	0,53%	Indragiri Hulu Regency
21	Kota Dumai	5.203.000.000	0,43%	Dumai City
		Seri B *Series B*		
22	Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri	7,000,000,000	0.58%	Amanah Riau Kepri Syariah Cooperative Consumer
TOTAL		**1.209.260.700.000**	**100%**	**TOTAL**

d. Komposisi Kepemilikan Saham BRK Syariah Sesuai Surat OJK Nomor:S-276/ KO.053/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal Pencatatan Perubahan Modal Disetor PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda) disampaikan bahwa :

a). Perubahan modal disetor yang berasal dari penyertaan modal dalam bentuk aset berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten Natuna dengan nilai sebesar Rp2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah), sebagaimana salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Nomor: 01 Tanggal 4 Juni 2024 oleh Pupung Mulyantini (Notaris di Pekanbaru) dan surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHUAH.01.03-0131026 Tanggal 04 Juni 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

b). Penyertaan dalam bentuk aset berupa tanah tersebut mengakibatkan jumlah modal disetor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) meningkat dari sebesar Rp1.207.160.700.000,- (satu triliun dua ratus tujuh miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.209.260.700.000,- (satu triliun dua ratus sembilan miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

2. Pengelolaan Permodalan

a. Tujuan utama kebijakan manajemen permodalan Bank adalah untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi persyaratan modal yang diwajibkan dan memastikan Bank telah menjaga peringkat pinjaman yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai saham para pemegang saham.

b. Dalam hal ini Bank Riau Kepri Syariah memiliki manajemen permodalan yang baik dan memadai, yang terlihat dari rasio kecukupan modal inti maupun rasio kecukupan total modal bank yang masih berada di atas 3 triliun dengan nominal Modal Inti per Desember 2025 sebesar Rp3.276 miliar dan total Modal sebesar Rp3.448 miliar

d. The share ownership composition of PT Bank Riau Kepri, in accordance with OJK Letter Number: S-276/ KO.053/2024 dated August 5, 2024, regarding the Recording of Changes in Paid-in Capital of PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda), is stated as follows:

a). The change in paid-in capital resulting from a capital injection in the form of land assets from the Natuna Regency Government, valued at Rp2,100,000,000 (two billion one hundred million rupiah), as documented in the copy of the Deed of Statement of Meeting Resolution of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) No. 01 dated June 4, 2024, by Pupung Mulyantini (Notary in Pekanbaru) and the letter from the Director General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0131026 dated June 4, 2024, regarding the Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), has been recorded in the supervisory administration of the Financial Services Authority (OJK).

b). The capital injection in the form of land assets resulted in an increase in the total paid-in capital of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) from Rp1,207,160,700,000 (one trillion two hundred seven billion one hundred sixty million seven hundred thousand rupiah) to Rp1,209,260,700,000 (one trillion two hundred nine billion two hundred sixty million seven hundred thousand rupiah).

2. Capital Management

a. The primary objective of the Bank's capital management policy is to ensure that the Bank complies with mandatory capital requirements and to guarantee that the Bank maintains a strong credit rating and healthy capital ratios to support business operations and maximize shareholder value.

b. In this regard, Bank Riau Kepri Syariah possesses sound and adequate capital management, evidenced by its Core Capital adequacy ratio and Total Capital adequacy ratio, both of which remain above Rp3 trillion, with Core Capital as of December 2025 recorded at Rp3,276 billion and Total Capital at Rp3,448 billion.

c. Bank Riau Kepri Syariah juga memiliki akses yang memadai terhadap pemegang saham yaitu Pemda Provinsi, kota/kabupaten di Provinsi Riau dan Provinsi Kepri, sehingga bila diperlukan Bank dapat menambah modal dari pemegang saham yang ada.

d. Bank Riau Kepri Syariah cukup berpengalaman menerbitkan instrument pasar modal berupa obligasi.

Sesuai POJK No 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dimana Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti Minimum paling sedikit 3 (tiga) triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2025, Modal inti per Desember 2025 telah melampaui modal inti minimum yaitu sebesar Rp3,276 miliar. Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan pemenuhan modal inti sesuai ketentuan Modal Inti Minimum antara lain melalui :

a). Penambahan Cadangan Umum setiap tahun dari komponen laba bersih sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

b). Penambahan Modal Setor dari Pemegang Saham;

c. Bank Riau Kepri Syariah also maintains adequate access to its shareholders, namely the Provincial, City, and Regency Governments of Riau and Kepulauan Riau Provinces, allowing the Bank to increase capital from existing shareholders if required. Furthermore,

d. Bank Riau Kepri Syariah is well-experienced in issuing capital market instruments such as bonds.

Pursuant to POJK No. 12/POJK.03/2020 concerning the Consolidation of Commercial Banks, which mandates that Regional Government-Owned Banks must fulfill a Minimum Core Capital of at least Rp3 trillion by December 31, 2025, the Bank's Core Capital as of December 2025 has exceeded the minimum requirement at Rp3,276 billion. The Bank is committed to continuously enhancing Core Capital fulfillment in accordance with Minimum Core Capital provisions through, among others:

a). Annual additions to General Reserves from net profit components, in accordance with GMS.

b). Additional Paid-in Capital from Shareholders;

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi di Bank dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. RUPS menjadi forum bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan berdasarkan kepentingan BRK Syariah.

The General Meeting of Shareholders (GMS/RUPS) is the organ that holds the supreme authority within the Bank and possesses all powers not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits stipulated by the Limited Liability Company Law and the Articles of Association. The GMS serves as a forum for Shareholders to make strategic decisions based on the best interests of BRK Syariah.

Wewenang, Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BRK Syariah, berikut wewenang, hak dan tanggung jawab Pemegang Saham:

Pemegang Saham Seri A

1. Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Memiliki hak khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Dapat menukarkan sahamnya dengan Saham Seri B;
4. Menerima dividen;
5. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi yang didahulukan dari Pemegang Saham Seri B.

Pemegang Saham Seri B

1. Menerima dividen;
2. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali

Komposisi Pemegang Saham BRK Syariah adalah sebagai berikut:

Authorities, Rights, and Responsibilities of Shareholders

Based on the provisions of the BRK Syariah Articles of Association, the authorities, rights, and responsibilities of the Shareholders are as follows:

Series A Shareholders

1. Exercise voting rights in the General Meeting of Shareholders (GMS);
2. Possess special rights in proposing nominations for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
3. May convert their shares into Series B Shares;
4. Receive dividends;
5. Receive the remaining assets from liquidation, prioritized over Series B Shareholders.

Series B Shareholders

1. Receive dividends;
2. Receive the remaining assets from liquidation.

Information on Substantial and Controlling Shareholders

The Shareholder composition of BRK Syariah is as follows:

Tabel Pemegang Saham BRK Syariah Tahun 2025
Table of BRK Syariah Shareholders in 2025

Jenis Saham Share Type	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Lembar Number of Sheets	Presentase (%) Percentage (%)
Seri A *Series A*	Provinsi Riau *Riau Province*	5.191.682	42,93%
	Provinsi Kepri *Kepulauan Riau Province*	120.000	0,99%
	Pemkot/Kab se-Riau & Kepri *Municipal/Regency Governments throughout Riau & Kepulauan Riau*	6.710.925	55,50%
Seri B *Series B*	Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri *Amanah Riau Kepri Syariah Cooperative Consumer*	70.000	0.58%

Jenis RUPS

RUPS di BRK Syariah terdiri dari:

1. RUPS Tahunan diadakan setahun sekali setelah penutupan tahun buku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pembahasan antara lain mengenai:
   a. Laporan Tahunan
   b. Usulan penggunaan Laba Bersih
   c. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS Tahunan
2. RUPS Luar Biasa (RUPS LB)
   Dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS LB sesuai permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.

Types of GMS

The GMS at BRK Syariah consists of:

1. Annual GMS: Held annually after the close of the fiscal year audited by a Public Accountant, with discussions including:
   a. Annual Report
   b. Proposed use of Net Profit
   c. Other matters requiring Annual GMS approval
2. Extraordinary GMS (EGMS)
   May be held at any time based on the Company's needs at the request of the Board of Commissioners and/or Shareholders. The Board of Directors is required to hold an EGMS upon a written request from the Board of Commissioners or Shareholders.

Tahapan Pelaksanaan RUPS

RUPS dilakukan dengan didahului adanya pemanggilan kepada para Pemegang Saham yang mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor BRK Syariah mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

GMS Implementation Stages

The GMS is preceded by issuing a summons to the Shareholders stating the day, date, time, place, and agenda items, along with a notification that the materials to be discussed at the meeting are available at the BRK Syariah office from the date of the summons until the meeting date.



Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025

Selama tahun 2025, BRK Syariah menyelengarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa, dengan tahapan proses pemanggilan RUPS sebagai berikut:

Implementation of the Annual GMS for the 2025 Fiscal Year

During 2025, BRK Syariah held one Annual GMS and two Extraordinary GMS, with the following stages in the GMS invitation process:

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 (28 April 2025)

Implementation of the Annual GMS for the 2025 Fiscal Year (April 28, 2025)

Pemanggilan RUPS Invitation	Pelaksanaan RUPS GMS Implementation	Hasil RUPS GMS Result
Pemanggilannya dilaksanakan pada Tanggal 13 April 2025 melalui undangan kepada Pemegang Saham dan pengumuman pada Surat Kabar (Nasional & Lokal). The summons will be issued on April 13, 2025, through an invitation to Shareholders and an announcement in newspapers (national and local).	RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 bertempat di Pekanbaru. The Annual GMS was held on April 28, 2025 in Pekanbaru.	Hasil RUPS disampaikan kepada Regulator dan seluruh Pemegang Saham GMS results are submitted to the Regulator and all shareholders

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 pada tanggal 28 April 2025 Bertempat di Pekanbaru.

Recapitulation of Attendance at the Annual GMS for the 2025 Financial Year on April 28, 2025, Held in Pekanbaru.

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance		Keterangan	Description
			Hadir Present	Tidak Hadir Not Present		
1	Abdul Wahid	Gubernur Provinsi Riau Governor of Riau Province	√		-	
2	Kasmarni, S.Sos., MMP Andris Wasono, SP, M.Si	-Bupati Kabupaten Bengkalis -Regent of Bengkalis Regency -Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis -Assistant for Government and People's Welfare, Regional Secretariat of Bengkalis Regency	√		Hadir, kemudian dikuasakan oleh Pejabat yang dikuasakan mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Present, subsequently delegated to the Authorized Official representing for and on behalf of the Government of Bengkalis Regency
3	Ahmad Yuzar	Bupati Kampar Regent of Kampar	√		-	
4	H. Herman, SE.,MT	Bupati Indragiri Hilir Regent of Indragiri Hilir	√		-	
5	-AKBP (Purn) H. Asmar -Bambang Suprianto, SE, MM	- Bupati Kepulauan Meranti - Regent of the Kepulauan Meranti -Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti -Regional Secretary of the Kepulauan Meranti Regency	√		Hadir, kemudian dikuasakan oleh Pejabat yang dikuasakan mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	Present, subsequently delegated to the Authorized Official representing for and on behalf of the Government of Kepulauan Meranti Regency
6	-Amsakar Ahcmad -Ramadhona	-Walikota Batam -Mayor of Batam -Kepala Bidang BPKAD Kota Batam -Head of Division of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Batam City	√		Hadir, kemudian dikuasakan oleh Pejabat yang dikuasakan mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam	Present, subsequently delegated to the Authorized Official representing for and on behalf of the Government of Batam City
7	Ronny Kartika, S.STP, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Regional Secretary of Bintan	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan	Representing, on behalf of the Government of Bintan Regency
8	-H. Bistamam -Muhammad Nur Hidayat	-Bupati Rokan Hilir -Regent of Rokan Hilir -Asisten II Rokan Hilir -Assistant II of Rokan Hilir	√		Hadir, kemudian dikuasakan oleh Pejabat yang dikuasakan mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	Present, subsequently delegated to the Authorized Official representing for and on behalf of the Government of Rokan Hilir Regency
9	Cen Sui Lan	Bupati Natuna Regent of Natuna	√		-	
10	H. Husni Merza,BBA MM	Wakil Bupati Kabupaten Siak Deputy Regent of Siak Regency	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak	Representing for and on behalf of the Siak Regency Government
11	H. Zukri	Bupati Kabupaten Pelalawan Regent of Pelalawan Regency	√		-	
12	H. Muklisin, S.Pd	Wakil Bupati Kuantan Singingi Deputy Regent of Kuantan Singingi	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kuantan Singingi	Representing for and on behalf of the Kuantan Singingi Regency Government
13	-H. Agung Nugroho -Samto, S.STP, M.Si	-Walikota Pekanbaru Mayor of Pekanbaru -Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Assistant for General Administration, Regional Secretariat of Pekanbaru City	√		Hadir, kemudian dikuasakan oleh Pejabat yang dikuasakan mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru	Present, subsequently delegated to the Authorized Official representing for and on behalf of the Government of Pekanbaru City
14	Ansar Ahmad, SE, MM	Gubernur Kepulauan Riau Governor of the Kepulauan Riau	√		-	-
15	H. Lis Darmansyah	Walikota Tanjung Pinang Mayor of Tanjung Pinang	√		-	-
16	Anton	Bupati Kabupaten Rokan Hulu Regent of Rokan Hulu Regency	√		-	
17	Aneng	Bupati Kepulauan Anambas Regent of Kepulauan Anambas	√		-	

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance		Keterangan	Description
			Hadir Present	Tidak Hadir Not Present		
18	Rocky Marciano Bawole	Wakil Bupati Kabupaten Karimun Deputy Regent of Karimun Regency	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun	Representing and on behalf of the Karimun Regency Government
19	Ir. Novrizal, S.T, M.IP	Wakil Bupati Kabupaten Lingga Deputy Regent of Lingga Regency	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga	Representing and on behalf of the Lingga Regency Government
20	Ade Agus Hartanto	Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Regent of Indragiri Hulu Regency	√		-	-
21	Paisal	Walikota Kota Dumai Mayor of Dumai City	√		-	-
22	Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan Dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko	Present at the Meeting as Director of Compliance and Risk Management
23	M.A Suharto	Direktur Dana dan Jasa Director of Funds and Services	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana dan Jasa	Present at the Meeting as Director of Funds and Services
24	Said Syamsuri	Direktur Operasional Director of Operations	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional	Present at the Meeting as Director of Operations
25	Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen	Present at the Meeting as Independent Commissioner
26	Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen	Present at the Meeting as Independent Commissioner
27	Zulhendi Rais	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	√		Hadir dalam Rapat selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah	Present at the Meeting as Chairman of the Sharia Supervisory Board
28	Syaifuddin Yuliar	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	√		Hadir dalam Rapat selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah	Present at the Meeting as Member of the Sharia Supervisory Board

Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (28 April 2025)

Decision of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Financial Year (April 28, 2025)

Agenda Pertama First Agenda	
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024	Approval of the Company's Annual Report for the 2024 Financial Year
Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 Yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	**Resolution** To approve the Annual Report for the 2024 Financial Year, namely the Supervisory Report of the Board of Commissioners, the Accountability Report of the Board of Directors, and the Company's Financial Statements for the 2024 Financial Year, audited by the Public Accounting Firm Bustaman, Ezeddin & Putranto, by granting full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and Directors for their management and supervisory actions carried out during the final financial year, December 31, 2024.

Agenda Kedua
Second Agenda

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024	Determination of the use of the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year
Keputusan a. Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen perseroan Tahun Buku 2024 sesuai dengan yang diusulkan. b. Menyetujui penggunaan cadangan jasa produksi pegawai Tahun Buku 2024 yang telah menjadi biaya Tahun Buku 2024 dengan komposisi 22,5% Besaran ini telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023. c. Menyetujui komposisi cadangan jasa produksi pegawai untuk Tahun Buku 2025, sama dengan Tahun Buku 2024. d. Menyetujui penggunaan cadangan tantiem pengurus Tahun Buku 2023 yang telah menjadi biaya pada Tahun 2023 dengan komposisi sebesar 2% dan untuk sisa sebesar 0,5% dikembalikan kelaba ditahan. e. Menyetujui penggunaan cadangan umum untuk Tantiem pengurus perseroan Tahun Buku 2024 dengan komposisi sebesar 2% f. Menyetujui komposisi cadangan tantiem pengurus untuk Tahun Buku 2025 dengan komposisi sebesar 2,5% apabila mencapai target dan apabila tidak mencapai target maka komposisi cadangan tantiem sebesar 2% dari laba bersih perseroan.	**Decisions** a. Approving the allocation of net profit and dividend distribution for the2024 Fiscal Year as proposed. b. Approving the use of employee production service reserves for the 2024 Fiscal Year, which have become expenses for the 2024 Fiscal Year, with a composition of 22.5%.This amount was approved at the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2023 Fiscal Year. c. Approving the composition of employee production service reserves for the 2025 Fiscal Year, the same as for the 2024 Fiscal Year. d. Approving the use of management bonus reserves for the 2023 Fiscal Year, which have become expenses in 2023, with a composition of 2%, and the remaining 0.5% to be returned to retained earnings. e. Approving the use of general reserves for management bonuses for the 2024 Fiscal Year, with a composition of 2%. f. Approving the composition of the management's bonus reserves for the 2025 Financial Year.The composition is 2.5% if the target is achieved, and if the target is not achieved, the bonus reserves will be 2% of the company's net profit.

Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Remunerasi bagi pengurus dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan	Determination of Remuneration for the Company's Management and Sharia Supervisory Board
Keputusan a. Menyetujui penyelesaian remunerasi tetap bagi pengurus perseroan (Dewan Komisaris & Direksi) untuk tahun buku 2024 yang menjadi beban yang ditangguhkan (belum dicatat sebagai biaya) pada tahun 2024. b. Menyetujui menetapkan anggaran remunerasi tetap bagi pengurus perseroan (Dewan pengurus & Direksi) tahun buku 2025 dengan komposisi jumlah pengurus lengkap (3 orang Dewan Komisaris dan 5 orang Direksi). c. Menyetujui menetapkan anggaran remunerasi Tetap Dewan Pengawas Syariah Tahun Buku 2025 dengan catatan untuk item THR dikurangi ½ (satu per dua) dari anggaran item THR yang diusulkan dan item honorarium/gaji ditetapkan sebesar 40% dari gaji Komisaris Utama.	**Decision** a. Approving the settlement of fixed remuneration for the company's management (Board of Commissioners & Directors) for the 2024 financial year, which will become a deferred charge (not yet recorded as an expense) in 2024. b. Approving the determination of the fixed remuneration budget for the company's management (Board of Commissioners & Board of Directors) for the 2025 financial year, with a full composition of management (3 members of the Board of Commissioners and 5 members of the Board of Directors). c. Approved the establishment of a fixed remuneration budget for the Sharia Supervisory Board for the 2025 Fiscal Year, with the THR allowance reduced by ½ (one-half) of the proposed THR allowance, and the honorarium/salary allowance set at 40% of the President Commissioner's salary.

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Perseroan Tahun Buku 2025.	Approval of Provision of Partnership Development Funds for the Company for the 2025 Financial Year.
Keputusan Menyetujui formula pembagian dana pembinaan kemitraan Perseroan Tahun Buku 2025 kepada masing-masing pemegang saham sama dengan formula pada tahun 2024 yaitu alokasi pembagian masing-masing pemegang saham sebesar Rp. 250.000.000,- dan sisanya dibagi secara proporsional berdasarkan besaran saham dan pelaksanaanya akan diatur oleh Direksi.	**Resolution** To approve the distribution formula for the Company's partnership development funds for the 2025 Fiscal Year to each shareholder, the same as in 2024, namely, an allocation of Rp 250,000,000 to each shareholder, with the remainder being distributed proportionally based on the size of the shares held. The implementation will be regulated by the Board of Directors.

Agenda Kelima
Fifth Agenda

Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik atas pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.	Approval of the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm for the audit of the Company's Financial Report for the 2025 Financial Year.
Keputusan Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun buku 2025 dengan mempertimbangkan proses seleksi pemilihan Kantor Akuntan Publik oleh Komite Audit, dimana data dan fakta terkait aspek independensi, profesionalisme, metode audit dan *signing partner* dari masing-masing Kantor Akuntan Publik tersebut masih harus dipelajari.	**Decision** Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Financial Statements of PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the 2025 financial year, taking into account the selection process for the Public Accounting Firm by the Audit Committee. Data and facts related to the independence, professionalism, audit methods, and signing partners of each Public Accounting Firm remain to be reviewed.

Agenda Keenam
Sixth Agenda

Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan Tahun 2024.	Approval of the Company's 2024 Recovery Action Plan.
Keputusan Menyetujui atas penetapan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan Tahun 2024.	Decision Approving the establishment of the Company's 2024 Recovery Action Plan.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 (28 April 2025)

Implementation of the 2025 Extraordinary GMS (April 28, 2025)

Pemanggilan Invitation	Pelaksanaan Implementation	Hasil RUPS GMS Result
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2025 melalui undangan kepada Pemegang Saham dan pengumuman pada Surat Kabar (Nasional & Lokal) The summons was carried out on April 13, 2025 through an invitation to Shareholders and an announcement in Newspapers (National & Local)	RUPS LB dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 bertempat di Pekanbaru The Extraordinary GMS was held on April 28, 2025 in Pekanbaru	Hasil RUPS disampaikan kepada Regulator dan seluruh Pemegang Saham The results of the GMS are submitted to the Regulator and all Shareholders.

Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 (28 April 2025)

Decision of the 2025 Extraordinary GMS (April 28, 2025)

Agenda Pertama *First Agenda*	
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Approval of amendments to the Company's Articles of Association.
Keputusan Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Dengan Matriks Perubahan Anggaran Dasar yang di usulkan dan ditayangkan.	Resolution Approving the amendments to the Company's Articles of Association in accordance with the proposed and published Articles of Association Amendment Matrix.
Agenda Kedua *Second Agenda*	
Penyerahan Kewenangan kepada Gubernur Riau sebagai Pemegang Saham terbesar untuk Mengambil Keputusan terhadap akan berakhirnya masa Jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.	Delegation of authority to the Governor of Riau, as the largest shareholder, to make decisions regarding the expiration of the terms of office of the Company's Management and Sharia Supervisory Board.
Keputusan a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) memutuskan untuk dilakukan seleksi terhadap satu Komisaris Utama dan dua Komisaris Independen yang akan diseleksi melalui Panitia Seleksi (Pansel) dan efektif berlaku setelah mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dua Komisaris Independen saat ini otomatis dinyatakan berhenti. b. Dalam rangka efektifitas Perseroan maka Komisaris Utama dan dua Komisaris Independen efektif setelah telaksana seleksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kepada pemegang Saham terbesar diberikan kewenangan untuk membentuk Panitia Seleksi (Pansel) c. Berkaitan dengan Direktur Utama Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) menetapkan saudara Wahyudi Gustiawan sebagai Direktur Utama, efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diminta kepada Komite Remunerasi memberikan rekomendasi untuk melengkapi persyaratan. d. Direktur Dana & Jasa dan Direktur Operasional tidak dilakukan perpanjangan dan kepada Pemegang Saham terbesar diberikan kewenangan untuk membentuk Panitia Seleksi (Pansel) e. Menetapkan saudara Helwin Yunus sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama sampai dengan dilantiknya Direktur Utama Perseroan yang baru f. Menyetujui untuk tidak memperpanjang Saudara Saifuddin Yuliar sebagai Dewan Pengawas Perseroan, untuk itu Pemegang Saham terbesar mengusulkan 2 (dua) orang calon anggotaDewan Pengawas Syariah (satu orang calon dari Provinsi Kepulauan Riau), kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dilakukan identifikasi dan rekomendasi melalui Komite Remunerasi dan Nominasi dan selanjutnya untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). g. Pemegang Saham meminta agar pertumbuhan laba Bank Riau Kepri Syariah dan pertumbuhan lainnya tumbuh signifikan, maka diminta kepada Pengurus Bank Riau Kepri Syariah untuk menambah struktur baru yaitu koordinator cabang di wilayah Kepulauan Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang dan Koordinator cabang di wilayah Provinsi Riau berkedudukan di Air Molek dengan pertimbangan jabatan setara dengan Pemimpin Divisi, maka diminta kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk dua pejabat senior untuk menduduki dua jabatan tersebut.	Resolution a. The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) resolved to conduct a selection process for one President Commissioner and two Independent Commissioners, which will be facilitated by the Selection Committee (Pansel) and shall become effective upon receiving a recommendation from the Financial Services Authority (OJK), whereby the two incumbent Independent Commissioners are automatically declared dismissed. b. For the Company's effectiveness, the President Commissioner and two Independent Commissioners are authorized to form a Selection Committee (Pansel) effective after the selection process by the Financial Services Authority (OJK). c. Regarding the Company's President Director, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) appointed Wahyudi Gustiawan as President Director, effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK). The Remuneration Committee was requested to provide recommendations to fulfill the requirements. d. The terms of the Director of Funds & Services and the Director of Operations were not extended, and the largest Shareholder was given the authority to form a Selection Committee (Pansel). e. Appointed Mr. Helwin Yunus as the Acting President Director until the inauguration of the Company's new President Director. f. Approved the non-extension of Mr. Saifuddin Yuliar's tenure as the Company's Supervisory Board member. Consequently, the majority Shareholder proposed 2 (two) candidates for the Sharia Supervisory Board (with one candidate originating from the Riau Islands Province) to the Company's Board of Commissioners for identification and recommendation through the Remuneration and Nomination Committee, followed by a fit and proper test to be conducted by the Financial Services Authority (OJK). g. The Shareholders mandated significant growth in the profitability and other performance metrics of Bank Riau Kepri Syariah. Therefore, the Management of Bank Riau Kepri Syariah is requested to establish a new organizational structure comprising a Branch Coordinator for the Riau Islands region, domiciled in Tanjung Pinang, and a Branch Coordinator for the Riau Province region, domiciled in Air Molek. Considering these positions are equivalent to a Division Head, the Company's Board of Directors is requested to appoint two senior executives to fill these two positions.

Agenda Ketiga Third Agenda	
Persetujuan Rencana Tambahan Modal disetor Tahun 2025 dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk membuat Akta pencatatan tamabahan modal yang akan disetor oleh pemegang saham.	Approval of the Plan for Additional Paid-in Capital in 2025 and authorization to the Board of Commissioners to draft a Deed of Recording of the Additional Capital to be Paid-in by Shareholders.
Keputusan Persetujuan rencan tambahan modal disetor tahun 2025 dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk membuat akta pencatatan tambahan modal yang akan disetor Oleh pemegang saham: 1. Menyetujui Koperasi Konsumen amanah Riau Kepri menambah Saham Seri B sebesar Rp. 3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah) 2. Menyutujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris membuat Akta Pencatatan Tambahan Modal Pemegang Saham tersebut sampai dengan Surat Keputusan Kementrian Hukum.	Decision Approval of the Plan for Additional Paid-in Capital in 2025 and authorization to the Board of Commissioners to draft a Deed of Recording of the Additional Capital to be Paid-in by Shareholders: 1. Approving the Amanah Riau Kepri Consumer Cooperative to issue an additional Series B Share of IDR 3,000,000,000 (Three Billion Rupiah). 2. Approving the authorization to the Board of Commissioners to draft a Deed of Recording of the Additional Shareholder Capital until the Decree of the Ministry of Law is issued.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2025 (23 Oktober 2025)

Implementation of the 2025 Extraordinary GMS (October 23, 2025)

Pemanggilan RUPS *GMS Invitation*	Pelaksanaan RUPS *GMS Implementation*	Hasil Keputusan RUPS *Result of GMS Resolution*
Pemanggilannya dilaksanakan pada Tanggal 08 Oktober 2025 undangan kepada Pemegang Saham dan pengumuman pada Surat Kabar (Nasional & Lokal). The invitation will be issued on October 8, 2025, with an invitation to Shareholders and an announcement in newspapers (national and local).	RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2025 bertempat di Batam. The Extraordinary GMS was held on October 23, 2025, in Batam.	Hasil RUPS disampaikan kepada Regulator dan seluruh Pemegang Saham The results of the GMS are submitted to the Regulator and all Shareholders.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 2025 pada tanggal 23 Oktober 2025 Bertempat di Batam

Recapitulation of Attendance at the 2025 Extraordinary GMS on October 23, 2025, Held in Batam

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance		Keterangan	Description
			Hadir Present	Tidak Hadir Not Present		
1	Abdul Wahid	Gubernur Provinsi Riau Governor of Riau Province	√		-	
2	Kasmarni, S.Sos.,MMP dr. Ersan Saputra TH	-Bupati Kabupaten Bengkalis Regent of Bengkalis Regency -Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis -Regional Secretary of Bengkalis	√		Hadir, kemudian dikuasakan oleh Pejabat yang dikuasakan mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Present, subsequently delegated to the Authorized Official representing for and on behalf of the Government of Bengkalis Regency
3	Ahmad Yuzar	Bupati Kampar Regent of Kampar	√		-	
4	H. Herman, SE.,MT	Bupati Indragiri Hilir Regent of Indragiri Hilir	√		-	
5	Fajar Triasmoko, MT	Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti Head of BPKAD of Kepulauan Meranti Regency	√		Mewakili untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	Representing for and on behalf of the Government of Kepulauan Meranti Regency
6	Firmansyah	PJ Sekretaris Daerah Kota Batam Act Regional Secretary of Batam	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam	Representing for and on behalf of the Batam City Government

7	Ronny Kartika, S.STP, M.M	Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Regional Secretary of Bintan	√	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan	Representing for and on behalf of the Bintan Regency Government
8	H. Bistamam	Bupati Rokan Hilir Regent of Rokan Hilir	√	-	
9	Boy Wijanarko Varianto	Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Regional Secretary of Natuna	√	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna	Representing for and on behalf of the Government of Natuna Regency
10	Syamsurizal, S.Ag, MSI	Wakil Bupati Kabupaten Siak Deputy Regent of Siak Regency	√	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak	Representing for and on behalf of the Siak Regency Government
11	H. Zukri SM	Bupati Kabupaten Pelalawan Regent of Pelalawan Regency	√	-	
12	Dr. H. Suhardiman Amby, MM	Bupati Kuantan Singingi Regent of Kuantan Singingi	√	-	
13	Markarius Anwar	Wakil Walikota Pekanbaru Deputy Mayor of Pekanbaru	√	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru	Representing for and on behalf of the Pekanbaru City Government
14	Vennni Meitaria D.	Kepala BKPAD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Head of BKPAD of the Kepulauan Riau Provincial Government	√	Mewaliki untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Representing for and on behalf of the Kepulauan Riau Provincial Government
15	H. Lis Darmansyah, SH	Walikota Tanjung Pinang Mayor of Tanjung Pinang	√	-	
16	Syafaruddin Poti	Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Deputy Regent of Rokan Hulu Regency	√	Mewaliki untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	Representing for and on behalf of the Rokan Hulu Regency Government
17	Aneng	Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Regent of Kepulauan Anambas Regency	√	-	

No.	**Nama** *Name*	**Jabatan** *Position*	**Kehadiran** Attendance		**Keterangan**	*Description*
			Hadir *Present*	**Tidak Hadir** *Not Present*		
18	Dwiyandri Kurniawan	Kepala. BPKAD Kabupaten Karimun Head of BPKAD Karimun Regency			Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun	Representing and on behalf of the Karimun Regency Government
19	Ir. H. Novrizal, S.T, M.IP	Wakil Bupati Kabupaten Lingga Deputy Regent of Lingga Regency			Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga	Representing and on behalf of the Lingga Regency Government
20	Ade Agus Hartanto	Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Regent of Indragiri Hulu Regency			-	
21	Paisal	Walikota Kota Dumai Mayor of Dumai City			-	
22	Helwin Yunus	Plt Direktur Utama Act. President Director			Hadir dalam Rapat selaku Plt Direktur Utama	Present at the Meeting as Acting President Director
23	Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Director of Compliance & Risk Management			Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Present at the Meeting as Director of Compliance and Risk Management
24	Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner			Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen	Present at the Meeting as Independent Commissioner
25	Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner			Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen	Present at the Meeting as Independent Commissioner
26	Zulhendi Rais	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board			Hadir dalam Rapat selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah	Present at the Meeting as Chairman of the Sharia Supervisory Board

Keputusan RUPS Luar Biasa 2025 (23 Oktober 2025)

Decision of the 2025 Extraordinary GMS (23 October 2025)

Agenda Pertama First Agenda	
Tindak Lanjut Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK terhadap Calon Direktur Utama	Follow-up to the OJK Board of Commissioners' Decree on the Candidate for President Director
Keputusan 1. Membatalkan penetapan saudara WAHYUDI GUSTIAWAN sebagai Direktur Utama Perseroan, sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebelumnya dan dituangkan dalam Akta, Nomor: 03 tertanggal 28-04-2025 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh lima) 2. Setelah memperhatikan, mempertimbangkan kinerja serta terwujud sinergi Program kerja pemerintah daerah dengan BRK Syariah selama saudara HELWIN YUNUS menjabat sebagai Plt Direktur Utama BRK Syariah dan mengingat sangat Pentingnya peran Direktur Utama sebagai pengendali utama kinerja bisnis BRK Syariah, sehingga sangat dihindari adanya kekosongan Jabatan Direktur Utama maka setelah mendengar dan menilai paparan dari saudara HELWIN YUNUS, maka ditetapkan dan diputuskan saudara HELWIN YUNUS sebagai, Direktur Utama BRK Syariah, efektif setelah disetujui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3. Pemegang Saham Memberikan kuasa dan persetujuan kepada Gubernur Riau untuk memilih calon Direktur Pembiayaan yang diambil dari nama-nama calon yang sudah diseleksi oleh panitia seleksi sebelumnya setelah saudara HELWIN YUNUS dinyatakan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian menyampaikan nama calon Direktur Pembiayaan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.	Decision 1. To revoke the appointment of WAHYUDI GUSTIAWAN as President Director of the Company, as previously decided at the previous Extraordinary General Meeting of Shareholders and set forth in Deed Number : 03 dated April 28, 2025 (the twenty-eighth of April, two thousand and twenty-five). 2. After considering the performance and synergy of the regional government's work programs with BRK Syariah during the time that HELWIN YUNUS served as Acting President Director of BRK Syariah, and considering the crucial role of the President Director as the primary controller of BRK Syariah's business performance, thus ensuring the avoidance of a vacancy in the President Director position, after hearing and evaluating HELWIN YUNUS's presentation, HELWIN YUNUS is appointed as President Director of BRK Syariah, effective upon approval of the fit and proper assessment by the Financial Services Authority (OJK). 3. Shareholders grant power and approval to the Governor of Riau to select a candidate for Director of Financing taken from the names of candidates who have been selected by the previous selection committee after Mr. HELWIN YUNUS has been declared approved by the Financial Services Authority (OJK) and then submit the name of the candidate for Director of Financing to the Financial Services Authority (OJK) for a fit and proper assessment.
Agenda Kedua Second Agenda	
Penetapan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Perseroan yang akan berakhir masa jabatan pertanggal 14-11-2026 (empat belas November dua ribu dua puluh enam) .	Appointment of the Company's Director of Compliance & Risk Management, whose term of office will end on November 14, 2026 (the fourteenth of November, two thousand and twenty-six).
Keputusan Setelah rapat memberikan kesempatan kepada saudara FAJAR RESTU FEBRIANSYAH untuk menyampaikan pembelaan diri maka Rapat memutuskan: - Memberikan Kesempatan kepada saudara FAJAR RESTU FEBRIANSYAH sebagai Direktur Kepatuhan Untuk menyelesaikan masa jabatan hingga tanggal 14-11-2026 (empat belas November dua ribu dua puluh enam) . - Memberikan Kuasa dan persetujuan kepada Gubernur Riau berhak memberhentikan FAJAR RESTU FEBRIANSYAH sewaktu-waktu Jika dipandang perlu	Decision After the meeting gave FAJAR RESTU FEBRIANSYAH the opportunity to present his defense, the meeting decided: - To grant FAJAR RESTU FEBRIANSYAH the opportunity to serve as Director of Compliance until November 14, 2026 (the fourteenth of November, two thousand and twenty-six). - To grant power and approval to the Governor of Riau to dismiss FAJAR RESTU FEBRIANSYAH at any time, if deemed necessary.
Agenda Ketiga Third Agenda	
Penetapan penambahan komposisi anggota Dewan Komisaris yang semula terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Calon Komisaris Utama Non Independen dan 2 (dua) orang Calon Komisaris Independen menjadi 4 (empat orang terdiri dari 1 (satu) orang Calon Komisaris Utama Non Independen, 1 (satu) orang Calon Komisaris Non Independen dan 2 (dua) orang Calon Komisaris Independen	Determination of the addition of the composition of the Board of Commissioners, which originally consisted of 3 (three) members, consisting of 1 (one) candidate for Non-Independent Main Commissioner and 2 (two) candidates for Independent Commissioners, to 4 (four) members, consisting of 1 (one) candidate for Non Independent Main Commissioner, 1 (one) candidate for Non-Independent Commissioner, and 2 (two) candidates for Independent Commissioners.
Keputusan - Menyetujui penambahan komposisi anggota Dewan Komisaris menjadi 4 (empat) Orang, yang terdiri dari : - 1 (satu) orang calon Komisaris Utama Non Independen - 1 (satu) orang calon Komisaris Non Independen, - 2 (dua) orang calon KomisarisIndependen, dari calon-calon Komisaris yang ada.	Decision - Approved the addition of the composition of the Board of Commissioners to 4 (four) members, consisting of: - 1 (one) candidate for Non-Independent Main Commissioner - 1 (one) candidate for Non-Independent Commissioner, - 2 (two) candidates for Independent Commissioners, from among the existing candidates for Commissioners.
Agenda Keempat Fourth Agenda	
Penetapan Calon Komisaris Utama, Calon Komisaris Independen, Calon Direktur Dana & Jasa dan Calon Direktur Operasional terpilih melalui seleksi untuk Dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan	Determination of the President Commissioner Candidates, Independent Commissioner Candidates, Fund & Services Director Candidates, and Operational Director Candidates selected through a selection process to be subject to a fit and proper assessment by the Financial Services Authority.

Keputusan Memutuskan : 1. Calon Komisaris Non Independen : - IRWAN (Komisaris Utama) - TATANG YUDIANSYAH 2. Calon Komisaris Independen : - SURYO KUNCORO - EKA AFRIADI. 3. Calon Direktur Dana & Jasa : - ANDRI SATRIA - MUHAMMAD JAZULI 4. Calon Direktur Operasional : - ASJ'ARI – WAN MUKHLIS. Untuk selanjutnya nama-nama calon Direksi dan Dewan Komisaris tersebut untuk segera diproses melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah melalui asesmen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku. Bilamana para calon Direksi dan calon Komisaris telah mendapat kan hasil *Fit & Proper* Test dan dinyatakan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka secara otomatis dapat langsung menjalankan tugas dan tanpa memerlukan pengesahan lagi dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan jika calon Direktur Dana & Jasa, calon Direktur Operasional lulus kedua duanya maka diberikan kuasa dan persetujuan kepada Gubernur Riau untuk memilih salah satu untuk menempati jabatan tersebut. Memperpanjang masa jabatan saudara ROY PRAKOSO sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak tanggal pelaksanaan RUPS dan paling lama 6 (enam Bulan atau otomatis berakhir setelah keluarnya hasil *Fit & Proper* Test dari salah satu Direktur Dana & Jasa.	Decision Decided: 1. Non-Independent Commissioner Candidates: - IRWAN (President Commissioner) - TATANG YUDIANSYAH 2. Independent Commissioner Candidates: - SURYO KUNCORO - EKA AFRIADI. 3. Fund & Services Director Candidates: - ANDRI SATRIA - MUHAMMAD JAZULI 4. Operational Director Candidates: - ASJ'ARI - WAN MUKHLIS. The names of the Director and Board of Commissioner candidates will be immediately processed by the Financial Services Authority (OJK) after undergoing an assessment in accordance with applicable Financial Services Authority Regulations (POJK). If the prospective Directors and Commissioners have received the Fit & Proper Test results and are declared approved by the Financial Services Authority (OJK), they can automatically immediately carry out their duties without requiring further approval from the General Meeting of Shareholders (GMS). If the prospective Director of Funds & Services and the prospective Director of Operations pass both, the Governor of Riau will be given the authority and approval to select one of them to fill the position. Extending the term of office of ROY PRAKOSO as an Independent Commissioner, effective from the date of the GMS for a maximum of 6 (six) months, or automatically ending upon the release of the Fit & Proper Test results for one of the Directors of Funds & Services

Agenda Kelima
Fifth Agenda

Penetapan pembentukan Komite Bisnis dan Pengembangan.	Determination of the establishment of a Business and Development Committee
Keputusan Memutuskan agar Dewan Komisaris membentuk Komite Bisnis dan Pengembangan yang diisi oleh tenaga ahli Profesional.	Resolution Decided that the Board of Commissioners establish a Business and Development Committee staffed by professional experts.

Agenda Keenam
Sixth Agenda

Penetapan tindak lanjut pengunduran diri Ibu RITA ANUGERAH sebagai Komisaris Independen.	Determination of follow-up actions regarding the resignation of Mrs. RITA ANUGERAH as Independent Commissioner.
Keputusan Menyetujui pengunduran diri Ibu RITA ANUGERAH sebagai Komisaris Independen Efektif tertanggal 25-10-2025 (dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh lima) .	Decision Approving the resignation of Mrs. RITA ANUGERAH as Independent Commissioner, effective October 25, 2025 (the twenty-fifth of October, two thousand and twenty-five).

Agenda Ketujuh
Seventh Agenda

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Amendments to the Company's Articles of Association
Keputusan Berdasarkan SK Gubernur Riau akan dibentuk Tim Kajian perubahan badan Hukum perseroan yang semula Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) Menjadi bentuk badan hukum sebelumnya, yang terdiri dari : 1. Pejabat dan staf pada biro ekonomi Pemerintah Provinsi Riau 2. Pejabat dan staf pada biro ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. - Direksi BRK Syariah agar menunjuk pejabat Bank untuk masuk dalam Tim Kajian - Tim kajian diberikan kewenangan untuk menunjuk konsultan dalam proses kajian tersebut dan melaporkan hasil kajian tersebut kepada Gubernur Riau paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak Tim Kajian tersebut dibentuk.	Decree Based on the Decree of the Governor of Riau, a Study Team will be formed to change the company's legal entity from a Regional Limited Liability Company (Perseroda) to its previous legal entity form. This team will consist of: 1. Officials and staff from the Riau Provincial Government's economic bureau 2. Officials and staff from the Kepulauan Riau Provincial Government's economic bureau. -The BRK Syariah Board of Directors is to appoint Bank officials to the Study Team. -The study team is authorized to appoint a consultant for the study process and shall report the study's findings to the Governor of Riau no later than 10 (ten) months from the establishment of the Study Team.

*Agenda Tambahan
*Additional Agenda

Agenda Kedelapan
Eight Agenda

Meminta kepada Direksi untuk melaksanakan Audit Kinerja Tahun 2022 sampai 2024 oleh pihak auditor eksternal, berkaitan dengan adanya temuan Kantor Akuntan Publik (KAP) tahun 2024.	Requested the Board of Directors to conduct a Performance Audit for the years 2022 to 2024 utilizing an external auditor, in relation to the findings of the Public Accounting Firm (KAP) in 2024.

Agenda Kesembilan Ninth Agenda	
Berkaitan dengan temuan Kantor Akuntan Publik (KAP) tahun 2024, maka Pemegang Saham tidak akan memberikan putusan *Acquit et de Charge*, yang diberikan oleh RUPS atas pembebasan dan pelunasan tanggung bagi Direksi dan Komisaris atas Tindakan pengurusan Perseroan yang dilaporkan dalam laporan tahunan tersebut.	In relation to the findings of the Public Accounting Firm (KAP) in 2024, the shareholders will not grant the Acquit et de Charge decision, which was given by the GMS regarding the release and discharge of responsibility for the Directors and Commissioners for the Company's management actions reported in the annual report.
Agenda Kesepuluh Tenth Agenda	
Putusan *Acquit et de Charge* untuk mantan Komisaris dan Direksi periode 2022 hingga 2024 tersebut diberikan bilamana hasil Audit Kinerja sudah dapat menggambarkan bahwa permasalahan tersebut sudah *Clean and Clear*. Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dengan hak subtitusi Kepada : - Direksi Perseroan baik bersama-sama dan/sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk : - Melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwajib atas keputusan rapat ini. Untuk itu Direksi dikuasakan untuk menghadap Notaris dan/Instansi yang berwenang untuk urusan tersebut, memberikan Keterangan-keterangan, membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana juga diperlukan untuk mengatur dan menetapkan Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dan/untuk melakukan pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan dan untuk menandatangani semua surat, akta, permohonan, dan dokumen lainnya termasuk untuk memilih tempat kedudukan hukum dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan, singkatnya untuk mencapai maksud tersebut melakukan tindakan dan urusan apapun tanpa ada yang dikecualikan	The *Acquit et de Charge* decision for the former Commissioners and Directors for the 2022 to 2024 period will be granted if the Performance Audit results show that the matter is clean and clear. Furthermore, the Meeting grants power of attorney with the right of substitution to: - The Company's Directors, both jointly and/or individually, with the right to transfer this power to another person, are authorized to: - Notify the relevant authorities regarding the decisions of this meeting. Therefore, the Directors are authorized to appear before a Notary and/or authorized agency for such matters, provide information, make amendments and/or additions in any form necessary to regulate and establish the Meeting Decision Statement and/or to provide such notification, and to submit and sign all letters, deeds, applications, and other documents, including selecting a legal domicile and to carry out other necessary actions. In short, to achieve these purposes, carry out any actions and affairs without exception.

*Agenda tambahan diluar pengumuman Panggilan RUPS dimedia.
*Additional agenda outside the announcement of the GMS Invitation in the media.

Hasil & Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Results & Realization of Previous Years' General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions

Keputusan & Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2024 tanggal 06 April 2024

Resolutions & Realization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of 2024, dated April 06, 2024

Agenda Pertama First Agenda	Status Status
Persetujuan Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (PERSERODA) untuk masa jabatan kedua kali Approval of the Proposed Extension of the Term of Office of the Sharia Board Members of PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (PERSERODA) for a second term.	
Keputusan: - Menyetujui Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Zulhendri Rais, License, Master Of Arts sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah selama 4 (empat) tahun terhitung sejak masa jabatan berakhir sampai dengan Tujuh April Duaribu Duapuluh Delapan (07- 04-2028). - Mata Acara Tambahan dan lain-lain sesuai dengan pasal 75 Ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas disetujui dengan suara bulat oleh Para Pemegang Saham dengan kehadiran 100 % (Seratus Persen): a. Mengenai penjelasan Panitia Seleksi dapat disimpulkan bahwa untuk calon Direktur Utama terdapat 1 (satu) calon yang lolos dan untuk calon Direktur Pembiayaan 2 (dua) orang yang lolos, Panitia Seleksi akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena syarat yang harus diajukan Panitia Seleksi kepada Pemegang Saham pengendali minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang. Rekomendasi calon Direktur Utama dan calon Direktur Pembiayaan akan dilanjutkan dengan seleksi dengan mengundang Jaaran Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan mengundang pihak lainnya yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Perundang undangan. b. Evaluasi Kinerja oleh Pemegang Saham terhadap Kinerja PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Resolution: - Approved the Extension of the Term of Office of Mr. Zulhendri Rais, License, Master Of Arts, as a member of the Sharia Supervisory Board for 4 (four) years, effective from the end of his term until April Seventh, Two Thousand Twenty-Eight (07-04-2028). - Additional Agenda and others in accordance with Article 75 Paragraph 4 of the Limited Liability Company Law, approved unanimously by the Shareholders with 100% (One Hundred Percent) attendance: a. Regarding the Selection Committee's explanation, it can be concluded that for the President Director candidate, 1 (one) candidate passed, and for the Director of Financing candidates, 2 (two) candidates passed. The Selection Committee will coordinate with the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) and the Financial Services Authority (OJK) because the requirement to be submitted by the Selection Committee to the controlling Shareholders is a minimum of 3 (three) and a maximum of 5 (five) persons. The recommendation for the President Director and Director of Financing candidates will proceed with a selection process by inviting the Management of Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) and other qualified parties in accordance with statutory regulations." b. Performance Evaluation by Shareholders on the Performance of PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).	Telah ditindaklanjuti Followed up

Keputusan & Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2024

Decisions & Realization of the Annual GMS for the 2024 Financial Year dated May 22, 2024

Agenda Pertama First Agenda	**Status** Status
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 Approval of the Company's Annual Report for the Financial Year 2023.	
Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 (Duaribu Duapuluh Tiga) dan memasukan laba sebesar Rp. 74.000.000.000 (Tujuhpuluh Empat Miliar Rupiah) dimasukkan menjadi dividen dan membayarkan Jasa Produksi Pegawai sebesar 22,5% (Duapuluh Dua koma Lima Persen) dan menolak tantiem-pengurus sebesar 2,5% (Dua koma Lima Persen). Resolution: "Approved the Annual Report for the Financial Year 2023 (Two Thousand Twenty-Three) and allocated a profit of Rp 74,000,000,000 (Seventy-Four Billion Rupiah) as dividends, paid Employee Production Bonus at 22.5% (Twenty-Two point Five Percent), and rejected the management bonus (tantiem) at 2.5% (Two point Five Percent)."	Telah ditindaklanjuti. Berdasarkan keputusan RUPS LB tanggal 13 November 2024. Laba Rp.74.000.000 (Tujuhpuluh Empat Miliar Rupiah) dibatalkan untuk dimasukan menjadi deviden dengan pertimbangan kebutuhan pemenuhan modal Bank. Followed up Based on the EGMS resolution dated November 13, 2024. The profit of Rp 74,000,000,000 (Seventy-Four Billion Rupiah) was canceled from being allocated as dividends, considering the Bank's capital fulfillment requirements.
Agenda Kedua Second Agenda	**Status** Status
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 Determination of the appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year 2023.	
Keputusan: 1. Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen perseroan Tahun Buku 2023 (Duaribu Duapuluh Tiga) sebesar Rp. 191.548.170.597,- (Seratus Sembilanpuluh Satu Miliar Limaratus Empatpuluh Delapan Juta Seratus Tujuhpuluh Ribu Limaratus Sembilanpuluh Tujuh Rupiah) ditambah-Rp.74.000.000.000,- (Tujuhpuluh Empat Miliar Rupiah) dibagikan seluruh kepada pemegang saham. 2. a. Karena target tidak tercapai maka penggunaan cadangan tantiem tahun buku 2023 (Duaribu Duapuluh Tiga) yang telah menjadi biaya tahun buku 2023 (Duaribu Duapuluh Tiga) dengan komposisi jasa produksi pegawai 22,5%(Duapuluh Dua koma Lima persen) dan tantiem pengurus 2,5% (Dua koma Lima persen) perlu ditinjau tantiem yang akan diberikan karena target tidak tercapai, untuk penetapan tantiem tunggu hasil investigasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), untuk jasa produksi pegawai sebesar 22,5% (Duapuluh Dua koma Lima persen) dapat dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Untuk tahun buku 2024 (Duaribu Duapuluh Empat), komposisi cadangan Jasa produksi pogawai sebesar 22,5% (Duapuluh Dua koma Lima Persen) dan tantiem pengurus sebesar 2,5% (Dua koma Lima persen) dan tantiem pengurus sama dengan tahun buku 2023 (Duaribu Duapuluh Tiga), khusus untuk tantiem pengurus di pending dan untuk jasa produksi pegawai tetap disetujui diserahkan. Resolution: 1. "Approved the appropriation of net profit and distribution of the Company's dividends for the Financial Year 2023 (Two Thousand Twenty-Three) amounting to Rp 191,548,170,597 (One Hundred Ninety-One Billion Five Hundred Forty-Eight Million One Hundred Seventy Thousand Five Hundred Ninety-Seven Rupiah) plus Rp 74,000,000,000 (Seventy-Four Billion Rupiah), distributed entirely to the shareholders." 2. a. Because the target was not achieved, the use of the management bonus (tantiem) reserve for the financial year 2023 (Two Thousand Twenty-Three), which has been expensed in the financial year 2023 (Two Thousand Twenty-Three) with a composition of employee production bonus at 22.5% (Twenty-Two point Five percent) and management bonus at 2.5% (Two point Five percent), requires a review of the bonus to be awarded due to the unachieved target. The determination of the management bonus shall await the investigation results from the Supreme Audit Agency (BPK). The employee production bonus of 22.5% (Twenty-Two point Five percent) can be distributed in accordance with the applicable regulations. b. For the financial year 2024 (Two Thousand Twenty-Four), the composition of the reserve for employee production bonus at 22.5% (Twenty-Two point Five Percent) and management bonus at 2.5% (Two point Five percent) remains the same as the financial year 2023 (Two Thousand Twenty-Three). Specifically, the management bonus is suspended, while the employee production bonus remains approved for distribution.	Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Followed up Followed up
Agenda Ketiga Third Agenda	**Status** Status
Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Perseroan Tahun Buku 2024 Approval of the Provision of the Company's Partnership Development Funds for the Financial Year 2024.	
Keputusan: Menyetujui Formula pembagian dana pembinaan kemitraan Perseroan Tahun Buku 2024 (Duaribu Duapuluh Empat) kepada masing-masing pemegang saham sama dengan formula pada tahun 2023 (Duaribu Duapuluh Tiga) yaitu alokasi pembagian masing-masing pemegang saham sebesar Rp.250.000.000,-(Duaratus Limapuluh Juta Rupiah), dan sisanya dibagi secara proporsional berdasarkan besaran saham dan pelaksanaannya akan diatur oleh Direksi. Resolution: Approved the formula for distributing the Company's partnership development funds for the Financial Year 2024 (Two Thousand Twenty-Four) to each shareholder, which is identical to the formula in 2023 (Two Thousand Twenty-Three). The allocation for each shareholder is Rp 250,000,000 (Two Hundred Fifty Million Rupiah), and the remainder shall be distributed proportionally based on share ownership, with the implementation to be regulated by the Board of Directors.	Telah ditindaklanjuti Followed up

Agenda Keempat Fourth Agenda	Status Status
Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik atas pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. Approval of the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm for the audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024.	
Keputusan: Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun buku 2024 (Duaribu Duapuluh Empat) dengan mempertimbangkan proses seleksi pemilihan Kantor Akuntan Publik oleh Komite Audit, dimana data dan fakta terkait aspek independensi, profesionalisme, metode audit dan signing partner dari masing-masing Kantor Akuntan Publik tersebut masih tetap dipertahankan. Resolution: Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Financial Statements of PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the financial year 2024 (Two Thousand Twenty-Four), taking into account the selection process conducted by the Audit Committee, wherein data and facts regarding independence, professionalism, audit methodology, and the signing partner of each Public Accounting Firm are maintained.	Telah ditindaklanjuti Followed up
Agenda Kelima Fifth Agenda	**Status** Status
Penetapan Remunerasi bagi Pengurus Perseroan Tahun Buku 2024 Determination of Remuneration for the Company's Management for the Financial Year 2024.	
Keputusan: Tidak menyetujui untuk menetapkan remunerasi bagi Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi) Tahun Buku 2024 (Duaribu Duapuluh Empat) dan fasilitas Lainnya Rp.47.013.751.217, (Empatpuluh Tujuh Miliar Tigabelas Juta Tujuhratus Limapuluh Satu Ribu Duaratus Tujuhbelas Rupiah) karena target tidak tercapai dipending sampai dengan hasil dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan. Resolution: Disapproved the determination of remuneration for the Company's Management (Board of Commissioners and Board of Directors) for the Financial Year 2024 (Two Thousand Twenty-Four) and other facilities amounting to Rp 47,013,751,217 (Forty-Seven Billion Thirteen Million Seven Hundred Fifty-One Thousand Two Hundred Seventeen Rupiah), as the target was not achieved. This is suspended pending the results from the Supreme Audit Agency (BPK).	Telah ditindaklanjuti Followed up

Keputusan & Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2024

Decisions & Realization of the Extraordinary GMS for the 2024 Financial Year dated May 22, 2024

Agenda Pertama First Agenda	Status Status
Persetujuan Penyertaan Modal dalam bentuk aset Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2023 Approval of Capital Participation in the form of assets from the Natuna Regency Government in accordance with Natuna Regency Regional Regulation Number 10 of 2023.	
Keputusan Menyetujui Pemyataan Modal dalam bentuk asset Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2023 yang semula tercatat sebagai saham Pemerintah Kabupaten Natuna dengan nominal sebesar Rp.2.080.000.000, (Dua Miliar Delapanpuluh Juta Rupiah) berubah menjadi Rp.2.100.000.000, (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah) sehingga total saham Pemerintah Kabupaten Natuna berubah menjadi sebesar Rp.36.038.100.000, (Tigapuluh Enam Miliar Tigapuluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) Resolution: "Approved the Capital Participation in the form of assets from the Natuna Regency Government in accordance with Natuna Regency Regional Regulation Number 10 of 2023, initially recorded as Natuna Regency Government shares with a nominal value of Rp 2,080,000,000 (Two Billion Eighty Million Rupiah), updated to Rp 2,100,000,000 (Two Billion One Hundred Million Rupiah), thereby revising the total shares of the Natuna Regency Government to Rp 36,038,100,000 (Thirty-Six Billion Thirty-Eight Million One Hundred Thousand Rupiah)."	Telah ditindaklanjuti Followed up
Agenda Kedua Second Agenda	**Status**
Persetujuan rencana tambahan Modal Disetor Tahun 2024 dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk membuat akta pencatatan tambahan modal yang akan disetor Pemegang Saham. Approval of the planned additional Paid-up Capital for 2024 and granting authority to the Board of Commissioners to draft the deed of recording for the additional capital to be deposited by Shareholders.	

Keputusan: 1. Menyetujui rencana tambahan modal yang akan disetor oleh masing-masing pemegang saham pada tahun 2024 (Duaribu Duapuluh Empat), yaitu a. Pemerintah Provinsi Riau akan menambahkan sebesar Rp. 260.000.000.000 (Duaratus Enampuluh Miliar Rupiah) setelah Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) keluar. b. Menyetujui Penambahan Modal dalam bentuk aset dari pemegang saham Kabupaten dan Kota, untuk menunjang kegiatan bisnis Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan dengan catatan untuk membeli aset kantor Bank Riau Kepri Syariah Perseroda agar tidak ada pengeluaran untuk biaya sewa. Dengan catatan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal Tujuhbelas Maret Duaribu Duapuluh (17-03-2020) tentang Konsolidasi Bank Umum dan memenuhi rencana setoran modal minimal 51% (Limapuluh Satu persen) dari salah satu Pemegang Saham sebagaimana diatur pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tanggal Duapuluh Delapan Desember Duaribu Tujuhbelas (28-12-2017) tentang Badan Usaha Milik Daerah serta memperhatikan Pasal 3 Surat Keputusan Direksi Nomor 060/KEPDIR/2023 tentang Pedoman Setoran Modal dalam bentuk Aset Milik Pemegang Saham Seri A pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris membuat akta pencatatan tambahan modal pemegang saham tersebut sampai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Telah ditindaklanjuti sesuai realisasi tambahan modal. Agenda penambahan modal masih dalam proses. Bank sudah menyurati ke Pemegang Saham Pengendali terkait penambahan modal disetor ke BRK Syariah dan masih menunggu arahan selanjutnya dari Pemegang Saham Pengendali.
Resolution: 1. "Approved the planned additional capital to be deposited by each shareholder in 2024 (Two Thousand Twenty-Four), namely:" a. The Riau Provincial Government will add Rp 260,000,000,000 (Two Hundred Sixty Billion Rupiah) following the issuance of the Audit by the Supreme Audit Agency (BPK). b. "Approved the Additional Capital in the form of assets from Regency and City shareholders to support the business activities of Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), with a note to purchase office assets for Bank Riau Kepri Syariah Perseroda to eliminate rental expenses. This is noted while observing the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2020 dated March Seventeenth, Two Thousand Twenty (17-03-2020) concerning the Consolidation of Commercial Banks, and fulfilling the planned minimum capital deposit of 51% (Fifty-One Percent) from one of the Shareholders as stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 54 of 2017 dated December Twenty-Eighth, Two Thousand Seventeen (28-12-2017) concerning Regionally-Owned Enterprises, as well as observing Article 3 of the Board of Directors Decree Number 060/KEPDIR/2023 concerning Guidelines for Capital Deposits in the form of Series A Shareholder Assets at PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)." 2. Approved granting authority to the Board of Commissioners to draft the deed of recording for the shareholders' additional capital until the Decree from the Ministry of Law and Human Rights is issued.	Followed up, in accordance with the realization of additional capital. The agenda for the capital increase remains in progress. The Bank has formally corresponded with the Controlling Shareholder regarding the additional paid-in capital to BRK Syariah and is currently awaiting further directives from the Controlling Shareholder.

Agenda Ketiga Third Agenda	**Status** Status
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Approval of amendments to the Company's Articles of Association.	
Keputusan: - Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan matriks perubahan anggaran dasar dengan catatan Calon terpilih Direksi dan Komisaris berdomisili wajib.di Kota Pekanbaru, serta hadir setiap hari kerja di kantor kecuali ada alasan dan seluruh pasal dalam Anggaran Dasar dimuat dalam 1 (satu) akta. - Menyetujui dan menetapkan Pemegang Saham Luar Biasa tanggal Duapuluh November Duaribu Delapanbelas (20-11-2018) sebagaimana tercatat-dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri disingkat PT. Bank Riau Kepri Nomor 337 tanggal Sepuluh Desember Duaribu Delapanbelas (10-12-2018) yang dibuat dihadapan Notaris Devi Ananji, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Batam, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.	Telah ditindaklanjuti
Resolution: - "Approved the amendments to the Company's Articles of Association in accordance with the articles of association amendment matrix, with the note that the elected Board of Directors and Board of Commissioners candidates are required to be domiciled in Pekanbaru City, and be present at the office every working day unless there is a justified reason, and all articles within the Articles of Association shall be contained in 1 (one) deed." - "Approved and stipulated that the Extraordinary Meeting of Shareholders dated November Twentieth, Two Thousand Eighteen (20-11-2018), as recorded in the Deed of Statement of Meeting Resolutions of PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, abbreviated as PT. Bank Riau Kepri, Number 337 dated December Tenth, Two Thousand Eighteen (10-12-2018), drawn up before Notary Devi Ananji, Bachelor of Laws, Master of Notary, Notary in Batam, is declared revoked and invalid."	Followed up

Agenda Keempat Fourth Agenda	**Status**
Persetujuan usulan: a. Penarikan dan pergantian sewaktu-waktu Komisaris Utama Non Independen Peseroan. b. Pelimpahan kewenangan kepada Gubernur Riau sebagai Pemegang Saham Terbesar untuk melakukan seleksi dan membentuk Panitia Seleksi Calon Komisaris Utama Non Independen. Approval of the proposal for: a. The withdrawal and replacement at any time of the Company's Non-Independent President Commissioner. b. The delegation of authority to the Governor of Riau as the Largest Shareholder to conduct the selection and form the Selection Committee for the Non-Independent President Commissioner Candidate.	
Keputusan: a. Menyetujui Penarikan dan Pergantian sewaktu-waktu Komisaris Utama Non Independen Perseroan yaitu Bapak Dr.H. Syahrial Abdi, AP., M.Si efektif per hari ini setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ditutup. b. Menyetujui Pelimpahan kewenangan kepada Gubemur Riau selaku Pemegang Saham Terbesar untuk melakukan seleksi dan membentuk Panitia Seleksi Komisaris Utama NonIndependen.	Telah ditindaklanjuti
Resolution: a. "Approved the withdrawal and replacement at any time of the Company's Non-Independent President Commissioner, namely Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si, effective today after the Extraordinary General Meeting of Shareholders is closed." b. Approved the delegation of authority to the Governor of Riau as the Largest Shareholder to conduct the selection and form the Selection Committee for the Non-Independent President Commissioner.	Followed up

Agenda Kelima Fifth Agenda	Status Status
Dan Lain-lain Any Other Business (AOB)	
Keputusan: Menyetujui kepada Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugas-sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Pemegang Saham mengamanahkan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk dapat memantau seluruh rekening dan kredit segera di syariahkan serta *Salary* Dewan Pengawas Syariah disamakan dengan Dewan Komisaris. Dengan catatan saldo CSR masih banyak yang belum digunakan dimohon kepada Direksi untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham untuk segera dicairkan. Apabila tidak dipakai sampai akhir tahun maka Pemegang Saham Pengendali dapat mengatur penyerahan dana CSR. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang atas Keputusan Rapat ini. Resolution: Approved for the Sharia Supervisory Board to carry out its duties in accordance with the Financial Services Authority Regulations (POJK), and the Shareholders mandated the Sharia Supervisory Board to monitor all accounts and financing to be immediately converted to sharia-compliant forms, and that the Salary of the Sharia Supervisory Board is equalized with that of the Board of Commissioners. With the note that there is still a large unused CSR balance, the Board of Directors is requested to provide information to the Shareholders so that it can be disbursed immediately. If it remains unused by the end of the year, the Controlling Shareholder may regulate the handover of the CSR funds. Granted power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors, either jointly or individually, with the right to transfer this power to another person, authorized to notify the competent authorities regarding the Resolutions of this Meeting.	Telah ditindaklanjuti Followed up

Keputusan & Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2024 tanggal 10 Agustus 2024

Decisions & Realization of the 2024 Extraordinary GMS dated August 10, 2024

Agenda Pertama First Agenda	Status Status
Penetapan Calon Komisaris Utama untuk diproses lebih lanjut mengikuti fit and proper test di Otoritas jasa keuangan. Determination of the President Commissioner Candidate to be processed further for the fit and proper test at the Financial Services Authority.	
Keputusan Menyetujui untuk menetapkan Calon Komisaris Utama untuk diproses lebih lanjut mengikuti fit and proper test di otoritas jasa keuangan yaitu bapak INDRA Resolution: Approved to stipulate the President Commissioner Candidate to be processed further for the fit and proper test at the Financial Services Authority, namely Mr. INDRA.	Telah ditindaklanjuti Followed up
Agenda Kedua Second Agenda	**Status** Status
Penetapan Calon Direktur Utama untuk diproses lebih lanjut mengikuti fit and proper test di Otoritas jasa keuangan Determination of the President Director Candidate to be processed further for the fit and proper test at the Financial Services Authority.	
Keputusan: Menyetujui untuk menetapkan Calon Direktur Utama untuk diproses lebih lanjut mengikuti fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan yaitu Bapak WAHYUDI GUSTIAWAN Resolution: Approved to stipulate the President Director Candidate to be processed further for the fit and proper test at the Financial Services Authority, namely Mr. WAHYUDI GUSTIAWAN.	Telah ditindaklanjuti Followed up
Agenda Kedua Second Agenda	**Status** Status
Penetapan Calon Direktur Pembiayaan untuk diproses lebih lanjut mengikuti fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan Determination of the Director of Financing Candidate to be processed further for the fit and proper test at the Financial Services Authority.	
Keputusan: Menyetujui untuk menetapkan Calon Direktur Pembiayaan untuk diproses lebih lanjut mengikuti fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan yaitu Bapak HELWIN YUNUS Resolution: Approved to stipulate the Director of Financing Candidate to be processed further for the fit and proper test at the Financial Services Authority, namely Mr. HELWIN YUNUS.	Telah ditindaklanjuti Followed up

Agenda Keempat Fourth Agenda	Status Status
Hal-hal lain yang dianggap perlu Any other necessary matters.	
Keputusan: a. Persetujuan Pemberian Gaji kepada Direksi dan Komisaris berdasarkan item remunerasi poin 1 Honorium/Gaji sebesar Rp. 7.464.000.000 (Tujuh Miliar Empatratus Enampuluh Empat Juta Rupiah). b. Direksi dan Komisaris melakukan kajian untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) khusus daerah T3 (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). c. Sesuai dengan POJK remunerasi Dewan Pengawas Syariah disetarakan dengan Komisaris termasuk gaji, fasilitas dan tunjangan. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang atas keputusan rapat ini. Resolution: a. Approval of Salary Provision for the Board of Directors and Board of Commissioners based on remuneration item point 1 Honorarium/Salary amounting to Rp 7,464,000,000 (Seven Billion Four Hundred Sixty-Four Million Rupiah). b. "The Board of Directors and Board of Commissioners to conduct a study to improve the welfare of PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) employees, specifically in the 3T regions (Underdeveloped, Frontier, and Outermost)." c. "In accordance with POJK, the remuneration for the Sharia Supervisory Board is equalized with that of the Commissioners, including salary, facilities, and allowances." Granted power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors, either jointly or individually, with the right to transfer this power to another person, authorized to notify the competent authorities regarding the Resolutions of this meeting.	Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi No.117/KEPDIR/2025 Perihal Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Followed up Followed up Followed up by the issuance of the Board of Directors Decree No. 117/KEPDIR/2025 concerning the Remuneration of the Sharia Supervisory Board.

Keputusan & Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun Buku 2024 tanggal 13 November 2024

Agenda Pertama First Agenda	Status Status
Persetujuan Pemenuhan Modal Inti Perseroan Approval of the Fulfillment of the Company's Core Capital.	
Keputusan: 1. Menyetujui Pembukuan Kembali Dividen sebesar Rp.74.000.000.000,-(Tujuhpuluh Empat Miliar Rupiah) yang telah diputus oleh Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal Duapuluh Dua Mei Duaribu Duapuluh Empat (22-05-2024) menjadi Laba ditahan. 2. Menyetujui Penyelesaian Selisih Yadit Pembiayaan sebesar Rp.175.465.859.483,71 (Seratus Tujuhpuluh Lima Miliar Empatratus Enampuluh Lima Juta Delapanratus Limapuluh Sembilan Ribu Empatratus Delapanpuluh Tiga koma Tujuhpuluh Satu Rupiah) menggunakan Cadangan Umum-.. secara bertahap yaitu pada tahun 2024 (Duaribu Duapuluh Empat) sebesar 50% (Limapuluh persen) dan pada tahun 2025 (Duaribu Duapuluh Lima) sebesar 50% (Limapuluh persen). Resolution: 1. "Approved the Rebooking of Dividends amounting to Rp 74,000,000,000 (Seventy-Four Billion Rupiah), which had been resolved by the General Meeting of Shareholders on May Twenty-Second, Two Thousand Twenty-Four (22-05-2024), into Retained Earnings." 2. "Approved the Settlement of the Financing Yield Difference (Selisih Yadit Pembiayaan) amounting to Rp 175,465,859,483.71 (One Hundred Seventy-Five Billion Four Hundred Sixty-Five Million Eight Hundred Fifty-Nine Thousand Four Hundred Eighty-Three point Seventy-One Rupiah) using the General Reserve in stages, namely 50% (Fifty percent) in 2024 (Two Thousand Twenty-Four) and 50% (Fifty percent) in 2025 (Two Thousand Twenty-Five)."	Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Followed up Followed up
Agenda Kedua Second Agenda	**Status** Status
Penetapan Tindak Lanjut Proses Seleksi Calon Pengurus Perseroan Determination of Follow-Up on the Selection Process for Company Management Candidates.	
Keputusan: 1. Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Gubemur Riau selaku Pemegang Saham terbesar untuk melaksanakan-seleksi dan membentuk Panitia Seleksi calon Direktur Utama Perseroan. 2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Gubemur Riau selaku Pemegang Saham terbesar untuk mengajukan calon Direktur Utama terpilih untuk dilakukan Penilaian-Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan. 3. Menyetujui apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dengan basil disetujui terhadap calon Komisaris Utama Perseroan yaitu Saudara Indra dan calon Direktur Pembiayaan Perseroan yaitu Saudara Helwin Yunus, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) menetapkan dan mengangkat Saudara Indra sebagai Komisaris Utama Perseroan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Akta Pernyataan Keputusan Rapat dibuat dan Saudara Helwin Yunus sebagai Direktur Pembiayaan Perseroan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Akta Pernyataan Keputusan Rapat dibuat. Untuk itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) memberikan kuasa kepada Direksi untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Resolution: 1. Approved the delegation of authority to the Governor of Riau as the largest Shareholder to execute the selection and form the Selection Committee for the Company's President Director candidate. 2. Approved granting authority to the Governor of Riau as the largest Shareholder to submit the selected President Director candidate to undergo the Fit and Proper Test (PKK) by the Financial Services Authority. 3. "Approved that if within a period of 30 (thirty) days since the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), the Financial Services Authority has submitted the Fit and Proper Test (PKK) with an approved result for the Company's President Commissioner candidate, Mr. Indra, and the Company's Director of Financing candidate, Mr. Helwin Yunus, then the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) stipulates and appoints Mr. Indra as the Company's President Commissioner for 4 (four) years effective from the date the Deed of Statement of Meeting Resolutions is drawn up, and Mr. Helwin Yunus as the Company's Director of Financing for 5 (five) years effective from the date the Deed of Statement of Meeting Resolutions is drawn up. For this purpose, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) grants power of attorney to the Board of Directors to draft the Deed of Statement of Meeting Resolutions."	Telah ditindaklanjuti Followed up

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SHARIA SUPERVISORY BOARD

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*supervising*) kegiatan Bank Syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha Bank Syariah mematuhi (*compliance*) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, seluruh transaksi perbankan syariah harus dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

The Sharia Supervisory Board is an independent body tasked with directing, consulting, evaluating, and supervising the activities of Sharia Banks to ensure that Sharia Bank business operations maintain compliance with Sharia principles as determined by Islamic law and fatwas. Based on Bank Indonesia regulations, all Sharia banking transactions must be executed in accordance with the fatwas established by the National Sharia Board.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Bank telah menerbitkan Keputusan Direksi Nomor: 133/KEPDIR/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah yang terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I Uraian Pendahuluan dan Latar Belakang Penyusunan, Dasar Hukum, serta PengertianPengertian.
2. Bab II Uraian mengenai DPS secara kelembagaan, menyangkut ketentuan mengenai Kedudukan DPS, Persyaratan Anggota DPS, Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang DPS, Mekanisme Penetapan dan Pengangkatan Anggota DPS, Jumlah dan Perangkapan Keanggotaan DPS, Struktur Organisasi DPS, Rapat DPS, Masa Jabatan DPS, Hak dan Fasilitas Anggota DPS dan ketentuan lainnya.
3. Bab III Memuat Pedoman dan Mekanisme Pengawasan dan Tata Cara Pelaporan DPS, berisi tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan DPS Terhadap Proses Pengembangan Produk Baru Bank, Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank serta Tata Cara Pelaporan DPS
4. Bab IV Memuat Objek Material Pengawasan DPS, berisi materi-materi bermuatan syariah termasuk Produk dan Jasa Bank dengan berpedoman kepada fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah.
5. Bab V Memuat Lampiran-Lampiran.

Guidelines and Working Procedures of the Sharia Supervisory Board

The Bank has issued Board of Directors Resolution Number: 133/KEPDIR/2025 dated August 20, 2025, regarding the Corporate Manual (BPP) of the BRK Syariah Sharia Supervisory Board, which consists of 5 (five) Chapters with the following details:

1. Chapter I: Introduction and Background of Preparation, Legal Basis, and Definitions.
2. Chapter II: Descriptions of the Sharia Supervisory Board (DPS) as an institution, concerning provisions on the Position of the DPS, Requirements for DPS Members, Duties, Responsibilities and Authority of the DPS, Mechanism for the Determination and Appointment of DPS Members, Number and Concurrent Membership of the DPS, Organizational Structure of the DPS, DPS Meetings, Tenure of the DPS, Rights and Facilities of DPS Members, and other provisions.
3. Chapter III: Contains Guidelines and Supervision Mechanisms and DPS Reporting Procedures, including the Mechanism for the Implementation of DPS Supervision over the Bank's New Product Development Process, Supervision of Bank Activities, and DPS Reporting Procedures.
4. Chapter IV: Contains Material Objects of DPS Supervision, comprising Sharia-related materials including Bank Products and Services guided by DSN-MUI fatwas and Sharia principles.
5. Chapter V: Contains Appendices.

Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan POJK 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan mengacu Pada SE OJK Nomor 15/SE.OJK/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya kepengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip syariah, paling sedikit melalui:
   a. evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur Bank
   b. review atas operasional Bank untuk memastikan kesesuaian Prinsip syariah;
   c. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah

Duties and Obligations of the Sharia Supervisory Board

In accordance with POJK 2 of 2024 concerning the Implementation of Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, and referring to SE OJK Number 15/SE.OJK/2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the duties and responsibilities of the DPS are as follows:

1. Supervision of policies and the conduct of management by the Board of Directors to ensure alignment with Sharia Principles, at a minimum through:
   a. Evaluation of Bank policies and procedures;
   b. Review of Bank operations to ensure Sharia Principle compliance;
   c. Directing, monitoring, and evaluating the implementation of Sharia Governance.

2. Memberikan nasihat termasuk opini syariah kepada Direksi, paling sedikit:
   a. Memberikan rekomendasi terkait pemenuhan Prinsip syariah
   b. Memberikan opini terkait hal-hal strategis / yang disyaratkan ketentuan
   c. Memberikan opini terhadap pengembangan produk baru
   d. Memberikan layanan konsultasi dan pendapat kepada fungsi Tata Kelola Syariah
3. Memberikan pendapat mengenai pemenuhan Prinsip syariah kepada komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
4. Berkoordinasi dengan otoritas fatwa dan/atau regulator terkait, apabila diperlukan.
5. Tugas lainnya yang sesuai dengan kompetensi DPS, contoh: memberikan pelatihan akad pembiayaan syariah bersama fungsi yang melaksanakan pelatihan pegawai pada Bank.

2. Providing advice including Sharia opinions to the Board of Directors, at a minimum:
   a. Providing recommendations regarding the fulfillment of Sharia Principles;
   b. Providing opinions regarding strategic matters or those required by regulation;
   c. Providing opinions on new product development;
   d. Providing consultation services and opinions to the Sharia Governance function;
3. Providing opinions regarding the fulfillment of Sharia Principles to the supporting committees of the Board of Commissioners.
4. Coordinating with fatwa authorities and/or relevant regulators, as necessary.
5. Other duties appropriate to the competence of the DPS, for example: providing training on Sharia financing contracts (akad) in collaboration with the function responsible for employee training at the Bank.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Composition and Basis of Appointment of the Sharia Supervisory Board

The composition and basis of appointment for the BRK Syariah Sharia Supervisory Board in 2025 are as follows:

Nama Name	Jabatan Positions	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date	Periode Jabatan Term of Office
Zulhendri Rais	Ketua Chairman	1 Surat No.SR-72/K0.053/2020	08 April 2020 April 08, 2020	08 April 2020 - 07 April 2024 April 08, 2020 - April 07, 2024
		2. Surat No. S-257/K0.154/2024	08 April 2024 April 08, 2020	08 April 2024 - 07 April 2028 April 08, 2024 - April 07, 2028
Saifuddin Yuliar	Anggota Member	1. Surat No. S-234/K0.053/2021	07 Juni 2021 June 07, 2021	07 Juni 2021 - 06 Juni 2025 June 07, 2021 - Jun 06, 2025

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS tidak boleh merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada 2 (dua) Bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah non-Bank. DPS juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota DSN-MUI.

Berikut adalah tabel rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah:

Concurrent Positions and Conflicts of Interest of the Sharia Supervisory Board

Members of the Sharia Supervisory Board may not hold concurrent positions as consultants in any Sharia Commercial Bank or Sharia Business Unit. The Sharia Supervisory Board may only hold concurrent positions as members of the Sharia Supervisory Board at two other banks and two non-bank Sharia financial institutions. The Sharia Supervisory Board may also not hold concurrent positions as members of the National Sharia Supervisory Board (DSN-MUI).

The following table shows concurrent positions held by the Sharia Supervisory Board:

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah
Table of Concurrent Positions of the Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan di BRK Syariah Positions at BRK Syariah	Jabatan pada Perusahaan / Instansi Lain Position in Other Companies / Agencies
Zulhendri Rais	Ketua Chairman	DPS pada Yayasan Berkah Riau Kepri Syariah (BRKS) DPS at the Yayasan Berkah Riau Kepri Syariah (BRKS)
Saifuddin Yuliar	Anggota Member	DPS pada Yayasan Berkah Riau Kepri Syariah (BRKS) DPS at the Yayasan Berkah Riau Kepri Syariah (BRKS)

Setiap anggota DPS dilarang:
1. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, anggota keluarga, atau pihak lain yang dapat berdampak negatif pada aset atau keuntungan bank;
2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS;
3. Merangkap jabatan sebagai dengan itu, baik individu maupun perusahaan, termasuk pemilik dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi di seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau UUS.

Each member of the DPS is prohibited from:
1. Using the Bank for personal gain, that of family members, or other parties, which could negatively impact the bank's assets or profits;
2. Taking and/or receiving personal benefits from the Bank other than the remuneration and facilities stipulated by the GMS;
3. Holding concurrent positions, whether as an individual or a company, including the owner of a company providing consulting services to all Sharia Commercial Banks (BUS) and/or UUS.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Share Ownership Table

Nama Name	Jabatan pada DPS BRK Syariah Positions in the DPS BRK Syariah	Kepemilikan Saham Shareholding			
		Bank	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Non Bank Non-Bank Financial Institutions	Perusahaan Lain Other Companies
Zulhendri Rais	Ketua Chairman	Tidak Ada No	Tidak Ada No	Tidak Ada No	Tidak Ada No
Saifuddin Yuliar	Anggota Member	Tidak Ada No	Tidak Ada No	Tidak Ada No	Tidak Ada No

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah telah mengadakan dan mengikuti beberapa rapat terkait dengan pembahasan pengembangan produk, pengeluaran opini syariah, jasa Bank, operasional Bank dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aspek syariah. Di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Sharia Supervisory Board Meetings

The Sharia Supervisory Board of BRK Syariah has held and attended several meetings related to product development, the issuance of sharia opinions, banking services, bank operations, and other sharia-related matters. According to Financial Services Authority regulations, meetings must be held at least once a month.

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah
Table of Frequency and Attendance Level in Sharia Supervisory Board Meetings

Nama Name	Jabatan Positions	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Zulhendri Rais	Ketua Chairman	13	13	100 %
Saifuddin Yuliar*	Anggota Member	4	3	75 %

*berakhir masa jabatan terhitung tanggal 6 Juni 2025
*term of office ends on June 6, 2025

Tabel Tanggal, Agenda, dan Peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2025
Table of Dates, Agenda, and Participants for the 2025 Sharia Supervisory Board Meeting

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta	Participant
1	31 Januari 2025 January 31, 2025	Permintaan Opini DPS Layanan Berkah BRKS (Bersama Loyalty Untuk Nasabah Bank Riau Kepri Syariah) dan Permintaan Opini DPS Fitur QRIS Antar Negara di BRKS Mobile Request for a DPS Opinion on the Berkah BRKS Service (Together Loyalty for Bank Riau Kepri Syariah Customers) and a DPS Opinion on the Inter-Country QRIS Feature on BRKS Mobile	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah 3. Direktur Dana & Jasa 4. Pemimpin Divisi Treasury & International Banking 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 7. Pemimpin Bagian Kepatuhan Syariah 8. Pemimpin Bagian Divisi Dana & Digital Banking	1. Chairman of the Sharia Supervisory Board 2. Member of the Sharia Supervisory Board 3. Director of Funds & Services 4. Head of the Treasury & International Banking Division 5. Head of the Compliance Division 6. Head of the Operations & Accounting Division 7. Head of the Sharia Compliance Division 8. Head of the Funds & Digital Banking Division
2	22 April 2025 April 22, 2025	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Discussion of Audit Results	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah 3. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 4. Pemimpin Bagian Divisi Audit Internal & Anti Fraud 5. Pemimpin Tim Anti Fraud 6. Ketua Tim Support Syariah 7. Anggota Tim Support Syariah 8. Anggota Tim Anti Fraud	1. Chairman of the Sharia Supervisory Board 2. Member of the Sharia Supervisory Board 3. Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Division 4. Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Division 5. Leader of the Anti-Fraud Team 6. Head of the Sharia Support Team 7. Member of the Sharia Support Team 8. Member of the Anti-Fraud Team

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta	Participant
3	22 April 2025 April 22, 2025	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Januari s.d Desember 2024 Discussion of Audit Results from January to December 2024	'1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah 3. Ketua Tim Support Syariah 4. Anggota Tim Support Syariah	'1. Chairman of the Sharia Supervisory Board 2. Member of the Sharia Supervisory Board 3. Head of the Sharia Support Team 4. Member of the Sharia Support Team
4	9 Mei 2025 May 9, 2025	Pembahasan Surat DSN MUI terkait Studi Banding Pemberian Point Loyalty Discussion of the DSN-MUI Letter Regarding a Comparative Study on Loyalty Points	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Ketua Tim Support Syariah 3. Pemimpin Bagian Kepatuhan Syariah 4. Pemimpin Bagian Divisi Dana & Digital Banking 5. Anggota Tim Support Syariah	1. Chairman of the Sharia Supervisory Board 2. Head of the Sharia Support Team 3. Head of the Sharia Compliance Division 4. Head of the Funds & Digital Banking Division 5. Member of the Sharia Support Team
5	14 Mei 2025 May 14, 2025	Permintaan Opini Syariah terkait "Gerai Investasi Online" Request for a Sharia Opinion Regarding "Online Investment Outlets"	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking 3. Ketua Tim Priority Banking 4. Anggota Tim Support Syariah	1. Chairman of the Sharia Supervisory Board 2. Head of the Funds & Digital Banking Division 3. Head of the Priority Banking Team 4. Member of the Sharia Support Team
6	25 Juni 2025 June 25, 2025	Rapat Silaturahmi dan Audiensi dalam Rangka Penerbitan Opini DPS Terhadap Layanan Berkah BRKS (Bersama Loyalty Untuk Nasabah Bank Riau Kepri Syariah) ke DSN-MUI di Jakarta Meeting and Audience to Issue a Sharia Supervisory Board (SSB) Opinion on the BRKS Berkah Service (Joint Loyalty for Bank Riau Kepri Syariah Customers) to the DSN-MUI in Jakarta	1. Direktur Dana & Jasa 2. Wakil Sekretaris BPH DSN-MUI 3. Sekretaris BPH DSN-MUI 4. Ketua Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah 5. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking 6. Anggota Divisi Perbankan Syariah 7. Anggota DSN-MUI 8. Pemimpin Bagian Kepatuhan Syariah	1. Director of Funds & Services 2. Deputy Secretary of the BPH DSN-MUI 3. Secretary of the BPH DSN-MUI 4. Chairman of the Sharia Supervisory Board 5. Head of the Funds & Digital Banking Division 6. Member of the Sharia Banking Division 7. Member of the DSN-MUI 8. Head of the Sharia Compliance Division
7	7 Juli 2025 July 7, 2025	Rapat Gelar Opini DPS terkait Pembukaan Layanan Gerai Investasi Online BRK Syariah SSB Opinion Meeting Regarding the Opening of the BRK Syariah Online Investment Outlet Service	1. Dewan Pengawas Syariah 2. Direktur Dana & Jasa 3. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking 4. Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & Service Quality 5. Ketua Tim Support Syariah 6. Pemimpin Bagian Kepatuhan Syariah 7. Anggota Tim Support Syariah	1. Sharia Supervisory Board 2. Director of Funds & Services 3. Head of the Funds & Digital Banking Division 4. Head of the Systems, Procedures & Service Quality Division 5. Head of Sharia Support Team 6. Head of Sharia Compliance Department 7. Members of the Sharia Support Team
8	28 Agustus 2025 August 28, 2025	Pembahasan Pemaparan Terkait Permohonan Opini DPS Terhadap Pendapatan Cash Basis Subsidi Margin Pembiayaan KUR Discussion and Presentation Regarding the Request for a Sharia Supervisory Board (SSB) Opinion Regarding Cash-Based Income and Margin Subsidies for KUR Financing	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Operasional 4. Ketua Tim Pengendalian Pelaporan Internal 5. Pemimpin Bagian Akuntasi & Tax Management 6. Pemimpin Bagian Sentral Admin Divisi Operasional & Akuntansi 7. Anggota Tim Support Syariah 8. Pemimpin Bagian Perencanaan & Keuangan 9. Pemimpin Bagian Pembiayaan Program Divisi MKM	1. Chairman of the Sharia Supervisory Board 2. Director of Funds & Services 3. Director of Operations 4. Head of the Internal Reporting Control Team 5. Head of the Accounting & Tax Management Division 6. Head of the Central Admin Section of the Operations & Accounting Division 7. Members of the Sharia Support Team 8. Head of the Planning & Finance Section 9. Head of the MSM Division Program Financing Section
9	2 September 2025 September 2, 2025	Pembahasan Opini Syariah untuk Kebijakan di BPP Penyelematan dan Penyelesaian Pembiayaan Discussion of a Sharia Opinion for Financing Rescue and Settlement Policy at the BPP	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Plt Direktur Utama 3. Pemimpin Divisi Special Asset Management 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan 5. Anggota Tim Support Syariah 6. Pemimpin Bagian Kepatuhan Syariah	1. Chairman of the Sharia Supervisory Board 2. Acting President Director 3. Head of the Special Asset Management Division 4. Head of the Compliance Division 5. Members of the Sharia Support Team 6. Head of the Sharia Compliance Section
10	18 September 2025 September 18, 2025	Pemaparan Produk Open API dengan Standarisasi SNAP BI kepada Dewan Pengawas Syariah Presentation of Open API Products with BI SNAP Standardization to the Sharia Supervisory Board	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Plt Direktur Utama 3. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 4. Pemimpin Bagian IT Planning & Assurance 5. Pemimpin Bagian IT Security 6. Pemimpin Bagian IT Development 7. Pemimpin Bagian Sistem Prosedur 8. Anggota Tim Support Syariah	1. Chairman of the Sharia Supervisory Board 2. Acting President Director 3. Head of the Information Systems Technology Division 4. Head of the IT Planning & Assurance Division 5. Head of the IT Security Division 6. Head of the IT Development Division 7. Head of the Systems Procedures Division 8. Member of the Sharia Support Team

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta	Participant
11	6 Oktober 2025 October 6, 2025	*Benchmarking* Gerai Reksa Dana Syariah Benchmarking of Sharia Mutual Fund Outlets	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking 3. Departement Head Wealth Management Bank Muamalat Indonesia 4. Investment Product Manager Retail, Liabilities, Wealth Management & Priority Segmented Bank Muamalat Indonesia 5. Sharia Compliance Bank Muamalat Indonesia 6. Ketua Tim Priority Banking 7. Pemimpin Bagian Kepatuhan Syariah 8. Tim Support Syariah	1. Chairman of the Sharia Supervisory Board 2. Head of the Funds & Digital Banking Division 3. Department Head of Wealth Management, Bank Muamalat Indonesia 4. Investment Product Manager, Retail, Liabilities, Wealth Management & Priority Segmented, Bank Muamalat Indonesia 5. Sharia Compliance, Bank Muamalat Indonesia 6. Head of the Priority Banking Team 7. Head of the Sharia Compliance Division 8. Sharia Support Team
12	17 November 2025 November 17, 2025	Permintaan Opini terhadap Layanan Virtual Account (VA) Request for Opinions on Virtual Account (VA) Services	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking 3. Pemimpin Bagian Digital Banking 4. Pemimpin Bagian Kepatuhan Syariah	1. Chairman of the Sharia Supervisory Board 2. Head of the Funds & Digital Banking Division 3. Head of the Digital Banking Division 4. Head of the Sharia Compliance Division
13	11 Desember 2025 December 11, 2025	Pemaparan Layanan Penambahan Klasifikasi "B" Pada Agen "Bkawan" BRK Syariah (Laku Pandai) kepada DPS BRK Syariah Presentation of the "B" Classification Addition Service for BRK Syariah "Bkawan" Agents (Laku Pandai) to the BRK Syariah DPS	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking 3. Pemimpin Bagian Retail Funding & Priority Banking 4. Pemimpin Bagian Pengembangan Kebijakan & Cyber Management 5. Pemimpin Bagian Kepatuhan Syariah 6. Anggota Tim Support Syariah	1. Chairman of the Sharia Supervisory Board 2. Head of the Funds & Digital Banking Division 3. Head of the Retail Funding & Priority Banking Division 4. Head of the Policy Development Division & Cyber Management 5. Head of Sharia Compliance 6. Member of the Sharia Support Team

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2025

Salah satu tanggung jawab DPS adalah mengawasi proses pengembangan produk baru Bank dan memberikan pendapat syariah atau opini tentang produk yang akan dikeluarkan oleh Bank. Pada tahun 2025, DPS telah memberikan pendapat syariah sebagai berikut:

Report on the Implementation of Duties of the Sharia Supervisory Board

Directives and Recommendations of the Sharia Supervisory Board in 2025

One of the responsibilities of the Sharia Supervisory Board is to oversee the Bank's new product development process and provide sharia opinions or opinions on products to be issued by the Bank. In 2025, the Sharia Supervisory Board issued the following sharia opinions:

No	Tanggal Date	Judul Opini DPS DPS Opinion Title	Nomor Register Registration Number
1	5 Februari 2025 February 5, 2025	Opini Syariah untuk Fitur Pembayaran QRIS Antarnegara di Aplikasi BRKS Mobile Sharia Opinion on the Inter-Border QRIS Payment Feature in the BRKS Mobile App	001/OS.01.01/DPS/2025
2	22 Agustus 2025 August 22, 2025	Opini Syariah untuk Produk Berkah BRK Syariah (Bersama Loyalty untuk Nasabah Bank Riau Kepri Syariah) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah Sharia Opinion on the BRK Syariah Berkah Product (Joint Loyalty for Bank Riau Kepri Syariah Customers) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	001/O-DPS/2025
3	01 September 2025 September 1, 2025	Opini terhadap Pendapatan Cash Basis Subsidi Margin Pembiayaan KUR Opinion on the Cash-Based Income Margin Subsidy for KUR Financing	002/O-DPS/2025
4	18 November 2025 November 18, 2025	Opini Syariah untuk Layanan Virtual Account BRK Syariah Sharia Opinion on the BRK Syariah Virtual Account Service	004/O-DPS/2025
5	28 November 2025 November 28, 2025	Opini terhadap Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) tahun 2025 Opinion on the 2025 Recovery Plan Report	005/O-DPS/2025
6	12 Desember 2025 December 12, 2025	Opini untuk Layanan "Bkawan" BRK Syariah (Laku Pandai) Klasifikasi "B" Opinion on the BRK Syariah "Bkawan" Service (Laku Pandai) Classification "B"	006/O-DPS/2025
7	12 Desember 2025 December 12, 2025	Opini untuk Layanan Tarik Tunai Tanpa Kartu (Cardless Withdrawal) Opinion on the Cardless Withdrawal Service	007/O-DPS/2025

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Sharia Supervisory Board Competency Development

Throughout 2025, the Sharia Supervisory Board of BRK Syariah participated in various competency development programs, including training, workshops, conferences, and seminars, as shown in the following table:

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2025
Sharia Supervisory Board Competency Development Table for 2025

Nama Name	Jabatan Position	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Tgl Awal Start Date	Tgl Akhir End Date
Zulhendri Rais	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	Workshop Penerapan Tata Kelola Syariah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Workshop on the Implementation of Sharia Governance at PT Bank Riau Kepri Syariah	Karim Consulting Indonesia Karim Consulting Indonesia	4 Februari 2025 February 4, 2025	5 Februari 2025 February 5, 2025
		Dauroh Ilmiah 1447 H Ma'had Az Zein Al Makki Al - ali Scientific Dauroh 1447 H Ma'had Az Zein Al Makki Al-Ali	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Institute (DSN-MUI) National Sharia Board – Indonesian Ulema Council Institute (DSN-MUI Institute)	5 Juli 2025 July 5, 2025	6 Juli 2025 July 6, 2025
		Workshop Pra-Ijtima'Sanawi (Annual Meeting) DPS X Tahun 2025 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pre-Annual Meeting (Ijtima' Sanawi) Workshop for the Sharia Supervisory Board (DPS) Year X 2025, Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit Division	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Institute (DSN-MUI) National Sharia Board – Indonesian Ulema Council Institute (DSN-MUI Institute)	24 September 2025 September 24, 2025	25 September 2025 September 25, 2025
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Certification Training Level 5	Muamalat Institute Muamalat Institute	20 Oktober 2025 October 20, 2025	21 Oktober 2025 October 21, 2025
		Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Certification Examination Level 5	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS) Professional Certification Body for Islamic Financial Competence (LSP KS)	13 November 2025 November 13, 2025	13 November 2025 November 13, 2025
Saifuddin Yuliar	Dewan Pengawas Syariah Board Supervisor Sharia	Workshop Penerapan Tata Kelola Syariah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Workshop on the Implementation of Sharia Governance at PT Bank Riau Kepri Syariah	Karim Consulting Indonesia Karim Consulting Indonesia	4 Februari 2025 February 4, 2025	5 Februari 2025 February 5, 2025
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Refreshment Level 4	CV Jamsukin Makmur Sejahtera (JMS Education) CV Jamsukin Makmur Sejahtera (JMS Education)	26 Mei 2025 May 26, 2025	27 Mei 2025 May 27, 2025

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification
Zulhendri Rais	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6, berlaku sampai dengan tanggal 3 Desember 2028 Level 4 Risk Management Certification, valid until December 3, 2028
Saifuddin Yuliar	Dewan Pengawas Syariah Board Supervisor Sharia	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4, berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2027 Level 4 Risk Management Certification, valid until November 7, 2027

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Kinerja DPS BRK Syariah sepanjang tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan manajemen Bank dan semua pihak terkait sehingga DPS dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian penyelenggaraan rapat DPS, penerbitan Opini DPS dan pelaksanaan Pengawasan Syariah (Uji Petik) DPS. Penilaian kinerja DPS dilakukan melalui *Self-Assesment* GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self-Assessment* GCG tersebut dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan serta pemenuhan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Sharia Supervisory Board Performance Assessment

The performance of the Sharia Supervisory Board (SBSC) of BRK Syariah throughout 2025 is inseparable from the support of the Bank's management and all related parties, enabling the SSB to carry out its various duties and responsibilities effectively, both in terms of quantity and quality.

This is demonstrated by the successful holding of SSB meetings, the issuance of SSB Opinions, and the implementation of SSB Sharia Supervision (Sampling Tests). The SSB performance assessment is conducted through a GCG Self-Assessment submitted to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with OJK Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. This GCG Self-Assessment is conducted periodically every semester and reported to the OJK for approval and to fulfill the requirement to submit the Sharia Supervisory Board Supervisory Report, which is submitted semiannually to the Financial Services Authority and the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (MUI).

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris adalah sebuah organ Bank yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan, memberikan nasihat, dan memastikan bahwa BRK Syariah menerapkan GCG di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Setiap anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama, memiliki posisi yang sama.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Pedoman kerja Dewan Komisaris berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris berikut organ pendukungnya. Pedoman kerja dan tata tertib Dewan Komisaris merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Bank Riau Kepri Syariah dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) tata kelola Bank yang baik yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDK/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Tujuan Pedoman Dewan Komisaris adalah mempermudah Dewan Komisaris dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris berikut organ kelengkapannya. Untuk itu pengembangannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi dalam BRK Syariah, didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Adapun isi dari Pedoman Kerja Dewan Komisaris antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
1. Visi, Misi, Tujuan
2. Fungsi
3. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris
4. Persyaratan untuk Menjadi Anggota Dewan Komisaris
5. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris
6. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
7. Etika Jabatan
8. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
9. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama
10. Waktu Kerja
11. Rapat Dewan Komisaris
12. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
13. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi
14. Organ-organ di bawah Dewan Komisaris

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Pedoman Kerja adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners is a bank organ collectively responsible for overseeing, providing advice, and ensuring that BRK Syariah implements GCG at all levels of the organization. Each member of the Board of Commissioners, including the President Commissioner, holds the same position.

Board of Commissioners Work Guidelines

The Board of Commissioners' work guidelines contain a compilation of corporate legal principles, applicable laws and regulations, Shareholder directives, and provisions of the Articles of Association that govern the work procedures of the Board of Commissioners and its supporting organs. The work guidelines and rules of procedure of the Board of Commissioners are the result of a codification of various regulations applicable to Bank Riau Kepri Syariah and best practices of good bank governance as outlined in the Board of Commissioners Decree Number 001/KEPDK/2023 dated June 27, 2023, concerning the Work Guidelines for the Board of Commissioners. The purpose of the Board of Commissioners' Guidelines is to facilitate the Board of Commissioners in understanding the regulations related to the work procedures of the Board of Commissioners and its supporting organs. Therefore, its development is carried out in accordance with the needs and dynamics that occur within BRK Syariah, based on applicable regulations and does not violate the provisions of the Articles of Association.

The contents of the Board of Commissioners'Work Guidelines include, among other things, the following matters:
1. Vision, Mission, Goals
2. Function
3. Number, Composition and Independence of the Board of Commissioners
4. Requirements to Become a Member of the Board of Commissioners
5. Term of Office of Members of the Board of Commissioners
6. Orientation and Capability Enhancement Program
7. Job Ethics
8. Duties and Authorities of the Board of Commissioners
9. Duties and Responsibilities of the Main Commissioner
10. Working time
11. Board of Commissioners Meeting
12. Performance Evaluation of the Board of Commissioners
13. Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors
14. Organs under the Board of Commissioners

Duties and Obligations of the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners as regulated in the Work Guidelines are as follows:

1. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang undangan, peraturan dari Otoritas Perbankan, OJK Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
2. Beritikad baik, hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
3. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BRK Syariah termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
5. Melakukan pengawasan untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan peraturan internal Perusahaan.
6. Memberikan nasihat, pendapat, dan saran kepada Direksi berkaitan dengan pengurusan BRK Syariah.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis Bank lainnya (KUD/ Kebijakan Umum Direksi, *Corporate Plan, Business Plan*) seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
8. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Rencana Jangka Panjang dan Rencana Bisnis Bank yang diusulkan Direksi.
9. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan Bersama
10. Menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
11. Mengikuti perkembangan kegiatan BRK Syariah baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Bank maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
12. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
13. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
15. Memastikan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan *prudential banking practices*.
16. Memastikan Direksi dan jajarannya dalam setiap kegiatan usaha Bank menerapkan prinsip-prinsip GCG, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.

1. Subject to the provisions of laws and regulations, regulations of the Banking Authority, OJK Articles of Association and decisions of the GMS.
2. Act in good faith, carefully and responsibly in carrying out duties for the benefit of the Company and in accordance with the Bank's aims and objectives.
3. Carrying out supervisory duties regarding the Board of Directors' policies in implementing the management of BRK Syariah including the implementation of the Company's Long-Term Plan, Company Work Plan and Budget, Business Plan as well as the provisions of the Articles of Association and decisions of the General Meeting of Shareholders and laws and regulations.
4. Examine and review the Annual Report prepared by the Board of Directors and sign the report.
5. Conduct supervision to ensure that the Board of Directors complies with the provisions of the Company's internal regulations.
6. Provide advice, opinions and suggestions to the Board of Directors regarding the management of BRK Syariah.
7. Provide opinions and suggestions to the Board of Directors regarding the preparation of the Vision, Mission and other strategic plans of the Bank (KUD/ General Policy of the Board of Directors, Corporate Plan, Business Plan) as regulated in the Articles of Association.
8. Providing opinions and suggestions as well as approval regarding the Long Term Plan and Bank Business Plan proposed by the Board of Directors.
9. Conducting a review of reports from the Board of Directors and all its staff, especially those related to specific tasks that have been jointly decided upon.
10. Reviewing reports from the Committees under the Board of Commissioners.
11. Follow the development of BRK Syariah activities both from internal information provided by the Bank and from external information originating from the media and other sources.
12. Attending work/coordination meetings with the Board of Directors and all its staff.
13. Make efforts to ensure that the Board of Directors and its staff have complied with the provisions of laws and regulations.
14. Prepare the work plan of the Board of Commissioners for the current year period.
15. 15. Ensuring follow-up actions on supervisory results and recommendations provided, particularly in the event of deviations from statutory regulations, the Articles of Association, and prudential banking practices.
16. Ensuring that the Board of Directors and its management team implement GCG principles across all of the Bank's business activities, which includes holding periodic meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance.

Komposisi dan Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris BRK Syariah adalah sebagai berikut:

Composition and Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

The composition and basis for the appointment of the BRK Syariah Board of Commissioners are as follows:

Nama Name	Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date	Periode Jabatan Term of Office
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Surat OJK No.S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 Surat OJK No. S-354/KO.154/2025 tanggal 9 Desember 2025 Akta Notaris Justitia Ferryanto,SH, MH No. 45 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders OJK Letter No. S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022 Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022 OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022 OJK Letter No. S-354/KO.154/2025 dated December 9, 2025 Notarial Deed of Justitia Ferryanto, SH, MH No. 45 dated October 23, 2025	25 Januari 2022 January 25, 2022	15 November 2021 – 14 November 2025 November 15, 2021 – November 14, 2025 23 Oktober 2025 – 22 April 2026 October 23, 2025 – April 22, 2026
Rita Anugerah*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 Surat OJK No. S-307/KO.053/2023 tanggal 29 September 2023 Akta Notaris Justitia Ferryanto,SH, MH No. 45 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 09 dated August 19, 2019 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022 OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022 OJK Letter No. S-307/KO.053/2023 dated September 29, 2023 Notarial Deed of Justitia Ferryanto, SH, MH No. 45 dated October 23, 2025 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders	Periode ke 2 (Dua) pada 29 September 2023 2nd (Two) Period on September 29, 2023	18 Agustus 2023 – 18 Agustus 2027 August 18, 2023 – August 18, 2027

* Berakhir Menjabat Sejak 25 Oktober 2025
*Term of office ended on October 25, 2025

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris adalah:

Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

The areas of supervisory duties of the Board of Commissioners are:

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Table of Duties of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris board of Commissioners	Jabatan Position	Bidang Tugas Pengawasan Supervisory Task Area
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of the Risk Monitoring Committee
Rita Anugerah*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Remunerasi & Nominasi Chairman of the Audit Committee and Chairman of the Remuneration & Nomination Committee

* Berakhir Menjabat Sejak 25 Oktober 2025
*Term of office ended on October 25, 2025

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*).

The appointment of members of the Board of Commissioners is carried out by the GMS by considering integrity, competence, professionalism and adequate financial reputation in accordance with the requirements of the fit and proper test established by Bank Indonesia/ Financial Services Authority. In addition, all members of the Bank's Board of Commissioners have fulfilled the requirements as members of the Board of Commissioners in accordance with Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, the Financial Services Authority Regulation on Sharia Commercial Banks, and the Financial Services Authority Regulation on the Fit and Proper Test.

Program Orientasi bagi Komisaris Baru

Dengan latar belakang Anggota Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar Anggota Komisaris tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Program orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas BRK Syariah. Program orientasi dapat juga berupa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tanggungjawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Direktur Utama.

Program Orientasi mengenai BRK Syariah diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama kali menjabat di Bank, mencakup materi sebagai berikut:

1. Gambaran mengenai BRK Syariah berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh BRK Syariah.
3. Tanggung jawab hukum Anggota Dewan Komisaris.
4. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
5. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
6. *Team building*: kegiatan ini menyertakan seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Komisaris

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Unit dan Pegawai-pegawai di BRK Syariah serta program lainnya.

Pada tahun 2025 tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris, sehingga pada tahun 2025 tidak ada program orientasi pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru.

Orientation Program for New Commissioners

Given the diverse background of Commissioners representing Shareholders, an Orientation Program is crucial. This is because Commissioners may not know each other and/or have never worked together as a team before. The orientation program can include presentations, meetings, and visits to BRK Syariah facilities. Other programs can also be tailored to meet specific needs. The President Commissioner is responsible for implementing the Orientation Program. If the President Commissioner is unable to attend, the President Director is responsible for implementing the orientation program.

The Orientation Program regarding BRK Syariah is provided to new members of the Board of Commissioners who are serving at the Bank for the first time, covering the following materials:

1. An overview of BRK Syariah relating to its objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and various other strategic issues.
2. Implementation of Good Corporate Governance principles by BRK Syariah.
3. Legal responsibilities of members of the Board of Commissioners.
4. Explanations relating to delegated authority, Internal and external audits, internal control systems and policies as well as the duties and roles of the Audit Committee and other committees formed by the Board of Commissioners.
5. Explanation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors.
6. Team building: this activity involves all members of the Board of Commissioners, both newly appointed and previously appointed, with the aim of fostering teamwork and cohesion as Commissioners.

The Orientation Program provided can be in the form of presentations, meetings or visits to Company facilities, introductions to Division Heads, Units and Employees at BRK Syariah as well as other programs.

In 2025 there will be no changes to the composition of the Board of Commissioners, so in 2025 there will be no orientation program for new members of the Board of Commissioners.

Komisaris Independen

Komisaris Independen sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:

1. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Penentuan Komisaris Independen BRK Syariah dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
b. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.
d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahi fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.
e. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
f. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
g. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen

Independent Commissioner

Independent Commissioners as regulated in Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, are members of the Board of Commissioners who do not have:

1. Financial relationships, management, share ownership and/or family relationships with controlling shareholders, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors; or
2. Financial relationships and/or shareholding relationships with the Bank, thus supporting its ability to act independently. The existence of Independent Commissioners is intended to encourage the creation of a more objective work climate and environment and to prioritize fairness and equality among various interests, including the interests of shareholders and other stakeholders. As Independent Commissioners, they must be free from conflicts of interest.

Criteria for Determining Independent Commissioners

The determination of the Independent Commissioner of BRK Syariah is carried out by taking into account the following matters:

a. Independent Commissioners must constitute at least 50% (fifty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners.
b. Not having family relations up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.
c. Former members of the Board of Directors or Executive Officers of the Bank or parties who have a relationship with the Bank, which may influence the person's ability to act independently, must undergo a cooling off period of at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner.
d. The provisions referred to in point c do not apply to former members of the Board of Directors who are in charge of supervisory functions or Executive Officers who carry out supervisory functions at the Bank.
e. Any proposal for the replacement and/or appointment of members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
f. Pass the Fit and Proper Assessment and receive approval from the Financial Services Authority.
g. Non-Independent Commissioners can switch to become Independent Commissioners after fulfilling the requirements as Independent Commissioners.

h. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun.
i. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pernyataan Komisaris Independen

Semua anggota Komisaris Independen telah menandatangani Surat Pernyataan Independen yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen, seperti yang diatur dalam Ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen tersebut dan bersedia untuk diganti.

h. Non-Independent Commissioners who wish to become Independent Commissioners are required to undergo a waiting period (cooling off) of at least 1 (one) year.
i. The transition from a Non-Independent Commissioner to an Independent Commissioner must obtain approval from the Financial Services Authority.

Independent Commissioner's Statement

All members of the Independent Commissioners have signed an Independent Statement Letter stating that they do not have any financial, management, share ownership, or family relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Controlling Shareholders or other relationships that may affect their ability to act independently, as regulated in the Provisions for Implementing Good Corporate Governance.

If in the future, it is discovered that an Independent Commissioner has financial relationships, management relationships, share ownership and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or other relationships that may affect his/her ability to act independently, then the person concerned is willing to relinquish the position of Independent Commissioner and is willing to be replaced.



SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
KOMISARIS INDEPENDEN PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Roy Prakoso
Tempat/tanggal lahir	: Jakarta/5 Januari 1964
Alamat domisili (copy KTP/SIM terlampir)	: KP Sawah RT 010/RW 002 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan
Jabatan	: Komisaris Independen

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1(satu) di atas, maka saya bersedia melepaskan jabatan saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 14 Januari 2026

(Roy Prakoso)

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Rangkap Jabatan

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2023 tentang Bank Umum Syariah maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, ditetapkan bahwa Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada:

a. lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik Bank maupun bukan bank; dan/atau
b. lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
c. Bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:
a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba;

Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Berikut adalah tabel rangkap jabatan Dewan Komisaris:

Dual Positions and Conflicts of Interest of the Board of Commissioners

Dual Position

In the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.03/2023 concerning Sharia Commercial Banks and the Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, it is stipulated that the Board of Commissioners is prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or Executive Officers at:
a. financial institutions or financial companies, both banks and non-banks; and/or
b. more than 1 (one) non-financial institution or non-financial company, whether domiciled in Indonesia or abroad.
c. Functional task areas in banking financial institutions and/or non-banking financial institutions domiciled in Indonesia or abroad.
d. Other positions that may give rise to a conflict of interest in carrying out duties as a member of the Board of Commissioners; and/or
e. Other positions in accordance with statutory provisions.

Excluding concurrent positions in the case of:
a. Members of the Board of Commissioners serve as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or Executive Officers who carry out supervisory functions in 1 (one) non-Bank subsidiary company controlled by the Bank;
b. Non-Independent Commissioners carry out functional duties of the Bank's shareholders in the form of legal entities in the Bank's business group; and/or
c. members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions;

The duties in the position and functions as referred to above may be carried out as long as the person concerned does not neglect the implementation of duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Commissioners.
The following is a table of concurrent positions of the Board of Commissioners:

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Table of Concurrent Positions of the Board of Commissioners

Nama Name	**Jabatan di BRK Syariah** Positions at BRK Syariah	**Jabatan pada Perusahaan / Lembaga Keuangan/ Bukan Keuangan** Position in Financial/Non-Financial Companies/ Institutions
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada No
Rita Anugerah*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada No

* Berakhir Menjabat Sejak 25 Oktober 2025
*Term of office ended on October 25, 2025

Program Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya, antara lain sebagai berikut :

Board of Commissioners Competency Training/Development Program

During 2025, Members of the Board of Commissioners have attended several training/seminars and workshops related to their field of work, including the following:

Nama Name	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Tgl Awal Start Date	Tgl Akhir End Date
Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	*Workshop* Penerapan Tata Kelola Syariah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Workshop on Sharia Governance Implementation at PT. Bank Riau Kepri Syariah	Karim Consulting Indonesia Karim Consulting Indonesia	4 Februari 2025 February 4, 2025	5 Februari 2025 February 45 2025
	Workshop Climate Risk Management, Scenario Analisys and Stress Testing Climate Risk Management, Scenario Analysis, and Stress Testing Workshop	PT. Lembaga Pengembangan Profesi Risiko Manajemen Gagasan PT. Risk Management Idea Professional Development Institute	25 Maret 2025 March 25, 2025	25 Maret 2025 March 25, 2025
	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Level 7 Risk Management Certification Briefing	CV Jamsukin Makmur Sejahtera (JMS Education) CV Jamsukin Makmur Sejahtera (JMS Education)	17 Mei 2025 May 17, 2025	17 Mei 2025 May 17, 2025
	Seminar dan Rakernas FKDK BPDSI Seminar and National Working Meeting of the FKDK BPDSI	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) Communication Forum of the Board of Commissioners of Regional Development Banks of Indonesia (FKDKP BPD-SI)	21 Mei 2025 May 21, 2025	22 Mei 2025 May 22, 2025
	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Level 7 Risk Management Certification Exam	CV Jamsukin Makmur Sejahtera (JMS Education) CV Jamsukin Makmur Sejahtera (JMS Education)	2 Juni 2025 June 2, 2025	2 Juni 2025 June 2, 2025
	Pelatihan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Tuntutan Implementasi termasuk Identifikasi Tantangan dan Persiapan Teknis/Non Teknis Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Training: Implementation	Risk Management Guard (RMG) Risk Management Guard (RMG)	19 Juni 2025 June 19, 2025	20 Juni 2025 June 20, 2025
	Seminar Nasional FKDK BPDSI Wilayah Tengah "*Roadmap* Penguatan BPD" National Seminar of the FKDK BPDSI Central Region: "Roadmap for Strengthening BPDs"	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) Communication Forum of the Board of Commissioners of Regional Development Banks of Indonesia (FKDKP BPD-SI)	10 Juli 2025 July 10, 2025	10 Juli 2025 July 10, 2025
	Seminar Nasional FKDK BPDSI Wilayah Timur "Transformasi BPD Regional Champion 2045" National Seminar of the FKDK BPDSI Eastern Region: "Transformation of Regional BPD Champions 2045"	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) Communication Forum of the Board of Commissioners of Regional Development Banks of Indonesia (FKDKP BPD-SI)	29 Juli 2025 July 29, 2025	29 Juli 2025 July 29, 2025
	Pelatihan dan *Refreshment* Sertifikat AAPM/AAFM/GAFM/IBS AAPM/AAFM/GAFM/IBS Certification Training and Refreshment	Prof.Dr.Fauzi Hasan Ph.d., CWM (IBS Internasional / American Academy Of Financial Management) Prof. Dr. Fauzi Hasan Ph.d., CWM (IBS International / American Academy of Financial Management)	9 Oktober 2025 October 9, 2025	29 Juli 2025 July 29, 2025
	Training IT *Risk & Cybersecurity* IT Risk & Cybersecurity Training	One Point Indonesia One Point Indonesia	3 Desember 2025 December 3, 2025	4 Desember 2025 December 4, 2025
	Pembinaan Spiritual Islami (Tarbiyah Ruhiyah) di Masjid MDM BRK Syariah Islamic Spiritual Guidance (Tarbiyah Ruhiyah) at the MDM BRK Syariah Mosque	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI) Bank Riau Kepri Syariah Human Resource Management Division (MSDI) Bank Riau Kepri Syariah	19 Desember 2025 December 19, 2025	19 Desember 2025 December 19, 2025

Nama Name	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Tgl Awal Start Date	Tgl Akhir End Date
Rita Anugerah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Seminar FKDK BPDSI "Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI" FKDK BPDSI Seminar: "Enhancing the Supervisory Role of the BPDSI Board of Commissioners"	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) Communication Forum of the Board of Commissioners of Regional Development Banks Throughout Indonesia (FKDK BPDSI)	16 Januari 2025 January 16, 2025	16 Januari 2025 January 16, 2025
	FGD OJK "Penyelarasan Pemahaman/Persepsi Mengenai Perizinan Kepengurusan dan Kepemilikan Bank Umum" OJK Focus Group Discussion (FGD): "Regulatory Alignment on Management Licensing and Ownership of Commercial Banks"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK)	21 Februari 2025 February 21, 2025	21 Februari 2025 February 21, 2025
	Workshop Penerapan Tata Kelola Syariah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Workshop on the Implementation of Sharia Governance at PT Bank Riau Kepri Syariah	Karim Consulting Indonesia Karim Consulting Indonesia	4 Februari 2025 February 4, 2025	5 Februari 2025 February 5, 2025
	Workshop Climate Risk Management, Scenario Analisys and Stress Testing Workshop on Climate Risk Management, Scenario Analysis, and Stress Testing	PT. Lembaga Pengembangan Profesi Risiko Manajemen Gagasan PT. Lembaga Pengembangan Profesi Risiko Manajemen Gagasan	25 Maret 2025 March 25, 2025	25 Maret 2025 March 25, 2025
	Seminar dan Rakernas FKDK BPDSI FKDK BPDSI Seminar and National Coordination Meeting (Rakernas)	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) Communication Forum of the Board of Commissioners of Regional Development Banks Throughout Indonesia (FKDK BPDSI)	21 Mei 2025 May 21, 2025	22 Mei 2025 May 22, 2025
	Pelatihan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Tuntutan Implementasi termasuk Identifikasi Tantangan dan Persiapan Teknis/Non Teknis Training on Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR): Implementation Imperatives, Challenge Identification, and Technical/Non-Technical Preparation	Risk Management Guard (RMG) Risk Management Guard (RMG)	19 Juni 2025 June 19, 2025	20 Juni 2025 June 20, 2025
	Seminar Nasional FKDK BPDSI Wilayah Tengah "*Roadmap* Penguatan BPD" FKDK BPDSI National Seminar (Central Region): "Roadmap for Strategic BPD Strengthening"	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) Communication Forum of the Board of Commissioners of Regional Development Banks Throughout Indonesia (FKDK BPDSI)	10 Juli 2025 July 10, 2025	10 Juli 2025 July 10, 2025
	Seminar Nasional FKDK BPDSI Wilayah Timur "Transformasi BPD *Regional Champion* 2045" FKDK BPDSI National Seminar (Eastern Region): "BPD Transformation: Regional Champion 2045"	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) Communication Forum of the Board of Commissioners of Regional Development Banks Throughout Indonesia (FKDK BPDSI)	29 Juli 2025 July 29, 2025	29 Juli 2025 July 29, 2025
	Pelatihan dan *Refreshement* Sertifikat AAPM/AAFM/GAFM/IBS AAPM/AAFM/GAFM/IBS Professional Certification Training and Maintenance	Prof.Dr.Fauzi Hasan Ph.d., CWM (IBS Internasional / American Academy Of Financial Management) Prof. Dr. Fauzi Hasan Ph.D., CWM (IBS International / American Academy of Financial Management)	-	-
	Refreshement Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Maintenance (Refreshment) – Level 6	ASBISINDO ASBISINDO (Association of Indonesian Islamic Banks)	10 Oktober 2025 October 10, 2025	10 Oktober 2025 October 10, 2025

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, berlaku sampai dengan tanggal 12 Juni 2028 Level 7 Risk Management Certification, valid until June 12, 2028
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6, berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2027 Level 6 Risk Management Certification, valid until April 29, 2027

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Untuk memastikan bahwa pengelolaan Bank dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan arahan kepada Direksi. Fokus pengawasan Dewan Komisaris termasuk pengawasan Strategis, pengawasan risiko, penggunaan modal, dan pelaksanaan tata kelola bank. Berikut adalah beberapa contoh fungsi pengawasan Dewan Komisaris:

a. Pengawasan strategis dengan mengarahkan pemantauan dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis.
b. Pengawasan terhadap pengelolaan risiko dengan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *risk appetite* dan *risk tolerance* serta kegiatan manajemen risiko sejalan dengan tujuan bisnis dan strategis, lingkungan operasional, pengendalian internal yang efektif, kecukupan modal dan kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundangan lainnya.
c. Pengawasan terhadap penggunaan Modal Bank yaitu dengan memastikan bahwa ketentuan kecukupan modal dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan praktek Bisnis di industri perbankan.
d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola Bank sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip tata kelola Bank dalam setiap kegiatan usaha BRK Syariah pada seluruh tingkatan organisas.

Procedures and Frequency of Providing Advice

To ensure that the Bank's management complies with applicable regulations, the Board of Commissioners provides recommendations and direction to the Board of Directors. The Board of Commissioners' oversight focuses on strategic oversight, risk oversight, capital utilization, and implementation of bank governance. The following are some examples of the Board of Commissioners' oversight functions:

a. Strategic oversight by directing monitoring and evaluating the implementation of strategic policies.
b. Supervision of risk management by conducting supervision to ensure that risk appetite and risk tolerance as well as risk management activities are in line with business and strategic objectives, operational environment, effective internal control, capital adequacy and compliance with Bank Indonesia/ Financial Services Authority Regulations and other laws and regulations.
c. Supervision of the use of Bank Capital, namely by ensuring that capital adequacy provisions are implemented by the Board of Directors in accordance with Bank Indonesia/ Financial Services Authority Regulations and Business practices in the banking industry.
d. Supervision of the implementation of Bank governance as an effort to ensure the implementation of Bank governance principles in all BRK Syariah business activities at all levels of the organization.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris bagian Rapat Dewan Komisaris, yaitu:

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 6 (enam) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun

Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners Meeting Policy has been regulated in the Board of Commissioners Work Guidelines section on Board of Commissioners Meetings, namely:

1. Meetings of the Board of Commissioners can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the commissioners or at the written request of one or more members of the commissioners or at the written request of one or more members of the Board of Directors or at the written request of 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.
2. Meetings of the Board of Commissioners must be held periodically at least 6 (six) times a year and must be attended by all members of the Board of Commissioners physically at least 2 (two) times a year.

3. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
4. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
13. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas di dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
14. Segala keputusan rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
15. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

3. The summons for the Board of Commissioners meeting is made by the Main Commissioner.
4. The summons for the Board of Commissioners meeting shall be delivered to each member of the Board of Commissioners directly, or by registered letter with proper acknowledgement of receipt, no later than 1 (one) day before the meeting is held, excluding the date of the summons and the date of the meeting.
5. Meeting invitations must include the agenda, date, time and place of the meeting.
6. Meetings of the Board of Commissioners are held at the company's domicile or at the company's place of business. If all members of the Board of Commissioners are present or represented, prior notice is not required, and the Board of Commissioners meeting may be held anywhere and has the right to make binding decisions.
7. The Board of Commissioners meeting is chaired by the Main Commissioner. In the event that the Main Commissioner is absent or is prevented from attending, which does not need to be proven to a Third Party, the Board of Commissioners meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is selected by and from the members of the Board of Commissioners who are present.
8. A member of the Board of Commissioners may be represented at a meeting of the Board of Commissioners only by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney.
9. A meeting of the Board of Commissioners is valid and has the right to make binding decisions if more than ½ (one half) of the total members of the Board of Commissioners are present or represented at the meeting.
10. Decisions at the Board of Commissioners' meeting must be taken based on deliberation to reach consensus. If a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, the decision will be taken by voting based on the affirmative vote of more than ½ (one half) of the total votes cast at the meeting.
11. If the votes for and against are equal, the chairman of the Board of Commissioners meeting will make the decision.
12. Each member of the Board of Commissioners present is entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Commissioners he/she represents.
13. In the event of a difference of opinion (dissenting opinion) occurring in a Board of Commissioners meeting, this must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion.
14. All decisions of the Board of Commissioners' meetings are binding on all members of the Board of Commissioners.
15. Voting on a person is done by means of a closed letter without a signature, while voting on other matters is done verbally unless the meeting chair determines otherwise without any objection from those present.

16. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
17. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputus dalam rapat Dewan Komisaris harus dibuat Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara tersebut dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan
18. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat merupakan bukti sah mengenai keputusankeputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga
19. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangai persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan secara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

16. Blank votes and invalid votes are deemed not to have been cast legally and are deemed to not exist and are not counted in determining the number of votes cast.
17. Minutes of the Board of Commissioners' Meeting must be prepared for all matters discussed and decided upon in the Board of Commissioners' Meeting, which must be signed by the Chairperson of the Meeting and at least by one other member of the Board of Commissioners present and/or represented at the meeting. If the minutes are prepared by a Notary, such signature is not required.
18. The minutes of the Board of Commissioners meeting that are made are valid evidence regarding the decisions taken in the relevant Board of Commissioners Meeting, both for the Board of Commissioners and for third parties.
19. The Board of Commissioners may also make valid decisions without holding a Board of Commissioners meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all members of the Board of Commissioners have given their approval regarding the proposal submitted in writing by signing the approval.

Decisions taken in this way have the same force as decisions legally taken at a Board of Commissioners meeting. Throughout 2025, the agenda, dates and participants of the Board of Commissioners Meetings are as follows:

Tabel Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025
2025 Board of Commissioners Meeting Table

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant
1	22 Januari 2025 January 22, 2025	1. Pembahasan Kinerja per Desember 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of Performance as of December 2024 of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Indarti (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 4. Fahmi Oemar (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Indarti (Audit Committee and Risk Monitoring Committee) 4. Fahmi Oemar (Audit Committee and Risk Monitoring Committee)
2	13 Februari 2025 February 13, 2025	1. Pembahasan Persiapan Pra Exit Meeting KAP atas temuan Audit atas pemeriksaan Laporan Keuangan tahun buku 2024 pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of Preparation for the KAP Pre-Exit Meeting regarding Audit Findings on the Examination of the Financial Report for the 2024 Financial Year at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discussing other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Indarti (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 4. Fahmi Oemar (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 5. Tim KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Indarti (Audit Committee and Risk Monitoring Committee) 4. Fahmi Oemar (Audit Committee and Risk Monitoring Committee) 5. Bustaman, Ezeddin & Putranto Public Accounting Firm Team
3	14 Maret 2025 March 14, 2025	1. Pembahasan Tindak Lanjut KAP oleh PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of the December 2024 Board of Commissioners Report of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Fahmi Oemar (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 4. Indarti (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Audit Committee and Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Audit Committee and Risk Monitoring Committee)
4	17 Maret 2025 March 17, 2025	1. Pembahasan Laporan Dekom Desember 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of the December 2024 Board of Commissioners Report of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Fahmi Oemar (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 4. Indarti (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Audit Committee and Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Audit Committee and Risk Monitoring Committee)

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant
5	19 Maret 2025 March 19, 2025	1. Pembahasan SOT Divisi Audit Internal dan Anti Fraud PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of the SOT of the Internal Audit and Anti-Fraud Division of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Fahmi Oemar (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko) 4. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 5. Pemimpin Bagian PMTLHA Divisi Audit Internal & Anti Fraud 6. Pemimpin Bagian Audit Jaringan 7. Pemimpin Bagian Audit Teknologi Informasi 8. Pemimpin Tim Anti Fraud 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Audit Committee & Risk Monitoring Committee) 4. Head of Internal Audit & Anti Fraud Division 5. Head of PMTLHA Section, Internal Audit & Anti Fraud Division 6. Network Audit Section Leader 7. Head of Information Technology Audit Section 8. Anti Fraud Team Leader
6	9 April 2025 April 9, 2025	1. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahunan 2024 dan RUPSLB PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 1. Discussion of Follow-up to the Results of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Direktur Operasional 4. Fahmi Oemar (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko) 5. Indarti (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Operational Director 4. Fahmi Oemar (Audit Committee & Risk Monitoring Committee) 5. Indarti (Audit Committee and Risk Monitoring Committee)
7	14 April 2025 April 14, 2025	1. Pembahasan Laporan Pengawasan Dekom PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Fahmi Oemar (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 4. Indarti (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 5. Sekretaris Dewan Komisaris 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Audit Committee and Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Audit Committee and Risk Monitoring Committee) 5. Secretary of the Board of Commissioners
8	5 Mei 2025 May 5, 2025	1. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahunan 2024 dan RUPSLB PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of Follow-up to the Results of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Fahmi Oemar (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 4. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 5. Pemimpin Tim Anti Fraud 6. Pemimpin Bagian PMTLHA Divisi Audit Internal & Anti Fraud 7. Sekretaris Dewan Komisaris 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Audit Committee and Risk Monitoring Committee) 4. Head of Internal Audit & Anti Fraud Division 5. Anti Fraud Team Leader 6. Head of PMTLHA Section, Internal Audit & Anti Fraud Division 7. Secretary of the Board of Commissioners
9	5 Mei 2025 May 5, 2025	1. Pembahasan Dana Murah dan Target RBB sesuai Revisi PSP PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of Low-Cost Funds and RBB Targets according to the Revised PSP of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Direktur Dana & Jasa 4. Fahmi Oemar (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 5. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking 6. Pemimpin Bagian Perencanaan & Keuangan 7. Pemimpin Bagian Corporate, Governance, Hajj & Umra 8. Pemimpin Bagian Retail Funding & Priority Banking 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Director of Funds & Services 4. Fahmi Oemar (Audit Committee and Risk Monitoring Committee) 5. Head of Funds & Digital Banking Division 6. Head of Planning & Finance Section 7. Head of Corporate, Governance, Hajj & Umra Division 8. Head of Retail Funding & Priority Banking
10	1 Agustus 2025 August 1, 2025	1. Pembasahan Ketentuan dan Aturan Atas Investigasi Pegawai/Calon Pengurus PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Amendment of the Provisions and Rules for the Investigation of Employees/Prospective Managers of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Other things deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 4. Pemimpin Bagian Audit Jaringan 5. Pemimpin Bagian PMTLHA 6. Pemimpin Tim Anti Fraud 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Head of Internal Audit & Anti Fraud Division 4. Network Audit Section Leader 5. Head of PMTLHA Section 6. Anti Fraud Team Leader
11	1 Agustus 2025 August 1, 2025	1. Pembahasan Kinerja Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Semester I / TW II 2025 2. Membahasan Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of the Financial Performance of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Semester I / Q2 2025 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Fahmi Oemar (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 4. Indarti (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Audit Committee / Risk Monitoring Committee)

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant
12	4 Agustus 2025 August 4, 2025	1. Pembahasan tentang Aturan Pengurus dapat Fasilitas untuk Sertifikasi Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion on the Rules for Management to Receive Facilities for Risk Management Certification at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Fahmi Oemar (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 4. Pemimpin Bagian CBL Divisi Hukum 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 4. Head of the Legal Division's CBL Section
13	4 Agustus 2025 August 4, 2025	1. Kajian Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2. Hasil Tindak Lanjut Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 3. Tata Kelola Perusahaan 4. Strategi Manajemen untuk Kinerja Perusahaan 5. Membahas Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Study of the Realization of the Bank's Business Plan (RBB) 2. Results of the Financial Services Authority (OJK) Audit Follow-up 3. Corporate Governance 4. Management Strategy for Company Performance 5. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Plt Direktur Utama 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Direktur Operasional 6. Fahmi Oemar (Komite Audit/Komite Pemantau Risiko) 7. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 8. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Acting President Director 4. Director of Compliance & Risk Management 5. Director of Operation 6. Fahmi Oemar (Audit Committee/Risk Monitoring Committee) 7. Head of Technology & Information Systems Division 8. Head of Risk Management Division
14	20 Agustus 2025 August 20, 2025	1. Pembahasan tentang Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion on the Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Fahmi Oemar (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Audit Committee / Risk Monitoring Committee)
15	27 Agustus 2025 August 27, 2025	1. Pembahasan Buku Pedoman Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of the Guidelines for the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Other things deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Fahmi Oemar (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 4. Indarti (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Audit Committee / Risk Monitoring Committee)
16	28 Agustus 2025 August 28, 2025	1. Pembahasan tentang Revisi RBB Tahun 2025-2027 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion on the Revision of the 2025-2027 RBB of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Fahmi Oemar (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 4. Indarti (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Audit Committee / Risk Monitoring Committee)
17	09 September 2025 September 9, 2025	1. Pembahasan tentang Pemaparan Permasalahan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion on the Presentation of Problems with the Bank Health Level (TKB) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Plt. Direktur Utama 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Fahmi Oemar (Komite Audit/Komite Pemantau Risiko) 6. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking 7. Pemimpin Bagian ERM Divisi Manajemen Risiko 8. Pemimpin Bagian Treasury Operasional 9. Pemimpin Bagian Quality Assurance Divisi Operasional & Akuntansi 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Acting President Director 4. Director of Compliance & Risk Management 5. Fahmi Oemar (Audit Committee/Risk Monitoring Committee) 6. Head of Funds & Digital Banking Division 7. Head of ERM Section, Risk Management Division 8. Head of Operational Treasury Section 9. Head of Quality Assurance Section, Operations & Accounting Division
18	09 September 2025 September 9, 2025	1. Pembahasan tentang Persetujuan Pembagian Wewenang dan Tugas Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas Hal-Hal Lain yang dianggap perlu 1. Discussion on the Approval of the Division of Authority and Duties of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan 5. Indarti (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 6. Indarti (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 7. Pemimpin Bagian Kepatuhan, Review Kebijakan & GCG 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Director of Compliance & Risk Management 4. Head of Compliance Division 5. Indarti (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 6. Indarti (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 7. Head of Compliance, Policy Review & GCG

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant
19	11 September 2025 September 11, 2025	1. Pembahasan Usulan Perubahan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of Proposed Changes to Bank Financing Policy (KPB) 2. Other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Plt Direktur Utama 4. Pemimpin Divisi Konsumer 5. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah 6. Pemimpin Divisi Komersial 7. Pemimpin Bagian Bisnis Sindikasi Divisi Komersial 8. Pemimpin Bagian Bisnis Komersial Divisi Komersial 9. Pemimpin Bagian Pembiayaan Program Divisi MKM 10. Pemimpin Bagian Multi Pembiayaan 11. Ketua Tim Pembiayaan Pra Pensiun dan Non ASN Divisi Konsumer 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Acting President Director 4. Consumer Division Leader 5. Head of Micro, Small & Medium Division 6. Head of Commercial Division 7. Head of Syndicated Business Section of Commercial Division 8. Head of Commercial Business Division Commercial Division 9. Head of the Program Financing Section of the MKM Division 10. Multi-Financing Section Leader 11. Head of the Pre-Retirement and Non-ASN Financing Team, Consumer Division
20	29 Oktober 2025 October 29, 2025	1. Pembahasan Draft Akta RUPSLB Tahun 2025 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of the Draft Deed of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders 2. Other things deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Plt Direktur Utama 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 5. Pemimpin Bagian CBL Divisi Hukum 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Acting President Director 3. Director of Compliance & Risk Management 4. Head of Human Resource Management Division 5. Head of CBL Section, Legal Division
21	26 November 2025 November 26, 2025	1. Pembahasan tentang Strategi dan Persiapan yang dilakukan atas Akta RUPS LB PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion on the Strategy and Preparations made for the Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Plt Direktur Utama 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Fahmi Oemar (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 5. Indarti (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 6. Pemimpin Divisi Hukum 7. Pemimpin Bagian PMTLHA Divisi Audit Internal & Anti Fraud 8. Pemimpin Bagian SekPro Divisi Sekretariat Perusahaan 9. Pemimpin Bagian CBL Divisi Hukum 10. Pemimpin Bagian Umum & Pemeliharaan Divisi Umum 11. Pemimpin Bagian Akuntansi & Tax Management Divisi Operasional & Akuntansi 12. Pemimpin Bagian Kepatuhan, Review Kebijakan & GCG Divisi Kepatuhan 13 Pemimpin Bagian Administrasi Divisi MSDI 14. Pemimpin Bagian Komunikasi Divisi Sekretariat Perusahaan 15. Staf Divisi Hukum 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Acting President Director 3. Director of Compliance & Risk Management 4. Fahmi Oemar (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 5. Indarti (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 6. Head of Legal Division 7. Head of PMTLHA Section, Internal Audit & Anti Fraud Division 8. Head of the Corporate Secretary Division's Pro Secretary Section 9. Head of CBL Section, Legal Division 10. Head of General Affairs & Maintenance Division 11. Head of Accounting & Tax Management Section, Operational & Accounting Division 12. Head of Compliance, Policy Review & GCG Section, Compliance Division 13. Head of Administration Section, MSDI Division 14. Head of Communications Section of the Corporate Secretary Division 15. Legal Division Staff
22	26 November 2025 November 26, 2025	1. Pembahasan Implementasi Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM Tahun 2025 dan Rencana Kerja APU,PPT dan PPPSPM tahun 2026 Bagian AML & CTF Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko 2. Membahas Hal-Hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion on the Implementation of the AML, CFT, and Counter-Proliferation Financing (CPF) Program for 2025 and the Work Plan for 2026, AML & CTF Section, Compliance and Risk Management Division. 2. Discussion of other matters deemed necessary.	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Plt. Direktur Utama 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Fahmi Oemar (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 5. Indarti (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 6. Pemimpin Bagian AML & CTF 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Acting President Director 3. Director of Compliance & Risk Management 4. Fahmi Oemar (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 5. Indarti (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 6. Head of AML & CTF Section
23	28 November 2025 November 28, 2025	1. Pembahasan tentang Recovery Plan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu" 1. Discussion regarding the Recovery Plan of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). 2. Discussion of other matters deemed necessary.	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Fahmi Oemar (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 3. Indarti (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 4. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 5. Pemimpin Bagian ERM Divisi Manajemen Risiko 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Fahmi Oemar (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 3. Indarti (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 4. Head of Risk Management Division 5. Head of ERM Section, Risk Management Division

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant
24	12 Desember 2025 December 12, 2025	1. Pembahasan Persetujuan BPP Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas Hal-hal lain yang dianggap perlu" 1. Discussion regarding the Approval of the Risk Management BPP (Guideline/Policy) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). 2. Discussion of other matters deemed necessary.	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Fahmi Oemar (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 4. Indarti (Komite Audit / Komite Pemantau Risiko) 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Bagian ERM Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin Bagian PKCM Divisi Manajemen Risiko 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Director of Compliance & Risk Management 3. Fahmi Oemar (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 5. Head of Risk Management Division 6. Head of ERM Section, Risk Management Division 7. Head of PKCM Section, Risk Management Division
25	19 Desember 2025 December 19, 2025	1. Pembahasan Pengelolaan Whistle Blowing System 2. Pembahasan Pengelolaan APU PPT 3. Pembahasan Realisasi Kinerja 2025 dan Program Kerja 2026 4. Membahas Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion on the Management of the Whistleblowing System. 2. Discussion on the Management of AML & CFT. 3. Discussion on 2025 Performance Realization and the 2026 Work Program. 4. Discussion of other matters deemed necessary.	1. Roy Prakoso 2. Fahmi Oemar (Komite Audit/Komite Pemantau Risiko) 3. Indarti (Komite Audit/Komite Pemantau Risiko) 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Bagian Kepatuhan Syariah 7. Pemimpin Bagian AML & CTF 8. Pemimpin Bagian Kepatuhan, Review Kebijakan & GCG 1. Roy Prakoso 2. Fahmi Oemar (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 3. Indarti (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 4. Director of Compliance & Risk Management 5. Head of Compliance Division 6. Head of Sharia Compliance Section 7. Head of AML & CTF Section 8. Head of Compliance, Policy Review & GCG Section
26	23 Desember 2025 December 23, 2025	1. Pembasahan Permasalahan terupdate tentang Kasus Fraud di Bank Riau Kepri Syariah 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion on the latest updates regarding Fraud cases at Bank Riau Kepri Syariah. 2. Discussion of other matters deemed necessary.	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Fahmi Oemar (Komite Audit/Komite Pemantau Risiko) 3. Indarti (Komite Audit/Komite Pemantau Risiko) 4. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 5. Pemimpin Bagian Audit Jaringan 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Fahmi Oemar (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 3. Indarti (Audit Committee / Risk Monitoring Committee) 4. Head of Internal Audit & Anti-Fraud Division 5. Head of Network Audit Section
27	24 Desember 2025 December 24, 2025	1. Pembahasan Konfigurasi IT 2. Pembahasan Cyber Security 3. Pembahasan Rencana Agenda Rapat Lintas Divisi 4. Hal-Hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion on IT Configuration. 2. Discussion on Cyber Security. 3. Discussion on the Agenda for Cross-Divisional Meetings. 4. Discussion of other matters deemed necessary.	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Fahmi Oemar (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 3. Indarti (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Fahmi Oemar (Audit Committee and Risk Monitoring Committee) 3. Indarti (Audit Committee and Risk Monitoring Committee)
28	24 Desember 2025 December 24, 2025	1. Pembahasan Konfigurasi IT 2. Pembahasan Cyber Security 3. Pembahasan antar Divisi terkait SOT 4. Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion on IT Configuration. 2. Discussion on Cyber Security. 3. Discussion among Divisions regarding SOT (Organizational Structure) 4. Discussion of other matters deemed necessary.	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Plt. Direktur Utama 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Fahmi Oemar (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 5. Indarti (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 8. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 9. Pemimpin Bagian Pengembangan Divisi MSDI 10. Pemimpin Bagian IT OP & Support Divisi TSI 11. Pemimpin Bagian IT Security Divisi TSI 12. Pemimpin Bagian IT Planning Divisi TSI 13. Tim CSIT 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Acting President Director 3. Director of Compliance & Risk Management 4. Fahmi Oemar (Audit Committee and Risk Monitoring Committee) 5. Indarti (Audit Committee and Risk Monitoring Committee) 6. Head of Risk Management Division 7. Head of Human Resources Management Division 8. Head of Technology & Information Systems Division 9. Head of Development Section, Human Resources Management Division 10. Head of IT Operations & Support Section, Technology & Information Systems Division 11. Head of IT Security Section, Technology & Information Systems Division 12. Head of IT Planning Section, Technology & Information Systems Division 13. CSIT Team
29	24 Desember 2025 December 24, 2025	1. Pembahasan Persetujuan BPP *Internal Control Over Financing* (ICOFR) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion on the Approval of the Internal Control Over Financing (ICOFR) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Fahmi Oemar (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 3. Indarti (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 4. Ketua Tim Pengendalian Pelaporan Internal 5. Anggota Tim Pengendalian Pelaporan Internal 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Fahmi Oemar (Audit Committee and Risk Monitoring Committee) 3. Indarti (Audit Committee and Risk Monitoring Committee) 4. Head of Internal Reporting Control Team 5. Member of Internal Reporting Control Team

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Meeting Frequency and Attendance

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025
Table of Frequency and Attendance of Board of Commissioners Meetings in 2025

No	Dewan Komisaris board of Commissioners	Jumlah Rapat yang dihadiri Number of Meetings that attended	Total Rapat Dewan Komisaris Total Board Meetings Commissioner	Persentase Percentage
1	Roy Prakoso	29	29	100%
2	Rita Anugerah *	19	19	100%

* Berakhir Menjabat Sejak 25 Oktober 2025
*Term of office ended on October 25, 2025

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2025

Dalam menjalankan program kerja pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2025, Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi kepada Direksi yakni Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap Calon Direktur Utama PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025 Dewan Komisaris memberikan persetujuan atau keputusan antara lain sebagai berikut:

1. Persetujuan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
2. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Divisi Audit Internal dan Anti *Fraud* Tahun 2025
3. Persetujuan Rencana Perubahan SOTK
4. Persetujuan Pembiayaan Aneka Guna (PAG) Kepada Pihak Terkait
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk *Review* Kaji Ulang Divisi Audit Internal dan Anti *Fraud* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
6. Tindak Lanjut Remunerasi Tetap Dewan Pengawas Syariah Tahun Buku 2025 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
7. Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahun 2025-2027
8. Persetujuan Pembagian Wewenang dan Tugas Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
9. Persetujuan Penegasan Limit Direksi.
10. Persetujuan Perubahan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB).
11. Persetujuan Perubahan Piagam Audit Intern Tahun 2025 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
12. Persetujuan Penyesuaian atas Revisi Rencana Bisnis Bank PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahun 2025-2027.

Report on the Implementation of the Duties of the Board of Commissioners

Board of Commissioners Recommendations for 2025

In implementing its supervisory work program, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee. Throughout 2025, the Board of Commissioners submitted recommendation to the Board of Directors regarding the Remuneration and Nomination Committee for the Candidate for President Director of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Decision of the Board of Commissioners for 2025

Throughout 2025, the Board of Commissioners provided approvals or decisions, including the following:

1. Approval of Extension of Term of Work of Members of Audit Committee and Risk Monitoring Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
2. Approval of the 2025 Work Plan and Budget of the Internal Audit and Anti-Fraud Division
3. Approval of the SOTK Change Plan
4. Approval of Multipurpose Financing (PAG) to Related Parties
5. Appointment of Public Accounting Firm (KAP) for the Review of the Internal Audit and Anti-Fraud Division of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
6. Follow-up on the Permanent Remuneration of the Sharia Supervisory Board for the 2025 Financial Year of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
7. Approval of the Revised Business Plan of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for 2025-2027
8. Approval of the Division of Authority and Duties of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
9. Approval of Confirmation of Directors' Limits.
10. Approval of Changes to Bank Financing Policy (KPB).
11. Approval of Changes to the Internal Audit Charter for 2025 of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
12. Approval of Adjustments to the Revised Business Plan of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for 2025-2027.

13. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun buku 2025
14. Persetujuan Perubahan BPP *Special Asset Management*
15. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026-2028 dan Persetujuan *Corporate Plan* Tahun 2026-2030 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
16. Persetujuan atas BPP *Internal Control Over Financing* (ICOFR) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan pengawasan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris terhadap pencapaian Direksi atas Rencana Bisnis Bank (RBB), yang merupakan target kinerja tahunan BRK Syariah. Selain itu, keberhasilan kinerja Dewan Komisaris juga dapat diukur melalui hasil penilaian tata kelola Bank umum syariah dan juga tingkat kesehatan Bank sebagai hasil dari fungsi pengawasan yang tercermin dari aspek profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan Bank.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Parameter pelaksanaan tata kelola bank, yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Ada 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola, yaitu aspek *Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome.*

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (*Self-Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja sesuai dengan SEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Parameter penilaian kinerja Dewan Komisaris meliputi prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola BRK Syariah.

Selain melalui penilaian sendiri (*Self-Assessment*), penilaian tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham (RUPS) bersamaan dengan persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

13. Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to Examine the Annual Financial Report of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the 2025 financial year
14. Approval of Changes to the Special Asset Management BPP
15. Approval of the Bank Business Plan (RBB) for 2026-2028 and Approval of the Corporate Plan for 2026-2030 of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
16. Approval of the Internal Control Over Financing (ICOFR) BPP of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

Board of Commissioners Performance Assessment

In the General Meeting of Shareholders (GMS), the performance evaluation of the Board of Commissioners is conducted based on joint supervision by all members of the Board of Commissioners regarding the Board of Directors' achievement of the Bank's Business Plan (RBB), which is the annual performance target of BRK Syariah. Furthermore, the success of the Board of Commissioners' performance can also be measured through the results of the governance assessment of Islamic commercial banks and also the level of bank health as a result of the supervisory function, which is reflected in the aspects of the risk profile, Good Corporate Governance, rentability, and bank capital.

Board of Commissioners Performance Assessment Criteria

The parameters for implementing bank governance, namely the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, are used to assess the performance of the Board of Commissioners. There are three aspects of governance assessment: Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome.

Board of Commissioners Performance Assessment Procedure

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out through a self-assessment report on the implementation of Good Corporate Governance which is submitted to the OJK periodically with reference to the OJK Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning the Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance is carried out using a Working Paper in accordance with the SEOJK concerning the Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The parameters for assessing the performance of the Board of Commissioners include the principles of implementing Good Corporate Governance related to the overall function in managing Sharia BRK.

In addition to self-assessment, the assessment of the Board of Commissioners' supervisory duties is carried out by Shareholders (GMS) together with the approval of the Annual Report and Financial Statements for the 2025 financial year which have been audited by a Public

(KAP) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025.

Pihak Penilai Kinerja

Assesment dilakukan melalui laporan *Self-Assesment* pelaksanaan tata kelola secara semesteran yang dilakukan oleh internal BRK Syariah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Accounting Firm (KAP) by providing full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the 2025 financial year.

Performance Appraisal Party

The assessment is carried out through a semi-annual self-assessment report on the implementation of governance carried out internally by BRK Syariah, to be subsequently submitted to the Financial Services Authority.

Results of the Board of Commissioners Performance Assessment

Tabel Penilaian Kinerja Dewan Komisaris (*Self-Assesment*)
Board of Commissioners Performance Assessment Table (Self-Assessment)

Parameter GCG GCG Parameters	**Governance Structure** Governance Structure	**Governance Process** Governance Process	**Governance Outcome** Governance Outcome	**Peringkat** Ranking **Komposit** Composite
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Implementation of Duties and Responsibilitiesboard of Commissioners	3	3	3	3 (Cukup Baik) 3 (Fairly Good)

Peringkat 3 artinya adalah: Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah melakukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang secara umum Cukup Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Dewan Komisaris.

Selama tahun 2025, BRK Syariah telah melakukan *Self-Assesment* (penilaian sendiri) terhadap pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris berdasarkan *governance structure, governance process* dan *governance outcome* dengan hasil penilaian berada pada peingkta komposi 3 (tiga) atau Cukup Baik.

Pengungkapan kebijakan *Self-Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi prinsip transparansi, namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan, namun juga untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris.

Rating 3 signifies that the Board of Commissioners, in the execution of its duties and responsibilities, has implemented Good Corporate Governance Fairly Good overall. This is reflected in the adequate fulfillment of Good Corporate Governance principles; in general, the identified weaknesses are insignificant and can be resolved through normal measures by the Board of Commissioners.

Throughout 2025, BRK Syariah conducted a Self-Assessment regarding the execution of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners, evaluated across governance structure, governance process, and governance outcome. The assessment resulted in a composite rating of 3 (three), or Fairly Good.

The disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is carried out not only to fulfill the principle of transparency, but also as a form of accountability for the implementation of supervisory duties, but also to provide confidence to shareholders regarding the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Commissioners.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris BRK Syariah dibantu oleh 3 (tiga) Komite yang bertanggung jawab untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang pengawasan dan penasihatan Bank untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efisien. Ketiga Komite tersebut adalah:

(1) Komite Audit,
(2) Komite Pemantau Risiko serta
(3) Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penilaian Kinerja terhadap Komite di bawah Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Piagam Komite, Program Kerja Komite dan hasil *Self-Assessment* GCG. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Komite merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk pemberhentian dan/ atau menunjuk kembali anggota Komite yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Komite.

Penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (*Self-Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja sesuai dengan SEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners and the Basis for Assessment

The BRK Syariah Board of Commissioners is assisted by 3 (three) Committees which are responsible for providing advice and recommendations regarding Bank supervision and advisory to support an efficient decision-making process. The three committees are:

(1) Audit Committee,
(2) Risk Monitoring Committee and
(3) Remuneration and Nomination Committee.

Performance assessments of Committees under the Board of Commissioners are determined based on the duties and obligations stated in the Committee Charter, the Committee Work Program, and the results of the GCG Self-Assessment. The results of the performance evaluation of each Committee member serve as a basis for the Board of Commissioners' considerations regarding dismissal and/or reappointment of the Committee member in question. The results of these performance evaluations serve as a means of assessing and improving the Committee's effectiveness.

The performance assessment of the Committee under the Board of Commissioners is carried out through a self-assessment report on the implementation of Good Corporate Governance which is submitted to the OJK periodically with reference to OJK Circular Letter No. 10/ SEOJK.03/2014 concerning the Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance is carried out using a Working Paper in accordance with the SEOJK concerning the Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Tabel Penilaian Kinerja Komite Self-Assesment
Self-Assessment Committee Performance Assessment Table

Parameter GCG GCG Parameters	**Governance Structure** Governance Structure	**Governance Process** Governance Process	**Governance Outcome** Governance Outcome	**Peringkat** Ranking **Komposit** Composite
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Completeness and Implementation of Committee Duties	3	3	3	3 (Cukup Baik) 3 (Fairly Good)

Dengan Peringkat 3 (tiga) artinya:

Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah melakukan pelaksanaan Good Corporate Governance yang secara umum Cukup Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Komite dibawah Dewan Komisaris.

With Rank 3 (three) means:

The Committees under the Board of Commissioners, in the execution of their duties and responsibilities, have carried out the implementation of Good Corporate Governance which is generally Fairly Good. This is reflected by the adequate fulfillment of Good Corporate Governance principles. In the event of weaknesses in the implementation of Good Corporate Governance principles, such weaknesses are generally insignificant and can be resolved through normal actions by the Committees under the Board of Commissioners.

Selama tahun 2025, BRK Syariah telah melakukan *Self-Assessment* (penilaian sendiri) terhadap Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berdasarkan *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* dengan hasil penilaian berada pada peringkat komposit 3 (tiga) atau Cukup Baik.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris

Pada tahun 2025, BRK Syariah belum membentuk Sekretaris Dewan Komisaris secara khusus di bawah Organisasi Dewan Komisaris, namun demikian pelaksana fungsi Sekretaris Dewan Komisaris telah dijalankan oleh pegawai yang berada di bawah koordinasi Divisi Sekretariat Perusahaan.

During 2025, BRK Syariah conducted a Self-Assessment on the Completeness and Execution of Committee Duties based on governance structure, governance process, and governance outcome, resulting in a composite rating of 3 (three), or Fairly Good.

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Secretary of the Board of Commissioners

In 2025, BRK Syariah has not yet formed a Secretary to the Board of Commissioners specifically under the Board of Commissioners Organization, however, the function of the Secretary to the Board of Commissioners has been carried out by employees under the coordination of the Corporate Secretary Division.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Komite Audit merupakan organ di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan terutama terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*), efektivitas pemeriksaan oleh Audit Internal maupun eksternal.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite Audit Bank adalah membantu Dewan Komisaris BRK Syariah untuk:

1. Melakukan melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
3. Melakukan evaluasi terhadap:
   a. pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern;
   b. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

Basis for Establishing an Audit Committee

The establishment of the Audit Committee refers to Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. The Audit Committee is an organ under the Board of Commissioners that assists in the implementation of supervisory duties, particularly regarding financial information, the internal control system, and the effectiveness of audits by both internal and external auditors.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Based on Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, the duties and responsibilities of the Bank Audit Committee are to assist the Board of Commissioners of BRK Syariah to:

1. Conducting evaluations of the implementation of internal audits in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process.
2. Coordinate with the Public Accounting Office in order to ensure the effectiveness of external audit implementation.
3. Conduct an evaluation of:
   a. implementation of tasks carried out by the internal audit function;
   b. implementation of follow-up by the Board of Directors on audit findings and/or recommendations from the results of supervision by the Financial Services Authority, internal auditors, the Sharia Supervisory Board, and/or external auditors, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners

4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

4. Provide recommendations regarding the appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms to the Board of Commissioners.

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/KEPDK/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Dalam Piagam tersebut diatur ketentuan berikut:

1. Tujuan
2. Dasar Hukum
3. Organisasi
4. Kedudukan
5. Keanggotaan
6. Persyaratan keanggotaan
7. Rapat
8. Etika kerja
9. Waktu kerja
10. Kewenangan
11. Tugas
12. Tanggung Jawab
13. Penutup

Audit Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners No. 002/KEPDK/2023 dated June 27, 2023, concerning the Work Guidelines for the Remuneration & Nomination Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Audit Committee. The Charter stipulates the following provisions:

1. Objective
2. Legal basis
3. Organization
4. Position
5. Membership
6. Membership requirements
7. Meeting
8. Work ethic
9. Working time
10. Authority
11. Task
12. Responsibility
13. Closing

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit BRK Syariah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di perbankan syariah.

Untuk susunan keanggotaan dan komposisi Komite Audit BRK Syariah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, sebagai komposisi berikut:

Structure and Composition of Audit Committee Members

The composition of the BRK Syariah Audit Committee members has met the requirements stipulated by Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, which stipulates that the Audit Committee members must consist of at least one Independent Commissioner, one independent party with expertise in financial accounting, and one independent party with expertise in Islamic banking.

The membership structure and composition of the BRK Syariah Audit Committee is stipulated in the Board of Directors' Decree, as follows:

Tabel Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit
Table of Structure, Membership, and Expertise of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Decree of Determination	Keahlian Skill	Bidang Tugas Field of Work
Rita Anugerah*	Komisaris Independen/ Ketua Komite Audit Independent Commissioner/ Independent Commissioner/ Chairman of the Audit Committee	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023	• Manajemen Risiko • Akuntan Profesional • Perpajakan • Pengajar akademik • Risk Management • Professional Accountant • Taxation • Academic instructor	Ketua Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Audit Committee, Member of the Risk Monitoring Committee, Chairman of the Remuneration and Nomination Committee

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Decree of Determination	Keahlian Skill	Bidang Tugas Field of Work
Roy Prakoso	Komisaris Independen/ Anggota Komite Audit Independent Commissioner/Audit Committee Member	SK Direksi Nomor SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/ MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 SK Direksi Nomor 202/KEPDIR/2025 tanggal 21 November 2025 Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/ MSDI/2023 dated March 24, 2023 Board of Directors Decree Number 202/ KEPDIR/2025 dated November 21, 2025	• Manajemen Risiko • Keuangan • Konsultan Perbankan dan IT • Pengajar Akademik • Risk Management • Finance • Banking and IT Consultant • Academic Lecturer	Ketua Komite Pemantau Risiko Ketua Komite Audit Chairman of the Risk Monitoring Committee Chairman of the Audit Committee
Fahmi Oemar	Pihak Independen/ Anggota Komite Audit Independent Party/Audit Committee Member	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/ MSDI/2023 dated March 24, 2023	• Manajemen Risiko • Akuntansi & Audit • Risk Management • Accounting & Audit	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Audit Committee Members Risk Monitoring Committee Members
Indarti	Pihak Independen/ Anggota Komite Audit Independent Party/Audit Committee Member	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/ MSDI/2023 dated March 24, 2023	• Manajemen Risiko • Akuntansi & Audit • Risk Management • Accounting & Audit	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Audit Committee Members Risk Monitoring Committee Members

* Berakhir Menjabat Sejak 25 Oktober 2025
*Term of office ended on October 25, 2025

Profil Anggota Komite Audit

Audit Committee Member Profile

Rita Anugerah*
Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Identity and Brief History of the Board of Commissioners section in the Annual Report.

Periode Jabatan Term of Office	Periode ke 2 (Dua) pada 18 Agustus 2023 - 18 Agustus 2027	2nd (Two) Period on August 18, 2023 - August 18, 2027
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Basis for Appointment as a Member of the Board of Commissioners	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 Surat OJK No. S-307/KO.053/2023 tanggal 29 September 2023 Akta Notaris Justitia Ferryanto, SH, MH No. 45 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 09 dated August 19, 2019 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022 OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022 OJK Letter No. S-307/KO.053/2023 dated September 29, 2023 Notarial Deed of Justitia Ferryanto, SH, MH No. 45 dated October 23, 2025 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Audit	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023	Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023

* Berakhir Menjabat Sejak 25 Oktober 2025
*Term of office ended on October 25, 2025

Roy Prakoso
Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Identity and Brief History of the Board of Commissioners section in the Annual Report.

Periode Jabatan Term of Office	Periode Pertama : 15 November 2021 – 14 November 2025 Periode Perpanjangan : 23 Oktober 2024 – 22 April 2026	First Period : November 15, 2021 – November 14, 2025 Extension Period : October 23, 2024 – April 22, 2026
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Basis for Appointment as a Member of the Board of Commissioners	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Surat OJK No. S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 Akta Notaris Justitia Ferryanto, SH, MH No. 45 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Akta Notaris Nomor 45 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Surat OJK No. S-354/KO.154/2025 tanggal 09 Desember 2025	Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders OJK Letter No. S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022 Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022 OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022 Notarial Deed of Justitia Ferryanto, SH, MH No. 45 dated October 23, 2025 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Dasar Penetapan sebagai Anggota Komite Audit Ketua Komite Audit Basis of Appointment as Member of the Audit Committee Chairperson of the Audit Committee	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 SK Direksi Nomor 202/KEPDIR/2025 tanggal 21 November 2025	Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 Board of Directors Decree Number 202/KEPDIR/2025 tanggal 21 November 2025

Fahmi Oemar Pihak Independen/Anggota Komite Audit Independent Party/Audit Committee Member	
Kewarganegaraan Indonesia	Citizenship Indonesia
Domisili Pekanbaru, Riau	Domicile Pekanbaru, Riau
Tempat, Tanggal Lahir Bengkalis, 16 Februari 1962	Place and date of birth Bengkalis, February 16, 1962
Usia 63 Tahun	Age 63 Years
Riwayat Pendidikan Doktoral : UPI – YAI Jakarta, Manajemen Keuangan, 2016 Pascasarjana : UPI – YPTK Padang, Manajemen Keuangan, 2008 Sarjana : Universitas Riau, Ekonomi Akuntansi, 1988	Educational background Doctoral: UPI – YAI Jakarta, Financial Management, 2016 Postgraduate: UPI – YPTK Padang, Financial Management, 2008 Bachelor's Degree: University of Riau, Accounting Economics, 1988
Riwayat Jabatan Bergabung di BRK Syariah sejak 2013 sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko	Job History Joined BRK Syariah since 2013 as Audit Committee & Risk Monitoring
Dasar Pengangkatan SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023	Basis of Appointment Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023
Periode Jabatan 2013 s.d. sekarang	Term of Office 2013 to present

Indarti Pihak Independen/Anggota Komite Audit Independent Party/Audit Committee Member	
Kewarganegaraan Indonesia	Citizenship Indonesia
Domisili Pekanbaru, Riau	Domicile Pekanbaru, Riau
Tempat, Tanggal Lahir Pekanbaru, 19 November 1975	Place and date of birth Pekanbaru, November 19, 1975
Usia 50 Tahun	Age 50 Years
Riwayat Pendidikan -Doktoral : Universitas Trisakti, Akuntansi, 2014 - Pascasarjana : Universitas Riau, Manajemen Keuangan, 2011	Educational background -Doctoral: Trisakti University, Accounting, 2014- Postgraduate: Riau University, Financial Management, 2011
Riwayat Jabatan Bergabung di Bank Riau Kepri sejak 2013 sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko	Job History Joined Bank Riau Kepri since 2013 as Audit Committee & Risk Monitoring
Dasar Pengangkatan SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023	Basis of Appointment Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023
Periode Jabatan 2013 s.d. sekarang	Term of Office 2013 to present

Independensi Komite Audit

Independensi Komite Audit tercermin dengan tidak adanya hubungan keluarga, keuangan, dan kepemilikan saham anggota Komite Audit sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Audit Committee Independence

The Audit Committee's independence is reflected in the absence of family, financial, or shareholding relationships among Audit Committee members, as described in the following table:

Tabel Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence Table

Aspek Independensi Independence Aspect	Rita Anugerah	Roy Prakoso	Fahmi Oemar	Indarti
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Does not have any management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have any share ownership relationship in the company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Not having any family relationship with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow members of the Audit Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not serving as a political party administrator, official or government official	√	√	√	√

Rapat Komite Audit

Selama tahun 2025, Komite Audit BRK Syariah telah menyelenggarakan rapat dengan tanggal, agenda dan peserta rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Audit Committee Meeting

During 2025, the BRK Syariah Audit Committee held meetings with the following dates, agendas and meeting participants with the following frequency and attendance levels:

Tabel Rapat Komite Audit Tahun 2025
Audit Committee Meeting Schedule for 2025

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant
1	13 Februari 2025 February 13, 2025	1. Pembahasan Persiapan Pra Exit Meeting KAP atas Temuan Audit atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of Preparation for the KAP Pre-Exit Meeting on Audit Findings on the Examination of the Financial Statements for the 2024 Fiscal Year at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 3. Fahmi Oemar (Komite Audit) 4. Indarti (Komite Audit) 1. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Audit Committee) 4. Indarti (Audit Committee)
2	14 Maret 2025 March 14, 2025	1. Pembahasan Tindak Lanjut KAP oleh PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of KAP Follow-up by PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 3. Fahmi Oemar (Komite Audit) 4. Indarti (Komite Audit) 1. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Audit Committee) 4. Indarti (Audit Committee)
3	10 April 2025 April 10, 2025	1. Pembahasan Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024, dan RUPS LB PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion on Preparation for the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Financial Year, and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 3. Fahmi Oemar (Komite Audit) 4. Indarti (Komite Audit) 1. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Audit Committee) 4. Indarti (Audit Committee)

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant
4	14 April 2025 April 14, 2025	1. Pembahasan Laporan Pengawasan Dekom PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 3. Fahmi Oemar (Komite Audit) 4. Indarti (Komite Audit) 1. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Audit Committee) 4. Indarti (Audit Committee)
5	01 Agustus 2025 August 1, 2025	1. Pembahasan Kinerja Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Semester I / TW II Tahun 2025 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of the Financial Performance of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Semester I / Q2 2025 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 3. Fahmi Oemar (Komite Audit) 4. Indarti (Komite Audit) 1. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Audit Committee) 4. Indarti (Audit Committee)
6	26 November 2025 November 26, 2025	1. Pembahasan Implementasi Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM tahun 2025 dan Program Kerja tahun 2026-2028 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion on the Implementation of the APU, PPT and PPPSPM Programs in 2025 and the Work Program for 2026-2028 2. Discussion of other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Fahmi Oemar (Komite Audit) 3. Indarti (Komite Audit) 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Fahmi Oemar (Audit Committee) 3. Indarti (Audit Committee)
7	12 Desember 2025 December 12, 2025	1. Pembahasan Persetujuan BPP Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of Approval of BPP Risk Management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Fahmi Oemar (Komite Audit) 3. Indarti (Komite Audit) 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Fahmi Oemar (Audit Committee) 3. Indarti (Audit Committee)
8	19 Desember 2025 December 19, 2025	1. Pembahasan Pengelolaan Whistleblowing System 2. Pembahasan Pengelolaan APU PPT 3. Pembahasan Realisasi Kinerja 2025 dan Program Kerja 2026 4. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of Whistleblowing System Management 2. Discussion on APU PPT Management 3. Discussion of 2025 Performance Realization and 2026 Work Program 4. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Fahmi Oemar (Komite Audit) 3. Indarti (Komite Audit) 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Fahmi Oemar (Audit Committee) 3. Indarti (Audit Committee)
9	23 Desember 2025 December 23, 2025	1. Pembahasan Implementasi Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM tahun 2025 dan Program Kerja tahun 2026-2028 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion on the Implementation of the APU, PPT and PPPSPM Programs in 2025 and the Work Program for 2026-2028 2. Discussion of other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Fahmi Oemar (Komite Audit) 3. Indarti (Komite Audit) 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Fahmi Oemar (Audit Committee) 3. Indarti (Audit Committee)

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2025
Audit Committee Meeting Attendance Rate Table for 2025

Name	Jabatan Position	Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Rita Anugerah*	Ketua Chairman	5	5	100%
Roy Prakoso	Anggota Member	9	9	100%
Fahmi Oemar	Anggota Member	9	9	100%
Indarti	Anggota Member	9	9	100%

* Berakhir Menjabat Sejak 25 Oktober 2025
*Term of office ended on October 25, 2025

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2025

Rekomendasi Komite Audit

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit menyampaikan rekomendasi yakni Rekomendasi Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk *Review* Kaji Ulang Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) periode Review Juni 2022 - Juni 2025.

Kegiatan Komite Audit Tahun 2025

1. Pembahasan Persiapan *Pra Exit Meeting* KAP atas Temuan Audit atas Pemeriksaan Laporna Keuangan Tahun Buku 2024 pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
2. Pembahasan Tindak Lanjut KAP oleh PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
3. Pembahasan Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024, dan RUPS LB PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
4. Pembahasan Laporan Pengawasan Dekom PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
5. Pembahasan Kinerja Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Semester I / TW II Tahun 2025.
6. Pembahasan Implementasi Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM tahun 2025 dan Program Kerja tahun 2026-2028.
7. Pembahasan Persetujuan BPP Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
8. Pembahasan Pengelolaan *Whistleblowing System*
9. Pembahasan Pengelolaan APU PPT
10. Pembahasan Realisasi Kinerja 2025 dan Program Kerja 2026

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

BRK Syariah memfasilitasi peningkatkan kemampuan anggota Komite Audit melalui program pengembangan. Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan menjelaskan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti Komite Audit sepanjang tahun 2025.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Kinerja Komite Audit senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris BRK Syariah setiap tahun. Hasil dari penilaian sendiri (*self-assesment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, mendapat Peringkat Komposit 3 (tiga), artinya Komite Audit sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan Cukup Baik. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam program kerja Komite Audit serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Audit.

Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/ atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Brief Report on the Implementation of Audit Committee Activities in 2025

Audit Committee Recommendations

Throughout 2025, the Audit Committee submitted Recommendation for Appointment of Public Accounting Firm (KAP) for Review of Internal Audit & Anti-Fraud Division of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for Review Period June 2022 - June 2025.

Audit Committee Activities in 2025

1. Discussion of Preparation for the KAP Pre-Exit Meeting on Audit Findings on the Examination of the 2024 Financial Report at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
2. Discussion of KAP Follow-up by PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
3. Discussion on Preparation for the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Financial Year, and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
4. Discussion of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
5. Discussion of Financial Performance of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Semester I / Q2 2025.
6. Discussion on the Implementation of the APU, PPT and PPPSPM Programs in 2025 and the Work Program for 2026-2028.
7. Discussion on the Approval of the Risk Management BPP of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
8. Discussion on Whistleblowing System Management
9. Discussion on APU PPT Management
10. Discussion on 2025 Performance Realization and 2026 Work Program

Audit Committee Competency Development

BRK Syariah facilitates the enhancement of the capabilities of Audit Committee members through development programs. The Company Profile chapter in the Annual Report describes the education and training activities the Audit Committee participated in throughout 2025.

Audit Committee Performance Assessment

The performance of the Audit Committee is continuously evaluated by the Board of Commissioners of BRK Syariah on an annual basis. The results of the Bank's self-assessment on the implementation of Good Corporate Governance regarding the completeness and execution of committee duties achieved a Composite Rating of 3 (three), indicating that the Audit Committee has implemented the principles of Good Corporate Governance fairly good. This assessment is conducted based on the realization and completion of the work programs outlined in the Audit Committee's work plan and is reported to the Board of Commissioners in the Audit Committee report.
The results of the assessment will be used as consideration by the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Audit Committee for the next term of office.

Komite Pemantau Risiko

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Komite Pemantau Risiko merupakan organ di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan terutama terkait dengan penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik isu manajemen risiko dan sistem pengawasan Internal serta langkah-langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawan Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris BRK Syariah untuk:

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/KEPDK/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Dalam Piagam tersebut diatur ketentuan berikut:

1. Dasar Hukum
    a. Organisasi
    b. Kedudukan
    c. Keanggotaan
    d. Persyaratan keanggotaan
    e. Rapat
    f. Etika kerja
    g. Waktu kerja
2. Kewenangan
3. Tugas
4. Tanggung Jawab
5. Penutup

Risk Monitoring Committee

Basis for Establishing the Risk Monitoring Committee

The establishment of the Risk Monitoring Committee refers to Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. The Risk Monitoring Committee is an organ under the Board of Commissioners that assists in the implementation of supervisory duties, particularly related to the effective implementation of risk management, including risk management issues and internal oversight systems, as well as anticipatory measures taken by the Board of Directors in managing risk.

Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

Based on Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee are to assist the Board of Commissioners of BRK Syariah to:

1. Conduct an evaluation of risk management policies.
2. Conducting an evaluation of the suitability between risk management policies and the implementation of those policies;
3. Evaluate the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.

Risk Monitoring Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners No. 002/KEPDK/2023 dated June 27, 2023, concerning the Work Guidelines for the Remuneration & Nomination Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Audit Committee. The Charter stipulates the following provisions:

1. Legal basis
    a. Organization
    b. Position
    c. Membership
    d. Membership requirements
    e. Meeting
    f. Work ethic
    g. Working time
2. Authority
3. Task
4. Responsibility
5. Closing

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Susunan keanggotaan dan komposisi Komite Pemantau Risiko BRK Syariah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

Structure and Composition of Risk Monitoring Committee Members

The membership and composition of the BRK Syariah Risk Monitoring Committee are stipulated in a Board of Directors Decree. Further details regarding the educational/training activities attended by the Risk Monitoring Committee throughout 2025 can be found in the Company Profile chapter of the Annual Report.

Tabel Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Pemantau Risiko
Table of Structure, Membership, and Expertise of the Risk Monitoring Committee

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Decree of Determination	Keahlian Skill	Bidang Tugas Field of Work
Roy Prakoso	Komisaris Independen/ Ketua Komite Audit Independent Commissioner/Chairman of the Audit Committee	SK Direksi Nomor SK Direksi Nomor 36.A/ KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 SK Direksi Nomor 202/KEPDIR/2025 tanggal 21 November 2025 Board of Directors Decree Number 36.A/ KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023 Board of Directors Decree Number 202/ KEPDIR/2025 dated November 21, 2025	• Manajemen Risiko • Keuangan • Konsultan Perbankan dan I • Pengajar Akademik • Risk Management • Finance • Banking Consultant and I • Academic Lecturer	Ketua Komite Pemantau Risiko Ketua Komite Audit Chairman of the Risk Monitoring Committee Chairman of the Audit Committee
Rita Anugerah*	Komisaris Independen/ Anggota Komite Audit Independent Commissioner/Audit Committee Member	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/ MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 Board of Directors Decree Number 36.A/ KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023	• Manajemen Risiko • Akuntan Profesional • Perpajakan • Pengajar akademik • Risk Management • Professional Accountant • Taxation • Academic instructor	Ketua Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Audit Committee, Member of the Risk Monitoring Committee, Chairman of the Remuneration and Nomination Committee
Fahmi Oemar	Pihak Independen/ Anggota Komite Audit Independent Party/Audit Committee Member	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 Board of Directors Decree Number 36.A/ KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023	• Manajemen Risiko • Akuntansi & Audit • Risk Management • Accounting & Audit	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Audit Committee Members Risk Monitoring Committee Members
Indarti	Pihak Independen/ Anggota Komite Audit Independent Party/Audit Committee Member	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 Board of Directors Decree Number 36.A/ KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023	• Manajemen Risiko • Akuntansi & Audit • Risk Management • Accounting & Audit	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Audit Committee Members Risk Monitoring Committee

* Berakhir Menjabat Sejak 25 Oktober 2025
*Term of office ended on October 25, 2025

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Member Profile

Roy Prakoso
Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Identity and Brief History of the Board of Commissioners section in the Annual Report.

Periode Jabatan Term of Office	Periode Pertama : 15 November 2021 s.d 14 november 2025 Periode Perpanjangan : 23 Oktober 2025 s.d 22 April 2026	First Period : 15 November 2021 to 14 November 2025 Extension Period : 23 October 2025 to 22 April 2026
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Basis for Appointment as a Member of the Board of Commissioners	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No. S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 5. Akta Notaris Justitia Ferryanto, SH, MH No. 45 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	1. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2. OJK Letter No. S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022 3. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022 4. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022 5. Notarial Deed of Justitia Ferryanto, SH, MH No. 45 dated October 23, 2025 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Basis for Appointment as Chair of the Risk Monitoring Committee	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/2023 tanggal 24 Maret 2023	Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/2023 dated 24 March 2023

Rita Anugerah* Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee		
Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan His profile can be seen in the Identity and Brief History of the Board of Commissioners section in the Annual Report.		
Periode Jabatan Term of Office	Periode ke 2 (Dua) pada 18 Agustus 2023 - 18 Agustus 2027	2nd (Two) Period on August 18, 2023 - August 18, 2027
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Basis for Appointment as a Member of the Board of Commissioners	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 3. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 4. Surat OJK No. S-307/KO.053/2023 tanggal 29 September 2023 5. Akta Notaris Justitia Ferryanto, SH, MH No. 45 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	1. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 09 dated August 19, 2019 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022 3. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022 4. OJK Letter No. S-307/KO.053/2023 dated September 29, 2023 5. Notarial Deed of Justitia Ferryanto, SH, MH No. 45 dated October 23, 2025 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Dasar Penetapan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Basis for Appointment as a Member of the Risk Monitoring Committee	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023	Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023

* Berakhir Menjabat Sejak 25 Oktober 2025
*Term of office ended on October 25, 2025

Fahmi Oemar Pihak Independen/Anggota Komite Pemantau Risiko Independent Party/Member of the Risk Monitoring Committee	
Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Komite Audit dalam Laporan Tahunan His profile can be seen in the Audit Committee Member Profile section in the Annual Report.	
Periode Jabatan Term of Office	2013 s.d. sekarang 2013 to present
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/2023 tanggal 24 Maret 2023 Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023

Indarti Pihak Independen/Anggota Komite Pemantau Risiko Independent Party/Member of the Risk Monitoring Committee	
Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Komite Audit dalam Laporan Tahunan His profile can be seen in the Audit Committee Member Profile section in the Annual Report.	
Periode Jabatan Term of Office	2013 s.d. sekarang 2013 to present
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/2023 tanggal 24 Maret 2023 Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko secara independen melapor dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham, sebagaimana tabel berikut:

Independence of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee independently reports and is accountable to the Board of Commissioners in carrying out its duties. The independence of the Risk Monitoring Committee members is reflected in their family relationships, financial relationships, management relationships, and share ownership, as shown in the following table:

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Independence Table

Aspek Independensi Independence Aspect	Roy Prakoso	Rita Anugerah	Fahmi Oemar	Indarti
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Does not have any management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have any share ownership relationship in the company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Not having any family relationship with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow members of the Audit Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not serving as a political party administrator, official or government official	√	√	√	√

Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2025, Komite Pemantau Risiko BRK Syariah telah menyelenggarakan rapat dengan tanggal, agenda dan peserta rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Meeting

During 2025, the BRK Syariah Risk Monitoring Committee held meetings with the following dates, agendas, and meeting participants with the following frequency and attendance levels:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Participant
1	14 Februari 2025 February 14, 2025	1. Membahas tentang Hasil Kunjungan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris ke Cabang Air Molek dan Kedai Peranap PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussing the Results of the Active Supervisory Visit of the Board of Commissioners to the Air Molek Branch and Kedai Peranap of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)
2	14 Februari 2025 February 14, 2025	1. Membahas tentang Akses Informasi (dashboard) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussing Information Access (dashboard) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)
3	20 Maret 2025 March 20, 2025	1. Membahas tentang Keanggotaan DPS pada Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discuss the DPS Membership on the Audit Committee and Risk Monitoring Committee 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)
4	26 Maret 2025 March 26, 2025	1. Membahas tentang Libur Idul Fitri dan Libur Panjang PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussing the Eid al-Fitr Holiday and the Long Holiday of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)
5	14 April 2025 April 14, 2025	1. Membahas tentang Tingkat Kesehatan Bank (TKB) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussing the Bank Health Level (TKB) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)
6	28 Mei 2025 May 28, 2025	1. Membahas tentang Mitigasi atas IT Risk pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussing IT Risk Mitigation at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)

No	Tanggal Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Participant
7	16 Juni 2025 June 16, 2025	1. Membahas tentang Risiko atas Penggunaan AI pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussing the Risks of Using AI at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)
8	31 Juli 2025 July 31, 2025	1. Membahas tentang Pemblokiran Rekening nasabah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) oleh PPATK 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussing the blocking of customer accounts of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) by PPATK 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)
9	24 Agustus 2025 July 31, 2025	1. Membahas tentang kesiapan akhir tahun pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussing year-end readiness at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)
10	25 Agustus 2025 August 25, 2025	1. Membahas tentang inisiatif bisnis pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussing business initiatives at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)
11	3 September 2025 September 3, 2025	1. Membahas tentang kesiapan akhir tahun pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussing year-end readiness at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)
12	9 September 2025 September 9, 2025	1. Membahas tentang Persetujuan Pembagian Wewenang dan Tugas Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussing the Approval of the Division of Authority and Duties of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Fahmi Oemar (Komite Audit) (Audit Committee) 3. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)
13	3 Oktober 2025 October 3, 2025	1. Membahas tentang Persetujuan Pembagian Wewenang dan Tugas Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussing the Approval of the Division of Authority and Duties of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 3. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 4. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)
14	19 November 2025 November 19, 2025	1. Membahas tentang Laporan Penerapan Manajemen Risiko TW III PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussing the Risk Management Implementation Report for Quarter III of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 3. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)
15	11 Desember 2025 December 11, 2025	1. Membahas tentang Laporan Penerapan Manajemen Risiko TW III PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussing the Risk Management Implementation Report for Quarter III of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 3. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)
16	22 Desember 2025 December 22, 2025	1. Membahas tentang Rapat Kerja Lintas Divisi dengan Pengurus PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussing the Cross-Divisional Working Meeting with the Management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 3. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)
17	24 Desember 2025 December 24, 2025	1. Pembahasan Persetujuan BPP Internal Control Over Financial Reporting PT Bank Riau Kepri Syariah 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Discussion of Approval of BPP Internal Control Over Financial Reporting of PT Bank Riau Kepri Syariah 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner) 2. Fahmi Oemar (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee) 3. Indarti (Komite Pemantau Risiko) (Risk Monitoring Committee)

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2025
Risk Monitoring Committee Meeting Attendance Rate Table for 2025

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadirn Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Roy Prakoso	Ketua Chairman	17	17	100%
Rita Anugerah*	Anggota Member	13	12	92%
Fahmi Oemar	Anggota Member	17	17	100%
Indarti	Anggota Member	17	17	100%

* Berakhir Menjabat Sejak 25 Oktober 2025
*Term of office ended on October 25, 2025

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Rekomendasi Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko tidak ada menyampaikan rekomendasi.

Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko menyampaikan rekomendasi antara lain sebagai berikut :

1. Membahas tentang Hasil Kunjungan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris ke Cabang Air Molek dan Kedai Peranap PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
2. Membahas tentang Akses Informasi (*dashboard*) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
3. Membahas tentang Keanggotaan DPS pada Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
4. Membahas tentang Libur Idul Fitri dan Libur Panjang PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
5. Membahas tentang Tingkat Kesehatan Bank (TKB) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
6. Membahas tentang Mitigasi atas IT *Risk* pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
7. Membahas tentang Risiko atas Penggunaan AI pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
8. Membahas tentang Pemblokiran Rekening nasabah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) oleh PPATK.
9. Membahas tentang kesiapan akhir tahun pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
10. Membahas tentang inisiatif bisnis pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
11. Membahas tentang Persetujuan Pembagian Wewenang dan Tugas Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
12. Membahas tentang Hasil RUPSLB dan RBB Tahun Buku 2025 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
13. Membahas tentang Laporan Penerapan Manajemen Risiko TW III PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

Brief Report on the Implementation of Risk Monitoring Committee Activities in 2025

Risk Monitoring Committee Recommendations

Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee did not submit any recommendations.

Risk Monitoring Committee Activities in 2025

Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee submitted recommendations, including the following:

1. Discussing the Results of the Active Supervisory Visit of the Board of Commissioners to the Air Molek Branch and Kedai Peranap of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
2. Discussing the Information Access (dashboard) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
3. Discussing DPS Membership on the Audit Committee and Risk Monitoring Committee.
4. Discussing the Eid al-Fitr Holiday and Long Holiday of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
5. Discussing the Bank Health Level (TKB) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
6. Discussing IT Risk Mitigation at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
7. Discussing the Risks of Using AI at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
8. Discussing the blocking of customer accounts of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) by PPATK.
9. Discussing year-end readiness at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
10. Discussing business initiatives at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
11. Discussing the Approval of the Division of Authority and Duties of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
12. Discussing the results of the EGMS and RBB for the 2025 financial year of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
13. Discussing the Risk Management Implementation Report for the Third Quarter of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

14. Membahas tentang Rapat Kerja Lintas Divisi dengan Pengurus PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
15. Pembahasan Persetujuan BPP *Internal Control Over Financial Reporting* PT Bank Riau Kepri Syariah

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

BRK Syariah memfasilitasi program pengembangan Komite Pemantau Risiko untuk meningkatkan kemampuan anggota Komite Pemantau Risiko. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Kinerja Komite Pemantau Risiko senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris BRK Syariah setiap tahun. Hasil dari penilaian sendiri (*Self-Assesment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, mendapat peringkat Komposit 3 (tiga) artinya Komite Pemantau Risiko sudaah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan "Cukup Baik". Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam program kerja Komite Pemantau Risiko serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Pemantau Risiko.

Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Pemantau Risiko untuk periode jabatan berikutnya.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan organ di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan terutama terkait dengan kebijakan remunerasi BRK Syariah dan fungsi nominasi bagi calon anggota Dewan Komisaris maupun Direksi BRK Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup 2 (dua) bidang yaitu remunerasi dan nominasi, antara lain:

14. Discussing the Cross-Divisional Working Meeting with the Management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
15. Discussion on Approval of BPP Internal Control Over Financial Reporting of PT Bank Riau Kepri Syariah

Risk Monitoring Committee Competency Development

BRK Syariah facilitated a Risk Monitoring Committee development program to enhance the capabilities of its members. Further details regarding the educational/training activities attended by the Risk Monitoring Committee throughout 2025 can be found in the Company Profile section of the Annual Report.

Risk Monitoring Committee Performance Assessment

The performance of the Risk Monitoring Committee is continuously evaluated by the Board of Commissioners of BRK Syariah on an annual basis. The results of the self-assessment (Self-Assessment) of the Bank's Good Corporate Governance implementation regarding the completeness and execution of the committee's duties achieved a Composite 3 (three) rating, meaning that the Risk Monitoring Committee has applied the principles of Good Corporate Governance "Fairly Good". This assessment is conducted based on the realization and completion of the work programs outlined in the Risk Monitoring Committee's work program and is reported to the Board of Commissioners within the Risk Monitoring Committee report.
The results of the assessment will be used as consideration by the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Risk Monitoring Committee for the next term of office.

Remuneration and Nomination Committee

Basis for Establishing the Remuneration and Nomination Committee

The establishment of the Remuneration and Nomination Committee refers to Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. The Remuneration and Nomination Committee is an organ under the Board of Commissioners that assists in the implementation of supervisory duties, particularly related to BRK Syariah's remuneration policy and the nomination function for prospective members of the Board of Commissioners and Directors of BRK Syariah.

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee has duties and responsibilities that cover 2 (two) areas, namely remuneration and nomination, including:

Terkait dengan Bidang Remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
   b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
   a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Prestasi kerja individual.
   c. Kewajaran dengan *peer group*.
   d. Perimbangan dan strategi jangka panjang Bank.
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi

Terkait dengan Bidang Nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
4. Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/KEPDK/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Dalam Piagam tersebut Bank Riau kepri Syariah telah diatur beberapa ketentuan, antara lain:

1. Tujuan
2. Dasar Hukum
3. Organisasi
   a. Kedudukan
   b. Keanggotaan
   c. Persyaratan keanggotaan
   d. Rapat
   e. Etika kerja
   f. Waktu kerja
4. Kewenangan
5. Tugas
6. Tanggung Jawab
7. Penutup.

Related to the Remuneration Field

1. Conducting an evaluation of the remuneration policy.
2. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
   a. Remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors to be submitted to the GMS.
   b. Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors
3. Ensure that the remuneration policy is at least in accordance with:
   a. Financial performance and fulfillment of reserves as regulated in applicable laws and regulations.
   b. Individual work performance.
   c. Fairness with peer group.
   d. Bank's long-term balance and strategy.
4. Conduct periodic evaluations of the implementation of remuneration policies

Related to the Nomination Field

1. Prepare and provide recommendations regarding the system and procedures for selecting and/or replacing members of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.
2. Provide recommendations regarding prospective members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Bank to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.
3. Provide recommendations regarding Independent Parties who will become Committee members to the Board of Commissioners.
4. Develop mechanisms and conduct performance assessments of the Board of Directors and Board of Commissioners

Remuneration and Nomination Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Remuneration and Nomination Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners Number 002/KEPDK/2023 dated June 27, 2023, concerning the Work Guidelines for the Remuneration & Nomination Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Audit Committee. The Bank Riau Kepri Syariah Charter stipulates several provisions, including:

1. Objective
2. Legal basis
   a. Organization
   b. Position
   c. Membership
   d. Membership requirements
   e. Meeting
   f. Work ethic
3. Working time
4. Authority
5. Task
6. Responsibility
7. Closing.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk susunan keanggotaan dan komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi BRK Syariah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, sebagai komposisi berikut

Composition and Structure of the Remuneration and Nomination Committee Members

The membership structure and composition of the BRK Syariah Remuneration and Nomination Committee is stipulated in the Board of Directors' Decree, as follows:

Tabel Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Structure, Membership, and Expertise of the Remuneration and Nomination Committee

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Decree of Determination	Keahlian Skill
Rita Anugerah*	Komisaris Independen/ Ketua Komite Independent Commissioner/ Committee Chair	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 Board of Directors Decree Number 36.A/ KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023	• Manajemen Risiko • Akuntan Profesional Perpajakan • Pengajar akademik • Risk Management • Professional AccountantTaxation • Academic instructor
Roy Prakoso	Komisaris Independen/ Ketua Komite Remunerasi & Nominasi Independent Commissioner/ Chairman of the Remuneration & Nomination Committee	SK No. 202/KEPDIR/2025 tanggal 21 November 2025 Decree No. 202/KEPDIR/2025 dated November 21, 2025	Bidang Perbankan Banking Sector
Muhammad Affan	Pemimpin Divisi Manajemen SDI/Anggota Komite Head of Human Resources Management Division/ Committee Member	SK No. 202/KEPDIR/2025 tanggal 21 November 2025 Decree No. 202/KEPDIR/2025 dated November 21, 2025	• Manajemen Risiko • HR Certified • Risk Management • HR Certified

* Berakhir Menjabat Sejak 25 Oktober 2025
*Term of office ended on October 25, 2025

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profile of Remuneration and Nomination Committee Members

Rita Anugerah* Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Remuneration and Nomination Committee	
Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan Her profile can be seen in the Identity and Brief History of the Board of Commissioners section in the Annual Report.	
Periode Jabatan Term of Office	Periode ke 2 (Dua) pada 18 Agustus 2023 - 18 Agustus 2027 2nd (Two) Period on August 18, 2023 - August 18, 2027
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Basis for Appointment as a Member of the Board of Commissioners	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 3. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 4. Surat OJK No. S-307/KO.053/2023 tanggal 29 September 2023 5. Akta Notaris Justitia Ferryanto, SH, MH No. 45 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 1. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 09 dated August 19, 2019 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022 3. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022 4. OJK Letter No. S-307/KO.053/2023 dated September 29, 2023 5. Notarial Deed of Justitia Ferryanto, SH, MH No. 45 dated October 23, 2025 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Basis for Appointment as Committee ChairRemuneration and Nomination	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023

* Berakhir Menjabat Sejak 25 Oktober 2025
*Term of office ended on October 25, 2025

Roy Prakoso **Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi** Member of the Remuneration and Nomination Committee	
Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan His profile can be seen in the Identity and Brief History of the Board of Commissioners section in the Annual Report.	
Periode Jabatan Term of Office	15 November 2021 s.d. 14 November 2025 15 November 2021 to 14 November 2025 23 Oktober 2025 s.d. 22 april 2026 October 23, 2025 s.d. April 22, 2026
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Basis for Appointment as a Member of the Board of Commissioners	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No. S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 5. Akta Notaris Justitia Ferryanto, SH, MH No. 45 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 1. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2. OJK Letter No. S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022 3. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022 4. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022 5. Notarial Deed of Justitia Ferryanto, SH, MH No. 45 dated October 23, 2025 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Basis for Appointment as Chair of the Remuneration and Nomination Committee	SK Direksi Nomor 202/KEPDIR/2025 tanggal 21 November 2025 Directors Decree Number202/KEPDIR/2025 dated November 21, 2025

Muhammad Affan **Pemimpin Divisi MSDI/ Anggota Komite** MSDI Division Leader/Committee Member	
Kewarganegaraan Indonesia	Citizenship Indonesia
Domisili Pekanbaru, Riau	Domicile Pekanbaru, Riau
Tempat, Tanggal Lahir Cengar, 11 Juni 1970	Place and date of birth Cengar, June 11, 1970
Usia 55 Tahun	Age 55 Years
Riwayat Pendidikan Meraih gelar Sarjana bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Riau (UNRI) pada tahun 1994.	Educational background Earned a Bachelor's degree in Development Economics from the University of Riau (UNRI) in 1994.
Riwayat Jabatan Bergabung di Bank Riau Kepri Syariah mulai tahun 1996. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai: • Pemimpin Cabang Teluk Kuantan (Apr 2014 - Mei 2017) • Pemimpin Cabang Bangkinang (Mei 2017 - Jul 2019) • Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah (Jul 2019 - Jan 2021) • Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (Jan 2021 - Agust 2022) • Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (Agust 2022 - Jul 2023) • Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan (Jul 2023 – Mei 2024) • Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan Merangkap Tugas Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (Mei 2024 - Sekarang)	• Job History Joined Bank Riau Kepri Syariah in 1996. Some of the positions he has held include: • Teluk Kuantan Branch Manager (Apr 2014 - May 2017) • Bangkinang Branch Manager (May 2017 - Jul 2019) • Head of Micro, Small & Medium Enterprises Division (Jul 2019 - Jan 2021) • Head of Human Resources Management Division (Jan 2021 - Aug 2022) • Head of Human Resources Management Division (August 2022 - July 2023) • Head of Planning & Finance Division (Jul 2023 – May 2024) • Head of Planning & Finance Division Concurrently Serves as Head of Human Resource Management Division (May 2024 - Present)
Dasar Pengangkatan SK Direksi No. 36.A/KEPDIR/2023 tanggal 24 Maret 2023	Basis of Appointment Board of Directors Decree No. 36.A/KEPDIR/2023 dated March 24, 2023
Periode Jabatan 2025 s.d. sekarang	Term of Office 2025 to present

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi secara independen melapor dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham, sebagaimana tabel berikut:

Independence of the Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee independently reports to and is accountable to the Board of Commissioners in carrying out its duties. The independence of the Remuneration and Nomination Committee members is reflected in their family relationships, financial relationships, management relationships, and share ownership, as shown in the following table:

Aspek Independensi Independence Aspect	Rita Anugerah Rita Anugerah	Roy Prakoso Roy Prakoso	Muhammad Affan Muhammad Affan
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Does not have any management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have any share ownership relationship in the company	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Not having any family relationship with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow members of the Audit Committee	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not serving as a political party administrator, official or government official	√	√	√

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi BRK Syariah telah menyelenggarakan rapat dengan tanggal, agenda dan peserta rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Remuneration and Nomination Committee Meeting

During 2025, the BRK Syariah Remuneration and Nomination Committee held meetings with the following dates, agendas and meeting participants with the following frequency and attendance levels:

Tabel Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2025
Remuneration and Nomination Committee Meeting Schedule for 2025

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	23 Juli 2025 23 July 2025	1. Pembahasan SK Remunerasi Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Deliberation on the Decree (SK) regarding the Remuneration of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 5. Pemimpin Bagian Administrasi MSDI 6. Pemimpin Bagian Pengembangan MSDI 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Director of Compliance & Risk Management 4. Head of Human Capital Management Division 5. Head of Human Capital Administration Department 6. Head of Human Capital Development Department
2	31 Juli 2025 31 July 2025	1. Pembahasan Calon Direktur Utama PT Bank Riau Kepri Syariah 2. Hal-Hal lain yang dianggap perlu 1. Deliberation on the Nominee for President Director of PT Bank Riau Kepri Syariah 2. Other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 3. Director of Compliance & Risk Management 4. Head of Human Capital Management Division

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Meeting Attendance Rate Table

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Rita Anugerah *	2	2	100%
Roy Prakoso	2	2	100%
Muhammad Affan	2	2	100%

* Berakhir Menjabat Sejak 25 Oktober 2025
*Term of office ended on October 25, 2025

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2025

Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan rekomendasi yakni Rekomendasi Calon Pengurus PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2025

1. Pembahasan SK Remunerasi Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
2. Pembahasan Calon Direktur Utama PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

BRK Syariah memfasilitasi program pengembangan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk meningkatkan kemampuan anggota. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

Penilaian Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris BRK Syariah setiap tahun. Hasil dari penilaian sendiri (*Self-Assesment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance Bank* atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, Mendapat peringkat Komposit 3 (tiga) artinya Komite Remunerasi daan Nominasi sudah menerapkan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan Cukup Baik. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk periode jabatan berikutnya.

Brief Report on the Implementation of Remuneration and Nomination Committee Activities in 2025

Recommendations of the Remuneration and Nomination Committee

Throughout 2025, the Remuneration and Nomination Committee submitted Recommendation for the Candidates of the Board of Management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Remuneration and Nomination Committee Activities in 2025

8. Deliberation on the Decree regarding the Remuneration of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
9. Deliberation on the Candidate for the President Director of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Competency Development of the Remuneration and Nomination Committee

BRK Syariah facilitates development programs for the Remuneration and Nomination Committee to enhance the capabilities of its members. Further details regarding the educational/training activities attended by the Remuneration and Nomination Committee throughout 2025 can be found in the Company Profile section of the Annual Report.

Performance Assessment of the Remuneration and Nomination Committee

The performance of the Remuneration and Nomination Committee is continuously evaluated by the Board of Commissioners of BRK Syariah on an annual basis. The results of the Bank's Good Corporate Governance implementation self-assessment regarding the completeness and execution of the committee's duties achieved a Composite 3 (three) rating, which means that the Remuneration and Nomination Committee has applied the principles of Good Corporate Governance "Fairly Good". This assessment is conducted based on the realization and completion of the work programs outlined in the Remuneration and Nomination Committee's work program and is reported to the Board of Commissioners within the Remuneration and Nomination Committee report.
The results of the assessment will be used as consideration by the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Remuneration and Nomination Committee for the next term of office.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ utama dalam struktur tata kelola perusahaan yang memiliki peran strategis dalam mengelola dan menjalankan kegiatan operasional Bank. Direksi bertanggung jawab secara kolegial atas seluruh kebijakan dan keputusan manajerial yang diambil dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertindak sebagai pihak yang mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas perusahaan, Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas pengelolaan Bank yang dilakukan selama periode tertentu. Pertanggungjawaban tersebut mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dengan menjalankan fungsi pengurusan secara profesional, Direksi berkomitmen untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank dikelola secara efektif, prudent, dan berkelanjutan demi menjaga kepercayaan pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Directors is the primary organ within the corporate governance structure, playing a strategic role in managing and implementing the Bank's operational activities. The Board of Directors is collectively responsible for all policies and managerial decisions taken to achieve the company's objectives. In carrying out its duties, the Board of Directors acts as the Bank's representative both inside and outside the courts, in accordance with the provisions contained in the Articles of Association and applicable laws and regulations.

As part of the company's accountability mechanism, the Board of Directors is accountable to the General Meeting of Shareholders (GMS) for the management of the Bank during a specified period. This accountability reflects the application of the principles of good corporate governance, particularly in the aspects of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. By carrying out its management functions professionally, the Board of Directors is committed to ensuring that the Bank's business activities are managed effectively, prudently, and sustainably to maintain the trust of shareholders and all stakeholders.

Pedoman Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman kerja yang berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berikut organ kelengkapannya. Pedoman kerja dan tata tertib Direksi merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi BRK Syariah dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) tata kelola Bank yang baik.

Pedoman Kerja Direksi BRK Syariah tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 215/KEPDIR/2024 tanggal 28 November 2024 Tentang Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda). Dalam Pedoman Kerja Direksi tersebut mengatur antara lain:

1. Visi dan misi
2. Tujuan
3. Fungsi
4. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi
5. Persyaratan untuk Menjadi Direksi
6. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
7. Masa Jabatan
8. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
9. Etika Kerja
10. Waktu Kerja
11. Tugas dan Tanggung Jawab

Board of Directors Work Guidelines

The Board of Directors has a work guideline that contains a compilation of corporate legal principles, applicable laws and regulations, Shareholder directives and provisions of the Articles of Association that regulate the work procedures for implementing the duties and responsibilities of the Board of Directors and its supporting organs. The work guideline and rules of procedure of the Board of Directors are the result of a codification of various regulations applicable to BRK Syariah and best practices of good bank governance.

The BRK Syariah Board of Directors' Work Guidelines are set out in the Board of Directors' Decree No. 215/KEPDIR/2024 dated November 28, 2024, concerning the Work Guidelines for the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda). The Board of Directors' Work Guidelines regulate, among other things:

1. Vision and mission
2. Objective
3. Function
4. Number, Composition, Criteria and Independence of the Board of Directors
5. Requirements to Become a Director
6. Appointment and Dismissal of Directors
7. Length of service
8. Orientation and Capability Enhancement Program
9. Work Ethics
10. Working time
11. Duties and responsibilities

12. Hak dan Kewenangan
13. Rapat Direksi
14. Pembagian Tugas antar Direksi
15. Pendelegasian Wewenang Antar Direksi
16. Komite-Komite Direksi
17. Penilaian Kinerja Direksi
18. Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
19. Penggunaan Saran Profesional

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kepengurusan Bank secara penuh.
2. Mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko dan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris yang diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Bank.
9. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Bank dan/atau pada Bank lain serta tanggal saham itu diperoleh.
10. Bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan Bank.
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang timbul berdasarkan anggaran dasar Bank, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
12. Melakukan evaluasi terhadap konerja komite di bawah Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun.

12. Rights and Authorities
13. Board of Directors Meeting
14. Division of Tasks among Directors
15. Delegation of Authority Between Directors
16. Board of Directors Committees
17. Board of Directors Performance Assessment
18. Working Relationship between the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board (DPS)
19. Use of Professional Advice

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

In general, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. Carry out full management of the Bank.
2. Representing the Bank both inside and outside court.
3. Manage the Bank in accordance with its authority and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.
4. Implementing Risk Management and Good Governance principles in all Bank business activities at all levels or levels of the organization.
5. Following up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, the results of supervision by Bank Indonesia or the Financial Services Authority and/or the results of supervision by other authorities.
6. Accountable for the implementation of his duties to shareholders through the General Meeting of Shareholders.
7. Disclosing to employees the Bank's strategic policies in the field of personnel.
8. Provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners as required in relation to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and control the implementation of Bank policies.
9. Organize and store a Special Register containing information regarding share ownership of members of the Board of Directors and Commissioners and their families in the Bank and/or other Banks and the date the shares were acquired.
10. Personally responsible for any negligence that is detrimental to the interests of the Bank.
11. Carry out the duties and responsibilities arising from the Bank's articles of association, Decisions of the General Meeting of Shareholders and as regulated in the Laws and Regulations, Bank Indonesia Regulations, Bank Indonesia Circulars, Financial Services Authority Regulations and Financial Services Authority Circulars.
12. Conduct an evaluation of the performance of committees under the Board of Directors at least at the end of each year.

13. Untuk Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, selain tugas dan tanggung jawab yang diatur secara umum di atas juga bertanggung jawab secara khusus sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

13. For the Director in charge of the Compliance function, in addition to the duties and responsibilities regulated in general above, he also has specific responsibilities as regulated in the Financial Services Authority Regulation concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.

Komposisi dan Pembagian Tugas Direksi

Seluruh anggota Direksi BRK Syariah telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Dasar pengangkatan Direksi adalah Surat Penetapan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Bank dari OJK. Selanjutnya calon anggota Direksi BRK Syariah yang telah disetujui oleh OJK ditetapkan untuk menjadi anggota Direksi di dalam RUPS Luar Biasa (RUPS LB) untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan pada RUPS LB.

Composition and Division of Duties of the Board of Directors

All members of the BRK Syariah Board of Directors have passed the Fit and Proper Test. The basis for appointment of the Board of Directors is the Letter of Determination of the Results of the Fit and Proper Test for Candidates for the Bank's Board of Directors from the OJK. Furthermore, candidates for the BRK Syariah Board of Directors who have been approved by the OJK are appointed to become members of the Board of Directors in an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) for a term of 5 (five) years starting from the date of appointment at the EGMS.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Tahun 2025
Table of Composition and Basis for Appointment of the Board of Directors in 2025

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Tanggal Efektif** Effective Date	**Periode Jabatan** Term of Office
Helwin Yunus	Direktur Pembiayaan Director of Financing	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH,MH No. 05 tanggal 13 November 2024 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas BRKS. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH,MH No.12 tanggal 29 November 2024 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Surat OJK No : SR-106/KO.154/ 2024 tanggal 18 Desember 2024. Surat OJK No : S-354/KO.154/2025 tanggal 9 Desember 2025 Akta Notaris Vivit Arisandy, SH, MKn No. 03 Tanggal 28 April 2025 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH,MH No. 05 dated November 13, 2024 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company BRKS. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 12 dated November 29, 2024 concerning the Statement of Decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. OJK Letter No: SR-106/KO.154/2024 dated December 18, 2024. OJK Letter No: S-354/KO.154/2025 dated December 9, 2025. Notarial Deed of Vivit Arisandy, SH, MKn No. 03 dated April 28, 2025 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders	29 November 2024 November 29, 2024	29 November 2024 –28 November 2029 November 29, 2024 – November 28, 2029
	Plt. Direktur Utama* Acting President Director*		28 April 2025 April 28, 2025	Terhitung tanggal 16 Mei 2025 s.d dilantiknya Direktur Utama Perseroan yang baru Effective May 16, 2025 until the inauguration of the new President Director of the Company
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Director of Compliance & Risk Management	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK. Surat OJK No. S-462/KO.053/2021 tanggal 7 Desember 2021. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of BRK. OJK Letter No. S-462/KO.053/2021 dated December 7, 2021. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022	7 Desember 2021 December 7, 2021	15 November 2021 – 14 November 2026 November 15, 2021 – November 14, 2026
M. A. Suharto	Direktur Dana & Jasa Director of Funds & Services	Surat OJK No.SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK. Surat OJK No. SR-106/KO.154/2024 tanggal 18 Desember 2024 OJK Letter No.SR-120/KO.053/2020 dated September 30, 2020. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 14 dated September 15, 2020 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of BRK. OJK Letter No. SR-106/KO.154/2024 dated December 18, 2024	30 September 2020	15 September 2020 – 14 September 2025 September 15, 2020– September 14, 2025
Said Syamsuri	Direktur Operasional Director of Operations	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK. Surat OJK No.SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 Surat OJK No. SR-106/KO.154/2024 tanggal 18 Desember 2024 Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 14 dated September 15, 2020 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of BRK. OJK Letter No.SR-120/KO.053/2020 dated September 30, 2020. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022 OJK Letter No. SR-106/KO.154/2024 dated December 18, 2024	30 September 2020	15 September 2020 – 14 September 2025 September 15, 2020– September 14, 2025

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, adalah sebagai berikut:

The duties and responsibilities of each Director as regulated in the Board of Directors' Guidelines and Work Regulations are as follows:

Tabel Pembidangan Tugas Direksi
Table of Directors' Duties

Jabatan Position	**Uraian Tugas & Tanggung Jawab**	Job Description & Responsibilities
Direktur Utama	Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan. Bersama-sama dengan Komisaris Utama menandatangani surat saham dan surat kolektif saham. Mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Menjalin hubungan dengan pihak luar antara lain dengan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank-Bank dan lembaga lainnya. Bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas dan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya, yaitu Divisi Manajemen Sumber Daya Insani, Divisi Audit Internal & Anti Fraud, dan Divisi Sekretariat Perusahaan. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank. Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkahlangkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Audit Internal. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Bank secara menyeluruh. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Bank. Menyiapkan Rencana Kerja Bank. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Bank ditutup. Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur. Berwenang mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Berwenang melakukan tindakan korektif dan/atau instruktif atas kebijakan yang telah diputuskan oleh Direktur yang menurut penilaian Direktur Utama menyimpang dari kebijakan Bank.	The President Director acts for and on behalf of the Board of Directors and represents the Bank in and out of court. Together with the Main Commissioner, sign the share certificate and collective share certificate. Binding the Bank with other parties and other parties with the Bank, and carrying out all actions, both regarding management and ownership. Establishing relationships with external parties, including Regional Governments, Government Agencies, Bank Indonesia, Financial Services Authority, Banks and other institutions. Responsible for planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of tasks and work of work units under his/her supervision, namely the Human Resources Management Division, Internal Audit & Anti-Fraud Division, and Corporate Secretary Division. Signing letters and other documents of a principal nature that may influence Bank policy. Must pay attention to and immediately take the necessary steps regarding everything stated in every audit report prepared by Internal Audit. Directing, developing and establishing the Bank's overall management strategy. Control and evaluate all Bank activities. Preparing Bank Work Plan. Submit the Annual Report to the GMS for approval within 6 (six) months after the Bank's financial year closes. Coordinate the activities and implementation of the duties of all Directors. Authorized to make decisions in the context of carrying out his duties, authority and responsibilities. Authorized to take corrective and/or instructive action on policies decided by the Director which, in the President Director's opinion, deviate from Bank policy.
Direktur Dana & Jasa	Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yangberkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi	Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the President Director is absent or prevented for any reason whatsoever, which does not need to be proven to a third party. Responsible for planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of work units under his/her supervision. Signing letters and other documents related to his/her field of work, except for very principled matters that can influence Bank policy, which must be carried out at a Board of Directors meeting.
Direktur Pembiayaan	Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi	Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the President Director is absent or prevented for any reason whatsoever, which does not need to be proven to a third party. Responsible for planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of work units under his/her supervision. Signing letters and other documents related to his/her field of work, except for very principled matters that can influence Bank policy, which must be carried out at a Board of Directors meeting.

Jabatan Position	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Job Description & Responsibilities
Direktur Operasional	Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya	Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the President Director is absent or prevented for any reason whatsoever, which does not need to be proven to a third party. Responsible for planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of work units under his/her supervision. Signing letters and other documents related to his/her field of work
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi. Selain melaksanakan tugas-tugas diatas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko berpedoman kepada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), antara lain yaitu : • Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; • Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; • Menetapkan system dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; • Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; Melakukan Tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang; • Melakukan koordinasi dengan dengan Dewan Pengawas Syariah terkait Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip syariah yang dilakukan Bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan; • Melakukan tugas-tugas lainnya yeng terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank Responsible for planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of work units under his/her supervision. Signing letters and other documents related to his/her field of work, except for very principled matters that can influence Bank policy, which must be carried out at a Board of Directors meeting. In addition to carrying out the above tasks, the implementation of the duties and responsibilities of the Director of Compliance & Risk Management is guided by the Company Guidelines (BPP) for the Implementation of the Compliance Function of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), including: • Formulating strategies to encourage the creation of a Bank Compliance Culture; • Proposing compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors; • Establishing compliance systems and procedures to be used to compile the Bank's internal provisions and guidelines; • Ensuring that all policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are based on Sharia principles in accordance with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations; • Minimizing Bank Compliance Risk; Taking preventive measures so that the policies and/or decisions taken by the Bank's Board of Directors do not deviate from Sharia principles and the provisions of laws and regulations;• Monitoring and maintaining the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and/or other authorized supervisory authorities;• Coordinating with the Sharia Supervisory Board regarding the Compliance Function towards Sharia Principles which is carried out together with the Compliance Division;• Carrying out other tasks related to the Compliance Function.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi/pengenalan mengenai BRK Syariah. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai-nilai BRK Syariah, kode etik dan pedoman tingkah laku, struktur organisasi, serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi. Kebijakan Program Orientasi bagi Direksi Baru di BRK Syariah dilakukan sebagai berikut:

1. Kepada Direktur yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan Program Orientasi mengenai Bank.
2. Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengadakan program Orientasi atau jika Direktur Utama berhalangan atau tidak ada, maka tanggung jawab pelaksanaan program Orientasi berada pada Direksi lainnya.
3. Program Orientasi yang diberikan kepada Direktur, antara lain meliputi:

Orientation Program for New Directors

Newly appointed members of the Board of Directors are given an orientation/introduction program regarding BRK Syariah. This program aims to provide an understanding of BRK Syariah's vision, mission, and values, code of ethics and guidelines for conduct, organizational structure, and the Board of Directors' work guidelines and procedures. The orientation program policy for new Directors at BRK Syariah is as follows:

1. New Directors who are appointed for the first time are required to be given an Orientation Program regarding the Bank.
2. The President Director is responsible for holding the Orientation program or if the President Director is prevented or absent, then the responsibility for implementing the Orientation program lies with the other Directors.
3. The Orientation Program provided to Directors includes, among others:

a. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan hukum;
b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh Bank;
c. Gambaran mengenai Bank berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
d. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

4. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Bank, perkenalan dengan para pejabat dan pegawai Bank serta program lainnya sesuai kebutuhan.
5. Program peningkatan kapabilitas menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang *core business Bank* di bidang perbankan dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Bank.
6. Ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi sebagai berikut:
   a. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi.
   b. Rencana untuk melakukan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi.
   c. Setiap Direktur yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar dan atau pelatihan agar menyajikan presentasi mengenai materi seminar atau pelatihan kepada Direktur lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.

Pada tahun 2025 terdapat perubahan komposisi Direksi untuk Jabatan Direktur Pembiayaan dan telah dilakukan program orientasi pengenalan bagi anggota Direksi yang baru.

Independensi Direksi

Direksi BRK Syariah tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan hubungan kepemilikan saham. Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank. Dengan demikian seluruh anggota Direksi Bank adalah independen.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat di tahun 2025 telah menyatakan independensinya dalam surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan yang ditandatangani sebagai syarat dokumen administratif dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan di OJK.

a. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors under the law;
b. Implementation of good governance principles by the Bank;
c. An overview of the Bank relating to its vision, mission, objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;
d. Information relating to delegated authority, Internal and external audits, internal control systems and policies and the Audit Committee.

4. The orientation program provided can be in the form of presentations, meetings or visits to Bank facilities, introductions to Bank officials and employees and other programs as needed.
5. The capability improvement program is important so that the Board of Directors can always follow the latest developments regarding the Bank's core business in the banking sector and always be ready to anticipate them for the Bank's sustainability and progress.
6. The provisions regarding the Capability Improvement Program for Directors are as follows:
   a. The Capability Improvement Program is implemented in order to increase the effectiveness of the implementation of the duties, authorities and responsibilities of the Board of Directors.
   b. Plans to implement the Capability Improvement Program must be included in the Board of Directors' Work Plan and Budget.
   c. Each Director who participates in a Capability Improvement Program such as a seminar or training must present the seminar or training material to other Directors in order to share information and knowledge.

In 2025, there was a change in the composition of the Board of Directors for the position of Director of Financing and an orientation program was carried out for new members of the Board of Directors.

Independence of the Board of Directors

The BRK Syariah Board of Directors has no financial, management, or shareholding relationships. All members of the Board of Directors also have no family relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or the Bank's Controlling Shareholders. Therefore, all members of the Bank's Board of Directors are independent.

All members of the Board of Directors who will serve in 2025 have declared their independence in a statement of no conflict of interest signed as a requirement for administrative documents in the Compliance and Compliance Assessment process at the OJK.

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Direksi

Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, lembaga keuangan non Bank atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Dual Positions and Conflicts of Interest of Directors

Dual Position

All members of the Board of Directors do not hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers at Banks, non-Bank financial institutions or other companies domiciled in Indonesia or abroad.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi
Table of Concurrent Positions of Directors

Direksi Board of Directors	**Jabatan** Position	**Rangkap Jabatan Pada Bank Lain** Concurrent Position at Another Bank	**Lembaga Keuangan Non Bank/ Perusahaan Lain** Non-Bank Financial Institutions/Other Companies
Helwin Yunus*	Direktur Utama President director	Tidak Ada None	Tidak Ada None
M.A. Suharto **	Direktur Dana & Jasa Director of Funds & Services	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Said Syamsuri **	Direktur Operasional Director of Operations	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Helwin Yunus	Direktur Pembiayaan Director of Financing	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Director of Compliance & Risk Management	Tidak Ada None	Tidak Ada None

*Terhitung tanggal 28 April 2025 s.d dilantiknya Direktur Utama Perseroan yang baru
*Effective April 28, 2025 until the inauguration of the new President Director of the Company
**Menjabat s.d tanggal 14 September 2025
**Serving until September 14, 2025

Benturan Kepentingan

BRK Syariah memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki potensi benturan kepentingan terhadap Bank selama tahun 2025. Dalam hal terdapat benturan kepentingan, anggota Direksi yang mengalami Benturan Kepentingan harus tetap mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul/kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta mengungkapkan kondisi Benturan Kepentingan tersebut dalam setiap keputusan/ Setiap kebijakan dan keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan akan diputuskan oleh Anggota Direksi yang tidak memiliki Benturan Kepentingan.

Apabila suatu pembahasan/usulan/keputusan merupakan wewenang mutlak dari yang bersangkutan, dan masih dalam batas kewenangan/limit transaksi dari jabatannya tersebut dan proses tersebut jika dialihkan akan menghambat proses bisnis Bank, maka pembahasan/ usulan/keputusan tetap harus dilaksanakan oleh Anggota Direksi yang bersangkutan secara profesional dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Conflict of Interest

BRK Syariah ensures that all members of the Board of Directors do not have a potential conflict of interest with the Bank during 2025. In the event of a conflict of interest, members of the Board of Directors who experience a Conflict of Interest must continue to prioritize the Bank's economic interests and prevent the Bank from losses that may arise/possible reduction in Bank profits and disclose the conditions of the Conflict of Interest in every decision/ Every policy and decision containing a Conflict of Interest will be decided by a Member of the Board of Directors who does not have a Conflict of Interest.

If a discussion/proposal/decision is within the absolute authority of the person concerned, and is still within the authority/transaction limits of the position and if the process is transferred it will hinder the Bank's business processes, then the discussion/proposal/decision must still be carried out by the relevant Board of Directors Member in a professional manner accompanied by reasons that can be accounted for and while still paying attention to the applicable provisions.

Kebijakan Pengembangan Kompetensi Direksi

Selama tahun 2025, Anggota Direksi telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya, antara lain sebagai berikut :

Board of Directors Competency Development Policy

During 2025, the Board of Directors members have attended several training/seminars and workshops related to their field of work, including the following:

Nama Name	Judul Pelatihan	Training Title	Penyelenggara Organizer	Tgl Awal Start Date	Tgl Akhir End Date
Helwin Yunus	Pelatihan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Poliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSM)	Training on the Implementation of Anti-Money Laundering Programs, Prevention of the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (APU-PPT and PPPSM)	PT. Nayottama Dinamika Indonesia (Nayottama)	23 Januari 2025 January 23, 2025	24 Januari 2025 January 24, 2025
	Pelatihan Perlindungan Data Pribadi	Personal Data Protection Training	Strategic Development Group (SDG)	14 Februari 2025 February 14, 2025	14 Februari 2025 February 14, 2025
	Workshop Penerapan Tata Kelola Syariah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah	Workshop on the Implementation of Sharia Governance at PT. Bank Riau Kepri Syariah	Karim Consulting Indonesia	04 Februari 2025 February 4, 2025	04 Februari 2025 February 4, 2025
	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi manajemen Umum Dana pensiun (MUDP)	Pension Fund General Management Certification Training and Examination (MUDP)	ADPI dan LSPDP	23 Mei 2025 May 23, 2025	25 Mei 2025 May 25, 2025
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Risk Management Certification Refreshment Level 7	ASBISINDO	11 September 2025 September 11, 2025	11 September 2025 September 11, 2025
	Pembekalan KKNI Jenjang 6C Bidang Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Dana Pensiun	KKNI Level 6C Provision for Pension Funds, Pension Fund Supervision Sub-Sector	ADPI dan LSPDP	25 September 2025 September 25, 2025	26 September 2025 September 26, 2025
	Ujian Sertifikasi Profesi KKNI Jenjang 6 Dana Pensiun Sub Bidang Pengawasan Dana Pensiun	KKNI Professional Certification Exam Level 6 Pension Fund Sub-Sector Pension Fund Supervision	Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun (LSPDP)	02 Oktober 2025 October 2, 2025	02 Oktober 2025 October 2, 2025
	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	Socialization of Gratification Control	Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)	30 Oktober 2025 October 30, 2025	30 Oktober 2025 October 30, 2025
Fajar Restu Febriansyah	Workshop Penerapan Tata Kelola Syariah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah	Workshop on the Implementation of Sharia Governance at PT. Bank Riau Kepri Syariah	Karim Consulting Indonesia	04 Februari 2025 February 4, 2025	04 Februari 2025 February 4, 2025
	Workshop Climate Risk Management, Scenario Analisys and Stress Testing	Climate Risk Management, Scenario Analysis and Stress Testing Workshop	PT Lembaga Pengembangan Profesi Risiko Manajemen Gagasan	25 Maret 2025 March 25, 2025	25 Maret 2025 March 25, 2025
	Workshop Anti Scam Collaboration	Anti Scam Collaboration Workshop	PERBANAS Institute	26 Mei 2025 May 26, 2025	27 Mei 2025 May 27, 2025
	Workshop Teknis Penyusunan Laporan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) OJK bagi BPD Se Indonesia	Technical Workshop on Preparing OJK Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) Reports for Regional Development Banks (BPD) Throughout Indonesia	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	2 Juni 2025 June 2, 2025	3 Juni 2025 June 3, 2025
	Refreshment Rencana Resulusi dan Rencana Aksi Pemulihan	Refreshment of Resolution Plan and Recovery Action Plan)	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	23 Juni 2025 June 23, 2025	24 Juni 2025 June 24, 2025
	Refreshement Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Risk Management Certification Refreshment Level 7	ASBISINDO	23 September 2025 September 23, 2025	23 September 2025 September 23, 2025
	Seminar Governance Risk and Compliance (GRC) dan Perlindungan Hukum Direksi serta Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam Rangka Akselerasi Pengembangan Bisnis dan Pembangunan Daerah	Seminar on Governance Risk and Compliance (GRC) and Legal Protection for Directors and Commissioners of Regional Development Banks (BPD) in the Context of Accelerating Business Development and Regional Development	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	25 September 2025 September 25, 2025	26 September 2025 September 26, 2025
	Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP)	Pension Fund General Management Training (MUDP)	Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)	7 Oktober 2025 October 7, 2025	10 Oktober 2025 October 10, 2025
	Workshop Meningkatkan Ketahanan Bank melalui Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM): Strategi dan Implementasi	Workshop on Improving Bank Resilience through Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM): Strategy and Implementation	Indonesian Risk Profesional Association (IRPA)	28 Oktober 2025 October 28, 2025	28 Oktober 2025 October 28, 2025
	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	Socialization of Gratification Control	Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)	30 Oktober 2025 October 30, 2025	30 Oktober 2025 October 30, 2025
	Pembekalan KKNI Jenjang 6C Bidang Dana Penisun Sub Bidang Pengawasan Dana Pensiun	Provision of KKNI Level 6C Pension Fund Sector, Pension Fund Supervision Sub-Sector	Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)	28 November 2025 November 28, 2025	29 November 2025 November 29, 2025

Nama Name	Judul Pelatihan	Training Title	Penyelenggara Organizer	Tgl Awal Start Date	Tgl Akhir End Date
M. A. Suharto*	Pelatihan Uji Kompetensi Wakil Manajer Investasi (WMI)	Investment Manager Representative (WMI) Competency Test Training	LPK Sertifikasiku / Reksa Madani Candradimuka (RMC)	1 Februari 2025 February 1, 2025	1 Maret 2025 March 1, 2025
	Sertifikasi Uji Kompetensi Wakil Manajer Investasi (WMI)	Investment Manager Representative (WMI) Competency Test Certification	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP PM)	08 Maret 2025 March 8, 2025	08 Maret 2025 March 8, 2025
	Workshop Penerapan Tata Kelola Syariah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah	Workshop on Sharia Governance Implementation at PT. Bank Riau Kepri Syariah	Karim Consulting Indonesia	4 Februari 2025 February 4, 2025	5 Februari 2025 February 5, 2025
	Workshop Climate Risk Management, Scenario Analisys and Stress Testing	Workshop on Climate Risk Management, Scenario Analysis and Stress Testing	PT. Lembaga Pengembangan Profesi Risiko Manajemen Gagasan	25 Maret 2025 March 25, 2025	25 Maret 2025 March 25, 2025
	Training Kejahatan Siber di Era Digital	Cybercrime in the Digital Era Training	Synergy Partner Prima	10 Juli 2025 July 10, 2025	11 Juli 2025 July 11, 2025
	Seminar Nasional "Pendalaman Pasar Keuangan dan Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia melalui Peningkatan Pemanfataan *Central Counterparty* (CCP) di Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA)	National Seminar "Financial Market Deepening and Strengthening the Stability of the Indonesian Financial System through Increased Utilization of Central Counterparty (CCP) in the Money and Foreign Exchange Markets (PUVA)"	Bank Indonesia	8 Agustus 2025 August 8, 2025	8 Agustus 2025 August 8, 2025
	Pelatihan dan Sertifikasi *Assesor* LSP PM	LSP PM Assessor Training and Certification	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP PM)	4 Agustus 2025 August 4, 2025	4 Agustus 2025 August 4, 2025
	Program Pemeliharaan / *Refreshement* Manajemen Risiko Jenjang 7	Level 7 Risk Management Maintenance / Refreshment Program	ASBISINDO	8 September 2025 September 8, 2025	8 September 2025 September 8, 2025
Said Syamsuri*	Simposium Think Business, Think Hong Kong	Think Business, Think Hong Kong Symposium	Perbanas Institute Jakarta	8 Januari 2025 January 8, 2025	8 Januari 2025 January 8, 2025
	Seminar *Digital & Security Forum Optimizing and Securing Scalable Infrastructure*	Digital & Security Forum Optimizing and Securing Scalable Infrastructure Seminar	PT. Multipolar	16 Januari 2025 January 16, 2025	16 Januari 2025 January 16, 2025
	Workshop "BPD *Go Digital*: Sinergi Digital dan Ketangguhan Siber dalam Mendukung Roadmap Penguatan BPD-SI"	Workshop "BPD Go Digital: Digital Synergy and Cyber Resilience in Supporting the BPD-SI Strengthening Roadmap"	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	23 Januari 2025 January 23, 2025	24 Januari 2025 January 24, 2025
	BPD Forum 2025 "*Navigation the Transformation Journey: Cost-Effective, Scalable, High-Performance and Scure Digital Systems*"	BPD Forum 2025 "Navigating the Transformation Journey: Cost-Effective, Scalable, High-Performance and Secure Digital Systems"	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	17 Februari 2025 February 17, 2025	18 Februari 2025 February 18, 2025
	Workshop Penerapan Tata Kelola Syariah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah	Workshop on Sharia Governance Implementation at PT. Bank Riau Kepri Syariah	Karim Consulting Indonesia	4 Februari 2025 February 4, 2025	5 Februari 2025 February 5, 2025
	Workshop Forum Siber BPD SI	BPD SI Cyber Forum Workshop	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	22 Mei 2025 May 22, 2025	22 Mei 2025 May 22, 2025
	Workshop Strategi Tata Kelola IA di Industri keuangan: Perspektif praktis untuk Bank Daerah	Workshop on IA Governance Strategy in the Financial Industry: Practical Perspectives for Regional Banks	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	21 Agustus 2025 August 21, 2025	21 Agustus 2025 August 21, 2025

* Menjabat s.d. tanggal 14 September 2025
*Serving until September 14, 2025

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Direksi Board of Directors	Jabatan Position	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification
M.A. Suharto	Direktur Dana & Jasa Director of Funds & Services	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2027 Level 7 Risk Management Certification, valid until March 28, 2027
Said Syamsuri	Direktur Operasional Director of Operations	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2027 Level 7 Risk Management Certification, valid until March 28, 2027
Helwin Yunus*	Direktur Pembiayaan Director of Financing	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, berlaku sampai dengan tanggal 03 Juli 2027 Level 7 Risk Management Certification, valid until July 3, 2027
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Director of Compliance & Risk Management	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, berlaku sampai dengan tanggal 03 Juli 2027 Level 7 Risk Management Certification, valid until July 3, 2027

*Memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 sejak menjabat sebagai Direktur Pembiayaan
*Obtained the Level 7 Risk Management Certification since serving as the Financing Director

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi telah diatur dalam Pedoman Kerja Direksi bagian Rapat Direksi, yaitu:

1. Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan yang dihadiri mayoritas anggota Direksi.
2. Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Direksi dan setiap Direktur yang hadir dan atau diwakili berhak memberikan suaranya dalam rapat tersebut. Rapat Direksi membicarakan mengenai hal-hal strategis, operasional atau rapat yang bersifat wacana.
4. Strategis artinya adalah hal-hal yang diputuskan dengan memerlukan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi atau Memo Direksi yang berdampak pada semua unit kerja, misalnya:
   - Perubahan sistem/kebijakan baik Sebagian atau seluruhnya.
   - Usulan-usulan yang harus dimintakan persetujuan Komisaris.
   - Usulan-usulan yang harus dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Agenda Rapat dapat diusulkan oleh masing-masing Direksi dengan menyertakan bahan tertulis untuk disiapkan undangan dan agendanya.
6. Agenda Rapat dapat ditambah dengan disertai bahan yang cukup atau dikurangi, apabila menurut urgensinya dapat dibahas pada rapat berikutnya.
7. Setiap kali rapat dibuat daftar hadir dan ditandatangani oleh semua yang hadir dalam rapat tersebut.
8. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) beserta alasan perbedaan pendapat tersebut harus dibacakan sebelum rapat ditutup, khususnya yang berkaitan dengan keputusan/kesepakatan yang diambil.
9. Risalah Rapat yang telah ditandatangani oleh seluruh yang hadir dalam Rapat, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi (termasuk yang tidak hadir dalam Rapat) serta kepada pihak-pihak terkait dengan keputusan yang diambil.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Seorang Direktur hanya dapat mewakili seorang Direktur lainnya berdasarkan surat kuasa. Direktur Utama bertindak sebagai pemimpin rapat. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.

Board of Directors Meeting

The Board of Directors' Meeting Policy has been regulated in the Board of Directors' Work Guidelines, section on Board of Directors' Meetings, namely:

1. Board of Directors meetings must be held periodically at least once a month and attended by the majority of Board of Directors members.
2. The Board of Directors is obliged to hold joint meetings with the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months.
3. Board of Directors Meeting is a meeting heldif attended by a majority of the Board of Directors members and each Director present or represented has the right to vote at the meeting. Board of Directors meetings discuss strategic, operational, or discursive matters.
4. Strategic means matters that are decided upon requiring the issuance of a Directors' Decree or Directors' Memo that have an impact on all work units, for example:
   - Changes to the system/policy, either partially or completely.
   - Proposals that must be approved by the Commissioner.
   - Proposals that must be approved by the General Meeting of Shareholders.
5. The Meeting Agenda can be proposed by each Director by including written materials to prepare the invitation and agenda.
6. The meeting agenda can be added to or reduced with sufficient material, if deemed urgent and can be discussed at the next meeting.
7. Every time there is a meeting, an attendance list is made and signed by all those present at the meeting.
8. Dissenting opinions and the reasons for these differences of opinion must be read out before the meeting is closed, especially those related to the decisions/agreements taken.
9. The minutes of the meeting, which have been signed by all those present at the meeting, are distributed to all members of the Board of Directors (including those not present at the meeting) and to parties related to the decisions taken.
10. A Board of Directors meeting is valid and has the right to make binding decisions if more than ½ (one half) of the total number of Board of Directors members are present or represented at the meeting.
11. A Director may only represent another Director by virtue of a power of attorney. The President Director shall act as the meeting leader. If the President Director is absent or prevented from attending a Board of Directors meeting for any reason, which does not require proof to a third party, then one of the Directors present and elected at the Board of Directors meeting may lead the Board of Directors meeting.

12. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
13. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi (sirkuler) dengan ketentuan semua Direktur memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
15. Hasil keputusan rapat Direksi mengikat seluruh anggota Direksi, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat, dengan dasar pertimbangan bahwa Direksi bersifat kolegial dan seluruh anggota Direksi telah diberikan kesempatan untuk mengetahui hasil rapat.

Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut :

12. All decisions in the Board of Directors Meeting are taken by deliberation to reach consensus.
13. If deliberation to reach a consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on the affirmative votes of at least more than ½ (one half) of the number of votes cast at the meeting.
14. The Board of Directors may also make valid and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting (circular), provided that all Directors provide written approval for the proposal and sign the approval. Decisions made in this manner have the same force as decisions legally taken at a Board of Directors Meeting.
15. The results of the decisions of the Board of Directors' meetings are binding on all members of the Board of Directors, both those present at the meeting and those not present at the meeting, based on the consideration that the Board of Directors is collegial and all members of the Board of Directors have been given the opportunity to know the results of the meeting.

Throughout 2025, the agenda, dates and participants of the Board of Directors Meetings are as follows:
2025 Board of Directors Meeting Table

Tabel Rapat Direksi Tahun 2025
2025 Board of Directors Meeting Table

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta	Participant
1	14 Januari 2025 January 14, 2025	Pembahasan Terkait Program Kerja Direksi Discussion Regarding the Board of Directors' Work Program	1. Direktur Operasional 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Direktur Pembiayaan 5. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 6. Pemimpin Bagian Pengembangan Divisi MSDI	1. Director of Operations 2. Director of Funds & Services 3. Director of Compliance & Risk Management 4. Director of Financing 5. Head of Human Resource Management Division 6. Head of Development Section of MSDI Division
2	24 Februari 2025 February 24, 2025	Rapat Komite MSDI MSDI Committee Meeting	1. Direktur Operasional 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Direktur Pembiayaan 5. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 6. Pemimpin Bagian Pengembangan Divisi MSDI	1. Director of Operations 2. Director of Funds & Services 3. Director of Compliance & Risk Management 4. Director of Financing 5. Head of Human Resource Management Division 6. Head of Development Section of MSDI Division
3	25 Februari 2025 February 25, 2025	Exit Meeting Audit Laporan Keuangan BRK Syariah oleh KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto (BEP) Tahun Buku 2024 Exit Meeting of BRK Syariah Financial Report Audit by Bustaman, Ezeddin & Putranto (BEP) Public Accounting Firm for Fiscal Year 2024	1. Partner in Charges KAP 2. Komisaris Independen (Rita Anugerah) 3. Komisaris Independen (Roy Prakoso) 4. Ketua Dewan Pengawas Syariah 5. Anggota Dewan Pengawas Syariah 6. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 7. Direktur Operasional 8. Direktur Pembiayaan 9. Direktur Dana & Jasa 10. Komite Audit dan Pemantau Risiko (Indarti) 11. Komite Audit dan Pemantau Risiko (Fahmi Oemar) 12. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 13. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 14. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 15. Pemimpin Bagian Divisi Umum 16. Pemimpin Bagian Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* 17. Pemimpin Bagian Divisi Operasional & Akuntansi	1. Partner in Charge of KAP 2. Independent Commissioner (Rita Anugerah) 3. Independent Commissioner (Roy Prakoso) 4. Chairman of the Sharia Supervisory Board 5. Member of the Sharia Supervisory Board 6. Director of Compliance & Risk Management 7. Director of Operations 8. Director of Financing 9. Director of Funds & Services 10. Audit and Risk Monitoring Committee (Indarti) 11. Audit and Risk Monitoring Committee (Fahmi Oemar) 12. Head of Operations & Accounting Division 13. Head of Technology & Information Systems Division 14. Head of Human Resource Management Division 15. Head of General Division 16. Head of Internal Audit & Anti Fraud Division 17. Head of Operational & Accounting Division

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta	Participant
4	26 Februari 2025 February 26, 2025	Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Riau Working Visit of the Riau Provincial DPRD	1. Ketua Komisi III DPRP Provinsi Riau 2. Wakil Ketua Komisi III DPRP Prov Riau 3. Sekretaris Komisi III DPRD Prov Riau 4. Anggota Komisi III DPRP Prov Riau 5. Ketua Dewan Pengawas Syariah 6. Direktur Operasional 7. Direktur Dana & Jasa 8. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 9. Direktur Pembiayaan 10. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 11. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 12. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	1. Chairman of Commission III of the Riau Province DPRP 2. Deputy Chairman of Commission III of the Riau Provincial DPRP 3. Secretary of Commission III of the Riau Provincial DPRD 4. Member of Commission III of the Riau Provincial DPRP 5. Chairman of the Sharia Supervisory Board 6. Director of Operations 7. Director of Funds & Services 8. Director of Compliance & Risk Management 9. Director of Financing 10. Head of Human Resource Management Division 11. Head of Planning & Finance Division 12. Head of Corporate Secretary Division
5	3 Maret 2025 March 3, 2025	Penyampaian Kebijakan SDI Delivery of SDI Policy	1. Direktur Operasional 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Direktur Pembiayaan 5. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan 7. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 8. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*	1. Director of Operations 2. Director of Funds & Services 3. Director of Compliance & Risk Management 4. Director of Financing 5. Head of Human Resource Management Division 6. Head of Compliance Division 7. Head of Risk Management Division 8. Head of Internal Audit & Anti Fraud Division
6	07 Maret 2025 March 7, 2025	Presentasi Pembahasan Permohonan Mediasi pada Unit Siber Polda Kepri dalam Perkara Peretasan/Akses Ilegal pada Aplikasi CMS Presentation of Discussion of Mediation Request to the Cyber Unit of the Kepulauan Riau Regional Police in the Case of Hacking/Illegal Access to the CMS Application	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Operasional 3. Direktur Dana & Jasa 4. Direktur Pembiayaan 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 7. Pemimpin Bagian Litigasi Divisi Hukum 8. Pemimpin Bagian Divisi Dana & Digital Banking 9. Pemimpin Bagian Divisi Manajemen Risiko 10. Pemimpin Bagian Divisi Kepatuhan	1. Director of Compliance & Risk Management 2. Director of Operations 3. Director of Funds & Services 4. Director of Financing 5. Head of Risk Management Division 6. Head of Technology & Information Systems Division 7. Head of Litigation Section of Legal Division 8. Head of Funds & Digital Banking Division 9. Head of Risk Management Division 10. Head of Compliance Division
7	26 Maret 2025 March 26, 2025	Rapat Kinerja dan Persiapan Akhir Bulan Maret 2025 Final Performance and Preparation Meeting, March 2025	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Operasional 3. Direktur Dana & Jasa 4. Direktur Pembiayaan 5. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah 6. Pemimpin Divisi Hukum 7. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 8. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* 9. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 10. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 11. Pemimpin Divisi Komersial 12. Pemimpin Divisi *Special Asset Management* 13. Pemimpin Divisi *Treasury & International Banking* 14. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 15. Pemimpin DIvisi Konsumer 16. Pemimpin Divisi Dana & *Digital Banking* 17. Pemimpin Bagian Dana & *Digital Banking* 18. Pemimpin Bagian Kepatuhan Syariah 19. Pemimpin Bagian Divisi Perencanaan & Keuangan	1. Director of Compliance & Risk Management 2. Director of Operations 3. Director of Funds & Services 4. Director of Financing 5. Head of Micro, Small & Medium Division 6. Head of Legal Division 7. Head of Operations & Accounting Division 8. Head of Internal Audit & Anti Fraud Division 9. Head of Corporate Secretary Division 10. Head of Risk Management Division 11. Head of Commercial Division 12. Head of Special Asset Management Division 13. Head of Treasury & International Banking Division 14. Head of Planning & Finance Division 15. Consumer Division Leader 16. Head of Funds & Digital Banking Division 17. Head of Funds & Digital Banking 18. Head of Sharia Compliance Section 19. Head of Planning & Finance Division
8	09 April 2025 April 9, 2025	Exit Meeting Audit Umum Divisi Konsumer tahun 2025 Exit Meeting of the 2025 Consumer Division General Audit	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Pembiayaan 3. Pemimpin Divisi Konsumer 4. Pemimpin Divisi Umum 5. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* 6. Pemimpin Bagian Sentral Admin& Staf 7. Pemimpin Bagian Pengadaan IT & Logistik Divisi Umum 8. Pemimpin Bagian Pemeliharaan Divisi Umum 9. Pemimpin Bagian Pengembangan Divisi MSDI 10. Pemimpin Bagian Sistem Prosedur & *Service Quality* 11. Pemimpin Bagian Multi Pembiayaan Konsumer & Staf 12. Ketua Tim Pra Pensiun 13. Pemimpin Bagian Audit Jaringan 14. Seluruh Tim Audit	1. Director of Compliance & Risk Management 2. Director of Financing 3. Consumer Division Leader 4. Head of General Division 5. Head of Internal Audit & Anti Fraud Division 6. Head of Central Admin & Staff Section 7. Head of IT Procurement & Logistics Section, General Division 8. Head of General Division Maintenance Section 9. Head of Development Section of MSDI Division 10. Head of System Procedure & Service Quality Section 11. Consumer Multi-Financing Section Leader & Staff 12. Head of the Pre-Retirement Team 13. Network Audit Section Leader 14. The entire audit team
9	10 April 2025 April 10, 2025	Pembahasan Penyampaian Laporan Kinerja Keuangan Dapen BRK Tahun 2024 Discussion on Submission of the 2024 BRK Pension Fund Financial Performance Report	1. Direktur Operasional 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 5. Dewan Pengawas Dana Pensiun 6. Direktur Investasi Dana Pensiun	1. Director of Operations 2. Director of Funds & Services 3. Director of Compliance & Risk Management 4. Head of Human Resource Management Division 5. Pension Fund Supervisory Board 6. Director of Pension Fund Investment

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta	Participant
10	22 April 2025 April 22, 2025	Rapat Lanjutan Persiapan Pertemuan dengan Gubernur Riau terkait RUPS tahunan tahun Buku 2024 & RUPS LB tahun 2025 Follow-up Meeting on Preparation for the Meeting with the Governor of Riau regarding the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Financial Year & the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the 2025 Financial Year	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Direktur Pembiayaan 5. Direktur Dana & Jasa 6. Direktur Operasional 7. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 8. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 9. Pemimpin Divisi Hukum 10. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	1. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 3. Director of Compliance & Risk Management 4. Director of Financing 5. Director of Funds & Services 6. Director of Operations 7. Head of Corporate Secretary Division 8. Head of Planning & Finance Division 9. Head of Legal Division 10. Head of Human Resource Management Division
11	29 April 2025 April 29, 2025	Pembagian Wewenang dan Tugas Direksi Sehubungan dengan Penunjukan Plt Direktur Utama Division of Authority and Duties of the Board of Directors in Connection with the Appointment of the Acting President Director	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Pembiayaan 3. Direktur Operasional 4. Direktur Dana & Jasa 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 7. Pemimpin Divisi Hukum 8. Pemimpin Bagian CBL Divisi Hukum 9. Pemimpin Bagian MMSDI 10. Pemimpin Bagian Kepatuhan	1. Director of Compliance & Risk Management 2. Director of Financing 3. Director of Operations 4. Director of Funds & Services 5. Head of Compliance Division 6. Head of Human Resource Management Division 7. Head of Legal Division 8. Head of CBL Section, Legal Division 9. MMSDI Section Leader 10. Compliance Section Leader
12	01 Juli 2025 July 1, 2025	1. Pembahasan Risk Appetite Statement 2025 2. Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank Desember 2024 3. Pembahasan Risiko Likuiditas April s.d Mei 2025 4. Pembahasan Operational Risk Self-Assesment (ORSA 1. Discussion of the 2025 Risk Appetite Statement 2. Discussion of Bank Health Levels in December 2024 3. Discussion of Liquidity Risk April to May 2025 4. Discussion of Operational Risk Self-Assessment (ORSA)	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Operasional 3. Direktur Dana & Jasa 4. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 5. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 6. Pemimpin Divisi Hukum 7. Pemimpin Divisi *Treasury & International Banking* 8. Pemimpin Divisi Umum 9. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 10. Pemimpin Divisi Kepatuhan 11. Pemimpin Divisi Komersial 12. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 13. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 14. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah	1. Director of Compliance & Risk Management 2. Director of Operations 3. Director of Funds & Services 4. Head of Human Resource Management Division 5. Head of Corporate Secretary Division 6. Head of Legal Division 7. Head of Treasury & International Banking Division 8. Head of General Division 9. Head of Operations & Accounting Division 10. Head of Compliance Division 11. Head of Commercial Division 12. Head of Risk Management Division 13. Head of Technology & Information Systems Division 14. Head of Micro, Small & Medium Division
13	30 Juli 2025 July 30, 2025	Pengadaan Mesin ATM ATM Machine Procurement	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Operasinal 4. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 5. Pemimpin Bagian Perencanaan & Keuangan 6. Pemimpin Bagian *Network & Monitoring* Kinerja Cabang 7. Staf Bagian Network Divisi Perencanaan & Keuangan 8. Staf Bagian Perencanaan & Keuangan	9. 1. Acting President Director 10. 2. Director of Funds & Services 11. 3. Director of Operations 12. 4. Head of Planning & Finance Division 13. 5. Head of Planning & Finance Section 14. 6. Head of Network & Branch Performance Monitoring Section 15. 7. Network Staff, Planning & Finance Division 16. 8. Planning & Finance Staff
14	30 Juli 2025 July 30, 2025	Pembahasan Pedoman Kebijakan Dividen Discussion of Dividend Policy Guidelines	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Operasional 4. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 5. Pemimpin Bagian Perencanaan & Keuangan 6. Pemimpin Bagian *Network & Monitoring* Kinerja Cabang	7. 1. Acting President Director 8. 2. Director of Funds & Services 9. 3. Director of Operations 10. 4. Head of Planning & Finance Division 11. 5. Head of Planning & Finance Section 12. 6. Head of Network & Branch Performance Monitoring Section
15	19 Agustus 2025 August 19, 2025	Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) dengan materi: 1. Laporan Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) 2. Hal-hal yang membutuhkan persetujuan KKP Financing Policy Committee (KKP) meeting with the following materials: 1. Report of the Financing Policy Committee (KKP) 2. Matters requiring KKP approval	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Komersial 5. Pemimpin Divisi *Treasury & International Banking* 6. Pemimpin Divisi *Special Asset Management* 7. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 8. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* 9. Pemimpin Divisi Konsumer 10. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah 11. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 12. Pemimpin Divisi Kepatuhan 13. Pemimpin Divisi Dana & *Digital Banking* 14. Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality* 15. Pemimpin Bagian Pengembangan Divisi Manajemen SDI	16. 1. Acting President Director 17. 2. Director of Funds & Services 18. 3. Director of Compliance & Risk Management 19. 4. Head of Commercial Division 20. 5. Head of Treasury & International Banking Division 21. 6. Head of Special Asset Management Division 22. 7. Head of Planning & Finance Division 23. 8. Head of Internal Audit & Anti Fraud Division 24. 9. Consumer Division Leader 25. 10. Head of Micro, Small & Medium Division 26. 11. Head of Operations & Accounting Division 27. 12. Head of Compliance Division 28. 13. Head of Funds & Digital Banking Division 29. 14. Head of Procedure System & Service Quality Division 30. 15. Head of Development Section of Human Resources Management Division

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta	Participant
16	27 Agustus 2025 August 27, 2025	Pembahasan Redesign Kantor Cabang Ranai Discussion on the Redesign of the Ranai Branch Office	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Operasional 3. Direktur Dana & Jasa 4. Pemimpin Divisi Umum 5. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan	1. Acting President Director 2. Director of Operations 3. Director of Funds & Services 4. Head of General Division 5. Head of Planning & Finance Division
17	29 Agustus 2025 August 29, 2025	Rapat Koordinasi Tata Kelola BRK Syariah bersama KPK RI (Zoom) Coordination Meeting on BRK Syariah Governance with the Corruption Eradication Commission (KPK RI) (Zoom)	1. Rita Anugerah (Komisaris Independen) 2. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 3. Plt Direktur Utama 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Direktur Dana & Jasa 6. Direktur Operasional 7. Komite Audit dan Pemantau Risiko 8. Pemimpin Divisi Umum 9. Pemimpin Divisi Komersial 10. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 11. Pemimpin Divisi *Special Asset Management* 12. Pemimpin Divisi Konsumer	1. Rita Anugerah (Independent Commissioner) 2. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 3. Acting President Director 4. Director of Compliance & Risk Management 5. Director of Funds & Services 6. Director of Operations 7. Audit and Risk Monitoring Committee 8. Head of General Division 9. Head of Commercial Division 10. Head of Corporate Secretary Division 11. Head of Special Asset Management Division 12. Consumer Division Leader
18	2 September 2025 September 2, 2025	Pembagian Wewenang dan Tugas Direksi Sehubungan dengan Berakhirnya Masa Jabatan Direktur Operasional dan Direktur Dana & Jasa Division of Authority and Duties of the Board of Directors in Connection with the End of the Term of Office of the Director of Operations and the Director of Funds & Services	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan 4. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 5. Pemimpin Bagian Kepatuhan, Review Kebijakan & GCG 6. Pemimpin Bagian Pengembangan SDI	1. Acting President Director 2. Director of Compliance & Risk Management 3. Head of Compliance Division 4. Head of Human Resource Management Division 5. Head of Compliance, Policy Review & GCG 6. Head of Human Resources Development Section
19	15 September 2025 September 15, 2025	1. Pemaparan Kinerja per 12 September 2025 2. Evaluasi Rapat tanggal 8 September 2025 3. Lain-Lain 1. Performance Presentation as of September 12, 2025 2. Evaluation of the Meeting on September 8, 2025 3. Others	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan & ManaJemen Risiko 3. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 4. Pemimpin Divisi Dana & *Digital Banking* 5. Pemimpin Divisi *Treasury & International Banking* 6. Pemimpin Divisi Komersial 7. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah 8. Pemimpin Divisi Konsumer 9. Pemimpin Divisi *Special Asset Management* 10. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 11. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 12. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 13. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 14. Pemimpin Divisi Umum 15. Pemimpin Divisi Hukum 16. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 17. Pemimpin Divisi Kepatuhan 18. Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality* 19. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 20. Ketua Tim Khusus Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 21. Ketua Tim Pelindungan Data Pribadi 22. Ketua Tim Pengendalian Pelaporan Internal 23. Pemimpin Bagian Perencanaan & Keuangan	1. Acting President Director 2. Director of Compliance & Risk Management 3. Head of Planning & Finance Division 4. Head of Funds & Digital Banking Division 5. Head of Treasury & International Banking Division 6. Head of Commercial Division 7. Head of Micro, Small & Medium Division 8. Consumer Division Leader 9. Head of Special Asset Management Division 10. Head of Human Resource Management Division 11. Head of Operations & Accounting Division 12. Head of Technology & Information Systems Division 13. Head of Internal Audit & Anti Fraud Division 14. Head of General Division 15. Head of Legal Division 16. Head of Risk Management Division 17. Head of Compliance Division 18. Head of Procedure System & Service Quality Division 19. Head of Corporate Secretary Division 20. Head of the Special Team for Settlement of Problematic Financing 21. Head of Personal Data Protection Team 22. Head of Internal Reporting Control Team 23. Head of Planning & Finance Section
20	19 September 2025 September 19, 2025	Tindak Lanjut Rapat tanggal 4 September 2025 (Klaim,JPN, Lelang) Follow-up to the Meeting on September 4, 2025 (Claims, JPN, Auction)	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 4. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking 5. Pemimpin Divisi Komersial 6. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah 7. Pemimpin Divisi Konsumer 8. Pemimpin Divisi *Special Asset Management* 9. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 10. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 11. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 12. Ketua Tim Khusus Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 13. Pemimpin Bagian Pengembangan Divisi Manajemen SDI 14. Pemimpin Bagian Divisi *Special Asset Management* 15. Pemimpin Bagian Litigasi Divisi Hukum 16. Pemimpin Bagian Perencanaan & Keuangan 17. Pemimpin Bagian *Network & Monitoring* Kinerja Cabang	1. Acting President Director 2. Director of Compliance & Risk Management 3. Head of Planning & Finance Division 4. Head of Funds & Digital Banking Division 5. Head of Commercial Division 6. Head of Micro, Small & Medium Division 7. Consumer Division Leader 8. Head of Special Asset Management Division 9. Head of Human Resource Management Division 10. Head of Operations & Accounting Division 11. Head of Risk Management Division 12. Head of the Special Team for Settlement of Problematic Financing 13. Head of Development Section of Human Resources Management Division 14. Head of Special Asset Management Division 15. Head of Litigation Section of Legal Division 16. Head of Planning & Finance Section 17. Head of Network & Branch Performance Monitoring Section

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta	Participant
21	30 September 2025 September 30, 2025	Tinjauan Manajemen Puncak ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Top Management Review of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan 4. Pemimpin Bagian Kepatuhan, *Review* Kebijakan & GCG 5. Pemimpin Bagian Administrasi Divisi MSDI 6. Pemimpin Bagian CLC Divisi MSDI 7. Pemimpin Bagian Umum & Pemeliharaan Divisi Umum 8. Pemimpin Bagian Audit Jaringan Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* 9. Pemimpin Bagian Audit Teknologi & Informasi Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* 10. Pemimpin Bagian PMTLHA Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* 11. Pemimpin Tim Anti *Fraud*	1. Acting President Director 2. Director of Compliance & Risk Management 3. Head of Compliance Division 4. Head of Compliance, Policy Review & GCG 5. Head of the MSDI Division Administration Section 6. Head of CLC Section, MSDI Division 7. Head of General Affairs & Maintenance Division 8. Head of Network Audit Section, Internal Audit & Anti Fraud Division 9. Head of Technology & Information Audit Section, Internal Audit & Anti Fraud Division 10. Head of PMTLHA Section, Internal Audit & Anti Fraud Division 11. Anti Fraud Team Leader
22	03 Oktober 2025 October 3, 2025	1. Strategi Pencapaian Target Akhir Tahun 2. Progress Klaim Asuransi 3. Progress Pendistribusian EDC 4. Lain-Lain yang dianggap penting 1. Strategy for Achieving Year-End Targets 2. Insurance Claim Progress 3. EDC Distribution Progress 4. Others considered important	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 4. Pemimpin Divisi Dana & *Digital Banking* 5. Pemimpin Divisi Komersial 6. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah 7. Pemimpin Divisi *Special Asset Management* 8. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 9. Pemimpin Bagian Perencanaan & Keuangan 10. Pemimpin Bagian *Network & Monitoring* Kinerja Cabang 11. Staf Divisi Operasional & Akuntansi 12. Staf Divisi Perencanaan & Keuangan	1. Acting President Director 2. Director of Compliance & Risk Management 3. Head of Planning & Finance Division 4. Head of Funds & Digital Banking Division 5. Head of Commercial Division 6. Head of Micro, Small & Medium Division 7. Head of Special Asset Management Division 8. Head of Operations & Accounting Division 9. Head of Planning & Finance Section 10. Head of Network & Branch Performance Monitoring Section 11. Operational & Accounting Division Staff 12. Planning & Finance Division Staff
23	13 Oktober 2025 October 13, 2025	1. Pemaparan Kinerja per 10 Oktober 2025 2. Tindak Lanjut Rapat Pra Exit OJK 3. Lain-Lain 1. Performance Presentation as of October 10, 2025 2. Follow-up to the OJK Pre-Exit Meeting 3. Others	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 4. Pemimpin Divisi Dana & *Digital Banking* 5. Pemimpin Divisi *Treasury & International Banking* 6. Pemimpin Divisi Komersial 7. Pemimpin Divisi Konsumer 8. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 9. Pemimpin Divisi Hukum 10. Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality* 11. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 12. Ketua Tim Khusus Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 13. Ketua Tim Pengalihan Hak & Kewajiban Nasabah 14. Ketua Tim Pelindungan Data Pribadi 15. Ketua Tim Pelindungan Data Pribadi	1. Acting President Director 2. Director of Compliance & Risk Management 3. Head of Planning & Finance Division 4. Head of Funds & Digital Banking Division 5. Head of Treasury & International Banking Division 6. Head of Commercial Division 7. Consumer Division Leader 8. Head of Technology & Information Systems Division 9. Head of Legal Division 10. Head of Procedure System & Service Quality Division 11. Head of Corporate Secretary Division 12. Head of the Special Team for Settlement of Problematic Financing 13. Head of the Customer Rights & Obligations Transfer Team 14. Head of Personal Data Protection Team 15. Head of Personal Data Protection Team
24	27 Oktober 2025 October 27, 2025	1. Pembahasan Kinerja Bank per 24 Oktober 2025 2. Lain-Lain 1. Discussion of Bank Performance as of October 24, 2025 2. Others	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 4. Pemimpin Divisi *Treasury &* International *Banking* 5. Pemimpin Divisi Komersial 6. Pemimpin Divisi Konsumer 7. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 8. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 9. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* 10. Pemimpin Divisi Umum 11. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 12. Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality* 13. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 14. Ketua Tim Pengalihan Hak & Kewajiban Nasabah 15. Ketua Tim Pelindungan Data Pribadi	1. Acting President Director 2. Director of Compliance & Risk Management 3. Head of Planning & Finance Division 4. Head of Treasury & International Banking Division 5. Head of Commercial Division 6. Consumer Division Leader 7. Head of Human Resource Management Division 8. Head of Technology & Information Systems Division 9. Head of Internal Audit & Anti Fraud Division 10. Head of General Affairs Division 11. Head of Risk Management Division 12. Head of Procedure System & Service Quality Division 13. Head of Corporate Secretary Division 14. Head of the Customer Rights & Obligations Transfer Team 15. Head of Personal Data Protection Team

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta	Participant
25	29 Oktober 2025 October 29, 2025	1. Pembahasan Profil Risiko September 2025 2. Pembahasan Risk Appetite Statement 2025 3. Pembahasan Recovery Plan 1. Risk Profile Discussion September 2025 2. Discussion of the 2025 Risk Appetite Statement 3. Discussion of the Recovery Plan	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan 5. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 6. Pemimpin Divisi Umum 7. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 8. Pemimpin Divisi *Treasury & International Banking* 9. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 10. Pemimpin Divisi Dana & *Digital Banking* 11. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 12. Pemimpin Divisi Komersial 13. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah 14. Pemimpin Divisi *Specaial Asset Management* 15. Pemimpin Divisi Konsumer 16. Pemimpin Bagian ERM Divisi Manajemen Risiko 17. Pemimpin Divisi Sistem Prosedur 18. Pemimpin Bagian Kesekretariatan & Protokoler	1. Acting President Director 2. Director of Compliance & Risk Management 3. Head of Risk Management Division 4. Head of Compliance Division 5. Head of Human Resource Management Division 6. Head of General Division 7. Head of Operations & Accounting Division 8. Head of Treasury & International Banking Division 9. Head of Planning & Finance Division 10. Head of Funds & Digital Banking Division 11. Head of Technology & Information Systems Division 12. Head of Commercial Division 13. Head of Micro, Small & Medium Division 14. Head of Special Asset Management Division 15. Consumer Division Leader 16. Head of ERM Section, Risk Management Division 17. Head of Procedure System Division 18. Head of Secretary & Protocol Section
26	06 November 2025 November 6, 2025	1. Materi pada Ekspose Evaluasi Tahunan BUMD Tahun 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Kebijakan Umum Direksi BRK Syariah Tahun 2026 1. Materials for the 2024 Annual Evaluation Exposure of BUMD PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. General Policy of the BRK Syariah Board of Directors for 2026	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 4. Pemimpin Bagian Perencaaan & Keuangan 5. Staf Divisi Perencanaan & Keuangan	1. Acting President Director 2. Director of Compliance & Risk Management 3. Head of Planning & Finance Division 4. Head of Planning & Finance Section 5. Planning & Finance Division Staff
27	07 November 2025 November 7, 2025	Tindak Lanjut Pembahasan Pencapaian Target NPF Tahun 2025 Follow-up to the Discussion on Achieving the 2025 NPF Target	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 4. Pemimpin Divisi *Dana & Digital Banking* 5. Pemimpin Divisi Konsumer 6. Pemimpin Divisi *Special Asset Management* 7. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 8. Pemimpin Bagian Bisnis Divisi Komersial 9. Pemimpin Bagian Sentral Asuransi Divisi Operasional & Akuntansi 10. Pemimpin Bagian Pembiayaan Program Divisi MKM 11. Pemimpin Bagian Perencanaan & Keuangan	1. Acting President Director 2. Director of Compliance & Risk Management 3. Head of Planning & Finance Division 4. Head of Funds & Digital Banking Division 5. Consumer Division Leader 6. Head of Special Asset Management Division 7. Head of Operations & Accounting Division 8. Head of Commercial Division Business Section 9. Head of the Central Insurance Section of the Operational & Accounting Division 10. Head of the Program Financing Section of the MKM Division 11. Head of Planning & Finance Section
28	1 Desember 2025 December 1, 2025	Pembahasan Telaah Hasil Keputusan RUPS LB 23 Oktober 2025 Discussion of the Review of the Results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 23, 2025	1. Roy Prakoso (Komisaris Independen) 2. Plt Direktur Utama 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Hukum 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Bagian Kepatuhan, *Review* Kebijakan & GCG 7. Pemimpin Bagian CBL Divisi Hukum	1. Roy Prakoso (Independent Commissioner) 2. Acting President Director 3. Director of Compliance & Risk Management 4. Head of Legal Division 5. Head of Compliance Division 6. Head of Compliance, Policy Review & GCG 7. Head of CBL Section, Legal Division
29	05 Desember 2025 December 5, 2025	Pembahasan Tindak Lanjut Pencapaian Target Tahun 2025 Discussion on Follow-up to Achieving the 2025 Target	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 4. Pemimpin Divisi Dana & *Digital Banking* 5. Pemimpin Divisi Komersial 6. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah 7. Pemimpin Divisi Konsumer 8. Pemimpin Divisi *Special Asset Management* 9. Ketua Tim Prapensiun & Non ASN Divisi Konsumer 10. Pemimpin Bagian *Network & Monitoring* Kinerja Cabang 11. Staf Divisi Perencanaan & Keuangan	1. Acting President Director 2. Director of Compliance & Risk Management 3. Head of Planning & Finance Division 4. Head of Funds & Digital Banking Division 5. Head of Commercial Division 6. Head of Micro, Small & Medium Division 7. Consumer Division Leader 8. Head of Special Asset Management Division 9. Head of the Pre-Retirement & Non-ASN Team, Consumer Division 10. Head of Network & Branch Performance Monitoring Section 11. Planning & Finance Division Staff
30	12 Desember 2025 December 12, 2025	Presentasi Permohonan Perdamaian dan Usulan Restorative Justice Presentation of the Peace Request and Restorative Justice Proposal	1. Plt Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Pemimpin Divisi Hukum 4. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 5. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan 7. Pemimpin Bagian Litigasi Divisi Hukum 8. Pemimpin Bagian Kepatuhan, *Review* Kebijakan & GCG	1. Acting President Director 2. Director of Compliance & Risk Management 3. Head of Legal Division 4. Head of Risk Management Division 5. Head of Technology & Information Systems Division 6. Head of Compliance Division 7. Head of Litigation Section of Legal Division 8. Head of Compliance, Policy Review & GCG

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Frequency and Attendance Level of Board of Directors Meetings

No	Direksi	Jumlah Rapat yang dihadiri Number of Meetings Attended	Total Rapat Direksi Total Board of Directors Meetings	Persentase Percentage	Board of Directors
1	Direktur Utama (Helwin Yunus) *	17	20	85%	President Director (Helwin Yunus) *
2	Direktur Dana & Jasa **	17	20	85%	Director of Funds & Services **
3	Direktur Pembiayaan ***	10	10	100%	Director of Financing ***
4	Direktur Operasional ****	16	20	80%	Director of Operations ****
5	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	28	31	90%	Director of Compliance & Risk Management

* Menjabat mulai April 2025
** Menjabat s.d 14 Sept 2025
*** Menjabat s.d 28 April 2025
**** Menjabat s.d 14 Sept 2025

* Serves from April 2025
** Serving until September 14, 2025
*** Serving until April 28, 2025
**** Serving until 14 Sept 2025

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2025

Selama tahun 2025, Direksi BRK Syariah telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Bank sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2025 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Bisnis Bank tahun 2025.
2. Menetapkan *Corporate Plan* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
3. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam rangka telah menjadi Bank Umum Syariah.
4. Memenuhi target kinerja Perusahaan.
5. Menyelenggarakan rapat internal Direksi dan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris maupun dengan unit kerja terkait selama tahun 2025.
6. Menyelenggarakan *Business Meeeting* tahunan dan evaluasi kinerja jaringan kantor Bank secara triwulanan.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors in 2025

Throughout 2025, the Board of Directors of BRK Syariah carried out its duties, obligations, and responsibilities in managing the Bank as mandated in the Articles of Association, applicable laws and regulations, and the Bank's established Annual Work Plan and Budget. The Board of Directors' duties throughout 2025 were generally as follows:

1. Prepare and establish the Bank's Business Plan for 2025.
2. Establishing the Corporate Plan of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
3. Establishing policies and strategic measures in line with the status as a Sharia Commercial Bank.
4. Meet the Company's performance targets.
5. Holding internal meetings of the Board of Directors and meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners and with related work units during 2025.
6. Organize annual Business Meetings and quarterly performance evaluations of the Bank's office network.

Kebijakan Pinjaman Anggota Direksi

Kebijakan Pinjaman Anggota Direksi diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 239/KEPDIR/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Kebijakan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Pengurus BRK Syariah. Di dalam kebijakan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Pembiayaan kepada Direksi,
2. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan,
3. *Plafond* dan Jangka Waktu,
4. Biaya-Biaya,
5. Proses, Wewenang Persetujuan Pembiayaan dan Pencairan,

Board of Directors Loan Policy

The Loan Policy for Board of Directors Members is regulated in Board of Directors Decree Number 239/KEPDIR/2024 dated December 27, 2024 concerning the Policy for Providing Financing Facilities to BRK Syariah Management. The policy regulates the following matters:

1. Purpose of Financing to Board of Directors,
2. Requirements for Financing Application,
3. Ceiling and Term,
4. Fees,
5. Process, Authority for Financing Approval and Disbursement,

6. Akad dan Jenis Akad, serta
7. Pembayaran Pokok dan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian tersebut merupakan hasil kerja kolegial seluruh anggota Direksi yang tercermin dalam pencapaian atas Rencana Bisnis Bank (RBB) yang menjadi target kinerja BRK Syariah setiap tahun. Selain itu, keberhasilan kinerja Direksi dapat diukur melalui hasil penilaian tata kelola Bank umum syariah dan juga tingkat kesehatan Bank yang mencakup antara lain aspek profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas , dan permodalan Bank.

Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan oleh Pemegang Saham melalui RUPS bersamaan dengan persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan dalam menjalankan fungsi pengurusan Bank yang telah dijalankan selama tahun buku 2025.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan tata kelola Bank yaitu Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (*Self-Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja sesuai dengan SEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Parameter penilaian kinerja Direksi meliputi prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola BRK Syariah. Selain melalui penilaian sendiri (*Self-Assessment*), penilaian dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025.

6. Contract and Type of Contract, and
7. Principal Payment and Repayment Before Maturity.

Board of Directors Performance Assessment

The Board of Directors' performance is assessed at the General Meeting of Shareholders (GMS). This assessment is the result of the collective work of all members of the Board of Directors, reflected in the achievement of the Bank's Business Plan (RBB), which serves as the annual performance target for BRK Syariah. Furthermore, the Board of Directors' performance can be measured through the assessment of the governance of Islamic commercial banks and the bank's health level, which includes, among other aspects, risk profile, good corporate governance, rentability, and bank capital.

The performance assessment of the Board of Directors is also carried out by Shareholders through the GMS together with the approval of the Annual Report and Financial Statements for the 2025 financial year which have been audited by a Public Accounting Firm (KAP) by providing full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for actions in carrying out the Bank's management functions that have been carried out during the 2025 financial year.

Board of Directors Performance Assessment Criteria

Evaluation of the Board of Directors' performance is carried out using the parameters for implementing Bank governance, namely the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, with 3 (three) aspects of governance assessment, namely the Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome aspects.

Board of Directors Performance Assessment Procedure

The Board of Directors' performance assessment is conducted through a self-assessment report on the implementation of Good Corporate Governance submitted to the OJK periodically with reference to OJK Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning the Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance is conducted using a Working Paper in accordance with the SEOJK concerning the Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The parameters for assessing the performance of the Board of Directors include the principles of implementing Good Corporate Governance related to the overall function in managing Sharia BRK. Apart from self-assessment, assessment and full release of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out during the 2025 financial year.

Pihak Penilai Kinerja

Assesment dilakukan melalui laporan *Self-Assesment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* semesteran yang dilakukan oleh internal BRK Syariah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Performance Appraisal Party

The assessment is carried out through a semi-annual self-assessment report on the implementation of Good Corporate Governance conducted internally by BRK Syariah, to be subsequently submitted to the Financial Services Authority.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Results of the Board of Directors' Performance Assessment

Tabel Penilaian Kinerja Direksi (*Self-Assesment*)
Table of Directors Performance Assessment (Self-Assessment)

Parameter GCG GCG Parameters	Governance Structure	Governance Process	Governance Outcome	**Peringkat** Rating
				Komposit Composite
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi *Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors*	3	3	3	3 (Cukup Baik) 3 (Fairly Good)

Peringkat 3 (tiga) artinya adalah:
Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah melakukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang secara umum Cukup Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Direksi.

Selama tahun 2025, BRK Syariah telah melakukan *Self-Assessment* (penilaian sendiri) terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi berdasarkan *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* dengan hasil penilaian berada pada peringkat komposit 3 (tiga) atau Cukup Baik

Pengungkapan kebijakan *Self-Assessment* atas kinerja Direksi ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi prinsip transparansi, namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Direksi.

Rating 3 (three) means:
The Committees under the Board of Commissioners, in the execution of their duties and responsibilities, have carried out the implementation of Good Corporate Governance which is generally Fairly Good. This is reflected by the adequate fulfillment of Good Corporate Governance principles. In the event of weaknesses in the implementation of Good Corporate Governance principles, such weaknesses are generally insignificant and can be resolved through normal actions by the Committees under the Board of Commissioners. During 2025, BRK Syariah has conducted a self-assessment of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors based on governance structure, governance process and governance outcome with the assessment results at a composite rating of 3 (three) or Fairly Good.

The disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Directors is carried out not only to fulfill the principle of transparency, but also as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide confidence to shareholders regarding the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Directors.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya citra positif dan reputasi BRK Syariah di mata para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memastikan terselenggaranya komunikasi yang efektif, transparan, dan tepat waktu antara Bank dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, serta memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan relevan bagi para pemangku kepentingan.

Sekretaris Perusahaan juga bertindak sebagai penghubung utama antara BRK Syariah dengan regulator, khususnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui peran tersebut, Sekretaris Perusahaan mendukung penerapan prinsip keterbukaan informasi, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, serta berkontribusi dalam memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga kepercayaan publik terhadap BRK Syariah secara berkelanjutan.

The Corporate Secretary plays a strategic role in supporting the positive image and reputation of BRK Syariah in the eyes of stakeholders. In carrying out this function, the Corporate Secretary is responsible for ensuring effective, transparent, and timely communication between the Bank and various parties, both internal and external, and ensuring the availability of accurate and relevant information for stakeholders.

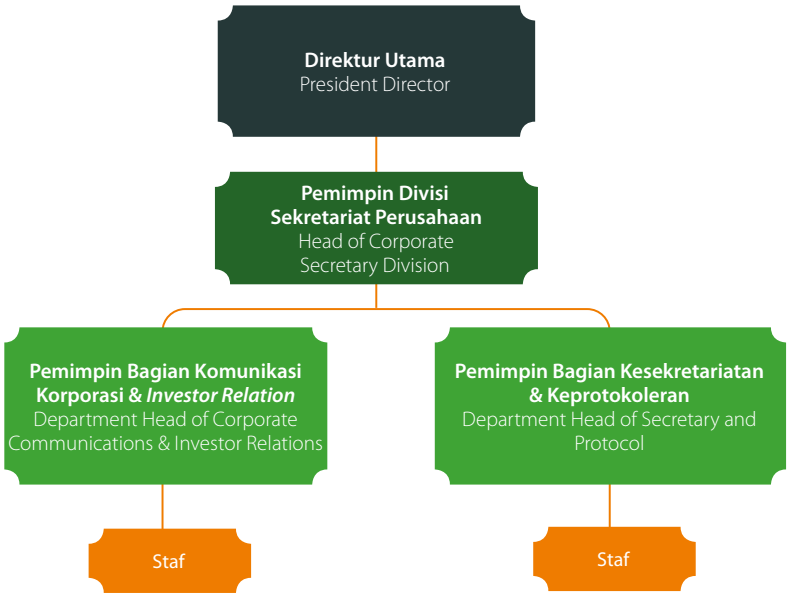
The Corporate Secretary also serves as the primary liaison between BRK Syariah and regulators, particularly Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK), as well as the public and other stakeholders. Through this role, the Corporate Secretary supports the implementation of the principle of information transparency, ensures compliance with applicable regulations, and contributes to strengthening the implementation of good corporate governance and maintaining public trust in BRK Syariah on an ongoing basis.

Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan

Dalam struktur organisasi, Sekretariat Perusahaan merupakan unit kerja setingkat satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Corporate Secretary Organizational Structure

In the organizational structure, the Corporate Secretary is a work unit at the unit level which is under and directly responsible to the President Director, with the following organizational structure:



Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile



TENGKU MUHAMMAD FADHLY KHOLIS

Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
Vice President of Corporate Secretary Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Pekanbaru, 10 Februari 1974. Usia 51 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan sejak November 2025 berdasarkan SK No.185/KEPDIR/2025.

Indonesian Citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Pekanbaru, February 10, 1974. Aged 51 as of December 31, 2025. Serving as the Vice President of Corporate Secretary since November 2025 based on Decree No. 185/KEPDIR/2025.

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi pada Universitas Sumatera Utara pada tahun 1998.

Pengalaman Kerja

Memulai karir di PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) pada tahun 2000. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pgs.Pemimpin Divisi SKAI (Ags 2013 s/d Mar 2014)
- Pemimpin Cabang Pasir Pangaraian (Mar 2014 s/d Ags 2015)
- Pemimpin Cabang Tanjung Balai Karimun (Ags 2015 s/d Mei 2017)
- Pemimpin Cabang Teluk Kuantan (Mei 2017 s/d Jul 2019)
- Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci (Jul 2019 s/d Jan 2021)
- Pemimpin Bagian Pengadaan Divisi Umum (Jan 2021 s/d Ags 2021)
- Pemimpin Bagian Pengadaan IT & Logistik Divisi Umum (Ags 2021 s/d Mei 2023)
- Tim *Task Force* Penyelesaian Pembiayaan (Mei 2023 s/d Jun 2023)
- Pemimpin Bagian Penyelesaian *Asset Management* Divisi *Special Asset Management* (Jun 2023 s/d Jan 2024)
- Pemimpin Bagian *Anti Money Laundering* (AML) & *Counter Terrorism Financing* (CTF) Divisi Kepatuhan (Jan 2024 s/d Apr 2025)
- Pjs. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (Apr 2025 s/d Oktober 2025)
- Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (November 2025 s/d sekarang)

Educational background

Obtained a Bachelor's Degree in Accounting from University of Sumatera Utara in 1998.

Work experience

Started a career at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) in 2000. Several positions held include:

- Act. Vice President of SKAI (Internal Audit) (Aug 2013 – Mar 2014)
- Branch Manager of Pasir Pangaraian (Mar 2014 – Aug 2015)
- Branch Manager of Tanjung Balai Karimun (Aug 2015 – May 2017)
- Branch Manager of Teluk Kuantan (May 2017 – July 2019)
- Branch Manager of Pangkalan Kerinci (July 2019 – Jan 2021)
- Head of Procurement Department, General Affairs Division (Jan 2021 – Aug 2021)
- Head of IT & Logistics Procurement Department, General Affairs Division (Aug 2021 – May 2023)
- Task Force Team for Financing Settlement (May 2023 – June 2023)
- Head of Asset Management Settlement Department, Special Asset Management Division (June 2023 – Jan 2024)
- Head of Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF) Department, Compliance Division (Jan 2024 – Apr 2025)
- Act. Vice President of Corporate Secretary (Apr 2025 – Oct 2025)
- Vice President of Corporate Secretary (November 2025 – Present)

Pengembangan Kompetensi Sekretariat Perusahaan tercantum pada Pengembangan Kapabilitas Bagi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretariat Perusahaan dan Unit Audit Internal & Anti *Fraud* dalam Bab Profil Perusahaan yang menjadi satu-kesatuan dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Perusahaan

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran unit (RKAU) Divisi Sekretariat Perusahaan.
b. Menyelenggarakan, memonitor, mengendalikan dan mengadministrasikan serta membuat laporan pelaksanaan RKAU Divisi Sekretariat Perusahaan sehubungan dengan bidang tugasnya dan kegiatan lain yang meliputi :
    1. Menjabarkan rencana kerja dan anggaran serta strategi bisnis Divisi Sekretariat Perusahaan dalam bentuk *Key Performance Indicator* (KPI).
    2. Memastikan pembuatan laporan-laporan baik yang bersifat internal maupun eksternal menyangkut Sekretariat Perusahaan.
    3. Bersinergi dengan unit bisnis dalam rangka *marketing comunication*.
    4. Memastikan tersedianya laporan yang dibutuhkan *stakeholders* secara *up to date*, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
    5. Menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan dengan tugas sebagai berikut :
        a). Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
        b). Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
        c). Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
            1). Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Media Komunikasi Bank;
            2). Penyampaian laporan berkala kepada Regulator yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perusahaan tepat waktu, antara lain Laporan Tahunan (*Annual Report*), Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*), dan laporan lainnya;
            3). Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
            4). Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapatnya;

The Development of Corporate Secretary Competencies is listed in the Development of Capability for the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary and Internal Audit & Anti-Fraud Unit in the Company Profile Chapter which is an integral part of this Annual Report.

Duties and Responsibilities of a Corporate Secretary

a. Prepare the Work Plan and Budget (RKAU) for the Corporate Secretary Division.
b. Execute, monitor, control, and administer, as well as prepare implementation reports for the Corporate Secretary Division's RKAU regarding its scope of duties and other activities, which include:
    1. Translating the work plan, budget, and business strategy of the Corporate Secretary Division into Key Performance Indicators (KPIs).
    2. Ensuring the preparation of both internal and external reports concerning the Corporate Secretary.
    3. Synergizing with business units in the context of marketing communication.
    4. Ensuring the availability of reports required by stakeholders that are up-to-date, accurate, and accountable.
    5. Performing the function of the Corporate Secretary with the following duties:
        a). Monitoring Capital Market developments, particularly the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.
        b). Providing counsel to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector.
        c). Ensuring the implementation of corporate governance, which includes:
            1). Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Bank's Communication Media;
            2). Periodic submission of reports to Regulators as the responsibility of the Corporate Secretary in a timely manner, including the Annual Report, Sustainability Report, and other mandatory filings;
            3). Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders (GMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS);
            4). Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, as well as preparing and administering the minutes of meetings;

5). Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

d). Sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham, Regulator Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

6. Memastikan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta mengadministrasikan seluruh asli dokumen bank, seperti akta RUPS, Perjanjian Kerjasama /MoU risalah rapat Direksi dan Komisaris, dan kebijakan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memastikan pelaksanaan fungsi Humas sebagai *single contact point* hubungan antar bank dengan berbagai *stakeholders* (Pemegang Saham, Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya) berjalan dengan baik.
8. Memastikan pengelolaan hubungan dengan media dapat berjalan dengan baik sehingga konsistensi pesan dan citra perusahaan dapat terus terbentuk.
9. Memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan *Stakeholders* lainnya atas informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
10. Memberikan informasi secara aktual terhadap *issue* yang berkembang, baik yang bersifat positif maupun negatif kepada *stakeholders* termasuk media.
11. Memastikan dan menyiapkan *press release* dan pidato untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
12. Menjadi juru bicara perusahaan terkait dengan aktivitas perusahaan.
13. Mengkoordinir penyusunan dan penyampaian proposal penambahan setoran modal atau saham kepada Pemegang Saham.
14. Memonitor kegiatan penerbitan sertifikat kolektif saham Bank.
15. Memonitor setoran modal atau saham.
16. Menyusun dan mereview kebijakan pengelolaan Dana Kemitraan dan / atau Dana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dana *Qordul Hasan* bank.
17. Memastikan pengelolaan Dana Kemitraan dan / atau Dana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dana *Qordul Hasan* bank dan memantau pelaksanaan Program Kemitraan dan kepedulian sosial (*corporate social responsibility (CSR)*) serta *sponsorship* korporasi sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

5). Implementing corporate orientation programs for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

d). Serving as a liaison between the Bank and Shareholders, Financial Regulators, and other stakeholders.

6. Ensuring the management of information and documentation, as well as administering all original bank documents such as the Deed of GMS, Cooperation Agreements/MoUs, minutes of Board of Directors and Board of Commissioners meetings, and internal policies in accordance with prevailing laws and regulations.
7. Ensuring the implementation of the Public Relations function as a single contact point for relations between the bank and various stakeholders (Shareholders, Regional Government, and other related parties) to ensure smooth operations.
8. Ensuring the management of media relations proceeds effectively to maintain the consistency of the message and the corporate image.
9. Providing services to Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other Stakeholders regarding information related to the company's condition.
10. Providing actual information on developing issues, both positive and negative, to stakeholders, including the media.
11. Ensuring and preparing press releases and speeches for the Board of Directors and Board of Commissioners.
12. Serving as the corporate spokesperson regarding the company's activities.
13. Coordinating the preparation and submission of proposals for additional capital or shares to the Shareholders.
14. Monitoring the issuance of collective share certificates.
15. Monitoring capital deposits or shares.
16. Drafting and reviewing policies for the management of Partnership Funds and/or Social and Environmental Responsibility (TJSL) through Qardhul Hasan funds.
17. Ensuring the management of Partnership Funds and/or Social and Environmental Responsibility (TJSL) through Qardhul Hasan funds and monitoring the implementation of Partnership and Social Care Programs (Corporate Social Responsibility/CSR) as well as corporate sponsorship as an effort to foster stakeholders.

18. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian Laporan Tahunan (*Annual Report)* dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) bekerjasama dengan unit kerja terkait.
19. Mengkoordinasikan penyusunan *Corporate Identity Bank*.
20. Mengkoordinasikan anggaran dan mengelola aktifitas promosi bank yang bersifat *corporate event* dan berdampak kepada *corporate image* berkerjasama dengan unit kerja terkait.
21. Memastikan pengelolaan termasuk pengkinian dan publikasi secara reguler :
    a). Media Komunikasi internal, seperti: majalah internal Bank dan lain-lain
    b). Media Komunikasi Eksternal, seperti: *website*, media sosial Bank dan lain-lain.
    c). Laporan-laporan dan informasi lainnya yang wajib dimuat / dipublikasikan di media komunikasi Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Menyusun *grand design* secara kreatif pengelolaan media komunikasi perusahaan.
23. Mengkoordinasikan proses pemanfaatan media komunikasi untuk peningkatan *corporate image* perusahaan, baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun media luar ruang (*billboard*).
24. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Protokoler, Sekretaris Dewan Komisaris dan Direksi.
25. Mengkoordinasikan dan meminta rekomendasi Dewan Komisaris terkait penempatan, mutasi dan promosi Sekretaris Dewan Komisaris.
26. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan / atau Dewan Komisaris dan RUPS / LB (lokasi, undangan, rundown acara, notulen rapat, sosialisasi hasil rapat, dokumentasi rapat).
27. Mendampingi dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang melibatkan kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris.
28. Menyusun dan mereview kebijakan Pengelolaan Dokumen dan Arsip Bank.
29. Memastikan administrasi dokumen-dokumen aktif bank termasuk semua surat masuk dan keluar dalam rangka pengarsipan yang sesuai dengan aturan.
30. Memastikan administrasi dan distribusi seluruh surat atau dokumen masuk yang ditujukan kepada Bank untuk ditindaklanjuti dan memastikan seluruh surat atau dokumen yang membutuhkan tindak lanjut tersebut telah dilaksanakan oleh unit yang terkait.

18. Coordinating the preparation, publication, and distribution of the Annual Report and Sustainability Report in collaboration with relevant work units.
19. Coordinating the preparation of the Corporate Identity of the Bank.
20. Coordinating the budget and managing bank promotional activities of a corporate event nature that impact the corporate image in collaboration with relevant work units.
21. Ensuring information management, including regular updates and publications:
    a). Internal communication media, such as internal Bank magazines and others;
    b). External communication media, such as websites, social media of the Bank, and others;
    c). Other reports and information required to be published in the Bank's communication media based on prevailing laws and regulations.
22. Preparing the grand design creatively for the management of corporate communication media.
23. Coordinating the process of utilizing corporate communication media to enhance the corporate image, both in print, electronic, and outdoor media (billboards).
24. Coordinating the duties and functions of Protocol, the Secretary of the Board of Commissioners, and the Board of Directors.
25. Coordinating and requesting recommendations from the Board of Commissioners regarding the placement, rotation, and promotion of the Secretary of the Board of Commissioners.
26. Coordinating the execution of Board of Directors and/or Board of Commissioners meetings and GMS/EGMS (location, invitation, rundown, minutes, socializations of meeting results, and meeting documentation).
27. Accompanying and documenting all activities involving the presence of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
28. Drafting and reviewing policies for the Management of Bank Documents and Archives.
29. Ensuring the administration of active bank documents, including all incoming and outgoing correspondence within the framework of archiving in accordance with regulations.
30. Ensuring the administration and distribution of all incoming letters or documents addressed to the Bank for follow-up and ensuring that all letters or documents requiring follow-up have been executed by the relevant work units.

c. Merumuskan kebijakan dan pengarahan Direksi dalam suatu instruksi, ketetapan, keputusan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi staf dan pegawai baik di lingkungan Divisi Sekretariat Perusahaan maupun bank secara keseluruhan.
d. Memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan internal audit dan eksternal serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan
e. Melatih / membimbing bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, prestasi dan mutu pegawai, termasuk diantaranya mengusulkan pelatihan / *workshop*.
f. Menetapkan satu orang pegawai yang juga berfungsi sebagai *support assistance* yang bertugas antara lain sebagai administrator, pemantauan SLA dan program kerja Divisi Sekretariat Perusahaan.
g. Penetapan uraian tugas pokok untuk seluruh pegawai di Divisi Sekretariat Perusahaan.
h. Penetapan rencana kerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk sasaran kinerja individu (SKI).
i. Dalam hal Pemimpin Divisi berhalangan baik tetap maupun sementara, maka pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan fungsi Pemimpin Divisi akan dilaksanakan oleh minimal dua orang Pemimpin bagian/pejabat setingkat. Apabila di dalam suatu unit kerja (Divisi) hanya terdapat satu orang Pemimpin Bagian/pejabat setingkat maka akan dilaksanakan oleh Pemimpin Bagian/pejabat setingkat tersebut.
j. Penetapan rencana kerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk sasaran kinerja individu (SKI)
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas Divisi Sekretariat Perusahaan.

c. Formulating policies and directives of the Board of Directors in an instruction, stipulation, decision, and written procedure as a guideline for staff and employees within both the Corporate Secretary Division and the Bank as a whole.
d. Providing responses to internal and external audit findings and performing the necessary corrective follow-up actions.
e. Training/mentoring subordinates to improve skills, achievements, and quality of employees, including recommending training/workshops.

f. Appointing one employee to serve as support assistance, acting as an administrator, monitoring SLAs, and the work program of the Corporate Secretary Division.
g. Determining the main job descriptions for all employees in the Corporate Secretary Division.
h. Determining subordinate work plans outlined in the form of Individual Performance Targets (SKI).
i. In the event the Division Head is unavailable, either permanently or temporarily, the duties, responsibilities, and functions of the Division Head shall be performed by at least two Sub-Division Heads/equivalent officials. If a work unit (Division) only has one Sub-Division Head/equivalent official, it shall be performed by said official.

j. Determining subordinate work plans outlined in the form of Individual Performance Targets (SKI).
k. Executing other tasks assigned by the Board of Directors, especially those concerning the implementation of the Corporate Secretary Division's duties.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

BRK Syariah telah membentuk komite di bawah Direksi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugasnya terkait proses pengambilan keputusan. Komite di bawah Direksi terdiri dari:

1. Komite *Sharia Asset and Liability Management* (SHALMA)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Kebijakan Pembiayaan
4. Komite Sumber Daya Insani
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
6. Komite Pembiayaan

BRK Syariah has established committees under the Board of Directors to support the effective implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities by providing contributions related to the decision-making process within their respective areas of responsibility. The committees under the Board of Directors consist of:

1. Sharia Asset and Liability Management Committee (SHALMA)
2. Risk Management Committee
3. Financing Policy Committee
4. Human Resources Committee
5. Information Technology Steering Committee
6. Financing Committee

Komite SHALMA (*Sharia Asset and Liability Management*)

Komite SHALMA merupakan komite di bawah Direksi yang bertujuan meningkatkan profitabilitas BRK Syariah secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*).

Struktur dan Keanggotaan Komite SHALMA

Susunan keanggotaan Komite SHALMA BRK Syariah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 086C/ KEPDIR/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Susunan Organisasi Komite SHALMA PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) adalah sebagai berikut:

SHALMA (Sharia Asset and Liability Management) Committee

The SHALMA Committee is a committee under the Board of Directors that aims to optimally increase the profitability of BRK Syariah, as well as ensure that liquidity risk, interest rate risk, and foreign exchange risk are controlled through the establishment of asset and liability management policies and strategies.

Structure and Membership of the SHALMA Committee

The membership composition of the SHALMA BRK Syariah Committee based on the Decree of the Board of Directors Number 086C/ KEPDIR/2024 dated May 30, 2024 concerning the Organizational Structure of the SHALMA Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) is as follows:

– Ketua merangkap anggota tetap: *Chairman concurrently as a permanent member*	Direktur Utama	*President director*
– Wakil Ketua I merangkap anggota tetap: *Vice Chairman I is concurrently a permanent member*	Direktur Dana & Jasa	*Director of Funds & Services*
– Wakil Ketua II merangkap anggota tetap: *Vice Chairman II is concurrently a permanent member*	Direktur Pembiayaan	*Director of Financing*
– Wakil Ketua III merangkap anggota tetap: *Vice Chairman III is concurrently a permanent member*	Direktur Operasional	*Director of Operations*
– Wakil Ketua IV merangkap anggota tetap tanpa hak suara: *Vice Chairman IV is a non-voting permanent member:*	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	*Director of Compliance and Risk Management*
– Sekretaris merangkap anggota tetap: *Secretary concurrently a permanent member*	Pemimpin Divisi *Treasury & Internasional banking*	*Head of Treasury & International banking Division*
– Anggota tetap: *Permanent members*	Pemimpin Divisi Komersial	*Head of Commercial Division*
	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah	*Head of Micro, Small & Medium Division*
	Pemimpin Divisi Konsumer	*Head of Consumer Division*
	Pemimpin Divisi *Special Asset Management*	*Head of Special Asset Management Division*
	Pemimpin Divisi Dana & *Digital Banking*	*Head of Funds & Digital Banking Division*
	Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan	*Head of Planning & Finance Division*
	Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi	*Head of Operations & Accounting Division*
– Anggota tetap tanpa hak suara : *Non-voting permanent members:*	Pemimpin Divisi Kepatuhan	*Head of Compliance Division*
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	*Head of Risk Management Division*
– Anggota Tidak Tetap: *Non-Permanent Members*	Pemimpin Divisi Umum	*Head of General Division*
	Pemimpin Divisi Hukum	*Head of Legal Division*
	Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*	*Head of Internal Audit & Anti Fraud Division*
	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	*Head of Human Resources Management Division*
	Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	*Head of Technology & Information System Division*
	Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality*	*Head of Procedure System & Service Quality Division*
	Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	*Head of Corporate Secretary Division*

Profil anggota Komite SHALMA tercantum pada Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Tingkat Di Bawah Direksi dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan.

The profiles of the SHALMA Committee members are listed in the Profile of the Board of Directors and the Profile of Officials One Level Below the Board of Directors in the Company Profile Chapter of the Annual Report.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite SHALMA

Komite SHALMA merupakan komite pendukung Direksi dengan tugas melakukan pengelolaan *Asset and Liabilities Management* (ALMA) yang meliputi *liquidity management, gap management, forex management, earning and investment management*, dengan mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi serta dampaknya kepada posisi BRK Syariah dengan menghitung *cost of funds*, menetapkan *base lending rate/ prime landing rate* dan menetapkan *internal fund transfer price*.

Duties and Responsibilities of the SHALMA Committee

The SHALMA Committee is a supporting committee of the Board of Directors with the task of managing Asset and Liabilities Management (ALMA) which includes liquidity management, gap management, forex management, earnings and investment management, by evaluating the development and prospects of economic indicators and their impact on the position of BRK Syariah by calculating the cost of funds, determining the base lending rate/ prime landing rate and determining the internal fund transfer price.

Pelaksanaan Tugas Komite SHALMA

Sepanjang tahun 2025, Komite SHALMA telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat, dengan rincian agenda sebagai berikut:

Implementation of the SHALMA Committee's Duties

Throughout 2025, the SHALMA Committee has organized13 (thirteen)meeting times, with the agenda details as follows:

Tabel Rapat Komite ALCO/SHALMA Tahun 2025
Table of ALCO/SHALMA Committee Meetings in 2025

Tanggal Rapat Meeting Date	**Agenda Rapat**	Meeting Agenda
22 Januari 2025 January 22, 2025	1. Menetapkan *Base Financing Rate* (BFR) bulan Januari 2025 2. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Januari 2025 3. Menyetujui Pricing DPK	1. Determining the Base Financing Rate (BFR) for January 2025 2. Determine Fund Transfer Pricing (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for January 2025 3. Approve DPK Pricing
28 Februari 2025 February 28, 2025	1. Menetapkan *Base Financing Rate* (BFR) bulan Februari 2025 2. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Februari 2025 3. Menyetujui ER Pricing DPK 4. Menyetujui Pembentukan CKPN terkait Likuidasi PT Sarana Riau Ventura 5. Menyetujui membuat Kebijakan terkait cost control terhadap biaya-biaya Bank yang dilaksanakan oleh Divisi Operasional & Akuntansi bersama Divisi Perencanaan & Keuangan 6. Menyetujui Pembentukan tim untuk pengkajian, kebutuhan serta *support system* pencatatan yang dapat mengakomodir terkait pengambilan pendanaan dari PT SMF, yang terdiri dari Divisi Dana & Digital Banking, Divisi Konsumer, Divisi Treasuri dan *Internasional Banking*, Divisi Perencanaan & Keuangan, Divisi Operasional & Akuntansi, dan Divisi TSI. 7. Menyetujui Pembentukan Tim terkait Aplikasi MIS oleh Divisi Perencanaan & Keuangan	1. Determining the Base Financing Rate (BFR) for February 2025 2. Determine Fund Transfer Pricing (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for February 2025 3. Approve ER Pricing DPK 4. Approving the Formation of CKPN related to the Liquidation of PT Sarana Riau Ventura 5. Approved the creation of policies related to cost control of Bank costs implemented by the Operations & Accounting Division together with the Planning & Finance Division. 6. Approved the formation of a team for the assessment, needs and support of a recording system that can accommodate the withdrawal of funding from PT SMF, consisting of the Funds & Digital Banking Division, Consumer Division, Treasury and International Banking Division, Planning & Finance Division, Operations & Accounting Division, and TSI Division. 7. Approved the Formation of a Team related to MIS Applications by the Planning & Finance Division
25 Maret 2025 March 25, 2025	1. Menetapkan *Base Financing Rate* (BFR) bulan Maret 2025 2. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Maret 2025 3. Menyetujui Pricing DPK dari Divisi Dana & *Digital Banking*	1. Determining the Base Financing Rate (BFR) for March 2025 2. Determine Fund Transfer Pricing / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for March 2025 3. Approving DPK Pricing from the Funds & Digital Banking Division
30 April 2025 April 30, 2025	1. Menetapkan *Base Financing Rate* (BFR) April 2025 2. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan April 2025 3. Menyetujui Pricing DPK dari Divisi Dana & *Digital Banking* untuk bulan April-Mei 2025 4. Usulan Pembiayaan Sindikasi PT PNM setuju untuk ditindaklanjuti	1. Establishing the Base Financing Rate (BFR) for April 2025 2. Determine Fund Transfer Pricing (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for April 2025 3. Approved the DPK Pricing from the Funds & Digital Banking Division for April-May 2025 4. PT PNM's Syndicated Financing Proposal agreed to be followed up
Mei 2025 May 2025	1. Menetapkan *Base Financing Rate* (BFR) Mei 2025 2. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Mei 2025 3. Usulan Pricing DPK dari Divisi Dana & Digital Banking bulan Mei 2025 4. Promo Uang Muka (DP) Pembiayaan Kepemilikan Emas Nol Persen 5. Perubahan Biaya Titip/Ujrah Pembiayaan Rahn Emas	1. Establishing the Base Financing Rate (BFR) for May 2025 2. Establish Fund Transfer Pricing (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for May 2025 3. Proposed DPK Pricing from the Funds & Digital Banking Division for May 2025 4. Zero Percent Down Payment (DP) Promo for Gold Ownership Financing 5. Changes in Entrustment/Ujrah Fees for Rahn Emas Financing

Tanggal Rapat Meeting Date	**Agenda Rapat**	Meeting Agenda
23 Juni 2025 June 23, 2025	1. Perhitungan *Base Financing Rate* (BFR) Juni 2025 2. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Juni 2025 3. Menyetujui pricing DPK dari Divisi Dana & *Digital Banking* untuk bulan Juni-Juli 2025	1. Calculation of the Base Financing Rate (BFR) for June 2025 2. Determine Fund Transfer Pricing (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for June 2025 3. Approved the DPK pricing from the Funds & Digital Banking Division for June-July 2025
29 Juli 2025 July 29, 2025	1. Menetapkan *Base Financing Rate* (BFR) bulan Juli 2025 2. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Juli 2025 untuk posisi long 7,50% p.a dan posisi short 6,50 p.a 3. Menyetujui Pricing DPK dari Divisi Dana & *Digital Banking* untuk bulan Juli - Agustus 2025 4. Menyetujui usulan pricing pembiayaan Sindikasi dari Divisi Komersial	1. Determining the Base Financing Rate (BFR) for July 2025 2. Determine Fund Transfer Pricing (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for July 2025 for long positions at 7.50% pa and short positions at 6.50 pa 3. Approved the DPK Pricing from the Funds & Digital Banking Division for July - August 2025 4. Approve the proposed pricing for syndicated financing from the Commercial Division
25 Agustus 2025 August 25, 2025	1. Menetapkan *Base Financing Rate* (BFR) bulan Agustus 2025 2. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Agustus 2025 untuk posisi long 7,25 % p.a dan posisi short 6,25 % p.a 3. Divisi Perencanaan & Keuangan diminta memberikan laporan kepada Direksi terkait *cost control* 4. Menyetujui Pemberian pricing DPK dari Divisi Dana & *Digital Banking* untuk bulan Agustus - September 2025 5. Menyetujui perubahan *counter* nisbah deposito mudharabah 6. Menyetujui pemberian pricing special nisbah/ER Deposito iB valas sampai bulan Desember 2025 setara ER 4 % - 5% dengan nominal mulai USD 1 juta dengan jangka waktu 1,3 dan 6 bulan. 7. Menyetujui Penyesuaian *Pricing* Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) dengan melakukan pemisahan pricing dari pricing pembiayaan konsumer lainnya yaitu 11% p.a anuitas dengan jangka waktu 1 s.d 5 tahun. 8. Divisi Dana & *Digital Banking* diminta melakukan *review* terhadap *pricing* nisbah *counter* produk tabungan	1. Determining the Base Financing Rate (BFR) for August 2025 2. Determine Fund Transfer Pricing (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for August 2025 for long positions at 7.25% pa and short positions at 6.25% pa 3. The Planning & Finance Division is asked to provide a report to the Board of Directors regarding cost control. 4. Approved the provision of DPK pricing from the Funds & Digital Banking Division for August - September 2025 5. Approve changes to the mudharabah deposit counter ratio 6. Approved the provision of special pricing ratio/ER for iB foreign currency deposits until December 2025 equivalent to ER 4% - 5% with a nominal starting from USD 1 million with a term of 1, 3 and 6 months. 7. Approved the Pricing Adjustment for Gold Ownership Financing (PKE) by separating the pricing from other consumer financing pricing, namely 11% pa annuity with a term of 1 to 5 years. 8. The Funds & Digital Banking Division was asked to review the pricing ratio for savings product counters.
29 September 2025 September 29, 2025	1. Menetapkan *Base Financing Rate* (BFR) bulan September 2025 2. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Oktober 2025 untuk posisi long tetap sebesar 7% dan posisi *short* tetap sebsar 6% 3. Menyetujui Pemberian Pricing DPK dari Divisi Dana & *Digital Banking* untuk bulan September - Oktober 2025	1. Determining the Base Financing Rate (BFR) for September 2025 2. Determine the Fund Transfer Pricing / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for October 2025 for long positions to remain at 7% and short positions to remain at 6%. 3. Approved the Pricing of DPK from the Funds & Digital Banking Division for September - October 2025
29 Oktober 2025 October 29, 2025	1. Menetapkan *Base Financing Rate* (BFR) bulan Oktober 2025 2. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan November 2025 3. Menyetujui Pricing DPK dari Divisi Dana & *Digital Banking* untuk bulan Oktober - November 2025 4. Menyetujui Fasilitas *Commited Line* sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dari PT Bank Syariah Indonesia	1. Determining the Base Financing Rate (BFR) for October 2025 2. Determine Fund Transfer Pricing (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for November 2025 3. Approved the DPK Pricing from the Funds & Digital Banking Division for October - November 2025 4. Approved the Committed Line Facility of Rp. 500,000,000,000 (five hundred billion rupiah) from PT Bank Syariah Indonesia
24 November 2025 November 24, 2025	1. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) untuk bulan Desember 2025 tetap sebesar 7% p.a untuk posisi long dan sebesar 6% p.a untuk posisi short. 2. Menyetujui usulan *Base Financing Rate* (BFR) untuk bulan November 2025 3. Menyetujui Usulan *Pricing* DPK untuk bulan November 2025 s.d Desember 2025 4. Menyetujui usulan *pricing* Komersial berdasarkan *Base Financing Rate* saat bulan terakhir dengan tambahan spread minimal 0,5% untuk strategi harga dan kompensasi risiko pasar 5. Menyetujui usulan Biaya Sewa/Ujrah RAHN Rp. 16.000/gr/bln dan akan diberlakukan mulai 2 Januari 2026.	1. Determine the Fund Transfer Pricing / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for December 2025 to remain at 7% pa for long positions and 6% pa for short positions. 2. Approved the proposed Base Financing Rate (BFR) for November 2025 3. Approved the DPK Pricing Proposal for November 2025 to December 2025 4. Approve the proposed Commercial pricing based on the Base Financing Rate for the last month with an additional spread of at least 0.5% for pricing strategies and market risk compensation. 5. Approved the proposed RAHN Rental/Ujrah Fee of IDR 16,000/gr/month and will be implemented starting January 2, 2026.
09 Desember 2025 December 9, 2025	1. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Desember 2025 tetap sebesar 7% p.a (untuk posisi long) dan sebesar 6% p.a (untuk posisi *short*) 2. Menetapkan usulan *Base Financing Rate* (BFR) untuk bulan Desember 2025 3. Menetapkan pricing DPK untuk bulan Desember s.d Januari 2026 4. Menyetujui pelatihan ALMA untuk anggota SSG dan Komite SHALMA	1. Determine the Fund Transfer Pricing (FTP) / Inter-Office Fee (FTP/IAK) for December 2025 to remain at 7% pa (for long positions) and 6% pa (for short positions). 2. Determine the proposed Base Financing Rate (BFR) for December 2025 3. Determine DPK pricing for December to January 2026 4. Approve ALMA training for SSG and SHALMA Committee members
22 Desember 2025 December 22, 2025	Menyetujui Usulan dari Divisi Dana & Digital Banking terkait penempatan giro dengan tambahan bagi hasil untuk Giro UPT-Pengelolaan Dana Bergulir sebesar 1,80% apabila bagi hasil giro yang diberikan lebih kecil dari ekspektasi nasabah untuk giro UPT Dana Bergulir tahun 2026	Approved the proposal from the Funds & Digital Banking Division regarding the placement of current accounts with an additional profit sharing for Current Accounts of UPT-Revolving Fund Management of 1.80% if the profit sharing provided is lower than the customer's expectations for Current Accounts of UPT Revolving Fund in 2026.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi terkait dengan evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif sekaligus menjadi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha BRK Syariah yang tidak lepas dari risiko.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor No. 074/KEPDIR/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut:

Risk Management Committee

The Risk Management Committee was formed to assist the Board of Directors in carrying out its duties related to evaluating the implementation of effective risk management processes and systems while also acting as an early warning system for BRK Syariah's business activities which are not free from risk.

Structure and Membership of the Risk Management Committee

The formation of the Risk Management Committee is stipulated in the Board of Directors' Decree Number 074/KEPDIR/2023 dated May 16, 2023 concerning the Risk Management Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the following composition:

– Ketua I: *Chairman I*	Direktur Utama	President Director
– Wakil Ketua I: *Vice Chairman I*	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Director of Compliance & Risk Management
– Wakil Ketua II: *Deputy Chairman II*	Direktur Pembiayaan	Director of Financing
– Wakil Ketua III: *Deputy Chairman III*	Direktur Dana & Jasa	Director of Funds & Services
– Wakil Ketua IV: *Deputy Chairman IV*	Direktur Operasional	Director of Operational
– Sekretaris: *Secretary*	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Head of Risk Management Division
– Anggota: *Member*	Pemimpin Divisi Komersial	Head of Commercial Division
	Pemimpin Divisi Konsumer	Head of Consumer Division
	Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah	Head of Micro, Small & Medium Division
	Pemimpin Divisi *Special Asset & Management*	Head of Rescue & Financing Division
	Pemimpin Divisi Treasuri & Internasional *Banking*	Head of Treasury & International Division
	Pemimpin Divisi Dana & *Digital Banking*	Head of Funds & Services Division
	Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi	Head of Operational Division
	Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*	Head of Internal Audit & Anti-Fraud Division
	Pemimpin Divisi Kepatuhan	Head of Compliance Division
	Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan	Head of Strategic Planning Division
	Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	Head of Technology & Information Systems Division
	Pemimpin Divisi Umum	Head of General Division
	Pemimpin Divisi Hukum	Head of Legal Division
	Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	Head of Corporate Secretary Division
	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	Head of Human Resource Management Division
	Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality*	Head of Procedure System & Service Quality Division

Profil anggota Komite Manajemen Risiko tercantum pada Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan 2025.

The profiles of the Risk Management Committee members are listed in the Profile of the Board of Directors and the Profile of Officials One Level Below the Board of Directors in the Company Profile Chapter of the 2025 Annual Report.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

1. Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
2. Berwenang dan bertanggung jawab terhadap perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
3. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
4. Melakukan pembahasan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank serta pembahasan lainnya termasuk *Risk Appetite Statement* dan risiko yang signifikan.
5. Melakukan pembahasan masalah yang dianggap perlu dan sangat mendesak.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

Develop policies, strategies and guidelines for implementing risk management.
Authorized and responsible for improving or perfecting the implementation of risk management based on the results of the evaluation of the implementation of risk management.
Establish matters related to business decisions that deviate from normal procedures.
Conducting discussions on the Bank's Risk Profile and Health Level as well as other discussions including the Risk Appetite Statement and significant risks.
Conduct discussions on issues that are considered necessary and very urgent.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2025 Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan pembahasan agenda sebagaimana tabel berikut ini.

Implementation of Duties of the Risk Management Committee

Throughout 2025, the Risk Management Committee has held2 (two)meeting times with discussion of the agenda as per the following table.

Tabel Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2025
Table of 2025 Risk Management Committee Meetings

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
1 Juli 2025 July 01, 2025	Pembahasan *Risk Appetite Statement* 2025, Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank Desember 2024, Pembahasan Risiko Likuiditas April s.d. Mei 2025 dan Pembahasan *Operational Risk Self-Assesment* (ORSA)	Discussion of the 2025 Risk Appetite Statement, Discussion of the Bank's Health Level in December 2024, Discussion of Liquidity Risk from April to May 2025, and Discussion of the Operational Risk Self-Assessment (ORSA).
29 Oktober 2025 *October 29, 2025*	Pembahasan Profil Risiko September 2025, Pembahasan *Risk Appetite Statement* 2025 dan pembahasan *Recovery Plan*	Discussion of the Risk Profile in September 2025, Discussion of the 2025 Risk Appetite Statement, and Discussion of the Recovery Plan.

Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan merupakan komite pendukung Direksi dengan tugas merumuskan kebijakan pembiayaan dan saran perbaikan terkait kebijakan pembiayaan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang menyangkut sektor tersebut membutuhkan perencanaan, riset dan evaluasi mendalam.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 008/ KEPDIR/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut:

Financing Policy Committee

The Financing Policy Committee is a committee supporting the Board of Directors, tasked with formulating financing policies and providing recommendations for improvements. Therefore, policies related to this sector require in-depth planning, research, and evaluation.

Structure and Membership of the Financing Policy Committee The establishment of the Financing Policy Committee is stipulated in the Board of Directors' Decree No. 008/ KEPDIR/2024 dated January 30, 2024 concerning the Financing Policy Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the following composition:

– Ketua I: *Chairman I*	Direktur Utama	President Director
– Wakil Ketua I: *Vice Chairman I*	Direktur Pembiayaan	Director of Financing
– Wakil Ketua II: *Deputy Chairman II*	Direktur Dana & Jasa	Director of Funds & Services
– Wakil Ketua III: *Deputy Chairman III*	Direktur Operasional	Director of Operational
– Sekretaris I: *Secretary I*	Pemimpin Divisi Komersial merangkap anggota	Head of Commercial Division is concurrently a member
– Sekretaris II: *Secretary II*	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah merangkap anggota	Head of Micro, Small & Medium Division is concurrently a member
– Sekretaris III: *Secretary III*	Pemimpin Divisi Konsumer merangkap anggota	Head of Consumer Division is concurrently a member
– Anggota: *Member*	Pemimpin Divisi *Special Asset Management*	Head of Special Asset Management Division
	Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*	Head of Internal Audit & Anti-Fraud Division
	Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi	Head of Operations & Accounting Division
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Head of Risk Management Division
	Pemimpin Divisi Dana & *Digital Banking*	Head of Dana & Digital Banking Division
	Pemimpin Divisi *Treasury* & *Internasional Banking*	Head of Treasury & International Banking Division
	Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan	Head of Planning & Finance Division

Profil anggota Komite Kebijakan Pembiayaan tercantum pada Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Tingkat Di Bawah Direksi dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan 2025.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab, meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB.
3. Memantau dan mengevaluasi:
   a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
   b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan.
   c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan nasabah besar tertentu.
   d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPD.
   e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan.
   f. Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
   g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.

The profiles of the members of the Financing Policy Committee are listed in the Profile of the Board of Directors and the Profile of Officials One Level Below the Board of Directors in the Company Profile Chapter of the 2025 Annual Report.

Functions, Duties and Responsibilities of the Financing Policy Committee

The Financing Policy Committee has functions, duties and responsibilities, including:

1. Provide input to the Board of Directors in the preparation of the KPB, especially regarding the formulation of prudential principles in financing.
2. Supervise that the KPB can be implemented and carried out consistently and consequently and formulate solutions if there are obstacles/constraints in the implementation of the KPB.
3. Monitoring and evaluating:
   a. Overall development and quality of the financing portfolio.
   b. The truth of the implementation of the authority to decide on financing.
   c. The truth of the process of providing, development and quality of financing provided to parties related to the Bank and certain large customers.
   d. The truth of the implementation of BMPD provisions.
   e. Compliance with statutory provisions and other regulations in the implementation of financing provision.
   f. Settlement of problematic financing in accordance with those stipulated in the KPB.
   g. The Bank's efforts to meet the adequacy of the Allowance for Impairment Losses (CKPN).
4. Submitting written reports periodically to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding:
   a. Results of supervision of the implementation and execution of KPB.

b. Hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan.
5. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
6. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Pembiayaan

Sepanjang tahun 2025 Komite Kebijakan Pembiayaan telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan agenda sebagaimana tabel berikut ini:

b. Results of monitoring and evaluation that have been carried out.
5. Provide suggestions for improvement steps to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners.
6. In the event of any deviations in the implementation of KPB related to the fulfillment of sharia principles, a report shall also be submitted to the Sharia Supervisory Board.

Implementation of the Duties of the Financing Policy Committee

Throughout 2025, the Financing Policy Committee held meetings with agenda discussions as shown in the following table:

Tabel Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan Tahun 2025
Table of 2025 Financing Policy Committee Meetings

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
19 Agustus 2025 August 19, 2025	Rapat Komite Kebijakan (KKP) dengan materi sebagai berikut : 1.Laporan Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) 2.Hal-hal yang membutuhkan persetujuan KKP	The Policy Committee (KKP) meeting covered the following topics: 1. Report of the Financing Policy Committee (KKP) 2. Matters requiring KKP approval

Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Insani

Pembentukan Komite SDI ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 37/KEPDIR/MSDI/2023 tentang Komite Sumber Daya Insani, dengan susunan sebagai berikut:

Structure and Membership of the Human Resources Committee

The formation of the Human Resources Committee is stipulated in the Board of Directors' Decree No. 37/KEPDIR/MSDI/2023 concerning the Human Resources Committee, with the following composition:

– Ketua (merangkap Anggota): *Chairman concurrently member)*	Direktur Utama	President Director
– Anggota: *Member*	Direktur Operasional	Director of Operational
	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Director of Compliance & Risk Management
	Direktur Dana & Jasa	Director of Funds & Services
	Direktur Pembiayaan	Director of Financing
– Sekretaris *Secretary*	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (bukan Anggota)	Head of Human Resources Management Division (non-member)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya insani

Tugas dan tanggung jawab Komite SDI, meliputi:
1. Perencanaan dan penerimaan Pegawai
   a. Mempertimbangkan dan menyetujui perencanaan Pegawai
   b. Menyetujui rencana-rencana kegiatan tertentu dan waktu pelaksanaan yang diusulkan Divisi Manajemen Sumber Daya Insani
   c. Mempertimbangkan dan menyetujui anggaran SDI secara keseluruhan
   d. Mempertimbangkan ragam dan target penerimaan pegawai (jumlah dan kualifikasinya)
2. Memutus usul/rekomendasi mengenai mutasi tenaga Pimpinan.

Duties and Responsibilities of the Human Resources Committee

1. The duties and responsibilities of the SDI Committee include:
   a. Employee planning and recruitment
   b. Consider and approve Employee planningApprove specific activity plans and implementation times proposed by the Human Resources Management Division.
   c. Consider and approve the overall SDI budget
   d. Considering the variety and targets of employee recruitment (number and qualifications)
2. Decide on proposals/recommendations regarding the transfer of leadership staff.

3. Manajemen jalur karir
   a. Memutus sistem dan pelaksanaan manajemen jalur karir
   b. Menentukan program jalur karir tahunan bagi peserta manajemen jalur karir
   c. Menentukan penambahan/pengurangan peserta manajemen jalur karir
4. Manajemen imbalan
   a. Menyetujui sistem/pedoman fasilitas pegawai (*employee benefits*).
   b. Menyetujui pedoman penggajian dan pemberian imbalan lainnya.
5. Menetapkan/memutus sanksi bagi pegawai.
6. Menetapkan kebijakan sumber daya insani lainnya

Pelaksanaan Tugas Komite Sumber Daya Manusia/Insani

Sepanjang tahun 2025 Komite SDI telah menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat dengan pembahasan dengan agenda sebagai berikut:

3. Career path management
   a. Breaking down the system and implementation of career path management
   b. Determine the annual career path program for career path management participants.
   c. Determining the addition/reduction of career path management participants
4. Reward management
   a. Approve employee benefits system/guidelines.
   b. Approve payroll and other compensation guidelines.
5. Determine/decide sanctions for employees.
6. Establish other human resource policies

Implementation of Duties of the Human Resources Committee

Throughout the 2025 fiscal year, the Human Resources Committee (SDI) convened 5 (five) meetings to deliberate on the following agendas:

Tabel Rapat Komite Sumber Daya Insani Tahun 2025
Table of 2025 Human Resources Committee Meetings

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
24 Februari 2025 24 February 2025	Rapat Komite SDI	Human Resources (SDI) Committee Meeting
24 Februari 2025 24 February 2025	Pembahasan Perubahan SOTK	Deliberation on Amendments to the Organizational Structure and Governance (SOTK)
9 Mei 2025 9 May 2025	Tindaklanjut Pembahasan Perubahan SOTK	Follow-up on the Deliberation of Amendments to the Organizational Structure and Governance (SOTK)
22 Juli 2025 22 July 2025	Pembahasan Kebijakan SDI	Deliberation on Human Resources (SDI) Policies
27 Oktober 2025 27 October 2025	Pembahasan Kebutuhan Pegawai dan Pegawai Core 36	Deliberation on Manpower Requirements and Core 36 Personnel

Komite Pengarah Teknologi Infomasi (TI)

Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah komite yang bertugas memberikan pandangan dan rekomendasi tentang kebijakan pengelolaan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi BRK Syariah. Komite Pengarah TI dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 010/KEPDIR/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Komite Pengarah Teknologi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pembentukan Komite Pengarah TI ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 010/KEPDIR/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Komite Pengarah Teknologi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut:

Information Technology (IT) Steering Committee

The Information Technology Steering Committee is a committee tasked with providing views and recommendations on BRK Syariah's technology and information systems management and development policies.The IT Steering Committee was formed based on the Board of Directors' Decree Number 010/KEPDIR/2024 dated January 31, 2024 concerning the Technology Steering Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Structure and Membership of the Information Technology Steering Committee

The formation of the IT Steering Committee is stipulated in the Board of Directors' Decree Number 010/KEPDIR/2024 dated January 31, 2024 concerning the Technology Steering Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the following composition:

– Ketua: *Chairman*	Direktur Operasional	*Director of Operational*
– Sekretaris: *Secretary*	Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	*Head of Technology & Information System Division*
– Anggota: *Member*	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	*Director of Compliance & Risk Management*
	Direktur Dana & Jasa	*Director of Funds & Services*
	Direktur Pembiayaan	*Director of Financing*
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	*Head of Risk Management Division*
	Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan	*Head of Planning & Finance Division*
	Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi	*Head of Operations & Accounting Division*
– Anggota Tidak Tetap *Non-permanent Member*	Pemimpin Divisi Umum	*Head of General Division*
	Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*	*Head of Internal Audit & Anti Fraud Division*
	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	*Head of Human Resources Management Division*
	Pemimpin Divisi Dana & *Digital Banking*	*Head of Funds & Digital Banking Division*
	Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	*Head of Corporate Secretary Division*
	Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality*	*Head of Procedure System & Service Quality Division*
	Pemimpin Divisi *Treasury & Internasional Banking*	*Head of Treasury & International Division*
	Pemimpin Divisi Kepatuhan	*Head of Compliance Division*
	Pemimpin Divisi Hukum	*Head of Legal Division*
	Pemimpin Divisi Konsumer	*Head of Consumer Division*
	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah	*Head of Micro, Small & Medium Division*
	Pemimpin Divisi Komersial	*Head of Commercial Division*
	Pemimpin Divisi *Special Asset Management*	*Head of Special Asset Management Division*

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain mencakup:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana korporasi Bank
2. Kebijakan, standar dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara rencana pengembangan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi dan rencana pengembangan Teknologi Informasi.
5. Evaluasi atas efektivitas biaya teknologi Informasi terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
6. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien dan tepat waktu.
8. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Duties and Responsibilities of the Information Technology Steering Committee

Provide recommendations to the Board of Directors, including:

1. Information Technology Strategic Plan in line with the Bank's corporate plan
2. Key Information Technology policies, standards and procedures.
3. Alignment between the Information Technology development plan and the Information Technology Strategic Plan.
4. Conformity between the implementation of Information Technology development and the Information Technology development plan.
5. Evaluation of the cost-effectiveness of Information Technology in achieving planned benefits.
6. Monitoring of Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance.
7. Efforts to resolve various problems related to Information Technology that cannot be resolved by user work units and Information Technology providers effectively, efficiently and on time.
8. Adequacy and allocation of resources owned by the Bank.

Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2025 Komite Pengarah TI telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

Implementation of Duties of the Information Technology Steering Committee

Throughout the 2025 fiscal year, the IT Steering Committee convened 3 (three) meetings with the following deliberated agendas:

Tabel Rapat Komite Pengarah TI Tahun 2025
IT Steering Committee Meeting Table 2025

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
03 Juli 2025 03 July 2025	1. Rencana Perubahan dan Realisasi Rencana Strategis TI Tahun 2025 2. Efektivitas Pengelolaan *Endpoint* (PC dan Laptop) 3. Implementasi SD-WAN	1. Proposed Amendments and Realization of the 2025 IT Strategic Plan 2. Effectiveness of Endpoint Management (PCs and Laptops) 3. SD-WAN Implementation
24 November 2025 24 November 2025	1. Rencana Strategis TI Tahun 2026 s.d 2030 2. Realisasi Rencana Strategis TI Tahun 2025 3. Relokasi *Data Center* dan PKS *Core Banking System*	1. IT Strategic Plan for 2026–2030 2. Realization of the 2025 IT Strategic Plan 3. Data Center Relocation and Cooperation Agreement (PKS) for the Core Banking System
11 Desember 2025 11 December 2025	Relokasi Data Center	Data Center Relocation

Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan BRK Syariah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam memberikan masukan dan rekomendasi terkait pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan suatu pembiayaan. Komite Pembiayaan ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 019/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut:

Financing Committee

The BRK Syariah Financing Committee was formed to support the implementation of the Board of Directors' duties in providing input and recommendations regarding decision-making on approval or rejection of financing. The Financing Committee is established in the Board of Directors' Decree No. 019/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Company Guidelines (BPP) for Financing of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the following composition:

Jenjang	Komite Pembiayaan	Financing Committee	level
A. Pembiayaan dalam wewenang memutus Komite Pembiayaan (KP)	– Direksi diluar Direktur Kepatuhan – Pemimpin Divisi Pembiayaan – Pinbag terkait	– Directors excluding Compliance Director – Head of Financing Division – Relevant Branch Manager	A. Financing in the authority to decide the Financing Committee (KP)
B. Pembiayaan dalam wewenang memutus Direktur Utama	– Direktur Utama sebagai pemutus – Direktur Pembiayaan sebagai pemutus – Pemimpin Divisi Pembiayaan sebagai pemutus – Pinbag terkait sebagai pemutus – Staf sebagai pengusul	– President Director as the decider – Financing Director as the decision maker – Head of the Financing Division as the deciderRelated pinbag as the decision maker – The relevant Branch Manager as the decider – Staff as proposer	B. Financing within the deciding authority of the President Director
C. Pembiayaan dalam wewenang memutus Direktur Pembiayaan	– Direktur Pembiayaan sebagai pemutus – Pemimpin Divisi Pembiayaan sebagai pemutus – Pinbag terkait sebagai pemutus – Staf sebagai pengusul	– Director of Financing as the decision maker – Head of the Financing Division as the deciderRelated pinbag as the decision maker – The relevant Branch Manager as the decider – Staff as proposer	C. Financing in the authority to decide the Director of Financing

Jenjang	Komite Pembiayaan	Financing Committee	level
D. Pembiayaan dalam wewenang memutus Pemimpin Divisi Pembiayaan	– Pemimpin Divisi Pembiayaan sebagai pemutus – Pinbag terkait sebagai pemutus – Staf sebagai pengusul	– Head of the Financing Division as the deciderRelated – The relevant Branch Manager as the decider – Staff as proposer	D. Financing in the authority to decide the Head of Financing Division
E. Pembiayaan dalam wewenang memutus Pemimpin Cabang	– Pemimpin Cabang sebagai pemutus – Pemimpin Bagian Pembiayaan sebagai pemutus – Pemimpin Seksi Pembiayaan dan *Account Officer* (AO) sebagai pengusul	– Branch Manager as the decision maker – Financing Section Head as the decider – Financing Section Head and Account Officer (AO) as proposers	E. Financing in the authority to decide the Branch Manager
F. Pembiayaan dalam wewenang memutus Pemimpin Cabang Pembantu	– Pemimpin Cabang Pembantu sebagai pemutus – Pemimpin Seksi Pembiayaan dan *Account Officer* (AO) sebagai pengusul	– Store Head as the decision maker – Account Officer (AO) as proposer	F. Financing in the authority to decide the Branch Manager
G. Pembiayaan dalam wewenang memutus Pemimpin Kedai	– Pemimpin Kedai sebagai pemutus – *Account Officer* (AO) sebagai pengusul	– kedai Head as the decision maker – Account Officer (AO) as a proposer	G. Financing in the authority to decide the Kedai Head

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan

Untuk tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan, antara lain:

1. Membahas permohonan pembiayaan nasabah di atas plafon tertentu yang diusulkan oleh kantor Cabang dan permohonan pembiayaan sindikasi, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Keputusan Direktur Utama.
3. Rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan dilaksanakan secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki, obyektif dan mengedepankan integritas.

Jika diperlukan Komite Pembiayaan dapat melakukan koordinasi dengan Komite SHALMA dalam aspek pendanaan pembiayaan.

Pelaksanaan Tugas Komite Pembiayaan

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat penyaluran pembiayaan yang membutuhkan keputusan Komite Pembiayaan.

Duties and Responsibilities of the Financing Committee

The duties and responsibilities of the Financing Committee include:

1. Discussing customer financing applications above a certain ceiling proposed by the Branch office and syndicated financing applications, prioritizing the principle of prudence.
2. Provide recommendations for approval or rejection of financing as a consideration for the Main Director's Decision.
3. Recommendations for approval or rejection of financing are carried out professionally based on existing competencies, objectively and prioritizing integrity.

If necessary, the Financing Committee can coordinate with the SHALMA Committee regarding financing aspects.

Implementation of the Financing Committee's Duties

Throughout 2025, there was no financing distribution that required the decision of the Financing Committee.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM
AFFILIATION BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, DIRECTORS AND SHAREHOLDERS

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, tidak terdapat hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali.

Affiliated Relationship of the Board of Commissioners

During 2025, there were no affiliated relationships between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Controlling Shareholders.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Affiliation Relationship Table of the Board of Commissioners

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris														
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Rita Anugerah*	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√		√

*Menjabat s.d. tanggal 25 Oktober 2025
*Serving until 25 October 2025

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Board of Commissioners Share Ownership

Tabel Kepemilikan Saham w
Board of Commissioners Share Ownership Table

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Shareholding			
		BRK Syariah	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Non Bank Non-bank financial institutions	Perusahaan Lain Other Companies
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	PT Mahesa Prima Solusindo dengan kepemilikan saham sebesar 30%
Rita Anugerah*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*menjabat s.d. tanggal 25 Oktober 2025
*serving until 25 October 2025

Hubungan Afiliasi Direksi

Selama tahun 2025, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lainnya, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.

Affiliation Relationship of Directors

During 2025, there were no affiliated relationships between the Members of the Board of Directors and other Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and Controlling Shareholders.
Table of Affiliated Relationships of Directors

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi
Table of Affiliation of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris Financial Relations, Family and Board of Commissioners													
		Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relations With						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain Management Relations with other Companies	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Helwin Yunus	Plt Direktur Utama Act President Director		√		√		√		√		√		√		√
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Director of Compliance & Risk Management		√		√		√		√		√		√		√
M.A. Suharto*	Direktur Dana & Jasa Director of Funds & Services		√		√		√		√		√		√		√
Said Syamsuri*	Direktur Operasional Director of Operations		√		√		√		√		√		√		√

* Menjabat s.d. tanggal 14 September 2025
*Serving until September 14, 2025

Kepemilikan Saham Direksi

Board of Directors' Share Ownership

Tabel Kepemilikan Saham Direksi
Board of Directors Share Ownership Table

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Shareholding			
		BRK Syariah	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Non Bank Non-bank financial institutions	Perusahaan Lain Other Companies
Helwin Yunus	Plt Direktur Utama Act President Director	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance & Risk Management	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None
M.A. Suharto*	Direktur Dana & Jasa Director of Funds & Services	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Said Syamsuri*	Direktur Operasional Director of Operations	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None

* Menjabat s.d. tanggal 14 September 2025
*Serving until September 14, 2025

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS FREQUENCY AND ATTENDANCE MEETINGS

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi merupakan salah satu indikator penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Melalui penyelenggaraan rapat yang dilakukan secara berkala, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki forum resmi untuk membahas perkembangan kinerja perusahaan, mengevaluasi implementasi strategi, serta mengambil keputusan yang diperlukan guna menjaga kelangsungan usaha BRK Syariah.

Rapat juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah strategis yang diambil selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Informasi lebih lanjut mengenai frekuensi penyelenggaraan rapat, tingkat kehadiran anggota, serta mekanisme pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris dalam sub bagian Rapat Dewan Komisaris dan pada bagian Direksi dalam subbagian Rapat Direksi. Dengan pelaksanaan rapat yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, Perseroan berupaya menjaga proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala membahas berbagai permasalahan yang dihadapi BRK Syariah serta mengevaluasi perkembangan pelaksanaan keputusan rapat yang telah disepakati sebelumnya.

Setiap keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Direksi bersifat kolegial dan menjadi tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Pelaksanaan keputusan tersebut dipantau oleh Dewan Komisaris dan/atau komite-komite di bawah Dewan Komisaris, serta oleh Direksi dan/atau komite di bawah Direksi guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah tindak lanjut dapat dijalankan secara optimal.

The frequency and attendance of Board of Commissioners and Board of Directors meetings are important indicators of the effectiveness of the company's oversight and management functions. Through regular meetings, the Board of Commissioners and Board of Directors provides a formal forum to discuss company performance developments, evaluate strategy implementation, and make decisions necessary to maintain BRK Syariah's business continuity.

Meetings also serve as a means to strengthen coordination and communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors in ensuring that every policy and strategic step taken is aligned with the principles of good corporate governance. Further information regarding the frequency of meetings, the level of attendance of members, and the mechanism for implementing meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors can be found in the Board of Commissioners section in the Board of Commissioners Meetings subsection and in the Board of Directors section in the Board of Directors Meetings subsection. By implementing well-structured and documented meetings, the Company strives to maintain a transparent, accountable, and professional decision-making process.

Monitoring and Evaluation of Follow-up to Decisions of the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings

Monitoring and Evaluation of Follow-Up Decisions of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings is a crucial part of ensuring that every decision made in the meeting can be implemented effectively and in accordance with the established objectives. In carrying out its supervisory and advisory functions to the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Board of Directors periodically discuss various issues faced by BRK Syariah and evaluate the progress of the implementation of previously agreed meeting decisions.

Every decision made in a Board of Commissioners Meeting or a Board of Directors Meeting is collegial and is a shared responsibility to be implemented by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and relevant work units in accordance with their respective duties and authorities. The implementation of these decisions is monitored by the Board of Commissioners and/or committees under the Board of Commissioners, as well as by the Board of Directors and/or committees under the Board of Directors to ensure that every policy and follow-up step can be implemented optimally.

KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS NOMINATION AND REMUNERATION POLICY

Kebijakan dan Prosedur Nominasi

Proses nominasi dan pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi kewenangan RUPS, dengan prosedur mengacu pada Anggaran Dasar Bank serta Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Calon anggota Direksi BRK Syariah telah memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik persyaratan dan kriteria terkait aspek integritas, kompetensi, domisili, independensi, atau kriteria khusus lainnya sesuai bidang Direktur masing-masing.

Proses nominasi dan pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan proses sebagai berikut:

1. Proses Penyerahan Kewenangan oleh RUPS kepada Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia Seleksi (Pansel).
2. Proses Tahapan Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Penetapan Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah oleh RUPS Luar Biasa.
4. Proses uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan keputusan lulus atau tidak lulus calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pengangkatan Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah oleh RUPS Luar Biasa.
6. Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berpedoman pada Peraturan OJK No. 59/ POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kebijakan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan atas pertimbangan kinerja dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan kemampuan BRK Syariah.

Prosedur Penetapan Remunerasi

RUPS menetapkan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana skema berikut:

Nomination Policy and Procedures

The nomination and election process for members of the Board of Directors and Board of Commissioners is under the authority of the GMS, with procedures referring to the Bank's Articles of Association and the Work Guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners. Prospective members of the Board of Directors of BRK Syariah have met the requirements and criteria as stipulated in applicable laws and regulations, including requirements and criteria related to integrity, competence, domicile, independence, or other specific criteria according to the respective Director's field.

The nomination and election process for members of the Board of Commissioners and Directors is carried out using the following process:

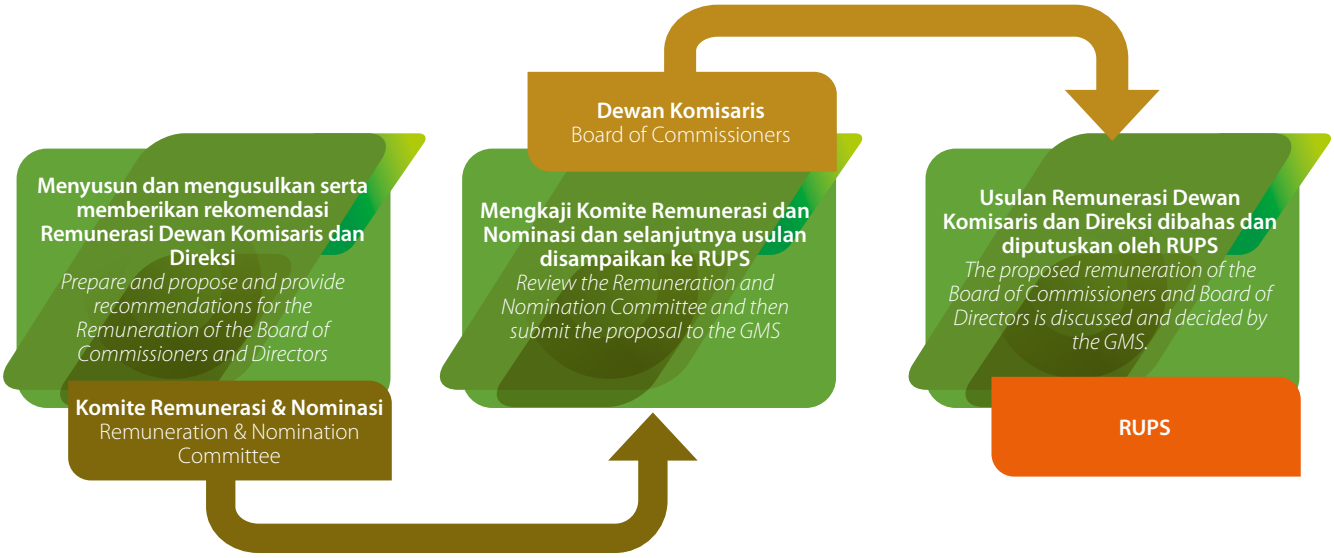
1. The process of handing over authority by the GMS to the Controlling Shareholders to form a Selection Committee (Pansel).
2. Selection Process for Candidate Members of the Board of Commissioners and Directors.
3. Determination of Candidates for members of the Board of Commissioners and Directors of BRK Syariah by the Extraordinary GMS.
4. The fit and proper test process by the Financial Services Authority and the decision to pass or fail candidates for members of the Board of Commissioners and Directors from the Financial Services Authority.
5. Appointment of Candidates for the Board of Commissioners and Directors of BRK Syariah by the Extraordinary GMS.
6. Prospective members of the Board of Commissioners and Board of Directors must obtain approval from the Financial Services Authority before carrying out their actions, duties and functions as members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Remuneration Policy

The remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors is guided by OJK Regulation No. 59/POJK.03/2017 dated December 18, 2017 concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors is determined in the General Meeting of Shareholders, which is based on consideration of the performance and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with the capabilities of BRK Syariah.

Remuneration Determination Procedure

The GMS determines the remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors of BRK Syariah by taking into account the proposals and recommendations of the Board of Commissioners with the assistance of the Remuneration and Nomination Committee, as per the following scheme:



Indikator Penetapan Remunerasi

Kebijakan remunerasi dirumuskan dengan mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab, dan level jabatan, serta bertujuan untuk menjaga mekanisme *check and balance* antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam mencapai tujuan BRK Syariah. Sistem remunerasi yang dibangun harus adil dan transparan. Adapun indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah antara lain:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Bank;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
7. Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

    a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman remunerasi Pengurus PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
    b. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
    c. Gaji Komisaris Utama sebesar 65% dari gaji Direktur Utama.
    d. Gaji anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.

Remuneration Determination Indicators

The remuneration policy is formulated by considering performance, responsibility, and position level, and aims to maintain a check-and-balance mechanism between the Board of Commissioners and the Board of Directors in achieving BRK Syariah's objectives. The remuneration system established must be fair and transparent. The indicators for determining remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors of BRK Syariah include:

1. Business scale factor;
2. Business complexity factors;
3. Inflation rate;
4. Bank's financial condition and capabilities;
5. Other relevant factors, as well
6. Not contrary to statutory regulations;
7. The composition of the Salary/Honorarium for the Board of Directors and Board of Commissioners is determined as follows:
    a. The salary of the President Director is determined using the remuneration guidelines of the Management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
    b. The salary of other members of the Board of Directors is 85% of the salary of the Main Director.
    c. The salary of the Main Commissioner is 65% of the salary of the Main Director.
    d. The salary of members of the Board of Commissioners is 90% of the salary of the Main Commissioner.

Struktur dan Nominal Remunerasi

Jenis remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah selama tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Remuneration Structure and Amount

The types of remuneration and facilities provided to all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board of BRK Syariah during 2025 can be seen as follows:

Tabel Struktur Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
Table of Remuneration Structure of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun Amount Received Within 1 Year						Types of Remuneration and Other Facilities
	Direksi Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board		
	Orang Person	Rp	Orang Person	Rp	Orang Person	Rp	
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura	4	16.664.967.942	2	6.437.718.539	2	945.872.060	Salary, bonus, regular allowance, tantiem, other fixed income and other facilities in kind
Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan,transportasi, perawatan kesehatan, dsb) yang:	-	-	-	-	-	-	Other facilities in kind (housing, transport, health care, etc.) that:
a. dapat dimiliki;	4	80.000.000	2	40.000.000	2		a. can be owned;
b.tidak dapat dimiliki	4	1.314.395.419	2	573.598.858	2		b. cannot be owned
Total		**18.059.363.361**		**7.051.317.397**		**945.872.060**	**Total**

Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam (1) satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

The remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board in (1) one year is grouped into the following income level ranges:

Tabel Rincian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
Table of Remuneration Details of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

Jumlah Remunerasi*	Jumlah Direksi Number of Directors		Jumlah Dewan Komisaris Total Board of Commissioners		Jumlah Dewan Pengawas Syariah Number of Sharia Supervisory Board		Total Remuneration*
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	
Di atas Rp2 miliar	4	3	2	0	0	0	*Above IDR 2 billion*
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	0	1	0	3	0	0	*Above IDR 2 billion*
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	0	0	0	0	1	2	*Above IDR 1 billion - IDR 2 billion*
Rp500 juta ke bawah	0	1	0	0	0	0	*IDR 500 million and below*

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)
**) received in financial form (non-natural)*

Rincian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Rincian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2025 terlihat dalam tabel berikut:

Details of Remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

Details of the remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for 2025 are shown in the following table:

No	Remunerasi	Komisaris Commissioners	Direksi *Directors*	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	Remuneration
1	Gaji	1.287.000.000	3.599.333.334	432.900.000	Salary
2	Tunj Perumahan 1	102.960.000	201.600.000	-	Housing Fee 1
3	Tunj Perumahan 2	-	96.000.000	-	Housing Fee 2
4	Fasilitas Perumahan	19.004.276	133.408.486	-	Housing Facilities
5	Fasilitas Perumahan	705.980.000	1.283.600.000	-	Housing Facilities
6	Perabotan Perlangkapan	-	-	-	Furniture Equipment
7	Kendaraan Dinas	132.714.000	618.998.700	-	Official Vehicles
8	Cuti	-	525.000.000	-	Leave
9	Perjalanan Dinas	428.010.718	1.284.590.726	68.857.612	Official Travel
10	THR	351.000.000	1.065.000.000	74.100.000	THR
11	Pakdin	68.822.000	208.815.000	43.586.760	Pakdin
12	By Telpon	15.849.653	69.975.204	-	By Phone
13	Gadget	40.000.000	80.000.000	-	Gadgets
14	THT	172.222.079	493.666.120	-	THT
15	Asuransi Purna Jabatan	1.074.590.302	2.376.352.520	-	Post-Service Insurance
16	Pembiayaan	-	19.104.000	-	Financing
17	Kesehatan	303.070.929	194.413.029	-	Health
18	Tantiem	1.309.518.940	2.781.335.984	167.636.188	Tantiem
19	Tunjangan Pajak	1.040.574.500	3.028.170.258	158.791.500	Tax Allowance
	Total	**7.051.317.397**	**18.059.363.361**	**945.872.060**	**Total**

TATA KELOLA REMUNERASI BANK
BANK REMUNERATION GOVERNANCE

Penetapan tata kelola remunerasi BRK Syariah telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasis risiko yang berpedoman pada Peraturan OJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum syariah. Adapun pengungkapan informasi terkait kebijakan remunerasi sesuai Peraturan OJK 59/POJK.03/2017 mencakup hal-hal sebagai berikut:

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

BRK Syariah telah menerbitkan Keputusan Direksi No. 133/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah dan Keputusan Direksi No. 117/KEPDIR/2025 Tentang Remunerasi Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah, dengan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, fair dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada Pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Terkait aspek remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, dan strategi jangka panjang Bank. Adapun uraian terkait nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab serta jumlah rapat Komite telah disajikan dalam Sub Bab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Laporan ini.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko Bank

BRK Syariah memandang risiko Bank menjadi faktor yang sangat mempengaruhi remunerasi yang bersifat variabel. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan OJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Remunerasi Berdasarkan Pengukuran Kinerja

Kebijakan BRK Syariah terkait dengan remunerasi berbasis pengukuran kinerja diatur dalam Keputusan Direksi No. 133/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah dan Keputusan Direksi No. 117/KEPDIR/2025 Tentang Remunerasi Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah. Bank dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat

The determination of BRK Syariah's remuneration governance has taken into account the principle of prudence in providing risk-based remuneration, guided by OJK Regulation No. 59/POJK.03/2017 dated December 18, 2017, concerning the application of remuneration for Islamic commercial banks. Disclosure of information related to remuneration policies in accordance with OJK Regulation 59/POJK.03/2017 includes the following:

Remuneration Policy Development Process

BRK Syariah has issuedBoard of Directors Decision No.133/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Remuneration Policy for the Management of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah and Board of Directors Decree No. 117/KEPDIR/2025 concerning the Remuneration of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah,by implementing a competitive, fair and risk-based remuneration system and always ensuring that no employee receives compensation below the stipulated provisions.

Remuneration and Nomination Committee

Regarding remuneration, the Remuneration and Nomination Committee is tasked with evaluating remuneration policies based on the Bank's performance, risk, and long-term strategy. Details of the committee's members, composition, duties and responsibilities, and number of meetings are presented in the Remuneration and Nomination Committee sub-chapter of this report.

Remuneration Linked to Bank Risk

BRK Syariah considers bank risk to be a significant factor influencing variable remuneration. This aligns with OJK Regulation No. 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Remuneration Based on Performance Measurement

The BRK Syariah policy regarding performance measurement-based remuneration is regulated inBoard of Directors Decree No. 133/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Remuneration Policy for the Management of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah and Board of Directors Decree No. 117/KEPDIR/2025 concerning the Remuneration of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah. Banks may postpone the payment of deferred variable remuneration (Malus) or withdraw

variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

1. Persentase NPF Net > 5% (lima persen) secara bankwide setelah dilakukan audit.
2. Terjadi fraud yang dilakukan oleh pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT) yang merugikan Bank.

Penundaan dapat dilakukan apabila terpenuhi salah satu faktor penunda pembayaran remunerasi yang ditahan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya Per Unit Bisnis, Per Wilayah dan Pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang yang Berlokasi di Luar Negeri

Kebijakan remunerasi BRK Syariah telah mempertimbangkan wilayah geografis Kantor Cabang, Capem dan Kedai dengan memberikan tunjangan untuk daerah-daerah tertentu.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Keputusan Direksi No. 133/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah dan Keputusan Direksi No. 117/KEPDIR/2025 Tentang Remunerasi Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ada yang bersifat variable, yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, seperti Tantiem untuk Pengurus dan Jasa Produksi untuk Pegawai atau remunerasi variabel lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya.

variable remuneration that has been paid (Clawback) to officials classified as Material Risk Takers (MRT), by considering factors including:

1. Net NPF percentage > 5% (five percent) bankwide after audit.
2. Fraud occurred by a party acting as a Material Risk Taker (MRT) which caused losses to the Bank.

Postponement can be done if one of the factors for delaying the payment of withheld remuneration as mentioned in numbers 1 and 2 above is met.

Scope of Remuneration Policy and Its Implementation Per Business Unit, Per Region and in Subsidiaries or Branch Offices Located Abroad

BRK Syariah's remuneration policy has taken into account the geographical areas of Branch Offices, Sub-district Offices and Shops by providing allowances for certain areas.

Variable Remuneration

Board of Directors Decree No. 133/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Remuneration Policy for the Management of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah and Board of Directors Decree No. 117/KEPDIR/2025 concerning the Remuneration of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah, the remuneration components of the Board of Commissioners and Directors are variable, namely remuneration linked to performance and risk, such as Tantiem for Management and Production Services for Employees or other variable remuneration that is equivalent to that.

Number of Directors, Board of Commissioners, and Employees Receiving Variable Remuneration During 1 (One) Year

Number of Directors, Board of Commissioners and Employees who received variable remuneration for 1 (one) year and the total nominal amount.

Remunerasi yang bersifat Variabel	**Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun** Amount Received in 1 (one) Year						Variable Remuneration
	Direksi Directors		**Dewan Komisaris** Board of Commissioners		**Pegawai** Employess		
	Orang Person	**Rp**	**Orang** Person	**Rp**	**Orang** Person	**Rp**	
Jasprod/Tantiem	5	3.026.330.811	3	1.565.620.482	2.341	63.748.493.372	Jasprod/Tantiem

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi MRT

Dalam menetapkan pegawai yang diidentifikasi sebagai MRT, Bank melakukan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Jabatan yang tergolong MRT sebagai berikut:

1. Direksi
2. Pemimpin Divisi/ Pemimpin Unit Kerja setingkat Pemimpin Divisi
3. Pemimpin Cabang
4. Pemimpin Cabang Pembantu
5. Pemimpin Kedai

Position and Number of Parties who are MRT

In determining which employees are identified as MRT, the Bank uses both a qualitative and quantitative approach. Positions classified as MRT are as follows:

1. Board of Directors
2. Division Leader/Work Unit Leader at Division Leader level
3. Branch Manager
4. Assistant Branch Manager
5. Shop Leader

Tabel Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi MRT tahun 2025
Table of Positions and Number of MRT Parties in 2025

No.	Jabatan	Jumlah Pihak yang Menjadi MRT Number of Parties Becoming MRT	Position
1.	Direksi	5	Board of Directors
2.	Pemimpin Divisi/ Pemimpin Unit Kerja setingkat Pemimpin Divisi	19	Division Head/level Work Unit Head Division Head
3.	Pemimpin Cabang	35	Branch Manager
4.	Pemimpin Cabang Pembantu	47	Sub Branch Manager
5.	Pemimpin Kedai	54	Kedai Head

Konsultan Eksternal terkait Kebijakan Remunerasi

Dalam menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal.

External Consultant regarding Remuneration Policy

In preparing and determining remuneration policies, the Bank does not use the services of external consultants.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Terkait dengan remunerasi, BRK Syariah berupaya agar tidak terjadi gap yang terlalu tinggi. Adapun rasio gaji tertinggi dan terendah selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Highest to Lowest Salary Ratio

Regarding remuneration, BRK Syariah strives to ensure there is not an excessively large gap. The ratio of the highest to lowest salaries over the past three years is as follows:

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2024-2025
2024-2025 Highest and Lowest Salary Ratio Table

URAIAN	Tahun 2025 Year 2025	Tahun 2024 Year 20234	DESCRIPTION
Rasio Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	8,60%	7,74%	The ratio of the highest and lowest Employee Salaries
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan terendah	85,00%	85,00%	The ratio of the highest and lowest Directors' Salaries
Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	90,00%	90,00%	The ratio of the highest and lowest Commissioners' Salaries
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	37,50	37,50%	The highest salary ratio for the Board of Directors and the highest Employees

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat Akan Diberikan oleh Bank Kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai Selama 1 (Satu) Tahun Pertama Bekerja.

BRK Syariah tidak memiliki kebijakan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel (RBV) dan tanpa syarat, karena kebijakan pemberian RBV diberlakukan tanpa

Unconditionally Guaranteed Variable Remuneration Will Be Given by the Bank to Prospective Directors, Prospective Board of Commissioners, and/or Prospective Employees During the First 1 (One) Year of Work.

BRK Syariah does not have a Variable Remuneration (RBV) policy and does not offer unconditional remuneration, as it is applied without regard to length of service. Going

mempertimbangkan lama periode bekerja. Kedepannya, BRK Syariah akan melakukan kajian ulang atas kebijakan remunerasi agar relevan dengan perkembangan industri dan strategi bisnis serta mengadopsi aspek-aspek kepatuhan pada ketentuan perbankan yang berlaku terkait remunerasi secara bertahap.

forward, BRK Syariah will review its remuneration policy to ensure it is relevant to industry developments and business strategies, and will gradually adopt aspects of compliance with applicable banking regulations regarding remuneration.

Jumlah Pegawai Terkena PHK dan Total Nominal Pesangon Dibayarkan

Tabel Jumlah Pegawai Terkena PHK dan Total Nominal Pesangon Dibayarkan Tahun 2024-2025

Number of Employees Laid Off and Total Amount of Severance Pay Paid

Table of Number of Employees Laid Off and Total Severance Pay Paid in 2024-2025

Tabel Jumlah Pegawai Terkena PHK dan Total Nominal Pesangon Dibayarkan Tahun 2024-2025
Table of Number of Employees Laid Off and Total Amount of Severance Pay Paid in 2024-2025

No.	Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang Dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai Number of Employees		Nominal Amount of Severance Paid per Person in 1 (one) Year
		2025	2024	
1.	Di atas Rp1 miliar	0	0	*Above IDR 1 billion*
2.	Di atas Rp500 juta s.d 1 milliar	3	0	*Above IDR 500 million up to 1 billion*
3.	Rp500 juta ke bawah	20	6	*IDR 500 million and below*

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS DIVERSITY POLICY

Kebijakan Keberagaman

BRK Syariah memiliki komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Keberagaman tersebut penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan, pembidangan, dan pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mendukung peningkatan kinerja BRK Syariah. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BRK Syariah telah mengatur keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Anggaran Dasar Bank dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Direksi. Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan peraturan terkait penerapan tata kelola bagi Bank umum syariah.

Diversity Policy

BRK Syariah has a diverse composition of members of the Board of Commissioners and Directors, based on age, educational background, expertise, and experience required to carry out their duties and responsibilities. This diversity is important to support the decision-making process, the allocation of responsibilities, and the implementation of the duties of members of the Board of Commissioners and Directors, as well as to support the improvement of BRK Syariah's performance. The diverse composition of the Board of Commissioners and Directors of BRK Syariah has complied with the provisions of Bank Indonesia, OJK Regulations, and other relevant laws and regulations.

BRK Syariah has regulated the diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as stipulated in the Bank's Articles of Association and the Guidelines and Work Procedures of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors also complies with the provisions of OJK Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks and regulations related to the implementation of governance for Sharia commercial banks.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

BRK Syariah senantiasa berupaya menjaga keberagaman keahlian dan pengalaman anggota Dewan Komisaris yang mencakup di antaranya bidang perbankan syariah, ekonomi syariah, bisnis, keuangan, tata kelola, sumber daya manusia, dan manajemen risiko.
Terhitung sejak 25 Oktober 2025, komposisi Dewan Komisaris BRK Syariah terdiri dari 1 (satu) orang, hal ini belum memenuhi Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, dan mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, maupun usia sebagaimana tabel berikut :

Diversity of the Composition of the Board of Commissioners

BRK Syariah always strives to maintain the diversity of expertise and experience of the members of the Board of Commissioners, which includes, among others, the fields of Islamic banking, Islamic economics, business, finance, governance, human resources, and risk management.
As of 25October 2025, the composition of the BRK Syariah Board of Commissioners consists of 1 (one) person, this does not comply with OJK Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks, and reflects the diversity of its members, both in terms of education, expertise, work experience, and age as in the following table:

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Table of Diversity in Composition of the Board of Commissioners

Nama Name	**Jabatan** Position	**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Work experience	**Keahlian** Skill
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	61 Tahun 61 Years	Pria Man	Sarjana Ekonomi Magister Manajemen *Doctor of Philosopy* Bachelor of Economics Master of Management Doctor of Philosopy	Di bidang perbankan In the banking sector	Manajemen Risiko, Financial dan IT Risk Management, Financial and IT
Rita Anugerah*	Komisaris Independen Independent Commissioner	64Tahun 64 Year	Wanita Woman	Sarjana bidang Akuntansi *Master of Accountancy and Financial Information System* (MAFIS) *Doctor Business Administration* (DBA) Bachelor of Accounting Master of Accountancy and Financial Information Systems (MAFIS) Doctor of Business Administration (DBA)	Akademisi Academics	Akuntansi, dan Administrasi Bisnis Accounting, and Business Administration

*Berakhir Menjabat Sejak 25 Oktober 2025
*Term of office ended on October 25, 2025

Dalam mempertahankan keunggulan kompetitif, BRK Syariah telah memiliki anggota Dewan Komisaris yang memiliki beragam latar belakang seperti perbankan, akademisi dan pemerintahan, juga memiliki kompetensi, latar belakang dan pengalaman yang beragam. Hal ini dipandang penting oleh BRK Syariah untuk memastikan proses pengawasan dan penasihatan Bank yang efektif.

To maintain its competitive advantage, BRK Syariah has a Board of Commissioners with diverse backgrounds, including banking, academia, and government, possessing diverse competencies, backgrounds, and experiences. BRK Syariah considers this crucial to ensure the Bank's effective supervisory and advisory processes.

Keberagaman Komposisi Direksi

Untuk tahun 2025, komposisi anggota Direksi BRK Syariah telah memenuhi Peraturan OJK No. 16/ POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, dan mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, maupun usia sebagaimana tabel berikut:

Diversity of Board of Directors Composition

For 2025, the composition of the BRK Syariah Board of Directors has complied with OJK Regulation No. 16/ POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks, and reflects the diversity of its members, both in terms of education, expertise, work experience, and age as shown in the following table:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi
Table of Diversity in the Composition of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience	Keahlian Skill
Helwin Yunus	Plt. Direktur Utama Act. President Director	52 Tahun 52 Years	Pria Man	Sarjana bidang Manajemen dari STIE Riau Magister bidang Manajemen Pemasaran dari Universitas Riau Bachelor's Degree in Management from STIE Riau Master's Degree in Marketing Management from Universitas Riau	Di bidang perbankan dan perkreditan/ pembiayaan In the banking and credit/financing sectors	Bidang perbankan, manajemen dan perkreditan/ pembiayaan Banking, management, and credit/financing sectors
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Director of Compliance & Risk Management	56 Tahun *56 Years*	Pria Man	Sarjana jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Bachelor's Degree in Economics and Development Studies	Di bidang perbankan, hukum, operasional dan perkreditan/ pembiayaan In the banking, legal, operational, and credit/ financing sectors	Bidang perbankan, hukum dan perkreditan/ pembiayaan Banking, legal, and credit/ financing sectors
M.A. Suharto*	Direktur Dana & Jasa Director of Funds & Services	60 Tahun *60 Years*	Pria Man	Sarjana jurusan Ilmu Ekonomi Bachelor's degree in Economics	Di bidang perbankan syariah, Keuangan, perkreditan/ pembiayaan dan pendanaan In the field of Islamic banking, finance, credit/ financing and funding	Bidang Perbankan, keuangan, perkreditan/ pembiayaan dan pendanaan Banking, finance, credit/ financing and funding sector
Said Syamsuri*	Direktur Operasional Director of Operations	60 Tahun *60 Years*	Pria Man	Sarjana jurusan Ekonomi/Akuntansi Magister Manajemen Bachelor's degree in Economics/ Accounting Master's degree in Management	Di bidang perbankan, operasional dan perkreditan/ pembiayaan In banking, operations and credit/financing	Bidang perbankan, manajemen, operasional dan perkreditan/ pembiayaan The fields of banking, management, operations and credit/ financing

* Menjabat s.d. tanggal 14 September 2025
*Serving until September 14, 2025

Dari tabel di atas, BRK Syariah telah memiliki anggota Direksi yang memiliki latar belakang yang beragam antara lain perbankan syariah, keuangan, operasional bank, hukum, audit dan *compliance*, juga memiliki kompetensi, latar belakang serta pengalaman yang beragam. Hal ini dipandang penting untuk memastikan proses pengambilan keputusan dapat berjalan efektif.

The table above shows that BRK Syariah has a Board of Directors with diverse backgrounds, including Islamic banking, finance, banking operations, law, audit, and compliance. They also possess diverse competencies, backgrounds, and experience. This is considered crucial to ensure effective decision-making.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

BRK Syariah menerapkan sistem pengendalian internal sebagai mekanisme pengawasan yang dijalankan secara berkelanjutan untuk memastikan kegiatan operasional Bank berjalan sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Sistem ini bertujuan menjaga dan mengamankan aset Bank, memastikan keandalan laporan keuangan dan manajerial, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta meminimalkan potensi kerugian, penyimpangan, dan tindakan *fraud*.

Dalam pelaksanaannya, BRK Syariah menerapkan prinsip pemisahan fungsi *(four eyes principle)* antara Unit Kerja Operasional dan satuan kerja pengendalian guna menciptakan mekanisme *checks and balances*. Dengan pemisahan fungsi tersebut, peluang terjadinya kesalahan, penyimpangan, maupun penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan pada seluruh jenjang organisasi.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan sistem pengendalian internal di BRK Syariah memiliki tujuan untuk:

1. Menjamin semua kegiatan usaha telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Sistem pendendalian internal BRK Syariah mengadopsi ketentuan sistem pengendalian internal dari COSO. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal, BRK Syariah menerapkan pendekatan *Three Lines of Defense* sebagai mekanisme pertahanan secara berlapis, yakni:

BRK Syariah implements an internal control system as an oversight mechanism conducted continuously to ensure the Bank's operational activities run in accordance with applicable policies and regulations. This system aims to safeguard and secure the Bank's assets, ensure the reliability of financial and managerial reports, enhance regulatory compliance, and minimize the potential for losses, irregularities, and fraudulent acts.

In its implementation, BRK Syariah applies the segregation of duties principle (four eyes principle) between Operational Work Units and control work units to create a checks and balances mechanism. With this segregation of duties, the likelihood of errors, irregularities, or abuse of authority can be minimized across all organizational levels.

Objectives of the Internal Control System

The implementation of the internal control system at BRK Syariah aims to:

1. Guarantee that all business activities have been executed in accordance with applicable laws and regulations, encompassing those issued by the government, the Financial Services Authority (OJK), as well as internal policies, provisions, and procedures established by the Board of Directors.
2. Guarantee the availability of comprehensive, accurate, effective, timely, and relevant reports required for sound and accountable decision-making.
3. Enhance the effectiveness and efficiency of asset and resource utilization to protect the Bank from the risk of loss.
4. Identify weaknesses and assess irregularities at an early stage, as well as continuously reassess the appropriateness of existing Bank policies and procedures.

Internal Control System Framework

The internal control system of BRK Syariah adopts the internal control provisions from COSO. An effective internal control system assists the Board of Directors and the Board of Commissioners in safeguarding bank assets, guaranteeing the availability of reliable financial and managerial reporting, enhancing compliance with laws and regulations, and mitigating the risk of losses, irregularities, and violations of prudential principles.

To enhance the effectiveness of internal controls, BRK Syariah implements the Three Lines of Defense approach as a layered defense mechanism, namely:

1. ***First Line of Defense***
   Risk Owner/Risk Taking Unit berperan sebagai pertahanan tingkat pertama dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan dan memitigasi risiko dalam aktivitas operasional. *Risk Taking Unit* memiliki tanggung jawab yang utama atas pengelolaan eksposur risiko dalam aktivitas sehari-hari serta melakukan tindakan perbaikan dalam mengatasi kelemahan pada proses dan pengendalian.

2. ***Second Line of Defense***
   Risk Control adalah Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan berperan sebagai unit kunci dalam memberikan pertahanan tingkat kedua melalui fungsi pemantauan yang independen. Divisi Manajemen Risiko telah melakukan *review* atas kelengkapan dan keakuratan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko, serta atas kecukupan skenario mitigasi yang diusulkan oleh unit kerja operasional**.** Sedangkan Divisi Kepatuhan memastikan bahwa dalam setiap pelaksanaan aktivitas Bank yang dilakukan oleh *risk taking unit* mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. ***Third Line of Defense***
   Risk Assurance dijalankan oleh fungsi Audit Internal melakukan penilaian terhadap kecukupan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko serta efektivitas pengendalian Internal dalam rangka memberikan *assurance* yang independen dan objektif. Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank.

Pengawasan Oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pengawasan organisasi BRK Syariah. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan sistem pengendalian internal pada BRK Syariah adalah:

1. Direksi bertanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai dengan tujuan pengendalian internal yang ditetapkan.
2. Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal Bank.

1. ***First Line of Defense***
   The Risk Owner/Risk Taking Unit acts as the first line of defense and is responsible for identifying, evaluating, controlling, and mitigating risks within operational activities. The Risk Taking Unit holds primary responsibility for managing risk exposures in day-to-day activities and taking corrective actions to address weaknesses in processes and controls.

2. ***Second Line of Defense***
   Risk Control, comprising the Risk Management Division and the Compliance Division, acts as a key unit providing the second line of defense through an independent monitoring function. The Risk Management Division has reviewed the completeness and accuracy of risk identification, measurement, monitoring, control, and reporting, as well as the adequacy of mitigation scenarios proposed by operational work units. Meanwhile, the Compliance Division ensures that every Bank activity executed by the risk taking unit adheres to applicable laws and regulations.

3. ***Third Line of Defense***
   Risk Assurance is executed by the Internal Audit function, which assesses the adequacy of policies, strategies, and the Risk Management framework, alongside the effectiveness of Internal Controls, to provide independent and objective assurance. The Internal Audit & Anti-Fraud Division must be capable of evaluating and playing an active role in continuously improving the effectiveness of the internal control system concerning the Bank's operational execution that potentially causes losses in achieving targets set by the Bank's management.

Management Oversight and Control Culture

The realization of a reliable and effective internal control system is the responsibility of all parties involved in the oversight of the BRK Syariah organization. The parties involved in overseeing the internal control system at BRK Syariah are:

1. The Board of Directors is responsible for creating and maintaining an effective internal control system and ensuring that the system operates in a safe and sound manner in accordance with the established internal control objectives.
2. The Board of Commissioners is responsible for overseeing the general implementation of internal controls, including the Board of Directors' policies that establish the Bank's internal controls.

3. Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* melakukan evaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan independensi dan keahlian auditor yang memadai. Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* mempunyai tanggung jawab melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Bank.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan. Penilaian risiko harus pula dilakukan oleh Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari. Kegiatan pengendalian memberikan keyakinan bahwa pejabat dan pegawai Bank melaksanakan arahan Direksi dan Dewan Komisaris secara efektif.

Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

Sistem pengendalian intern yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data/informasi intern yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar (kondisi ekstern) dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

Sistem pengendalian intern Bank menyediakan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pegawai Bank sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini secara jelas tercermin dalam struktur organisasi BRK Syariah dalam menetapkan fungsi dan tanggung jawab *(job desc)* dan pemisahan fungsi pada *back office, front office,* dan *middle office.*

3. The Internal Audit & Anti-Fraud Division evaluates and plays an active role in continuously enhancing the effectiveness of the internal control system related to Bank operations that could potentially cause losses in achieving established targets, while maintaining adequate auditor independence and expertise. The Internal Audit & Anti-Fraud Division is responsible for conducting audits and assessments on the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, information technology, and other activities executed by the Bank.

Risk Identification and Assessment

Risk assessment is a series of actions undertaken by the Board of Directors to identify, analyze, and assess the risks faced by the Bank in order to achieve established targets. Risk assessments must also be conducted by the Internal Audit & Anti-Fraud Division to ensure broader and more comprehensive audit coverage.

Control Activities and Segregation of Duties

Control activities encompass the establishment of control policies and procedures as well as early verification processes to ensure consistent compliance, and are integral to every daily Bank function or activity. Control activities provide assurance that Bank officers and employees effectively execute the directives of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Accounting, Information, and Communication Systems

An effective internal control system provides at minimum sufficient and comprehensive internal data/information regarding finance, regulatory compliance, market information (external conditions), and any events or conditions required for sound and accountable decision-making. The information system must be able to generate reports on business activities, financial conditions, risk management implementation, and regulatory compliance that support the duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

The Bank's internal control system provides effective communication channels so that all Bank employees fully understand and comply with applicable policies and procedures in executing their duties and responsibilities. This is clearly reflected in BRK Syariah's organizational structure by establishing functions and responsibilities (job descriptions) and the segregation of duties across the back office, front office, and middle office.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal agar meningkatkan efektivitas kapasitas sistem pengendalian intern. Pemantauan dilakukan oleh seluruh unit operasional dan bisnis serta Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* secara berkala dan terus menerus sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala.

Pelaksanaan Pengendalian Internal

Berdasarkan kerangka kerja dan komponen pengendalian internal yang telah disusun, BRK Syariah melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian Keuangan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan Bank, BRK Syariah telah menerapkan hal-hal berikut:

1. Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana stratejik dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blueprint* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan dan telah didistribusikan kepada pihak-pihak terkait.
2. BRK Syariah dalam penetapan strategi bisnis telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan BRK Syariah, antara lain proyeksi permodalan dan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum), serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BRK Syariah.
3. BRK Syariah telah melaksanakan proses pengendalian keuangan guna memantau pencapaian kinerja secara berkala Bank melalui Divisi Perencanaan & Keuangan dan dibawakan dalam rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi.
4. BRK Syariah telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala

Pengendalian Operasional

Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BRK Syariah telah menerapkan hal-hal berikut:

1. BRK Syariah telah melengkapi *standar operating procedure*/manual kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BRK Syariah terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait.

Monitoring Activities and Correction of Irregularities

The Bank monitors and evaluates the adequacy of the internal control system in response to changing internal and external conditions to enhance the effectiveness of the internal control system's capacity. Monitoring is conducted periodically and continuously by all operational and business units as well as the Internal Audit & Anti-Fraud Division as part of the Bank's day-to-day activities, including periodic evaluations.

Implementation of Internal Control

Based on the established internal control framework and components, BRK Syariah implements internal controls to ensure the adequacy of financial controls, operational effectiveness and efficiency, and compliance with applicable laws and regulations.

Financial Control

To guarantee the successful execution of strategic plans supporting the Bank's development, BRK Syariah has implemented the following:

1. The Board of Directors has formulated and obtained approval from the Board of Commissioners for the strategic plan and the Annual Work and Budget Plan (RKAT), which are outlined in the Bank Business Plan (RBB) as a 3 (three)-year business strategy blueprint and have been distributed to relevant parties.
2. In establishing its business strategy, BRK Syariah has accounted for the impact on BRK Syariah's capital, including capital projections and the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM/CAR), and monitors internal conditions and external factor developments that directly or indirectly influence BRK Syariah's business strategy.
3. BRK Syariah has executed financial control processes to periodically monitor the Bank's performance achievements through the Planning & Finance Division, which are presented in Board of Directors meetings when follow-up action is required.
4. BRK Syariah has ensured all accounting policies and standards are periodically updated.

Operational Control

To comprehensively support operational risk control, BRK Syariah has implemented the following:

1. BRK Syariah has completed standard operating procedures/work manuals detailing the work procedures for every banking operational transaction conducted at BRK Syariah regarding new products and activities, including the mitigation of related operational risks.

2. BRK Syariah telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/ pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. BRK Syariah memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan, apabila terjadi.
2. BRK Syariah telah memiliki Satuan Kerja/Divisi Kepatuhan yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Untuk memastikan kepatuhan BRK Syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, BRK Syariah telah menerapkan hal-hal berikut:

1. BRK Syariah memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
2. BRK Syariah menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah.
3. BRK Syariah dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah.
4. BRK Syariah melalui Divisi Kepatuhan mengkoordinasikan dan meminta satuan kerja terkait untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank untuk disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
5. BRK Syariah dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.

2. BRK Syariah has established a sound organizational structure, equipped with oversight/control units to support operational controls.

Compliance with other laws and regulations, namely:

3. BRK Syariah holds a strong commitment to complying with applicable laws and regulations and taking steps to rectify weaknesses should they occur.

4. BRK Syariah possesses an independent Compliance Work Unit/Division separate from operational work units to execute the compliance function.

Compliance with Applicable Laws and Regulations

To ensure BRK Syariah's compliance with applicable laws and regulations, BRK Syariah has implemented the following:

1. BRK Syariah is committed to complying with applicable laws and regulations and taking necessary steps to rectify these risk weaknesses should they occur.

2. BRK Syariah establishes compliance systems and procedures to be utilized in drafting the Bank's internal provisions and guidelines to ensure alignment with applicable laws and regulations, including Sharia Principles.
3. In executing the compliance function, BRK Syariah ensures that all Bank policies, provisions, systems, procedures, and business activities align with the regulations of the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and applicable laws and regulations, including Sharia Principles.

4. Through the Compliance Division, BRK Syariah coordinates and requests relevant work units to refine the Bank's policies and procedures to align with the regulations of the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and applicable laws and regulations, including Sharia Principles.

5. In executing the compliance function, BRK Syariah takes preventive measures so that policies and/or decisions made by the Bank's Board of Directors do not deviate from the regulations of the Financial Services Authority (OJK) and legal provisions, including Sharia Principles.

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal

Selama tahun 2025 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik dan mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Bank secara efektif. Penilaian tersebut diperoleh melalui proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh terhadap penerapan kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengendalian yang berlaku di lingkungan Bank.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris yang didukung oleh Komite Audit secara aktif memantau pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan oleh Direksi. Sistem pengendalian internal tersebut dirancang untuk memastikan bahwa berbagai risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank dapat dikelola dan dikendalikan secara memadai, meskipun tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya menghilangkan risiko.

Setiap temuan terkait kecukupan pengendalian internal telah dilaporkan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meminimalkan potensi risiko. Selanjutnya, laporan mengenai perkembangan tindak lanjut tersebut juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang berkesinambungan.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris tercermin dalam pernyataan bahwa BRK Syariah telah memiliki dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dan memadai dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi Bank. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan setiap risiko yang timbul dari aktivitas usaha dapat dikelola secara terukur dan tetap berada dalam batas toleransi risiko *(risk appetite)* yang telah ditetapkan oleh Bank.

Direksi dan Dewan Komisaris juga menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal tersebut telah mendukung terselenggaranya kegiatan operasional Bank secara efektif dan efisien. Hal ini tercermin dari tersedianya laporan keuangan yang akurat, andal, serta disampaikan secara tepat waktu, dan terlaksananya pengamanan aset Bank secara optimal dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Evaluation of Internal Control Effectiveness

Throughout 2025, it was demonstrated that the internal control system has operated soundly and effectively supported the execution of the Bank's operational activities. This assessment was derived through a comprehensive monitoring and evaluation process concerning the implementation of policies, procedures, and control mechanisms applicable within the Bank.

In executing the oversight function, the Board of Commissioners, supported by the Audit Committee, actively monitors the implementation of the internal control system executed by the Board of Directors. The internal control system is designed to ensure that various inherent risks in the Bank's business activities can be adequately managed and controlled, although it is not intended to entirely eliminate risk.

Every finding related to the adequacy of internal controls has been reported to the Board of Directors for follow-up via necessary corrective measures to minimize potential risks. Furthermore, reports regarding the progress of these follow-ups are also submitted to the Board of Commissioners through the Audit Committee as part of a continuous oversight mechanism.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

The commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners is reflected in the statement that BRK Syariah possesses and implements an effective and adequate internal control system in managing the various risks faced by the Bank. The system is designed to ensure every risk arising from business activities can be managed in a measurable manner and remains within the risk appetite boundaries established by the Bank.

The Board of Directors and the Board of Commissioners also state that the implementation of the internal control system has supported the execution of the Bank's operational activities effectively and efficiently. This is reflected in the availability of accurate, reliable, and timely financial reports, the optimal safeguarding of Bank assets, and compliance with applicable regulations.

brksyariah
berkah untuk semua

LAPORAN ASESMEN MANAJEMEN ATAS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI ICOFR TAHUN BUKU 2025

Sesuai dengan POJK No.15 Tahun 2024 mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Plt. Direktur Utama, menyatakan bahwa:

1. Kami telah menelaah laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2025;
2. Berdasarkan pengetahuan kami, laporan keuangan tidak memuat pernyataan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak mencantumkan fakta material yang diperlukan untuk membuat pernyataan yang dibuat, mengingat keadaan di mana pernyataan tersebut dibuat, tidak menyesatkan;
3. Berdasarkan pengetahuan kami, laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya yang termasuk dalam laporan, secara wajar menyajikan dalam semua hal yang material kondisi keuangan dan hasil operasi, dan untuk periode-periode yang disajikan dalam laporan;
4. Kami telah mengimplementasikan pengendalian internal yang dianggap perlu untuk menyusun dan menyajikan secara wajar laporan keuangan dan bebas dari salah saji material:
   a. Merancang pengendalian dan prosedur pengungkapan dan telah dilakukan pengawasan untuk memastikan bahwa informasi material yang berkaitan dengan pelaporan keuangan diketahui oleh para manajemen, khususnya selama periode saat laporan keuangan sedang disiapkan serta memberikan keyakinan yang wajar mengenai keandalan laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang akan dipublikasikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
   b. Mengevaluasi efektivitas pengendalian dan prosedur pengungkapan menyampaikan kesimpulan kami tentang efektivitas pengendalian dan prosedur pengungkapan berdasarkan periode pelaporan yang dicakup;
5. Kami telah mengungkapkan berdasarkan hasil evaluasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit perihal:
   a. Seluruh defisiensi signifikan dan kelemahan material dalam rancangan dan pengoperasian pengendalian internal atas pelaporan keuangan, yang cukup mungkin dapat berdampak pada kemampuan Bank untuk mencatat, memproses, merangkum, dan melaporkan informasi keuangan, beserta dengan tindakan perbaikan;
   b. Perubahan signifikan dalam kebijakan akuntansi, prosedur dan faktor lainnya selama tahun berjalan yang dapat mempengaruhi pengendalian internal;
   c. Setiap kecurangan (*fraud*), baik yang berdampak secara material maupun tidak, yang melibatkan manajemen atau personel lain yang memiliki peran penting dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
6. Kami telah memelihara dan menjalankan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan ditemukan defisiensi signifikan atas laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2025. Mayoritas temuan merupakan kelemahan implementasi (execution gap) dan dokumentasi yang masih berada pada tahap defisiensi kontrol, namun masih ada temuan yang berada di tahap defisiensi signifikan yang sedang dalam proses remediasi/perbaikan.

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Audit Internal BRK Syariah sebagai *third line of defense* berperan dalam memberikan penilaian independen terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses tata kelola yang diterapkan di seluruh lini organisasi. Melalui fungsi ini, Audit Internal memastikan bahwa penerapan pengendalian pada setiap *line of defense* berjalan secara konsisten, terintegrasi, dan semakin kuat dalam mendukung pengelolaan risiko Bank.

Dalam menjalankan perannya, Audit Internal terus melakukan pengembangan dan inovasi dalam penerapan metodologi serta pemanfaatan berbagai *tools* audit yang lebih modern dan berbasis teknologi. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses audit sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif, efisien, serta mampu memberikan nilai tambah bagi manajemen dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

Fungsi Audit Internal

Fungsi Audit Internal BRK Syariah dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*. Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* dibentuk untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern, serta kualitas kinerja manajemen pada seluruh aspek atau kegiatan Bank.

Struktur Organisasi Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*

Internal Audit of BRK Syariah, acting as the third line of defense, plays a crucial role in providing an independent assessment of the effectiveness of the internal control system, risk management, and governance processes implemented across all organizational lines. Through this function, Internal Audit ensures that the implementation of controls at every line of defense operates consistently, is integrated, and increasingly strengthens the Bank's risk management.

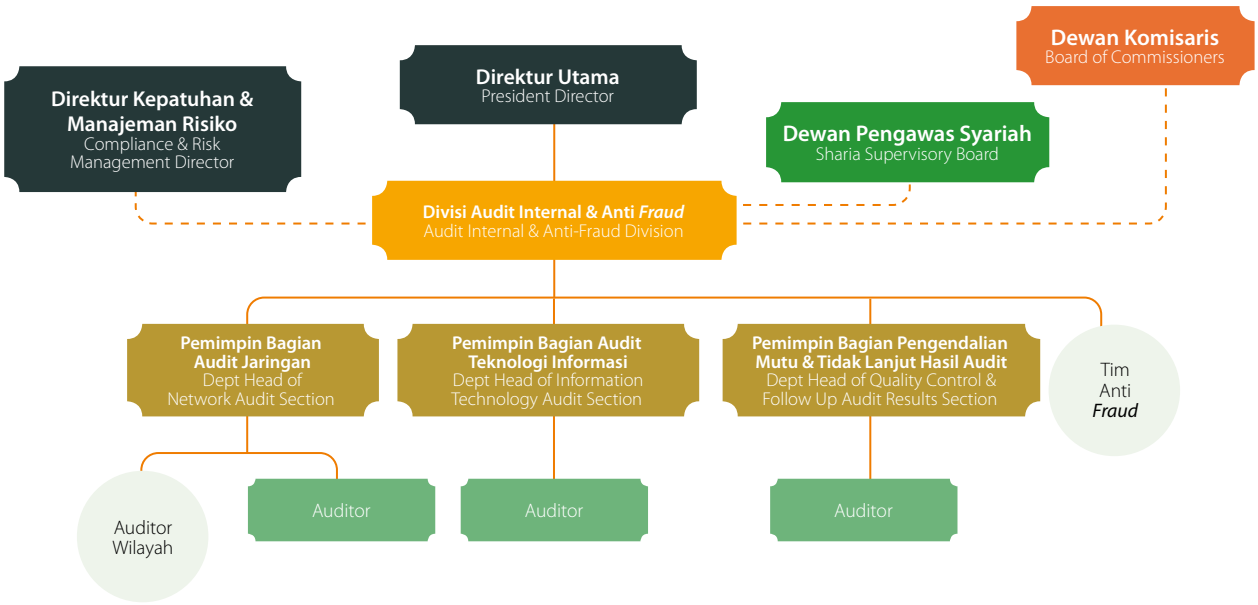
In executing its role, Internal Audit continuously develops and innovates the implementation of methodologies and the utilization of various modern, technology-based audit tools. These efforts aim to enhance the quality of the audit process so that its execution becomes more effective, efficient, and capable of providing added value to management in strengthening the internal control system and supporting the creation of good corporate governance.

Internal Audit Function

The Internal Audit function of BRK Syariah is executed by the Internal Audit & Anti-Fraud Division. The Internal Audit & Anti-Fraud Division was established to conduct examinations and assessments of the adequacy and effectiveness of the internal control structure, as well as the quality of management performance across all aspects or activities of the Bank.

Organizational Structure of the Internal Audit & Anti-Fraud Division

Struktur Organisasi Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
Organizational Structure of Audit Internal & Anti-Fraud Division



Kedudukan Audit Internal Dalam Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) BRK Syariah saat ini, Fungsi Audit Internal dipimpin oleh Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pimpinan Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* memiliki 4 (empat) bagian di bawahnya, yaitu Bagian Audit Jaringan, Bagian Audit Teknologi Informasi, Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit dan Tim Anti *Fraud*.

Position of Internal Audit within the Organizational Structure

Based on the current Organizational Structure and Work Procedures (SOT) of BRK Syariah, the Internal Audit Function is led by a Division Head who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to the Financial Services Authority (OJK). The Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Division has 4 (four) sections operating underneath them, namely the Network Audit Section, the Information Technology Audit Section, the Quality Control & Audit Result Follow-Up Section, and the Anti-Fraud Team.

Profil Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*

Profile of the Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Division



MUHAMAD NANANG

Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
Vice President of Internal Audit & Anti Fraud Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Bengkalis, 2 Januari 1972. Usia 53 tahun per 31 Desember 2025. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* sejak 2023 berdasarkan SK No. 91/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 11 Juli 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Bengkalis, 2 January 1972. 53 years old as of 31 December 2025. Served as Internal Vice President of Internal Audit & Anti Fraud Division since 2023 based on Decree No. 91/KEPDIR/MSDI/2023 dated 11 July 2023.

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Sarjana bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Riau (UNRI) tahun 1996.

Pengalaman Kerja
Berkarir di Bank Riau Kepri Syariah sejak tahun 2000. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian UKPN Divisi Kepatuhan (Okt 2014 - Jan 2018)
- Pgs. Pemimpin Cabang Jakarta (Jan - Mar 2018)
- Pemimpin Cabang Siak Sri Indrapura (Mar 2018 - Jul 2019)
- Pemimpin Cabang Bengkalis (Jul 2019 – Agust 2021)
- Pemimpin Cabang Pekanbaru (Agust 2021 – Feb 2022)
- Pgs. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (Feb 2022 - Nov 2022)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (Nov 2022 – Jul 2023)
- Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* (Jul 2023 - Sekarang)

Educational background
Obtained a Bachelor's degree in Development Economics from the University of Riau (UNRI) in 1996.

Work experience
He has worked at Bank Riau Kepri Syariah since 2000. Several positions he has held include:

- UKPN Dept. Head of Compliance Division (Oct 2014 - Jan 2018)
- Act. Head of Jakarta Branch (Jan - Mar 2018)
- Head of Siak Sri Indrapura Branch (Mar 2018 - Jul 2019)
- Head of Bengkalis Branch (Jul 2019 – Aug 2021)
- Head of Pekanbaru Branch (Augt 2021 – Feb 2022)
- Act. Vice President of Risk Management Division (Feb 2022 - Nov 2022)
- Vice President of Risk Management Division (Nov 2022 – Jul 2023)
- Vice President of Internal Audit & Anti Fraud Division (Jul 2023 - Present)

Pengembangan Kompetensi Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal

Competency Development of the Head of the Internal Audit Work Unit

Judul Pelatihan Training Title	Waktu date		Tempat Place	Penyelenggara Organizer
Workshop Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Capacity Building Workshop and Internal Auditor Meeting 2025	22/01/2025	24/01/2025	Batam	Bank Riau Kepri Syariah
Workshop Penerapan Tata Kelola Syariah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Workshop on the Implementation of Sharia Governance at PT Bank Riau Kepri Syariah	04/02/2025	05/02/2025	Menara Dang Merdu BRKS	Karim Consulting Indonesia
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Risk Management Certification Refreshment Program Level 7	21/04/2025	21/04/2025	Menara Dang Merdu BRKS	Strategic Development Group (SDG)
Pelatihan *Information Management Systems Awareness* Bagi Seluruh Insan BRK Syariah Secara Online Information Management Systems Awareness Training for All BRK Syariah Employees Conducted Online	08/05/2025	08/05/2025	Menara Dang Merdu BRKS	PT. AKUATOR CIPTA CENDIKIA
Sosialisasi *Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Personal Data Protection Awareness Socialization for Head Office	02/06/2025	02/06/2025	Menara Dang Merdu BRKS	Bank Riau Kepri Syariah
Konferensi Auditor Internal (KAI) 2025 '*Shifting Horizon For Internal Auditors* 2025 Internal Auditors Conference (KAI): 'Shifting Horizons for Internal Auditors'	02/07/2025	02/07/2025	Yogyakarta	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Workshop Bidang Hukum "Bagaimana Mitigasi Risiko Hukum dan Pencegahan Bank dalam rangka mengantisipasi Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Korupsi dan *Cybercrime*" Legal Workshop: 'Legal Risk Mitigation and Bank Prevention Measures in Anticipating Banking Crimes, Corruption, and Cybercrime'	28/07/2025	28/07/2025	Menara Dang Merdu BRK Syariah	Bank Riau Kepri Syariah
Training Quality Assurance Banking Industry Syariah Quality Assurance Training in the Islamic Banking Industry	24/072025	24/07/2025	Jakarta	THE MILLENIALS INSTITUTE
Training Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) Training	14/08/2025	14/08/2025	Menara Dang Merdu BRK Syariah	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) & (SP & FMI BI serta KPDHN) Tahun 2025 Socialization of the Compliance Assessment Report (LHPK) and BI SP & FMI as well as KPDHN for 2025	27/11/2025	27/11/2025	Bali	Bank Indonesia
Pembinaan Spiritual Islami (*Tarbiyah Ruhiyah*) di Masjid MDM BRK Syariah Islamic Spiritual Development Program (*Tarbiyah Ruhiyah*) at the MDM Mosque of BRK Syariah	19/12/2025	19/12/2025	Mesjid Baiturrahim BRK Syariah	Bank Riau Kepri Syariah

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pengangkatan Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* berdasarkan SK No. 91/KEPDIR/ MSDI/2023 tanggal 11 Juli 2023. Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil audit. Direktur Utama dapat memberhentikan Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, apabila Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Audit Internal atau gagal/tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Piagam Audit Internal

Dalam melakukan tugasnya, Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* berpedoman pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* yang tertuang di dalam SK Direksi Nomor 034/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, yang dalam penyusunannya tetap mengacu pada Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan Standar Profesional Audit Intern (SPAI) sebagai pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar. Piagam Audit Intern BRK Syariah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 209/KEPDIR/2025 tanggal 26 November 2025 tentang Piagam Audit Intern yang di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Audit Internal
2. Visi dan Misi Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
4. Wewenang Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
5. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
6. Kode Etik Auditor Internal
7. Independensi dan objektivitas Auditor Internal
8. Tujuan dan Ruang Lingkup aktivitas Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
9. Persyaratan dan Pengembangan Auditor Internal
10. Risiko Audit & Perlindungan Hukum kepada Pegawai dan Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
11. Program Pengendalian Mutu Audit
12. Hubungan Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* dengan Auditor Eksternal & Ahli Hukum

Parties Authorized to Appoint and Dismiss the Head of the Internal Audit Work Unit

The Internal Audit & Anti-Fraud Division is led by a Division Head who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The appointment of the Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Division is based on Decree No. 91/KEPDIR/ MSDI/2023 dated July 11, 2023. The appointment and dismissal of the Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Division are reported to the Financial Services Authority (OJK). The Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Division reports to the President Director and may communicate directly with the Board of Commissioners to report various matters relating to audit results. The President Director may dismiss the Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Division upon receiving approval from the Board of Commissioners, should the Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Division fail to meet the requirements as an Internal Audit auditor or fail/be deemed incompetent in executing their duties.

Internal Audit Charter

In executing its duties, the Internal Audit & Anti-Fraud Division is guided by the Company Guidelines (BPP) of the Internal Audit & Anti-Fraud Division outlined in Board of Directors Decree Number 034/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022, concerning the Company Guidelines (BPP) for the Execution of the Internal Audit Function, which in its formulation continues to refer to OJK Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated January 28, 2019, concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks and the Professional Standards for Internal Auditing (SPAI) for the professional execution of internal audits as stipulated by the internal audit professional association, including the standard implementation guidelines. The Internal Audit Charter of BRK Syariah was established through Board of Directors Decree Number 209/KEPDIR/2025 dated November 26, 2025, concerning the Internal Audit Charter, which includes the following matters:

1. Position of Internal Audit
2. Vision and Mission of the Internal Audit & Anti-Fraud Division
3. Duties and Responsibilities of the Internal Audit & Anti-Fraud Division
4. Authority of the Internal Audit & Anti-Fraud Division
5. Responsibilities and Accountability of the Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Division
6. Code of Ethics for Internal Auditors
7. Independence and Objectivity of Internal Auditors
8. Objectives and Scope of Activities of the Internal Audit & Anti-Fraud Division
9. Requirements and Development of Internal Auditors
10. Audit Risk & Legal Protection for Employees and the Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Division
11. Audit Quality Control Program
12. Relationship of the Internal Audit Division with External Auditors & Legal Experts

13. Hubungan Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* dengan Unit Kerja Yang Melaksanakan Fungsi Pengendalian Lain
14. Kaji Ulang
15. Penggunaan Jasa Pihak Eksternal

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*

Dalam melaksanakan fungsinya *Divisi Audit Internal* & Anti *Fraud* memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan rencana audit yang terdokumentasi dengan jelas, melalui proses konsultasi bersama Dewan Pengawas Syariah serta mempertimbangkan rekomendasi dari komite audit. Rencana Audit diajukan untuk memperoleh persetujuan dan ditandatangani oleh Direktur Utama serta Komisaris Utama sebagai bentuk legitimasi dan komitmen manajemen puncak dalam mendukung pelaksanaan audit yang efektif, transparan dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik ;
2. Melaporkan Realisasi Rencana Kerja audit Tahunan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Bank;
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian risiko dan kontrol internal pada seluruh aktivitas yang ada di Bank termasuk pemenuhan prinsip syariah dengan berkoordinasi dengan DPS dan Komite Audit;
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian risiko dan kontrol internal pada seluruh aktivitas yang ada di Bank;
6. Memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan;
7. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Audit termasuk hasil Audit Intern Syariah terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah, Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko;
8. Memberikan masukan, saran dan konsultasi atas hasil pelaksanaan audit kepada manajemen dan unit kerja terkait dalam rangka perbaikan terhadap kualitas manajemen risiko dan pengendalian internal serta tata Kelola, termasuk saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen terkait pemenuhan Prinsip Syariah, sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan ojektivitas serta sumber daya yang diperlukan tersedia;
9. Melakukan audit atas permasalahan atau peristiwa yang mengandung indikasi penyimpangan dan atau *fraud* yang timbul sebagai tindak lanjut permintaan Direksi;

13. Relationship of the Internal Audit & Anti-Fraud Division with Work Units Executing Other Control Functions
14. Review
15. Use of External Party Services

Duties and Responsibilities of the Internal Audit & Anti-Fraud Division

In executing its function, the Internal Audit & Anti-Fraud Division holds the following responsibilities:

1. Formulating and establishing a clearly documented audit plan, through a consultation process with the Sharia Supervisory Board while considering recommendations from the audit committee. The Audit Plan is submitted to obtain approval and is signed by the President Director and the President Commissioner as a form of legitimacy and top management commitment to support the execution of effective, transparent audits aligned with good corporate governance principles;
2. Reporting the Realization of the Annual Audit Work Plan to the President Director and the Board of Commissioners;
3. Conducting examinations and assessments of the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, information technology, and other activities executed by the Bank;
4. Evaluating the implementation of risk control and internal controls across all activities within the Bank, including compliance with Sharia principles by coordinating with the Sharia Supervisory Board (DPS) and the Audit Committee;
5. Evaluating the implementation of risk control and internal controls across all activities within the Bank;
6. Providing recommendations based on examination results;
7. Drafting and submitting the Audit Result Report, including Sharia Internal Audit results related to the fulfillment of Sharia Principles, to the Sharia Supervisory Board, the President Director, and the Board of Commissioners, with a copy addressed to the Compliance & Risk Management Director;
8. Providing input, advice, and consultation regarding audit execution results to management and relevant work units to improve the quality of risk management, internal control, and governance, including recommendations for improvement and objective information concerning audited activities across all management levels regarding the fulfillment of Sharia Principles, provided it does not compromise independence and objectivity and that necessary resources are available;
9. Conducting audits on issues or events containing indications of irregularities and/or fraud arising as a follow-up to requests from the Board of Directors;

10. Melakukan pemantauan dan tindakan perbaikan terhadap tindak lanjut hasil audit termasuk audit intern Syariah dan melaporkan realisasinya secara periodik kepada Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada komite audit dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko;
11. Melaporkan dengan segera kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris terhadap adanya temuan audit yang berpotensi mengganggu kegiatan usaha Bank;
12. Berpartisipasi aktif dalam penyempurnaan pemrosesan kasus;
13. Membantu unit kerja Bank dalam memberikan masukan, saran dan *review* terhadap kebijakan operasional Bank;
14. Menyusun kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas Auditor serta melakukan *review* untuk keperluan penyempurnaan;
15. Mengajukan anggaran tahunan dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama secara periodik sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
16. Menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
17. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
18. Menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis;
19. Menyusun kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan yang memadai kepada anggota Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* dan pihak ekstern.

Agar dapat berperan secara optimal maka Divisi Audit Internal & *Anti Fraud* berwewenang untuk :
1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris khususnya terkait dengan fungsi Audit Intern;
2. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi karyawan, dana, asset, dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Bank sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan audit atau konsultasi;
3. Melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan teknik pemeriksaan lainnya kepada nasabah atau pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi;
4. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah;
5. Melakukan pertemuan secara berkala atau insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah atau Komite Audit;

10. Monitoring and undertaking corrective actions regarding the follow-up of audit results, including Sharia internal audits, and reporting their realization periodically to the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and the Board of Commissioners, with copies to the audit committee and the Compliance & Risk Management Director;
11. Immediately reporting to the President Director and the Board of Commissioners any audit findings that potentially disrupt the Bank's business activities;
12. Actively participating in the refinement of case processing;
13. Assisting Bank work units by providing input, advice, and reviews regarding the Bank's operational policies;

14. Drafting policies as guidelines for the execution of Auditor duties and conducting reviews for refinement purposes;
15. Proposing an annual budget and periodically reporting its realization to the President Director according to the established timeframe;
16. Drafting implementation reports and summaries of audit results and submitting them to the Financial Services Authority (OJK) after being signed by the President Director and the Board of Commissioners;
17. Reporting the results of monitoring corrective follow-ups on significant findings to the Board of Directors and the Board of Commissioners, with copies to the Audit Committee and the Director overseeing the compliance function;
18. Applying knowledge, skills, and competencies executed with professional skepticism;

19. Periodically drafting policies on assignment limitations and adequate waiting periods for assignments for members of the Internal Audit & Anti-Fraud Division and external parties.

To play an optimal role, the Internal Audit & Anti-Fraud Division is authorized to:
1. Assist the duties of the President Director and the Board of Commissioners, specifically concerning the Internal Audit function;
2. Have full, free, and unrestricted access to records, employee information, funds, assets, and other resources owned by the Bank as long as it pertains to the execution of audits or consultations;

3. Conduct verifications, interviews, confirmations, and other examination techniques with customers or other parties concerning the execution of audits and consultations;
4. Communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Sharia Supervisory Board;
5. Hold periodic or incidental meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or the Audit Committee;

6. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan tujuan, ruang lingkup, jadwal audit serta menetapkan metodologi dan perangkat audit yang akan digunakan;
7. Meminta bantuan pihak eksternal maupun pihak internal Bank dalam menunjang pelaksanaan audit apabila dipandang perlu;
8. Membangun komunikasi, koordinasi yang sinergis dengan unit *assurance* lainnya;
9. Berwenang mengikuti rapat yang bersifat strategis;
10. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugasnya;
11. Menetapkan standar kompetensi calon auditor dan dapat melakukan wawancara langsung kepada calon auditor untuk menilai kesesuaian dan kecukupan kompetensinya;
12. Memastikan seluruh pegawai Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
13. Menetapkan kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
14. Dapat melakukan audit kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Bank berdasarkan permintaan dari perusahaan afiliasi yang disetujui oleh Direktur Utama disesuaikan dengan ketersediaan *resources* dan kompetensi auditor.

Persyaratan Auditor Internal

Berdasarkan SK Direksi No.209/ KEPDIR/2025 tanggal 26 November 2025 tentang Piagam Audit Intern, Auditor internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern terhadap bank secara menyeluruh;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif serta menjunjung integritas dalam pelaksanaan tugas;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang teknik audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang – undangan di bidang perbankan dan peraturan terkait lainnya;
5. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan perbankan syariah dan prinsip syariah;
6. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tertulis;
7. Mematuhi standar profesi dan kode etik auditor Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*;
8. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*, kecuali ada penetapan atau keputusan pengadilan;
9. Memahami manajemen risiko dan prinsip Tata Keola Bank yang baik;

6. Allocate audit resources, determine objectives, scope, audit schedules, and establish methodologies and audit tools to be utilized;
7. Request assistance from external parties or internal Bank parties to support the execution of audits if deemed necessary;
8. Build communication and synergistic coordination with other assurance units;
9. Possess the authority to attend strategic meetings;
10. Possess competent human resources aligned with the needs for executing their duties;
11. Establish competency standards for auditor candidates and conduct direct interviews with auditor candidates to assess the suitability and adequacy of their competencies;
12. Ensure all employees of the Internal Audit & Anti-Fraud Division participate in continuing professional development and other training corresponding to the evolving complexity and business activities of the Bank;
13. Establish criteria for utilizing external experts to support the internal audit function;
14. Conduct audits on companies affiliated with the Bank based on requests from the affiliated company approved by the President Director, adjusted to resource availability and auditor competency.

Internal Auditor Requirements

Based on Board of Directors Decree No. 209/KEPDIR/2025 dated November 26, 2025, concerning the Internal Audit Charter, internal auditors must fulfill the following requirements:

1. Possess the knowledge, skills, and competencies required to execute the Internal Audit function for the bank comprehensively;
2. Possess integrity and professional, independent, honest, and objective conduct, and uphold integrity in the execution of duties;
3. Possess knowledge and experience regarding audit techniques and relevant disciplines pertaining to their field of duty;
4. Possess knowledge of banking laws and regulations and other related regulations;
5. Possess knowledge and understanding of Sharia banking provisions and Sharia principles;
6. Possess the ability to communicate effectively, both verbally and in writing;
7. Comply with professional standards and the auditor code of ethics of the Internal Audit & Anti-Fraud Division;
8. Maintain the confidentiality of corporate information and/or data related to the execution of the duties and responsibilities of the Internal Audit & Anti-Fraud Division, unless there is a court order or decree;
9. Understand risk management and good Corporate Governance principles;

10. Senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.

Auditor internal bertanggung jawab terhadap profesinya dan selalu melaksanakan tugas sesuai standar yang berlaku serta terus mengembangkan pengetahuan, kemampuan teknis, dan disiplin ilmu yang relevan sehingga dapat memberikan hasil audit yang berkualitas. Untuk itu, auditor internal harus secara berkelanjutan diberikan pendidikan dan latihan yang cukup untuk dapat mengikuti perkembangan bisnis Bank dan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

10. Continuously enhance knowledge, skills, and other competencies through continuing professional development.

Internal auditors are responsible to their profession and must always execute their duties according to applicable standards, continuously developing relevant knowledge, technical capabilities, and disciplines to deliver high-quality audit results. Therefore, internal auditors must be continuously provided with sufficient education and training to keep pace with the Bank's business developments and possess knowledge and/or understanding of Sharia banking operations.

Komposisi Personil Audit Internal & Anti *Fraud*

Composition of Internal Audit & Anti-Fraud Personnel

No.	Jabatan	Jumlah Total	Position
1.	Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*	1	Head of Internal Audit & Anti-Fraud Division
2.	Pemimpin Bagian Audit Jaringan	1	Head of Network Audit Section
3.	Pemimpin Bagian Audit Teknologi Informasi	1	Head of Information Technology Audit Section
4.	Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit (PMTLHA)	1	Head of Quality Control & Follow-up of Audit Results (PMTLHA) Section
5.	Pimpinan Tim Anti *Fraud*	1	Head of Anti Fraud Team
6.	Auditor Bagian Audit TI	3	IT Audit Section Auditor
7.	Auditor Bagian Audit Jaringan	15	Network Audit Section Auditor
8.	Auditor Bagian PMTLHA	2	PMTLHA Section Auditor
9.	Anggota Tim Anti *Fraud*	3	Anti Fraud Team Members
Jumlah		**28**	**Total**

Sertifikasi Profesi Personil Satuan Pengawasan Internal

Professional Certification of Internal Audit Unit Personnel

No.	Sertifikasi	Jumlah Total	Position
1.	Sertifikasi Ahli pembangun integritas	2	Integrity builder Expert Certification
2.	Sertifikasi Auditor Level *Supervisor*	6	Supervisor Level Auditor Certification
3.	Sertifikasi Auditor Level *Auditor*	10	Auditor Level Auditor Certification
4.	QIA Lanjutan II	2	QIA Advanced II
5.	Sertifikasi ITIL	1	ITIL Certification
6.	Sertifikasi CPIA *(Certified Practitioner of Internal Audit)*	5	(Certified Practitioner of Internal Audit) Certification CPIA
7.	Belum Memiliki Sertifikasi	0	No Certification

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* Tahun 2025

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* tahun 2025 yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* telah melakukan hal-hal terkait dengan rencana kerja tahun 2025 sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit umum terhadap 27 unit kerja (Divisi Kantor Pusat & Unit Kantor), dengan rincian pelaksanaan

Brief Report on the Execution of Internal Audit & Anti-Fraud Division Activities in 2025

In accordance with the Annual Audit Work Plan of the Internal Audit & Anti-Fraud Division for the year 2025, which was approved by the President Director and the Board of Commissioners, the Internal Audit & Anti-Fraud Division has undertaken the following matters related to the 2025 work plan:

1. Executed general audits on 27 work units (Head Office Divisions & Branch Units), with execution details as follows:

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Description
1.	Divisi Komersial	10.03.2025 s.d. 19.03.2025	Commercial Division
2.	BRKS Lingga Dabo Singkep	21.04.2025 s.d. 29.04.2025	BRKS Lingga Dabo Singkep
3.	BRKS Lingga Daik	30.04.2025 s.d. 11.05.2025	BRKS Lingga Daik
4.	BRKS Bintan Tanjung Uban	28.04.2025 s.d. 02.05.2025	BRKS Bintan Tanjung Uban
5.	BRKS Rohul Dalu dalu	05.05.2025 s.d. 09.05.2025	BRKS Rohul Dalu dalu
6.	BRKS Rohul Rantau Kasai	14.05.2025 s.d. 16.05.2025	BRKS Rohul Rantau Kasai
7.	BRKS Tanjung Pinang	19.05.2025 s.d. 27.05.2025	BRKS Tanjung Pinang
8.	BRKS Rohul Kabun	25.05.2025 s.d. 29.05.2025	BRKS Rohul Kabun
9.	BRKS Pasir Pengaraian	01.06.2025 s.d. 13.06.2025	BRKS Pasir Pengaraian
10.	BRKS Inhil Sungai Guntung	22.06.2025 s.d. 28.06.2025	BRKS Inhil Sungai Guntung
11.	BRKS Inhu Belilas	19.08.2025 s.d. 26.08.2025	BRKS Inhu Belilas
12.	BRKS Tanjung Pinang Pamedan	02.09.2025 s.d. 12.09.2025	BRKS Tanjung Pinang Pamedan
13.	BRKS Pelalawan Sorek	17.09.2025 s.d. 23.09.2025	BRKS Pelalawan Sorek
14.	BRKS Pelalawan Bandar Sei Kijang	24.09.2025 s.d. 30.09.2025	BRKS Pelalawan Bandar Sei Kijang
15.	BRKS Pangkalan Kerinci	01.10.2025 s.d. 09.10.2025	BRKS Pangkalan Kerinci
16.	BRKS Tembilahan	22.09.2025 s.d. 02.10.2025	BRKS Tembilahan
17.	BRKS Inhu Peranap	05.10.2025 s.d. 11.10.2025	BRKS Inhu Peranap
18.	BRKS Airmolek	12.10.2025 s.d. 22.10.2025	BRKS Airmolek
19.	BRKS Jakarta	20.10.2025 s.d. 28.10.2025	BRKS Jakarta
20.	BRKS Rohil Bagan Batu	03.11.2025 s.d. 07.11.2025	BRKS Rohil Bagan Batu
21.	BRKS Rohil Ujung Tanjung	02.11.2025 s.d. 08.11.2025	BRKS Rohil Ujung Tanjung
22.	BRKS Pekanbaru Arifin Ahmad	17.11.2025 s.d. 21.11.2025	BRKS Pekanbaru Arifin Ahmad
23.	Divisi Kepatuhan	18.11.2025 s.d. 24.11.2025	Compliance Division
24.	Divisi MSDI & Audit Tematik Pengelolaan Sistem Informasi Rekam Jejak Pelaku tahun 2025	24.11.2025 s.d. 28.12.2025	MSDI Division & Thematic Audit on the Management of Perpetrator Track Record Information System 2025
25.	Divisi Treasury & Internasional	15.12.2025 s.d. 19.12.2025	Treasury & International Division
26.	BRKS Bengkalis Sungai Pakning	10.12.2025 s.d. 13.12.2025	BRKS Bengkalis Sungai Pakning
27.	BRKS Bengkalis	10.12.2025 s.d. 13.12.2025	BRKS Bengkalis

2. Melaksanakan audit tematik terhadap 3 objek audit, dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :

2. Executed thematic audits on 3 audit objects, with execution details as follows:

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Description
1.	Literasi & Inklusi Keuangan	22.07.2025 s.d. 04.08.2025	Financial Literacy & Financial Inclusion
2.	APU, PPT & PPPSPM Divisi Kepatuhan	18.11.2025 s.d. 24.11.2025	AML, CFT & PFPT Compliance Division
3.	Kinerja Sentralisasi Operasional (SO)	22.12.2025 s.d.. 30.12.2025	Operational Centralization Performance (SO)

3. Melaksanakan audit berkala oleh auditor wilayah, dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :

3. Executed periodic audits by regional auditors, with execution details as follows:

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Description
1.	BRKS Kampar Petapahan	19.03.2025 s.d 26.03.2025	BRKS Kampar Petapahan
2.	BRKS Batam Belakang Padang	23.06.2025 s.d. 26.06.2025	BRKS Batam Belakang Padang
3.	BRKS Bengkalis Duri Sudirman	16.09.2025 s.d. 22.09.2025	BRKS Bengkalis Duri Sudirman
4.	BRKS Siak Pasar Minas	06.10.2025 s.d. 10.10.2025	BRKS Siak Pasar Minas
5.	BRKS Siak Lubuk Dalam	20.10.2025 s.d. 24.10.2025	BRKS Siak Lubuk Dalam
6.	BRKS Natuna Midai	09.10.2025 s.d. 17.10.2025	BRKS Natuna Midai
7.	BRKS Pekanbaru Marpoyan	13.10.2025 s.d. 17.10.2025	BRKS Pekanbaru Marpoyan
8.	BRKS Pekanbaru Tenayan	22.10.2025 s.d. 28.10.2025	BRKS Pekanbaru Tenayan
9.	BRKS Batam Botania	20.10.2025 s.d. 24.10.2025	BRKS Batam Botania
10.	BRKS Natuna Sedanau	04.12.2025 s.d. 10.12.2025	BRKS Natuna Sedanau
11.	BRKS Dumai Sungai Sembilan	11.12.2025 s.d. 17.12.2025	BRKS Dumai Sungai Sembilan
12.	BRKS Kampar Air Tiris	22.12.2025 s.d. 24.12.2025	BRKS Kampar Air Tiris

4. Melaksanakan audit TI terhadap 11 objek audit , dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :

4. Executed IT audits on 11 audit objects, with execution details as follows:

No	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Description
1.	Internal SPBI dan Audit *Security* SPBI	15.01.2025 s.d. 14.03.2025	Internal SPBI and SPBI Security Audit
2.	Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	14.04.2025 s.d. 09.05.2025	Financial Information Service System (SLIK)
3.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	02.06.2025 s.d. 10.06.2025	Information Security Management System (SMKI)
4.	Aplikasi *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT)	02.06.2025 s.d. 20.06.2025	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Application
5.	Penyelenggaraan Teknologi Informasi (PTI)	23.07.2025 s.d. 29.08.2025	Information Technology Organization (PTI)
6.	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	23.07.2025 s.d. 29.08.2025	Payment Service Provider (PJP)
7.	*Core Banking System Vision Sharia*	23.09.2025 s.d. 31.10.2025	Core Banking System Vision Sharia
8.	*Single Customer View* Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	23.09.2025 s.d. 17.10.2025	Single Customer View Deposit Insurance Corporation (LPS)
9.	Fungsi Pengelolaan TI	12.11.2025 s.d. 26.11.2025	IT Management Function
10.	Pertahanan dan Keamanan Siber	12.11.2025 s.d. 05.12.2025	Cyber Defense and Security
11.	Aplikasi *Fraud Detection System* (FDS)	11.12.2025 s.d. 23.12.2025	Fraud Detection System (FDS) Application
12	Penugasan Audit Tematik Kinerja Sentralisasi Operasional (SO)	22.12.2025 s.d. 30.12.2025	Thematic Audit Assignment for Operational Centralization (SO) Performance
13	Penugasa Audit Berkala AW 2 BRKS Kampar Air Tiris	22.12.2025 s.d. 24.12.2025	Periodic Audit Assignment for AW 2 BRKS Kampar Air Tiris

5. Melakukan audit investigasi terhadap 9 (sembilan) isu, dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :

5. Conducted investigative audits on 9 (nine) issues, with execution details as follows:

No	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Description
1.	Pembiayaan MKM Kolektif Anggota Kopsa MAS Sekeladi pada BRKS Siak Kandis (Perpanjangan)	15.01.2025 s.d. 07.02.2025	Collective Micro-Financing of Kopsa MAS Sekeladi Members at BRKS Siak Kandis (Extension)
2.	Tata Kelola Persediaan BRKS Tanjung Pinang	18.02.2025 s.d. 05.03.2025	Inventory Governance BRKS Tanjung Pinang
3.	Penyimpangan dan Pembebanan Biaya Rapat Pada Divisi *Treasury* dan *International Banking*	10.03.2025 s.d. 10.04.2025	Irregularities and Charging of Meeting Expenses in the Treasury and International Banking Division
4.	Penyimpangan dan Pembebanan Biaya Rapat Pada Divisi Treasury dan International Banking (Perpanjangan)	11.04.2025 s.d. 22.04.2025	Irregularities and Charging of Meeting Expenses in the Treasury and International Banking Division (Extension)
5.	Indikasi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang sebagai Pemimpin Unit Kantor BRKS Rohil Ujung Tanjung	17.06.2025 s.d. 03.07.2025	Indications of Irregularities and Abuse of Authority as Branch Unit Head of BRKS Rohil Ujung Tanjung
6.	BRKS Rohil Ujung Tanjung	17.06.2025 s.d. 03.07.2025	BRKS Rohil Ujung Tanjung
7.	BRKS Kampar Flamboyan dan BRKS Kampar Kota Bangun	04.08.2025 s.d. 29.08.2025	BRKS Kampar Flamboyan and BRKS Kampar Kota Bangun
8.	BRKS Kampar Flamboyan dan BRKS Kampar Kota Bangun(Perpanjangan)	01.09.2025 s.d. 10.09.2025	BRKS Kampar Flamboyan and BRKS Kampar Kota Bangun (Extension)
9.	BRKS Dumai	12.11.2025 s.d. 02.12.2025	BRKS Dumai

6.. Melakukan audit rutin oleh Auditor Wilayah Merupakan *continuous auditing* atas 6 (enam) unit kantor cabang yang merupakan tempat domisili auditor wilayah yaitu :

6. Conducted routine audits by Regional Auditors representing continuous auditing over 6 (six) branch office units which serve as the domicile for regional auditors, namely:

No.	Keterangan	Description
1.	BRK Syariah Cabang Utama	BRK Syariah Main Branch
2.	BRK Syariah Cabang Siak	BRK Syariah Siak Branch
3.	BRK Syariah Cabang Dumai	BRK Syariah Dumai Branch
4.	BRK Syariah Cabang Bangkinang	BRK Syariah Bangkinang Branch
5.	BRK Syariah Cabang Batam	BRK Syariah Batam Branch
6.	BRK Syariah Cabang Ranai	BRK Syariah Ranai Branch

7. Melakukan *Quality Assurance* terhadap 18 pelaksanaan Audit Umum dan 08 pelaksanaan Audit Teknologi Informasi.
8. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok Pokok Hasil Audit kepada OJK setiap semester.

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan personil Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*, auditor internal diikutsertakan dalam pendidikan, pelatihan, maupun seminar yang berkaitan dengan audit dan perkembangannya. Materi pelatihan yang didapat dari kegiatan tersebut, nantinya akan disampaikan kepada auditor lainnya melalui mekanisme "*Sharing Moment*" sebagai bahan masukan dan pembelajaran untuk dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh auditor pada Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*.

7. Conducted Quality Assurance on 18 General Audit executions and 08 Information Technology Audit executions.
8. Submitted the Implementation Report and Summary of Audit Results to the OJK every semester.

To broaden the insight and knowledge of Internal Audit & Anti-Fraud Division personnel, internal auditors participate in education, training, and seminars relating to auditing and its advancements. The training materials acquired from these activities are subsequently shared with other auditors through a "Sharing Moment" mechanism as input and learning to provide added value to all auditors within the Internal Audit & Anti-Fraud Division.

Tabel Pengembangan Kompetensi Auditor Internal 2025
Table of Internal Auditor Competency Development 2025

No.	NIK	Nama	Judul Training Training Title	Kategori Category	Tempat Location	Tgl Awal Start Date	Tgl Akhir End Date	Vendor Vendor
1	011037	Tengku Elfriandra Hidayat	Sosialisasi *Learning Management System* (LMS) Sistem Pembelajaran BRK Syariah (Siberkah) bagi Pegawai Kantor Pusat (I-001) Socialization of Learning Management System (LMS) BRK Syariah Learning System (Siberkah) for Head Office Employees (I-001)	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRKS	1/6/2025	1/6/2025	Bank Riau Kepri Syariah
2	010337	Muhammad Feroz	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
3	010415	Alan Asy'ari Al Falah	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
4	010487	Linda	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
5	010556	Marsan Sanogian Irli	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
6	010562	Ramadhan Gusti	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
7	010591	Junaidi	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
8	010614	Siska Andriany	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
9	010623	Ahmad Rifa'i	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
10	010625	Ahmad Hijas	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
11	010647	Masnuryadi Masbak	Workshop Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	Workshop	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
12	010692	Abdil Barr	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
13	010718	Afri Muhammad	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
14	010735	Dini Nursanty Harahap	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
15	010759	Mex Fitra	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
16	010777	Raja Bambang Gunawan	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
17	010790	T. Lodya Desvira	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah

No.	NIK	Nama	Judul Training Training Title	Kategori Category	Tempat Location	Tgl Awal Start Date	Tgl Akhir End Date	Vendor Vendor
18	010791	Tanty Dewayani	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
19	010856	Ngatini	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
20	010863	Ade Putra	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
21	010922	Fadly Isriandy Nasution	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
22	010964	Lita Wuryani	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
23	011025	Siska	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
24	011037	Tengku Elfriandra Hidayat	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
25	011088	Nur Fadillah	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
26	011155	Helmy Arief	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
27	011263	Tengku Masyitoh	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
28	012596	Dirga Bakti Prawira	*Workshop* Pengembangan Auditor Internal & Pertemuan Auditor Internal Tahun 2025 Internal Auditor Development Workshop & Internal Auditor Meeting 2025	*Workshop*	Nagoya Hill Hotel Batam	1/22/2025	1/24/2025	Bank Riau Kepri Syariah
29	010964	Lita Wuryani	*Training* Penerapan *Know Your Employe* (KYE) yang Efektif untuk Mencegah Terjadinya Anti Fraud Training on Effective Implementation of Know Your Employee (KYE) to Prevent Anti-Fraud Occurrences	*Training*	Bandung	1/30/2025	1/31/2025	PT Nayottama Dinamika Indonesia (Nayottama)
30	012596	Dirga Bakti Prawira	*Training* Penerapan *Know Your Employe* (KYE) yang Efektif untuk Mencegah Terjadinya Anti Fraud Training on Effective Implementation of Know Your Employee (KYE) to Prevent Anti-Fraud Occurrences	*Training*	Bandung	1/30/2025	1/31/2025	PT Nayottama Dinamika Indonesia (Nayottama)
31	010625	Ahmad Hijas	Pelatihan dan Sertifikasi ISO/IEC 27001 Lead Auditor (P-011) ISO/IEC 27001 Lead Auditor Training and Certification (P-011)	Sertifikasi	Jakarta	2/3/2025	2/6/2025	PT. Multimatics
32	010647	Masnuryadi Masbak	Pelatihan dan Sertifikasi ISO/IEC 27001 Lead Auditor (P-011) ISO/IEC 27001 Lead Auditor Training and Certification (P-011)	Sertifikasi	Jakarta	2/3/2025	2/6/2025	PT. Multimatics
33	010735	Dini Nursanty Harahap	Pelatihan dan Sertifikasi ISO/IEC 27001 Lead Auditor (P-011) ISO/IEC 27001 Lead Auditor Training and Certification (P-011)	Sertifikasi	Jakarta	2/3/2025	2/6/2025	PT. Multimatics
34	011155	Helmy Arief	Pelatihan dan Sertifikasi ISO/IEC 27001 Lead Auditor (P-011) ISO/IEC 27001 Lead Auditor Training and Certification (P-011)	Sertifikasi	Jakarta	2/3/2025	2/6/2025	PT. Multimatics
35	010614	Siska Andriany	*Certified Practitioner Internal Audit* (CPIA) Certified Practitioner Internal Audit (CPIA)	Sertifikasi	MDM BRK Syariah	2/10/2025	2/21/2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
36	011025	Siska	*Certified Practitioner Internal Audit* (CPIA) Certified Practitioner Internal Audit (CPIA)	Sertifikasi	MDM BRK Syariah	2/10/2025	2/21/2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)

No.	NIK	Nama	Judul Training Training Title	Kategori Category	Tempat Location	Tgl Awal Start Date	Tgl Akhir End Date	Vendor Vendor
37	010692	Abdil Barr	Sosialisasi *Awareness* Pelindungan Data Pribadi Pada Kantor Wilayah Pekanbaru Socialization on Personal Data Protection Awareness at Pekanbaru Regional Office	Sosialisasi	Unit Kantor Masing Masing	2/10/2025	2/24/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
38	010791	Tanty Dewayani	*Workshop* Pengendalian Mutu Audit Internal Bank Berbasis Risiko untuk Peningkatan Standar Perbankan Risk-Based Bank Internal Audit Quality Control Workshop to Elevate Banking Standards	Workshop	Jakarta	2/20/2025	2/21/2025	Learning Banking Center (LBC)
39	011037	Tengku Elfriandra Hidayat	*Workshop* Pengendalian Mutu Audit Internal Bank Berbasis Risiko untuk Peningkatan Standar Perbankan Risk-Based Bank Internal Audit Quality Control Workshop to Elevate Banking Standards	*Workshop*	Jakarta	2/20/2025	2/21/2025	Learning Banking Center (LBC)
40	010647	Masnuryadi Masbak	*Workshop* Digital Forensik di Sektor Jasa Keuangan Digital Forensics in the Financial Services Sector Workshop	*Workshop*	Jakarta	4/28/2025	4/30/2025	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
41	010856	Ngatini	Pelatihan Implementasi Strategi Anti-Fraud (SAF) yang Efektif sejalan dengan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan Effective Anti-Fraud Strategy (SAF) Implementation Training in accordance with POJK Number 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions	*Training*	Jakarta	4/29/2025	4/30/2025	PT Nayottama Dinamika Indonesia (Nayottama)
42	010922	Fadly Isriandy Nasution	Pelatihan Implementasi Strategi Anti-*Fraud* (SAF) yang Efektif sejalan dengan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan Effective Anti-Fraud Strategy (SAF) Implementation Training in accordance with POJK Number 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions	*Training*	Jakarta	4/29/2025	4/30/2025	PT Nayottama Dinamika Indonesia (Nayottama)
43	010614	Siska Andriany	Program Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Preparation Program Level 4	*Training*	Unit Kantor Masing-masing	4/16/2025	4/17/2025	CV Jamsukin Makmur Sejahtera (JMS Education)
44	010614	Siska Andriany	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Examination Level 4	Ujian	Unit Kantor Masing-masing	4/25/2025	4/25/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
45	010337	Muhammad Feroz	Program Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Recertification Preparation Program Level 5	*Training*	Unit Kantor Masing-masing	5/6/2025	5/7/2025	Muamalat Institute
46	010922	Fadly Isriandy Nasution	Program Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Recertification Preparation Program Level 5	*Training*	Unit Kantor Masing-masing	5/6/2025	5/7/2025	Muamalat Institute
47	010625	Ahmad Hijas	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Examination Level 4	Ujian	Unit Kantor Masing-masing	5/23/2025	5/23/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
48	010735	Dini Nursanty Harahap	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Examination Level 4	Ujian	Unit Kantor Masing-masing	5/23/2025	5/23/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
49	010863	Ade Putra	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Examination Level 4	Ujian	Unit Kantor Masing-masing	5/23/2025	5/23/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
50	010964	Lita Wuryani	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Examination Level 4	Ujian	Unit Kantor Masing-masing	5/23/2025	5/23/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
51	011037	Tengku Elfriandra Hidayat	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Examination Level 4	Ujian	Unit Kantor Masing-masing	5/23/2025	5/23/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
52	011155	Helmy Arief	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Examination Level 4	Ujian	Unit Kantor Masing-masing	5/23/2025	5/23/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
53	010337	Muhammad Feroz	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Examination Level 4	Sertifikasi	Unit Kantor Masing-masing	5/16/2025	5/16/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
54	010922	Fadly Isriandy Nasution	Ujian Resertikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Recertification Examination Level 5	Sertifikasi	Unit Kantor Masing-masing	5/16/2025	5/16/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)

No.	NIK	Nama	Judul Training Training Title	Kategori Category	Tempat Location	Tgl Awal Start Date	Tgl Akhir End Date	Vendor Vendor
55	011088	Nur Fadillah	Pelatihan dan Sertifikasi Taksir Gadai Emas (RAHN) Batch 1 Gold Pawn Appraiser Training and Certification (RAHN) Batch 1	Pelatihan	Pekanbaru	5/5/2025	5/6/2025	One Point Indonesia
56	010718	Afri Muhammad	Pelatihan dan Sertifikasi Penaksir Emas BRK Syariah Tahun 2025 Batch 2 BRK Syariah Gold Appraiser Training and Certification 2025 Batch 2	Pelatihan	Batam	5/15/2025	5/16/2025	One Point Indonesia
57	011263	Tengku Masyitoh	Pelatihan dan Sertifikasi Penaksir Emas BRK Syariah Tahun 2025 Batch 2 BRK Syariah Gold Appraiser Training and Certification 2025 Batch 2	Pelatihan	Batam	5/15/2025	5/16/2025	One Point Indonesia
58	010614	Siska Andriany	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
59	010487	Linda	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
60	010863	Ade Putra	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
61	010625	Ahmad Hijas	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
62	010735	Dini Nursanty Harahap	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
63	010922	Fadly Isriandy Nasution	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
64	010777	Raja Bambang Gunawan	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
65	010623	Ahmad Rifa'i	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
66	011037	Tengku Elfriandra Hidayat	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
67	011155	Helmy Arief	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
68	010556	Marsan Sanogian Irli	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
69	010337	Muhammad Feroz	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
70	010964	Lita Wuryani	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
71	010791	Tanty Dewayani	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
72	010647	Masnuryadi Masbak	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)

No.	NIK	Nama	Judul Training Training Title	Kategori Category	Tempat Location	Tgl Awal Start Date	Tgl Akhir End Date	Vendor Vendor
73	011263	Tengku Masyitoh	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
74	010759	Mex Fitra	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
75	010562	Ramadhan Gusti	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
76	011025	Siska	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
77	010856	Ngatini	*Sosialisasi Awareness* Pelindungan Data Pribadi Kantor Pusat Socialization on Personal Data Protection Awareness for Head Office	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	6/2/2025	6/2/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
78	010562	Ramadhan Gusti	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjeng 5 Risk Management Recertification Preparation Level 5	Training	Unit Kantor Masing-masing	6/10/2025	6/11/2025	Muamalat Institute
79	010647	Masnuryadi Masbak	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjeng 5 Risk Management Recertification Preparation Level 5	Training	Unit Kantor Masing-masing	6/10/2025	6/11/2025	Muamalat Institute
80	010647	Masnuryadi Masbak	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Recertification Examination Level 5 Risk Management Recertification Examination Level 5	Sertifikasi	Unin Kantor Masing-masing	6/20/2025	6/20/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
81	010562	Ramadhan Gusti	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Recertification Examination Level 5	Sertifikasi	Unin Kantor Masing-masing	6/20/2025	6/20/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
82	010759	Mex Fitra	Pelatihan Audit Intern Perbankan Syariah Sharia Banking Internal Audit Training	Training	MDM BRK Syariah	6/11/2025	6/11/2025	Muamalat Institute
83	011037	Tengku Elfriandra Hidayat	Pelatihan Audit Intern Perbankan Syariah Sharia Banking Internal Audit Training	Training	MDM BRK Syariah	6/11/2025	6/11/2025	Muamalat Institute
84	011263	Tengku Masyitoh	Pelatihan Audit Intern Perbankan Syariah Sharia Banking Internal Audit Training	Training	MDM BRK Syariah	6/11/2025	6/11/2025	Muamalat Institute
85	012596	Dirga Bakti Prawira	Pelatihan Audit Intern Perbankan Syariah Sharia Banking Internal Audit Training	Training	MDM BRK Syariah	6/11/2025	6/11/2025	Muamalat Institute
86	010856	Ngatini	Konsinyering Digital Learning Transformation Digital Learning Transformation Consignment	Pelatihan	Batam	6/18/2025	6/19/2025	PT Wahana Tatar Wirakelola
87	010759	Mex Fitra	*Focus Group Discussion* (FGD) Pemahaman Penyusunan User Requirement Form (URF) Focus Group Discussion (FGD) on Understanding the Preparation of User Requirement Forms (URF)	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	7/14/2025	7/14/2025	Bank Riau Kepri Syariah
88	011037	Tengku Elfriandra Hidayat	*Focus Group Discussion* (FGD) Pemahaman Penyusunan User Requirement Form (URF) Focus Group Discussion (FGD) on Understanding the Preparation of User Requirement Forms (URF)	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	7/14/2025	7/14/2025	Bank Riau Kepri Syariah
89	010735	Dini Nursanty Harahap	Pelaksanaan Wisuda Pengukuhan *Certified Practitioner Of Internal Audit* (CPIA) dan Konferen Graduation Inauguration for Certified Practitioner Of Internal Audit (CPIA) and Conference	*Training*	Yogyakarta	7/2/2025	7/3/2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
90	010790	T. Lodya Desvira	Pelaksanaan Wisuda Pengukuhan *Certified Practitioner Of Internal Audit* (CPIA) dan Konferen Graduation Inauguration for Certified Practitioner Of Internal Audit (CPIA) and Conference	*Training*	Yogyakarta	7/2/2025	7/3/2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
91	011263	Tengku Masyitoh	Pelaksanaan Wisuda Pengukuhan *Certified Practitioner Of Internal Audit* (CPIA) dan Konferen Graduation Inauguration for Certified Practitioner Of Internal Audit (CPIA) and Conference	*Training*	Yogyakarta	7/2/2025	7/3/2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)

No.	NIK	Nama	Judul Training Training Title	Kategori Category	Tempat Location	Tgl Awal Start Date	Tgl Akhir End Date	Vendor Vendor
92	010777	Raja Bambang Gunawan	*Workshop* Bidang Hukum "Bagaimana Mitigasi Risiko Hukum dan Pencegahan Bank dalam rangka mengantisipasi Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Korupsi dan Cybercrime" Legal Field Workshop "How to Mitigate Legal Risks and Bank Prevention to Anticipate Banking Crimes, Corruption Crimes, and Cybercrime"	*Workshop*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	7/28/2025	7/29/2025	Bank Riau Kepri Syariah
93	010591	Junaidi	*Workshop* Bidang Hukum "Bagaimana Mitigasi Risiko Hukum dan Pencegahan Bank dalam rangka mengantisipasi Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Korupsi dan Cybercrime" Legal Field Workshop "How to Mitigate Legal Risks and Bank Prevention to Anticipate Banking Crimes, Corruption Crimes, and Cybercrime"	*Workshop*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	7/28/2025	7/29/2025	Bank Riau Kepri Syariah
94	010625	Ahmad Hijas	Pelatihan dan Sertifikasi IT Auditor BNSP IT Auditor BNSP Training and Certification	Sertifikasi	Yogyakarta	7/14/2025	7/18/2025	Inixindo Yogyakarta
95	011155	Helmy Arief	Pelatihan dan Sertifikasi IT Auditor BNSP IT Auditor BNSP Training and Certification	Sertifikasi	Yogyakarta	7/14/2025	7/18/2025	Inixindo Yogyakarta
96	010623	Ahmad Rifa'i	*Training Quality Assurance Banking Industry Syariah* Training Quality Assurance Banking Industry Syariah	*Training*	Jakarta	7/24/2025	7/25/2025	THE MILLENIALS INSTITUTE
97	010791	Tanty Dewayani	*Training Quality Assurance Banking Industry Syariah* Training Quality Assurance Banking Industry Syariah	*Training*	Jakarta	7/24/2025	7/25/2025	THE MILLENIALS INSTITUTE
98	011037	Tengku Elfriandra Hidayat	*Training Quality Assurance Banking Industry Syariah* Training Quality Assurance Banking Industry Syariah	*Training*	Jakarta	7/24/2025	7/25/2025	THE MILLENIALS INSTITUTE
99	010735	Dini Nursanty Harahap	*Training* Remitten ISO 20022 RMA Portal, SWIFT REF dan MX PACS 008 dan PACS 009 Training Remittance ISO 20022 RMA Portal, SWIFT REF and MX PACS 008 and PACS 009	*Training*	Nagoya Hill Hotel	7/26/2025	7/27/2025	Bank Riau Kepri Syariah
100	010591	Junaidi	*Training* Aspek Hukum Pembiayaan Batch 1 Training on Legal Aspects of Financing Batch 1	*Training*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	7/30/2025	7/30/2025	Simpul Banking Training Center
101	011263	Tengku Masyitoh	Program Pemeliharaan Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Maintenance Program Level 4	Sertifikasi	Unit Kantor Masing-masing	7/25/2025	7/25/2025	Muamalat Institute
102	010574	Agussalim	Program Pemeliharaan Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Maintenance Program Level 5	Refreshment	Unit Kantor Masing-masing	8/18/2025	8/18/2025	PT Jasa Manajemen Strategis
103	010623	Ahmad Rifa'i	Program Pemeliharaan Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Maintenance Program Level 5	Refreshment	Unit Kantor Masing-masing	8/18/2025	8/18/2025	PT Jasa Manajemen Strategis
104	010415	Alan Asy'ari Al Falah	Program Pemeliharaan Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Maintenance Program Level 5	Refreshment	Unit Kantor Masing-masing	8/18/2025	8/18/2025	PT Jasa Manajemen Strategis
105	010556	Marsan Sanogian Irli	Program Pemeliharaan Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Maintenance Program Level 5	Refreshment	Unit Kantor Masing-masing	8/18/2025	8/18/2025	PT Jasa Manajemen Strategis
106	010777	Raja Bambang Gunawan	Program Pemeliharaan Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Maintenance Program Level 5	Refreshment	Unit Kantor Masing-masing	8/18/2025	8/18/2025	PT Jasa Manajemen Strategis
107	010777	Raja Bambang Gunawan	*Training Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Training Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	*Assessment*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	8/14/2025	8/14/2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
108	010556	Marsan Sanogian Irli	*Training Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Training Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	*Assessment*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	8/14/2025	8/14/2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
109	010487	Linda	*Training Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Training Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	*Assessment*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	8/14/2025	8/14/2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
110	010614	Siska Andriany	*Training Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Training Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	*Assessment*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	8/14/2025	8/14/2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
111	010337	Muhammad Feroz	*Training Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Training Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	*Assessment*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	8/14/2025	8/14/2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta

No.	NIK	Nama	Judul Training Training Title	Kategori Category	Tempat Location	Tgl Awal Start Date	Tgl Akhir End Date	Vendor Vendor
112	010863	Ade Putra	*Training Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Training Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	*Assessment*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	8/14/2025	8/14/2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
113	010337	Muhammad Feroz	*Training Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Training Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	*Training*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	8/14/2025	8/15/2025	PT LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI RISIKO MANAJEMEN GAGASAN
114	010487	Linda	*Training Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Training Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	*Training*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	8/14/2025	8/15/2025	PT LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI RISIKO MANAJEMEN GAGASAN
115	010556	Marsan Sanogian Irli	*Training Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Training Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	*Training*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	8/14/2025	8/15/2025	PT LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI RISIKO MANAJEMEN GAGASAN
116	010614	Siska Andriany	*Training Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Training Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	*Training*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	8/14/2025	8/15/2025	PT LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI RISIKO MANAJEMEN GAGASAN
117	010777	Raja Bambang Gunawan	*Training Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Training Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	*Training*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	8/14/2025	8/15/2025	PT LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI RISIKO MANAJEMEN GAGASAN
118	010863	Ade Putra	*Training Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Training Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	*Training*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	8/14/2025	8/15/2025	PT LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI RISIKO MANAJEMEN GAGASAN
119	010791	Tanty Dewayani	Pembekalan & Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Preparation & Recertification of Risk Management Level 4	Sertifikasi	Unit Kantor Peserta	8/7/2025	8/8/2025	Muamalat Institute
120	010790	T. Lodya Desvira	Pembekalan & Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Preparation & Recertification of Risk Management Level 4	Sertifikasi	Unit Kantor Peserta	8/7/2025	8/8/2025	Muamalat Institute
121	010759	Mex Fitra	Pembekalan & Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Preparation & Recertification of Risk Management Level 4	Sertifikasi	Unit Kantor Peserta	8/7/2025	8/8/2025	Muamalat Institute
122	011088	Nur Fadillah	Pembekalan & Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Preparation & Recertification of Risk Management Level 4	Sertifikasi	Unit Kantor Peserta	8/7/2025	8/8/2025	Muamalat Institute
123	011025	Siska	Pembekalan & Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Preparation & Recertification of Risk Management Level 4	Sertifikasi	Unit Kantor Peserta	8/7/2025	8/8/2025	Muamalat Institute
124	010718	Afri Muhammad	Pembekalan & Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Preparation & Recertification of Risk Management Level 4	Sertifikasi	Unit Kantor Peserta	8/7/2025	8/8/2025	Muamalat Institute
125	010791	Tanty Dewayani	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Examination Level 4	Sertifikasi	Unit Kantor Peserta	8/22/2025	8/22/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
126	010790	T. Lodya Desvira	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Examination Level 4	Sertifikasi	Unit Kantor Peserta	8/22/2025	8/22/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
127	010759	Mex Fitra	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Examination Level 4	Sertifikasi	Unit Kantor Peserta	8/22/2025	8/22/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
128	011088	Nur Fadillah	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Examination Level 4	Sertifikasi	Unit Kantor Peserta	8/22/2025	8/22/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
129	010718	Afri Muhammad	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Recertification Examination Level 4	Sertifikasi	Unit Kantor Peserta	8/22/2025	8/22/2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
130	010922	Fadly Isriandy Nasution	Pelatihan dan Pengujian Keamanan Siber Berbasis *Skenario Cyber Drill* dan *Table Top Exercise Bersama* BSSN Cyber Security Training and Testing Based on Cyber Drill and Table Top Exercise Scenarios with BSSN	Pelatihan	Menara Dang Merdu BRK Syariah	9/17/2025	9/18/2025	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	NIK	Nama	Judul Training Training Title	Kategori Category	Tempat Location	Tgl Awal Start Date	Tgl Akhir End Date	Vendor Vendor
131	010625	Ahmad Hijas	Pelatihan dan Pengujian Keamanan Siber Berbasis *Skenario Cyber Drill* dan Table *Top Exercise* Bersama BSSN Cyber Security Training and Testing Based on Cyber Drill and Table Top Exercise Scenarios with BSSN	Pelatihan	Menara Dang Merdu BRK Syariah	9/17/2025	9/18/2025	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
132	010922	Fadly Isriandy Nasution	Pelatihan Antikorupsi bagi BUMD Klaster Bank Daerah Tahun 2025 Anti-Corruption Training for BUMD Regional Bank Cluster 2025	*Training*	Jakarta	9/23/2025	9/26/2025	Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)
133	010856	Ngatini	*Training Microsoft Office* 365 untuk Pegawai Unit Kerja Kantor Pusat Microsoft Office 365 Training for Head Office Work Unit Employees	*Training*	Menara Dang Merdu BRK Syariah	9/29/2025	9/29/2025	PT. Multipolar
134	012596	Dirga Bakti Prawira	*Training Microsoft Office* 365 untuk Pegawai Unit Kerja Kantor Pusat Microsoft Office 365 Training for Head Office Work Unit Employees	Training	Menara Dang Merdu BRK Syariah	9/29/2025	9/29/2025	PT. Multipolar
135	010647	Masnuryadi Masbak	*Workshop Cybersecurity Risk Valution* Cybersecurity Risk Valuation Workshop	*Workshop*	Jakarta	10/16/2025	10/17/2025	Econand
136	010647	Masnuryadi Masbak	Sosialisasi BPP Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur dan SOP Pengelolaan Matrik User Core Banking System Socialization of Company Guidelines Manual (BPP) Guidelines for Formulating Policies and Procedures and SOPs for the Management of Core Banking System User Matrix	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRK Syariah	11/5/2025	11/5/2025	Bank Riau Kepri Syariah
137	010574	Agussalim	Pelatihan Sistem Pengendalian Intren Internal Control System Training	*Training*	Jakarta	11/6/2025	11/7/2025	PT Dakaratama Global Kreasi
138	010647	Masnuryadi Masbak	Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) & (SP & FMI BI serta KPDHN) Tahun 2025 Socialization of Compliance Assessment Result Report (LHPK) & (SP & FMI BI as well as KPDHN) 2025	Sosialisasi	Bali	11/27/2025	11/27/2025	Bank Indonesia
139	010562	Ramadhan Gusti	Pembinaan Spiritual Islami (Tarbiyah Ruhiyah) Islamic Spiritual Development (Tarbiyah Ruhiyah)	Sosialisasi	Mesjid Baiturrahim BRK Syariah	11/28/2025	11/28/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
140	010614	Siska Andriany	Pembinaan Spiritual Islami (Tarbiyah Ruhiyah) Islamic Spiritual Development (Tarbiyah Ruhiyah)	Sosialisasi	Mesjid Baiturrahim BRK Syariah	11/28/2025	11/28/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
141	010759	Mex Fitra	Pembinaan Spiritual Islami (Tarbiyah Ruhiyah) Islamic Spiritual Development (Tarbiyah Ruhiyah)	Sosialisasi	Mesjid Baiturrahim BRK Syariah	11/28/2025	11/28/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
142	011025	Siska	Pembinaan Spiritual Islami (Tarbiyah Ruhiyah) Islamic Spiritual Development (Tarbiyah Ruhiyah)	Sosialisasi	Mesjid Baiturrahim BRK Syariah	11/28/2025	11/28/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
143	011155	Helmy Arief	Pembinaan Spiritual Islami (Tarbiyah Ruhiyah) Islamic Spiritual Development (Tarbiyah Ruhiyah)	Sosialisasi	Mesjid Baiturrahim BRK Syariah	11/28/2025	11/28/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
144	010856	Ngatini	*Training Trade Based Money Laundring*: Risiko, Tipilogi dan Deteksi/APU PPT Trade Based Money Laundering Training: Risks, Typologies and Detection/AML CFT	*Training*	Unit Kantor Peserta	11/27/2025	11/27/2025	Muamalat Institute
145	010964	Lita Wuryani	*Training Trade Based Money Laundring*: Risiko, Tipilogi dan Deteksi/APU PPT Trade Based Money Laundering Training: Risks, Typologies and Detection/AML CFT	*Training*	Unit Kantor Peserta	11/27/2025	11/27/2025	Muamalat Institute
146	010614	Siska Andriany	Pembinaan Spiritual Islami (Tarbiyah Ruhiyah) di Masjid MDM BRK Syariah Islamic Spiritual Development (Tarbiyah Ruhiyah) at MDM Mosque BRK Syariah	Sosialisasi	Mesjid Baiturrahim BRK Syariah	12/19/2025	12/19/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
147	010647	Masnuryadi Masbak	Pembinaan Spiritual Islami (Tarbiyah Ruhiyah) di Masjid MDM BRK Syariah Islamic Spiritual Development (Tarbiyah Ruhiyah) at MDM Mosque BRK Syariah	Sosialisasi	Mesjid Baiturrahim BRK Syariah	12/19/2025	12/19/2025	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)

STRATEGI ANTI *FRAUD*
ANTI-FRAUD STRATEGY

Strategi anti *fraud* yang diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat-perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

Pencegahan

Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup :

1. Kesadaran Anti *Fraud*
   Kesadaran Anti *Fraud* adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait. Melalui kepemimpinan yang baik didukung dengan anti *fraud awareness* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank terhadap pengendalian *fraud*. Moral dan *awareness* dari pimpinan terhadap anti *fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkannya. Upaya untuk menumbuhkan Kesadaran Anti *Fraud* dilakukan melalui :
   a. Penyusunan dan Sosialisasi Deklarasi Anti *Fraud*
   b. Program Budaya Anti *Fraud* bagi Pegawai
2. Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai potensi risiko terjadinya *fraud*. Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Bank.
3. Kebijakan Mengenal Pegawai Kebijakan Mengenal Pegawai berlaku untuk :
   a. Calon Pegawai
   b. Pegawai *Existing*
   c. Pengawasan dan sarana pelaporan
   d. Sanksi *administrative*

Deteksi

Pilar deteksi dalam strategi anti *fraud* merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, antara lain melalui :

1. *Whistleblowing System* (WBS)
2. Pemeriksaan Dadakan (*Surprise* Audit)
3. Sistem Pengawasan
4. Aplikasi Anti *Fraud*
5. Aplikasi *Fraud Detection System*

Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi memuat langkahlangkah yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian *fraud*, yang paling kurang mencakup :

1. Investigasi

The anti-fraud strategy implemented through the fraud control system is executed using instruments derived from 4 (four) interrelated pillars, as follows:

Prevention

The prevention pillar comprises instruments aimed at mitigating the potential occurrence of fraud, which at a minimum include:

1. Anti-Fraud Awareness
   An effort to cultivate awareness regarding the importance of fraud prevention among all relevant parties. Through effective leadership supported by high anti-fraud awareness, it is expected that a sense of collective responsibility for fraud control will flourish across all elements of the Bank. The morality and awareness of the leadership regarding anti-fraud must permeate every policy or regulation established. Efforts to foster Anti-Fraud Awareness are conducted through:
   a. Formulation and Socialization of the Anti-Fraud Declaration.
   b. Anti-Fraud Culture Programs for Employees.
2. vulnerability identification is a risk management process to identify, analyze, and assess the potential risk of fraud. Generally, vulnerability identification is aimed at identifying inherent fraud risks within every activity that could potentially result in losses for the Bank.
3. Know Your Employee (KYE) Policy The Know Your Employee policy applies to:
   a. Prospective Employees (Candidates).
   b. Existing Employees.
   c. Supervision and reporting mechanisms.
   d. Administrative sanctions.

Detection

The detection pillar within the anti-fraud strategy is an integral part of the fraud control system, containing measures to identify and discover fraud within the Bank's business activities, including through:

1. Whistleblowing System (WBS).
2. Surprise Audits.
3. Surveillance Systems.
4. Anti-Fraud Applications.
5. Fraud Detection System (FDS) Applications.

Investigation, Reporting, and Sanctions

The investigation, reporting, and sanctions pillar contains steps aimed at gathering information and establishing reporting systems, including the imposition of sanctions for fraud incidents, which at a minimum include:

Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian fraud yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pelaporan
   Hasil akhir dari proses investigasi adalah laporan hasil investigasi yang disampaikan kepada Direktur Utama.
3. Pengenaan Sanksi
   Kebijakan pengenaan sanksi baik tentang mekanisme pengenaan sanksi, pihak yang berwenang mengenakan sanksi maupun jenis-jenis sanksi, secara khusus diatur di dalam kebijakan Direksi Bank tersendiri.

Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.

1. Pemantauan
   Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *fraud* adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian *fraud*, baik sesuai ketentuan internal Bank maupun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi
   Bank mengadministrasikan dan memelihara data kejadian *fraud (fraud profiling)* secara rutin. Data kejadian tersebut akan digunakan sebagai alat bantu evaluasi.
3. Tindak lanjut
   Berdasarkan data kejadian *fraud* dan hasil evaluasi maka dilakukan perbaikan kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa.

Pengembangan Kompetensi Ketua dan Anggota Tim Anti *Fraud*

BRK Syariah memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Ketua dan anggota Tim Anti *Fraud* dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Sepanjang tahun 2025 telah dilakukan berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan guna meningkatkan kompetensi ketua dan anggota tim anti *fraud*.

1. Investigation
   Investigations are conducted to gather evidence related to incidents reasonably suspected to be fraudulent acts. Investigation is a critical component of the fraud control system, signaling to all relevant parties that every detected indication of fraud will be processed according to applicable investigation standards, and perpetrators will be dealt with in accordance with prevailing regulations.
2. Reporting
   The final output of the investigation process is an Investigation Result Report submitted to the President Director.
3. Imposition of Sanctions
   Policies regarding the imposition of sanctions including the sanctioning mechanism, the authorized parties to impose sanctions, and the types of sanctions are specifically regulated within a separate Board of Directors policy.

Monitoring, Evaluation, and Follow-up

The monitoring, evaluation, and follow-up pillar contains instruments aimed at monitoring and evaluating fraud incidents, as well as the necessary follow-up actions based on evaluation results.

1. Monitoring
   A crucial step in implementing the fraud control system is monitoring the follow-up actions taken regarding fraud incidents, ensuring compliance with both the Bank's internal regulations and applicable laws and legislation.

2. Evaluation
   The Bank routinely administers and maintains fraud incident data (fraud profiling). This incident data serves as a tool for evaluation.

3. Follow-up
   Based on fraud incident data and evaluation results, improvements are made to address weaknesses and strengthen the internal control system to prevent the recurrence of fraud due to similar vulnerabilities.

Competency Development of the Anti-Fraud Team Chairperson and Members

BRK Syariah facilitates the implementation of development programs for the Chairperson and members of the Anti-Fraud Team to enhance their competencies. Throughout 2025, various training and development activities were conducted to improve the expertise of the anti-fraud team.

Program Pengendalian Mutu

Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* memiliki program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya, dengan melakukan:

1. Supervisi, untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.
2. Review Internal, dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta objektivitas atas pelaksanaan audit, Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* melalui Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* dan/atau Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit telah melakukan tugas *Quality Assurance* (QA) terhadap terhadap 18 (delapan belas) pelaksanaan Audit Umum dan 8 (delapan) pelaksanaan Audit Teknologi Informasi. Selain melaksanakan QA untuk menjaga mutu audit, Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* juga melakukan edukasi dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil Audit Internal.
3. *Quality Assurance* Tim Audit Umum :

Quality Assurance Program

The Internal Audit & Anti-Fraud Division maintains a program to evaluate the quality of its audit activities by conducting:

1. Supervision, To ensure compliance with audit standards, policies, procedures, and the established audit programs.
2. Internal Review, In maintaining the quality of audit activities and preserving independence and objectivity in audit execution, the Internal Audit & Anti-Fraud Division—through the Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Division and/or the Head of the Quality Assurance & Audit Follow-up Section—has performed Quality Assurance (QA) tasks for 18 (eighteen) General Audit executions and 8 (eight) Information Technology Audit executions. In addition to performing QA to maintain audit quality, the Internal Audit & Anti-Fraud Division also provides education to expedite the resolution of internal audit follow-up actions.
3. Quality Assurance General Audit Team :

No	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Description
1	QA Audit Umum Divisi Konsumer	07 Mei 2025 May 07, 2025	General Audit Quality Assurance – Consumer Division
2	QA Audit Umum Divisi Komersial	04 Juni 2025 June 04, 2025	General Audit Quality Assurance – Commercial Division
3	QA Audit Umum BRKS Lingga Daik	16 Juni 2025 June 16, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Lingga Daik Branch
4	QA Audit Umum BRKS Lingga Dabo Singkep	16 Juni 2025 June 16, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Lingga Dabo Singkep
5	QA Audit Umum BRKS Rohul Dalu dalu	08 Juli 2025 July 08, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Rokan Hulu Dalu-Dalu
6	QA Audit Umum BRKS Rohul Rantau Kasai	08 Juli 2025 July 08, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Rokan Hulu Rantau Kasai
7	QA Audit Umum BRKS Tanjung Pinang	09 Juli 2025 July 09, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Tanjung Pinang Branch
8	QA Audit Umum BRKS Bintan Tanjung Uban	11 Juli 2025 July 11, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Bintan Tanjung Uban
9	QA Audit Umum BRKS Pasir Pengaraian	11 Juli 2025 July 11, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Pasir Pengaraian Branch
10	QA Audit Umum BRKS Rohul Kabun	11 Juli 2025 July 11, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Rokan Hulu Kabun
11	QA Audit Umum BRKS Inhil Sungai Guntung	22 September 2025 September 22, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Indragiri Hilir Sungai Guntung
12	QA Audit Umum BRKS Air Molek	01 Desember 2025 December 01, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Air Molek Branch
13	QA Audit Umum BRKS Tembilahan	01 Desember 2025 December 01, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Tembilahan Branch
14	QA Audit Umum BRKS Tanjung Pinang Pamedan	17 Desember 2025 December 17, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Tanjung Pinang Pamedan Branch
15	QA Audit Umum BRKS Jakarta	17 Desember 2025 December 17, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Jakarta Branch
16	QA Audit Umum BRKS Rohil Bagan Batu	17 Desember 2025 December 17, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Rokan Hilir Bagan Batu
17	QA Audit Umum BRKS Bengkalis	31 Desember 2025 December 31, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Bengkalis Branch
18	QA Audit Umum BRKS Bengkalis Sungai Pakning	31 Desember 2025 December 31, 2025	General Audit Quality Assurance – BRKS Bengkalis Sungai Pakning

4. *Quality Assurance* Tim Audit TI :

4. Quality Assurance: IT Audit Team

No	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	Description
1	QA Audit *Security* dan Audit Internal Sistem Pembayaran Bank Indonesia	27 Maret 2025 March 27, 2025	QA Security Audit and Internal Audit of Bank Indonesia Payment System
2	QA Audit Internal Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	18 Juni 2025 June 18, 2025	QA Internal Audit of Financial Information Service System (SLIK)
3	QA Audit Penyelenggaraan Teknologi Informasi (PTI)	10 Desember 2025 December 10, 2025	QA Audit of Information Technology Provision (PTI)
4	QA Audit *Core Banking System Vision Sharia*	10 Desember 2025 December 10, 2025	QA Audit of Core Banking System Vision Sharia
5	QA Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	10 Desember 2025 December 10, 2025	QA Audit of Information Security Management System (ISMS/SMKI)
6	QA Audit *Single Customer View* Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	10 Desember 2025 December 10, 2025	QA Audit of Single Customer View Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS)
7	QA Audit Aplikasi *Fraud Detection System* (FDS)	31 Desember 2025 December 31, 2025	QA Audit of Fraud Detection System (FDS) Application
8	QA Audit Fungsi Pengelolaan TI	31 Desember 2025 December 31, 2025	QA Audit of IT Management Function

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Hasil Pemantauan Komitmen Auditee terhadap Tindak Lanjut Hasil Audit Umum sampai dengan Desember 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Audit Umum Divisi Tahun 2025

Dari total temuan sebanyak 748 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 654 temuan dan yang dalam proses tindaklanjut sebanyak 94 temuan, yaitu sebagai berikut :

Audit Findings and Follow-up Actions

The results of monitoring Auditee commitments regarding the follow-up of General Audit findings as of December 2025 are as follows:

1. Execution of Divisional General Audits 2025

Out of a total of 748 findings, 654 findings have been fully addressed, and 94 findings are currently in the follow-up process, as detailed below:

No	Divisi	Total Temuan Total Findings	Total Temuan yang Sudah DiTindaklanjuti Total findings that have been followed up	Temuan dlm proses s/d Desember 2025 In-process findings until December 2025	Division
1	Divisi Komersial	15	15	0	Commercial Division
2	BRKS Lingga Dabo Singkep	27	27	0	BRKS Lingga Dabo Singkep
3	BRKS Lingga Daik	29	29	0	BRKS Lingga Daik
4	BRKS Bintan Tanjung Uban	30	30	0	BRKS Bintan Tanjung Uban
5	BRKS Rohul Dalu dalu	30	30	0	BRKS Rohul Dalu dalu
6	BRKS Rohul Rantau Kasai	24	24	0	BRKS Rohul Rantau Kasai
7	BRKS Tanjung Pinang	34	34	0	BRKS Tanjung Pinang
8	BRKS Rohul Kabun	26	23	3	BRKS Rohul Kabun
9	BRKS Pasir Pengaraian	38	37	1	BRKS Pasir Pengaraian
10	Divisi Konsumer	10	8	2	Divisi Konsumer
11	BRKS Inhil Sungai Guntung	25	24	1	BRKS Inhil Sungai Guntung
12	BRKS Inhu Belilas	21	20	1	BRKS Inhu Belilas
13	BRKS Tanjung Pinang Pamedan	28	27	1	BRKS Tanjung Pinang Pamedan
14	BRKS Pelalawan Sorek	37	37	0	BRKS Pelalawan Sorek
15	BRKS Pelalawan Bandar Sei Kijang	22	21	1	BRKS Pelalawan Bandar Sei Kijang
16	BRKS Pangkalan Kerinci	38	38	0	BRKS Pangkalan Kerinci

No	Divisi	Total Temuan Total Findings	Total Temuan yang Sudah DiTindaklanjuti Total findings that have been followed up	Temuan dlm proses s/d Desember 2025 In-process findings until December 2025	Division
17	BRKS Tembilahan	31	31	0	BRKS Tembilahan
18	BRKS Inhu Peranap	24	23	1	BRKS Inhu Peranap
19	BRKS Airmolek	35	33	2	BRKS Airmolek
20	BRKS Jakarta	18	18	0	BRKS Jakarta
21	BRKS Rohil Bagan Batu	40	35	5	BRKS Rohil Bagan Batu
22	BRKS Rohil Ujung Tanjung	34	25	9	BRKS Rohil Ujung Tanjung
23	BRKS Pekanbaru Arifin Ahmad	33	22	11	BRKS Pekanbaru Arifin Ahmad
24	Divisi Kepatuhan	7	3	4	Compliance Division
25	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	23	6	17	Human Capital Management Division
26	Divisi Treasury & Internasional	6	1	5	Treasury & International Division
27	BRKS Bengkalis Sungai Pakning	29	21	8	BRKS Bengkalis Sungai Pakning
28	BRKS Bengkalis	34	12	27	BRKS Bengkalis
Total		**748**	**654**	**94**	**Total**

2. Pelaksanaan Tematik Audit Tahun 2025

Dari total temuan sebanyak14 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 8 temuan dan yang masih dalam proses tindaklanjut sebanyak 6, yaitu sebagai berikut:

2. Execution of Thematic Audits 2025

Out of a total of 14 findings, 8 findings have been fully addressed, and 6 findings are still in the follow-up process, as detailed below:

No	Divisi	Total Temuan	Total Temuan yang Sudah Di Tindaklanjuti	Temuan dlm proses s/d Desember 2025	
1	Literasi & Inklusi Keuangan	6	5	1	Financial Literacy & Inclusion
2	APU, PPT & PPPSPM Divisi Kepatuhan	7	3	4	AML, CFT & CPF Compliance Division
3	Pengelolaan Sistem Informasi Rekam Jejak Pelaku tahun 2025	1	0	1	Management of Perpetrator Track Record Information System 2025
4	Sentral Operation	0	0	0	Central Operations
Total		**14**	**8**	**6**	**Total**

3. Pelaksanaan Audit Umum Teknologi Informasi Tahun 2025

Dari total temuan sebanyak 127 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 112 temuan dan yang masih dalam proses tindaklanjut sebanyak 15, yaitu sebagai berikut :

3. Execution of Information Technology General Audits 2025

Out of a total of 127 findings, 112 findings have been fully addressed, and 15 findings are still in the follow-up process, as detailed below:

No	Divisi	Total Temuan	Total Temuan yang Sudah Di Tindaklanjuti	Temuan dlm proses s/d Desember 2025	
1	Internal SPBI dan Audit *Security* SPBI	31	31	0	Internal BI Payment System (SPBI) & Security Audit SPBI
2	Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	28	28	0	Financial Information Service System (SLIK)
3	Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	5	5	0	Information Security Management System (SMKI)
4	*Aplikasi Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT)	8	8	0	SWIFT Application
5.	Penyelenggaraan Teknologi Informasi (PTI)	13	13	0	IT Provision (PTI)
6	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	12	11	1	Payment Service Provider (PJP)
7	*Core Banking System Vision Sharia*	12	6	6	Core Banking System Vision Sharia
8	*Single Customer View Lembaga Penjaminan Simpanan* (LPS)	7	6	1	Single Customer View Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS)
9	Fungsi Pengelolaan TI	3	3	0	IT Management Function
10	Pertahanan dan Keamanan Siber	2	1	1	Cyber Defense and Security
11	Aplikasi *Fraud Detection System* (FDS)	6	0	6	Fraud Detection System (FDS) Application
Total		**127**	**112**	**15**	**Total**

FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.

BRK Syariah telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BRK Syariah sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No.241/KEPDIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. BPP Fungsi Kepatuhan mengatur mengenai Peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan, yang diharapkan dapat menjadi *forward looking* dan lebih sensitif dalam menghadapi dinamika kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka mendukung terciptanya fungsi kepatuhan Syariah dalam memastikan kegiatan operasional dan bisnis BRK Syariah telah memenuhi prinsip Syariah, BRK Syariah telah menerbitkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan Syariah sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 049/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan Syariah. BPP Kepatuhan Syariah mengatur mengenai Tugas dan Tanggung Jawab serta Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Syariah, Proses Pengujian Kepatuhan Syariah dan Proses Pengawasan Kepatuhan Syariah.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan BRK Syariah dijalankan Divisi Kepatuhan, yang berada di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Struktur organisasi Divisi Kepatuhan memiliki 3 (Tiga) Bagian, yaitu (1) Bagian Kepatuhan, *Review* Kebijakan & GCG, (2) Bagian *Anti Money Laundering* (AML) & *Counter Terrorism Financing* dan (3) bagian kepatuhan Syariah, dengan skema sebagai berikut:

The Compliance Function is a series of preventive actions and measures designed to ensure that the policies, regulations, systems, and procedures, as well as the business activities conducted by the Bank, are in alignment with the regulations of Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and other prevailing laws and regulations, including Sharia Principles.

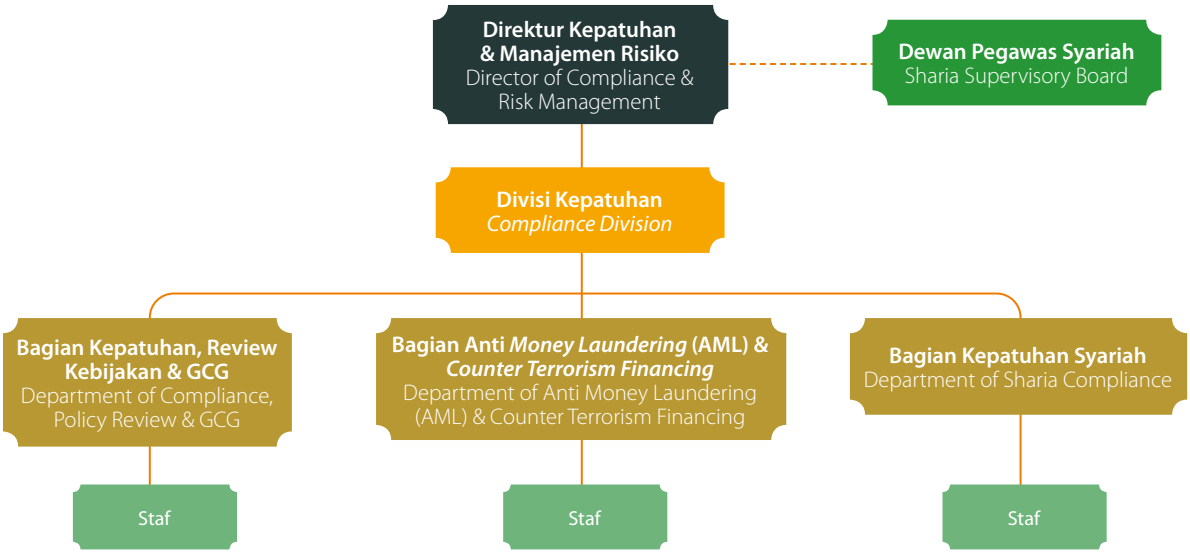
BRK Syariah has established a Corporate Manual (BPP) regarding the Implementation of the Compliance Function of BRK Syariah, as stipulated in the Board of Directors' Decree No. 241/KEPDIR/2024 dated December 30, 2024, concerning the Corporate Manual (BPP) for the Implementation of the Compliance Function. The Compliance Function BPP governs the Roles and Functions of Compliance as well as the Compliance Working Unit, which is expected to be forward-looking and more sensitive to the dynamics of the Bank's business activities.

In order to support the establishment of a Sharia compliance function to ensure that BRK Syariah's operational and business activities meet Sharia principles, BRK Syariah has issued a Corporate Manual (BPP) for Sharia Compliance, as stipulated in the Board of Directors' Decree No. 049/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022, concerning the Corporate Manual (BPP) for Sharia Compliance. The Sharia Compliance BPP governs the Duties and Responsibilities, as well as the Implementation of the Sharia Compliance Function, the Sharia Compliance Testing Process, and the Sharia Compliance Oversight Process.

Organizational Structure of the Compliance Function

The Compliance Function of BRK Syariah is managed by the Compliance Division, which reports directly to the Director of Compliance and Risk Management. The organizational structure of the Compliance Division consists of 3 (three) Departments: (1) Compliance, Policy Review & GCG Department, (2) Anti-Money Laundering (AML) & Counter-Terrorism Financing Department, and (3) Sharia Compliance Department, based on the following scheme:

Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan
Organizational Structure of Compliance Division



Profil Pemimpin Divisi Kepatuhan

Uraian lengkap profil Pemimpin Divisi Kepatuhan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Sepanjang tahun 2025 Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan di BRK Syariah adalah Sdr. Fajar Restu Febriansyah yang diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri Syariah pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021 dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 15 November 2021 sampai dengan 14 November 2026.

Uraian lengkap Profil Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Direksi, Bab Profil Perusahaan.

Profile of the Head of Compliance Division

A complete description of the profile of the Head of the Compliance Division can be found in the section "Profiles of Officials One Level Below the Board of Directors" in the Corporate Profile Chapter of this Annual Report.

Director Overseeing the Compliance Function

Throughout 2025, the Director overseeing the Compliance Function at BRK Syariah is Mr. Fajar Restu Febriansyah, who was appointed as the Director of Compliance and Risk Management of Bank Riau Kepri Syariah at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB) on November 15, 2021, with a term of office from November 15, 2021, to November 14, 2026.

A complete description of the Profile of the Director of Compliance and Risk Management can be found in the "Identity and Brief History of the Board of Directors" section, Corporate Profile Chapter.

Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BRK Syariah, fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, adalah sebagai berikut:

1. Direktur Kepatuhan berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
2. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara umum, meliputi :
   a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
   b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
   c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
   d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank dilakukan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
   f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
   h. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang dilakukan bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan;
   i. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab tersebut di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Performance of Duties of the Director Overseeing the Compliance Function

Within the Guidelines for the Implementation of the Compliance Function of BRK Syariah, the functions, duties, and responsibilities of the Compliance Director are as follows:

1. The Compliance Director functions to perform a series of actions or steps to ensure that the policies, regulations, systems, and procedures, as well as the business activities carried out by the Bank, are in accordance with the regulations of the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and prevailing laws and regulations, including Sharia Principles, as well as ensuring the Bank's compliance with commitments made by the Bank to the OJK and/ or other authorized supervisory authorities.
2. The general duties and responsibilities of the Compliance Director include:
   a. Formulating strategies to foster the creation of a Bank Compliance Culture;
   b. Proposing compliance policies or compliance principles to be established by the Board of Directors;
   c. Determining the compliance systems and procedures to be used in drafting the Bank's internal regulations and guidelines;
   d. Ensuring that all policies, regulations, systems, and procedures, as well as the business activities conducted by the Bank, are carried out based on Sharia principles in accordance with the regulations of the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and prevailing laws and regulations;
   e. Minimizing the Bank's Compliance Risk;
   f. Taking preventive measures to ensure that policies and/or decisions made by the Bank's Board of Directors do not deviate from Sharia principles and statutory regulations;
   g. Monitoring and maintaining the Bank's compliance with commitments made by the Bank to the OJK and/or other authorized supervisory authorities;
   h. Coordinating with the Sharia Supervisory Board regarding the implementation of the Compliance Function toward Sharia Principles, carried out jointly with the Compliance Division;
   i. Performing other duties related to the Compliance Function.

The aforementioned duties and responsibilities do not eliminate the rights and obligations of the Compliance Director as a member of the Bank's Board of Directors as regulated in the Law on Limited Liability Companies, should specific actions require a decision from all members of the Bank's Board of Directors.

3. Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, meliputi:
   a. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Divisi Kepatuhan, dan Divisi lain yang di bawah struktur organisasinya;
   b. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Direksi lainnya dalam rangka memastikan kelancaran tugas dan tanggung jawab;
   c. Memantau dan mengevaluasi risiko kepatuhan Bank;
   d. Menyusun kebijakan dan prosedur di Divisi Kepatuhan;
   e. Melakukan pengujian atas rancangan dan perubahan kebijakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dan peraturan dan perundang-undangan;
   f. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan komitmen Bank dengan pihak otoritas pengawas;
   g. Menyampaikan laporan semesteran kepada OJK tentang pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
   h. Memantau pelaksanaan Prinsip Tata Kelola yang baik berjalan sesuai dengan ketentuan di seluruh tingkatan organisasi;
   i. Memastikan prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakan Direksi telah sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   j. Menetapkan rencana kerja dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan;
   k. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan yang menjadi tanggung jawab Direktur Kepatuhan;
   l. Mengkoordinasikan dan meminta satuan kerja terkait untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank sesuai prinsip syariah, ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   m. Melakukan koordinasi dengan Direktur lain untuk mengoptimalkan aktivitas Bank yang sejalan dengan Budaya Kepatuhan;
   n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
   o. Melakukan koordinasi dengan Direktur lain terhadap langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan;

3. Duties and responsibilities in the implementation of the Bank's Compliance Function include:
   a. Leading and coordinating the activities of the Compliance Division and other divisions under its organizational structure;
   b. Coordinating with other members of the Board of Directors to ensure the smooth execution of duties and responsibilities;
   c. Monitoring and evaluating the Bank's compliance risk;
   d. Developing policies and procedures within the Compliance Division;
   e. Testing the design and changes of policies to ensure compliance with Sharia principles and laws and regulations;
   f. Establishing the necessary steps to fulfill the Bank's compliance with regulations and commitments to supervisory authorities;
   g. Submitting semi-annual reports to the OJK regarding the performance of the Compliance Director's duties, with a copy to the Board of Commissioners;
   h. Monitoring the implementation of Good Corporate Governance principles across all organizational levels;
   i. Ensuring that the principle of prudence in every Board of Directors' policy is in accordance with Sharia principles, OJK regulations, Bank Indonesia, and prevailing laws and regulations;
   j. Setting work plans and conducting evaluations on the implementation of compliance risk management;
   k. Evaluating and submitting reports that are the responsibility of the Compliance Director;
   l. Coordinating and requesting relevant working units to refine Bank policies and procedures according to Sharia principles, OJK regulations, Bank Indonesia, and prevailing laws and regulations;
   m. Coordinating with other Directors to optimize Bank activities in line with the Compliance Culture;
   n. Reporting the performance of duties and responsibilities quarterly to the President Director, with a copy to the Board of Commissioners;
   o. Coordinating with other Directors regarding steps to be taken concerning compliance violations;

p. Melaporkan kepada OJK setiap kebijakan dan/ atau keputusan Direksi yang menurut Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Prinsip Syariah, ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
q. Menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi

4. Tugas dan tanggung jawab dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) meliputi:
   a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan OJK dan PPATK yang menyangkut Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) ;
   b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Keluar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) yang telah disusun oleh Divisi Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK);
   c. Merencanakan dan *monitoring* Program Pengkinian Data Nasabah berdasarkan Risiko/ *Risk Based Approach*;
   d. Memastikan bahwa penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) telah dilaksanakan secara efektif;
   e. Memastikan bahwa nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan/atau transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi transfer dana dalam dan keluar negeri telah ditangani dan dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan BPP APU, PPT dan PPPSPM.

p. Reporting to the OJK any Board of Directors' policies and/or decisions that, in the opinion of the Compliance Director, have deviated from Sharia Principles, OJK regulations, Bank Indonesia, and prevailing laws and regulations;
q. Fulfilling responsibilities as a member of the Board of Directors.

4. Duties and responsibilities in the implementation of the Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorism Financing (CFT), and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPPSPM) Program include:
   a. Establish the necessary steps to ensure that the Bank has complied with the OJK and PPATK regulations concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering (APU), Prevention of Terrorism Financing (PPT) and Prevention of the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPPSPM) Programs through the preparation of Guidelines for the Implementation of the Anti-Money Laundering (APU), Prevention of Terrorism Financing (PPT) and Prevention of the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPPSPM) Programs;;
   b. Submitting reports on Suspicious Financial Transactions (TKM), Cash Financial Transactions (TKT), Domestic and Foreign Fund Transfers, and the Integrated Service User Information System (SIPESAT) prepared by the Compliance Division to the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK);
   c. Planning and monitoring the Customer Data Updating Program based on a Risk-Based Approach;
   d. Ensuring that the implementation of the AML, CFT, and PPPSPM programs has been executed effectively;
   e. Ensuring that customers deemed high-risk, including politically exposed persons, and/or suspicious financial transactions, cash transactions, and fund transfer transactions (domestic and foreign), have been handled and reported to the PPATK in accordance with the AML, CFT, and PPPSPM BPP.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan BRK Syariah berada di Kantor Pusat yaitu Divisi Kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab Divisi Kepatuhan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan pengelolaan terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan Prinsip Syariah, ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
7. Melakukan *monitoring* Budaya Kepatuhan di jaringan kantor Bank yang dilakukan secara berkesinambungan;
8. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) dokumen persyaratan administratif calon pengurus Bank;
9. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) kesiapan operasional pembukaan, perubahan status dan relokasi jaringan kantor Bank sesuai ketentuan;
10. Membantu Direktur Kepatuhan dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan regulator yang menyangkut penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)
11. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
12. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT & PPPSPM;

Compliance Working Unit

The BRK Syariah Compliance Working Unit is located at the Head Office, specifically the Compliance Division. The duties and responsibilities of the Compliance Division include:

1. Developing measures to support the creation of a Compliance Culture in all Bank business activities at every organizational level;
2. Managing Compliance Risk with reference to Regulator regulations regarding risk management implementation for Commercial Banks;
3. Assessing and evaluating the effectiveness, adequacy, and suitability of the Bank's policies, regulations, systems, and procedures with prevailing laws and regulations;
4. Reviewing and/or recommending the updating and refinement of the Bank's policies, regulations, systems, and procedures to align with Sharia principles, OJK regulations, Bank Indonesia, and prevailing laws and regulations;
5. Taking efforts to ensure that the Bank's policies, regulations, systems, procedures, and business activities comply with Sharia Principles, Regulator requirements, and prevailing laws and regulations;
6. Ensuring the Bank's compliance with commitments made to the Regulator and/or other authorized supervisory authorities;
7. Continuously monitoring the Compliance Culture across the Bank's office network;
8. Compiling a compliance checklist of administrative requirement documents for prospective Bank management;
9. Compiling a compliance checklist for operational readiness regarding the opening, status change, and relocation of the Bank's office network in accordance with regulations;
10. Assist the Compliance Director in determining the necessary steps to ensure that the Bank has complied with regulatory regulations regarding the implementation of anti-money laundering and prevention of terrorism financing programs through the preparation of Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering (AML), Prevention of Terrorism Financing (PPT) and Prevention of the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPPSPM) Programs.
11. Periodically analyzing risk assessments for money laundering and/or terrorism financing crimes related to customers, countries or geographic areas, products, services, transactions, or delivery channels;
12. Drafting, updating, and proposing policies and procedures for the implementation of the APU, PPT & PPPSPM program;

13. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah dan melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
14. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
15. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/ atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif dan memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT & PPPSPM;
16. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/ atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
17. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi Bank;
18. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU, PPT & PPPSPM oleh unit kerja terkait;
19. Menyusun laporan GCG Bank, termasuk melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG sesuai ketentuan regulator;
20. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya;
21. Memantau penyampaian laporan kepada regulator dan pihak eksternal lainnya oleh satuan kerja terkait;
22. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan;
23. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai ketentuan regulator yang berlaku.

13. Monitoring Customer accounts and transaction execution, and evaluating the results of monitoring and analysis to determine the presence or absence of Suspicious Financial Transactions (TKM), Cash Financial Transactions (TKT), and/or cross-border fund transfers;
14. Ensuring the updating of Customer data and profiles as well as transaction data and profiles;
15. Ensuring that business activities at high risk of Money Laundering and/or Terrorism Financing are effectively identified and ensuring the identification of high-risk areas related to the implementation of the APU, PPT & PPPSPM program;
16. Receiving, analyzing, and drafting reports on Suspicious Financial Transactions and/or cash transactions submitted by working units;
17. Obtaining access to required information available across all Bank organizational units;
18. Coordinating and monitoring the implementation of the APU, PPT & PPPSPM program by relevant work units;
19. Drafting the Bank's GCG report, including conducting a self-assessment of GCG implementation according to regulator requirements;
20. Monitoring the development of systems and procedures related to processes under its scope of authority;
21. Monitoring the submission of reports to regulators and other external parties by relevant working units;
22. Drafting the report on the performance of the Compliance Director's duties;
23. Performing other duties related to the Compliance Function in accordance with applicable regulator provisions.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2025

A. Rencana Evaluasi Pedoman Internal

Untuk tahun 2025 Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Bank Riau Kepri Syariah, akan melakukan kegiatan terkait dengan rencana evaluasi maupun penyusunan pedoman internal, meliputi sebagai berikut :

1. Melakukan Penyusunan pedoman/kebijakan/ kajian :
   a. Perubahan BPP *Compliance Checklist* Calon Pengurus dan DPS Bank
   b. Penyusunan Pedoman Akad Murabahah
   c. Penyusunan Pedoman Akad MMQ

2025 Compliance Function Work Program

A. Internal Guidelines Evaluation Plan

For the year 2025, the Director of Compliance & Risk Management of Bank Riau Kepri Syariah will conduct activities related to the evaluation and drafting of internal guidelines, including:

1. Drafting Guidelines/Policies/Studies:
   a. Amendment of the BPP Compliance Checklist for Prospective Management and the Bank's Sharia Supervisory Board (DPS).
   b. Drafting of Murabahah Contract Guidelines.
   c. Drafting of MMQ (Musyarakah Mutanaqisah) Contract Guidelines.

d. Penyusunan Kebijakan Pengelompokan Nasabah berdasarkan Pendekatan *Risk Based Assesment* yang sejalan dengan hasil perhitungan IRA.
e. Penyusunan Kebijakan Pengkinian dan Pemantauan data Nasabah yang dititikberatkan pada jangka waktu pemeliharaan atau pengkinian data nasabah sesuai profil risiko.
f. Penyusunan Kebijakan *Know Your Customer* dengan fokus pada penyusunan kembali kelompok kode profesi, badan hukum, bidang usaha dan lainnya.
g. Penyusunan Kebijakan Penerapan *Single* CIF.
h. Penyusunan Kebijakan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan melakukan penyesuaian pada pola perhitungan dengan metode pembobotan dan review parameter TKM.
i. Penyusunan Kebijakan Penolakan dan Penundaan Transaksi, Blokir serta Pemutusan Hubungan Usaha.
j. Penyusunan Kebijakan serta Aplikasi *Screening Watchlist* pada *Teller*.

2. Melakukan Penyesuaian Aplikasi :
a. Pengembangan Aplikasi goAML untuk Penilaian IRA berdasarkan pendekatan TPPU, TPPT dan PPSPM terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi.
b. Pengembangan Aplikasi goAML BRK Syariah terkait Penolakan dan Penundaan Transaksi pada Teller.
c. Pengembangan Penyempurnaan Parameter Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.
d. Pengembangan Aplikasi Pengkinian Data pada goAML BRKSyariah.
e. Pengembangan RBA pada Aplikasi goAML BRKS sesuai IRA.
f. *Upgrade*/Pengadaan Perangkat Server Aplikasi goAML BRK Syariah.
g. Pengembangan goAML BRKS yariah Tahap I :
- Penambahan Fungsi *Profiling* Data Nasabah
- Penambahan Sistem *Scoring* Skala Prioritas Indikasi TKM.
- Penambahan Sub Menu Kertas Kerja Analisa TKM.
- Penambahan Sub Menu Rekapitulasi Pelaporan TKT, TKM, dan TKL.

d. Drafting of Customer Segmentation Policies based on a Risk-Based Assessment approach aligned with IRA (Inherent Risk Assessment) calculation results.

e. Drafting of Policies for Customer Data Updating and Monitoring, emphasizing the maintenance or update period according to risk profiles.

f. Drafting of Know Your Customer (KYC) Policies focusing on the re-categorization of profession codes, legal entities, business fields, etc.
g. Drafting of the Single CIF (Customer Information File) Implementation Policy.
h. Drafting of Suspicious Financial Transaction (TKM) Identification Policies by adjusting calculation patterns using weighting methods and reviewing TKM parameters.
i. Drafting of Policies for Rejection and Postponement of Transactions, Blocking, and Termination of Business Relationships.
j. Drafting of Screening Watchlist Policies and Applications for Tellers.

2. Application Adjustments:
a. Development of the goAML Application for IRA Assessment based on AML, CFT, and PPPSPM approaches related to Customers, countries/geographic areas, products, services, transactions, or distribution networks.
b. Development of BRK Syariah goAML Application regarding Transaction Rejection and Postponement for Tellers.
c. Development and refinement of Suspicious Financial Transaction Identification Parameters.
d. Development of the Data Updating Application on BRK Syariah goAML.
e. Development of RBA (Risk-Based Approach) in the goAML BRKS Application according to IRA.
f. Upgrade/Procurement of Server Hardware for the goAML BRK Syariah Application.
g. Phase I Development of goAML BRK Syariah:
- Addition of Customer Data Profiling Functions.
- Addition of a Priority Scale Scoring System for TKM Indications.
- Addition of TKM Analysis Worksheet Sub-menus.
- Addition of Sub-menus for Recapitulation of TKT, TKM, and TKL Reporting.

B. Rencana Kegiatan Untuk Mendorong dan/ atau Memelihara Budaya Kepatuhan, Termasuk Rencana Sosialisasi Ketentuan

Dalam rangka mendorong dan/atau memelihara budaya kepatuhan, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dibantu oleh Unit Kerja Divisi Kepatuhan, pada tahun 2025 akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan *review* terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/ SE OJK untuk disesuaikan dengan kebijakan internal Bank.
2. Mengelola laporan penyampaian *Whistle Blowing System* (WBS) yang dikelola oleh Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai Pengelola WBS
3. Memantau komitmen-komitmen Bank untuk menindaklanjuti permasalahan dan saran yang diberikan pihak pengawas atau pemeriksa eksternal dalam dokumen *exit meeting*.
4. Memantau dan mengelola risiko kepatuhan.
5. Melakukan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan seluruh Pegawai Bank.
6. Membuat pemberitahuan ke jaringan kantor Bank mengenai larangan pemberian/ penerimaan gratifikasi dalam rangka hari besar keagamaan.
7. Melakukan peningkatan budaya kepatuhan dengan melakukan sosialisasi antara lain mengenai :
   - Kode Etik Kepatuhan;
   - *Whistle Blowing System* (WBS);
   - Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
8. Melakukan edukasi dan *monitoring* terhadap pemenuhan aspek syariah pada unit kerja kantor Bank.
9. Melakukan sinergi dengan DSN-MUI dalam rangka permintaan atau penjelasan Fatwa DSN-MUI atas Produk, aktivitas dan Operasional yang perlu mendapatkan fatwa dan/atau penjelasan lebih lanjut.
10. Peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan program APU, PPT & PPPSPM dan melalui pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU, PPT & PPPSPM dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan pihak otoritas lainnya.

B. Activities to Foster and/or Maintain a Compliance Culture, Including Regulation Socialization Plans

To foster and/or maintain a compliance culture, the Director of Compliance and Risk Management, supported by the Compliance Division, will carry out the following activities in 2025:

1. Monitoring and reviewing Bank Indonesia and OJK Regulations/Circulars for adjustment with the Bank's internal policies.
2. Managing Whistleblowing System (WBS) reports administered by the Head of Compliance Division as the WBS Manager.
3. Monitoring the Bank's commitments to follow up on issues and recommendations provided by external supervisors or examiners in exit meeting documents.
4. Monitoring and managing compliance risk.
5. Conducting the signing of the Compliance Statement by all Bank Employees.
6. Issuing notices to the Bank's office network regarding the prohibition of giving/receiving gratifications in relation to religious holidays.
7. Enhancing the compliance culture through socialization of:
   - Compliance Code of Ethics;
   - Whistleblowing System (WBS);
   - Gratification Control Guidelines.
8. Conducting education and monitoring of Sharia aspect fulfillment at Bank office units.
9. Synergizing with DSN-MUI for requests or explanations of DSN-MUI Fatwas on Products, Activities, and Operations requiring further clarification.
10. Improving human resources in the implementation of APU, PPT & PPPSPM programs and through training provided periodically to all employees, especially new employees, employees who deal directly with customers, employees who supervise the implementation of APU, PPT & PPPSPM programs and employees related to the preparation of reports to PPATK and other authorities..

Strategi Kepatuhan Bank

Sehubungan dengan fungsi kepatuhan yang diatur di atas, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Menetapkan strategi Budaya Kepatuhan, antara lain :
   - Menyusun *Compliance Charter* (Piagam Kepatuhan)
   - Menyusun *Compliance Code of Conduct* (Kode Etik Kepatuhan)
   - Menyusun *Compliance Policy* (Kebijakan Kepatuhan)
   - Menyusun Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
   - Menyusun Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)
   - Menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi
   - Menyusun Pedoman Pengujian Kepatuhan pada Unit Kantor Bank
2. Melakukan sosialisasi Kode Etik Kepatuhan, *Whistle Blowing System* dan Pengendalian Gratifikasi pada kegiatan pelatihan/sosialisasi yang diadakan oleh internal Bank.
3. Melakukan kunjungan dan monitoring di unit kantor Bank (Cabang, Capem dan Kedai yang tidak memiliki petugas *Quality Assurance & Collateral* Admin dan tidak dilakukan pemeriksaan/Audit Umum oleh Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*) guna mengetahui dan menilai tingkat pemahaman serta kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pedoman serta aplikasi APU, PPT dan PPPSPM.
5. Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank agar sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
6. Memantau tindak lanjut pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia/OJK.
7. Menyusun dan melaporkan hasil penilaian dan pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance*.
8. Melakukan pengujian terhadap kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BRK Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada OJK.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2025

1. Menerbitkan Perubahan BPP *Compliance Checklist* Calon Pengurus dan DPS Bank
2. Menerbitkan Pedoman Akad Murabahah.
3. Menerbitkan Pedoman Akad MMQ

Bank Compliance Strategy

In connection with the compliance functions regulated above, the Director of Compliance and Risk Management of BRK Syariah has established necessary steps in accordance with his duties and functions, including:

1. Determining the Compliance Culture strategy:
   - Drafting the Compliance Charter.
   - Drafting the Compliance Code of Conduct.
   - Drafting the Compliance Policy.
   - Drafting Conflict of Interest Guidelines.
   - Drafting the Whistleblowing System.
   - Drafting Gratification Control Guidelines.
   - Drafting Compliance Testing Guidelines for Bank Office Units.
2. Socializing the Compliance Code of Ethics, WBS, and Gratification Control during internal Bank training/ socialization sessions.
3. Conducting visits and monitoring at Bank office units (Branches, Sub-Branches, and Kedai that do not have Quality Assurance & Collateral Admin officers and are not subject to General Audit by the Internal Audit & Anti-Fraud Division) to assess employee understanding and compliance with applicable regulations.
4. Conducting socialization and training related to APU, PPT, and PPPSPM guidelines and applications.
5. Reviewing internal Bank policies and procedures for alignment with external regulatory changes.
6. Monitoring the follow-up fulfillment of Bank commitments to Bank Indonesia/OJK.
7. Drafting and reporting the assessment and implementation of Good Corporate Governance.
8. Testing policies and/or decisions taken by the Board of Directors of BRK Syariah to ensure they do not deviate from Bank Indonesia, OJK, and prevailing laws and regulations.
9. Submitting the Compliance Director's Duty Implementation Report to the OJK.

Implementation of the 2025 Compliance Function Work Program

1. Issuing the Amendment to the BPP Compliance Checklist for Prospective Management and the Bank's DPS.
2. Issuing Murabahah Contract Guidelines.
3. Issuing MMQ Contract Guidelines.

4. Menerbitkan Kebijakan Pengkinian dan Pemantauan data Nasabah yang dititikberatkan pada jangka waktu pemeliharaan atau pengkinian data nasabah sesuai profil risiko.
5. Menerbitkan Kebijakan Pengkinian dan Pemantauan Data Nasabah yang dititikberatkan pada jangka waktu pemeliharaan atau pengkinian data nasabah sesuai profil risiko.
6. Menerbitkan Kebijakan Penerapan *Single* CIF.
7. Menerbitkan Kebijakan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan melakukan penyesuaian pada pola perhitungan dengan metode pembobotan dan *review* parameter TKM.
8. Menerbitkan Kebijakan Penolakan dan Penundaan Transaksi, Blokir serta Pemutusan Hubungan Usaha.
9. Menerbitkan Kebijakan serta Aplikasi *Screening Watchlist* pada *Teller*.
10. Melakukan *review* terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan internal Bank.
11. Melakukan kajian dan pengujian atas rencana kebijakan/ketentuan yang akan diterbitkan Bank.
12. Melakukan peningkatan pemahaman pegawai terhadap kebijakan *Whistleblowing System*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Kode Etik Kepatuhan dan ketentuan internal Bank lainnya serta pengukuran budaya kepatuhan melalui kegiatan *monitoring* dan pengujian kepatuhan pada jaringan kantor Bank (yang tidak memiliki petugas *Quality Assurance & Collateral* Admin dan tidak dilakukan pemeriksaan/Audit Umum oleh Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*), serta memberikan pelatihan/sosialisasi terkait kebijakan tersebut pada setiap kegiatan pelatihan/sosialisasi internal Bank.
13. Melakukan sosialisasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam aspek Akad dan Operasional Bank (Kantor Pusat, Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai).
14. Memantau komitmen-komitmen Bank untuk menindaklanjuti permasalahan dan saran yang diberikan pihak pengawas atau pemeriksa eksternal dalam dokumen *exit meeting*.
15. Mengelola laporan *Whistle Blowing System* (WBS) yang dikelola oleh Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai petugas harian WBS.
16. Memantau dan mengelola risiko kepatuhan.
17. Membuat pernyataan komitmen kepatuhan dari seluruh jajaran BRK Syariah.
18. Mengadakan pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan pihak otoritas lainnya.

4. Issuing Customer Data Updating and Monitoring Policies emphasizing the maintenance or update period according to risk profiles.
5. Publish a Customer Data Updating and Monitoring Policy that focuses on the period of maintenance or updating of customer data according to the risk profile.
6. Issuing the Single CIF Implementation Policy.
7. Issuing Suspicious Financial Transaction Identification Policies by adjusting calculation patterns using weighting methods and reviewing TKM parameters.
8. Issuing Policies for Rejection and Postponement of Transactions, Blocking, and Termination of Business Relationships.
9. Issuing Screening Watchlist Policies and Applications for Tellers.
10. Reviewing Bank Indonesia and OJK Regulations/ Circulars for subsequent adjustment of internal Bank policies.
11. Conducting studies and testing of planned policies/ regulations to be issued by the Bank.
12. Improving employee understanding of the Whistleblowing System policy, Gratuity Control Guidelines, Compliance Code of Ethics and other internal Bank provisions as well as measuring compliance culture through monitoring and compliance testing activities in the Bank's office network (which does not have Quality Assurance & Collateral Admin officers and does not undergo General Audits/Audit by the Internal Audit & Anti Fraud Division), as well as providing training/socialization related to the policy at every internal Bank training/ socialization activity.
13. Socializing Sharia Principle fulfillment in Contractual (Akad) and Bank Operational aspects (Head Office, Branches, Sub-Branches, and Kedai).
14. Monitoring Bank commitments to follow up on issues and recommendations from external supervisors in exit meeting documents.
15. Managing Whistleblowing System (WBS) reports managed by the Head of Compliance Division as the WBS daily officer.
16. Monitoring and managing compliance risk.
17. Creating a compliance commitment statement for all ranks of BRK Syariah.
18. Conducting training that is provided periodically to all employees, especially new employees, employees who deal directly with customers, employees who supervise the implementation of the APU program and employees related to the preparation of reports to the PPATK and other authorities.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Terhadap Undang-Undang

1. Pengujian Kebijakan adalah memastikan bahwa setiap ketentuan, kebijakan dan standar operasional prosedur Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran OJK dan ketentuan eksternal lainnya.
2. Pengujian Rencana Pemberian Kredit/ Pembiayaan adalah memastikan bahwa setiap rencana pemberian kredit/pembiayaan yang menjadi wewenang Direksi telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran OJK dan ketentuan eksternal lainnya, serta prinsip Syariah.
3. Melakukan pemantauan dan *review* terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk disesuaikan dengan kebijakan internal Bank.

B. Pemenuhan Komitmen kepada Otoritas Berwenang

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko terus memantau dan mengingatkan unit kerja terkait atas temuan dan tindak lanjut komitmen Bank yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya. Untuk teknis pelaksanaan pemantauan tindak lanjut komitmen Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dibantu oleh Divisi Kepatuhan sebagai unit kerja yang memonitoring terhadap temuan Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya tersebut.

Untuk memastikan bahwa Bank menyelesaikan tindak lanjut komitmen tersebut Divisi Kepatuhan telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Mengingatkan unit kerja pemilik temuan.
2. Memonitor tindak lanjut komitmen yang akan jatuh tempo maupun yang telah jatuh tempo yang diselesaikan oleh unit kerja terkait melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK).
3. Untuk temuan yang telah jatuh tempo, namun belum selesai ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait Divisi Kepatuhan meminta unit kerja pemilik temuan untuk membuat/menyampaikan penyebab belum selesai ditindaklanjuti dan timeline atas rencana pemenuhan komitmen tersebut dan jika diperlukan menyampaikan kepada Direksi untuk diagendakan dan dibahas pada Rapat Direksi.

Application of the Compliance

B. Function Toward the Law

1. Policy Testing: Ensuring that every regulation, policy, and standard operating procedure of the Bank complies with applicable regulations, including Laws, Bank Indonesia Regulations, OJK Regulations, Bank Indonesia Circulars, OJK Circulars, and other external provisions.

2. Credit/Financing Plan Testing: Ensuring that every credit/financing plan within the authority of the Board of Directors is compliant and does not violate applicable regulations, including Laws, Bank Indonesia Regulations, OJK Regulations, Bank Indonesia Circulars, OJK Circulars, and other external provisions, as well as Sharia principles.

3. Monitoring and reviewing Bank Indonesia and OJK Regulations/Circulars for adjustment with internal Bank policies.

B. Fulfillment of Commitments to Authorized Authorities

The Director of Compliance & Risk Management continuously monitors and reminds relevant work units of findings and the follow-up of Bank commitments agreed upon with the OJK and other regulators. For the technical implementation of follow-up monitoring, the Director is assisted by the Compliance Division as the unit monitoring findings from the OJK and other regulators.

To ensure the Bank completes these follow-up commitments, the Compliance Division has taken several steps as follows:

1. Reminding the work unit owners of the findings.
2. Monitoring the follow-up of commitments that are approaching or have passed their due dates through the Compliance Information System Application (ASIK).
3. For findings that have passed the deadline but have not been resolved by the relevant work unit, the Compliance Division requires the unit owner to provide/submit the reason for the delay and a timeline for the fulfillment plan, and if necessary, submits it to the Board of Directors to be scheduled and discussed in a Board of Directors Meeting.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

"BRK Syariah secara konsisten memperkuat penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi sebagai pilar utama tata kelola perusahaan yang baik, guna memastikan pengelolaan risiko yang efektif, menjaga ketahanan operasional Bank, serta mendukung pencapaian kinerja dan tujuan strategis secara berkelanjutan".

"BRK Syariah consistently strengthens the implementation of comprehensive and integrated risk management as a primary pillar of Good Corporate Governance (GCG), aimed at ensuring effective risk management, maintaining the Bank's operational resilience, and supporting the achievement of sustainable performance and strategic objectives."

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko BRK Syariah

Kebijakan Manajemen Risiko Bank

Komitmen BRK Syariah dalam menerapkan manajemen risiko merupakan bagian integral dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Melalui penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi, BRK Syariah berupaya mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai potensi risiko guna menjaga stabilitas operasional, melindungi aset dan reputasi Bank, serta memastikan keberlanjutan kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan strategis dan memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan.

Risiko yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan risiko kredit, pasar, dan operasional, tetapi juga dengan risiko yang muncul akibat ketidakpastian ekonomi global, perubahan regulasi, serta tantangan teknologi digital yang semakin berkembang. Seiring dengan kemajuan teknologi, sektor perbankan semakin bergantung pada sistem digital dan *platform online*, yang memunculkan risiko baru, terutama yang berkaitan dengan keamanan data dan potensi kejahatan siber. Risiko - risiko ini mencakup ancaman terhadap integritas dan kerahasiaan data nasabah, serta potensi terjadinya serangan siber yang dapat merusak sistem operasional dan merugikan kepercayaan publik terhadap industri perbankan.

Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang efektif sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara pengambilan keputusan yang berisiko dan upaya mitigasi yang relevan, baik dalam aspek tradisional maupun dalam ranah digital. Bank harus memiliki strategi yang komprehensif dalam menghadapi ancaman siber dan menjaga keberlanjutan sistem digital mereka dengan memperkuat pertahanan terhadap serangan dan pelanggaran keamanan.

General Overview of BRK Syariah Risk Management System

Bank Risk Management Policy

BRK Syariah's commitment to implementing risk management is an integral part of its efforts to strengthen Good Corporate Governance. Through the application of comprehensive and integrated risk management, BRK Syariah strives to identify, measure, monitor, and control various potential risks to maintain operational stability, protect the Bank's assets and reputation, and ensure sustainable performance in supporting the achievement of strategic goals and meeting stakeholder expectations.

The risks faced are not only related to credit, market, and operational risks but also risks arising from global economic uncertainty, regulatory changes, and evolving digital technology challenges. As technology advances, the banking sector increasingly relies on digital systems and online platforms, giving rise to new risks, particularly regarding data security and potential cybercrime. These risks include threats to the integrity and confidentiality of customer data, as well as the potential for cyberattacks that could damage operational systems and undermine public trust in the banking industry.

Therefore, the implementation of effective governance is vital in creating a balance between risky decision-making and relevant mitigation efforts, both in traditional aspects and the digital realm. The Bank must have a comprehensive strategy in facing cyber threats and maintaining the sustainability of its digital systems by strengthening defenses against attacks and security breaches.

Melalui pengelolaan risiko yang baik, bank dapat menjaga keseimbangan antara keuntungan dan potensi kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, peran serta regulator dan otoritas yang relevan, seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, turut mendukung terciptanya kerangka kerja yang kuat dalam pengelolaan risiko di perbankan Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi perubahan yang cepat, tantangan global, serta ancaman digital dan kejahatan siber yang semakin kompleks.

Through sound risk management, the bank can maintain a balance between profits and potential losses that may arise. Furthermore, the involvement of regulators and relevant authorities, such as the Financial Services Authority and Bank Indonesia, supports the creation of a robust framework for risk management in Indonesian banking. This is expected to strengthen the resilience of the banking sector in facing rapid changes, global challenges, and increasingly complex digital threats and cybercrimes.

Manajemen risiko yang efektif adalah salah satu elemen penting dari tata kelola yang baik. Perbankan harus secara proaktif memastikan dapat dicapainya kesinambungan usaha, pelayanan kepada pelanggan dan pengembangan tujuan organisasi yang sejalan dengan Visi dan Misi dalam perspektif memenuhi ekspektasi para *Stakeholder*-nya.

Effective risk management is a critical element of good governance. Banking institutions must proactively ensure business continuity, customer service, and the development of organizational goals aligned with the Vision and Mission from the perspective of meeting stakeholder expectations.

Proses pemulihan perekonomian global pasca pandemic di sepanjang tahun 2025, masih diwarnai berbagai ketidakpastian akibat berlarutnya perang Rusia – Ukraina, memanasnya konflik di Timur Tengah, gangguan rantai pasok yang memicu terjadinya inflasi tinggi, persaingan ketat dalam mengelola likuiditas. Kenaikan suku bunga acuan (*benchmark rate*) negara-negara maju yang diberlakukan untuk meredam inflasi pada akhirnya memicu terjadinya *capital outflow* dan berlanjutnya perlambatan pertumbuhan perekonomian global.

The global economic recovery process post-pandemic throughout 2025 remains characterized by various uncertainties due to the prolonged Russia-Ukraine war, escalating conflicts in the Middle East, supply chain disruptions triggering high inflation, and intense competition in liquidity management. The increase in benchmark rates by developed countries, implemented to curb inflation, ultimately triggered capital outflows and a continued slowdown in global economic growth.

Berbagai faktor tersebut meningkatkan risiko yang harus diatasi oleh Bank, seperti potensi naiknya *Non Performing Financing* (NPF), depresiasi Rupiah terhadap eksposur valas, pelemahan *Net Interest Income*, turunnya valuasi portofolio surat berharga, kecukupan likuiditas, berkurangnya ketahanan permodalan ditambah dengan meningkatnya eksposur risiko investasi. Untuk mengukur dampak pemburukan faktor ekonomi, faktor lingkungan dan sosial, Bank melakukan *stress testing* internal secara berkala, sekaligus mempersiapkan mitigasi yang relevan atas setiap potensi risiko yang muncul. Bank juga menetapkan selera risiko (*risk appetite*) dan *risk tolerance* terhadap produk atau aktivitas Bank, sehingga profil risiko, tata kelola, earning dan capital Bank akan dapat terjaga dengan baik.

These factors increase the risks the Bank must address, such as the potential rise in Non-Performing Financing (NPF), Rupiah depreciation against foreign exchange exposure, weakening Net Interest Income, declining valuation of securities portfolios, liquidity adequacy, reduced capital resilience, and increased investment risk exposure. To measure the impact of deteriorating economic, environmental, and social factors, the Bank conducts periodic internal stress testing while preparing relevant mitigations for every potential risk that arises. The Bank also sets risk appetite and risk tolerance for its products or activities, ensuring the Bank's risk profile, governance, earnings, and capital are well-maintained.

Bank secara berkelanjutan menerapkan strategi optimalisasi budaya risiko (*Risk Culture*), melakukan *monitoring* dan memberikan pemahaman pentingnya penerapan fungsi budaya manajemen risiko di setiap aspek aktivitas operasional Bank kepada seluruh pegawai, serta mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan sesuai dengan penerapan manajemen risiko perbankan di Indonesia sesuai ketentuan regulasi, meningkatkan kewaspadaan secara langsung maupun tidak langsung

The Bank continuously implements a Risk Culture optimization strategy, monitoring and providing an understanding of the importance of the risk management culture function in every aspect of the Bank's operational activities to all employees. It also identifies weaknesses and deviations at an early stage and reassesses the fairness of the Bank's existing policies and procedures continuously in accordance with banking risk management implementation in Indonesia as per regulatory requirements. This increases alertness, both directly and indirectly, among all individual employees

oleh seluruh individu pegawai maupun kelompok kerja, yang diharapkan menjadi etos kerja yang harus mendapat dukungan untuk mencapai visi dan misi Bank serta meningkatkan ketahanan siber dalam era digitalisasi. Untuk mengukur kinerja operasional Bank yang sesuai dengan misi, visi, strategi bisnis, kecukupan permodalan dan kecukupan sumber daya manusia, maka seluruh unit kerja dalam organisasi Bank telah melakukan penilaian secara kuantitatif (*self assessment*) terhadap risiko operasional yang terjadi pada seluruh aktivitas operasional perbankan dengan mempertimbangkan frekuensi maupun dampak material yang merugikan Bank.

Kebijakan Manajemen Risiko Bank bertujuan untuk :
1. Memberikan arahan dalam mengamankan Bank atas risiko yang dihadapi melalui penentuan arah kebijakan pengelolaan risiko
2. Menerapkan tata kelola yang baik terkait pengelolaan risiko
3. Dasar dalam pelaksanaan aktivitas Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan praktek perbankan yang sehat
4. Menjadi pedoman dalam kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan risiko di seluruh level organisasi Bank
5. Membangun budaya peduli risiko (*risk awareness*) di lingkungan kerja Bank.

Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas:

a. Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank.

b. Pengukuran Risiko
Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan menentukan modal untuk meng-*cover* risiko residual.

c. Pemantauan Risiko
Pemantauan risiko bertujuan antara lain untuk membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan eksposur risiko yang sedang dikelola.

d. Pengendalian Risiko
Pengendalian risiko dilakukan terhadap potensi terjadinya pelampauan atas limit risiko yang telah ditetapkan dan dapat ditolerir oleh Bank.

Dalam penerapan manajemen risiko, BRK Syariah senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu kepada :

and workgroups, which is expected to become a work ethos that must be supported to achieve the Bank's vision and mission and enhance cyber resilience in the digitalization era. To measure the Bank's operational performance in accordance with the mission, vision, business strategy, capital adequacy, and human resource adequacy, all work units within the Bank's organization have conducted quantitative assessments (self-assessment) of operational risks occurring in all banking operational activities, considering both the frequency and the material impact detrimental to the Bank.

The Bank's Risk Management Policy aims to:
1. Provide direction in securing the Bank against risks faced through determining risk management policy directions.
2. Implement good governance related to risk management.
3. Serve as a basis for conducting Bank activities based on prudential principles and sound banking practices.
4. Serve as a guideline for authority and responsibility in risk management across all levels of the Bank's organization.
5. Build a risk-aware culture (risk awareness) within the Bank's work environment.

Risk Management Implementation is carried out in a sequence consisting of:

a. Risk Identification
Aims to identify the types of risks inherent in every functional activity that could potentially harm the Bank.

b. Risk Measurement
Aims to determine the risk exposure inherent in the Bank's activities to be compared with the Bank's risk appetite, enabling the Bank to take risk mitigation actions and determine capital to cover residual risks.

c. Risk Monitoring
Aims, among other things, to compare established risk limits with the risk exposure being managed.

d. Risk Control
Conducted against the potential for exceeding established risk limits that can be tolerated by the Bank.

In implementing risk management, BRK Syariah consistently complies with the regulations and laws applicable in Indonesia, referring to:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan;
5. POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;
6. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. POJK Nomor 26/POJK.03/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah;
8. POJK Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah;
10. POJK Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
11. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
12. SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
13. SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah;
14. SEOJK Nomor 35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah;
15. SEOJK Nomor 10 /SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
16. SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Kerangka Manajemen Risiko

Implementasi manajemen risiko di BRK Syariah dilakukan secara aktif sesuai dengan kerangka Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis dan komprehensif, yang dijadikan sebagai dasar dalam proses manajemen risiko Bank dalam memastikan tercapainya target dan realisasi bisnis Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mendorong pertumbuhan kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta memaksimalkan nilai pemegang saham. Penerapan manajemen risiko

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking;
3. Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection;
4. Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector;
5. POJK No. 21/POJK.03/2014 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Sharia Commercial Banks;
6. POJK Number 24/POJK.03/2015 concerning Products and Activities of Sharia Banks and Sharia Business Units;
7. POJK Number 26/POJK.03/2021 dated December 21, 2021, concerning Maximum Limit for Provision of Funds and Large Fund Provision for Sharia Commercial Banks;
8. POJK Number 2/POJK.03/2022 concerning Asset Quality Assessment for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
9. Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks;
10. POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
11. SEOJK Number 10/SEOJK.03/2014 dated June 11, 2014, concerning Health Level Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
12. SEOJK Number 8/SEOJK.03/2014 dated June 13, 2014, concerning Health Level Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
13. SEOJK Number 34/SEOJK.03/2015 dated December 21, 2015, concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using the Standardized Approach for Sharia Commercial Banks;
14. SEOJK Number 35/SEOJK.03/2015 dated December 21, 2015, concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Market Risk Using the Standard Method for Sharia Commercial Banks;
15. SEOJK Number 10/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Reports for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
16. SEOJK Number 25/SEOJK.03/2023 dated December 21, 2023, concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Risk Management Framework

The implementation of risk management at BRK Syariah is actively carried out according to a written and comprehensive Risk Management Framework. This framework serves as the foundation for the Bank's risk management process to ensure the achievement of the Bank's business targets and realization while maintaining prudential principles, encouraging performance growth, complying with applicable regulations, and maximizing shareholder value. The implementation of risk management at BRK Syariah consistently ensures,

di BRK Syariah senantiasa memastikan, memiliki dan melaksanakan unsur-unsur penting yang terdapat pada penilaian kecukupan penerapan manajemen risiko, yaitu :

1. **Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah**

   Dewan Komisaris memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggung jawabnya yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor No : 001/KEPDK/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), antara lain Melakukan pengawasan atas jalannya Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi Perseroan. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi.

   Direksi memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggung jawabnya sesuai Surat Keputusan Direksi No. 215/KEPDIR/2024 tanggal 28 November 2024 Tentang Pedoman Kerja Direksi. Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan melakukan penyusunan, persetujuan, penerapan serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank. Dalam menjalankan fungsinya menerapkan manajemen risiko yang efektif, Direksi didukung oleh Komite Sumber Daya Insani, Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite SHALMA, Komite Kebijakan Bisnis dan Komite Kredit/ Pembiayaan.

   Dewan Pengawas Syariah memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggung jawabnya sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor Surat Keputusan Direksi No. 133/KEPDIR/2025 tnggl 20 Agustus 2025, Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Memberikan opini syariah terhadap produk baru baik dalam hal penghimpunan dana ataupun pembiayaan serta aktivitas Bank lainnya.

possesses, and executes essential elements found in the assessment of risk management implementation adequacy, namely:

1. **Active Oversight by the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board**

   The Board of Commissioners has clear guidelines on its duties and responsibilities as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners No: 001/KEPDK/2023 dated June 27, 2023, concerning the Work Guidelines of the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), which include: overseeing the management of the Company by the Board of Directors in general, regarding both the Company and its business, and providing advice to the Board of Directors. Performing duties specifically assigned under the articles of association, applicable laws and regulations, and/or based on GMS resolutions. Exercising duties, responsibilities, and authorities in accordance with the Company's Articles of Association and GMS resolutions. In performing its risk oversight function, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration & Nomination Committee.

   The Board of Directors has clear guidelines on its duties and responsibilities as per the Board of Directors Decree No. 215/KEPDIR/2024 dated November 28, 2024, concerning the Work Guidelines of the Board of Directors. Active oversight by the Board of Directors is carried out, among other things, by drafting, approving, implementing, and evaluating the Bank's risk management policies and procedures. In exercising its function to implement effective risk management, the Board of Directors is supported by the Human Resources Committee, Information Technology Committee, Risk Management Committee, SHALMA Committee, Business Policy Committee, and Credit/Financing Committee.

   The Sharia Supervisory Board has clear guidelines on its duties and responsibilities as per the Board of Directors Decree No. 133/KEPDIR/2025 dated August 20, 2025, concerning the Company Guidelines (BPP) of the Sharia Supervisory Board. Its duties, authorities, and responsibilities include providing advice and suggestions to the Board of Directors and supervising the Bank's activities to ensure compliance with Sharia Principles. It also provides Sharia opinions on new products regarding fund collection, financing, and other Bank activities.

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

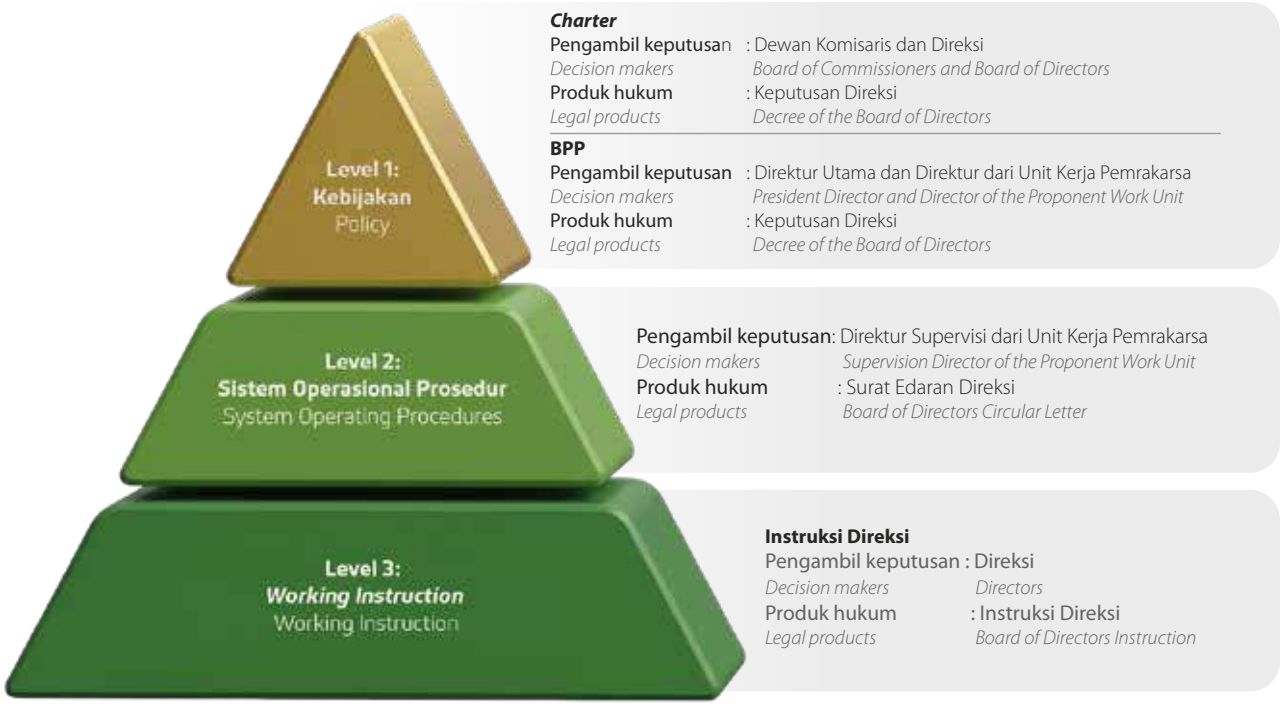
BRK Syariah memiliki kebijakan manajemen risiko yang dijadikan sebagai pedoman sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 050/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) mengacu pada POJK No.65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Struktur Kebijakan dan Prosedur di BRK Syariah mencerminkan tingkat kepentingan, kejelasan dan urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan proses atau tugas sebagai berikut :

Adequacy of Risk Management Policies and Procedures and Establishment of Risk Limits

BRK Syariah has risk management policies that serve as guidelines as regulated in the Board of Directors Decree Number 050/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022, concerning the Company Guidelines (BPP) for Risk Management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), referring to POJK No.65/POJK.03/2016 dated December 23, 2016, concerning Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

The structure of Policies and Procedures at BRK Syariah reflects the level of importance, clarity, and sequence of steps to be followed in the execution of processes or tasks as follows:



BRK Syariah memastikan seluruh kegiatan yang memiliki eksposur risiko memiliki kecukupan kebijakan dan prosedur sebagai acuan segenap unit kerja dalam melakukan kegiatan operasional sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, termasuk penetapan limit risiko untuk melindungi Bank dari risiko yang berlebihan (*excessive*) dan melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

BRK Syariah ensures that all activities with risk exposure have adequate policies and procedures as references for all work units in conducting operational activities according to their functions and responsibilities, including setting risk limits to protect the Bank from excessive risk and violations of prudential banking principles.

Sebagai acuan dalam pengelolaan risiko BRK Syariah telah memiliki Kebijakan maupun Prosedur Manajemen Risiko Bank yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.

As a reference in risk management, BRK Syariah possesses Risk Management Policies and Procedures that serve as the main guidelines. For more specific business areas, the Bank has specialized policies and procedures, such as in credit, treasury, and operations. These policies and procedures regulate, among other things, the setting of limits for each activity, both at the portfolio and transactional levels.

Sebagai salah satu metode pengendalian Risiko, BRK Syariah juga telah memiliki pedoman terkait limit risiko. Limit risiko merupakan ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan oleh manajemen. Penetapan limit risiko BRK Syariah ditetapkan dalam kebijakan tentang *Risk Appetite Statement* yang bersifat strategis dan memerlukan persetujuan dari Direksi. Dalam *Risk Appetite Statement* diatur tentang limit risiko yang terkait dengan Penyelarasan Strategi, Kecukupan Modal, Rentabilitas, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Imbal hasil dan Risiko Investasi.

As one of the risk control methods, BRK Syariah also has guidelines related to risk limits. Risk limits are thresholds to determine the level of risk mitigation intensity to be carried out by management. BRK Syariah's risk limits are established in the Risk Appetite Statement policy, which is strategic in nature and requires approval from the Board of Directors. The Risk Appetite Statement regulates risk limits related to Strategic Alignment, Capital Adequacy, Profitability, Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Compliance Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Rate of Return Risk, and Investment Risk.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Tujuan dari proses manajemen risiko yang baik adalah untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas Bank dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap seluruh aktivitas BRK Syariah. Proses manajemen risiko mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko. Proses Manajemen Risiko dilaksanakan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Bank pada seluruh jajaran Bank hingga level operasional baik secara transaksional maupun pada level portofolio. Bank terus melakukan pengembangan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian risiko yang komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya dapat mengambil langkah- langkah yang memadai untuk memitigasi dampak risiko seminimal mungkin.

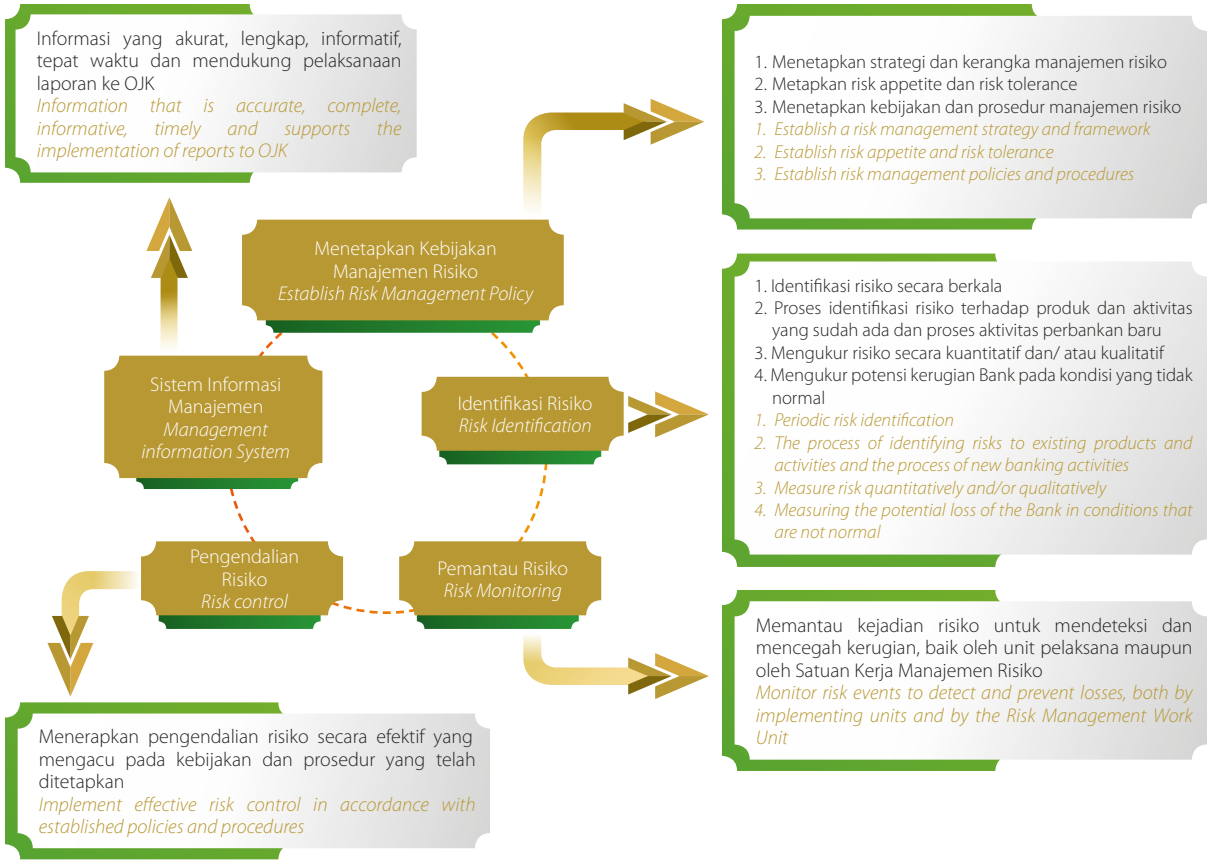
2. Adequacy of Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Control Processes as well as Risk Management Information Systems

The objective of a sound risk management process is to manage the risks inherent in the Bank's activities to provide maximum sustainable added value to all BRK Syariah activities. The risk management process includes continuous identification, measurement, monitoring, and control of all material risk factors, supported by a Risk Management Information System. The Risk Management Process is implemented for all risk factors that significantly affect the Bank's financial condition across all levels of the Bank down to the operational level, both transactionally and at the portfolio level. The Bank continues to develop and improve its comprehensive risk management system framework and risk control structure to provide early information on potential risks and subsequently take adequate steps to mitigate risk impacts to a minimum.

Skema Proses Manajemen Risiko BRK Syariah

BRK Syariah Risk Management Process Scheme:

Skema Proses Manajemen Risiko BRK Syariah
Schematic of BRK Syariah Risk Management Process



a. Identifikasi Risiko

Dilakukan secara proaktif terhadap seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya. Proses identifikasi dilakukan secara berkala untuk seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha Bank.

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang ada, di mana sekurang-kurangnya dilakukan terhadap risiko utama dari produk dan aktivitas bisnis Bank. Selain itu, Bank melakukan identifikasi risiko dengan melakukan kajian risiko, advis dan *review* terhadap setiap produk dan/atau aktivitas Bank yang akan diterbitkan/ diimplementasikan oleh unit bisnis/unit fungsional atau *risk owner* guna memberikan gambaran terkait risiko-risiko yang dapat terjadi di kemudian hari beserta mitigasinya sebelum diperkenalkan atau dijalankan sesuai dengan permintaan unit bisnis/unit fungsional atau *risk owner*.

a. Risk Identification

Identification is carried out proactively for all business activities to analyze sources, the level of probability of risk, and its impact. The identification process is conducted periodically for all types and characteristics of risks found in every Bank business activity.

The risk identification process is carried out by analyzing all existing risk sources, at a minimum covering the main risks of the Bank's products and business activities. Additionally, the Bank identifies risks by conducting risk assessments, advice, and reviews of every product and/or activity to be issued/implemented by business/functional units or risk owners to provide an overview of risks that may occur in the future along with their mitigation before being introduced or executed, based on requests from the business/functional units or risk owners.

b. Pengukuran Risiko

Bertujuan untuk memperkirakan besarnya eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada setiap produk dan/atau aktivitas yang dimiliki Bank dibandingkan dengan *risk appetite* sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko. Pendekatan pengukuran risiko dapat bersifat kuantitatif, kualitatif atau merupakan kombinasi antara keduanya untuk meng-*cover* risiko residual yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank.

c. Pemantauan Risiko

Bank memiliki prosedur pemantauan risiko yang antara lain mencakup pemantauan risiko terhadap besarnya kepatuhan limit internal maupun konsistensi pelaksanaan prosedur operasional dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik yang dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko terhadap produk dan aktivitas Bank dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko Bank yang bersifat material. Pemantauan dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai pemilik risiko (*Risk Owner*) maupun oleh *Risk Control Unit*. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

d. Pengendalian Risiko

Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk mengelola seluruh eksposur risiko. Proses pengendalian risiko diterapkan terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko yang disesuaikan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan Bank. Faktor yang mendukung terlaksananya pengendalian risiko yang handal pada Bank yaitu:

a. Risk Measurement

Aims to estimate the magnitude of risk exposure as a whole and by risk type for every product and/or activity owned by the Bank compared to the risk appetite as a reference for conducting risk control. The risk measurement approach can be quantitative, qualitative, or a combination of both to cover residual risks adjusted to the characteristics and complexity of the Bank's business.

b. Risk Monitoring

The Bank has risk monitoring procedures that include, among others, monitoring the extent of internal limit compliance and the consistency of operational procedure implementation with established policies. The monitoring process ensures that risks have been well-managed by evaluating risk exposure to the Bank's products and activities and improving the reporting process in the event of material changes in business activities, products, transactions, risk factors, information technology, and the Bank's risk management information system. Monitoring is conducted both by the Operational Work Units (Risk Taking Units) as Risk Owners and by the Risk Control Unit. Monitoring results are presented in periodic reports submitted to management for risk mitigation and necessary actions.

c. Risk Control

The Bank has an adequate risk control system referring to established policies and procedures, aiming to manage all risk exposures. The risk control process is applied to 10 (ten) types of risks adjusted to the risk appetite and risk tolerance established by the Bank. Factors supporting the implementation of reliable risk control at the Bank are:



e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Tujuan adanya sistem informasi manajemen risiko adalah untuk memastikan data yang dibutuhkan tersedia, akurat, informatif dan tepat waktu sehingga Bank dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi dampak risiko seminimal mungkin. Sistem informasi manajemen risiko BRK Syariah menggunakan aplikasi antara lain aplikasi *Contingency Funding Plan* (CFP), aplikasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB), aplikasi *Internal Capital Adequacy Assesment Process* (ICAAP) dan aplikasi *Operational Risk Self Assessment* (ORSA).

Sistem Informasi manajemen risiko ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
2. Mendeteksi setiap perkembangan yang kurang menguntungkan pada tahap awal, sehingga juga memungkinkan dilakukannya tindakan korektif untuk meminimalisir kerugian Bank.

3. Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang andal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Kecukupan kebijakan dan terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan satuan kerja pendukung serta SKAI.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Pembentukan organisasi Manajemen Risiko Bank didasarkan pada ketentuan otoritas mengenai penerapan manajemen risiko, penerapan Basel II serta kebutuhan pengelolaan risiko yang lebih baik. Organisasi Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko yaitu Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko yang dibantu oleh Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direksi untuk melakukan pengelolaan risiko secara independen.

Fungsi manajemen risiko melakukan monitoring risiko secara keseluruhan atas penerapan manajemen risiko yang meliputi penetapan tingkat *risk appetite* dan *risk tolerance*, pengawasan terhadap pelaksanaan unit bisnis yang sesuai dengan kebijakan manajemen risiko dan standar operasional yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil pemantauan risiko kepada Komisaris dan Direksi.

a. Risk Management Information System

The purpose of the risk management information system is to ensure the required data is available, accurate, informative, and timely so the Bank can take adequate steps to mitigate risk impacts to a minimum. BRK Syariah's risk management information system uses applications such as the Contingency Funding Plan (CFP) application, Bank Health Level (TKB) application, Internal Capital Adequacy Assesment Process (ICAAP) application, and Operational Risk Self Assessment (ORSA) application.

This risk management information system aims to:

1. Support the implementation of the risk identification, measurement, monitoring, and control processes.
2. Detect any unfavorable developments at an early stage, thereby also enabling corrective actions to minimize Bank losses.

3. Comprehensive Internal Control System

The implementation process of effective Risk Management must be equipped with a reliable internal control system. Effective implementation of the internal control system helps the Bank's management safeguard Bank assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reporting, increase the Bank's compliance with laws and regulations, and reduce the risk of losses, deviations, and violations of prudential aspects. The adequacy of policies and the implementation of a reliable and effective internal control system are the responsibility of all operational work units (risk-taking units), supporting work units, and the Internal Audit & Anti-Fraud Division (SKAI).

Risk Management Organizational Structure

The formation of the Bank's Risk Management organization is based on authority regulations regarding risk management implementation, Basel II implementation, and the need for better risk management. The Risk Management organization is led by a Director responsible for risk management, namely the Director of Compliance & Risk Management, assisted by the Risk Management Division, which is responsible to the Board of Directors for conducting risk management independently.

The risk management function conducts overall risk monitoring of risk management implementation, including determining risk appetite and risk tolerance levels, overseeing business unit execution in accordance with established risk management policies and operational standards, and reporting risk monitoring results to the Board of Commissioners and Board of Directors.

Bank telah melaksanakan kontrol independen yang merupakan sistem pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh unit kerja yang tidak berada di bawah unit pelaksana transaksi, yaitu *Staff Quality Assurance & Collateral Admin* Cabang dan *Credit Review* Cabang. Kontrol independen bertugas untuk melakukan pemeriksaan, verifikasi, *proofing*, *monitoring*, *review* dan analisa atas transaksi, pemberian kredit/ pembiayaan dan laporan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja yang pelaksanaannya secara *sampling*. Lapisan terakhir adalah audit internal yang bertujuan melakukan audit terhadap pelaksanaan seluruh unit kerja. Apabila ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka akan dicari upaya tindak lanjut penyelesaian dan melakukan *review* serta evaluasi rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan. Manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha Bank, yang dikelola melalui pembentukan Komite Manajemen Risiko pada tingkat Direksi dan Divisi serta Komite Pemantau Risiko pada tingkat Dewan Komisaris.

The Bank has implemented independent controls, which are embedded supervision systems carried out by work units not under the transaction executing unit, namely the Quality Assurance & Collateral Admin Staff at Branches and Branch Credit Review. Independent control is tasked with conducting inspection, verification, proofing, monitoring, review, and analysis of transactions, credit/financing provision, and reports carried out by work units on a sampling basis The final layer is internal audit, which aims to audit the execution of all work units. If violations of applicable provisions are found, follow-up settlement efforts will be sought, and a review and evaluation of the overall risk management design and implementation will be conducted. Risk management functions as a filter or early warning system for the Bank's business activities, managed through the formation of the Risk Management Committee at the Board of Directors and Division levels and the Risk Monitoring Committee at the Board of Commissioners level.

Fungsi pengelola manajemen risiko BRK Syariah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko yang berada di bawah Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko mengacu pada Keputusan Direksi Nomor 193/ KEPDIR/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang perubahan pertama atas Surat Keputusan Direksi No 227/KEPDIR/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

The risk management management function of BRK Syariah is carried out by the Risk Management Division under the Director of Compliance & Risk Management, referring to the Board of Directors Decree Number 193/ KEPDIR/2024 dated October 18, 2024, concerning the first amendment to the Board of Directors Decree No 227/ KEPDIR/2024 regarding the Organizational Structure and Work Procedures of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Risk Management Division Organizational Structure:

Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko
Organizational Structure of Risk Management Division



Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Setiap unit organisasi wajib melaporkan kondisi risiko dan wajib memahami setiap perubahan risiko yang ada di unit kerjanya, dan melaporkan secara berkala kepada Divisi Manajemen Risiko bila terdapat perubahan-perubahan dan hal-hal spesifik. Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengelolaan strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko serta memantau pelaksanaannya;
2. Identifikasi risiko dan mengumpulkan data/ informasi yang relevan untuk pengukuran, analisa dan pemantauan Risiko;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, dan Risiko Lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank;
4. Membuat laporan Tingkat Kesehatan bank, Profil Risiko Bank dan laporan lainnya yang terkait risiko untuk kepentingan internal dan eksternal;
5. Menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
6. Merekomendasikan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mitigasi Risiko kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko;
7. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka Sertifikasi Manajemen Risiko;
8. Meningkatkan penerapan budaya risiko.

Adapun Satuan Kerja Operasional (SKO) adalah seluruh unit kerja terutama Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*) di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang terutama yang terkait langsung dengan risiko, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Melakukan seluruh kegiatan di setiap unit kerja dengan berpedoman pada penyelenggaraan pekerjaan yang ada serta kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko.
2. Mengendalikan eksposur risiko di unit kerja masing - masing.
3. Menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Divisi Manajemen Risiko secara berkala.
4. Melakukan usulan terhadap hal-hal tertentu khususnya untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko.

The Risk Management Division is directly responsible to the Director of Compliance & Risk Management. Every organizational unit is required to report risk conditions and understand every change in risk within its work unit, reporting periodically to the Risk Management Division if there are changes and specific matters. The Risk Management Division has the following duties and responsibilities:

1. Management of risk management strategies recommended by the Risk Management Committee and monitoring their implementation;
2. Risk identification and collection of relevant data/information for measurement, analysis, and monitoring of Risk;
3. Monitoring and controlling Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, and Other Risks in every Bank functional activity;
4. Producing Bank Health Level reports, Bank Risk Profile reports, and other risk-related reports for internal and external purposes;
5. Calculating the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM);
6. Recommending tactical and strategic steps for risk mitigation to operational work units (risk-taking units) and/or to the Risk Management Committee;
7. Enhancing employee competency within the framework of Risk Management Certification;
8. Improving risk culture implementation.

The Operational Work Units (SKO) comprise all work units, especially operational work units (Risk-Taking Units) at the Head Office and Branch Offices, particularly those directly related to risk, with the duties and responsibilities to:

1. Conduct all activities in each work unit guided by existing work implementation as well as risk management implementation policies, guidelines, and strategies.
2. Control risk exposure in their respective work units.
3. Submit reports or information regarding risk exposure managed by the relevant work unit to the Risk Management Division periodically.
4. Propose certain matters, specifically to improve risk management implementation.

Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah:
1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi dan saran atas berbagai kegiatan perusahaan, sehingga perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Direksi.

Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
1. Seorang Komisaris Independen;
2. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan;
3. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko

Melalui Surat Keputusan Direksi Bank Nomor Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor No. 074/KEPDIR/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Komite Manajemen Risiko dan Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka dibentuklah Komite Manajemen Risiko beranggotakan Direksi dan Pemimpin Divisi yang merupakan anggota, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
2. Berwenang dan bertanggungjawab terhadap perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
3. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
4. Melakukan pembahasan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank serta pembahasan lainnya termasuk *Risk Appetite Statement* dan risiko yang signifikan.
5. Melakukan pembahasan masalah yang dianggap perlu dan sangat mendesak.

Tata Kelola Manajemen Risiko

Sasaran kebijakan manajemen risiko Bank adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya aktivitas/kegiatan usaha Bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha Bank. Pedoman penerapan standar manajemen risiko Bank berdasarkan pada:

Risk Monitoring Committee

The duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee are:
1. Evaluate the suitability between risk management policies and the implementation of Bank policies;
2. Monitor and evaluate the execution of duties by the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit to provide recommendations and advice on various company activities that need the attention of the Board of Commissioners in exercising its oversight function over the Board of Directors.

The Risk Monitoring Committee members consist of at least:
1. One Independent Commissioner;
2. One Independent Party with expertise in finance;
3. One Independent Party with expertise in risk management.

Risk Management Committee

Through the Bank's Board of Directors Decree, the formation of the Risk Management Committee was established in the Board of Directors Decree No. 074/KEPDIR/2023 dated May 16, 2023, concerning the Risk Management Committee and OJK Regulation Number 65/POJK.03/2016 dated December 23, 2016, regarding Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. Thus, the Risk Management Committee was formed, consisting of the Board of Directors and Division Leaders as members, with the following duties and responsibilities:
1. Draft risk management implementation policies, strategies, and guidelines.
2. Be authorized and responsible for the improvement or refinement of risk management implementation based on risk management implementation evaluation results.
3. Determine matters related to business decisions that deviate from normal procedures.
4. Discuss the Risk Profile and Bank Health Level, as well as other discussions, including the Risk Appetite Statement and significant risks.
5. Discuss matters deemed necessary and urgent.

Risk Management Governance

The objective of the Bank's risk management policy is to identify, measure, monitor, and control the Bank's business activities with a reasonable level of risk in a directed, integrated, and sustainable manner. Thus, risk management functions as a filter or early warning system for the Bank's business activities. The guidelines for the implementation of the Bank's risk management standards are based on:

a. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum, yang mencakup mengenai pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
b. Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko, yang mencakup penerapan manajemen risiko yang meliputi 10 (sepuluh) risiko.
c. Penilaian profil risiko, yang mencakup penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*risk control system*), baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi.

Untuk meningkatkan kelanjutan usaha dalam menghadapi gejolak kondisi perekonomian, gangguan eksternal lainnya, Bank berupaya memperkuat proses manajemen risiko di setiap kegiatan usaha.

Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risiko merupakan bagian dari bisnis Bank sehingga dalam penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menggunakan pendekatan pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional. Upaya dalam pengelolaan risiko mencakup penilaian profil risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko yang bertujuan untuk menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar yang dapat mengganggu permodalan Bank.

Pengelolaan risiko melalui permodalan disesuaikan dengan rencana strategis dan bisnis jangka panjang, serta kebijakan alokasi modal secara efisien sesuai dengan segmen bisnis yang memiliki profil *risk return* yang optimal mengacu pada POJK No. 65/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal hasil (*Rate of Return Risk*) dan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*). Pengelolaan risiko diupayakan sejalan dengan *Road Map Basel* I, *Basel* II dan *Basel* III serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

a. General Risk Management Implementation, which covers active oversight by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board; adequacy of policies, procedures, and limit setting; adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes, as well as risk management information systems; and a comprehensive internal control system.
b. Risk Management Implementation for Each Risk, which covers the implementation of risk management covering 10 (ten) risks.
c. Risk Profile Assessment, which covers assessment of inherent risks and the quality of risk management implementation reflecting the risk control system, both for the Bank individually and on a consolidated basis.

To improve business continuity in facing economic fluctuations and other external disruptions, the Bank strives to strengthen the risk management process in every business activity.

Risk Profile and Its Management

Risk is a part of the Bank's business; therefore, in implementing risk management, BRK Syariah uses a risk management approach through capital and risk management through operational activities. Efforts in risk management include inherent risk profile assessment and assessment of the quality of risk management implementation reflecting the risk control system, aiming to avoid relatively larger potential losses that could disrupt the Bank's capital.

Risk management through capital is adjusted to long-term strategic and business plans, as well as efficient capital allocation policies according to business segments that have an optimal risk return profile, referring to POJK No. 65/POJK.03/2016 concerning Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units covering 10 (ten) types of risks: Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Rate of Return Risk, and Investment Risk (Equity Investment Risk). Risk management efforts are aligned with the Basel I, Basel II, and Basel III Road Maps and Financial Services Authority regulations.

Profil Risiko Utama

Risiko Kredit

Adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan *credit risk*, dan *settlement risk*. Risiko Kredit timbul karena ketidakpastian pelunasan pembiayaan oleh debitur/ pihak ketiga baik sebagian ataupun seluruhnya. Risiko ini disebabkan oleh investasi yang tidak memberikan pendapatan atau berpotensi risiko yang mengakibatkan pengurangan aktiva modal. Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Selain Pembiayaan, Bank menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Secara umum eksposur Risiko Kredit merupakan salah satu eksposur Risiko utama sehingga kemampuan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko Kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi Risiko tersebut sangat penting.
Beberapa langkah yang dilakukan Bank dalam menunjang pengelolaan, mitigasi risiko kredit serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah:

- Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara keseluruhan memadai dan sesuai dengan yang diatur dalam AD/ART serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peran aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam memonitoring pemahaman di Kantor Cabang terkait penyaluran pembiayaan, terutama bagi Pemimpin Cabang sebagai pemutus pembiayaan yang menjadi kewenangannya.
- Bank telah menetapkan *Risk Appetite* untuk Risiko Kredit sesuai dengan Rencana Bisnis Bank, seperti penetapan penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, rasio NPF, NPF per segmentasi pembiayaan dan rasio *Financing at Risk* dengan tetap memperhatikan risiko yang wajar pada kondisi normal guna meminimalkan dampak kerugian bank.
- Strategi manajemen risiko yang searah dengan *risk appetite* dan kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif, serta fungsi manajemen risiko kredit yang cukup independen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas telah berjalan dengan cukup baik.
- Budaya manajemen risiko kredit telah disosialisasikan kepada seluruh level organisasi dan perlu dievaluasi agar dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga timbulnya budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja.
- *Monitoring* terhadap portofolio pembiayaan baik dari sisi *outstanding* maupun dari sisi kualitas pembiayaan pada seluruh jaringan kantor termasuk penetapan wilayah kerja PIC *monitoring* NPF sehingga pembiayaan

Primary Risk Profiles

Credit Risk

This is the risk due to the failure of the customer or other parties to fulfill obligations to the Bank in accordance with credit risk and settlement risk. Credit Risk arises due to uncertainty in financing repayment by the debtor/ third party, either partially or entirely. This risk is caused by investments that do not provide income or potential risks resulting in capital asset reduction. Credit Risk can stem from various Bank business activities. Besides Financing, the Bank faces Credit Risk from various financial instruments such as securities, acceptances, interbank transactions, trade finance transactions, exchange rate and derivative transactions, as well as commitment and contingency obligations.

In general, Credit Risk exposure is one of the primary risk exposures, so the Bank's ability to identify, measure, monitor, and control Credit Risk and provide sufficient capital for such risk is very important.

Several steps taken by the Bank in supporting management, credit risk mitigation, and Risk Management Implementation Quality are:

- The Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board in performing their overall duties and responsibilities are adequate and in accordance with what is regulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.
- Active role of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board in monitoring understanding at Branch Offices regarding financing distribution, especially for Branch Leaders as financing approvers within their authority.
- The Bank has established Risk Appetite for Credit Risk in accordance with the Bank's Business Plan, such as setting financing distribution based on economic sector, NPF ratio, NPF per financing segmentation, and Financing at Risk ratio, while maintaining reasonable risk under normal conditions to minimize the impact of bank losses.
- Risk management strategies aligned with risk appetite and organizational adequacy in supporting effective risk management implementation, as well as a sufficiently independent credit risk management function with clear duties and responsibilities, have proceeded quite well.
- The credit risk management culture has been socialized to all organizational levels and needs to be evaluated for consistent implementation, creating a risk-aware culture across all work units.
- Monitoring the financing portfolio in terms of both outstanding balances and financing quality across the entire branch network, which includes the designation of operational territories for the Non-Performing Financing (NPF) monitoring Persons in Charge (PIC). Consequently,

pada Desember 2025 menjadi sebesar Rp21.787 miliar meningkat sebesar Rp179,75 miliar atau (0,83%) dibandingkan pembiayaan Desember 2024 dan NPF naik menjadi sebesar 3,82% dibandingkan Desember 2024 pada angka 2,37%

- Bank telah menetapkan *Risk Appetite* untuk Risiko Kredit sesuai dengan Rencana Bisnis Bank, seperti penetapan penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, rasio NPF, NPF per segmentasi pembiayaan dan rasio *Loan at Risk* dengan tetap memperhatikan risiko yang wajar pada kondisi normal guna meminimalkan dampak kerugian Bank.
- Strategi manajemen risiko yang searah dengan *risk appetite* dan kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif, serta fungsi manajemen risiko kredit yang cukup independen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas telah berjalan dengan cukup baik.
- Bank fokus dalam melakukan perbaikan kualitas pembiayaan bermasalah dengan menempatkan petugas penyelamatan dan penyelesaian bermasalah di unit kantor
- Bank aktif melakukan *monitoring* secara rutin dan berkala terhadap target dan realisasi penyaluran pembiayaan.
- Bank juga aktif melakukan upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah secara berkala, yaitu secara harian, mingguan dan bulanan serta meminta *action plan* perbaikan NPF dari masing-masing unit kantor sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- Bank telah menetapkan *Risk Appetite Metric* untuk Risiko Kredit dengan batasan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan.
- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit sudah memadai dan harus selalu diberi pemahaman agar dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pegawai, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap SK Direksi atas penyaluran kredit dengan cara melakukan sosialisasi BPP Pembiayaan keseluruh jaringan kantor BRK Syariah.
- Peningkatan *capacity building* secara kontiniu terutama pemahaman atas pelaksanaan prinsip syariah serta peran aktif dari supervisor sebagai upaya memitigasi penyaluran pembiayaan sesuai dengan ketentuan BPP Pembiayaan.
- Pada periode pelaporan peningkatan *capacity building* yang telah dilaksanakan di bidang pembiayaan antara lain Training Produk Pembiayaan, *Workshop* BPP dan SOP Pembiayaan, Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan dan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi EFOS.
- *Monitoring* terhadap kualitas penyaluran pembiayaan oleh Divisi Manajemen Risiko telah dilakukan secara berkala setiap bulannya melalui laporan pemantauan portofolio pembiayaan yang disampaikan kepada Direksi dan pihak-pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti penyelesaiannya yaitu kepada Divisi Komersial, Divisi Konsumer, Divisi Mikro, Kecil & Menengah serta Divisi *Special Asset Management*.

total financing as of December 2025 amounted to Rp21,787 billion, representing an increase of Rp179.75 billion (or 0.83%) compared to the financing recorded in December 2024. Concurrently, the NPF ratio escalated to 3.82%, an increase from the 2.37% recorded in December 2024.

- The Bank has established a Risk Appetite for Credit Risk in accordance with the Bank's Business Plan, including determining financing distribution based on economic sectors, the Non-Performing Loan (NPF) ratio, the NPF per financing segment, and the Loan at Risk ratio, while maintaining reasonable risk under normal conditions to minimize the impact of bank losses.
- The risk management strategy aligns with the risk appetite and the adequacy of organizational tools to support effective risk management, as well as a sufficiently independent credit risk management function with clearly defined duties and responsibilities, has been performing quite well.
- The Bank focuses on improving problem financing quality by placing rescue and settlement officers in office units.
- The Bank is active in routine and periodic monitoring of financing distribution targets and realization.
- The Bank also actively carries out periodic problem financing settlement efforts, daily, weekly, and monthly, and requests NPF improvement action plans from each office unit as a settlement effort.
- The Bank has established Risk Appetite Metrics for Credit Risk with established Risk Appetite and Risk Tolerance limits.
- Credit risk management policies and procedures are adequate and must always be communicated to ensure consistent implementation by employees, reducing violations of the Board of Directors' Decrees on credit distribution by socializing the Financing BPP to the entire BRK Syariah office network.
- Continuous capacity building, especially understanding Sharia principle implementation and the active role of supervisors as an effort to mitigate financing distribution in accordance with Financing BPP provisions.
- During the reporting period, capacity building in financing included Financing Product Training, BPP and SOP Financing Workshops, Financing Policy Socialization, and EFOS Application Usage Socialization.
- Monitoring of financing distribution quality by the Risk Management Division has been conducted periodically every month through financing portfolio monitoring reports submitted to the Board of Directors and related parties for immediate follow-up, namely the Commercial Division, Consumer Division, Micro, Small & Medium Division, and Special Asset Management Division.

- *Monitoring* realisasi *Risk Appetite Statement* untuk risiko kredit telah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko melalui Laporan *Risk Appetite Statement* yang setiap bulannya disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila terdapat parameter risiko kredit yang telah melampaui yaitu dibawah/diatas *risk appetite* atau *risk tolerance* yang ditetapkan, Divisi Manajemen Risiko juga akan menyampaikannya kepada Divisi terkait untuk segera ditindaklanjuti penyelesaiannya.
- Bank melalui Divisi Kepatuhan juga telah mengingatkan agar permasalahan dalam penyaluran pembiayaan UMKM kolektif agar dilakukan pembahasan dalam Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan sehingga dapat memberikan evaluasi, perbaikan dan penyelesaian.
- Bank memiliki Aplikasi *Electronic Financing Origination System* (E-FOS) yang digunakan untuk memproses permohonan pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan untuk sektor konsumtif dan produktif (non komersil) di lingkungan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Saat ini Aplikasi *Electronic Financing Origination System* (E-FOS) juga telah dapat digunakan untuk pembiayaan MKM.
- Bank telah melakukan *monitoring* terhadap data pemetaan dan perkembangan klaim asuransi oleh bagian Pengelolaan Asuransi setiap bulannya melalui laporan realisasi penagihan asuransi yang disampaikan kepada Direksi.
- Upaya memitigasi risiko terkait klaim asuransi juga telah dilakukan dimana saat ini Bank telah mengembangkan SIAP (Sistem Integrasi Aplikasi Pialang) yang digunakan untuk penyaluran Pembiayaan Konsumtif yang diberikan proteksi asuransi yang terhubung secara *host to host* dengan broker yang saat ini bekerja sama.
- Bank melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk percepatan penyelesaian pembiayaan bermasalah, seperti:
  - KPKNL untuk eksekusi lelang agunan;
  - Pengadilan Negeri untuk melakukan gugatan kepada debitur;
  - JPN (Jaksa Pengacara Negara) untuk melakukan penagihan kepada debitur pembiayaan bermasalah.
- Divisi yang membidangi pembiayaan bekerjasama dengan Divisi terkait secara rutin melakukan *monitoring*, penagihan dan pembinaan kepada debitur serta memproses permohonan restrukturisasi pembiayaan.
- Untuk menjaga kualitas pembiayaan, Divisi Pembiayaan dan Pimpinan Unit Kantor terus memonitoring pertumbuhan pembiayaan dan mengendalikan pergeseran kolektibiliti pembiayaan agar NPF dapat dikelola di bawah target yang ditetapkan.
- Bank juga telah meminta setiap unit kantor menyusun rencana tindak atau *action plan* untuk penurunan NPF baik melakukan penagihan, resrukturisasi maupun lelang.

- Monitoring of Risk Appetite Statement realization for credit risk has been conducted by the Risk Management Division through Risk Appetite Statement Reports submitted monthly to the Board of Directors and Board of Commissioners. If credit risk parameters exceed the established risk appetite or risk tolerance, the Risk Management Division will also convey this to the relevant Division for immediate follow-up.

- The Bank, through the Compliance Division, has also reminded that issues in collective MSME financing distribution should be discussed in the Financing Policy Committee Meeting to provide evaluation, improvement, and settlement.
- The Bank has the Electronic Financing Origination System (E-FOS) application used to process financing applications through to disbursement for consumptive and productive (non-commercial) sectors within PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Currently, the Electronic Financing Origination System (E-FOS) application can also be used for MSME financing.

- The Bank has monitored mapping data and insurance claim developments by the Insurance Management section every month through insurance collection realization reports submitted to the Board of Directors.

- Efforts to mitigate risks related to insurance claims have also been made, where the Bank has currently developed SIAP (Broker Application Integration System) used for Consumptive Financing distribution provided with insurance protection connected host-to-host with current partner brokers.
- The Bank cooperates with third parties for accelerated problem financing settlement, such as:
  - KPKNL for collateral auction execution;
  - District Courts for filing lawsuits against debtors;
  - State Attorney (JPN) for collection from problem financing debtors.

- Divisions in charge of financing, in cooperation with relevant Divisions, routinely monitor, collect, and provide guidance to debtors and process financing restructuring applications.

- To maintain financing quality, the Financing Division and Office Unit Leaders continue to monitor financing growth and control shifts in financing collectability so that NPF can be managed below the set target.

- The Bank has also requested every office unit to draft an action plan for NPF reduction, whether through collection, restructuring, or auction.

Risiko Pasar

Adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko Pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam bentuk surat berharga. Setiap posisi Bank yang berpotensi menimbulkan laba atau rugi akibat perubahan faktor pasar akan mengandung Risiko Pasar. Dalam kaitan dengan pengelolaan Risiko Pasar, portofolio Bank dikelompokkan menjadi portofolio *Trading Book* dan *Banking Book*. Pengelolaan Risiko Pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif perubahan kondisi pasar terhadap Aset permodalan Bank.

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan BRK Syariah.

Dalam menghitung Risiko Pasar BRK Syariah masih menggunakan Metode Standar (*Standard Method*) sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Adapun langkah memitigasi risiko pasar yang telah dilakukan Bank antara lain:

- Bank telah menetapkan *Risk Appetite* untuk Risiko Pasar sesuai dengan Rencana Bisnis Bank, dimana bank aktif melakukan transaksi penempatan dan kegiatan *treasury* syariah lainnya dengan tetap memperhatikan risiko yang wajar dan sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian pada kondisi normal guna meminimalkan dampak kerugian bagi bank.
- Bank telah menetapkan limit transaksi pada Divisi *Treasury & International Banking* dalam pengelolaan dana, yang bertujuan untuk mengendalikan risiko sesuai dengan karateristik Bank Riau Kepri Syariah. Limit kewenangan tersebut mengatur antara lain :
  a. Limit transaksi pasar uang
  b. Limit transaksi surat berharga (obligasi, MTN, NCD, instrumen pasar modal lainnya)
  c. Limit transaksi reksadana
- Bank juga telah menetapkan *Counterparty Limit* dan dilakukan *review* setiap tahunnya, serta dilakukan pemantauan atas limit transaksi antar bank tersebut.
- Bank telah melakukan beberapa perubahan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan *treasury* bank yaitu sebagai berikut :

Market Risk

Market Risk is the risk to balance sheet positions and administrative accounts due to changes in market prices, including risks in the form of changes in the value of assets that can be traded or leased. Market Risk exists, among others, in the Bank's functional activities such as treasury activities and investments in the form of securities. Every Bank position that has the potential to generate profit or loss due to changes in market factors will contain Market Risk. In connection with Market Risk management, the Bank's portfolio is grouped into Trading Book and Banking Book portfolios. Market Risk management aims to minimize the possible negative impact of changes in market conditions on the Bank's capital assets.

The main objective of Risk Management for Market Risk is to minimize the possible negative impact due to changes in market conditions on the assets and capital of BRK Syariah.

In calculating Market Risk, BRK Syariah still uses the Standardized Method in accordance with Financial Services Authority Circular Letter Number 38/SEOJK.03/2016 dated September 8, 2016, regarding Guidelines for the Use of the Standard Method in Calculating Minimum Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks by Taking into Account Market Risk.

Market risk mitigation steps taken by the Bank include:

- The Bank has established Risk Appetite for Market Risk in accordance with the Bank's Business Plan, where the bank actively conducts placement transactions and other Sharia treasury activities while maintaining reasonable risk and adhering to Sharia principles and prudential principles under normal conditions to minimize loss impacts for the bank.
- The Bank has established transaction limits in the Treasury & International Banking Division in fund management, aiming to control risk according to Bank Riau Kepri Syariah's characteristics. These authority limits regulate, among others:
  a. Money market transaction limits
  b. Securities transaction limits (bonds, MTN, NCD, other capital market instruments)
  c. Mutual fund transaction limits
- The Bank has also established Counterparty Limits, which are reviewed annually, and interbank transaction limits are monitored.
- The Bank has made several policy changes related to the bank's treasury activities, namely:

- SK No. 149/KEPDIR/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) *Treasury* Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku selanjutnya diberlakukan SK No 182/KEPDIR/2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Treasury Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko pasar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disosialisasikan agar dipahami dan atau dilaksanakan secara konsisten oleh pegawai.
- Sistem informasi manajemen risiko pasar termasuk pelaporan risiko pasar kepada Dewan Komisaris dan Direksi telah berjalan melalui laporan bulanan risiko pasar dan laporan *middle office* yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko.
- Bank secara berkala minimal sekali dalam sebulan mengadakan rapat komite SHALMA dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan mitigasi pada risiko pasar.
- Dalam menjalankan fungsi manajemen risiko yang independen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas terutama dalam pemisahan tugas (*segregation of duty*) untuk memitigasi risiko, Bank telah melakukan pemisahan tugas antara *front office* (*dealing room*), *middle office* (petugas *middle office* Divisi Manajemen Risiko) dan *back office* (*treasury operation*).
- Bank telah melakukan *Inhouse Training Treasury* Syariah dalam peningkatan *capacity building* untuk pegawai Divisi *Treasury & International Banking*, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Operasional & Akuntansi dan Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*.
- Dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan, Bank telah melakukan pemantauan terhadap *counterparty limit* yang berlaku, pemantauan risiko pasar dan likuiditas, kewajaran harga pasar serta pemantauan atas terjadinya *deal amendmend* dan *deal cancelation* pada kegiatan transaksi yang dilakukan Divisi *Treasury & International Banking*.
- Dalam menyikapi kondisi market yang kurang stabil, pembelian surat berharga yang dilakukan oleh Divisi *Treasury* & Internasional *Banking* lebih mengutamakan pembelian dalam bentuk *Available For Sale* (AFS), obligasi pemerintah dan *corporate* BUMN maupun swasta dengan rating AAA dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan kondisi makro dan keseimbangan portofolio.
- Terhadap peningkatan *Mark to Market* (*unrealized*) surat berharga kategori tersedia untuk dijual yang menjadi faktor pengurang modal inti, langkahlangkah yang telah dilakukan dalam mengantisipasi dan memitigasi peningkatan nilai *Mark to Market*
- Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam meningkatkan komposisi surat berharga pasar uang adalah :

- Board of Directors Decree No. 149/KEPDIR/2024 dated August 22, 2024, concerning the Standard Operating Procedures (SOP) for Sharia Treasury, is hereby revoked and declared null and void. It is subsequently superseded by the enactment of Board of Directors Decree No. 182/KEPDIR/2025 dated October 20, 2025, concerning the Standard Operating Procedures (SOP) for Sharia Treasury of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

- Market risk management policies and procedures comply with applicable regulations and have been socialized to ensure consistent understanding and/or implementation by employees.
- Market risk management information systems, including market risk reporting to the Board of Commissioners and Board of Directors, have proceeded through monthly market risk reports and middle office reports submitted by the Risk Management Division.
- The Bank periodically, at least once a month, holds SHALMA committee meetings to take necessary steps to mitigate market risk.

- In performing an independent risk management function with clear duties and responsibilities, particularly in the segregation of duties to mitigate risk, the Bank has separated duties between the front office (dealing room), middle office (Risk Management Division middle office officers), and back office (treasury operation).
- The Bank has conducted Inhouse Training Treasury Syariah to enhance capacity building for employees of the Treasury & International Banking Division, Risk Management Division, Operations & Accounting Division, and Internal Audit & Anti-Fraud Division.
- In the framework of monitoring function execution, the Bank has monitored applicable counterparty limits, market and liquidity risk monitoring, market price fairness, and monitoring of deal amendments and deal cancellations in transaction activities conducted by the Treasury & International Banking Division.

- In responding to unstable market conditions, securities purchases by the Treasury & International Banking Division prioritize purchases in the form of Available For Sale (AFS), government bonds, and corporate SOE or private bonds with AAA ratings while still referring to prudential principles and considering macro conditions and portfolio balance.

- Regarding the increase in Mark to Market (unrealized) of securities in the available-for-sale category which becomes a deduction factor for tier 1 capital, steps taken to anticipate and mitigate the increase in Mark to Market value include:
- Steps taken to increase the composition of money market securities:

a. Melakukan pengelolaan dana instrumen Surat Berharga Pasar Modal (SBPM) berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Korporasi yang jatuh tempo/ *mature* untuk untuk ditempatkan kembali pada instrumen Pasar Uang berupa SIMA, SiPA, dan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) serta Fasbis.
b. Ikut serta pada *Auction* Operasi Moneter Syariah (OMS) berupa Sukuk Bank Indonesia yang dibukukan pada Portofolio *Hold To Maturity* (HTM) sehingga tenor yang dimiliki lebih sensitif terhadap BI-Rate.
c. Dibutuhkan kestabilan komposisi DPK (Dana Pihak Ketiga) sehingga Divisi *Treasury* & *International Banking* memiliki ruang yang cukup untuk melakukan optimalisasi pada penempatan surat berharga pasar uang.

- Divisi Manajemen Risiko melalui Catatan Laporan Pemantauan Risiko Pasar setiap bulan juga telah memberikan rekomendasi kepada *Treasury* dalam pengelolaan surat berharga untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  a. Dalam melakukan pembelian surat berharga dapat menentukan kebijakan/strategi yang diambil terkait penempatan surat berharga tersebut apakah dengan tujuan sebagai Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) atau dengan tujuan sebagai investasi;
  b. Menetapkan *Management Action Trigger* (MAT) yaitu batasan untuk melakukan tindakan terhadap risiko perubahan nilai yang merugi melalui penetapan *budget loss* sebagai *early warning signal* yang diajukan Divisi *Treasury* & *International Banking* kepada Divisi Manajemen Risiko;
  c. Mencari metode perhitungan valuasi surat berharga yang lebih *reliable* / wajar sesuai dengan kondisi pasar.
  d. Menyiapkan strategi dalam pengelolaan surat berharga dalam memaksimalkan pendapatan dengan memperhatikan stabilitas market surat berharga yang akan dibeli melalui *System Bloomberg* dan menyesuaikan dengan regulasi PLM dan prinsip kehati-hatian;
  e. Memonitoring dan memperhatikan nilai *Mark to Market* (MtM) untuk mencerminkan nilai pasar yang wajar, serta menganalisa dan memilih harga terbaik untuk dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola risiko dengan menyesuaikan nilat aset dan liabilitas menurut kondisi pasar saat ini.

a. Managing Capital Market Securities (SBPM) instruments in the form of Sovereign Sharia Securities (SBSN) and Corporate Sukuk reaching maturity to be reinvested into Money Market instruments in the form of SIMA, SiPA, and Bank Indonesia Sukuk (SukBI) as well as Fasbis.

b. Participating in Sharia Monetary Operation (OMS) Auctions in the form of Bank Indonesia Sukuk recorded in the Hold To Maturity (HTM) Portfolio so that the tenor held is more sensitive to the BI-Rate.
c. Stability in the composition of Third-Party Funds (DPK) is required so the Treasury & International Banking Division has sufficient room to optimize placements in money market securities.

- The Risk Management Division, through Monthly Market Risk Monitoring Report Notes, has also provided recommendations to Treasury in securities management to consider the following:
  a. In conducting securities purchases, determine policies/strategies regarding the placement of these securities, whether for Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) purposes or investment purposes;
  b. Set Management Action Triggers (MAT), namely limits for taking action against losing value changes through setting a budget loss as an early warning signal proposed by the Treasury & International Banking Division to the Risk Management Division;
  c. Seek more reliable/fair securities valuation calculation methods in accordance with market conditions.
  d. Prepare strategies in securities management to maximize income by considering the stability of the securities market to be purchased through the Bloomberg System and adjusting to PLM regulations and prudential principles;
  e. Monitor and consider Mark to Market (MtM) values to reflect fair market value, and analyze and select the best price for accurate decision-making in managing risk by adjusting asset and liability values according to current market conditions.

Risiko Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu Bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing yang diukur dengan besarnya persentase Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing Dana Pihak Ketiga (DPK).

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan BRK Syariah dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Beberapa langkah yang dilakukan Bank dalam menunjang pengelolaan, mitigasi risiko Likuiditas serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah:

- Bank telah menetapkan *Risk Appetite Metric* untuk Risiko Likuiditas dengan batasan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan. Bank selalu berusaha memenuhi kebutuhan pengambilan dana nasabah seketika dan kebutuhan pencairan pembiayaan sesuai dengan strategi bank yang mampu menjaga reputasi yang baik.
- Optimalisasi pelaksanaan SHALMA dalam pengelolaan likuiditas yang optimal dan aman melalui pengelolaan *Primary Reserves* (Kas dan GWM), *Secondary Reserves* dan *Tertiary Reserves* dengan memperhatikan limit-limit yang telah ditetapkan.
- Telah ditetapkan limit internal atas Risiko Likuiditas seperti rasio GWM, AL/NCD, CIR dan CASA sebagai *early warning*.
- Pembagian wewenang dan tanggung jawab pada struktur manajemen Risiko Likuiditas dalam pemisahan fungsi *risk taking unit* dan *risk management unit*, melalui satuan kerja operasional utama yang mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan perkreditan, *treasury*, sistem informasi dan akunting. Bank juga telah membentuk bagian *Middle Office* pada Divisi Manajemen Risiko dan *Treasury Operation* pada Divisi Operasional & Akuntansi.
- Bank memiliki Aplikasi *Contingency Funding Plan* (CFP) sebagai suatu sarana untuk mendukung pengelolaan risiko likuiditas Bank sebagai informasi untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo Bank yang bersumber dari pendanaan arus kas dan/ atau aset likuid berkualitas tinggi agar tidak mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- Dalam menjaga likuditas, Bank aktif melakukan penempatan dana dalam bentuk SUKBI, Fasbis, SIMA, SBSN dan pembelian Sukuk *Mudharabah* pada Bank *Counterparty*. Pada bulan Desember 2025, Bank juga melakukan transaksi *borrowing* dalam bentuk SIMA, SIPA dan PASBI untuk menjaga likuiditas dalam men penurunan dana pihak ketiga yang dimiliki.

Liquidity Risk

Liquidity is the ability of a Bank to meet short-term financial obligations in both Rupiah and foreign currencies, measured by the percentage of Statutory Reserves (GWM) at Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency of Third-Party Funds (DPK).

The main objective of Risk Management for Liquidity Risk is to minimize the possibility of BRK Syariah"s inability to obtain cash flow funding sources.

Steps taken by the Bank in supporting management, Liquidity risk mitigation, and Risk Management Implementation Quality include:

- The Bank has established Risk Appetite Metrics for Liquidity Risk with established Risk Appetite and Risk Tolerance limits. The Bank always strives to meet immediate customer withdrawal needs and financing disbursement needs according to bank strategies capable of maintaining a good reputation.
- Optimization of SHALMA implementation in optimal and safe liquidity management through Primary Reserves (Cash and GWM), Secondary Reserves, and Tertiary Reserves management considering established limits.
- Internal limits for Liquidity Risk have been set, such as GWM ratio, AL/NCD, CIR, and CASA as early warnings.
- Division of authority and responsibility in the Liquidity Risk management structure in the segregation of functions between risk-taking units and risk management units, through main operational work units that take and implement decisions on risk, including but not limited to credit, treasury, information system, and accounting activities. The Bank has also formed a Middle Office section in the Risk Management Division and Treasury Operation in the Operations & Accounting Division.
- The Bank has the Contingency Funding Plan (CFP) application as a means to support the Bank's liquidity risk management as information to meet the Bank's maturing obligations sourced from cash flow funding and/or high-quality liquid assets so as not to disrupt the Bank's activities and financial condition.
- In maintaining liquidity, Bank actively places funds in the form of SUKBI, Fasbis, SIMA, SBSN, and purchases *Mudharabah* Sukuk at Counterparty Banks. In December 2025, the Bank also conducted borrowing transactions in the form of SIMA, SIPA, and PASBI to maintain liquidity amid the decline in third-party funds held.

- Penempatan dana yang terus dilakukan dalam menjaga likuiditas Bank telah sesuai dengan batas counterparty limit yang ditetapkan dan secara umum likuiditas Bank telah memenuhi *threshold* yang ditetapkan.
- Untuk menjaga dan memenuhi *threshold* rasio likuiditas, Bank telah mengubah dan menerbitkan kebijakan-kebijakan baru.
- Bank secara berkala minimal sekali dalam sebulan mengadakan rapat komite SHALMA (*Sharia Asset Liability Management*) dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan mitigasi pada Risiko Likuiditas.
- Proses manajemen risiko likuiditas dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko likuiditas telah dilakukan sesuai dengan parameter yang terdapat dalam pedoman *Contingency Funding Plan* dan kondisi likuiditas dalam 1 (satu) bulan terakhir.
- Peningkatan *capacity building* juga telah dilaksanakan Bank di bidang likuiditas dengan melakukan Pelatihan Publik Syariah Digital Marketing dan Sosialisasi/ *Inhouse* Perhitungan Spesial *Nisbah* dan Bagi Hasil Deposito.
- Meningkat kan likuiditas dengan mengutamakan penghimpunan dana-dana murah.
- Dengan melihat kondisi makro ekonomi yang akan memasuki resesi, maka penyaluran kredit dilakukan dengan lebih berhati-hati dan dengan mempertimbangkan *maturity gap*.
- Bank telah menyusun Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang merupakan rencana aksi pemulihan untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank. Salah satu Indikator dan *Trigger* yang ditetapkan adalah terkait Likuiditas, dimana Bank telah menetapkan Opsi Pemulihan untuk mengatasi permasalahan likuiditas sehingga kembali ke kondisi normal.
- Dalam rangka kewajiban pemenuhan terhadap POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum dapat disampaikan bahwa Bank telah membuat dan menyampaikan Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) BRK Syariah kepada regulator pada bulan November 2025.
- Dalam pemenuhan likuiditas, Bank telah melakukan langkah antisipasi antara lain terus melakukan upaya dalam meningkatkan dana tabungan sesuai dengan target yang ditetapkan dan menciptakan inovasi baru untuk program tabungan yang menarik minat masyarakat serta melakukan optimalisasi dan kerjasama dengan korporasi/ institusi swasta (Yayasan, Universitas, Rumah Sakit, Perusahaan BUMD). Hal-hal yang telah dilakukan adalah mengoptimalkan kinerja petugas FO beserta PIC Divisi Dana dan *Digital Banking* yang telah ditunjuk, dengan melakukan *coaching* dan *mentoring* secara harian dengan komunikasi tatap muka maupun

- Fund placements continuously carried out to maintain Bank liquidity are in accordance with established counterparty limit boundaries, and in general, Bank liquidity has met the established thresholds.
- To maintain and meet liquidity ratio thresholds, the Bank has changed and issued new policies.
- The Bank periodically, at least once a month, holds SHALMA (Sharia Asset Liability Management) committee meetings to take necessary steps to mitigate Liquidity Risk.
- The liquidity risk management process in identifying, measuring, monitoring, and controlling liquidity risk has been conducted according to parameters in the Contingency Funding Plan guidelines and liquidity conditions in the last 1 (one) month.
- Capacity building has also been implemented by the Bank in the liquidity field by conducting Digital Marketing Sharia Public Training and Socialization/ Inhouse calculation of Special Nisbah and Deposit Profit Sharing.
- Increasing liquidity by prioritizing the collection of low-cost funds.
- In view of macroeconomic conditions entering a recession, credit distribution is conducted more prudently and by considering the maturity gap.
- The Bank has drafted a Recovery Plan which is an action plan to address financial problems that may occur at the Bank. One established Indicator and Trigger is related to Liquidity, where the Bank has set Recovery Options to address liquidity problems to return to normal conditions.
- In compliance with the regulatory obligations set forth in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 5 of 2024 concerning the Determination of Supervisory Status and the Handling of Commercial Bank Issues, it is hereby reported that the Bank formulated and submitted the Recovery Plan Document of BRK Syariah to the regulator in November 2025.
- In meeting liquidity, the Bank has taken anticipatory steps including continuing efforts to increase savings funds according to set targets and creating new innovations for savings programs that attract public interest as well as optimizing and cooperating with private corporations/institutions (Foundations, Universities, Hospitals, Regional SOEs). Activities performed include optimizing FO performance along with designated Fund and Digital Banking Division PICs, conducting daily coaching and mentoring through face-to-face communication as well as

melalui *zoom meeting* dan *whattsapp group* serta dilaporkan mingguan yang meliputi kegiatan antara lain :

- Meningkatkan jumlah pengguna BRKS *Mobile* baik nasabah tabungan *existing* maupun nasabah baru;
- Meningkatkan jumlah rekening tabungan baru dengan melakukan pemasaran ke perusahaan swasta, sekolah, masjid, dan pelaku usaha yang menggunakan alat perekam pajak *online*;
- Meningkatkan penggunaan layanan QRIS melalui kerjasama dengan masjid dan pelaku usaha;
- Meningkatkan nasabah yang ikut serta dalam program "Hadiah Langsung";
- Meningkatkan pengguna fitur CMS baik OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun perusahaan swasta;
- Terus mengupayakan peningkatan saldo penempatan dana dari korporasi baik nasabah *existing* maupun nasabah baru dengan melakukan kunjungan langsung maupun melalui media komunikasi;
- Melakukan kunjungan sosialisasi dan kerjasama dengan pesantren, sekolah, dinas dan instansi;
- Melakukan *Banking Day* ke sekolah-sekolah;
- Kerjasama dengan BUMD Provinsi Riau;
- Melakukan promosi program tabungan di akun resmi media sosial BRK Syariah dan akun pribadi seluruh pegawai;
- Prospek nasabah dana pensiun dan aset manajemen;
- Produk tabungan *nisbah* setara deposito.
- Memperpendek tenor dari penempatan SIMA;
- Menyeimbangkan penempatan pada Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dengan penempatan Fasbis sebagai cadangan likuiditas harian;
- Membangun/membentuk cadangan likuiditas darurat diatas kewajiban PLM sehingga memiliki kemampuan untuk mengkonversi dengan segera pada *cash flow* dalam bentuk penjualan secara *outright* atau repo antar bank/ Bank Indonesia;
- Berkoordinasi dengan Divisi terkait dalam rangka menggali kemungkinan adanya dana masuk dari korporasi atau dari pihak terkait (Pemda) ataupun *counterparty* lain;
- Menambah akses alternatif pendanaan dalam bentuk *committed line* diantaranya dengan Bank Syariah Indonesia (BSI);
- Melakukan transaksi SIMA *Borrow*, SIPA *Borrow* dan PASBI untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank;
- Melakukan kerjasama dengan BUMD, Korporasi dan Perusahaan lainnya;
- *Coaching* dan *Monitoring* terhadap seluruh *funding officer* dan unit kantor;
- Program *reward* untuk *funding officer* yang dapat mencapai *closing* tertinggi setiap minggu;
- Promosi program tabungan di akun resmi media sosial BRK Syariah dan akun pribadi seluruh pegawai;

Zoom meetings and WhatsApp groups, and weekly reporting covering activities such as:

- Increasing the number of BRKS Mobile users among both existing savings customers and new customers;
- Increasing the number of new savings accounts by marketing to private companies, schools, mosques, and business actors using online tax recording tools;
- Increasing the use of QRIS services through cooperation with mosques and business actors;
- Increasing customers participating in "Direct Gift" programs;
- Increasing CMS feature users, both OPD (Regional Apparatus Organizations) and private companies;

- Continuously striving to increase fund placement balances from corporations, both existing and new customers, through direct visits and communication media;
- Conducting socialization visits and cooperation with Islamic boarding schools, schools, departments, and institutions;
- Conducting Banking Day at schools;
- Cooperation with Riau Province Regional SOEs;
- Promoting savings programs on official BRK Syariah social media accounts and all employees' personal accounts;
- Prospecting pension fund and asset management customers;
- Savings products with nisbah equivalent to deposits.
- Shortening the tenor of SIMA placements;
- Balancing placements in Bank Indonesia Sukuk (SukBI) with Fasbis placements as daily liquidity reserves;
- Building/forming emergency liquidity reserves above PLM obligations to have the ability to convert immediately to cash flow in the form of outright sales or interbank/Bank Indonesia repo;

- Coordinating with relevant Divisions to explore possible fund inflows from corporations, related parties (Regional Government), or other counterparties;
- Adding alternative funding access in the form of a committed line including with Bank Syariah Indonesia (BSI);
- Conducting SIMA Borrow, SIPA Borrow, and PASBI transactions to meet Bank liquidity needs;
- Cooperating with Regional SOEs, Corporations, and other companies;
- Coaching and Monitoring all funding officers and office units;
- Reward programs for funding officers with the highest closing each week;
- Promoting savings programs on official BRK Syariah social media accounts and all employees' personal accounts;

- Menyelenggarakan *special event* berupa seminar kesehatan dengan mengundang nasabah yang berkomitmen untuk *top up* dan sebagian calon nasabah yang berpotensi untuk membuka tabungan prioritas berkolaborasi dengan rumah sakit yang memberikan diskon khusus untuk nasabah prioritas (Mahkota *Medical*, *Center*, Putra Melaka *Hospital* dan *Asisstccare*);
- Menyelenggarakan *special event beauty* class bagi nasabah prioritas
- Sosialisasi ketentuan layanan prioritas.

- Budaya manajemen risiko likuiditas telah disosialisasikan kepada hampir seluruh level organisasi dilihat dari kesesuaian realisasi indikator likuiditas dengan RAS.
- Sistem informasi manajemen risiko likuiditas cukup memadai termasuk pelaporan Risiko Likuiditas kepada Dewan Komisaris dan Direksi, namun monitoring likuiditas dan kepatuhan GWM akan tetap menjadi perhatian dan bersifat rutin.
- Sistem pengendalian internal cukup efektif mendukung manajemen Risiko Likuiditas.
- Sumber daya manusia dari sisi kuantitas dan kompetensi cukup memadai dalam menangani Risiko Likuiditas, dimana seluruh pegawai pada Divisi *Treasury & International Banking* telah lulus dalam sertifikasi *treasury* sesuai dengan level jabatan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank yang dapat bersumber antara lain pada Sumber Daya Manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur serta kejadian eksternal.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan Pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan informasi manajemen serta pengelolaan sumber daya manusia.

Risiko Operasional dapat memicu timbulnya risiko-risiko lain seperti Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas,Risiko Imbal hasil dan Risiko Investasi. Pengelolaan Risiko Operasional secara efektif dan konsisten dapat meminimalisir timbulnya risiko-risiko lain. Risiko Operasional melekat pada seluruh aktivitas/ proses operasional Bank dalam menjalankan bisnis. Bank menerapkan Manajemen Risiko Operasional secara efektif untuk menurunkan frekuensi

- Organizing special events such as health seminars inviting customers committed to top up and potential priority savings customers in collaboration with hospitals providing special discounts for priority customers (Mahkota Medical Center, Putra Melaka Hospital, and Assistccare);
- Organizing special beauty class events for priority customers;
- Socialization of priority service provisions.

- Liquidity risk management culture has been socialized to almost all organizational levels, as seen from the alignment of liquidity indicator realization with RAS.
- Liquidity risk management information systems are quite adequate including Liquidity Risk reporting to the Board of Commissioners and Board of Directors, though liquidity monitoring and GWM compliance will remain a focus and routine.
- Internal control systems are quite effective in supporting Liquidity Risk management.
- Human resources in terms of quantity and competency are quite adequate in handling Liquidity Risk, where all employees in the Treasury & International Banking Division have passed treasury certification according to applicable position levels.

Operational Risk

Operational Risk is the risk due to inadequacy and/or failure of internal processes, human error, system failure, and/or external events affecting the Bank's operations, which can stem from Human Resources, internal processes, systems and infrastructure, and external events.

Operational risk can cause direct or indirect financial losses and potential loss of opportunity to obtain profit. Operational risk can be inherent in every functional activity of the Bank such as Financing (fund provision), treasury and investment, operations and services, trade finance, funding and debt instruments, information system technology and management information, and human resource management.

Operational Risk can trigger other risks such as Reputation Risk, Strategic Risk, Legal Risk, Market Risk, Credit Risk, Compliance Risk, and Liquidity Risk, Rate of Return Risk, and Investment Risk. Effective and consistent Operational Risk management can minimize the occurrence of other risks. Operational Risk is inherent in all Bank operational activities/processes in conducting business. The Bank implements Operational Risk Management effectively to reduce the frequency and/or impact of operational losses.

dan/atau dampak kerugian operasional. Secara umum penerapan Manajemen Risiko Operasional diharapkan memberikan dampak positif pada *stakeholder* Bank.

Penerapan pengelolaan Risiko Operasional melibatkan semua unsur dalam Bank termasuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan, mekanisme dan praktik yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan kegagalan atau kerugian serta memastikan penerapan peluang bisnis baru secara tepat di bawah kendali manajemen risiko. Pemetaan Risiko Operasional dilaksanakan terhadap berbagai kegiatan operasional perbankan seperti produk dan layanan, jaringan kantor dan pengembangannya, serta perkembangan teknologi informasi.

Untuk mitigasi Risiko Operasional, BRK Syariah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Bank telah melakukan kajian risiko operasional untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Bank yang sejalan dengan regulasi.
- Dalam rangka pengelolaan risiko operasional, Bank aktif melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan serta mengadakan *coaching* dan *counselling*.
- Seiring dengan berkembangnya skala usaha dan kompleksitas bisnis, Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi SDI khususnya bidang pembiayaan, bidang *Treasury* Syariah, Pengendalian Internal dan Kepatuhan melalui pelatihan/*workshop* yang sesuai dengan kebutuhan pegawai
- Langkah-langkah yang telah dilakukan Bank terkait *Capacity Building* Pegawai adalah sebagai berikut :
  - *Workshop* Taksasi Agunan bagi *Account Officer* MKM BRK Syariah *Batch* 1 Wilayah Riau Daratan, pada tanggal 17 – 19 Februari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 34 orang di MDM BRK Syariah dengan mengundang narasumber eksternal dari *One Point* Indonesia.
  - *Workshop* Taksasi Agunan bagi *Account Officer* MKM BRK Syariah *Batch* 2 Wilayah Riau Daratan, pada tanggal 19 – 21 Februari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 34 orang di MDM BRK Syariah dengan mengundang narasumber eksternal dari *One Point* Indonesia.
  - *Workshop* Taksasi Agunan bagi *Account Officer* MKM BRK Syariah *Batch* 3 Wilayah Kepulauan Riau, pada tanggal 19 – 21 Maret 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang di Batam dengan mengundang narasumber eksternal dari *One Point* Indonesia.

Generally, Operational Risk Management implementation is expected to provide a positive impact on the Bank's stakeholders.

Operational Risk management implementation involves all elements within the Bank including active oversight by the Board of Commissioners and Board of Directors, who are responsible for and ensure that the Bank has appropriate policies, mechanisms, and practices to avoid or minimize failures or losses and ensure appropriate implementation of new business opportunities under risk management control. Operational Risk mapping is conducted for various banking operational activities such as products and services, office networks and their development, and information technology developments.

To mitigate Operational Risk, BRK Syariah takes the following steps:

- The Bank has conducted operational risk assessments to identify all risks inherent in new products and activities and ensure policies and procedures align with risk types, needs, and Bank developments in line with regulations.
- In the framework of operational risk management, the Bank actively socializes policies and regulations and conducts coaching and counseling.
- With growing business scale and complexity, the Bank is committed to continuously improving the quality and competency of SDI, particularly in financing, Sharia Treasury, Internal Control, and Compliance through training/workshops according to employee needs.
- Steps taken by the Bank regarding Employee Capacity Building are as follows:
  - Collateral Appraisal Workshop for MSME Account Officers of BRK Syariah, Batch 1, Mainland Riau Region, held on February 17 – 19, 2025, with 34 participants at MDM BRK Syariah, featuring external resource persons from One Point Indonesia.
  - Collateral Appraisal Workshop for MSME Account Officers of BRK Syariah, Batch 2, Mainland Riau Region, held on February 19 – 21, 2025, with 34 participants at MDM BRK Syariah, featuring external resource persons from One Point Indonesia.
  - Collateral Appraisal Workshop for MSME Account Officers of BRK Syariah, Batch 3, Kepulauan Riau Region, held on March 19 – 21, 2025, with 30 participants in Batam, featuring external resource persons from One Point Indonesia.

- *Training* Strategi Percepatan Bisnis Pembiayaan Berkualitas bagi *Team Leader* MKM BRK Syariah *Batch* 1 pada tanggal 4 – 6 Februari 2025 di MDM BRK Syariah dengan jumlah peserta 39 orang dengan mengundang narasumber eksternal dari *Brain Grow Consulting*.
- *Training* Strategi Percepatan Bisnis Pembiayaan Berkualitas bagi *Team Leader* MKM BRK Syariah *Batch* 2 pada tanggal 17 – 19 Maret 2025 di Batam dengan jumlah peserta 30 orang, dengan mengundang narasumber eksternal dari *One Point* Indonesia.
- Pelatihan Taksasi Agunan AO Komersial pada tanggal 8 – 9 Mei 2025 di Batam dengan jumlah peserta 14 orang, dengan mengundang narasumber eksternal dari PT. Mrebeweni Presisi *Consulting*.
- Pelatihan dan Sertifikasi Taksir Gadai Emas (RAHN) *Batch* 1 pada tanggal 5 – 6 Mei 2025 di Menara Dang Merdu BRK Syariah dengan jumlah peserta 36 orang, dengan mengundang narasumber eksternal dari *One Point* Indonesia.
- Pelatihan dan Sertifikasi Taksir Gadai Emas (RAHN) *Batch* 2 pada tanggal 15 – 16 Mei 2025 di Batam dengan jumlah peserta 36 orang, dengan mengundang narasumber eksternal dari *One Point* Indonesia.
- *Training* Strategi Percepatan Bisnis Pembiayaan Berkualitas bagi Team Leader Pembiayaan Konsumer Wilayah Kepri BRK Syariah *Batch* 1 pada tanggal 2 - 4 Juni 2025 di Menara Dang Merdu BRK Syariah dengan jumlah peserta 32 orang dengan mengundang narasumber eksternal dari *Brain Grow Consulting*.
- *Training* Strategi Percepatan Bisnis Pembiayaan Berkualitas bagi Team Leader Pembiayaan Konsumer Wilayah Kepri BRK Syariah *Batch* 2 pada tanggal 18 – 20 Juni 2025 di Batam dengan jumlah peserta 38 orang dengan mengundang narasumber eksternal dari *Brain Grow Consulting*.
- Pelatihan dan *Refreshment* Sertifikasi Taksir Gadai Emas (RAHN) *Batch* 1 Wilayah Kepulauan Riau pada tanggal 8 – 9 September 2025 di Batam dengan jumlah peserta 36 orang, dengan mengundang narasumber eksternal dari *One Point* Indonesia.
- Pelatihan dan *Refreshment* Sertifikasi Taksir Gadai Emas (RAHN) *Batch* 2 Wilayah Riau pada tanggal 15 – 16 September 2025 di Menara Dang Merdu BRK Syariah dengan jumlah peserta 36 orang, dengan mengundang narasumber eksternal dari *One Point* Indonesia.

- Bank telah menerapkan Aplikasi ORSA dan Aplikasi Strategi Anti *Fraud* di seluruh jaringan kantor dan Divisi. Dengan diterapkannya aplikasi tersebut, diharapkan dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang berpotensi timbulnya risiko operasional serta sebagai *early warning system* dan budaya peduli risiko yang tertanam pada diri pegawai.
- Terkait penerapan manajemen sumber daya insani telah dilakukan beberapa langkah maupun upaya perbaikan, diantaranya seperti:

- Quality Financing Business Acceleration Strategy Training for MSME Team Leaders of BRK Syariah, Batch 1, held on February 4 – 6, 2025, at MDM BRK Syariah, with 39 participants, featuring external resource persons from Brain Grow Consulting.

- Quality Financing Business Acceleration Strategy Training for MSME Team Leaders of BRK Syariah, Batch 2, held on March 17 – 19, 2025, in Batam, with 30 participants, featuring external resource persons from One Point Indonesia.

- Collateral Appraisal Training for Commercial Account Officers, held on May 8 – 9, 2025, in Batam, with 14 participants, featuring external resource persons from PT. Mrebeweni Presisi Consulting.
- Gold Pawn (Rahn) Appraisal Training and Certification, Batch 1 , held on May 5 – 6, 2025, at Menara Dang Merdu BRK Syariah, with 36 participants, featuring external resource persons from One Point Indonesia.
- Gold Pawn (Rahn) Appraisal Training and Certification, Batch 2 , held on May 15 – 16, 2025, in Batam, with 36 participants, featuring external resource persons from One Point Indonesia.
- Quality Financing Business Acceleration Strategy Training for Consumer Financing Team Leaders of BRK Syariah, Kepulauan Riau Region, Batch 1, held on June 2 - 4, 2025, at Menara Dang Merdu BRK Syariah, with 32 participants, featuring external resource persons from Brain Grow Consulting.

- Quality Financing Business Acceleration Strategy Training for Consumer Financing Team Leaders of BRK Syariah, Kepulauan Riau Region, Batch 2, held on June 18 – 20, 2025, in Batam, with 38 participants, featuring external resource persons from Brain Grow Consulting.
- Gold Pawn (Rahn) Appraisal Certification Refreshment Training, Batch 1, Kepulauan Riau Region, held on September 8 – 9, 2025, in Batam, with 36 participants, featuring external resource persons from One Point Indonesia.
- Gold Pawn (Rahn) Appraisal Certification Refreshment Training, Batch 2, Mainland Riau Region, held on September 15 – 16, 2025, at Menara Dang Merdu BRK Syariah, with 36 participants, featuring external resource persons from One Point Indonesia.

- The Bank has implemented the ORSA Application and Anti-Fraud Strategy Application across all office networks and Divisions. With the implementation of these applications, it is expected to minimize events with potential operational risk and serve as an early warning system and risk-aware culture embedded in employees.
- Regarding human resource management implementation, several steps and improvement efforts have been made, such as:

- Mutasi dan rotasi telah berjalan lancar, terutama untuk pemenuhan tenaga analis pembiayaan dan *funding officer* yang diambil dari pegawai yang telah mendapatkan pelatihan dan pengalaman;
- Bank melaksanakan promosi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dimana setiap pegawai diwajibkan untuk mengikuti dan lulus dari tahapan *assesment* dan wawancara yang dilaksanakan;
- Meningkatkan fungsi pengawasan melekat antara supervisi dan petugas pelapor, agar setiap laporan yang dilaporkan lebih akurat;
- Bank melakukan sosialisasi budaya kepatuhan dan sosialisasi terkait penerapan strategi anti *fraud* kepada seluruh pegawai;
- Bank terus meningkatkan sumber daya insani melalui pelatihan yang sesuai dengan kompotensi pegawai dan kebutuhan masing-masing unit kerja.
- Bank meningkatkan penerapan prinsip kebijakan mengenal pegawai (*Know Your Employee*) dalam pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan, diawali dari proses rekrutmen pegawai sampai dengan pegawai *existing* melalui pengawasan melekat, proses penempatan, pemantauan terhadap pinjaman pegawai dan pemantauan terhadap rekening pegawai.

- Bank membuat dan mendistribusikan *leaflet* dan *banner* pencegahan *fraud* yang memuat efek dari perbuatan *fraud* kepada seluruh jaringan kantor untuk ditempatkan pada area kerja pegawai seperti *counter teller*, *customer service*, perkreditan, administrasi kredit dan umum serta akuntansi dan pelaporan
- Terkait Kewajiban pemenuhan sertifikasi Bank telah melakukan beberapa sertifikasi antara lain:
  a. Sertifikasi Manajemen Risiko dengan persentase kelulusan sebesar 99,63%, belum lulus sebesar 0,37%. belum mengikuti sebesar 12,20%
  b. Sertifikasi *Treasury* dengan rincian sebagai berikut :
     - Persentase kelulusan sebesar 100% untuk level *Advance* dan *Intermediete*
     - Persentase kelulusan sebesar 96% untuk level *Basic* dan 4% untuk yang belum mengikuti.
  c. Sertifikasi Kepatuhan dengan rincian sebagai berikut :
     - 1 orang belum mengikuti level *Executive*
     - Persentase kelulusan 100% untuk *level Manager*
     - Persentase kelulusan 84% untuk *level Officer* dan 16% untuk yang belum mengikuti.
  d. Sertifkasi Auditor dengan rincian sebagai berikut :
     - Persentase kelulusan 100% untuk level Auditor *Supervisor*
     - Persentase kelulusan 96% untuk level Auditor dan 13% untuk yang belum mengikuti
  e. Sertifikasi MSDI dengan persentase kelulusan sebesar 70% dan belum mengikuti sebesar 30%.
  f. Sertifikasi Hukum dengan persentase kelulusan sebesar 50% dan belum mengikuti sebesar 50%.
  g. Sertifikasi *Nazhir Wakaf* dengan persentase kelulusan sebesar 100%.

- Mutation and rotation have proceeded smoothly, particularly to fulfill financing analyst and funding officer needs taken from employees who have received training and experience;
- The Bank carries out promotions according to established provisions, where every employee is required to participate in and pass assessment and interview stages conducted;
- Increasing the embedded supervision function between supervisors and reporting officers to ensure more accurate reports;
- The Bank conducts compliance culture socialization and anti-fraud strategy implementation socialization to all employees;
- The Bank continues to enhance human resources through training appropriate to employee competency and the needs of each work unit.
- The Bank increases the implementation of Know Your Employee policy principles in identifying and monitoring employee profiles, starting from recruitment to existing employees through embedded supervision, placement processes, monitoring of employee loans, and monitoring of employee accounts.

- The Bank creates and distributes fraud prevention leaflets and banners containing the effects of fraud to the entire office network for placement in employee work areas such as teller counters, customer service, credit, credit administration, and general as well as accounting and reporting.
- Regarding certification compliance obligations, the Bank has conducted several certifications, including:
  a. Risk Management Certification with a passing percentage of 99.63%, not yet passed 0.37%, not yet participated 12.20%.
  b. Treasury Certification with details:
     - 100% passing percentage for Advanced and Intermediate levels.
     - 96% passing percentage for Basic level and 4% not yet participated.
  c. Compliance Certification with details:
     - 1 person not yet participated in Executive level.
     - 100% passing percentage for Manager level.
     - 84% passing percentage for Officer level and 16% not yet participated.
  d. Auditor Certification with details:
     - 100% passing percentage for Auditor Supervisor level.
     - 96% passing percentage for Auditor level and 13% not yet participated.
  e. MSDI Certification with 70% passing percentage and 30% not yet participated.
  f. Legal Certification with 50% passing percentage and 50% not yet participated.
  g. Waqf Nazhir Certification with 100% passing percentage.

h. Sertifikasi SPPUR dengan persentase kelulusan sebesar 100%.
i. Sertifikasi Ahli Pembangunan Integritas (API) dengan persentase kelulusan sebesar 100%.

Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung

- Infrastruktur Bank Riau Kepri Syariah telah berjalan dengan beberapa fungsi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Infrastruktur pendukung saat ini (*existing*) adalah :
  - *Data Center*
  - *Disaster Recovery Center* (DRC)
  - *Network Monitoring* dan *Management System* (NMS)
  - *Core Switch*
  - *Distribution Switch*
  - *Server Farm Switch*
  - *Access Switch*
  - *Firewall*
  - Q Radar SOC
  - *Host Security Modul* (HSM)
- Dari hasil penerapan keandalan infrastruktur pendukung IT dan kerentanan sistem IT terhadap ancaman dan serangan periode bulan Juli s.d. Desember 2025 dinyatakan dalam range skor rendah.
- Bank terus melakukan pembenahan terhadap sistem TI, mempersiapkan infrastruktur pendukung yang handal dalam memonitoring aktif/tidaknya *station* atau unit kantor sehingga kegagalan sistem dapat cepat dideteksi dan dilakukan.
- Masih terdapat permasalahan selisih lebih maupun selisih kurang Kas ATM pada unit kantor. Terkait selisih lebih maupun selisih kurang antara uang yang tersedia di ATM dengan pencatatan Bank, telah dilakukan rekonsiliasi untuk kemudian diselesaikan ke rekening nasabah maupun dibukukan ke tagihan ATM Bersama maupun Prima.
- Masih terdapat rekening titipan (rupa-rupa aset) yang masih bersaldo dan belum diselesaikan, sehingga perlu menjadi perhatian oleh bank untuk dapat segera diselesaikan.
- Masih terdapat kelemahan dalam operasional dan infrastruktur ATM seperti permasalahan pada perangkat keras, jaringan dan *software* serta infrastruktur pendukung ATM dan belum informatifnya laporan yang dihasilkan oleh aplikasi *back end system monitoring* ATM. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bank telah melakukan Migrasi/*Update* pada ATM & CDM sebanyak 22 (dua puluh dua) kali pada Aplikasi IST, Bank Vision dan BRK Link.
- Rekap jaringan *offline* di seluruh unit jaringan kantor pada periode laporan rata-rata *availability* sebesar 99,77%.

h. SPPUR Certification with 100% passing percentage.

i. Integrity Development Expert (API) Certification with 100% passing percentage.

Information Technology and Supporting Infrastructure

- Bank Riau Kepri Syariah's infrastructure has been operational with several functions covering hardware and software. Current (existing) supporting infrastructure includes:
  - Data Center
  - Disaster Recovery Center (DRC)
  - Network Monitoring and Management System (NMS)
  - Core Switch
  - Distribution Switch
  - Server Farm Switch
  - Access Switch
  - Firewall
  - Q Radar SOC
  - Host Security Module (HSM)
- From the IT supporting infrastructure reliability and IT system vulnerability to threats and attacks implementation results for the July to December 2025 period, it was declared within a low score range.
- The Bank continues to improve IT systems, preparing reliable supporting infrastructure to monitor active/inactive stations or office units so system failures can be quickly detected and addressed.

- There are still ATM Cash overage and shortage issues in office units. Regarding overages and shortages between cash available in ATMs and Bank records, reconciliations have been performed for settlement to customer accounts or recorded as ATM Bersama or Prima receivables.

- There are still suspense accounts (miscellaneous assets) that still have balances and are unresolved, requiring bank attention for immediate resolution.

- There are still weaknesses in ATM operations and infrastructure such as hardware, network, and software issues as well as ATM supporting infrastructure and non-informative reports produced by the ATM monitoring back-end system application. To follow up on this, the Bank has conducted Migration/Updates on ATMs & CDMs 22 (twenty-two) times on the IST, Bank Vision, and BRK Link applications.

- The recap of offline networks across all office network units during the report period showed an average availability of 99.77%.

- Pada periode laporan, Bank memiliki 110 (seratus sepuluh) aplikasi non core banking dan 44 (empat puluh empat) aplikasi *non core banking* yang telah diubah.
- Bank terus melakukan perbaikan pada kualitas jaringan dan berupaya untuk selalu meningkatkan performa ATM/CDM.

Risiko Hukum

Menurut Peraturan OJK Tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Risiko Hukum didefinisikan sebagai risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Definisi di atas dikaitkan dengan aktivitas fungsional Bank yang begitu banyak mempunyai hubungan hukum dengan pihak lain sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menuntut Bank untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam melakukan hubungan hukum tersebut. Dalam Surat Edaran OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum disebutkan bahwa Bank harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforceability* guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut. Disamping keharusan melakukan kaji ulang, Bank juga diharuskan memiliki dan melaksanakan prosedur analisa aspek hukum terhadap produk dan/ atau aktivitas baru, harus memiliki satuan kerja atau fungsi yang berperan sebagai "*legal watch*" yang menyediakan analisis atau advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi, harus menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur Risiko Hukum.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian risiko dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan kebijakan/mitigasi risiko sebagai berikut:

- Sistem pengendalian risiko dilakukan cukup efektif dengan saling berkoordinasi antara Divisi Hukum dengan unit kerja lainnya dalam pelaksanaan manajemen risiko hukum pada saat penyusunan atau *review* BPP/SOP/Perjanjian Kerjasama/ Ketentuan lainnya dengan memberikan masukan/ pendapat sesuai dengan fungsi masing-masing bagian.
- Untuk menunjang pemahaman pegawai terkait Risiko Hukum pada pelaksanaan eksekusi agunan kredit hapus buku, Bank telah melakukan *workshop* dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan pembicara Asdatun (Asisten Perdata & Tata Usaha Negara) yang diikuti oleh seluruh Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang Pembantu Wilayah Kepulauan Riau.
- Bank juga telah melakukan sosialisasi dan *workshop* dalam rangka peningkatan pemahaman sumber daya manusia terhadap dampak Risiko Hukum untuk eksekusi agunan hapus buku. Bank melalui Kejaksaan Tinggi juga meminta legal opini untuk pengamanan eksekusi agunan hapus buku.

- During the report period, the Bank had 110 (one hundred ten) non-core banking applications and 44 (forty-four) changed non-core banking applications.
- The Bank continues to improve network quality and strives to always increase ATM/CDM performance.

Legal Risk

According to the OJK Regulation on Standard Guidelines for Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Legal Risk is defined as risk due to lawsuits and/or legal aspect weaknesses. This definition is linked to the Bank's functional activities having many legal relationships with other parties, demanding the Bank be more prudent and meticulous in conducting such legal relationships. In the OJK Circular on Risk Management Implementation for Commercial Banks, it is mentioned that the Bank must conduct periodic reviews of contracts and agreements between the Bank and other parties, including by reassessing the effectiveness of enforceability processes to check the validity of rights in those contracts and agreements. Besides the requirement to conduct reviews, the Bank is also required to have and implement legal aspect analysis procedures for new products and/or activities, must have a work unit or function acting as "legal watch" providing legal analysis or advice to all employees at every organizational level, and must assess the impact of changes in certain provisions or regulations on Legal Risk exposure.

In performing risk control functions and improving risk management implementation quality, BRK Syariah implements the following risk policies/mitigation:

- Risk control systems are quite effective with coordination between the Legal Division and other work units in legal risk management implementation during drafting or review of BPP/SOP/Cooperation Agreements/Other provisions by providing input/opinions according to their respective sections' functions.
- To support employee understanding of Legal Risk in executing written-off credit collateral, the Bank conducted a workshop with the Kepulauan Riau High Prosecution Office with the Asdatun (Assistant for Civil & State Administrative Affairs) as a speaker, attended by all Branch Leaders and Sub-Branch Leaders across Kepulauan Riau.
- The Bank has also conducted socialization and workshops to increase human resource understanding of Legal Risk impact for written-off collateral execution. The Bank, through the High Prosecution Office, also requested legal opinions for safeguarding written-off collateral execution.

- Seluruh aktivitas dan produk Bank telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, mengacu kepada *best practice* dan tidak terdapat aktivitas maupun produk Bank yang belum diatur atau bertentangan dengan perundang-undangan.
- Struktur organisasi pada Divisi Hukum secara struktur telah terpenuhi yang terdiri dari Bagian Hukum Litigasi dan Bagian Hukum Non Litigasi, sehingga mitigasi atas risiko hukum dapat dikelola dengan baik.
- Langkah-langkah yang diambil dalam strategi pengelolaan Risiko Hukum oleh Divisi Hukum adalah sebagai berikut:
  - Bagian Litigasi :
    - Pemberian advis hukum atas setiap permasalahan hukum unit kantor yang belum diatur di dalam ketentuan/kebijakan internal Bank;
    - Telah melakukan kerjasama dengan PH *Retainer* (Tetap) sehingga penanganan masalah hukum lebih optimal;
    - *Briefing* dan edukasi kepada pegawai-pegawai yang diperiksa sebagai saksi sebelum memberikan keterangan di instansi penegak hukum.
  - Bagian *Corporate* & *Business Legal* :
    - Dalam setiap perjanjian antara Bank dengan pihak eksternal terlebih dahulu dilakukan proses Uji Petik di Divisi Hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam BPP Hukum *Corporate* & *Business Legal*;
    - Melakukan harmonisasi dan pemeriksaan akhir terhadap Kebijakan Bank yang telah dilakukan uji petik oleh Divisi Kepatuhan;
    - Pemberian advis hukum atas setiap permasalahan hukum pada unit kantor yang belum diatur di dalam ketentuan/kebijakan internal Bank.
- Terhadap Laporan *Monitoring* Perjanjian oleh Bank yang berpotensi menyebabkan risiko hukum, Divisi Hukum secara kontiniu mengingatkan setiap unit kerja untuk
  - Memperhatikan jangka waktu berakhirnya perjanjian kerjasama sehingga tidak terdapat perjanjian kerjasama yang telah melewati jangka waktu berlakunya;
  - Melakukan *upload* dan *update* data untuk setiap adanya perjanjian baru atau perubahan perjanjian pada Aplikasi *Monitoring* Perjanjian Kerjasama yang telah disediakan oleh Divisi Hukum;
- Dalam rangka *awareness* dan pemahaman seluruh pegawai bank mengenai Manajemen Risiko Hukum, berikut disampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode laporan :
  a. Divisi Hukum telah melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Kebijakan atau Ketentuan yang ada pada Divisi Hukum dan melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama dengan Notaris/PPAT rekanan di kantor BRKS Tanjungpinang Pamedan pada tanggal 3 Juli 2025, di kantor BRKS Tanjung Balai Karimun pada tanggal 7 Agustus 2025, di kantor BRKS Selat Panjang pada

- All Bank activities and products comply with applicable laws and regulations, refer to best practices, and there are no Bank activities or products not yet regulated or contradicting legislation.

- The organizational structure of the Legal Division has been structurally fulfilled, consisting of the Litigation Legal Section and Non-Litigation Legal Section, ensuring legal risk mitigation can be well-managed.
- Steps taken in the Legal Risk management strategy by the Legal Division are:
  - Litigation Section:
    - Providing legal advice on every legal issue in office units not yet regulated in internal Bank provisions/policies;
    - conducting cooperation with Retainer Legal Counsel (PH) so legal problem handling is more optimal;
    - briefing and educating employees examined as witnesses before providing testimony at law enforcement agencies.
  - Corporate & Business Legal Section:
    - very agreement between the Bank and external parties first undergoes a Spot Check process in the Legal Division as regulated in the Corporate & Business Legal BPP;
    - harmonizing and final checking Bank Policies spot-checked by the Compliance Division;
    - providing legal advice on every legal issue in office units not yet regulated in internal Bank provisions/policies.
- Regarding the Monitoring Report of Agreements by the Bank with potential legal risk, the Legal Division continuously reminds every work unit to:
  - Pay attention to cooperation agreement expiration periods so there are no expired cooperation agreements;
  - Upload and update data for every new agreement or agreement amendment on the Cooperation Agreement Monitoring Application provided by the Legal Division.
- In the framework of awareness and understanding of all bank employees regarding Legal Risk Management, the following activities were conducted during the report period:
  a. The Legal Division has conducted a Focus Group Discussion (FGD) regarding the Policies or Regulations existing within the Legal Division and conducted Monitoring on the implementation of partnerships with partner Notaries/Land Deed Officials (PPAT) at the BRKS Tanjungpinang Pamedan Branch office on July 3, 2025, at the BRKS Tanjung Balai Karimun Branch office on August 7,

tanggal 21 Agustus 2025, di kantor BRKS Lingga Dabo Singkep pada tanggal 12 November 2025 dan di kantor BRKS Lingga Daik pada tanggal 13 November 2025.

b. Divisi Hukum telah melaksanakan kegiatan workshop bidang hukum bagi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Unit Kantor PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum dalam rangka memitigasi risiko yang muncul dalam menjalankan operasional bank. Pelaksanaan kegiatan *workshop* dilakukan pada tanggal 28 dan 29 Juli 2025 di Pekanbaru dan pada tanggal 24 dan 25 September 2025 di Batam.

c. Divisi Hukum juga berperan aktif hingga akhir Desember 2025 dalam upaya pengembalian keuangan bank terhadap pembiayaan bermasalah di BRK Syariah, Berdasarkan hasil kerja sama dengan bagian Datun di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi baik di Wilayah Riau Kepri dalam penanganan masalah bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terdapat 38 (tiga puluh delapan) nasabah yang telah diajukan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan total realisasi pembayaran per Desember 2025 sebesar Rp167.559.977,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Laporan monitoring perjanjian kerja sama oleh Bank yang berpotensi menyebabkan risiko hukum periode Juli s.d. Desember 2025 yaitu Divisi Hukum secara periodik menyurati seluruh unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang perihal Monitoring Aplikasi Perjanjian Kerjasama sebagaimana Surat Divisi Hukum No. 206/HK.03/DHK/2025 tanggal 10 Oktober 2025 dimana unit kerja diwajibkan untuk :
  a. Memperhatikan jangka waktu berakhirnya perjanjian kerjasama bank dengan pihak eksternal/pihak ketiga, sehingga tidak terdapat perjanjian kerja sama yang telah melewati jangka waktu berlakunya namun masih berjalan.
  b. Melakukan *upload* dan *update* data untuk setiap adanya perjanjian kerjasama baru atau perubahan perjanjian kerjasama pada Aplikasi *Monitoring* Perjanjian Kerjasama.
  c. Penggunaan Aplikasi *Monitoring* Perjanjian Kerjasama agar berpedoman pada Surat Edaran Direksi No. 022/SE/2024 tentang Aplikasi *Monitoring* Perjanjian Kerjasama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh unit kerja terkait telah dilakukan harmonisasi oleh Divisi Hukum.
- Terkait kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penetapan limit risiko yang terkait dengan strategi manajemen risiko yang searah dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*, Bank telah menyusun parameter untuk mengukur apakah suatu sistem masuk dalam kategori *low* sampai dengan *high*.

2025, at the BRKS Selat Panjang Branch office on August 21, 2025, at the BRKS Lingga Dabo Singkep office on November 12, 2025, and at the BRKS Lingga Daik office on November 13, 2025.

b. The Legal Division has executed a legal workshop for Division Heads and Branch/Unit Heads of PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), aimed at expanding legal insight and knowledge to mitigate risks arising during the Bank's operational activities. The workshop was held on July 28 and 29, 2025, in Pekanbaru, and on September 24 and 25, 2025, in Batam.

c. The Legal Division also played an active role through the end of December 2025 in the Bank's financial recovery efforts regarding Non-Performing Financing at BRK Syariah. Based on the collaboration with the Civil and State Administrative Law (Datun) Division at the District Attorney's Office and the High Prosecutor's Office within the Riau Kepri Region in handling Civil and State Administrative matters, a total of 38 (thirty-eight) clients have been endorsed to the State Attorney (JPN). The total realized recovery as of December 2025 amounted to Rp167,559,977 (one hundred sixty-seven million five hundred fifty-nine thousand nine hundred seventy-seven rupiah).

- The monitoring report on the Bank's cooperation agreements that potentially incur legal risks for the period of July to December 2025 stipulates that the Legal Division periodically issues correspondence to all Head Office and Branch Office work units regarding the Cooperation Agreement Monitoring Application, as promulgated in the Legal Division Letter No. 206/HK.03/DHK/2025 dated October 10, 2025, whereby the work units are mandated to:
  a. Closely monitor the expiration dates of the Bank's cooperation agreements with external/third parties, ensuring that no expired cooperation agreements remain operationally active.
  b. Upload and update data within the Cooperation Agreement Monitoring Application for every new cooperation agreement or amendment to existing agreements.
  c. Ensure that the utilization of the Cooperation Agreement Monitoring Application adheres to the Board of Directors Circular Letter No. 022/SE/2024 concerning the Cooperation Agreement Monitoring Application of PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- All policies issued by relevant work units have been harmonized by the Legal Division.
- Regarding risk management policies, procedures, and risk limit setting related to risk management strategy aligned with risk appetite and risk tolerance, the Bank has drafted parameters to measure whether a system falls into low to high categories.

Risiko Reputasi

Berdasarkan Peraturan OJK Tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko reputasi didefinisikan sebagai risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Secara umum definisi Risiko Reputasi adalah potensi hilangnya atau hancurnya reputasi perusahaan karena penerimaan lingkungan eksternal yang rendah, bahkan bisa terjadi penolakan. Penyebab penolakan tersebut dapat berupa ketidak mampuan perusahaan mengambil tindakan terhadap isu eksternal yang terkait dengan perusahaan dan ketidakmampuan Bank mengelola komunikasi dengan pihak berkepentingan yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Bank. Reputasi adalah penilaian yang diberikan oleh pihak internal dan eksternal terhadap kinerja perusahaan dalam kurun waktu tertentu, reputasi terbentuk dari bagaimana sebuah Bank mempresentasikan keberadaannya melalui layanan atau produk, aktivitas usaha, kontribusi terhadap komunitas, dan juga komunikasi yang dilakukan baik terhadap pihak internal maupun eksternal melalui simbol-simbol yang pada akhirnya akan membentuk pandangan atau gambaran mengenai Bank secara menyeluruh. Lebih spesifik pengertian reputasi bagi Bank adalah pandangan umum *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) terhadap kinerja Bank yang bisa dilihat dari bagaimana kinerja keuangan, produk atau layanan, manajemen usaha dan kontribusinya bagi masyarakat yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan maupun perolehan informasi yang didapat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kurun waktu tertentu.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Reputasi dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan kebijakan/ mitigasi risiko sebagai berikut:

- Strategi pengelolaan risiko reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan dalam menangani masalah risiko reputasi, Bank dibantu oleh Divisi Sekretariat Perusahaan yang bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan menyelesaikan pemberitaan negatif, komentar, keluhan nasabah yang berkembang di media cetak ataupun media sosial serta menjalankan *public service* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR).
- Divisi Sekretariat Perusahaan juga melakukan klarifikasi agar pemberitaan yang disajikan tidak melebar serta berdampak bagi perkembangan bisnis Bank.
- Bank terus menjaga hubungan baik dengan media, baik media cetak maupun elektronik untuk penyampaian informasi kegiatan, dan publikasi produk/layanan bank guna meningkatkan dan menjaga reputasi Bank.

Reputation Risk

Based on the OJK Regulation on Standard Guidelines for Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, reputation risk is defined as risk due to decreasing stakeholder trust levels stemming from negative perceptions of the Bank.

Generally, the definition of Reputation Risk is the potential loss or destruction of corporate reputation due to low external environment acceptance, even rejection. The cause of such rejection can be the company's inability to take action against external issues related to the company and the Bank's inability to manage communication with stakeholders which can create negative perceptions of the Bank. Reputation is the assessment given by internal and external parties of corporate performance over a certain period; reputation is formed by how a Bank presents its existence through services or products, business activities, community contributions, and communication performed with both internal and external parties through symbols which ultimately form an overall view or image of the Bank. More specifically, the meaning of reputation for the Bank is the general view of stakeholders on Bank performance seen from financial performance, products or services, business management, and community contribution obtained through experience, observation, or information obtained directly or indirectly over a certain period.

In performing Reputation Risk control functions and improving risk management implementation quality, BRK Syariah implements the following risk policies/mitigation:

- Reputation risk management strategy is aligned with the risk level to be taken and in handling reputation risk issues, the Bank is assisted by the Corporate Secretariat Division responsible for implementing policies related to handling and resolving negative news, comments, and customer complaints evolving in print or social media as well as running public service in the framework of corporate social responsibility (CSR).
- The Corporate Secretary Division also conducts clarifications so news presented does not broaden and impact Bank business development.
- The Bank continues to maintain good relations with media, both print and electronic, for activity information delivery and bank product/service publication to enhance and maintain Bank reputation.

- Terkait permasalahan keluhan yang disampaikan oleh nasabah, Bank melalui layanan *Call Centre* Divisi Operasional & Akuntansi dan Divisi Sistem Prosedur & *Service Quality* akan menindaklanjuti setiap keluhan yang disampaikan sesuai prosedur yang ditetapkan.
- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko reputasi memadai dan telah tersedia, seperti telah dilakukan rating terhadap media yang bekerjasama dengan Bank saat ini, dan kedepannya Bank akan terus melakukan *review* terhadap media cetak maupun *online* dengan persyaratan yang lebih ketat.
- BRK Syariah secara terus menerus melakukan penyempurnaan kebijakan internal Bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.
- BRK Syariah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan regulasi, telah diaudit, menyajikan informasi keuangan secara transparansi dan dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- BRK Syariah melakukan kerjasama bisnis dengan seluruh pemangku kepentingan dan senantiasa merujuk kepada peraturan perundangundangan dan berbagai ketentuan yang berlaku, serta mencapai kesepakatan kerjasama bisnis yang saling memberikan manfaat.
- Dalam melakukan kerjasama bisnis, tidak terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis antara Bank dengan pihak lain.
- Bank memiliki nilai rating yang baik dari lembaga pemeringkat *Fitch Rating* yaitu berada pada peringkat A.

Risiko Stratejik

Adalah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. BRK Syariah mengelola Risiko Stratejik melalui *business plan* yang disusun oleh Divisi Perencanaan & Keuangan sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD) melalui pengumpulan informasi strategis, pemantauan pasar, ekonomi daerah dan melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara menyeluruh.

Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi Bank.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Stratejik dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan kebijakan/mitigasi risiko sebagai berikut:

- Regarding complaint issues submitted by customers, the Bank through the Operations & Accounting Division Call Center service and Procedure System & Service Quality Division will follow up on every complaint submitted according to established procedures.
- Reputation risk management policies & procedures are adequate & available, such as rating currently cooperating media, and in the future, the Bank will continue reviewing print and online media with stricter requirements.

- BRK Syariah continuously improves internal policies related to customer complaints and services to minimize the potential for decreased Bank reputation.

- BRK Syariah prepares financial reports according to accounting standards and regulations, audited, presenting financial information transparently and published according to applicable provisions.
- Bank Riau Kepri Syariah conducts business cooperation with all stakeholders and always refers to laws and various applicable provisions, and achieves mutually beneficial business cooperation agreements.

- In conducting business cooperation, no violations or potential business ethics violations occurred between the Bank and other parties.
- The Bank has a good rating from Fitch Rating, at the A rating level.

Strategic Risk

This is the risk caused by inappropriate bank strategy determination and implementation, inappropriate business decision-making, or the Bank's lack of responsiveness to external changes. BRK Syariah manages Strategic Risk through business plans drafted by the Planning & Finance Division as a breakdown of the General Policy of the Board of Directors (KUD) through strategic information collection, market monitoring, regional economy, and through a comprehensive consideration and decision-making process.

The main objective of risk management for reputation risk is to anticipate and minimize the loss impact of the Bank's reputation risk.

In performing Strategic Risk control functions and improving risk management implementation quality, BRK Syariah implements the following risk policies/mitigation:

- Kesesuaian strategi Bank dengan kondisi lingkungan bisnis memadai, namun harus tetap memperhatikan kondisi perekonomian nasional terutama metode dalam menentukan target dari rasio keuangan maupun proyeksi terhadap pos keuangan dalam *Corporate Plan*, Kebijakan Umum Direksi dan RBB.
- Dalam mendukung rencana BRK Syariah sebagai Bank Umum Syariah, Bank telah menuangkan Strategi Bisnis dan Arah Kebijakan Umum Bank pada *Corporate Plan* Bank Riau Kepri Syariah tahun 2026 – 2030 dan Rencana Bisnis Bank Riau Kepri Syariah tahun 2026 – 2028 yang sejalan dengan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023 – 2027 dari OJK.
- Arah kebijakan Bank setelah konversi menjadi Bank Umum Syariah, yaitu akan melakukan upaya-upaya penguatan identitas syariah sejalan dengan penguatan tatanan institusi organisasi. Seluruh aktivitas Bank baik dari pengembangan operasional dan produk akan dikaitkan dengan *maqoshid* syariah.
- Bank memposisikan diri menjadi bank utama bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau dan Kepri, BUMD dan perusahaan yang terkait dengan APBD melalui akselerasi terhadap pertumbuhan bisnis dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kondisi tersebut mendorong bank untuk mengeksplorasi lebih mendalam terhadap strategi bisnis sehingga penguasaan pangsa pasar menjadi lebih optimal.
- Komposisi strategi berisiko tinggi dibanding strategi berisiko rendah mencapai 45,45% dari strategi pengembangan area bisnis Bank pada tahun 2025. Strategi pengembangan bisnis BRK Syariah yang akan ditempuh ditunjang oleh lima pilar Kebijakan Manajemen yaitu *Lending*, Dana Pihak Ketiga, Sumber Daya Insani, *Internal Control* dan Operasional. Kelima pilar ini menjadi dasar untuk menentukan aspek kinerja organisasi yang fokus menuju posisi bertumbuh, beserta level kinerja yang harus dicapai.
- Bank telah menyusun RBB BRK Syariah Tahun 2025-2027 dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :
  1. Permodalan kuat
  2. Meningkatnya perolehan laba dan pertumbuhan aset.
  3. *Brand image* kuat
  4. Peningkatan bisnis
  5. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan nasabah
  6. *Sharia business process excellent*
  7. *Adaptive* dalam sinergi dan kolaborasi
  8. Digitalisasi proses bisnis yang didukung oleh kemampuan teknologi Informasi
  9. Kuatnya tatanan institusi organisasi

- Suitability of Bank strategy with business environment conditions is adequate, but must still consider national economic conditions especially methods in determining targets from financial ratios or projections for financial items in the Corporate Plan, General Policy of the Board of Directors, and RBB.
- To support BRK Syariah's plan as a Sharia Commercial Bank, the Bank has detailed Business Strategy and General Policy Direction in the 2026 – 2030 Bank Riau Kepri Syariah Corporate Plan and 2026 – 2028 Bank Riau Kepri Syariah Business Plan aligned with the 2023 – 2027 Indonesian Sharia Banking Development and Strengthening Roadmap from OJK.
- The Bank's policy direction after conversion into a Sharia Commercial Bank is to conduct efforts to strengthen Sharia identity in line with strengthening organizational institutional structure. All Bank activities from operational and product development will be linked to Maqasid Sharia.
- The Bank positions itself as the primary bank for Provincial, Regency, and City governments in Riau and Kepri Provinces, Regional SOEs, and companies related to the Regional Budget (APBD) through accelerating business growth while still prioritizing prudential principles. This condition encourages the bank to explore business strategies more deeply so market share mastery becomes more optimal.

- The composition of high-risk strategies compared to low-risk strategies accounts for 45.45% of the Bank's business area development strategy in 2025. The business development strategy of BRK Syariah to be pursued is supported by five pillars of Management Policy, namely Financing, Third-Party Funds, Human Resources, Internal Control, and Operations. These five pillars serve as the foundation for determining organizational performance aspects focused on a growth trajectory, along with the required performance levels to be achieved.
- The Bank has formulated the Bank Business Plan (RBB) of BRK Syariah for the Period of 2025-2027, which has obtained the approval of the Board of Commissioners, by establishing the following strategic objectives:
  1. Robust Capital Base
  2. Enhanced Profitability and Asset Growth.
  3. Strong Brand Equity
  4. Business Expansion
  5. Fulfillment of Customer Needs and Satisfaction
  6. Excellence in Sharia Business Processes
  7. Adaptability in Synergy and Collaboration
  8. Business Process Digitalization Supported by Robust Information Technology Capabilities
  9. Solid Organizational and Institutional Framework

- Modal Disetor BRK Syariah saat ini masih sama dengan periode sebelumnya yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) No 01 tanggal 04 Juni 2024 sebesar Rp1.209.260.700.000,- (satu triliun dua ratus sembilan miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah disetujui penambahan modal disetor PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) sebesar Rp2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) yang berasal dari penyertaan dalam bentuk aset berupa tanah seluas 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) setara dengan nilai Rp2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) setoran Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Pemegang Saham Seri A).
- Bank terus menambah jaringan pelayanan dan menyajikan produk-produk baru dengan harapan agar bank mampu menjaga loyalitas nasabah, meningkatkan jumlah nasabah dan meningkatkan transaksi perbankan. Dari sisi teknologi, bank terus melakukan pengembangan IT agar kualitas produk jasa setara dengan bank pesaing. Selain itu bank juga akan meningkatkan penyaluran pembiayaan, peningkatan dana pihak ketiga (*low cost fund*) serta kualitas sumber daya insani yang berkompeten.
- Jika dilihat dari penyaluran pembiayaan telah tercapai sebesar 97,38%, realisasi DPK tercapai sebesar 102,36% dan aset sebesar 98,73% dari RBB yang ditetapkan. Untuk realisasi laba tercapai sebesar 81,04%.
- Rencana Bisnis disusun bersama oleh Manajemen yang dikoordinir oleh Divisi Perencanaan & Keuangan telah sejalan dengan sasaran Strategis Bisnis Bank secara keseluruhan.
- Seluruh manajemen Bank secara konsisten dan berkala memonitor perkembangan realisasi di setiap jaringan kantor dan unit kerja dalam mengoptimalkan pencapaian target sesuai anggaran tahun 2025.
- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko stratejik memadai dan telah tersedia serta sejalan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang ditetapkan manajemen, namun masih terdapat beberapa kendala sehingga perlu dilakukan kajian dan analisa yang lebih komprehensif terutama dalam penyaluran pembiayaan, pengelolaan DPK berbasis *low cost fund* serta produk dan aktivitas baru bank dapat terealisasi sehingga target yang ditetapkan dalam *Corporate Plan* dapat tercapai.
- Fungsi manajemen risiko stratejik independen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik.
- Untuk mengantisipasi meningkatnya risiko sebagai Bank Umum Syariah, Bank telah melakukan kajian serta mempersiapkan strategi agar kemungkinan risiko yang dihadapi dapat dimitigasi dengan baik, seperti mempersiapkan sumber daya insani agar paham tentang produk perbankan syariah, mempersiapkan IT yang berbasis syariah serta pengembangan produk perbankan syariah.

- PThe Paid-in Capital of BRK Syariah currently remains unchanged from the previous period, which, based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions of the Limited Liability Company Regional Development Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) No. 01 dated June 4, 2024, amounted to Rp1,209,260,700,000 (one trillion two hundred nine billion two hundred sixty million seven hundred thousand rupiah), following the approved addition to the paid-in capital of PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) in the amount of Rp2,100,000,000 (two billion one hundred million rupiah) derived from an equity participation in the form of a 2,000 m2 (two thousand square meters) land asset, equivalent to the value of Rp2,100,000,000 (two billion one hundred million rupiah), deposited by the Regional Government of Natuna Regency (Series A Shareholder).
- The Bank continues to expand its service network and introduce new products with the objective of maintaining customer loyalty, expanding the customer base, and increasing banking transactions. In terms of technology, the Bank continuously pursues IT development to ensure its service product quality is on par with competing banks. Furthermore, the Bank will increase the disbursement of financing, enhance third-party funds (low-cost funds), and improve the quality of competent human capital.
- From the perspective of financing disbursement, the achievement reached 97.38%, Third-Party Funds (DPK) realization reached 102.36%, and assets reached 98,73% of the designated Bank Business Plan (RBB). Meanwhile, profit realization reached 81,04%..
- The Business Plan, formulated collaboratively by the Management and coordinated by the Planning & Finance Division, is fully aligned with the Bank's overall strategic business objectives.
- The entire Bank management consistently and periodically monitors the progress of realization across every branch network and work unit to optimize the achievement of targets in accordance with the 2025 budget.
- Adequate strategic risk management policies and procedures are in place and aligned with the risk appetite and risk tolerance established by the Management. However, several constraints remain, necessitating a more comprehensive review and analysis—particularly concerning the disbursement of financing, the management of Third-Party Funds (DPK) based on low-cost funds, and the realization of the Bank's new products and activities—to ensure the targets set forth in the Corporate Plan are achieved.
- The independent strategic risk management function, endowed with clear duties and responsibilities, has been operating effectively.
- To anticipate the escalating risks associated with its status as a Sharia Commercial Bank, the Bank has conducted assessments and formulated strategies to ensure potential risks are adequately mitigated. These measures include preparing Human Capital to thoroughly comprehend Sharia banking products, developing Sharia-compliant IT infrastructure, and advancing the development of Sharia banking products.

Risiko Kepatuhan

Merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Divisi Kepatuhan secara teratur membantu dan meninjau ulang kembali aspek kepatuhan Bank, khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar. Bank sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kebijakan APU, PPT dan PPPSPM. Ketentuan-ketentuan lain yang harus dipatuhi terutama yang terkait prinsip *prudential banking* seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), GWM, Kualitas Aktiva Produktif, Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) dan Posisi Devisa Neto (PDN).

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku BRK Syariah yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Kepatuhan dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan mitigasi risiko sebagai berikut:

- Dalam rangka pengelolaan risiko kepatuhan, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - Pengujian untuk setiap kebijakan yang akan diterbitkan oleh unit kerja terkait;
  - Menyampaikan *review/resume* terhadap ketentuan eksternal (OJK/BI) yang baru diterbitkan kepada unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kebijakan internal;
  - Menyampaikan kepada seluruh pegawai di unit kantor Bank untuk :
    a. Konsisten mematuhi ketentuan yang berlaku
    b. Mengoptimalkan pencegahan maupun mendeteksi secara dini (*early warning*) potensi terjadinya *fraud* di unit kantor masing-masing
    c. Melaksanakan kegiatan operasional Bank dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)
    d. Membaca dan memahami ketentuan terkait budaya kepatuhan Bank
    e. Menjalin hubungan dengan para nasabah, rekanan dan mitra Bank dengan selalu memperhatikan aspek integritas dan profesionalisme
  - Memberikan sosialisasi kepada pegawai mengenai :
    a. Pengendalian gratifikasi
    b. Kode etik kepatuhan
    c. *Whistleblowing System* (WBS)
    d. Pemenuhan aspek syariah

Compliance Risk

Is the risk caused by the Bank not complying with or not implementing laws and other applicable provisions. The Compliance Division regularly assists and reviews the Bank's compliance aspects, specifically suspicious or unnatural transactions. The Bank fully complies with the Law on Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and AML, CFT, and CPF Policies. Other provisions that must be complied with specifically those related to prudential banking principles such as Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM), GWM, Earning Asset Quality, Legal Lending Limit (BMPD), and Net Open Position (PDN).

The main objective of Risk Management for Compliance Risk is to ensure that the Risk Management process can minimize the possible negative impact of BRK Syariah's behavior deviating from or violating generally applicable standards, provisions, and/or laws.

In performing Compliance Risk control functions and improving risk management implementation quality, BRK Syariah implements the following risk mitigation:

- In the framework of compliance risk management, the Bank has performed the following:
  - Testing for every policy to be issued by relevant work units;
  - Delivering reviews/resumes of newly issued external provisions (OJK/BI) to relevant work units for follow-up and adjustment with internal policies;
  - Delivering to all employees in Bank office units to:
    a. Consistently comply with applicable provisions
    b. Optimize prevention and early detection (early warning) of potential fraud in their respective office units
    c. Execute Bank operational activities with full responsibility, professionalism, and prioritize prudential banking principles
    d. Read and understand provisions related to Bank compliance culture
    e. Build relationships with customers, partners, and bank allies by always prioritizing integrity and professionalism aspects
  - Providing socialization to employees regarding:
    a. Gratification control
    b. Compliance code of ethics
    c. Whistleblowing System (WBS)
    d. Sharia aspect fulfillment

- Melakukan pengelolaan risiko kepatuhan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan yang memuat :
  a. Monitoring tindak lanjut temuan eksternal
  b. Monitoring rasio prinsip kehati-hatian

- Bank telah menetapkan *Risk Appetite Metric* untuk Risiko Kepatuhan dengan batasan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan.
- Penetapan aspek-aspek kepatuhan telah dijalankan dengan cukup baik dalam alur proses bisnis Bank melalui rangkaian *review* kepatuhan yang terus dilakukan pengawasannya oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- Untuk mencegah agar kejadian *fraud* tidak terulang lagi, Bank telah melakukan upaya-upaya berupa perbaikan sistem dan prosedur, perbaikan sistem pengendalian intern, sosialisasi budaya anti *fraud* dan budaya peduli risiko, monitoring budaya kepatuhan pegawai, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku *fraud* dan pegawai yang terkait.
- Bank telah membekali pelatihan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bagi perbankan untuk pegawai.
- Bank melakukan evaluasi atas implementasi pelaksanaan sosialisasi APU/PPT dengan memperhatikan hal-hal yang dianggap perlu oleh kantor bank dalam pemenuhan pelaporan bank kepada PPATK .

Risiko Imbal Hasil

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Imbal Hasil dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan mitigasi risiko sebagai berikut:

- Dalam rangka menghindari gejolak nasabah akibat dari perubahan aktivitas usaha konvensional menjadi syariah dan mengantisipasi penarikan dana oleh nasabah akibat imbal hasil yang diterima belum memenuhi ekspektasi return nasabah (*displaced commercial risk*), maka Bank mengambil kebijakan khusus yang diberlakukan selama rentang waktu penyelesaian hak dan kewajiban nasabah yaitu 365 hari sejak Bank melakukan perubahan aktivitas dari Bank Konvensional ke Syariah dengan memberlakukan kebijakan *income smoothing*.
- Penetapan Tingkat Imbal Hasil Deposito dibahas dalam Rapat SHALMA melalui Divisi *Treasury* & *International Banking* dan unit kerja lainnya.
- Dalam rangka pengelolaan tingkat imbal hasil dana pihak ketiga dan strategi pengelolaan biaya *income smoothing* dana pihak ketiga, telah dilakukan

- Managing compliance risk using the Compliance Information System Application containing:

  a. Monitoring follow-up of external findings
  b. Monitoring prudential principle ratios

- The Bank has established Risk Appetite Metrics for Compliance Risk with established Risk Appetite and Risk Tolerance limits.
- Compliance aspects determination has been executed quite well in Bank business process flows through a series of compliance reviews continuously monitored by the Board of Commissioners and Board of Directors.

- To prevent fraud from reoccurring, the Bank has performed efforts in the form of system and procedure improvements, internal control system improvements, anti-fraud culture and risk-aware culture socialization, employee compliance culture monitoring, and providing firm sanctions against fraud perpetrators and related employees.
- The Bank has equipped employees with suspicious financial transaction identification training for banking.

- The Bank conducts evaluations on AML/CFT socialization implementation by considering matters deemed necessary by bank offices in fulfilling bank reporting to PPATK.

Rate of Return Risk

Is the risk due to changes in the level of return paid by the Bank to customers, because changes occur in the level of return received by the Bank from fund distribution, which can affect the behavior of the Bank's third-party fund customers.

In performing Rate of Return Risk control functions and improving risk management implementation quality, BRK Syariah implements the following risk mitigation:

- In the framework of avoiding customer turmoil due to conversion from conventional to sharia business activities and anticipating fund withdrawals by customers because returns received have not met customer return expectations (displaced commercial risk), the Bank took a special policy applied during the customer rights and obligations settlement period, namely 365 days since the Bank changed activities from Conventional to Sharia Bank, by applying income smoothing policy.

- Deposit Return Rate determination is discussed in SHALMA Meetings through the Treasury & International Banking Division and other work units.
- In the framework of third-party fund return rate management and third-party fund income smoothing cost management strategies, Equivalent Rate (ER)

penihilan *Equivalent Rate* (ER) pada deposito sehingga biaya *income smoothing* tidak seluruhnya dibayarkan. Hal ini bertujuan untuk mengelola nasabah khusus dan mengurangi beban imbal hasil dan biaya *income smoothing*.

- Proses manajemen risiko imbal hasil cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko imbal hasil, terutama terkait hubungan baik dengan para deposan sehingga risiko deposan mencairkan dana secara tiba-tiba dapat dimitigasi dengan baik.
- Dalam rangka meningkatkan pencapaian dana pihak ketiga serta mencermati dinamika perkembangan suku bunga maupun imbal hasil di industri perbankan, Bank telah melakukan evaluasi terhadap tingkat imbal hasil Deposito *Mudharabah* terutama terkait penetapan Spesial *Nisbah*. Disamping itu Bank juga mengatur kewenangan pemberian Deposito Spesial *Nisbah* dengan *Income Smoothing* yang menjadi wewenang Direksi.
- Bank telah membuat ketentuan pemberian Spesial *Nisbah* Deposito Berjangka dengan menetapkan dan menggolongkan Spesial *Nisbah* melalui :
  - Penetapan nominal yang diberikan spesial *Nisbah*
  - Penetapan wewenang spesial *nisbah* bagi Direksi, Divisi Dana dan *Digital Banking* serta unit kantor Cabang, Capem maupun Kedai
- Bank memiliki langkah strategi pengelolaan tingkat imbal hasil dana pihak ketiga dan strategi pengelolaan biaya *income smoothing* dana pihak ketiga pada sebagai berikut
  - Telah dilakukan penihilan *Equivalent Rate* (ER) pada Deposito *existing* konvensional sehingga biaya *income smoothing* tidak dibayarkan dan *income smoothing* diajukan persetujuan ke Direksi secara selektif. Hal ini bertujuan untuk mengelola nasabah khusus dan mengurangi beban imbal hasil dan biaya *income smoothing*.
  - Deposito yang diberikan *income smoothing* untuk nasabah korporasi diberikan dengan jangka waktu yang tidak terlalu panjang (rentang 1 s.d. 3 bulan) untuk memelihara (*maintenance*) biaya dana sehingga dilakukan negosiasi ulang pada saat jatuh tempo sesuai dengan market rate terbaru.

Risiko Investasi

Adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Investasi dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan mitigasi risiko sebagai berikut:

- Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah termasuk pelaksanaan kewenangan

nullification was performed on deposits so income smoothing costs are not entirely paid. This aims to manage special customers and reduce return burden and income smoothing costs.

- The rate of return risk management process is quite adequate in identifying, measuring, monitoring, and controlling rate of return risk, specifically related to good relations with depositors so the risk of depositors *withdrawing funds suddenly can be well-mitigated.*

- In the framework of increasing third-party fund achievement and observing interest rate and return dynamics in the banking industry, the Bank has evaluated *Mudharabah* Deposit return rates especially related to Special Nisbah determination. Besides that, the Bank also regulates Special Nisbah Deposit granting authority with Income Smoothing which is the Board of Directors' authority.
- The Bank has made provisions for granting Time Deposit Special Nisbah by setting and classifying Special Nisbah through:
  - Setting the nominal given special Nisbah
  - Setting special nisbah authority for the Board of Directors, Fund and Digital Banking Division as well as Branch office units, Sub-Branches, and Kedai.
- The Bank has third-party fund return rate management strategy steps and third-party fund income smoothing cost management strategies as follows:

  - Equivalent Rate (ER) nullification was performed on existing conventional Deposits so income smoothing costs are not paid and income smoothing is selectively proposed for Board of Directors approval. This aims to manage special customers and reduce return burden and income smoothing costs.
  - Deposits given income smoothing for corporate customers are given with not too long durations (range 1 to 3 months) to maintain (maintenance) fund costs so renegotiations are performed at maturity according to the latest market rate.

Investment Risk (Equity Investment Risk)

Is the risk due to the Bank sharing business losses of customers financed in profit-sharing-based financing whether using the net revenue sharing method or the profit and loss sharing method.

In performing Investment Risk control functions and improving risk management implementation quality, BRK Syariah implements the following risk mitigation:

- Active oversight by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board including

dan tanggung jawab sesuai AD/ ART serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dewan Pengawas Syariah rutin melakukan rapat dan memberikan opini yang dibutuhkan terkait produk-produk yang dikembangkan dan dijalankan oleh BRK Syariah serta melakukan kunjungan sekaligus pengawasan langsung terhadap unit kantor syariah terkait pelaksanaan kepatuhan Prinsip Syariah dan menyampaikan laporan hasil kunjungan dan pengawasan kepada Direksi dan OJK.
- Bank telah membuat kebijakan khusus terkait pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan atas debitur yang terdampak *Covid-19* dengan memperhatikan prinsip *four eyes principle* dan kehati-hatian.
- Bank telah membentuk Bagian *Financial Review* yang berada di bawah Divisi Manajemen Risiko, yang berfungsi meningkatkan proses penyaluran pembiayaan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna memitigasi terjadinya potensi pembiayaan bermasalah.
- Proses manajemen risiko investasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko investasi.
- Bank tetap akan lebih selektif dalam melakukan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

execution of authority and responsibility according to the Articles of Association and applicable laws and regulations.
- The Sharia Supervisory Board routinely holds meetings and provides required opinions regarding products developed and run by BRK Syariah as well as conducting visits and direct supervision of sharia office units regarding Sharia Principle compliance implementation and submitting visit and supervision result reports to the Board of Directors and OJK.

- The Bank has made special policies related to financing restructuring implementation for debtors impacted by Covid-19 considering four eyes principle and prudence.
- The Bank has formed the Financial Review Section under the Risk Management Division, functioning to improve financing distribution processes so they can proceed well according to prudential principles to mitigate potential problem financing.

- The investment risk management process is quite adequate in identifying, measuring, monitoring, and controlling investment risk.
- The Bank will remain more selective in conducting financing distribution according to prudential principles.

Profil Risiko

Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank untuk 10 (sepuluh) jenis risiko yang dikelola Bank. Hasil SREP OJK Laporan Profil Risiko BRK Syariah sepanjang tahun 2025 relatif stabil dengan peringkat Risiko *Moderate*.

Risk Profile

Risk profile assessment is an assessment of Inherent Risk and Risk Management Implementation Quality in Bank operational activities for 10 (ten) types of risks managed by the Bank. SREP OJK results of BRK Syariah Risk Profile Reports throughout 2025 are relatively stable with a Moderate Risk rating.

No	**Profil Risiko** Risk Profile	**Peringkat Risiko Inheren** Inherent Risk Rating	**Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko** Risk Management Quality Rating	**Peringkat Tingkat Risiko** Risk Level Rating
1	Risiko Kredit Credit Risk	*Moderate*	*Fair*	3
2	Risiko Pasar Market Risk	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
3	Risiko Likuiditas Liquidity Risk	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
4	Risiko Operasional Operational Risk	*Moderate*	*Fair*	3
5	Risiko Hukum Legal Risk	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
6	Risiko Reputasi Reputation Risk	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
7	Risiko Stratejik Strategic Risk	*Moderate*	*Fair*	3
8	Risiko Kepatuhan Compliance Risk	*Moderate*	*Fair*	3
9	Risiko Imbal Hasil Rate of Return Risk	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
10	Risiko Investasi Investment Risk	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
	Peringkat Komposit Composite Rating	***Moderate***	*Fair*	**3**

Pada tahun 2025 proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko masih terfokus pada risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko strategis, hal ini mengingat risiko yang dominan mempengaruhi profil risiko Bank adalah keempat risiko tersebut.

Secara keseluruhan 10 (sepuluh) risiko ini masih dapat dikendalikan, namun tetap perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi potensi risiko yang akan dihadapi.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan antara lain :
1. Penyusunan dan *Monitoring Risk Appetite Statement* Tahun 2025;
2. Pemantauan terhadap risiko Bank Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai *middle office treasury* antara lain pemantauan limit, pemantauan risiko likuiditas, validasi kewajaran harga pasar, *deal amendment* dan *deal cancelation*;
3. Melakukan Advis atas Surat OJK dan Regulator;
4. Membuat Rencana Tindak (*Action Plan*) Pemenuhan Modal Inti;
5. Melakukan perhitungan *stress testing* terkait kredit/ pembiayaan *Re-Covid* dan likuiditas;
6. Melakukan Kajian Risiko terhadap Produk atauAktivitas Baru; Melakukan Advis Risiko
7. Melakukan *Review* IT *Risk Assessment*
8. Melakukan Kajian risiko terhadap aktivitas Divisi Operasional, antara lain kajian risiko terhadap penambahan kas limit, limit ATM dan perubahan Denominasi ATM;
9. Melakukan Tanggapan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK);
10. Melakukan Pengujian *Backtesting* Keakuratan Tarif CKPN PSAK 55;
11. Melakukan Kajian Risiko Terhadap Transaksi Valas;
12. Melakukan Kajian Risiko Perubahan Limit Kas dan Denominasi ATM;
13. Melakukan Kajian Risiko Penempatan Dana pada Surat Berharga Pasar Modal (SBPM) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) ;
14. Melakukan *Review* fasilitas antar Bank dan lembaga keuangan lainnya;
15. Melakukan rekomendasi *credit review* calon debitur termasuk debitur korporasi;
16. Pemantauan terhadap kualitas pembiayaan seluruh kantor cabang

Sosialisasi Manajemen Risiko

BRK Syariah secara rutin melakukan sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja untuk menciptakan *risk awareness* yang pada akhirnya diharapkan akan tercipta budaya risiko (*risk culture*) dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pada Bank. Media utama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi manajemen risiko dilakukan dengan cara *in class* (tatap

In 2025, identification, measurement, monitoring, and risk control processes were still focused on credit risk, operational risk, compliance risk, and strategic risk, considering these four risks dominantly affect the Bank's risk profile.

Overall, these 10 (ten) risks are still controllable, yet mitigation steps still need to be taken to reduce potential risks to be faced.

Mitigation steps taken include:
1. Drafting and Monitoring 2025 Risk Appetite Statement;
2. Monitoring Bank risks; execution of duties and responsibilities as treasury middle office including limit monitoring, liquidity risk monitoring, market price fairness validation, deal amendment, and deal cancellation;
3. Providing Advice on OJK and Regulator Letters;
4. Making Tier 1 Capital Fulfillment Action Plan;
5. Conducting stress testing calculations related to Re-Covid credit/financing and liquidity;
6. Conducting Risk Assessments on New Products or Activities; Providing Risk Advice;
7. Conducting IT Risk Assessment Review;
8. Conducting risk assessments on Operations Division activities, including risk assessments on cash limit additions, ATM limits, and ATM Denomination changes;
9. Conducting Responses to Draft Financial Services Authority Regulations (RPOJK);
10. Conducting Backtesting of CKPN PSAK 55 Rate Accuracy;
11. Conducting Risk Assessments on Foreign Exchange Transactions;
12. Conducting Risk Assessments on Cash Limit Changes and ATM Denominations;
13. Conducting Risk Assessments on fund placement in Capital Market Securities (SBPM) and Money Market Securities (SBPU) in the form of Sovereign Sharia Securities (SBSN) and Bank Indonesia Sukuk (SUKBI);
14. Reviewing interbank facilities and other financial institutions;
15. Providing credit review recommendations for prospective debtors including corporate debtors;
16. Monitoring financing quality of all branch offices.

Risk Management Socialization

BRK Syariah routinely socializes regarding risk management implementation in all work units to create risk awareness which ultimately is expected to create a risk culture in conducting daily activities at the Bank. The main media in risk management socialization activities is in-class (face-to-face). Such face-to-face activities start when employees are accepted as BRK Syariah employees

muka). Kegiatan tatap muka tersebut mulai dilaksanakan pada saat pegawai diterima sebagai pegawai BRK Syariah dan akan dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Selain dengan cara tatap muka, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan cara:

1. Melakukan sosialisasi dan/atau *monitoring* ke seluruh jaringan kantor BRK Syariah.
2. Menerbitkan ketentuan terkait pelaksanaan manajemen risiko.
3. Kegiatan *briefing* pada unit kerja sebelum melaksanakan kegiatan.
4. Menyampaikan arahan terkait pelaksanaan manajemen risiko lisan, tulisan maupun melalui intranet BRK Syariah.

Selain itu, pada tahun 2025 Divisi Manajemen risiko telah melakukan sosialisasi pemantauan Aplikasi *Operational Risk Self assessment* (ORSA) pada seluruh Kantor Cabang BRK Syariah.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Sertifikasi Manajemen Risiko

Pada tahun 2025 dari 266 orang pegawai yang akan disertifikasi, 261 orang telah diikutsertakan untuk mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko dengan kelulusan sebesar 261 orang (98,12%) dan tidak lulus 5 orang (1,88%). Dengan rincian sebagai berikut:

and will be conducted periodically at least 1 (one) time a year. Besides face-to-face, socialization activities are conducted by:

1. Conducting socialization and/or monitoring across the entire BRK Syariah office network.
2. Issuing provisions related to risk management implementation.
3. Briefing activities in work units before executing activities.
4. Delivering directions related to risk management implementation orally, in writing, or through BRK Syariah intranet.

Furthermore, in 2025 the Risk Management Division conducted socialization of Operational Risk Self-assessment (ORSA) Application monitoring across all BRK Syariah Branch Offices.

Risk Management Competency Development

Risk Management Certification

In 2025, current accounts with other banks reached Rp7.88 billion, representing a decrease of 16.56% compared to the Rp9.45 billion recorded in 2024. This decline primarily stemmed from Rupiah-denominated current accounts, which experienced a reduction of Rp1.59 billion, or 17.21%, year-on-year.

KET	NO	JABATAN	JUMLAH (ORG) TOTAL	MIN.LEVEL/ JENJANG MIN. LEVEL	LULUS PASS		BELUM MENGIKUTI NOT YET PARTICIPATED		BELUM LULUS NOT YET PASSED		POSITION
					ORG	%	ORG	%	ORG	%	
A	1	Komisaris	1	6	1	100%	0	0%	0	0%	Board of Commissioners
	2	Direksi	2	7	2	100%	0	0%	0	0%	Board of Directors
	3	DPS	1	4	1	100%	0	0%	0	0%	Sharia Supervisory Board (DPS)
B	1	Pemimpin Divisi	16	7	14	88%	0	0%	0	0%	Division Heads
				6	2	12%	0	0%	0	0%	
		Jumlah	**16**		**16**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**Total**
C	1	Branch Manager, Pinbag & Setara	127	5	127	100%	0	0%	0	0%	Branch Managers, Sub-Division Heads & Equivalent
	2	Branch Manager, Pinbag & Setara	3	2 & 3	3	100%	0	0%	0	0%	Branch Managers, Sub-Division Heads & Equivalent
		Jumlah	**130**		**130**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**Total**
D	1	Pincapem, Pinkedai, Staf Manrisk, Staf Kepatuhan, Staf DAI	111	4	106	95%	5	5%	0	0%	Sub-Branch Managers, Cash Office Heads, Risk Management Staff, Compliance Staff, Internal Audit (DAI) Staff
			5	1	5	100%	0	0%	0	0%	
		Jumlah	**116**		**111**	**96%**	**5**	**4%**	**0**	**0%**	**Total**
		TOTAL	**266**		**261**	**98,12%**	**5**	**1,88%**	**0**	**0%**	**Total**

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

BRK Syariah secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi digunakan untuk menyesuaikan dan memperkuat pengelolaan sistem manajemen risiko Bank. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi, kebijakan manajemen risiko, kualitas penerapan manajemen risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, kecukupan proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Adapun uraian terkait dengan Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan BRK Syariah per posisi 31 Desember 2025 dan 2024 telah diuraikan pada Bab Analisa Pembahasan Atas Kinerja Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

BRK Syariah senantiasa berupaya untuk mengelola risiko secara dinamis sejalan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan manajemen risiko sudah berjalan dengan baik.

Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi atas efetivitas pelaksanaan manajemen risiko. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan upaya penguatan pengelolaan risiko antara lain:

1. Sumber Daya Insani (SDI)
   a. Meningkatkan kompetensi SDI untuk mendukung aktivitas Bank melalui internal maupun eksternal *training*;
   b. Meningkatkan *risk awareness* pegawai antara lain melalui *e-learning* manajemen risiko.
   c. Meningkatkan *legal awareness* bagi seluruh jajaran Bank.
2. *Tools* dan Metodologi
   Memperkuat dan mengembangkan tools, model, serta metodologi pengelolaan seluruh risiko yang lebih baik melalui pengembangan *model rating*, *scoring*, *stress test*, dan model risiko lainnya serta pengembangan metodologi *control testing*.
3. System
   Meningkatkan pengamanan IT *system* operasional.

Review of Risk Management System Effectiveness

BRK Syariah periodically evaluates the effectiveness of the risk management system. Evaluation results are used to adjust and strengthen the Bank's risk management system management. Evaluations include adjustments to strategy, risk management policy, risk management implementation quality covering risk governance, risk management framework, adequacy of risk management processes, adequacy of risk management information systems, as well as adequacy of risk control systems.

The details related to the Publication Report of Risk Exposure and Capital of BRK Syariah as of December 31, 2025, and 2024 have been detailed in the Analysis and Discussion of Company Performance Chapter in this Annual Report.

Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners or Audit Committee on Risk Management System Adequacy

BRK Syariah always strives to manage risk dynamically in line with internal and external developments. The Board of Commissioners views that risk management implementation has proceeded well.

The Board of Directors and Board of Commissioners continuously evaluate risk management execution effectiveness. Evaluation results are used to strengthen risk management including:

1. Human Resources (SDI)
   a. Increasing SDI competency to support Bank activities through internal and external training;
   b. Increasing employee risk awareness through risk management e-learning.
   c. Increasing legal awareness for all Bank levels.
2. Tools and Methodology
   Strengthening and developing tools, models, and methodologies for better overall risk management through developing rating models, scoring, stress tests, and other risk models as well as developing control testing methodology.
3. System
   Improving operational IT system security.

AUDITOR EKSTERNAL
EXTERNAL AUDITOR

"BRK Syariah berkomitmen menjaga transparansi dan kredibilitas laporan keuangan melalui pelaksanaan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK guna memastikan penyajian laporan keuangan yang wajar, andal, dan sesuai standar professional."

"BRK Syariah is committed to maintaining transparency and the credibility of financial statements through the implementation of external audits by Public Accounting Firms registered with the OJK to ensure the presentation of financial statements that are fair, reliable, and in accordance with professional standards."

Penerapan Fungsi Audit Eskternal

Sesuai dengan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank bahwa Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan posisi bulan Desember wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Disamping itu, guna memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan maka BRK Syariah menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk mengaudit laporan keuangan tahunan berdasarkan perjanjian kerja dengan KAP.

Audit tersebut untuk memastikan bahwa informasi keuangan BRK Syariah disusun dan disajikan secara berkualitas, sesuai Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan mendapat opini atas kewajaran Laporan Keuangan.

Penunjukan Akuntan Publik

Proses penunjukan KAP dilakukan dengan tahapan berikut:

1. RUPS memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris antara lain untuk menunjuk KAP sebagai auditor eksternal yang independen untuk memeriksa laporan keuangan BRK Syariah tahun buku 2025.
2. BRK Syariah telah memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan periode Januari sampai dengan Desember 2025 kepada KAP yang disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. KAP yang ditunjuk adalah KAP yang terdaftar di OJK.
3. Proses pemilihan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan BRK Syariah.

Implementation of External Audit Function

In accordance with POJK Number 37/POJK.03/2019 dated December 19, 2019, concerning Transparency and Publication of Bank Reports, Financial Statements prepared based on financial accounting standards as of December must be audited by a Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK). Furthermore, to fulfill the implementation of the external audit function in accordance with POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and SE OJK No. 18/SEOJK.03/2023 concerning Procedures for the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, BRK Syariah utilizes the services of a Public Accounting Firm (KAP) and/or a Public Accountant (AP) to audit the annual financial statements based on a work agreement with the KAP.
The audit is conducted to ensure that BRK Syariah's financial information is prepared and presented with high quality, in accordance with the Professional Standards of Public Accountants and the established audit scope, and to obtain an opinion on the fairness of the Financial Statements.

Appointment of Public Accountant

The process of appointing a KAP is carried out through the following stages:

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) granted approval to the Board of Commissioners, among others, to appoint a KAP as an independent external auditor to examine BRK Syariah's financial statements for the 2025 fiscal year.
2. BRK Syariah has assigned the audit of the Annual Financial Statements for the period of January to December 2025 to the KAP approved by the Board of Commissioners in accordance with the recommendations of the Audit Committee. The appointed KAP is one registered with the OJK.
3. The selection process was carried out in accordance with the applicable goods and services procurement mechanisms. To guarantee independence and the quality of the examination results, the appointed external auditor must not have any conflict of interest with BRK Syariah.

Pada RUPS Tahunan tanggal 28 April 2025 telah disetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan mempertimbangkan proses seleksi pemilihan Kantor Akuntan Publik oleh Komite Audit. Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Surat Nomor : 080/KS.01/DK/2025 tanggal 21 Oktoberr 2025 Perihal Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun buku 2025.

Periode Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik dan *Audit Fee*

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan. Penggunaan jasa audit dari akuntan Publik (AP) yang sama dibatasi dan paling lama untuk periode audit selama 8 (delapan) tahun secara akumulasi mengacu pada POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Laporan Hasil Audit dan *Management Letter* telah disampaikan secara tepat waktu kepada BRK Syariah sehingga Laporan Publikasi pada surat kabar dan tidak pernah terlambat untuk disampaikan kepada Bank Indonesia, OJK dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, KAP yang ditunjuk telah melaksanakan audit secara independen berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berikut daftar Akuntan Publik yang melakukan jasa audit BRK Syariah.

At the Annual GMS on April 28, 2025, the delegation of authority to the Board of Commissioners was approved to determine the Public Accounting Firm to conduct the audit of the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) by considering the selection process of the Public Accounting Firm by the Audit Committee. The Board of Commissioners acted in accordance with the recommendation in Letter Number: 080/KS.01/DK/2025 dated October 21, 2025, regarding the Determination of the Public Accounting Firm (KAP) for the Examination of the Annual Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the 2025 fiscal year.

Period of Public Accounting Firm, Public Accountant, and Audit Fee

To guarantee independence and the quality of the examination results, the appointed external auditor or Public Accounting Firm (KAP) must not have a conflict of interest with the Company. The use of audit services from the same Public Accountant (AP) is limited to a maximum cumulative audit period of 8 (eight) years, referring to POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and SE OJK No. 18/SEOJK.03/2023 concerning Procedures for the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Audit Reports and Management Letters have been submitted in a timely manner to BRK Syariah, ensuring that Published Reports in newspapers are never late for submission to Bank Indonesia, OJK, and the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). In performing its duties, the appointed KAP has conducted the audit independently based on the Professional Standards of Public Accountants prepared by the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI). Below is the list of Public Accountants providing audit services for BRK Syariah.

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Audit Fee Periode 8 (Delapan) Tahun Terakhir
Table of Public Accounting Firm, Accountant Name, Audit Fee for the Last 8 (Eight) Year Period

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Office	Periode KAP KAP Period	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Accountant Name (Partner in Charge)	Audit Fee (Rp) Audit Fee (IDR)
2025	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 6 6th period	Hermen Bustaman, CA, CPA	749.250.000
2024	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 5 5th period	Bustaman, Ezeddin & Putranto	726.772.500
2023	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 4 4th period	Bustaman, Ezeddin & Putranto	783.425.000
2022	Hendrawinata Hanny, Erwin & Sumargo	Periode ke 1 1th period	Hendrawinata Hanny, Erwin & Sumargo	666.000.000
2021	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 3 3th period	Bustaman, Ezeddin & Putranto	600.000.000

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Office	Periode KAP KAP Period	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Accountant Name (Partner in Charge)	Audit Fee (Rp) Audit Fee (IDR)
2020	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 2 2th period	Bustaman, Ezeddin & Putranto	632.500.000
2019	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 1 1th period	Bustaman, Ezeddin & Putranto	600.000.000
2018	Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	Periode ke 2	Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	645.370.000

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Bustaman, Ezeddin & Putranto selain untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun 2025 periode ke 6, juga melaksanakan Audit Kinerja, Audit Kepatuhan dan *Review* terhadap Teknologi Sistem Informasi BRK Syariah tahun 2025.

Pengawasan dan Komunikasi Bank dan Akuntan Publik

Dalam pelaksanaan audit, BRK Syariah senantiasa melakukan komunikasi dengan auditor ekternal terkait rencana pelaksanaan audit, progress audit dan isu-isu penting lainnya untuk mendukung kelancaran proses audit. Laporan hasil audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi BRK Syariah dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SEOJK tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Komite Audit pada tanggal 28 Mei 2025.

Other Services Provided by the Accountant

In addition to performing the Audit of the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for 2025 (6th period), Bustaman, Ezeddin & Putranto also conducted a Performance Audit, Compliance Audit, and an Information System Technology Review for BRK Syariah in 2025.

Supervision and Communication between the Bank and Public Accountant

During the audit implementation, BRK Syariah consistently maintains communication with the external auditor regarding the audit plan, audit progress, and other significant issues to support a smooth audit process. Audit result reports are submitted to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with applicable laws and regulations.

Effectiveness of External Audit Implementation

The Audit Committee conducts an evaluation of the implementation of audit services on annual financial information by the AP and/or KAP, which at a minimum includes:

1. Conformity of the audit implementation by the AP and/or KAP with applicable auditing standards;
2. Adequacy of fieldwork time;
3. Assessment of the scope of services provided and the adequacy of sampling; and
4. Improvement recommendations provided by the AP and/or KAP.

The Audit Committee's evaluation report is submitted by the Board of Directors of BRK Syariah using the form found in the appendix of the SEOJK concerning Procedures for the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and was signed by the Audit Committee on May 28, 2025.

KODE ETIK (*CODE OF CONDUCT*)
CODE OF CONDUCT

"Penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BRK Syariah didorong dengan semangat mengedepankan nilai-nilai perusahaan, budaya kerja, serta Kode Etik yang menjadi pedoman bagi seluruh insan Bank untuk bertindak profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel"

"The reinforcement of Good Corporate Governance (GCG) at BRK Syariah is driven by a commitment to prioritizing corporate values, work culture, and a Code of Conduct. These serve as the guiding principles for all Bank personnel to act professionally, with integrity, transparency, and accountability."

BRK Syariah menyadari arti pentingnya implementasi tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham (*Shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*Stakeholderss*), dengan pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan Bank yang amanah, transparan dan akuntabel.

BRK Syariah telah memiliki dan mengimplementasikan nilai-nilai dan budaya Bank, standar etika dan Kode Etik yang menjadi acuan di setiap level organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan seluruh Pegawai Bank. Yaitu tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 172/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Kode Etik BRK Syariah menjadi dasar sikap dan tindakan pegawai agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai utama Bank serta peraturan internal maupun regulasi eksternal yang berlaku.

Pokok-Pokok Kode Etik

Nilai-nilai Dasar Kode Etik Kepatuhan

1. ***Integrity***
   Insan Bank memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai dan kode etik perusahaan dengan menunjukkan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ajaran dan prinsip agama, moral, etika dan budaya.

2. ***Synergy***
   Insan Bank mengutamakan kerjasama tim yang saling menghargai dan mendukung dengan mengedepankan cara berpikir positif dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.

BRK Syariah recognizes the vital importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) as a strategic tool to enhance long-term value and sustainable business growth. This commitment extends beyond Shareholders to include all Stakeholders, ensuring that business management is not merely profit-driven but is managed in a manner that is fiduciary (amanah), transparent, and accountable.

BRK Syariah has established and implemented Bank values, work culture, and ethical standards through a Code of Conduct that serves as a reference for every level of the organization, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board (SSB), and all Bank Employees. This is formally stipulated in the Board of Directors Decree No. 172/KEPDIR/2022, dated August 22, 2022, concerning the Compliance Code of Conduct of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
The BRK Syariah Code of Conduct serves as the fundamental basis for the attitudes and actions of employees, ensuring they work professionally and ethically. It utilizes core principles that refer to the Bank's vision, mission, and core values, as well as applicable internal and external regulations.

Key Elements of the Code of Conduct

Core Values of the Compliance Code of Conduct

1. **Integrity**
   Bank personnel maintain a high commitment to the company's values and code of ethics by demonstrating accountable behavior in accordance with religious teachings and principles, morals, ethics, and culture.

2. **Synergy**
   Bank personnel prioritize teamwork characterized by mutual respect and support, emphasizing positive thinking to achieve corporate objectives.

3. ***Honesty***
Insan Bank mengedepankan kejujuran dalam setiap ucapan dan perbuatan yang bersumber dari ketulusan dan keikhlasan hati.

4. ***Adaptive***
Insan Bank bersikap kreatif dan inovatif terhadap perubahan dan masalah yang dihadapinya, sehingga dapat memberikan solusi yang memiliki nilai tambah.

5. ***Respect***
Insan Bank senantiasa memberikan pelayanan prima dengan menunjukkan kepedulian yang tinggi, proaktif, dan cepat tanggap guna memberikan solusi terbaik terhadap kebutuhan pelanggan.

6. ***Excellence***
Insan Bank menunjukkan pribadi unggul dengan memiliki kompetensi yang tinggi dan terimplementasi dari cara kerja yang cerdas, efektif dan efisien, serta bersemangat untuk memberikan hasil terbaik bagi organisasi.

Prinsip Etika Bisnis Bank

1. **Kami Sajikan Mutu**
Kegiatan Operasional Bank dituntut untuk melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari yang harus senantiasa berfokus pada mutu dengan kata lain adalah, setiap Insan Bank senantiasa memenuhi kebutuhan dan harapan para *Stakeholders*.

2. **Kami Bekerja Profesional**
Dalam setiap aktivitas operasional Bank, setiap Insan Bank dituntut untuk mengerti hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Setiap Insan Bank wajib melayani setiap nasabah secara profesional dengan sikap sopan, ramah dan wajar. Harus tanggap dan berusaha memahami kebutuhan serta mencarikan alternatif solusi atas masalah nasabah dengan sebaik-baiknya dan dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank. Ketepatan dan efisiensi waktu pelayanan adalah faktor yang mendukung layanan yang berkualitas.

3. **Kami Bertekad Mewujudkan Tata Kelola Bank yang Baik**
Good Corporate Governance merupakan tata kelola Bank yang baik dalam rangka memberikan nilai yang terbaik bagi para *Stakeholders*. Di dalamnya terkandung 5 (lima) prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness* (T-A-R-I-F). Setiap Insan Bank dalam melakukan aktivitas sehari-hari senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan terjadi proses *check and balance*.

3. **Honesty**
Bank personnel uphold honesty in every word and deed, rooted in sincerity and heartfelt integrity.

4. **Adaptive**
Bank personnel adopt a creative and innovative stance toward changes and challenges, providing solutions that offer added value.

5. **Respect**
Bank personnel consistently provide excellent service by demonstrating high levels of care, proactivity, and responsiveness to provide the best solutions for customer needs.

6. **Excellence**
Bank personnel demonstrate individual superiority through high competence, implemented through smart, effective, and efficient work methods, driven by a spirit to deliver the best results for the organization.

Principles of Bank Business Ethics

1. **We Deliver Quality**
Bank operational activities must focus on quality in daily execution. In other words, every Bank member must consistently meet the needs and expectations of Stakeholders.

2. **We Work Professionally**
In every operational activity, all Bank personnel are required to understand their rights, obligations, authority, and responsibilities. Every member is obligated to serve each customer professionally with a polite, friendly, and appropriate attitude. Personnel must be responsive, strive to understand customer needs, and find alternative solutions while prioritizing the Bank's interests. Timeliness and service efficiency are factors that support quality service.

3. **We Are Committed to Realizing Good Bank Governance**
Good Corporate Governance (GCG) is implemented to provide optimal value to Stakeholders. It contains five principles: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness (T-A-R-I-F). Every Bank member prioritizes these GCG principles in their daily activities to ensure a process of checks and balances.

4. **Kami Menjaga Semangat Kebersamaan**
   Setiap Insan Bank harus menjaga rasa kebersamaan, tidak dipengaruhi oleh ancaman, tindak kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi dan pelecehan yang didasari perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, ataupun ketidakmampuan pribadi baik melalui komentar, gurauan dan atau tindakan, begitu pula hubungan antar pegawai dan pengurus Bank tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing.

5. **Kami Menghargai Peranan dan Prestasi Pegawai**
   Keberhasilan pencapaian kinerja Bank harus dipandang sebagai hasil kerja kolektif seluruh pegawai dan unit kerja. Penghargaan harus diberikan kepada pegawai yang berprestasi sesuai dengan kontribusinya kepada Bank.

Prinsip Etika Kerja

Etika kerja merupakan tuntutan etika bagi Insan Bank dalam menjalankan fungsi dan tugasnya guna mencapai dan mewujudkan visi dan misi BRK Syariah. Etika Kerja di Bank terdiri dari :

1. **Patuh dan Taat pada Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku dan Prinsip Syariah**
   Setiap Insan Bank dituntut untuk selalu mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undang yang berlaku, baik ketentuan eksternal maupun internal (BPP, SOP, SK, SE dan Instruksi Direksi, dll) sebagai dasar dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan/kebijakan maupun dalam menjalankan kegiatan operasional Bank, serta prinsip Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha Bank.

2. **Melakukan Pencatatan yang Benar Mengenai Segala Transaksi yang Bertalian dengan Kegiatan Bank**
   Segenap Insan Bank harus mencatat data-data dan menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya secara jujur, tepat, benar dan akurat.

3. **Menggunakan dan Melindungi Harta Bank dengan Baik**
   Seluruh Insan Bank bertanggung jawab atas penggunaan harta benda milik Bank yaitu dapat berupa harta fisik dan non fisik, termasuk semua sarana, prasarana dan perangkat lunak (informasi). Penggunaan untuk tujuan selain untuk kepentingan pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Pemimpin Unit Kerja, dan Pemimpin Unit Kerja yang bersangkutan bertanggungjawab atas izin yang diberikan.

4. **We Maintain the Spirit of Togetherness**
   Every Bank member must uphold a sense of solidarity, unaffected by threats, violence, or any form of discrimination and harassment based on ethnicity, religion, skin color, gender, age, or personal disability. Comments, jokes, or actions—as well as relationships between employees and Bank management—must not be influenced by individual interests.

5. **We Value Employee Roles and Achievements**
   The success of the Bank's performance must be viewed as the collective result of all employees and work units. Recognition must be given to high-performing employees based on their contribution to the Bank.

Principles of Work Ethics

Work ethics represent the ethical requirements for Bank personnel in carrying out their functions and duties to realize the vision and mission of BRK Syariah. The Work Ethics consist of:

1. **Compliance with Applicable Laws, Regulations, and Sharia Principles**
   Every Bank member is required to always comply with applicable laws and regulations, both external and internal (BPP, SOP, Board Decree/SK, Circular Letter/SE, Board Instructions, etc.), as the basis for actions, decision-making, and Bank operational activities, as well as Sharia principles in conducting business activities.

2. **Accurate Recording of All Transactions Related to Bank Activities**
   All Bank personnel must record data and prepare work reports related to their functions and responsibilities honestly, precisely, correctly, and accurately.

3. **Properly Using and Protecting Bank Assets**

   All Bank personnel are responsible for the use of Bank assets, which can be physical and non-physical, including all facilities, infrastructure, and software (information). Use for purposes other than work must be justified and require prior written permission from the Work Unit Leader, and the relevant Work Unit Leader is responsible for the permission granted.

4. Menghindarkan Diri dari Persaingan yang Tidak Sehat Suatu persaingan dinilai tidak sehat apabila:

- Dalam melakukan usahanya, dengan sengaja atau karena kelalaian, berbuat sesuatu yang dapat merugikan nama baik Bank, pengurus dan pegawai.
- Mempromosikan jasa-jasa Bank dengan cara-cara yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengelabui calon nasabah atau nasabah atau dengan pernyataan
- pernyataan yang implikasinya mengandung hal-hal yang tidak benar atau menjelekkan Bank lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Tidak Menyalahgunakan Wewenang untuk Kepentingan Pribadi

Untuk menghindari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang dapat merugikan Bank, baik secara *financial* maupun kinerja Bank, maka segenap Insan Bank melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak memanfaatkan posisi dan wewenangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diyakini dapat digolongkan sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau tindakan-tindakan lain sejenis yang tergolong atau mengarah tindakan korporasi yang merugikan seperti *fraud, insider trading* dan sejenisnya.
- Mengutamakan objektivitas, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap kebijakan penilaian, seperti penilaian terhadap kualitas dan harga pengadaan barang, pemilihan dan penunjukan konsultan, pemilihan dan penetapan rekanan, perawatan harta benda Bank, pembangunan sarana dan prasarana serta aktivitas bisnis lainnya dalam arti seluas-luasnya.

6. Menghindarkan Diri Dari Keterlibatan Pengambilan Keputusan Dalam Hal Terdapat Pertentangan Kepentingan

Setiap Insan Bank menjauhi dan menghindari setiap konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Bank, diantaranya namun tidak terbatas pada :

- Tidak memanfaatkan posisi/jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- Tidak melibatkan diri pada proses pembahasan/ usulan dan/atau proses pengambilan keputusan dimana calon nasabah/rekanan memiliki hubungan/keterkaitan seperti : hubungan bisnis, hubungan hutang-piutang dan hubungan kekerabatan.
- Dilarang menikmati/menerima sebagian maupun seluruh dana dari pembiayaan yang sedang diproses dan/atau telah disetujui/ diberikan kepada Nasabah.
- Dilarang menggunakan atau menerima fasilitas milik Nasabah dan/atau Relasi/rekanan.

4. Avoiding Unfair Competition. Competition is considered unfair if:

- In conducting its business, intentionally or through negligence, doing anything that could harm the reputation of the Bank, its management, or its employees.
- Promoting the Bank's services in ways that could directly or indirectly deceive potential customers or customers, or through statements.
- Making statements that are implied to contain untrue information or disparage other banks, either directly or indirectly.

5. Not Abusing Authority for Personal Interests

To prevent the practices of Collusion, Corruption, and Nepotism (KKN) that may cause financial or performance-related detriments to the Bank, all Bank Personnel shall observe the following:

- Do not utilize their position and authority to engage in actions reasonably classified as Corruption, Collusion, and Nepotism, or other similar actions constituting or leading to detrimental corporate acts such as fraud, insider trading, and the like.
- Prioritize objectivity, honesty, and transparency in every assessment policy, such as evaluating the quality and pricing of goods procurement, the selection and appointment of consultants, the selection and designation of partners, the maintenance of Bank assets, the development of facilities and infrastructure, as well as other business activities in the broadest sense.

6. Avoiding Involvement in Decision-Making Processes Involving a Conflict of Interest

Every Bank Personnel must steer clear of and avoid any conflict between personal interests and the Bank's interests, including but not limited to:

- Do not utilize their position/office and authority for personal gain.
- Do not involve themselves in the deliberation/ proposal and/or decision-making processes where prospective customers/partners share a relationship/connection, such as: business relationships, debt-receivable relationships, and kinship.
- Strictly prohibited from enjoying/receiving any or all funds from financing facilities currently being processed and/or already approved/disbursed to Customers.
- Strictly prohibited from utilizing or accepting facilities belonging to Customers and/or Relations/ partners.

- Tidak diperkenankan memperoleh atau meminta pinjaman dari Nasabah dan/atau Relasi/rekanan yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Dilarang memberikan talangan atau membayar sebagian/seluruh pinjaman/pembiayaan Nasabah dengan menggunakan dana pribadi Insan Bank.

7. Menjaga Kerahasiaan Nasabah dan Bank

Guna menjaga kerahasiaan data-data perbankan, data kepegawaian maupun data-data lainnya yang tergolong dalam kategori data rahasia Bank dari pihak-pihak (internal maupun eksternal Bank) yang tidak berkepentingan, setiap Insan Bank tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sesuai dengan aturan rahasia Bank dan rahasia jabatan.
- Memberikan data dan informasi yang tergolong dalam kategori rahasia Bank, baik itu yang menyangkut strategi bisnis keuangan, kebijakan, produk, jasa, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan Bank.
- Membocorkan atau menggunakan data dan informasi yang tergolong rahasia Bank untuk kepentingan politik tertentu, dan atau pihak ketiga yang tidak berwenang,

8. Memperhitungkan Dampak Merugikan Dari Setiap Kebijakan yang Ditetapkan Bank terhadap Keadaan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

Dalam menetapkan suatu keputusan atau kebijakan wajib memperhitungkan dampak yang merugikan yang dapat terjadi sebagai akibat dari kebijakan yang ditetapkan, baik yang menimbulkan keresahan ekonomi, sosial dan kerusakan lingkungan.

9. Tidak Menerima Hadiah atau Imbalan

Dalam menjalin hubungan dengan para Nasabah, rekanan dan mitra Bank, segenap Insan BRK Syariah selalu memperhatikan aspek kejujuran, kewajaran dan *fairness*, dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak menerima imbalan, hadiah atau cindera mata dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun dengan batasan sebagaimana yang diatur di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- Dalam rangka menjaga nama baik Bank, setiap Insan Bank menghindarkan diri dari segala bentuk penyuapan (*risywah*).

- Not permitted to obtain or solicit loans from Customers and/or Relations/partners for personal use that may precipitate a conflict of interest.

- Strictly prohibited from providing bailout funds or settling a portion/entirety of a Customer's loan/financing utilizing the personal funds of Bank Personnel.

7. Maintaining Customer and Bank Confidentiality

In order to preserve the confidentiality of banking data, personnel data, and other data classified under the Bank's confidential data category from unauthorized parties (both internal and external to the Bank), every Bank Personnel shall refrain from the following:

- Disclosing customer data and information to any party, adhering strictly to Bank secrecy and occupational confidentiality regulations.
- Disclosing data and information classified under the Bank's confidential category, pertaining to financial business strategies, policies, products, services, technology, personnel, and other data deemed potentially detrimental to the Bank.

- Leaking or exploiting data and information classified as Bank secrets for specific political interests and/or unauthorized third parties.

8. Considering the Detrimental Impacts of Every Bank-Established Policy on Economic, Social, and Environmental Conditions

In stipulating a decision or policy, it is mandatory to consider the potential detrimental impacts resulting from the enacted policy, particularly those that may incite economic or social unrest, or environmental degradation.

9. Not Accepting Gifts or Rewards

In forging relationships with Customers, associates, and Bank partners, all BRK Syariah Personnel must consistently observe aspects of honesty, propriety, and fairness by refraining from the following:

- Accepting remuneration, gifts, or souvenirs and/or the like in any form, subject to the thresholds stipulated in the Gratification Control Guidelines within PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

- In the interest of safeguarding the Bank's reputation, every Bank Personnel must abstain from all forms of bribery (risywah).

10. Tidak Melakukan Perbuatan Tercela yang Dapat Merugikan Citra Profesinya

Sebagai Insan Bank tidak melakukan perbuatan tercela, seperti berjudi, mabuk, perbuatan asusila, menggunakan psikotropika, berhutang diluar kemampuan bayarnya.

11. Menjaga Hubungan Baik Antar sesama Insan Bank

Insan Bank dalam pekerjaannya harus saling berkomunikasi dan saling berinteraksi serta saling memberikan masukan yang bersifat positif guna terciptanya hubungan yang harmonis dalam setiap tugas dan pekerjaannya.

12. Menjaga Keamanan Kerja dan Kebersihan Lingkungan Kerja

Seluruh Insan Bank, harus :

- Mengamankan lingkungan kerja termasuk harta, data, dan transaksi perusahaan.
- Tidak melakukan pelanggaran hukum.
- Tidak membocorkan rahasia perusahaan.
- Tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma agama/syariat Islam, etika, dan kesusilaan.
- Menjaga data informasi (*password, user* dll) yang menjadi wewenangnya.

Pernyataan Kode Etik Berlaku Bagi Setiap Level Organisasi

Kepatuhan terhadap Kode Etik menjadi salah satu komitmen setiap insan BRK Syariah dalam menerapkan tata kelola yang baik di setiap level organisasi Bank yang meliputi seluruh pegawai, termasuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Sebagai bentuk implementasinya, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah telah melakukan penandatanganan Pernyataan Tahunan Kepatuhan terhadap Kode Etik, kemudian ditindaklanjuti ke seluruh tingkatan organisasi. Apabila informasi yang telah dipublikasikan kurang lengkap, Pegawai sewaktu-waktu dapat bertanya kepada atasan langsung maupun ke unit kerja yang bertanggung jawab atas implementasi GCG yaitu Divisi Kepatuhan.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Penyebarluasan atau sosialisasi Kode Etik dilakukan secara berkala untuk menumbuhkan kesadaran dan juga pemahaman dalam menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai utama BRK Syariah. Dari kesadaran itu dapat ditumbuhkan sikap yang dikehendaki oleh Bank terhadap Insan BRK Syariah dalam hubungan antar pegawai, mengambil keputusan dengan mengedepankan kepentingan Bank serta menjaga harta dan reputasi Bank. Sosialisasi Kode Etik merupakan tanggung jawab dari Divisi Kepatuhan, selama tahun 2025 dilaksanakan dengan program:

10. Not Committing Disgraceful Acts that May Detract from Their Professional Image

As Bank Personnel, refraining from disgraceful acts, such as gambling, intoxication, immoral conduct, the use of psychotropic substances, or incurring debt beyond repayment capacity.

11. Fostering Good Relationships Among Fellow Bank Personnel

In executing their duties, Bank Personnel must communicate, interact, and provide positive feedback to one another to cultivate harmonious relationships across all tasks and responsibilities.

12. Maintaining Occupational Security and Work Environment Cleanliness

All Bank Personnel must:

- Secure the work environment, encompassing corporate assets, data, and transactions.
- Not commit legal violations.
- Not leak corporate secrets.
- Not engage in activities that contravene religious norms/Islamic Sharia, ethics, and morality.
- Safeguard information data (passwords, usernames, etc.) under their authorization.

Statement of Code of Conduct Applicability for Every Organizational Level

Compliance with the Code of Conduct is one of the commitments of every BRK Syariah personnel in implementing good corporate governance at every level of the Bank's organization, which includes all employees, including the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board. As a form of its implementation, the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory of BRK Syariah have signed the Annual Statement of Compliance with the Code of Conduct, which is then cascaded to all organizational levels. Should the published information be deemed incomplete, Employees may at any time inquire with their direct supervisors or the work unit responsible for GCG implementation, namely the Compliance Division.

Socialization and Dissemination of the Code of Conduct

The dissemination or socialization of the Code of Conduct is conducted periodically to foster awareness as well as understanding in implementing behaviors that are in accordance with the core values of BRK Syariah. From this awareness, the attitude desired by the Bank from BRK Syariah Personnel can be cultivated regarding interpersonal employee relationships, making decisions by prioritizing the Bank's interests, and safeguarding the Bank's assets and reputation. The socialization of the Code of Conduct is the responsibility of the Compliance Division; during 2025, it was implemented through the following programs:

1. Sosialisasi kepada karyawan baru agar dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik Kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank.
2. Reminder kepada seluruh Insan Bank antara lain dalam bentuk penandatanganan surat pernyataan kepatuhan setiap tahun.
3. Menyampaikan masukan dan saran untuk perubahan dan perbaikan.
4. Forum diskusi (*problem solving*) baik *on line* atau *off line*.
5. Apabila ada perubahan, Kode Etik Kepatuhan akan diinformasikan kepada Insan Bank.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Implementasi Kode Etik BRK Syariah dilakukan dengan secara terus-menerus, baik dalam deklarasi atas pemahaman dan kepatuhan Kode Etik, adanya kebijakan Bank yang selaras dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan, sikap perbuatan, dan lain sebagainya. BRK Syariah melakukan pemantauan penerapan Kode Etik secara berkesinambungan dan jika terjadi pelanggaran oleh Insan BRK Syariah maka akan diberikan sanksi yang tegas, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pelanggaran Kode Etik BRK Syariah termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana whistleblowing berdasarkan kebijakan penerapan Pedoman *Whistleblowing System*. Ketentuan mengenai sanksi Kode Etik diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 172/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis sanksi pelanggaran Kode Etik antara lain meliputi:
- Teguran tertulis berupa Surat Peringatan I.
- Teguran tertulis berupa Surat Peringatan II.
- Teguran tertulis berupa Surat Peringatan III.
- Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- Demosi *grade*

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi Yang Diberikan Pada Tahun 2025

Selama tahun 2025, terdapat kasus pelanggaran Kode Etik BRK Syariah sebanyak 11 (sebelas) orang pegawai, dengan rekapitulasinya sebagai berikut:

1. Socialization for new employees to ensure they acknowledge, understand, and implement the Compliance Code of Conduct in the Bank's operational activities.
2. Reminders to all Bank Personnel, including in the form of signing an annual compliance statement letter.
3. Submitting input and suggestions for changes and improvements.
4. Discussion forums (problem-solving) conducted either online or offline.
5. Should there be any amendments, the Compliance Code of Conduct will be communicated to Bank Personnel.

Efforts in the Implementation and Enforcement of the Code of Conduct

The implementation of the BRK Syariah Code of Conduct is carried out continuously, encompassing the declaration of understanding and compliance with the Code of Conduct, the existence of Bank policies aligned with corporate values and culture, behavioral conduct, and so forth. BRK Syariah conducts continuous monitoring of the implementation of the Code of Conduct, and in the event of a violation by BRK Syariah Personnel, strict sanctions will be imposed, commensurate with the severity of the violation committed.

Violations of the BRK Syariah Code of Conduct are categorized as actions that can be reported through the whistleblowing mechanism based on the policy for implementing the Whistleblowing System Guidelines. Provisions regarding Code of Conduct sanctions are stipulated in the Board of Directors Decree No. 172/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022, concerning the Compliance Code of Conduct of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Types of Sanctions for Code of Conduct Violations

The types of sanctions for Code of Conduct violations include, among others:
- Written reprimand in the form of Warning Letter I.
- Written reprimand in the form of Warning Letter II.
- Written reprimand in the form of Warning Letter III.
- Written statement of dissatisfaction.
- Grade demotion.

Number of Code of Conduct Violations and Sanctions Imposed in 2025

During the year 2025, there were cases of BRK Syariah Code of Conduct violations involving 11 (eleven) employees, with the following recapitulation:

Tabel Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Tahun 2025
Table: Settlement of Code of Conduct Violation Cases in 2025

Kategori Sanksi Sanction Category	**Jenis Sanksi**	Jumlah Total	**Status Penyelesaian** Settlement Status	Type of Sanction
Ringan Light	Peringatan I	2	2	Warning I
	Peringatan II	-	-	Warning II
	Peringatan III	-	-	Warning III
Sedang Moderate	Pernyataan tidak puas	3	3	Statement of Dissatisfaction
	Demosi *grade*	1	1	Grade Demotion
Berat Heavy	Pemutusan hubungan kerja	5	5	Employment Termination

PERKARA PENTING
SIGNIFICANT LEGAL CASES

Sepanjang tahun 2025, BRK Syariah menghadapi perkara penting, baik berupa perdata, pidana maupun hubungan industrial. Beberapa di antaranya dalam proses penyelesaian dan sisanya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Rekapitulasi perkara penting yang dihadapi tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Throughout 2025, BRK Syariah faced significant legal cases, encompassing civil, criminal, as well as industrial relations matters. Several of these are currently in the settlement process, while the remainder have been declared to have obtained permanent legal force (inkracht). The recapitulation of these significant legal cases faced is detailed in the table below:

Tabel Perkara Penting Tahun 2025
Table of Significant Legal Cases in 2025

No	**Permasalahan Hukum** Legal Issues	Jumlah | Total		
		Perdata Civil	**Pidana** Criminal	**Hubungan Industrial** Industrial Relations
1	Jumlah Kasus yang Dihadapi Total Cases Faced	5	11	-
2	Kasus yang telah Selesai (berkekuatan hukum tetap) Resolved Cases (having permanent legal force)	3	3	-
3	Kasus Dalam Proses Penyelesaian Cases in the Settlement Process	2	8	-

Dari total 16 (enam belas) permasalahan hukum yang dihadapi Bank, sebanyak 6 (enam) perkara telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap), sedangkan 10 (sepuluh) perkara masih dalam proses penyelesaian.

Of the total 16 (sixteen) legal matters faced by the Bank, 6 (six) cases have been conclusively resolved (having attained final and binding legal force), while 10 (ten) cases remain in the process of settlement

Permasalahan Hukum Yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris Dan Direksi Yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2025, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah yang sedang menjabat

Ongoing Legal Issues Faced by the Incumbent Board of Commissioners and Board of Directors

During the year 2025, there were no ongoing legal issues faced by the incumbent Board of Commissioners and Board of Directors of BRK Syariah.

Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Entitas Anak

Mengingat BRK Syariah tidak memiliki Entitas Anak maka tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang yang dihadapi oleh Entitas Anak.

Legal Issues Faced by Subsidiaries

Considering that BRK Syariah does not possess any Subsidiaries, there is no information regarding legal issues faced by Subsidiaries.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
WHISTLEBLOWING SYSTEM

"*Whistleblowing System* (WBS) menjadi komitmen kuat BRK Syariah dalam menegakkan integritas dengan menyediakan saluran pelaporan dugaan pelanggaran secara transparan, aman, dan akuntabel"

"The Whistleblowing System (WBS) represents BRK Syariah's strong commitment to upholding integrity by providing a transparent, secure, and accountable reporting channel for alleged violations."

Pedoman *Whistleblowing System*

Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS) merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan BRK Syariah. Kebijakan WBS BRK Syariah telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 171/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Untuk informasi mengenai WBS BRK Syariah telah disampaikan dalam *website*: http://www.brksyariah. co.id/whistleblowing.

Media Penyampaian Laporan Pelanggaran

Saluran yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan pelaporannya dapat diakses melalui situs web BRK Syariah, yaitu http://www.brksyariah. co.id/*whistleblowing*, dimana pelapor (*whistleblower*) dapat menyampaikan pengungkapan duagaan pelanggaran atau *fraud* dengan cara:

1. Pelapor menyampaikan laporan WBS melalui Aplikasi WBS pada *website* BRK Syariah pada kolom/tab *whistleblowing*.
2. Pelapor mengisi data isian pada formulir aduan secara lengkap dan benar, memuat informasi berupa
   a. Jenis pelanggaran;
   b. Uraian pengaduan;
   c. Informasi pelaku/terlapor;
   d. Bukti pendukung/dokumen yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran;
   e. Data pelapor (*non mandatory*).

Apabila terdapat hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut terkait pelaporan WBS dapat menghubungi unit kerja pengelola WBS dengan nomor telepon (0761) 47070 Ext. 1220 dan 1222.

Whistleblowing System Guidelines

The Whistleblowing System (WBS) is a mechanism for disclosing violations, unlawful acts, unethical/immoral behavior, or other actions that may cause detriment to BRK Syariah. The WBS policy of BRK Syariah is stipulated in the Board of Directors Decree No. 171/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022, concerning the Guidelines for the Whistleblowing System of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Information regarding the BRK Syariah WBS is available on the website: http://www.brksyariah.co.id/whistleblowing.

Media for Submitting Violation Reports

The channel that whistleblowers can use to submit their reports is accessible through the BRK Syariah website, namely http://www.brksyariah.co.id/whistleblowing, where the whistleblower can disclose suspected violations or fraud by the following means:

1. The whistleblower submits the WBS report through WBS Application on the BRK Syariah website under the whistleblowing column/tab.
2. The whistleblower fills out the data fields on the complaint form completely and accurately, containing information such as:
   a. Type of violation;
   b. Description of the complaint;
   c. Information regarding the perpetrator/reported party;
   d. Supporting evidence/documents indicating the occurrence of a suspected violation;
   e. Whistleblower data (non-mandatory).

Should there be further inquiries regarding WBS reporting, individuals may contact the WBS management work unit at the telephone number (0761) 47070 Ext. 1220 and 1222.

Jenis Pelanggaran WBS

1. Perbuatan *fraud*.
2. Pelanggaran kode etik antara lain meliputi:
   a. Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau dokumen.
   b. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar bank.
   c. Menginformasikan/mengungkapkan rahasia nasabah dan bank.
   d. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan/atau mengakibatkan kerugian bank.
   e. Penyelewengan uang/kas bank.
   f. Penggelapan aset dan/atau inventaris bank.
   g. Pemerasan.
   h. Perbuatan Asusila.

Pengelola Laporan WBS

Setiap pengaduan yang sampai kepada Pengelola WBS, akan ditindaklanjuti ke Direktur Utama selaku Penanggung Jawab WBS melalui Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Selanjutnya Direktur Utama memberikan keputusan persetujuan atau penolakan tindak lanjut atas Laporan WBS tersebut. Jika Penanggung Jawab WBS setuju untuk ditindaklanjuti, maka Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* melakukan proses pemeriksaan dan investigasi lebih mendalam. Untuk selanjutnya Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Direksi, untuk dilanjutkan dengan keputusan sanksi.

Perlindungan Bagi Pelapor (*Whistleblower*)

Pada prinsipnya hak dari pelapor WBS adalah mendapatkan perlindungan atas laporan yang disampaikan untuk memberikan rasa aman terkait kemungkinan ancaman atas laporan WBS yang disampaikannya. Untuk itulah BRK Syariah memberikan perlindungan bagi pelapor yang meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas dan melindungi pelapor, termasuk jaminan kerahasiaan dari petugas, pengelola dan penanggung jawab WBS
2. Perlindungan kepada pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas, pelapor dan isi laporan serta jaminan perlindungan dari perlakuan insan Bank yang merugikan, seperti intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Pelapor adalah juga sebagai Terlapor atau pihak yang terlibat di dalam dugaan pelanggaran/*Fraud* yang disampaikan

Types of WBS Violations

1. Fraudulent acts.
2. Code of conduct violations, which include, among others:
   a. Misuse and falsification of data and/or documents.
   b. Abuse of position for personal/group interests or other interests outside the bank.
   c. Informing/disclosing customer and bank secrets.
   d. Acceptance and/or provision of gratuities that may influence decision-making and/or result in financial losses to the bank.
   e. Misappropriation of bank funds/cash.
   f. Embezzlement of bank assets and/or inventory.
   g. Extortion.
   h. Immoral acts.

WBS Report Management

Every complaint received by the WBS Management will be escalated to the President Director as the Person in Charge of the WBS through the Director of Compliance and Risk Management. Subsequently, the President Director shall issue a decision of approval or rejection regarding the follow-up of the WBS Report. If the Person in Charge of the WBS approves the follow-up, the Internal Audit & Anti-Fraud Division will conduct a more in-depth examination and investigation process. Following this, the Internal Audit & Anti-Fraud Division will submit the investigation results to the Board of Directors to proceed with a sanctioning decision.

Protection for Whistleblowers

In principle, the right of a WBS whistleblower is to receive protection regarding the submitted report to ensure a sense of security against potential threats resulting from the submitted WBS report. Therefore, BRK Syariah provides protection for whistleblowers, which encompasses:

1. A guarantee of identity confidentiality and protection for the whistleblower, including a guarantee of confidentiality from WBS officers, management, and the person in charge.
2. Protection for the whistleblower encompasses a guarantee of confidentiality regarding their identity and the content of the report, as well as a guarantee of protection from detrimental treatment by Bank personnel, such as intimidation, harassment, or discrimination in any form, except in cases where the examination results reveal that the Whistleblower is also the Reported Party or a party involved in the alleged violation/Fraud being reported.

Penanganan Pengaduan WBS

WBS Complaint Handling



1. Pelapor : Menyampaikan Laporan melalui *website* Bank

2. Petugas WBS :
   - Verifikasi dan Analisa Laporan
   - Klarifikasi dan konfirmasi kepada pelapor untuk melengkapi keterangan dan bukti.
   - Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pengelola disertai *update* status laporan di aplikasi WBS

3. Pengelola WBS (Pemimpin Divisi Kepatuhan) :
   - Menerima laporan dari Petugas WBS
   - Membuat usulan tindak lanjut laporan kepada penanggung jawab WBS melalui Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

1. Whistleblower (Informer): Submits the Report through the Bank's website.
2. WBS Officer:
   - Verification and Analysis of the Report.
   - Clarification and confirmation with the whistleblower to complete information and evidence.
   - Creates and submits a report to the Management, accompanied by a report status update in the WBS application.

3. WBS Manager (Compliance Division Head):
   - Receives reports from the WBS Officer.
   - Formulates a proposal for report follow-up to the WBS Person in Charge through the Director of Compliance and Risk Management.

4. Direksi
   - Keputusan Sanksi
   - Pelaksanaan keputusan Sanksi

5. Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
   - Melakukan proses pemeriksaan dan investigasi lebih mendalam
   - Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direksi.

6. Penanggung Jawab WBS (Direktur Utama)
   - Memberikan keputusan persetujuan atau penolakan tindak lanjut laporan.
   - Laporan disetujui untuk ditindaklanjuti.

Sosialisasi WBS

Tujuan WBS adalah menyediakan saluran pelaporan untuk pegawai internal dan pihak luar/nasabah/ pihak rekanan untuk menyampaikan laporan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran di BRK Syariah. Untuk itu BRK Syariah secara berkelanjutan melakukan sosialisasi pelaporan pelanggaran melalui *WhistleBlowing System*. Untuk ke pihak internal, sosialisasi dilakukan melalui Forum internal pegawai, aplikasi Strategi Anti *Fraud* BRK Syariah dan aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan BRK Syariah, serta pemasangan banner maupun *sticker* WBS BRK Syariah pada setia jaringan kantor Bank. Sedangkan ke pihak eksternal seperti nasabah, mitra bisnis, rekanan sosialisasi dilakukan melalui *Website* BRK Syariah dan termasuk mencantumkan klausul himbauan anti gratifikasi dalam Perjanjian Kerjasama.

Pengungkapan Laporan WBS dan Tindak Lanjutnya

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang masuk melalui Aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS) melalui *website* sebagai berikut :

4. Board of Directors:
   - Sanction Decision.
   - Execution of the Sanction decision.

5. Internal Audit & Anti-Fraud Division:
   - Conducts a more in-depth examination and investigation process.
   - Delivers the investigation results to the Board of Directors.

6. Person in Charge of WBS (President Director):
   - Provides a decision of approval or rejection for the report follow-up.
   - Report is approved for follow-up.

WBS Socialization

The objective of the WBS is to provide a reporting channel for internal employees and external parties/customers/ partners to submit reports upon discovering any suspected violations within BRK Syariah. Therefore, BRK Syariah continuously conducts socialization regarding violation reporting through the Whistleblowing System. For internal parties, socialization is carried out through employee internal forums, the BRK Syariah Anti-Fraud Strategy application, and the BRK Syariah Compliance Information System application, as well as the placement of BRK Syariah WBS banners and stickers across every Bank office network. Meanwhile, for external parties such as customers, business partners, and associates, socialization is conducted through the BRK Syariah Website, which includes incorporating an anti-gratuity advisory clause within the Cooperation Agreements.

Disclosure of WBS Reports and Subsequent Follow-up

Number of Complaints and Complaint Process

The Suspected Violation Complaint Reports received up to December 31, 2025, through the Whistleblowing System (WBS) Application via the website are as follows:

Klasifikasi Laporan Report Classification		**Laporan Ditindaklanjuti** Reports Followed Up	**Laporan dinyatakan Selesai** Reports Declared Resolved
Fraud	***Non Fraud***		
-	5	5	5

Tindak Lanjut Hasil Laporan WBS

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* atau pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Follow-up on WBS Report Results

If the investigation results prove that the reported party has committed fraud or a violation, the deciding official will impose sanctions in accordance with the applicable regulations.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATUITY CONTROL

"BRK Syariah menerapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang didukung oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk memastikan penerapan prinsip integritas, transparansi, dan kepatuhan dalam setiap interaksi dengan pemangku kepentingan".

"BRK Syariah implements the Gratuity Control Guidelines supported by the Gratuity Control Unit (UPG) to ensure the application of the principles of integrity, transparency, and compliance in every interaction with stakeholders."

BRK Syariah telah menetapkan Surat Keputusan Direksi No. 170/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berada di Divisi Kepatuhan. Pedoman tersebut digunakan setiap Insan BRK Syariah dalam berinteraksi dengan nasabah, mitra bisnis, rekanan dan sesama pegawai Bank serta para pemangku kepentingan lainnya.

Unit Pengendalian Gratifikasi

Untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Divisi Kepatuhan dalam menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi, maka ditunjuklah pegawai sebagai fungsi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dengan lingkup tugas pokok dan fungsi UPG sebagai berikut:

1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait gratifikasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
2. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Insan Bank;
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
4. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Direksi;
6. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal di lingkungan Bank;
7. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Bank;dan
8. Melakukan *monitoring* dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

1. Sosialisasi bagi pegawai baru terkait adanya kebijakan gratifikasi di BRK Syariah.
2. Pelatihan melalui kegiatan *In House Training*, kunjungan ke jaringan kantor BRK Syariah maupun pembelajaran atau *e-learning* melalui portal internal BRK Syariah.

BRK Syariah has enacted the Board of Directors Decree No. 170/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022, concerning the Gratuity Control Guidelines within PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), establishing the Gratuity Control Unit (UPG) under the Compliance Division. These guidelines are utilized by every BRK Syariah personnel in interacting with customers, business partners, associates, fellow Bank employees, and other stakeholders.

Gratuity Control Unit

To assist the Head of the Compliance Division in executing the gratuity control function, employees have been appointed to serve the function of the Gratuity Control Unit (UPG), with the primary scope of duties and functions of the UPG as follows:

1. Formulating and/or evaluating gratuity-related provisions while strictly adhering to applicable regulations and other similar necessities to support the implementation of gratuity control;
2. Receiving, analyzing, and administering reports on the acceptance and refusal of gratuities from Bank personnel;
3. Forwarding gratuity acceptance reports to the KPK;
4. Reporting the recapitulation of gratuity reports periodically to the KPK;
5. Submitting the results of gratuity report management and proposed gratuity control policies to the Board of Directors;
6. Conducting socialization of gratuity regulations to internal parties within the Bank;
7. Managing gratuity items that fall under the Bank's authority; and
8. Conducting monitoring and evaluation of the implementation of gratuity control in collaboration with the KPK.

Socialization of Gratuity Policy

1. Socialization for new employees regarding the existence of the gratuity policy at BRK Syariah.
2. Training through In-House Training activities, visits to the BRK Syariah office network, as well as learning or e-learning via the internal BRK Syariah portal.

Laporan Gratifikasi Tahun 2025

Selama tahun 2025 tidak terdapat laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG BRK Syariah.

2025 Gratuity Report

During the year 2025, no gratuity reports were received by the UPG of BRK Syariah.

Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sebagai perwujudan tata kelola yang baik, secara proaktif dalam melawan penyuapan, Bank telah melakukan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Untuk tahap awal, Implementasi SMAP ISO 37001:2016 dilakukan pada proses kerja pada Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*. Sertifikat SNI ISO 37001:2016 telah diperoleh PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dari PT BSC Mutu Internasional pada tanggal 10 November 2024.

Sertifikasi yang telah diperoleh tersebut harus dilakukan audit *surveiilance* setiap tahun guna memperpanjang Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

Untuk Tahun 2025 telah dilaksanakan audit surveillance oleh PT TSI Sertifikasi Internasional, dan sertifikat SNI ISO 37001:2016 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah diperpanjang sampai dengan tanggal 10 November 2026.

ISO 37001:2016 Certification For Anti-Bribery Management System

As a manifestation of good corporate governance and a proactive stance against bribery, the Bank has implemented the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS). For the initial stage, the implementation of the ISO 37001:2016 ABMS was carried out in the work processes of the Internal Audit & Anti-Fraud Division. The SNI ISO 37001:2016 certificate was obtained by PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) from PT BSC Mutu Internasional on November 10, 2024.
The obtained certification requires an annual surveillance audit to extend the ISO 37001:2016 ABMS Certification.

For the year 2025, a surveillance audit was conducted by PT TSI Sertifikasi Internasional, and the SNI ISO 37001:2016 certificate of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) has been extended until November 10, 2026.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

MANAGEMENT OF THE STATE OFFICIALS' WEALTH REPORT (LHKPN)

Dasar Hukum

Sebagai Bank BUMD, BRK Syariah mendukung upaya pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan korupsi melalui pengelolaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme, yang mengatur bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat struktural lainnya di BRK Syariah termasuk ke dalam kategori "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" dan menjadi wajib laporan LHKPN.

Legal Basis

As a Regionally-Owned Enterprise (BUMD) Bank, BRK Syariah supports the efforts of the government and the Corruption Eradication Commission (KPK) in preventing corruption through the management of the State Officials' Wealth Report (LHKPN). This is in accordance with Law Number 28 of 1999 concerning State Officials Who Are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, which stipulates that every state official is obligated to report and publicly declare their Wealth before and after assuming office, as well as be willing to have their wealth examined before and after their tenure. The Board of Commissioners, Board of Directors, and other structural officials at BRK Syariah fall into the category of "other officials possessing strategic functions" and are mandatorily required to report their LHKPN.

Kewajiban pelaporan LHKPN diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Pedoman LHKPN

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 092B/KEPDIR/2021 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Direksi No. 104/KEPDIR/2020 tentang Kewajiban dalam Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Pengelolaan LHKPN menetapkan pejabat dan pegawai yang wajib menyampaikan LHKPN meliputi:

a. Dewan Komisaris.
b. Direksi.
c. Pemimpin Divisi/setingkat.
d. Pemimpin Bagian Kantor Pusat/setingkat.
e. Pemimpin Cabang/setingkat.
f. Pemimpin Cabang Pembantu/setingkat.
g. Pemimpin Kedai/Pemimpin Seksi/Staf.

Fungsi Kepatuhan LHKPN

Pejabat yang bertanggung jawab atas kepatuhan LHKPN di BRK Syariah adalah Pemimpin Divisi Kepatuhan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

a. Melakukan *monitoring* terhadap kepatuhan Wajib Lapor dalam pelaporan LHKPN.
b. Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab untuk menerbitkan surat/himbauan dan media lainnya terkait tingkat kepatuhan Wajib Lapor dalam memenuhi kewajiban LHKPN di BRK Syariah serta mengingatkan secara tertulis Wajib Lapor LHKPN yang belum melakukan pelaporan sesuai tenggat waktu yang ditentukan Bank.
c. Memberikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab untuk kemudian diajukan kepada Direktur yang membawahi bidang kepatuhan agar terhadap pegawai Wajib Lapor yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi.

The LHKPN reporting obligation is further regulated in KPK Regulation Number 07 of 2016 concerning the Procedures for the Registration, Announcement, and Examination of the State Officials' Wealth. Every State Official is required to report their wealth through the LHKPN form provided by the KPK, which must be filled out honestly, truthfully, and completely, so that the KPK can analyze, evaluate, and assess the total amount, type, and value of the reported Wealth accurately, swiftly, precisely, and responsibly.

LHKPN Guidelines

In accordance with the Board of Directors Decree No. 092B/KEPDIR/2021 regarding the First Amendment to the Board of Directors Decree No. 104/KEPDIR/2020 concerning the Obligation in the Submission of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) and the Management of LHKPN, it is stipulated that the officials and employees obligated to submit the LHKPN encompass:

a. The Board of Commissioners.
b. The Board of Directors.
c. Division Heads/equivalent.
d. Head Office Department Heads/equivalent.
e. Branch Managers/equivalent.
f. Sub-Branch Managers/equivalent.
g. Micro-Branch (Kedai) Managers/Section Heads/Staff.

LHKPN Compliance Function

The official responsible for LHKPN compliance at BRK Syariah is the Head of the Compliance Division, who holds the duties and responsibilities to:

a. Conduct monitoring of the compliance of Mandatory Reporters in submitting the LHKPN.
b. Coordinate with the Person in Charge to issue letters/appeals and utilize other media regarding the compliance level of Mandatory Reporters in fulfilling their LHKPN obligations at BRK Syariah, as well as to issue written reminders to LHKPN Mandatory Reporters who have not submitted their reports within the deadline determined by the Bank.
c. Provide recommendations to the Person in Charge, to be subsequently submitted to the Director overseeing the compliance sector, so that Mandatory Reporter employees who are non-compliant in submitting their LHKPN are subject to sanctions.

Pelaporan LHKPN

Selama tahun 2025, BRK Syariah telah mematuhi ketentuan pelaporan LHKPN sebagai berikut :

1. Dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaiaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode pelaporan tahun 2025 untuk posisi harta kekayaan 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025, Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan BRK Syariah telah menyampaikan laporan dimaksud melalui e-LHKPN dengan tenggat waktu penyampaian laporan.
2. Berdasarkan rekapitulasi penyampaian LHKPN oleh Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan BRK Syariah, sampai dengan tenggat waktu penyampaian LHKPN diperoleh persentase tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 97.89% (dari 619 Wajib Lapor, 606 telah menyampaikan LHKPN secara tepat waktu).

LHKPN Reporting

During the year 2025, BRK Syariah complied with the LHKPN reporting provisions as follows:

1. In order to fulfill the obligation of submitting the State Officials' Wealth Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK) for the 2025 reporting period, reflecting the wealth position from January 1, 2025, to December 31, 2025, the LHKPN Mandatory Reporters within BRK Syariah have submitted the aforementioned report via e-LHKPN within the report submission deadline.
2. Based on the recapitulation of LHKPN submissions by Mandatory Reporters within BRK Syariah, the compliance rate for LHKPN filing as of the submission deadline reached 97.89% (out of 619 Mandatory Reporters, 606 have submitted their LHKPN in a timely manner)

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI DAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

ANTI-MONEY LAUNDERING (AML), COUNTER-TERRORISM FINANCING (CTF), AND COUNTER-PROLIFERATION FINANCING OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION (CPF) PROGRAMS

Dalam implementasi APU, PPT dan PPPSPM ini, BRK Syariah mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Transaksi pencucian uang merupakan aktivitas yang terkait dengan menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pindah buku, transfer, pembayaran berupa sejumlah uang, termasuk di dalamnya hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Sedangkan Pendanaan terorisme merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk digunakan dan/atau diketahui akan digunakan bagi kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

In the implementation of these AML, CTF, and CPF programs, BRK Syariah refers to Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, as well as Law No. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Terrorism Financing. Money laundering transactions represent activities related to receiving the placement, deposit, withdrawal, book transfer, remittance, or payment in the form of a sum of money, including grants, donations, safekeeping, and/or the exchange of a sum of money, or other actions and/or activities associated with money. Meanwhile, terrorism financing constitutes any act of providing, collecting, giving, or lending funds, either directly or indirectly. The purpose of these activities is to be used and/or known to be used for terrorist activities, terrorist organizations, or terrorists.

BRK Syariah berkomitmen untuk melaksanakan Program APU, PPT & PPPSPM sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan serta SE OJK No. 32/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan. Hingga saat ini, kebijakan terkait dengan APU, PPT dan PPPSPM di BRK Syariah telah dijalankan dan akan terus dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan, khususnya yang terjadi di industri keuangan dan perbankan.

Kebijakan dan Prosedur

Implementasi atas Penerapan APU, PPT dan PPPSPM, Bank telah melakukan perubahan dan penerbitan terhadap kebijakan sebagai berikut :

a. Surat Edaran Nomor 075/SE/2025 tanggal 05 Desember 2025 Tentang Manual Kerja Penolakan Transaksi Nasabah/WIC/*Conductor* dan Penolakan Hubungan Usaha Calon Nasabah yang Masuk Daftar Pantauan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
b. Surat Edaran Nomor 078/SE/2025 tanggal 24 Desember 2025 Tentang Manual Kerja Pengkinian Data Nasabah Dengan Pendekatan Berdasarkan Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
c. Surat Edaran Nomor 080/SE/2025 tanggal 29 Desember 2025 Tentang Manual Produk Parameter Pemantauan Transaksi Keuangan Mencurigakan Aplikasi goAML BRK Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan serta prosedur terkait penerapan program APU, PPT & PPPSPM, sejalan dengan perkembangan produk dan jasa, maupun teknologi serta dikaitkan dengan perkembangan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang terjadi saat ini.
b. Direksi melaksanakan program APU, PPT & PPPSPM antara lain melalui penyampaian kewajiban pelaporan kepada PPATK, OJK dan instansi lainnya yang berwenang serta melalui koordinasi dengan bagian AML & CTF Divisi Kepatuhan (penanggung jawab penerapan program APU, PPT & PPPSPM di Bank), atas pelaksanaan penerapan program APU, PPT & PPPSPM di jaringan kantor Bank serta menyelenggarakan pelatihan khusus penerapan program APU, PPT & PPPSPM.

BRK Syariah is committed to executing the AML, CTF, & CPF Programs in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8 of 2023 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction Programs in the Financial Services Sector, as well as the Financial Services Authority Circular Letter (SE OJK) No. 32/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Programs in the Banking Sector. To date, policies related to AML, CTF, and CPF at BRK Syariah have been executed and will be continuously evaluated on a regular basis to ensure alignment with developments, particularly those occurring within the financial and banking industry.

Policies and Procedures

Regarding the implementation of AML, CTF, and CPF, the Bank has made amendments and issued the following policies:

a. Circular Letter Number 075/SE/2025 dated December 5, 2025, Concerning the Operating Manual for the Rejection of Transactions by Customers/Walk-in Customers (WIC)/Conductors and the Rejection of Business Relationships with Prospective Customers Included in the Watchlist of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
b. Circular Letter Number 078/SE/2025 dated December 24, 2025, Concerning the Operating Manual for Customer Data Updating Utilizing a Risk-Based Approach at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
c. Circular Letter Number 080/SE/2025 dated December 29, 2025, Concerning the Product Manual for Suspicious Financial Transaction Monitoring Parameters within the goAML Application of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Active Oversight by the Board of Commissioners and Board of Directors

a. The Board of Directors formulates and establishes policies and procedures related to the implementation of the AML, CTF, & CPF programs, aligning with developments in products, services, and technology, as well as correlating with current trends in money laundering and/or terrorism financing modus operandi.
b. The Board of Directors executes the AML, CTF, & CPF programs through, among other actions, fulfilling reporting obligations to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), the Financial Services Authority (OJK), and other authorized agencies; coordinating with the AML & CTF Department of the Compliance Division (the party responsible for the program's implementation at the Bank) regarding the execution of the AML, CTF, & CPF programs across the Bank's office network; and organizing specialized training for the program's implementation.

c. Direksi telah membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas penerapan program APU, PPT & PPPSPM yaitu Bagian AML & CTF (Bagian *Anti Money Loundering & Counter Terrorism Financing*) yang berada di Divisi Kepatuhan di bawah Direktorat Kepatuhan & Manajemen Risiko. Uraian detil terkait struktur organisasi pengelola dan profil ringkas Kepala Divisi Kepatuhan diuraikan pada bagian Fungsi Kepatuhan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
d. Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas implementasi program APU, PPT & PPPSPM yang dijalankan oleh Direksi, dengan membahas agenda program APU, PPT & PPPSPM dalam rapat maupun melalui pelaporan terkait APU, PPT & PPPSPM yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Program APU, PPT & PPPSPM Tahun 2025

Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan Program APU, PPT & PPPSPM, BRK Syariah telah menerapkan program sebagai berikut, sebagai berikut:

A. Implementasi 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defense*)
B. Bank telah menyampaikan laporan yang diwajibkan kepada PPATK periode Januari s.d. Desember 2025 :
   1). Laporan Transaksi Keuangan Tunai : 1.652
   2). Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan : 14
   3). Laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri : 91
   4). Laporan SIPESAT, dengan jumlah CIF Baru yang disampaikan sebagai berikut:
      - Pelaporan TW 1 sebanyak : 25.584 CIF
      - Pelaporan TW II sebanyak : 19.852 CIF
      - Pelaporan TW III sebanyak : 28.540 CIF
      - Pelaporan TW IV sebanyak : 27.613 CIF
   5). Jumlah Laporan SIPENDAR, terdiri:

c. The Board of Directors has established a dedicated work unit responsible for the implementation of the AML, CTF, & CPF programs, namely the AML & CTF (Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing) Department, situated within the Compliance Division under the Compliance & Risk Management Directorate. A detailed description of the management's organizational structure and a brief profile of the Head of the Compliance Division are outlined in the Compliance Function section within the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.
d. The Board of Commissioners exercises active oversight over the implementation of the AML, CTF, & CPF programs executed by the Board of Directors by discussing program agendas in meetings and through related reports submitted to the Board of Commissioners.

Implementation of the AML, CTF, & CPF Programs in 2025

To fulfill the execution of the AML, CTF, & CPF Programs, BRK Syariah has implemented the following measures:

A. Implementation of the three lines of defense.

B. The Bank has submitted the mandatory reports to the PPATK for the period of January to December 2025:
   1). Cash Financial Transaction Reports : 1,652
   2). Suspicious Financial Transaction Reports : 14
   3). Inbound and Outbound Overseas Cross-Border Fund Transfer Reports : 91
   4). SIPESAT Reports, with the number of New CIFs submitted as follows:
      - Q1 Reporting: 25,584 CIFs
      - Q2 Reporting: 19,852 CIFs
      - Q3 Reporting: 28,540 CIFs
      - Q4 Reporting: 27,613 CIFs
   5). Total SIPENDAR Reports, comprising:

No	Jenis Laporan Type of Report	*Watchlist* Januari 2025 Watchlist January2025	*Watchlist* April 2025 Watchlist April 2025	*Watchlist* Juli 2025 Watchlist July 2025	*Watchlist* Oktober 2025 Watchlist October 2025	Permintaan Request
1	*ProaktifWatchlist*	23	23	22	15	-
2	Pengayaan Enhancement	-	-	-	-	0

C. Identifikasi dan *Verifikasi Walk In Customer* (WIC)
   1). Total Jumlah WIC s.d. 31 Desember 2025 sebanyak 39.602.
   2). Jumlah Transaksi WIC yang memenuhi parameter sebagai Transaksi Keuangan Tunai yang dilaporkan kepada PPATK sebanyak 122 laporan, yang terdiri dari:
      - 32 Laporan Transaksi Keungan Tunai berdasarkan Identifikasi rekening Nasabah dari transaksi WIC
      - 7 Laporan Transaksi Keungan Tunai berdasarkan Identifikasi pelaku transaksi WIC.

D. Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*)
   1). Daftar Nasabah berisiko tinggi kategori *Politically Exposed Person* (PEP) dikelola Bank dengan baik, mencakup PEP dan Pihak Terkait PEP yang terdaftar sebagai Nasabah Bank serta PEP dan Pihat Terkait PEP sebanyak 5.708 Nasabah dengan rincian sebagai berikut:
      - Nasabah PEP : 5.380
      - Pihak terkait PEP : 328
   2). Pengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risikonya :
      - Nasabah berisiko rendah : 1.086.601 Nasabah
      - Nasabah berisiko sedang : 404.928 Nasabah
      - Nasabah berisiko tinggi : 31.112 Nasabah

E. Bank telah mengikuti penilaian *Financial Integrity Ratting on Money and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) yang diselenggarakan oleh PPATK dan memperoleh penilaian Baik dengan penilaian sebagai berikut:

C. Identification and Verification of Walk-In Customers (WIC)
   1). Total WICs as of December 31, 2025, amounted to 39,602.
   2). The number of WIC Transactions meeting the parameters for Cash Financial Transactions reported to the PPATK amounted to 122 reports, consisting of:
      - 32 Cash Financial Transaction Reports based on the identification of Customer accounts from WIC transactions.
      - 7 Cash Financial Transaction Reports based on the identification of the individuals conducting the WIC transactions.

D. Application of the Risk-Based Approach in AML, CTF, & CPF Programs
   1). The list of high-risk customers categorized as Politically Exposed Persons (PEPs) is well-managed by the Bank, encompassing PEPs and PEP-Related Parties registered as Bank Customers. The total number of PEPs and PEP-Related Parties is 5,708 Customers, with the following details:
      - PEP Customers : 5,380
      - PEP-Related Parties: 328
   2). Categorization of Customers based on risk levels:
      - Low-risk Customers: 1,086,601 Customers
      - Medium-risk Customers: 404,928 Customers
      - High-risk Customers: 31,112 Customers

E. The Bank participated in the Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) assessment conducted by the PPATK and achieved a "Good" rating with the following assessment scores:

Kategori Penilaian	**Nilai FIR Nasional** National FIR Score	**Nilai FIR PJK Bank** FIR Score of Bank PJK	**Nilai FIR KBMI1** FIR Score of KBMI 1	**Nilai FIR PT. BRKS** FIR Score of PT. BRKS	Assessment Category
Dimensi 1	8,14	9,24	9,29	9,56	Dimension 1
Dimensi 2	8,56	9,59	9,68	9,75	Dimension 2
Dimensi 3	8,18	8,55	8,64	9,34	Dimension 3
Skor (Kategori)	8,03 (Sangat Baik)	8,83 (Sangat Baik)	8,96 (Sangat Baik)	9,46 (Sangat Baik)	Score (Category)

F. Pengkinian dan pemantauan :
   a. Pengkinian data Nasabah dilakukan secara berkelanjutan oleh Kantor Bank. Realisasi Rencana Pengkinian Data Nasabah tahun 2025 per 31 Desember 2025 secara konsolidasi mencapai 99.14 % atau sebanyak 162.747 dari 164.160 CIF yang menjadi target pengkinian Tahun 2025.
   b. Pemantauan terhadap Calon Nasabah dan Nasabah yang memiliki kemiripan data dengan data pada Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dilakukan sebelum Bank melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan pada saat diterimanya DTTOT dari pihak otoritas yang berwenang.

F. Updating and Monitoring:
   a. The updating of Customer data is carried out continuously by Bank Offices. The realization of the Customer Data Updating Plan for 2025 as of December 31, 2025, on a consolidated basis, reached 99.14%, or 162,747 out of the 164,160 CIFs targeted for updates in 2025.
   b. Monitoring of Prospective Customers and Customers whose data bear similarities to data on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the List of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction is conducted before the Bank establishes a business relationship with the Prospective Customer and upon receipt of the DTTOT from the competent authorities.

c. Update data Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) pada *Core Banking System* telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

c. Updates to the data regarding the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the List of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (DPPSPM) on the Core Banking System have been performed with the following details:

DTTOT	JUMLAH Total	DPPSPM	JUMLAH Total
Individual	415	Individual	80
Korporasi	119	Korporasi	-

d. Pemantauan terhadap Nasabah wajib pajak dan/atau penanggung pajak dilakukan melalui pemberian informasi/data Nasabah sebagaimana data permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan Republik Indonesia periode Januari s.d Desember 2025 sebanyak 99 Surat Permintaan Informasi Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak dengan jumlah Wajib Pajak / Penanggung Pajak sebanyak 879.

e.. Pemantauan terhadap Nasabah yang diduga Korupsi dari permintaan KPK melalui Aplikasi PEDAL KPK Periode Januari s.d Desember 2025 terdapat 2 Surat Permintaan yang didalamnya mencakup 5 Nama permintaan informasi nasabah, dari data tersebut terdapat 1 (satu) nasabah yang telah diverifikasi dari kesesuaian Nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir dan Alamat pada database Bank, namun terdapat 4 (empat) nama bukan merupakan nasabah Bank dan telah disampaikan ke KPK melalui Aplikasi PEDAL KPK sesuai ketentuan berlaku.

G. Analisa Transaksi *Know Your Customer* Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terindikasi sesuai parameter yang ditetapkan pada Aplikasi goAML BRK Syariah telah dilakukan analisa sesuai ketentuan BPP APU, PPT dan PPSPM PT Bank Riau Kepri Syariah dimana secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut :

d. Monitoring of Customers who are taxpayers and/or tax bearers is conducted by providing Customer information/data as requested by the Directorate General of Taxes - Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. For the period of January to December 2025, there were 99 Letters of Request for Information regarding Taxpayers and/or Tax Bearers, involving a total of 879 Taxpayers/Tax Bearers.

e. Monitoring of Customers suspected of corruption based on requests from the KPK through the KPK PEDAL Application for the period of January to December 2025 yielded 2 Letters of Request encompassing 5 names for customer information requests. From this data, 1 (one) customer was verified to have matching Name, NIK (National Identity Number), Place and Date of Birth, and Address within the Bank's database. However, 4 (four) names were not Bank customers, and this information was conveyed to the KPK via the KPK PEDAL Application in accordance with applicable regulations.

G. The analysis of Know Your Customer Suspicious Financial Transactions indicated by parameters set within the BRK Syariah goAML Application has been conducted in accordance with the provisions of the PT Bank Riau Kepri Syariah AML, CTF, and CPF Company Manual, detailed in the following table:

Total Data Di Analisa Total Data Analyzed	Jumlah Total	Data Belum di Analisa Data Not Analyzed	Data Telah di Analisa Data Analyzed	Transaksi Dikecualikan Exempt Transactions	Proses EDD EDD Process	Persentase Percentage
TW I	28.126	-	28.040	57	29	99,89%
TW II	23.707	-	23.601	59	47	99,80%
TW III	16.792	-	16.487	44	261	98,44%
TW IV	19.618	-	19.343	35	240	98,77%
Total	88.243	-	87.467	199	577	99,34%

H. Pelatihan dan Sertifikasi APU, PPT & PPPSPM

Peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan program APU, PPT & PPPSPM dilakukan antara lain melalui pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU, PPT & PPPSPM dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK & pihak otoritas lainnya. Pada periode Januari s.d Desember 2025 kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan pengetahuan bagi pegawai terkait penerapan APU, PPT & PPPSPM, sebagai berikut:

1. ***Public Training* Penyusunan *Individu Risk Assessment* (IRA) dalam rangka Penerapan Program APU PTT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) sejalan dengan POJK No 8 Tahun 2023.**

   Hari/Tanggal : Kamis-Jum'at / 23-24 Januari 2025
   Tempat : Hotel Oria Jakarta
   Waktu : 08.00 WIB s.d selesai
   Peserta :
   1. Helwin Yunus (Direktur Pembiayaan)
   2. Khairul Fahmi (Staf Bagian AML & CTF)

2. ***Public Training* "Penyusunan *Individual Risk Assesment* (IRA) dalam rangka Penguatan Integritas Keuangan APU, PPT & PPPSPM)".**

   Hari/Tanggal : Kamis-Sabtu/30 Januari s.d. 1 Februari 2025
   Tempat : Hyat Regency Yogyakarta
   Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
   Peserta :
   1. T.M. Fadhly Kholis (Pemimpin Bagian AML & CTF)
   2. Hadi Sasmita (Staf Bagian AML & CTF)
   3. Lila Zullina (Pelaksana Bagian AML & CTF)

3. **Pelatihan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSPM)**

   a. **Wilayah Daratan**

      Hari/Tanggal : Jum'at-Sabtu / 16-17 Mei 2025
      Tempat : Menara Dang Merdu BRKS Syariah
      Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
      Peserta : Supervisor Layanan dan Customer Service

   b. **Wilayah Kepulauan**

      Hari/Tanggal : Jum'at-Sabtu / 23-24 Mei 2025
      Tempat : Hotel iBaloi Batam
      Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
      Peserta : Supervisor Layanan dan Customer Service

H. AML, CTF, & CPF Training and Certification

The enhancement of human resources in implementing the AML, CTF, & CPF programs is achieved through, among other methods, periodic training provided to all employees, especially new employees, front-line employees dealing directly with Customers, employees overseeing the program's implementation, and employees involved in preparing reports for the PPATK and other authorities. During the period from January to December 2025, the activities conducted to develop employee knowledge regarding the implementation of AML, CTF, & CPF are as follows:

1. **Public Training on the Preparation of Individual Risk Assessment (IRA) in the Context of the Risk-Based Approach Application for AML & CTF Programs in alignment with POJK No. 8 of 2023.**

   Day/Date : Thursday - Friday / January 23-24, 2025
   Venue : Hotel Oria Jakarta
   Time : 08:00 WIB to finish
   Participants :
   1. Helwin Yunus (Financing Director)
   2. Khairul Fahmi (AML & CTF Department Staff)

2. **Public Training "Preparation of Individual Risk Assessment (IRA) in the Context of Strengthening AML, CTF, & CPF Financial Integrity."**

   Day/Date : Thursday - Saturday / January 30 to February 1, 2025
   Venue : Hyatt Regency Yogyakarta
   Time : 08:00 WIB to finish
   Participants :
   1. T.M. Fadhly Kholis (Head of AML & CTF Department)
   2. Hadi Sasmita (AML & CTF Department Staff)
   3. Lila Zullina (AML & CTF Department Executive)

3. **Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML-CTF and CPF) Training.**

   a. **Mainland Region**

      Day/Date : Friday - Saturday / May 16-17, 2025
      Venue : Menara Dang Merdu BRKS Syariah
      Time : 08:00 WIB to finish
      Participants : Service Supervisors and Customer Service

   b. **Archipelagic Region**

      Day/Date : Friday - Saturday / May 23-24, 2025
      Venue : Hotel iBaloi Batam
      Time : 08:00 WIB to finish
      Participants : Service Supervisors and Customer Service

4. ***Workshop* Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Identifikasi Tindak Pidana Asal**
   Hari/Tanggal : Rabu – Kamis / 09 Juli 2025 sd 10 Juli 2025
   Tempat : Lantai 5 Menara Dang Merdu PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
   Waktu : Pukul 07.30 WIB s.d. Selesai
   Peserta : 1. Herry Sutadi Sanusi (Pemimpin Bagian AML & CTF)
   2. Khairul Fahmi (Staf AML & CTF)

5. ***Workshop* program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa**
   Hari/Tanggal : Kamis – Jum'at / 31 Juli 2025 sd 01 Agustus 2025
   Tempat : Jakarta
   Waktu : Pukul 08.00 WIB sd Selesai
   Peserta :1. Azhar Efendi (Pemimpin Divisi)
   2. Herry Sutadi Sanusi (Pemimpin Bagian AML & CTF)
   3. Dwi Kresna Riyadi (Staf AML & CTF)

6. ***Workshop* Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Identifikasi Tindak Pidana Asal**
   Hari/Tanggal : Rabu – Kamis / 17 September 2025 s.d. 18 September 2025
   Tempat : Hari/Tanggal : Rabu – Kamis / 17 September 2025 s.d. 18 September 2025
   Waktu : Pukul 07.30 WIB s.d. Selesai
   Peserta : 1. Erifah (Staf AML & CTF)
   2. Dwi Kresna Riyadi (Staf AML & CTF)

7. ***Workshop Trade Based Money Laundring* Risiko, Tipologi, dan Deteksi**
   Hari/Tanggal : Kamis / 27 November 2025
   Tempat : Lantai 5 Menara Dang Merdu PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan di unit Kantor Masing-masing
   Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. Selesai

4. **Workshop on Suspicious Financial Transactions and the Determination of Predicate Crime Identification.**
   Day/Date : Wednesday - Thursday / July 9-10, 2025
   Venue : 5th Floor Menara Dang Merdu PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
   Time : 07:30 WIB to finish
   Participants : 1. Herry Sutadi Sanusi (Head of AML & CTF Department)
   2. Khairul Fahmi (AML & CTF Staff)

5. **Workshop on Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML-CTF and CPF) Programs in the Financial Services Sector.**
   Day/Date : Thursday - Friday / July 31 to August 1, 2025
   Venue : Jakarta
   Time : 08:00 WIB to finish
   Participants : 1. Azhar Efendi (Division Head)
   2. Herry Sutadi Sanusi (Head of AML & CTF Department)
   3. Dwi Kresna Riyadi (AML & CTF Staff)

6. **Workshop on Suspicious Financial Transactions and the Determination of Predicate Crime Identification.**
   Day/Date : Wednesday - Thursday / September 17-18, 2025
   Venue : Day/Date: Wednesday - Thursday / September 17-18, 2025
   Time : 07:30 WIB to finish
   Participants: 1. Erifah (AML & CTF Staff)
   2. Dwi Kresna Riyadi (AML & CTF Staff)

7. **Workshop on Trade-Based Money Laundering Risks, Typologies, and Detection.**
   Day/Date : Thursday / November 27, 2025
   Venue :5th Floor Menara Dang Merdu PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) and at respective Office units
   Time : 08:00 WIB to finish

Peserta : 1. Lila Zulina (Pelaksana AML & CTF Divisi Kepatuhan)
2. Rikha Handayani (Pelaksana AML & CTF Divisi Kepatuhan)
3. Lita Wuryani (Anggota Tim Anti *Fraud*)
4. Dirga Bakti Prawira (Anggota Tim Anti *Fraud*)
5. Muhammad Naufal Adly (BRKS Tanjungpinang Pamedan)
6. Bella Monisa (*Teller* BRKS Bangkinang)
7. Dimas Aditya Ferdian (*Customer Service* BRKS Rohil Kubu)

8. Melaksanakan *monitoring* dan sosialiasi beberapa unit kantor periode Oktober s.d. November 2025, sebagai upaya untuk peningkatan dan perbaikan nilai kontrol Risiko pada unit kantor yang berada di wilayah Kabupaten Meranti, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna. Penetapan unit kantor dimaksud berdasarkan hasil penyusunan *Individual Risk Assessment* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) TPPU/TPPT/PPSPM tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran risiko bawaan dan risiko risidual, dengan data sebagai berikut :

Participants: 1. Lila Zulina Compliance Division AML & CTF Executive)
2. Rikha Handayani (Compliance Division AML & CTF Executive)
3. Lita Wuryani (Anti-Fraud Team Member)
4. Dirga Bakti Prawira (Anti-Fraud Team Member) 5. Muhammad Naufal Adly (BRKS Tanjungpinang Pamedan)
6. Bella Monisa (Teller BRKS Bangkinang)
7. Dimas Aditya Ferdian (Customer Service BRKS Rohil Kubu)

8. Conducting monitoring and socialization across several office units during the October to November 2025 period, as an effort to enhance and improve the Risk control scores at office units located in the Meranti Regency, Batam City, Tanjung Pinang City, Bintan Regency, and Natuna Regency regions. The designation of these office units is based on the results of the Individual Risk Assessment of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for ML/TF/CPF in 2025, derived from inherent and residual risk measurements, with the following data:

No	Uraian Description	Waktu Time	Tempat Venue	Peserta Participants
1	Sosialisasi APU PPT dan PPSPM AML, CTF, and CPF Socialization	Tanggal 14 Agustus 2025 August 14, 2025	Lt.5 Menara Dang Merdu PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 5th Floor Menara Dang Merdu PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	*Teller, Customer Service, Account Officer* dan *Funding Officer* berjumlah 34 orang Tellers, Customer Service, Account Officers, and Funding Officers totaling 34 personnel
2	Melaksanakan *monitoring* dan Sosialiasi APU PPT dan PPSPM Conducting monitoring and AML, CTF, & CPF Socialization	Tanggal 11 Oktober 2025 October 11, 2025	Wilayah Kota Batam Batam City Region	Pemimpin Bagian Operasional, Pemimpin Cabang Pembantu, Supervisor Layanan, *Team Leader* Dana, *Head Teller, Teller, Customer Service*, Supervisor Operasional, *Account Officer, Funding Officer* dan Satpam berjumlah 51 orang Head of Operations Department, Sub-Branch Managers, Service Supervisors, Fund Team Leaders, Head Tellers, Tellers, Customer Service, Operations Supervisors, Account Officers, Funding Officers, and Security Guards totaling 51 personnel
		Tanggal 17 Oktober 2025 October 17, 2025	Wilayah Kabupaten Kota Tanjungpinang Tanjungpinang City / Regency Region	*Team Leader* Dana, *Head Teller, Teller, Customer Service, Account Officer, Funding Officer*, Satpam berjumlah 37 orang Fund Team Leaders, Head Tellers, Tellers, Customer Service, Account Officers, Funding Officers, and Security Guards totaling 37 personnel
		Tanggal 23 Oktober 2025 October 23, 2025	Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Kepulauan Meranti Regency Region	Pemimpin Bagian Operasional, Pemimpin Kedai, Supervisor Layanan, , *Team Leader* Dana, , *Teller, Customer Service*, Supervisor Operasional (Kedai), Umum & Akt, *Account Officer, Funding Officer*, Adm Pembiayaan Satpam berjumlah 33 orang Head of Operations Department, Micro-Branch (Kedai) Managers, Service Supervisors, Fund Team Leaders, Tellers, Customer Service, Operations Supervisors (Micro-Branch), General & Accounting, Account Officers, Funding Officers, Financing Administration, and Security Guards totaling 33 personnel
		Tanggal 27 Oktober 2025 October 27, 2025	Wilayah Kota Dumai Dumai City Region	Supervisor Layanan, *Teller, Customer Service, Funding Officer*, Satpam berjumlah 43 orang Service Supervisors, Tellers, Customer Service, Funding Officers, and Security Guards totaling 43 personnel
		Tanggal 4 November 2025 November 4, 2025	Wilayah Kabupaten Natuna Natuna Regency Region	*Branch Manager*, Pemimpin Bagian Operasional, Auditor Wilayah, Pemimpin Kedai, Supervisor Layanan, *Team Leader* Dana, *Team Leader* Pembiayaan, *Head Teller*, Supervisor Operasional, *Support Assistance,Teller, Customer Service*, Umum & Akt, *Account Officer, Funding Officer*, Admin Pembiayaan Komersial, Rahn, Penagihan Pembiayaan, Satpam berjumlah 60 orang Branch Managers, Head of Operations Department, Regional Auditors, Micro-Branch (Kedai) Managers, Service Supervisors, Fund Team Leaders, Financing Team Leaders, Head Tellers, Operations Supervisors, Support Assistants, Tellers, Customer Service, General & Accounting, Account Officers, Funding Officers, Commercial Financing Administration, Rahn (Pawn), Financing Collection, and Security Guards totaling 60 personnel

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

"BRK Syariah berkomitmen kuat dalam mencegah korupsi dan gratifikasi melalui penerapan berbagai kebijakan integritas dan kepatuhan di seluruh lini organisasi."

"BRK Syariah is strongly committed to preventing corruption and gratuities through the implementation of various integrity and compliance policies across all organizational lines."

Prosedur dan Program

BRK Syariah berkomitmen mengedepankan praktek tata kelola perusahaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan mendukung sepenuhnya penegakan kebijakan anti korupsi. Untuk itulah, BRK Syariah tegas melarang adanya praktek korupsi maupun gratifikasi di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi Bank. Komitmen tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan seperti Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Pedoman Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*), Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), Kebijakan Bank terkait Penerapan Anti-*Fraud* maupun Kode Etik dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan.

BRK Syariah memastikan setiap kegiatan bisnis dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menjadi aspek pengawasan Dewan Komisaris. Disamping itu, BRK Syariah berkomitmen menghindari adanya *conflict of interest*, penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran prinsip integritas yang akan merugikan kepentingan Bank. Menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan seperti nasabah, rekanan, regulator dan mitra bisnis dengan memperhatikan etika dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menjurus pada tindakan gratifikasi maupun korupsi. Setiap adanya pelanggaran akan dilaporkan kepada pihak terkait sesuai kebijakan Bank dan hukum yang berlaku.

Sebagai implementasi penerapan anti korupsi pada seluruh jenjang organisasi, pada tahun 2025 seluruh pejabat dan pegawai BRK Syariah telah melaksanakan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan dan Pernyataan Penanganan Benturan Kepentingan yang dilaksanakan secara serentak pada unit kerja masing-masing.

Selain itu, sebagai wujud komitmen dalam penegakan integritas khususnya dalam penegakan budaya anti korupsi, BRK Syariah juga telah mengikutsertakan 1 (satu) orang pegawainya dalam pelaksanaan Pelatihan Anti Korupsi bagi BUMD Klaster Bank Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) .

Procedures and Programs

BRK Syariah is committed to prioritizing corporate governance practices that align with Sharia principles and fully supports the enforcement of anti-corruption policies. Therefore, BRK Syariah strictly prohibits any practices of corruption and gratuities at all levels and tiers of the Bank's organization. This commitment is manifested in various policies such as the Gratuity Control Guidelines, Guidelines for the Whistleblowing System, Compliance Code of Conduct, Conflict of Interest Guidelines, Bank Policies regarding Anti-Fraud Implementation, as well as the Code of Ethics and Corporate Cultural Values.

BRK Syariah ensures that every business activity is conducted in compliance with applicable laws and regulations, which also constitutes an aspect of the Board of Commissioners' oversight. Furthermore, BRK Syariah is committed to avoiding conflicts of interest, abuse of office, and violations of integrity principles that would be detrimental to the Bank's interests. It maintains good cooperative relationships with stakeholders such as customers, associates, regulators, and business partners by observing ethics and refraining from actions that lead to gratuities or corruption. Any violation will be reported to the relevant authorities in accordance with Bank policies and applicable laws.

As an implementation of anti-corruption enforcement across all organizational levels, in 2025, all BRK Syariah officials and employees executed the signing of the Statement of Compliance and the Statement of Conflict of Interest Management, which was carried out simultaneously at their respective work units.

Furthermore, as a testament to its commitment to upholding integrity, particularly in enforcing an anti-corruption culture, BRK Syariah has also enrolled 1 (one) of its employees to participate in the 2025 Anti-Corruption Training for Regionally-Owned Enterprises (BUMD) within the Regional Bank Cluster, organized by the Corruption Eradication Commission (KPK).

Pelatihan dan Sosialisasi Anti Korupsi

Untuk meningkatkan *awareness* segenap Insan BRK Syariah dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah, maka Bank secara berkala melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh Pegawai Bank dengan melakukan sosiallisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Kode Etik Kepatuhan kepada pegawai baru maupun pegawai *existing* baik melalui kunjungan ke jaringan kantor Bank maupun, *in house training*, maupun melalui media komunikasi *online*.

Anti-Corruption Training and Socialization

To enhance the awareness of all BRK Syariah personnel in supporting the corruption prevention and eradication programs initiated by the government, the Bank periodically conducts socialization and training for all Bank Employees. This is achieved by socializing the Gratuity Control Guidelines and Compliance Code of Conduct to new and existing employees through visits to the Bank's office network, in-house training, as well as online communication media.

RENCANA STRATEGIS BANK
BANK STRATEGIC PLAN

"BRK Syariah melaksanakan perencanaan korporasi berdasarkan dokumen Rencana Korporasi (Corporate Plan),, RBB, dan RKAT sebagai pedoman strategis dan operasional Bank".

"BRK Syariah carries out corporate planning based on the Corporate Plan, RBB, and RKAT documents as strategic and operational guidelines for the Bank."

Dengan status sebagai Bank Umum Syariah, penyusunan rencana strategis BRK Syariah berdasarkan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Rencana Korporasi BRK Syariah disusun dalam dokumen Rencana Korporasi (Corporate Plan) yang menjadi perencanaan bisnis dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun, sedangkan Rencana Bisnis disusun dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan jangka waktu 3 tahun. Pelaksanaan Rencana Korporasi dan RBB secara tahunan dilakukan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

As a Sharia Commercial Bank, BRK Syariah's strategic plan is based on OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2021 dated April 30, 2021, concerning the Business Plans of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. BRK Syariah's Corporate Plan is prepared in a Corporate Plan document, which serves as a business plan with a term of up to 5 (five) years. The Business Plan is prepared in the form of a Bank Business Plan (RBB) with a term of 3 years. The annual implementation of the Corporate Plan and RBB is carried out through the Annual Work Plan and Budget (RKAT).

Untuk mengetahui kemajuan pencapaian Rencana Bisnis yang telah disusun, BRK Syariah telah melakukan antara lain:

- Melakukan *monitoring* progress dan pencapaian target anggaran inisiatif strategis.
- Melakukan pembinaan kepada seluruh unit kerja terkait pencapaian kinerja.
- Evaluasi kinerja Bank secara bulanan maupun triwulanan pada seluruh unit kerja.
- Penyusunan Laporan Realisasi RBB, antara lain memuat keterangan sebagai berikut:

To monitor the progress of achieving the formulated Business Plan, BRK Syariah has conducted, among other things:

- Monitoring the progress and achievement of the strategic initiative budget targets.
- Providing guidance to all work units regarding performance achievement.
- Conducting monthly and quarterly Bank performance evaluations across all work units.
- Preparing the RBB Realization Report, which includes, among others, the following information:

1. Penjelasan mengenai pencapaian rencana bisnis meliputi fokus dan prioritas pencapaian serta perbandingan antara rencana dan realisasinya di antaranya realisasi rasio-rasio keuangan utama (DPK, pembiayaan, laba, NPF); realisasi rasio pembiayaan kepada sektor UMKM; realisasi dana pendidikan dan pelatihan; realiasi pengembangan sistem informasi dan manajemen; realisasi pengembangan produk dan aktivitas baru; dan realisasi pengembangan jaringan kantor.
2. Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana bisnis seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.
3. Tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi rencana bisnis

1. An explanation regarding the achievement of the business plan, encompassing the focus and priorities of achievement, as well as a comparison between the plan and its realization; these include the realization of key financial ratios (Third-Party Funds/DPK, financing, profit, Non-Performing Financing/NPF); the realization of the financing ratio to the MSME sector; the realization of education and training funds; the realization of information and management systems development; the realization of new product and activity development; and the realization of office network development.
2. An explanation regarding deviations from the business plan realization, such as the causes and the obstacles encountered.
3. Follow-up actions or efforts that will be undertaken to improve the achievement of the business plan realization.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

BRK Syariah menempatkan transparansi dan kemudahan akses informasi sebagai fokus dalam memperkuat praktik tata kelola perusahaan yang baik. Melalui berbagai saluran komunikasi yang terbuka dan mudah diakses, BRK Syariah menyampaikan informasi secara tepat waktu, akurat, dan relevan kepada regulator, pemegang saham, nasabah, pegawai, mitra kerja, serta masyarakat luas sebagai wujud implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

Sarana komunikasi BRK Syariah antara lain adalah :

Website BRK Syariah

Berbagai informasi terkait produk dan layanan bank, serta berbagai informasi BRK Syariah mudah diakses dan dapat diunggah dalam *website* BRK Syariah https://www.brksyariah.co.id/. Uraian lebih detil terkait konten *website* telah diungkapkan pada bagian Informasi *Website* Perusahaan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Media sosial BRK Syariah

Media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, BRK Syariah juga hadir untuk menyampaikan informasi terkait pemutakhiran produk dan jasa Bank, edukasi maupun promo dalam berbagai *platform* media sosial yang meliputi:

BRK Syariah prioritizes transparency and ease of access to information as a focal point in strengthening Good Corporate Governance (GCG) practices. Through various open and accessible communication channels, BRK Syariah delivers timely, accurate, and relevant information to regulators, shareholders, customers, employees, business partners, and the general public as a manifestation of the implementation of transparency and accountability principles to stakeholders.

BRK Syariah's communication channels include:

BRK Syariah Website

Various information related to the Bank's products and services, as well as general BRK Syariah information, is easily accessible and can be downloaded from the BRK Syariah website at https://www.brksyariah.co.id/. A more detailed description regarding the website content is disclosed in the Corporate Website Information section under the Corporate Profile Chapter of this Annual Report.

BRK Syariah Social Media

Social media has become an inseparable part of daily life. Therefore, BRK Syariah is also present to convey information related to the Bank's product and service updates, education, and promotions across various social media platforms, including:

08117575470
BRK Syariah
brksyariahid
bank_brksyariah
BRK Syariah
brksyariahid

08117575470
BRK Syariah
brksyariahid
bank_brksyariah
BRK Syariah
brksyariahid

Sarana Komunikasi Pemangku Kepentingan *(Stakeholders)*

Interaksi dengan segenap pemangku kepentingan seperti regulator, media, mitra bisnis, komunitas masyarakat maupun pemegang saham dilakukan dengan proses formal serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari pemangku kepentingan yang terlibat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Stakeholder Communication Channels

Interaction with all stakeholders, such as regulators, media, business partners, community groups, and shareholders, is conducted through an organized process.

No	Pemangku Kepentingan Stakeholders	Kepentingan Stakeholders	Sarana Komunikasi Means of Communication
1	Nasabah Customer	– Informasi mengenai produk dan Layanan Bank - Information on Bank Products and Services	Media Sosial, Email, Whatshap
2	Regulator Regulator	– Aspek kepatuhan, prinsip kehati-hatian dan tata kelola - Compliance aspects, prudent banking principles, and governance	Email, Whatshap
3	Pemegang Saham Shareholders	– Kinerja keuangan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian - Financial performance and implementation of prudent banking principles	*Website*, Email, Telepon Kantor
4	Mitra Bisnis/Pemasok/ Vendor Business Partners/Suppliers/Vendors	– Informasi pengadaan barang dan/jasa – Masukan dan saran - Procurement of goods and/or services information - Feedback and suggestions	Telepon Kantor, *Website*
5	Media, Kelompok Kepentingan dan Masyarakat Umum Media, Interest Groups and General Public	– Informasi mengenai produk dan Layanan Bank – Kinerja keuangan - Information regarding Bank Products and Services - Financial performance	Media Sosial, *Website*, Whatshap

Komunikasi Internal

Komunikasi internal di BRK Syariah dilakukan melalui berbagai saluran dan media, antara lain email, kontak person dan aplikasi whatshap. Pegawai BRK Syariah dapat mengakses informasi melalui komputer kerja setiap Pegawai, laptop dan perangkat elektronik lainnya yang merupakan fasilitas perusahaan.

Internal Communication

Internal communication at BRK Syariah is conducted through various channels and media, including email, contact persons, and the WhatsApp application. BRK Syariah employees can access information through each employee's workstation computer, laptop, and other electronic devices provided as corporate facilities.

Siaran Pers

Dalam rangka menjalin komunikasi yang efektif dengan media massa, BRK Syariah menjalankan beragam aktivitas, termasuk menerbitkan siaran pers. Di sepanjang tahun 2025, BRK Syariah telah mengeluarkan 405 siaran pers kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, media massa berperan penting dalam penyebarluasan informasi mengenai perjalanan, perkembangan, maupun pencapaian BRK Syariah.

Press Releases

In order to establish effective communication with the mass media, BRK Syariah carries out various activities, including issuing press releases. Throughout 2025, BRK Syariah has issued 405 press releases to the general public. Through this activity, mass media plays a vital role in disseminating information regarding the journey, developments, and achievements of BRK Syariah.

No	Tema Siaran Pers	Jumlah Siaran Pers Number of Press Releases	Press Release Theme
1	Perusahaan	301	Company
2	Produk dan Layanan Bank	49	Bank Products and Services
3	*Branding* dan *sponsorship*	8	Branding and sponsorship
4	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	47	Corporate Social Responsibility (CSR)

Judul dan konten lengkap siaran pers BRK Syariah dapat diakses di https://www.brksyariah.co.id/.
The full title and content of the BRK Syariah press release can be accessed at https://www.brksyariah.co.id/.

PENANGANAN PENGADUAN NASABAH
CUSTOMER COMPLAINT HANDLING

"BRK Syariah menyediakan mekanisme penanganan pengaduan nasabah yang transparan dan mudah diakses".

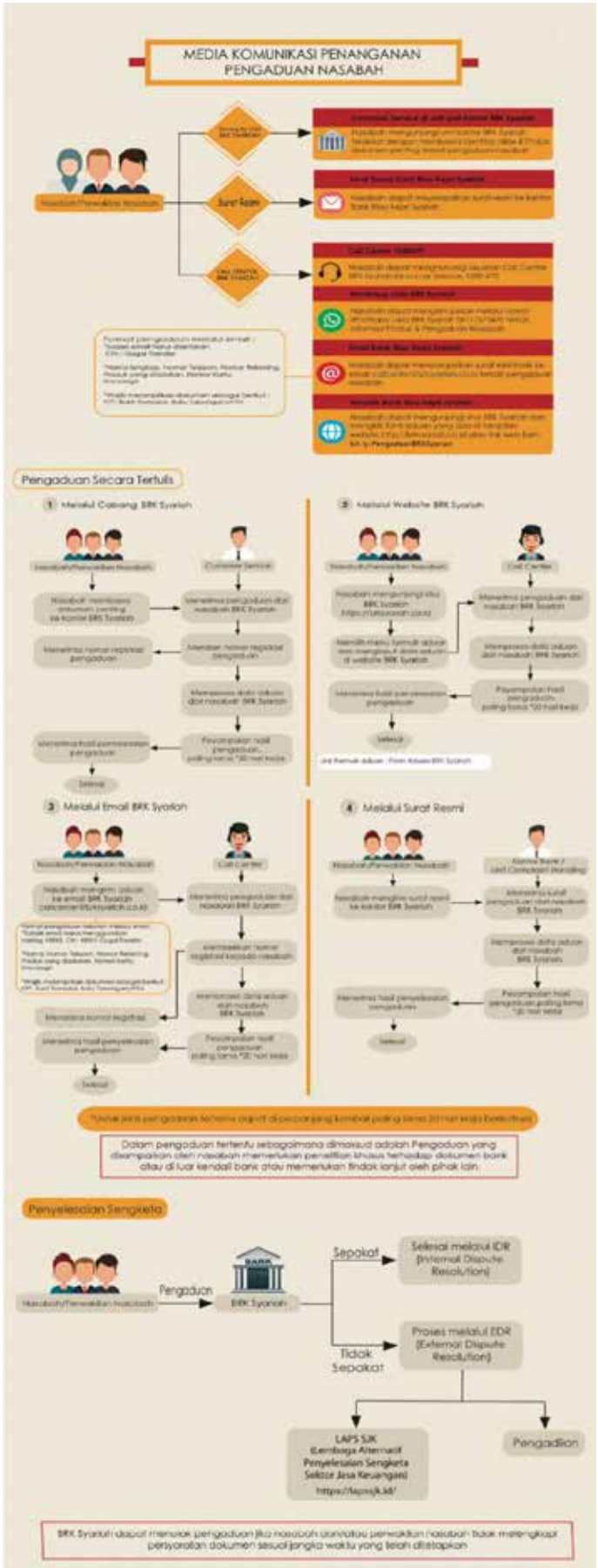
"BRK Syariah provides a transparent and easily accessible customer complaint handling mechanism."

BRK Syariah telah mengimplementasikan program Penanganan Pengaduan Nasabah yang komprehensif. Program ini bertujuan untuk memberikan saluran yang jelas bagi nasabah yang ingin menyampaikan keluhan, masukan, atau permintaan bantuan terkait layanan yang diberikan oleh BRK Syariah.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, BRK Syariah telah menetapkan prosedur yang transparan dan mudah diakses untuk menerima dan menangani pengaduan nasabah. Nasabah dapat mengajukan pengaduan melalui berbagai saluran, yaitu unit kantor, kantor pusat dan layanan *Call Center* BRK Syariah dengan media sebagai berikut :

BRK Syariah has implemented a comprehensive Customer Complaint Handling program. This program aims to provide clear channels for customers wishing to submit complaints, feedback, or requests for assistance regarding the services provided by BRK Syariah.

As part of this commitment, BRK Syariah has established transparent and easily accessible procedures for receiving and handling customer complaints. Customers can submit complaints through various channels, namely office units, the head office, and BRK Syariah Call Center services through the following media:


MEDIA KOMUNIKASI PENANGANAN PENGADUAN NASABAH
Pengaduan Secara Tertulis
1 Melalui Cabang BRK Syariah
2 Melalui Website BRK Syariah
3 Melalui Email BRK Syariah
4 Melalui Surat Resmi
Dalam pengaduan tertentu sebagaimana dimaksud adalah Pengaduan yang disampaikan oleh nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen bank atau di luar kendali bank atau memerlukan tindak lanjut oleh pihak lain.
Penyelesaian Sengketa
Pengaduan
BRK Syariah
Sepakat
Selesai melalui IDR (Internal Dispute Resolution)
Tidak Sepakat
Proses melalui EDR (External Dispute Resolution)
LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan)
https://lapssjk.id/
Pengadilan
BRK Syariah dapat menolak pengaduan jika nasabah dan/atau perwakilan nasabah tidak melengkapi persyaratan dokumen sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan

BRK Syariah berkomitmen untuk segera merespons dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh nasabah. Tim yang ditunjuk khusus untuk penanganan pengaduan bekerja secara profesional dan objektif, memastikan bahwa setiap pengaduan diproses dengan cermat dan tepat waktu.

BRK Syariah juga melakukan evaluasi terhadap pengaduan yang diterima untuk mengidentifikasi pola atau masalah yang mungkin muncul secara berulang. Hal ini memungkinkan BRK Syariah untuk melakukan perbaikan dalam sistem atau proses yang ada, sehingga masalah serupa dapat dihindari di masa depan.

Dengan penanganan pengaduan yang komprehensif, BRK Syariah berupaya untuk memastikan kepuasan nasabah dan menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Perseroan percaya bahwa setiap pengaduan adalah kesempatan untuk memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Sepanjang tahun 2025, BRK Syariah telah menyelesaikan semua pengaduan nasabah yang diterima atau mencapai seratus persen. Berikut Penanganan Pengaduan Nasabah selama tahun 2025

BRK Syariah is committed to responding promptly and taking the necessary steps to resolve issues faced by customers. The team specifically designated for complaint handling operates professionally and objectively, ensuring that every complaint is processed carefully and in a timely manner.

BRK Syariah also evaluates complaints received to identify patterns or issues that may recur. This allows BRK Syariah to make improvements to existing systems or processes, ensuring that similar issues can be avoided in the future.

Through comprehensive complaint handling, BRK Syariah strives to ensure customer satisfaction and maintain good relationships with them. The Company believes that every complaint is an opportunity to improve service and enhance the quality of the services provided.

Throughout 2025, BRK Syariah resolved all customer complaints received, reaching one hundred percent. The following is the Customer Complaint Handling data during 2025:

Penanganan Pengaduan Nasabah 2025
Customer Complaint Handling in 2025

No	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai Finished		Dalam Proses In Process		Tidak Selesai Not completed		Jumlah Pengaduan Number of Complaints
		Jumlah Amount	Persentase Percentage	Jumlah Amount	Persentase Percentage	Jumlah Amount	Persentase Percentage	
1	Kartu ATM / Debit / Mesin ATM ATM/Debit Cards / ATM Machines	2.965	23.83%	296	43.08%	0	0	3.261
2	*Electronic Banking* Electronic Banking (E-Banking)	9.294	74.70%	386	56.19%	0	0	9.680
3	Penyaluran Dana Financing Disbursement	0	0	0	0	0	0	0
4	Kliring (Transfer) / *Remittance* Clearing (Transfer) / Remittance	0	0	0	0	0	0	0
5	Penghimpunan Dana (Tabungan, Giro, Deposito) Fund Raising (Savings, Current Accounts, Time Deposits)	0	0	0	0	0	0	0
6	Bank Garansi Bank Guarantee	0	0	0	0	0	0	0
7	*E-Money* E-Money	169	1.36%	3	0.44%	0	0	172
8	Produk Kerjasama Partnership Products	0	0	0	0	0	0	0
9	Produk Lainnya Other Products	14	0.11%	2	0.29%	0	0	16
Total		**12.442**	**100.00%**	**687**	**100.00%**	**0**	**0**	**13.129**

INVESTOR RELATION
INVESTOR RELATIONS

Investor Relation merupakan fungsi strategis dalam membangun komunikasi yang transparan dan akuntabel antara Bank dengan para pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham. Melalui pengelolaan komunikasi yang terarah, BRK Syariah berupaya memastikan bahwa informasi mengenai kinerja, kebijakan, dan perkembangan Bank dapat disampaikan secara jelas, tepat waktu, dan dapat dipercaya.

Meskipun saat ini BRK Syariah belum berstatus sebagai perusahaan yang tercatat di pasar modal, Bank tetap menempatkan aspek komunikasi dan keterbukaan informasi sebagai bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik dan memperkuat reputasi institusi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penetapan Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi Nomor:100/SE/2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik

Kebijakan tersebut mengatur mekanisme keterbukaan informasi, tata cara penyampaian informasi kepada publik, serta alur koordinasi internal dalam pengelolaan informasi perusahaan. Dengan adanya pedoman tersebut, BRK Syariah berupaya memberikan kemudahan bagi pemegang saham, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas untuk mengakses informasi dan menjalin komunikasi dengan Bank secara transparan dan bertanggung jawab.

Investor Relations serves as a strategic function in fostering transparent and accountable communication between the Bank and its stakeholders, particularly shareholders. Through the management of targeted communication, BRK Syariah endeavors to ensure that information regarding the Bank's performance, policies, and developments is delivered clearly, timely, and reliably.

Although BRK Syariah is not yet listed on the capital market, the Bank continues to prioritize communication and information transparency as a key component in maintaining public trust and strengthening the institution's reputation. This commitment is demonstrated through the establishment of a Communication and Information Transparency Policy, outlined in Board of Directors Circular Letter Number 100/SE/2023 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Public Information Services.

This policy regulates the mechanism for information disclosure, the procedures for disseminating information to the public, and the internal coordination flow in managing corporate information. Guided by these provisions, BRK Syariah strives to provide shareholders, stakeholders, and the general public with ease of access to information and to engage in communication with the Bank in a transparent and responsible manner.

INFORMASI PENTING LAINNYA
OTHER IMPORTANT INFORMATION

"Sepanjang 2025, BRK Syariah tidak melakukan *buyback* saham maupun obligasi serta tidak mencatat pelanggaran BMPD. Bank juga terus menjaga transparansi informasi, menerapkan pengelolaan benturan kepentingan sesuai ketentuan, serta tidak menerima sanksi administratif yang bersifat material dari regulator.

"Throughout 2025, BRK Syariah did not conduct any buybacks of shares or bonds and recorded no violations of the Legal Lending Limit (BMPD). The Bank also continued to maintain information transparency, implemented conflict of interest management in accordance with regulations, and did not receive any material administrative sanctions from regulators."

Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham dan/atau Obligasi

BRK Syariah bukan merupakan perusahaan terbuka atau emiten, sehingga informasi terkait pembelian kembali (*buyback*) saham dan/atau obligasi selama tahun 2025 tidak diungkapkan dalam laporan tahunan ini.

Share and/or Bond Buyback

BRK Syariah is not a public company or an issuer; therefore, information regarding the buyback of shares and/or bonds during 2025 is not disclosed in this annual report.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Sebagai lembaga intermediasi, BRK Syariah melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan kepada masyarakah, termasuk juga kepada pihak yang terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) kepada nasabah inti.

BRK Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio pembiayaan melalui proses *review* dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BRK Syariah dengan memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD). Adapun terkait dengan penyediaan dana besar, BRK Syariah melakukan analisa kelayakan minimum sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) dari penyediaan dana kepada debitur umum. Syarat dan ketentuan penyediaan dana besar adalah sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembiayaan yang berlaku di BRK Syariah sebagaimana diatur di dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pembiayaan yang termuat di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 019/KEPDIR/2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pembiayaan.

Selama tahun 2025, BRK Syariah tidak mencatat adanya pelanggaran atau pelampauan BMPD dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang diuraikan lebih rinci pada Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Provision of Funds to Related Parties and Large Exposures

As an intermediary institution, BRK Syariah conducts financing distribution activities to the public, including related parties and large exposures to core customers.

BRK Syariah applies prudent principles in providing funds to related parties by implementing financing portfolio diversification through review processes and mechanisms aligned with BRK Syariah policies, fulfilling OJK provisions and applicable laws regarding the Legal Lending Limit (Batas Maksimum Penyediaan Dana/BMPD). Regarding large exposures, BRK Syariah conducts feasibility analyses that are at least equal to or more prudent than the provision of funds to general debtors. The terms and conditions for large exposures are in accordance with the financing procedures applicable at BRK Syariah as regulated in the Financing Company Guidelines (BPP) contained in the Board of Directors Decree Number 019/KEPDIR/2022 concerning the Financing Company Guidelines (BPP).

Throughout 2025, BRK Syariah recorded no violations or exceedances of the BMPD in providing funds to related parties and large exposures, as detailed further in the Management Discussion and Analysis Chapter of this Annual Report.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Yang dimaksud dengan internal *fraud* Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai tetap maupun tidak tetap, baik honorer dan *outsourcing* dengan nilai penyimpangan lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah).

Sepanjang tahun 2025 terdapat 1 (satu) penyimpangan internal dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

Number of Internal Fraud Cases and Resolution Efforts

Internal fraud, according to applicable regulations, refers to deviations or fraudulent acts committed by members of the Board of Directors, Board of Commissioners, permanent or non-permanent employees (including contract/honorary and outsourcing) with a deviation value exceeding Rp100,000,000 (one hundred million Rupiah).
Throughout 2025, there was 1 (one) internal deviation reported to the Financial Services Authority (OJK), as follows:

Tabel Jumlah Penyimpangan Internal Tahun 2023-2025
Table of Total Internal Irregularities for 2023–2025

Internal Fraud 2023-2025 Internal Fraud Tahun 2022-2023	Dewan Komisaris dan Direksi			Pegawai Tetap			Pegawai Tidak Tetap		
	Tahun 2025 Year 2025	Tahun 2024 Year 2024	Tahun2023 Year 2023	Tahun 2025 Year 2025	Tahun 2024* Year 2024*	Tahun 2023* Year 2023*	Tahun2025 Year 2025	Tahun 2024 Year 2024	Tahun 2023 Year 2023
Total Fraud Total Fraud Cases	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Telah Diselesaikan Resolved	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank Under Internal Resolution Process	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Not Yet Resolved	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Proceeded through Legal Process	-	-	-	-	1	1	-	-	-

*Penyajian kembali tabel jumlah penyimpangan internal lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah)
*Representation of the table of the amount of internal deviations of more than IDR 100,000,000 (one hundred million Rupiah)

Upaya Penyelesaian

Sebagai wujud penerapan *zero fraud*, pada tahun 2025 BRK Syariah memberikan tindakan tegas berupa sanksi kepada pegawai yang terbukti melakukan *fraud* dan pegawai lainnya yang melakukan pelanggaran setelah melalui tahapan proses pemeriksaaan dan pemberian sanksi.

Selain itu, terhadap pelaku *fraud* internal, manajemen Bank telah memberikan sanksi yang tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tidak Hormat dan mengganti kerugian, serta Bank menerbitkan surat informasi kepada instansi di wilayah Riau maupun Kepulauan Riau bahwa yang bersangkutan diberhentikan karena permasalahaan integritas.

Kepada pegawai yang terkait dengan terjadinya *fraud* internal diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan/ pelanggaran prosedur yang dilakukan dengan tetap mengacu kepada ketentuan sanksi kepegawaian yang berlaku di internal Bank

Resolution Efforts

As a form of implementing zero fraud, in 2025, BRK Syariah took firm action by imposing sanctions on employees proven to have committed fraud and other employees who committed violations after undergoing examination and sanctioning stages.

Furthermore, for perpetrators of internal fraud, the Bank's management has imposed strict sanctions in the form of Dishonorable Termination of Employment (PHK) and restitution for losses. The Bank also issued information letters to institutions in the Riau and Kepulauan Riau regions stating that the concerned individuals were terminated due to integrity issues.

Employees related to the occurrence of internal fraud were sanctioned according to the level of their error or procedural violation, while adhering to the personnel sanction regulations applicable within the Bank.

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Ketentuan terkait dengan pencegahan transaksi orang dalam (*insider trading*) tercantum dalam Kode Etik *Dealer* pada Divisi *Treasury & International Banking*. Kebijakan tersebut mengatur bahwa Direksi dan pegawai yang melakukan aktivitas treasuri di pasar keuangan syariah dilarang mempergunakan Bank menjadi fasilitator untuk bertransaksi dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi atau spekulasi bagi rekening pribadi pada semua instrumen pasar keuangan syariah yang dimaksud dalam Kode etik treasuri (*Islamic Code of Conduct)* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Prevention of Insider Trading

Provisions regarding the prevention of insider trading are included in the Dealer Code of Ethics within the Treasury & International Banking Division. This policy stipulates that Directors and employees conducting treasury activities in the Sharia financial market are prohibited from using the Bank as a facilitator for transactions aimed at personal gain or speculation for personal accounts in all Sharia financial market instruments mentioned in the Islamic Code of Conduct of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BRK Syariah tidak terlepas dari interaksi antar individu di lingkungan Bank maupun dengan pihak-pihak lainnya, dimana terdapat potensi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan bahkan kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan Bank. Untuk itulah, BRK Syariah senantiasa berkomitmen mematuhi POJK Nomor: 42/ POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dengan terbitnya ketentuan tersebut, BRK Syariah telah menetapkan Surat Keputusan Direksi Nomor 242/ KEPDIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 Tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan transaksi afiliasi maupun yang mengandung benturan kepentingan.

Hingga akhir tahun 2025, BRK Syariah telah melakukan sosialisasi pada jaringan kantor Bank sebanyak 4 (empat) unit kerja mengenai kebijakan tersebut yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan.

Affiliated Transactions and Transactions Containing Conflicts of Interest

Policy on Affiliated Transactions and Conflicts of Interest

In carrying out its business activities, BRK Syariah is inextricably linked to interactions between individuals within the Bank and with other parties. This creates the potential for unavoidable conflicts of interest between parties, which can influence the decision-making process and even the performance of those decisions, potentially detrimental to the Bank. Therefore, BRK Syariah remains committed to complying with POJK Number 42/ POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

With the issuance of this regulation, BRK Syariah has issued Board of Directors Decree Number 242/KEPDI/2024 dated December 30, 2024, concerning Conflict of Interest Guidelines to ensure the appropriate implementation of affiliated transactions and those involving conflicts of interest.

By the end of 2025, BRK Syariah had conducted outreach to the Bank's four office networks regarding this policy, conducted by the Compliance Division.

Mekanisme Review dan Persetujuan Atas Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi kondisi benturan kepentingan maka sesuai kebijakan tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), insan BRK Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Bank harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Namun, apabila keputusan masih tetap akan diambil, maka pihak yang mengalami Benturan Kepentingan harus tetap mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul/kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.
2. Di dalam setiap risalah rapat atau keputusan Bank yang dibuat oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Bank, agar dinyatakan bahwa di dalam pengambilan keputusan rapat atau keputusan yang dibuat oleh pejabat dan pengurus Bank tersebut telah memuat ada atau tidaknya benturan kepentingan.
3. Setiap kebijakan dan keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan akan diputuskan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Bank yang tidak memiliki Benturan Kepentingan. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Bank memiliki Benturan Kepentingan maka pengambilan keputusan dialihkan kepada Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Bank lainnya yang tidak memiliki Benturan Kepentingan.
4. Dalam hal insan Bank berada di dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan harus menarik diri dan dilarang ikut dalam pembahasan/usulan dan/atau proses pengambilan keputusan tersebut.
5. Apabila suatu pembahasan/usulan/keputusan merupakan wewenang mutlak dari yang bersangkutan, dan masih dalam batas kewenangan/limit transaksi dari jabatannya tersebut dan proses tersebut jika dialihkan akan menghambat proses bisnis Bank, maka pembahasan/usulan/ keputusan tetap harus dilaksanakan oleh pegawai/ pejabat/pengurus yang bersangkutan secara profesional dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Review and Approval Mechanism for Affiliate Transactions and Conflicts of Interest

In the event of a conflict of interest, BRK Syariah personnel must adhere to the following procedures:

1. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Bank Officials must refrain from making decisions in situations where a Conflict of Interest exists. However, if a decision is still to be made, the party experiencing the Conflict of Interest must prioritize the Bank's economic interests and protect the Bank from potential losses or reduced profits. They must disclose the nature of the Conflict of Interest in every decision.
2. Every meeting minute or decision made by a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Bank Officials must state whether or not a Conflict of Interest was included in the decision-making process.
3. Every policy and decision containing a Conflict of Interest will be made by a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Bank Official who does not have a Conflict of Interest. If a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Bank Official has a Conflict of Interest, decision-making is delegated to another member of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Bank Official who does not have a Conflict of Interest.
4. If a Bank employee finds themselves in a Conflict of Interest situation, they must withdraw from the discussion/proposal and/or decision-making process and are prohibited from participating.
5. If a discussion/proposal/decision falls within the absolute authority of the individual concerned, and is within the authority/transaction limits of their position, and if transferred, the process would hinder the Bank's business processes, the discussion/proposal/decision must still be carried out professionally by the employee/official/manager concerned, provided with justifiable reasons and with due regard to applicable regulations.

Selama tahun 2025, tidak terdapat transaksi dan laporan mengenai adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang berpotensi merugikan dan/atau mengurangi keuntungan BRK Syariah.

During 2025, there were no transactions or reports regarding conflict-of-interest transactions that potentially harmed or reduced the profits of BRK Syariah.

Transaksi yang Mengandung Transaksi Benturan Kepentingan Transactions Containing Conflict of Interest Transactions				
Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan Names and Positions that Have a Conflict of Interest	**Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan** Name and Position of Decision Maker	**Jenis Transaksi** Transaction Type	**Nilai Transaksi** Transaction Value	**Keterangan** Description
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

BRK Syariah telah mengungkapkan informasi kondisi keuangan dan non keuangan Bank kepada pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan cara menyusun dan menyajikan laporan sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, mencakup Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola. Penyampaian dan publikasi informasi tersebut dilakukan baik melalui media cetak maupun situs web https://www.brksyariah.co.id.

Secara berkala, BRK Syariah telah mempublikasikan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasi yang diunggah dalam di *website* BRK Syariah. Selain itu, BRK Syariah juga telah mengumumkan Laporan Keuangan, Publikasi Triwulanan di surat kabar harian lokal dan nasional serta melaporkannya juga ke lembaga terkait agar publik memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi keuangan BRK Syariah.

Dalam memenuhi aspek transparansi non keuangan, BRK Syariah telah mengungkapkan berbagai informasi sebagai berikut:

1. *Website* BRK Syariah telah menyajikan Laporan Tahunan Bank, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Pelaksanaan GCG, informasi Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan lokasi ATM Bank;
2. Menyampaikan informasi produk dan layanan Bank di *website* mencakup jenis produk, tingkat bunga, layanan pembayaran tagihan pihak ketiga dan sebagainya;

Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Condition

BRK Syariah has disclosed the Bank's financial and non-financial condition information to stakeholders in accordance with applicable regulations by formulating and presenting reports according to the procedures, types, and scope as stipulated in Bank Indonesia/Financial Services Authority (OJK) regulations. This includes the Annual Report, Quarterly Published Financial Reports, Monthly Published Financial Reports, and Governance Implementation Reports. The submission and publication of this information are conducted through both print media and the website https://www.brksyariah.co.id.

Periodically, BRK Syariah has published the Annual Report, Quarterly Published Financial Reports, Monthly Published Financial Reports, and Consolidated Financial Reports, which are uploaded to the BRK Syariah website. Furthermore, BRK Syariah has also announced the Quarterly Published Financial Reports in local and national daily newspapers and reported them to the relevant institutions to ensure the public obtains clear and accurate information regarding the financial condition of BRK Syariah.

In fulfilling the non-financial transparency aspects, BRK Syariah has disclosed various information as follows:

1. The BRK Syariah website presents the Bank's Annual Reports, Quarterly Published Financial Reports, GCG Implementation Reports, information on Branch Offices, Sub-Branch Offices, Cash Offices, and the Bank's ATM locations.
2. Disseminating information on the Bank's products and services on the website, covering product types, interest/profit rates, third-party bill payment services, and others.

1. Menyediakan brosur produk di setiap Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/Kantor Kas BRK Syariah;
2. Menginformasikan tingkat imbal hasil dan kurs pada papan informasi elektronik;
3. Menginformasikan tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah;
4. Membentuk unit dan/atau fungsi pengaduan nasabah di Kantor Pusat dan di setiap Kantor Cabang.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/ atau Politik

BRK Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perseroan terbatas dan etika bisnis yang sehat.

Selama tahun 2025, BRK Syariah tidak memberikan bantuan atau donasi terkait kegiatan politik. Pemberian dana untuk kegiatan sosial oleh BRK Syariah dilaksanakan dalam berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemuda, olahraga, seni, budaya dan kesehatan, dan sebagainya.

Uraian lebih lanjut terkait dana kegiatan sosial dijelaskan pada Bab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Laporan Tahunan ini.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Pada tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif material yang dikenakan kepada BRK Syariah, anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal maupun Otoritas lainnya. Sanksi yang dikenakan hanya sebatas denda atas kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan yang jumlahnya tidak signifikan merugikan Bank serta teguran atas tidak terpenuhinya kewajiban peralihan hak dan kewajiban nasabah sehubungan dengan peralihan menjadi Bank Umum Syariah. Adapun sanksi atau denda yang dikenakan kepada BRK Syariah dengan jumlah yang tidak material selama tahun 2025 antara lain:

- Denda atas keterlambatan pelaporan
- Denda atas kesalahan laporan.

1. Providing product brochures at every BRK Syariah Branch Office/Sub-Branch Office/Cash Office.
2. Displaying yield rates and exchange rates on electronic information boards.
3. Informing procedures for handling and resolving customer complaints.
4. Establishing customer complaint units and/or functions at the Head Office and in every Branch Office.

Provision of Funds for Social and/or Political Activities

BRK Syariah is a Regional Government-Owned Enterprise (BUMD) that is established and operates based on limited liability principles and sound business ethics.

Throughout 2025, BRK Syariah did not provide any assistance or donations related to political activities. The provision of funds for social activities by BRK Syariah is implemented through various Corporate Social Responsibility (CSR) programs aimed at improving community welfare, community empowerment, youth activities, sports, arts, culture, health, and others.

Further details regarding social activity funds are explained in the Corporate Social and Environmental Responsibility Chapter of this Annual Report.

Administrative Sanctions Imposed on the Company, Members of the Board of Commissioners, and the Board of Directors by Capital Market Authorities and Other Authorities

In 2025, there were no material administrative sanctions imposed on BRK Syariah, members of the Board of Commissioners, or the Board of Directors by Capital Market Authorities or other Authorities. The sanctions imposed were limited to fines for errors and delays in report submissions, the amounts of which did not significantly disadvantage the Bank, as well as warnings regarding the unfulfilled obligation to transfer customer rights and obligations in connection with the transition to a Sharia Commercial Bank. The non-material sanctions or fines imposed on BRK Syariah during 2025 included:

- Fines for reporting delays.
- Fines for reporting errors.

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PRAKTIK *BAD CORPORATE GOVERNANCE*

STATEMENT OF NON-ENGAGEMENT IN BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

Bad Corporate Governance merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berpotensi merusak integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan Bank. Praktik tersebut tidak hanya dapat mengganggu efektivitas sistem pengendalian internal, tetapi juga berisiko menurunkan kepercayaan pemegang saham, nasabah, dan para pemangku kepentingan terhadap Bank.

Menyadari hal tersebut, BRK Syariah terus memperkuat komitmen untuk menjaga penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam setiap aktivitas operasional dan pengambilan keputusan. Bank memastikan bahwa seluruh insan perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menjunjung tinggi etika, kepatuhan terhadap regulasi, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sepanjang tahun 2025, BRK Syariah berkomitmen untuk menghindari berbagai praktik yang bertentangan dengan GCG, termasuk penyalahgunaan wewenang, tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan, perilaku tidak etis, serta praktik lain yang berpotensi merugikan Bank maupun para pemangku kepentingan. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BRK Syariah dalam membangun tata kelola yang kuat, berintegritas, dan berkelanjutan.

Tindakan yang bertentangan dengan praktik dan prinsip GCG antara lain dengan menghindari praktik sebagai berikut:

Bad Corporate Governance refers to practices that contradict the principles of good corporate governance and have the potential to damage integrity, transparency, and accountability in the management of the Bank. Such practices can not only disrupt the effectiveness of internal control systems but also risk diminishing the trust of shareholders, customers, and stakeholders in the Bank.

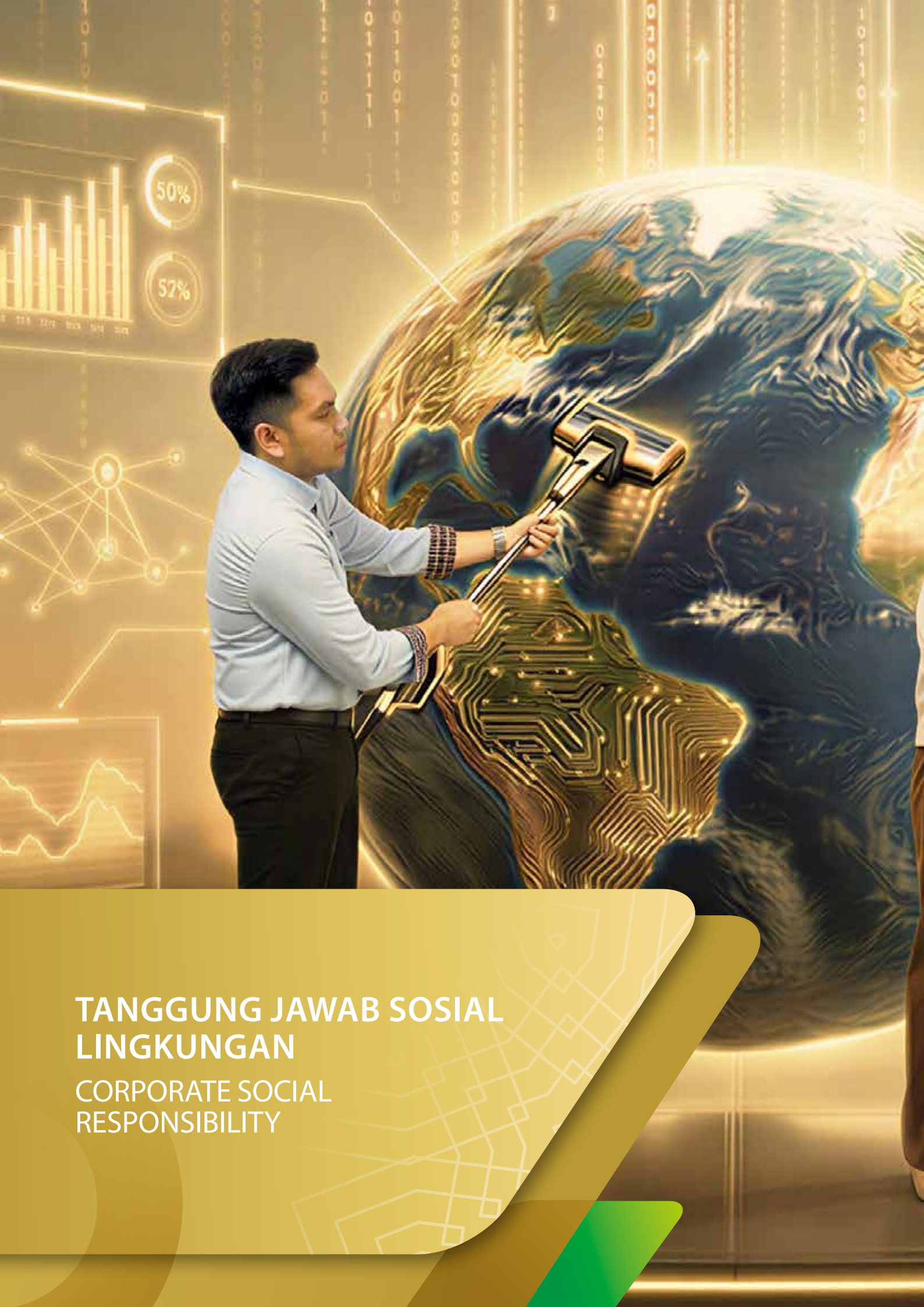
Recognizing this, BRK Syariah continues to strengthen its commitment to consistently maintaining the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in every operational activity and decision-making process. The Bank ensures that all corporate personnel perform their duties and responsibilities with high ethics, compliance with regulations, and principles of transparency and accountability.

Throughout 2025, BRK Syariah remained committed to avoiding various practices that contradict GCG, including abuse of authority, actions that lead to conflicts of interest, unethical behavior, and other practices that could potentially disadvantage the Bank or stakeholders. This commitment is part of BRK Syariah's sustainable efforts to build robust, high-integrity, and sustainable governance.

Actions that contradict GCG practices and principles include avoiding practices such as:

No	Uraian	Praktik	Description
1	Adanya laporan sebagai Bank yang mencemari lingkungan.	Nihil	Reports of the Bank polluting the environment.
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Bank, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam LaporanTahunan.	Nihil	Significant cases currently faced by the Bank, subsidiaries, members of the Board of Directors, and/or members of the Board of Commissioners currently in office that were not disclosed in the Annual Report.
3	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.	Nihil	Non-compliance in fulfilling tax obligations.
4	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	Nihil	Discrepancies in the presentation of the Annual Report and Financial Reports with applicable regulations and SAK (Financial Accounting Standards).
5	Kasus terkait buruh dan karyawan.	Nihil	Cases related to labor and employees.
6	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan.	Nihil	Absence of operating segment disclosures in the Financial Reports.
7	Terdapat ketidaksesuaian antara Buku Laporan Tahunan versi hardcopy dengan Laporan Tahunan versi *softcopy*.	Nihil	Discrepancies between the hardcopy version of the Annual Report and the softcopy version of the Annual Report.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

BRK Syariah meyakini bahwa kinerja perusahaan yang berkelanjutan tidak semata tercermin dari perolehan laba, tetapi juga dari kontribusi nyata dalam memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Atas dasar tersebut, Perseroan secara konsisten mengimplementasikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bagian dari komitmen pelayanan publik dan strategi investasi sosial jangka panjang.

Pada tahun 2025, BRK Syariah merealisasikan penyaluran dana CSR sebesar Rp11.950.404.168,- (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang diarahkan pada berbagai bidang prioritas guna memperkuat dampak sosial dan mendukung keberhasilan usaha di masa mendatang.

Pelaksanaan CSR diungkapkan secara menyeluruh dalam Laporan Keberlanjutan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik dan dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emitan, dan Perusahaan Publik. Dalam Laporan Tahunan ini disajikan ringkasan mengenai kebijakan, cakupan program, serta realisasi pendanaan CSR sepanjang tahun buku 2025.

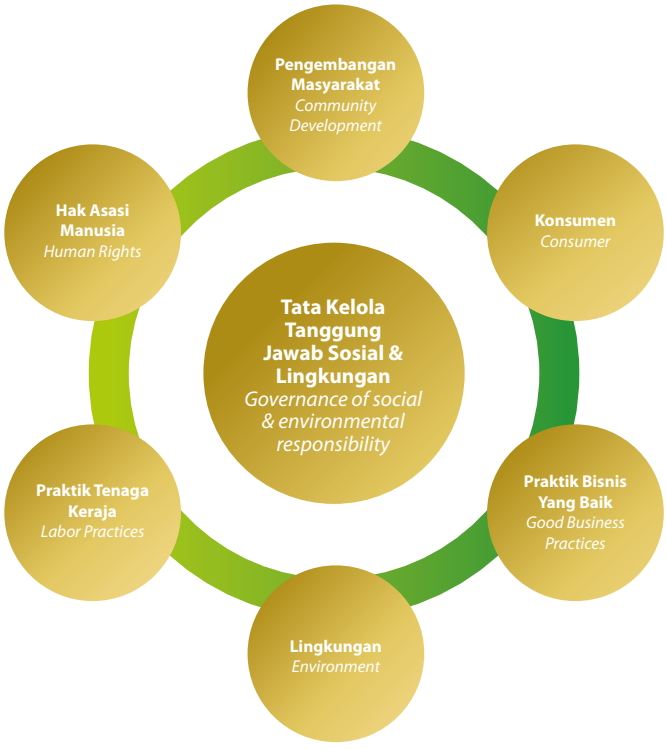
BRK Syariah believes that sustainable corporate performance is not solely reflected in profit generation, but also in tangible contributions to fulfilling the needs and expectations of stakeholders. Based on this premise, the Company consistently implements the Corporate Social Responsibility (CSR) program as part of its public service commitment and long-term social investment strategy.

In 2025, BRK Syariah realized CSR fund disbursements amounting to Rp11,950,404,168 (eleven billion nine hundred fifty million four hundred four thousand one hundred sixty-eight rupiah), directed towards various priority sectors to strengthen social impact and support future business success.

The implementation of CSR is comprehensively disclosed in the Sustainability Report in accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers and Public Companies, and in the context of implementing sustainable finance as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. This Annual Report presents a summary of the policies, program scope, and realization of CSR funding throughout the 2025 financial year.

Strategi dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Strategy and Implementation of Social and Environmental Responsibility



Komitmen BRK Syariah tidak hanya terfokus pada pencapaian kinerja finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan Bank tercermin melalui praktik bisnis yang sehat, perlindungan konsumen, penghormatan hak asasi manusia, pengelolaan ketenagakerjaan yang adil, serta tata kelola perusahaan yang baik.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program CSR difokuskan pada pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), peningkatan kualitas hubungan industrial, serta pemberian layanan yang prima kepada nasabah.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan Program CSR BRK Syariah, maka telah tertuang dalam visi dan misi sebagai berikut:

1. Misi CSR BRK Syariah
   Sebagai bank daerah yang mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang lingkungan, kesehatan, sosial dan budaya, pendidikan, kegiatan keagamaan, pemuda dan olahraga serta ekonomi dengan membangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat yang berkelanjutan.

2. Visi CSR BRK Syariah
   - Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan penyediaan saluran distribusi dan fasilitas untuk usaha-usaha kecil yang dibiayai Bank.
   - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) masyarakat dengan berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
   - Berperan aktif dalam peningkatan kehidupan masyarakat dengan peduli dan tanggap terhadap lingkungan hidup, ketenagakerjaan/keselamatan kerja, kesehatan, sosial dan budaya, kegiatan keagamaan, pemuda dan olahraga, perlindungan nasabah, sosial kemasyarakatan, pendidikan, adat/budaya/seni, bencana alam, dan/atau dukungan operasional kegiatan pemerintahan.
   - Program CSR BRK Syariah bertujuan untuk mendorong budaya kerja Bank yang lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas bisnis, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuannya. Secara eksternal CSR BRK Syariah diharapkan dapat membentuk dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dengan menciptakan dan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan yang lebih sejahtera dan mandiri.

Strategy and Implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility BRK Syariah's commitment is not only focused on achieving financial performance but also on creating sustainable value for the community, the environment, and all stakeholders. The Bank's success is reflected through sound business practices, consumer protection, respect for human rights, fair employment management, and good corporate governance.

This commitment is manifested through the implementation of an integrated and sustainable Corporate Social Responsibility program. The CSR program focuses on the social and economic development of the community, responsible environmental management, the implementation of Occupational Health and Safety (OHS/K3), the improvement of industrial relations quality, and the provision of excellent service to customers.

To achieve the expected goals of the BRK Syariah CSR Program implementation, it has been outlined in the following vision and mission:

1. BRK Syariah CSR Mission
   As a regional bank that drives regional economic growth, thus capable of improving the quality of life and welfare of the community in the fields of environment, health, social and culture, education, religious activities, youth and sports, as well as the economy by building a harmonious and sustainable relationship among the Government, the Company, and the Community.

2. BRK Syariah CSR Vision
   - To drive regional economic growth by providing distribution channels and facilities for small businesses financed by the Bank.
   - To improve the quality of the community's Human Capital (Sumber Daya Insani/SDI) by participating in the enhancement of education quality in the region.
   - To play an active role in improving community life by being caring and responsive to the environment, employment/occupational safety, health, social and culture, religious activities, youth and sports, customer protection, social community, education, customs/culture/arts, natural disasters, and/or operational support for government activities.
   - The BRK Syariah CSR program aims to foster a more responsible Bank work culture in carrying out business activities, so that ultimately the business world will be able to survive sustainably to achieve its goals. Externally, BRK Syariah's CSR is expected to shape and create sustainable community welfare by creating and involving a continuous spirit of synergy from all parties in the social, economic, and environmental sectors to be more prosperous and independent.

Dasar Kebijakan Pelaksanaan CSR

Pelaksanaan program CSR BRK Syariah mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang mengatur secara umum maupun khusus mengenai CSR antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
6. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Selain itu, BRK Syariah secara khusus menetapkan peraturan tentang CSR dalam regulasi internal yaitu Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 004/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan telah di dilakukan perubahan melalui Surat Keputusan Direksi No. 126/KEPDIR/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Legal Basis for CSR Implementation Policy

The implementation of the BRK Syariah CSR program refers to the laws and regulations in Indonesia, both those regulating generally and specifically regarding CSR, including:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended several times, most recently amended by Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law;
2. Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking as amended several times, most recently by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector;
3. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
4. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises;
5. Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility of Business Entities;
6. Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009, concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
7. Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks.
8. Riau Province Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province.

In addition, BRK Syariah specifically establishes regulations regarding CSR in internal regulations, namely the Company Guidelines (BPP), which was stipulated through the Board of Directors Decree No. 004/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022, concerning the Company Guidelines for the Corporate Social Responsibility (CSR) Program of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) and has been amended through the Board of Directors Decree No. 126/KEPDIR/2023 dated October 10, 2023, concerning the Company Guidelines for the Corporate Social Responsibility (CSR) Program of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Prinsip

BRK Syariah menyusun kebijakan dan program CSR baik secara konsep maupun sasaran implementasi secara tertulis. Perusahaan telah memiliki kebijakan tertulis dari pimpinan perusahaan terkait program CSR. Di samping itu, BRK Syariah telah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) CSR yang mengatur segala macam panduan kebijakan dalam melaksanakan program program CSR agar bisa berjalan efektif dan memberi dampak optimal kepada para pemangku kepentingan. SOP juga dimaksudkan untuk menegakkan prinsip tata kelola yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pelaksanaan program CSR.

Ruang Lingkup dan Fokus

Ruang lingkup program CSR BRK Syariah merujuk pada Standar ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial yang meliputi:

1. Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial.
2. Hak Asasi Manusia.
3. Operasi Yang Adil.
4. Lingkungan Hidup.
5. Ketenagakerjaan.
6. Pemenuhan Kepentingan Nasabah.
7. Kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya, Program CSR BRK Syariah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat sekitar wilayah kerja atau operasional Bank dan masyarakat luas secara selektif. Fokus pelaksanaan Program CSR BRK Syariah meliputi bidang:

1. Kesejahteraan Sosial
2. Pendidikan.
3. Kesehatan.
4. Seni dan Budaya.
5. Keagamaan.
6. Kewirausahawan.
7. Infrastruktur.
8. Lingkungan.
9. Ketenagakerjaan.
10. Olahraga.
11. Dukungan kegiatan operasional Pemerintah.
12. Bantuan bencana alam.
13. Dan pemberian penghargaan kepada individu, kelompok atau masyarakat yang telah berjasa atas dedikasinya secara terus menerus dan berkelanjutan serta memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan baik dibidang keagamaan, ekonomi dan kewirausahawan, pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, ketahanan pangan dan lingkungan hidup.

Principles

BRK Syariah formulates CSR policies and programs, both conceptually and regarding implementation targets, in writing. The Company already has a written policy from the company's management regarding the CSR program. Furthermore, BRK Syariah has a CSR Standard Operating Procedure (SOP) that regulates all kinds of policy guidelines in implementing CSR programs so they can run effectively and provide optimal impacts to stakeholders. The SOP is also intended to uphold the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the implementation of the CSR program.

Scope and Focus

The scope of the BRK Syariah CSR program refers to the ISO 26000 Standard on Social Responsibility, which includes:

1. Organizational Governance.
2. Human Rights.
3. Fair Operating Practices.
4. The Environment.
5. Labor Practices.
6. Consumer Issues.
7. Community Involvement and Development.

In its implementation, the BRK Syariah CSR Program is carried out for all stakeholders, including the community around the Bank's work or operational areas and the wider community selectively.
The focus of the BRK Syariah CSR Program implementation covers the fields of:

1. Social Welfare.
2. Education.
3. Health.
4. Arts and Culture.
5. Religion.
6. Entrepreneurship.
7. Infrastructure.
8. Environment.
9. Employment.
10. Sports.
11. Operational support for Government activities.
12. Natural disaster relief.
13. And awarding individuals, groups, or communities who have been meritorious for their continuous and sustainable dedication and provided benefits to the community and the environment, whether in the fields of religion, economy and entrepreneurship, education, health, sports, socio-culture, food security, and the environment.

Metode dan Lingkup *Due Diligent* Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan
Dalam rangka mencegah terjadinya dampak negatif dari keputusan dan kegiatan Bank, maka BRK Syariah telah memiliki berbagai kebijakan, mekanisme pemantauan dan mekanisme penanganan keluhan.

Due Diligence Methods and Scope Regarding the Social, Economic, and Environmental Impacts of Company Activities. In order to prevent negative impacts from the Bank's decisions and activities, BRK Syariah has established various policies, monitoring mechanisms, and grievance handling mechanisms.

Struktur Pengelola CSR BRK Syariah

Komitmen BRK Syariah dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan diwujudkan dengan menempatkan Program CSR sebagai prioritas dalam strategi keberlanjutan Bank. Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, terarah, dan selaras dengan kebijakan perusahaan, pengelolaan CSR dipercayakan kepada Divisi Sekretariat Perusahaan.

Divisi Sekretariat Perusahaan bertanggung jawab atas perencanaan, implementasi, pemantauan, serta evaluasi seluruh program CSR, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam struktur organisasi, Divisi Sekretariat Perusahaan berkoordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko guna menjamin akuntabilitas dan pengelolaan risiko yang optimal.

Berikut struktur pengelola CSR pada BRK Syariah:

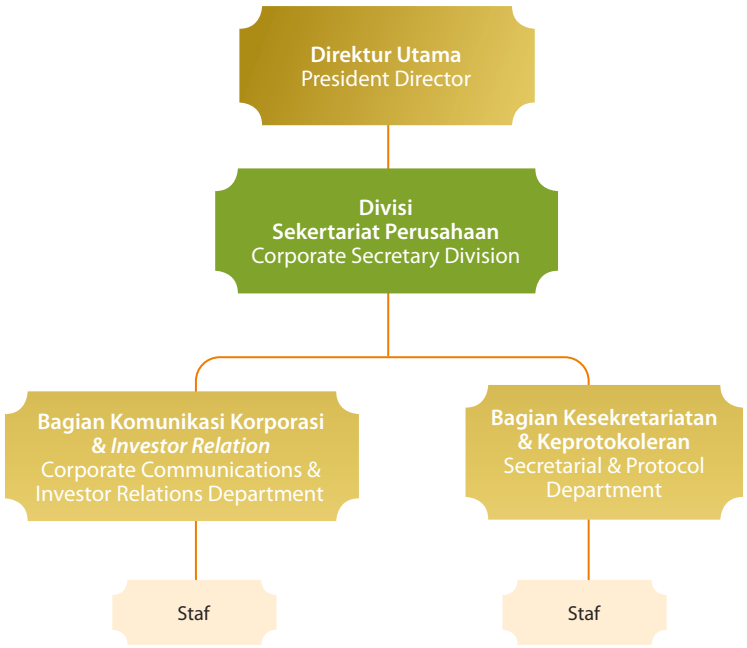
BRK Syariah CSR Management Structure

BRK Syariah's commitment to carrying out corporate social responsibility is manifested by placing the CSR Program as a priority in the Bank's sustainability strategy. To ensure effective, directed implementation that is aligned with company policies, CSR management is entrusted to the Corporate Secretary Division.

The Corporate Secretary Division is responsible for the planning, implementation, monitoring, and evaluation of all CSR programs, while also ensuring compliance with regulations and the principles of good corporate governance. Within the organizational structure, the Corporate Secretary Division coordinates with and reports directly to the Director of Compliance & Risk Management to ensure optimal accountability and risk management.

The following is the CSR management structure at BRK Syariah:

Diagram Struktur Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan
Organizational Structure Diagram of Corporate Secretary Division



Tugas dan Tanggung Jawab

Divisi Sekretariat Perusahaan sebagai penanggung jawab program CSR memiliki kewenangan dan bertindak sebagai koordinator pelaksanaan serta melakukan evaluasi CSR. Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Sekretariat Perusahaan sebagai Unit Kerja Pengelola CSR adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan mereview Kebijakan pengelolaan CSR.
2. Menyusun anggaran CSR untuk dimintakan persetujuan Pemegang Saham untuk Program Kemitraan dan pada anggaran Bank untuk Dana Bantuan Masyarakat.
3. Memastikan pengelolaan dan memantau pelaksanaan CSR sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*)
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan CSR Program Kemitraan kepada Pemegang Saham.
5. Menyusun, penerbitan dan pendistribusian Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) dengan bekerjasama dengan unit kerja terkait.

Sumber Dana, Anggaran, dan Realisasi Anggaran CSR Didanai dari sumber berikut:

1. Dana CSR Program Kemitraan: Untuk tahun 2025 dana CSR Program Kemitraan ditetapkan dari persentase keuntungan bersih Bank tahun Buku 2024 dan alokasi besaran untuk masing-masing Pemerintah Daerah selaku pemegang saham ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan.
2. Dana Program Bantuan Kemasyarakatan: Sumber dana program bantuan kemasyarakatan berasal dari dana BRK Syariah yang menggunakan biaya dana bantuan kemasyarakatan yang besarnya ditentukan dalam penyusunan anggaran (RKAT) Bank.

BRK Syariah menyadari pentingnya program CSR untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kinerja positif serta kunci kerberhasilan Bank di masa depan. Oleh karena itu BRK Syariah menyediakan anggaran yang khusus dialokasikan untuk kegiatan CSR. Total dana yang telah disalurkan BRK Syariah melalui berbagai kegiatan CSR selama tahun 2025 sebesar Rp11.950.404.168,- (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Duties and Responsibilities

The Corporate Secretary Division, as the party responsible for the CSR program, has the authority and acts as the implementation coordinator and conducts CSR evaluations. The duties and responsibilities of the Corporate Secretary Division as the CSR Management Work Unit are as follows:

1. Formulating and reviewing CSR management policies.
2. Preparing the CSR budget to seek Shareholders' approval for the Partnership Program and within the Bank's budget for the Community Assistance Fund.
3. Ensuring the management and monitoring of CSR implementation as an effort to foster relationships with stakeholders.
4. Submitting reports on the implementation of the Partnership Program CSR to the Shareholders.
5. Preparing, publishing, and distributing the Sustainability Report in collaboration with related work units.

Funding Sources, Budgets, and CSR Budget Realization Funded from the following sources:

1. Partnership Program CSR Funds: For 2025, Partnership Program CSR funds are determined from a percentage of the Bank's net profit for the 2024 Financial Year, and the allocation amount for each Regional Government as a shareholder is determined in the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS).
2. Community Assistance Program Funds: The source of funds for the community assistance program comes from BRK Syariah funds utilizing the community assistance fund expenses, the amount of which is determined in the preparation of the Bank's budget (RKAT).

BRK Syariah realizes the importance of the CSR program to support sustainable growth and positive performance, as well as being a key to the Bank's future success. Therefore, BRK Syariah provides a budget specifically allocated for CSR activities. The total funds disbursed by BRK Syariah through various CSR activities during 2025 amounted to Rp11,950,404,168 (eleven billion nine hundred fifty million four hundred four thousand one hundred sixty-eight rupiah), with the following details:

(dalam Rupiah | *in IDR*)

Kegiatan CSR Program Kemitraan	Realisasi Realization	CSR Activities Partnership Program
Kesejahteraan sosial	950.323.139	Social Welfare
Pendidikan	2.194.707.869	Education
Kesehatan	-	Health
Seni dan Budaya	165.805.000	Arts and Culture
Keagamaan	6.306.577.261	Religion
Kewirausahawan	282.510.000	Entrepreneurship

Kegiatan CSR Program Kemitraan	Realisasi Realization	CSR Activities Partnership Program
Infrastruktur	99.760.450	Infrastructure
Lingkungan	48.633.000	Environment
Ketenagakerjaan	-	Employment
Olahraga	142.500.000	Sports
Dukungan kegiatan operasional Pemerintah	25.000.000	Support for Government Operational Activities
Penghargaan kepada Individu, Kelompk atau masyarakat	-	Awards to Individuals, Groups or Communities
Bencana Alam	17.772.000	Natural Disasters
Jumlah	**10.233.588.718**	**Total**

Kegiatan CSR Program Dabamas	Realisasi Realization	CSR Activities Dabamas Programme
Keagamaan	983.347.000	Religion
Pendidikan	53.475.000	Education
Bantuan Bencana Alam	59.879.000	Natural Disaster Relief
Kesejahteraan Sosial	457.100.000	Social welfare
Seni & Budaya	53.700.000	Arts & Culture
Dukungan Kegiatan Pemerintah	109.314.450	Government Support for Activities
Jumlah	**1.716.815.450**	**Total**

CSR sebagai Pilar Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* BRK Syariah dilakukan secara konsisten melalui skema kemitraan yang terencana dan berorientasi pada keberlanjutan. Program tersebut menjadi sarana strategis Bank dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil, serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara inklusif.

Melalui pendekatan yang terarah dan kolaboratif, CSR tidak hanya difokuskan pada pemberian bantuan, tetapi juga pada penciptaan kemandirian dan nilai tambah jangka panjang bagi masyarakat. Inisiatif tersebut sekaligus memperkuat peran BRK Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan lingkungan sekitarnya.

CSR as a Pillar of Community Economic Empowerment

The implementation of the BRK Syariah Corporate Social Responsibility program is carried out consistently through a planned and sustainability-oriented partnership scheme. The program serves as the Bank's strategic tool in driving community economic empowerment, strengthening the capacity of micro and small business actors, and improving social welfare inclusively.

Through a directed and collaborative approach, CSR is not only focused on providing assistance but also on creating independence and long-term added value for the community. This initiative simultaneously strengthens BRK Syariah's role as a sharia financial institution that provides tangible benefits to regional development and its surrounding environment.

No	Pemegang Saham Shareholders	CSR Program Kemitraan CSR Partnership Program	Testimoni Testimonial	Dokumentasi Documentation
1	Pemerintah Provinsi Riau Riau Provincial Government	Bantuan Sekolah Sepak Bola Tunas Negeri Assistance for Tunas Negeri Football School	BRK Syariah membuktikan komitmennya terhadap pembinaan atlet muda demi melahirkan talenta emas dari Bumi Lancang Kuning dengan menyediakan sarana dan Prasarana. Fasilitas latihan ini adalah kunci untuk menciptakan gaya hidup sehat sekaligus wadah pembentukan karakter positif bagi calon atlet profesional Riau di masa depan. BRK Syariah demonstrates its steadfast commitment to nurturing youth athletic potential to cultivate premier talent from 'Bumi Lancang Kuning' through the provision of comprehensive infrastructure. These training facilities serve as a strategic pillar for fostering healthy lifestyles while acting as a catalyst for character development among future professional athletes in Riau.	

No	Pemegang Saham Shareholders	CSR Program Kemitraan CSR Partnership Program	Testimoni Testimonial	Dokumentasi Documentation
2	Kab. Bengkalis Bengkalis Regency	Bantuan Ponpes Darussalam Al-Bantani Bengkalis Assistance for Darussalam Al-Bantani Islamic Boarding School, Bengkalis	Menciptakan lingkungan belajar yang lebih representatif dan nyaman proses transmisi ilmu agama dan pembentukan karakter mulia dapat berjalan lebih optimal, sehingga, diharapkan pondok pesantren ini mampu mencetak generasi *Qurani* yang unggul dan mandiri. Establishing a more representative and conducive learning environment to optimize the transmission of religious knowledge and character building; thus, empowering this Islamic boarding school to produce an excellent, independent, and Quranic-centered generation.	
3	Kab. Kampar Kampar Regency	Bantuan 650 (Enam ratus lima puluh) Paket Sembako untuk 26 (Dua puluh enam) Panti Asuhan dan 130 (Seratus tiga puluh) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kab. Kampar. Assistance of 650 (Six hundred fifty) Basic Food Packages for 26 (Twenty-six) Orphanages and 130 (One hundred thirty) Social Welfare Service Recipients (PPKS) in Kampar Regency	Meringankan beban ekonomi masyarakat rentan dan bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan pokok bagi anak-anak yatim dan penyandang masalah sosial, sekaligus sebagai instrumen penguatan jaring pengaman sosial daerah dan diharapkan berdampak positif berupa peningkatan kesejahteraan dan rasa kepedulian antarsesama, yang menegaskan peran BRK Syariah dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan bantuan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya Kab. Kampar. Mitigating the economic burden on vulnerable communities and ensuring the fulfillment of primary food security for orphans and the socially underprivileged. This initiative serves as a regional social safety net instrument, aimed at enhancing welfare and social cohesion, thereby reaffirming BRK Syariah's role in advancing social justice and the equitable distribution of assistance across all societal strata, particularly in Kampar Regency.	
4	Kab. Indragiri Hilir Indragiri Hilir Regency	Pembangunan Ponpes Tarbiyatul Qur'an (Yayasan Insan Penghapal Qur'an Indonesia) Kab. Indragiri Hilir. Construction of Tarbiyatul Qur'an Islamic Boarding School (Insan Penghapal Qur'an Indonesia Foundation), Indragiri Hilir Regency	Memperluas akses pendidikan berbasis *tahfiz* dan bertujuan untuk mempercepat ketersediaan infrastruktur pendidikan yang representatif guna mendukung lahirnya generasi penghapal Al-Qur'an yang berakhlak mulia dan berdaya saing serta diharapkan pondok pesantren ini menjadi pusat syiar Islam yang kokoh di Indragiri Hilir, sekaligus memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang agamis dan berkontribusi nyata pada pembangunan daerah. Expanding access to *Tahfiz*-based education and accelerating the availability of representative educational infrastructure to support the emergence of a noble and competitive generation of Quranic memorizers. This Islamic boarding school is envisioned as a robust center for Islamic outreach in Indragiri Hilir, yielding long-term benefits by enhancing the quality of religious human capital and contributing significantly to regional development.	
5	Kab. Kepulauan Meranti Kepulauan Meranti Regency	Perbaikan Sarana Olahraga Untuk Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PELTI) Kab. Kep. Meranti Repair of Sports Facilities for the Indonesian Tennis Association (PELTI) of Kepulauan Meranti Regency	Langkah nyata dalam merevitalisasi infrastruktur olahraga yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas lapangan yang lebih standar dan representatif bagi para atlet serta pecinta tenis, guna menunjang produktivitas latihan dan pencarian bakat muda secara optimal dan diharapkan semangat sportivitas masyarakat meningkat, sekaligus mampu melahirkan atlet tenis berprestasi yang dapat membawa nama baik Kepulauan Meranti. A concrete step in revitalizing sports infrastructure aimed at providing standardized and representative court facilities for athletes and tennis enthusiasts. This initiative is designed to optimize training productivity and talent scouting, fostering a spirit of sportsmanship within the community while producing high-achieving tennis athletes to enhance the prestige of the Meranti Islands.	
6	Kota Batam Batam City	Nihil Nil	-	-
7	Kab. Bintan Bintan Regency	- Bantuan 10 (Sepuluh) Pelaku Usaha UMKM KUBE Lengkuas - Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur Kab. Bintan - Bantuan 10 (Sepuluh) Pelaku Usaha UMKM UP2K Serai Wangi - Kel. Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan - Assistance for 10 (Ten) MSME Actors of KUBE Lengkuas - Gunung Lengkuas Sub-district, Bintan Timur District, Bintan Regency. - Assistance for 10 (Ten) MSME Actors of UP2K Serai Wangi - Kijang Sub-district, Bintan Timur District, Bintan Regency.	Bantuan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas produksi, digitalisasi usaha, dan optimalisasi potensi komoditas daerah. Secara langsung mendorong peningkatan pendapatan keluarga, penciptaan lapangan kerja di tingkat kelurahan, serta penguatan sinergi antara sektor korporasi dengan pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok di Kabupaten Bintan. This assistance aims to strengthen local economic autonomy by increasing production capacity, driving business digitalization, and optimizing regional commodity potential. It directly facilitates family income enhancement, job creation at the sub-district level, and reinforces synergy between the corporate sector and group-based community empowerment in Bintan Regency.	 

No	Pemegang Saham Shareholders	CSR Program Kemitraan CSR Partnership Program	Testimoni Testimonial	Dokumentasi Documentation
8	Kab. Rokan Hilir Rokan Hilir Regency	Nihil Nil	-	
9	Kab. Natuna Natuna Regency	Nihil Nil	-	
10	Kab. Siak Siak Regency	Kegiatan Pemilihan Bujang Dara Riau Tahun 2025 di Pekanbaru. Riau Bujang Dara Selection Event 2025 in Pekanbaru.	Representasi generasi muda terbaik sebagai duta wisata yang mampu mempromosikan potensi pariwisata, seni budaya, dan ekonomi kreatif Kabupaten Siak ke tingkat provinsi maupun nasional. Sebagai sarana pelestarian budaya Melayu serta memperkuat *branding* daerah sebagai destinasi wisata unggulan, sekaligus menjadi wadah pengembangan kapasitas intelektual, etika, dan kepemimpinan pemuda Kab. Siak disektor pariwisata. Representing the finest youth as tourism ambassadors capable of promoting Siak Regency's tourism potential, arts, culture, and creative economy at both provincial and national levels. This program serves as a vehicle for preserving Malay culture and strengthening regional branding as a premier destination, while providing a platform for developing the intellectual capacity, ethics, and leadership of Siak's youth within the tourism sector.	
11	Kab. Pelalawan Pelalawan Regency	Sarana Olahraga untuk Persatuan Binaraga Fitness Indonesia – Pelalawan Sports Facilities for the Indonesian Bodybuilding and Fitness Association (PBFI) – Pelalawan	Menyediakan fasilitas latihan yang standar dan memadai guna mencetak atlet binaraga berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di kancah provinsi maupun nasional serta manfaat nyata berupa penguatan infrastruktur olahraga lokal, peningkatan minat generasi muda terhadap gaya hidup sehat dan produktif, sekaligus dukungan terhadap pembinaan atlet profesional secara berkelanjutan. Providing standardized and adequate training facilities to produce high-achieving bodybuilding athletes capable of elevating regional prestige on provincial and national stages. This initiative yields tangible benefits by strengthening local sports infrastructure, increasing youth engagement in healthy and productive lifestyles, and providing sustainable support for professional athlete development.	
12	Kab. Kuansing Kuansing Regency	Bantuan 1 (Ekor) Kerbau Untuk Acara Pengukuhan DT. Topo Suku Melayu dan Bagindo Ali Nagori Pangean. Assistance of 1 (One) Buffalo for the Inauguration Event of DT. Topo Suku Melayu and Bagindo Ali Nagori Pangean	Melestarikan nilai-nilai adat istiadat dan memperkuat identitas budaya lokal sebagai fondasi kerukunan sosial masyarakat. Dukungan operasional dalam penyelenggaraan prosesi adat yang sakral, dalam menjaga marwah kelembagaan adat serta kearifan lokal di wilayah Kuantan Singingi. Preserving traditional values and strengthening local cultural identity as the foundation of social harmony. This operational support facilitates sacred customary rituals, safeguarding the institutional dignity and local wisdom of the Kuantan Singingi region.	
13	Kota Pekanbaru Pekanbaru City	Bantuan Acara Nikah Massal Kota Pekanbaru Sebanyak 100 Pasangan. Assistance for the Pekanbaru City Mass Wedding Event for 100 Couples	Membantu warga kurang mampu mendapatkan legalitas hukum pernikahan secara negara dan agama demi menjamin hak sipil keluarga serta anak. Kemudahan akses administrasi kependudukan untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan kepastian hukum bagi masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru. Assisting underprivileged citizens in obtaining legal and religious marriage certification to secure the civil rights of families and children. This initiative streamlines access to population administration, enhancing social welfare and providing legal certainty for the community in Pekanbaru City.	
14	Provinsi Kepulauan Riau Kepulauan Riau Province	10 Masjid/ *Mushalla* Safari Ramadan 10 Mosques/Prayer Rooms for the Ramadan Safari	Mempererat silaturahmi dalam mendukung kelancaran ibadah selama bulan suci. Dukungan ini untuk perbaikan sarana prasarana ibadah, peningkatan kualitas kegiatan syiar Islam di pelosok kepulauan, serta pemerataan akses bantuan sosial keagamaan yang menyentuh langsung kebutuhan jemaah di berbagai titik strategis wilayah Kepri. Strengthening 'Silaturahmi' (communal bonds) to support the seamless performance of worship during the holy month. This support encompasses the improvement of religious infrastructure, elevating the quality of Islamic outreach in remote islands, and ensuring the equitable distribution of socio-religious assistance that directly addresses the needs of congregations across strategic locations in the Riau Islands (Kepri).	

No	Pemegang Saham Shareholders	CSR Program Kemitraan CSR Partnership Program	Testimoni Testimonial	Dokumentasi Documentation
15	Kota Tanjungpinang Tanjungpinang City	348 (tiga ratus empat puluh delapan) Paket Sembako (Beras 5kg; Terigu 1Kg; Minyak Goreng 1Lt; Gula 1Kg; Mentega 200gr) 348 (three hundred forty-eight) Basic Food Packages (5kg Rice; 1kg Flour; 1L Cooking Oil; 1kg Sugar; 200g Butter)	Meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu dan menjaga ketahanan pangan masyarakat dalam menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok. Ketersediaan bahan pangan esensial (beras, terigu, minyak goreng, gula, dan mentega) secara gratis bagi warga sasaran, sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah. Alleviating the economic burden on underprivileged families and maintaining community food security amidst fluctuations in commodity prices. The provision of free essential food supplies (rice, flour, cooking oil, sugar, and butter) to target beneficiaries strengthens the social safety net as part of regional poverty alleviation efforts.	
16	Kab. Rokan Hulu Rokan Hulu Regency	Perbaikan Ornamen Tulisan Dataran Tinggi Pematang Baih dan Batang Lubuh Water Front City Repair of the Highlands Text Ornaments of Pematang Baih and Batang Lubuh Water Front City	Memulihkan estetika dan daya tarik visual ikon wisata serta ruang publik utama daerah guna mendukung promosi pariwisata lokal. Peningkatan kualitas infrastruktur rekreasi masyarakat, penguatan identitas atau *branding* Kota Pasir Pengaraian untuk menciptakan lingkungan yang lebih representatif bagi aktivitas ekonomi kreatif dan sosial masyarakat Rokan Hulu. Restoring the aesthetics and visual appeal of tourism icons and primary public spaces to bolster local tourism promotion. This enhancement of community recreational infrastructure and urban branding for Pasir Pengaraian creates a more representative environment for creative economic activities and social engagement in Rokan Hulu.	
17	Kab. Kepulauan Anambas Kepulauan Anambas Regency	Pengadaan Gerobak Sebanyak 167 (Seratus enam puluh tujuh) Gerobak UMKM Procurement of 167 (One hundred sixty-seven) Carts for MSMEs	Memperkuat infrastruktur usaha mikro dan menata pusat kuliner daerah agar lebih representatif serta higienis bagi konsumen. Peningkatan kapasitas berjualan bagi ratusan pedagang lokal, penciptaan lapangan kerja mandiri yang lebih modern, serta penguatan estetika tata kota dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara merata di Anambas. Strengthening micro-enterprise infrastructure and revitalizing regional culinary centers to ensure more representative and hygienic consumer environments. This initiative increases the commercial capacity of hundreds of local vendors, creates modern self-employment opportunities, and enhances urban aesthetics to support equitable grassroots economic growth in Anambas.	
18	Kab. Karimun Karimun Regency	Sarana Olahraga Untuk Tapak Suci Putera Muhammadiyah Kab. Karimun Sports Facilities for Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Karimun Regency	Menyediakan fasilitas latihan yang standar dan memadai guna mendukung pembinaan atlet pencak silat usia dini hingga remaja dalam meraih prestasi di tingkat regional maupun nasional. Penguatan infrastruktur bela diri lokal, pelestarian warisan budaya bangsa melalui olahraga prestasi, serta menjadi wadah pengembangan karakter, disiplin, dan fisik pemuda untuk terhindar dari pengaruh negatif lingkungan sosial. Providing standardized training facilities to support the development of Pencak Silat athletes from early childhood to adolescence, aiming for regional and national achievement. This strengthens local martial arts infrastructure, preserves national cultural heritage through competitive sports, and serves as a platform for character, discipline, and physical development to shield youth from negative social influences.	
19	Kab. Lingga Lingga Regency	Sarana Olahraga Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) - Kel. Daik Kec. Lingga Kab. Lingga Sports Facilities for the Tarung Derajat Sports Family (KODRAT) - Daik Sub-district, Lingga District, Lingga Regency	Mendukung pembinaan atlet bela diri secara profesional dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas sarana fisik, penguatan disiplin dan karakter melalui olahraga, serta pembibitan atlet potensial yang mampu mengharumkan nama Kab. Lingga dalam berbagai ajang kompetisi. Supporting professional and sustainable mentorship for martial arts athletes. This includes enhancing physical infrastructure, reinforcing discipline and character through sports, and scouting potential athletes to elevate the prestige of Lingga Regency in various competitions.	
20	Kab. Indragiri Hulu Indragiri Hulu Regency	Nihil Nil	-	
21	Kota Dumai Dumai City	Bantuan Pondok Pesantren Al Bahjah Al Maunah Assistance for Al Bahjah Al Maunah Islamic Boarding School	Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan Islam dan kenyamanan fasilitas belajar mengajar di lingkungan pesantren. Penguatan infrastruktur pendidikan keagamaan dan penciptaan lingkungan *tahfiz* yang lebih representatif merupakan ikhtiar dalam mencetak generasi muda yang berakhlak mulia dan kompeten di Kota Dumai. Improving the quality of Islamic educational infrastructure and the comfort of teaching and learning facilities within the Pesantren environment. Strengthening religious education infrastructure and creating more representative *Tahfiz* environments represent a dedicated effort to produce a noble and competent youth generation in Dumai City.	 



LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN AUDITED 2025

AUDITED ANNUAL FINANCIAL REPORT 2025



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

(INDEPENDENT AUDITOR REPORT)

ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

ON
FINANCIAL STATEMENTS
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)
PER 31 DECEMBER 2025 AND 2024

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
AND
LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
AND
FINANCIAL STATEMENTS
PER 31 DECEMBER 2025

DAFTAR ISI / ***TABLE OF CONTENTS***

		Halaman / *Page*		
A.	**SURAT PERNYATAAN DIREKSI**		***Board of Directors' Statement Letter***	***A.***
	- Surat Pernyataan Direksi		*Board of Directors' Statement Letter* -	
B.	**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**		***INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***	***B.***
	- Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report* -	
C.	**LAPORAN KEUANGAN**		***FINANCIAL STATEMENTS***	***C.***
	- Laporan Posisi Keuangan	1 - 3	*Statement of Financial Position* -	
	- Laporan Laba Rugi	4 - 5	*Income Statement* -	
	- Laporan Perubahan Ekuitas	6 - 7	*Equity Change Report* -	
	- Laporan Arus Kas	8 - 9	*Cash flow Statement* -	
	- Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil	10	*Income And Profit Sharing - Reconciliation Report*	
	- Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat	11	*Statement Of Sources And - Distribution Of Zakat Funds*	
	- Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan	12	*Statement Of Sources And - Uses Of Qardhul Hasan Funds*	
	- Catatan atas Laporan Keuangan	13 - 131	*Notes Of Financial Statements* -	

=== ooOoo ===

A. SURAT PERNYATAAN DIREKSI

(BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT)

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah
Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru, Riau, 28116
Telp. (0761) 47070, Fax (0761) 42389
www.brksyariah.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2025
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
SYARIAH (PERSERODA)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Helwin Yunus, S.E., M.M.
   Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru
   Nomor Telp :
   Jabatan : (Plt.) Direktur Utama dan Direktur Pembiayaan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (PERSERODA) ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENT'S
FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2025
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
SYARIAH (PERSERODA)

We, the undersigned :

1. *Name* : *Helwin Yunus, S.E., M.M.*
   Office Address : *Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru*
   Phone Number :
   Function : *(Act.) President Director and Director of Finance*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial reports of PT Bank Riau Kepri Syariah (PERSERODA) ("Bank");*
2. *The company's financial statements have been prepared and presented in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia.*
3. *a. All information in the company's financial statement has been disclosed in a complete and truthful manner.*
   b. The company's financial statement do not contain any incorrect information or material fact, not do they omit information or material fact.
4. *We are responsible for the company's internal control system.*

We certify the accuracy of this statement.

Pekanbaru, 26 Maret 2026 / *Pekanbaru, March 26th, 2026*
Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

Helwin Yunus, S.E., M.M.
(Plt.) Direktur Utama dan Direktur Pembiayaan /
(Act.) President Director and Director of Finance

B. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

(INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT)

Kantor Akuntan Publik
Bustaman, Ezeddin & Putranto
Akuntan Publik Terdaftar dan Konsultan Manajemen
Izin Usaha No. : 1029/KM.1/2017

Kantor Pusat :
Gedung Sentra Kramat Blok B No. 18, Jl. Kramat Raya No. 7-9
Telp. 021-3156131 • Jakarta Pusat 10450 • www.kapbep.com
E-mail : infokap@kapbep.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. : 00024/2.1151/AU.4/07/0328-1/1/III/2026

Kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

To the Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakat funds, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2025, and its financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with Code of Ethics for Public Accountants established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have also fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal controls as management determines is necessary to

Kantor Cabang :
Jl. Bhakti No. 61, Asrama Haji Tabing, Padang 25171. • Telp. 0751-7055101
E-mail : herryputranto@kapbep.com • herryakuntan@yahoo.co.id

keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material*

Kantor Akuntan Publik
Bustaman, Ezeddin & Putranto

terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to cotinue as a going concern.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola bahwa kami mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto

00024

Hermen Bustaman, CA, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0328
Public Accountant License Number: AP.0328

26 Maret 2026 / *March 26, 2026*

C. LAPORAN KEUANGAN

(FINANCIAL REPORTS)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ASET				***ASSETS***
Kas	937.249.225.087	4	956.983.333.618	*Cash*
Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia	3.074.641.649.359	5	2.466.348.755.257	*Current Accounts And Placements With Bank Indonesia*
Giro dan Penempatan Pada Bank Lain	61.032.128.642	6	188.524.167.905	*Current Account and Placement With Other Banks*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-		-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Giro dan Penempatan Pada Bank Lain - bersih	61.032.128.642		188.524.167.905	*Total Current Account and Placement With Other Banks - net*
Investasi Pada Surat Berharga	4.677.867.043.294	7	4.881.312.993.711	*Investment in Marketable Securities*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-		-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Investasi Pada Surat Berharga - bersih	4.677.867.043.294		4.881.312.993.711	*Total Investment in Marketable Securities - net*
Piutang dan Pembiayaan		8		*Receivables and Financing*
Piutang *Murabahah*		8.1		*Receivables Murabahah*
Pihak Berelasi	113.745.791		-	*Related Parties*
Pihak Ketiga	10.362.918.780.925		12.778.524.965.636	*Third Parties*
Ijarah	252.449.118		173.034.291	*Ijarah*
Jumlah Piutang	10.363.284.975.834		12.778.697.999.927	*Total Receivables*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(378.810.012.542)		(370.437.117.143)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Piutang - bersih	9.984.474.963.292		12.408.260.882.784	*Total Receivables - net*
Pinjaman *Qardh*		8.2		*Funds of Qardh*
Pihak Berelasi	45.000.000		-	*Related Parties*
Pihak Ketiga	220.509.010.440		98.023.024.000	*Third Parties*
Jumlah Pinjaman *Qardh*	220.554.010.440		98.023.024.000	*Total Funds of Qardh*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(91.444.069)		(7.629.480)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Pinjaman *Qardh* - bersih	220.462.566.371		98.015.394.520	*Total Funds of Qardh - net*
Pembiayaan *Mudharabah*		8.3		*Financing Mudharabah*
Pihak Berelasi	-		-	*Related Parties*
Pihak Ketiga	-		1.894.944.320	*Third Parties*
Jumlah *Mudharabah*	-		1.894.944.320	*Total Mudharabah*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-		(1.593.155)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah *Mudharabah* - bersih	-		1.893.351.165	*Total Mudharabah - net*
Pembiayaan *Musyarakah*		8.4		*Financing Musyarakah*
Pihak Berelasi	2.781.244.933		32.781.363.963	*Related Parties*
Pihak Ketiga	11.027.506.214.259		8.454.910.339.583	*Third Parties*
Jumlah *Musyarakah*	11.030.287.459.192		8.487.691.703.546	*Total Musyarakah*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(146.590.607.147)		(70.644.791.649)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah *Musyarakah* - bersih	10.883.696.852.045		8.417.046.911.897	*Total Musyarakah - net*
Aset yang Diperoleh Untuk *Ijarah* - bersih	173.187.283.341	8.5	241.200.177.835	*Asset Acquired For Ijarah - net*
Jumlah Piutang dan Pembiayaan	**21.787.313.728.807**		**21.607.507.849.628**	*Total Receivables and Financing*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(525.492.063.758)		(441.091.131.427)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - bersih	**21.261.821.665.049**		**21.166.416.718.201**	*Total Financing - net*
Penyertaan Saham	1.555.783.335	9	1.555.783.335	*Investment in Shares*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.155.450.000)		-	
Jumlah Penyertaan Saham - bersih	400.333.335		1.555.783.335	
Aset Tetap - Bersih	361.907.342.002	10	383.736.681.271	*Fixed Assets - Net*
Aset Pajak Tangguhan	95.970.531.978	19	104.882.179.931	*Deferred Tax Assets*
Aset Lain-lain - Bersih	629.256.040.607	11	709.965.951.945	*Other Assets - Net*
JUMLAH ASET	**31.100.145.959.354**		**30.859.726.565.174**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	465.366.018.112	12	498.692.240.697	*Liabilities due immediately*
Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan	35.668.652.402	13	42.645.059.851	*Undistributed Revenue Sharing*
Simpanan *Wadiah*				*Wadiah Deposits*
Giro *Wadiah*		14		*Wadiah demand deposits*
Pihak Berelasi	1.286.404.721		1.478.710.241	*Related Parties*
Pihak Ketiga	108.887.476.152		155.196.473.537	*Third Parties*
	110.173.880.873		156.675.183.778	
Tabungan *Wadiah*		15		*Wadiah Savings Deposits*
Pihak Berelasi	5.215.710.257		9.861.399.536	*Related Parties*
Pihak Ketiga	1.664.616.804.940		1.493.674.542.940	*Third Parties*
	1.669.832.515.197		1.503.535.942.476	
Jumlah Simpanan *Wadiah*	**1.780.006.396.069**		**1.660.211.126.254**	*Total Wadiah Deposits*
Pendanaan dari Bank Indonesia (PaSBI)	401.373.600.000	16	1.502.950.250.000	*Funding from Bank Indonesia (PaSBI)*
Surat berharga yang diterbitkan SIMA	600.000.000.000	17	590.000.000.000	*Securities issued by SIMA*
Pinjaman yang diterima	281.471.618.527	18	241.696.507.938	*Borrowings*
Utang pajak	21.431.131.954	19	30.909.964.335	*Taxes payable*
Liabilitas Imbalan pasca kerja	67.908.495.494	20	83.639.024.126	*Post - Employment Benefit Liabilities*
Liabilitas Lain-lain	13.256.596.000	21	70.904.993.307	*Other Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**3.666.482.508.557**		**4.721.649.166.508**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA SYIRKAH TEMPORER - BUKAN BANK				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS - NOT BANK***
Giro *Mudharabah*		22		*Mudharabah Demand Deposits*
Pihak Berelasi	1.051.987.342.558		480.356.978.430	*Related Parties*
Pihak Ketiga	1.197.520.800.367		1.283.540.481.528	*Third Parties*
	2.249.508.142.925		1.763.897.459.958	
Tabungan *Mudharabah*		23		*Mudharabah Saving Deposits*
Pihak Berelasi	10.769.153.551		5.667.871.871	*Related Parties*
Pihak Ketiga	7.002.025.917.572		6.605.367.621.913	*Third Parties*
	7.012.795.071.123		6.611.035.493.784	
Deposito *Mudharabah*		24		*Mudharabah Time Deposits*
Pihak Berelasi	1.892.000.000		1.032.000.000	*Related Parties*
Pihak Ketiga	14.705.873.790.235		14.280.301.891.727	*Third Parties*
	14.707.765.790.235		14.281.333.891.727	
Jumlah dana syirkah temporer - bukan Bank	**23.970.069.004.282**		**22.656.266.845.468**	***Amount of temporary syirkah funds - not Bank***
DANA SYIRKAH TEMPORER - BANK				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS - BANK***
Giro *Mudharabah*	41.253.991.126	22	33.043.066.612	*Mudharabah Demand Deposits*
Tabungan *Mudharabah*	33.819.265.076	23	25.102.806.498	*Mudharabah Saving Deposits*
Deposito *Mudharabah*	1.800.000.000	24	4.600.000.000	*Mudharabah Time Deposits*
Jumlah dana syirkah temporer - Bank	**76.873.256.202**		**62.745.873.110**	***Amount of temporary syirkah funds - Bank***
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	**24.046.942.260.484**		**22.719.012.718.579**	***AMOUNT OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
EKUITAS				***EQUITY***
Modal Saham - Nilai Nominal		25		*Share Capital - Nominal Value*
Modal dasar - 34.000.000 saham Seri A dan 6.000.000 saham Seri B. Nilai nominal Rp100.000 per saham				*Authorized capital - 34,000,000 Series A shares and 6,000,000 Series B shares. Nominal value of Rp 100,000 per share*
Modal ditempatkan dan disetor penuh 12.092.607 saham pada 31 Desember 2025 dan 12.092.607 saham pada 31 Desember 2024	1.209.260.700.000		1.209.260.700.000	*Issued and fully paid capital of 12.092.607 shares as of December 31, 2025 and 12.092.607 shares as of December 31, 2024*
Tambahan modal disetor	2.084.940.000	26	2.084.940.000	*Additional paid-in capital*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak	(34.099.094.905)	20	(40.328.734.507)	*Remeasurement of employee benefits liabilities - net of tax*
Kerugian bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari surat berharga tersedia untuk dijual	11.367.340.857	7	(27.200.388.365)	*Unrealized loss net on changes in fair value of available for sale marketable securities*
Saldo laba		27		*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	1.846.010.805.225		1.861.628.489.388	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	352.096.499.136		413.619.673.570	*Unappropriated*
Jumlah saldo laba	2.198.107.304.361		2.275.248.162.959	*Total retained earnings*
Jumlah Ekuitas	**3.386.721.190.313**		**3.419.064.680.087**	***Total Equity***
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	**31.100.145.959.354**		**30.859.726.565.174**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

Pekanbaru, 26 Maret 2026 / *Pekanbaru, March 26, 2026*

brksyariah
berkah untuk semua
Direksi

Helwin Yunus, S.E., M.M.
(Plt.) Direktur Utama dan Direktur Pembiayaan /
(Act.) President Director and Director of Finance

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ending
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI *MUDHARIB*				***REVENUES FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB***
Pendapatan dari Jual Beli	1.124.078.737.376	28	1.324.667.658.575	*Income From Sales And Purchases*
Pendapatan dari Bagi Hasil	964.975.592.464	29	668.624.039.001	*Income From Profit Sharing*
Pendapatan dari *Ijarah* - bersih	20.240.305.397	30	17.235.875.027	*Income From Ijarah - net*
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	388.055.584.175	31	320.640.165.994	*Other Main Operating Income*
	2.497.350.219.412		**2.331.167.738.597**	
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	**983.292.429.129**	32	**926.717.440.785**	***THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN***
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	**1.514.057.790.283**		**1.404.450.297.812**	***BANK'S SHARE IN PROFIT***
PENDAPATAN USAHA LAINNYA		33		***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan	110.512.195.370		121.049.162.487	*Fee Based Income From Banking*
Pendapatan lainnya	7.529.754.221		6.077.986.479	*Other Income*
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	**118.041.949.591**		**127.127.148.965**	*Total Other Operating Income*
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Beban Tenaga Kerja	674.648.995.375	34	632.851.476.280	*Personnel Expenses*
Beban Umum dan Administrasi	449.654.849.461	35	404.031.737.855	*General and administrative*
Bonus *wadiah*	89.765.098	36	133.949.699	*Wadiah bonus*
Beban usaha lainnya	23.115.453.531	37	20.789.559.068	*Others operating expenses*
	1.147.509.063.465		**1.057.806.722.902**	
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan non-produktif - bersih	(85.556.382.331)	38	(23.190.432.171)	*Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
LABA USAHA	**399.034.294.078**		**450.580.291.705**	***OPERATING INCOME***
PENDAPATAN/ (BEBAN) NON USAHA - BERSIH	(29.520.913.666)	39	(26.957.141.658)	***NON OPERATING INCOME AND (EXPENSE) - NET***
LABA SEBELUM PAJAK	**369.513.380.413**		**423.623.150.046**	***PROFIT BEFORE TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		19.b		***INCOME (EXPENSES) TAX***
Pajak kini	(93.207.816.020)		(99.993.836.140)	*Current tax expenses*
Penyesuaian pajak tahun lalu	(3.597.373.362)		(27.220.300.872)	*Last year's tax adjustment*
Pajak tangguhan	3.723.507.356		42.964.735.124	*Deferred tax*
Pajak penghasilan - bersih	**(93.081.682.026)**		**(84.249.401.888)**	*Tax expenses - net*
LABA SETELAH PAJAK	**276.431.698.386**		**339.373.748.158**	***PROFIT AFTER TAX***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ending
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba-rugi:				*Items That Will Not Be Reclassified To Profit And Loss:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	7.986.717.438		(12.485.826.877)	*Remeasurement of employee benefits liabilities - net of tax*
Pajak penghasilan terkait	(1.757.077.836)		2.746.881.913	*Related income tax*
Pos-pos Yang Akan Direklasifikasi ke Laba-rugi:				*Items That Will Be Reclassified To Profit or Loss*
Kerugian Yang Belum Direalisasikan atas surat berharga Dalam Kelompok Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	49.445.806.694	7	35.963.147.557	*Unrealized Loss On Securities Measured At Fair Value Through Other Comprehensive Income*
Pajak penghasilan terkait	(10.878.077.472)	19.c	(7.911.892.462)	*Related income tax*
Jumlah Rugi Komprehensif Lain - bersih setelah pajak	**44.797.368.824**		**18.312.310.130**	*Total Other Comprehensive Loss - net of tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	**321.229.067.210**		**357.686.058.289**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
LABA PER SAHAM DASAR	**22.860**	40	**28.089**	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

Pekanbaru, 26 Maret 2026 / *Pekanbaru, March 26, 2026*

brksyariah
berkah untuk semua

Direksi

Helwin Yunus, S.E., M.M.
(Plt.) Direktur Utama dan Direktur Pembiayaan /
(Act.) President Director and Director of Finance

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ending
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid-up Share Capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Kerugian Yang Belum Direalisasi Atas Surat berharga Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain dan Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - Setelah Pajak/ *Unrealized Losses On Marketable Securities At Fair Value Through Other Comprehensive Income and Remeasurement of employee benefits liabilities - Net Of Tax*	Saldo laba (rugi)/ *retained earnings (loss)*		Total ekuitas/ *Total equity*	
				Telah Ditentukan penggunaaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unapproproriated*		
Saldo per 31 Desember 2023	**1.207.160.700.000**	**4.164.940.000**	**(55.251.643.459)**	**1.871.323.275.554**	**358.020.992.963**	**3.385.418.265.058**	***Balance on December 31, 2023***
Reklasifikasi modal disetor	2.100.000.000	(2.080.000.000)	-	-	-	20.000.000	*Additional paid - in capital*
Pembayaran deviden	-	-	-	-	(191.548.170.597)	(191.548.170.597)	*Payments of dividend*
Pembagian laba untuk cadangan	-	-	-	-	(78.038.143.577)	(78.038.143.577)	*Appropriation of general reserves*
Dana kemitraan	-	-	-	-	(14.188.753.378)	(14.188.753.378)	*Partnership funds*
Pembentukan cadangan	-	-	-	78.038.143.577	-	78.038.143.577	*Reserve formation*
Laba periode berjalan	-	-	-	-	339.373.748.158	339.373.748.158	*Profit for the current period*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak	-	-	(40.328.734.507)	-	-	(40.328.734.507)	*Remeasurement of employee benefit liabilities - net of tax*
Penyelesaian selisih Yadit Pembiayaan	-	-	-	(87.732.929.742)	-	(87.732.929.742)	*Tax underpayment*
Laba komprehensif lain	-	-	28.051.255.094	-	-	28.051.255.094	*Other comprehensive loss*
Saldo per 31 Desember 2024	**1.209.260.700.000**	**2.084.940.000**	**(67.529.122.872)**	**1.861.628.489.388**	**413.619.673.570**	**3.419.064.680.087**	***Balance on December 31, 2024***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form
an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ending
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid-up Share Capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Kerugian Yang Belum Direalisasi Atas Surat berharga Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain dan Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - Setelah Pajak/ *Unrealized Losses On Marketable Securities At Fair Value Through Other Comprehensive Income and Remeasurement of employee benefits liabilities - Net Of Tax*	Saldo laba (rugi)/ *retained earnings (loss)*		Total ekuitas/ *Total equity*	
				Telah Ditentukan penggunaaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappproproriated*		
Saldo per 31 Desember 2024	**1.209.260.700.000**	**2.084.940.000**	**(67.529.122.872)**	**1.861.628.489.388**	**413.619.673.570**	**3.419.064.680.087**	***Balance on December 31, 2024***
Reklasifikasi modal disetor	-	-	-	-	-	*	*Additional paid - in capital*
Pembayaran deviden	-	-	-	-	(229.077.280.007)	(229.077.280.007)	*Payments of dividend*
Pembagian laba untuk cadangan	-	-	-	-	(93.327.780.744)	(93.327.780.744)	*Appropriation of general reserves*
Dana kemitraan	-	-	-	-	(16.968.687.408)	(16.968.687.408)	*Partnership funds*
Pembentukan cadangan	-	-	-	93.327.780.744	-	93.327.780.744	*Reserve formation*
Laba periode berjalan	-	-	-	-	276.431.698.386	276.431.698.386	*Profit for the current period*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak	-	-	6.229.639.602	-	-	6.229.639.602	*Remeasurement of employee benefits liabilities - net of tax*
Koreksi Tantiem atas laba 2023	-	-	-	-	7.094.376.689	7.094.376.689	*Correction of Bonus on 2023 Profit*
Realisasi Tantiem atas laba 2023	-	-	-	-	(5.675.501.351)	(5.675.501.351)	*Realization of Bonus on 2023 Profit*
Penyelesaian Remunerasi	-	-	-	(21.212.535.166)	-	(21.212.535.166)	*Remuneration Settlement*
Penyelesaian selisih Yadit Pembiayaan	-	-	-	(87.732.929.742)	-	(87.732.929.742)	*Settlement of difference Financing to be received*
Laba komprehensif lain	-	-	38.567.729.222	-	-	38.567.729.222	*Other comprehensive loss*
Saldo per 31 Desember 2025	**1.209.260.700.000**	**2.084.940.000**	**(22.731.754.048)**	**1.846.010.805.225**	**352.096.499.136**	**3.386.721.190.313**	***Balance on December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the year ending
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan jual beli, bagi hasil, *Ijarah* dan usaha utama lainnya	2.473.325.050.288	2.378.381.875.741	*Proceeds of margin, profit sharing ijarah and other main operating activities*
Pembayaran bagi hasil dana *Syirkah* temporer	(976.316.021.680)	(936.021.025.798)	*Payment of profit sharing of temporary syirkah funds*
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	6.179.553.994	5.147.400.019	*Receipts from recovery of financing and receivable written off*
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	111.862.395.597	121.979.748.946	*Receipt of other operating income*
Pembayaran tantiem	-	-	*Payment of tantiem*
Pembayaran beban usaha	(1.244.967.697.476)	(855.408.197.388)	*Payments of operating expenses*
Penerimaan atas pendapatan non-usaha bersih	(29.520.913.666)	(26.957.141.658)	*Receipts from non-operating income - net*
Pembayaran pajak penghasilan	(96.805.189.382)	(127.214.137.012)	*Payments of income taxes*
Pembayaran zakat	(1.128.595)	(994.519)	*Payment of zakat*
Penyaluran dana kebajikan	(3.077.233.778)	(2.953.036.201)	*Distribution of qardhul hasan funds*
Arus kas sebelum perubahan aset operasi dan liabilitas operasi	240.678.815.302	556.954.492.130	*Cash flow before changes in operating assets and liabilities*
(Kenaikan) Penurunan aset operasi			*(Increase) Decrease in operating assets*
Surat berharga	203.445.950.418	(1.435.588.702.317)	*Marketable securities*
Piutang	2.415.413.024.093	1.910.971.271.247	*Receivables*
Piutang *Qardh*	(122.530.986.440)	(38.933.875.000)	*Receivables of qardh*
Pembiayaan	(2.540.700.811.326)	(3.382.631.028.185)	*Financing*
Aset *Ijarah*	68.012.894.494	81.455.884.249	*Ijarah assets*
Penyertaan saham	-	-	*Investments in shares*
Aset lain-lain - bersih	249.223.681.615	(272.579.783.652)	*Other assets - net*
Kenaikan (Penurunan) liabilitas operasi			*Increase (Decrease) in operating liabilities*
Simpanan *mudharabah*	1.313.802.158.814	750.399.370.704	*Deposit mudharabah*
Simpanan *wadiah*	119.795.269.815	75.056.794.931	*Deposit wadiah*
Simpanan Bank	14.127.383.091	- 13.808.400.335	*Bank Savings*
Liabilitas segera	2.058.062.507	(643.937.303.429)	*Liabilities due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	(13.952.814.899)	18.607.170.026	*Share results that have not been shared*
Pendanaan dari Bank Indonesia (PaSBI)	(1.101.576.650.000)	922.825.250.000	*Funding from Bank Indonesia (PaSBI)*
Surat berharga yang diterbitkan SIMA	10.000.000.000	365.000.000.000	*Securities issued by SIMA*
Utang pajak	(9.478.832.381)	20.903.595.027	*Tax payable*
Liabilitas lain-lain	(57.648.397.306)	(10.991.437.657)	*Others liabilities*
Jumlah	549.989.932.495	(1.653.251.194.391)	*Total*
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	**790.668.747.797**	**(1.096.296.702.262)**	***NET CASH PROVIDED BY (USED IN) OPERATING ACTIVITIES***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the year ending
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025		2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian aset tetap	(22.034.194.693)		(65.097.396.819)	*Purchase of fixed assets*
Penjualan aset tetap	-		-	*Sale of fixed assets*
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	**(22.034.194.693)**		**(65.097.396.819)**	***NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pinjaman yang diterima	39.775.110.588		5.495.821.723	*Borrowings*
Pembayaran dividen	(229.077.280.007)		(191.548.170.597)	*Dividends paid*
Penggunaan laba untuk cadangan umum	(93.327.780.744)		(78.038.143.577)	*Use of profits for general reserves*
Program kemitraan dan bina lingkungan	(16.968.687.408)		(14.188.753.378)	*Partnership and environment program*
Pembentukan cadangan	93.327.780.744		78.038.143.577	*Reserve formation*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak	6.229.639.602	-	40.328.734.507	*Remeasurement of employee benefits liabilities - net of tax*
Penyelesaian selisih Yadit Pembiayaan	(87.732.929.742)	-	87.732.929.742	*Settlement of Financing Differences*
Modal disetor	1.418.875.338		2.100.000.000	*Paid-up capital*
Tambahan modal disetor	(21.212.535.166)		(2.080.000.000)	*Additional paid-in capital*
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	**(307.567.806.794)**		**(328.282.766.500)**	***NET CASH PROVIDED BY (USED) IN FINANCING ACTIVITIES***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**461.066.746.310**		**(1.489.676.865.581)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	**3.611.856.256.779**		**5.101.533.122.360**	***AT BEGINNING OF THE PERIOD***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	**4.072.923.003.089**		**3.611.856.256.779**	***AT END OF THE PERIODE***
Kas dan Setara Kas terdiri dari :				***Cash and Cash Equivalent :***
Kas	937.249.225.087		956.983.333.618	*Cash*
Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia	3.074.641.649.359		2.466.348.755.257	*Current Accounts And Placements With Bank Indonesia*
Giro dan Penempatan Pada Bank Lain	61.032.128.642		188.524.167.905	*Current Account and Placement With Other Banks*
Jumlah	**4.072.923.003.089**		**3.611.856.256.779**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INCOME AND PROFIT SHARING RECONCILIATION REPORT
For the year ending
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
Pendapatan pengelola dana sebagai Mudharib	2.497.350.219.412		2.331.167.738.597	*Revenue from fund management as Mudharib*
Pengurangan:				*Deduction:*
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:				*Current year income in which its cash and cash equivalents have not been received:*
Pendapatan jual beli dan bagi hasil	(167.127.790.665)		(163.230.315.551)	*Income from sales and purchase*
Pendapatan bagi hasil				*Income from profit sharing*
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal	(104.553.396.277)		(84.425.702.268)	*differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities*
Pendapatan dari ijarah - bersih	(256.646.806)		(332.522.061)	*Income from Ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya	(88.309.678.784)		(92.375.258.005)	*Other main operating income*
	(360.247.512.532)		(340.363.797.884)	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	2.137.102.706.880		1.990.803.940.713	*Available income for profit sharing*
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	1.153.810.277.750		1.064.086.499.928	*Bank's share from profit sharing*
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	983.292.429.129		926.717.440.785	*Third parties' share on return*
Dirinci atas:				*Details to:*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	947.623.776.728		884.072.380.934	*Fund owners' share on distributed profit sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	35.668.652.402		42.645.059.851	*Fund owners' share on undistributed profit sharing*
Jumlah	**983.292.429.129**		**926.717.440.785**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
For the year ending
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
Sumber dana zakat				*Sources of zakat funds*
Internal bank	-		-	*Internal bank*
Eksternal bank	817.082.651		624.480.899	*External bank*
Penyaluran dana zakat				*Distribution of zakat funds*
Disalurkan ke lembaga amil zakat	(815.954.056)		(623.486.380)	*Distributed to zakat amil institutions*
Saldo akhir dana zakat	**1.128.595**		**994.519**	*Ending balance of zakat funds*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
For the year ending
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ *Notes*	2024	
Sumber dana kebajikan				*Sources of qardhul hasan funds*
Infaq dan shadaqah	292.397		276.482	*Infaq and shadaqah*
Denda	379.506.680		603.647.299	*Penalty*
Pendapatan non-halal	211.956.718		75.282.588	*Non-halal income*
Sumbangan/hibah	-		-	*Donation/grant*
Lainnya	54.491.282		561.488.332	
	646.247.077		1.240.694.701	
Penggunaan dana kebajikan				*Uses of qardhul hasan funds*
Sumbangan	(522.049.500)		(150.000.000)	*Donation*
(Penurunan)/kenaikan dana kebajikan	124.197.577		1.090.694.701	*(Decrease)/increase qardhul hasan funds*
Saldo awal dana kebajikan	2.953.036.201		1.862.341.500	*Beginning balance of qardhul hasan funds*
Saldo akhir dana kebajikan	**3.077.233.778**		**2.953.036.201**	***Ending balance of qardhul hasan funds***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ("Bank") didirikan sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Status pendirian Bank disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau No.10 Tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No.18 tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1962. Status pendirian Bank diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No.14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau No.5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau No.14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Persetujuan perubahan status Bank dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan hasil Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh notaris Ferry Bakti, S.H. dengan Akta No. 33, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 No. 50. Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris Muhammad Dahad Umar, S.H. Notaris di Pekanbaru No. 36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan No. C- 09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003.

Perubahan badan hukum tersebut telah disahkan dalam RUPS tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan di dalam Akta Notaris No. 209 tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto, S.H. Notaris di Batam, dan telah mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003.

Perubahan nama Bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan No.AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata No.AHU.2- AH.01.01-6849 tanggal 25 Agustus 2010, serta persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/59/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ("the Bank") is established in accordance with Act No.13 of 1962 on Regional Development Banks. Commencing on April 1st, 1966 officially Bank Pembangunan Daerah Riau activities began with its status as a government owned Bank of Riau.

The status of the establishment of the Bank adjusted with Provincial Regulation Level Region Riau No.10 of 1975, which is then set back to the level I Riau Regional Regulation No. 18 of 1986 by Law No.13 Year 1962. Status of establishment of the Bank arranged and adapted to the Regional Regulation No.14 of 1992 about Regional Development Bank Riau pursuant to Act No.7 of 1992 on Banking. Finally the Provincial Regulation Level Region Riau No.5 of 1998 on First Amendment Regulations Provincial Level Region Riau No.14 of 1992 about Regional Development Bank Riau.

Status changing approval of the Bank from the Regional Company (PD) into a Limited Liability Company (PT) according to the results Decisions Annual General Meeting on June 26, 2002 made by notary Ferry Bakti, S.H. by Deed No. 33, which is then determined by the Regional Regulation No. 10 of 2002 dated August 26, 2002 and has been enacted in the Riau Provincial Gazette 2002 No. 50. Conversion of the law has been made with Deed number 36 dated January 18, 2003 by Muhammad Dahad Umar, S.H. Notary in Pekanbaru which was approved by the Minister of Justice and Human Rights with Decree No. C- 09851.HT.01.01.TH.2003 May 5, 2003.

Changes in the legal entity has been approved in the Annual General Meeting on June 13, 2003 are set forth in the Deed No. 209 dated June 13, 2003 Notary Yondri Darto, S.H., Notary in Batam, and has also received the approval of the Senior Deputy Governor of Bank Indonesia No.5/30/KEP.DGS/2003 dated July 22, 2003.

Name Changing of the Bank from PT Bank Pembangunan Daerah Riau became PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri accordance to the EGM decision on April 26, 2010, after the approval of the Minister of Justice and Human Rights through decision letter No.AHU- 36484.AH.01.02 Year 2010 dated July 22, 2010 and the letter of the General Director of Legal Administration Director of Civil No.AHU.2-AH.01.01-6849 on August 25, 2010, as well as the approval of Bank Indonesia in Bank Indonesia Governor Decree No.12/59/KEP.GBI/2010 dated September 23, 2010.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Berdasarkan Surat dari Bank Indonesia No.6/7/DPbs/Pbr tanggal 27 Februari 2004 dinyatakan bahwa Bank Indonesia Menyetujui Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank Riau dengan memperhatikan ketentuan PBI No.4/1/PBI/2002.

Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.9/5/KEP.DpG/2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang penunjukan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau sebagai Bank Umum Devisa ditetapkan bahwa Bank harus melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dengan nasabahnya dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di luar negeri.

Bank juga wajib menyampaikan laporan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi devisa dan kegiatan valuta asing yang telah dan sedang dilakukan kepada Bank Indonesia setempat.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 pada tanggal 26 April 2010 Notaris Fery Bakti, S.H. yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-36484.AH.01.02. Tahun 2010 pada tanggal 22 Juli 2010 bahwa Bank mengganti nama Perseroan dari semula "PT Bank Pembangunan Daerah Riau" atau disingkat "PT Bank Riau" berubah menjadi "PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" atau disingkat "PT Bank Riau Kepri".

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan oleh Notaris Pupung Mulyantini, S.H., M.H. tanggal 14 Juni 2022 Nomor 17, Bank memutuskan untuk menyetujui mengubah nama Bank dari “PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri” disingkat “PT. Bank Riau Kepri” menjadi “PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah" disingkat “PT Bank Riau Kepri Syariah”. Bank memulai kegiatan operasionalnya sebagai Bank Umum Syariah mulai tanggal 22 Agustus 2022. Akta perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bank telah memperoleh izin Usaha Bank Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-93/D.03/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda). Bank efektif melakukan aktivitas perbankan syariah pada tanggal 22 Agustus 2022. Hal ini sesuai kesiapan Bank Umum beroperasi secara penuh sebagai Bank Umum Syariah dan sesuai POJK No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah tanggal 30 Agustus 2022.

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Establishment and General Information** (continued)*

Based on the Letter from Bank Indonesia No.6/7/DPbs/Pbr dated on February 27th, 2004 stated that Bank Indonesia Approved the Principal of Opening the Branch Office of Sharia Bank Riau by considering the provisions of PBI No.4/1/PBI/2002.

Based on the Decree Letter by the Deputy Governor of Bank Indonesia No.9/5/KEP.DpG/2007 dated March 15, 2007 on the appointment of Limited Liability Company Bank Pembangunan Daerah Riau as Foreign Exchange Public Bank resolving that the Bank must perform its banking business activities in foreign exchange with its customers and or performing banking transactions with parties overseas.

The bank also is obligated to deliver written reports related to the performance of foreign exchange transaction and foreign exchange activities already and being performed to the local Bank Indonesia.

Based on Decision meeting was notarial deed No. 41 dated April 26, 2010 by Notary Fery Bakti, S.H. was had been aproved by Human Rights and Law Minister No.AHU- 36484.AH.01.02. year 2010 dated on July 22nd, 2010 is Bank was replacement the company name which before are "PT Bank Pembangunan Daerah Riau" or "PT Bank Riau" became "PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" or "PT Bank Riau Kepri".

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders notarized by Pupung Mulyantini, S.H., M.H. June 14, 2022 Number 17, decided to agree to change the name of the Bank from "PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" abbreviated as "PT. Bank Riau Kepri" to "PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah" abbreviated "PT Bank Riau Kepri Syariah". The Bank started its operational activity as a Shariah Commercial Bank starting on August 22, 2022. The amendment deed has been approved by the Otoritas Jasa Keuangan.

The Bank has obtained a Sharia Bank Business License from the Financial Services Authority (OJK) in accordance with a copy of the Decree of the Members of the OJK Board of Commissioners No.KEP-93/D.03/2022 dated 4 July 2022 concerning Granting Permits to Change Business Activities of Conventional Commercial Banks into Sharia Commercial Banks PT Regional Development Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). The Bank will effectively carry out sharia banking activities on 22 August 2022. This is in accordance with the readiness of Commercial Banks to operate fully as Sharia Commercial Banks and in accordance with POJK No.16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks dated 30 August 2022.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Maksud dan Tujuan

Tujuan pendirian Bank adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menyediakan pembiayaan pembangunan, penghimpunan dana dan melaksanakan pekerjaan penyimpanan uang daerah serta kegiatan perbankan pada umumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank mempunyai Visi "Sebagai perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat".

c. Struktur Organisasi dan Manajemen

Berdasarkan Akta Notaris No. 36 Tanggal 22 Mei 2024 di Notaris Pupung Mulyantini, S.H., M.H. (Notaris di Kota Pekanbaru) bahwa menyetujui penarikan dan pergantian sewaktu-waktu Komisaris Utama Non Independen Perseroan yaitu Bapak Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si efektif perhari ini setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ditutup.

Perubahan Susunan Kepengurusan PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun 2025 terakhir telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan surat nomor S-354/KO.154/2025 tanggal 9 Desember 2025, dengan adanya persetujuan pengunduran diri Saudari Rita Anugrah dari jabatannya sebagai Komisaris Independen dan pengangkatan kembali Saudara Roy Prakoso sebagai Komisaris Independen sesuai dengan Salinan Akta Nomor 45 tanggal 23 Oktober 2025 yang telah dinotariilkan oleh Justitia Ferryanto, S.H., M.H. (Notaris di Kota Batam).

Susunan Kepengurusan PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda) tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

b. Purpose and Objectives

The purpose of establishing the Bank is to assist and encourage economic growth and regional development in all fields, as well as as a source of regional income in order to improve the living standards of the people by providing development financing, raising funds and carrying out regional money storage work and banking activities in general, as long as it does not conflict with applicable laws and regulations.

Bank has a vision "As a Banking Incorporation which is capable to grow and become prominent in the region, has a professional management and push the regional economic growth so that it can empowering people's economy".

c. Structure and Management

Based on Notarial Deed No. 36 dated May 22, 2024 at Notary Pupung Mulyantini, S.H., M.H. (Notary in Pekanbaru City) that approves the withdrawal and replacement at any time of the Company's Non-Independent President Commissioner, namely Mr. Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si effective today after the Extraordinary General Meeting of Shareholders is

The latest changes in the Management Composition of PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda) in 2025 have been recorded in the Financial Services Authority's supervisory administration letter number S-354/KO.154/2025 dated December 9, 2025, with the approval of the resignation of Ms. Rita Anugrah from her position as Independent Commissioner and the reappointment of Mr. Roy Prakoso as Independent Commissioner in accordance with the Copy of Deed Number 45 dated October 23, 2025 which has been notarized by Justitia Ferryanto, S.H., M.H. (Notary in Batam City).

The composition of the management of PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda) as of December 31, 2025 is as follows:

31 Desember/ *December 31, 2025*		
a. Dewan Komisaris		*a. Board of Commissioner*
• Komisaris Utama	-	*President Commissioner* •
• Komisaris Independen	-	*Independent Commissioner* •
• Komisaris Independen	Dr. Roy Prakoso, S.E, M.M	*Independent Commissioner* •
b. Dewan Direksi		*b. Board of Director*
• Direktur Utama *)	Helwin Yunus, S.E., M.M.	*President Director *)* •
• Direktur Pembiayaan	Helwin Yunus, S.E., M.M.	*Director of Finance* •
• Direktur Dana dan Jasa	-	*Funding and Services Director* •
• Direktur Operasional	-	*Operational Director* •
• Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Fajar Restu Febriansyah, S.E	*Director of Compliance and Risk Management* •

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Organisasi dan Manajemen (lanjutan)

1. GENERAL *(continued)*

c. Structure and Management *(continued)*

	31 Desember/ *December 31, 2025*	
c. Dewan Pengawas Syariah		*c. Board of Sharia Supervisors*
• Ketua	H. Zulhendri Rais, Lc., M.A	*Chairman* •
• Anggota	-	*Member* •

*) Sesuai dengan Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Nomor 3 tanggal 28 April 2025, RUPS menetapkan Saudara Helwin Yunus sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama sampai dengan dilantiknya Direktur Utama Perseroan yang baru.

*) *In accordance with the Copy of the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Number 3 dated April 28, 2025, the GMS appointed Mr. Helwin Yunus as Acting President Director until the inauguration of the new President Director of the Company.*

Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) Nomor 202/KEPDIR/2025 tanggal 21 November 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 Tentang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) sebagai berikut:

Decision of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) Number 202/KEPDIR/2025 dated November 21, 2025 Concerning the Third Amendment to the Decision of the Board of Directors Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 Concerning the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) as follows:

a. Komite Audit Bank		*a. Bank Auditor Committee*
• Ketua	Dr. Roy Prakoso, S.E, M.M	*Chairman* •
• Anggota	Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
• Anggota	Indarti, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
b. Komite Pemantau Risiko		*b. Risk Monitoring Committee*
• Ketua merangkap Anggota	Dr. Roy Prakoso, S.E, M.M	*Chairman* •
• Anggota	Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
• Anggota	Indarti, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
• Anggota	H. Zulhendri Rais, Lc., M.A	*Member* •
c. Komite Remunerasi dan Nominasi		*c. Remuneration and Nomination Committee*
• Anggota	Dr. Roy Prakoso, S.E, M.M	*Member* •
• Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen SDI (*ex officio*)	*Member* •

Satuan Kerja Auditor Internal dan Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Internal Auditor and Corporate Secretary Work Units are as follows:

a. Satuan Kerja Auditor Internal		*a. Internal Auditor Work Unit*
• Ketua	Muhamad Nanang	*Chairman* •
b. Sekretaris Perusahaan		*b. Corporate Secretary*
• Ketua	T.M. Fadhly Kholis	*Chairman* •

Susunan Kepengurusan PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda) tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the management of PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda) as of December 31, 2024 is as follows:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Organisasi dan Manajemen (lanjutan)

1. GENERAL *(continued)*

c. Structure and Management *(continued)*

	31 Desember/ *December 31, 2024*	
a. Dewan Komisaris		*a. Board of Commissioner*
• Komisaris Utama	-	*President Commissioner* •
• Komisaris Independen	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	*Independent Commissioner* •
• Komisaris Independen	Roy Prakoso, S.E, M.M	*Independent Commissioner* •
b. Dewan Direksi		*b. Board of Director*
• Direktur Utama	-	*President Director* •
• Direktur Pembiayaan	Helwin Yunus, S.E., M.M.	*Director of Finance* •
• Direktur Dana dan Jasa	H. M.A. Suharto, S.E	*Funding and Services Director* •
• Direktur Operasional	H. Said Syamsuri, S.E., M.M., Ak. CA	*Operational Director* •
• Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Fajar Restu Febriansyah, S.E	*Director of Compliance and Risk Management* •
c. Dewan Pengawas Syariah		*c. Board of Sharia Supervisors*
• Ketua	H. Zulhendri Rais, Lc., M.A	*Chairman* •
• Anggota	Saifudin Yuliar, Lc, M.Ag	*Member* •

Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) Nomor 096/KEPDIR/2024 tanggal 13 Juni 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 Tentang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) sebagai berikut:

Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) Number 096/KEPDIR/2024 dated June 13, 2024 Concerning Amendments to the Decree of the Board of Directors Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 Concerning the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) as follows:

a. Komite Audit Bank		*a. Bank Auditor Committee*
• Ketua merangkap Anggota	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	*Chairman* •
• Anggota	Roy Prakoso, S.E, M.M	*Member* •
• Anggota	Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
• Anggota	Indarti, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
b. Komite Pemantau Risiko		*b. Risk Monitoring Committee*
• Ketua merangkap Anggota	Roy Prakoso, S.E, M.M	*Chairman* •
• Anggota	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	*Member* •
• Anggota	Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
• Anggota	Indarti, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
c. Komite Remunerasi dan Nominasi		*c. Remuneration and Nomination Committee*
• Ketua merangkap Anggota	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	*Chairman* •
• Anggota	Roy Prakoso, S.E, M.M	*Member* •
• Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen SDI (*ex officio*)	*Member* •

Satuan Kerja Auditor Internal dan Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Internal Auditor and Corporate Secretary Work Units are as follows:

a. Satuan Kerja Auditor Internal		*a. Internal Auditor Work Unit*
• Ketua	Muhamad Nanang	*Chairman* •
b. Sekretaris Perusahaan		*b. Corporate Secretary*
• Ketua	Edi Wardana	*Chairman* •

Jumlah karyawan Bank pada akhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebanyak 2.994 orang dan 3.003 orang (tidak diaudit).

The number of Bank employees at the end of December 31, 2025 and 2024 was 2.994 people and 3.003 people respectively (unaudited).

1. UMUM (lanjutan)

d. Jaringan Kantor

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara Dang Merdu Jalan Jenderal Sudirman No. 464, Pekanbaru - Riau.

Posisi jaringan distribusi Bank yang tersebar di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Jaringan kantor :			***Office network***
- Pusat	1	1	*Head office* -
- Kantor cabang	23	23	*Branch office* -
- Kantor cabang pembantu	40	40	*Sub-branch office* -
- Kedai	49	49	*First class office* -
- Kantor kas	46	46	*Cash office* -
- Butik	1	1	*Boutique office* -
- Payment point	19	17	*Payment point office* -
- Kas keliling	16	16	*Mobile cash* -
- ATM/CRM/CDM	377	375	*ATM/CRM/CDM* -
- *Electronic Data Capture*	1275	600	*Electronic Data Capture* -

***1. GENERAL** (continued)*

d. Office Network

Head Office is located at Dang Merdu Tower on Jenderal Sudirman Street Number 464, Pekanbaru - Riau.

The position of the Bank's distribution network spread across Riau Province and Riau Islands Province as of 31 December 2025 and 2024 is as follows:

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi material yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti yang dijabarkan dibawah ini:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah ("PSAK Syariah"), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia ("PAPSI Revisi 2013").

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 401, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah". Berdasarkan PSAK 401, laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

(i) Laporan posisi keuangan
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
(iii) Laporan perubahan ekuitas;
(iv) Laporan arus kas;
(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
(vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The material accounting policies adopted in preparing the Bank's financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of financial statements

Presented below are the material accounting policies applied in the preparation of the financial statements of the Bank in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS"), Statements of Sharia Financial Accounting Standards ("SFAS Sharia"), Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by Institute of Indonesian Chartered Accountant and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines ("PAPSI Revised 2013").

The financial statements are prepared in accordance with SFAS 401, "Presentation of Sharia Financial Statements". Based on SFAS 401, a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

(i) Statement of financial position;
(ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income;
(iii) Statement of changes in equity;
(iv) Statement of cash flows;
(v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing;
(vi) Statement of sources and distribution of zakat funds;
(vii) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds; and
(viii) Notes to the financial statements.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual *(accrual basis)* dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas *(cash basis)*.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat, infaq dan shadaqah berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Basis of preparation of financial statements *(continued)*

The statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flow and statement of changes in shareholders' equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

The financial statements are presented on a historical cost basis, unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis, except statement of cash flow and statement of reconciliation of income and revenue sharing.

The statement of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

The statement of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to funds owners under cash basis.

The statement of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

The statement of sources and distribution of zakat funds show the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds in a particular date.

The statement of sources and uses of qardhul hasan funds show the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and the qardhul hasan funds balance in a particular date.

Zakat is part of the wealth which must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq and shadaqah funds are derived from the Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Pada tanggal 1 Januari 2025, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

Implementasi dari standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Bank di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

1) Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;

2) Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;

3) Suatu pihak adalah ventura bersama di mana Bank sebagai venturer;

4) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;

5) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Basis of preparation of financial statements *(continued)*

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah ("Rp") which also the Bank's functional currency. The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS")

On 1 January 2025, there were new standards and adjustments or amendments for prevailing standards and effective since that date as follows:

- *Amendment of SFAS 221: "Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding the lack of convertibility.*

The implementation of the above standard did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the Bank's financial statements for current period of prior financial years.

c. Transactions with Related Parties

The Bank enter into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS 224 regarding "Related Party Disclosures" and Regulation of Bapepam and LK No. KEP347/BL/2012, dated June 25, 2012 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies".

A party is considered as a related party of the Bank if:

1) Directly or indirectly through one or more intermediaries, is party (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has an interest in the Bank that provides significant influence to the Bank, or (iii) has joint control over the Bank;

2) It is a member of the same group as the Bank;

3) It is a joint venture in which the Bank acts as a venturer;

4) It is a member of the key management personnel of the Bank;

5) It is a close family member of an individual as described in point (1) or (4);

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

6) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5);

7) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 46 atas laporan keuangan.

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset non-Produktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (“SBIS”) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (“FASBIS”), giro dan penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang murabahah, piutang istishna, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan rekening penampungan.

Sesuai dengan PSAK 402 "Akuntansi Murabahah" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), Bank menghitung CKPN individual untuk piutang murabahah sesuai dengan ketentuan di ISAK 402 “Penurunan Nilai Piutang Murabahah”.

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

1). kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

c. Transactions with Related Parties *(continued)*

6) It is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for whom has significant voting rights in several entities, directly or indirectly, by the individuals described in point (4) or (5);

7) It is a post-employment benefit plan program for the employee benefit of either the Bank or entities related to the Bank.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details are presented in Note 46 of the financial statements.

d. Allowance for Impairment Losses on Earning and non-Earning Assets

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Certificates (“SBIS”) and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (“FASBIS”), current accounts and placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakahfinancing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees.

Non-earning assets are the Bank’s assets other than the earning assets which have potential loss, consisting of inter-office accounts, foreclosed collaterals and suspense accounts.

In accordance with SFAS 402 “Accounting for Murabahah” and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), the Bank calculates individual allowance for impairment losses for murabahah receivable in accordance with IFAS 402 “Impairment of Murabahah Receivables”.

The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired at each statement of financial position date.

Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

1). significant financial difficulty of the issuer or obligor;

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset non-Produktif (lanjutan)

2). pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;

3). pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

4). terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;

5). hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;

6). data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut;

7). memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan

8). kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for Impairment Losses on Earning and non-Earning Assets *(continued)*

2). a breach of contract, such as a default or arrears on principal or margin payment in margin or principal payments;

3). the lender, for economic or legal reasons relating to the debtor's financial difficulty, grants the debtor a concession that the lender would not otherwise consider;

4). it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganization;

5). the disappearance of an active market of financial assets due to financial difficulties;

6). observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified individually in the portfolio;

7). adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and

8). national or local conditions that correlate with breach of contract of the assets in the portfolio.

The Bank first assesses whether an objective evidence of impairment for financial assets that are individually significant and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar financing risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognised is excluded in the collective assessment of impairment

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset non-Produktif (lanjutan)

1). Piutang murabahah memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet;

2). Piutang murabahah yang direstrukturisasi atau pernah direstrukturisasi.

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang murabahah yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai;

2. Piutang murabahah yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; dan

3. Piutang murabahah yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

Bank menggunakan metode analisis migrasi yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis 5 (lima) tahun dalam menghitung *Probability of Default* ("PD") dan *Loss of Given Default* ("LGD").

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat margin efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan margin.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

d. Allowance for Impairment Losses on Earning and non-Earning Assets *(continued)*

1). Murabahah receivables which have collectibility status as substandard, doubtful, and loss;

2). Murabahah receivables that are restructured or have been restructured.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

1. Murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;

2. Murabahah receivables which individually have insignificant value; and

3. Restructured murabahah receivables which individually have insignificant value

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets which are evaluated collectively, grouped based on similar receivable risk characteristics and taking into account the receivable segmentation on the basis of historical loss experience (probability of default).

The Bank uses the migration analysis method which is a statistical model analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Bank uses 5 (five) years historical data to compute for the Probability of Default ("PD") and Loss of Given Default ("LGD").

Impairment losses on financial assets recorded at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective margin rate.

Impairment losses are recognised in statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortized cost.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operational income other than margin income.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset non-Produktif (lanjutan)

Aset produktif atas piutang istishna, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi. Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku. Selain itu, Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 7 Februari 2022.

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") adalah sebagai berikut:

1). Cadangan umum, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

2). Cadangan khusus, sekurang kurangnya sebesar:

a). 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;

b). 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;

c). 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan

d). 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").

Bank melakukan pengkajian kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif yang dibentuk berdasarkan POJK No. 02/POJK.03/2022 dan mempertimbangkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih.

Rekening perantara adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Temporary account adalah akun yang digunakan dalam operasional perbankan sehari-hari yang bersifat sementara dan harus segera diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for Impairment Losses on Earning and non-Earning Assets *(continued)*

Earning assets such as istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees. The Bank provides the allowance for impairment losses based on the estimated losses from uncollectible amount earning assets as stipulated in the applicable SFAS. Bank also implemented Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 dated January 31, 2022 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which was effective as of February 7, 2022.

The minimum allowance to be provided in accordance with Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") is as follows:

1). General reserve shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding current accounts and placements with Bank Indonesia, and securities issued by the government based on sharia principles and part of earning assets guaranteed cash collateral.

2). Special reserves, shall be at least:

a). 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value;

b). 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value;

c). 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and

d). 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

The criteria for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Regulation of the Financial Services Authority ("POJK").

The Bank conducts assessment upon the adequacy of the allowance for impairment losses on earning assets established based on POJK No. 02/POJK.03/2022 and consider the estimated loss of earning assets that is uncollectable.

Inter-branches account is receivable or payable arising from inter-branch transactions that are unsettled after a certain period of time.

Temporary account is an account containing unidentified transactions or transactions which are unable to be classified to the proper account due to the lack of adequate supporting documents.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset non-Produktif (lanjutan)

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening perantara dan *temporary account* .

Kualitas rekening perantara dan *loss of given default* ditetapkan sebagai berikut:

1). Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.

2). Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro wadiah pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS") dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS").

e. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

FASBIS dan SBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip masing-masing adalah wadiah dan jualah. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

f. Giro dan Penempatan pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari Bank Umum Syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank.

Dana penerimaan jasa giro yang berasal dari bank non-syariah dikategorikan sebagai dana non-halal, sehingga Bank Syariah menyalurkannya sebagai dana kebajikan. Sebelum dana kebajikan tersebut disalurkan, maka pencatatannya di sisi liabilitas.

g. Investasi pada surat berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (sukuk).

Pada saat pengakuan awal, Bank menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for Impairment Losses on Earning and non-Earning Assets *(continued)*

The Bank is required to settle its inter-branch account and temporary account.

The quality of inter-branch account and loss of given default are determined as:

1). Current, if the transaction has been recorded in the Bank's book up to 180 (one hundred and eighty) days.

2). Loss, if the transaction has been recorded in the Bank's book over 180 (one hundred and eighty) days.

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS") and Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS").

e. Current Accounts and Placements with Bank Indonesia

FASBIS and SBIS are certificates issued by Bank Indonesia as evidence of short-term deposit of funds with the principles of wadiah and jualah, respectively. Current accounts and placements with Bank Indonesia are presented at the outstanding balance.

f. Current Accounts and Placements with Other Banks

Current accounts with other Banks are stated at their outstanding balances net of allowance for impairment losses. Bonuses received by the Bank from Sharia Commercial Banks are recognised as other operating income. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks are not recognised as the Bank's income.

The received current account service funds that come from non-sharia Bank are categorized as Non-Halal funds, so Sharia Bank then distributed as qardhul hasan funds. Before the qardhul hasan funds are distributed, it is recorded in liabilities

g. Investments in marketable securities

Sharia marketable securities are proof of investments under sharia principles commonly traded in sharia money market and/or sharia stock exchange, such as sharia bonds (sukuk).

At initial recognition, the Bank determines the classification of investments in sukuk either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut:

a. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan/atau hasilnya;
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi komprehensif;
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan dan kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

h. Piutang

Piutang terdiri dari piutang murabahah, piutang istishna dan piutang ijarah.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Investments in marketable securities *(continued)*

Sukuk classifications are as follows:

a. Measured at amortized cost

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and/or the results;*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost;*
- *The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognised in profit or loss.*

b. Measured at fair value through other comprehensive income

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the sukuk, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost;*
- *The difference between acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and is recognised in comprehensive income;*
- *Gain or loss from changes of fair value is recognised in other comprehensive income after considering unamortized difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has been previously recognised in other comprehensive income. When sukuk is derecognised, the accumulated gain or loss which was been previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss as reclassification adjustment.*

c. Measured at fair value through profit or loss

- *Sukuk acquisition cost excludes transaction cost;*
- *The difference between fair value and the carrying value is recognised in profit or loss.*

h. Receivables

Receivables consist of murabahahn receivables, istishna receivables and ijarah receivables.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Piutang (lanjutan)

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama.

Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Istishna adalah akad penjualan antara al-mustashni (pembeli) dan al-shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugaskan produsen untuk membuat atau mengadakan al-mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Piutang istishna disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Margin istishna yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istishna.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Piutang ijarah adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar pada saat jatuh tempo. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang ijarah disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang ijarah.

i. Pinjaman qardh

Pinjaman qardh adalah penyaluran dana dengan akad qardh.

Akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Pinjaman qardh meliputi pembiayaan dengan akad hawalah dan rahn. Akad hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (ujrah) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Receivables *(continued)*

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Bank, whereby the Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed.

Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus directly attributable transaction costs which is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition, are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

Istishna is a sale and purchase contract between al-mustashni (buyer) and al-shani (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply almashnu (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price.

Istishna receivables are stated at the amount billed to customer less allowance for impairment losses. Deferred istishna margin is presented as a contra account of istishna receivables.

Ijarah is the contract of transferring the rights (benefits) of an asset within a certain period of time with the payment of rent (ujrah) without the transfer of ownership of the asset itself.

Ijarah receivables are stated at the principal portion of unpaid rent income at maturity. Allowance for impairment losses accounts on Ijarah receivables is presented as a contra account of ijarah receivables.

i. Funds of qardh

Funds of qardh represent a distribution of funds with qardh contract.

Qardh contract is a borrowing contract with the condition that the borrower should repay the loan at a specified period of time.

Funds of qardh includes hawalah and rahn financing contract. Hawalah is a transfer of debts from debtors to other party (Bank) which obligate to shoulder or pay. The Bank will obtain a fee (ujrah) from this transaction, which is recognised as income when received.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Piutang (lanjutan)

Akad rahn merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan ujrah (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman qardh dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

j. Pembiayaan

Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah.

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (mudharib) selama jangka waktu tertentu.

Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

k. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

Aset yang diperoleh untuk ijarah merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (ijarah) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Objek sewa dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Receivables *(continued)*

Rahn contract is the pawn of goods or assets by customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and the Bank gets ujrah (benefits) in return which are recognised on an accrual basis.

Funds of qardh are recognised at the same amount of funds lent when these occur. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognised as revenue when these are incurred. On the statement of financial position date, funds of qardh is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

j. Financing

Financing with profit sharing scheme can be done in the form of mudharabah and musyarakah contract.

Mudharabah is a joint financing made between the Bank as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a business executor (mudharib) during a certain period.

The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (pre-determined ratio). On the statement of financial position date, mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musyarakah is a partnership contract among fund's owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position dates, musyarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the existing financing quality.

k. Assets Acquired for Ijarah

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statement of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation. Leased object in ijarah transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in ijarah muntahiyah bittamlik transaction is depreciated based on leased term.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah (lanjutan)

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dapat dilakukan dengan cara:

(i). Hibah

(ii). penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;

(iii). penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan

(iv). penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

l. Aset tetap

Aset tetap dinilai sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dinilai dengan metode revaluasi. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Tanah tidak disusutkan.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

k. Assets Acquired for Ijarah *(continued)*

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease contract.

The transfer of ownership right on the leased object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:

(i). A grant

(ii). sale prior to the end of contract for an amount equivalent to the remaining lease installments;

(iii). sale prior to the end of the agreement at a specified amount as agreed at the inception of the contract; and

(iv). installment sales at a specific price as agreed in the contract.

l. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation, except for land which is valued with revaluation method. The acquisition cost includes directly attributable cost for the acquisition of the asset.

Valuation is performed regularly to ensure that the fair value of the revalued assets does not differ materially from its carrying amount. Land is not depreciated.

Fixed assets, except land, are depreciated from the month of the usage of assets and computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

Penggolongan harta berwujud	Masa manfaat/ *Useful life*	Tarif penyusutan/ *Depreciation tarif*	*Group assets*	*Tangible property class*
Perabot / perlengkapan kantor	4 tahun/ years	25%	*Group I*	*Furniture / fixtures office*
Perabot / perlengkapan rumah dinas	4 tahun/ years	25%	*Group I*	*Furniture / fixture house official*
Perabot / perlengkapan mess	4 tahun/ years	25%	*Group I*	*Furniture / fixture mess*
Mesin kantor	4 tahun/ years	25%	*Group I*	*Office machine*
Komputer	4 tahun/ years	25%	*Group I*	*Computer*
Kendaraan	4 tahun/ years	25%	*Group I*	*Vehicle*
Perabot / perlengkapan kantor	8 tahun/ years	12,5%	*Group II*	*Office equipments / supplies*
Perabot / perlengkapan rumah dinas	8 tahun/ years	12,5%	*Group II*	*Home office equipments / supplies*
Kendaraan	8 tahun/ years	12,5%	*Group II*	*Vehicle*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Aset tetap (lanjutan)

Penggolongan harta berwujud	Masa manfaat/ *Useful life*	Tarif penyusutan/ *Depreciation tarif*	*Group assets*	*Tangible property class*
Bangunan kantor	20 tahun/ years	5%	*Fixed*	*Office building*
Bangunan rumah dinas	20 tahun/ years	5%	*Fixed*	*Home office building*
Bangunan mess	20 tahun/ years	5%	*Fixed*	*Boarding house building*
Bangunan gudang	20 tahun/ years	5%	*Fixed*	*Wwarehouse building*
Bangunan lainnya	20 tahun/ years	5%	*Fixed*	*Other building*

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Bank mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam tahun keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada “selisih revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya.

Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap “selisih revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Apabila aset tetap dilepas, maka nilai harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan dan keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap diakui pada “pendapatan dan beban non-usaha” dalam laporan laba rugi. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

m. Aset Lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari biaya dibayar dimuka.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Dalam kontrak perjanjian sewa, manajemen menggunakan basis akad syariah PSAK 407 Akuntansi Ijarah sehingga berpendapat atas sewa bukan merupakan ruang lingkup PSAK 116 Sewa.

Sewa dibayar dimuka diamortisasi selama masa sewa dengan menggunakan garis lurus (*straight-line method*).

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

l. Fixed assets *(continued)*

Costs after initial recognition are recognised as part of the carrying amount of the asset or as a separate asset, as appropriate, only when the Bank is likely to benefit economically in the future with respect to these assets and the acquisition cost can be reliably measured. The carrying value of the replaced part are removed from the accounts. All other repairs and maintenance are charged to the income statement in the financial period when these costs occur.

The increase in the carrying amount arising from revaluation of land is credited to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive

The decrease in the carrying amount that offset previous increase of the same asset is charged to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive income, other decrease is charged to the profit or loss.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

The net gains or losses arising from disposal of the fixed assets are determined by comparing the proceeds received from disposal with the carrying amount of the assets and recognised in “non-operating income and expenses” in the income statement. When the revalued assets are sold, amounts recorded in equity are transferred to retained earnings.

m. Other Assets

Other assets consist of prepaid expenses.

Prepaid expenses are amortized over the useful life using the straight-line method.

In the lease agreement contract, management uses the sharia contract basis of SFAS 407 Accounting for Ijara so that it is of the opinion that lease is not within the scope of SFAS 116 Lease.

Upfront rent is amortized over the life of the lease using the straight-line method.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

o. Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada bank lain.

Giro wadiah digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan wadiah adalah simpanan dana nasabah pada Bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Terhadap titipan tersebut, Bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan wadiah dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

p. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer adalah investasi yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.

Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah muthlaqoh, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytarokah dan akun lain yang sejenis, misalnya: giro mudharabah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Tabungan mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan mudharabah dicatat sebesar nilai simpanan dari nasabah.

Deposito mudharabah merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank.

Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

n. Obligations due Immediately

Obligations due immediately represent the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are stated at the amounts of the Bank's liabilities to the entrustee.

o. Deposits from Customers and Other Banks

Deposits represent other parties' deposits in the form of wadiah demand deposits and wadiah savings deposits. Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments, available for withdrawal at any time through cheque and demand deposit drafts and receive bonuses according to the Bank's policies. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors in the Bank.

Wadiah savings deposits are customers' deposits in the Bank which can be withdrawn at any time. For these deposits, the Bank is not required to give any benefits except in terms of voluntary bonuses. Wadiah deposits are stated at the amount payable to customers.

p. Temporary Syirkah Funds

Temporary syirkah funds represent investment received by the Bank. The Bank has the rights to manage and invest the funds in accordance with either the Bank's policy or restriction set by the depositors with the agreed profit sharing.

An example of temporary syirkah funds is the receipt of funds from a mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytaroka and other similar accounts. For example: mudharabah demand deposits, mudharabah savings deposits and mudharabah time deposits.

Mudharabah savings deposits represent funds from other parties which receive predetermined and pre-agreed profit sharing (nisbah) based on income derived by the Bank from the use of such funds. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn only at a certain point in time based on the agreement between the depositors and the Bank.

Mudharabah time deposits are stated at nominal amount based on the agreement between the depositors and the Bank.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Dana Syirkah Temporer (lanjutan)

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian.

Di sisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Dana syirkah temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi keuntungan.

q. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang murabahah, istishna, pendapatan dari ijarah, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pendapatan atas piutang murabahah menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang murabahah.

Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan istishna diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

p. Temporary Syirkah Funds *(continued)*

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability. This is because the Bank does not have any liability to return the fund to the owners, except for losses due to the management's negligence or misrepresentation.

On the other hand, temporary syirkah funds cannot also be classified as equity, because of the existence of maturity period and the absence of similar rights of depositors as with shareholders, such as voting rights and the rights to realize gain from current assets and other non-investment assets.

Temporary syirkah funds represent one of the statement of financial position accounts which is in accordance with sharia principles that provide rights to the Bank to manage and invest funds, including mixing of one fund with the other funds.

The owners of temporary syirkah funds receive parts of profit in accordance with the agreement and receive loss based on the proportion of fund from each parties. The profit distribution of temporary syirkah funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

q. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib

Revenue from fund management by the Bank as mudharib consists of income from murabahah receivables transactions, istishna receivables, income from ijarah, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing and other main operating income.

Income from murabahah receivables is recognised using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables.

When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future.

This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts

Income from istishna is recognised at the date of transfer of assets.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib (lanjutan)

Pendapatan ijarah diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Pendapatan usaha mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari pinjaman qardh, pendapatan dari SBIS, pendapatan dari FASBIS, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil investasi pada surat berharga.

r. Hak Pihak Ketiga atas bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip mudharabah mutlaqah atas pengelolaan dana mereka oleh Bank.

Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Bagian laba Bank yang dibagikan kepada pemilik dana dihitung dari pendapatan yang telah diterima.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Bank menghitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan kepada nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan untuk nasabah giro dan tabungan dengan akad wadiah dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang didapatkan melalui penggunaan dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

q. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib *(continued)*

Income from Ijarah is recognised proportionately over the contract period.

Musyarakah revenue which is distributed to active partners is recognised in accordance with the agreement, while musyarakah revenue which is distributed to passive partners is recognised as right of the passive partner to profit sharing and liability.

Revenue from mudharabah is recognised during the period of profit sharing in accordance with the agreed nisbah, while recognition based on projected income is not allowed. Loss incurred due to negligence on the part of fund manager is charged to the fund manager and shall not reduce the mudharabah investment.

Other main operating income consists of income derived from funds of qardh, SBIS, FASBIS, placements with other sharia banks and profit sharing from investment in marketable securities.

r. Third Parties' Share on Returns of Temporary Syirkah Funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents third parties' share on the income of the Bank derived from managing of such funds by the Bank under mudharabah mutlaqah principles.

The profit sharing is distributed on the cash basis.

The profit sharing distributed to fund owners is calculated based on the revenue of the Bank.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners. The Bank computes proportionately based on the allocation of funds from owners and the Bank which was used in financing and other earning assets granted.

The total available margin and profit sharing are distributed to customers and depositors as shahibul maal and to the Bank as mudharib in accordance with a predetermined nisbah, while for customers of demand deposits and savings deposits under wadiah contract might be granted bonuses according to the Bank's policy.

Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which are earned through the use of Bank's funds, are entirely entitled to the Bank, including income from the Bank's fee-based investments.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan diakui pada periode akuntansi dimana jasa diberikan, dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi dan dinilai berdasarkan jasa aktual yang telah diberikan sebagai proporsi atas total jasa yang harus diberikan.

t. Imbalan kerja

Imbalan kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama tahun berjalan jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program Pensiun Iuran Pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program cadangan iuran pasti Bank. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayarannya dikurangkan dari utang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program Imbalan Pasti dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti besar diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat.

Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2021.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit* .

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain terdiri atas:

i. Keuntungan dan kerugian aktuarial.

ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset).

iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Fee based Income from Banking Services

Fee based income from banking services is recognised in the accounting period in which the services are rendered, by reference to the stage of completion of the specific transaction and assessed on the basis of the actual service provided as a proportion of the total service to be provided.

t. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits such as salaries, social security contributions, short- term leaves and allowance of feast day are recognised during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined Contribution Plan

Contribution payable to the pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan. The contribution is accrued and recognised as expense when services have been rendered by qualified employees and actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined Benefit Plan and Other Long- term Employee Benefits

The post-employment benefits and other long-term employee benefits such as grand leaves are recognised as expense when services have been rendered by qualified employees.

The benefits are determined based on Bank regulations and Labor Law (UU) No. 11 of 2020 dated November 2, 2021.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit method.

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognised as other comprehensive income consist of:

i. *Actuarial gain and losses.*

ii. *Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets).*

iii. *The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Imbalan kerja (lanjutan)

Program Imbalan Pasti dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti - bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga bersih atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti bersih langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

u. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan/atau keberatan tersebut. Jika perlu, manajemen akan membentuk provisi berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

t. Employee Benefits *(continued)*

Defined Benefit Plan and Other Long- term Employee Benefits *(continued)*

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) – net, which is recognised as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits: current service cost, net interest expense of net defined benefit liabilities (assets), and re-measurement of liabilities (assets) is recognised immediately in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs are recognised as expense at the earlier date between the occurrence of the amendments or curtailment program occurs, and the recognition of the costs of restructuring or severance. Therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognised over the future vesting period.

u. Taxation

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable that those temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses will be utilized in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced when it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate part or all of the benefit of the deferred tax assets.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined. If needed, management will provide provisions based on the estimated amount which will be paid to tax authority.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi bersih tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke laba komprehensif lainnya dan dilaporkan ke ekuitas.

v. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Bank menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs *Reuters* pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

		2025		2024	
1 Dollar Amerika Serikat (USD)	Rp	16.675,00	Rp	16.095,00	*1 United States Dollar (USD)*
1 Euro (EUR)	Rp	19.571,45	Rp	16.758,12	*1 Euro (EUR)*
1 Dollar Singapura (SGD)	Rp	12.965,05	Rp	11.844,58	*1 Singapore Dollar (SGG)*
1 Riyal Arab Saudi (SAR)	Rp	4.446,50	Rp	4.284,00	*1 Saudi Arabia Riyal (SAR)*
1 Ringgit Malaysia (MYR)	Rp	4.108,16	Rp	3.597,86	*1 Malaysian Ringgit (MYR)*

w. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi

Sukuk Mudharabah Subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan garis lurus. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

u. Taxation *(continued)*

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement of financial position dates.

The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognised as "Income Tax Benefit/(Expense)" and included in the net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

v. Transaction and Balance in Foreign Currency

The Bank maintains its accounting records in Indonesian Rupiah. Transactions in foreign currencies are recorded at the prevailing exchange rates in effect on the date of the transactions.

At statement of financial position dates, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Reuters spot rates at 16:00 WIB (Western Indonesian Time).

The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

The exchange rates used in translating foreign currency amounts into Rupiah are as follows (full Rupiah):

w. Subordinated Sukuk Mudharabah

Subordinated Sukuk Mudharabah I is initially recognised at fair value and subsequently measured at amortized cost using straight line method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction cost.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Laba per Saham

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

y. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

z. Sumber Dana Kebajikan

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018, Sumber Dana Kebajikan yang didapat berasal dari Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP) apabila berasal dari:

1). Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba).

2). Transaksi Syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya)

3). Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan

4). Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

aa. Segmen Operasi

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Bank yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup hal-hal yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

x. Earning per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid-up shares during the related year.

y. Provisi

Provisions are recognised when the Bank has a present obligation (legal or constructive), as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

z. Source of Qardhul Hasan Funds

Based on Fatwa DSN-MUI No.123/DSN- MUI/XI/2018, source of Qardhul Hasan Funds is acquired from Funds that are Prohibited to be Recognised as Revenue (TBDSP Funds), if the funds come from:

1). The transaction that is not accordance with sharia principle and can not beavoided include interest revenue (riba).

2). The sharia transaction does not fulfill the term and condition (principle and/or requirement).

3). Penalty funds (punishment) because of not fulfilling the obligation on initial

4). Unknown funds, the owner is known but was not found or the owner is known but return cost is higher than the stated amount.

aa. Operating Segment

A segment is a distinguishable component of the business unit that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Segmen Operasi (lanjutan)

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal yang disajikan kepada Direksi sebagai pengambil keputusan operasional dan keuangan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

aa. Operating Segment *(continued)*

The Bank presents operating segment based on Bank's internal report that is presented to the Board of Directors as the Chief Operating Decision Maker (CODM).

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman qardh, pembiayaan, dan aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih

Bank menelaah kualitas aset pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang murabahah dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements and these require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh, financing, and assets acquired for ijarah - net

The Bank examines the quality of assets at statement of financial position date to assess whether impairment should be recorded in the profit or loss. In determining whether a provision for impairment losses should be recognised in the profit or loss, the Bank makes estimation of whether there is any indication of impairment in the asset quality. Such estimates are based on the assumption of a number of factors, and the end result may differ, resulting in future changes to allowance for impairment.

The specific condition of impaired counterparty in calculating allowances for impairment losses of murabahah receivables is evaluated individually based on management's best estimate of the present value of the expected cash in flows. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and/or the net realisable value of any underlying collateral. Each impaired assets is assessed on its merits, the workout strategy and estimated recoverable cash flows.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman qardh, pembiayaan, dan aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih (lanjutan)

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian pembiayaan yang melekat dalam portofolio piutang murabahah dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan segmentasi.

Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

b. Kewajiban Imbalan Kerja Karyawan

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja.

Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan. Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

c. Perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(continued)*

a. Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh, financing, and assets acquired for ijarah - net *(continued)*

Collectively assessed impairment allowances cover financing losses inherent in portfolios of murabahah receivables with similar economic characteristics when there is objective evidence of impairment, yet the individual impaired items cannot be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as financing quality and product segmentation.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

b. Employee Benefit Liabilities

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost or income for employee benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations.

In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability. Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

c. Taxation

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

Deferred tax assets are recognised for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

4. KAS / *4. CASH*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Kas	610.293.917.400	827.080.210.900	*Cash*
Kas ATM	146.169.600.000	116.086.500.000	*ATM Cash*
Kas ATM Pada Pihak Ketiga	173.035.600.000	-	*ATM Cash to Third Parties*
Jumlah	**929.499.117.400**	**943.166.710.900**	***Total***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	2.922.810.675	7.998.522.915	*United States Dollar*
Dolar Singapura	2.163.901.851	3.462.463.295	*Singapore Dollar*
Euro	174.675.191	137.584.165	*Euro*
Riyal Arab Saudi	2.314.447.715	1.621.948.104	*Saudi Arabia Riyal*
Ringgit Malaysia	174.272.255	596.104.238	*Malaysian Ringgit*
Jumlah	**7.750.107.687**	**13.816.622.718**	***Total***
Jumlah Kas	**937.249.225.087**	**956.983.333.618**	***Total Cash***

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By Currencies*

	2025	2024	
Rupiah	2.900.319.181.684	2.459.025.530.257	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	174.322.467.675	7.323.225.000	*United States Dollar*
Jumlah	**3.074.641.649.359**	**2.466.348.755.257**	***Total***

b. Berdasarkan jenis / *b. By type*

	2025	2024	
Rupiah			*Rupiah*
Giro pada Bank Indonesia	3.067.069.181.684	2.459.025.530.257	*Current Account With Bank Indonesia*
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	-	-	*Bank Indonesia Sharia Certificated Facilities (FASBIS)*
	3.067.069.181.684	2.459.025.530.257	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Giro Pada Bank Indonesia	7.572.467.675	7.323.225.000	*Current Account With Bank Indonesia*
Jumlah	**3.074.641.649.359**	**2.466.348.755.257**	***Total***

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By time period*

Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 Bulan	2.900.319.181.684	2.459.025.530.257	*≤ 1 Month*
1 - ≤ 3 Bulan	-	-	*1 - ≤ 3 Months*
3 - ≤ 12 Bulan	-	-	*3 - ≤ 12 Months*
Sub Jumlah	**2.900.319.181.684**	**2.459.025.530.257**	***Sub total***
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
< 1 bulan	174.322.467.675	7.323.225.000	*< 1 month*
1-3 bulan	-	-	*1-3 month*
Sub Jumlah	**174.322.467.675**	**7.323.225.000**	***Sub total***
Jumlah	**3.074.641.649.359**	**2.466.348.755.257**	***Total***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

d. Berdasarkan umur jatuh tempo

Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 Bulan	2.900.319.181.684	2.459.025.530.257	*≤ 1 Month*
1 - ≤ 3 Bulan	-	-	*1 - ≤ 3 Months*
3 - ≤ 12 Bulan	-	-	*3 - ≤ 12 Months*
Sub Jumlah	**2.900.319.181.684**	**2.459.025.530.257**	***Sub total***
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
< 1 bulan	174.322.467.675	7.323.225.000	*< 1 month*
1-3 bulan	-	-	*1-3 month*
Sub Jumlah	**174.322.467.675**	**7.323.225.000**	***Sub total***
Jumlah	**3.074.641.649.359**	**2.466.348.755.257**	***Total***

e. Berdasarkan kolektabilitas

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh giro dan penempatan pada Bank Indonesia diklasifikasikan "Lancar".

f. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM)

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tentang "Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah", sebagaimana telah diubah terakhir dengan PADG No. 12 tahun 2023 tanggal 27 September 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023. PADG baru tersebut mengatur setiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 7,5% dan 1% dari dana pihak ketiga (DPK) dalam Rupiah dan valuta asing.

Dalam perhitungan kewajiban pemenuhan GWM Rupiah, terdapat komponen insentif GWM sesuai PADG No. 8 tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang "Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah", serta disinsentif RIM sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA *(continued)*

d. By remaining period to maturity

e. By collectability

As of December 31, 2025 and 2024, all current accounts and placements with Bank Indonesia is classified as "Current".

f. The Minimum Statutory Reserve Requirement (GWM)

The GWM ratio as at 31 December 2025 and 31 December 2024 are calculated based on Board of Governors Members Regulations (PADG) No. 24/8/PADG/2022 regarding "The implementation of Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Banks, Sharia Banks and Sharia Business Units", as last amended by PADG No. 12 year 2023 dated 27 September 2023 and effectively came into force on 1 October 2023. The new PADG regulates every Sharia Bank and Sharia Business Unit to maintain GWM in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 7.5% and 1% of third party funds (TPF) in Rupiah and foreign exchange.

In calculating the fulfillment of Rupiah statutory reserves, there is a GWM incentive component which is in accordance with the PADG No. 8 year 2025 dated 27 March 2025 concerning "Third amendment of Board of Governors Members Regulations ("PADG") No. 24/8/PADG/2022 regarding the implementation of Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Banks, Sharia Banks and Sharia Business Units", as well as disincentives RIM according to Bank Indonesia Regulation Number 21/12/PBI/2019 dated 25 November 2019 concerning "Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 20/4/PBI/2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit".

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

f. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) (lanjutan)

Rasio GWM dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 2/PADG/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang "Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2023 yang mana mewajibkan setiap bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 7,5% dan 1% dari dana pihak ketiga (DPK) dalam Rupiah dan valuta asing.

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/07/PADG/2021 yang berlaku sejak 1 Mei 2021 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/22/PADG/2019 yang berlaku sejak 28 November 2019, terdapat perubahan perhitungan GWM *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Bank harus memelihara tambahan GWM jika RIM Bank kurang dari batas bawah 84% atau melebihi batas atas target BI sebesar 94%.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum (GWM) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA *(continued)*

f. The Minimum Statutory Reserve Requirement (GWM) *(continued)*

The GWM ratio is calculated based on Member of the Board of Governors Regulation (PADG) No. 2/PADG/2023 dated 24 March 2023 concerning "Implementation Regulations for Fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units" came into force on 1 April 2023, and regulates that each bank is required to maintain a GWM in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 7.5% and 1% of third party funds (DPK) in Rupiah and foreign exchange.

In addition, based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 23/07/PADG/2021 which is effective from May 1, 2021 and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 21/22/PADG/2019 which is effective from November 28, 2019, there are changes in the calculation of GWM Financing to Deposit Ratios (FDR) to the Macroprudential Intermediation Ratio (RIM).

Banks must pay additional Statutory Reserves if the Bank's RIM is less than the lower limit of 84% or exceeds the upper limit of the BI target of 94%.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is maintained to meet the Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) of Bank Indonesia.

The Bank has complied with Bank Indonesia's Minimum Statutory Reserve (GWM) regulations on December 31, 2025 and 2024.

	2025	2024	
Rasio GWM	3,67% (7.5% dikurangi insentif KLM 4,3% ditambah GWM RIM 0,469%)	5,8% (7.5% dikurangi insentif KLM 3% ditambah GWM RIM 1,3%)	*GWM Ratio*
Rupiah			*Rupiah*
Kewajiban Pemenuhan GWM	3,67% (7.5% dikurangi insentif KLM 4,3% ditambah GWM RIM 0,469%)	5,8% (7.5% dikurangi insentif KLM 3% ditambah GWM RIM 1,3%)	*Fulfillment of Statutory Reserves*
Realisasi Pemenuhan GWM	10,04%	8,64%	*Realisation Fulfillment of Statuory Reserves*
Realisasi Pemenuhan PLM (d/h GWM Sekunder)	17,61%	19,22%	*Realisation Fulfillment of PLM (Previously GWM Secondary)*
Valas			*Valas*
Kewajiban Pemenuhan GWM	4%	4%	*Fulfillment of Statutory Reserves*
Realisasi Pemenuhan GWM	14,13%	7,19%	*Realisation Fulfillment of Statuory Reserves*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN / *CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan mata uang / *By Currencies*

	2025	2024	
Rupiah	29.939.446.850	38.681.703.773	*Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	24.486.568.833	144.143.890.710	*United States Dollar*
Eropa	3.345.878.139	2.898.603.250	*Euro*
Riyal Arab Saudi	44.448.904	42.824.492	*Saudi Arabia Riyal*
Dolar Singapura	3.215.785.917	2.757.145.680	*Singapore Dollar*
Jumlah	**61.032.128.642**	**188.524.167.905**	***Total***
Cadangan Kerugian			*Allowance for Impairment*
Penurunan nilai	-	-	*Losses*
Jumlah	**61.032.128.642**	**188.524.167.905**	***Total***

b. Berdasarkan jenis / *By type*

	2025	2024	
Rupiah			*Rupiah*
Giro *Mudharabah*	27.641.568.327	36.389.455.213	*Current Account Mudharabah*
Tabungan *Mudharabah*	2.297.878.522	2.292.248.560	*Saving Account Mudharabah*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	-	-	*Interbank Mudharabah Investment Certificate*
Jumlah Rupiah	**29.939.446.850**	**38.681.703.773**	*Total Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign Currencies*
Giro *Mudharabah* Dolar Amerika Serikat	24.486.568.833	144.143.890.710	*Current Account United States Dollar*
Giro *Mudharabah* Euro	3.345.878.139	2.898.603.250	*Current Account Euro*
Giro *Mudharabah* Dolar Singapore	3.215.785.917	2.757.145.680	*Current Account Singapore Dollar*
Giro *Mudharabah* Riyal Arab Saudi	44.448.904	42.824.492	*Current Acount Saudi Arabia Riyal*
Jumlah Mata Uang Asing	**31.092.681.793**	**149.842.464.132**	***Total Foreign Currencies***
	61.032.128.642	**188.524.167.905**	
Cadangan Kerugian			*Allowance for Impairment*
Penurunan nilai	-	-	*Losses*
Jumlah	**61.032.128.642**	**188.524.167.905**	***Total***

c. Berdasarkan kolektibilitas / *By colletibility*

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan lancar.

All current accounts with other banks as of and December 31, 2025 and 2024 are classified as current.

d. Berdasarkan jatuh tempo / *By maturity*

Giro dan penempatan pada bank lain memiliki sisa umur jatuh tempo kurang dari 1 (satu) bulan.

Current accounts and placements with other banks have remaining period to maturity of less than 1 (one) month.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen, kolektibilitas seluruh giro dan penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan "Lancar". Manajemen yakin seluruh giro dan penempatan pada bank lain akan tertagih, sehingga CKPN tidak perlu dibentuk.

Based on management's review and evaluation, all current accounts and placements with other banks as at December 31, 2025 and 2024 were classified as "Current". Management believes that all current accounts and placements in other banks will be collected, so CKPN does not need to be formed.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat giro dan penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2025 and 2024, no current accounts and placements with other bank are pledged as collaterals.

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA / *INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES*

a. Klasifikasi jenis dan tujuan investasi / *Classification based on type and invesment*

	2025	2024	
Sukuk BI tersedia untuk dijual	593.013.858.332	1.038.069.738.947	*BI Sukuk available for sale*
Sukuk Negara yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	883.123.644.600	1.764.263.546.180	*Government Sukuk measured at fair value through other comprehensive income*
Sukuk Korporasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	3.201.729.540.361	2.078.979.708.585	*Corporate Sukuk measured at amortized cost*
Jumlah Investasi Surat Berharga	**4.677.867.043.294**	**4.881.312.993.711**	*Total Investment marketable securities*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian Penurunan nilai	-	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**4.677.867.043.294**	**4.881.312.993.711**	***Total - net***

b. Klasifikasi berdasarkan jatuh tempo / *Classification to maturity*

	2025	2024	
Sampai dengan 1 bulan	-	-	*Less than 1 month*
Lebih dari 1 s/d 12 bulan	4.677.867.043.294	4.881.312.993.711	*More than 1 to 12 month*
Jumlah	**4.677.867.043.294**	**4.881.312.993.711**	***Total***

c. Rincian Surat Berharga / *Detail of marketable securities*

1). Sukuk Pemerintah - Tersedia Untuk Dijual / *Government Sukuk - Available For Sale*

2025					
Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan/ *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 31 Desember 2025 / *Carrying Value December 31, 2025*
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	40.056.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	40.056.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	25.000.000.000	25.035.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	1.889.000.000	1.891.644.600
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	45.063.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	30.000.000.000	30.042.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	40.056.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	45.063.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	25.000.000.000	25.035.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	45.063.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	40.056.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	45.063.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	45.063.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	40.056.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	45.063.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	40.056.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	40.056.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	45.063.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	45.063.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	40.056.000.000

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES *(continued)*

c. Rincian Surat Berharga (lanjutan)

c. Detail of marketable securities *(continued)*

1). Sukuk Pemerintah - Tersedia Untuk Dijual (lanjutan)***/ Government Sukuk - Available For Sale*** *(continued)*

2025

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan/ *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 31 Desember 2025 / *Carrying Value December 31, 2025*
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	40.056.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	40.056.000.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	40.056.000.000
Jumlah Sukuk Pemerintah (Diukur pada nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain) / *Total Government Sukuk (Measured at fair value through other comprehensive income)*				**881.889.000.000**	**883.123.644.600**

2024

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan/ *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 31 Desember 2024 / *Carrying Value December 31, 2024*
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	40.000.000.000	39.701.200.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	40.000.000.000	39.701.200.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	40.000.000.000	39.701.200.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	23.306.000.000	23.131.904.180
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	25.000.000.000	24.813.250.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	40.000.000.000	39.701.200.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	40.000.000.000	39.701.200.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	40.000.000.000	39.701.200.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	45.000.000.000	44.663.850.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	45.000.000.000	44.663.850.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	40.000.000.000	39.701.200.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	45.000.000.000	44.663.850.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	40.000.000.000	39.701.200.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	45.000.000.000	44.663.850.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	30.000.000.000	29.775.900.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	45.000.000.000	44.663.850.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	40.000.000.000	39.701.200.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	45.000.000.000	44.663.850.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	45.000.000.000	44.663.850.000
PBS017	15-Oct-17	15-Oct-25	6,125%	40.000.000.000	39.701.200.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	38.720.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	38.720.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	25.000.000.000	24.200.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	1.889.000.000	1.828.552.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	43.560.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	30.000.000.000	29.040.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	38.720.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	43.560.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	25.000.000.000	24.200.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	43.560.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	38.720.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	43.560.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	43.560.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	38.720.000.000

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES *(continued)*

c. Rincian Surat Berharga (lanjutan)

c. Detail of marketable securities *(continued)*

1). Sukuk Pemerintah - Tersedia Untuk Dijual (lanjutan)***/ Government Sukuk - Available For Sale*** *(continued)*

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan/ *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 31 Desember 2024 / *Carrying Value December 31, 2024*
2024					
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	43.560.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	38.720.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	38.720.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	43.560.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	45.000.000.000	43.560.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	38.720.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	38.720.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	38.720.000.000
PBS032	15-Oct-17	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	38.720.000.000
PBS003	15-Oct-17	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.171.550.000
PBS003	15-Oct-17	15-Jan-27	6,000%	40.000.000.000	39.263.600.000
PBS030	15-Oct-17	15-Jul-28	5,875%	20.000.000.000	19.404.800.000
PBS030	15-Oct-17	15-Jul-28	5,875%	21.000.000.000	20.375.040.000
Jumlah Sukuk Pemerintah (Diukur pada nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain) / *Total Government Sukuk (Measured at fair value through other comprehensive income)*				**1.801.195.000.000**	**1.764.263.546.180**

2). Sukuk Korporasi - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo / ***Corporate Sukuk - Held Until Maturity***

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan/ *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 31 Desember 2025 / *Carrying Value December 31, 2025*
2025					
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	39.727.131.609
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	50.000.000.000	49.658.750.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	50.000.000.000	49.625.436.554
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	50.000.000.000	49.632.508.834
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	10.000.000.000	9.935.344.828
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	35.000.000.000	34.819.359.756
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	10.000.000.000	9.958.293.037
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	40.000.000.000	39.850.597.610
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	30.000.000.000	29.882.228.315
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.836.312.500
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.828.331.638
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.778.602.789
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.771.246.090
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.757.903.826
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.726.055.195
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	40.000.000.000	39.745.065.789
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.932.744.565
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	49.000.000.000	48.902.212.252
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	49.000.000.000	48.879.659.950
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	50.000.000.000	49.691.964.286
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	49.000.000.000	48.897.316.176
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.908.408.717

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES *(continued)*

c. Rincian Surat Berharga (lanjutan)

c. Detail of marketable securities *(continued)*

2). Sukuk Korporasi - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (lanjutan)/ ***Corporate Sukuk - Held Until Maturity*** *(continued)*

2025					
Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan/ *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 31 Desember 2025 / *Carrying Value December 31, 2025*
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.951.294.567
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.529.129.606
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	40.000.000.000	39.577.692.308
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.178.029.248
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.199.455.376
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.240.730.932
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.371.475.054
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	45.000.000.000	44.667.699.927
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	45.000.000.000	44.669.508.468
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.505.588.453
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.493.168.390
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	49.000.000.000	48.475.692.654
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	34.000.000.000	33.614.338.843
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	48.910.714.286
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	48.941.141.261
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.073.184.019
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	36.000.000.000	35.530.977.778
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.320.544.554
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.263.315.442
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.326.870.324
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.312.030.075
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.287.311.558
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.231.092.437
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.174.613.402
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.274.935.401
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	45.000.000.000	44.522.972.561
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	40.000.000.000	39.550.526.316
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	48.000.000.000	47.545.114.286
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	49.000.000.000	48.616.967.176
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	49.000.000.000	48.696.513.989
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	45.000.000.000	44.713.338.608
PBSG001	15-Sep-22	15-Sep-29	6,625%	20.000.000.000	20.101.341.093
PBSG001	15-Sep-22	15-Sep-29	6,625%	40.000.000.000	40.213.491.903
PBSG001	15-Sep-22	15-Sep-29	6,625%	30.000.000.000	30.022.682.827
PBSG001	15-Sep-22	15-Sep-29	6,625%	30.000.000.000	29.817.444.550
PBSG001	15-Sep-22	15-Sep-29	6,625%	40.000.000.000	40.058.265.139
PBSG001	15-Sep-22	15-Sep-29	6,625%	25.000.000.000	25.097.965.208
PBS040	15-Nov-25	15-Nov-30	5,000%	50.000.000.000	48.917.881.166
PBS040	15-Nov-25	15-Nov-30	5,000%	50.000.000.000	48.917.947.635
PBS040	15-Nov-25	15-Nov-30	5,000%	45.000.000.000	44.028.959.391
PBS029	15-Mar-21	15-Mar-34	6,375%	40.000.000.000	39.183.701.657
PBS029	15-Mar-21	15-Mar-34	6,375%	45.000.000.000	44.279.842.306
PBS029	15-Mar-21	15-Mar-34	6,375%	45.000.000.000	44.532.824.976
PBS029	15-Mar-21	15-Mar-34	6,375%	45.000.000.000	44.617.276.943
PBS029	15-Mar-21	15-Mar-34	6,375%	45.000.000.000	44.637.495.991
PBS029	15-Mar-21	15-Mar-34	6,375%	45.000.000.000	44.782.427.815
PBS029	15-Mar-21	15-Mar-34	6,375%	45.000.000.000	44.721.271.364

(continued)

c. Rincian Surat Berharga (lanjutan) / ***c. Detail of marketable securities*** *(continued)*

2). Sukuk Korporasi - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (lanjutan)/ ***Corporate Sukuk - Held Until Maturity*** *(continued)*

2025

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan/ *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 31 Desember 2025 / *Carrying Value December 31, 2025*
PBS029	15-Mar-21	15-Mar-34	6,375%	49.000.000.000	49.523.584.813
PBS029	15-Mar-21	15-Mar-34	6,375%	45.000.000.000	46.094.041.806
PBS029	15-Mar-21	15-Mar-34	6,375%	40.000.000.000	40.968.852.459
PBS029	15-Mar-21	15-Mar-34	6,375%	25.000.000.000	25.610.475.912
PBS029	15-Mar-21	15-Mar-34	6,375%	45.000.000.000	46.090.323.795
Jumlah Sukuk Korporasi - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo / *Total Corporate Sukuk - Held Until Maturity*				**3.226.000.000.000**	**3.201.729.540.361**

2024

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan/ *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 31 Desember 2024 / *Carrying Value December 31, 2024*
SR016	23-Mar-22	10-Mar-25	4,950%	34.000.000.000	33.909.620.253
PBS036	15-Aug-22	15-Aug-25	5,375%	50.000.000.000	49.790.697.493
PBS036	15-Aug-22	15-Aug-25	5,375%	50.000.000.000	49.778.726.708
PBS036	15-Aug-22	15-Aug-25	5,375%	50.000.000.000	49.770.047.170
PBS036	15-Aug-22	15-Aug-25	5,375%	50.000.000.000	49.763.903.463
PBS036	15-Aug-22	15-Aug-25	5,375%	45.000.000.000	44.825.053.996
PBS036	15-Aug-22	15-Aug-25	5,375%	45.000.000.000	44.810.016.556
PBS036	15-Aug-22	15-Aug-25	5,375%	40.000.000.000	39.820.994.475
PBS036	15-Aug-22	15-Aug-25	5,375%	35.000.000.000	34.824.402.730
PBS036	15-Aug-22	15-Aug-25	5,375%	50.000.000.000	49.748.423.165
PBS036	15-Aug-22	15-Aug-25	5,375%	50.000.000.000	49.733.926.521
PBS036	15-Aug-22	15-Aug-25	5,375%	30.000.000.000	29.872.084.548
PBS036	15-Aug-22	15-Aug-25	5,375%	50.000.000.000	49.739.884.393
SR017	10-Oct-22	10-Sep-25	5,900%	29.000.000.000	28.903.333.333
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	40.000.000.000	39.223.374.578
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	50.000.000.000	49.028.750.000
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	50.000.000.000	48.933.934.808
PBS032	15-Jul-21	15-Jul-26	4,875%	50.000.000.000	48.954.063.604
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	10.000.000.000	9.873.275.862
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	35.000.000.000	34.645.945.122
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	10.000.000.000	9.918.254.352
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	40.000.000.000	39.707.171.315
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	30.000.000.000	29.769.167.498
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.679.172.500
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.663.530.010
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.566.061.467
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.551.642.336
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.525.491.498
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.463.068.182
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	40.000.000.000	39.500.328.947
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	45.000.000.000	44.868.179.348
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	49.000.000.000	48.808.336.015
PBS003	15-Jan-12	15-Jan-27	6,000%	49.000.000.000	48.764.133.501

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES *(continued)*

c. Rincian Surat Berharga (lanjutan)

c. Detail of marketable securities *(continued)*

2). Sukuk Korporasi - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (lanjutan)/ ***Corporate Sukuk - Held Until Maturity*** *(continued)*

2024

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan/ *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 31 Desember 2024 / *Carrying Value December 31, 2024*
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.343.869.123
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	40.000.000.000	39.411.538.462
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	48.854.630.919
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	48.884.486.999
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	48.942.002.119
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.124.186.551
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	45.000.000.000	44.536.958.914
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	45.000.000.000	44.539.479.013
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.311.065.877
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	50.000.000.000	49.293.759.232
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	49.000.000.000	48.269.407.796
PBS030	15-Jan-21	15-Jul-28	5,875%	34.000.000.000	33.462.603.306
PBSG001	15-Sep-22	15-Sep-29	6,625%	20.000.000.000	20.128.669.028
PBSG001	15-Sep-22	15-Sep-29	6,625%	40.000.000.000	40.271.062.753
PBSG001	15-Sep-22	15-Sep-29	6,625%	30.000.000.000	30.028.799.544
PBSG001	15-Sep-22	15-Sep-29	6,625%	30.000.000.000	29.768.216.114
PBSG001	15-Sep-22	15-Sep-29	6,625%	40.000.000.000	40.073.977.087
Jumlah Sukuk Korporasi - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo / *Total Corporate Sukuk - Held Until Maturity*				**2.099.000.000.000**	**2.078.979.708.585**

3). Sukuk BI tersedia untuk dijual/ *BI Sukuk available for sale*

2025

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan/ *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 31 Desember 2025 / *Carrying Value December 31, 2025*
Bank Indonesia	4-Jul-25	2-Jan-26	5,938%	50.000.000.000	51.484.575.000
Sukbi Sekunder BSI	8-Oct-25	9-Jan-26	6,689%	100.000.000.000	104.905.390.000
Bank Indonesia	1-Aug-25	6-Feb-26	5,529%	53.191.000.000	54.432.733.257
Bank Indonesia	12-Nov-25	11-Feb-26	4,600%	6.054.000.000	6.091.904.699
Bank Indonesia	4-Jun-25	6-Mar-26	6,262%	100.000.000.000	103.652.580.000
Bank Indonesia	10-Dec-25	11-Mar-26	4,874%	45.934.000.000	46.064.608.736
Bank Indonesia	3-Oct-25	10-Apr-26	4,755%	25.542.000.000	25.842.256.427
Sukbi Sekunder BSI	19-Nov-25	8-May-26	6,471%	100.000.000.000	104.241.850.000
Bank Indonesia	7-Nov-25	15-May-26	4,617%	48.402.000.000	48.737.203.211
Bank Indonesia	5-Dec-25	19-Jun-26	4,901%	47.393.000.000	47.560.757.002
Jumlah Sukuk BI tersedia untuk dijual/ *Total BI Sukuk available for sale*				**576.516.000.000**	**593.013.858.332**

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES *(continued)*

c. Rincian Surat Berharga (lanjutan)

c. Detail of marketable securities *(continued)*

3). Sukuk BI tersedia untuk dijual (lanjutan)/ ***BI Sukuk available for sale*** *(continued)*

			2024		
Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan/ *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 31 Desember 2024 / *Carrying Value December 31, 2024*
Sukbi Sekunder BJBS	4-Dec-24	3-Jan-25	6,886%	150.000.000.000	160.357.785.000
Sukbi Sekunder BSI	6-Dec-24	31-Jan-25	6,816%	100.000.000.000	106.304.930.000
Sukbi Sekunder BSI	9-Dec-24	31-Jan-25	7,316%	150.000.000.000	157.377.345.000
Bank Indonesia	28-Nov-24	26-Feb-25	6,703%	100.755.000.000	101.374.068.947
Sukbi Sekunder BSI	31-Oct-24	2-May-25	7,470%	180.000.000.000	189.039.258.000
Bank Indonesia	1-Nov-24	2-May-25	6,781%	250.000.000.000	252.825.275.000
Bank Indonesia	1-Nov-24	2-May-25	6,781%	70.000.000.000	70.791.077.000
Jumlah Sukuk BI tersedia untuk dijual/ ***Total BI Sukuk available for sale***				**1.000.755.000.000**	**1.038.069.738.947**

d. Kolektibilitas Surat Berharga

d. Collectibility of marketable securities

	2025	**2024**	
Lancar	4.677.867.043.294	4.881.312.993.711	*Current*
Macet	-	-	*Loss*
Jumlah	4.677.867.043.294	4.881.312.993.711	*Total*
Dikurangi:			*Less*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Surat Berharga	-	-	*Allowance for impairment losses Marketable Securities*
Jumlah - bersih	**4.677.867.043.294**	**4.881.312.993.711**	*Total - nett*

Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi atas Surat Berharga dan obligasi yang nilai wajarnya diukur melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak tangguhan dirinci sebagai berikut:

Unrealized gains/losses on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income and Government Bonds net of deferred tax detail is as follows:

	2025	**2024**	
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari Surat Berharga tersedia untuk dijual	14.573.513.919	(34.872.292.775)	*Unrealized gains (loss) net on changes in fair value of available for sale marketable securities*
Pajak tangguhan	(3.206.173.062)	7.671.904.411	*Deffered tax*
Jumlah	**11.367.340.857**	**(27.200.388.365)**	*Total*

e. Berdasarkan kolektibilitas

e. By collectibility

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 seluruh investasi pada surat berharga diklasifikasikan "Lancar".

As of December 31, 2025 and 2024, all investments in marketable securities are classified as "Current".

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. *INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES* *(continued)*

f. Berdasarkan peringkat

f. *Based on rating*

	Desember / *December* 31, 2025			
	Pemeringkat / Agencies	Peringkat / Rating	Nilai Tercatat/ Carrying Value	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***Fair value through through other comprehensive income***
Sukuk Pemerintah	--	--	883.123.644.600	*Government Sukuk*
Sub jumlah			883.123.644.600	***Sub total***
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortized cost***
Sukuk Bank Indonesia	--	--	593.013.858.332	*Bank Indonesia Sukuk*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")	--	--		*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Sukuk Pemerintah	--	--	3.201.729.540.361	*Government Sukuk*
Premium (Diskonto) yang belum diamortisas	--	--		*Unamortized Premium (Discount)*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pefindo	AAA		*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Sub jumlah			3.794.743.398.694	*Sub total*
Cadangan kerugian penurunan nilai			-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah			**4.677.867.043.294**	***Total***

	Desember / *December* 31, 2024			
	Pemeringkat / Agencies	Peringkat / Rating	Nilai Tercatat/ Carrying Value	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***Fair value through through other comprehensive income***
Sukuk Pemerintah	--	--	1.764.263.546.180	*Government Sukuk*
Sub jumlah			1.764.263.546.180	*Sub total*
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortized cost***
Sukuk Bank Indonesia	--	--		*Bank Indonesia Sukuk*
Sukuk Bank Indonesia	--	--	1.038.069.738.947	*Bank Indonesia Sukuk*
Sukuk Pemerintah	--	--	2.078.979.708.585	*Government Sukuk*
Premium (Diskonto) yang belum diamortisas	--	--		*Unamortized Premium (Discount)*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pefindo	AAA		*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Sub jumlah			3.117.049.447.531	*Sub total*
Cadangan kerugian penurunan nilai			-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah			**4.881.312.993.711**	***Total***

8. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN / *8. RECEIVABLES AND FINANCING*

Piutang dan Pembiayaan terdiri dari : / *Receivables and financing consist of :*

31 Desember/ December 31, 2025

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Piutang *Murabahah/ Receivables Murabahah*	9.741.502.393.647	174.308.214.525	19.393.182.755	18.384.213.693	409.444.522.096	10.363.032.526.716
Piutang Ijarah/ *Receivables Ijarah*	33.727.481	4.359.674	26.372.563	14.031.811	173.957.589	252.449.118
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(1.648.649.605)	(6.364.241.463)	(6.175.605.067)	(7.778.957.594)	(356.842.558.813)	(378.810.012.542)
Bersih/*Net*	**9.739.887.471.523**	**167.948.332.736**	**13.243.950.251**	**10.619.287.910**	**52.775.920.872**	**9.984.474.963.292**
Pinjaman *Qardh/ Funds of Qardh*	219.238.960.440	1.315.050.000	-	-	-	220.554.010.440
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(70.936.928)	(20.507.141)	-	-	-	(91.444.069)
Bersih/*Net*	**219.168.023.512**	**1.294.542.859**	**-**	**-**	**-**	**220.462.566.371**
Pembiayaan/ *Financing* Mudharabah		-	-	-	-	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*		-	-	-	-	-
Bersih/*Net*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Pembiayaan/ *Financing* Musyarakah	10.420.254.105.749	225.951.102.326	43.350.185.100	268.965.982.352	71.766.083.666	11.030.287.459.192
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(4.327.380.180)	(3.829.005.294)	(7.855.075.619)	(60.272.124.173)	(70.307.021.881)	(146.590.607.147)
Bersih/*Net*	**10.415.926.725.569**	**222.122.097.032**	**35.495.109.481**	**208.693.858.179**	**1.459.061.785**	**10.883.696.852.045**
Aset yang Diperoleh Untuk *Ijarah* - bersih/ *Asset Acquired For Ijarah - net*	171.122.838.123	1.068.405.500	377.499.975	13.758.352	604.781.391	173.187.283.341
Jumlah Piutang dan Pembiayan/ *Total Receivables and Financing*	**20.552.152.025.440**	**402.647.132.025**	**63.147.240.392**	**287.377.986.208**	**481.989.344.742**	**21.787.313.728.807**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(6.046.966.713)	(10.213.753.898)	(14.030.680.686)	(68.051.081.767)	(427.149.580.694)	(525.492.063.758)
Jumlah-bersih/ *Total-Nett*	**20.546.105.058.727**	**392.433.378.127**	**49.116.559.706**	**219.326.904.440**	**54.839.764.048**	**21.261.821.665.049**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN (lanjutan)

Piutang dan Pembiayaan terdiri dari (lanjutan):

8. RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

Receivables and financing consist of (continued):

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
31 Desember/ December 31, 2024						
Piutang Murabahah/ *Receivables Murabahah*	12.136.785.330.444	203.049.416.934	18.319.310.414	36.689.306.051	383.681.601.793	12.778.524.965.636
Piutang Ijarah *Receivables Ijarah*	-	19.511.659	9.106.654	-	144.415.978	173.034.291
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(670.051.928)	(5.966.395.234)	(6.797.173.351)	(17.131.356.873)	(339.872.139.757)	(370.437.117.143)
Bersih/*Net*	**12.136.115.278.516**	**197.102.533.359**	**11.531.243.717**	**19.557.949.178**	**43.953.878.014**	**12.408.260.882.784**
Pinjaman *Qardh*/ *Funds of Qardh*	97.620.524.000	402.500.000	-	-	-	98.023.024.000
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(1.721.070)	(5.908.410)	-	-	-	(7.629.480)
Bersih/*Net*	**97.618.802.930**	**396.591.590**	**-**	**-**	**-**	**98.015.394.520**
Pembiayaan/ *Financing* Mudharabah	1.894.944.320	-	-	-	-	1.894.944.320
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(1.593.155)	-	-	-	-	(1.593.155)
Bersih/*Net*	**1.893.351.165**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.893.351.165**
Pembiayaan/ *Financing* Musyarakah	7.923.803.296.170	490.510.093.371	1.952.847.702	1.993.881.853	69.431.584.450	8.487.691.703.546
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(1.382.611.890)	(4.483.583.003)	(594.908.261)	(715.694.050)	(63.467.994.445)	(70.644.791.649)
Bersih/*Net*	**7.922.420.684.280**	**486.026.510.368**	**4.877.543.131**	**40.394.086.159**	**5.963.590.005**	**8.417.046.911.897**
Aset yang Diperoleh Untuk *Ijarah* - bersih/ *Asset Acquired For Ijarah - net*	238.511.708.990	2.247.300.961	187.500.014	-	253.667.869	241.200.177.835
Jumlah Piutang dan Pembiayan/ *Total Receivables and Financing*	**20.398.615.803.924**	**693.981.521.964**	**20.281.264.770**	**38.683.187.904**	**453.257.602.221**	**21.607.507.849.628**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(2.055.978.043)	(10.455.886.647)	(7.392.081.612)	(17.847.050.923)	(403.340.134.202)	(441.091.131.427)
Jumlah-bersih/ *Total-Nett*	**20.396.559.825.881**	**683.525.635.317**	**12.889.183.158**	**20.836.136.981**	**49.917.468.019**	**21.166.416.718.201**

8.1. PIUTANG *MURABAHAH* / *8.1. MURABAHAH RECEIVABLES*

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas / *a. By type and collectability*

	2025	2024	
Piutang *Murabahah*			***Murabahah Receivables***
Lancar	9.741.502.393.647	12.136.785.330.444	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	174.308.214.525	203.049.416.934	*Special Mention*
Kurang Lancar	19.393.182.755	18.319.310.414	*Substandard*
Diragukan	18.384.213.693	36.689.306.051	*Doubtful*
Macet	409.444.522.096	383.681.601.793	*Loss*
Jumlah	10.363.032.526.716	12.778.524.965.636	*Total*
Piutang *Ijarah*			***Ijarah Receivables***
Lancar	33.727.481	-	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	4.359.674	19.511.659	*Special Mention*
Kurang Lancar	26.372.563	9.106.654	*Substandard*
Diragukan	14.031.811	-	*Doubtful*
Macet	173.957.589	144.415.978	*Loss*
Jumlah	252.449.118	173.034.291	*Total*
Jumlah	**10.363.284.975.834**	**12.778.697.999.927**	*Total*
Dikurangi: Cadangan			*Less allowance for impairment*
Kerugian Penurunan Nilai	(378.810.012.542)	(370.437.117.143)	*losses*
Jumlah - bersih	**9.984.474.963.292**	**12.408.260.882.784**	***Total - nett***

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas / *b. By economic sector and collectibility*

31 Desember/ December 31, 2025

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Industri / *Manufacturing*	20.433.091.051	929.370.687	61.594.414	494.639.382	2.664.164.737	24.582.860.271
Perantara keuangan / *Financial intermediary*	8.103.716.858	266.571.748	-	-	2.308.991.972	10.679.280.578
Kontruksi / *Construction*	1.068.426.414	190.274.140	-	-	4.445.592.102	5.704.292.656
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / *Government administration, defense and mandatory social security*	61.158.416.304	7.211.327.248	684.189.134	480.472.521	10.010.091.071	79.544.496.278
Listrik, Gas dan Air / *Electricity, Gas And Water*	793.055.873	-	-	-	-	793.055.873
Transportasi, pergudangan dan komunikasi/ *Transportation, warehousing and communication*	6.052.797.727	1.085.239.870	37.780.073	-	3.045.806.194	10.221.623.864
Perdagangan besar dan eceran / *Wholesale and retail trade*	275.674.734.953	20.058.012.324	1.135.019.391	4.074.234.054	89.198.380.489	390.140.381.211
Pertambangan / *Mining*	568.399.793	-	-	-	-	568.399.793
Pertanian / *Agricultur*	1.435.630.942.029	42.685.733.687	3.777.004.872	3.053.324.948	152.781.014.043	1.637.928.019.579
Lainnya / *Others*	7.932.052.540.126	101.886.044.495	13.723.967.434	10.295.574.599	145.164.439.077	8.203.122.565.731
Jumlah Piutang *Total Receivable*	**9.741.536.121.128**	**174.312.574.199**	**19.419.555.318**	**18.398.245.504**	**409.618.479.685**	**10.363.284.975.834**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8.1. PIUTANG *MURABAHAH* (lanjutan) / ***8.1. MURABAHAH RECEIVABLES*** *(continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas (lanjutan) / ***b. By economic sector and collectibility*** *(continued)*

31 Desember/ December 31, 2025

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(1.648.649.605)	(6.364.241.463)	(6.175.605.067)	(7.778.957.594)	(356.842.558.813)	(378.810.012.542)
Jumlah-bersih Total-Nett	**9.739.887.471.523**	**167.948.332.736**	**13.243.950.251**	**10.619.287.910**	**52.775.920.872**	**9.984.474.963.292**

31 Desember/ December 31, 2024

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Industri / *Manufacturing*	25.963.722.491	1.012.505.959	86.137.615	-	4.212.562.419	31.274.928.484
Perantara keuangan / *Financial intermediary*	11.239.378.301	351.881.457	127.447.296	-	2.717.965.083	14.436.672.137
Kontruksi / *Construction*	3.590.632.590	245.981.610	-	467.381.344	4.260.411.371	8.564.406.915
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / *Government administration, defense and mandatory social security*	87.435.566.287	8.135.886.680	772.977.657	218.418.612	9.889.231.609	106.452.080.845
Listrik, Gas dan Air / *Electricity, Gas And Water*	1.157.195.055	186.983.916	-	-	-	1.344.178.971
Transportasi, pergudangan dan komunikasi/ *Transportation, warehousing and communication*	9.514.650.553	1.268.884.718	128.713.081	24.790.622	2.994.890.315	13.931.929.289
Perdagangan besar dan eceran / *Wholesale and retail trade*	406.045.479.070	21.263.242.628	3.161.474.435	2.476.628.081	89.649.368.212	522.596.192.426
Pertambangan / *Mining*	984.660.841	-	-	-	-	984.660.841
Pertanian / *Agricultur*	1.917.176.634.939	51.443.312.079	6.824.094.349	26.515.367.724	128.244.007.044	2.130.203.416.135
Lainnya / *Others*	9.673.677.410.317	119.160.249.546	7.227.572.635	6.986.719.668	141.857.581.718	9.948.909.533.884
Jumlah Piutang *Total Receivable*	**12.136.785.330.444**	**203.068.928.593**	**18.328.417.068**	**36.689.306.051**	**383.826.017.771**	**12.778.697.999.927**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(670.051.928)	(5.966.395.234)	(6.797.173.351)	(17.131.356.873)	(339.872.139.757)	(370.437.117.143)
Jumlah-bersih **Total-Nett**	**12.136.115.278.516**	**197.102.533.359**	**11.531.243.717**	**19.557.949.178**	**43.953.878.014**	**12.408.260.882.784**

8.1. PIUTANG *MURABAHAH* (lanjutan) / ***8.1. MURABAHAH RECEIVABLES*** *(continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / ***c. By contractual term***

	2025	2024	
Jangka waktu			*Term*
Kurang s/d 1 tahun	4.150.945.172	5.385.843.727	*Less than 1 year*
1 tahun s.d 2 tahun	76.284.122.047	107.212.884.739	*1-2 years*
2 tahun s.d 5 tahun	3.085.675.220.014	3.798.739.779.602	*2-5 years*
Lebih dari 5 tahun	7.197.174.688.601	8.867.359.491.859	*More than 5 years*
Jumlah	10.363.284.975.834	12.778.697.999.927	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(378.810.012.542)	(370.437.117.143)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**9.984.474.963.292**	**12.408.260.882.784**	*Total - net*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / ***d. By remaining period to maturity***

	2025	2024	
Jangka waktu			*Term*
Kurang s/d 1 tahun	584.087.910.272	510.504.628.887	*Less than 1 year*
1 tahun s.d 2 tahun	788.400.510.092	897.704.503.664	*1-2 years*
2 tahun s.d 5 tahun	3.273.131.108.116	4.090.035.000.900	*2-5 years*
Lebih dari 5 tahun	5.717.665.447.354	7.280.453.866.476	*More than 5 years*
Jumlah	10.363.284.975.834	12.778.697.999.927	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(378.810.012.542)	(370.437.117.143)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**9.984.474.963.292**	**12.408.260.882.784**	*Total - net*

e. Berdasarkan keterkaitan / ***e. By relationship***

	2025	2024	
Pihak berelasi	113.745.791	-	*Related parties*
Pihak ketiga	10.363.171.230.043	12.778.697.999.927	*Third parties*
Jumlah	10.363.284.975.834	12.778.697.999.927	*Amount to*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(378.810.012.542)	(370.437.117.143)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**9.984.474.963.292**	**12.408.260.882.784**	*Total - net*

f. Berdasarkan kolektibilitas / ***f. By collectibility***

	2025		2024		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	
Lancar	9.741.536.121.128	1.648.649.605	12.136.785.330.444	670.051.928	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	174.312.574.199	6.364.241.463	203.068.928.593	5.966.395.234	*Special Mention*
Kurang Lancar	19.419.555.318	6.175.605.067	18.328.417.068	6.797.173.351	*Substandard*
Diragukan	18.398.245.504	7.778.957.594	36.689.306.051	17.131.356.873	*Doubtful*
Macet	409.618.479.685	356.842.558.813	383.826.017.771	339.872.139.757	*Loss*
Jumlah	**10.363.284.975.834**	**378.810.012.542**	**12.778.697.999.927**	**370.437.117.143**	***Total***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8.1. PIUTANG *MURABAHAH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Saldo Awal	370.437.117.143	351.055.397.732	*Beginning Balance*
Pembentukan Penyisihan Selama Periode Berjalan	25.155.224.089	36.272.679.623	*Provision During The Period*
Pemulihan Penyisihan Selama Periode Berjalan	(16.782.328.691)	(16.890.960.212)	*Recoveries During The Period*
Jumlah - bersih	**378.810.012.541**	**370.437.117.143**	*Total*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang.

Piutang dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito mudharabah atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Jumlah piutang yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp9.580.113.737 dan Rp9.948.983.633. Restrukturisasi piutang dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas piutang bagi nasabah pembiayaan.

Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah piutang adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Jumlah Piutang			*Total Receivables*
NPF - Bruto	447.436.280.507	438.843.740.890	*NPF - Gross*
Persentase NPF - Bruto	4,32%	3,43%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto	76.639.159.033	75.043.070.909	*NPF - Net*
Persentase NPF - Neto	0,77%	0,60%	*Percentage of NPF - Net*

8.1. MURABAHAH RECEIVABLES *(continued)*

g. Other significant information

The movements of allowance for impairment losses on receivables are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses on murabahah receivables is adequate to cover impairment losses from uncollectible receivables.

Receivables are collateralized by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, mudharabah time deposits or by other guarantees generally accepted by the Bank.

The total receivables restructured as of December 31, 2025 and 2024 amounted to IDR 9,580,113,737 and IDR 9,948,983,633. Receivables restructuring is carried out by extending time, rescheduling and adding receivables facilities for debtors.

The ratio of total Non performing Financing (NPF) gross and net on receivables are as follows:

8.2. PINJAMAN QARDH

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	2025	2024	
Rupiah			*Rupiah*
Rahn	220.554.010.440	98.023.024.000	*Rahn*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(91.444.069)	(7.629.480)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**220.462.566.371**	**98.015.394.520**	***Total - net***

8.2. FUNDS OF QARDH

a. By type and currency

8.2. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / ***8.2. FUNDS OF QARDH*** *(continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas / ***b. By economic sector and collectibility***

31 Desember/ December 31, 2025

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Lainnya / *Others*	219.238.960.440	1.315.050.000	-	-		220.554.010.440
Jumlah Pinjaman						
Total Fund	**219.238.960.440**	**1.315.050.000**	**-**	**-**	**-**	**220.554.010.440**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(70.936.928)	(20.507.141)	-	-	-	(91.444.069)
Jumlah-bersih						
Total-Nett	**219.168.023.512**	**1.294.542.859**	**-**	**-**	**-**	**220.462.566.371**

31 Desember/ December 31, 2024

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Lainnya / *Others*	97.620.524.000	402.500.000	-	-	-	98.023.024.000
Jumlah Pinjaman						
Total Fund	**97.620.524.000**	**402.500.000**	**-**	**-**	**-**	**98.023.024.000**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(1.721.070)	(5.908.410)	-	-	-	(7.629.480)
Jumlah-bersih						
Total-Nett	**97.618.802.930**	**396.591.590**	**-**	**-**	**-**	**98.015.394.520**

c. Berdasarkan jangka waktu / ***c. By period***

	2025	**2024**	
Jangka waktu			*Term*
Kurang s/d 1 tahun	220.554.010.440	98.023.024.000	*Less than 1 year*
1 tahun s.d 2 tahun	-	-	*1-2 years*
2 tahun s.d 5 tahun	-	-	*2-5 years*
Lebih dari 5 tahun	-	-	*More than 5 years*
Jumlah	220.554.010.440	98.023.024.000	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(91.444.069)	(7.629.480)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**220.462.566.371**	**98.015.394.520**	*Total - net*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / ***d. By remaining period to maturity***

	2025	**2024**	
Jangka waktu			*Term*
Kurang s/d 1 tahun	220.554.010.440	98.023.024.000	*Less than 1 year*
1 tahun s.d 2 tahun	-	-	*1-2 years*
2 tahun s.d 5 tahun	-	-	*2-5 years*
Lebih dari 5 tahun	-	-	*More than 5 years*
Jumlah	220.554.010.440	98.023.024.000	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(91.444.069)	(7.629.480)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**220.462.566.371**	**98.015.394.520**	*Total - net*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8.2. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / ***8.2. FUNDS OF QARDH*** *(continued)*

e. Berdasarkan keterkaitan / ***e. By relationship***

	2025	2024	
Pihak berelasi	45.000.000	-	*Related parties*
Pihak ketiga	220.509.010.440	98.023.024.000	*Third parties*
Jumlah	220.554.010.440	98.023.024.000	*Amount to*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(91.444.069)	(7.629.480)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**220.462.566.371**	**98.015.394.520**	*Total - net*

f. Berdasarkan kolektibilitas / ***f. By collectibility***

	2025		2024		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	
Lancar	219.238.960.440	70.936.928	97.620.524.000	1.721.070	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	1.315.050.000	20.507.141	402.500.000	5.908.410	*Special Mention*
Kurang Lancar	-	-	-	-	*Substandard*
Diragukan	-	-	-	-	*Doubtful*
Macet	-	-	-	-	*Loss*
Jumlah	**220.554.010.440**	**91.444.069**	**98.023.024.000**	**7.629.480**	***Total***

g. Informasi penting lainnya / ***g. Other significant information***

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman qardh adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on funds of qardh are as follows:

	2025	2024	
Saldo Awal	7.629.480	17.843.469	*Beginning Balance*
Pembentukan Penyisihan Selama Periode Berjalan	83.814.590	731.202.716	*Provision During The Period*
Pemulihan Penyisihan Selama Periode Berjalan	-	(741.416.705)	*Recoveries During The Period*
Jumlah - bersih	**91.444.069**	**7.629.480**	*Total*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman qardh yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pinjaman qardh.

Management believes that the allowance for impairment losses on funds of qardh is adequate to cover impairment losses from uncollectible funds of qardh.

Pinjaman qardh dijamin agunan yang diikat dengan gadai, hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Funds of qardh are collateralized by pawning, registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, or by other guarantees generally accepted by the Bank.

Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pinjaman qardh adalah sebagai berikut:

The ratio of total non-Performing financing (NPF) gross and net on funds of qardh are as follows:

8.2. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / ***8.2. FUNDS OF QARDH*** *(continued)*

g. Informasi penting lainnya (lanjutan) / ***g. Other significant information*** *(continued)*

	2025	2024	
Jumlah Pinjaman Qardh			*Total Fund of Qardh*
NPF - Bruto	-	-	*NPF - Gross*
Persentase NPF - Bruto	0,00%	0,00%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto	-	-	*NPF - Net*
Persentase NPF - Neto	0,00%	0,00%	*Percentage of NPF - Net*

8.3. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* / ***8.3. MUDHARABAH FINANCING***

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / ***a. By type and currency***

	2025	2024	
Rupiah			*Rupiah*
Modal Kerja	-	1.894.944.320	*Working Capital*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(1.593.155)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**-**	**1.893.351.165**	***Total - net***

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas / ***b. By economic sector and collectibility***

31 Desember/ December 31, 2025

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Lainnya / *Others*	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan *Total Financing*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	-	-	-	-	-	-
Jumlah-bersih Total-Nett	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

31 Desember/ December 31, 2024

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Lainnya / *Others*	1.894.944.320	-	-	-	-	1.894.944.320
Jumlah Pembiayaan *Total Financing*	**1.894.944.320**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.894.944.320**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(1.593.155)	-	-	-	-	(1.593.155)
Jumlah-bersih Total-Nett	**1.893.351.165**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.893.351.165**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8.3. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan) / ***8.3. MUDHARABAH FINANCING*** *(continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / ***c. By period***

	2025	2024	
Jangka waktu			*Term*
Kurang s/d 1 tahun	-	-	*Less than 1 year*
1 tahun s.d 2 tahun	-	-	*1-2 years*
2 tahun s.d 5 tahun	-	1.894.944.320	*2-5 years*
Lebih dari 5 tahun	-	-	*More than 5 years*
Jumlah	-	1.894.944.320	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(1.593.155)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**-**	**1.893.351.165**	*Total - net*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / ***d. By remaining period to maturity***

	2025	2024	
Jangka waktu			*Term*
Kurang s/d 1 tahun		-	*Less than 1 year*
1 tahun s.d 2 tahun	-	-	*1-2 years*
2 tahun s.d 5 tahun	-	1.894.944.320	*2-5 years*
Lebih dari 5 tahun	-	-	*More than 5 years*
Jumlah	-	1.894.944.320	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(1.593.155)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**-**	**1.893.351.165**	*Total - net*

e. Berdasarkan keterkaitan / ***e. By relationship***

	2025	2024	
Pihak berelasi	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	-	1.894.944.320	*Third parties*
Jumlah	-	1.894.944.320	*Amount to*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(1.593.155)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**-**	**1.893.351.165**	*Total - net*

f. Berdasarkan kolektibilitas / ***f. By collectibility***

	2025		2024		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	
Lancar	-	-	1.894.944.320	1.593.155	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	-	-	-	-	*Special Mention*
Kurang Lancar	-	-	-	-	*Substandard*
Diragukan	-	-	-	-	*Doubtful*
Macet	-	-	-	-	*Loss*
Jumlah	**-**	**-**	**1.894.944.320**	**1.593.155**	***Total***

8.3. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan) / ***8.3 MUDHARABAH FINANCING*** *(continued)*

g. Informasi penting lainnya / ***g. Other significant information***

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on mudharabah financing are as follows:

	2025	2024	
Saldo Awal	1.593.155	985.644	*Beginning Balance*
Pembentukan Penyisihan Selama Periode Berjalan	-	607.511	*Establishment of Allowance During the Current Period*
Pemulihan Penyisihan Selama Periode Berjalan	(1.593.155)	-	*Recovery of Allowances During the Current Period*
Jumlah - bersih	**-**	**1.593.155**	*Total*

Pembiayaan mudharabah dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito mudharabah atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Mudharabah financing are collateralized by registered mortgage or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits or by other guarantees generally accepted by the Bank.

Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

The ratio of total Non-Performing Financing (NPF) gross and net on mudharabah financing are as follows:

	2025	2024	
Jumlah Pembiayaan Mudharabah			*Mudharabah Financing Amount*
NPF - Bruto	-	-	*NPF - Gross*
Persentase NPF - Bruto	0,00%	0,00%	*Percentage of NPF - Gross*

8.4. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* / ***8.4. MUSYARAKAH FINANCING***

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / ***a. By type and currency***

	2025	2024	
Rupiah			*Rupiah*
Modal Kerja	790.191.874.510	505.470.723.444	*Working Capital*
Investasi	2.489.551.338.852	2.308.447.936.910	*Investment*
Konsumsi	7.750.544.245.830	5.673.773.043.192	*Consumption*
Jumlah	11.030.287.459.192	8.487.691.703.546	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(146.590.607.147)	(70.644.791.649)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**10.883.696.852.045**	**8.417.046.911.897**	***Total - net***

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas / ***b. By economic sector and collectibility***

31 Desember/ December 31, 2025

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Industri / *Manufacturing*	396.742.786.071	563.599.362	-	-	3.587.807.854	400.894.193.287
Perantara keuangan / *Financial intermediary*	116.205.607.643	259.730.280	-	-	1.700.933.899	118.166.271.822
Kontruksi / *Construction*	649.686.714.087	146.195.762.365	-	-	21.576.316.477	817.458.792.929

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8.4. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / ***8.4. MUSYARAKAH FINANCING*** *(continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas (lanjutan) / ***b. By economic sector and collectibility*** *(continued)*

31 Desember/ December 31, 2025

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi/ *Transportation, warehousing and communication*	10.906.814.752	699.075.634	-	229.920.576	55.397.213	11.891.208.175
Perdagangan besar dan eceran */ Wholesale and retail trade*	344.346.607.669	20.258.793.153	471.171.613	246.529.045.684	25.001.665.245	636.607.283.364
Pertambangan / *Mining*	506.794.943	-	-	-	989.875.252	1.496.670.195
Pertanian / *Agricultur*	1.025.808.707.656	20.144.870.238	15.778.819.129	20.304.255.975	5.029.608.057	1.087.066.261.055
Listrik, Gas dan Air / *Electricity, Gas And Water*	356.191.546	-	-	-	-	356.191.546
Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib / *Government administration, defense and mandatory social security*	130.917.790.271	2.827.170.855	-	-	4.158.114.749	137.903.075.875
Lainnya / *Others*	7.744.776.091.111	35.002.100.439	27.100.194.358	1.902.760.117	9.666.364.919	7.818.447.510.944
Jumlah Pembiayaan *Total Financing*	**10.420.254.105.749**	**225.951.102.326**	**43.350.185.100**	**268.965.982.352**	**71.766.083.666**	**11.030.287.459.192**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(4.327.380.180)	(3.829.005.294)	(7.855.075.619)	(60.272.124.173)	(70.307.021.881)	(146.590.607.147)
Jumlah-bersih Total-Nett	**10.415.926.725.569**	**222.122.097.032**	**35.495.109.481**	**208.693.858.179**	**1.459.061.785**	**10.883.696.852.045**

31 Desember/ December 31, 2024

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Industri / *Manufacturing*	490.475.265.562	345.958.125	-	-	3.611.912.932	494.433.136.619
Perantara keuangan / *Financial intermediary*	25.134.456.942	-	-	-	1.700.933.899	26.835.390.841
Kontruksi / *Construction*	698.242.920.117	146.195.762.365	-	-	28.107.356.391	872.546.038.873
Transportasi, pergudangan dan komunikasi/ *Transportation, warehousing and communication*	9.273.936.942	130.316.386	-	-	-	9.404.253.328
Perdagangan besar dan eceran */ Wholesale and retail trade*	239.987.071.516	271.432.626.410	4.168.072	53.084.702	27.747.650.748	539.224.601.448
Pertambangan / *Mining*	415.185.846	-	-	-	989.875.252	1.405.061.098
Pertanian / *Agricultur*	678.799.460.100	54.171.943.334	-	170.531.979	2.560.406.496	735.702.341.909
Listrik, Gas dan Air / *Electricity, Gas And Water*	11.973.431.474	97.216.793	-	-	-	12.070.648.267

8.4. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / ***8.4. MUSYARAKAH FINANCING*** *(continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas (lanjutan) / ***b. By economic sector and collectibility*** *(continued)*

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
31 Desember/ December 31, 2024						
Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib / *Government administration, defense and mandatory social security*	58.107.125.647	2.442.593.506	345.442.923	-	3.122.807.585	64.017.969.661
Lainnya / *Others*	5.711.394.442.024	15.693.676.457	1.603.236.707	1.770.265.167	1.590.641.147	5.732.052.261.502
Jumlah Pembiayaan *Total Financing*	**7.923.803.296.170**	**490.510.093.376**	**1.952.847.702**	**1.993.881.848**	**69.431.584.450**	**8.487.691.703.546**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(1.382.611.890)	(4.483.583.003)	(594.908.261)	(715.694.050)	(63.467.994.445)	(70.644.791.649)
Jumlah-bersih Total-Nett	**7.922.420.684.280**	**486.026.510.373**	**1.357.939.441**	**1.278.187.798**	**5.963.590.005**	**8.417.046.911.897**

c. Berdasarkan jangka waktu / ***c. By period***

	2025	**2024**	
Jangka waktu			*Term*
Kurang s/d 1 tahun	68.478.694.334	86.121.535.503	*Less than 1 year*
1 tahun s.d 2 tahun	106.782.109.601	75.975.623.439	*1-2 years*
2 tahun s.d 5 tahun	2.465.666.353.102	1.588.506.776.760	*2-5 years*
Lebih dari 5 tahun	8.389.360.302.155	6.737.087.767.844	*More than 5 years*
Jumlah	11.030.287.459.192	8.487.691.703.546	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(146.590.607.147)	(70.644.791.649)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**10.883.696.852.045**	**8.417.046.911.897**	*Total - net*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / ***d. By remaining period to maturity***

	2025	**2024**	
Jangka waktu			*Term*
Kurang s/d 1 tahun	221.206.301.315	261.528.840.413	*Less than 1 year*
1 tahun s.d 2 tahun	201.363.148.444	94.215.141.200	*1-2 years*
2 tahun s.d 5 tahun	3.094.820.304.817	1.857.634.668.020	*2-5 years*
Lebih dari 5 tahun	7.512.897.704.616	6.274.313.053.913	*More than 5 years*
Jumlah	11.030.287.459.192	8.487.691.703.546	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(146.590.607.147)	(70.644.791.649)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**10.883.696.852.045**	**8.417.046.911.897**	*Total - net*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8.4. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / ***8.4. MUSYARAKAH FINANCING*** *(continued)*

e. Berdasarkan keterkaitan / ***e. By relationship***

	2025	2024	
Pihak berelasi	2.781.244.933	32.781.363.963	*Related parties*
Pihak ketiga	11.027.506.214.259	8.454.910.339.583	*Third parties*
Jumlah	11.030.287.459.192	8.487.691.703.546	*Amount to*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(146.590.607.147)	(70.644.791.649)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**10.883.696.852.045**	**8.417.046.911.897**	*Total - net*

f. Berdasarkan kolektibilitas / ***f. By collectibility***

	2025		2024		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	
Lancar	10.420.254.105.749	4.327.380.180	7.923.803.296.170	1.382.611.890	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	225.951.102.326	3.829.005.294	490.510.093.376	4.483.583.003	*Special Mention*
Kurang Lancar	43.350.185.100	7.855.075.619	1.952.847.702	594.908.261	*Substandard*
Diragukan	268.965.982.352	60.272.124.173	1.993.881.848	715.694.050	*Doubtful*
Macet	71.766.083.666	70.307.021.881	69.431.584.450	63.467.994.445	*Loss*
Jumlah	**11.030.287.459.192**	**146.590.607.147**	**8.487.691.703.546**	**70.644.791.649**	***Total***

g. Informasi penting lainnya / ***g. Other significant information***

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on musyarakah financing as follows:

	2025	2024	
Saldo Awal	70.644.791.649	68.315.603.522	*Beginning Balance*
Pembentukan Penyisihan Selama Periode Berjalan	79.697.262.505	6.456.950.289	*Provision During The Period*
Pemulihan Penyisihan Selama Periode Berjalan	(3.751.447.007)	(4.127.762.162)	*Recoveries During The Period*
Jumlah - bersih	**146.590.607.147**	**70.644.791.649**	*Related parties*

	2025	2024	
CKPN	525.492.063.758	441.091.131.427	*CKPN*
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)	576.820.879.147	509.153.080.792	*Assessment (PPKA)*
Kurang CKPN atas PPKA	51.328.815.389	68.061.949.365	*Disadvantages CKPN on PPKA*
Rasio CKPN atas PPKA	91%	87%	*CKPN to PPKA Ratio*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan musyarakah.

Management believes that the allowance for impairment losses on musyarakah financing is adequate to cover impairment losses from uncollectible musyarakah financing.

8.4. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

Pembiayaan musyarakah dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito mudharabah atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

8.4. MUSYARAKAH FINANCING *(continued)*

g. Other significant information *(continued)*

Musyarakah financing is collateralised by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits or by other collaterals generally acceptable by the Bank.

The ratio of total Non-Performing Financing (NPF) gross and net on mudharabah financing as follows:

	2025	2024	
Jumlah Pembiayaan Musyarakah			*Amount of Musyarakah Financing*
NPF - Bruto	384.082.251.117	73.378.314.000	*NPF - Gross*
Persentase NPF - Bruto	3,48%	0,86%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF-Neto	245.648.029.444	8.599.717.244	*NPF - Net*
Persentase NPF - Neto	2,26%	0,10%	*Percentage of NPF - Net*

8.5. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH*

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi ijarah, ijarah multijasa, dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) dengan rincian sebagai berikut:

8.5. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH

This account represents lease object transactions from ijarah, ijarah multi-services and Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) with details are as follows:

	2025	2024	
Multijasa	68.770.000.000	80.779.000.000	*Multi-services*
Lainnya	213.474.500.000	266.594.500.000	*Others*
Jumlah	282.244.500.000	347.373.500.000	*Total*
Akumulasi Penyusutan, Amortisasi Pemeliharaan dan Penurunan Nilai	(109.057.216.659)	(106.173.322.165)	*Accumulated Depreciation, Maintenance Amortization and Impairment*
Jumlah - bersih	**173.187.283.341**	**241.200.177.835**	***Total - net***

Penyusutan, amortisasi, pemeliharaan dan penurunan nilai yang dibebankan pada laporan laba rugi masing-masing sebesar Rp109.057.216.659 dan Rp106.173.322.165 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Depreciation, amortization, maintenance and impairment charges charged to the profit and loss statement amounted to IDR 109.057.216.659 and IDR 106.173.322.165 for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

9. PENYERTAAN SAHAM

Akun ini merupakan penyertaan saham yang ditempatkan pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perusahaan daerah (Ventura). Penyertaan pada BPR dalam kondisi laba, sedangkan pada Perusahaan Ventura dalam kondisi rugi. Persentase kepemilikan dan jumlah nominal penyertaan sebagai berikut:

9. INVESTMENT IN SHARES

This account represents investment in shares placed in 2 (two) Rural Banks (BPR) and a regional company (Ventura). Investments in BPRs are in a profit condition, while in Venture Companies they are in a loss condition. The percentage of ownership and nominal amount of participation are as follows:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan) / *9. INVESTMENT IN SHARES (continued)*

Keterangan/ *Description*	Bagian penyertaan / *Share of investment*	Tanggal Penyertaan / *Date of investment*	*Nominal Penyertaan 31 Desember 2025 / Participation Amount December 31, 2025*	*Nominal Penyertaan 31 Desember 2024 / Participation Amount December 31, 2024*
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang/ Kateman	1,38%	21/11/2007	200.000.000	200.000.000
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir	0,91%	02/10/2007	200.333.335	200.333.335
PT Sarana Riau Ventura	7,76%	30/05/2007	1.155.450.000	1.155.450.000
Jumlah / Total			1.555.783.335	1.555.783.335
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*			(1.155.450.000)	-
Jumlah bersih/ Total net			**400.333.335**	**1.555.783.335**

10. ASET TETAP / *10. FIXED ASSETS*

Berikut ini adalah aset tetap kepemilikan langsung yang dimiliki oleh Bank:

Following is the direct ownership of fixed assets by the bank:

	2025				
	Saldo Awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Increase*	Pengurangan/ *Decrease*	Reklasifikasi/ Penyesuaian *Reclasification/ Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Harga perolehan/ *Cost of Acquisition*					
Tanah/*Land*	90.485.416.600	-	-	-	90.485.416.600
Bangunan/*Building*	319.184.163.088	3.870.573.750	3.847.409.438	(2.200.000)	319.205.127.400
Mesin dan Peralatan Kantor/ *Machine and office equipment*	390.989.455.113	41.655.317.013	15.497.189.408	2.200.000	417.149.782.718
Kendaraan/ *Vehicle*	30.444.071.823	1.242.899.000	947.099.000		30.739.871.823
Sub. Jumlah/ *Sub.Total*	**831.103.106.624**	**46.768.789.763**	**20.291.697.846**	**-**	**857.580.198.541**
Aset dalam penyelesaian/ *Construction in progress*					
Tanah dan Bangunan / *Land and Building*	981.625.315	8.815.039.839	2.644.779.682	-	7.151.885.472
Mesin dan Peralatan Kantor/ *Machine and office equipment*	11.504.114.512	44.860.377.170	55.473.534.551	-	890.957.131
Kendaraan/ *Vehicle*	-	575.399.000	575.399.000	-	-
Sub. Jumlah/ *Sub.Total*	**12.485.739.827**	**53.675.417.009**	**58.118.314.233**	**-**	**8.042.842.603**
Jumlah/ *Total*	**843.588.846.451**	**100.444.206.772**	**78.410.012.079**	**-**	**865.623.041.144**

10. ASET TETAP (lanjutan) / ***10. FIXED ASSETS*** *(continued)*

	2025				
	Saldo Awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Increase*	Pengurangan/ *Decrease*	Reklasifikasi/ Penyesuaian *Reclasification/ Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Akumulasi Penyusutan/ *Accumulated Depreciation*					
Bangunan / *Building*	149.044.956.992	17.500.538.239	2.030.893.166	(403.304)	164.514.198.761
Mesin dan Peralatan Kantor/ *Machine and office equipment*	286.377.991.144	39.609.142.052	13.685.832.621	1.337.432	312.302.638.007
Kendaraan/ *Vehicle*	24.429.217.044	3.416.744.329	947.098.999	-	26.898.862.374
Sub. Jumlah/ *Sub.Total*	**459.852.165.180**	**60.526.424.620**	**16.663.824.786**	**934.128**	**503.715.699.142**
Jumlah/ *Total*	**383.736.681.271**				**361.907.342.002**

	2024				
	Saldo Awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Increase*	Pengurangan/ *Decrease*	Reklasifikasi/ Penyesuaian *Reclasification/ Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Harga perolehan/ *Cost of Acquisition*					
Tanah/*Land*	88.385.416.600	2.100.000.000	-	-	90.485.416.600
Bangunan/*Building*	318.557.432.088	626.731.000	-	-	319.184.163.088
Mesin dan Peralatan Kantor/ *Machine and office equipment*	327.188.694.118	66.881.391.472	3.080.630.477	-	390.989.455.113
Kendaraan/ *Vehicle*	28.445.123.575	2.059.849.250	60.901.002	-	30.444.071.823
Sub. Jumlah/ *Sub.Total*	**762.576.666.381**	**71.667.971.722**	**3.141.531.479**	**-**	**831.103.106.624**
Aset dalam penyelesaian/ *Construction in progress*					
Tanah dan Bangunan / *Land and Building*	3.591.635.953	-	2.610.010.638	-	981.625.315
Mesin dan Peralatan Kantor/ *Machine and office equipment*	12.323.147.298	63.702.045.373	64.521.078.159	-	11.504.114.512
Kendaraan/ *Vehicle*	-	1.837.209.250	1.837.209.250	-	0
Sub. Jumlah/ *Sub.Total*	**15.914.783.251**	**65.539.254.623**	**68.968.298.047**	**-**	**12.485.739.827**
Jumlah/ *Total*	**778.491.449.632**	**137.207.226.345**	**72.109.829.526**	**-**	**843.588.846.451**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan) / *10. FIXED ASSETS (continued)*

	2024				
	Saldo Awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Increase*	Pengurangan/ *Decrease*	Reklasifikasi/ Penyesuaian *Reclasification/ Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Akumulasi Penyusutan/ *Accumulated Depreciation*					
Bangunan / *Building*	133.162.441.498	15.882.515.494	-	-	149.044.956.992
Mesin dan Peralatan Kantor/ *Machine and office equipment*	253.647.991.339	35.810.630.282	3.080.630.477	-	286.377.991.144
Kendaraan/ *Vehicle*	21.701.221.983	2.788.896.063	60.901.002	-	24.429.217.044
Sub. Jumlah/ *Sub.Total*	**408.511.654.820**	**54.482.041.839**	**3.141.531.479**	**-**	**459.852.165.180**
Jumlah/ *Total*	**369.979.794.812**				**383.736.681.271**

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp43.863.533.962 dan Rp51.340.510.360 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The amount of depreciation on fixed assets charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income is Rp43.863.533.962 and Rp51.340.510.360 respectively for the periods ending December 31, 2025 and 2024.

Aset tetap berupa gedung, kendaraan dan inventaris tertentu lainnya diasuransikan atas kemungkinan risiko kebakaran, kecelakaan dan risiko lain.

Fixed assets in the form of buildings, vehicles and certain other inventories are insured against possible risks of fire, accident and other risks.

Aset tetap tersebut diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp452.199.325.085 kepada PT Asuransi Asei Indonesia, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Syariah dan PT Asuransi Askrida Syariah. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari kebakaran dan gempa bumi.

The fixed assets are insured with a sum insured of Rp452.199.325.085 to PT Asuransi Asei Indonesia, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Syariah and PT Asuransi Askrida Syariah. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from fire and earthquake.

11. ASET LAIN-LAIN / *11. OTHER ASSETS*

	2025	2024	
Piutang Pendapatan Surat Berharga	113.385.601.499	94.277.508.267	*Income Receivables From Securities*
Pendapatan Pembiayaan Yang Akan Diterima	158.295.585.444	153.378.509.551	*Income Receivables From Financing*
Asuransi Dibayar Dimuka	100.253.249.332	113.789.967.492	*Prepaid Insurance*
PPh pasal 21 lebih bayar	11.427.487.647	7.962.452.692	*Article 21 Income Tax overpayment*
Sewa Dibayar Dimuka	29.630.337.103	29.770.467.622	*Prepaid Expense*
Tagihan ATM	9.023.992.104	10.628.684.316	*ATM Receivables*
Persediaan Alat Tulis Kantor dan Materai	13.915.148.102	18.435.997.024	*Office Stationery and Stamp Supplies*
Setoran Jaminan	2.241.019.652	2.248.603.652	*Guarantee Deposit*
Beban Lainnya Yang Dibayar Dimuka (Yadibu)	9.036.543.712	7.843.728.491	*Other Prepaid Expenses (Yadibu)*

11. ASET LAIN-LAIN (lanjutan) / *11. OTHER ASSETS (continued)*

	2025	2024	
Beban Yang Ditangguhkan	22.122.985.548	36.503.743.264	*Deferred Expenses*
Persekot Yang Diperhitungkan (Yadip) Dengan Beban	223.455.484	309.760.572	*Persekot Calculated (Yadip) With Expenses*
Pos-Pos Debet Dalam Penyelesaian Lainnya	159.700.634.980	234.788.654.002	*Debit Items in Other Settlement*
Selisih Kurang (Aktiva) Dalam Penyelesaian	-	1.750.000	*Shortfall (Assets) in Settlement*
Persekot Pembelian	-	26.125.000	*Purchase Advance*
Jumlah	**629.256.040.607**	**709.965.951.945**	*Total*

Manajemen yakin seluruh aset lain-lain akan tertagih, sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tidak perlu dibentuk.

Management believes that all other assets will be collected, so there is no need to establish an impairment credit loss.

12. LIABILITAS SEGERA / *12. LIABILITIES PAYABLE ON DEMAND*

	2025	2024	
Liabilitas pihaK ketiga	53.480.759.670	73.377.346.255	*Third Party Liabilities*
Cadangan jasprod dan tantiem	67.725.766.105	83.453.470.024	*Provision of bonus and tantiem*
Liabilitas atas tagihan ATM	47.697.359.565	41.380.234.169	*Liabilities to bill ATM*
Titipan kiriman uang dan inkaso	-	3.062.030.595	*Clearing and RTGS*
Titipan tagihan pembayaran	85.080.471.311	82.891.690.653	*Bill Payment Deposit*
Biaya yang masih harus dibayar	40.724.574.109	37.403.456.324	*Accrued expenses*
Liabilitas terkait pembiayaan	23.050.000	25.800.000	*Liabilities related to financing*
Liabilitas BI-Fast	91.100.583.366	65.096.221.642	*Liabilities to BI Fast*
Setoran jaminan jatuh tempo	61.704.662.943	88.672.027.664	*Maturity Security Deposit*
Titipan dana nasabah	2.253.330.133	15.107.240.188	*Customer Fund Deposit*
Warkat pinjaman Kliring	5.746.772.078	-	*Clearing loan instruments*
Liabilitas p*rinciple* Telkomsel	320.827.696	302.039.844	*Liabilities to Telkomsel Principle*
Liabilitas QRIS	5.502.879.928	3.799.833.337	*Liabilities to QRIS*
Dana kebajikan	3.076.664.899	2.952.759.719	*Qardhul Hasan Fund*
Rekening yang ditutup	348.880.094	344.739.248	*Closed Account*
Zakat dan infaq	1.697.474	1.271.001	*Zakat and infaq*
Titipan lainnya	577.738.742	822.080.034	*Other Entrustments*
Jumlah	**465.366.018.112**	**498.692.240.697**	*Total*

Liabilitas ATM Prima dan ATM Bersama merupakan liabilitas yang timbul karena penggunaan jaringan *Automated Teller Machine* (ATM) Bank oleh nasabah bank lain yang menjadi anggota dari jaringan ATM Prima dan jaringan ATM Bersama.

Liabilities to ATM Prima and ATM Bersama represent liabilities arising from using the Bank's network of Automated Teller Machine (ATM) by customers of using ATM Prima and ATM Bersama

Titipan lainnya merupakan titipan direct terhadap mitra Bank, titipan bagi hasil deposito jatuh tempo, dan lain-lain.

Other remittances are direct remittances to Bank's partners, remittances of time deposits profit sharing and others.

Zakat pegawai, nasabah dan umum merupakan zakat yang dibayarkan secara individu melalui platform *E-Channel* Bank dan akan disalurkan ke lembaga pengelola zakat

Zakat of employees, customers and publics are zakat paid individually through the Bank's EChannel platform and will be distributed to zakat management institutions.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN / *13. UNDISTRIBUTED PROFIT SHARING*

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada nasabah (*shahibul maal*) atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah.

This account represents the undistributed share of the customers (shahibul maal) on income generated by the Bank from managing mudharabah funds.

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The Bank's undistributed profit sharing as of December 31, 2025 and 2024, are as follows:

	2025	2024	
Rupiah			*Rupiah*
Deposito	35.482.416.319	42.400.421.658	*Time Deposits*
Sub Jumlah	**35.482.416.319**	**42.400.421.658**	*Sub Total*
Mata Uang Asing			*Foreign currency*
Deposito	186.236.083	244.638.193	*Time Deposits*
Sub Jumlah	**186.236.083**	**244.638.193**	*Sub Total*
Jumlah	**35.668.652.402**	**42.645.059.851**	*Total*

14. GIRO *WADIAH* / *14. WADIAH DEMAND DEPOSITS*

Giro wadiah terdiri dari:

Wadiah demand deposits consist of:

	2025	2024	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Rupiah	108.887.476.152	155.196.473.537	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	-	-	*United States Dollar*
	108.887.476.152	155.196.473.537	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Rupiah	1.286.404.721	1.478.710.241	*Rupiah*
Jumlah	**110.173.880.873**	**156.675.183.778**	***Total***

Giro wadiah merupakan giro wadiah yadhamanah yaitu titipan dana pihak ketiga yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah demand deposits represent wadiah yad-dhamanah in which the third-party funds are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy.

Kisaran bonus giro wadiah yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate from wadiah demand deposits given by customers are as follows:

	2025	2024	
Rupiah	0%	0%	*Rupiah*
Valuta asing	0%	0%	*Foreign currencies*

15. TABUNGAN *WADIAH* / *15. WADIAH SAVINGS DEPOSITS*

Tabungan wadiah terdiri dari:

Wadiah savings deposits consist of:

	2025	2024	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Rupiah	1.664.616.804.940	1.493.674.542.940	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	-	-	*United States Dollar*
	1.664.616.804.940	1.493.674.542.940	

15. TABUNGAN *WADIAH* (lanjutan) / *15. WADIAH SAVINGS DEPOSITS (continued)*

Tabungan wadiah terdiri dari (lanjutan): / *Wadiah savings deposits consist of (continued):*

	2025	2024	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Rupiah	5.215.710.257	9.861.399.536	*Rupiah*
Jumlah	**1.669.832.515.197**	**1.503.535.942.476**	***Total***

Kisaran bonus tabungan *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut: / *The range rate of bonus from wadiah savings deposits given by customers are as follows:*

	2025	2024	
Rupiah	0%	0%	*Rupiah*
Valuta asing	0%	0%	*Foreign currencies*

16. PENDANAAN DARI BANK INDONESIA (PaSBI) / *16. FUNDING FROM BANK INDONESIA (PaSBI)*

		2025		
Pendanaan dari Bank Indonesia / *Funding from Bank Indonesia*	Tanggal Valuta / *Value Date*	Tanggal Jatuh Tempo / *Maturity Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*
PBS032	31-Dec-25	7-Jan-26	4,85%	200.686.800.000
PBS032	31-Dec-25	7-Jan-26	4,85%	200.686.800.000
Jumlah pendanaan dari Bank Indonesia / *Total funding from Bank Indonesia*				**401.373.600.000**

		2024		
Pendanaan dari Bank Indonesia / *Funding from Bank Indonesia*	Tanggal Valuta / *Value Date*	Tanggal Jatuh Tempo / *Maturity Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*
PBS003	30-Dec-24	6-Jan-25	6,25%	228.545.000.000
PBS003	30-Dec-24	6-Jan-25	6,25%	228.545.000.000
PBS017	30-Dec-24	6-Jan-25	6,25%	243.767.500.000
PBS017	30-Dec-24	6-Jan-25	6,25%	243.767.500.000
PBS017	30-Dec-24	6-Jan-25	6,25%	243.767.500.000
PBS036	30-Dec-24	6-Jan-25	6,25%	241.967.500.000
PBS036	30-Dec-24	6-Jan-25	6,25%	72.590.250.000
Jumlah pendanaan dari Bank Indonesia / *Total funding from Bank Indonesia*				**1.502.950.250.000**

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN SIMA / *17. SECURITIES ISSUED BY SIMA*

		2025		
Surat berharga yang diterbitkan SIMA/ *Securities issued by SIMA*	Tanggal Valuta/ *Value Date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bagi hasil per tahun/ *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal/ *Nominal Value*
BPD Sulselbar UUS	31-Dec-25	2-Jan-26	4,20%	100.000.000.000
BPD Sulselbar UUS	31-Dec-25	2-Jan-26	4,20%	100.000.000.000
BPD Kaltimtara UUS	31-Dec-25	2-Jan-26	4,15%	100.000.000.000
BPD Jatim UUS	31-Dec-25	2-Jan-26	4,15%	100.000.000.000
BPD Jatim UUS	31-Dec-25	2-Jan-26	4,15%	100.000.000.000
BSI	31-Dec-25	2-Jan-26	4,18%	100.000.000.000
Jumlah surat berharga yang diterbitkan SIMA / *Total securities issued by SIMA*				**600.000.000.000**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN SIMA (lanjutan)

17. SECURITIES ISSUED BY SIMA *(continued)*

Surat berharga yang diterbitkan SIMA/ *Securities issued by SIMA*	Tanggal Valuta/ *Value Date*	2024 Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bagi hasil per tahun/ *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal/ *Nominal Value*
BPD Aceh Syariah	27-Dec-24	2-Jan-25	6,35%	100.000.000.000
BPD Aceh Syariah	27-Dec-24	2-Jan-25	6,35%	100.000.000.000
BPD Aceh Syariah	27-Dec-24	2-Jan-25	6,35%	100.000.000.000
Bank Nano Syariah	30-Dec-24	2-Jan-25	6,35%	100.000.000.000
BPD Kaltimtara UUS	30-Dec-24	2-Jan-25	6,30%	50.000.000.000
BTPN Syariah	30-Dec-24	3-Jan-25	6,32%	40.000.000.000
BPD Sulselbar UUS	30-Dec-24	6-Jan-25	6,40%	100.000.000.000
Jumlah surat berharga yang diterbitkan SIMA / *Total securities issued by SIMA*				**590.000.000.000**

18. PINJAMAN YANG DITERIMA

18. BORROWING

	2025	2024	
Pinjaman Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera	268.624.286.231	228.490.120.541	*Home Ownership Credit Loans*
Pinjaman Dana Kelolaan	12.847.332.296	13.206.387.397	*Chanelling*
Jumlah	**281.471.618.527**	**241.696.507.938**	*Total*

a. Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Riau

Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Riau terdiri dari MoU No.68/MoU/2002 tanggal 2 Oktober 2002 dan No.69/MoU/2002 tanggal 3 Oktober 2002.

a. Loans from Government of Riau Province

Loans from the Government of Riau Province consists of MoU No.68/MOU/2002 dated October 2nd, 2002 and 69/MOU/2002 dated October 3rd, 2002.

b. Pinjaman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Perjanjian Kerjasama Operasional antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Unit Usaha Syariah, berdasarkan perjanjian nomor: 92/PKS/Sg/2019 dan nomor: 065/PKO/2019 tanggal 19 Desember 2019, Tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera/Rumah Sejahtera Syariah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

b. Loans from the Ministry of Public Works and Public Housing

Agreement between the Center for Housing Financing Fund Management of the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia and PT Bank Pembangunan Bank Kepri Sharia Business Unit, based on agreement number: 92/PKS/Sg/2019 and number: 065/PKO/2019 dated December 19, 2019, concerning the Distribution of Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) Funds through Credit/Financing of Prosperous Home Ownership/Sharia Prosperous Houses for Low-Income Communities.

19. PERPAJAKAN

19. TAXATION

	2025	2024	
a. Utang Pajak			***a. Taxes Payable***
Utang pajak penghasilan pasal 29	2.830.877.280	15.858.002.140	*Income tax payables article 29*
PPh Pasal 4(2)	5.294.224.626	6.017.628.938	*Income Tax Art 4 (2)*
PPh Pasal 21	984.320.350	524.888.713	*Income Tax Art 21*

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***19. TAXATION*** *(continued)*

a. Utang Pajak (lanjutan) / ***a. Taxes Payable*** *(continued)*

	2025	2024	
PPh Pasal 23	435.864.344	523.870.455	*Income Tax Art 23*
PPh Pasal 25	11.873.835.380	7.979.091.000	*Income Tax Art 25*
PPN dan PPh Lainnya	12.009.974	6.483.089	*VAT Out*
Jumlah	**21.431.131.954**	**30.909.964.335**	*Total*

b. Manfaat (Beban) Pajak / ***b. Taxes Benefit (Expenses)***

	2025	2024	
Beban pajak kini	(93.207.816.020)	(99.993.836.140)	*Current expenses tax*
Beban pajak tahun lalu	(3.597.373.362)	(27.220.300.872)	*Last year's tax expenses*
Pajak tangguhan	3.723.507.356	42.964.735.124	*Deferred tax*
Jumlah	**(93.081.682.026)**	**(84.249.401.888)**	*Total*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income are as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak	369.513.380.413	423.623.150.046	*Profit before tax*
Koreksi Fiskal			*Fiscal corrections*
Beda temporer			*Temporary differences*
Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan CKPN atas aset produktif	46.576.102.543	(2.792.122.836)	*The difference is insufficient between the Provision for Asset Quality Assessment (PPKA) and CKPN on productive assets*
Hapus buku dan penerimaan pembiayaan hapus buku	(6.179.553.994)	(3.658.268.908)	*write-off and receipt of write-off financing*
Jasa produksi - bersih	(14.161.961.198)	12.509.703.137	*Production services - net*
Tantiem pengurus - bersih	(1.565.742.721)	-	*Manajemen tantiem - net*
Imbalan kerja - bersih	(7.743.811.194)	- 14.905.798.098	*Employee benefits - net*
Jumlah beda temporer	16.925.033.436	(8.846.486.706)	*Total*
Beda permanen			*Permanent differences*
Tenaga kerja, umum dan administrasi.	26.212.909.489	22.369.055.826	*Employee, general and administration*
Beban operasional lainnya	118.801.999	56.694.085	*Others operating expenses*
Pendapatan non operasional	(1.811.728)	-	*Non operating income*
Beban non operasional	10.903.578.261	17.315.024.184	*Non operating expenses*
Jumlah beda permanen	37.233.478.021	39.740.774.095	*Total*
Jumlah koreksi fiskal	**54.158.511.457**	**30.894.287.390**	*Total fiscal of corection*
Penghasilan kena pajak	423.671.891.869	454.517.437.436	*Taxable income*
Pembulatan	**423.671.891.000**	**454.517.437.000**	*Rounding*
• Pajak kini tahun 2025 - 22%	93.207.816.020	-	*Current tax in 2025 - 22%* •
• Pajak kini tahun 2024 - 22%	-	99.993.836.140	*Current tax in 2024 - 22%* •
Jumlah pajak kini	**93.207.816.020**	**99.993.836.140**	*Current tax amount*
Pajak dibayar dimuka			*Prepaid taxes*
PPh Pasal 25	90.376.938.740	84.135.834.000	*Income taxes article 25*
Jumlah pajak dibayar dimuka	**90.376.938.740**	**84.135.834.000**	*Total*
Pajak kurang (lebih) bayar	**2.830.877.280**	**15.858.002.140**	*Taxes (overpayment) less paid*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Manfaat (Beban) Pajak (lanjutan)

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara yang ditentukan sendiri oleh Bank. Jumlah tersebut mungkin berbeda dengan jumlah penghasilan kena pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan badan.

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ("PMK") No. 74 Tahun 2024

Pada tanggal 18 Oktober 2024, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ("PMK") No. 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Peraturan ini menggantikan PMK No.81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan PMK No.219/PMK.011/2012. Perubahan ini berdampak pada penambahan nilai aset pajak tangguhan dan penambahan hutang pajak badan Bank untuk Tahun Pajak 2025 dan 2024.

19. TAXATION *(continued)*

b. Taxes Benefit (Expenses) *(continued)*

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations made on a self assessment basis by the Bank. These amounts may differ from taxable income reported in the corporate income tax return.

Implementation of the Minister of Finance Regulation ("PMK") No. 74 Year 2024.

On 18 October 2024, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Minister of Finance Regulation ("PMK") No. 74 Year 2024 concerning the Establishment of Provisions for Uncollectible Receivables that can be Deducted from Gross Income. This regulation replaces PMK No. 81/PMK.03/2009 regarding the Formation or Accumulation of Reserve Funds That Can Be Deducted as Expenses, as amended by PMK No. 219/PMK.011/2012. This change impacts the increase in deferred tax assets and the addition of the Bank's corporate tax liabilities for the Fiscal Year 2025 dan 2024.

c. Aset pajak tangguhan / ***c. Deffered tax assets***

	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	Dikreditkan/ dibebankan ke laba rugi / *Credited (Charged) to profit or loss*	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Charged to other comprehensife Income*	31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	
Kewajiban jasa produksi	16.799.000.534	(3.115.631.464)	-	13.683.369.070	*Liabilities production services*
Kewajiban tantiem	1.560.762.871	(344.463.399)	-	1.216.299.473	*Liabilities tantiem*
Kewajiban imbalan pasca kerja	7.025.814.037	(1.703.638.463)	-	5.322.175.574	*Post-employment benefits obligation*
Perbedaan CKPN pinjaman atas PPKA pinjaman	19.128.426.837	10.246.742.560	-	29.375.169.396	*Different of loans ECL over PPKA loans*
Saldo pinjaman hapus buku	41.321.499.972	(1.359.501.879)	-	39.961.998.093	*Write-off loans balance*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak	11.374.771.271	-	(1.757.077.836)	9.617.693.435	*Remeasurement of employee benefits liabilities - net of tax*
Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7.671.904.411	-	(10.878.077.473)	(3.206.173.062)	*Marketable securities measured at fair value through other comprehensive income*
Jumlah	**104.882.179.932**	**3.723.507.356**	**(12.635.155.309)**	**95.970.531.979**	***Total***

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

19. TAXATION *(continued)*

c. Deffered tax assets *(continued)*

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	Dikreditkan/ dibebankan ke laba rugi / *Credited (Charged) to profit or loss*	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Charged to other comprehensife Income*	31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	
Kewajiban jasa produksi	14.046.865.844	2.752.134.690	-	16.799.000.534	*Liabilities production services*
Kewajiban tantiem	1.560.762.871	(0)	-	1.560.762.871	*Liabilities tantiem*
Kewajiban imbalan pasca kerja	10.305.089.618	(3.279.275.582)	-	7.025.814.037	*Post-employment benefits obligation*
Perbedaan CKPN pinjaman atas PPKA pinjaman	(25.168.268.339)	44.296.695.175	-	19.128.426.837	*Different of loans ECL over PPKA loans*
Saldo pinjaman hapus buku	42.126.319.131	(804.819.160)	-	41.321.499.972	*Write-off loans balance*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak	-	-	11.374.771.271	11.374.771.271	
Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	15.583.796.873	-	(7.911.892.462)	7.671.904.411	*rketable securities measured at fair value through other comprehensive income*
Jumlah	**58.454.565.999**	**42.964.735.124**	**3.462.878.809**	**104.882.179.932**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Management believes that it is most likely that future taxable income will be available against the temporary difference which creates deferred tax assets.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dari 25% menjadi 22% mulai dari tahun fiskal 2020 dan seterusnya.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which has become Law (UU) No. 2 of 2020, and stipulates Government Regulation (PP) No. 30 of 2020 concerning Reduction of Income Tax Rates for Domestic Corporate Taxpayers in the Form of a Public Company and effective as of June 19, 2020. This regulation stipulates a reduction in the income tax rate for domestic corporate taxpayers from 25% to 22% starting from the 2020 fiscal year onwards.

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada para karyawan yang memenuhi syarat terdiri dari program, Cuti Besar, Penghargaan Masa Bhakti (PMB), Tunjangan Hari Tua (THT), Masa Persiapan Pensiun (MPP), Program Pensiun Iuran Pasti, pensiun manfaat pasti.

20. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

Bank provides long-term benefits and postemployment benefits to all qualified employees which consist of Annual Leave, Service Pay Benefit (PMB), (THT), Pension Preparation Period (MPP), defined dues pension, defined benefit pension (Dapen).

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Valuasi aktuaria atas imbalan kerja PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) per 31 Desember 2025 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Indra Catarya Situmeang dan Rekan, berdasarkan Laporan Aktuaria Valuasi Imbalan Kerja Nomor: 058/LA-IK/KKAICS/I-2026 Tanggal 28 Januari 2026.

Valuasi aktuaria atas imbalan kerja PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp87.297.505.428 dan Rp83.639.024.126.

20. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

Actuarial valuation of employee benefits of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) as of December 31, 2025 was conducted by Actuarial Consulting Firm Indra Catraya Situmeang and Partners, based on Actuarial Report on Employee Benefits Valuation Number: 074/LA-IK/KKAICS/II-2025 dated January 28, 2026.

Actuarial valuation of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) employee benefits as of December 31, 2025 and 2024 is IDR 87.297.505.428 and IDR 83.639.024.126.

Disajikan dalam laporan posisi keuangan: / *Presented in the statement of financial position:*

Laporan Aktuaria	**2025**	**2024**	***Actuarial Report***
Imbalan kerja	43.761.097.212	37.360.104.362	*Employee benefits*
Imbalan cuti besar	24.147.398.282	26.631.190.035	*Long services leave allowance*
Imbalan penghargaan masa bakti	-	19.647.729.729	*Future Award Program*
Jumlah	**67.908.495.494**	**83.639.024.126**	*Total*

Beban imbalan kerja per 31 Desember 2025 dan 2024 yang sudah dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan berdasarkan PSAK 219, saldo Tunjangan Hari Tua (THT) yang dikelola melalui asuransi Jiwasraya dan kewajiban imbalan kerja sebesar Rp137.094.493.714 dan Rp123.099.174.791.

Employee benefit expenses as of December 31, 2025 and 2024, which have been established in accordance with Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and based on PSAK 219, the balance of Old Age Allowance (THT) managed through Jiwasraya insurance and employee benefit obligations amounted to Rp137,094,493,714 and Rp123,099,174,791.

kewajiban imbalan pasca kerja yang disajikan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp67.908.495.494 dan Rp83.639.024.126. untuk tahun 2025 kewajiban imbalan pasca kerja yang disajikan tidak termasuk imbalan penghargaan masa bakti

Post-employment benefit obligations presented in the financial statements as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp67,908,495,494 and Rp83,639,024,126. For 2025, the post-employment benefit obligations presented do not include long-service award benefits.

Diluar program pensiun tersebut diatas PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menempatkan program iuran pasti yang dikelola oleh DPLK BNI dengan saldo 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp234.222.409.939 dan Rp204.608.608.521 dan saldo THT di IFG Life per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp137.094.493.714 dan Rp123.099.174.791.

Apart from the pension program mentioned above, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) has placed a defined contribution program managed by DPLK BNI with a balance of Rp234,222,409,939 and Rp204,608,608,521 as of December 31, 2025 and 2024, and a THT balance at IFG Life as of December 31, 2025 and 2024 of Rp137,094,493,714 and Rp123,099,174,791.

	2025	**2024**	
Disajikan dalam laporan posisi keuangan :			*Presented on the statement financial position :*
Imbalan kerja	42.497.649.456	36.602.234.615	*Work benefits*
Imbalan cuti besar	24.147.398.282	26.631.190.035	*Long services leave allowance*
Imbalan penghargaan masa bakti	-	19.647.729.729	*Future Award Program*
Imbalan PKWT	1.263.447.756	757.869.747	*PKWT Benefit*
Jumlah	**67.908.495.494**	**83.639.024.126**	*Total*

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pada tahun berjalan sebagai berikut:

	2025	2024	
Selisih penilaian kembali imbalan pasca kerja	(43.716.788.340)	(51.703.505.778)	*Difference in revaluation of post-employment benefits*
Pajak tangguhan	9.617.693.435	11.374.771.271	*Deferred tax*
Jumlah	**(34.099.094.905)**	**(40.328.734.507)**	*Total*

Imbalan kerja

Beban liabilitas imbalan pascakerja diakui pada laporan laba rugi pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Beban jasa kini	4.548.021.427	4.234.135.729	*Current cost*
Biaya jasa lalu	-	(93.467.207.313)	*Past service costs*
Beban bunga	2.271.095.261	8.767.754.566	*Inters cost*
Pengukuran kembali imbalan jangka panjang lain	-	-	*Remeasurement other employee benefit*
Jumlah	**6.819.116.688**	**(80.465.317.018)**	*Total*

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Saldo awal	36.602.234.615	130.231.941.959	*Begining Balance*
Beban jasa kini	6.819.116.688	(80.465.317.018)	*Currents services cost*
Pengukuran kembali imbalan jangka panjang lain	7.986.717.438	(12.485.826.876)	*Remeasurement other employee benefit*
Realisasi pembayaran manfaat	(8.910.419.285)	(678.563.450)	*Benefit Payment*
Saldo akhir	**42.497.649.456**	**36.602.234.615**	*Ending balance*

Imbalan cuti besar

Beban liabilitas imbalan pascakerja diakui pada laporan laba rugi pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Beban jasa kini	7.130.127.582	7.909.751.459	*Current cost*
Beban bunga	1.431.429.886	1.232.311.134	*Inters cost*
Pengukuran kembali imbalan jangka panjang lain	1.693.664.824	192.677.955	*Remeasurement other employee benefit*
Jumlah	**10.255.222.292**	**9.334.739.548**	*Total*

Jumlah liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Nilai kini kewajiban	24.147.398.282	26.631.190.035	*Present value of liabilitas*

20. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

Remeasurement of employee benefit liabilities in the current year is as follows:

Work benefits

Amount recognized in the statement of profit or loss in rescpect of the post-employement benefit are as follows:

Movements in the presents value of finacial position arising from post-employement benefit are as follows:

Long services leave allowance

Amount recognized in the statement of profit or loss in rescpect of the post-employement benefit are as follows:

The amount of post-employment benefits liabilities recognized in the financial statements are as follows:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Imbalan cuti besar (lanjutan)

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Saldo awal	26.631.190.035	19.216.473.000	*Begining Balance*
Beban jasa kini	10.255.222.292	9.334.740.548	*Currents services cost*
Realisasi pembayaran manfaat	(12.739.014.045)	(1.920.023.513)	*Benefit Payment*
Saldo akhir	**24.147.398.282**	**26.631.190.035**	*Ending balance*

Program penghargaan masa bakti

Beban liabilitas imbalan pascakerja diakui pada laporan laba rugi pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Beban jasa kini	4.984.039.748	12.780.967.786	*Current cost*
Beban bunga	1.230.482.051	928.426.931	*Inters cost*
Pengukuran kembali imbalan jangka panjang lain	(2.012.373.094)	(7.015.014.088)	*Remeasurement other employee benefit*
Pembayaran manfaat			*Inters cost*
Jumlah	**4.202.148.705**	**6.694.380.629**	*Total*

Jumlah liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Nilai kini kewajiban	19.389.009.934	19.647.729.729	*Present value of liabilities*

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Mutasi nilai posisi keuangan			*Movements in the presents value*
Saldo awal	19.647.729.729	14.555.597.000	*Begining Balance*
Beban jasa kini	4.202.148.705	6.694.380.629	*Currents services cost*
Pembayaran manfaat	(4.460.868.500)	(1.602.247.900)	*Benefit payment*
Saldo akhir	**19.389.009.934**	**19.647.729.729**	*Ending balance*

Program imbalan PKWT

	2025	2024	
Saldo awal	757.869.747	1.634.838.324	*Begining Balance*
Beban jasa kini	769.175.010	(876.968.577)	*Currents services cost*
Pembayaran manfaat	(263.597.000)	-	
Saldo akhir	**1.263.447.756**	**757.869.747**	*Ending balance*

Program Tunjangan Hari Tua

Perjanjian kerja sama antara Bank dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tentang Pengelolaan Program Tunjangan Hari Tua Kumpulan No.54/DIR/BR/2005 dan No.067.SJ.U.0805 tanggal 18 Agustus 2005.

20. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

Long services leave allowance (continued)

Movements in the presents value of finacial position arising from post-employement benefit are as follows:

Future Award Program

Amount recognized in the statement of profit or loss in rescpect of the post-employement benefit are as follows:

The amount of post-employment benefits liabilities recognized in the financial statements are as follows:

Movements in the presents value of finacial position arising from post-employement benefit are as follows:

Reward PKWT plan

Mutual aid pension plan

The cooperation agreement between the Bank and PT Asuransi Jiwasraya (Persero) About the Program Management Annuities set No.54/DIR/BR/2005 and No.067.SJ.U.0805 dated August 18th, 2005.

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Program Masa Persiapan Pensiun

Program Masa Persiapan Pensiun dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun.

Program Pensiun Iuran Pasti

Sesuai dengan dokumen perjanjian kerjasama No.022/DLK/1/2013 tanggal 24 Juni 2013, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) pada tanggal 24 Juni 2013 tentang pengelolaan program pensiun iuran pasti bagi pegawai bank.

Program Pensiun Manfaat Pasti

Program pensiun manfaat pasti dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 (diaudit) oleh auditor independen lain dengan nomor LAI No.00002/2.1055/AU.1/08/0649-5/1/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 dan No.00001/2.1055/AU.1/08/0649-4/1/I/2025 tanggal 16 Januari 2025.

20. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

Program Preparation Pension

Program preparation pension is self-managed by the Bank and is an employee benefit plan for employees who will enter pension age.

Defined Contribution Pension Plan

In accordance cooperation agreement document No.022/DLK/1/2013 dated June 24th, 2013 the Bank entered into a cooperation agreement with "Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46)" dated June 24th, 2013 regarding defined contribution pension plan for the Bank's employees.

Pension Plan

Pension Plan managed by Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Financial Statement of the Riau Kepri Syariah Regional Development Bank Pension Fund for the year ended December 31, 2025 and 2024 (audited) by another independent auditor with LAI number No.00002/2.1055/AU.1/08/0649-5/1/I/2026 dated January 19, 2026 and No.00001/2.1055/AU.1/08/0649-4/1/I/2025 dated January 16, 2025.

	2025	2024	
Laporan nilai kini aktuarial			*Actuarial present value statement*
• Jumlah aset neto	498.967.352.639	474.405.270.771	*Total net assets* •
• Selisih kewajiban aktuaria	(35.741.092.740)	(76.537.214.771)	*difference actuarial liability* •
Kewajiban aktuaria akhir tahun	**463.226.259.899**	**397.868.056.000**	*Actuary liability at the year end*
Iuran normal bulanan			*Monthly normal contribution*
• Iuran Normal Pemberi kerja	5.058.811.949	5.198.960.514	*Normal Employer Contributions* •
• Iuran Normal Peserta	1.341.859.200	1.378.982.525	*Normal Participant Contribution* •
• Iuran Tambahan	762.034.970	1.612.796.172	*Additional Fees* •
	7.162.706.119	**8.190.739.211**	

Status aset (liabilitas) program imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The employee benefits assets (liabilities) status as of December 31st, 2024 and 2023 are as follows:

	2025	2024	
Jumlah aset neto			*Total net assets*
• Aset neto awal tahun	474.405.270.771	466.410.252.489	*Net assets beginning of year* •
• Penyesuaian	-	-	*Adjustment* •
• Kenaikan (penurunan) aset bersih	24.562.081.868	7.995.018.282	*Increase (decrease) in net assets* •
Aset neto akhir tahun	**498.967.352.639**	**474.405.270.771**	*Net assets end of year*

Aset Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau terutama terdiri dari obligasi, Efek-efek dan deposito berjangka.

Pension Fund assets of Bank Pembangunan Daerah Riau consist mainly of bonds, marketable securities and time deposits.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

Rekonsiliasi atas perubahan aset (liabilitas) imbalan kerja selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Kenaikan (penurunan) aset bersih			*Increase (decrease) in net assets*
• Hasil usaha bersih	28.258.593.168	27.291.051.429	*Operation Income* •
• Peningkatan (penurunan) nilai investasi	11.749.594.882	(5.845.451.483)	*Increase(decrease) of investment value* •
• Iuran Normal Pemberi kerja	5.058.811.949	5.198.960.514	*Normal Employer Contributions* •
• Iuran Normal Peserta	1.341.859.200	1.378.982.525	*Normal Participant Contribution* •
• Iuran Tambahan	762.034.970	1.612.796.172	*Additional Fees* •
• Imbalan yang dibayarkan	(22.608.812.302)	(21.641.320.875)	*Paid reward* •
• Pengurangan aset netto lainnya	-	-	*Decreasing of net others asset* •
Jumlah	**24.562.081.868**	**7.995.018.282**	*Total*

Pendapatan (biaya) imbalan kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Hasil usaha			*Increase (decrease) in net assets*
• Hasil usaha investasi	36.084.480.968	36.276.737.435	*Investment Income* •
• Beban investasi	(379.838.023)	(1.471.156.789)	*Investment Expense* •
• Beban operasional	(7.712.133.586)	(7.650.972.021)	*Operating expenses* •
• Pendapatan dan beban lain-lain	287.979.530	158.597.327	*Income and other Expense* •
• Pajak penghasilan	(21.895.720)	(22.154.523)	*Income Tax* •
Jumlah hasil usaha bersih	**28.258.593.169**	**27.291.051.429**	*Total of net Income* •

Penyusunan Laporan Aktuaris Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah per 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan laporan perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto No.020-B/PSAK/KKA-AS/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 dan laporan perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto No.024-B/PSAK/KKK-AS/II/2025 tanggal 16 Januari 2025.

Jumlah kewajiban yang berkaitan dengan program pensiun Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah secara keseluruhan sebagai berikut:

	2025	2024	
• Kekayaan untuk pendanaan	498.967.352.639	474.405.270.771	*Wealth for funding* •
• Nilai Kini Aktuaria	463.226.259.899	397.868.056.000	*Current Value of Actuarial* •

Iuran Normal masing masing sebesar 27,20% dan 23,85% per 31 Desember 2025 dan 2024 terhadap Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).

20. *POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES* *(continued)*

Pension Plan (continued)

Following are the reconciliation of the movements of employee benefit assets (liabilities) during the year:

Employee benefits income (expenses) for the periods ended December 31st, 2024 and 2023 are as follows:

Preparation of the Actuarial Report of the Riau Kepri Syariah Regional Development Bank Pension Fund as of December 31, 2025 and 2024 based on the calculation report of post-employment benefit obligations of the Agus Susanto Actuarial Consultant Office No. 020-B/PSAK/KKA-AS/I/2026 dated January 19, 2026 and the calculation report of post-employment benefit obligations of the Agus Susanto Actuarial Consultant Office No. 024-B/PSAK/KKK-AS/II/2025 dated January 16, 2025.

Total liabilitiy related to Pension Fund of Bank Pembangunan Daerah riau Kepri Syariah overall are as follows:

Normal Contributions are 27.20% and 23.85% respectively as of December 31, 2025 and 2024, towards Basic Pension Income (PhDP).

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

Data dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaria atas seluruh imbalan kerja di atas adalah:

• Tingkat Diskonto	7%	7,06%	*Discount rate* •
• Tingkat kenaikan gaji kedepan	5,00%	8,00%	*The rate of future salary increases* •
• Rata-rata usia karyawan	46,58	38,01	*Average age of employees* •

20. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

Pension Plan (continued)

The data and assumptions used in the actuarial calculations for all employee benefits above are:

21. LIABILITAS LAIN-LAIN

21. OTHER LIABILITIES

	2025	2024	
Cadangan THR dan Kepegawaian Lainnya	3.711.144.569	52.531.081.342	*Provision of THR and other employee expenses*
Setoran Jaminan	7.580.514.309	12.796.418.465	*Guarantee deposits*
Rekening Sementara	-	4.864.224.863	*Temporary accounts*
Pendapatan Administrasi Pembiayaan Ditangguhkan	1.878.865.489	634.736.905	*Deferred financing administration income*
Selisih Lebih (Pasiva) Dalam Penyelesaian	53.105.384	52.725.000	*Surplus (Liability) in Settlement*
Nota-Nota Kredit Dalam Penyelesaian	8.406.017	46.500	*Credit Notes in Progress*
Dana Kredit Kelolaan Yang Belum Disalurkan	24.560.232	24.560.232	*Undisbursed Managed Credit Funds*
Pos-Pos Kredit Dalam Penyelesaian Lainnya	-	1.200.000	*Other Credit Items in Settlement*
Jumlah	**13.256.596.000**	**70.904.993.307**	*Total*

Rekening sementara terdiri dari rekening penampungan angsuran pembiayaan, rekening pendamping, dan rekening titipan pembayaran asuransi karyawan.

Temporary account represents account for financing installment, companion accounts, and deposit accounts for employee's insurance payments.

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari cadangan yang dibentuk untuk sewa gedung dan jaringan, pemeliharaan ATM dan iuran OJK.

Accrued expenses consist of reserves on building and network leases, ATM maintenance fees and Financial Services Authority's fee.

Pendapatan diterima dimuka terdiri dari ujrah diterima dimuka atas *supply chain financing* dan *buyer chain financing.*

Deferred Income consists of deferred ujrah income of supply chain financing and buyer chain financing.

Lain-lain terdiri dari rekening administrasi, perantara hasil kliring dan lainnya.

Others consist of administrative accounts, clearance intermediaries and others.

Dana kebajikan terdiri dari dana sosial yang berasal dari denda/penalti, transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta infaq dan shadaqah yang berasal dari E-Channel. Infaq dan shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Qardhul hasan funds consists of social funds originating from fines/penalties, transactions that are not in accordance with sharia principles and infaq and shadaqah originating from EChannel. Infaq and sadaqah are assets that are given voluntarily by the owners, whether the use is limited (determined) or not.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. GIRO *MUDHARABAH* / *22. MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS*

	2025	2024	
Pihak ketiga - bukan bank			***Third parties - non-bank***
Rupiah	1.180.643.360.559	1.268.676.086.595	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	11.332.737.204	10.123.123.915	*United States Dollar*
Dolar Singapura	5.542.865.628	4.706.181.861	*Singapore Dollar*
Euro Europa	1.836.976	35.089.157	*Europe Euro*
Sub jumlah	**1.197.520.800.367**	**1.283.540.481.528**	***Sub total***
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	1.051.987.342.558	480.356.978.430	*Rupiah*
Jumlah bukan bank	**2.249.508.142.925**	**1.763.897.459.958**	***Non bank total***
Bank			***Bank***
Rupiah	41.253.991.126	33.043.066.612	*Rupiah*
Sub jumlah	**41.253.991.126**	**33.043.066.612**	***Sub total***
Jumlah	**2.290.762.134.050**	**1.796.940.526.570**	***Total***

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bank garansi, dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Mudharabah demand deposits is a current account product in which investor's fund can be withdrawn by check, bank guarantee, or other payment instruction method according to the agreement.

Kisaran tingkat bagi hasil untuk giro mudharabah per tahun adalah sebagai berikut:

The range rate of profit sharing for mudharabah demand deposits are as follows:

	2025	2024	
Rupiah	0.00 - 0.93 %	0.00 - 0.99 %	*Rupiah*
Valuta asing	0.00 - 0.28 %	0.00 - 0.30 %	*Foreign currencies*

23. TABUNGAN *MUDHARABAH* / *23. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS*

	2025	2024	
Pihak ketiga - bukan bank			***Third parties - non-bank***
Rupiah	7.002.001.248.790	6.605.367.621.913	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	-	-	*United States Dollar*
Dolar Singapura	-	-	*Singapore Dollar*
Euro Europa	-	-	*Europe Euro*
Riyal Saudi	24.668.782	-	
Sub jumlah	**7.002.025.917.572**	**6.605.367.621.913**	***Sub total***
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	10.769.153.551	5.667.871.871	*Rupiah*
Jumlah bukan bank	**7.012.795.071.123**	**6.611.035.493.784**	***Non bank total***
Pihak ketiga - bank			***Third parties - bank***
Rupiah	33.819.265.076	25.102.806.498	*Rupiah*
Sub jumlah	**33.819.265.076**	**25.102.806.498**	***Sub total***
Jumlah	**7.046.614.336.199**	**6.636.138.300.282**	***Total***

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who are entitled to receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined nisbah.

Kisaran tingkat bagi hasil untuk tabungan mudharabah per tahun adalah sebagai berikut:

The range rate of profit sharing for mudharabah savings deposits are as follows:

23. TABUNGAN *MUDHARABAH* (lanjutan) / ***23. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS*** *(continued)*

	2025	2024	
Rupiah	0,00% - 2,89%	0,15% - 2,80%	*Rupiah*
Valuta asing	0,47%	-	*Foreign currencies*

24. DEPOSITO *MUDHARABAH* / ***24. MUDHARABAH TIME DEPOSITS***

a. Berdasarkan mata uang: / ***a. By currency:***

	2025	2024	
Pihak ketiga - bukan bank			***Third parties - non-bank***
Rupiah	14.597.671.427.298	14.193.626.387.910	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	105.646.744.140	84.838.219.946	*United States Dollar*
Dolar Singapura	2.555.618.796	1.837.283.871	*Singapore Dollar*
Sub jumlah	**14.705.873.790.235**	**14.280.301.891.727**	***Sub total***
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	1.892.000.000	1.032.000.000	*Rupiah*
Jumlah bukan bank	**14.707.765.790.235**	**14.281.333.891.727**	***Non bank total***
Pihak ketiga - bank			***Third parties - bank***
Rupiah	1.800.000.000	4.600.000.000	*Rupiah*
Sub jumlah	**1.800.000.000**	**4.600.000.000**	***Sub total***
Jumlah	**14.709.565.790.235**	**14.285.933.891.727**	***Total***

b. Berdasarkan jangka waktu: / ***b. By period:***

	2025	2024	
Rupiah			*Rupiah*
1 bulan	3.296.891.502.752	3.598.764.759.451	*1 month*
3 bulan	7.686.962.215.000	7.661.593.392.482	*3 months*
6 bulan	3.251.906.882.904	2.189.642.331.618	*6 months*
12 bulan	362.832.664.185	746.165.241.901	*12 months*
12 bulan lebih	2.770.162.457	3.092.662.457	*more than 12 months*
Sub jumlah	**14.601.363.427.298**	**14.199.258.387.910**	***Sub total***
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
1 bulan	105.351.680.015	84.569.513.921	*1 month*
3 bulan	211.689.125	188.231.025	*3 months*
6 bulan	83.375.000	80.475.000	*6 months*
12 bulan	-	-	*12 months*
Sub jumlah	**105.646.744.140**	**84.838.219.946**	***Sub total***
Dolar Singapura			*Singapore Dollar*
1 bulan	2.143.472.821	1.567.357.738	*1 month*
3 bulan	221.702.355	72.251.938	*3 months*
6 bulan	154.634.151	141.270.306	*6 months*
12 bulan	35.809.468	56.403.890	*12 months*
Sub jumlah	**2.555.618.796**	**1.837.283.871**	***Sub total***
Jumlah	**14.709.565.790.235**	**14.285.933.891.727**	***Total***

c. Beberapa Deposito *mudharabah* dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank.

c. Mudharabah time deposits that are used as collateral for the receivable and financing Bank's.

d. Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

d. Mudharabah time deposits represent third parties' investments which are entitled to receive a share in the income derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and previously approved nisbah.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. DEPOSITO *MUDHARABAH* (lanjutan)

e. Kisaran tingkat bagi hasil untuk deposito mudharabah per tahun adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Rupiah	2.33% - 6.85%	3.48% - 7.66%	*Rupiah*
Valuta asing	0.47% - 4.75%	0.50% - 4.85%	*Foreign currencies*

f. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya nilai simpanan yang dijamin LPS, pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank. Beban premi penjaminan pemerintah selama 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp56.104.569.766 dan Rp47.047.480.708. Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

24. MUDHARABAH TIME DEPOSITS *(continued)*

e. The range rate of profit sharing for mudharabah time deposits are as follows:

f. *Based on Republic of Indonesia Government Regulation no. 66 of 2008 dated 13 October 2008 regarding the amount of deposits guaranteed by LPS, on 31 December 2025 and 2024, the amount of deposits guaranteed by LPS is deposits up to IDR 2,000,000,000 for each customer per bank. Government guarantee premium expenses for 31 December 2025 and 2024 are IDR 56.104.569.766 and IDR 47.047.480.708 respectively. The bank is a participant in the guarantee program.*

25. MODAL SAHAM

Penambahan modal disetor PT Bank Riau Kepri sebesar Rp2.000.000.000,- yang berasal Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri telah ditata usahakan berdasarkan Surat PT Bank Riau Kepri No.106/TS.01/DIR/2022 tanggal 31 Januari 2022 dan telah di telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan Surat OJK No.S-195/KO.053/2022 tanggal 28 April 2022 sehingga modal disetor posisi menjadi Rp1.105.160.700.000.

Penambahan modal disetor PT.Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 21 Agustus tahun 2022 sebesar Rp100.000.000.000. (seratus milyar rupiah) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Riau, telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK, berdasarkan surat PT. Bank Riau Kepri (Perseroda) No.501/TS.01/DIR/2022 tanggal 19 Mei 2022 dengan dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK melalui surat OJK nomor S- 249/KO.053/2022 tanggal 15 Juni 2022 sehingga modal disetor Bank posisi 21 Agustus 2022 menjadi Rp1.205.160.700.000.

Terakhir Pengangkatan Pengurus dan Pencatatan Modal Disetor PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda) terakhir berdasarkan Surat OJK No. S-307/KO.053/2023 tanggal 29 September 2023.

Laporan Perubahan Modal Disetor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) sebesar Rp.2.000.000.000 yang berasal dari Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri Pemegang Saham Seri B, telah ditatausahakan administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, surat OJK No. S-108/KO.053/2023 tanggal 15 April 2023, sehingga total modal disetor Bank posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp1.207.160.700.000.

25. SHARE CAPITAL

The additional of paid in capital of PT Bank Riau Kepri amounting to IDR 2,000,000,000,- originating from the Sharia Consumer Cooperative Amanah Riau Kepri has been administered based on the letter of PT Bank Riau Kepri No.106/TS.01/DIR/2022 dated January 31, 2022 and has been administered in the OJK supervision administration based on OJK Letter No.S-195/KO.053/2022 dated April 28, 2022 so that the paid-up capital position becomes IDR 1,105,160,700,000.

The additional paid in capital of PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) on August 21, 2022 amounting to IDR 100,000,000,000 originating from the Riau Provincial Government, has been administered in the administration of OJK supervision, based on a letter from PT. Bank Riau Kepri (Perseroda) No.501/TS.01/DIR/2022 dated May 19, 2022 with and has been administered in the OJK supervision administration through OJK letter number S249/KO.053/2022 dated June 15, 2022 so that the Bank's paid-up capital on August 21, 2022 becomes IDR 1,205,160,700,000.

The latest appointment of management and registration of paid-up capital of PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda) is based on OJK Letter No. S-307/KO.053/2023 dated 29 September 2023.

Report on Changes in Paid-in Capital of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) amounting to IDR 2,000,000,000 originating from the Amanah Riau Kepri Sharia Consumer Cooperative Series B Shareholders, has been administered by the supervisory administration of the Financial Services Authority, OJK letter No. S-108/KO.053/2023 dated 15 April 2023, so that the total paid-up capital of the Bank as of 31 December 2023 is IDR 1,207,160,700,000.

25. MODAL SAHAM (lanjutan)

Penyertaan modal dalam bentuk aset berupa tanah seluas 2.000 m2 dengan nilai sebesar Rp2.080.000.000,- yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna belum dapat ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengingat terdapat hal-hal yang masih memerlukan tindak lanjut dari Bank, sebagaimana surat OJK No. S-108/KO.053/2023 tanggal 15 April 2023 tersebut diatas.

Penambahan modal disetor tahun 2024 sebesar Rp2.100.000.000 yang berasal dari penyertaan dalam bentuk aset berupa tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dengan nilai sebesar Rp2.100.000.000 sebagaimana salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Nomor 01 tanggal 4 Juni 2024 oleh Pupung Mulyantini, S.H., M.H. (Notaris di Kota Pekanbaru) dan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0131026 tanggal 04 Juni 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana surat OJK Nomor S-276/KO.154/2024 tanggal 05 Agustus 2024, sehingga total modal disetor Bank posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp1.209.260.700.000.

Rencana tambahan modal yang akan disetor oleh Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp260.000.000.000 Duaratus Enampuluh Miliar Rupiah) setelah audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) keluar dan Penambahan Modal dalam bentuk aset dari pemegang saham Kabupaten dan Kota, untuk menunjang kegiatan bisnis Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan dengan catatan membeli aset kantor Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) agar tidak ada pengeluaran untuk biaya sewa, yang disetujui berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Nomor 36 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat oleh Pupung Mulyantini, S.H., M.H. (Notaris di Kota Pekanbaru).

Komposisi kepemilikan modal disetor per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

25. SHARE CAPITAL *(continued)*

Capital participation in the form of assets in the form of land covering an area of 2,000 m2 with a value of IDR 2,080,000,000 originating from the Regional Government of Natuna Regency cannot yet be administered in the supervisory administration of the Financial Services Authority considering that there are matters that still require follow-up from the Bank, as OJK letter no. S-108/KO.053/2023 dated 15 April 2023 as mentioned above.

Additional paid-in capital in 2024 amounting to IDR 2.100.000.000 which comes from participation in the form of assets in the form of land from the Natuna Regency Government with a value of IDR 2.100.000.000 as stated in the copy of the Deed of Statement of Meeting Decision of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Number 01 dated June 4, 2024 by Pupung Mulyantini, S.H., M.H. (Notary in Pekanbaru City) and letter from the Director General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights No.AHU-AH.01.03-0131026 dated June 4, 2024 concerning Receipt of Notification of Changes to the Articles of Association of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), has been recorded in the supervision administration of the Financial Services Authority as stated in the OJK letter Number S-276/KO.154/2024 dated August 5, 2024, so that the total paid-in capital of the Bank as of December 31, 2024 amounting to IDR 1.209.260.700.000.

The additional capital plan to be deposited by the Riau Provincial Government is IDR 260.000.000.000 (Two Hundred Sixty Billion Rupiah) after the BPK (Financial Audit Agency) audit is issued and Additional Capital in the form of assets from Regency and City shareholders, to support the business activities of Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) and with a note to purchase office assets of Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) so that there are no expenses for rental fees, which were approved based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Number 36 dated May 22, 2024 made by Pupung Mulyantini, S.H., M.H. (Notary in Pekanbaru City).

Composition of Authorized capital December 31, 2025 is as follow:

Perkiraan/ Akun	Lembar saham / *per share*	Nilai Per lembar saham (Rp) / *par value (IDR)*	Jumlah Nilai Saham (Rp) / *Value of share (IDR)*
Modal Dasar / *Authorized capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	34.000.000	100.000	3.400.000.000.000
Saham Seri B / *Share of B series*	6.000.000	100.000	600.000.000.000
Jumlah / *total*	40.000.000		4.000.000.000.000

Perkiraan/ Akun	Lembar saham / *per share*	Nilai Per lembar saham (Rp) / *par value (IDR)*	Jumlah Nilai Saham (Rp) / *Value of share (IDR)*
Modal Ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid up capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	12.022.607	100.000	1.202.260.700.000
Saham Seri B / *Share of B series*	70.000	100.000	7.000.000.000
Jumlah / *total*	12.092.607		**1.209.260.700.000**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. MODAL SAHAM (lanjutan) / ***25. SHARE CAPITAL*** *(continued)*

Pemegang Saham/ ***Shareholders***	**Persentase pemilikan/** ***Ownership persentase***	**Lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/** ***Amount of issued and fully-paid share capital***	**Nilai Per lembar saham (Rp) /** ***Per value (IDR)***	**Jumlah Nilai Saham (Rp) /** ***Value of share (IDR)***
Provinsi Riau	42,93%	5.191.682	100.000	519.168.200.000
Provinsi Kepulauan Riau	0,99%	120.000	100.000	12.000.000.000
Kota Pekanbaru	1,24%	150.000	100.000	15.000.000.000
Kabupaten Kampar	8,70%	1.051.812	100.000	105.181.200.000
Kabupaten Bengkalis	10,88%	1.316.062	100.000	131.606.200.000
Kabupaten Indragiri Hulu	0,53%	64.007	100.000	6.400.700.000
Kabupaten Indragiri Hilir	5,61%	678.772	100.000	67.877.200.000
Kabupaten Siak Sri Indrapura	2,71%	327.110	100.000	32.711.000.000
Kota Dumai	0,43%	52.030	100.000	5.203.000.000
Kabupaten Pelalawan	2,64%	319.668	100.000	31.966.800.000
Kabupaten Rokan Hulu	0,68%	82.807	100.000	8.280.700.000
Kabupaten Rokan Hilir	3,07%	371.351	100.000	37.135.100.000
Kabupaten Kuantan Singingi	1,26%	152.086	100.000	15.208.600.000
Kabupaten Bintan	3,15%	380.789	100.000	38.078.900.000
Kota Batam	4,13%	500.000	100.000	50.000.000.000
Kabupaten Karimun	0,59%	71.900	100.000	7.190.000.000
Kabupaten Natuna	2,98%	360.381	100.000	36.038.100.000
Kota Tanjung Pinang	0,69%	83.913	100.000	8.391.300.000
Kabupaten Kep. Meranti	4,96%	600.000	100.000	60.000.000.000
Kabupaten Lingga	0,58%	70.000	100.000	7.000.000.000
Kabupaten Kepulauan Anambas	0,65%	78.237	100.000	7.823.700.000
Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	0,58%	70.000	100.000	7.000.000.000
Jumlah / *Total*	100,00%	12.092.607		**1.209.260.700.000**

Komposisi kepemilikan modal disetor per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Composition of Authorized capital December 31, 2024 is as follow:

Perkiraan/ Akun	**Lembar saham /** ***per share***	**Nilai Per lembar saham (Rp) /** ***per value (IDR)***	**Jumlah Nilai Saham (Rp) /** ***Value of share (IDR)***
Modal Dasar / *Authorized capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	34.000.000	100.000	3.400.000.000.000
Saham Seri B / *Share of B series*	6.000.000	100.000	600.000.000.000
Jumlah / *total*	40.000.000		4.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan disetor penuh / *Issued and fully paid up capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	12.022.607	100.000	1.202.260.700.000
Saham Seri B / *Share of B series*	70.000	100.000	7.000.000.000
Jumlah / *total*	12.092.607		**1.209.260.700.000**

Pemegang Saham/ ***Shareholders***	**Persentase pemilikan/** ***Ownership persentase***	**Lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/** ***Amount of issued and fully-paid share capital***	**Nilai Per lembar saham (Rp) /** ***Per value (IDR)***	**Jumlah Nilai Saham (Rp) /** ***Value of share (IDR)***
Provinsi Riau	42,93%	5.191.682	100.000	519.168.200.000
Provinsi Kepulauan Riau	0,99%	120.000	100.000	12.000.000.000
Kota Pekanbaru	1,24%	150.000	100.000	15.000.000.000

25. MODAL SAHAM (lanjutan) / ***25. SHARE CAPITAL*** *(continued)*

Pemegang Saham/ ***Shareholders***	**Persentase pemilikan/** ***Ownership persentase***	**Lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/** ***Amount of issued and fully-paid share capital***	**Nilai Per lembar saham (Rp) /** ***Per value (IDR)***	**Jumlah Nilai Saham (Rp) /** ***Value of share (IDR)***
Kabupaten Kampar	8,70%	1.051.812	100.000	105.181.200.000
Kabupaten Bengkalis	10,88%	1.316.062	100.000	131.606.200.000
Kabupaten Indragiri Hulu	0,53%	64.007	100.000	6.400.700.000
Kabupaten Indragiri Hilir	5,61%	678.772	100.000	67.877.200.000
Kabupaten Siak Sri Indrapura	2,71%	327.110	100.000	32.711.000.000
Kota Dumai	0,43%	52.030	100.000	5.203.000.000
Kabupaten Pelalawan	2,64%	319.668	100.000	31.966.800.000
Kabupaten Rokan Hulu	0,68%	82.807	100.000	8.280.700.000
Kabupaten Rokan Hilir	3,07%	371.351	100.000	37.135.100.000
Kabupaten Kuantan Singingi	1,26%	152.086	100.000	15.208.600.000
Kabupaten Bintan	3,15%	380.789	100.000	38.078.900.000
Kota Batam	4,13%	500.000	100.000	50.000.000.000
Kabupaten Karimun	0,59%	71.900	100.000	7.190.000.000
Kabupaten Natuna	2,98%	360.381	100.000	36.038.100.000
Kota Tanjung Pinang	0,69%	83.913	100.000	8.391.300.000
Kabupaten Kep. Meranti	4,96%	600.000	100.000	60.000.000.000
Kabupaten Lingga	0,58%	70.000	100.000	7.000.000.000
Kabupaten Kepulauan Anambas	0,65%	78.237	100.000	7.823.700.000
Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	0,58%	70.000	100.000	7.000.000.000
Jumlah / *Total*	100,00%	12.092.607		**1.209.260.700.000**

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR / ***26. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL***

	2025	**2024**	
Dana setoran modal	2.084.940.000	2.084.940.000	*Paid Capital*

Tambahan modal disetor Pemegang Saham seri A Bupati Kabupaten Natuna sebesar Rp2.080.000.000 telah dilakukan berdasarkan surat pernyataan Bupati Natuna, dengan surat pernyataan No. 032/339/BPKAD-Set/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021.

Additional paid-up capital of series A shareholders of the Regent of Natuna Regency amounting to IDR 2.080.000.000 has been carried out based on the statement letter of the Regent of Natuna, with statement letter No. 032/339/BPKAD-Set/XII/2021 dated December 8, 2021.

Rincian mutasi tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The details of additional paid-in capital mutations as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Mutasi tambahan modal disetor per 31 Desember 2025 / ***Mutation of Additional Paid-in Capital as of December 31, 2025***

Pemegang Saham / ***Shareholders***	**2025**			
	Saldo awal tahun / ***Beginning balance***	**Penambahan /** ***Additional***	**Pengembalian /** ***Return***	**Saldo Akhir Tahun /** ***Ending balance***
Dana setoran modal/ *Capital deposit fund*	2.084.940.000	-	-	2.084.940.000
Jumlah / *Total*	**2.084.940.000**	**-**	**-**	**2.084.940.000**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan) / *26. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)*

Mutasi tambahan modal disetor per 31 Desember 2024 / ***Mutation of Additional Paid-in Capital as of December 31, 2024***

Pemegang Saham / *Shareholders*	2024			
	Saldo awal tahun / *Beginning balance*	Penambahan / *Additional*	Reklasifikasi ke modal/ *Reclasification to paid capital*	Saldo Akhir Tahun / *Ending balance*
Dana setoran modal/ *Capital deposit fund*	2.084.940.000	-	-	2.084.940.000
Kabupaten Natuna	2.080.000.000	-	2.080.000.000	-
Jumlah / *Total*	**4.164.939.999**	**-**	**2.080.000.000**	**2.084.940.000**

27. SALDO LABA / *27. RETAINED EARNINGS*

	2025	2024	
Telah ditentukan penggunaannya	1.846.010.805.225	1.861.628.489.388	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	352.096.499.136	413.619.673.570	*Purpose reserves*
Jumlah	**2.198.107.304.361**	**2.275.248.162.959**	*Total*

Telah ditentukan penggunaannya / ***Appropriated***

	2025	2024	
- Cadangan umum	1.846.010.805.225	1.861.628.489.388	*General reserves* -
- Cadangan tujuan	-	-	*Goal backup* -
Jumlah	**1.846.010.805.225**	**1.861.628.489.388**	*Total*

Cadangan Umum / ***General reserves***

Penggunaan cadangan umum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengacu kepada perundang-undangan serta digunakan untuk menutup

The general reserves certainly by General Meeting Of Stockholders with refer to regulation by the Law and used for covered Bank losses.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tahun buku 2024 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah" (Perseroda) Disingkat PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang dibuat oleh Notaris Vivit Arisandy, S.H., M.Kn. tanggal 28 April 2025 Nomor 02. RUPS antara lain memutuskan:

The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2024 financial year based on the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company "Riau Kepri Syariah Regional Development Bank" (Perseroda) Abbreviated as PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) made by Notary Vivit Arisandy, S.H., M.Kn. dated April 28, 2025 Number 02. The GMS among others decided:

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2024;
- *Approved the 2024 Fiscal Year Annual Report;*

- Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen perseroan Tahun Buku 2024 sesuai dengan yang diusulkan yaitu sebesar Rp339.373.748.158,-
- *Approved the allocation of the use of net profit and distribution of dividends of the company for the 2024 Financial Year in accordance with the proposal, namely IDR 339,373,748,158.*

Alokasi penggunaan laba bersih tahun buku 2024:

Allocation of use of net profit for the 2024 financial year:

	Komposisi	Nominal	
- Dividen	67,50%	229.077.280.007	*Dividends* -
- Cadangan umum	27,50%	93.327.780.744	*General Reserves* -
- Dana Pembinaan Kemitraan	5,00%	16.968.687.408	*Development Fund* -
Jumlah	**100,00%**	**339.373.748.158**	*Total*

27. SALDO LABA (lanjutan)

Cadangan Umum (lanjutan)

- Penggunaan cadangan jasa produksi pegawai dan tantiem pengurus tahun buku 2024.
  - Menyetujui penggunaan cadangan jasa produksi pegawai Tahun Buku 2024 yang telah menjadi biaya Tahun Buku 2024 dengan komposisi 22,5%.
  - Menyetujui komposisi cadangan jasa produksi pegawai untuk Tahun Buku 2025, sama dengan Tahun Buku 2024.
  - Menyetujui penggunaan cadangan tantiem pengurus Tahun Buku 2023 yang telah menjadi biaya pada tahun 2023 dengan komposisi sebesar 2% dan untuk sisanya sebesar 0,5% dikembalikan ke laba ditahan.
  - Menyetujui penggunaan cadangan umum untuk tantiem pengurus perseroan Tahun Buku 2024 dengan komposisi sebesar 2%.
  - Menyetujui komposisi cadangan tantiem pengurus untuk Tahun Buku 2025 dengan komposisi sebesar 2,5% apabila mencapai target dan apabila tidak mencapai target maka komposisi cadangan tantiem sebesar 2% dari laba bersih Perseroan.
  - Menyetujui penyelesaian remunerasi tetap bagi pengurus perseroan (Dewan Komisaris & Direksi) untuk tahun buku 2024 yang menjadi beban yang ditangguhkan (belum dicacat sebagai biaya) pada tahun 2024 dengan akumulasi nilai diluar honorarium/ gaji sebesar Rp14.425.060.202.
  - Menyetujui menetapkan anggaran remunerasi tetap bagi pengurus perseroan (Dewan Pengurus & Direksi) tahun buku 2025 sebesar Rp39.919.374.528,- dengan komposisi jumlah pengurus lengkap (3 orang Dewan Komisaris dan 5 orang Direksi).
  - Menyetujui menetapkan anggaran remunerasi tetap Dewan Pengawas Syariah tahun buku 2025 dengan catatan untuk item THR dikurangi 1/2 (satu per dua) dari anggaran item THR yang diusulkan dan item honorarium/gaji ditetapkan sebesar 40% dari gaji Komisaris Utama.
  - Menyetujui formula pembagian dana pembinaan kemitraan Perseroan Tahun Buku 2025 kepada masing-masing pemegang saham sama dengan formula pada tahun 2024 yaitu alokasi pembagian masing-masing pemegang saham sebesar Rp 200.000.000,- dan sisanya dibagi secara proporsional berdasarkan besaran saham dan pelaksanaannya akan diatur oleh Direksi.

27. RETAINED EARNINGS *(continued)*

General reserves *(continued)*

- *Use of employee production service reserves and management bonuses for the 2024.*
  - *Approved the use of employee production service reserves for the 2024 Financial Year which have become costs for the 2024 Financial Year with a composition of 22.5%.*
  - *Approved the composition of employee production service reserves for the 2025 Financial Year, the same as the 2024 Financial Year.*
  - *Approved the use of the management bonus reserves for the 2023 Financial Year which have become expenses in 2023 with a composition of 2% and the remaining 0.5% returned to retained earnings.*
  - *Approved the use of general reserves for bonuses for the company's management for the 2024 Financial Year with a composition of 2%.*
  - *Approved the composition of the management's bonus reserves for the 2025 Financial Year with a composition of 2.5% if the target is achieved and if the target is not achieved, the composition of the bonus reserves will be 2% of the Company's net profit.*
  - *Approved the settlement of fixed remuneration for the company's management (Board of Commissioners & Directors) for the 2024 financial year which is a deferred charge (not yet recorded as an expense) in 2024 with an accumulated value outside of honorarium/salary of IDR 14,425,060,202.*
  - *Approved to determine a fixed remuneration budget for the company's management (Board of Management & Board of Directors) for the 2025 financial year amounting to IDR 39,919,374,528,- with a complete composition of the number of management (3 Board of Commissioners and 5 Board of Directors).*
  - *Approved to determine the fixed remuneration budget for the Sharia Supervisory Board for the 2025 financial year with a note that the THR item is reduced by 1/2 (one half) of the proposed THR item budget and the honorarium/salary item is set at 40% of the Main Commissioner's salary.*
  - *Approved the distribution formula for the Company's partnership development funds for the 2025 Financial Year to each shareholder, the same as the formula in 2024, namely the allocation of distribution to each shareholder of IDR 200,000,000, and the remainder is divided proportionally based on the size of the shares and its implementation will be regulated by the Board of Directors.*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. SALDO LABA (lanjutan)

Cadangan Umum (lanjutan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tahun buku 2023 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang dibuat oleh Notaris Pupung Mulyantini, S.H., M.H. tanggal 22 Mei 2024 Nomor 35. RUPS memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2023;
- Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp283.775.067.551 alokasi untuk pembagian dividen perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp191.548.170.597 ditambah Rp74.000.000.000 dibagikan seluruh kepada pemegang saham.

Alokasi penggunaan laba bersih tahun buku 2023:

	Komposisi	Nominal	
- Dividen	67,50%	191.548.170.597	Dividends -
- Cadangan umum	27,50%	78.038.143.577	General Reserves -
- Dana Pembinaan Kemitraan	5,00%	14.188.753.378	Partnership - Development Fund
Jumlah	**100,00%**	**283.775.067.551**	Total

- Penggunaan cadangan jasa produksi pegawai dan tantiem pengurus tahun buku 2023 dan 2024.
  a. Menyetujui penggunaan cadangan jasa produksi pegawai 22,5% tahun 2023. Karena target tidak tercapai, untuk penetapan tantiem pengurus 2,5% tahun 2023 tunggu hasil investigasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
  b. Menyetujui untuk tahun buku 2024 komposisi cadangan jasa produksi pegawai 22,5% dan tantiem pengurus dipending.
- Menyetujui Formula pembagian Dana Pembinaan Kemitraan Perseroan tahun buku 2024 kepada masing-masing pemegang saham sama dengan formula pada tahun 2023 yaitu alokasi pembagian masing-masing pemegang saham sebesar 250.000.000 dan sisanya dibagi secara proporsional berdasarkan besaran saham dan pelaksanaannya akan diatur oleh Direksi.
- Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun buku 2024;
- Tidak menyetujui untuk menetapkan remunerasi bagi Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) Tahun buku 2024 dan fasilitas lainnya sebesar Rp47.013.751.217,- karena target tidak tercapai dipending sampai dengan hasil dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

27. RETAINED EARNINGS *(continued)*

General reserves *(continued)*

The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2023 financial year is based on the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) made by Notary Pupung Mulyantini, S.H., M.H. dated May 22, 2023 Number 35. The GMS decided:

- *Approved the 2023 Fiscal Year Annual Report;*
- *Approved the allocation of the use of net profit for the 2023 financial year amounting to IDR 283.775.067.551 allocation for the distribution of the company's dividends for the 2023 financial year amounting to IDR 191.548.170.597 plus IDR 74.000.000.000 distributed in full to shareholders.*

Allocation of use of net profit for the 2023 financial year:

- *Use of employee production service reserves and management bonuses for the 2023 and 2024 financial*
  a. Approving the use of employee production service reserves of 22.5% in 2023. Because the target was not achieved, to determine the management bonus of 2.5% in 2023, wait for the results of the BPK (The Audit Board) investigation.
  b. Approved for the 2024 financial year the composition of employee production service reserves of 22.5% and pending management bonuses.
- *Approving the distribution formula for the Company's Partnership Development Fund for the 2024 financial year to each shareholder is the same as the formula in 2023, namely the allocation of distribution for each shareholder is 250.000.000 and the remainder is divided proportionally based on the size of the shares and its implementation will be regulated by the Board of*
- *Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to conduct an audit of the Financial Report of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the 2024 financial*
- *Disagree to determine the remuneration for the Management (Board of Commissioners and Directors) for the 2024 financial year and other facilities amounting to IDR 47.013.751.217 because the target was not achieved and is pending until the results from the BPK (The Audit Board).*

27. SALDO LABA (lanjutan)

Cadangan Umum (lanjutan)

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang dibuat oleh Notaris Pupung Mulyantini, S.H., M.H. tanggal 13 November 2024 Nomor 05. RUPSLB memutuskan:

- Menyetujui pembukuan kembali dividen sebesar Rp74.000.000.000 yang telah diputus oleh Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 22 Mei 2024 menjadi laba ditahan.
- Menyetujui penyelesaian selisih Yadit Pembiayaan sebesar Rp175.465.859.483,71 menggunakan Cadangan Umum secara bertahap yaitu pada tahun 2024 sebesar Rp 87.732.929.741,86 sebesar 50% dan pada tahun 2025 sebesar 50%.

Belum ditentukan penggunaannya

	2025	2024	
Saldo awal	413.619.673.570	358.020.992.963	*Beginning balance*
Pembagian Deviden	(229.077.280.007)	(191.548.170.597)	*Payment of dividend*
Cadangan umum	(93.327.780.744)	(78.038.143.577)	*General reserve*
Dana Pembinaan Kemitraan	(16.968.687.408)	(14.188.753.378)	*Partnership Development Fund*
Realisasi/ koreksi Tantiem	1.418.875.338	-	*Realization/correction of Tantiem*
Laba periode berjalan	276.431.698.386	339.373.748.158	*Profit for the period*
Saldo akhir	**352.096.499.136**	**413.619.673.570**	*Ending balance*

Seperti dijelaskan dalam catatan 1a atas laporan keuangan Bank, dimana Bank telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan No.KEP-93/D.03/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Bank siap beroperasi secara penuh dan efektif memulai aktivitas perbankan syariah pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagai Bank Umum Syariah.

27. RETAINED EARNINGS (continued)

***General reserves** (continued)*

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which was stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) made by Notary Pupung Mulyantini, S.H., M.H. dated November 13, 2024 Number 05. The EGMS decided:

- *Approved the re-booking of dividends amounting to IDR 74.000.000.000 which was decided by the General Meeting of Shareholders on May 22, 2024 into retained earnings.*
- *Approved the settlement of the Yadit Financing difference of IDR 175.465.859.483,71 using General Reserves in stages, namely in 2024 amounting to IDR 87.732.929.741,86 amounting to 50% and in 2025 amounting to 50%.*

Purpose reserves

As describe in Note 1a to the Bank's financial statements, where the Bank has obtained permission to change business activities that have been issued by the Financial Services Authority (OJK) as stated in Decree No.KEP93/D.03/2022 dated July 4, 2022 concerning changes in the business activities of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. The Bank is ready to operate fully and effectively start sharia banking activities on August 22, 2022 as a Sharia Commercial Bank.

28. PENDAPATAN DARI JUAL BELI / *28. INCOME FROM SALES AND PURCHASES*

	2025	2024	
Murabahah	**1.124.078.737.376**	**1.324.667.658.575**	*Murabahah*

29. PENDAPATAN BAGI HASIL / *29. INCOME FROM PROFIT SHARING*

	2025	2024	
Musyarakah	964.932.661.916	668.390.727.049	*Musyarakah*
Mudharabah	42.930.548	233.311.952	*Mudharabah*
Jumlah	**964.975.592.464**	**668.624.039.001**	*Total*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENDAPATAN DARI *IJARAH* – BERSIH / *30. INCOME FROM IJARAH – NET*

	2025	2024	
Ijarah dan ijarah multijasa	93.091.199.891	124.974.393.530	*Ijarah and Ijarah multi-services*
Beban penyusutan, amortisasi pemeliharaan dan penurunan nilai aset ijarah	(72.850.894.494)	(107.738.518.503)	*Depreciation, amortisation maintenance expense and impairment of ijarah assets*
Jumlah - bersih	**20.240.305.397**	**17.235.875.027**	***Total - net***

31. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA / *31. OTHER MAIN OPERATING INCOME*

	2025	2024	
Pendapatan dari investasi pada surat berharga	264.203.828.603	214.068.928.029	*Income from investments in marketable securities*
Bonus dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	106.139.094.730	96.749.991.505	*Bonus from Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)*
Bagi hasil penempatan pada bank lain	248.762.602	1.784.423.073	*Profit sharing from placements with other bank*
Pendapatan kas bagi hasil fee Ujroh anjak piutang	17.463.898.239	8.036.823.387	*Cash income for fee revenue Ujroh factoring in receivables*
Jumlah	**388.055.584.175**	**320.640.165.994**	***Total***

32. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL / *32. INTEREST AND SHARIA INCOME*

	2025	2024	
Deposito mudharabah	847.477.627.715	824.311.961.045	*Mudharabah time deposits*
Giro mudharabah	43.230.607.611	37.252.099.080	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	60.027.994.940	52.198.236.789	*Mudharabah savings deposits*
Surat Berharga	31.162.657.174	11.769.212.200	*Merketable securities*
Pinjaman Diterima	1.393.541.690	1.185.931.672	*Borrowings*
Jumlah	**983.292.429.129**	**926.717.440.785**	***Total***

33. PENDAPATAN USAHA LAINNYA / *33. OTHER OPERATING INCOME*

	2025	2024	
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan			*Fee Based Income From Banking*
Keuntungan penjualan - nilai wajar melalui OCI	929.036.622	-	*Gain on sale - fair value through OCI*
Pendapatan transaksi ATM	54.517.312.913	32.301.693.112	*Income from ATM transactions*
Pendapatan komisi asuransi	12.869.276.798	31.677.095.000	*Income from insurance commission*
Pendapatan administrasi dan komisi selain pembiayaan	16.128.050.547	7.588.109.502	*Income from administration and commission other than financing*
Pendapatan administrasi tabungan dan giro	12.159.158.954	11.412.896.848	*Income from saving and demand deposits administration*
Pendapatan administrasi pembiayaan	917.446.644	992.705.251	*Income from financing administration*

33. PENDAPATAN USAHA LAINNYA (lanjutan) / *33. OTHER OPERATING INCOME (continued)*

	2025	2024	
Pendapatan transaksi *remittance*	36.888.188	25.773.538	*Income from remittance transactions*
Keuntungan penjabaran Valas	3.156.138.118	2.945.775.509	*Forex translation benefits*
Lainnya	9.798.886.587	34.105.113.727	*Others*
Jumlah	**110.512.195.370**	**121.049.162.487**	*Total*
Pendapatan lainnya			*Other income*
Penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan	6.179.553.994	5.147.400.019	*Recoveries of receivables and financing written-off*
Lainnya	1.350.200.227	930.586.460	*Others*
	7.529.754.221	**6.077.986.479**	
Jumlah	**118.041.949.591**	**127.127.148.965**	***Total***

34. BEBAN TENAGA KERJA / *34. PERSONNEL EXPENSES*

	2025	2024	
Gaji dan upah	246.959.084.948	230.824.121.003	*Salaries and wages*
Tunjangan karyawan	40.727.554.539	38.968.609.890	*Employee benefits*
Tantiem dan jasa produksi	67.725.766.105	76.359.093.336	*Tantiem production services*
Pendidikan dan pelatihan	37.203.345.625	37.515.394.732	*Education and training*
Outsourcing	69.284.552.173	72.282.070.128	*Outsourcing*
Lainnya	212.748.691.985	176.902.187.191	*Others*
Jumlah	**674.648.995.375**	**632.851.476.280**	***Total***

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *35. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Beban umum dan administrasi terdiri dari: / *General and administrative expenses consist of:*

	2025	2024	
Beban sewa	105.768.680.711	71.159.537.882	*Rent expenses*
Beban penjaminan	56.104.569.766	47.047.480.708	*Underwriting expenses*
Beban asuransi	64.032.671.844	48.095.987.793	*Insurance expenses*
Penyusutan aset tetap	57.696.566.561	51.722.272.787	*Depreciation of fixed assets*
Beban promosi	33.533.753.999	29.348.169.121	*Promotion expenses*
Pemeliharaan dan perbaikan	26.657.270.727	29.904.018.054	*Service and maintenance*
Beban transportasi	32.805.147.187	31.817.970.807	*Transportation expenses*
Beban barang cetak	11.600.965.470	15.008.711.806	*Printing expenses*
Listrik, air dan gas	14.866.400.707	14.902.255.471	*Electricity, water and gas*
Beban pengelolaan teknologi sistem dan informasi	10.900.585.023	23.977.630.730	*Systems and information technology expenses*
Beban komunikasi	5.475.975.258	4.813.849.993	*Communication expenses*
Beban barang dan jasa lain	12.498.030.145	13.076.765.607	*Other goods & services*
Beban kantor	9.407.696.061	9.321.771.911	*Office expenses*
Beban lisensi software	1.765.933.495	1.924.519.760	*Software license expenses*
Lain-lain	6.540.602.510	11.910.795.427	*Others*
Jumlah	**449.654.849.461**	**404.031.737.855**	***Total***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. BONUS *WADIAH* / *36. WADIAH BONUS*

Beban bonus wadiah terdiri dari: / *Wadiah bonus expenses consist of:*

	2025	2024	
Giro wadiah	89.765.098	133.949.699	*Current Account Wadiah*
Tabungan wadiah	-	-	*Wadiah Savings*
Jumlah	**89.765.098**	**133.949.699**	***Total***

37. BEBAN USAHA LAINNYA / *37. OTHER OPERATING EXPENSES*

Beban lain-lain terdiri dari: / *Other expenses consist of:*

	2025	2024	
Beban administrasi	7.377.251.778	13.417.656.610	*Administration expenses*
Beban rapat	4.088.560.052	5.194.142.094	*Meeting expenses*
Lain-lain	11.649.641.701	2.177.760.363	*Others*
Jumlah	**23.115.453.531**	**20.789.559.068**	***Total***

38. BEBAN (PEMULIHAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON-PRODUKTIF – BERSIH / *38. EXPENSES (RECOVERY) FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS – NET*

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - bersih terdiri dari: / *Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net, consist of:*

	2025	2024	
Beban CKPN - piutang dan pembiayaan			*CKPN Expense - receivables and financing*
Piutang	25.155.224.089	36.272.679.623	*Receivables*
Piutang qardh	83.814.639	731.202.716	*Funds of qardh*
Pembiayaan mudharabah	-	607.511	*Mudharabah financing*
Pembiayaan musyarakah	79.697.262.505	6.456.950.289	*Musyarakah financing*
Jumlah	**104.936.301.233**	**43.461.440.139**	*Total*
Beban CKPN - penyertaan	1.155.450.000	-	*CKPN burden - inclusion*
Jumlah	**1.155.450.000**	**-**	*Total*
Pemulihan CKPN			*CKPN recovery*
Piutang	(15.553.660.086)	(16.132.789.146)	*Receivables*
Piutang qardh	-	(10.456.660)	*Funds of qardh*
Pembiayaan mudharabah	-	-	*Mudharabah financing*
Pembiayaan musyarakah	(4.981.708.816)	(4.127.762.162)	*Musyarakah financing*
Jumlah	**(20.535.368.901)**	**(20.271.007.968)**	*Total*
Jumlah - bersih	**85.556.382.331**	**23.190.432.171**	***Total - net***

CKPN Aset Produktif tahun 2025 total sebesar Rp525.492.063.758 naik Rp84.400.932.331 atau 19,13% dibanding CKPN Aset Produktif tahun 2024 total sebesar Rp441.091.131.427. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain karena adanya kenaikan CKPN Pembiayaan Sindikasi MNC Land dari Rp604.596.656 pada tahun 2024 menjadi Rp50.106.930.849 pada tahun 2025.

The 2025 Allowance for Impairment Losses on Productive Assets totaled Rp525,492,063,758, an increase of Rp84,400,932,331 or 19.13% compared to the 2024 Allowance for Impairment Losses on Productive Assets totaling Rp441,091,131,427. This increase was caused, among other things, by the increase in Allowance for Impairment Losses on MNC Land Syndicated Financing from Rp604,596,656 in 2024 to Rp50,106,930,849 in 2025.

38. BEBAN (PEMULIHAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON-PRODUKTIF – BERSIH (lanjutan)

Pembiayaan kepada Sindikasi PT MNC Land TBK, berdasarkan Akta Perubahan Keempat Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 27 yang dibuat oleh Notaris Surjadi, SH., MKn., MM., MH Notaris di Jakarta, saldo pembiayaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp258.814.500.120 terjadi penurunan kolektibilitas dilaporkan semula dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (2) kemudian ditetapkan menjadi kolektibilitas diragukan (4). Saat ini nasabah sedang dalam proses pembicaraan terkait rencana restrukturisasi kredit BRI Bilateral antara pihak BRI dan Konsultan FS Independen, secara *inline* nasabah juga akan mengajukan permohonan restrukturisasi kepada BRI.

38. EXPENSES (RECOVERY) FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS – NET *(continued)*

Financing to the Syndicate of PT MNC Land TBK, based on the Fourth Amendment Deed of the Syndicate Credit Agreement dated August 12, 2024 Number 27 made by Notary Surjadi, SH., MKn., MM., MH Notary in Jakarta, the financing balance as of December 31, 2025 amounted to Rp258,814,500,120, there was a decrease in collectibility, initially reported with collectibility in special attention (2) then determined to be doubtful collectibility (4). Currently, the customer is in the process of discussing the BRI Bilateral credit restructuring plan between BRI and the Independent FS Consultant, inline the customer will also submit a restructuring application to BRI.

39. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA

Pendapatan (beban) non usaha lainnya terdiri dari:

	2025	2024	
Pendapatan:			*Income:*
Keuntungan penjualan aset tetap	-	57.826.000	*Gains on sales fixed asset*
Lain-lain	10.026.086.766	7.938.193.740	*Others*
Jumlah	**10.026.086.766**	**7.996.019.740**	*Total*
Beban:			*Expenses:*
Iuran keanggotaan	15.976.059.746	13.601.635.764	*Member fee*
Kegiatan sosial	3.175.763.948	3.347.493.593	*Social activities*
Lain-lain	20.395.176.737	18.004.032.041	*Others expenses*
Jumlah	**39.547.000.431**	**34.953.161.398**	*Total*
Jumlah - bersih	**(29.520.913.666)**	**(26.957.141.658)**	*Total -net*

39. *NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)*

Non operational income (expenses) consist of:

40. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba per saham untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah

	2025	2024	
Laba tahun berjalan	276.431.698.386	339.373.748.158	*Profit for the year*
Lembar saham disetor penuh	12.092.607	12.082.107	*Fully paid shares*
Laba bersih per saham	**22.860**	**28.089**	*Net profit per share*

40. *BASIS EARNINGS PER SHARE*

The computation of earnings per share for the period ended December 31, 2025 and 2024, are as follows:

41. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Rincian laporan transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Bank adalah sebagai berikut:

a. Komitmen

	2025	2024	
Liabilitas komitmen			*Commitments liablities*
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah pembiayaan yang belum digunakan	280.972.695.059	291.007.777.943	*Uncollection financing facilities from clinets*

41. *COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

Detail of transaction commitment and contingencies in Bank activities are as follow:

a. *Commitments*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

b. Kontijensi

	2025	2024	
Tagihan kontijensi			*Contigencies claim*
Tagihan bagi hasil dan marjin piutang dalam penyelesaian	290.314.957.445	278.542.477.074	*Interest receivable and margin profit sharing loans*
Liabilitas kontijensi			*Contigencies liabilities*
Garansi yang diterbitkan	29.241.328.164	27.615.211.874	*Guarantee issued*
Lainnya	-	-	*Others*
Jumlah	**29.241.328.164**	**27.615.211.874**	*Total*

c. Lainnya

	2025	2024	
Penerusan pembiayaan	223.222.930.254	223.355.917.960	*Distribution chanelling*
Aset produktif yang dihapus buku			*Write-off productive asset*
Aset produktif:			*Productive Asset:*
Pembiayaan	262.037.301.484	268.205.772.430	*Financing*
Lainnya	1.713.115.105	1.713.115.105	*Others*
Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan:			*Written off productive assets recovered:*
Pembiayaan	3.700.391.265	3.747.029.792	*Financing*
Jumlah	**490.673.738.108**	**497.021.835.287**	*Total*

41. *COMMITMENTS AND CONTINGENCIES* *(continued)*

b. *Contigencies*

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

a. Jenis hubungan

Pihak-pihak berelasi secara entitas dan/atau manajemen:

42. *TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with related parties. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

a. *Type of relationships*

Related parties from the entity level and/or management are:

No.	Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan istimewa/ *Nature of relationship*	Transaksi/ *Transaction*
1.	Provinsi Riau	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
2.	Kabupaten Bengkalis	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
3.	Kabupaten Siak Sri Indrapura	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
4.	Kabupaten Pelalawan	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
7.	Kota Pekanbaru	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
8.	Kota Dumai	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
9.	Kabupaten Bintan	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
10.	Kabupaten Rokan Hilir	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Deposito (*time deposit*).
11.	Kabupaten Kuantan Singingi	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
12.	Kota Tanjung Pinang	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

42. *TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES* *(continued)*

a. *Type of relationships* *(continued)*

No.	Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan istimewa/ *Nature of relationship*	Transaksi/ *Transaction*
13.	Kabupaten Kep. Meranti	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
14.	Provinsi Kepulauan Riau	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
15.	Kabupaten Kampar	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
16.	Kabupaten Lingga	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
17.	Kabupaten Karimun	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
18.	Kota Batam	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account) dan* Simpanan Deposito *(time deposit)*
19.	Kabupaten Natuna	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
20.	Kabupaten Rokan Hulu	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
21.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
22.	Karyawan kunci / *Key Employees*	Direksi, Komisaris, Pemimpin Cabang, Pemimpin Divisi serta anggota keluarga dekat dengan orang-orang tersebut / *Directors, Commissioners, Heads of Branches, Heads of Divisions and close members of the families of such individuals*	Tabungan (*saving),* deposito *(time deposit)* dan Kredit yang diberikan *(Loans)*
23.	PD. BPR Rokan Hilir	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Tabungan *(saving),* Simpanan Giro *(current account)*
24.	PD Tuah Sekata	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account),* Simpanan Deposito *(Time deposits)*
25.	PT Penjaminan Kredit Daerah Prop. Riau	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account),* Simpanan Tabungan *(saving)* dan Simpanan Deposito *(Time deposits)*
26.	PT PER	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)* dan Simpanan Deposito *(Time deposits)*
27.	Riau Airlines	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)*
28.	PD BPR Rohul	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Tabungan *(saving)*
29.	PT Yastera	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)* dan Pinjaman *(Loan)*
30.	PD Rokan Hulu Jaya	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Tabungan (*saving* Simpanan Giro (*current account*)
31.	BPR Dana Amanah	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi pihak-pihak berelasi

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

	2025	2024	
ASET			*ASET*
Pembiayaan yang diberikan			*Financing provided*
Lembaga Pemerintah	-	31.060.540.966	*Goverment Entitas*
Karyawan kunci	2.939.990.724	1.780.172.997	*Key management*
% terhadap jumlah aset	0,0095%	0,1064%	*% with compare to total asset*
LIABILITAS			*LIABILITIES*
Simpanan wadiah			*Deposits wadiah*
Simpanan dari nasabah	6.502.114.978	11.340.109.777	*Deposits from customer*
% terhadap jumlah liabilitas	0,0235%	0,0413%	*% with compare total liabilities*
Simpanan Mudharabah			*Deposits mudharabah*
Simpanan dari nasabah dan bank lain	1.064.648.496.109	487.056.850.301	*Deposits from customer and other Bank*
% terhadap jumlah liabilitas	3,8416%	1,7749%	*% with compare total liabilities*

Simpanan dari nasabah tersebut merupakan simpanan dari manajemen kunci, pemerintah daerah dan Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama. Simpanan dari bank lain merupakan simpanan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama.

Deposit from customer represent deposits from key management, province and regional goverment and The company which owned share by the ultimate shareholders. Deposit from other Bank represent deposits from Bank Perkreditan Rakyat (BPR) which owned share by the ultimate shareholders.

c. Komitmen dan kontinjensi

Tidak terdapat saldo komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Kompensasi terhadap personil manajemen kunci Bank (diluar dari Komisaris dan Direksi) adalah sebagai berikut:

c. *Commitment and contingencies*

There were no commitments and contingencies to related parties for the year ended and December 31, 2025 and 2024. Compensation of key management personnel of the Bank (excluded from Commisioners and Director) are follows:

	2025	2024	
Gaji	11.873.340.550	11.566.352.600	*Salary*
Tunjangan	6.769.516.650	5.830.973.147	*Allowance*
Jasa produksi	4.295.798.871	3.571.669.575	*Production bonuses*
Imbalan jangka panjang	2.085.484.264	2.831.278.496	*Long-term benefit*
Jumlah	**25.024.140.335**	**23.800.273.818**	***Total***

43. MANAJEMEN RISIKO

Bank dalam menjalankan usahanya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal Bank juga menyebabkan risiko yang dihadapi Bank menjadi semakin kompleks. Maka dari itu, agar dapat beradaptasi dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis, Bank dituntut untuk mampu menerapkan manajemen risiko yang andal dan sistematis. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan harus dapat mendukung Bank untuk lebih berhati-hati seiring dengan perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang semakin maju.

43. *RISK MANAGEMENT*

In running its business, the Bank is always faced with various risks. Rapid developments in the Bank's external and internal environment have also caused the risks faced by the Bank to become increasingly complex. Therefore, in order to be able to adapt and be able to compete in the business environment, the Bank is required to be able to implement reliable and systematic risk management. The applied risk management principles must be able to support the Bank in being more prudent in line with the increasingly advanced developments in business activities and banking operations.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Bank memiliki pengungkapan terhadap risiko dibawah ini yang berasal dari aktivitas bisnis dan instrumen keuangan:

a. Risiko Kredit
b. Risiko Pasar
c. Risiko Likuiditas
d. Risiko Operasional
e. Risiko Hukum
f. Risiko Reputasi
g. Risiko Stratejik
h. Risiko Kepatuhan
i. Risiko Imbal Hasil
j. Risiko Investasi

Catatan di bawah ini menyajikan informasi mengenai eksposur Bank terhadap setiap risiko di atas, tujuan, kebijakan dan proses yang dilakukan oleh Bank dalam mengukur dan mengelola risiko.

Kerangka manajemen risiko

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pemantau risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Bank. Komite Pemantau Risiko tersebut mengadakan pertemuan secararutin untuk menilai kinerja dari setiap portofolio pembiayaan dan mendiskusikan masalah - masalah risiko. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk implementasi strategi manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab untuk mengelola risiko yang ada di Bank. Komite Manajemen Risiko tersebut terdiri dari semua anggota Direksi dan senior manajer eksekutif. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Direktur Utama.

Kebijakan manajemen risiko ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang dihadapi Bank, menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan.

Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, Bank mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank.

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

The Bank has exposures to the following risks from financial instruments:

a. *Credit Risk*
b. *Market Risk*
c. *Liquidity Risk*
d. *Operating Risk*
e. *Legal Risk*
f. *Reputation Risk*
g. *Strategic Risk*
h. *Compliance Risk*
i. *Return Risk*
j. *Investment Risk*

The following notes present information about the Bank's exposure to each of the above risks,the Bank's objectives and policies for measuring and managing risk.

Risk management framework

Organization of the Bank's risk management involves oversight from the Commissioners, Directors, and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority in the Commissioners' level. They approves and monitors the implementation of risk management policies and framework of the Bank. The Risk Monitoring Committee meets every month to assess the performance of the respective credit portofolios and discuss risk issues. Commissioners delegate authority to Board of Directors to implement the risk management strategy.

The Risk Management Committee is established by the Board of Directors and is responsible for managing risk of the Bank. The Risk Management Committee comprises of all members of the Board of Directors and senior management executives. It is chaired by President Director.

The Bank's risk management policies are established to identify and analyze the risks faced by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits.

Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Bank's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). SKAI secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Bank.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan-kebijakan dan proses-proses yang meliputi kriteria pemberian kredit, tujuan dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio. Bank juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio Bank yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit.

Bank terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portofolio pinjaman yang diberikan dengancara meningkatkan kebijakan manajemen risiko kredit secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan system dalam upaya menjaga dampak negatif yang diakibatkan oleh kredit

Bank telah mengimplementasikan upaya disetiap tahap yang berhubungan dengan aktifitas penagih hutang untuk meningkatkan proses penagihan dan memperkuat pemantauan kegiatan penagihan.

Beberapa upaya telah dilakukan Bank untuk mengantisipasi hal tersebut seperti pengaturan tentang pembagian tugas dan fungsi karyawan untuk penagihan. Bank juga telah meminta setiap unit kantor menyusun rencana tindakan atau action untuk melakukan lelang, restrukturisasi kredit dan langkah-langkah konkrit lainnya dalam penyelesaian kredit bermasalah.

Namun upaya yang dilakukan Bank belumlah maksimal. Bank masih membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk mengupayakan hal tersebut, terutama Bank yang berada di daerah kabupaten, kecamatan dan kelurahan.

Bank belum melakukan perjanjian dengan agen penagihan (pihak ketiga) untuk membantu upaya Bank dalam melakukan penagihan, begitu juga dengan karyawan Bank yang masih perlu diberikan pelatihan dalam melakukan pekerjaan penagihan baik mengenai tata cara penagihan dan kode etik dalam melakukan penagihan. Divisi yang membidangi kredit bekerjasama dengan divisi terkait telah membentuk tim investigasi dan penyelesaian kredit bermasalah, serta secara rutin melakukan penagihan dan pembinaan kepada nasabah pembiayaan.

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

Risk management framework *(continued)*

The Bank's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit. Internal Audit undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Bank's Audit Committee.

a. Credit Risk

Credit risk is managed through established policies and processes covering creditacceptance criteria, credit origination andapproval, pricing, monitoring, problem loanmanagement and portfolio management.The Bank also closely monitors the development of its loan portfolios, to enable the Bank initiate a preventive action in atimely manner when there is a deterioration in credit quality.

Bank continued to actively manage and monitor the loan portfolio quality by improving credit risk management policies effectively, improving procedures andsystems development in an effort to keep the negative impact caused by non-performing loans (NPL).

The Bank has implemented efforts at each stage relating to debt collection activities to improve the collection process and strengthen monitoring of collection activities.

Several attempts have been made by the Bank to anticipate such matters such as arrangements on the distribution of duties and functions of employees for billing. The Bank has also asked each office unit to prepare an action plan or action to conduct auctions, credit restructuring and other concrete steps in the settlement of nonperforming loans.

However, the Bank's efforts have not been maximized. Banks still need a lot of human resources to work on it, especially Banks located in regencies, districts and subdistricts.

The Bank has not entered into an agreement with a collection agency (third party) to assist the Bank's efforts in collecting billing, as well as any Bank employees who still need to be trained in conducting both billing work and billing codes. The division in charge of credit in cooperation with related divisions has established a team of investigation and settlement of problem loans, and routinely collect and coach to the debtor.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas kredit atau meminimalisasi kerugian kredit.

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk liabilitas kontinjensi, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus Bank bayarkan dalam hal timbul kewajiban atas instrumen yang diterbitkan. Untuk komitmen kredit, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar jumlah fasilitas yang belum ditarik dari nilai penuh fasilitas kredit yang telah disepakati *(committed)* kepada nasabah.

Berikut ini menyajikan eksposur maksimum terhadap risiko kredit Bank atas instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan komitmen dan kontinjensi (rekening administratif), tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau jaminan kredit lainnya.

	2025	2024	
Laporan posisi keuangan:			*Statement of financial position:*
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	3.074.641.649.359	2.466.348.755.257	*Current account and Placement With Bank Indonesia*
Giro dan Penempatan pada Bank lain	61.032.128.642	188.524.167.905	*Current account and Placement With other Bank*
Investasi pada surat berharga	4.677.867.043.294	4.881.312.993.711	*Investment in Marketable securities*
Pembiayaan yang diberikan - bersih	21.261.821.665.049	21.166.416.718.201	*Financing - net*
Penyertaan - bersih	1.555.783.335	1.555.783.335	*Investment - net*
Aset lain-lain - bersih	629.256.040.607	709.965.951.945	*Other assets - net*
Jumlah	**29.706.174.310.287**	**29.414.124.370.354**	*Total*

	2025	2024	
Komitmen dan kontinjensi - diluar laporan posisi keuangan:			*Commitment and contingencies off balanced sheet*
Fasilitas kredit kepada nasabah pembiayaan yang belum digunakan	280.972.695.059	291.007.777.943	*Credit facilities to debtors that have not been used*
Bank garansi yang diterbitkan	29.241.328.164	27.615.211.874	*Bank guaranteed issued*
Jumlah	**30.016.388.333.510**	**29.732.747.360.171**	*Total*

SE OJK Nomor 10/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan mengenai pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko.

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

a. Credit Risk *(contnued)*

Management Information Systems (MIS) are in place and cover a sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing for timely measures to be taken to counteract for any possible deterioration in credit quality or to minimize credit losses.

i. Maximum exposure to credit risk

For financial assets recognized on the statement of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amount. For contingent liabilities, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank would have to pay if the obligations of the instruments issued are called upon. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is the full amount of the un-drawn committed credit facilities granted to customers.

The following presents the Bank's maximum exposure to credit risk of statements of financial position and off balance sheet financial instruments, without taking into account of any collateral held or other credit enhancement.

SE OJK Number 10/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit Reports submitted to the Financial Services Authority explain disclosure of risk exposures and application of risk management.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

Pengelompokkan wilayah

Wilayah / *Area*	Wilayah/area 1	Wilayah/area 2	Wilayah/ Area Wilayah/area 3	Wilayah/area 4	Wilayah/area 5
Pekanbaru	✓	-	-	-	-
Kampar	✓	-	-	-	-
Bengkalis	✓	-	-	-	-
Indragiri Hulu	✓	-	-	-	-
Indragiri Hilir	✓	-	-	-	-
Siak Sri Indrapura	✓	-	-	-	-
Dumai	✓	-	-	-	-
Pelalawan	✓	-	-	-	-
Rokan Hulu	✓	-	-	-	-
Rokan Hilir	✓	-	-	-	-
Kuantan Singingi	✓	-	-	-	-
Batam	-	✓	-	-	-
Karimun	-	✓	-	-	-
Natuna, Bintan dan Anambas	-	✓	-	-	-
Tanjung Pinang	-	✓	-	-	-
Kepulauan Meranti	✓	-	-	-	-
Lingga	-	✓	-	-	-
Diluar Riau dan Kepulauan Riau	-	-	✓	-	-

ii. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Bank melakukan pengungkapan kuantitatif atas pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN dengan melalui pendekatan yang akan digunakan berdasarkan sektor ekonomi (dalam jutaan rupiah):

Per 31 Desember 2025 / *As of December 31, 2025*:

Wilayah / *Area*	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual / *Individual CKPN*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif / *Collective CKPN*
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	Telah jatuh Tempo / After Due Date		
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/*Agriculture, Forest and Fishing*	2.736.316	62.831	200.724	67	160.226
Pertambangan dan penggalian /*Mining and excavating*	1.969	-	990	-	990
Industri pengolahan/ *Manufacture industry*	426.122	1.493	6.365	2.954	3.410
Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan teknis/*Professional, Scientific and Technical Activities*	1.867	37	1.488	-	1.489

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

a. Credit Risk *(contnued)*

i. Maximum exposure to credit risk (continued)

Grouping Area

ii. Maximum exposure to credit risk

The Bank has been quantitive disclosure of allowance for impairment losses (AFIL) as individual and colective, with statistic method was using in that calculating of allowance for impairment losses based on Economic Sector (In Millions of Rupiah):

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

ii. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

a. Credit Risk *(contnued)*

ii. Maximum exposure to credit risk (continued)

Per 31 Desember 2025 / *As of December 31, 2025*:

Wilayah / *Area*	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual / *Individual CKPN*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif / *Collective CKPN*
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	Telah jatuh Tempo / After Due Date		
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya/*Rental and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support*	72.904	555	2.025	-	1.832
Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin/*Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air*	92	-	-	-	0
Konstruksi/*Construction*	1.413.586	146.386	26.022	-	33.438
Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and retail trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance*	709.620	35.402	123.182	296	110.599
Pengangkutan dan Pergudangan/ *Transportation and Warehousing*	16.580	1.432	2.464	-	2.341
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum/*Acomodation and food supply*	398.322	264.016	10.259	49.502	455
Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	2.652	28	177	-	178
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah/*Water Management, Waste Water Management, Waste Management and Recycling*	7.250	-	443	443	0
Aktivitas Keuangan dan Asuransi /*Financial and Insurance Activities*	69.471	-	-	-	61
Real Estate/ *Real Estate*	5.622	260	1.225	-	1.168
Aktivitas Jasa Lainnya/ *Other Service Activities*	141.859	8.301	13.720	-	12.055
Pendidikan/*Education*	35.342	-	168	-	196
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial / *Human Health Activities and Social Activities*	40.200	1.037	624	-	393
Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi / *Arts, Entertainment and Recreation*	1.212	140	364	-	372
Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja/*Household Activities as an Employer*	1.184	274	458	2	269

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / **43. *RISK MANAGEMENT*** *(continued)*

a. Risiko Kredit (lanjutan) / ***a. Credit Risk*** *(contnued)*

ii. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan) / *ii. Maximum exposure to credit risk (continued)*

Per 31 Desember 2025 / *As of December 31, 2025*:

Wilayah / *Area*	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual / *Individual CKPN*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif / *Collective CKPN*
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	Telah jatuh Tempo / After Due Date		
Bukan Lapangan Usaha/ *Not job opportunity*	16.472.195	139.125	183.167	5.220	137.532
Lainnya/*Others*	9.648.910	-	-	1.155	-
Jumlah/*Total*	**32.203.275**	**661.315**	**573.864**	**59.640**	**467.007**

Per 31 Desember 2024 / *As of December 31, 2024:*

Wilayah / *Area*	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual / *Individual CKPN*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif / *Collective CKPN*
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	Telah jatuh Tempo / *After Due Date*		
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ *Agriculture, Forest and Fishing*	2.879.254	105.615	164.314	74	143.771
Pertambangan dan penggalian /*Mining and excavating*	2.245		990		990
Industri pengolahan/ *Manufacture industry*	525.271	1.358	6.015	2.954	3.057
Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan teknis/ *Professional, Scientific and Technical Activities*	2.127	80	1.488	-	1.492
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya/*Rental and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support*	33.864	765	1.880	-	1.799
Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin/*Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air*	11.869	172	-	-	18
Konstruksi/*Construction*	1.199.730	146.442	32.835	-	31.332
Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor/*Car and Motorcycle Repair and Maintenance*	722.103	29.327	113.358	311	101.595
Pengangkutan dan Pergudangan/ *Transportation and Warehousing*	18.403	846	2.468	-	2.167
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum/*Acomodation and food supply*	370.151	263.369	9.734	-	9.030

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

ii. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

a. Credit Risk *(contnued)*

ii. Maximum exposure to credit risk (continued)

Per 31 Desember 2024 / *As of December 31, 2024:*

Wilayah / *Area*	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual / *Individual CKPN*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif / *Collective CKPN*
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	Telah jatuh Tempo / *After Due Date*		
Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	2.125	60	213	-	125
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah/ Water *Management, Waste Water Management, Waste Management, Waste Management and Recycling*	6.462	112	1.883	1.883	6
Aktivitas Keuangan dan Asuransi /*Financial and Insurance Activities*	20.925	-	-	-	2
Real Estate/ *Real Estate*	7.010	-	1.670	-	1.354
Aktivitas Jasa Lainnya/ *Other Service Activities*	140.036	8.773	12.391	-	11.717
Pendidikan/*Education*	15.479	-	445	-	218
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial / *Human Health Activities and Social Activities*	17.591	1.261	631	-	436
Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi / *Arts, Entertainment and Recreation*	1.295	-	364	-	364
Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja/*Household Activities as an Employer*	2.351	544	506	2	331
Bukan Lapangan Usaha/ *Not job opportunity*	16.101.219	137.504	161.477	5.296	120.767
Lainnya/*Others*	9.777.736	-	-	-	-
Jumlah/ *Total*	**31.857.245**	**696.229**	**512.663**	**10.520**	**430.571**

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sejenis atau memiliki karakteristik yang sejenis yang dapat menyebabkan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi ataupun kondisi lainnya.

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similarbusiness activities or when they have similar characteristics that would cause their abilityto meet contractual obligations to be similarlyaffected by changes in economic or other conditions.

Bank mendorong adanya diversifikasi dari portofolio kreditnya pada berbagai wilayah industri, dan produk kreditsebagai upaya untuk meminimalisasi risiko kredit.

The Bank encourages the diversification of its credit portfolio among a variety ofindustries, and credit product in order to minimize the credit risk.

Pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko yang mencakup pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Bank secara individual (dalam jutaan rupiah):

Described the disclosure of risk exposure and risk management which includes thedisclosure of net charges based on theremaining term of the contract Bank individually (in millions of rupiah):

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

ii. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

a. Credit Risk *(contnued)*

ii. Maximum exposure to credit risk (continued)

Per 31 Desember 2025 / *As of December 31, 2025*:

Kategori Portofolio/*Portfolio Category*	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak/*Net Billing Based on Contract Term*				
	< 1 tahun/ < 1 year	> 1 s.d 3 tahun/ > 1 to 3 years	> 3 s.d 5 tahun/ > 3 to 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Non-Kontraktual/ Non-Contractual
Tagihan Kepada Pemerintah/*Goverment billed*	3.701.403	1.197.106	354.898	2.603.654	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/*Bill to Public entity sector*	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank/ *Billing to the Bank*	61.032	-	19.258	-	-
Kredit Beragun Rumah Tinggal/*Loans with house guarantee*	996	10.131	24.993	424.406	-
Kredit Beragun Properti Komersial */Loans with commercial property guarantee*	7.419	5.145	7.829	6.224	-
Kredit Pegawai/Pensiunan/ *Loans of employee or retired*	167.111	1.223.249	2.134.657	12.091.085	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/*Receivable to Micro business, small business and Retail Portfolio*	204.313	1.498.268	1.366.301	285.289	-
Tagihan Kepada Korporasi/ *Receivable to the Corporation*	503.612	68.445	663.182	564.115	-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo/*With due dated*	17.579	29.644	29.203	246.858	-
Aset Lainnya/*Other assets*	-	-	-	-	2.024.783
Jumlah/ *Total*	**4.663.465**	**4.031.988**	**4.600.320**	**16.221.631**	**2.024.783**

Per 31 Desember 2024 / *As of December 31, 2024*:

Kategori Portofolio/*Portfolio Category*	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak/*Net Billing Based on Contract Term*				
	< 1 tahun/ < 1 year	> 1 s.d 3 tahun/ > 1 to 3 years	> 3 s.d 5 tahun/ > 3 to 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Non-Kontraktual/ Non-Contractual
Tagihan Kepada Pemerintah/*Goverment billed*	4.981.515	1.696.548	754.025	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/*Bill to Public entity sector*	48.529	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank/ *Billing to the Bank*	188.524	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah Tinggal/*Loans with house guarantee*	1.030	9.433	24.276	370.772	-

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

ii. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

a. Credit Risk *(contnued)*

ii. Maximum exposure to credit risk (continued)

Per 31 Desember 2024 / *As of December 31, 2024* :

Kategori Portofolio/*Portfolio Category*	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak/*Net Billing Based on Contract Term*				
	< 1 tahun/ < 1 year	> 1 s.d 3 tahun/ > 1 to 3 years	> 3 s.d 5 tahun/ > 3 to 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Non-Kontraktual/ Non-Contractual
Kredit Beragun Properti Komersial */Loans with commercial property guarantee*	4.994	1.954	12.408	3.003	-
Kredit Pegawai/Pensiunan/ *Loans of employee or retired*	128.760	971.449	2.293.816	12.041.580	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/*Receivable to Micro business, small business and Retail Portfolio*	166.937	1.437.939	1.626.878	322.445	-
Tagihan Kepada Korporasi/ *Receivable to the Corporation*	259.807	29.772	506.462	1.148.642	-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo/*With due dated*	17.697	18.625	20.227	27.535	-
Aset Lainnya/*Other assets*	-	-	-	-	2.157.124
Jumlah/ *Total*	**5.797.793**	**4.165.721**	**5.238.091**	**13.913.977**	**2.157.124**

Penambahan diversifikasi ini berdasarkan rencana strategi Bank, sektor target, kondisi ekonomi saat ini, kebijakan pemerintah, sumber pendanaan, dan proyeksi pertumbuhan. Konsentrasi kredit yang diberikan berdasarkan jenis, sektor ekonomi, jatuh tempo, jangka waktu perjanjian kredit, Pihak berelasi dan kolektibilitas diungkapkan pada tabel diatas.

The extent of diversification is based on the Bank's strategic plan, target sectors, currenteconomic conditions, government policy, funding sources and growth projections. Concentration of credit risk of loans receivable by type, economic sector, maturity, term of credit agreement, related party and collectibility is disclosed in table above.

Dalam hal pengendalian risiko kredit, Bank telah melaksanakan beberapa tahapan berikut:

In the frame of controlling credit risk, Bank was doing for several step is as follow:

- Menyediakan modal yang cukup untuk menutup risiko Bank dapat menyediakan modal baik dalam rangka memenuhi rasio kecukupan modal maupun dalam meng-cover risiko secara keseluruhan. Dalam hal ini PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah menghitung ATMR Risiko Kredit dengan pendekatan standar dalam laporan KPMM.
- *Providing sufficient capital to cover the risk Bank can provide the capital both in the framework of meeting the capital adequacy ratio as well as to cover the risk as a whole. In this case PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) have contacted the Credit Risk ATMR with standard approach in the KPMM report.*
- Memelihara kualitas aset produktif.
- *Maintaining productive asset quality.*
- Pengawasan aktif Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
- *Supervising the active Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board.*
- Meningkatkan efisiensi proses manajemen kredit.
- *Improving the credit management efficiency.*
- Meningkatkan budaya kredit yang sehat.
- *Improving healthy credit culture.*
- Mempersiapkan bisnis yang cepat tanggap.
- *Providing quicker business response.*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank (*adverse movement*). Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif dari kedua jenis risiko pasar tersebut misalnya perubahan harga opsi.

Risiko pasar ada di aktivitas fungsional Bank dan kegiatan *treasury*. Aktivitas ini mencakup penempatan dalam bentuk Surat Berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis lainnya) dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan melakukan kontrol atas eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, serta memaksimalkan tingkat pengembalian atas risiko.

Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) oleh Bank. Limit dari risiko pasar ditetapkan pada tingkat bankwide dan dilaporkan serta dipantau oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko setiap hari. *Management Action Triggers* (MAT) membantu manajemen pada saat tingkat risiko mencapai batasan-batasan tertentu.

ALCO berperan sebagai forum manajemen senior tertinggi untuk mengambil keputusan atas kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko pasar dan likuiditas. Divisi Pasar dan Risiko Likuiditas bertanggungjawab untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar di Bank berdasarkan kerangka yang disetujui oleh ALCO.

Secara keseluruhan, risiko pasar dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

i. Risiko nilai tukar

Merupakan penjumlahan dari nilai absolute dari selisih bersih aset dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

Bank wajib mengelola dan memelihara PDN paling tinggi 20% dari modal pada tengah hari kerja dan akhir hari kerja sepanjang hari berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan PBI No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

b. Market Risk

Market risk is the risk arising from adverse movement in market variables in portfolios held by the Bank that could incur losses for the Bank (adverse movement). Market variables are defined as interest rates and exchange rates, including derivatives of these two types of market risk, i.e., change in option prices.

Market risk exists in both bankwide and treasury activities. These activities include placement in securities and money market, equity participation in other financial institutions, provisions of funds (loans and other similar forms), funding and issuance of debt instruments, and trade financing activities.

The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return on risk.

Market risk is managed through a comprehensive policy and limit framework to measure and monitor the amount of risk based on risk appetite of the Bank. Market risk limits are set at bankwide level and are reported and monitored by Compliance and Risk Management on a daily basis. Management Action Triggers (MAT) helps to sensitize the management in case the risk level is reaches certain thresholds.

ALCO acts as the apex senior management forum charged to take all decisions on policy regarding market and liquidity risk management. Market Risk is responsible for identifying, measuring, monitoring and controlling market risk in the Bank based on framework approved by ALCO.

On overall, market risk is divided into two following risks:

i. Value exchange risk

It is the total amount of the absolute value from the net difference of assets and liabilities in the balance sheet for every foreign exchange plus the net difference of receivables and payables both as commitments as well as contingencies in administrative account for every foreign exchange all of which are stated in rupiah.

The bank is compulsory to manage and maintain PDN at the highest 20% of the capital in the middle of the working day and at the end of the working day all day in accordance with PBI No.17/5/PBI/2015, dated may 29th, 2015 concerning the Fourth Change on Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/2003 Concerning Public Bank Net Foreign Exchange Position.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

i. Risiko nilai tukar (lanjutan)

Bank harus menetapkan limit internal *Net Open Position* (NOP) secara konsisten dalam rangka mencegah terjadinya pelampauan batasan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku terutama dalam hal seluruh limit internal yang ditetapkan dan telah digunakan.

Posisi Devisa Netto Bank dapat disajikan sebagai berikut:

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

b. Market Risk *(continued)*

i. Value exchange risk (continued)

The bank must decide on the limit internal Net Open Position (NOP) consistently in the framework of preventing the occurrence of exceeding the limit decided upon by the prevailing regulations, especially in the case of all internal limits decided and already used.

The Bank Net Foreign Exchange Position can be presented as follows:

	2025	**2024**	
Aset Valuta Asing			*Foreign exchange asset*
Mata uang Euro			*Euro Currency*
Kas	174.675.191	137.584.165	*Cash*
Giro pada Bank lain	3.345.878.139	2.898.603.250	*Current account with other bank*
Jumlah	**3.520.553.330**	**3.036.187.415**	***Total***
Mata uang Dolar Amerika			*United State Dollar Currency*
Kas	2.922.810.675	7.998.522.915	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	7.572.467.675	7.323.225.000	*Current account with BI*
Term Deposit pada Bank Indonesia	166.750.000.000	-	*Term Deposit at Bank Indonesia*
Giro pada Bank lain	24.486.568.833	144.143.890.710	*Current account with other bank*
Jumlah	**201.731.847.183**	**159.465.638.625**	***Total***
Mata uang Dolar Singapura			*Singapore Dollar Currency*
Kas	2.163.901.851	3.462.463.295	*Cash*
Giro pada Bank lain	3.215.785.917	2.757.145.680	*Current account with other bank*
Jumlah	**5.379.687.768**	**6.219.608.975**	***Total***
Mata uang Ringgit Malaysia			*Malaysia Ringgit Currency*
Kas	174.272.255	596.104.238	*Cash*
Jumlah	**174.272.255**	**596.104.238**	***Total***
Mata uang Riyal Arab Saudi			*Saudi Arabia Riyal Currency*
Kas	2.314.447.715	1.621.948.104	*Cash*
Giro pada Bank lain	44.448.904	42.824.492	*Current account with other bank*
Jumlah	**2.358.896.619**	**1.664.772.596**	***Total***
Liabilitas valuta Asing			*Foreign exchange liabilities*
Mata uang Euro			*Euro Currency*
Giro	1.273.906	1.090.786	*Current account*
Giro Perseorangan	563.071	33.998.371	*Individual current account*
Jumlah	**1.836.976**	**1.090.786**	***Total***

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

i. Risiko nilai tukar (lanjutan)

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

b. Market Risk *(continued)*

i. Value exchange risk (continued)

	2025	**2024**	
Liabilitas valuta Asing (lanjutan)			*Foreign exchange liabilities (continued)*
Mata uang Dolar Amerika			*United State Dollar Currency*
Giro Perusahaan Asuransi	-	9.251.786.808	*Insurance Company Current Account*
Giro Perseorangan & Swasta Lainnya	11.332.737.204	871.337.107	*Other Individual & Private Current Accounts*
Deposito	105.646.744.140	84.838.219.946	*Deposit*
Bagi Hasil Deposito	185.723.315	313.962.751	*Deposit Profit Sharing*
Jumlah	**117.165.204.659**	**95.275.306.612**	***Total***
Mata uang Dolar Singapura			*Singapore Dollar Currency*
Perusahaan	19.944.655	4.706.181.861	*Individual Current account*
Giro perorangan	5.522.920.973		
Deposito perorangan	2.555.618.796	1.837.283.871	*Individual Deposit*
Bagi Hasil Deposito	512.768	326.555	*Deposit Profit Sharing*
Jumlah	**8.098.997.192**	**6.543.792.287**	***Total***
Mata uang Dolar Saudi Arabia			*Saudi Arabia Dollar Currency*
Tabungan	24.668.782	11.236.718	*Savings*
Jumlah	**24.668.782**	**11.236.718**	***Total***

	2025	**2024**	
Posisi Devisa Netto (PDN)			*Netto of Devisa Position*
Mata uang Euro	3.518.716.354	3.001.098.258	*Euro Currency*
Mata uang Dolar Amerika	84.566.642.524	64.190.332.013	*United State Dollar Currency*
Mata uang Dolar Singapura	2.719.309.423	324.183.312	*Singapore Currency*
Mata uang Ringgit Malaysia	174.272.255	596.104.238	*Ringgit Malaysian Currency*
Mata uang Riyal Arab Saudi	2.334.227.837	1.653.535.878	*Saudi Arabia Riyal Currency*
Jumlah	93.313.168.393	69.765.253.700	***Total***
Jumlah PDN (dalam jutaan Rupiah)	93.313	69.765	*Total PDN (in millions Rupiah)*
Jumlah Modal (dalam jutaan Rupiah)	3.447.615	3.449.494	*Total capital (in millions Rupiah)*
Rasio % PDN	2,71%	2,02%	*PDN ratio %*

Perhitungan Rasio PDN menyesuaikan dengan perhitungan data terbaru.

The calculation of PDN ratio, adjusts to the latest data calculation.

ii. Risiko tingkat suku bunga

Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi Bank yang mengandung risiko suku bunga.

Bank belum mengelola risiko suku bunga, sehingga Bank belum melakukan perhitungan atas risiko tingkat suku bunga Bank.

Tabel di bawah ini menyajikan portofolio Bank (tidak termasuk portofolio yang diperdagangkan) pada nilai tercatatnya, yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal *re-pricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual (disajikan dalam jutaan rupiah):

ii. Interest rate risk

Interest rate risk is the potential loss incurred from adverse movement in market interest rates with respect to a Bank position or transaction carrying interest rate risk.

The Bank was not to carry out interest rate risk, with the result that Bank have not did calculated to Bank interest rate risk.

The table below summarizes the Bank's nontrading portfolios at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual re-pricing or maturity dates (expressed in million rupiah):

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

ii. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

b. Market Risk *(continued)*

ii. Interest rate risk (continued)

Akun/ *Account*	Nilai tercatat (dalam jutaan Rupiah / *in million Rp) / Carrying amount*	2025 Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate* ≤ 3 bulan/ ≤ *3 months*	3 - 12 bulan/ *Months*	12 - 24 bulan/ *Months*	> dari 24 bulan/ *More then 24 months*
Aset/ *Assets*					
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts in Bank Indonesia*	2.672.060	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Surat-Efek-efek/ *Marketable securities*	4.677.867	5,61%	5,14%	6,42%	6,37%
Jumlah/ *Total*	7.349.927	7,11%	6,64%	7,92%	7,87%
Liabilitas/ *Liabilities*					
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	1.001.373	4,34%			
Jumlah/ *Total*	1.001.373	4,34%	-	-	-
Pengaruh dari derivatif untuk manajemen Risiko/ *Effect of* derrivatives *held for risk management*	-	-	-	-	-
Selisih/ *Difference*	6.348.554	2,77%	6,64%	7,92%	7,87%

Akun/ *Account*	Nilai tercatat (dalam jutaan Rupiah / *in million Rp) / Carrying amount*	2024 Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate* ≤ 3 bulan/ ≤ *3 months*	3 - 12 bulan/ *Months*	12 - 24 bulan/ *Months*	> dari 24 bulan/ *More then 24 months*
Aset/ *Assets*					
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts in Bank Indonesia*	2.371.145	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Surat berharga yang dimiliki/ *Securities owned*	3.843.243	6,38%	6,41%	6,39%	6,82%
Penyertaan/ *Investment*	1.556	-	-	-	-
Jumlah/ *Total*	6.215.944	7,88%	7,91%	7,89%	8,32%
Liabilitas/ *Liabilities*					
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	2.092.950	6,40%	-	-	-
Jumlah/ *Total*	2.092.950	6,40%	-	-	-
Pengaruh dari derivatif untuk manajemen Risiko/ *Effect of* derrivatives *held for risk management*	-	-	-	-	-
Selisih/ *Difference*	4.122.994	1,48%	7,91%	7,89%	8,32%

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko pasar, bank telah menyelesaikan beberapa tahap sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi suku bunga secara tepat pada setiap penggunaan dana bank baik aktivitas fungsional tertentu maupun aktivitas bank secara keseluruhan.

In terms of implementing and controlling market risk, Bank has done several step is as follows:

- *Performing the interest rate identification accurately in every use of bank finance both for certain functional activities as well as bank activities as a whole.*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

ii. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

- Melakukan *mark to market* .
- Setiap penempatan terhadap bank *counterparty* dilakukan kajian risiko oleh Divisi Manajemen Risiko terhadap fasilitas *credit line* yang akan
- Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi serta setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan instruksi dan rekomendasi Komite Aset dan Liabilitas (ALCO).

c. Risiko liquiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan menutup posisi di pasar. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terpenting pada bank umum dan perlu dikelola secara berkesinambungan.

Asset and Liability Committee (ALCO) berperan sebagai forum manajemen senior tertinggi untuk memonitor situasi likuiditas Bank. ALCO bertanggungjawab untuk menentukan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan aset dan liabilitas Bank sejalan dengan prinsip kehati-hatian manajemen risiko dan peraturan yang berlaku.

ALCO menyetujui kerangka limit, mempertimbangkan struktur laporan posisi keuangan jangka panjang dari Bank. ALCO juga menyetujui asumsi likuiditas dan skenario stress testing yang akan diterapkan.

Bank mengelola risiko likuiditas melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Risiko likuiditas diukur dan dipantau secara harian berdasarkan kerangka kerja limit risiko likuiditas. Kerangka kerja digunakan untuk mengelola situasi likuiditas Bank pada kondisi normal (*business-as-usual*) dan kejadian kondisi *stress* . Rencana pendanaan darurat likuiditas (*liquidity contingency plan*) telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis likuiditas.

Eksposur terhadap Risiko Likuiditas

Analisis kesenjangan likuiditas untuk memberikan pandangan terhadap ketidaksesuaian arus kas masuk terkait dengan arus kas keluar di setiap saat.

Kondisi ini dikelola secara terpusat oleh Tresuri yang mempunyai akses danotorisasi secara langsung ke interbank, nasabah besar (institusional) dan profesional market yang lainnya, dalam upaya membantu aktivitas bisnis Bank di pengumpulan dana dan pemberian kredit.

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

b. Market Risk *(continued)*

ii. Interest rate risk (continued)

- *Performing mark to market.*
- *Every allocation on bank counterparty is done by risk evaluation by the Risk Management Division to the credit line facilities given.*
- *Active supervision on the active Board of Commissioners and Directors and every transaction is done in accordance with the instructions and recommendations by the Asset and Liability Committee (ALCO).*

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Bank is unable to meet its obligation associated with financial liabilities at due date. Liquidity risk is the most important risk to a commercial bank and as such needs to be managed on an on-going basis.

The Asset and Liability Committee (ALCO), which acts as the apex body entrusted to monitor liquidity situation of the Bank. ALCO is in charge of determining the policy and strategy of the Bank's asset and liabilities in line with the principles of prudent risk management and applicable regulatory requirements.

ALCO approves the limit framework, deliberates on the long term structural statement of financial position positioning of the Bank. In addition, ALCO approves all liquidity assumption and stress testing scenarios.

The Bank manages liquidity risk through liquidity gap analysis and liquidity ratios. Liquidity risk is measured and monitored on a daily basis based on liquidity risk limit framework. The framework manages the liquidity situation of the Bank under both a business-as-usual and stress event. Liquidity contingency plan is in place to prepare the Bank in the case of a liquidity crisis.

Exposure to Liquidity risk

Liquidity gap analysis provides insight as to the mismatch of expected cash inflows vis-à-vis outflows on any given day.

This is centrally managed within Treasury which has direct and authorized access to interbank, wholesale, and other professional markets, to supplement core banking activities of lending and deposit taking

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko liquiditas (lanjutan)

Eksposur terhadap Risiko Likuiditas (lanjutan)

Salah satu rasio likuiditas adalah rasio dari aset likuid bersih terhadap liabilitas 1 bulan. Untuk tujuan ini, aset yang bersifat likuid termasuk kas dan setara kas dan Surat Berharga berperingkat investasi, yang diperdagangkan secara aktif dan likuid di pasar dikurangi dengan simpanan dari bank dan komitmen yang jatuh tempo dalam satu bulan mendatang.

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

c. Liquidity Risk *(continued)*

Exposure to Liquidity risk *(continued)*

One of liquidity ratios is net liquid assets to 1 month liabilities. For this purpose, net liquid assets are considered as including cash and cash equivalents and investment grade debt securities for which there is an active and liquid market less any deposits from banks and commitments maturing within next month.

	2025	2024	
Kas dan setara kas	937.249.225.087	956.983.333.618	*Cash and cash equivalent*
Surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	883.123.644.600	1.764.263.546.180	*Marketable securities measured fair value through other comprehensive income*
Surat berharga yang diukur dengan biaya amortisasi	3.201.729.540.361	2.078.979.708.585	*Marketable securities measured at amortize cost*
Simpanan dari Bank lain	(76.873.256.202)	(62.745.873.110)	*Deposit from other Banks*
Jumlah	**4.945.229.153.847**	**4.737.480.715.272**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, rasio dari aset likuid bersih terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2025 and 2024, the ratio of net liquid assets to deposits from customers were as follows:

	2025	2024	
Simpanan dari nasabah	25.750.075.400.351	24.316.477.971.722	*Deposit from customer*
Rasio aset likuid bersih terhadap simpanan nasabah	19%	19%	*Ratio of net liquid assets to deposit from customers*

Kebijakan likuiditas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk kewajiban penarikan nasabah atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan.

The Bank's liquidity policy is aimed at ensuring that funding needs can be met, either to pay deposits at maturity or for customer withdrawal obligations or to fulfill unused credit facilities.

Pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas Bank berada dalam tanggung jawab Bagian *Asset and Liabilities Management* di Divisi Tresuri. Sumber dana dan waktu jatuh tempo deposito dikelola untuk menghindari adanya dana yang menganggur dan menentukan jumlah serta instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali secara terus menerus.

Managing and monitoring the Bank's liquidity position is the responsibility for Asset and Liabilities Management Group in Division of Treasury. Sources of funds and maturity of time deposits maturing managed to preventidle funds and determine the appropriate amount of liquid assets instrument to ensure a controlled level of liquidity continuously.

Nilai nominal arus masuk/arus keluar yang disajikan pada tabel di bawah ini merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan terkait dengan pokok dan bunga atas liabilitas keuangan. Pengungkapan instrumen derivatif menunjukkan nilai bersih derivatif yang dapat diselesaikan secara neto, juga arus masuk dan keluar bruto untuk derivatif yang diselesaikan secara bersamaan (misalnya, kontrak berjangka valuta asing).

The nominal inflow/outflow disclosed in the following table represents the contractual undiscounted cash flows relating to the principal and interest on the financial liability or commitment. The disclosure for derivatives shows a net amount for derivatives that are net settled, but a gross inflow and outflow amount for derivatives that have simultaneous gross settlement (e.g. currency forward).

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko liquiditas (lanjutan)

Eksposur terhadap Risiko Likuiditas (lanjutan)

Bank telah membangun model pengukuran risiko likuiditas untuk mengukur risiko likuiditas dari portofolio aset dan kewajiban Bank, dan memberikan jaminan keamanan tambahan berdasarkan skenario terbaik (*best case*), terburuk (*worst case*) dan paling mungkin terjadi (*most probable case*).

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko likuiditas, Bank telah menerapkan beberapa langkah berikut:

- Menganalisa perilaku portofolio aset dan portofolio liabilitas
- Memenuhi ketentuan otoritas moneter seperti pemeliharaan GWM Primer maupun GWM Sekunder baik dalam rupiah maupun valuta asing.
- Pengawasan aktif dari Komisaris dan Direksi.
- Memiliki rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*).
- Monitoring Likuiditas yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko setiap bulannya dari laporan keuangan, sehingga dapat diambil langkah-langkah mitigasi risiko likuiditas.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal.

Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Bank, dari mulai Kantor Pusat sampai cabang kecil di seluruh Indonesia. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian financial, keselamatan karyawan dan reputasi Bank.

Komponen utama Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional yang dijalankan berkesinambungan yaitu:

1. Akuntabilitas yang jelas

   Semua pihak di Bank menjalankan penugasan terkait dengan perannya masing-masing dalam pengelolaan risiko operasional.

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

c. Liquidity Risk *(continued)*

Exposure to Liquidity risk *(continued)*

The Bank has developed a liquidity risk measurement model to measure the liquidity risk of the Bank's assets and liabilities portfolio, and to provide additional security guarantees based on best case, worst case and most probable case scenarios.

In terms of implementing and controlling liquidity risk, the Bank has implemented the following steps:

- *To analyzed behaviour of asset and liabilities portfolio.*
- *Comply with monetary authority regulations such as maintenance of Primary Minimum Statutory Giro and Secondary Minimum Statutory Giro both in rupiah and foreign currency.*
- *urveillance on active Board of Commissioners and Directors.*
- *By having contingencies funding plan.*
- *Liquidity Monitoring carried out by the Risk Management Division every month from the financial statements, so that liquidity risk mitigation measures can be taken.*

d. Operational Risk

Operational risk is defined as the risk of losses resulting from inadequate or failure of internal control processes, people and systems or from external events.

This type of risk is inherent in every business processes, operational activities, systems and products of Bank, from Head Office Units to micro branches located in remote areas of Indonesia. Failure to manage operational risks correctly could lead tofinancial losses, employee safety and reputation of the Bank.

Major components of Operational Risk Management Framework which are being consistently practiced are:

1. *The right accountability*

   All parties in the Bank are designated for their respective roles in the management of operational risk.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko Operasional (lanjutan)

1. Akuntabilitas yang jelas (lanjutan)

Direksi seperti halnya Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi efektivitas dari kerangka kerja pengelolaan Risiko operasional secara menyeluruh serta pelaksanaannya.

Unit bisnis dan fungsi *support* sebagai pemilik dari proses pengelolaan risiko dan fungsi Pengendalian Internal yang ada pada setiap *Risk Taking Unit* (RTU) berperan sebagai lini pertahanan lapis pertama dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Mereka bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengelola, memitigasi dan melaporkan Risiko Operasional.

Divisi Manajemen Risiko bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan dan Hukum berperan sebagai pertahanan lapis kedua.

Divisi Manajemen Risiko berfungsi dalam perancangan, pendefinisian, pengembangan dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional secara keseluruhan, memantau penerapan kerangka kerja oleh RTU, memastikan kecukupan kontrol atas kebijakan dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator/fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional yang efektif.

Sedangkan Satuan Kerja Auditor Internal (SKAI) secara independen berperan sebagai pertahanan lapis ketiga.

2. Siklus pengelolaan Risiko Operasional

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko operasional, Bank mengacu kepada kerangka Basel Accord II, Ketentuan Bank Indonesia serta International Best Practices. Pengelolaan risiko operasional meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional.

Disamping melakukan proses manajemen risiko terhadap risiko yang melekat dalam aktivitas *existing*, Bank juga melakukan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai dengan jenis risiko yang telah ditetapkan dalam POJK No.65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti yang salah satunya mengatur mengenai produk dan aktivitas Bank.

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

d. Operational Risk *(continued)*

1. The right accountability (continued)

The Board of Director's as well as the Board of Commissioners are responsible to oversee the effectiveness of the overall operational risk management framework as well as its execution.

Business unit and supporting unit as the owner of risk management process and Internal Control functions in each Risk Taking Units act as the first line of defence in day-today execution/ implementation of operational risk management. They are responsible to identify, manage, mitigate and reports on Operational Risk.

Risk Management Division together with Compliance and Legal Division act as the second line of defence.

Risk Management Division function to design, defining, develop and maintaining the overall operational risk management framework, monitor the RTU's adherence to the framework, ensuring the control adequacy of policies and procedures, and act as the coordinator/facilitator of the overall operational risk management activities to ensure its effectiveness.

Meanwhile, the Work of Internal Auditors Unit (SKAI) are independently doing the role as the third line of defence.

2. Operational Risk Management Cycle

In order to implement operational risk management, Bank made reference to Basel Accord II, Bank Indonesia Regulations and International Best Practices. Operational risk management encompasses the identification, measurement, monitoring and operational control processes.

In addition take risk management process against the risks inherent in the existing activity. Bank also take a risk management implementation comprehensively of new products and activities issuing plan in accordance with the type of risk that has been established in POJK No.65/POJK.03/2016 dated December 23, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016 concerning Commercial Bank Business Activities Based on Core Capital one of which regulates the Bank's products and activities.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko Operasional (lanjutan)

2. Siklus pengelolaan Risiko Operasional (lanjutan)

Bank telah mengalokasikan kebutuhan modal risiko operasional berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision* dan SEOJK No.13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) Bagi Bank Umum Syariah.

Bank menggunakan pendekatan *Basic Indicator* dan saat ini masih melakukan pengembangan terhadap perhitungan penyisihan modal dengan metode *Standardlized Approach* serta pengumpulan data risiko yang digunakan dalam perhitungan beban modal Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan yang lebih kompleks (*Advanced Measurement Approach*).

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko operasional, Bank telah menerapkan langkah berikut:

- Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi.
- Memiliki kebijakan, prosedur dan proses untuk mengendalikan atau memitigasi risiko operasional sesuai dengan kompleksitas operasional Bank.
- Adanya tindak lanjut atas hasil temuan Audit Intern dan Ekstern.

e. Risiko hukum

Bank mengelola risiko hukum dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum.

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis dalam bisnis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Bank telah membentuk Divisi Hukum dan *Corporate Secretary* sebagai salah satu strategi pengendalian internal Bank terhadap potensi risiko hukum.

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

d. Operational Risk *(continued)*

2. *Operational Risk Management Cycle (continued)*

The Bank has allocated operational risk capital requirements based on the Basel Committee on Banking Supervision and SEOJK No.13/SEOJK.03/2015 dated April 27, 2015 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for Operational Risk using Basic Indicator Approach (PID) for Sharia Commercial Banks.

Bank using Basic Indicator approach and methodology, is currently doing a development of the capital allowance calculation by method of Standardize Approach and the collection of risk data collection risk capital charges using a more complex approach (Advanced Measurement Approach).

In the frame of applied and controlling operational risk, Bank was doing several steps is as follows:

- Surveillance on active Board of Commissioners and Directors.
- *By having the policies, procedures andprocess to control or mitigate the operationalrisks in accordance with the complexity of the Bank operation.*
- *The existence of follow-ups on the results of Intern and Extern Audit findings.*

e. Law Risk

The Bank manages the legal risks by making sure that all activities and relations of the Bank business activities with third party shall be based on the regulations and requirements that is able to protect the interests of the Bank from legal aspects.

The legal risk is the risk resulted from the existence of weaknesses in the judicial aspect in business, among them resulted from the existence of lawsuit, the absence of supportive rules of laws the weaknesses in the bond such as not meeting the requirements for the validity of contract and the bond of collateral is not perfect. The Bank has formed Legal Division and Corporate Secretary as one of the strategies of the Bank's internal control against legal risk potential.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank. Bank mengelola risiko reputasi dengan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank bersama-sama dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank tetap terjaga.

g. Risiko Stratejik

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Bank mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan strategis secara kolektif dan komprehensif oleh Direksi dan Komite-Komite yang telah dibentuk.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank melaksanakan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- Tindakan mengelola Risiko Kepatuhan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

f. Reputation Risk

Risk reputation is the risk, among others, resulted from the existence of negative publication related to the Bank's business activities or negative perception toward the Bank. The Bank manages the reputation risk by making sure that the appropriateness between the Bank's business activities and other activities resulting in the Bank's reputation is still being maintained.

g. Strategic Risk

The strategic risk is the risk among them resulted from the existence of determining and implementing inaccurate Bank's strategies, inaccurate business decision taking or the lack of responsiveness of the Bank towards external changes. The Bank manages the strategic risks through the process of consideration and decision taking for every strategic policy collectively and comprehensively by Board of Directors ad Committees already formed.

h. Compliance Risk

Compliance risk is the risk arising resulted from the Bank not complying and/or not implementing the prevailing rules of laws and provisions, including the Sharia (Islamic Rules) Principal for Public Bank and Sharia Business Unit.

The Bank implements the Compliance Function, the Bank Compliance Function includes the acts to:

- *Manifest the performance of Compliant Culture in all organizational levels and business activities of the Bank;*
- *Perform in managing Compliance Risk shall be done by referring to the provisions of Bank Indonesia concerning Risk Management for Public Bank;*
- *Make sure that the policies, provisions, systems, and procedures as well as business activities performed by the Bank has been in accordance with the provisions of Bank Indonesia and the prevailing rules of laws, including Sharia Principal for Sharia Public Bank and Sharia Business Units; and*
- *Make sure the compliance of the Bank to the commitment made by the Bank to Bank Indonesia and/or other supervising authorities in charge.*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

i Risiko Imbal Hasil

Bank melakukan identifikasi dan analis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko imbal hasil syariah dan berpengaruh secara kuantitatif kondisi permodalan dan pendanaan Bank yang berbasis syariah Identikasi risiko imbal hasil syariah dilakukan melalui observasi atas perbandingan tingkat imbal hasil yang diberikan Bank dengan kompetitor maupun acuan, riwayat perilaku nasabah dana syariah apabila terjadi perubahan imbal hasil, serta kondisi likuiditas dana syariah di saat terjadinya perubahan imbal hasil.

Bank melakukan pengendalian terhadap risiko imbal hasil syariah demi menjaga stabilitas likuiditas dana kelola berbasis syariah. Hal ini dilakukan dengan senantiasa menjaga hubungan baik dengan nasabah serta memberikan tingkat imbal hasil optimal kepada nasabah dengan tetap memperhatikan risiko dan kondisi Bank.

Bank juga menetapkan unit kerja yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menganalis indicator risiko imbal hasil syariah serta menyampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala.

j. Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah.

Proses manajemen risiko investasi:

- Melakukan identifikasi atas risiko aktivitas investasi dengan akad berbasis bagi hasil terhadap portofolio yang sudah ada atau potensi risiko yang mungkin timbul, guna memudahkan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang jelas dan hati-hati, sehingga risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif.

- Mengimplementasikan proses persetujuan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang efektif antara lain dengan menetapkan batas kewenangan (limit) dan mekanisme pengambilan keputusan investasi dengan akad berbasis bagi hasil.

- Monitoring terhadap konsentrasi penyaluran dana dengan akad berbasis bagi hasil sehingga sesuai dengan selera *risk appetite* Bank.

43. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

i. Return Risk

The Bank identifies and analyzes factors that can increase risk exposure to sharia returns and quantitatively affect the condition of capital and funding of sharia-based banks The identification of sharia yield risk is carried out through observation of the comparison of the level of returns provided by the Bank with competitors and references, the history of sharia fund customer behavior if there is a change in yields, and the liquidity condition of Islamic funds when there is a change in yield.

The Bank controls the risk of sharia returns in order to maintain liquidity stability of sharia-based managed funds. This is done by always maintaining good relations with customers and providing optimal returns to customers while still paying attention to the risks and conditions of the Bank.

The Bank also establishes a work unit that is given the authority and responsibility to analyze sharia yield risk indicators and submit them to the Board of Directors and Board of Commissioners periodically.

j. Investment Risk

Investment Risk is the risk caused by the Bank to bear the customer's business losses financed in profit-sharing based financing, both using the net revenue sharing method and using the profit and loss sharing method. In this case, the calculation of profit sharing is not only based on the amount of revenue or sales obtained by customers but is calculated from the business profits generated by customers.

Investment risk management process:

- *Identify the risks of investment activities with profit-sharing based contracts against existing portfolios or potential risks that may arise, in order to facilitate the preparation and implementation of investment policies with clear and careful profit-sharing-based contracts, so that these risks can be managed and controlled effectively.*

- *Implement an investment approval process with an effective profit-sharing based contract, among others, by setting limits and investment decision-making mechanisms with profit-sharing based contracts.*

- *Monitoring of the concentration of fund distribution with profit-sharing based contracts so that it is in accordance with the Bank's risk appetite.*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

j. Risiko Investasi (lanjutan)

Proses manajemen risiko investasi (lanjutan):

- Secara efektif mengawasi dan mengendalikan sifat, karakteristik dan kualitas dari investasi dengan akad berbasis bagi hasil.
- Pedoman dan prosedur dikomunikasikan, diimplementasikan, dimonitor dan dikaji ulang secara periodik dengan mempertimbangkan perubahan kondisi internal dan eksternal.
- Memiliki dan mengembangkan kebijakan/prosedur penyaluran dana dengan akad berbasis bagi hasil dan pedoman manajemen risiko investasi yang memadai untuk mengelola secara hati-hati tingkat risiko pada sejumlah kriteria, seperti kualitas, konsentrasi, jatuh tempo, pengamanan jaminan, dan bentuk fasilitas pembiayaan.

Pengendalian Penyelewengan

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko penyelewengan, Bank telah menerapkan beberapa langkah berikut:

- Pengelolaan operasional Bank tidak tergantung pada kebijakan seseorang.
- Pengelola Bank dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, maupun keluarganya.
- Manajemen Bank memahami dan senantiasa mewaspadai jenis-jenis risiko yang melekat dalam kegiatan usaha Bank yang dipimpinnya.
- Pemilik Bank memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan banknya.
- Pemilik mayoritas menyerahkan pengelolaan Bank kepada manajemen profesional.
- Senantiasa diupayakan meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga bisa berkonsentrasi dalam bekerja.
- Senantiasa dilaksanakan pendidikan dan pelatihan termasuk pembinaan moral dan keagamaan dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***j. Investment Risk** (continued)*

Investment risk management process (continued):

- *Effectively supervise and control the nature, characteristics and quality of investments with profit-sharing based contracts.*
- *Guidelines and procedures are communicated, implemented, monitored and reviewed periodically by considering changes in internal and external conditions.*
- *Have and develop policies/procedures for disbursing funds with profit-sharing based contracts and adequate investment risk management guidelines to carefully manage the level of risk on a number of criteria, such as quality, concentration, maturity, security of guarantees, and forms of financing facilities.*

Deviation Control

In the framework of applied and controlling deviation risk, Bank was doing several steps is as follows:

- *Managing operational of Bank is not depending on ones decision.*
- *Bank management in operate activities in the circumstance carrying out things for personal, family or group benefit.*
- *The managemen of Bank realize and always aware of any kind of risk stick in bank activity managed by them.*
- *The owner of Bank have a strong comitment to develop their bank.*
- *The majority owner have submitted to carry out Bank to the professional management.*
- *Continously make an effort to increase official prosperity to make an effect of contrentration in doing work .*
- *Always carrying out education and training including building moral and religious in the framework on increasing ability, beliveness and obey the Only God.*

44. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Sebagian besar instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan disajikan menggunakan nilai wajar. Berikut ini adalah perbandingan antara nilai tercatat seperti yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan dan nilai wajar laporan keuangan.

44. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

A significant number of financial instruments are carried at fair value in the statements of financial position. Below is the comparison of the carrying amounts, as reported on the financial position, and the fair value of financial statements.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

44. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Instrumen keuangan telah dialokasikan berdasarkan klasifikasinya. Kebijakan akuntansi penting pada Catatan 2 menjelaskan bagaimana setiap kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dan bagaimana pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian atas nilai wajar.

Pengelompokan aset keuangan telah diklasifikasikan menjadi aset keuangan diukur melalui laba rugi; aset keuangan diukur melalui penghasilan komprehensif lain; biaya amortisasi; pinjaman yang diberikan dan piutang. Demikian dengan setiap liabilitas keuangan juga telah diklasifikasikan menjadi yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi.

Nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan informasi yang tersedia dan belum diperbaharui untuk merefleksikan perubahan keadaan pasar setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Tabel berikut ini merupakan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam jutaan rupiah).

44. *FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES* *(continued)*

Financial instruments have been allocated based on their classification. The significant accounting policies in Note 2 describe how the categories of the financial assets and financial liabilities are measured and how income and expenses, including fair value gains and losses.

The grouping of financial assets has been classified into financial assets measured through profit and loss; financial assets are measured through other comprehensive income; amortization costs; loans provided and receivables. Similarly, each financial liability has also been classified into one that is measured through other comprehensive income and amortized cost of acquisition

The fair value are based on relevant information available as at the statements of financial position date and have not been updated to reflect changes in market condition after the statements of financial position date.

The table below sets out the carrying amount and fair values of the Bank financial assets and liabilities as at December 31, 2025 and, 2024 (in millions rupiah).

Perkiraan/ *Account*	**2025**						
	Nilai tercatat / *Carrying amount*						
	Nilai pasar melalui laba rugi/ FVTPL	Nilai pasar melalui penghasilan komprehensif/ FVTOCI	pinjaman diberikan/ *Loans*	tersedia untuk dijual/ *Available for sale*	amortisasi lainnya/ *Other amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*
Aset keuangan/ *Financial Assets*							
Kas/*Cash*	-	937.249	-	-	-	937.249	937.249
Giro pada Bank Indonesia/*Current account with Bank Indonesia*	-	-	3.074.642	-	-	3.074.642	3.074.642
Giro pada bank lain/*Current account with others Bank*	-	-	-	-	-	-	-
Efek-efek/ *Marketable securities*	-	883.124	-	3.201.730	-	4.084.853	4.084.853
Pembiayaan yang diberikan/ *Finacing receivables*	-	-	21.261.822	-	-	21.261.822	21.261.822
Penyertaan saham/ *Investment in share of stocks*	-	-	1.556	-	-	1.556	1.556
Aset lain-lain / *Other assets*	-	-	629.256	-	-	629.256	629.256
Jumlah Aset Keuangan/ *Total Financial Assets*	**-**	**1.820.373**	**24.967.275**	**3.201.730**	**-**	**29.989.378**	**-**

44. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

44. *FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES* *(continued)*

Perkiraan/ *Account*	**2025** Nilai tercatat / *Carrying amount*						
	Nilai pasar melalui laba rugi/ FVTPL	Nilai pasar melalui penghasilan komprehensif/ FVTOCI	pinjaman diberikan/ *Loans*	tersedia untuk dijual/ *Available for sale*	amortisasi lainnya/ *Other amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*
Liabilities keuangan *Financial Liabillities*							
Kewajiban segera/ *Current liabilities*	-	-	-	-	465.366	465.366	465.366
Simpanan wadiah/ *Wadiah deposit*	-	-	-	-	1.780.006	1.780.006	1.780.006
Simpanan mudharabah */Deposits mudharabah*	-	-	-	-	24.046.942	24.046.942	24.046.942
Obligasi yang diterbitkan / *Bond issued*	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima / *Borrowing*	-	-	-	-	1.282.845	1.282.845	1.282.845
Liabilitas lain-lain / *Other liabilities*	-	-	-	-	13.257	13.257	13.257
Jumlah Liabilitas Keuangan/ *Total Financial Liabillities*	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.588.416**	**57.577.794**	**-**

Perkiraan/ *Account*	**2024** Nilai tercatat / *Carrying amount*						
	Nilai pasar melalui laba rugi/ FVTPL	Nilai pasar melalui penghasilan komprehensif/ FVTOCI	pinjaman diberikan/ *Loans*	tersedia untuk dijual/ *Available for sale*	amortisasi lainnya/ *Other amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*
Aset keuangan/ *Financial Assets*							
Kas/*Cash*	-	956.983	-	-	-	956.983	956.983
Giro pada Bank Indonesia/*Current account with Bank Indonesia*	-	-	2.466.349	-	-	2.466.349	2.466.349
Giro pada bank lain/*Current account with others Bank*	-	-	-	-	-	-	-
Efek-efek/ *Marketable securities*	-	1.764.264	-	2.078.980	-	3.843.243	3.843.243
Pembiayaan yang diberikan/ *Financing receivables*	-	-	21.166.417	-	-	21.166.417	21.166.417
Penyertaan saham/ *Investment in share of stocks*	-	-	1.556	-	-	1.556	1.556
Aset lain-lain / *Other assets*	-	-	709.966	-	-	709.966	709.966
Jumlah Aset Keuangan/ *Total Financial Assets*	**-**	**2.721.247**	**24.344.287**	**2.078.980**	**-**	**29.144.514**	**-**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

44. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

44. *FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES* *(continued)*

Perkiraan/ *Account*	**2024**						
	Nilai tercatat / *Carrying amount*						
	Nilai pasar melalui laba rugi/ FVTPL	Nilai pasar melalui penghasilan komprehensif/ FVTOCI	pinjaman diberikan/ *Loans*	tersedia untuk dijual/ *Available for sale*	amortisasi lainnya/ *Other amortized*	Nilai tercatat/ C*arrying amount*	Nilai wajar/ F*air value*
Liabilitas keuangan/ *Financial Liabilities*							
Kewajiban segera/ *Current liabilities*	-	-	-	-	498.692	498.692	498.692
Simpanan wadiah/ *Deposit wadiah*	-	-	-	-	1.660.211	1.660.211	1.660.211
Simpanan mudharabah */Deposits mudharabah*	-	-	-	-	22.719.013	22.719.013	22.719.013
Pinjaman yang diterima / *Borrowing*	-	-	-	-	2.334.647	2.334.647	2.334.647
Liabilitas lain-lain / *Other liabilities*	-	-	-	-	70.905	70.905	70.905
Jumlah Liabilitas Keuangan/ *Total Financial Liabilities*	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.283.468**	**27.283.468**	**-**

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, kecuali Surat Berharga dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan yang mempunyai risiko nilai wajar, piutang pembiayaan konsumen, obligasi yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang.

The fair value of financial assets and liabilities, except for held to maturity marketable securities, loans with fair value risk, consumer financing receivables, bonds issued, and borrowings, approximated to the carrying amount largely due to short-term maturities of these instruments and/or repricing frequently.

Nilai wajar Surat Berharga dimiliki hingga jatuh tempo dan obligasi yang diterbitkan ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada tanggal laporan.

The fair value of held to maturity marketablesecurities and bonds issued was determined on the basis of quoted market price as of reporting date.

Nilai wajar pinjaman yang diberikan yang mempunyai risiko nilai wajar, piutang pembiayaan konsumen, dan pinjaman yang diterima dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal laporan.

The fair value of loans with fair value risk, consumer financing receivables, and borrowing are determined by discounting cash flows using market interest rate as at reporting date.

Nilai wajar investasi dalam saham dinilai sebesar biaya perolehannya karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

The fair value of investments in shares is carried at cost due to its fair value cannot be reliably measured.

45. RASIO KEUANGAN

Laporan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. POJK No. 37/POJK.03/2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

45. *FINANCIAL RATIOS*

Financial Ratio Report of Islamic Commercial Banks based on SEOJK Number 10/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Reports of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units. POJK No. 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.

45. RASIO KEUANGAN (lanjutan)

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai POJK Nomor 21/POJK.03.2014 tanggal 18 November 2014 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah tanggal 23 Desember 2016. SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 Tentang Penerapan Manajemen risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015. Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015. Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah.

Perhitungan PDN didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN maksimum 20% dari jumlah modal.

45. *FINANCIAL RATIOS* *(continued)*

Minimum Capital Provision Obligation (KPMM) in accordance with POJK Number 21/POJK.03.2014 dated November 18, 2014 concerning Minimum Capital Provision Obligation of Sharia Commercial Banks.

The implementation of risk management for Islamic commercial banks and Islamic business units is stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 65/POJK.03/2016 concerning the implementation of risk management for Islamic commercial banks and Islamic business units dated December 23, 2016. SEOJK Number 25/SEOJK.03/2023 Concerning the Implementation of Risk Management for Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units.

Circular Letter of the Financial Services Authority Number 34/SEOJK.03/2015 dated 21 December 2015. Concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using the Standard Approach for Islamic Commercial Banks.

Circular Letter of the Financial Services Authority Number 35/SEOJK.03/2015 dated 21 December 2015. Concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Market Risk Using the Standard Approach for Islamic Commercial Banks.

The calculation of PDN is based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 dated July 1, 2003 as last amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015. Based on this regulation, Banks are required to maintain a maximum PDN ratio of 20% of total capital.

(dalam jutaan Rupiah)	**2025**	**2024**	*(in millions Rupiah)*
a. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		*a. Risk Weighted Assets*	
Setelah memperhitungkan			*After taking into account*
Risiko Kredit	13.743.490	13.831.474	*Credit Risk*
Risiko Pasar	93.313	69.765	*Market Risk*
Risiko Operasional	2.415.418	2.384.065	*Operational Risk*
Jumlah	16.252.221	16.285.305	*Total*
b. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)		*b. Capital Adequacy Ratio*	
Komponen Modal			*Capital Componen*
Modal Inti	3.275.821	3.276.601	*Principle Capital*
Modal Pelengkap	171.794	172.893	*Capital Completion*
Total Modal	3.447.615	3.449.494	*Total Capital*
c. Rasio keuangan		*c. Financial ratios*	
1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	21,21%	21,18%	*Minimum Capital Requirement (KPMM)*
2. Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2,79%	1,74%	*Problematic productive assets and problematic non-productive assets to total productive assets and non-productive assets*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

45. RASIO KEUANGAN (lanjutan)

45. *FINANCIAL RATIOS* *(continued)*

(dalam jutaan Rupiah)	**2025**	**2024**	*(in millions Rupiah)*
c. Rasio keuangan (lanjutan)		*c. Financial ratios (continued)*	
3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,82%	1,76%	*Productive assets with problems against total productive assets*
4. Laba sebelum pajak dibanding dengan rata-rata total aset (ROA)	1,19%	1,43%	*Income before taxes compared with average total assets (ROA)*
5. Laba bersih setelah pajak dibanding dengan rata-rata ekuitas (ROE)	8,50%	10,42%	*Income after taxes compared with average total equity (ROE)*
6. Beban operasional dibanding pendapatan operasional (BOPO)	84,86%	81,82%	*Operating expenses compared with operating income (BOPO)*
7. Beban terhadap pendapatan (CIR)	70,31%	68,17%	*Cost To Income (CIR)*
8. Pendapatan bagi hasil dikurangi beban imbalan dibanding dengan rata-rata aset produktif *(Net Imbalan)*	5,12%	4,98%	*Net Income compared with average productive assets (Net Reward)*
9. *Net Operation Margin (NOM)*	0,88%	1,08%	*Net Operation Margin (NOM)*
10. Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Total Pembiayaan	50,63%	39,29%	*Profit Sharing Financing to Total Financing*
11. Pembiayaan dibanding dengan dana pihak ketiga *(FDR)*	84,61%	88,86%	*Financing compared with related parties fund (FDR)*
12. Pembiayan bermasalah dibanding dengan total pembiayaan (NPF-Kotor)	3,82%	2,37%	*Non performance financing compared with total financing (NPF-Gross)*
13. Pembiayaan bermasalah - CKPN pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan (NPF-Bersih)	1,48%	0,39%	*Non performing financing - CKPN non performing financing compare with total financing (NPF-Net)*
14. CKPN aset keuangan terhadap total aset produktif	1,78%	1,51%	*CKPN of financial assets to total productive assets*
d. Kepatuhan		*d. Compliance*	
Persentase pelanggaran BMPD			*Percentage of BMPK violations*
I. Pihak terkait	0,00%	0,00%	*I. Reted parties*
II. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	*II. Unrelated parties*

45. RASIO KEUANGAN (lanjutan) / *FINANCIAL RATIOS (continued)*

(dalam jutaan Rupiah)	2025	2024	*(in millions Rupiah)*
d. Kepatuhan (lanjutan)		*d. Compliance (continued)*	
Persentase pelampauan BMPD			*Percentage of exceeding BMPK*
I. Pihak terkait	0,00%	0,00%	*I. Reted parties*
II. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	*II. Unrelated parties*
Giro Wajib Minimum (GWM)			*Statutory Reserves (GWM)*
I. GWM Rupiah	10,04%	8,64%	*GWM main rupiah*
II. GWM Valas	14,13%	7,19%	*GWM foreign exchange*
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	2,71%	2,02%	*Overall Net Foreign Exchange Position*

46. INFORMASI SEGMEN / *SEGMENT INFORMATION*

Bank mempertimbangkan jenis usaha sebagai segmen utama dan lokasi geografis sebagai segmen sekunder.

The Bank considers the nature of its business as the primary segment and geographical areas as the secondary segment.

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha sekunder dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information concerning the secondary segment information of the Bank is set out in the table below:

Segmen Geografis/ *Geographic Segments*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*			
	Riau	**Kepulauan Riau**	**Lainnya**	**Jumlah/ *Total***
Pendapatan dari Jual Beli *Income From Sales And Purchases*	880.714.797.820	242.867.692.790	496.246.766	1.124.078.737.376
Pendapatan dari Bagi Hasil *Income From Profit Sharing*	725.898.988.913	216.234.845.030	22.841.758.521	964.975.592.464
Pendapatan dari Ijarah - neto *Income From Ijarah - Net*	16.246.620.491	3.988.429.072	5.255.834	20.240.305.397
Pendapatan Usaha Utama Lainnya *Other Main Operating Income*	382.612.720.280	5.402.293.815	40.570.080	388.055.584.175
Hak pihak ketiga atas bagi hasil *Third parties share on return*	(530.674.284.965)	(113.780.184.643)	(338.837.959.522)	(983.292.429.129)
Pendapatan - Bersih *Income - Net*	**1.474.798.842.540**	**354.713.076.064**	**(315.454.128.321)**	**1.514.057.790.283**
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan/ *Fee Based Income From Banking*	90.922.233.788	19.460.236.362	129.725.221	110.512.195.370
Pendapatan lainnya/ *Other Income*	5.454.402.938	2.075.351.283	-	7.529.754.221
Gaji dan Tunjangan/ *Salaries and Benefits*	559.006.163.692	92.958.802.473	5.523.121.279	657.488.087.444
Umum dan administrasi/ *General administrative*	407.049.703.262	55.991.460.186	3.774.593.944	466.815.757.392
Bonus Wadiah/ *Wadiah Bonus*	54.904.176	34.860.922	-	89.765.098
Lain-lain/ *Others*	21.697.669.218	1.287.872.127	129.912.186	23.115.453.531
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses for Financial*	78.946.193.180	6.582.216.444	27.972.707	85.556.382.331
Pendapatan/(beban) Non usaha - neto *Non operating Income/(expense) - net*	28.241.245.413	931.682.885	347.985.368	29.520.913.666
Laba Operasional/ *Operating Income*	476.179.600.324	218.461.768.673	(325.127.988.584)	369.513.380.412
Laba Bersih/ *Net Profit*	383.097.918.298	218.461.768.673	(325.127.988.584)	276.431.698.386
Jumlah Aset/ *Total Assets*	20.742.396.607.461	4.781.165.565.732	5.576.583.786.161	31.100.145.959.354
Jumlah Liabilitas/ *Total Liability*	17.819.298.763.404	4.349.392.460.021	5.544.733.545.616	27.713.424.769.041
Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	2.923.097.844.057	431.773.105.711	31.850.240.545	3.386.721.190.313

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

46. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

46. *SEGMENT INFORMATION* *(continued)*

Segmen Geografis/ *Geographic Segments*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*			
	Riau	**Kepulauan Riau**	**Lainnya**	**Jumlah/ *Total***
Pendapatan dari Jual Beli/ *Income From Sales And Purchases*	1.029.913.334.716	294.199.880.231	554.443.629	1.324.667.658.575
Pendapatan dari Bagi Hasil/ *Income From Profit Sharing*	537.870.968.353	126.785.392.851	3.967.677.797	668.624.039.001
Pendapatan dari Ijarah - neto/ *Income From Ijarah - Net*	13.262.590.876	3.964.388.766	8.895.385	17.235.875.027
Pendapatan Usaha Utama Lainnya/ *Other Main Operating Income*	317.963.154.647	2.677.011.347	-	320.640.165.994
Hak pihak ketiga atas bagi hasil/ *Third parties share on return*	(436.209.402.270)	(109.449.334.430)	(381.058.704.085)	(926.717.440.785)
Pendapatan - Bersih/ *Income - Net*	**1.462.800.646.321**	**318.177.338.765**	**(376.527.687.274)**	**1.404.450.297.812**
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan/ *Fee Based Income From Banking*	96.773.569.718	24.119.559.974	156.032.795	121.049.162.487
Pendapatan lainnya/ *Other Income*	4.577.138.404	1.500.848.074	-	6.077.986.479
Gaji dan Tunjangan/ *Salaries and Benefits*	536.333.149.880	91.085.963.628	5.432.362.772	632.851.476.280
Umum dan administrasi/ *General administrative*	347.868.844.907	52.616.148.963	3.546.743.986	404.031.737.855
Bonus Wadiah/ *Wadiah Bonus*	112.794.432	21.155.267	-	133.949.699
Lain-lain/ *Others*	19.369.845.267	1.295.195.269	124.518.532	20.789.559.068
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses for Financial*	(17.732.731.879)	(5.252.403.117)	(205.297.175)	(23.190.432.171)
Pendapatan/(beban) Non usaha - neto *Non operating Income/(expense) - net*	23.368.319.268	3.284.344.653	304.477.737	26.957.141.658
Laba Operasional/ *Operating Income*	619.365.668.811	190.242.535.916	(385.985.054.681)	423.623.150.046
Laba Bersih/ *Net Profit*	535.116.266.924	190.242.535.916	(385.985.054.681)	339.373.748.158
Jumlah Aset/ *Total Assets*	21.764.993.609.807	3.779.133.098.466	5.315.599.856.902	30.859.726.565.174
Jumlah Liabilitas/ *Total Liability*	18.572.450.929.719	3.552.611.098.466	5.315.599.856.902	27.440.661.885.087
Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	3.192.542.680.087	226.522.000.000	-	3.419.064.680.087

47. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pekerjaan pengelolaan Kas ATM wilayah Pekanbaru, Batam dan Tanjung Pinang.

Pekerjaan pengelolaan Kas ATM wilayah Pekanbaru, Batam dan Tanjung Pinang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan PT Swadharma Sarana Informatika, No.:0001/PKS/2025 dan No.:SSI/DIR/0784/2025 tanggal 11 Maret 2025. Jangka waktu perjanjian selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dilaksanakan. Pekerjaan tersebut dilakukan berkesinambungan dan dilaporkan setiap bulan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian

47. *SIGNIFICANT AGREEMENTS*

a. ATM cash management work in the Pekanbaru, Batam and Tanjung Pinang areas.

ATM Cash management work in Pekanbaru, Batam and Tanjung Pinang areas is carried out based on the Cooperation Agreement between PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) and PT Swadharma Sarana Informatika, No.: 0001 / PKS / 2025 and No.: SSI / DIR / 0784/2025 dated March 11, 2025. The term of the agreement is for a period of 12 (twelve) months, starting from the date of signing of this Agreement. The work is carried out continuously and reported monthly with the provisions stipulated in this Agreement.

47. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Pengadaan barang/jasa *maintenance CRM* (*Cash Recycle Machine*)

Pada tanggal 18 Juli 2023, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Hitachi Channel Solutions Indonesia dengan perjanjian No.006/PKS/2023. Perjanjian tersebut berlaku selama 12 bulan dan akan diperpanjang secara otomatis setiap bulannya tanpa perlu adanya dokumen pendukung perpanjangan jangka waktu perjanjian.

c. Pekerjaan pengadaan barang/jasa *outsourcing* aplikasi *Core Banking Visionshari'a* (syariah)

Pada tanggal 3 November 2023, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Multipolar Technology Tbk dengan perjanjian No.010/PKS/2023. Perjanjian tersebut berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 29 Februari 2024.

d. Pengadaan kartu ATM Chip

Pada tanggal 3 November 2023, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk dengan perjanjian No.011/PKS/2023. Perjanjian tersebut berlaku terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kartu ATM Chip PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) sampai dengan diterima pekerjaan.

e. Pemanfaatan Fasilitas *Customisation* Kartu Kredit

Berdasarkan perjanjian No.01/696-PKS/DIR dan No.049/PKS/2021 tanggal 23 September 2021, PT Bank Riau Kepri (Pihak Kedua) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Pihak Pertama). melakukan kerjasama Pemanfaatan Fasilitas *Customisation* BSI *Hasanah Card*, berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak 23-09-2021 sampai dengan 23-09-2023. Para pihak sepakat dengan jumlah *annual fee*.

f. Perjanjian penyelenggaraan Ajungan Tunai Mandiri/ ATM Bersama

Pada tanggal 3 Oktober 2003, Bank mengadakan perjanjian penyelenggaraan ATM Bersama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis dengan perjanjian No.30/DIR/BPDR/X/2003. Perjanjian tersebut berlaku selama 36 bulan dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya sepanjang tidak ada perubahan dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut, Bank akan mendapatkan manfaat jaringan ATM Bersama di lebih dari 31.000 ATM di seluruh Indonesia.

47. *SIGNIFICANT AGREEMENTS* *(continued)*

b. Procurement of goods/services for CRM (Cash Recycle Machine) maintenance

On July 18 2023, the Bank entered into a cooperation agreement with PT Hitachi Channel Solutions Indonesia with agreement No.006/PKS/2023. The agreement is valid for 12 months and will be extended automatically every month without the need for supporting documents to extend the term of the agreement.

c. Job procurement of goods/services outsourcing the Core Banking Visionshari'a (syariah)

On November 3 2023, the Bank entered into a cooperation agreement with PT Multipolar Technology Tbk with agreement No.010/PKS/2023. The agreement is valid for 1 year starting from March 1, 2023 to February 29, 2024.

d. Procurement of ATM Chip cards

On November 3 2023, the Bank entered into a cooperation agreement with PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk with agreement No.011/PKS/2023. This agreement is valid from the issuance of the Letter of Appointment as Provider of Goods/Services for ATM Chip cards at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) until the job is accepted.

e. Utilization of Credit Card Customisation Facility

Based on agreements No.01/696-PKS/DIR and No.049/PKS/2021 dated September 23, 2021, PT Bank Riau Kepri (Second Party) and PT Bank Syariah Indonesia Tbk (First Party). collaborating on the Utilization of BSI Hasanah Card Customisation Facility, valid for a period of two years starting from September 23, 2021 to September 23, 2023. The parties agree on the amount of the annual fee.

f. Joint Automatic Teller Machine/ ATM Agreement

On October 3, 2003, the Bank entered into an agreement for the implementation of ATM Bersama with PT Artajasa Pembayaran Elektronis with agreement No.30/DIR/BPDR/X/2003. The agreement is valid for 36 months and will be automatically renewed annually as long as there is no change in the agreement. Under the agreement, the Bank will benefit from the ATM Bersama network at more than 31,000 ATMs throughout Indonesia.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

48. KASUS HUKUM

Terkait kasus hukum tidak terdapat pengaruh reputasi negatif. Sebagai bank yang dimiliki oleh PEMDA Tingkat I/II di Provinsi Riau dan Kepri, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) memiliki kredibilitas yang kuat di mata nasabah. Dan kasus hukum tersebut tidak berpengaruh terhadap reputasi dan kelangsungan usaha Bank, namun tetap menjadi perhatian dari manajemen.

Perkara Perdata

Pada akhir periode 31 Desember 2025, terdapat 6 kasus perdata masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Perkara Pidana

Pada akhir periode 31 Desember 2025, terdapat 9 kasus perkara pidana yang masih dalam proses penyidikan.

48. *LEGAL CASES*

Regarding legal cases, there is no negative reputational influence. As a bank owned by the Level I/II local government in Riau and Kepri Provinces, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) has strong credibility in the eyes of customers. And the legal case has no effect on the Bank's reputation and business continuity, but remains a concern of management.

Civil Cases

At the end of the period of December 31, 2025, there is 6 civil case that is still in the process of being tried in the District Court.

Criminal Cases

At the end of the period on December 31, 2025, there were 9 criminal cases that were still under investigation.

49. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No.022/AUDIT.04/DPS/2025 tanggal 27 Agustus 2025 dan surat No.005/AUDIT.04/DPS/2026 tanggal 26 Februari 2026, Dewan Pengawas Syariah ("DPS") PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) untuk periode tahun 2025, telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI"), serta opini syariah dari DPS.

49. *OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD*

Based on letter No.022/AUDIT.04/DPS/2025 dated August 27, 2025 and letter No.005/AUDIT.04/DPS/2026 dated February 26, 2026, the Sharia Supervisory Board ("DPS") of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) stated that in general the sharia aspects in the operations and products of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the period of 2025, have followed the fatwas and sharia provisions issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council ("DSN-MUI"), as well as the sharia opinion from the DPS.

50. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2026 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 109: "Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan" tentang penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur ESG-linked, aset keuangan dengan fitur *non recourse* , dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti *tranche* .
- Amendemen PSAK 107: "Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan" tentang persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

50. *NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE*

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2026 are as follows:

- *Amendment of SFAS 109: "Classification and Measurement of Financial Instruments" regarding the derecognition of financial liabilities, as well as clarifying the assessment of cash flow characteristics for financial assets with ESG-linked features, financial assets with non-recourse features, and contractually bound instruments such as tranches.*
- *Amendment of SFAS 107: "Classification and Measurement of Financial Instruments" regarding requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and adding provisions related to financial instruments with contractual terms that change the timing or amount of contractual cash flows.*

50. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027.

- Amendemen PSAK 118: "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan" tentang disyaratkan pengungkapan penyajian total dan subtotal tertentu dalam laporan laba rugi. Selain itu, entitas juga disyaratkan untuk mengklasifikasikan seluruh pendapatan dan biaya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ke dalam satu dari lima kategori: operasi, investasi, pendanaan, pajak penghasilan dan operasi yang dihentikan. Amandemen ini mensyaratkan pengungkapan atas ukuran kinerja tetapan manajemen, subtotal pendapatan dan biaya, serta persyaratan baru untuk agregasi dari disagregasi informasi keuangan.

- Amendemen PSAK 413: "Penurunan Nilai" tentang penurunan nilai atas instrumen keuangan yaitu aset keuangan berbasis syariah dan kafalah untuk penjaminan risiko kredit. PSAK 413 diterapkan pada aset keuangan syariah berupa hak tagih yang jumlah kas dan waktu pembayarannya sudah ditentukan dalam akad. Perhitungan penurunan nilai dalam PSAK 413 menggunakan konsep ekspektasi kerugian (*expected loss*) yang perhitungannya mencerminkan jumlah tidak bias dan probabilitas tertimbang (*unbiased and probability-weighted amount*) dan informasi wajar dan tersokong (*reasonable and supportable information*). Perhitungan tersebut tidak mencerminkan nilai waktu atas uang (*time value of money*).

- Kafalah penjaminan risiko kredit ditentukan jumlah yang lebih tinggi antara jumlah provisi yang dihitung berdasarkan PSAK 413 dengan jumlah liabilitas yang telah dibentuk.

- Amandemen PSAK 401: "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah tentang perubahan penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan penghasilan komprehensif dan catatan atas laporan keuangan. Entitas disyarakan untuk melakukan pengklasifikasian penghasilan dan beban ke dalam kategori operasi, investasi, pendanaan, zakat perusahaan, pajak penghasilan dan operasi yang dihentikan. Selain itu, disyaratkan juga untuk menyajikan subtotal laba rugi operasi, laba rugi sebelum pendanaan, zakat perusahaan, dan pajak penghasilan, serta laba rugi.

  Untuk mengkomunikasikan pandangan manajemen atas aspek kinerja keuangan secara keseluruhan, PSAK 401 mensyaratkan pengungkapan ukuran kinerja tetapan manajemen. Perubahan ini mengakibatkan struktur laporan penghasilan komprehensif yang lebih konsisten dan komparabilitas antar entitas.

50. *NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE* *(continued)*

Effective beginning on or after 1 January 2027.

- *Amendment of SFAS 118: "Presentation and Disclosure in Financial Statements" regarding the required disclosure of specified total and subtotal presentation within the statement of profit or loss, including subtotals. Furthermore, entities are required to classify all income and expenses within the statement of profit or loss into one of five categories: operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations, whereof the first three are new. It also requires disclosure of newly defined management-defined performance measures, subtotals of income and expenses, and includes new requirements for aggregation and disaggregation of financial information.*

- *Amendment of SFAS 413: "Impairment" regarding the impairment of financial instruments, namely shariabased financial assets and kafalah for credit risk guarantees. SFAS 413 is applied to sharia financial assets in the form of collection rights whose cash amount and scheduled payment have been determined in the contract. The calculation of impairment in SFAS 413 uses the concept of expected loss whose calculation reflects the unbiased and probabilityweighted amount and reasonable and supportable information. This calculation does not reflect the time value of money.*

- *The credit risk guarantee kafalah is determined by the higher amount between the provision amount calculated based on SFAS 413 and the amount of liabilities that have been formed.*

- *Amendment to SFAS 401: "Presentation and Disclosure in Sharia Financial Statements" regarding changes in the presentation and disclosure of information in the comprehensive income statement and notes to the financial statements. Entities are required to classify income and expenses into categories of operations, investments, financing, corporate zakat, income tax, and discontinued operations. Additionally, it is also required to present subtotals for operating profit or loss, profit or loss before financing, corporate zakat, and income tax, as well as profit or loss.*

  To communicate management's views on overall financial performance, PSAK 401 mandates the disclosure of management's performance measures. These changes result in a more consistent structure for the comprehensive income statement and enhance comparability between entities.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

50. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

50. *NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE* *(continued)*

As at the authorisation date of financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

51. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 26 Maret 2026.

51. THE COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Bank is responsible for the presentation and preparation of financial statements that were completed on March 26, 2026.



INDEKS OJK

OJK INDEKS


Referensi SEOJK Nomor 16/
SEOJK.04/2021 : Laporan Tahunan
Emiten atau Perusahaan Publik
Reference SEOJK Number 16/
SEOJK.04/2021 : Annual Report of
Issuers or Public Companies

Referensi SEOJK Nomor 16/ SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference SEOJK Number 16/ SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan	Halaman	Description
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting | Summary of Key Financial Data		
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	15-19	Summary of key financial data contains financial information presented in comparative form for 3 (three) financial years or since commencement of business if the Issuer or Public Company has been in business for less than 3 (three) years, including at least:
1). pendapatan/penjualan;		1). revenue/sales;
2). laba bruto;		2). gross profit;
3). laba (rugi);		3). profit (loss);
4). jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;		4). total profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;
5). total laba (rugi) komprehensif;		5). total comprehensive income (loss);
6). jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;		6). total comprehensive income (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;
7). laba (rugi) per saham;		7). earnings (loss) per share;
8). jumlah aset;		8). total assets;
9). jumlah liabilitas;		9). total liabilities;
10). jumlah ekuitas;		10). total equity;
11). rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;		11). ratio of profit (loss) to total assets;
12). rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;		12). profit (loss) to equity ratio;
13). rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;		13). ratio of profit (loss) to revenue/sales;
14). rasio lancar;		14). current ratio;
15). rasio liabilitas terhadap ekuitas;		15). the ratio of liabilities to equity;
16). rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan		16). the ratio of liabilities to total assets; and
17). informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.		17). information and other financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.
b. Informasi Saham | Stock Information		
Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		Share information for Public Listed Companies shall at least contain:
1). saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a). jumlah saham yang beredar; b). kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; c). harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan d). volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;	155	1). shares issued for each quarterly period presented in comparative form for the last 2 (two) financial years, at least containing: a). number of shares outstanding; b). market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed; c). the highest, lowest, and closing share price based on the price on the stock exchange where the shares are listed; and d). trading volume on the stock exchange where the shares are listed. The information in (b), (c) and (d) is only disclosed if the shares are listed on the stock exchange;

Keterangan	Halaman	Description
2). dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: a). tanggal pelaksanaan aksi korporasi; b). rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; c). jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; d). jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan e). harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	19	2). in the event of corporate actions that cause changes in shares, such as stock splits, reverse stock mergers, stock dividends, bonus shares, changes in par value of shares, issuance of convertible securities, as well as capital increases and decreases, the share information as referred to in the figure shall be added with at least an explanation regarding: a). date of implementation of corporate action; b). the ratio of stock splits, reverse stock mergers, stock dividends, bonus shares, number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares; c). number of shares outstanding before and after the corporate action; d). number of convertible securities exercised (if any); and e). the share price before and after the corporate action;
3). dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan	19	3). in the event of suspension and/or delisting during the financial year, explain the reasons for the suspension and/or delisting; and
4). dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut.	19	4). in the event that the suspension as referred to in point 3) and/or delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, describe the actions taken to resolve the suspension and/or delisting.
c. Laporan Direksi | Directors' Report		
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	56-61	The report of the Board of Directors shall at least contain a brief description of:
1). kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a). strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b). peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; c). proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; d). perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan e). kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;		1). performance of the Issuer or Public Company, containing at least: a). strategic strategies and policies of the Issuer or Public Company; b). the role of the Board of Directors in the formulation of strategic strategies and policies of the Issuer or Public Company; c). the process undertaken by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy; d). comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and e). obstacles faced by the Issuer or Public Company;
2). gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan	62-63	2). description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and
3). penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	63-65	3). implementation of governance of the Issuer or Public Company.
d. Laporan Dewan Komisaris | Board of Commissioners Report		
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	39-42	The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:
1). penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;		1). assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of the Issuer or Public Company, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of the strategy of the Issuer or Public Company carried out by the Board of Directors;
2). pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	42-43	2). views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and
3). pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik	43-46	3). views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company
4). Surat Pernyataan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan	69	4). Statement of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners Regarding Responsibility for the Annual Report

Keterangan	Halaman	Description
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik | Profile of Issuer or Public Company		
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi:		Profile of Issuer or Public Company at least contains information:
1). nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	72,82-85	1). name of the Issuer or Public Company including if there is a change of name, the reason for the change, and the effective date of the change of name in the financial year;
2). akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a). alamat; b). nomor telepon; c). alamat surat elektronik; dan d). alamat situs web;	72-74	2). access to the Issuer or Public Company including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about the Issuer or Public Company, including: a). address; b). telephone number; c). electronic mail address; and d). website address;
3). riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	82-85	3). brief history of the Issuer or Public Company;
4). visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan;	88-89	4). vision and mission of the Issuer or Public Company as well as corporate culture or corporate values;
5). kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	92-109	5). business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the financial year, and types of goods and/or services produced;
6). wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan	74-80	6). operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or region where operational activities are carried out or the scope of the company's operational activities.
7). struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	110-112	7). organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to a structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;
8). daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;		8). membership list of industry associations both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;
9). profil Direksi, paling sedikit memuat: a). nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b). foto terbaru; c). usia; d). kewarganegaraan; e). riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f). riwayat jabatan, meliputi informasi: (1). dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; (2). rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan (3). pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	115-119	9). profile of the Board of Directors, containing at least: a). name and title appropriate to duties and responsibilities; recent photograph; b). Recent photo; c). Age; d). citizenship; e). education and/or certification history; f). position history, including information: (1). the legal basis of appointment as a member of the Board of Directors of the relevant Issuer or Public Company; (2). concurrent positions, either as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or members of committees and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that the members of the Board of Directors do not have concurrent positions, then disclose the matter; and (3). work experience along with the period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;
g). hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	120	g). affiliated relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly up to the individual owner, including the name of the affiliated party. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose the same; and
h). perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	114	h). changes in the composition of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, it shall be disclosed;

Keterangan	Halaman	Description
10). profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a). nama dan jabatan; b). foto terbaru; c). usia; d). kewarganegaraan; e). riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f). riwayat jabatan, meliputi informasi: (1). dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; (2). dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; (3). rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan (4). pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	122-124	10). profile of the Board of Commissioners, containing at least: a). name and position; b). recent photograph; c). age; d). nationality; e). education and/or certification history; f). position history, including information: (1). legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners; (2). the legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the relevant Issuer or Public Company; (3). dual positions, either as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not hold concurrent positions, this should be disclosed; and (4). work experience along with the period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;
g). hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	125	g). affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly up to the individual owner, including the name of the affiliated party; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose the same;
h). pernyataan independensi komisaris independent dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan	123-124 dan 366	h). statement of independence of independent commissioners in the event that independent commissioners have served more than 2 (two) periods; and
i). perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	121	i). changes in the composition of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the Board of Commissioners, it shall be disclosed;
11). dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	114 dan 121	11). in the event that there is a change in the composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the end of the financial year until the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
12). jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	148-149	12). number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contract) in the financial year; Disclosure of information can be presented in tabular form.
13). nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: a). pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b). anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan c). kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	150-153	13). names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year, which consists of information regarding: a). shareholders who own 5% (five percent) or more of the shares of the Issuer or Public Company; b). members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then disclose the matter; and c). groups of public shareholders, namely groups of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company; The information above can be presented in tabular form.

Keterangan	Halaman	Description
14). persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	152	14). percentage of indirect ownership of the Issuer's or Public Company's shares by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the register of shareholders for indirect ownership purposes. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the Issuer's or Public Company's shares, such disclosure shall be made.
15). jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: a). kepemilikan institusi lokal; b). kepemilikan institusi asing; c). kepemilikan individu lokal; dan d). kepemilikan individu asing;	153	15). number of shareholders and percentage of ownership as of the end of the financial year by classification: a). local institutional ownership; b). foreign institutional ownership; c). local individual ownership; and d). foreign individual ownership;
16). informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	150; 154	16). information on major shareholders and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, down to individual owners, presented in the form of schemes or charts;
17). nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	155	17). name of subsidiaries, associated companies, joint venture companies over which the Issuer or Public Company has joint control (if any), together with percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of subsidiaries, associated companies, joint venture companies; For subsidiaries, information on the address of the subsidiary is added.
18). kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	155	18). chronological listing of shares, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of the listing until the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock combinations, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of convertible securities, implementation of capital increase and reduction (if any);
19). informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	155	19). information on the listing of other securities other than the securities as referred to in point 18), which have not matured in the financial year shall at least contain the name of the securities, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);
20). informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: a). nama dan alamat; b). periode penugasan; c). informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; d). biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan e). dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	156	20). information on the use of public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/alliances include: a). name and address; b). period of the assignment; c). information on audit and/or non-audit services provided; d). audit and/or non-audit fees for each assignment provided during the fiscal year; and e). in the event that the AP and KAP along with its network/association/alliance, appointed do not provide non-audit services, then disclose the information; and Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/alliances can be presented in tabular form.
21). nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	157	21). name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP.

Keterangan	Halaman	Description
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen | Management Discussion and Analysis		
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:		Management's discussion and analysis contains analysis and discussion of the financial statements and other key information with an emphasis on material changes that occurred during the financial year, which includes at least:
1). tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a). produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b). pendapatan/penjualan; dan c). profitabilitas;	181-182	1). review of operations per business segment in accordance with the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding: a). production, including process, capacity, and development; b). revenue/sales; and c). profitability;
2). kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: a). aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b). liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; c). ekuitas; d). pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan e). arus kas;	183-205	2). comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding: a). current assets, non-current assets, and total assets; b). current liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; c). equity; d). revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive income (loss); and e). cash flows;
3). kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	214-215	3). ability to pay debts or liabilities by presenting relevant ratio calculations;
4). tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	215	4). collectibility level of receivables of the Issuer or Public Company by presenting relevant ratio calculation;
5). struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	217-219	5). capital structure and management's policy on the capital structure, along with the basis for determining the policy;
6). bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: a). tujuan dari ikatan tersebut; b). sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c). mata uang yang menjadi denominasi; dan d). langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	257	6). discussion of material ties for investment in capital goods with an explanation containing at least: a). the purpose of the bond; b). the expected source of funds to fulfill the bond; c). the currency in which it is denominated; and d). measures planned by the Issuer or Public Company to hedge the risk of the related foreign currency position;
7). bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a). jenis investasi barang modal; b). tujuan investasi barang modal; dan c). nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	257-258	7). a discussion of the investment in capital goods realized in the last financial year, at least containing: a). type of capital goods investment; b). purpose of capital goods investment; and c). the value of capital goods investment incurred;
8). informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	258	8). information and material facts that occurred after the date of the accountant's report (if any);
9). prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	265-267	9). business prospects of the Issuer or Public Company in relation to industry conditions, the economy in general and international markets accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;
10). perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: a). pendapatan/penjualan; b). laba (rugi); c). struktur modal (capital structure); atau d). hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	258-261	10). comparison between the target/projection at the beginning of the financial year and the results achieved (realization), regarding: a). revenue/sales; b). profit (loss); c). capital structure; or d). other matters considered important for the Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman	Description
11). target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: a). pendapatan/penjualan; b). laba (rugi); c). struktur modal (capital structure); d). kebijakan dividen; atau e). hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	261-264	11). target/projection to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding: a). revenue/sales; b). profit (loss); c). capital structure; d). dividend policy; or e). other matters considered important for the Issuer or Public Company;
12). aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	178-180	12). marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding marketing strategy and market share;
13). uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: a). kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; b). tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c). jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d). jumlah dividen per tahun yang dibayar; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	267-268	13). description of dividends for the last 2 (two) financial years, at least: a). dividend policy, including information on the percentage of dividends distributed to net income; b). cash dividend payment date and/or non-cash dividend distribution date; c). the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and d). the amount of dividends per year paid; Disclosure of information may be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company has not distributed dividends in the last 2 (two) years, it shall disclose the same.
14). realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: a). dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan b). dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	268	14). realization of the use of proceeds from the public offering, provided that: c). in the event that during the financial year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of proceeds, then disclose the cumulative realization of the use of proceeds from the public offering up to the end of the financial year; and d). in the event that there is a change in the use of proceeds as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of proceeds from a public offering, the Issuer shall explain such change;

Keterangan	Halaman	Description
15). informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: a). tanggal, nilai, dan objek transaksi; b). nama pihak yang melakukan transaksi; c). sifat hubungan afiliasi (jika ada); d). penjelasan mengenai kewajaran transaksi; e). pemenuhan ketentuan terkait; dan f). dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: (1). pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan (2). peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); g). untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. h). untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; i). dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	271-273	15). material information (if any), among others regarding investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred in the financial year, at least contains: a). date, value, and object of the transaction; b). the name of the party conducting the transaction; c). nature of affiliated relationship (if any); d). explanation of the fairness of the transaction; e). fulfillment of related provisions; and f). in the event that there is an affiliated relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letter a) up to letter e), the Issuer or Public Company shall also disclose the information: (1). a statement from the Board of Directors that the related party transaction has gone through adequate procedures to ensure that the related party transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by fulfilling the armslength principle; and (2). The role of the Board of Commissioners and the audit committee in conducting adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by fulfilling the armslength principle; g). For affiliated transactions or material transactions that are business activities carried out in order to generate business income and are carried out routinely, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transaction or material transaction is a business activity carried out in order to generate business income and is carried out routinely, repeatedly, and/or continuously; In the event that the affiliated transaction or material transaction has been disclosed in the annual financial report, information regarding the reference to the disclosure in the annual financial report shall be added. h). For the disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that are the result of the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, information is added regarding the date of the GMS that approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions; i). in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, it is disclosed regarding this matter;
16). perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	274-275	16). changes in laws and regulations that significantly affect the Issuer or Public Company and their impact on the financial statements (if any); and
17). perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	277	17). changes in accounting policies, reasons and impact on the financial statements (if any).

Keterangan	Halaman	Description
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik | Governance of Issuers or Public Companies		
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	341-353	The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:
1). RUPS, paling sedikit memuat a). Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: (1). keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan (2). keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; b). dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;		1). GMS, at least contains a). Information regarding GMS resolutions in the financial year and 1 (one) year prior to the financial year includes: (1). resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year prior to the financial year that are realized in the financial year; and (2). resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year prior to the financial year that have not been realized along with the reasons for not being realized; b). in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the implementation of the GMS to conduct vote counting, it shall disclose such matter;
2). Direksi, paling sedikit memuat: a). tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. b). pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; c). kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: (1). kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan (2). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); e). penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: (1). prosedur penilaian kinerja; dan (2). kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan f). dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas ireksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	400-418	2). Board of Directors, at least contains: a). duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in the form of a table. b). a statement that the Board of Directors has a guideline or charter of the Board of Directors; c). policies and implementation of the frequency of Board of Directors meetings, joint Board of Directors meetings with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in such meetings including attendance at the GMS; Information on the level of attendance of members of the Board of Directors in meetings of the Board of Directors, joint meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or GMS can be presented in the form of a table. d). training and/or competency improvement for members of the Board of Directors: (1). training policy and/or competency improvement of members of the Board of Directors, including orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and (2). training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any); e). the Board of Directors' assessment of the performance of committees that support the implementation of the duties of the Board of Directors in the financial year contains at least: (1). performance appraisal procedures; and (2). criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and f). in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the board of directors, it shall disclose such matter.

Keterangan	Halaman	Description
3). Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a). tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b). pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; c). kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: (1). kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan (2). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); e). penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: (1). prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; (2). kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan (3). pihak yang melakukan penilaian. f). penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: (1). prosedur penilaian kinerja; dan (2). kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	361-380	3). The Board of Commissioners, at least contains: a). duties and responsibilities of the Board of Commissioners; b). a statement that the Board of Commissioners has a guideline or charter for the Board of Commissioners; c). policy and implementation of the frequency of Board of Commissioners meetings, Board of Commissioners meetings with the Board of Directors and the attendance rate of members of the Board of Commissioners in such meetings including attendance at the GMS; Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners in Board of Commissioners meetings, Board of Commissioners meetings with the Board of Directors, or GMS can be presented in the form of a table. d). training and/or competency improvement for members of the Board of Commissioners: (1). training and/or competency improvement policies for members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and (2). training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any); e). performance assessment of the Board of Directors and the Board of Commissioners and each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, at least containing: (1). procedures for conducting performance appraisals; (2). criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and (3). the party conducting the assessment. f). The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes: (1). performance appraisal procedures; and (2). criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and meeting attendance;
4). Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a). prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan b). prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: (1). prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; (2). struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan (3). besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	439-446	4). Nomination and remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners, at least contains: a). nomination procedures, including a brief description of the policy and process for nominating members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and b). procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, among others: (1). procedures for determining the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners; (2). remuneration structure of the Board of Directors and Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and (3). the amount of remuneration of each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; Disclosure of information may be presented in tabular form.
5). Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: a). nama; b). dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; c). periode penugasan dewan pengawas syariah; d). tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan e). frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	128-129; 354-360	5). Sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies conducting business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, at least contains: a). Name; b). legal basis for the appointment of the sharia supervisory board; c). the period of assignment of the sharia supervisory board; d). duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and e). the frequency and manner of providing advice and counsel and supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;

Keterangan	Halaman	Description
6). Komite audit, paling sedikit memuat: a). nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b). usia; c). kewarganegaraan; d). riwayat pendidikan; e). riwayat jabatan, meliputi informasi: (1). dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; (2). rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan (3). pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f). periode dan masa jabatan anggota komite audit; g). pernyataan independensi komite audit; h). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i). kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan j). pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit;	381-387	6). The audit committee, at least contains: a). name and position in committee membership; b). Age; c). citizenship; d). education history; e). position history, including information: (1). legal basis for appointment as a committee member; (2). concurrent positions, either as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or members of committees and other positions (if any); and (3). work experience along with the period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; f). period and tenure of audit committee members; g). statement of audit committee independence; h). training and/or competency improvement that has been participated in the financial year (if any); i). policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members at such meetings; and j). implementation of audit committee activities in the financial year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;
7). komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a). nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b). usia; c). kewarganegaraan; d). riwayat pendidikan; e). riwayat jabatan, meliputi informasi: (1). dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; (2). rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan (3). pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f). periode dan masa jabatan anggota komite; g). pernyataan independensi komite; h). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i). uraian tugas dan tanggung jawab; j). pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); k). kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; l). uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan m). dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: (1). alasan tidak dibentuknya komite; dan (2). pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	394-399	7). nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least contains: a). name and position in committee membership; b). Age; c). citizenship; d). education history; e). position history, including information: (1). legal basis for appointment as a committee member; (2). concurrent positions, either as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or members of committees and other positions (if any); and (3). work experience along with the period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; f). terms and tenure of committee members; g). committee independence statement; h). training and/or competency improvement that has been participated in the financial year (if any); i). job descriptions and responsibilities; j). statement that it has a guideline or charter; k). policy and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at such meetings; l). a brief description of the implementation of activities in the financial year; and m). in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company shall disclose the information as referred to in letter i) up to letter l) and disclose: (1). the reasons for not establishing the committee; and (2). parties who carry out the nomination and remuneration function;

Keterangan	Halaman	Description
8). komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a). nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b). usia; c). kewarganegaraan; d). riwayat pendidikan; e). riwayat jabatan, meliputi informasi: (1). dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; (2). rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan (3). pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f). periode dan masa jabatan anggota komite; g). pernyataan independensi komite; h). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan i). uraian tugas dan tanggung jawab; j). pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; k). kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan l). uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	388-394	8). other committees owned by the Issuer or Public Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing: a). name and position in committee membership; b). Age; c). citizenship; d). education history; e). position history, including information: (1). legal basis for appointment as a committee member; (2). concurrent positions, either as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or members of committees and other positions (if any); and (3). work experience along with the period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; f). terms and tenure of committee members; g). committee independence statement; h). training and/or competency improvement that has been participated in the financial year (if any); and i). job descriptions and responsibilities; j). statement that it has a committee guideline or charter; k). policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at such meetings; and l). brief description of the implementation of committee activities during the year under review;
9). Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: a). nama; b). domisili; c). riwayat jabatan, meliputi: (1). dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan (2). pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; d). riwayat pendidikan; e). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan f). uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	419-424	9). The company secretary, at least contains: a). Name; b). domicile; c). position history, including: (1). legal basis for appointment as company secretary; and (2). work experience along with the period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; d). education history; e). training and/or competency improvement attended in the financial year; and f). brief description of the implementation of the duties of the company secretary in the financial year;
10). Unit audit internal, paling sedikit memuat: a). nama kepala unit audit internal; b). riwayat jabatan, meliputi: (1). dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan (2). pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; c). kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); d). pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; e). struktur dan kedudukan unit audit internal; f). uraian tugas dan tanggung jawab; g). pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan h). uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	456-474	10). Internal audit unit, including at least: a). name of the head of the internal audit unit; b). position history, including: (1). legal basis for appointment as head of internal audit unit; and (2). work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; c). qualification or certification as an internal audit professional (if applicable); d). training and/or competency improvement attended in the financial year; e). structure and position of the internal audit unit; f). job descriptions and responsibilities; g). a statement that the internal audit unit has a guideline or charter; and h). a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties in the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;

Keterangan	Halaman	Description
11). uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a). pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; b). tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan c). pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	449-455	11). description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing: a). financial and operational controls, and compliance with other laws and regulations; b). review of the effectiveness of the internal control system; and c). statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;
12). sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a). gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; b). jenis risiko dan cara pengelolaannya; c). tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan d). pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	493-534	12). risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing: a). overview of the risk management system of the Issuer or Public Company; b). types of risk and how they are managed; c). review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and d). statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners or audit committee on the adequacy of the risk management system;
13). perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: a). pokok perkara/gugatan; b). status penyelesaian perkara/gugatan; dan c). pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	545	13). legal cases with material impact faced by the Issuer or Public Company, its subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least containing: a). the subject matter of the case/defense; b). the status of the settlement of the case/defense; and c). its effect on the condition of the Issuer or Public Company;
14). informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	575	14). information on administrative sanctions/sanctions imposed on the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the financial year (if any);
15). informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: a). pokok-pokok kode etik; b). bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya;dan c). pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	538-545	15). information on the code of ethics of the Issuer or Public Company includes: a). principles of the code of ethics; b). the form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and c). a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company;
16). uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/ MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: a). jumlah saham dan/atau opsi; b). jangka waktu pelaksanaan; c). persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d). harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	268	16). a brief description of the policy of providing performance-based long-term compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), among others in the form of management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP); In the case of compensation in the form of management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed shall at least contain: a). number of shares and/or options; b). period of exercise; c). requirements of eligible employees and/or management; and d). exercise price or determination of exercise price;
17). uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a). kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan b). pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	152; 437	17). brief description of the information disclosure policy regarding: a). share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) business days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of the Public Listed Company; and b). implementation of the policy;

Keterangan	Halaman	Description
18). uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a). cara penyampaian laporan pelanggaran; b). perlindungan bagi pelapor; c). penanganan pengaduan; d). pihak yang mengelola pengaduan; dan e). hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: (1). jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan (2). tindak lanjut pengaduan; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	546-549	18). description of the whistleblowing system in the Issuer or Public Company, at least containing: a). how to submit a violation report; b). protection for whistleblowers; c). complaint handling; d). parties who manage complaints; and e). results of complaint handling, at least: (1). the number of complaints received and processed in the fiscal year; and (2). follow-up of complaints; In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, it shall disclose this matter.
19). uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a). program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan b). pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; c). Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	562-563	19). description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing: a). programs and procedures in place to address corruption, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities within the Issuer or Public Company; and b). anti-corruption training/socialization to employees of the Issuer or Public Company; c). In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having such a policy should be explained.
20). penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: a). pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b). penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternative pelaksanaannya (jika ada). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	316-327	20). implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers that issue equity securities or Public Companies, including: a). a statement regarding recommendations that have been implemented; and/or b). explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementation (if any). Disclosure of information may be presented in tabular form.
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies		
1). Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a). penjelasan strategi keberlanjutan; b). ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); c). profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; d). penjelasan Direksi; e). tata kelola keberlanjutan; f). kinerja keberlanjutan; g). verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; h). lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan i). tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	580-589	1). The information disclosed in the social and environmental responsibility section constitutes the Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, containing at least: a). explanation of sustainability strategy; b). overview of sustainability aspects (economic, social and environmental); c). brief profile of the Issuer or Public Company; d). explanation of the Board of Directors; e). sustainability governance; f). sustainability performance; g). written verification from independent parties, if any; h). feedback sheet for readers, if any; and i). the Issuer's or Public Company's response to the previous year's report feedback;
2). Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	580-589	2). The Sustainability Report as referred to in point 1), must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II which is an integral part of this Circular Letter of the Financial Services Authority;

Keterangan	Halaman	Description
3). informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat: a). diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau b). merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	580-589	3). informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat: a). disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Board of Directors' explanation of the Sustainability Report disclosed in the relevant section of the Board of Directors' Report; and/or b). refer to other sections outside the social and environmental responsibility section while still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Report for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II which is an integral part of this Circular Letter of the Financial Services Authority, such as the profile of the Issuer or Public Company;
4). Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	Disajikan Terpisah	4). The Sustainability Report as referred to in point 1) is an integral part of the Annual Report but can be presented separately with the Annual Report;
5). Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: a). memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan b). disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	Disajikan Terpisah	5). In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must: a). contains all information as referred to in number 1); and b). prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Report for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II which is an integral part of this Circular Letter of the Financial Services Authority;
6). Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	580	6). In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the social and environmental responsibility section shall contain information that information regarding social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report presented separately from the Annual Report; and
7). Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	Disajikan Terpisah	7). Submission of the Sustainability Report that is presented separately with the Annual Report must be submitted together with the submission of the Annual Report.
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit | Audited Annual Financial Statements		
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.	592	The annual financial statements contained in the Annual Report are prepared in accordance with Indonesian financial accounting standards and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The annual financial report shall contain a statement regarding the responsibility for the financial statements as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the responsibility of the Board of Directors for financial statements or the laws and regulations in the capital market sector that regulate the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Statement Letter of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners on the Responsibility for the Annual Report		
Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	69	The statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding responsibility for the Annual Report is prepared in accordance with the format of the Statement Letter of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibility for the Annual Report as set out in Appendix I which is an integral part of this Circular Letter of the Financial Services Authority.

Referensi Bonus PUGKI 2021

PUGKI 2021 Bonus Reference

Keterangan	Halaman	Description
Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (PUGKI 1.3.2)	377-378	Types of decisions requiring Board of Commissioners approval (PUGKI 1.3.2)
Rincian tugas Komisaris Utama (PUKGI 1.3.13.1)	363	Details of the duties of the President Commissioner (PUKGI 1.3.13.1)
Kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading (PUKGI 7.2.3)	572	Policy to prevent insider trading (PUKGI 7.2.3)
Apakah korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan? (PUKGI 6.2.4)	BRK Syariah' Menyusun	Does the corporation publish an integrated annual report that puts historical performance into context and describes the corporation's risks, opportunities and future prospects, thereby helping shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value? (PUKGI 6.2.4)

Referensi Bonus ASEAN CG Scorecard

ASEAN CG Scorecard Bonus Reference

Keterangan	Halaman	Description
Tanggung jawab Komite Audit dalam pemberian rekomendasi atas penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal (E.2.24)	387	Audit Committee's responsibility in providing recommendations on the appointment and dismissal of external auditors (E.2.24)
Deskripsi proses tata kelola terkait isu IT termasuk disruption (gangguan), cyber security (keamanan dunia maya), dan disaster recovery (pemulihan bencana) untuk memastikan semua risiko utama telah diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan pada Direksi (B.E.5.1)	304-305	Description of governance processes related to IT issues including disruption, cyber security, and disaster recovery to ensure all key risks are identified, managed, and reported to the Board of Directors (B.E.5.1)
Kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka panjang (C.3.3	294	Reward/compensation policies that take into account long-term company performance (C.3.3)
Kebijakan untuk melakukan penelaahan dan persetujuan transaksi dengan pihak berelasi yang material/ signifikan (D.3.1)	477-480	Policy to review and approve transactions with material/ significant related parties (D.3.1)
Kebijakan terkait perencanaan atas suksesi anggota Direksi dan managemen kunci (E.5.3)	440	Policy on succession planning for members of the Board of Directors and key management (E.5.3)
Kerangka pelaporan berkelanjutan yang diakui secara internasional (contoh: GRI, Integrated Reporting, SASB) yang diadopsi oleh Perusahaan (B.C.1.1)	Laporan Keberlanjutan	Internationally recognized sustainability reporting frameworks (e.g. GRI, Integrated Reporting, SASB) adopted by the Company (B.C.1.1)

Referensi Penalti ASEAN CG Scorecard

ASEAN CG Scorecard Penalty Reference

Keterangan	Halaman	Description
Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan (B.D.1.1)	Laporan	Timeliness of publication of financial statements and annual reports (B.D.1.1)
Opini auditor independen atas laporan keuangan perusahaan (B.D.1.1)	Wajar dalam semua hal yang material	Independent auditor's opinion on the company's financial statements (B.D.1.1)
Apakah terjadi perdagangan orang dalam yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? (P.B.1.1)	572-573	Has there been insider trading involving directors/ commissioners, management and employees in the last three years? (P.B.1.1)
Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir? (P.B.2.1))	576	Were there any cases of non-compliance with laws, rules and regulations relating to related party transactions that were significant or material in the last three years? (P.B.2.1))
Apakah telah terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan (P.C.1.1)	576	Whether there has been any violation of any law relating to labor/ employment/ consumer/ insolvency/ commercial/ competition or environmental matters (P.C.1.1)
Apakah perusahaan menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (material event)? (P.C.2.1)	576	Has the company faced sanctions from regulators for not making announcements within the prescribed timeframe for material events? (P.C.2.1)
Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan? (P.E.1.1)	576-577	Is there evidence that the company did not comply with any listing rules and regulations during the past year other than disclosure rules? (P.E.1.1)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK



brksyariah
berkah untuk semua

Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri,
Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru 28116

www.www.brksyariah.co.id

Call Center
1500470